



BAPPENAS



RENCANA AKSI

**REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
WILAYAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN 2007 - 2009**



**BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI NAD - NIAS
DAN
KEMENTERIAN NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

**RINGKASAN EKSEKUTIF
RENCANA AKSI REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT PROVINSI NANGGROE
ACEH DARUSSALAM DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA
UTARA TAHUN 2007-2009**

KEJADIAN BENCANA. Pada tanggal 26 Desember 2004 terjadi gempa bumi yang berskala sangat kuat dengan kekuatan 8,9 skala Richter dengan pusat gempa di Samudera Hindia di lepas pantai barat laut Pulau Sumatera. Gempa yang kemudian menyebabkan gelombang tsunami ini telah memporakporandakan sebagian besar wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan sebagian Kepulauan Nias, Provinsi Sumatera Utara. Tiga bulan setelah peristiwa tersebut, pada tanggal 28 Maret 2005 terjadi gempa bumi yang luar biasa di Kepulauan Nias dengan kekuatan 8,7 Skala Richter. Peristiwa gempa ini menimbulkan kerusakan dan kerugian yang besar di wilayah dan kehidupan masyarakat Kepulauan Nias di berbagai sektor kehidupan, antara lain: perumahan dan permukiman, infrastruktur, dan terhentinya kegiatan ekonomi masyarakat. serta kehidupan sosial budaya masyarakat.

DASAR PENYUSUNAN RENCANA AKSI. Penyusunan Rencana Aksi didasarkan atas: (1) pertimbangan kerusakan dan kerugian akibat bencana tsunami dan gempa; (2) Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah NAD dan Nias mengacu kepada Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana tercantum dalam Perpres No 30 tahun 2005, dengan memberikan penekanan dan penambahan signifikan untuk penanganan pasca bencana khususnya di wilayah Nias dengan mengakomodasi kerusakan dan kerugian akibat gempa 28 Maret 2005 secara menyeluruh.

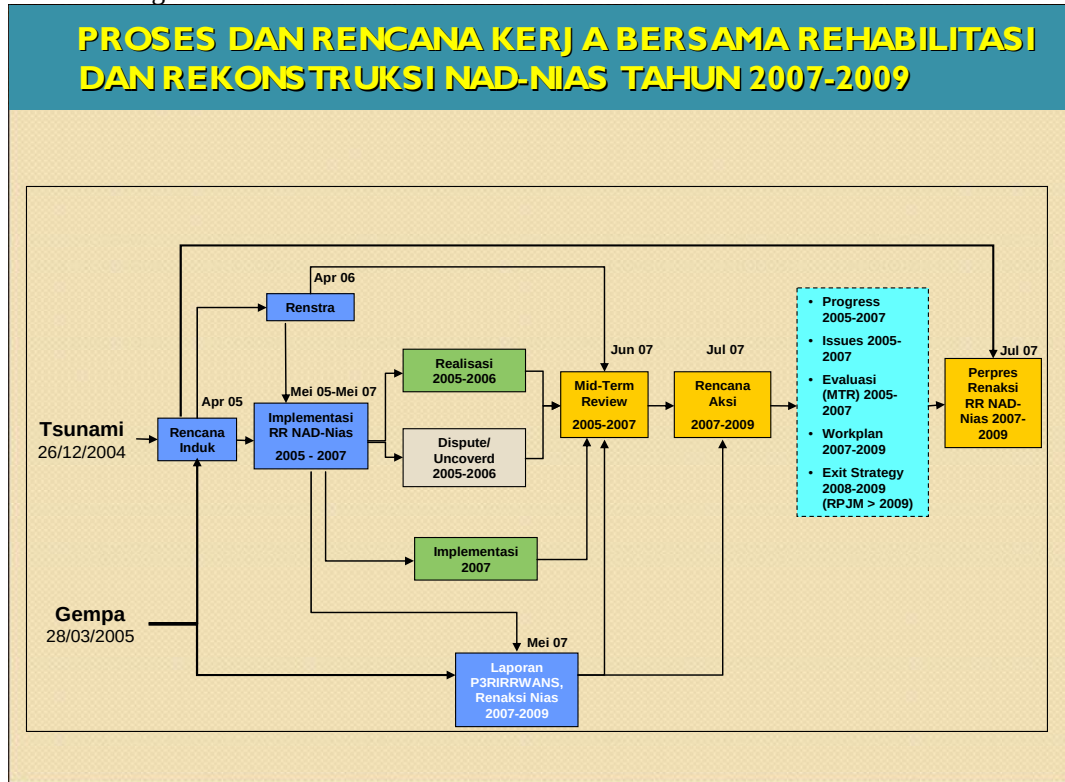
RUANG LINGKUP RENCANA AKSI. Dalam penyusunan rencana aksi ini terdapat beberapa ruang lingkup, yaitu: (1) Terfokus pada bidang-bidang pemulihan sebagai berikut: pemulihan perumahan dan permukiman, tata ruang, pertanian, dan lingkungan hidup, infrastruktur, sosial kemasyarakatan, perekonomian, serta kelembagaan dan hukum; (2) Wilayah perencanaan dalam penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi ini di Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Provinsi Sumut.

KERANGKA WAKTU RENCANA AKSI.

1. Sejak tahun 2007 hingga April 2009. Jangka waktu ini merupakan sisa masa tugas dan tanggung jawab BRR dalam melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara.
2. Mulai pasca April 2009 hingga tahun 2012. Jangka waktu ini merupakan perhitungan jangka menengah dalam perencanaan pembangunan daerah. Tugas dan tanggung jawab pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah, baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

METODOLOGI DAN PROSES PENYUSUNAN. Sebagai koordinator dalam penyusunan rencana aksi, Badan Pelaksana BRR memperoleh masukan-masukan dari Bappenas, Dewan Pengarah BRR, Dewan Pengawas BRR, Pemda Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara, dan berbagai stakeholders di pusat dan daerah. Rencana aksi ini disusun melalui berbagai forum konsultasi publik yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pengelolaan rehabilitasi dan rekonstruksi selanjutnya diperlukan pelibatan seluruh stakeholders untuk mewujudkan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang partisipatif.

Sedangkan proses dan rencana kerja bersama dalam penyusunan rencana aksi ini adalah sebagai berikut:



KEMAJUAN PELAKSANAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI.

Perkembangan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang bersumber dari DIPA BRR

DIPA	Anggaran	Realisasi			
		Tahun Berjalan	Luncuran/ Trust Fund*	Total	%
2005	3.966.952.500.000	414.662.762.597	2.082.482.891.058	2.497.145.653.655	62,95
2006	10.522.978.230.000	5.684.083.973.514	2.213.702.756.920	7.897.786.730.434	75,05
2007	10.737.371.614.000	1.756.175.035.393	-	1.602.175.035.393	16,36

PENYESUAIAN PROGRAM 2007. Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Provinsi NAD dan Kepulauan Nias telah berjalan selama 2 (dua) tahun. Evaluasi realisasi program tahun anggaran 2005-2006 menunjukkan perbedaan, penambahan, maupun pengurangan program/kegiatan yang disesuaikan dengan kebutuhan riil di lapangan. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, penyesuaian program dan kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang terdapat dalam DIPA BRR tahun anggaran 2007 dianggap perlu untuk disesuaikan dengan kondisi tersebut.

ARAHAN KEBIJAKAN PROGRAM 2008. Beberapa kebijakan yang terkait dengan pelaksanaan program pada tahun 2008, diantaranya: (1) Prioritas penyelesaian perumahan dan pemukiman; (2) Pembangunan Infrastruktur yang mendukung prasarana dan aksesibilitas perumahan dan permukiman

Ringkasan Eksekutif

Rehabilitasi/Rekonstruksi dan prioritas pada infrastruktur yang mendukung peningkatan ekonomi yang berdampak cepat (*quick yielding*); (3) Pembangunan bidang (ekonomi, pendidikan dan kesehatan, agama, sosial dan budaya) yang diarahkan untuk mendorong kemandirian masyarakat; dan (4) Pengutamaan peningkatan kapasitas Pemda dan fungsionalisasi pekerjaan fisik secara selektif, sekaligus mendorong peran kelembagaan Donor dan NGO.

STRATEGI TRANSISI. Mengintegrasikan program rehabilitasi dan rekonstruksi Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara ke dalam program pembangunan Pemda. Memastikan transisi dari fase rekonstruksi ke fase pembangunan sedini mungkin dengan melibatkan Pemda di dalam perencanaan, evaluasi, dan transfer kegiatan pemulihan. Memastikan Pemda dan K/L, serta instansi terkait yang memiliki kapasitas yang cukup untuk menjalankan dan memelihara fasilitas yang dibangun selama proses pemulihan. Menyiapkan mekanisme manajemen resiko bencana ke dalam kerangka pembangunan Pemda

TAHAPAN TRANSISI PASCA 2009. Tahun 2009 merupakan fase terakhir dari proses rekonstruksi di Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Provinsi Sumut. Oleh karenanya, dimulai pada tahun 2008, perlu diperhatikan aspek peralihan yang mendukung proses peralihan program dan kegiatan dari BRR dan *stakeholder* lain kepada Pemerintah Daerah. Beberapa kriteria untuk *exit program* ini adalah: (1) Mengakomodasi skema pengurangan resiko bencana dan/atau pengurangan kemiskinan; (2) Program dengan pembiayaan gabungan oleh BRR dan Pemerintah Daerah; (3) Program lanjutan dari tahun 2008 dan harus selesai di tahun 2009; (4) Program yang mendukung pemeliharaan dan operasi dari fasilitas yang dibangun selama masa rekonstruksi; dan (5) Program yang bertujuan untuk melembagakan mekanisme pengurangan resiko bencana ke dalam kebijakan Pemerintah Daerah

Peran dan Tanggungjawab Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat Pasca BRR NAD-Nias

Pihak	Peran dan Tanggungjawab
Pemerintahan Provinsi	Pemeliharaan dan operasi terhadap aset-aset yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi; - perencanaan dan pengendalian pembangunan; - perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang; - penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; - penyediaan sarana dan prasarana umum; - penanganan bidang kesehatan; - penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial; - penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten/kota; - pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten/kota; - fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah termasuk lintas kabupaten/kota; - pengendalian lingkungan hidup; - pelayanan pertanahan termasuk lintas kabupaten/kota; - pelayanan kependudukan, dan catatan sipil; - pelayanan administrasi umum pemerintahan; - pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas kabupaten/kota; - penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten/kota
Pemerintahan Kabupaten/Kota	Pemeliharaan dan operasi terhadap aset-aset yang menjadi kewenangan pemkab/pemkot Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota adalah: - perencanaan dan pengendalian pembangunan; - perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang; - penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; - penyediaan sarana dan prasarana umum; - penanganan bidang kesehatan; - penyelenggaraan pendidikan; - penanggulangan masalah sosial; - pelayanan bidang ketenagakerjaan; - fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah; - pengendalian lingkungan hidup; - pelayanan pertanahan; - pelayanan kependudukan, dan catatan sipil;

Pihak	Peran dan Tanggungjawab
	m. pelayanan administrasi umum pemerintahan; n. pelayanan administrasi penanaman modal; o. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya
Pemerintah Pusat	Melaksanakan kegiatan-kegiatan pusat di daerah melalui kementerian/lembaga terkait Urusan wajib yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat adalah bidang : politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, agama, moneter dan fiskal nasional Dalam menyelenggarakan urusan wajib tersebut, Pemerintah Pusat menyelenggarakan sendiri atau dapat melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada perangkat Pemerintah Pusat atau wakil Pemerintah Pusat di daerah atau dapat menugaskan kepada pemerintahan daerah dan/atau pemerintahan desa.
Hubungan Antar Pemerintah Daerah	Hubungan dalam bidang keuangan antarpemerintahan daerah adalah: - bagi hasil pajak dan nonpajak antara pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota; - pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab bersama; - pembiayaan bersama atas kerja sama antardaerah; dan - pinjaman dan/atau hibah antarpemerintahan daerah. Hubungan dalam bidang pelayanan umum antar Pemda meliputi: - pelaksanaan bidang pelayanan umum yang menjadi kewenangan daerah; - kerja sama antarpemerintahan daerah dalam penyelenggaraan pelayanan umum; dan - pengelolaan perizinan bersama bidang pelayanan umum Hubungan dalam bidang pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antar pemerintahan daerah meliputi: - pelaksanaan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang menjadi kewenangan daerah; - kerja sama dan bagi hasil atas pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antarpemerintahan daerah; dan - pengelolaan perizinan bersama dalam pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya.
Hubungan Antar Pemerintah Pusat – Pemerintah Daerah	Hubungan dalam bidang keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintahan daerah meliputi: - pemberian sumber-sumber keuangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah; - pengalokasian dana perimbangan kepada pemerintahan daerah; dan - pemberian pinjaman dan/atau hibah kepada pemerintahan daerah. Hubungan dalam bidang pelayanan umum antara Pemerintah Pusat dan pemerintahan daerah meliputi: - kewenangan, tanggung jawab, dan penentuan standar pelayanan minimal; - pengalokasian pendanaan pelayanan umum yang menjadi kewenangan daerah; dan - fasilitasi pelaksanaan kerja sama antarpemerintahan daerah dalam penyelenggaraan pelayanan umum. Hubungan dalam bidang pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara Pemerintah Pusat dan Pemda meliputi: - kewenangan, tanggung jawab, pemanfaatan, pemeliharaan, pengendalian dampak, budidaya, dan pelestarian; - bagi hasil atas pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya; dan - penyerasian lingkungan dan tata ruang serta rehabilitasi lahan.

Sumber : UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Analisis Tim P3B Bappenas, 2007

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF	i
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xxvii
DAFTAR BAGAN	xxviii

PENDAHULUAN.....	I - 1
I.1 Latar Belakang	I - 1
I.2 Maksud, Tujuan Dan Sasaran	I - 2
I.3 Ruang Lingkup Rencana Aksi	I - 3
I.4 Kerangka Waktu Pelaksanaan Rencana Aksi	I - 4
I.5 Metodologi Penyusunan	I - 4
I.6 Sistematika Penyusunan Rencana Aksi	I - 6

PERKEMBANGAN PELAKSANAAN UPAYA PENANGANAN

REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI NAD-NIAS 2005-2007.....	II - 1
II.1 BRR	II - 1
II.1.1 Dewan Pengarah	II - 1
II.1.1.1 Bidang Umum	II - 3
II.1.1.2 Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.....	II - 5
II.1.1.3 Bidang Perekonomian.....	II - 6
II.1.1.4 Bidang Kesejahteraan Rakyat.....	II - 6
II.1.2 Dewan Pengawas BRR.....	II - 6
II.1.2.1 Dasar Hukum Pembentukan Dewan Pengawas.....	II - 6
II.1.2.2 Mekanisme Kerja Dewan Pengawas.....	II - 7
II.1.2.3 Kegiatan Dewan Pengawas	II - 8
II.1.2.4 Temuan Hasil Pengawasan Benefit dan Dampak	II - 8
II.1.2.5 Implikasi Hasil Pengawasan.....	II - 10
II.1.3 Badan Pelaksana BRR	II - 11

II.1.3.1	Bidang Pemulihan Perumahan, Permukiman, Tata Ruang, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	II - 13
II.1.3.1.1	Perumahan dan Permukiman	II - 13
II.1.3.1.2	Tata Ruang.....	II - 15
II.1.3.1.3	Pertanahan	II - 16
II.1.3.1.4	Aspek-aspek Lain	II - 17
II.1.3.2	Bidang Pemulihan Infrastruktur	II - 17
II.1.3.2.1	Jalan dan Transportasi.....	II - 17
II.1.3.2.2	Energi dan Listrik.....	II - 23
II.1.3.2.3	Sumberdaya Air	II - 25
II.1.3.2.4	Bangunan Fasilitas Umum.....	II - 27
II.1.3.3	Bidang Pemulihan Sosial Kemasyarakatan	II - 28
II.1.3.3.1	Pendidikan.....	II - 28
II.1.3.3.2	Kesehatan	II - 32
II.1.3.3.3	Agama	II - 36
II.1.3.3.4	Sosial Budaya dan Sumberdaya Manusia	II - 39
II.1.3.4	Bidang Pemulihan Perekonomian.....	II - 48
II.1.3.4.1	Pertanian	II - 48
II.1.3.4.2	Perikanan.....	II - 52
II.1.3.4.3	Pengembangan Usaha	II - 53
II.1.3.5	Bidang Pemulihan Kelembagaan dan Hukum	II - 60
II.1.3.5.1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemda	II - 60
II.1.3.5.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Hukum	II - 63
II.1.3.5.3	Ketertiban, Keamanan dan Ketahanan Masyarakat (K3M).....	II - 66
II.1.3.6	Realisasi Anggaran.....	II - 68
II.1.3.6.1	Penyerapan DIPA 2005.....	II - 68
II.1.3.6.2	Penyerapan DIPA 2006.....	II - 70
II.1.3.6.3	Kinerja Penyerapan Anggaran	II - 71
II.2	Donor/NGO	II - 72

II.2.1 Bidang Pemulihan Perumahan, Permukiman, Tata Ruang, Pertanahan & Lingkungan Hidup	II - 73
II.2.2 Bidang Pemulihan Infrastruktur	II - 75
II.2.3 Bidang Pemulihan Sosial dan Kemasyarakatan.....	II - 77
II.2.3.1 Pendidikan	II - 78
II.2.3.2 Kesehatan.....	II - 79
II.2.3.3 Agama.....	II - 81
II.2.3.4 Sosial dan Budaya	II - 82
II.2.4 Bidang Pemulihan Perekonomian.....	II - 83
II.2.4.1 Pertanian	II - 84
II.2.4.1.1 Pertanian, Perkebunan dan Peternakan	II - 84
II.2.4.1.2 Kehutanan	II - 85
II.2.4.2 Perikanan	II - 85
II.2.4.3 Pengembangan Usaha	II - 86
II.2.4.3.1 Perindustrian dan Perdagangan	II - 86
II.2.4.3.2 Tenaga Kerja.....	II - 86
II.2.5 Bidang Pemulihan Kelembagaan dan Hukum	II - 87
II.3 Kementerian Lembaga (K/L).....	II - 89
II.3.1 Bidang Pemulihan Sosial Kemasyarakatan.....	II - 89
II.3.2 Bidang Pemulihan Perekonomian.....	II - 92
II.4 Pemerintah Daerah.....	II - 97
II.4.1 Bidang Pemulihan Sosial Budaya.....	II - 99
II.4.2 Bidang Pemulihan Perekonomian.....	II - 101
II.4.3 Bidang Pemulihan Kelembagaan dan Hukum	II - 104
II.5 Identifikasi Isu dan Permasalahan Pelaksanaan Rehabilitasi Rekonstruksi NAD-Nias Tahun 2005-2006.....	II - 104

SASARAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI TAHUN

2007-2009III - 1

III.1 Bidang Pemulihan Perumahan, Permukiman, Tata Ruang, Pertanahan, Dan Lingkungan Hidup	III - 1
III.1.1 Perumahan Dan Permukiman	III - 2
III.1.2 Tata Ruang	III - 5

III.1.3 Pertanahan	III - 9
III.1.4 Lingkungan Hidup	III - 13
III.2 Bidang Pemulihan Infrastruktur	III - 13
III.2.1 Jalan dan Transportasi	III - 13
III.2.1.1 Transportasi Laut dan ASDP	III - 13
III.2.1.2 Transportasi Udara	III - 14
III.2.1.3 Transportasi Darat, Jalan dan Jembatan	III - 15
III.2.2 Energi dan Telekomunikasi	III - 20
III.2.3 Infrastruktur Sumber Daya Air	III - 24
III.2.4 Air Minum dan Sanitasi	III - 25
III.3 Bidang Sosial Kemasyarakatan	III - 27
III.3.1 Pendidikan, Kesehatan dan Pemberdayaan Perempuan	III - 27
III.4 Bidang Pemulihan Perekonomian	III - 54
III.4.1 Pertanian	III - 54
III.5 Bidang Pemulihan Kelembagaan dan Hukum	III - 63
III.5.1 Kelembagaan Daerah.....	III - 63
III.5.2 Hukum	III - 68
III.5.3 Ketertiban, Keamanan, dan Ketahanan Masyarakat (K3M)	III - 71
III.6 Pendanaan Rencana Aksi NAD-Nias 2007-2009	III - 73

PRINSIP, KEBIJAKAN UMUM, STRATEGI DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI NAD-NIAS

2007 - 2009	IV - 1
IV.1 Prinsip-Prinsip Rehabilitasi dan Rekonstruksi	IV - 1
IV.2 Kebijakan Umum	IV - 2
IV.3 Kebijakan dan Strategi Sektorial	IV - 4
IV.3.1 Bidang Pemulihan Perumahan, Permukiman, Tata Ruang, Pertanahan dan Lingkungan Hidup.....	IV - 6
IV.3.2 Bidang Pemulihan Infrastruktur	IV - 7
IV.3.3 Bidang Pemulihan Sosial Kemasyarakatan.....	IV - 9
IV.3.4 Bidang Pemulihan Perekonomian.....	IV - 11

IV.3.5 Bidang Pemulihan Kelembagaan dan Hukum	IV - 12
IV.4 Sumber-Sumber Pendanaan	IV - 14
IV.5 Mekanisme Pengelolaan Pendanaan	IV - 15
IV.6 Mekanisme Penyaluran Dana	IV - 15
IV.7 Mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa	IV - 18
IV.8 Mekanisme Pemantauan dan Pengendalian Pelaksanaan	
Rehabilitasi dan Rekonstruksi	IV - 20
IV.8.1 Kerangka Pemantauan dan Pengendalian	IV - 21
IV.8.2 Kegiatan Pemantauan dan Pengendalian	IV - 22
IV.8.3 Kegiatan Pendukung Pemantauan dan Pengendalian	IV - 23
IV.9 Strategi Transisi dan Pengalihan Tanggung Jawab	
Rehabilitasi dan Rekonstruksi	IV - 25

RENCANA AKSI REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI NAD-NIAS

TAHUN 2007 – 2009

V.1 Penyesuaian Program 2007	V - 1
V.1.1 Bidang Pemulihan Perumahan, Permukiman, Tata Ruang, Pertanahan, dan Lingkungan Hidup	V - 2
V.1.2 Bidang Pemulihan Infrastruktur	V - 3
V.1.3 Bidang Pemulihan Sosial Kemasyarakatan	V - 6
V.1.4 Bidang Pemulihan Perekonomian	V - 9
V.1.5 Bidang Pemulihan Kelembagaan dan Hukum	V - 12
V.2 Pemantapan Rencana Program Tahun 2008.....	V - 13
V.2.1 Bidang Pemulihan Perumahan, Permukiman, Tata Ruang, Pertanahan, dan Lingkungan Hidup.....	V - 15
V.2.2 Bidang Pemulihan Infrastruktur	V - 16
V.2.3 Bidang Pemulihan Sosial Kemasyarakatan.....	V - 18
V.2.4 Bidang Pemulihan Perekonomian.....	V - 21
V.2.5 Bidang Pemulihan Kelembagaan dan Hukum	V - 22
V.3 Tahapan Transisi Pasca 2009 dan Persiapan Exit Strategy	V - 23
V.3.1 Persiapan Pengalihan	V - 23
V.3.1.1 Pemantapan Sekretariat Bersama	V - 25
V.3.1.2 Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah	V - 28

V.3.1.3	Pemantapan Tim Pengalihan 2008-2009	V - 29
V.3.1.4	Persiapan Penyelesaian Tugas BRR	V - 29
V.3.2	Pengelolaan Pendanaan	V - 29
V.3.2.1	Dana Desentralisasi Kementrian/Lembaga	V - 29
V.3.2.2	Dana Dekonsentrasi	V - 30
V.3.2.3	Dana Tugas Pembantuan	V - 30
V.3.2.4	Dana Perimbangan (DAU dan DAK)	V - 30
V.3.3	Pengalihan Peralatan dan Perangkat (Aset)	V - 30
V.3.3.1	BRR	V - 32
V.3.3.2	Donor dan NGO	V - 33
V.3.4	Pengalihan Personil (SDM)	V - 34
V.3.4.1	Status Personil dan SDM BRR NAD-Nias	V - 34
V.3.4.2	Kebijakan Penyesuaian Organisasi dan Personil BRR NAD-Nias Tahun 2007-2009	V - 35
V.3.5	Pengalihan Dokumen	V - 36
V.3.5.1	Dokumen Administrasi	V - 36
V.3.5.2	Hasil Studi	V - 37
V.3.5.3	Sistem	V - 37

KEBERLANJUTAN PEMULIHAN WILAYAH DAN KEHIDUPAN	
MASYARAKAT PROVINSI NAD DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI	
SUMATERA UTARA VI - 1	
VI.1	Permasalahan dan Tantangan Pembangunan Jangka Menengah Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara
VI.1.1	Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
VI.1.2	Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara
VI.2	Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Provinsi NAD –Nias
VI.3	Rencana Pembangunan Jangka Menengah
VI.3.1	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Wilayah Provinsi NAD Tahun 2007-2012
VI.3.2	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Wilayah Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara Tahun 2006-2011

VI.4 Peran dan Tanggung Jawab Stakeholders dalam Keberlanjutan Pemulihan

Wilayah Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara .. VI - 54

DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Realisasi Anggaran BRR On Budget 2005-2006II - 12
Tabel II.2	Realisasi Anggaran BRR Non APBN (Off Budget) 2005-2006II - 13
Tabel II.3	Realisasi dan Program PerumahanII - 14
Tabel II.4	Realisasi dan Program PermukimanII - 14
Tabel II.5	Pembagian Tugas BRR dengan NGO/Donor di Bidang PerumahanII - 15
Tabel II.6	Realisasi dan Program Tata RuangII - 16
Tabel II.7	Realisasi dan Program Administrasi PertanahanII - 16
Tabel II.8	Rincian Realisasi Kegiatan Pertanahan tahun 2005-2006 dan Program 2007 per kabupatenII - 17
Tabel II.9	Rekapitulasi Realisasi tahun 2005-2006 dan Program 2007 Sub bidang Jalan dan JembatanII - 17
Tabel II.10	Rekapitulasi Realisasi 2005-2006 dan Program 2007 Sub Sektor PerhubunganII - 19
Tabel II.11	Realisasi Pembangunan Terminal Bis/ APKII - 19
Tabel II.12	Realisasi Pembangunan Gedung Pengujian Kendaraan BermotorII - 20
Tabel II.13	Realisasi Pembangunan Pelabuhan PenyeberanganII - 20
Tabel II.14	Realisasi Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Prasarana Pelabuhan LautII - 21
Tabel II.15	Realisasi Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bandar UdaraII - 22
Tabel II.16	Realisasi Pelaksanaan RR AirstripII - 22
Tabel II.17	Realisasi Pelaksanaan RR HelipadII - 22
Tabel II.18	Realisasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bidang KelistrikanII - 24
Tabel II.19	Rekapitulasi Realisasi 2005-2006 dan Program 2007 Sub-Sektor Sumberdaya AirII - 26

Tabel II.20	Rekapitulasi Realisasi 2005-2006 dan Rencana 2007 Sub-Sektor Air Bersih dan Sanitasi II - 27
Tabel II.21	Program 2007 dan Rencana 2008 untuk Fasilitas Bangunan Umum II - 27
Tabel II.22	Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bidang Pendidikan (Program Pendidikan Anak Usia Dini) II - 28
Tabel II.23	Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bidang Pendidikan (Program Wajib Belajar 9 tahun) II - 29
Tabel II.24	Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bidang Pendidikan (Program Pendidikan Menengah) II - 30
Tabel II.25	Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bidang Pendidikan (Program Pendidikan Tinggi) II - 31
Tabel II.26	Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bidang Pendidikan (Program Penelitian dan Pengembangan Pendidikan) II - 32
Tabel II.27	Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bidang Kesehatan (Program Upaya Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan) II - 33
Tabel II.28	Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bidang Kesehatan (Program Penyelenggaraan Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular dan Wabah) II - 34
Tabel II.29	Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bidang Kesehatan (Program Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan dan Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat) II - 34
Tabel II.30	Pelaksanaan Rehabilitasi dan Bidang Kesehatan (Program Pengkajian & Penelitian Terapan di Bidang Kesehatan, Pengembangan Pendidikan Tenaga Kesehatan & Program Perbaikan Gizi Masyarakat) II - 35
Tabel II.31	Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bidang Kesehatan II - 36
Tabel II.32	Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias oleh Bapel dalam Bidang Agama (Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama) II - 36

Tabel II.33	Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias oleh Bapel dalam Bidang Agama (Program Pengembangan Nilai-nilai Keagamaan) II - 37
Tabel II.34	Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias oleh Bapel dalam Bidang Agama (Program Peningkatan Pendidikan Agama dan Keagamaan) II - 37
Tabel II.35	Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias oleh Bapel dalam Bidang Agama (Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Aparatur Negara) II - 38
Tabel II.36	Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias oleh Bapel dalam Sub Bidang Pelayanan Keagamaan II - 38
Tabel II.37	Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bidang Sosial (Program Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial) II - 39
Tabel II.38	Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bidang Sosial (Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial) II - 40
Tabel II.39	Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bidang Sosial(Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT, MKS.) ..II - 41
Tabel II.40	Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bidang Sosial (Program Pelayanan Rehabilitasi Sosial)II - 41
Tabel II.41	Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bidang Sosial (Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial) II - 42
Tabel II.42	Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bidang Bantuan Sosial per Kabupaten II - 42
Tabel II.43	Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bidang Pemberdayaan Perempuan (Program Penguatan Kelembagaan) II - 43
Tabel II.44	Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pemberdayaan Perempuan (Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan perempuan) II - 44
Tabel II.45	Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi bidang Pemberdayaan Perempuan (Program Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak) II - 45

Tabel II.46	Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bidang Pemberdayaan Perempuan (Program Pelayanan Keluarga Berencana) II - 45
Tabel II.47	Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias oleh Bapel dalam Bidang Pemuda dan Olah Raga II - 46
Tabel II.48	Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias oleh Bapel dalam Bidang Budaya (Program Pemulihan kembali jati diri dan asset budaya masyarakat) II - 47
Tabel II.49	Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias oleh Bapel dalam Sub Bidang Bangunan Budaya dan Pengembangan Nilai- Nilai Budaya II - 48
Tabel II.50	Realisasi Pelaksanaan Proyek Rehabilitasi dan Rekonstruksi Tanaman Pangan dan Hortikultura II - 49
Tabel II.51	Realisasi Pelaksanaan Proyek Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perkebunan II - 50
Tabel II.52	Realisasi Pelaksanaan Proyek Rehabilitasi dan Rekonstruksi Peternakan II - 51
Tabel II.53	Realisasi Pelaksanaan Proyek Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kehutanan dan Lingkungan II - 52
Tabel II.54	Realisasi Pelaksanaan Proyek Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perikanan II - 53
Tabel II.55	Industri II - 54
Tabel II.56	Perdagangan II - 54
Tabel II.57	Koperasi dan UKM II - 55
Tabel II.58	Tenaga Kerja II - 56
Tabel II.59	Realisasi Pelaksanaan Proyek Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pariwisata II - 56
Tabel II.60	Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias Oleh BRR dalam Bidang Pemulihan Ekonomi II - 57
Tabel II.61	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sarana Prasarana PEMDA oleh BRR II - 61
Tabel II.62	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sarana Prasarana PEMDA oleh BRR (Program Peningkatan Profesionalisme Aparat

	Pemda)II - 61
Tabel II.63	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sarana Prasarana PEMDA oleh BRR (Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan PEMDA) II - 62
Tabel II.64	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sarana Prasarana PEMDA oleh BRR (Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemda) . II - 63
Tabel II.65	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sarana Prasarana PEMDA oleh BRR (Program Peningkatan Kerjasama Antar Daerah) II - 63
Tabel II.66	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sarana Prasarana PEMDA oleh BRR II - 63
Tabel II.67	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sarana Prasarana Kejaksaaan oleh BRR, Departemen Hukum dan HAM dan Pengadilan II - 64
Tabel II.68	Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias oleh BRR Bidang Pemulihan Kelembagaan II - 66
Tabel II.69	Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD -Nias oleh Bapel BRR Dalam Bidang Ketertiban, Keamanan dan Ketahanan Masyarakat (K3M) II - 67
Tabel II.70	Penyerapan Anggaran DIPA 2005 (Dalam Rp. Juta) II - 70
Tabel II.71	Penyerapan Anggaran DIPA 2006 (Dalam Rp. Juta) II - 71
Tabel II.72	Persentase Penyerapan Anggaran II - 73
Tabel II.73	Pembiayaan rehabilitasi dan rekonstruksi Prov.NAD-Nias bersumber dari off-budget berdasarkan sektor pemulihan . II - 74
Tabel II.74	Pembiayaan rehabilitasi dan rekonstruksi Prov.NAD-Nias Bidang Pemulihan Perumahan, Pemukiman, Tata Ruang, Pertanahan & Lingkungan Hidup II - 74
Tabel II.75	Realisasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan dan Permukiman Dilaksanakan oleh Donor dan NGO (Off Budget)II - 75
Tabel II.76	Pembiayaan rehabilitasi dan rekonstruksi Prov.NAD-Nias Bidang Pemulihan Infrastruktur II - 76
Tabel II.77	Realisasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Prasarana Publik (Perhubungan, Energi dan Listrik serta Sumberdaya Air) Dilaksanakan oleh Donor dan NGOII - 77

Tabel II.78	Realisasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Prasarana Dasar Permukiman Dilaksanakan oleh Donor dan NGO (Off Budget)	II - 78
Tabel II.79	Pembiayaan rehabilitasi dan rekonstruksi Prov.NAD-Nias Bidang Pemulihan Sosial Kemasyarakatan	II - 79
Tabel II.80	Pembiayaan Pendidikan dalam rehabilitasi dan rekonstruksi Prov.NAD-Nias	II - 79
Tabel II.81	Realisasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi bidang Pendidikan Dilaksanakan oleh Donor dan NGO (Off Budget)	II - 80
Tabel II.82	Pembiayaan Kesehatan dalam rehabilitasi dan rekonstruksi Prov.NAD-Nias	II - 80
Tabel II.83	Realisasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi bidang Kesehatan yang Dilaksanakan oleh Donor dan NGO (Off Budget)	II - 81
Tabel II.84	Pembiayaan Agama dalam rehabilitasi dan rekonstruksi Prov.NAD-Nias	II - 82
Tabel II.85	Realisasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi bidang Agama yang Dilaksanakan oleh Donor dan NGO (Off Budget)	II - 83
Tabel II.86	Pembiayaan Sosial Budaya dalam rehabilitasi dan rekonstruksi Prov.NAD-Nias	II - 83
Tabel II.87	Realisasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi bidang Sosial dan Budaya yang Dilaksanakan oleh Donor dan NGO (Off Budget)	II - 84
Tabel II.88	Pembiayaan rehabilitasi dan rekonstruksi Prov.NAD-Nias Bidang Pemulihan Perekonomian	II - 84
Tabel II.89	Realisasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sektor Pertanian, perkebunan dan Peternakan yang Dilaksanakan oleh Donor dan NGO (Off Budget)	II - 86
Tabel II.90	Realisasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sektor Kehutanan yang Dilaksanakan oleh Donor dan NGO (Off Budget)	II - 86
Tabel II.91	Realisasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi bidang Perikanan dan Kelautan yang Dilaksanakan oleh Donor dan NGO (Off Budget)	II - 86
Tabel II.92	Realisasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sektor Perdagangan dan Industri yang Dilaksanakan oleh Donor dan NGO	

	(Off Budget) II - 87
Tabel II.93	Realisasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sektor Ketenagakerjaan yang Dilaksanakan oleh Donor dan NGO (Off Budget) II - 88
Tabel II.94	Pembiayaan rehabilitasi dan rekonstruksi Prov.NAD-Nias Bidang Pemulihan Kelembagaan dan Hukum II - 88
Tabel II.95	Realisasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bidang Kelembagaan yang Dilaksanakan oleh Donor dan NGO (Off Budget) II - 89
Tabel II.96	Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias oleh Kementerian Lembaga Bidang Pemulihan Sosial BudayaII - 91
Tabel II.97	Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias oleh Kementerian/Lembaga Bidang Pemulihan Ekonomi II - 94
Tabel II.98	Penjabaran APBD TA. 2005 yang berkaitan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Prov.NAD-Nias Pasca Gempa Bumi dan Tsunami II - 98
Tabel II.99	Penjabaran APBD TA. 2006 yang berkaitan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Prov.NAD-Nias Pasca Gempa Bumi dan Tsunami II - 99
Tabel II.100	Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias oleh Pemerintah Daerah NAD Bidang Pemulihan Sosial Budaya II - 101
Tabel II.101	Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias oleh Pemerintah Daerah NAD Bidang Pemulihan Ekonomi II - 102
Tabel II.102	Pembangunan dan rehabilitasi Pasar Tradisional, Induk, Grosir, penunjang di Provinsi NAD Tahun 2005 dan 2006 II - 103
Tabel II.103	Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias oleh Pemerintah Daerah NAD Bidang Pemulihan Kelembagaan dan Hukum II - 104
Tabel II.104	Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias oleh Pemerintah Daerah NAD Bidang Pemulihan Ketertiban, Keamanan dan Ketahanan Masyarakat II - 105
Tabel II.105	Identifikasi Isu dan Permasalahan II - 106
Tabel III.1	Sasaran Rencana Aksi Sub Bidang Perumahan dan Permukiman III - 2

Tabel III.2	Permasalahan dan Rencana Tindak Lanjut Bidang Pemulihan Perumahan, Permukiman, Tata Ruang, Pertanahan, dan Lingkungan Hidup Sub Bidang Pemulihan Perumahan dan Permukiman III - 3
Tabel III.3	Sasaran Rencana Aksi Sub Bidang Tata Ruang III - 6
Tabel III.4	Permasalahan dan Rencana Tindak Lanjut Bidang Pemulihan Perumahan , Permukiman, Tata Ruang, Pertanahan, dan Lingkungan Hidup Sub Bidang Tata Ruang III - 7
Tabel III.5	Sasaran Rencana Aksi Sub Bidang Pertanahan III - 10
Tabel III.6	Permasalahan dan Rencana Tindak Lanjut Bidang Pemulihan Perumahan , Permukiman, Tata Ruang, Pertanahan, dan Lingkungan Hidup Sub Bidang Pertanahan III - 11
Tabel III.7	Permasalahan dan Rencana Tindak Lanjut Bidang Pemulihan Perumahan , Permukiman, Tata Ruang, Pertanahan, dan Lingkungan Hidup Sub Bidang Lingkungan Hidup III - 13
Tabel III.8	Sasaran Rencana Aksi Sub Transportasi Laut dan ASDP III - 14
Tabel III.9	Sasaran Rencana Aksi Sub Transportasi Udara III - 15
Tabel III.10	Sasaran Rencana Aksi Sub Jalan dan Jembatan III - 16
Tabel III.11	Sasaran Rencana Aksi Sub Terminal Bus dan LLAJ III - 17
Tabel III.12	Sasaran Rencana Aksi Sub Pos dan Telematika III - 18
Tabel III.13	Permasalahan dan Rencana Tindak Lanjut Bidang Pemulihan Infrastruktur sub bidang Jalan dan Transportasi III - 19
Tabel III.14	Sasaran Rencana Aksi Sub Listrik..... III - 20
Tabel III.15	Sasaran Rencana Aksi Sub Energi III - 22
Tabel III.16	Sasaran Rencana Aksi Sub Telekomunikasi III - 23
Tabel III.17	Permasalahan dan Rencana Tindak Lanjut Bidang Pemulihan Infrastruktur Sub Bidang Energi dan Telekomunikasi III - 23
Tabel III.18	Sasaran Rencana Aksi Sub Sumber Daya Air III - 24
Tabel III.19	Permasalahan dan Rencana Tindak Lanjut Bidang Pemulihan Infrastruktur Sub Bidang Sumber Daya Air III - 25
Tabel III.20	Sasaran Rencana Aksi Sub Air Minum dan Sanitasi III - 25
Tabel III.21	Permasalahan dan Rencana Tindak Lanjut Bidang Pemulihan Infrastruktur Sub Bidang Sumber Daya Air III - 26

Tabel III.22	Sasaran Rencana Aksi Sub Fasilitas dan Bangunan Publik .III - 26
Tabel III.23	Permasalahan dan Rencana Tindak Lanjut Bidang Pemulihan Infrastruktur Sub Bidang Fasilitas dan Bangunan III - 27
Tabel III.24	Sasaran Rencana Aksi Sub Bidang Pendidikan (Program Pendidikan Anak Usia Dini).....III - 28
Tabel III.25	Sasaran Rencana Aksi Sub Bidang Pendidikan (Program Pendidikan Menengah)III - 28
Tabel III.26	Sasaran Rencana Aksi Sub Bidang Pendidikan (Program Pendidikan Tinggi)III - 30
Tabel III.27	Sasaran Rencana Aksi Sub Bidang Pendidikan (Program Penelitian dan Pengembangan Pendidikan)..... III - 31
Tabel III.28	Permasalahan dan Rencana Tindak Lanjut Bidang Sosial Kemasyarakatan Sub Bidang Pendidikan III - 32
Tabel III.29	Sasaran Rencana Aksi Sub Bidang Kesehatan (Program Upaya Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan).....III - 34
Tabel III.30	Sasaran Rencana Aksi Sub Bidang Kesehatan (Program Penyelenggaraan Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular dan Wabah)..... III - 35
Tabel III.31	Sasaran Rencana Aksi Sub Bidang Kesehatan (Program Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan dan Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat)..... III - 35
Tabel III.32	Sasaran Rencana Aksi Sub Bidang Kesehatan (Program Pengkajian & Penelitian Terapan di Bidang Kesehatan, Pengembangan Pendidikan Tenaga Kesehatan & Program Perbaikan Gizi Masyarakat) III - 36
Tabel III.33	Sasaran Rencana Aksi Sub Bidang Kesehatan (Program Penyelenggaraan Kebijakan & Manajemen Pembangunan Kesehatan, Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pengungsi Korban Bencana dan Penanggulangan Masalah Kesehatan dan Program Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan) III - 37
Tabel III.34	Permasalahan dan Rencana Tindak Lanjut Bidang Sosial Kemasyarakatan Sub Bidang Kesehatan III - 37

Tabel III.35	Sasaran Rencana Aksi Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan (Program Penguatan Kelembagaan)III - 39
Tabel III.36	Sasaran Rencana Aksi Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan (Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan)III - 39
Tabel III.37	Sasaran Rencana Aksi Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan (Program Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak).....III - 40
Tabel III.38	Sasaran Rencana Aksi Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan (Program Pelayanan Keluarga Berencana)..... III - 41
Tabel III.39	Permasalahan dan Rencana Tindak Lanjut Bidang Sosial Kemasyarakatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan ... III - 41
Tabel III.40	Sasaran Rencana Aksi Sub Bidang Sosial (Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Kat, Mks.)III - 42
Tabel III.41	Sasaran Rencana Aksi Sub Bidang SosialIII - 43
Tabel III.42	Sasaran Rencana Aksi Sub Bidang Sosial (Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial)III - 43
Tabel III.43	Sasaran Rencana Aksi Sub Bidang Sosial (Program Pelayanan Rehabilitasi Sosial)III - 44
Tabel III.44	Sasaran Rencana Aksi Sub Bidang Sosial (Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial).....III - 45
Tabel III.45	Permasalahan Dan Rencana Tindak Lanjut Bidang Sosial Kemasyarakatan Sub Bidang SosialIII - 46
Tabel III.46	Sasaran Rencana Aksi Sub Bidang Pemuda dan Olah Raga..... III - 47
Tabel III.47	Permasalahan Dan Rencana Tindak Lanjut Bidang Sosial Kemasyarakatan Sub Bidang Pemuda dan Olah RagaIII - 48
Tabel III.48	Sasaran Rencana Aksi Sub Bidang Budaya (Program Pemulihan Kembali Jati Diri dan Asset Budaya Masyarakat)III - 49
Tabel III.49	Sasaran Rencana Aksi Sub Bidang Agama (Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama)..... III - 51
Tabel III.50	Sasaran Rencana Aksi Sub Bidang Agama (Program Pengembangan Nilai-Nilai Keagamaan)..... III - 52

Tabel III.51	Sasaran Rencana Aksi Sub Bidang Agama (Program Peningkatan Pendidikan Agama dan Keagamaan) III - 52
Tabel III.52	Sasaran Rencana Aksi Sub Bidang Agama (Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Aparatur Negara) III - 53
Tabel III.53	Permasalahan Dan Rencana Tindak Lanjut Bidang Sosial Kemasyarakatan Sub Bidang Agama III - 53
Tabel III.54	Sasaran Rencana Aksi Sub Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura III - 54
Tabel III.55	Sasaran Rencana Aksi Sub Bidang Perkebunan III - 55
Tabel III.56	Sasaran Rencana Aksi Sub Bidang Peternakan III - 56
Tabel III.57	Sasaran Rencana Aksi Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan III - 57
Tabel III.58	Permasalahan Dan Rencana Tindak Lanjut Bidang Pemulihan Ekonomi Sub Bidang Pertanian III - 58
Tabel III.59	Sasaran Rencana Aksi Sub Bidang Perikanan III - 60
Tabel III.60	Permasalahan Dan Rencana Tindak Lanjut Bidang Pemulihan Ekonomi Sub Bidang Perikanan III - 60
Tabel III.61	Sasaran Rencana Aksi Sub Bidang Industri III - 60
Tabel III.62	Sasaran Rencana Aksi Sub Bidang Perdagangan..... III - 61
Tabel III.63	Sasaran Rencana Aksi Sub Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Ukm) III - 61
Tabel III.64	Sasaran Rencana Aksi Sub Bidang Ketenagakerjaan III - 62
Tabel III.65	Sasaran Rencana Aksi Sub Bidang Pariwisata..... III - 62
Tabel III.66	Permasalahan Dan Rencana Tindak Lanjut Bidang Pemulihan Ekonomi Sub Bidang Pengembangan Usaha..... III - 63
Tabel III.67	Sasaran Rencana Aksi Sub Bidang Sarana Prasarana Pemda III - 64
Tabel III.68	Sasaran Rencana Aksi Sub Bidang Sarana Prasarana Pemda (Program Peningkatan Profesionalisme Aparat Pemda)..... III - 64
Tabel III.69	Sasaran Rencana Aksi Sub Bidang Sarana Prasarana Pemda (Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemda)..... III - 65
Tabel III.70	Sasaran Rencana Aksi Sub Bidang Sarana Prasarana Pemda (Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemda)..... III - 66

Tabel III.71	Sasaran Rencana Aksi Sub Bidang Sarana Prasarana Pemda (Program Peningkatan Kerjasama Antar Daerah).....III - 66
Tabel III.72	Sasaran Rencana Aksi Sub Bidang Sarana Prasarana PemdaIII - 66
Tabel III.73	Permasalahan dan Rencana Tindak Lanjut Bidang Pemulihan Kelembagaan dan Hukum Sub Bidang Kelembagaan Daerah..... III - 67
Tabel III.74	Sasaran Rencana Aksi Sub Bidang HukumIII - 68
Tabel III.75	Permasalahan Dan Rencana Tindak Lanjut Bidang Pemulihan Kelembagaan Dan Hukum Sub Bidang HukumIII - 70
Tabel III.76	Sasaran Rencana Aksi Sub Bidang Keamanan Dan Ketahanan Masyarakat (K3m)..... III - 71
Tabel III.77	Permasalahan Dan Rencana Tindak Lanjut Bidang Pemulihan Kelembagaan Dan Hukum Sub Bidang Ketertiban, Keamanan Dan Ketahanan Masyarakat III - 73
Tabel III.78	Kebutuhan Pendanaan (On Budget) Tahun 2007-2009 III - 74
Tabel III.79	Total Kebutuhan Pendanaan (Off Budget) Tahun 2007-2009 III - 74
Tabel III.80	Total Kebutuhan Pendanaan (Sumber Apbd Provinsi Nad) 2007-2008 III - 75
Tabel III.81	Dana Apbn Pemda Prov Nad (2007)..... III - 76
Tabel III.82	Rekapitulasi Pemetaan Pendanaan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Kepulauan Nias, Provinsi Sumatera Utara Tahun 2007-2009III - 78
Tabel IV.1	Keterkaitan Kebijakan Umum Dengan Bidang Atau Pilar Pemulihan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Nad-Nias IV - 3
Tabel IV.2	Kerangka Pemantauan dan Indikator EvaluasiIV - 21
Tabel IV.3	Kegiatan Exit Strategy BRR IV - 26
Tabel V.1	Komposisi Pegawai BRR NAD-Nias Tahun 2007.....V - 35
Tabel VI.1	Rencana Struktur Ruang Provinsi Nanggroe Aceh DarussalamVI – 19
Tabel VI.2	Klasifikasi Program Pembangunan Jangka Menengah Berdasarkan 5 Bidang Pemulihan Rehabilitasi-Rekonstruksi dan Bidang

	Pembangunan RPJMD Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007-2012	VI – 21
Tabel VI.3	Program Pemanfaatan Ruang Kawasan Lindung Di Kabupaten Nias	VI – 34
Tabel VI.4	Program Pemanfaatan Ruang Kawasan Budidaya Di Kabupaten Nias	VI - 35
Tabel VI.5	Fungsi Pusat-Pusat Perkembangan Kabupaten Nias Selatan	VI – 36
Tabel VI.6	Prioritas Strategi Pembangunan Ekonomi Sektoral (Komoditas dan Sentra Unggulan) di Kabupaten Nias	VI – 38
Tabel VI.7	Prioritas Strategi Pembangunan Ekonomi Sektoral (Komoditas dan Sentra Unggulan) di Kabupaten Nias Selatan	VI – 40
Tabel VI.8	Kebijakan Umum Anggaran Kabupaten Nias 2006-2011 ...	VI – 41
Tabel VI.9	Klasifikasi Program Pembangunan Jangka Menengah Berdasarkan 4 Pilar Rehabilitasi-Rekonstruksi dan Bidang Pembangunan RPJMD Kabupaten Nias	VI – 44
Tabel VI.10	Klasifikasi Program Pembangunan Jangka Menengah Berdasarkan 4 Pilar Rehabilitasi-Rekonstruksi dan Bidang Pembangunan RPJMD Kabupaten Nias Selatan	VI – 48
Tabel VI.11	Peran dan Tanggung jawab Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat Pasca BRR NAD-Nias	VI – 54

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1	Koordinasi Penyusunan Rencana Aksi	I - 5
Gambar I.2	Proses dan Rencana Kerja Bersama Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD - Nias Tahun 2007 – 2009.....	I - 6
Gambar IV.1	Skenario Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD Tahun 2005-2009	IV - 4
Gambar IV.2	Sekenario Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Kepulauan Nias (2005-2009)	IV - 5
Gambar IV.3	Alur Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi	IV - 16
Gambar IV.4	Bagan Alir Mekanisme Hibah Luar Negeri	IV - 17
Gambar IV.5	Kerangka Kerja Logis Kegiatan Pemantauan dan Pengendalian	IV - 22
Gambar IV.6	Diagram Prinsip Pengawasan Pelaksanaan	IV - 23

DAFTAR BAGAN

Bagan V.1	Kuadran Penilaian Program Tahun 2007-2009	V - 1
Bagan V.2	Distribusi Alokasi Indikatif Tahun 2008 Menurut Kuadran	V - 14
Bagan V.3	Strategi Pengakhiran Masa Tugas Brr	V - 24
Bagan V.4	Mekanisme Koordinasi Sekretariat Bersama	V - 26
Bagan V.5	Mekanisme Koordinasi Sekretariat Bersama	V - 26
Bagan V.6	Proses Seleksi Program Sekretariat Bersama	V - 28
Bagan V.7	Tahapan Peralihan Aset BRR NAD-Nias	V - 31

DAFTAR GRAFIK

Grafik III.1	Kebutuhan Pendanaan On Budget 2007-2009	III - 75
Grafik III.2	Kebutuhan Pendanaan APBD Prov NAD 2007-2008	III - 76
Grafik III.3	Dana APBN Provinsi NAD Tahun 2007	III - 77

LAMPIRAN RENCANA RINCI



Pendahuluan

I.1 Latar Belakang

Pada tanggal 26 Desember 2004 telah terjadi gempa bumi yang berskala sangat kuat dengan kekuatan 8,9 skala Richter dengan pusat gempa di Samudera Hindia di lepas pantai barat laut Pulau Sumatera. Gempa yang kemudian menyebabkan gelombang tsunami ini telah menghancurkan sebagian besar wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan sebagian Kepulauan Nias, Provinsi Sumatera Utara. Bencana tersebut telah mengakibatkan kerusakan dan kerugian di berbagai sektor kehidupan baik pada sektor sosial, ekonomi, pemerintahan, budaya, dan lainnya. Tiga bulan setelah peristiwa tersebut di atas, pada tanggal 28 Maret 2005 terjadi gempa bumi yang luar biasa di Kepulauan Nias dengan kekuatan 8,7 skala Richter. Peristiwa gempa ini menimbulkan kerusakan dan kerugian yang besar bagi wilayah dan kehidupan masyarakat Kepulauan Nias. Akibat peristiwa gempa tersebut juga telah menyebabkan kerusakan dan kerugian yang cukup parah di Kepulauan Nias dari berbagai sektor kehidupan, antara lain: perumahan dan permukiman, infrastruktur, dan terhentinya kegiatan ekonomi masyarakat, serta kehidupan sosial budaya masyarakat.

Untuk melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah dan kehidupan masyarakat di Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Presiden No. 30 Tahun 2005 tentang Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara. Di dalam Perpres itu selanjutnya Bappenas ditugaskan untuk melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap Rencana Induk yang sudah dituangkan ke dalam rencana aksi oleh Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi bersama-sama dengan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Melalui Keputusan Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas No. 338/M.PPN/12/2005 maka dibentuk Tim Koordinasi Pemantauan dan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara (P3RIRRWANS).

Selanjutnya pada akhir bulan Mei 2005, melalui Perpu No. 2 Tahun 2005 jo. UU No. 10 Tahun 2005 Pemerintah Indonesia membentuk sebuah badan khusus yang bernama Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara, yang disingkat BRR NAD-Nias. Badan ini ditugaskan untuk melaksanakan dan mengkoordinasikan program rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara. Badan ini mendapat mandat untuk melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi dengan masa tugas 4 (empat) tahun. Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi ini diarahkan kepada pembangunan Provinsi NAD dan Kepulauan Nias yang berkelanjutan dan didukung oleh kelembagaan dan sumber daya manusia yang tersedia. Mengingat proses rehabilitasi dan rekonstruksi tidak akan dapat diselesaikan dalam kurun waktu selama 4 (empat) tahun, maka kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang belum dapat terselesaikan dielaborasi ke dalam rencana pembangunan jangka menengah berikutnya di Provinsi NAD

dan Kepulauan Nias, dengan melibatkan pemerintah daerah yang didukung pemerintah pusat.

Sejak dua tahun lalu, BRR NAD-Nias sudah melaksanakan mandatnya dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Berdasarkan hasil Evaluasi Paruh Waktu terhadap pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi, telah menunjukkan hasil-hasil yang positif, namun masih perlu dioptimalkan dalam pelaksanaannya. Dalam laporan Evaluasi Paruh Waktu tersebut menunjukkan terdapat empat kategori pelaksanaan mengenai Rencana Induk rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat Provinsi NAD dan Kepulauan Nias pasca gempa dan tsunami, yaitu:

1. Terdapat program dan kegiatan yang realisasinya lebih besar dari yang tertera dalam Rencana Induk karena untuk memenuhi kebutuhan lapangan yang mendesak.
2. Terdapat program dan kegiatan yang realisasinya sampai tahun 2007 tidak mencapai sasaran sesuai Rencana Induk.
3. Terdapat program dan kegiatan yang dilaksanakan di luar program/kegiatan Rencana Induk.
4. Terdapat program dan kegiatan dalam Rencana Induk yang tidak dilaksanakan oleh BRR tetapi dilaksanakan oleh pihak lain.

Di samping itu, kenyataan di lapangan menunjukkan masih banyak permasalahan yang belum terselesaikan secara tuntas. Hal itu mengakibatkan target yang tercantum dalam Rencana Induk belum dapat direalisasikan, antara lain yang terkait dengan ketersediaan infrastruktur di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, agama, sosial, budaya serta permukiman. Sebagai misal, meskipun rumah sudah selesai dibangun tetapi belum dihuni karena kualitas bangunan serta prasarana dan sarana dasar permukiman belum memenuhi syarat. Atas dasar hasil Evaluasi Paruh Waktu menunjukkan bahwa belum atau tidak semua program dan kegiatan yang dimandatkan kepada BRR dalam Rencana Induk dapat dilaksanakan sepenuhnya. Misalnya masih terdapat rumah yang sudah dibangun tetapi pengungsi masih tinggal di barak-barak.

Dalam kurun waktu dua tahun menjelang berakhirnya mandat BRR pada bulan April 2009 diperlukan suatu Rencana Aksi yang mampu mengakomodasikan kebutuhan riil di lapangan sesuai dengan ketersediaan sumber daya dana dan sumber daya manusia serta kelembagaan dan sistem kerja sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Penyusunan Rencana Aksi ini dilakukan dalam masa transisi menjelang proses peralihan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dari BRR kepada Pemerintah Daerah dalam rangka keberlangsungan dan keberlanjutan. Keberadaan Rencana Aksi ini merupakan penyempurnaan terhadap Rencana Strategis dan Rencana Aksi yang sudah pernah dilakukan oleh BRR sebelumnya dan dengan mempertimbangkan dinamika dan kondisi lapangan.

1.2 Maksud, Tujuan dan Sasaran

Maksud dan tujuan disusunnya Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara ini merupakan sebagai pedoman untuk :

1. Menciptakan kesepakatan dan komitmen melalui koordinasi dan sinkronisasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, masyarakat, perguruan tinggi/akademisi, LSM, lembaga donor serta masyarakat internasional dalam membangun kembali Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara ke depan.
2. Melaksanakan berbagai program dan kegiatan dalam bentuk rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi yang belum dilaksanakan untuk tahun 2007-2009.

3. Melakukan sosialisasi, dan diseminasi informasi kepada seluruh lapisan masyarakat tentang bencana alam, dampak bencana, penilaian kerusakan dan kerugian, penilaian kebutuhan, serta sistem peringatan dini terhadap ancaman bencana melalui pendekatan solidaritas dan partisipasi publik.
4. Mengembangkan sistem dan mekanisme mobilisasi pendanaan yang bersumber dari *on budget* (APBN dan APBD) dan *off budget* secara efisien, efektif, transparan, partisipatif dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan prinsip *good governance*.
5. Mewujudkan pembangunan kembali di wilayah Provinsi NAD dan Kepulauan Nias secara berkelanjutan dan terpadu oleh seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) baik dari aspek kelembagaan, pendanaan, Sumber Daya Manusia (SDM) maupun implementasi sejak dari tahap perencanaan sampai tahap evaluasi.

Sedangkan sasaran dalam pelaksanaan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Terwujudnya kesepakatan melalui koordinasi dan sinkronisasi antar berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam membangun kembali wilayah dan kehidupan masyarakat Provinsi NAD dan Kepulauan Nias.
2. Terlaksananya kegiatan-kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pada tahun 2007-2009.
3. Tersosialisasikannya berbagai data dan informasi tentang bencana alam dan dampaknya serta sistem peringatan dini kepada seluruh lapisan masyarakat melalui pendekatan solidaritas dan partisipasi publik.
4. Terwujudnya sistem dan mekanisme mobilisasi pendanaan dari sumber *on budget* dan *off budget* yang efisien, efektif, transparan dan dapat dipertanggung-jawabkan sesuai dengan prinsip *good-governance*.
5. Terciptanya kesinambungan dan keterpaduan dalam pembangunan kembali wilayah dan masyarakat Provinsi NAD dan Kepulauan Nias dari berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*) pada aspek kelembagaan, pendanaan dan SDM.

I.3 Ruang Lingkup Rencana Aksi

Ruang lingkup dalam rencana aksi ini meliputi bidang-bidang pemulihan sebagai berikut: 1. Bidang Pemulihan Perumahan dan Permukiman, Tata Ruang, Pertanahan, dan Lingkungan Hidup, 2. Bidang Pemulihan Infrastruktur, 3. Bidang Pemulihan Sosial Kemasyarakatan, 4. Bidang Pemulihan Perekonomian, dan 5. Bidang Pemulihan Kelembagaan dan Hukum.

Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat Provinsi NAD dan Kepulauan Nias tahun 2007-2009 ini disusun dengan mempertimbangkan kerusakan dan kerugian akibat bencana tsunami dan gempa. Dasar pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah NAD sepenuhnya mengacu kepada Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana tercantum dalam Perpres No. 30 Tahun 2005. Sedangkan untuk wilayah Kepulauan Nias belum sepenuhnya tertampung dalam Rencana Induk, dimana program dan kegiatan penanganan pasca bencana dalam Rencana Induk yang tertuang dalam Perpres 30/2005 dimana pada waktu itu belum sepenuhnya mengakomodasi kerusakan dan kerugian akibat gempa yang terjadi pada 28 Maret 2005 secara menyeluruh. Hal ini terjadi karena pada waktu penerbitan Rencana Induk tersebut hanya berselang sekitar 2 minggu setelah peristiwa gempa di Kepulauan Nias.

Dengan demikian, keberadaan rencana aksi ini merupakan penyempurnaan terhadap produk perencanaan sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara yang tertuang dalam Perpres No. 30 Tahun 2005. Dalam Rencana Induk telah digambarkan kerangka besar pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi NAD dan Kepulauan Nias yang diakibatkan oleh bencana gempa dan tsunami pada

26 Desember 2004. Rencana aksi ini pun memberikan tambahan landasan dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang diakibatkan oleh peristiwa gempa yang terjadi pada 28 Maret 2005 di Kepulauan Nias.

Wilayah perencanaan dalam penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi ini mencakup Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara yang disesuaikan berdasarkan wilayah administratif pemerintahan. Untuk itu wilayah perencanaan ini difokuskan kepada Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias, Provinsi Sumatera Utara yang telah dikemukakan diatas. Pembagian wilayah perencanaan berdasarkan administratif pemerintahan ini dalam rangka untuk memudahkan dalam melaksanakan proses kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.

I.4 Kerangka Waktu Pelaksanaan Rencana Aksi

Kerangka waktu pelaksanaan Rencana Aksi rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara ini mencakup kurun waktu tahun 2007 hingga April 2009. Jangka waktu ini merupakan sisa masa tugas dan tanggung jawab BRR dalam melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara. Sedangkan mulai Mei 2009 hingga tahun 2012 kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dilanjutkan oleh Pemerintah Daerah (tingkat provinsi maupun kabupaten/kota sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah) dan Kementerian/Lembaga. Untuk wilayah Provinsi NAD masa pembangunan jangka menengah yaitu tahun 2007 sampai dengan 2012, sedangkan untuk wilayah Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara yaitu tahun 2006 sampai dengan 2011.

Terkait dengan keberlanjutan proses pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca BRR maka Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah menjadi salah satu acuan yang memberikan arahan dalam rangka kesinambungan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah pasca bencana. Dengan demikian proses pemulihan di daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara menjadi tugas dan tanggung jawab bagi semua pemangku kepentingan (*stakeholders*), khususnya kepada Pemerintah Daerah dan Kementerian/Lembaga.

I.5 Metodologi Penyusunan

Sebagai koordinator dalam penyusunan rencana aksi, Badan Pelaksana BRR memperoleh masukan-masukan dari Bappenas, Dewan Pengarah BRR, Dewan Pengawas BRR, Pemda Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara, dan berbagai *stakeholders* di pusat dan daerah. Selanjutnya, Badan Pelaksana BRR bersama-sama dengan Bappenas, Dewan Pengarah BRR, Dewan Pengawas BRR, Pemda Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara, dan berbagai *stakeholders* di pusat dan daerah melakukan konsultasi, dan koordinasi untuk menentukan komponen-komponen kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang akan dilaksanakan lebih lanjut. Rencana aksi ini disusun melalui berbagai forum konsultasi publik yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*). Gambaran koordinasi tersebut dapat dilihat dalam gambar berikut ini:

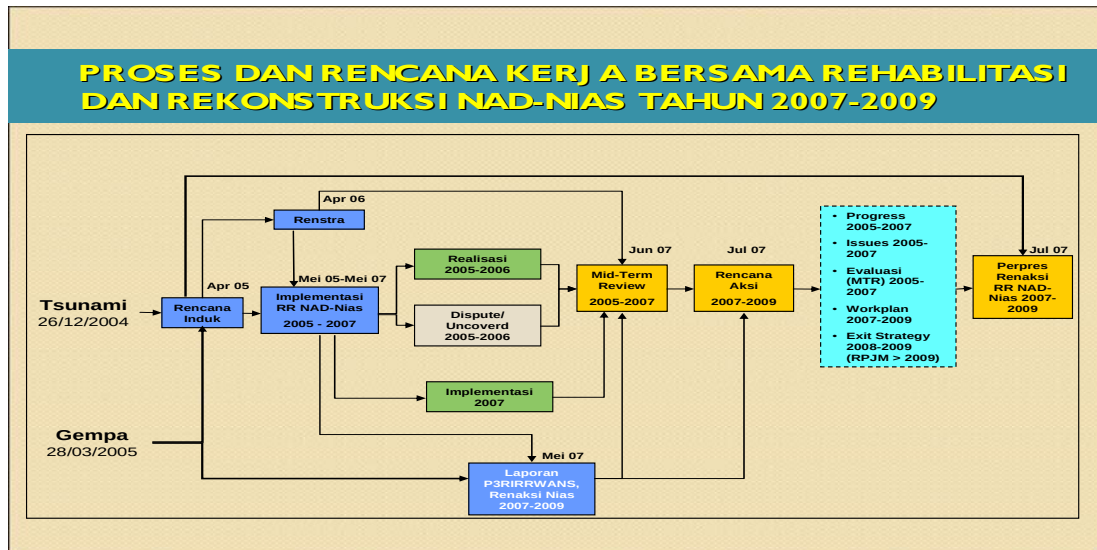
Gambar I. 1
Koordinasi Penyusunan Rencana Aksi



Buku rencana aksi ini berisi pedoman pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi secara keseluruhan yang mencakup antara lain, perkiraan sasaran kebutuhan baru kebijakan, prinsip, dan strategi rehabilitasi dan rekonstruksi. Sedangkan lampiran berisi rencana aksi rinci kegiatan dan kebutuhan dana rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara. Pada bagian akhir dielaborasi kerangka pembangunan jangka menengah di wilayah Provinsi NAD dan Kepulauan Nias yang merupakan langkah kesinambungan dan keberlanjutan dalam rangka pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Dalam proses penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi ini terdiri dari beberapa alur dan kerangka proses pemikiran yang saling terhubung antara satu dengan lainnya. Ilustrasi tersebut dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar I. 2
Proses dan Rencana Kerja Bersama
Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD – Nias
Tahun 2007 – 2009



I.6 Sistematika Penyusunan Rencana Aksi

Rencana Aksi rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat Kepulauan Nias secara keseluruhan termuat dalam:

BAB I PENDAHULUAN. Menjelaskan tentang: Latar belakang; Maksud, tujuan dan sasaran; Ruang lingkup; Kerangka waktu; Metodologi penyusunan dan ditutup dengan Sistematika penyusunan rencana aksi.

BAB II PERKEMBANGAN PELAKSANAAN UPAYA PENANGANAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI NAD-NIAS 2005-2007. Menerangkan tentang: Pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam Rencana Induk periode 2005-2007 yang dilakukan oleh BRR NAD-Nias, Donor/NGO, Kementerian/Lembaga, dan Pemerintah Daerah; Identifikasi berbagai permasalahan dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi; serta Langkah-langkah upaya penyelesaian yang dilakukan.

BAB III SASARAN PELAKSANAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI TAHUN 2007-2009. Membahas tentang: Sasaran pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi tahun 2007-2009; Pelaksanaan paruh waktu kedua yang merupakan sisa pelaksanaan pada paruh waktu pertama tahun 2005-2006.

BAB IV PRINSIP, KEBIJAKAN UMUM DAN STRATEGI PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN RENCANA AKSI REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI 2007-2009. Membahas tentang: Prinsip-Prinsip; Kebijakan Umum; Kebijakan dan Strategi Sektor; Sumber-sumber pendanaan; Mekanisme pengelolaan pendanaan; Mekanisme penyaluran dana; Mekanisme pengadaan barang dan jasa; Mekanisme pemantauan dan pengendalian pelaksanaan

rehabilitasi dan rekonstruksi; yang ditutup dengan pengantar Strategi transisi dan pengalihan tanggung jawab rehabilitasi dan rekonstruksi.

BAB V RENCANA AKSI REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI NAD-NIAS TAHUN 2007-2009. Menjelaskan tentang: Penyesuaian program untuk tahun 2007; Pemantapan rencana program untuk tahun 2008; Tahapan transisi pasca 2009; Persiapan transisi dan pengalihan; pengalihan pengelolaan pendanaan; Pengalihan peralatan dan perangkat (aset); Pengalihan personil (SDM); dan Pengalihan dokumen.

BAB VI KEBERLANJUTAN PEMULIHAN WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT PROVINSI NAD DAN KEPULAUAN NIAS. Menjelaskan tentang: Konsep kebijakan keberlanjutan; Permasalahan dan tantangan pembangunan jangka menengah; Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah; Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2007-2012; dan. Rencana Tata Ruang Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara.



Perkembangan Pelaksanaan Upaya Penanganan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi NAD-NIAS 2005-2007

Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi NAD-Nias yang akan di evaluasi dalam kurun waktu 2005-2007 bersumber dari program dan proyek TA 2005 murni dan TA 2006 luncuran, serta TA 2006, yang terdiri dari anggaran 2006 murni dan luncuran yang dikelola melalui dana 'trust fund'. Untuk tahun anggaran 2007 baru dalam penyelesaian proses pelelangan atau masih dalam proses melakukan persiapan pekerjaan lapangan, maka belum diperoleh hasil realisasinya. Evaluasi terhadap program dan proyek rehabilitasi dan rekonstruksi ini mencakup program dan proyek rehabilitasi dan rekonstruksi yang dikelola oleh BRR, Pemda, Kementrian/Lembaga dan donor/NGOs serta pihak yang ditugasi untuk melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.

II.1. BRR

Mengingat Dewan Pengarah dan Dewan Pengawas juga merupakan bagian dari BRR, maka kegiatan Dewan Pengarah dan Dewan Pengawas juga disampaikan sebagai bagian dari realisasi tugas. Selanjutnya disampaikan realisasi pelaksanaan program dan proyek dari Bapel BRR, Donor/NGO, Kementerian Lembaga dan Pemerintah Daerah khususnya dalam penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi di NAD dan Nias.

II.1.1. Dewan Pengarah

Dua tahun setelah terbentuknya Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias, Provinsi Sumatera Utara, berbagai bentuk program kegiatan yang berkelanjutan guna pemulihan seluruh wilayah dan kehidupan masyarakat yang dilanda bencana tersebut telah dan terus dilaksanakan.

Dewan Pengarah yang merupakan salah satu dari 3 (tiga) organ yang ada dalam lingkungan BRR NAD-Nias, selain Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana (Bapel), telah pula melaksanakan kegiatan guna mendukung proses rehabilitasi dan rekonstruksi yang dimulai pada tahun 2005 dan tahun 2006. Berbagai kegiatan dilaksanakan dengan mengacu kepada tugas dan wewenang sebagaimana diamanatkan dalam Perpu No.2 tahun 2005 yang kemudian telah ditetapkan menjadi Undang-Undang No. 10 tahun 2005, dimana tugas utama Dewan Pengarah adalah dalam memberikan arahan guna perumusan, perencanaan, dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilaksanakan dan atau dikoordinasikan oleh Badan Pelaksana.

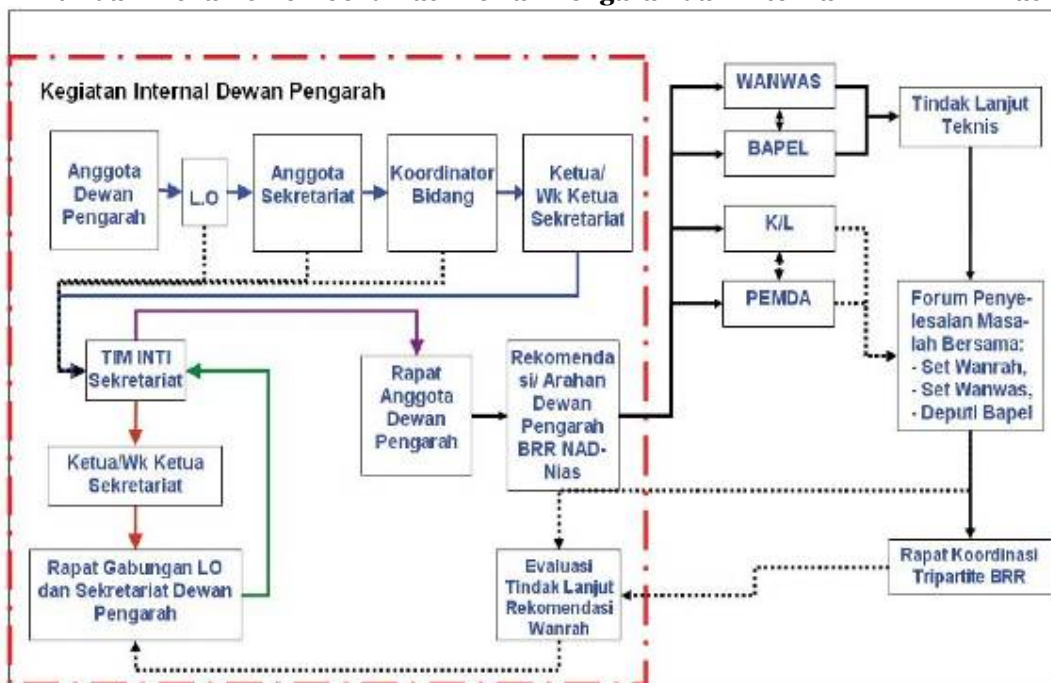
Anggota Dewan Pengarah merupakan representasi berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*) seperti dari unsur masyarakat, unsur akademisi/ perguruan tinggi, unsur pemerintah baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta unsur lain yang mendukung fungsi pengarah. Anggota Dewan Pengarah bertanggung jawab untuk meyakinkan bahwa aspirasi berbagai pihak yang diwakilinya telah menjadi acuan dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi.

Dalam perumusan arahan oleh Dewan Pengarah, para Anggota Dewan Pengarah secara rutin telah melaksanakan rapat dan pertemuan disertai kunjungan ke daerah yang terkena bencana guna mendapatkan berbagai masukan terhadap pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi. Dalam mendukung kegiatan Dewan Pengarah, telah dibentuk Sekretariat Dewan Pengarah yang berkedudukan di Jakarta untuk tingkat Pusat dan perwakilan di tingkat daerah, yaitu di Medan untuk wilayah Nias dan Sumatera Utara serta di Banda Aceh untuk wilayah Nanggroe

Aceh Darussalam. Keanggotaan Sekretariat Dewan Pengarah terdiri dari Pejabat Penghubung, Anggota Sekretariat dan Tim Inti.

Sebagaimana tugas pokok dan fungsi kelembagaan Dewan Pengarah dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi NAD dan Nias, maka Dewan Pengarah telah menetapkan alur dan mekanisme koordinasi pembahasan dan penyelesaian permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi. Alur dan mekanisme tersebut telah berjalan dan telah pula menghasilkan kebijakan-kebijakan serta rekomendasi yang telah ditindaklanjuti oleh pihak-pihak yang berkepentingan terutama Badan Pelaksana BRR NAD-Nias. Berikut merupakan alur dan mekanisme koordinasi dimaksud :

Bagan II. 1
Alur dan Mekanisme Koordinasi Dewan Pengarah dan Internal BRR NAD-Nias



Sumber : Dewan Pengarah, 2007

Rekomendasi dan arahan terhadap pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang dihasilkan oleh Dewan Pengarah sebagaimana alur tersebut diatas, terdapat beberapa arahan yang langsung ditindaklanjuti oleh instansi masing-masing anggota Dewan Pengarah. Disamping itu, untuk memudahkan Badan Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam menyikapi dan menyelesaikan permasalahan di lapangan, Dewan Pengarah telah menyampaikan rekomendasi untuk penyelesaian berbagai permasalahan yang dijumpai di lapangan. Rekomendasi tersebut juga dibahas dalam rapat-rapat tripartite yang dihadiri oleh para anggota Dewan Pengarah, anggota Dewan Pengawas dan jajaran pimpinan Badan Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Sejalan dengan besarnya dampak bencana yang terjadi dan kompleksnya proses rehabilitasi dan rekonstruksi yang harus dilaksanakan, terdapat beberapa isu dan permasalahan strategis serta arahan telah dihimpun oleh Dewan Pengarah selama tahun 2005 dan 2006 yang berimplikasi langsung terhadap pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi NAD dan Nias yang meliputi Bidang Umum; Politik, Hukum dan Keamanan; Perekonomian; dan Kesejahteraan Rakyat.

II.1.1.1. Bidang Umum

Secara khusus pada bidang umum, permasalahan yang mengemuka adalah minimnya koordinasi, sinkronisasi dan integrasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pengawasan antar instansi BRR dengan Pemerintah Daerah serta antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang disebabkan lemahnya “*Leadership Competency*” dan terhambatnya penerbitan Peraturan Perundangan khususnya dibidang Pertanahan dan Hukum. Akibatnya terjadi keterlambatan realisasi fisik dan keuangan pada tahun 2005 dan 2006 yang pada gilirannya menyulitkan penyelesaian kegiatan serta tidak sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2006. Di samping itu, mengingat kebutuhan yang berkembang di lapangan dan besarnya harapan masyarakat dalam pemulihan kembali daerah yang terkena bencana, maka diperlukan percepatan dalam pelaksanaan revisi rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi NAD dan Nias.

Beberapa upaya, rekomendasi dan tindak lanjut terhadap permasalahan yang menjadi fokus Dewan Pengarah pada bidang umum tahun 2005-2006 telah mendapat perhatian oleh Badan Pelaksana serta telah pula ditindaklanjuti dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi oleh berbagai pemangku kepentingan. Adapun beberapa rekomendasi dan tindak lanjut pada bidang umum ini sebagai berikut :

a. Aspek Pendanaan

- i. Dalam upaya untuk mempercepat proses pengadaan barang dan jasa dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di NAD dan Nias, pemerintah telah menerbitkan Perpres No. 70/2005 tentang perubahan ke tiga atas Keppres 80/2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah. Pada tahun 2006, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan selaku Ketua Dewan Pengarah, telah menyurati Presiden untuk melakukan Perubahan terhadap Peraturan Presiden Nomor 70/2005, khusus masalah tenggat waktu pelaksanaan pengadaan perumahan sebelum 1 Juli 2006 untuk dapat diperpanjang sampai dengan Desember 2007. Hal tersebut ditindaklanjuti oleh pemerintah dengan penerbitan Peraturan Presiden Nomor 79/2006 tentang perubahan kelima tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Untuk selanjutnya, saat ini sedang diproses oleh BAPPENAS perubahan ketujuh atas Keppres 80/2003 sesuai dengan usulan Kepala Badan Pelaksana kepada Presiden Republik Indonesia;
- ii. Kementerian/Lembaga diharapkan menyegerakan penentuan dan penempatan satuan kerja (satker) guna merealisasikan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi NAD dan Nias.

b. Aspek Perencanaan Program

- i. Telah dilakukan pembahasan antara Badan Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi dengan Kementerian/ Lembaga sehingga telah disepakati mengenai lingkup tugas BRR sesuai Rencana Induk, terutama menyangkut batasan wilayah dan obyek yang ditangani agar tidak tumpang tindih dengan program Departemen/instansi;
- ii. Dalam kaitannya dengan peningkatan dayaguna pelaksanaan tahun 2005 dan perencanaan kegiatan tahun 2006, Badan Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi telah berkoordinasi dan mengkomunikasikan rencana kerjanya kepada Dewan Pengarah, termasuk di dalam penyusunan rencana aksi pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi tahun 2006 sesuai dengan rancangan pagu alokasi sebesar Rp 9,9 triliun;

c. Koordinasi BRR

- i. Koordinasi internal BRR telah diperjelas dan ditindaklanjuti melalui forum interaksi dan komunikasi yang intensif antar seluruh komponen BRR (Dewan Pengarah, Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana). Hal ini ditindaklanjuti dengan pelaksanaan rapat

tripartite yang kemudian kesepakatannya akan dibahas lebih lanjut pada tingkat kesekretariatan;

- ii. Koordinasi secara eksternal antara BRR, khususnya Badan Pelaksana, dengan kementerian/lembaga dan terutama dengan pemerintah daerah telah ditindaklanjuti dengan pembentukan Sekretariat Bersama (SEKBER) serta Regionalisasi guna untuk memaksimalkan ; 1) koordinasi satu atap dalam perencanaan, pemograman dan evaluasi, 2) pengelolaan data dan informasi, 3) memperkuat hubungan antar stakeholder, 4) peningkatan akuntabilitas, transparansi dan partisipasi di semua kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.

d. Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Kegiatan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pada tahun 2005 dan 2006 telah ditindaklanjuti dengan pertemuan antara Tim Pemantauan dan Pengendalian Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD dan Nias Bappenas, Badan Pelaksana, Sekretariat Dewan Pengarah, Pemerintah Daerah dan Instansi terkait lainnya guna menjamin dan menciptakan: (a) koordinasi antar pelaku pembangunan, (b) integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan, (c) keterkaitan dan konsistensi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, serta (d) penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

e. Integrasi Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD dan Nias ke dalam Program Pembangunan Pemerintah Daerah

- i. Badan Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi untuk melakukan sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan dengan pemerintah daerah, khususnya dengan Bappeda sebagai penanggung jawab dalam perumusan dan perancangan perencanaan pembangunan daerah. Hal ini telah ditindaklanjuti oleh Badan Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi dan Bappeda dan sudah dibentuk satker perencanaan yang berkedudukan di Bappeda Prov Nad.
- ii. Khusus pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di Kepulauan Nias, Sumatera Utara, Badan Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi perwakilan Nias dan Pemerintah Daerah Sumatera Utara telah menindaklanjuti dengan pembentukan Sekretariat Bersama.

f. Penyempurnaan Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD dan Nias

- i. Badan Pemeriksa Keuangan telah merekomendasikan revisi Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekomendasi NAD dan Nias terhadap kegiatan atau program sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat Aceh-Nias pada saat sekarang, termasuk dalam merumuskan besaran kegiatan dan besaran anggaran sesuai realita pelaksanaan. Hanya saja perlu dirumuskan mekanisme dan prosedur dalam proses perubahan Rencana Induk, sehingga perubahan tersebut dapat mendorong percepatan proses pemulihan di daerah bencana;
- ii. Rencana Aksi yang disusun oleh Bappeda-Bappeda Kabupaten/Kota seluruh NAD pada tahun 2005 perlu dievaluasi bersama, dikoordinasikan dan disesuaikan dengan Rencana Induk serta Rencana Strategis BRR, sehingga dapat menjadi pedoman Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi sesuai kewenangan Pemerintah Daerah tahun 2007. Untuk itu perlu kejelasan status legal dokumen perencanaannya;
- iii. Perlunya fleksibilitas dalam Rencana Induk dengan tidak melihat batas-batas wilayah namun tetap mengutamakan pembangunan kembali daerah yang terkena bencana;
- iv. Menindaklanjuti keinginan Pemerintah Daerah Sumatera Utara untuk melakukan penyusunan kembali Rencana Induk untuk Kepulauan Nias dan kesepakatan tripartite internal BRR. Bappenas bersama-sama Pemerintah Daerah Sumatera Utara dan

Kepulauan Nias serta Badan Pelaksana Perwakilan Nias telah melakukan penyusunan Rencana Aksi Kepulauan Nias pasca bencana gempa tanggal 28 Maret 2005.

- v. Pasca penyusunan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi untuk Kepulauan Nias dan pelaksanaan kegiatan Evaluasi Paruh Waktu pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi NAD dan Nias oleh Badan Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Maka akan dilanjutkan penyusunan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat NAD.

g. Pelimpahan Kewenangan Pasca Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD dan Nias (Exit Strategy)

- i. Melibatkan secara aktif Pemerintah Daerah dan perangkat Kementerian/Lembaga dalam penyusunan perencanaan dan proses pelaksanaan di lapangan;
- ii. Mendorong Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan dan SDM dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian kegiatan;
- iii. Mengidentifikasi dan mempersiapkan kegiatan fisik dan non fisik dalam arti pelimpahan aset kepada Pemerintah Daerah;
- iv. Memberikan peran aktif kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat di setiap kegiatan bidang pemulihan dalam peran dan kontribusi tertentu yang menjadi tanggungjawab dan kewenangannya, dalam keseluruhan skenario integrasi dan keutuhan pelaksanaan program dan kegiatan, dan bukan sebagai pelengkap dan penyelesaian masalah bila ada kendala saja.

II.1.1.2. Bidang Politik, Hukum dan Keamanan

Pada bidang politik, hukum dan keamanan, permasalahan yang mendapat perhatian oleh Dewan Pengarah adalah keikutsertaan Mantan GAM pada BRR NAD dan Nias; penyelenggaraan Pemerintahan di Aceh; penyelesaian Masalah Hukum; serta Keamanan dan Ketertiban. Sesuai dengan hasil evaluasi, sebagian besar dari rekomendasi atas permasalahan yang disampaikan, pada umumnya telah dilaksanakan oleh lembaga terkait, terutama dalam hal ini oleh Badan Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Beberapa rekomendasi yang berimplikasi langsung dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi NAD dan Nias diantaranya :

1. Pemerintah telah melakukan revisi Perpres Nomor 34 Tahun 2005 dengan menerbitkan Perpres 76 Tahun 2006 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja serta Hak Keuangan BRR NAD dan Nias. Untuk selanjutnya telah diterbitkan pula Keppres 86/M dengan menempatkan beberapa staff/pegawai baru di Badan Pelaksana yang memiliki latar belakang sebagai mantan GAM;
2. Telah dilakukan upaya bersama untuk memperjelas posisi dan keberadaan Badan Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam kegiatan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi, hubungannya dengan penerapan keadaan Tertib Sipil dan kelanjutan Operasi Terpadu di Provinsi NAD;
3. Pemerintah telah menerbitkan pengaturan perundangan dalam penanganan lembaga/orang asing melalui Perpres Nomor 69 Tahun 2005 tentang Peran Serta Lembaga/Perorangan Asing Dalam Rangka Hibah Untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi NAD dan Kepulauan Nias, Provinsi Sumut;
4. Pemerintah telah berkomitmen untuk mempercepat penyelesaian peraturan perundangan yang tersisa, yang terkait dengan kelancaran pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di NAD dan Nias, status perpu penyelesaian masalah hukum kini berada di meja menteri hukham untuk selanjutnya akan disampaikan kepada Sekretaris Negara;
5. Telah dilakukan upaya untuk meningkatkan efektifitas mekanisme koordinasi antara Badan Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi dan pihak TNI & Polri dalam

pelaksanaan pengamanan pembangunan rehabilitasi dan rekonstruksi, terutama proyek-proyek yang dianggap vital dan strategis.

II.1.1.3. Bidang Perekonomian

Untuk bidang perekonomian, masalah yang dirasakan cukup menonjol dan strategis terkait dengan upaya pemulihan ekonomi di NAD dan Nias antara lain: (i) belum optimalnya fasilitasi dalam proses revisi qanun RTRW, sehingga berdampak pada kelancaran pembangunan perumahan untuk para pengungsi, serta pembangunan sarana dan prasarana lainnya; (ii) belum terbitnya Perpu Bidang Hukum yang antara lain mengatur pertanahan, keperdataan dan perbankan, yang mengakibatkan terhambatnya penyelesaian pembangunan perumahan dan menghambat upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat NAD dan Nias secara keseluruhan. Untuk itu, diperlukan percepatan pelaksanaan revisi qanun RTRW Provinsi dan Kabupaten/Kota serta penerbitan Perpu penyelesaian masalah hukum.

Beberapa rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi NAD dan Nias pada tahun 2005-2006 diantaranya :

1. Badan Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi telah menyelesaikan kegiatan perencanaan spasial mikro yang bersumber dari pendanaan off budget dan non budget di Provinsi NAD dengan realisasi sampai dengan November 2006 adalah sebagai berikut : (a) Village Mapping (kebutuhan 962 dengan realisasi 373), (b) Village Planning (kebutuhan 962 dengan realisasi 404), (c) DED (kebutuhan 962 dengan realisasi 110);
2. Badan Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam mempercepat penyelesaian masalah pertanahan selain melaksanakan melalui village planning juga menindaklanjutinya dengan Program RALAS (Rehabilitation of Aceh Land Administration Systems) dengan dukungan pembiayaan MDF;
3. Badan Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi telah memprioritaskan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan dan permukiman dengan mengeluarkan beberapa kebijakan penunjang diantaranya : (a) Kebijakan tentang Rekonstruksi (BPRB), (b) Kebijakan tentang Rehabilitasi (BPR), (c) Kebijakan tentang Relokasi (BPPK), (d) Kebijakan tentang Bantuan bagi Mereka yang tidak memiliki tanah dan rumah (BSBT), (e) Standar Kelayakan Bangunan, peningkatan kapasitas kelembagaan pelaksana kegiatan.

II.1.1.4. Bidang Kesejahteraan Rakyat

Pada bidang kesejahteraan rakyat, Dewan Pengarah memberikan perhatian terhadap beberapa permasalahan, diantaranya : agama, sosial dan budaya; pengungsi; kependudukan; bantuan kemanusiaan; kesehatan; dan pendidikan. Berbagai permasalahan tersebut telah mendapat perhatian khusus oleh Badan Pelaksana maupun Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pada tahun 2005-2006 dan terus dimantapkan pada tahun 2007-2009 dengan program pengembangan sosial, agama dan kebudayaan serta peningkatan kapasitas kelembagaan sebagaimana pola dan skenario rehabilitasi dan rekonstruksi NAD-Nias tahun 2005-2009 yang telah ditentukan oleh Badan Pelaksana BRR NAD-Nias.

II.1.2. Dewan Pengawas BRR

II.1.2.1. Dasar Hukum Pembentukan Dewan Pengawas

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2005 yang selanjutnya menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005, kedudukan Dewan Pengawas (Wanwas) BRR sesuai Pasal 1 (6) bahwa Dewan Pengawas Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RR) adalah kelengkapan organisasi fungsional yang

bertanggungjawab untuk memastikan bahwa kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi telah berjalan secara efisien dan efektif serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Wilayah Pascabencana. Pada Pasal 13 dijelaskan bahwa Dewan Pengawas BRR mempunyai tugas: (1) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan proses rehabilitasi dan rekonstruksi, (2) Menerima, menelaah dan menindaklanjuti pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat. Selanjutnya wewenang Dewan Pengawas adalah: (1) Menunjuk dan menggunakan jasa profesional auditor independen atau tenaga ahli, (2) Meminta penjelasan Badan Pelaksana dan pihak lain yang terkait dengan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi, (3) Memberikan rekomendasi hasil pengawasan dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi kepada presiden.

Dalam menjalankan tugas diatas, sesuai Pasal 12 (1) Dewan Pengawas beranggotakan 9 (sembilan) orang terdiri atas (a) seorang ketua merangkap anggota (b) seorang Sekretaris merangkap anggota; dan (c) 7 (tujuh) orang anggota. Selanjutnya pada Pasal 12 (2) Anggota Dewan Pengawas terdiri dari tokoh masyarakat yang memiliki pemahaman yang memadai dalam bidang pengawasan. Pasal 12 (3) Ketua, sekretaris dan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Presiden. Pasal 12 (4) Dalam rangka membantu kelancaran pelaksanaan tugas, Dewan Pengawas dapat membentuk Sekretariat. Berdasarkan SK Ketua Dewan Pengawas Nomor KEP 01/Ket/6/2005 dibentuk sekretariat Dewan Pengawas dengan kantor di Banda Aceh dan Jakarta dengan wilayah kerja Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias. Sekretariat Dewan Pengawas terdiri dari para Tenaga Ahli, Tenaga Teknis dan Tenaga Administrasi. Sekretariat Dewan Pengawas dipimpin oleh Sekretaris Dewan Pengawas, sedangkan Pelaksana Harian Sekretariat Dewan Pengawas adalah Kepala Sekretariat.

II.1.2.2. Mekanisme Kerja Dewan Pengawas

Sesuai dengan perannya, Dewan Pengawas BRR melakukan monitoring dan evaluasi (monev) ke seluruh wilayah Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan Kepulauan Nias. Karena keterbatasan personalia, maka dipandang perlu merekrut Tenaga Teknis (*outsourc*) untuk membantu Tenaga Ahli Dewan Pengawas. Kegiatan pengawasan mengikuti rangkakerja (*framework*) yang telah dikembangkan oleh Dewan Pengawas BRR seperti terlihat pada bagan II.2 dibawah, yaitu menganalisis *benefit* dan dampak, untuk itu perlu juga meneliti dan menganalisis *outcome*, *output*, proses dan input dalam setiap kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sesuai dengan perencanaan dengan mengacu pada rencana induk BRR. Pengawasan keuangan dan kinerja dilaksanakan oleh Anggota Dewan Pengawas bersama SPI (Satuan Pengawas Internal) dan SAK (Satuan Anti Korupsi) serta kedeputian Bapel terkait. Anggota Dewan Pengawas membentuk Tim Kecil Dewan Pengawas bersama auditor independent dimana setiap 2 minggu melakukan pembahasan yang berhubungan dengan keuangan dan standar akuntansi, kinerja, organisasi, manajemen dan personalia, temuan pengawasan internal, dan standar kerja.

Bagan II. 2 Mekanisme Pengawasan dan Pelaporan Dewan Pengawas BRR

Error! Objects cannot be created from editing field codes.

Sumber : Dewan Pengawas, 2007

II.1.2.3. Kegiatan Dewan Pengawas

Kegiatan Dewan Pengawas BRR dalam menjalankan tupoksi proses rehabilitasi dan rekonstruksi BRR sejak Mei 2005 sampai dengan Mei 2007 terdiri dari (i) kegiatan rapat Dewan Pengawas, (ii) melakukan pengawasan lapangan (iii) menerima pengaduan dan melakukan publikasi dan (iv) membuat laporan hasil pengawasan.

II.1.2.4. Temuan Hasil Pengawasan Benefit dan Dampak

Beberapa temuan Wanwas dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi periode Mei 2005 sampai dengan Mei 2007 adalah sebagai berikut:

BIDANG PEMULIHAN PERUMAHAN, PERMUKIMAN, TATA RUANG, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

- Perencanaan dan pembangunan perumahan dan lingkungan kurang baik, rumah tidak siap huni, terlambat penyerahan karena tidak langsung diikuti dengan pembangunan prasarana sarana dasar (watsan, jalan, listrik).
- Masih didapati pembangunan rumah dengan kualitas yang rendah (contoh: perumahan di Kec. Johan Pahlawan).
- Data benefecieries tidak valid. Kuantitas rumah tidak sesuai dengan jumlah benefecieries.
- Pembangunan rumah belum terpadu dengan tata ruang dan permukiman.

BIDANG PEMULIHAN INFRASTRUKTUR

- Overlapping proyek antara satker dengan satker atau dinas terkait lainnya.
 - Rendahnya mutu bangunan karena pelaksanaan tender dan konstruksi terlambat.
 - Konsultan Pengawas, Perencana dan Kontraktor yang tidak menjalankan fungsi dengan baik.
 - Masalah PLTS, kualitas listrik dan air bersih, database pelaksanaan program/kegiatan BRR belum siap pakai dan belum akurat, TVRI meureudeu belum on-air, Masalah ICT/Database Tenaga Kerja belum fungsional.
 - Kurang koordinasi antar instansi dan perencanaan yang belum sempurna dan tidak memperhatikan kondisi daerah.
 - Peran Regional tidak Optimal dan staf regional kurang mengetahui proyek yang dikerjakan pusat/BRR Banda Aceh (contoh: Regional III).

BIDANG PEMULIHAN PEREKONOMIAN

- Lemahnya pembinaan LKM oleh AMF disebabkan karena AMF belum dapat berfungsi secara optimal.
- Program-program pelatihan *Satker Life Skill* dan *Satker Tenaga Kerja* tidak disertai dengan pemberian modal usaha.
- Lemahnya perencanaan dan *need assessment* di bidang pertanian.
- Pencetakan sawah tidak tuntas, sehingga petani belum dapat memanfaatkannya.
- Kambing BLM yang didistribusikan ke peternak di seluruh Aceh banyak yang mati.
- Program di bidang perikanan ada yang belum memperhatikan wilayah dampak tsunami dan masih ada tambak yang belum direhab.

BIDANG PEMULIHAN SOSIAL KEMASYARAKATAN

- Program di Bidang Pendidikan, Kesehatan, Agama dan Budaya masih didominasi pada pembangunan fisik.

- Beberapa program di bidang pendidikan yang menjadi perhatian adalah lemahnya konsep softprogram, belum tersentuhnya program untuk pendidikan anak usia dini (PAUD), lemahnya koordinasi baik dengan pihak sekolah maupun dengan Dinas.
- Pihak sekolah tidak dilibatkan dalam kegiatan rehab dan rekon sehingga pengawasan internal terhadap kualitas bangunan tidak dapat terlaksana secara optimal.
- Program dihomogenkan untuk seluruh kabupaten disebabkan karena lemahnya *need assesment* dan penentuan bantuan yang cenderung bersifat *top down*.
- Lemahnya perencanaan menyebabkan perencanaan fisik tidak terpadu.
- Bangunan RKB, RPL dan UGB banyak yang belum fungsional, karena belum tersedia prasarana dan sarana penunjang lainnya untuk Proses Belajar Mengajar (PBM).
- Program Sekolah Alam belum memiliki konsep yang kuat dan tidak fokus terutama pada penentuan sasaran pada anak usia 3-18 tahun sebaiknya difokuskan untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Lemahnya pelaksanaan softprogram di bidang kesehatan sehingga tidak sinergi dengan program fisik sehingga dikhawatirkan tidak dapat meningkatkan mutu pelayanan kesehatan.
- Pembangunan fisik puskesmas tidak dibarengi dengan perencanaan prasarana dan sarana dasar, meubelair, sarana air dan kamar mandi sehingga belum dapat difungsikan secara optimal.
- Penentuan Program beasiswa untuk Tenaga Kesehatan yang dikelola oleh Komite, cenderung topdown sehingga program pendidikan yang dipilih ada yang tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
- Bidang Peran Perempuan belum menyentuh pada program peningkatan peran perempuan secara menyeluruh namun masih bersifat stimulan dan sporadis (tidak berkelanjutan), Bale Ureng Inong belum memberi manfaat yang nyata.
- Di bidang Agama dan Budaya perlu diperhatikan adalah masalah pendangkalan akidah dan tidak tersedia data lengkap yang akurat dan menyeluruh.
- Program di bidang agama kurang menyentuh dan belum memberikan impact yang signifikan kepada masyarakat.
- Pengadaan buku untuk PDIA, anggaran 2006 sudah dibayar 100% tetapi pekerjaan baru 40%.
- Rehab dan rekon cagar budaya anggaran tahun 2006 banyak yang ditinggalkan oleh kontraktor dan tidak ada koordinasi dengan Dinas Kebudayaan.

BIDANG PEMULIHAN KELEMBAGAAN DAN HUKUM

- Pembangunan fisik yang sudah selesai 100% banyak yang belum diserahterimakan kepada pihak beneficiaries.
- Regional V: struktur organisasi hingga awal Mei 2007 belum sepenuhnya terisi. Lembaga Sekretariat Bersama tidak berfungsi maksimal, Koordinasi antara BRR NAD-Nias Pusat dengan BRR NAD-Nias Kantor Regional V masih lemah.
- Kantor Regional IV: Satker Kelembagaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia belum dapat merealisasikan pembayaran kepada rekanan atas paket-paket pekerjaan fisik yang dilaksanakan tahun 2006.
- Pembangunan Gedung Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri Singkil sangat terlambat, sehingga berkantor di gedung darurat.
- Kesadaran hukum masyarakat rata-rata masih lemah, pengdokumentasian dalam bentuk digital dan mudah diakses terhadap seluruh produk hukum daerah belum ada.
- Pemahaman aparat pemerintah daerah dan masyarakat terhadap HAM masih lemah, perhatian terhadap kelompok cacat masih kurang,
- Design interior institusi peradilan (negeri dan syariah) belum sesuai dengan fungsinya,
- Ada Lembaga Sekretariat Bersama tidak berfungsi maksimal.
- Komunikasi masih belum efektif, mekanisme komunikasi dan tindak lanjut pengaduan masyarakat masih lemah.

Menjawab hasil temuan Wanwas diatas maka Rekomendasi:

1. Prioritas utama bidang perumahan adalah pembangunan prasarana dan sarana dasar permukiman, *upgrading* pada rumah-rumah yang belum layak huni, memastikan calon pemilik (khususnya mereka yang masih tinggal di barak) terhadap rumah-rumah yang belum dihuni dan kesesuaian jumlah.
2. Bidang infrastruktur perlu dipastikan adanya DED (Detail Engineering Design) yang baik yang didasarkan pada SID (survey investigation and design) dalam pembangunan gedung, sarana transportasi dan bangunan sumber air.
3. Perlu pembinaan LKM dan AMF yang sungguh-sungguh agar programnya dapat berkelanjutan. Tidak perlu lagi adanya pembentukan lembaga serupa lainnya seperti Koperasi Terpadu dan sejenisnya. Program pelatihan lifeskill dan tenaga kerja seyogianya dipadukan dengan LKM atau program lain dalam pemberdayaan ekonomi.
4. Rehabilitasi tambak di wilayah bencana tsunami harus mendapat prioritas.
5. Perlu alokasi anggaran yang cukup untuk bidang pendidikan dan kesehatan khususnya untuk kegiatan non-fisik yang dapat mendorong peningkatan mutu pendidikan dan kesehatan melalui Program Penguatan Kurikulum, PAUD, sekolah kejuruan, Program Penguatan Manajemen, Program Penguatan Kapasitas SDM sampai Perguruan Tinggi dan Penguatan Sistem Rekam Medik unit-unit pelayanan kesehatan.
6. Perlu alokasi anggaran yang cukup untuk pembangunan prasarana dan sarana dasar unit pelayanan kesehatan agar pembangunan fisik yang telah dibangun dapat difungsikan secara optimal.
7. Pengembangan bidang Agama di Prov. NAD harus menjadi prioritas dalam upaya percepatan pelaksanaan Syari'at Islam sebagaimana yang telah diatur dalam qanun-qanun dan merumuskan qanun-qanun lainnya yang diperlukan. Perlu koordinasi secara intensif oleh BRR dengan lembaga-lembaga terkait dalam menyusun dan mengembangkan program.
8. Harus dipastikan adanya persepsi yang sama antara BRR dan Pemda NAD-Nias tentang mekanisme serah terima aset, serah terima aset tidak harus menunggu tahun 2009.
9. Perlu peningkatan anggaran untuk program peningkatan pengetahuan dan keahlian aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus, perlu peningkatan anggaran untuk program Rencana Aksi Nasional HAM daerah NAD dan perlu program digitalisasi produk hukum daerah.
10. Perlu memaksimalkan fungsi kantor regional dan keseragaman laporan kegiatan semua kantor regional.
11. Perlu program peningkatan kapasitas pemda kabupaten/kota untuk mendukung proses exit strategy.

II.1.2.5. Implikasi Hasil Pengawasan

1. Implikasi terhadap Kebijakan/Program: hasil pengawasan dapat memastikan apakah program tersebut dibutuhkan atau tidak.
2. Implikasi terhadap pelaksanaan/implementasi kegiatan:
 - a. Memastikan bahwa mekanisme pelaksanaan kegiatan tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan.
 - b. Teridentifikasi kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat segera diusulkan perbaikan.

Contoh kasus implikasi positif hasil pengawasan Dewan Pengawas BRR

- Atas desakan Ketua Dewan Pengawas maka Ketua Bapel telah mengeluarkan SK No. 23/Kep/BP-BRR/II/2006, tanggal 22 Februari 2006 tentang Tim Pembinaan dan Pengawasan Pendangkalan Aqidah (P3A), walaupun kemudian Bapel tidak melakukan pembinaan selanjutnya terhadap temuan tim ini.

- Temuan Wanwas tentang beberapa LKM sebagai penyalur bantuan modal usaha yang memiliki kinerja sangat lemah, rendahnya tingkat transparansi dan akuntabilitas serta kompleksitas masalah di tubuh AMF. Atas masukan Dewan Pengawas, Bapel telah melakukan tindak lanjut dengan mengirimkan manajer pendamping kepada LKM, melaksanakan pelatihan-pelatihan bagi manajer LKM, melaksanakan program Transparansi LKM dan Penegakan Hukum pada tahun 2007, pembentukan Tim Teknis Penguatan AMF Center yang terdiri dari Bapel, Dinas Koperasi dan Dewan Pengawas dalam rangka pembenahan AMF center.
- Temuan Wanwas tentang tingginya kadar asbes dalam material rumah di Desa Deah Raya, dimana Dewan Pengawas merekomendasikan material tersebut diganti/dilapisi dengan material yang lebih aman bagi kesehatan. Tindak lanjut atas rekomendasi tersebut oleh Bapel masih dalam proses.
- Temuan Wanwas tentang cetak sawah di Aceh Besar yang tidak selesai dikerjakan oleh kontraktor, ditindaklanjuti oleh Bapel dalam bentuk penuntasan pencetakan sawah dimaksud.
- Temuan Wanwas tentang mutu bangunan UGB MAN Sakti Pidie yang rendah. Atas rekomendasi Wanwas, Satuan Anti Korupsi (SAK) telah melakukan investigasi dan berhasil menemukan kerugian negara dalam proyek tersebut.
- Temuan Wanwas terhadap pembangunan 1 unit RKB SMPN Susoh yang miring, Wanwas merekomendasikan agar RKB tersebut dibongkar. Dalam hal ini, Deputi terkait telah meminta regional IV agar mengalokasikan anggaran untuk perbaikan RKB tersebut.

II.1.3. Badan Pelaksana BRR

Dalam rangka mengemban tugas dan tanggung jawab untuk melakukan percepatan dalam rangka pemulihan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah bencana NAD dan Nias, Badan Pelaksana BRR telah melakukan beragam program dan proyek yang terkait dengan sektor-sektor kehidupan masyarakat dan wilayah bencana. Terdapat beberapa jenis sumber pembiayaan yang menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi NAD dan Nias, diantaranya sumber pembiayaan yang bersumber dari pembiayaan pemerintah (*on budget*) maupun oleh donor/NGO (*off budget*). Pembiayaan dari *on-budget* adalah pembiayaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi melalui pendanaan yang alokasi penggunaan dananya tercatat dalam Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA). Dana *on-budget* ini kita kenal dengan dana APBN. Pembiayaan rehabilitasi dan rekonstruksi Provinsi NAD-Nias akan dijelaskan pada tabel II.6 dibawah ini.

Tabel II. 1
Realisasi Anggaran BRR On Budget 2005-2006

NO	BIDANG/SUB BIDANG	JUMLAH (Rupiah)
		On Budget 2005-2006
I	Perumahan dan Pemukiman	3,703,250,340,446
1	Perumahan	2,819,336,906,609
2	Tata ruang, PSD dan pertanahan	883,913,433,837
II	Infrastruktur	2,355,190,563,475
1	Perhubungan, Telekomunikasi, POS/ASDP	472,604,860,283
2	Jalan & Jembatan/UASR	800,032,250,603
3	Air Bersih, Sanitasi dan Persampahan	152,416,292,911
4	Energy & Listrik	301,503,644,911
5	Irigasi	216,402,840,005
6	Pengendalian Banjir & Pengaman Pantai	412,230,674,762
III	Ekonomi dan Usaha	968,498,929,140
1	Pertanian Tanaman Pangan, Peternakan, Perkebunan	299,152,067,325
2	Kelautan dan Perikanan	320,026,127,544
3	Kehutanan	32,237,729,098
4	Pengembangan Usaha	45,300,677,097
5	Industri	46,924,747,072

6	Perdagangan, Pariwisata, Investasi	24,928,925,779
7	Koperasi dan UKM	161,413,021,549
8	Tenaga Kerja	38,515,633,676
IV	Pendidikan, Kesehatan dan Peran Perempuan	1,042,727,115,236
1	Pendidikan	400,157,959,445
2	Kesehatan	600,491,793,294
3	Peran perempuan dan anak	42,077,362,497
V	Kelembagaan dan SDM	965,907,990,203
1	Kelembagaan dan Pemerintahan	275,953,171,058
2	Kelembagaan Hukum dan Keamanan	278,726,875,934
3	Yudikatif, Legislatif, Matra-matra	411,227,943,211
VI	Sosial, Agama dan Budaya	757,660,076,317
1	Sosial & Kependudukan	124,059,418,761
2	Agama	559,234,947,433
3	Budaya	74,365,710,123
-	Perencanaan	223,116,492,278
-	Sekretariat, Komunikasi dan Informasi (administrasi)	419,750,280,116
	TOTAL	10,436,101,787,211

* Sumber : BRR NAD-Nias 2006-2007

Sedangkan pembiayaan yang bersumber dari *off budget* berasal dari perolehan lainnya yang bersumber dari masyarakat, lembaga donor dan dunia usaha yang bermaksud membantu pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias, Provinsi Sumatera Utara dengan cara langsung melaksanakan suatu kegiatan tertentu tanpa melalui APBN dan untuk selanjutnya diterima oleh Badan Pelaksana BRR NAD-Nias sebagai wakil dari Pemerintah Indonesia. Pembiayaan *off-budget* terdapat di beberapa sektor dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias pasca gempa dan tsunami, diantaranya pada sektor infrastruktur (jalan dan transportasi, energi dan telekomunikasi, infrastruktur sumber daya air), sektor perumahan dan pemukiman (perumahan, air minum dan sanitasi), sektor kelembagaan & pengembangan manusia (pemerintahan, pendidikan, kesehatan, kebudayaan), sektor pengembangan ekonomi dan administrasi.

Realisasi kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dengan sumber pembiayaan dari Off-Budget tahun 2005-2006 adalah sebesar Rp. 14, 8 trilyun atau sebesar 44.5 % dari total nilai komitmen Lembaga Donor dan NGO. Rincian realisasi dana off-budget tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini ;

Tabel II. 2
Realisasi Anggaran BRR Non APBN (Off Budget) 2005-2006

NO	BIDANG/SUB BIDANG	JUMLAH (Rupiah) Off Budget 2005-2006
I	Perumahan dan Pemukiman	3,934,718,495,600
1	Perumahan	3,678,832,106,000
2	Tata ruang, PSD dan pertanahan	255,886,389,600
II	Infrastruktur	2,156,761,520,000
1	Perhubungan, Telekomunikasi, POS/ASDP	
2	Jalan & Jembatan/UASR	806,758,515,600
3	Air Bersih, Sanitasi dan Persampahan	1,337,171,525,200
4	Energy & Listrik	5,807,785,200
5	Irigasi	7,023,694,000
6	Pengendalian Banjir & Pengaman Pantai	-
III	Ekonomi dan Usaha	1,823,313,601,200
1	Pertanian Tanaman Pangan, Peternakan, Perkebunan	595,426,741,600
2	Kelautan dan Perikanan	173,655,110,600
3	Kehutanan	86,827,555,300
4	Pengembangan Usaha	587,992,534,400

5	Industri	61,024,970,800
6	Perdagangan, Pariwisata, Investasi	6,860,541,200
7	Koperasi dan UKM	86,827,555,300
8	Tenaga Kerja	224,698,592,000
IV	Pendidikan, Kesehatan dan Peran Perempuan	4,231,846,507,200
1	Pendidikan	1,783,247,297,600
2	Kesehatan	2,182,454,314,000
3	Peran perempuan dan anak	266,144,895,600
V	Kelembagaan dan SDM	1,334,018,501,200
1	Kelembagaan dan Pemerintahan	1,013,317,274,400
2	Kelembagaan Hukum dan Keamanan	275,413,960,000
3	Yudikatif, Legislatif, Matra-matra	45,287,266,800
VI	Sosial, Agama dan Budaya	373,258,306,000
1	Sosial & Kependudukan	64,845,767,600
2	Agama	70,127,920,000
3	Budaya	238,284,618,400
-	Perencanaan	21,123,089,600
-	Sekretariat, Komunikasi dan Informasi (administrasi)	962,172,542,400
TOTAL		14,837,212,563,200

* Sumber : BRR NAD-Nias 2006-2007

II.1.3.1. Bidang Pemulihan Perumahan, Permukiman, Tata Ruang, Pertanian dan Lingkungan Hidup

Realisasi pembangunan perumahan tidak hanya terdiri dari program pembangunan rumah baru dan perbaikan rumah (rehabilitasi). Dalam perkembangannya, kemudian dikenal program Bantuan Sosial Bertempat Tinggal (BSBT/*renters*) dan Program '*upgrading*'. Bagian utama selain perumahan adalah Permukiman (gamping). Pembangunan permukiman ini mencakup kegiatan pembangunan prasarana dasar permukiman berupa jalan pemukiman, drainase lingkungan, penyediaan air bersih, pengelolaan limbah rumah tangga dan drainase lingkungan, listrik serta adanya dukungan ketersediaan fasilitas umum lainnya. Selain itu juga arahan perencanaan yang lebih luas untuk mewadahi permukiman tersebut, yaitu Tata Ruang serta Pertanian.

Berdasarkan penjelasan di atas, pembahasan sub bab ini terbagi atas 5 bagian utama, yaitu Perumahan, Pendekatan Pelaksanaan Sistem Informasi dan Sasaran Penerima Manfaat (*Beneficiaries*), Tata Ruang, Prasarana Dasar Permukiman, Pertanian.

II.1.3.1.1 Perumahan dan Permukiman

Sumber biaya pembangunan perumahan terdiri dari sumber pembiayaan *off-budget*, yaitu sumbangan Internasional melalui lembaga donor ataupun LSM (NGO), serta sisanya bersumber dari APBN (*on budget*).

Tabel II. 3
Realisasi dan Program Perumahan

NO	PERUMAHAN	Rencana Induk	Realisasi 05 – 06 *)		REALISASI (2005-06)	CAPAIAN (%)
			APBN (On Budget)	Non APBN (Off Budget)		
1	NAD	196.975	23.453	58.315	81.768	
	a.Rehabilitasi	119.072	8.459	4.213	12.672	10,64
	b.Rekonstruksi	77.903	14.994	54.102	69.096	88,69
2	Nias	49.021	8.327	3.518	11.845	
	a.Rehabilitasi	36.766	0	720	720	1,96
	b.Rekonstruksi	12.255	8.327	2.798	11.125	90,78
	a.Rehabilitasi NAD - Nias	155.838	8.459	4.933	13.392	6,25
	b.Rekonstruksi NAD - Nias	90.158	23.321	56.900	80.221	88,98
JUMLAH NAD - Nias		245.996	31.780	61.833	93.613	

*) Data Realisasi ; Data On Budget (Kedeputan Bidang Perumahan dan Permukiman), Off Budget (Pusdatin)

Menurut Data Survey lapangan yang dilakukan pada akhir November 2006 (Report Artistika, Desember 2006), hanya 44.520 rumah yang sudah ditempati (tingkat kerincian data ini adalah per Kabupaten). Apabila disandingkan dengan jumlah rumah yang dibangun pada waktu yang sama, maka tingkat hunian hanya sekitar 77,93%.

Sedangkan realisasi penyediaan prasarana dasar permukiman terdiri dari 5 kegiatan utama, yaitu Pembangunan Baru PSD, Perbaikan PSD, Penyusunan DED kawasan/ desa, Penyusunan Rencana Detail Induk Sistem PSD (RIS PSD), serta pembangunan PSD berbasis kecamatan. Namun, karena perbandingannya adalah dengan Rencana induk, maka keseluruhannya dikaji sebagai satu kegiatan saja.

Tabel II. 4
Realisasi dan Program Permukiman

NO	KEGIATAN PEMBANGUNAN	SAT	RENC. NDUK	REALISASI TAHUN 2005-2006				PROG 2007	2005-2007	
				APBN	NON APBN	TOTAL	CAPAIAN		TOTAL	CAPAIAN
1	Prasarana dan Sarana Dasar (PSD)	pkt	420	63	151	173	41%	277	368	85%

Sumber: Artistika dan RAND (Desember 2006)

Dari total 173 PSD terbangun, 37 Unit diantaranya di Nias Sumatera Utara. Sedangkan rincian pembangunan PSD oleh Donor dan NGO (*off Budget*) adalah di Aceh Barat (22 unit), Aceh Besar (16 unit) dan Pidie (20 unit), daerah lain jumlahnya sangat kecil.

II.1.3.1.1 Non APBN (Donor dan NGO)

Komposisi pembangunan rumah oleh Donor dan NGO atau Non APBN berdasarkan realisasi 2005-2006 adalah sekitar 64% dari total rumah yang telah terbangun di Propinsi NAD dan Pulau Nias. Sedangkan, jumlah total rumah yang dibangun dengan dana Non APBN ini adalah 67.873 unit rumah, termasuk jumlah ini adalah sekitar 56% dari total skomitmen yang tercatat dari Data Pusdatin Maret 2007, yaitu 109.433 unit rumah. Rumah yang dibangun melalui pembiayaan donor dan NGO, mulai awal 2005 sampai dengan akhir Mei 2007 adalah sebanyak 66.110 unit atau sekitar 85% dari total rumah yang telah selesai dibangun, yaitu 78.178 unit.

Rencana pembagian tugas antara BRR dan Lembaga Donor/NGO dalam pembangunan rumah dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel II. 5
Pembagian Tugas BRR dengan NGO/Donor di Bidang Perumahan

JENIS PEMBANGUNAN RUMAH	PEMBAGIAN TUGAS (%)	
	DONOR/NGO	BRR
Rumah Baru Rekonstruksi	70	30
Rumah Baru Relokasi/Resettlement	60	40
Rehabilitasi	80	20
Renters	10	90
PSD	80	20
Upgrading	95	5

Sumber: Deputi Perumahan Mei 2007

II.1.3.1.2 APBN (BRR)

Komposisi pembangunan rumah berdasarkan realisasi 2005-2006 oleh BRR melalui dana APBN adalah sekitar 36% dari total jumlah rumah terbangun. Tujuan akhir pembangunan perumahan dan permukiman adalah agar rumah yang telah terbangun dapat dihuni dan memungkinkan peningkatan produktivitas penghuninya. Kelemahan pembangunan rumah

oleh BRR selama ini adalah minimnya ketersediaan data rumah yang dihuni sebagai bagian pemantauan yang penting.

II.1.3.1.2 Tata Ruang

Dikaitkan dengan proses rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah propinsi NAD dan Nias kepulauan, maka diperlukan perencanaan tata ruang, yang bersifat makro yaitu tata ruang wilayah propinsi dan kabupaten/kota ataupun tata ruang meso (kecamatan) dan tata ruang mikro atau detail tata ruang pada tingkat dusun/kampung (gampong), atau lebih dikenal sebutan 'Village Planning'. Dari 730 desa yang rusak berat dan sedang, 487 Village Plan telah selesai dibuat; 98 dari APBN dan 389 dari Off Budget. Pada tahun 2007, akan diselesaikan sebanyak 108 Village Plan, sisanya diharapkan akan ditangani oleh Lembaga Donor/NGO.

Tabel II. 6
Realisasi dan Program Tata Ruang

NO	KEGIATAN PEMBANGUNAN	SAT	RENC. INDUK	REALISASI TAHUN 2005-2006				PROG 2007	2005-2007	
				APBN	NON APBN	TOTAL	CAPAIAN		TOTAL	CAPAIAN
1.	Penyusunan Rencana Tata Ruang									
a	Revisi RTRW Propinsi	Prov	1	1		1	100 %	-	1	100%
b	Penyusunan RTRW Kabupaten/ Kota	Kab./ Kota	13	13		13	100%	1	14	107%
c	RDTR Kota/ Kecamatan	Kota	-	13	7	13	%	7	20	*
d	RTBL/ RTR Kawasan	Kab./ Kota	1	5		5	%	4	9	900%
e	Rencana Desa (<i>village planning</i>)	Desa	-	94	392	486	%	56	542	*
2.	Penyusunan Pedoman:	Desa	-	5		5	%	-		*
a	Pemetaan Desa secara Partisipatif	Desa	--	1		1	%	-		*
b.	Perencanaan Desa	Desa	-	2		2	%	-		*
c.	Perencanaan Tata Ruang Kecamatan	Kec.	-	1		1	%	-		*
d.	Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Kec./ Kaw./ Kota/ Kab.	-	1		1	%	-		*
3.	Sosialisasi Kebijakan Penataan Ruang pada masyarakat	Kab./ Kota	-	-		-		11	11	*
4.	Koordinasi Pemerintah Pusat dan Daerah (integrasi program sektoral)							8		*
5.	Pemantapan Kelembagaan Penataan Ruang Daerah							14		*
6.	Studi	unit	-	2		2		-	2	

Sumber : Data Kedeputian Perumahan dan Permukiman, Mei 2007.

Keterangan: * : kegiatan ini tidak tercantum dalam Rencana Induk namun dilaksanakan untuk memenuhi tuntutan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

II.1.3.1.3 Pertanahan

Aspek pertanahan merupakan kegiatan (pemetaan dan administrasi pertanahan) yang menentukan dalam kelancaran dan keberhasilan rehabilitasi dan rekonstruksi bidang perumahan khususnya dan pembangunan NAD - Nias secara umum. Realisasi pencapaian kegiatan pemetaan dan administrasi pertanahan pada tahun anggaran 2005, dari target 50.000 bidang/persil adalah pengukuran bidang persil sebesar 52.944 persil (telah melampaui target). Namun untuk penerbitan sertifikat, baru mencapai 13.419 persil (27%). Tahun anggaran 2006, sedang dilaksanakan pekerjaan pengukuran dan adjudikasi, sampai dengan akhir Mei 2007 sebanyak 150.000 bidang/persil telah diajudikasi. Secara lebih terinci capaian dan administrasi pertanahan seperti pada tabel berikut.

Tabel II. 7
Realisasi dan Program Administrasi Pertanahan

NO	KEGIATAN PEMBANGUNAN	SAT	RENC. INDUK	REALISASI TAHUN 2005-2006				PROG 2007	2005-2007	
1	Penyiapan Lahan/ Pembebasan Lahan	ha	2.135	2.000	44	2.000	94%	50	2.050	96
2	Sertifikasi		400.000	14.586	27	200.000	50%	85.000	285.000	71

Sumber: Deputi Bidang Perumahan dan Permukiman BRR, 8 Juni 2007

Tabel II. 8
Rincian Realisasi Kegiatan Pertanahan tahun 2005-2006 dan Program 2007 per kabupaten

NO.	Kabupaten/Kota	RENCANA INDUK	TARGET	REALISASI 2005-2007**			
				SURVEY		AJUDIKASI	
				JUMLAH	PERSEN	JUMLAH	PERSEN
1	Banda Aceh	*	40.000	39.505	187	10.553	44
2	Aceh Besar	*	45.000	45.258	202	17.871	85
3	Aceh Jaya	*	20.000	20.973	105	14.949	75
4	Pidie	*	20.000	21.924	110	15.590	78
5	Bireuen	*	30.000	32.376	108	25.130	84
6	Lhokseumawe	*	5.000	5.163	103	3.573	71
7	Aceh Utara	*	10.000	10.546	105	8.573	86
8	Aceh Barat	*	25.000	26.417	106	15.898	64
9	Nagan raya	*	5.000	5.333	107	4.456	89
JUMLAH			200.000	207.495	126	116.593	75

* Sumber : Kedeputan Bidang Perumahan dan Permukiman/Direktorat Pemetaan dan Administrasi Pertanahan, BRR

* Rencana Induk tidak mencantumkan Sasaran Kuantitatif per bidang tanah

** Capaian Terhadap Target yang ditetapkan oleh Direktorat Pertanahan Kedeputan Perumahan Permukiman

Tabel II. 9
Rekapitulasi Realisasi Pengadaan Tanah Untuk Perumahan Per Kabupaten/ Kota

NO	KABUPATEN/ KOTA	TAHUN (M2)			KETERANGAN
		2005	2006	2007	
1	Banda Aceh	81.685	0	0	
2	Aceh Besar	1.036.965	139.365	349.000	Rencana pembelian
3	Aceh Jaya	0	191.725	227.653	Rencana Pembelian
4	Pidie	83.922	0	0	
5	Bireuen	106.765	0	0	
6	Lhokseumawe	50.995	0	0	
7	Aceh Utara	35.000	5.686	0	
8	Langsa	0	111.391	63.700	Rencana pembelian
9	Aceh Barat	841.949	4.200	0	
10	Simeulue	50.000	2.400	0	
11	Aceh Barat Daya	0	41.166	0	
12	Aceh Selatan	476.041	0	0	

13	Singkil	1.162.895	0	0
TOTAL		3.926.217	495.933	640.353

Sumber : Kedeputan Bidang Perumahan dan Permukiman/ Direktorat Pemetaan dan Administrasi Pertanahan, BRR, 2007

Tabel II. 10
Rekapitulasi Realisasi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum
(Non Perumahan) Per Kabupaten/ Kota

NO	KABUPATEN/ KOTA	TAHUN (M ²)		JUMLAH
		2006	2007	
1	2	3	4	5
1	Banda Aceh *)	609.619	300.000	909.619
2	Aceh Besar *)	88.751	100.000	188.751
3	Sabang	93.527	-	93.527
4	Aceh Jaya	408.635	-	408.635
5	Pidie	68.208	-	68.208
6	Bireuen	1.753	-	1.753
7	Aceh Utara	5.070	-	5.070
8	Aceh Tamiang	119.209	-	119.209
9	Langsa	8.859	-	8.859
10	Aceh Barat	52.122	-	52.122
11	Nagan Raya	390.000	-	390.000
12	Prov NAD *)	2.304.105	1350.000	3.654.105
	JUMLAH	4.149.858	1.750.000	5.899.858

Sumber : BRR NAD-Nias, 2007

II.1.3.1.4 Aspek-aspek Lain

Selain pokok-pokok bahasan realisasi yang menyangkut langsung pada kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi baik Perumahan maupun Permukiman (Tata Ruang dan Pertanahan) yang telah disebutkan di atas, terdapat aspek-aspek realisasi lain yang berpengaruh dan patut jadi pertimbangan dalam realisasi di paruh waktu ke dua masa kerja BRR. Aspek tersebut terdiri dari:

- ❖ Pendekatan Pelaksanaan Pembangunan Perumahan
- ❖ Sistem Informasi (dimanfaatkan dalam Sasaran Penerima Manfaat (*Beneficiaries*) dan Dukungan Logistik)
- ❖ Dukungan Logistik

II.1.3.2. Bidang Pemulihan Infrastruktur

Bidang Infrastruktur terdiri dari; Jalan dan Jembatan, Perhubungan (Udara, darat dan Laut), SAR, Pos dan Telematika, Sumber Daya Air (Irigasi, Pengamanan Pantai, Pengendalian Banjir), Energi dan Listrik, Air Bersih, Sanitasi dan Persampahan serta Pembinaan Bangunan Umum.

II.1.3.2.1 Jalan dan Transportasi

Rekapitulasi realisasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi jalan dan jembatan disajikan pada tabel berikut.

Tabel II. 11
Rekapitulasi Realisasi tahun 2005-2006 dan Program 2007
Sub bidang Jalan dan Jembatan

NO	KEGIATAN	SAT.	RI		REAL 05-06				PROG 07			05-07	
			RUAS	KM	ON B	OFF B	ON-OFF	% RI	ON	OFF	ON-OFF	VOL	% RI
1	Lintas Timur NAD	Km	4	39	-		-	-	3		3	3	8%
2	Lintas Barat -NAD	Km	7	282	132	152	284	101%	179	30	209	493	175%
3	Lintas Tengah-NAD	Km	8	72	11		11	15%	0		0	11	15%
4	Lintas Lainnya – NAD	Km	46	458	76		76	17%	32		32	108	24%
5	Pulau Nias (Propinsi)	Km	2	33	127		127	385%	123		123	250	758%
6	Jalan Kab/Kota	Km	23 kab	347	459		459	132%	371		371	830	239%
TOTAL				1.231	805	152	957	16.5%	708	30	738	1.695	29%

Sumber : Rencana Induk dan data Deputi Infrastruktur BRR, Mei 2007

Sampai dengan akhir tahun 2006, total jalan yang telah ditangani (rehabilitasi dan rekonstruksi) mencapai 957 km terdiri dari jalan Nasional sepanjang 295 km, jalan propinsi 203 km (Propinsi NAD: 76 km dan Kepulauan Nias 127 km) dan jalan kabupaten sepanjang 459 km, dengan total biaya Rp. 1.699 milyar.

Pada tahun 2007 diprogramkan rehabilitasi dan rekonstruksi jalan sepanjang 738 km, yang terdiri dari jalan Nasional 212 km, jalan propinsi 155 km (Prop. NAD : 32 km dan Nias 123 km), dan jalan kabupaten sepanjang 371 km. Total anggaran tahun 2007 sebesar 1.609 milyar Rupiah. Sehingga sampai akhir tahun 2007 akan ditangani jalan sepanjang 1.695 km jalan dengan total biaya mencapai 3,31 trilyun Rupiah.

Berdasarkan data Deputi Infrastruktur, ruas jalan yang belum ditangani untuk jalan Nasional adalah Lintas tengah : Takengon – Uwak (52 km) – Perbatasan Gayo Luwes dan Aceh tengah (32 km.) – Blang Kejeran (54 km) – Lawe Aunan (38 km) – Kutacane (37 km) – Perbatasan Sumatera Utara (39 km).

Sedangkan untuk jalan propinsi yang belum ditangani adalah :

- ❖ Jalan lingkaran Pulau Banyak (jalan propinsi) (36 km)
- ❖ Peurelak – Lokop (111 km)
- ❖ Batas Aceh Timur – Pinding – Blang kejeran (59 km)
- ❖ Babah Rot – Batas Aceh Tenggara (36 km)
- ❖ Batas Aceh Selatan – Terangon – Blang Kejeran (83 km)
- ❖ Simpang Lawe Deski – M. Situlen – Batas Aceh Selatan (30 km)
- ❖ Simpang Krueng Geukueh – Simpang Kebayakan (90 km)
- ❖ Beureunun - Kemala (21 km).
- ❖ Krueng Raya – Laweung – Batee – Tibang (73 km)
- ❖ Blang Bintang – Krueng Raya (19 km)
- ❖ Alue Glong – Jantho (20 km)
- ❖ Simpang Pangwa – Meureudu – Babah Jurong (7 km)
- ❖ Simpang Turu – Lutung – Geumpang (11 km)
- ❖ Peukan Pidie – Kembang Tanjung – Teupin Raya (11 km)
- ❖ Geudong – makam Malikul Saleh (9 km)
- ❖ Krueng Manee – Bukit Rata (32 km)
- ❖ Lhok Sukon – Cot Girek (14 km)
- ❖ Simpang Krueng Geukeuh – Palabuhan (2 km)
- ❖ Gunung Kapur – Trumon – Pulau Raya (17 km)
- ❖ Krueng Luas – Kulala Keupeng – Rundeng – Sebulusalam (31 km)
- ❖ Bintang - Simpang Krap (32 km)
- ❖ Simpang Tritit – Pondok Baru – Samar Kilang – Batas Aceh Timur (64km)
- ❖ Calang – Geumpang (90 km)

Sedangkan untuk transportasi, sampai dengan tahun 2006 telah ditangani pelabuhan laut sebanyak 10 unit dan 5 unit pelabuhan penyeberangan. Diantaranya satu pelabuhan penyeberangan di Ulelu ditangani langsung melalui bantuan Donor (*Off Budget*). Pelabuhan udara yang telah ditangani sebanyak 6 unit. Selain itu juga telah dibangun 1 unit landasan udara/airstrip di Calang.

Pada tahun anggaran 2007 diprogramkan penanganan untuk 7 unit bandara, 3 di antaranya merupakan penanganan baru, sedangkan 4 unit merupakan lanjutan. Selain itu juga direncanakan pembangunan airstrip di Blangkejeren dan landasan heli/helipad di Pulau Rondo-Aceh Besar. Selanjutnya pelabuhan laut yang ditangani sebanyak 8 unit (5 unit penanganan baru dan 3 unit penanganan lanjutan) dan pelabuhan penyeberangan sebanyak 4 unit (1 penanganan baru dan 3 unit penanganan lanjutan tahun 2006). Untuk lebih jelasnya penyelesaian bidang perhubungan sampai dengan tahun 2006 dan program 2007 pada disajikan pada tabel berikut. Adapun perinciannya disajikan pada lampiran.

Tabel II. 12
Rekapitulasi Realisasi 2005-2006 dan Program 2007 Sub Sektor Perhubungan

NO	BANGUNAN/GEDUNG	RI	REAL 05-06		PROG '07		05-07	
			B	% KE RI	B	L	B	% KE RI
1	Pel. Laut	17	10	59%	5	3	15	88%
2	Pel. Ferry	9	7	78%	1	3	8	89%
3	Bandara	9	6	67%	3	4	9	100%
4	Airstrip	-	1	-	1		2	-
5	Helipad	-		-	1		1	-
6	Terminal Bus	29	8	28%	5		13	45%
7	Kantor SAR	1	1	100%		1	1	100%
8	Kantor BMG	8	8	100%			8	100%
9	Kantor Pos	19	11	58%	5		16	84%
Total		214	80	37%	58	11	110	51%

B= Baru, L=Lanjutan, Sumber : Deputi Infrastruktur Bapel BRR, Mei 2007.

II.1.3.2.1.1 Fasilitas LLAJ

Berdasarkan Rencana Induk, kebutuhan terminal dan stasiun DAMRI sebanyak 29 unit. Sampai dengan 2006, 7 unit terminal dan stasiun DAMRI sedang dalam proses pembangunan. Pada tahun 2007 dialokasikan pembangunan terminal sebanyak 7 unit.

Tabel II. 13
Realisasi Pembangunan Terminal Bis/ APK

NO	TERMINAL BIS/ APK	RENCANA INDUK	REAL 05-06	DIPA '07	
			BARU	BARU	LANJUT
1	BandaAceh	4	2	1	
2	Singkil	1	1	1	
3	Bireun	1			
4	Lhokseumawe	1			
5	Calang	1		1	
6	BlangPidie	1	1	1	
7	KotaMakmur	1			
8	AcehBesar	1			
9	Langsa	1			
10	AcehUtara	3	1	1	
11	KebonTengah	1			
12	Langsa	3			
13	Bakongan	1			
14	Sigli	1			
15	KualaSimpang	1			
16	Nias	1			
17	NiasSelatan	1			
18	Simelue		1	1	

NO	TERMINAL BIS/ APK	RENCANA INDUK	REAL 05-06	DIPA '07	
			BARU	BARU	LANJUT
19	Takengon			1	
20	Stasiun DAMRI Banda Aceh	1	1		
21	Pool DAMRI (tersebar)	2			
22	Pool DAMRI Meulaboh	1			
23	Pool DAMRI Lhokseumawe	1			
	Total	29	7	7	0
	Kumulatif		7	14	
	Kumulatif % RI		24%	48%	

Sumber : BRR NAD-Nias, 2007

Pembangunan gedung Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) menurut Rencana Induk dibangun sejumlah 10 unit. Lokasi pembangunan gedung PKB diarahkan pada daerah-daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan kendaraan bermotor yang cukup tinggi. Fasilitas gedung PKB mulai dilaksanakan pada tahun 2007 sejumlah 2 unit, yaitu di Meulaboh dan Langsa.

Tabel II. 14
Realisasi Pembangunan Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor

No	Gedung Uji Kendaraan	RI		Real 05-06		RKA '07		
		Jumlah	Rp My	Baru	Rp My	Baru	Lanjut	Rp My
1	PKB Banda Aceh	1						
2	PKB Aceh Barat	1				1		6
3	PKB Aceh Tamiang	1						
4	PKB Aceh Utara	1						
5	PKB Lhok Semawe	1						
6	PKB Pidie	1						
7	PKB Bireuen	1						
8	PKB Aceh Timur	1				1		6
9	PKB di Nias	1						
10	PKB di Nias Selatan	1						
	Total	10	-	-	-	2	-	12
	Kumul.			-	-	2		12

Sumber : BRR NAD-Nias, 2007

Pengadaan Bus Bantuan menurut Rencana Induk sebanyak 131 unit. Dari jumlah tersebut 28 unit diantaranya telah dilaksanakan pengadaannya pada tahun 2006 dan telah diserahkan serta dioperasikan oleh DAMRI sedangkan sisanya akan diadakan pada tahun 2007 dan 2008 untuk diserahkan kepada pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota. Pembangunan/rehabilitasi jembatan timbang sebanyak 3 unit dan pembangunan halte bus sebanyak 60 unit yang tercantum dalam rencana induk sampai saat ini belum dilaksanakan.

II.1.3.2.1.2 Prasarana Jalan Kereta Api

Dalam Rencana Induk direncanakan pembangunan prasarana jalan kereta api sepanjang 233 km dengan biaya Rp.1,093 triliun. Pelaksanaan studi dan pembangunan jalan kereta api telah mulai dirintis Departemen Perhubungan bersama Pemerintah Provinsi NAD sehingga pelaksanaan kegiatan yang menelan biaya sangat besar tersebut tidak ditangani oleh BRR.

II.1.3.2.1.3 Angkutan Sungai Danau Penyeberangan (ASDP)

Rehabilitasi dan rekonstruksi pelabuhan penyeberangan ditargetkan sebanyak 9 unit sebagaimana tertuang dalam rencana induk. Dari keseluruhan jumlah tersebut, 7 unit telah ditangani pada tahun anggaran 2005-2006. Satu unit yakni pelabuhan penyeberangan Meulaboh akan dilaksanakan pada TA 2007. Satu unit yang belum ditangani adalah pelabuhan penyeberangan Gunung Sitoli.

Tabel II. 15
Realisasi Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan

NO	PEL. FERRY	LOKASI	RI	REAL '05 - '06		RKA '07	
				BARU	LANJUTAN	BARU	LANJUTAN
1	Ulee Lheue	Banda Aceh	1	v			V
2	Balohan	Sabang	1	v			
3	Labuhan Haji	Aceh Selatan	1	v			
4	Lamteng	Aceh Besar	1	v			
5	Sinabang	Simeulue	1	v			V
6	Meulaboh	Aceh Barat	1			v	
7	Pulau Banyak	Aceh Singkil	1	v			
8	Singkil	Aceh Singkil	1	v			V
9	Gunung Sitoli	Nias	1				
Total			9	7		1	3
Kumul.				7		8	
Kum (%) ke RI				78%		89%	

Sumber : BRR NAD-Nias, 2007

II.1.3.2.1.4 Transportasi Laut

Rehabilitasi dan rekonstruksi pelabuhan di NAD dan Nias dalam rencana induk ditetapkan sejumlah 17 unit. Dari jumlah tersebut, 10 unit telah dan sedang dilaksanakan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksinya sedangkan 8 unit (5 baru dan 3 lanjutan) diprogramkan pada tahun 2007. Sehingga sampai akhir 2007 diperkirakan telah ditangani 15 unit pelabuhan dari rencana induk sebanyak 17 unit. Ada 3 unit pelabuhan dalam Rencana Induk yang belum ditangani yakni Sabang, Sibadeh, dan Sigli. Sementara itu terdapat 1 unit pelabuhan (Kuala Langsa) di luar Rencana Induk yang ditangani. Di luar itu juga dibangun dermaga di Pulau Rondo.

Tabel II. 16
Realisasi Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Prasarana Pelabuhan Laut

No	PELABUHAN LAUT	LOKASI	RENCANA INDUK	REALISASI 2005-06		PROGRAM 2007		TOTAL
				BARU	LANJUT	BARU	LANJUT	
1	Sabang	Sabang	☒					
2	Malahayati	Aceh Besar	☒	☒			☒	1
3	Krueng Geukueh	Lhokseumawe	☒			☒		1
4	Kuala Langsa	Langsa				☒		1
5	Meulaboh	Aceh Barat	☒	☒			☒	1
6	Calang	Aceh Jaya	☒			☒		1
7	Susoh	Aceh Barat Daya	☒	☒				1
8	Tapak Tuan	Aceh Selatan	☒	☒		☒		1
9	Singkil	Aceh Singkil	☒				☒	1
10	Sibadeh	Aceh Selatan	☒					
11	Sinabang	Simeulue	☒			☒		1
12	Sibigo	Simeulue	☒	☒				1
13	Sigli	Pidie	☒					
14	Gunung Sitoli	Nias	☒	☒				1
15	Lahewa	Nias	☒	☒				1
16	Sirombu	Nias	☒	☒				1
17	Teluk Dalam	Nias Selatan	☒	☒				1
18	Tello	Nias Selatan	☒	☒				1
Total			17	10	0	5	3	15
Kumulatif				10		15		
(%) ke RI				59%		88%		

Sumber : Deputi Infrastruktur BRR, Mei 2007.

II.1.3.2.1.5 Transportasi Udara

Rehabilitasi dan rekonstruksi bandar udara sesuai dengan Rencana Induk dilaksanakan sebanyak 9 unit. Dari jumlah tersebut 6 unit diantaranya telah dan sedang dilaksanakan pada tahun 2005 – 2006. Tiga unit lainnya akan dilaksanakan pada tahun 2007 dan 2008. Pada

tahun 2008 kegiatan difokuskan pada pengembangan Bandara SIM dan Bandara Cut Nyak Dhien Nagan Raya.

Tabel II. 17
Realisasi Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bandar Udara

NO	BANDAR UDARA	LANDASAN		RI		REAL 05-06		RKA '07	
		AWAL	AKHIR	Vol.	RP MY	BARU	RP MY	BARU	LANJUT RP MY
1	Maimun Saleh	1850 m x 30 m		1	25.1	v	12.25		v 1.41
2	S. Iskandar Muda	2500 m x 45 m	2950 m x 45 m	1	474.5			v	88.38
3	Cut Nyak Dhien	1000 m x 30 m	1700 m x 30 m	1	141.6	v	20.75		v 8.85
4	Teuku Cut Ali	750 m x 23 m	1250 m x 30 m	1	21.8		0.29	v	8.08
5	Lasikin	750 m x 23 m	1500 m x 30 m	1	25.6	v	24.80		v 13.93
6	Kuala Batee	750 m x 23 m	1300 m x 30 m	1	22.0		0.29	v	19.69
7	Rembele	1200 m x 30 m		1	26.1	v	10.96		v 5.99
8	Binaka	1400 m x 30 m		1	4.6	v	16.34		
9	Lasundre	750 m x 23 m		1	3.0	v	5.59		
Total				9	744.3	6	91.27	3	4 146.33
Kumululatif						6	91.27	9	237.60
Kum (%) ke RI						67%	12.26%	100%	31.92%

Sumber : BRR NAD-Nias, 2007

Pembangunan airstrip telah dilaksanakan dengan dana Off-Budget pada tahun 2005. Satu unit airstrip direncanakan dibangun di Blangkejeren pada TA 2007. Sementara helipad pada tahun 2007 direncanakan sebanyak 1 unit dan 2008 sebanyak 2 unit.

Tabel II. 18
Realisasi Pelaksanaan RR Airstrip

No	Landasan Udara	Lokasi	RI		Real 05-06		RKA '07	
			#	Rp My	Baru	Rp My	Baru	Lanjut Rp My
1	Airstrip Calang	Aceh Jaya			v	0.7		
2	Airstrip Blangkejeren	Gayo Luwes					v	8.2
3	Airstrip Sibigo	Simeulue						
4	Airstrip Teluk Dalam	Nias Selatan						
Total			0	0	1	0.70	1	0 8.20
Kumululatif					1	0.70	2	8.90

Sumber : BRR NAD-Nias, 2007

Tabel II. 19
Realisasi Pelaksanaan RR Helipad

No	Landasan Heli	Lokasi	RI		Real 05-06		RKA '07	
			Vol.	Rp My	Baru	Rp My	Baru	Lanjut Rp My
1	Pulau Rondo	Aceh Besar					1	1.4
2	Pulau Breuh	Aceh Besar						
3	Pulau Banyak	Singkil						
Total			0	0	0	0.00	1	0 1.40
Kumululatif					0	0.00	1	1.40

Sumber : BRR NAD-Nias, 2007

II.1.3.2.1.6 Prasarana Penyelamatan (SAR)

Pembangunan gedung dan sarana kantor SAR NAD telah selesai dibangun pada tahun 2006. Untuk melengkapi berbagai fasilitas pendukung lainnya maka dialokasikan Rp. 1,696 Milyar pada tahun 2007.

Pembangunan *rescue boat* berdasarkan Rencana Induk dilaksanakan sebanyak 2 unit dan BRR akan melakukan pengadaan sebanyak 2 unit pada tahun 2007 dan 2008.

Untuk mengantisipasi musibah yang sering terjadi di perairan karena Provinsi NAD berada langsung di lintasan pelayaran internasional maka perlu dilakukan pengadaan *sea rider* sebanyak 3 unit dan fasilitas-fasilitas peralatan pendukung operasi pencarian dan penyelamatan. Pengadaan fasilitas tersebut telah dilaksanakan pada tahun 2006 – 2007.

II.1.3.2.1.7 Meteorologi, Geofisika dan Pos Telekomunikasi

II.1.3.2.1.7.1 Badan Meteorologi dan Geofisika

Enam stasiun BMG telah selesai direhabilitasi dan direkonstruksi untuk NAD (Mata ie, Blang Bintang, Indrapuri, Tapak tuan, Meulaboh, Takengon), dan 2 stasiun BMG di Nias (Onowaembo dan Binaka) sesuai dengan yang ditargetkan dalam Blue Print, Untuk perumahan dinas BMG yang ditargetkan dalam Blueprint sebanyak 40 unit, namun yang telah dicapai sampai sekarang sebanyak 26 unit di NAD dan 6 Unit di Nias dan terdapat 8 unit lagi yang harus diselesaikan, namun sampai saat ini masih terkendala dengan permasalahan pembebasan lahan yang belum terselesaikan. Target dalam *Blue Print* terdapat 1 unit peralatan Meteorologi konvensional dan telah diadakan di Saree NAD dalam bentuk taman alat meteorologi untuk pertanian.

Dalam *Blue Print* juga dicantumkan rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas TVRI, RRI dan Dinas Infokom, namun dalam pelaksanaannya ditangani langsung oleh sektor kelembagaan dan kapasitas ke deputian ILP hanya memberikan bantuan teknis melalui Direktorat Fasilitas dan Bangunan Umum, yang bersifat evaluasi perencanaan fisik dan monitoring di lapangan.

II.1.3.2.1.7.2 Pos dan Telekomunikasi

Untuk memenuhi kebutuhan pelayanan telekomunikasi masyarakat yang harus segera dipenuhi, maka BRR telah melaksanakan rehab 4.310 SST, yang merupakan capaian sampai dengan awal tahun 2007, meliputi wilayah Meulaboh, Simpang Peut, Kaway XVI. Sedangkan sisanya untuk wilayah lainnya akan ditangani oleh PT. TELKOM tbk.

Infrastruktur ICT (VSAT & Wifi base) telah dibangun di 21 lokasi (seluruh ibukota kabupaten di Propinsi NAD) dan selesai pada tahun 2006 sehingga sudah dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan rencana untuk ke depan akan dilakukan migrasi dari *Wifi* ke *Wimax* karena ini merupakan dasar pemikiran awal bahwa NAD adalah propinsi Cyber pertama di Indonesia dan ini juga merupakan sasaran baru yang dilakukan ke deputian Infrastruktur, Lingkungan dan Pemeliharaan yaitu terciptanya pemerintah dan masyarakat dimana teknologi digunakan dengan tujuan untuk meningkatkan akses dan distribusi informasi pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, bisnis, pegawai, dan departemen lainnya serta untuk meningkatkan kinerja pemerintahan itu sendiri, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat (target *e-government* dan *e-community*), migrasi ini rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2008.

Untuk prasarana POS sesuai dengan target yang dicantumkan dalam Rencana Induk ada 19 unit kantor POS yang mengalami rusak berat dan yang telah ditangani adalah 11 kantor POS selesai dibangun (4 di Banda Aceh, 2 di Aceh Besar, dan 2 di Aceh Jaya), 3 kantor pos selesai direhabilitasi (1 di Aceh Barat, 2 di Aceh Besar) untuk tahun 2005 – 2006 dan 5 unit kantor POS sedang direhabilitasi dan rekonstruksi pada tahun 2007.

II.1.3.2.2 Energi dan Listrik

II.1.3.2.2.1 Listrik

Program rehabilitasi dan rekonstruksi bidang energi dan listrik yang dilaksanakan oleh BRR lebih difokuskan pada pelayanan sambungan rumah untuk rumah-rumah yang baru dibangun, jaringan tegangan rendah (JTR), penggantian diesel-diesel pembangkit listrik yang rusak dan tidak fungsional dan sebagian jaringan tegangan menengah (JTM). Dari target 119.253 sambungan rumah, sampai dengan Desember 2006 telah dicapai pengadaan sebanyak 71.993 unit (60%). Pemasangan sambungan rumah terus dilaksanakan sesuai dengan progress penyelesaian pembangunan rumah bagi korban bencana tsunami. Pada tahun anggaran 2007, sasaran yang akan dicapai adalah pengadaan sambungan rumah sebanyak 64.387 unit (54%). Dengan demikian secara keseluruhan, target yang telah di capai sampai dengan 2007 untuk

pengadaan listrik (sambungan rumah) mencapai 136.380 unit atau melebihi target yang tercantum dalam Rencana Induk. Kelebihan alokasi ini dimaksudkan untuk memenuhi target sambungan bagi pembangunan rumah baru sebanyak 120.000 unit dan permintaan masyarakat lainnya seperti bangunan fasilitas umum, fasilitas sosial, bangunan publik lainnya.

Dari target sasaran 2.394 km JTR dan 1.046 km JTM, sampai Desember 2006 telah dilaksanakan sebanyak 397.8 km JTR dan 256.5 km JTM. Pada tahun anggaran 2007 sasaran yang akan dicapai sepanjang 397.6 km JTR dan 212.5 km JTM. Dengan demikian masih terdapat sisa target sebesar 1,636.6 km JTR dan 577.9 km JTM. Sedangkan target sasaran 736 unit Gardu Distribusi (GD) dan 6 unit Gardu Hubung (GH), sampai Desember 2006 telah tercapai 217 GD dan 3 unit GH. Tahun anggaran 2007 sasaran yang akan dicapai sebanyak 260 unit GD dan 1 unit GH. Dengan demikian masih terdapat sisa target sebesar 298 unit GD.

Pembangunan pembangkit listrik dengan target 16 unit, sampai Desember 2006 telah berhasil dicapai 11 unit pembangkit listrik. Pada tahun anggaran 2007 tidak ada pengadaan dan pemasangan pembangkit listrik. Target pembangkit listrik tersebut belum termasuk target rekonstruksi pembangunan baru Pembangkit Listrik Tenaga Air Peusangan (PLTA) Peusangan dengan kapasitas 2X42 MW. Pembangunan PLTA Peusangan akan dibiayai JBIC dengan percepatan proses pinjaman sehingga pelaksanaannya dapat dimulai akhir tahun 2007. Sebagai tambahan dari pemenuhan target rekonstruksi tersebut, PT. PLN juga sudah memproses tender pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batu Bara sebesar 2X100 MW di kabupaten Nagan Raya. Disamping itu Departemen ESDM akan memproses tender pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) sebesar 2X20 MW di Seulawah, kabupaten Aceh Besar.

Untuk bangunan gedung layanan umum, dari sasaran target 6 unit bangunan gedung, BRR hanya akan membangun satu gedung pelayanan masyarakat di Merduati. Masih terdapat sisa target 5 gedung kantor termasuk kantor wilayah.

Khusus untuk daerah-daerah yang tidak terjangkau jaringan listrik, BRR membiayai pengadaan 1.691 unit Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan 1 unit Pembangkit Listrik Mikro Hidro (PLTMH). Disamping itu Departemen ESDM melalui program Listrik Desa mengadakan 1.000 unit PLTS pada tahun anggaran 2006. Pada tahun anggaran 2007 sasaran yang akan dicapai 469 unit. Tahun anggaran 2008, perlu dilanjutkan pengadaan PLTS sebanyak 1.000 unit. Berikut realisasi rehabilitasi dan rekonstruksi bidang kelistrikan yang dijelaskan oleh tabel dibawah ini.

Tabel II. 20
Realisasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bidang Kelistrikan

NO	KEGIATAN PEMBANGUNAN	SAT	RENC. NDUK	REALISASI TAHUN 2005 - 2006				PROG 2007	2005-2007		KET
				APBN	NON APBN	TOTAL	%		TOTAL	%	
1	Sarana dan Prasarana Energi	pkt	12								
2	Sarana dan Prasarana Ketenagalistrikan	pkt	13								
3	Rehabilitasi dan pengembangan jaringan distribusi		tersebar								
4	Pengadaan generator	pkt	7								
5	Perbaikan kantor PT. PLN	pkt	5								
6	Pengadaan PLTD Apung baru	pkt	1								
7	Pengembangan Sistem Ketenagalistrikan		tersebar								

NO	KEGIATAN PEMBANGUNAN	SAT	RENC. NDUK	REALISASI TAHUN 2005 - 2006				PROG 2007	2005-2007		KET
				APBN	NON APBN	TOTAL	%		TOTAL	%	
	NAD										
8	Pembangunan jaringan transmisi		tersebar								
9	Pembangunan PLTA / PLTM	Unit	2								
10	Pembangunan PLTG	Unit	1								
11	Jalur transmisi (SUTM dan SKTM)	Km	1.805	412		412	23%	283	695	39%	
12	Jalur distribusi (SKTR)	Km	2.714	689		689	25%	413	1.102	41%	
13	Stasiun Distribusi	Unit							557		
14	Sambungan Pelanggan	Pg	119.253	71.993		71.993	60%	64.387	136.380	114%	
15	Gardu Distribusi	Unit	883	217		217	25%	318	535	61%	
16	Diesel	Unit	24	12		12	50%			50%	
17	Bangunan	Buah	6					1	1	17%	
18	Energi Infrastruktur NAD - Nias	Unit									

Sumber : Deputi Infrastruktur BRR, Mei 2007.

II.1.3.2.2.2 Energi

Pada akhir Desember 2006, pembangunan Depo BBM Simeulue saat sudah mencapai 71 persen dan kontribusi BRR sebesar Rp. 10 milyar telah dibayarkan kepada kontraktor PT. Pertamina pada bulan Desember 2006. Selain penanganan masalah BBM, BRR pada tahun anggaran 2005 dan 2006 melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi gedung dinas, gedung dan peralatan laboratorium, gedung balai latihan kerja (BLK) pada Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi NAD, pengadaan peralatan pertambangan rakyat dan peralatan pengeboran sumur dalam. Selain itu BRR juga membangun kembali 3 unit gedung pemantau gunung api yang hancur berikut pengadaan peralatan pemantau gunung api.

II.1.3.2.3 Sumberdaya Air

II.1.3.2.3.1 Irigasi

Dari 62.955 ha target rehabilitasi dan rekonstruksi sub bidang Irigasi, sampai dengan Desember 2006 telah dilaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi prasarana Irigasi seluas 78.766 ha (125%). Tahun anggaran 2007, terdapat penambahan seluas 31.212 Ha sehingga total luas irigasi adalah 108.181 (172%).

II.1.3.2.3.2 Sungai dan Pengendalian Banjir

Dari target 58.851 meter sungai yang harus direhabilitasi dan direkonstruksi, sampai dengan Desember 2006 telah dilakukan rehabilitasi dan rekonstruksi sungai sepanjang 76.689 meter (130%). Tahun anggaran 2007, sasaran yang akan dicapai sepanjang 100.189 meter (170%).

II.1.3.2.3.3 Pengamanan Pantai

Dari target 35.064 meter pantai yang harus dilindungi, pada tahun anggaran 2005-2006 telah dikerjakan bangunan pengaman pantai sepanjang 57.854 meter (165%) dan pada tahun anggaran 2007 sepanjang 23.376 meter. Target yang telah dicapai dalam dua tahun anggaran sebesar 72.454 meter atau 206%.

Tabel II. 21
Rekapitulasi Realisasi 2005-2006 dan Program 2007
Sub-Sektor Sumberdaya Air

NO	KEGIATAN PEMBANGUNAN	SAT	RENC.	REALISASI TAHUN 2005 - 2006	PROG 2005-2007
----	----------------------	-----	-------	-----------------------------	----------------

			NDUK	APBN	NON APBN	TOTAL	%	2007	TOTAL	%
1	Irigasi	Ha	62.995	78.766		78.766	125	31.212	108.181	172
2	Sungai dan Pengendalian Banjir	m'	138.796	76.689	2.000	76.689	55	12.163	100.189	72
3	Pengaman Pantai	m'	69.058	57.854		57.854	84	23.376	72.454	105

Sumber : Deputi Infrastruktur BRR, Mei 2007.

II.1.3.2.3.4 Air Bersih dan Sanitasi

Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam rangka penyediaan air minum dan air bersih telah berjalan sejak tahun 2005 dan tahun 2007. Sampai tahun ketiga telah teralokasi dana sebesar Rp. 309,943 miliar atau sebesar 13.54% dari target (*on budget* yang terserap dan telah dialokasikan pada tahun 2007). Komponen terbesar adalah untuk rehabilitasi dan rekonstruksi air bersih atau sebesar 63,53% atau sebesar Rp. 196,906 miliar, untuk komponen air limbah sebesar Rp. 23,093 miliar (7,45%), komponen persampahan sebesar Rp. 50,407 miliar (16,26%), dan komponen drainase sebesar Rp. 39,536 miliar (12,76%).

II.1.3.2.3.4.1 Air Bersih

Pada tahun 2005 kegiatan rekonstruksi diarahkan pada penanganan darurat untuk terpenuhinya kebutuhan air bersih kota-kota terkena tsunami dan barak-barak pengungsian. Kemajuan secara fisik telah banyak dicapai dalam rehabilitasi dan rekonstruksi pada sub bidang air bersih. Keterlibatan bantuan masyarakat Internasional melalui Donor dan NGO (*off budget*) pada pelaksanaan penyediaan air bersih telah memberikan peran yang sangat besar, sejak masa tanggap darurat. Pencapaian dengan anggaran APBN yang telah dibangun/dalam tahap pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi adalah sebesar Rp. 196,906 miliar, dengan anggaran sebesar ini akan terbagi fasilitas pelayanan air bersih perpipaan dengan kapasitas sebesar 480 lt/det yang tersebar di Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Bireuen, Kabupaten Pidie, Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Aceh Singkil, Kota Sabang, Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Aceh Utara, dan Kabupaten Simeulue. Masih dibutuhkan tambahan kapasitas penyediaan air bersih sebesar 2.976 lt/det yang memerlukan rekonstruksi. Sisa kapasitas ini akan dilaksanakan pada tahun 2008 dengan lokasi yang menjadi sasaran utama, yaitu kota terkena tsunami dan kota dengan potensi ekonomi yang tinggi. Sedangkan kota lainnya akan diserahkan kepada Pemerintah Provinsi NAD untuk membangunnya baik dengan dan dari APBN maupun dari APBD.

II.1.3.2.3.4.2 Persampahan

Penanganan darurat persampahan juga sebagian besar ditangani oleh Donor dan NGO, antara lain yang cukup besar adalah oleh UNDP untuk *city wide* selama tahun 2005. Sedangkan UNICEF menangani masalah persampahan untuk lokasi-lokasi barak. Pelaksanaan pembangunan sub bidang persampahan sampai tahun 2006 lebih banyak berupa penyediaan sarana pengangkutan sampah berupa *Dump Truck* dan *Arm roll truck*. Baru pada tahun 2007 ini beberapa lokasi TPA akan dibangun, yaitu TPA di Langsa, TPA di Meulaboh, TPA di Nagan Raya, dan TPA di Aceh Singkil.

II.1.3.2.3.4.3 Air Limbah

Pencapaian pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam bidang air limbah sampai saat ini masih jauh dari yang diharapkan. Baru IPLT di Banda Aceh yang sudah selesai dibangun oleh UNDP. Beberapa MCK telah dibangun dengan dana APBN (*on budget*) dan juga dana bantuan Donor dan NGO (*off budget*). Sedangkan IPLT di kabupaten/kota lainnya sedang dilaksanakan pembangunannya melalui pembiayaan pada tahun anggaran 2007 berjalan ini.

II.1.3.2.3.4.4 Drainase

Drainase lingkungan permukiman sampai saat ini baru terbangun saluran drainase sepanjang 26.595 m dari total 106.347 m atau sekitar 29%. Alokasi anggaran yang telah terserap adalah sebesar Rp. 39,536 miliar. Masih kecilnya capaian pelaksanaan pekerjaan drainase lingkungan permukiman ini adalah karena perumahan dan permukiman masih dalam proses pelaksanaan.

Tabel II. 22
Rekapitulasi Realisasi 2005-2006 dan Rencana 2007
Sub-Sektor Air Bersih dan Sanitasi

NO	KEGIATAN PEMBANGUNAN	SAT	RENC. INDUK	REALISASI TAHUN 2005 - 2006				PROG 2007	2005-2007	
				APBN	NON APBN	TOTAL	%		TOTAL	%
a	Air Bersih	Lt/dtk	3.256	135		135	4.1	345	280	9
b	Pembuangan Limbah	Rumah	543.217	1.400		1.400	0.3	290.310	291.710	54
c	Sampah	Rumah	543.217	636		636	0.1	1.529	1665	0.3
d	Drainase	m'	106.347	16.662		16.662	15.7	9.933	26.595	29

Sumber : BRR NAD-Nias, 2007

II.1.3.2.4 Bangunan Fasilitas Umum

Pelaksanaan proyek bangunan umum baru diprogramkan pada tahun 2007 dan rencana 2008. Beberapa kegiatan yang dilakukan meliputi pembangunan PUSLAKAT mitigasi Tsunami, *escape building*, museum tsunami, laboratorium dan peralatan.

Tabel II. 23
Program 2007 dan Rencana 2008 untuk Fasilitas Bangunan Umum

NO	KEGIATAN PEMBANGUNAN	SAT.	RENC. INDUK	REALISASI TAHUN 2005 - 2006				PROG 2007	2005-2007	
				APBN	NON APBN	TOTAL	%		TOTAL	%
1	Pembangunan Pusat Pelatihan Mitigasi Tsunami NAD daerah bencana Banda Aceh							4		
2	<i>Escape Hill</i>	Unit	5							
3	Desain dan konstruksi dari <i>Escape Building</i> di Aceh Jaya	Unit	1					1	1	100
4	Desain dan konstruksi dari <i>Escape Building</i> di Aceh Barat	Unit	1					1	1	100
5	Desain dan konstruksi dari <i>Escape Building</i> di Lhokseumawe	Unit	1					1	1	100
6	Desain dan konstruksi dari <i>Escape Building</i> di Bireuen	Unit	1					1	1	100
7	Desain dan konstruksi dari <i>Escape Building</i> di Pidie	Unit	1					1	1	100
8	Museum Pusat Pengembangan Tsunami di Banda Aceh (<i>Multi year</i> ingin mulai 2007 dengan Desain & Konstruksi di 2008/9)							2		
9	Pembangunan Pusat Kualitas Struktural di Banda Aceh & Peralatan untuk lab							1		
10	Kordinasi dan Konsultasi Rencana Kerja dan Program Pemerintah NAD - NIAS -							0		

NO	KEGIATAN PEMBANGUNAN	SAT.	RENC. INDUK	REALISASI TAHUN 2005 - 2006				PROG 2007	2005-2007	
				APBN	NON APBN	TOTAL	%		TOTAL	%
	Proyek <i>Multi year</i>									

Sumber : BRR NAD-Nias, 2007

II.1.3.3. Bidang Pemulihan Sosial Kemasyarakatan

Bidang sosial budaya meliputi beberapa kelompok kegiatan yaitu, Pendidikan, Kesehatan, Agama, Sosial, Budaya dan Sumberdaya Manusia (Pemberdayaan Perempuan, Kependudukan dan Keluarga Berencana, serta Pemuda dan Olahraga).

II.1.3.3.1 Pendidikan

Sesuai dengan rencana induk, pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam bidang pendidikan berupa program pembangunan fasilitas (gedung) untuk pendidikan darurat/ sementara, program pendidikan anak usia dini, memantapkan program pendidikan dasar, menengah dan pendidikan tinggi serta penelitian dan pengembangan pendidikan di wilayah bencana Provinsi NAD dan Kepulauan Nias (Kabupaten Nias dan Nias Selatan).

Masih terdapat banyak program/kegiatan dengan realisasi yang belum mencapai target rencana induk hingga tahun 2007 sehingga dalam periode waktu berikutnya harus dirampungkan.

Secara terperinci, kemajuan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam bidang pendidikan akan diuraikan dan disajikan dalam beberapa Tabel berikut berdasarkan kelompok program/kegiatannya.

Tabel II. 24
Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bidang Pendidikan
(Program Pendidikan Anak Usia Dini)

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SAT.	RENC. INDUK	REALISASI TAHUN 2005-2006				PROG. 2007	2005 -2007	
				APBN	NON APBN	TOTAL	CAPAIAN		TOTAL	CAPAIAN
A	Pembangunan Gedung darurat/ sementara	Unit/ Ruang	12	49	246	295	2458%		295	2458.3%
B	Program Pendidikan Anak Usia Dini/TK									
1	Rehabilitasi dan pembangunan TK	Unit	101		61	61	60.4%	2	63	62.4%
2	Perabot/Peralatan	set	125		61	61	48.8%		106	84.8%
3	Materi belajar mengajar		125		61	61	48.8%	15	126	100.8%

Sumber : Data Kedeputan Pendidikan dan Kesehatan, Mei 2007.

Berdasarkan Rencana Induk direncanakan sejumlah 12 unit namun dalam realisasi mencapai 295 unit 24 kali nya (2.458%). Demikian pula dengan penyediaan materi belajar mengajar sampai dengan akhir tahun 2007 yang telah melampaui target realisasi (100.8%). Pada rehabilitasi dan pembangunan TK dan bantuan peralatannya, terlihat target realisasi lebih dari separuhnya sampai dengan tahun 2006. Realisasi ini terutama berasal dari pendanaan yang bersumber dari bantuan NGO dan Donor (Non APBN).

Program wajib belajar 9 tahun, terdiri atas pendidikan tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan pendidikan luar biasa. Pada pendidikan Sekolah Dasar, realisasi yang mencapai 100% ke atas adalah pada program paket belajar, pembangunan unit sekolah baru, pembangunan ruang kelas baru, rehabilitasi sekolah, pengembangan fasilitas/komputer

sekolah, meubeler dan trauma konseling. Namun demikian untuk program lainnya kecuali rehab sekolah dasar (76.1%).

Keadaan serupa juga ditemukan pada program sekolah menengah pertama. Kecuali pelatihan guru (180.3%) dan pengembangan teknologi informasi (800%), realisasi rencana induk sampai dengan tahun 2007 bervariasi mulai dari 0% (belum ada realisasi) sampai dengan 90.5%. Selanjutnya pada program pendidikan sekolah luar biasa, rata-rata hampir seluruh program memiliki pencapaian lebih dari 50% dari rencana induk, kecuali program pengadaan peralatan kantor SLB (20%) dan program pemberian beasiswa SLB (0%). Secara terperinci disajikan pada Tabel berikut.

Tabel II. 25
Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bidang Pendidikan
(Program Wajib Belajar 9 tahun)

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SAT.	RENC. INDUK	REALISASI TAHUN 2005-2006				PROG RAM 2007	2005-2007	
				APBN	NON APBN	TOTAL	CAPAIAN		TOTAL	CAPAIAN
A	Sekolah Dasar									
1	Rehab sekolah	Unit	627	85	228	313	49.9%	164	477	76.1%
2	Pembangunan USB	Unit	25	26		26	104.0%	4	30	120.0%
3	Pembangunan RKB	Ruang	12	111		111	925.0%	11	122	1016.7%
4	Pemb. Sekolah Terpadu	Unit	3				0.0%		-	0.0%
5	Pembangunan Rumah Guru	Unit		178		178			178	
6	Rehab sekolah akibat konflik	Unit	23				0.0%		23	100.0%
7	Alat Olahraga, kesenian, teknologi dasar, life skill	Set	882				0.0%		-	0.0%
8	Meubeler	pkt	113	8	518	526	465.5%	36	562	497.3%
9	Paket Belajar	pkt	103.599		680.357	680.357	656.7%	9.169	689.526	665.6%
10	Buku Perpustakaan	SD	1.717				0.0%		-	0.0%
11	Buku Pelajaran Pokok	Exp	284.505				0.0%		-	0.0%
12	Diklat Kep Sek, Pembina/Pengawas	Orang	3.107				0.0%		-	0.0%
13	Block grant operasional SD	pkt	129				0.0%		-	0.0%
14	Pengembangan Telekomunikasi, Komputer dll	pkt	1				0.0%		3	300.0%
15	Trauma Conselling	Kab	2		16	16	800.0%		16	800.0%
16	Fasilitas sanitasi				55	55			60	
B	Sekolah Menengah Pertama									
1	Pembangunan gedung	skl	293	111	34	145	49.5%	1	146	49.8%
2	Pembangunan USB	Unit	84	19	39	58	69.0%	18	76	90.5%
3	Pembangunan RKB pengembangan	Ruang	1.150	273	436	709	61.7%		709	61.7%
4	Pembangunan Sekolah Binaan/Unggul	Paket		3	3	6		27	39	
5	Pembangunan Asrama Siswa	Unit	1		4	4	21.1%		4	21.1%
6	Meubeler	Pkt	206	90		90	43.7%	30	120	58.3%
7	Beasiswa	Orang	9.009			-	0.0%		-	0.0%
8	Trauma Conselling	Kab	2			-	0.0%		-	0.0%
9	Investasi Mutu					-			-	
-	Pemb. Pustaka, Lab. IPA, RK	Unit	193			-	0.0%		-	0.0%
-	Pemb. Perpustakaan	unit	100			-	0.0%		-	0.0%
-	Buku Pelajaran	Eksp	1.539.000			-	0.0%		-	0.0%
-	Lab Komputer	set	100			-	0.0%		-	0.0%
-	Alat Keterampilan	set	53			-	0.0%		30	56.6%
-	Pelatihan Guru	Org	10.000	221	17.115	17.336	173.4%	693	18.029	180.3%

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SAT.	RENC. INDUK	REALISASI TAHUN 2005-2006				PROG RAM 2007	2005-2007	
				APBN	NON APBN	TOTAL	CAPAIAN		TOTAL	CAPAIAN
-	Pengembangan Mutu Sekolah	skl	90		27	27	30.0%		53	58.9%
-	Kegiatan Kesiswaan	skl	2.386			-	0.0%		210	8.8%
-	Pengembangan IT untuk SMP	pkt	1			-	0.0%		8	800.0%
-	Efisiensi dan Efektivitas (akreditasi, Kinerja, CB)	skl	239			-	0.0%		20	8.4%
C	Pendidikan Luar Biasa/SLB	UNIT								
1	Pembangunan UGB	lokasi	6		1	1	16.7%		5	83.3%
2	Rehab Gedung	Ruang	5			-	0.0%		4	80.0%
3	Bantuan Meubeler	skl	6		1	1	16.7%		5	83.3%
4	Beasiswa SLB	Org	2.900			-	0.0%		-	0.0%
5	Sarana Prasarana	lokasi	4		1	1	25.0%		5	125.0%
6	Peralatan Pendidikan	unit	10		1	1	10.0%		5	50.0%
7	Peralatan Kantor	unit	25		1	1	4.0%		5	20.0%

Sumber : Data Kedeputan Pendidikan dan Kesehatan BRR, Mei 2007.

Pada pendidikan menengah, program diklasifikasikan dalam tiga bagian yaitu pendidikan SMA, SMK, dan Madrasah (Tsanawiyah dan Aliyah). Pencapaian realisasi terlihat pada beberapa program baik yang dibiayai oleh sumber pendanaan APBN maupun Non APBN. Pada pendidikan SMA, pencapaian lebih dari 100% dari rencana induk terlihat pada program peningkatan kapasitas manajemen sekolah (391.3%). Selanjutnya pada program lain, realisasi hampir seluruhnya mencapai di atas 50% dari rencana induk sampai dengan tahun 2007. Pencapaian program di bawah 50% adalah pada pembangunan fasilitas ibadah dan operasional dan pemeliharaan (0%), Laboratorium IPA dan komputer (31.4%) dan ruang serbaguna (42.0%).

Selanjutnya pada program pendidikan SMK, pencapaian target dari rencana induk masih di bawah 50%. Pencapaian tertinggi adalah pada program pendidikan dan pelatihan siswa (41.7%), pembangunan sekolah (33.3%) dan rehab gedung (7%). Selanjutnya pada program pembangunan RKB meubeler dan bantuan BOB belum ada realisasi dari rencana induk.

Program pendidikan madrasah (Departemen Agama) realisasi pembangunan RKB dan UGB masing-masing mencapai 342.4% dan 61.5% dari rencana induk sampai dengan tahun 2007. Selanjutnya pembangunan BKG madrasah mencapai 31 buah, namun tidak terdapat dalam rencana induk. Secara terperinci disajikan pada Tabel berikut.

Tabel II. 26
Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bidang Pendidikan
(Program Pendidikan Menengah)

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SAT.	RENC. INDUK	REALISASI TAHUN 2005-2006				PROG RAM 2007	2005-2007	
				APBN	NON APBN	TOTAL	CAPAIAN		TOTAL	CAPAIAN
A	SMA	UNIT								
1	Pembangunan RKB	Paket	530	209	37	246	46.4%	23	269	50.8%
2	Pembangunan UGB Reguler & Berasrama	Unit	42	22		22	52.4%	16	40	95.2%
3	Rehab	skl	148		43	43	29.1%	21	76	51.4%
4	Meubeler	pkt	90	14		14	15.6%	59	85	94.4%
5	Buku perpustakaan	Expl	973.208	-	431.000	431.000	44.3%	21.000	487.000	50.0%
6	Lab IPA dan Komputer	pkt	140	44		44	31.4%		44	31.4%
7	Ruang Serbaguna/RPL	pkt	100	24		24	24.0%	12	42	42.0%
8	Fasilitas Ibadah	pkt	100			-	0.0%		-	0.0%
9	Peralatan Olahraga dan Seni	pkt	100			-	0.0%		69	69.0%
10	Pengembangan	skl	20			-	0.0%		7	35.0%

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SAT.	RENC. INDUK	REALISASI TAHUN 2005-2006			PROG RAM 2007	2005 -2007	
				APBN	NON APBN	TOTAL		TOTAL	CAPAI AN
	sekolah bertaraf International								
11	Operasional dan pemeliharaan	skl	1.120			-	0.0%	-	0.0%
12	Peningkatan kapasitas manajemen sekolah	skl/org	92	120		120	130.4%	360	391.3%
B	SMK	UNIT				-		-	
1	Rehab gedung	unit	14		1	1	7.1%	1	7.1%
2	Pembangunan	unit	3		1	1	33.3%	1	33.3%
3	Pembangunan RKB	ruang	34			-	0.0%	-	0.0%
4	Pendidikan dan pelatihan siswa	siswa	240	100		100	41.7%	100	41.7%
5	Bantuan Peralatan dan meubeler	lokasi	67			-	0.0%	-	0.0%
6	bantuan BOP (buku, bahan ajar, PBS	skl	152			-	0.0%	-	0.0%
7	Vocational Training	Org			10.540	10.540		435	10.975
C	PENDIDIKAN DEPAG (MADRASAH)	UNIT							
1	Pembangunan RKB madrasah		85	291		291	342.4%	291	342.4%
2	Pembangunan UGB Madrasah		52	32		32	61.5%	32	61.5%
3	Pembangunan BKG Madrasah			31		31		31	

Sumber : Data Kedeputan Pendidikan dan Kesehatan BRR, Mei 2007.

Program dan kegiatan pendidikan tinggi, menitikberatkan pada kegiatan fisik dan pemberian santunan/bantuan berupa beasiswa pendidikan kepada mahasiswa/dosen yang melakukan studi. Hampir seluruh kegiatan pada program ini telah mencapai realisasi yang telah ditetapkan dalam rencana induk (pencapaian lebih dari 100%). Namun demikian, terdapat beberapa program yang belum terealisasi yaitu perbaikan dan perluasan asrama mahasiswa (realisasi 0%) sampai dengan tahun 2007. Secara terperinci disajikan pada Tabel berikut.

Tabel II. 27
Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bidang Pendidikan
(Program Pendidikan Tinggi)

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SAT.	RENC. INDUK	REALISASI TAHUN 2005-2006				PROG RAM 2007	2005 -2007	
				APBN	NON APBN	TO TAL	CAPAI AN		TOTAL	CAPAIAN
	PENDIDIKAN TINGGI (4 PT + swasta)	pts								
1	Penyediaan dosen bantu 6 bulan	OB	900				0.0%		-	0.0%
2	Kompensasi SPP 2004/2005	Mhs	-						-	
3	Beasiswa mahasiswa korban tsunami/kurang Mampu/ikatan dinas	Mhs	13.500	8.846	17.194	26.040	192.9%	6.782	40.746	301.8%
4	Penggantian ruang kantor dan Laboratorium	pkt	4			-	0.0%	3	4	100.0%
5	Penggantian meubeler kuliah, lab & kantor	pkt	17		12	12	70.6%	4	16	94.1%
6	Perbaikan Mess Dosen	pkt	2		2	2	100.0%		2	100.0%
7	Penggantian Meubeler asrama mahasiswa	pkt	2	1		1	50.0%	1	2	100.0%
8	Perbaikan Asrama Mahasiswa	m2	5.900			-	0.0%	1	1	0.0%
9	Penggantian/pengadaan peralatan Lab	pkt	26			-	0.0%	6	8	30.8%

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SAT.	RENC. INDUK	REALISASI TAHUN 2005-2006				PROG RAM 2007	2005 -2007	
				APBN	NON APBN	TO TAL	CAPAI AN		TOTAL	CAPAIAN
10	Penambahan Luas asrama mahasiswa	pkt	1			-	0.0%		-	0.0%
11	Penggantian Kendaraan Dinas	unit	10		8	8	80.0%		8	80.0%
12	Santunan dosen/tenaga adm PT	org	213		500	500	234.7%		500	234.7%
13	Penggantian Bus kampus	unit	15			-	0.0%		-	0.0%
14	Perbaikan pagar kampus	m2	5.200			-	0.0%		-	0.0%
15	Perbaikan jalan Kampus	pkt	1		1	1	100.0%		2	200.0%
16	Beasiswa dan Pelatihan Dosen S2/S3	org	150	142		142	94.7%	87	369	246.0%
17	Pembangunan Rumah Dosen	pkt	1		5	5	500.0%		5	500.0%
18	Pembuatan sumur dan jaringan air bersih	unit	3	1		1	33.3%	2	3	100.0%
19	Pembangunan Pusat Pelatihan Unsyiah	pkt	1			-	0.0%		1	100.0%
20	Meubeler Pusat Pelatihan Unsyiah	pkt	1			-	0.0%		1	100.0%
21	Rehab gedung PGSD Unsyiah	pkt	1	1		1	100.0%	1	2	200.0%
22	Meubeler PT	pkt	1	1		1	100.0%	3	8	800.0%
23	Perbaikan gedung pendidikan PT	pkt	7		10	10	142.9%	12	23	328.6%
24	Pembangunan kembali gedung kuliah/lab PTN & PTS	pts	3	1	1	2	66.7%	4	7	233.3%

Sumber : Data Kedeputan Pendidikan dan Kesehatan BRR, Mei 2007.

Sampai dengan tahun 2007, realisasi kegiatan riset mencapai 144.6% dan *teaching grant* mencapai 91.1% dari rencana induk dalam program penelitian dan pengembangan pendidikan. Selanjutnya bantuan praktek mahasiswa, realisasi mencapai 46.5%, pengadaan buku pustaka (18.6%) serta monitoring dan pengawasan baru mencapai 4.3% dari rencana induk. Secara terperinci disajikan pada Tabel berikut.

Tabel II. 28
Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bidang Pendidikan (Program Penelitian dan Pengembangan Pendidikan)

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SAT.	RENC. INDUK	REALISASI TAHUN 2005-2006				PROG RAM 2007	2005 -2007	
				APBN	NON APBN	TOTAL	CAPAIAN		TOTAL	CAPAIAN
1	Teaching Grant	Keg	56	17		17	30.4%		51	91.1%
2	Riset	Keg	56	42		42	75.0%	13	81	144.6%
3	Bantuan Praktek Mahasiswa & ekstra kurikuler	OB	1.800	600		600	33.3%	79	837	46.5%
4	Akreditasi, sertifikasi, dan pelatihan data base	Keg	-	29		29		5	40	
5	TOEFL dan POT dosen	Org	-	60		60			180	
6	Matrikulasi mahasiswa Undangan	Org	-	270		270			540	
7	Buku Pustaka	Pkt	59	2		2	3.4%	3	11	18.6%
8	Monitoring dan pengawasan	Keg	184	2		2	1.1%	2	8	4.3%

Sumber : Data Kedeputan Pendidikan dan Kesehatan BRR, Mei 2007.

II.1.3.3.2 Kesehatan

Pelaksanaan Program upaya pemeliharaan dan pemulihan kesehatan, capaiannya rata-rata telah melebihi rencana induk yang telah ditetapkan. Untuk kegiatan pengadaan alat

kedokteran, operasional dan pemeliharaan rumah sakit serta pendidikan dan pelatihan teknis realisasinya telah mencapai lebih dari 100% dan utamanya dilaksanakan pada tahun 2005-2006. Namun demikian masih terdapat beberapa kegiatan yang sampai dengan tahun 2007 belum terealisasi sepenuhnya seperti pembangunan rumah dinas (4.8%), pengadaan kendaraan (7.2%) maupun pembangunan dan perawatan gedung kesehatan dan pendidikan. Dalam bentuk tabel disajikan pada Tabel berikut:

Tabel II. 29
Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bidang Kesehatan
(Program Upaya Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan)

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	SAT.	RENC. INDUK	REALISASI TAHUN 2005-2006				PROGR AM 2007	2005 -2007	
				APBN	NON APBN	TOTAL	CAPAI AN		TO TAL	CAPAI AN
1	Pendidikan dan Pelatihan Teknis	pkt	1	2	-	2	200.0%		2	200.0%
2	Pembangunan Rumah Negara									
-	Rumah Dinas	pkt	21	1	-	1	4.8%		1	4.8%
-	Rumah Dokter dan Paramedis Puskesmas	pkt	42	10	-	10	23.8%		10	23.8%
3	Pembangunan dan Perawatan Gedung Kesehatan/Pendidikan	pkt								
-	Kantor Dinas Kesehatan	pkt	5	2	-	2	40.0%	-	2	40.0%
-	Rumah Sakit	pkt	9	12	4	16	177.8%	4	20	222.2%
-	Pustu	pkt	174	-	45	45	25.9%	6	51	29.3%
-	Polindes	pkt	700	-	56	56	8.0%	4	60	8.6%
-	Klinik	pkt	6	-	5	5	83.3%	-	5	83.3%
-	BBPOM	pkt	3							
-	Laboratorium Kesehatan	pkt	1							
4	Operasional Dan Pemeliharaan Rumah Sakit	pkt	4	12		12	300.0%		12	300.0%
5	Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan, Dan KB	unit	4	24		24	600.0%		24	600.0%
6	Pengadaan Kendaraan Roda4/Roda 6/Roda 10 (ambulance)	unit	69	5		5	7.2%		5	7.2%

Sumber : Data Kedeputan Pendidikan dan Kesehatan BRR, Mei 2007.

Pada Program pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah, terdiri dari dua kegiatan dengan capaian yang telah melebihi rencana induk yang telah ditetapkan. Untuk kegiatan bantuan penanggulangan bencana alam dan kerusuhan dalam pencegahan dan pemberantasan penyakit menular telah merealisasikan 2 paket dari 1 paket yang diamanatkan dalam rencana induk (200%) sedangkan pembangunan kantor kesehatan pelabuhan baru merealisasikan 50% dari rencana induk sebesar 2 paket. Dalam bentuk tabel disajikan pada Tabel berikut:

Tabel II. 30
Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bidang Kesehatan
(Program Penyelenggaraan Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular dan Wabah)

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	SAT.	RENC. INDUK	REALISASI TAHUN 2005-2006				PROG RAM 2007	2005 -2007	
				APBN	NON APBN	TOTAL	CAPAI AN		TOTAL	CAPAIAN
1	Bantuan Penanggulangan Bencana Alam dan Kerusuhan dalam Pencegahan dan Pemberantasan	pkt	1	2	-	2	200.0%		2	200.0%

	Penyakit Menular									
2	Pembangunan Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP)	pkt	2	1	-	1	50.0%		1	50.0%

Sumber : Data Kedeputan Pendidikan dan Kesehatan BRR, Mei 2007.

Realisasi program pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan seluruhnya telah mencapai lebih dari 100% dari rencana induk. Pengadaan peralatan medis dan pembangunan gedung farmasi/obat telah dilaksanakan seluruhnya pada tahun 2006 dan diteruskan lagi pada tahun 2007. Demikian pula dengan program peningkatan kesehatan masyarakat. Pembangunan fasilitas puskesmas dan pelayanan kesehatan di pengungsian telah terealisasi masing-masing sebesar 148.4% dan 276.4% sampai dengan tahun 2007. Dalam bentuk tabel disajikan pada Tabel berikut:

Tabel II. 31
Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bidang Kesehatan
(Program Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan
dan Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat)

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SAT.	RENC. INDUK	REALISASI TAHUN 2005-2006				PROG RAM 2007	2005 -2007	
				APBN	NON APBN	TOTAL	CAPAI AN		TOTAL	CAPAIAN
A	Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan		6					-		
1	Pengadaan Peralatan Medis di Laboratorium Daerah dan Balai Pengawasan Obat dan Makanan	pt	1	1	-	1	100.0%		1	100.0%
2	Pembangunan Gudang Farmasi/Obat	pt	5	12	-	12	240.0%		12	240.0%
B	Peningkatan Kesehatan Masyarakat		119	162	34	196	164.7%	51	247	207.6%
1	Pembangunan Fasilitas Pelayanan Kesehatan/Puskesmas	unit	64	52	31	83	129.7%	12	95	148.4%
2	Pelayanan Kesehatan di Pengungsian/Poskeslit	unit	55	110	3	113	205.5%	39	152	276.4%

Sumber : Data Kedeputan Pendidikan dan Kesehatan BRR, Mei 2007.

Demikian pula dengan program pengkajian dan penelitian bidang kesehatan. Realisasi telah mencapai 100% untuk seluruh kegiatannya. Bahkan pada program perbaikan gizi masyarakat, realisasi mencapai lima kali lipat dari amanat rencana induk (lebih dari 500%) dan telah dilaksanakan pada 21 kota/kabupaten di Provinsi NAD dan Kepulauan Nias. Selanjutnya pada program pengembangan pendidikan tenaga kesehatan, seluruh kegiatan telah melampaui amanat rencana induk (lebih dari 100%) kecuali pada kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Institusi Pendidikan dan Pengembangan Kesehatan yang baru mencapai realisasi 33% (2 unit) dari amanat rencana induk. Secara terperinci pencapaian disajikan pada Tabel berikut.

Tabel II. 32
Pelaksanaan Rehabilitasi dan Bidang Kesehatan (Program Pengkajian & Penelitian Terapan di Bidang Kesehatan, Pengembangan Pendidikan Tenaga Kesehatan & Program Perbaikan Gizi Masyarakat)

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SAT.	RENC. INDUK	REALISASI TAHUN 2005-2006				PROG RAM 2007	2005 -2007	
				APBN	NON APBN	TOTAL	CAPAI AN		TOTAL	CAPAIAN
A	Pengkajian dan Penelitian Terapan di Bidang Kesehatan		2					25		

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	SAT.	RENC. INDUK	REALISASI TAHUN 2005-2006				PROG RAM 2007	2005 -2007	
				APBN	NON APBN	TOTAL	CAPAI AN		TOTAL	CAPAIAN
1	Pengadaan Barang Reagensia Litbangkes untuk Kegiatan Laboratorium	pkt	1	1	-	1	100.0%		1	100.0%
2	Penelitian, Pengkajian Dan Pelaksanaan Terapan	pkt	1	1	-	1	100.0%		1	100.0%
B	Pengembangan Pendidikan Tenaga Kesehatan		8	7		7	87.5%	503	510	6375.0%
1	Pengadaan Buku Perpustakaan UPTD Pendidikan	pkt	1	1	-	1	100.0%		1	100.0%
2	Beasiswa Pendidikan Lanjutan Tenaga Kesehatan	pkt	1	4	-	4	400.0%		4	400.0%
3	Pembangunan Sarana dan Prasarana Institusi Pendidikan dan Pengembangan Kesehatan	pkt	6	2	-	2	33.3%		2	33.3%
C	Perbaikan Gizi Masyarakat		42	236	-	236	561.9%	21	257	611.9%
1	Pendidikan dan Pelatihan Teknis	Kab/ Kota	21	118	-	118	561.9%		118	561.9%
2	Pelayanan Kesehatan dan Perbaikan Gizi	Kab/ Kota	21	118	-	118	561.9%		118	561.9%

Sumber : Data Kedeputan Pendidikan dan Kesehatan BRR, Mei 2007.

Selanjutnya pada program penyelenggaraan kebijakan & manajemen pembangunan kesehatan, program peningkatan pelayanan kesehatan pengungsi korban bencana dan penanggulangan masalah kesehatan dan program penyelenggaraan penyehatan lingkungan, realisasi seluruhnya telah mencapai target atau melampaui target yang telah ditetapkan rencana induk sejak periode tahun 2005-2006. selanjutnya beberapa penambahan juga dilaksanakan realisasinya pada tahun 2007. Secara terperinci pencapaian tiap program yaitu (Program Penyelenggaraan Kebijakan & Manajemen Pembangunan Kesehatan, Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pengungsi Korban Bencana dan Penanggulangan Masalah Kesehatan dan Program Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan) akan diperjelas melalui tabel dibawah ini.

Tabel II. 33
Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bidang Kesehatan

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	SAT.	RENC. INDUK	REALISASI TAHUN 2005-2006				PROG RAM 2007	2005 -2007	
				APBN	NON APBN	TO TAL	CAPAI AN		TOTAL	CAPAI AN
A	Penyelenggaraan Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan		3					22		
1	Administrasi Umum	pkt	1	2	-	2	200.0%		2	200.0%
2	Pendidikan dan Pelatihan Teknis	pkt	1	2	-	2	200.0%		2	200.0%
3	Bantuan Penanggulangan Bencana Alam dan Kerusuhan	pkt	1	2	-	2	200.0%		2	200.0%
B	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pengungsi Korban Bencana dan		1	1	-	1	100.0%	2	3	300.0%

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	SAT.	RENC. INDUK	REALISASI TAHUN 2005-2006				PROG RAM 2007	2005-2007	
				APBN	NON APBN	TO TAL	CAPAI AN		TOTAL	CAPAI AN
	Penanggulangan Masalah Kesehatan									
1	Program Promosi Kesehatan	pkt	1	1	-	1	100.0%		1	100.0%
C	Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan		1	2	-	2	200.0%	34	36	3600.0 %
1	Peningkatan Sarana Sanitasi Air Bersih dan Sarana Sanitasi Dasar	pkt	1	2	-	2	200.0%		2	200.0%

Sumber : Data Kedeputian Pendidikan dan Kesehatan BRR, Mei 2007.

II.1.3.3.3 Agama

Pelaksanaan Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama, capaiannya sudah melebihi rencana induk yang telah ditetapkan. Untuk program pembangunan tempat ibadah, pencapaian sebesar 91% telah terlaksana pada tahun 2005-2006 dan 2007 yang meliputi pembangunan Masjid, Meunasah, dayah, Balai pengajian, Gereja dan Vihara.

Selanjutnya untuk pembangunan kembali KUA yang direncanakan sebanyak 68 buah (rencana induk), telah terealisasi pembangunannya sebanyak 50 unit pada 2005-2006 dan tambahan sebanyak 66 unit pada tahun 2007 sehingga total KUA terbangun kembali sebanyak 116 KUA (171%). Namun demikian untuk pengadaan buku nikah yang direncanakan sejumlah 30.000 eksemplar belum terealisasi hingga tahun 2007 (0%).

Sumber pendanaan berasal dari pembiayaan APBN dan non APBN. Target realisasi program pada periode 2005-2006 dan sampai dengan tahun 2007 disajikan pada Tabel berikut.

Tabel II. 34
Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias oleh Bapel dalam Bidang Agama
(Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama)

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	SAT.	RENC. INDUK	REALISASI TAHUN 2005-2006				PROG RAM 2007	2005-2007	
				APBN	NON APBN	TOTAL	CAPAIAN		TOTAL	CAPAI AN
1	Terbangunnya kembali tempat ibadah	Unit	3.114	2.525	66	2.591	83%	239	2.830	91%
	- Masjid	Unit	1.167	1.410	50	1.460	125%	73	1.533	131%
	- Meunasah	Unit		437	16	453		35	488	
	- Dayah	Unit		145	3	148		15	163	
	- Balai Pengajian	Unit	85	196		196	231%	15	211	248%
	- Vihara	Unit	4			-	0%	2	2	50%
	- Gereja	Unit	1.943	337		337	17%	141	478	25%
2	Terbangunnya kembali KUA	Unit	68	50		50	74%	66	116	171%
3	Pengadaan buku nikah	exp.	30.000				0%			0%

Sumber : BRR NAD-Nias, 2007

Untuk program Pengembangan Nilai-nilai Keagamaan, beberapa capaian telah terlaksana pada tahun 2005-2006 dan tahun 2007. Sumber pembiayaan berasal dari pendanaan APBN. Rincian kegiatan meliputi terbinanya kembali ketenteraman bathin (berupa pembinaan dan pelatihan serta bantuan imuem meunasah sebanyak 300 orang), bantuan Al-Qur'an sebanyak 32.655 eksemplar dan pemberian beasiswa pada siswa/santri korban tsunami (7.900 orang). Target realisasi program pada periode 2005-2006 dan sampai dengan tahun 2007 disajikan pada Tabel berikut.

Tabel II. 35
Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias oleh Bapel dalam Bidang Agama
(Program Pengembangan Nilai-nilai Keagamaan)

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	SAT.	RENC. INDUK	REALISASI TAHUN 2005-2006				PROG RAM 2007	2005-2007	
				APBN	NON APBN	TOTAL	CAPAI AN		TOTAL	CAPAI AN
1	Terbinanya kembali ketenteraman bathin	pkt	589	176		176	30%		176	30%
2	Bantuan Qur'an, Kitab dan Buku-buku bacaan	buah	0	20.405		20.405		12.250	32.655	
3	Beasiswa Mahasiswa, Siswa dan Santri Korban Tsunami	Org		7.900		7.900			7.900	

Sumber : BRR NAD-Nias, 2007

Program Pengembangan Nilai Keagamaan meliputi pelatihan kader-kader agama, pemulihan kondisi mental dan spiritual, penelitian keagamaan dan penempatan guru da'i di dayah. Sumber pembiayaan terutama berasal dari APBN, namun pada beberapa kegiatan juga didanai dari sumber non APBN (seperti bantuan pembangunan dayah sebanyak 7 unit pada tahun 2005-2006). Realisasi pelatihan kader Masjid telah melatih 585 orang pada tahun 2005-2006. selanjutnya hingga tahun 2007 telah dilakukan beberapa realisasi seperti pembangunan asrama santri, bantuan pembangunan gedung dan pengadaan fasilitas agama, kegiatan magang, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat seperti remaja Masjid.

Selanjutnya, program pemulihan mental dan spiritual telah merealisasikan 93 paket kegiatan, penelitian keagamaan telah merealisasikan pencetakan 10.000 eksemplar terjemahan Al-Qur'an berbahasa Aceh. Berikutnya, sejumlah 4.190 guru/da'i telah ditempatkan secara tersebar pada beberapa sekolah.

Realisasi program pada periode 2005-2006 dan sampai dengan tahun 2007 disajikan pada Tabel berikut.

Tabel II. 36
Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias oleh Bapel dalam Bidang Agama
(Program Peningkatan Pendidikan Agama dan Keagamaan)

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	SAT.	RENC. INDUK	REALISASI TAHUN 2005-2006				PROG RAM 2007	2005-2007	
				APBN	NON APBN	TOTAL	CAPAI AN		TOTAL	CAPAI AN
1	Terlatihnya kader-kader imam Masjid, khatib, dan lain-lain	pkt	154	285		285	185%	300	585	380%
2	Pulihnya kondisi mental spiritual.	Org		93		93			93	
3	Penelitian Keagamaan	Paket		8		8			8	
4	Penempatan/Bantuan Guru dan Tenaga Dai	Org		3.970		3.970		220	4.190	

Sumber : BRR NAD-Nias, 2007

Program lainnya di bidang agama adalah Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Aparatur Negara. Kegiatan pembangunan gedung Kanwil Depag Provinsi NAD yang pada rencana induk akan dibangun 1 unit yang telah terealisasi tahun 2007. Realisasi yang telah dilaksanakan adalah kegiatan rehabilitasi gedung Kanwil Depag pada beberapa kabupaten/kota sebanyak 9 unit (rencana induk 7 unit).

Rehabilitasi Gedung Dinas Syari'ah Propinsi dan Gedung Dinas Syari'ah Kab/kota yang direncanakan sejumlah 4 unit, namun dalam realisasinya telah melakukan rehabilitasi sebanyak 6 unit (150%) sampai dengan tahun 2007. Sedangkan rehabilitasi gedung untuk observasi vital dan asrama haji masing-masing telah direalisasikan sebanyak 1 unit.

Penambahan ruangan pada pembangunan beberapa gedung baitul mal juga telah dilaksanakan antara lain di Provinsi NAD, Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Jaya, Pidie dan Aceh Barat. Selanjutnya pengadaan meubeler dan perlengkapan gedung juga beberapa telah terealisasi seperti pengadaan meubeler asrama haji, Kantor Depag dan Syari'ah Islam Aceh Jaya.

Realisasi program pada periode 2005-2006 dan sampai dengan tahun 2007 disajikan pada Tabel berikut.

Tabel II. 37
Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias oleh Bapel dalam Bidang Agama
(Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Aparatur Negara)

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SAT.	RENC. INDUK	REALISASI TAHUN 2005-2006				PROG RAM 2007	2005 -2007	
				APBN	NON APBN	TOTAL	CAPAI AN		TOTAL	CAPAI AN
1	Gedung Kanwil Depag Propinsi NAD	Unit	1				0%	1	1	100%
2	Gedung Kandepag Kab./kota	Unit	7	7		7	100%	2	9	129%
3	Gedung Dinas Syariat propinsi dan gedung Dinas Syariat Kab./Kota	Unit	4	6		6	150%	2	8	200%
4	Gedung MPU propinsi dan gedung MPU kab./kota	Unit	4	8		8	200%	5	13	325%
5	Gedung Observasi Hilal	Unit	1	1		1	100%	1	2	200%
6	Asrama Haji	Unit	1	1		1	100%		1	100%
7	Meubeler dan Perlengkapan Gedung	Set		279		279		9	288	
8	Pengadaan Tanah untuk Kantor Pemerintah	M2								
9	Bangunan lain (rumah dinas dan Aula)	Unit	4					10	10	250%

Sumber : BRR NAD-Nias, 2007

Berdasarkan penyebaran program/kegiatan di Kabupaten/Kota maka rekapitulasi data Realisasi Sub Bidang Pelayanan keagamaan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi berdasarkan sebaran kabupaten di Provinsi NAD dan Nias tahun 2005-2006 dan Program 2007 ditampilkan dalam Tabel berikut. Program meliputi kegiatan sosial agama, rehabilitasi mental agama, kegiatan agama dan penyediaan Al-Qur'an. Penyebaran kegiatan meliputi 21 Kabupaten di Provinsi NAD dan 2 kabupaten di Nias.

Tabel II. 38
Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias oleh Bapel dalam Sub Bidang Pelayanan Keagamaan

NO	KABUPATEN/KOTA	KEGIATAN SOSIAL AGAMA	REHAB. MENTAL AGAMA	KEGIATAN AGAMA	AL QUR'AN EDISI LUX
1	Aceh Barat	1	3	0	12
2	Aceh Barat Daya	1	1	0	7
3	Aceh Besar	0	4	2	31
4	Aceh Jaya	22	3	0	8
5	Aceh Selatan	4	0	1	7
6	Aceh Singkil	2	2	0	12
7	Aceh Tamiang	0	0	0	15
8	Aceh Tengah	2	0	0	15
9	Aceh Tenggara	3	2	0	7
10	Aceh Timur	2	1	0	21
11	Aceh Utara	12	2	0	35
12	Banda Aceh	67	7	8	25
13	Bener Meriah	0	0	0	10
14	Bireuen	0	1	1	35
15	Gayo Luwes	0	0	0	3
16	Kota Langsa	0	0	0	8
17	Kota Lhokseumawe	0	0	0	10
18	Nagan Raya	0	1	0	7
19	Pidie	47	5	1	35
20	Sabang	1	0	1	2
21	Simeulue	1	3	0	8
Sub Total NAD		165	35	14	313

NO	KABUPATEN/KOTA	KEGIATAN SOSIAL AGAMA	REHAB. MENTAL AGAMA	KEGIATAN AGAMA	AL QUR'AN EDISI LUX
1	Nias	1	0	0	0
2	Nias Selatan	0	0	0	0
TOTAL		166	35	14	313

Sumber : BRR NAD-Nias, 2007

II.1.3.3.4 Sosial Budaya dan Sumberdaya Manusia

II.1.3.3.4.1 Sosial

Untuk kegiatan bidang sosial, berdasarkan rencana induk terdapat 5 (lima) kelompok program penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi yaitu : Bantuan dan jaminan sosial; Pelayanan dan rehabilitasi sosial; Pemberdayaan Fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS lainnya; Penelitian dan pengembangan kesejahteraan sosial; Pemberdayaan kelembagaan Kesejahteraan sosial.

Program bantuan jaminan sosial sebagian besar telah selesai dilaksanakan pada masa tanggap darurat, berupa bantuan kebutuhan pokok kepada pengungsi. Selanjutnya pada program tahun 2007, masih ada bantuan kebutuhan pokok (beras, lauk pauk dan sandang) untuk pengungsi yang masih tersisa tinggal di barak untuk sekitar 1.500 pengungsi.

Tabel II. 39
Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bidang Sosial
(Program Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial)

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SAT.	RENC. INDUK	REALISASI TAHUN 2005-2006				PROGRAM 2007	2005 -2007	
				APBN	NON APBN	TOTAL	CAPAI AN		TOTAL	CAPAI AN
1	Tanggap Darurat (Lauk, beras, sandang)	Paket	40.331	82		82	0.0%	100	100	0.2%
2	Program Bantuan Pengungsi	Org	40.331	2.127		2.127	0.0%	1500	1.500	3.7%
3	Program bantuan wanita (org)	Paket		200	8.410	8.610		3	3	
4	Bantuan Rehab Rumah (unit)	Paket		300	546	846		1	1	
5	Pembangunan Trauma Centre.	Unit	1				0.0%			0.0%

Sumber : Data Kedeputan Agama, Sosial dan Budaya BRR, Mei 2007.

Jika mengacu pada Rencana Induk, program pelayanan dan rehabilitasi sosial hanya menyebutkan kebutuhan bantuan rehabilitasi sosial sebanyak 12 kegiatan, namun pada pelaksanaannya telah melampaui target rencana induk tersebut, baik dilihat dari jumlah kegiatan maupun jenis kegiatannya. Untuk lebih jelasnya lihat tabel berikut ini.

Tabel II. 40
Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bidang Sosial
(Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial)

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SAT.	RENC. INDUK	REALISASI TAHUN 2005-2006				PROGRAM 2007	2005 -2007	
				APBN	NON APBN	TOTAL	CAPAI AN		TOTAL	CAPAI AN
1	Bantuan Panti Sosial	Keg	12	6		6	0.0%	171	171	1425.0%
2	Bantuan sarana Panti Sosial	Panti		49		49		68	68	
3	Pembangunan Gedung	Unit		1		1		7	7	

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	SAT.	RENC. INDUK	REALISASI TAHUN 2005-2006			PROGRAM 2007	2005-2007	
				APBN	NON APBN	TOTAL		TOTAL	CAPAI AN
	Sosial Kemasyarakatan								
4	Bantuan Sarana Penyandang Cacat	Unit		10		10	9	9	
5	Penampungan anak dan lansia (Org)	Paket		51	178	229	4	4	
6	Bantuan Biaya fakir miskin	Org		13.366		13.366			
7	Bantuan Lokakarya Bidang Sosial	Angk.		10		10			
8	Bantuan Prasarana dan sarana penyandang cacat	Pkt		35		35			
9	Bantuan ekonomi untuk Panti	Pkt		22		22			
10	Bantuan Makan Panti	Org		10.000		10.000			
11	Peningkatan Kesra Anak (Org)	Pkt		19	139.363	139.382			
12	Bantuan anak berprestasi	Org		500		500			

Sumber : Data Kedeputan Agama, Sosial dan Budaya BRR, Mei 2007.

Pada program pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS berdasarkan rencana induk, yang diamanatkan hanya dua kegiatan yaitu bantuan pengungsi sebanyak 19.500 paket dan bantuan pengembangan usaha produktif untuk 10.700 desa. Realisasi pada kegiatan program ini lebih banyak ditangani melalui bantuan Internasional NGO dan Donor. Sehingga pada program tahun 2007, BRR (APBN) hanya menangani desa-desa yang belum mendapatkan bantuan (*filling gap*), yakni untuk 45 desa.

Tabel II. 41
Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bidang Sosial
(Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT, MKS.)

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	SAT.	RENC. INDUK	REALISASI TAHUN 2005-2006				PROG. 2007	2005-2007	
				APBN	NON APBN	SAT.	TOTAL	CAPAIAN	TOTAL	CAPAIAN
1	Usaha ekonomis produktif.	Paket						1	1	
2	Bantuan pengembangan usaha ekonomi produktif	Desa	10.700	300			300	0.0%	45	45 0.4%
3	Bantuan Pengungsi (Org)	Pkt	19.500	322	449,103		449,425	0.0%		0.0%
4	Kebutuhan layanan sosial	KK		300			300			
5	Pelatihan keterampilan dan pembinaan wirausaha (Org)	Keg		12	34,315		34,327			
6	Bimbingan sosial RSDK	Keg		3			3			
7	Bantuan KUBE Penyandang cacat	Pkt		6			6			
8	Rehab TMP/Perbaikan Rumah Perintis									
9	Keluarga Rentan/Korban Konflik	Pkt		1.270			1.270		27	27
10	Kembalinya 265 KK KAT ke lokasi.	Desa		60			60			
11	Pengembangan Pranata Sosial	Desa		60			60		45	45

Sumber : Data Kedeputan Pendidikan dan Kesehatan BRR, Mei 2007.

Begitupula pada program pelayanan rehabilitasi sosial, meskipun realisasi capaian pelaksanaan terhadap rencana induk pada beberapa kegiatan mencatat angka nol namun kenyataan di lapangan kegiatan dimaksud sudah ditangani melalui bantuan NGO dan donor, serta sebagian pekerjaan tidak diperlukan lagi. Program tahun 2007 mencatat beberapa kegiatan yang juga sifatnya 'filling gap'.

Tabel II. 42
Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bidang Sosial
(Program Pelayanan Rehabilitasi Sosial)

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SAT.	RENC. INDUK	REALISASI TAHUN 2005-2006				PROG. 2007	2005-2007	
				APBN	NON APBN	TO TAL	CAPAIAN		TO TAL	CAPAIAN
1	Bantuan insentif petugas pendamping Keluarga Binaan Sosial	Pkt	25.000	1		1	0.0%			0.0%
2	Bantuan biaya peningkatan kapasitas kecerdasan sosial mahasiswa	Pkt	2.500	1		1	0.0%	4	4	0.2%
3	Pendampingan Masyarakat Desa	Desa		1.020		1.020		95	95	
4	Peningkatan Kecerdasan Sosial	Pkt		1		1				
5	Pembangunan Sistem Kesejahteraan Sosial Desa	Desa						50	50	
6	Program bantuan sosial untuk kegiatan sosial masyarakat	Pkt		1		1		39	39	
7	Program pendidikan dan pelatihan masyarakat	Keg		59		59				
8	Pendirian Pati	Unit	5				0.0%			0.0%
9	Terkumpulnya data-data permasalahan sosial di NAD	Keg		1		1				
10	Bantuan penunjang kegiatan Karang Taruna Indonesia Propinsi NAD	Pkt		1		1				
11	Program pemetaan permasalahan sosial pasca bencana	Keg		1		1				
12	Bantuan pengkajian alternative untuk membangun masyarakat kreatif, inovatif dan produktif	Keg		1		1				
13	Program pembuatan film dokumenter sosial tentang pembangunan Aceh kembali	Pkt		1		1				

Sumber : Data Kedeputusan Pendidikan dan Kesehatan, Mei 2007.

Untuk program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial hanya mencatat satu kegiatan yaitu rehabilitasi yayasan/panti, yaitu realisasi pelaksanaan sampai tahun 2007 sebesar 21 unit dan program 2007 sebesar 5 unit. pada tahun tidak mencatat. Begitupula untuk program.

Tabel II. 43
Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bidang Sosial
(Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial)

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SAT.	RENC. INDUK	REALISASI TAHUN 2005-2006				PROG. 2007	2005-2007	
				APBN	NON APBN	TO TAL	CAPAIAN		TO TAL	CAPAIAN
A	Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial									
1	Rehabilitasi yayasan/orsos/panti masyarakat	Paket		21				5	5	
2	Rehab TMP/MPN/Perbaikan	Pkt	18.810				0.0%			0.0%

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SAT.	RENC. INDUK	REALISASI TAHUN 2005-2006				PROG. 2007	2005-2007	
				APBN	NON APBN	TO TAL	CAPAI AN		TO TAL	CAPAI AN
	Rumah PK									
B	Litbang Kesejahteraan Sosial									
1	Pelatihan PNS	Org								
2	Identifikasi Kearifan Lokal	Pkt								
3	Pemetaan Sosial Paska Bencana	Pkt								

Sumber : Data Kedeputian Pendidikan dan Kesehatan BRR, Mei 2007.

Tabel berikut menggambarkan penyebaran program/kegiatan di Kabupaten/Kota untuk program bantuan Sosial.

Tabel II. 44
Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Bidang Bantuan Sosial per Kabupaten

NO	KABUPATEN/ KOTA	RENOVASI PELATIHAN ANAK CACAT	PKS I/II	PENYEBARAN BANTUAN SOSIAL	PEMBERIAN SARANA KOMPUTER	BANTUAN ANAK ASUH
1	Aceh Barat	1		18		
2	Aceh Barat Daya		2			
3	Aceh Besar		14	15	5	1,758
4	Aceh Jaya	1	2	15		
5	Aceh Selatan		2			
6	Aceh Singkil	1				
7	Aceh Tamiang					
8	Aceh Tengah	2	2			
9	Aceh Tenggara	2				
10	Aceh Timur	1	4			
11	Aceh Utara	4	6	10		58
12	Banda Aceh		10	5	5	482
13	Bener Meriah	1				
14	Bireuen	1				
15	Gayo Lues	1				
16	Kota Langsa	1				
17	Kota Lhokseumawe	1	12			140
18	Nagan Raya		2			
19	Pidie	3	6	10		814
20	Sabang	1	2		5	
21	Simeulue		2			
22	NAD*)					3252
23	DONOR/NGO	-				
	SUB TOTAL NAD	22	64	68	15	3252
1	KEPULAUAN NIAS	15	50	50	50	2000
TOTAL NAD & SUMUT						5252

Sumber : Data Kedeputian Pendidikan dan Kesehatan BRR, Mei 2007.

II.1.3.3.4.2 Pemberdayaan Perempuan

Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pada bidang pemberdayaan perempuan, yang mengacu pada rencana induk, terutama berkenaan dengan Program Penguatan Kelembagaan, Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan, Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak, dan Pelayanan Keluarga Berencana di Provinsi NAD dan Nias kepulauan.

Realisasi pelaksanaan sampai dengan tahun 2006 terdapat program dengan capaian sesuai target rencana induk (100%), melebihi target rencana induk ($\geq 100\%$) dan adapula yang belum sesuai target rencana induk bahkan sampai tahun 2007, seperti revitalisasi kelembagaan (5,9%), pengarusutamaan gender dan survey assessment kebutuhan khusus

perempuan. Untuk program/kegiatan dengan realisasi yang belum mencapai target rencana induk akan dilakukan penajaman sasaran disesuaikan dengan kebutuhan real.

Tabel II. 45

**Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bidang Pemberdayaan Perempuan
(Program Penguatan Kelembagaan)**

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SAT.	RENC. INDUK	REALISASI TAHUN 2005-2006				PROG. 2007	2005 -2007	
				APBN	NON APBN	TO TAL	CAPAIAN		TO TAL	CAPAIAN
1	Revitalisasi Kelembagaan	Unit	51	2		2	3.9%	1	3	5.9%
2	Pengarusutamaan Gender	Paket Pertemuan	51	2		2	3.9%	1	3	5.9%
3	Assessment data dan kebutuhan khusus perempuan	Survey	17	4		4	23.5%	1	5	29.4%
4	Rehabilitasi psikologis & peningkatan keterampilan perempuan	Paket	1	1		1	100.0%		1	100.0%
5	Bea siswa bagi ulama perempuan , pelatihan dan kursus singkat bagi pemimpin perempuan	Paket	1					1	1	100.0%
6	Sosialisasi garapan kepada masyarakat desa	Paket	1	1		1	100.0%		1	100.0%
7	Pelatihan tenaga sukarela masyarakat bagi remaja desa	Paket	1							

Sumber : BRR NAD-Nias, 2007

Realisasi program yang telah mencapai target atau melampaui target yang telah ditetapkan rencana induk adalah pelatihan life skill dan vocational, bantuan dengan kompetensi bagi masyarakat dan workshop 'trafficking' dan 'judicial watch networking' (masing-masing pencapaian 100% hingga tahun 2007). Pencapaian tersebut terutama pada periode tahun 2005-2006. Selanjutnya program lain mencapai lebih dari 100% kecuali program fasilitasi 'woman crisis center' (19.6%) dan pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (2.6%). Secara terperinci pencapaian disajikan pada Tabel berikut.

Tabel II. 46

Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pemberdayaan Perempuan (Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan perempuan)

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SAT	RENC. INDUK	REALISASI TAHUN 2005-2006				PROG. 2007	2005 -2007	
				AP BN	NON APBN	TO TAL	Capaian		Total	Capaian
1	Fasilitasi Pusat Penanganan Krisis pda wanita	Unit	51	10		10	19.6%		10	19.6%
2	Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan	Kelompok	901	10		10	1.1%	13	23	2.6%
3	Pemberdayaan Ekonomi Perempuan	Kelompok	850	1.800		1.800	211.8%	3.500	5.300	623.5%
4	Dukungan Hukum untuk Perempuan	Kasus	17	118		118	694.1%	100	218	1282.4%
5	Pelatihan keterampilan hidup dan vocational skill untuk perempuan	Paket	1	1		1	100.0%		1	100.0%
6	Bantuan pada kelompok pengajian	Paket	1	2.100		2.100			2.100	
7	Bantuan untuk masyarakat dengan kompetensi	Paket	1	1		1	100.0%		1	100.0%
8	Penyediaan sarana tempat perempuan melakukan kegiatan	Unit	50	49		49	98.0%		49	98.0%
9	Workshop gugus anti trafficking	Paket	1	1		1	100.0%		1	100.0%

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SAT	RENC. INDUK	REALISASI TAHUN 2005-2006				PROG. 2007	2005 -2007	
				AP BN	NON APBN	TOTAL	Capaian		Total	Capaian
10	Workshop jaringan pemerhati hukum	Paket	1	1		1	100.0%		1	100.0%

Sumber : Data Kedeputian Pendidikan dan Kesehatan BRR, Mei 2007.

Pada program/kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak, mengkonsentrasikan pada rehabilitasi psikologis anak dan keluarga pasca bencana serta kelengkapan kebutuhan administrasi kependudukan. Hampir seluruh program telah mencapai target realisasi yang telah ditetapkan oleh rencana induk seperti TOT pola asuh anak, qanun perlindungan anak, penyelenggaraan kongres anak, dan pedoman dan KIE (pencapaian 100%). Namun demikian, terdapat beberapa program yang realisasinya di bawah 100% yaitu reunifikasi keluarga (1.8%) dan fasilitasi *children center and kid conselling* (29.4%). Adapun kegiatan pemantauan dan evaluasi kegiatan Satker realisasinya baru mencapai 50%. Secara terperinci disajikan pada Tabel berikut.

Tabel II. 47
Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi bidang Pemberdayaan Perempuan
(Program Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak)

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SAT.	RENC. INDUK	REALISASI TAHUN 2005-2006				PROG. 2007	2005 -2007	
				APBN	NON APBN	TOTAL	Capaian		Total	Capaian
1	Fasilitasi Pusat Anak dan Konseling untuk anak	Unit	34	10		10	29.4%		10	29.4%
2	Reunifikasi Keluarga	Anak	6.800				0.0%	120	120	1.8%
3	Dukungan untuk mendapatkan akte kelahiran gratis	Anak		38.386		38.386		34.837	73.223	
4	Dukungan untuk pengembangan pola asuh anak									
5	Pedoman dan KIE	Paket	1				0.0%	1	1	100.0%
6	TOT bagi Pola Asuh Anak	Diklat	1				0.0%	1	1	100.0%
7	Qanun perlindungan anak (akte kelahiran bebas)	Paket	1				0.0%	1	1	100.0%
8	Penyelenggaraan kongres anak	Paket	1	1		1	100.0%		1	100.0%
9	Monitoring dan evaluasi untuk kegiatan Satker	Paket	4	1		1	25.0%	1	2	50.0%

Sumber : BRR NAD-Nias, 2007

Program Pelayanan Keluarga Berencana (KB) menitikberatkan pada program pendidikan, pelatihan, pelayanan kesehatan gizi serta pengadaan peralatan/perlengkapan operasional. Hampir seluruh program telah terealisasi pada periode tahun 2005-2006. dari keseluruhan program yang telah ditetapkan dalam rencana induk, hanya 2 program yang belum terealisasi penuh sampai dengan tahun 2007 yaitu program perlengkapan sarana kantor dan pengadaan kendaraan roda 4 yang masing-masing pencapaiannya sebesar 33.3%. Secara terperinci disajikan pada Tabel berikut.

Tabel II. 48
Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bidang Pemberdayaan Perempuan (Program Pelayanan Keluarga Berencana)

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SAT	RENC. INDUK	REALISASI TAHUN 2005-2006				PROG. 2007	2005 -2007	
				APBN	NON APBN	Total	Capaian		Total	Capaian
1	Pendidikan dan pelatihan masyarakat	Paket	190	190		190	100.0%		190	100.0%
2	Penyuluhan dan penyebaran informasi	Paket	190	190		190	100.0%		190	100.0%
3	Pelayanan	Paket	190	190		190	100.0%		190	100.0%

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SAT	RENC. INDUK	REALISASI TAHUN 2005-2006				PROG. 2007	2005 -2007	
				APBN	NON APBN	Total	Capaian		Total	Capaian
	kesehatan/perbaikan gizi ibu/anak dan kb									
4	Pengadaan perlengkapan sarana gedung	Paket	3	1		1	33.3%		1	33.3%
5	Pengadaan kendaraan bermotor roda 2	Unit	271	271		271	100.0%		271	100.0%
6	Pengadaan kendaraan bermotor roda-4/roda-6/roda-10	Unit	3	1		1	33.3%		1	33.3%

Sumber : Data Kedeputian Pendidikan dan Kesehatan BRR, Mei 2007.

II.1.3.3.4.3 Pemuda dan Olahraga

Realisasi bidang pemuda dan olahraga pada tahun 2005-2006 meliputi dua jenis program yaitu pembinaan dan peningkatan partisipasi pemuda dan rehabilitasi serta pemeliharaan bangunan gedung olahraga dan pada program tahun 2007 seluruh program bidang pemuda dan olahraga ditangani. Untuk lebih jelasnya volume dari realisasi sampai dengan tahun 2006 dan program 2007 disajikan pada tabel berikut.

Tabel II. 49
Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias oleh Bapel
dalam Bidang Pemuda dan Olah Raga

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SAT.	RENC. INDUK	REALISASI TAHUN 2005-2006				PROG. 2007	2005 -2007	
				APBN	NON APBN	TOTAL	CAPAI AN		TOTAL	CAPAI AN
A	Program Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Pemuda									
1	Rencana Kegiatan (Adm.) (Kab./Kota)	OB	300	21		21	7%	60	81	27%
2	Penumbuhan KUPP	kelompok	125	115		115	92%	25	140	112%
3	Kelompok Pemuda sebaya	kelompok	40	83		83	208%	8	91	228%
4	Pengembangan Sentra Pemberdayaan pemuda	lokasi	5	1		1	20%	1	2	40%
5	Pertukaran Pemuda antar Propinsi	orang	160					32	32	20%
6	Monitoring dan Evaluasi life skills	kelompok	250					50	50	20%
7	Latihan kewirausahaan Pemuda di Kabupaten / Kota	orang	300					60	60	20%
8	Bantuan untuk lembaga kepemudaan	lembaga	25					5	5	20%
9	Pelatihan/seleksi SP3	orang	100					20	20	20%
10	Peningkatan Sumber daya SP3	orang	275					55	55	20%
11	Sosialisasi dan sinkronisasi SP3	kegiatan	10					2	2	20%
12	Monitoring dan Evaluasi SP3	kegiatan	5					1	1	20%
B	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga									
1	Peningkatan mutu SDM keolahragaan daerah	orang	300	326		326	109%	60	386	129%
2	Inventarisasi/Pendataan OR daerah	kegiatan	5	1		1	20%	1	2	40%
3	Pembinaan Akademik Atlet Pelajar (PPLP)	kegiatan	5					1	1	20%

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SAT.	RENC. INDUK	REALISASI TAHUN 2005-2006				PROG. 2007	2005 -2007	
				APBN	NON APBN	TOTAL	CAPAI AN		TOTAL	CAPAI AN
4	Festival OR Tradisional bagi masyarakat	orang	100	420		420	420%	20	440	440%
5	Kompetisi antar klub OR Pelajar	orang	1125					225	225	20%
6	Pemberdayaan Diklat OR Pelajar berbakat	orang	125					25	25	20%
7	Pemberdayaan Diklat OR Mahasiswa berbakat	orang	50					10	10	20%
8	Kompetisi antar PPLP dan PPLS	orang	330					66	66	20%
9	Pekan OR Pelajar	orang	550					110	110	20%
10	Pemberdayaan organisasi OR Pelajar dan ORMAS	kegiatan	5	5		5	100%	1	6	120%
11	Perkemahan Pelatihan Atlet Pelajar	orang	400					80	80	20%
12	Pekan OR Pelajar Cacat	orang	175					35	35	20%
13	Pekan OR Pedesaan	kec./desa	15					3	3	20%
14	Peringatan HAORNAS	21 kab./kota	105					21	21	20%
15	Dukungan admn. Pengelolaan Kegiatan (Kab./Kota)	kegiatan	5	21		21	420%	1	22	440%
C	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga									
1	Bantuan Peralatan Olahraga	paket	5	91		91	1820%	1	92	1840%
2	Inventarisasi Organisasi dan Potensi Olahraga	kab./kota	30	1		1	3%	6	7	23%
3	Konsolidasi dengan Stake Holder keolahragaan	organisasi	90					18	18	20%
4	Menyusun model increatment dan strategi perlakuan	kegiatan	5					1	1	20%
5	TOT instruktur dari masyarakat setempat	orang	300					60	60	20%

Sumber : Data Kedeputan Pendidikan dan Kesehatan BRR, Mei 2007.

II.1.3.3.4.4 Budaya

Berdasarkan rencana induk, bidang budaya yang ditangani meliputi 3 jenis program, yaitu pengembangan nilai budaya; pengelolaan keragaman budaya dan pengelolaan budaya. Realisasi pelaksanaan dibidang budaya sampai dengan tahun 2006, telah ditangani untuk seluruh kegiatan pada masing-masing program tersebut di atas. Sedangkan pada program tahun 2007 hanya menangani 3 jenis kegiatan, yaitu kegiatan penguatan kebanggaan dan ikatan sosial masyarakat Aceh; dan Menyediakan hiburan kepada pengunjung serta pembangunan Gedung Pusat Dokumentasi dan informasi Aceh. Untuk lebih jelasnya melihat realisasi dan program per program dan kegiatan yang ditangani disajikan pada tabel berikut.

Tabel II. 50
Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias oleh Bapel dalam Bidang Budaya (Program Pemulihan kembali jati diri dan asset budaya masyarakat)

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SAT	RENCANA INDUK	REALISASI TAHUN 2005-2006				PROGRAM 2007	2005 -2007	
				APBN	NON APBN	TOTAL	CAPAI AN		TOTAL	CAPAI AN
1	Menguatnya kebanggaan dan ikatan sosial masyarakat Aceh	Paket		10	2375			52	62	
2	Terbangunnya kembali semangat dan partisipasi semua komponen masyarakat	Paket		12	4630					

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SAT	RENCA NA INDUK	REALISASI TAHUN 2005- 2006				PROG RAM 2007	2005 -2007	
				APBN	NON APBN	TO TAL	CAPAI AN		TO TAL	CAPA IAN
	Aceh									
3	Terlestarikannya aset-aset budaya Aceh untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang berbasis adat dan budaya lokal	Paket		13						
5	Teridentifikasinya kondisi terakhir BCB/Situs, Museum dan Bangunan Tua Bersejarah di Seluruh Wilayah yang terkena bencana	Paket		1			69		70	
6	Tersedianya peta digital kebudayaan Aceh pasca gempa tsunami	Paket		1						
7	Terpeliharanya/lestarinya BCB/situs, museum dan bangunan seni-budaya/adat di seluruh wilayah Aceh yang terkena bencana	Paket		56	116	172				
8	Terbangunnya sebuah Museum Tsunami yang lengkap dengan kelembagaan			1			8		9	
	Pemulihan Seluruh Industri Budaya									
1	Tersedianya hiburan kepada pengungsi (orang dewasa dan anak-anak) untuk mengurangi beban mental/trauma yang dihadapi.	Paket		10				66	76	
2	Terlaksananya pembuatan film dokumenter dan Kesenian	Paket		1						
	Pembangunan Kembali PDIA									
1	Terbangunnya Gedung Pusat Dokumentasi dan informasi Aceh	Paket		4				1	1	
2	Tersedianya kembali dokumen dan informasi sumber sejarah dan kebudayaan Aceh	Paket		2						

Sumber : Data Kedeputan Agama, Sosial dan Budaya BRR, Mei 2007.

Realisasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi bidang budaya berdasarkan sebaran kabupaten di Provinsi NAD dan Nias tahun 2005-2006 dan Program 2007 ditampilkan pada Tabel berikut.

Tabel II. 51
Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias oleh Bapel dalam Sub Bidang Bangunan Budaya dan Pengembangan Nilai-Nilai Budaya

NO	KABUPATEN/ KOTA	BANGU NAN BERSEJA RAH, MUSEUM,	BUKU & SENI BUDAYA ACEH	KESENI AN & SANG GAR	SENI RAMPOE DAN TAMAN BACAAN	PELATIHAN IMEUM MUKMIN, & KEPEMIMPI NAN	PEMBANGU NAN GEDUNG, MAKAM, SITUS
1	Banda Aceh	10	840	0	0	0	5
2	Aceh Besar	0	1680	9	25	40	5
3	Sabang	0	280	2	15	12	1
4	Aceh Jaya	0	560	3	5	47	2
5	Pidie	0	560	4	46	49	2
6	Bireuen	0	560	9	25	69	2
7	Aceh Utara	0	840	5	46	11	6
8	Lhokseumawe	0	280	13	34	47	1

NO	KABUPATEN/ KOTA	BANGU NAN BERSEJA RAH, MUSEUM,	BUKU & SENI BUDAYA ACEH	KESENI AN & SANG GAR	SENI RAMPOE DAN TAMAN BACAAN	PELATIHAN IMEUM MUKMIN, & KEPEMIMP NAN	PEMBANGU NAN GEDUNG, MAKAM, SITUS
9	Aceh Tengah	0	1280	5	2	47	1
10	Bener Meriah	0	280	0	0	47	1
11	Gayo Lues	0	280	0	0	62	1
12	Aceh Timur	0	1120	2	10	48	4
13	Langsa	0	280	2	11	51	1
14	Aceh Tamiang	0	280	3	0	56	4
15	Aceh Barat	0	840	14	23	55	3
16	Nagan Raya	0	560	1	0	51	2
17	Abdya	0	560	3	20	55	2
18	Simeulue	0	280	4	76	2	2
19	Aceh Selatan	0	280	9	34	56	3
20	Aceh Singkil	0	280	1	91	42	1
21	Aceh Tenggara	0	280	1	40	68	1
JUMLAH		10	12200	90	503	915	50

Sumber : Data Kedeputan Agama, Sosial dan Budaya BRR, Mei 2007.

Pelaksanaan dalam bidang sosial pada sub bidang kependudukan dan keluarga berencana, BRR tidak lagi melaksanakan programnya karena program pendataan penduduk sudah dilaksanakan oleh Kementerian Lembaga yaitu Badan Pusat Statistik (BPS).

II.1.3.4. Bidang Pemulihan Perekonomian

Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi bidang ekonomi bersumber dari (dua) jenis, yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)-RI atau dikenal dengan istilah 'On Budget' dan sumber pembiayaan bukan APBN atau disebut 'Off Budget', yakni dana Multi Donor ('Multi Donor Fund') dari berbagai organisasi non-pemerintah (NGOs) yang secara langsung melakukan kegiatannya di lapangan.

II.1.3.4.1 Pertanian

Bidang pertanian, meliputi sub-sektor tanaman pangan dan hortikultura, sub-sektor perkebunan dan sub-sektor peternakan. Kehancuran dan kerusakan di sektor pertanian (Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan), mengakibatkan sekitar 300.000 petani kehilangan mata pencaharian dan pekerjaan, karena rusaknya lahan pertanian, yakni lahan sawah seluas 23.000 ha; lahan palawija/tegalan seluas 24.345 ha dan lahan perkebunan (tanaman keras) seluas 102.461 ha. Serta 1.904.587 ekor ternak (ternak besar, kecil dan unggas) hilang.

II.1.3.4.1.1 Tanaman Hortikultura.

Melalui proyek Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2005 dan 2006, telah mampu menyediakan pekerjaan bagi 304.582 keluarga petani (KK), melalui kegiatan padat karya pada saat pelaksanaan proyek serta telah selesainya rehabilitasi sebagian besar lahan pertanian, baik berupa lahan sawah, lahan palawija/tegalan) dan perkebunan. Lahan pertanian yang sudah direhabilitasi seluas 93.910 Ha dari areal pertanian yang rusak seluas 150.136 Ha (kebun 102.461 Ha, sawah 23.330 Ha, tegalan 23.345 Ha).

Selain rehabilitasi lahan pertanian untuk mengganti kerusakan lahan pertanian yang disebutkan dalam Rencana Induk (Perpres no. 30 Tahun 2005) tersebut di atas, BRR pada tahun anggaran 2005 dan 2006 telah menyediakan traktor, mesin dan peralatan pertanian berupa traktor roda 4 (4 WD) = 47 unit, Hand traktor = 366 unit, Power Thresher = 974 unit, dan Hand sprayer = 976 unit, serta alat pertanian kecil sebanyak 33.734 unit. Selanjutnya

penggilingan padi (*Rice Milling Unit*), meliputi mesin RMU dan gudang yang telah dibangun sejumlah 74 unit.

Program pendukung pengembangan pertanian tanaman pangan dan hortikultura pada tahun 2007 adalah pembangunan lining irigasi 31 km; pembangunan Balai Benih Utama (BBU) dan Balai Benih Induk (BBI) sebanyak 14 unit; gudang Alsintan sebanyak 22 unit dan gedung Balai Pertemuan Petani sebanyak 12 unit dan penggilingan padi (*Rice Milling Unit*) sebanyak 2 unit.

Tabel II. 52
Realisasi Pelaksanaan Proyek Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Tanaman Pangan dan Hortikultura

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	SAT.	RENC. INDUK	REALISASI TAHUN 2005 - 2006				PROG RAM 2007	2005 -2007	
				APBN (DIPA BRR)	NON APBN	TOTAL	CAPAI AN		TOTAL	CAPAI AN
1	Penyerapan tenaga kerja	Org/Tk				304.582				
2	Rehabilitasi lahan pertanian (sawah, tegalan dan kebun)	Ha	150.136	41.352	43.220	84.572	177%	9.338	93.910	196%
a	Lahan Sawah	Ha	23.330	11.886		11.886		9.289	35.906	
-	Rehabilitasi sawah	Ha		24.851		24.851		8.144	32.995	
-	Pencetakan sawah baru	Ha		1.145		1.145		1.145	2.921	
b	Lahan kering/tegalan	Ha	24.345	14.725		14.725			14.725	
-	Rehabilitasi tegalan	Ha		2.200		2.200			2.200	
-	Pengembangan tegalan	Ha		13.894		13.894		49	12.574	
c	Rehabilitasi Kebun	Ha	102.461							
3	Pengembangan Sawah/Agroinput	Ha	11.886	12.931		12.931			12.931	
4	Penghijauan pekarangan	Batang		26.000		26.000			26.000	-
5	Lining jaringan irigasi	Km		0.896	103.64	104		31	135	
6	Bantuan material jalan usaha tani	km		6.200		6.200			6.200	
7	Balai Benih (BBU dan BBI)	Unit		3		3		14	17	
8	Alsintan	Unit		3.284	9.467	12.751			12.751	
9	Pengadaan Gudang Alsintan	Unit		1		1		22	23	-
10	Gudang dan mesin RMU	Unit		73		73		2	51	-
11	Balai Pertemuan Petani	Unit		144		144		12	156	-

Sumber : BRR NAD-Nias, 2007

II.1.3.4.1.2 Perkebunan

Pada sub-sektor perkebunan Rehabilitasi dan pengembangan tanaman perkebunan yang telah dilakukan pada tahun 2006 sebesar 6.947 Ha. Jika mengacu kepada data Rencana Induk, luas areal kebun yang rusak adalah sebesar 102.461 Ha. Namun berdasarkan sumber data dari Dinas Perkebunan Aceh, areal perkebunan yang rusak akibat tsunami seluas 22.000 Ha. (Data kerusakan areal perkebunan dalam Rencana Induk adalah total kerusakan lahan akibat tsunami dan konflik selama 32 tahun, karena selama konflik kebun-kebun tersebut menjadi tidak terurus dan terlantar). Selain telah merehabilitasi areal kebun seluas tersebut di atas, pada tahun 2006 telah dilakukan penyediaan bibit kelapa sawit sejumlah 685.000 batang dan penyiapan lahan (*Land clearing*) untuk perkebunan kelapa sawit 2006 seluas 3.000 Ha yang berlokasi di kabupaten Aceh Jaya, Aceh Barat dan Nagan Raya.

Rehabilitasi dan pengembangan sub-sektor perkebunan di atas telah mampu menyediakan lapangan pekerjaan dan sumber pencaharian bagi 1.776 keluarga petani perkebunan (KK), sejak pelaksanaan proyek, melalui program padat karya rehabilitasi kebun, pembangunan jalan produksi hingga pemeliharaan kebun hingga berproduksi. Pada tahun 2007 diprogramkan Rehabilitasi perkebunan seluas 10.508 ha. Sehingga secara kumulatif sampai dengan akhir program tahun 2007 akan rehabilitasi lahan perkebunan total seluas 10.515 Ha, atau baru mencapai sekitar 10% dari Rencana Induk yaitu sebesar 102,461 Ha. Sedangkan untuk penyediaan bibit kelapa sawit, pada tahun 2007 diprogramkan sebesar 1,211,500 batang.

Tabel II. 53
Realisasi Pelaksanaan Proyek Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perkebunan

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SAT.	RENC. INDUK	REALISASI TAHUN 2005-2006				PROG. 2007	2005-2007	
				APBN	NON APBN	TOTAL	CAPAI AN		TOTAL	CAPAI AN
1	Rehabilitasi Perkebunan	Ha	102461	6947		7	0	10508	10515	10
2	Pembangunan Jalan Produksi	M2		1		1			1	
3	Pengadaan Bibit Kelapa Sawit	Batang		685000		685000		1211500	1896500	
4	bangunan kantor Layanan publik	Unit		10		10			10	
5	Diklat Fasilitator Daerah	Orang		160		160			160	
6	Penyuluh Pendamping	Orang		115		115			115	

Sumber : BRR NAD-Nias, 2007

Sampai dengan tahun 2006 BRR telah melakukan restocking ternak besar (sapi/kerbau) sejumlah 2.650 ekor dan ternak kecil (kambing) sejumlah 13.000 ekor (Grafik). Untuk ternak jenis unggas, terutama ayam ras, restocking baru dilaksanakan sebesar 10.000 ekor.

Pada tahun 2007 diprogramkan Restocking ternak (BSRR, KCL, unggas) sejumlah 5.935 ekor. Sehingga secara kumulatif sampai dengan akhir program tahun 2007 Restocking ternak (BSRR, KCL, unggas) sejumlah 32,814 ekor atau baru mencapai sekitar 2% dari Rencana Induk sebesar 1,904,587 ekor.

Program pendukung pengembangan peternakan pada tahun 2007 adalah pembangunan Poskeswan 7 unit; pembangunan Pasar Hewan sebanyak 1 unit; Tempat Pemotongan Hewan sebanyak 2 unit; Tempat Penjualan Daging sebanyak 1 unit; pengembangan Kebun HMT sebesar 70 Ha dan Tempat Penempatan Ternak sebanyak 2 unit.

Tabel II. 54
Realisasi Pelaksanaan Proyek Rehabilitasi dan Rekonstruksi Peternakan

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	SAT.	RENC. INDUK	REALISASI TAHUN 2005-2006				PROG. 2007	2005 -2007	
				APBN	NON APBN	TOTAL	CAPAI AN		TOTAL	CAPAI AN
1	Restocking ternak (besar, kecil, unggas)	Ekor	1.904.587	25.650	1.032	26.682	1%	5.935	32.617	2%
2	Pengendalian penyakit hewan menular	Ekor		25.650		25.650	-		25.650	-
3	Pembangunan Poskeswan	Unit		9		9	-	7	16	-
4	Pelayanan Inseminasi Buatan	Dosis		33.000		33.000	-		33.000	-
5	Pembangunan pasar hewan	Unit		1		1	-	1	2	-
6	Pemotongan Hewan	Unit		4		4	-	2	6	-
7	Tempat Penjualan daging	Unit		6		6	-	1	7	-
8	Peningkatan laboratorium	Paket		1		1	-		1	-

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SAT.	RENC. INDUK	REALISASI TAHUN 2005-2006				PROG. 2007	2005-2007	
				APBN	NON APBN	TOTAL	CAPAI AN		TOTAL	CAPAI AN
9	Diklat inseminator.	Orang		42		42	-		42	-
10	Rehabilitasi kandang ternak	m'			10.844	10.844	-		10.844	-
11	Pengembangan kebun HMT	Ha				-	-	70	70	-
12	Tempat penempatan ternak	Unit				-	-	2	2	-

Sumber : BRR NAD-Nias, 2007

II.1.3.4.1.3 Kehutanan

Pada sektor kehutanan dan lingkungan, realisasi pelaksanaan proyek pada tahun anggaran 2005 dan 2006 untuk rehabilitasi hutan pantai dan mangrove seluas 5.113 Ha, dari Rencana Induk seluas 174.590 Ha, atau baru mencapai sekitar 3%.

Sedangkan program lain yang telah terealisasi pada tahun anggaran 2005 dan 2006 antara lain untuk rehabilitasi hutan alam seluas 163.08 Ha; rehabilitasi hutan kota seluas 130 Ha/paket; pengembangan hutan konservasi sejumlah 3 kawasan; pengukuran kawasan hutan (tata batas) sebesar 130 Km; tumpangsari hutan rakyat sebesar 2 paket; peningkatan usaha masyarakat sekitar hutan sebanyak 40 kelompok; peningkatan kelembagaan lokal seluas 20 Ha; restorasi kawasan bufferzone sebesar 188 Ha; transplantasi terumbu karang sejumlah 1 paket dan rehabilitasi fasilitas kantor dinas sejumlah 1 unit.

Program tahun 2007 untuk sektor kehutanan dan lingkungan adalah rehabilitasi hutan pantai dan mangrove seluas 6.662 Ha dari Rencana Induk seluas 174.590 Ha, atau baru mencapai sekitar 7%.

Untuk program tahun 2007 lainnya yang berkaitan dengan sektor kehutanan dan lingkungan adalah rehabilitasi hutan alam seluas 961 Ha; rehabilitasi hutan kota seluas 5 Ha/pkt; magersari (tumpangsari di hutan) seluas 115 Ha; bantuan bibit kepada masyarakat sejumlah 20.000 batang; pengembangan hasil hutan Non Kayo sejumlah 7 Kabupaten; pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir sejumlah 9 Kabupaten; pemberdayaan masyarakat sekitar hutan sejumlah 2 lokasi; Pawang Uteun & Inong Beuraleu sejumlah 3 paket dan Pembangunan Laboratorium. Klimatologi lapangan sejumlah 1 paket.

Tabel II. 55
Realisasi Pelaksanaan Proyek Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Kehutanan dan Lingkungan

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SAT.	RENC. INDUK	REALISASI TAHUN 2005-2006				PROG. 2007	2005-2007	
				APBN	NON APBN	TOTAL	CAPAI AN		TOTAL	CAPAI AN
1	Rehab Hutan Mangrove	Ha	174.590	4.788	325	5.113	3	6.662	11.775	7
2	Rehab Hutan Alam	Ha		820	162.263	163.083		961	164044	
3	Rehabilitasi Hutan Kota	Ha/Pkt		130		130		5	135	
4	Pembinaan Konservasi	Kawasan		3		3			3	
5	Pengukuhan Kawasan Hutan (Tata batas)	Km		130		130			130	
6	Tumpang Sari Hutan rakyat	Pkt		2		2			2	
7	Peningkatan Usaha Masyarakat sekitar Hutan	Kelpk		40		40			40	
8	Peningkatan Kelembagaan Lokal	Ha		20		20			20	
9	Restorasi kawasan bufferzone	Ha		188		188			188	
10	Transplantasi Terumbu Karang	Pkt		1		1			1	

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SAT.	RENC. INDUK	REALISASI TAHUN 2005-2006				PROG. 2007	2005-2007	
				APBN	NON APBN	TOTAL	CAPAI AN		TOTAL	CAPAI AN
11	Rehabilitasi fasilitas Kantor Dinas Kehutanan	Unit		1		1			1	
12	Magarsari (Tumpang sari di hutan)	Ha				-		115	115	
13	Bantuan Bibit Pada masyarakat	Btg				-		20.000	20.000	
14	Pengembangan. Hasil Hutan Non kayu	Kab				-		7	7	
15	Pengembangan Masyarakat sekitar Hutan	Lokasi				-		2	2	
16	Pawang uteun & Inong Beuraleun	Pkt				-		3	3	
17	Pemb. Lab Klimatologi lapangan	Pkt						1	1	

Sumber : BRR NAD-Nias, 2007

II.1.3.4.2 Perikanan

Pada sub sektor perikanan, realisasi pelaksanaan proyek pada tahun anggaran 2005 dan 2006 untuk budidaya perikanan telah merehabilitasi tambak yang rusak sejumlah 14.322 Ha dari kerusakan tambak seluas 36.597 Ha (Rencana Induk), atau mencapai 39%.

Sedangkan untuk perikanan tangkap (nelayan), BRR telah menyediakan sejumlah 609 unit Kapal motor kayu ukuran (<3,5 – 8 GT) dan boat yang direhabilitasi sejumlah 50 unit dan pengadaan alat tangkap sejumlah 89 paket. Berdasarkan data Rencana Induk jumlah kapal motor kayu yang rusak adalah 21.455 unit dan 16.012 unit alat tangkap. Data lain, berdasarkan sumber dari FAO (2005) menyebutkan boat yang rusak sejumlah 10.569 unit.

Prasarana Pelabuhan Perikanan (PPI/PPP) sampai dengan tahun 2006 telah berhasil direhab sejumlah 8 unit dan telah dibentuk 206 UPI (Unit Pengolahan Ikan) dan bantuan agroinput (pupuk, benih ikan, obat-obatan, pakan ikan dan fasilitas produksi lainnya) untuk melayani areal tambak yang telah berhasil direhabilitasi seluas 2.574, 20 Ha.

Berdasarkan Rencana Induk jumlah Pelabuhan Perikanan yang rusak adalah sebesar 305 unit yang rusak. Gedung Tempat Pendaratan Ikan Pantai Lampulo seluas 480 M² yang telah selesai dibangun dan difungsikan oleh para nelayan untuk melakukan kegiatan perekonomiannya. Dalam hal ini pelaksanaannya sudah sesuai dengan Rencana Induk

Selain itu Sub-sektor perikanan ini telah menyumbang penyerapan tenaga kerja sebesar 6.758 orang nelayan.

Tabel II. 56
Realisasi Pelaksanaan Proyek Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perikanan

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	SAT.	RENC. INDUK	REALISASI TAHUN 2005-2006				PROG. 2007	2005 -2007	
				APBN	NON APBN	TOTAL	CAPAI AN		TOTAL	CAPAI AN
	<i>Penyerapan tenaga kerja</i>	<i>Org/ TK</i>	<i>130.000</i>							
1	Rehabilitasi Tambak	Ha	36.597	5.051	7.883	12.934	35%	1.388	14.322	39%
2	Bantuan Agroinput	Ha		5.304		5.304	-	1.385	6.689	-
3	Pengemb. BBIP Simeulue	Pkt				-	-	1	1	-
4	Hatchery skala rumah tangga	Unit		12		12	-	41	53	-
5	Keramba Jaring Apung	Unit		16		16	-	-	-	-

Sumber : BRR NAD-Nias, 2007

II.1.3.4.3 Pengembangan Usaha

Sub bidang Pengembangan Usaha dibagi ke dalam 4 (empat) bagian, yaitu Industri, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil-Menengah (UKM), Ketenagakerjaan dan Pariwisata.

II.1.3.4.3.1 Industri

Pada tahun anggaran 2005 telah direalisasikan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) industri untuk 5.214 orang dan peningkatan sarana dan prasarana industri pada pelabuhan Malahayati serta pengembangan industri garam rakyat (Pilot Proyek) dan kegiatan pendukung pengembangan industri lainnya, seperti pengembangan desa batik Aceh.

Pada tahun 2007 diprogramkan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) industri untuk 67 orang, sehingga secara kumulatif sampai dengan akhir program tahun 2007 sebanyak 5.281 orang.

Pemberian bantuan kepada industri batu bata di Simeulue. Di Provinsi NAD, untuk industri batu bata diberikan bantuan diberikan kepada 39 kelompok kerja untuk 8 daerah, yaitu Banda Aceh, Aceh Besar, Pidie, Bireuen, Aceh Barat Daya, Aceh Barat, Simeulue dan Aceh Jaya. Jenis bantuan yang diberikan untuk industri batu bata terdiri atas bantuan pondok kerja, modal kerja, dan peralatan kerja.

Program pendukung pengembangan industri antara lain pengembangan Desa Batik Aceh sebanyak 4 paket; pengembangan industri oleh Dekranas sebanyak 1 paket dan Bantuan pengembangan ekonomi produktif di 4 Kabupaten.

Tabel II. 57
Industri

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SAT	RENC. INDUK	REALISASI TAHUN 2005-2006				PROG. 2007	2005-2007	
				APBN	NON APBN	TOTAL	CAPAIAN		TOTAL	CAPAIAN
1	Penyerapan Tenaga Kerja	Org/Tk		57.910	87.784	145695			145.694	
2	BLM Masyarakat Industri	Org		5.214		5.214		67	5.281	
3	Infrastruktur Kawasan Industri	Unit	2	0			0			
4	Sarana-prasarana Pelabuhan Malahayati	Unit	1	1		1	100		1	0
5	Pilot Project Industri Garam rakyat	Lokasi	6	1		1	17		1	100
6	Penyediaan Fasilitas Industri	Unit			105	105			105	17
7	Pengembangan Desa Batik Aceh	Pkt						4	4	
8	Pengembangan Industri oleh Dekranas	Pkt						1	1	
9	Bantuan pengem. Ekonomi produktif	Kab.						4	4	

Sumber : BRR NAD-Nias, 2007

II.1.3.4.3.2 Perdagangan

Di sektor perdagangan, BRR pada tahun 2005 dan 2006 telah merealisasikan bantuan modal bergulir (*revolving fund*) bagi para pedagang grosir dan pedagang pasar sebanyak 12.631 unit terdiri dari 886 unit melalui APBN dan 11.745 unit melalui pembiayaan Non APBN (*Off Budget*).

Rehabilitasi pasar telah mencapai 73 unit, terdiri diantaranya rehabilitasi pasar induk sejumlah 42 unit dan sisanya merupakan pasar grosir dan pasar tradisional yang tersebar di

seluruh wilayah kabupaten. Dengan rincian sumber pembiayaan dari APBN sebesar 34 unit pasar dan Non APBN (Off Budget) sebesar 39 unit pasar. Untuk kota Banda Aceh, konsentrasi pasar pasca tsunami dialihkan ke pasar Lambaro yang masih terus dalam tahap pembangunan, yaitu pasar induk Lambaro yang merupakan bantuan dari JICs. Serta sedang dilakukan pembebasan lahan untuk perluasan pasar.

Berdasarkan amanat Rencana Induk, pasar yang mengalami kerusakan sebanyak 193 unit, sehingga realisasi telah mencapai 38%. Rehabilitasi prasarana perdagangan dan bantuan modal telah mampu menyediakan lapangan pekerjaan bagi 23.500 tenaga kerja.

Pada tahun 2007 diprogramkan Total Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) pedagang pasar (revolving) sampai dengan akhir program tahun 2007 secara kumulatif sebanyak 1.370 paket/orang

Program pendukung perdagangan antara lain Pembangunan/Rehab. Pasar sebesar 11 unit dari total akhir program tahun 2007 sebesar 124 unit; pembangunan terminal sebanyak 3 paket dan pembangunan gudang transito sebanyak 1 unit.

Tabel II. 58
Perdagangan

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SAT	RENCANA INDUK	REALISASI TAHUN 2005-2006			CAPAIAN	PROG. 2007	2005-2007	
				APBN	NON APBN	TOTAL			TOTAL	CAPAIAN
1	Penyerapan Tenaga Kerja	Org/Tk	170.000	23486		23.486	14		23.500	14
2	BLM Pedagang Pasar (Revolving)	Pkt/Org		886	11.745	12.631			12.631	
3	Pembangunan/ Rehab pasar	Unit	193	34	28	62	32	11	73	38
4	Alat dan Kemetrologian	Pkt		1		1			1	
5	Pembangunan Terminal	Pkt						3	0	
6	Gudang Transito	Unit						1	0	

Sumber : BRR NAD-Nias, 2007

II.1.3.4.3.3 dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)

Pengembangan koperasi dan UKM (Usaha Kecil Menengah) direalisasikan melalui bantuan modal melalui LKM (Lembaga Keuangan Mikro) kepada 77.316 pedagang kecil (40.875 pedagang kecil melalui APBN dan 36.441 melalui Non APBN) dan bantuan modal untuk pemulihan aset produktif telah dilakukan kepada 22.441 orang serta pada tahun anggaran 2005 dan 2006 telah dibentuk sejumlah 146 Unit LKM yang tersebar di kabupaten/kota NAD. Pemberian bantuan mesin jahit sebagai peralatan kerja untuk usaha konveksi di Banda Aceh. Di Provinsi NAD, untuk usaha konveksi diberikan bantuan kepada 48 kelompok kerja untuk 10 daerah, yaitu Banda Aceh, Aceh Besar, Pidie, Bireuen, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Singkil, Aceh Barat Daya, Aceh Barat, dan Simeulue. Jenis bantuan yang diberikan terdiri atas bantuan modal kerja dan bantuan peralatan kerja

Pada tahun 2007 diprogramkan Pemberdayaan Koperasi & UKM (Usaha Kecil Menengah) sebesar 60 unit dan secara kumulatif sampai dengan akhir program tahun 2007 sebesar 3654 unit atau telah melebihi Rencana Induk yakni sebesar 254 unit (157%)

Program lainnya dalam tahun 2007 adalah Bantuan Modal LKM Usaha Masyarakat sebanyak 19.992 orang; Pelatihan Pengelola LKM sebanyak 400 orang; Pelatihan Kewirausahaan sebanyak 2.016 orang; Bantuan Teknis dan Manajemen LKM sebanyak 100 paket dan Kelembagaan Koperasi Terpadu sebanyak 1 paket.

Tabel II. 59
Koperasi dan UKM

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SAT	RENC. INDUK	REALISASI TAHUN 2005-2006				PROGR AM 2007	2005-2007	
				APBN	NON APBN	TOTAL	CAPAI AN		TOTAL	CAPAI AN
1	Pemberdayaan Koperasi dan UKM	Unit	254	146	148	294	115%	60	354	139%
2	Bantuan Modal LKM Usaha Masyarakat	Orang		40.875	36.441	77.316		19.992	97.308	
3	Aceh/Nias Micro Finance	Unit	22	11		11	50		11	50%
4	AMF Center dan perwakilannya	Kab/ Kota	22	11		11	50		11	50%
5	Peningkatan LKM dan Microbanking	Unit	22	6		6	27		6	27%
6	Pelatihan Pengelola LKM	Orang						400	400	
7	Pelatihan Kewirausahaan	Orang						2.016	2.016	
8	Bantuan teknis dan manajemen LKM	Paket						100	100	
9	Kelembagaan koperasi terpadu	Paket						1	1	

Sumber : BRR NAD-Nias, 2007

II.1.3.4.3.4 Tenaga Kerja

Dalam rangka mendorong sektor ketenagakerjaan BRR pada tahun anggaran 2005 dan 2006 telah merealisasikan pelatihan keterampilan (*vocational raining*) bagi 29.478 orang tenaga kerja, terdiri dari pembiayaan melalui APBN sebanyak 10.935 orang dan melalui kegiatan NGO (*Off Budget*) sebanyak 29.478 orang. Selanjutnya telah membangun Balai Latihan kerja sebanyak 2 (dua) unit dan peralatan BLK satu unit. Program '*cash for work*' sebanyak 91.242 orang pekerja dan pendidikan dan pelatihan pegawai sebanyak 247 orang pegawai.

Pada tahun 2007 diprogramkan bagi tenaga kerja berupa Pelatihan Keterampilan untuk 77 orang dan secara kumulatif sampai dengan akhir program tahun 2007 total sebanyak 40.490 orang.

Program pendukung sektor ketenagakerjaan BRR tahun 2007 berupa pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) sebanyak 3 unit; Peralatan BLK sebesar 2 unit; Pembangunan KKK sebanyak 1 paket dan Pembangunan jalan lingkungan BLK sebesar 1 paket.

Tabel II. 60
Tenaga Kerja

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SAT	RENC. INDUK	REALISASI TAHUN 2005-2006				PROG RAM 2007	2005-2007	
				APBN	NON APBN	TOTAL	CAPAI AN		TOTAL	CAPAI AN
1	BLM melalui KLM	Org								
2	Pelatihan Keterampilan	Org/Angk.		10.935	29.478	40.413		77	40.490	
3	Balai Latihan Kerja (BLK)	Unit	5	2		2	40%	3	5	
4	Peralatan BLK	Unit	5	1		1	20%	2	3	100%
5	Pekerja Cash for Work	Org			91.242	91.242			91.242	
6	Pelatihan Pegawai	Org			247	247			247	
7	Pembangunan KKK	Pkt						1	1	
8	Pembangunan Jalan Lingkungan BLK	Pkt						1	1	

Sumber : BRR NAD-Nias, 2007

II.1.3.4.3.5 Pariwisata

Pengembangan pariwisata merupakan kegiatan yang perlu didukung dalam rangka meningkatkan ekonomi dan usaha masyarakat Aceh dan Nias Kepulauan, selain juga dalam

rangka melestarikan dan meningkatkan situs budaya. Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh BRR dalam rangka pengembangan pariwisata ini adalah pengembangan pariwisata adalah pengembangan sarana dan prasarana obyek wisata Kota Sabang serta perencanaan pemugaran kawasan wisata Pulau Sinabang; pulau Banyak dan Kawasan wisata Ujung Batee.

Pada tahun 2007 diprogramkan bagi Pengembangan pariwisata berupa Peningkatan obyek wisata Kota Sabang sebanyak 11 paket. Dalam rangka mendukung program pengembangan pariwisata untuk tahun 2007 akan dilaksanakan program pelatihan bidang pariwisata sebanyak 9 paket; penyelenggaraan pesta rakyat sebanyak 4 paket; pengembangan usaha ekonomi pariwisata sebanyak 56 paket dan pengembangan wisata Kota Banda Aceh sebanyak 55 paket.

Tabel II. 61
Realisasi Pelaksanaan Proyek Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pariwisata

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SAT	RENC. INDUK	REALISASI TAHUN 2005-2006			PROG RAM 2007	2005-2007	
				APBN	NON APBN	TOTAL		TOTAL	CAPAI AN
1	Pemugaran Kws. Wisata P. Sinabang	Pkt							
2	Pemugaran Kws Wisata P. Banyak	Pkt		1		1	-	1	-
3	Pemugaran Kws Wisata Ujung Batee	Pkt		1		1	-	1	-
4	Pemugaran Kws Wisata Lampuuk	Pkt		1		1	-	1	-
5	Peningk Objek Wisata Kota Sabang	Pkt		1		1	-	11	12
6	Pengemb Sarana & Site Plan Wisata	Pkt		1		1	-	1	-
7	Pelatihan bidang Pariwisata	Pkt				-	-	9	9
8	Penyelenggaraan pesta rakyat	Pkt				-	-	4	4
9	Pengemb Usaha ekonomi pariwisata	Pkt				-	-	56	56
10	Pengemb wisata kota Banda Aceh	Pkt				-	-	55	55

Sumber : BRR NAD-Nias, 2007

Tabel II. 62
Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias Oleh BRR dalam Bidang Pemulihan Ekonomi

NO	BIDANG	KEMAJUAN
1.	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	- Telah didistribusikan 4.397 perahu di NAD - Renovasi 129 tempat pelelangan ikan di NAD - Rehabilitasi 19.299 hektar tambak udang di NAD 300 unit perahu, 600 unit peralatan tangkap & 8 paket peralatan, bantuan modal usaha pengolahan ikan 100 kepala keluarga - FAO dan Howu-howu membagikan perahu dan peralatan tangkap - Pembangunan PPI, bantuan peralatan alat tangkap 10 unit & kapal nelayan 18 unit, pelatihan pengolahan ikan - Intensifikasi padi untuk 500 Ha sawah, intensifikasi karet 250 Ha dan ekstensifikasi 74 Ha, jagung 250 Ha dan cabe 60 Ha 300 unit perahu nelayan dibatalkan dan digantikan dengan pengadaan peralatan pendukung nelayan - Pelabuhan Perikanan (ada tambahan lahan berupa pembebasan tanah seluas 52 Ha . Sumber dana BRR dari APBN), Pembangunan Gedung Pengepakan oleh ADB dan Pembangunan Perumahan Nelayan oleh GTZ di Banda Aceh - Perbaikan Budidaya di seluruh Aceh total seluas 1510 Ha. 1 Ha dapat bantuan sebesar Rp.20 juta, untuk Agroinput (bibit, pupuk, operasional) sebesar Rp. 12 juta - Pagar keliling pelabuhan sepanjang 300 M, Jalan kawasan pelabuhan (lanjutan) sepanjang 447 M dan Galangan kapal di Lampulo sebanyak 2 Unit

NO	BIDANG	KEMAJUAN
		- Administrasi, Pengembangan Kawasan Kelautan dan Perikanan/PPK ADB, Pengadaan Kendaraan Roda-2 - Pengembangan Mutu Perikanan Usaha Kecil di Banda Aceh, Aceh Besar, Pidie, Bireuen, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Tamiang, Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Simeulue, Aceh Singkil, Sabang, Lhokseumawe dan Langsa - Pengembangan Sarana Perikanan Tangkap (Sarana Penangkapan berupa alat tangkap dan armada tangkap, Unit Pengolahan Ikan (UPI) di Prov. NAD, Kendaraan Roda 2) di Banda Aceh, Aceh Besar, Pidie, Bireuen, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Tamiang, Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Simeulue, Aceh Singkil, Sabang, Lhokseumawe dan Langsa - Pengembangan Sarana Perikanan Budidaya (Rehab Tambak dan Agro input) di Banda Aceh, Aceh Besar, Pidie, Bireuen, Aceh Timur, Aceh Tamiang, Aceh Jaya, Aceh Barat Daya, Aceh Utara, Lhokseumawe dan Aceh Selatan. - Pengembangan Prasarana Perikanan (Pembangunan/rehabilitasi PPI, DED PPI, pembebasan lahan) di Banda Aceh, Pidie, Bireuen, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Tamiang, Aceh Jaya, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Simeulue, Aceh Singkil, Sabang, Lhokseumawe - Penyusunan Rencana Teknis (belanja jasa konsultan/tenaga ahli).
2.	Sub Bidang Pertanian	- Rehabilitasi 30.926 hektar sawah di NAD - Pembangunan Sistem Jaringan Irigasi Teknis (17 DI 3.138 Ha di Nias dan 10 DI 2.015 Ha di Nias Selatan 60 unit mesin penggilingan padi, peralatan pertanian kecil 960 unit, 8 hand tractor, pompa air 4 unit - Pembangunan Sistem Jaringan Irigasi 7 Daerah Irigasi - Bantuan 50 unit mesin penggilingan padi, 20 hand tractor, sarana produksi palawija/hortikultura 100 unit, penyuluhan/pelatihan & pemberdayaan 22 kelompok tani - Penyuluhan & Intensifikasi tanaman karet 450 Ha, kakao 400 Ha - Pemberdayaan peternak ayam, babi dan pembangunan rumah potong hewan di Nias <i>Produksi Tanaman Pangan</i> - Program : Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk tanaman Pangan dengan pagu DIPA di NAD - Pelatihan Penyuluh Pendamping (37 orang x 3 Ha) dan Petugas Hama Penyakit juga Magang Petugas BBI Padi dan hortikultura ke sumber tehnologi - Pemulihan sawah dampak tsunami : 5000 Ha - Pengadaan Peralatan Laboratorium Lapangan untuk 10 Kabupaten - Pengawasan dan Pembangunan Fisik seperti Gudang RMU, Rumah Pompa, Balai Pertemuan Petani di Aceh Besar, Pidie, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Selatan, Aceh Barat, Simeulue, Bireuen, Aceh Barat daya, Aceh Jaya, Nagan Raya - Bantuan Modal sarana produksi dan alsintan pola BLM, material jaringan air, material jalan usaha tani dan upah kerja pola padat karya di 13 Kabupaten/Kota total seluas 5.000 Ha - Optimalisasi lahan tegalan untuk palawija dan hortikultura seluas 1.200 Ha - Bantuan modal sarana produksi dan alsintan pola BLM, material jaringan air, material pagar keliling, material jalan usaha tani dan upah kerja pola padat karya di 13 Kabupaten/Kota total seluas 1.200 Ha - Penghijauan tanaman buah-buahan untuk pekarangan dampak tsunami kepada 26.000 kepala keluarga di 13 Kabupaten/Kota - Pembangunan Kantor Dinas Pertanian Simeulue seluas 350 M² - Pembangunan Kantor Karantina Tumbuhan seluas 400 M² - Rehabilitasi Gedung Lab. Hama Penyakit TPH Pulo IE Nagan Raya seluas 250² - Pembangunan Gedung Alsintan NAD seluas 400 M², pagar keliling 1.000 M², Saluran drainase 300 M. - Lining Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani di 10 Kabupaten - Penanggulangan Hama/Penyakit Tanaman, Pengadaan Mebeulair, Pengadaan Alat Pertanian di 10 Kabupaten - Pengadaan Perlengkapan sarana gedung berupa peralatan dan mesin, mebeulair, filing cabinet di 10 Kab/Kota - Pengadaan Alat Pengolah Data di 13 Kabupaten, Pengadaan Kendaraan, Pencetakan Sawah, Perbanyak Bibit/Benih - Pengembangan Sarana Usaha Pertanian pada Balai Benih Induk (BBI Padi Keumala, BBI Hortikultura Saree, UPT Balai Pembenihan, BPTP (Balai Pengkajian Tehnologi Pertanian) baik Pembangunan Gedung/Rehab, Kelengkapan dan Mobiler Kantor

NO	BIDANG	KEMAJUAN
		- Rehabilitasi sawah seluas 1.000 Ha - Pengadaan sarana produksi pertanian baik benih, pupuk KCl, pupuk SP 36, Pupuk Urea, Pestisida : kacang, kedelai (Pidie), jagung (Aceh Utara, Aceh Timur), cabe (Aceh Utara, Aceh Timur, Pidie), bawang merah (Pidie, Aceh Barat daya) - Manajemen Teknis : Belanja Uang Honor Tidak tetap
3.	Sub Bidang Pariwisata	- Pengembangan ekowisata pantai Genasi dan Toyolawa dan Danau Megoto di Nias - Transplantasi terumbu karang di Nias - Pelatihan bagi pemandu wisata sebanyak 1 paket di Banda Aceh - Pelatihan Pemandu Wisata Selam sebanyak 1 paket di Banda Aceh - Pelatihan Aparatur wisata sebanyak 1 paket di Banda Aceh - Promosi wisata daerah: Pertunjukan dan eksibisi seni budaya dalam negeri di Jakarta, ASEAN Diving Festival di Sabang, Pembentukan Family Tourism di Sabang - Pembukaan jalur wisata alam Sabang-Puket-Langkawi, Perbaikan Site Plan, Pembukaan jalur wisata sungai di Banda Aceh - Promosi wisata berbasis advertisement: jurnalis dan travel writers di Sabang dan Aceh Besar - Pemugaran Kawasan Wisata Pulau Sinabang: Boat wisata, compressor diving, pengadaan peralatan diving, diving shop, pengadaan dan pembuatan Taman Wisata Lasikin di Sinabang - Pemugaran Kawasan Wisata Pulau Banyak: Pengadaan peralatan selam, pengadaan compressor selam, pondok wisata, restorasi wisata, Mushalla, MCK di Aceh Singkil - Pemugaran Kawasan Wisata Ujung Batee: Restorasi dan Taman Wisata, Mushalla, MCK, pengadaan air bersih di Aceh Besar. - Pemugaran Kawasan wisata Alami Lampuuk: Restorasi dan Taman Wisata, musholla, MCK, pengadaan air bersih di Aceh Besar - Peningkatan sarana/prasarana objek wisata Kota Sabang: Jalan setapak, pembangunan terminal wisata, survey dan identifikasi potensi wisata taman laut Sabang, Pembuatan film CD pariwisata Kota Sabang, pengadaan air bersih di kawasan wisata Iboih/Gapang, Pembuatan dermaga kayu tempat wisata mancing - Pembuatan dan Pelaksanaan Outlet Wisata Bahari di Aceh Besar
4.	Sub Bidang Koperasi & UKM	3.640 berkas pinjaman micro-finance telah disalurkan di NAD - Pelatihan dan Bantuan LKM pada 6 koperasi di Nias - Bantuan Langsung Masyarakat 500 KK di Nias - Pendidikan dan Pelatihan Masyarakat (baik pelatihan pengurus kelembagaan masyarakat BKM dan pengelola LKM; pelatihan penyiapan kewirausahaan untuk KSM/masyarakat; Rekrutmen, Pelatihan dan Jasa Pengelola AMF di Banda Aceh dan 21 kabupaten - Pengembangan Koperasi dan Pengusaha Kecil (Bantuan sarana kerja LKM, BLM untuk Pemilihan Aset Produktif) di 11 kabupaten - Pengadaan Kendaraan Bermotor - Realisasi Penyaluran Bantuan Langsung Masyarakat Dana LKM Tahun 2005 pada 11 Kab./Kota (Banda Aceh, Aceh besar, Pidie, Bireuen, Aceh Utara, Lhokseumawe, Aceh Timur, Aceh Jaya, Aceh Barat, Simeulue, Singkil). Pada rencana jumlah LKM sebesar 73 LKM dengan jumlah penerima 27.366 orang dengan anggaran sebesar Rp. 77.370.000.000,-. Sedangkan realisasi dengan 73 LKM (realisasi 100 %), jumlah penerima sebanyak 29.813 orang (realisasi 108,94 %) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 77.348.394.000,- atau 99,97 %. - Realisasi Penyaluran Bantuan Langsung Masyarakat Dana LKM Tahun 2006 pada 21 Kab/Kota (Banda Aceh, Aceh Besar, Sabang, Pidie, Bireuen, Bener Meriah, Aceh Tengah, Aceh Tamiang, Aceh Utara, Lhokseumawe, Aceh Timur, Langsa, Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Abdya, Aceh Selatan, Aceh Tenggara, Gayo Lues, Simeulue, Singkil). Pada rencana jumlah LKM sebesar 63 LKM dengan jumlah penerima 5.166 orang dengan anggaran sebesar Rp. 25.830.000.000,-. Sedangkan realisasi dengan 62 LKM (realisasi 98,41 %), jumlah penerima sebanyak 2.040 orang (realisasi 39,49 %) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 7.378.830.000,- atau 28,57 %. (Laporan Satker BRR Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi NAD pada pelaksanaan monev dan FGD pokja pemulihan perekonomian di Banda Aceh).
5.	Sub Bidang Perdagangan	7 pasar dari 219 pasar/toko/kios yang rusak telah dibangun kembali di NAD - Pembangunan 8 pasar tradisional di Nias - Pembangunan 88 Kios pasar oleh BRR di Nias - Pembangunan pasar tradisional 12 unit - Sedang dilaksanakan perancangan pasar Yaahowu dan pembangunan kembali 12 pasar tradisional & penunjang, pengadaan alat & mesin untuk industri rumah tangga dan industri kecil di Nias. - Telah diberikan bantuan langsung masyarakat untuk 500 kepala keluarga sebesar Rp. 1 milyar; modal usaha untuk 480 UKM sebesar Rp. 2,4 milyar; bantuan modal

NO	BIDANG	KEMAJUAN
		LKM senilai Rp.6 milyar di Nias ▪ Pengembangan Hubungan Kerjasama Luar Negeri dan Investasi di Lhokseumawe, Banda Aceh ▪ Pengembangan Usaha dan Lembaga Perdagangan di Banda Aceh; Bantuan Usaha Ekonomi Produktif berupa bantuan modal bergulir bagi usaha kecil/pedagang pasar di 21 Kab./Kota ▪ Pembangunan 1 unit Pasar Grosir di Bireuen ▪ Pembangunan Pasar Tradisional di Aceh Besar, Pidie, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Selatan, Aceh Barat, Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Simeulue, Aceh Singkil, Bireuen, Aceh Barat Daya, Gayo Lues, Aceh Jaya, Nagan Raya, Aceh Tamiang, Bener Meriah, Banda Aceh, Sabang, Langsa, Lhokseumawe ▪ Bantuan Ekonomi Produktif berupa bantuan modal bergulir dan investasi pedagang pasar di 21 Kab./Kota; Pengadaan kendaraan Roda 4 untuk operasional kemetrolagian di 21 Kab./Kota ▪ Peningkatan dan pengembangan kemetrolagian berupa belanja barang operasional lainnya dan penyempurnaan pelayanan operasional kemetrolagian di 21 Kab./Kota ▪ Pelatihan Keterampilan Teknis penanaman modal (pelatihan kewirausahaan), Pendidikan dan training of trainer penanaman modal sebanyak 1 paket di Lhokseumawe ▪ Training Pemanfaatan Teknologi Investasi sebanyak 1 paket di Bireuen ▪ Pelayanan Perijinan Penanaman modal dan Pengembangan Iklim Promosi & Investasi sebanyak 1 paket di Banda Aceh
6.	Sub Bidang Perindustrian	▪ Pemberian bantuan oleh BRR kepada 6 industri pembuat batu bata dan tukang las di Nias ▪ Bantuan usaha industri kecil 100 unit, bantuan modal LKM 6 unit & bantuan modal kerja/industri ke 200 rumah tangga ▪ Pelatihan dan Kejuruan Keterampilan Konstruksi dan Industri serta <i>Life Skill</i> untuk 147 angkatan ▪ Pemberian bantuan berupa pondok kerja, modal kerja dan peralatan kerja pada industri batu bata kepada 39 kelompok kerja untuk 8 daerah, yaitu Banda Aceh, Aceh Besar, Pidie, Bireuen, Aceh Barat Daya, Aceh Barat, Simeulue dan Aceh Jaya; pada industri garam kepada 100 kelompok kerja untuk 3 daerah, yaitu Aceh Besar, Pidie, dan Bireuen; pada industri kusen kepada 27 kelompok kerja untuk 10 daerah, yaitu Banda Aceh, Aceh Besar, Pidie, Bireuen, Aceh Utara, Aceh Timur, Simeulue, Aceh Barat, Aceh Jaya, dan Aceh Singkil; pada industri bengkel las kepada 26 kelompok kerja untuk 10 daerah, yaitu Banda Aceh, Aceh Besar, Pidie, Bireuen, Aceh Utara, Aceh Timur, Simeulue, Aceh Barat, Aceh Jaya, dan Aceh Singkil; pada industri bordir kepada 60 kelompok kerja untuk 11 daerah, yaitu Banda Aceh, Aceh Besar, Pidie, Bireuen, Aceh Utara, Aceh Timur, Lhokseumawe, Aceh Singkil, Aceh Barat Daya, Aceh Barat, dan Simeulue; pada industri konveksi kepada 48 kelompok kerja untuk 10 daerah, yaitu Banda Aceh, Aceh Besar, Pidie, Bireuen, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Singkil, Aceh Barat Daya, Aceh Barat, dan Simeulue; pada industri gerabah kepada 22 kelompok kerja untuk 6 daerah, yaitu Banda Aceh, Pidie, Bireuen, Aceh Utara, Aceh Timur, dan Aceh Barat; pada industri tahu-tempe kepada 61 kelompok kerja untuk 7 daerah, yaitu Banda Aceh, Aceh Besar, Pidie, Bireuen, Lhokseumawe, Aceh Timur, dan Aceh Jaya; pada industri pangan kepada 50 kelompok kerja untuk 8 daerah, yaitu Banda Aceh, Aceh Besar, Pidie, Bireuen, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Barat, dan Aceh Barat Daya; pada industri kapal nelayan kepada 20 kelompok kerja untuk 10 daerah, yaitu Banda Aceh, Aceh Besar, Pidie, Bireuen, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Barat, Sabang, Aceh Jaya, dan Simeulue; pada industri kerajinan rumah tangga kepada 35 orang untuk 2 daerah, yaitu Banda Aceh dan Aceh Besar. ▪ Belanja Modal Gedung dan Bangunan di 13 Kab./Kota ▪ Pembangunan Gedung Pusat Batik Aceh ▪ Belanja Lembaga Sosial lainnya : 5 LKM di Banda Aceh, 1 LKM Sabang, 2 LKM di Aceh Besar, 2 LKM di Pidie, 3 LKM di Bireuen, 2 LKM di Aceh Utara, 2 LKM di Aceh Timur, 1 LKM di Lhokseumawe, 3 LKM di Aceh Barat, 3 LKM di Nagan Raya, 2 LKM di Aceh Singkil, 3 LKM di Aceh Jaya, 2 LKM di Simeulue ▪ Pemberian bantuan untuk penambangan batu gunung di Aceh Besar ▪ Pemberian bantuan untuk penambangan pasir di Aceh Besar ▪ Bantuan untuk Pilot Project Pembinaan Penambangan Skala Kecil di Aceh Selatan, Aceh Barat dan Nagan Raya ▪ bantuan untuk penambangan emas placer ▪ Biaya operasional tenaga tim pelaksana lapangan di 4 Kab
7.	Sub Bidang Tenaga Kerja	▪ Pelatihan Tenaga Kerja 11 angkatan, bantuan peralatan bengkel las 10 unit, pembuatan batu bata 24 unit, pembuatan kapal nelayan 2 unit, pembuatan tahu

NO	BIDANG	KEMAJUAN
		tempe 6 unit di Nias ▪ Penyelenggaraan & Pelatihan Produktivitas ketenagakerjaan 5 angkatan, bantuan peralatan & modal kerja penambang rakyat 21 kelompok & pelatihan tenaga kerja, peralatan ▪ Pemberian bantuan modal bergulir ▪ Pembangunan 1 unit BLK di Lhokseumawe dan 1 unit di Banda Aceh ▪ Rehabilitasi kantor Dinas Tenaga Kerja Provinsi NAD

Sumber : Laporan kegiatan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi Satker BRR provinsi NAD-Nias; Perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi di Kepulauan Nias, Juli 2006; Mengenal proses rehabilitasi dan rekonstruksi Nias lebih dekat (Pertemuan dengan masyarakat Nias di Medan dan Sekitarnya, 25 November 2006).

Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam pemulihan perekonomian yang meliputi subbidang kelautan dan perikanan, pertanian, pariwisata, perdagangan masih dominan pemulihan pada aspek fisik sedangkan subbidang perindustrian, koperasi & UKM dan tenaga kerja lebih menekankan pemulihan pada aspek non fisik. Dalam tahap pemulihan ditempuh melalui kebijakan pembangunan secara fisik maupun non fisik, kemudian diikuti melalui penggantian sumber daya manusia yang baru akibat menjadi korban gempa dan tsunami. Secara prioritas, untuk bidang pemulihan perekonomian ini adalah pada subbidang kelautan dan perikanan yang mengalami kerusakan paling parah pasca tsunami.

II.1.3.5. Bidang Pemulihan Kelembagaan dan Hukum

Bidang Kelembagaan terdiri atas beberapa bagian yaitu Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemda, Pembangunan Sarana dan Prasarana Hukum, dan Ketertiban, Keamanan dan Ketahanan Masyarakat (K3M). Masing-masing bidang memiliki beberapa program/kegiatan yang akan disajikan dalam uraian dan Tabel berikut. Uraian berisikan tentang rencana induk yang telah ditetapkan dan realisasi pekerjaan oleh Bapel pada periode 2005-2006 hingga periode tahun 2007. Dalam perkembangannya, beberapa kemajuan telah dicapai dalam realisasi di Provinsi NAD dan Kepulauan Nias.

II.1.3.5.1 Pembangunan Sarana dan Prasarana PEMDA

Sedikitnya hingga akhir 2006 tercatat sebanyak 489 unit bangunan pemerintah daerah telah terbangun. Kegiatan ini meliputi kantor dinas/badan, Camat, mukim, dan balai musyawarah. Selanjutnya pada 2007 direncanakan pembangunan 142 unit. Sehingga sampai akhir tahun 2007 diperkirakan akan terbangun 631 unit. Rincian pembangunannya selanjutnya dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel II. 63
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sarana Prasarana PEMDA oleh BRR

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SAT	RENCANA INDUK	REALISASI TAHUN 2005-2006				PROGRAM 2007	2005 -2007	
				APBN	NON APBN	TOTAL	CAPAIAN		TOTAL	CAPAIAN
1	Perencanaan	Dokumen	550							
2	Ktr KDH/DPRD/Dinas/Meuligo	Unit	76	5		5	6.6%	25	30	39.5%
3	Kantor Kecamatan	Unit	23	14		14	60.9%	6	20	87.0%
4	Rumah Dinas Camat	Unit	-	69		69		11	80	
5	Kantor Desa/Kelur.	Unit	450	283		283	62.9%	33	316	70.2%
6	Ambulan Pemda	Paket	12							
7	Pemadam Kebakaran	Paket	12							
8	Ktr Mukim/Balee	Unit		118		118		67	185	

Sumber : BRR NAD-Nias, 2007

Program peningkatan profesionalisme aparat Pemda memiliki beberapa kegiatan berkenaan dengan pemberdayaan aparat Pemda, penyusunan sistem, serta kepentingan administratif lainnya. Dari delapan kegiatan yang direncanakan dalam program ini, kemajuan yang dapat dipantau adalah realisasi kegiatan penyusunan rencana pengelolaan pegawai dan peningkatan kapasitas mitigasi bencana Pemda. Realisasi dari rencana induk kedua kegiatan tersebut masing-masing mencapai 107.7% dan 53% sampai dengan tahun 2007. Kegiatan rekrutmen dan mutasi pegawai, penanganan masalah administrasi kepegawaian dan pemberdayaan dan fasilitasi aparat Pemda telah merealisasikan kegiatannya pada tahun 2007 namun belum diketahui pencapaiannya berdasarkan rencana induk yang telah ditetapkan. Masing-masing Rincian pembangunannya selanjutnya dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel II. 64
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sarana Prasarana PEMDA oleh BRR (Program Peningkatan Profesionalisme Aparat Pemda)

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SAT	RENCA NA INDUK	REALISASI TAHUN 2005-2006				PROG RAM 2007	2005 -2007	
				APBN	NON APBN	TO TAL	CAPAI AN		TO TAL	CAPAI AN
1	Pemberdayaan dan Fasilitasi Aparat PEMDA	Paket						3	3	
2	Penanganan masalah administrasi Kepegawaian	Paket						1	1	
3	Penyusunan Sisdur Adm Paska Bencana bagi PNS	Paket								
4	Penyediaan tenaga-tenaga Kontrak/Suplemen	Paket								
5	Penyelesaian rekrutmen CPNS yang telah dilaksanakan	Paket								
6	Penataan & Penyediaan (rekrutmen & mutasi) aparatur Pemda	Paket						5	5	
7	Penyusunan Rencana Pengelolaan Pegawai	Pemda	13	8		8	61.5%	6	14	107.7%
8	Peningkatan Kapasitas Mitigasi Bencana Pemda	Kab/k	13	7		7	53.8%		7	53.8%

Sumber : BRR NAD-Nias, 2007

Program peningkatan kapasitas kelembagaan Pemda memiliki kegiatan yang berkenaan dengan penyelesaian administrasi, penyusunan rencana tata organisasi, sistem komunikasi, monev dan peningkatan kapasitas kelembagaan. Beberapa pencapaian sampai saat ini telah mencapai lebih dari 100%, yaitu kegiatan penyelamatan administrasi pemerintahan (176%), penyusunan penataan organisasi Pemda (123.1%) dan BOP kecamatan/Gampong (341.6%). Program ini terutama dilaksanakan pada tahun 2006 dan sebagian kecil dilanjutkan pada tahun 2007. namun demikian beberapa pencapaian masih sedikit sampai dengan tahun 2007 seperti pada kegiatan penataan Siskom humas daerah yang pencapaiannya baru mencapai 7.7%. Masing-masing Rincian selanjutnya dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel II. 65
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sarana Prasarana PEMDA oleh BRR (Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan PEMDA)

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SAT	RENCA NA INDUK	REALISASI TAHUN 2005-2006				PROG RAM 2007	2005 -2007	
				APBN	NON APBN	TO TAL	CAPAI AN		TO TAL	CAPAI AN
1	Penyelamatan Administrasi Pemerintahan	Pemda	13	23		23	176.9%		23	176.9%
2	Penyusunan Rencana Penataan Organisasi Pemda	Pemda	13	11		11	84.6%	5	16	123.1%
3	Pemantapan dan Monev Penataan Organisasi Pemda	Pemda	13					4	4	30.8%
4	Penataan SisKom Humas		13					1	1	7.7%

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SAT	RENCA NA INDUK	REALISASI TAHUN 2005-2006				PROG RAM 2007	2005 -2007	
				APBN	NON APBN	TO TAL	CAPAI AN		TO TAL	CAPAI AN
	daerah (media centre)									
5	BOP Kecamatan/Gampong (Buku, Komputer, Fax, Roda2, Seragam)	Kab/ kota	13	23		23	176.9%		23	176.9%
		Kec.	77	263		263	341.6%		263	341.6%
6	Peningkatan kapasitas pemerintahan kecamatan/mukim/gampong	Kab/ kota	13	6		6	46.2%	1	7	
		Kec.	77	263		263	341.6%		263	341.6%
7	Rencana Perbaikan Sisdur Kerja lembaga Pemerintah	Keg		21		21			21	

Sumber : BRR NAD-Nias, 2007

Program peningkatan kapasitas keuangan Pemda memiliki dua kegiatan dan pencapaian keduanya sejak tahun 2006 telah mencapai lebih dari 100%. Selanjutnya sampai tahun 2007 terdapat beberapa penambahan. Masing-masing adalah kegiatan peningkatan kapasitas legislatif (192.3%) dan penataan keuangan daerah dan pengelolaannya (169.2%). Masing-masing Rincian selanjutnya dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel II. 66
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sarana Prasarana PEMDA oleh BRR
(Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemda)

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	SAT	RENC ANA INDUK	REALISASI TAHUN 2005-2006				PROG RAM 2007	2005 -2007	
				AP BN	NON APBN	TO TAL	CAPAI AN		TOTAL	CAPAI AN
1	Peningkatan Kapasitas Legislatif dalam PKeuD	Kab/ kota	13	21		21	161.5%	4	25	192.3%
2	Penataan Keuangan Daerah dan Pengelolaannya	Kab/ kota	13	21		21	161.5%	1	22	169.2%

Sumber : BRR NAD-Nias, 2007

Program peningkatan kerjasama antar daerah juga memiliki dua kegiatan yaitu optimalisasi kerjasama antar daerah dan koordinasi penyelenggaraan pusat dan daerah.. Pencapaian pada tahun 2006 masing-masing telah menyelesaikan 1 paket. Pada tahun 2007 pelaksanaan optimalisasi kerjasama pemerintah daerah melaksanakan 1 paket lagi. Masing-masing Rincian selanjutnya dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel II. 67
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sarana Prasarana PEMDA oleh BRR
(Program Peningkatan Kerjasama Antar Daerah)

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	SAT	RENCA NA INDUK	REALISASI TAHUN 2005-2006				PROG RAM 2007	2005 -2007	
				AP BN	NON APBN	TO TAL	CAPAI AN		TO TAL	CAPAI AN
1	Optimalisasi Kerjasama antara Daerah	Paket		1		1		1	2	
2	Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Pusat dan Daerah	Paket		1		1			1	

Sumber : BRR NAD-Nias, 2007

Beberapa kegiatan pembangunan sarana dan prasarana lainnya, ada yang belum dikerjakan (yaitu penataan administrasi wilayah pemerintahan) dan kegiatan lainnya belum dapat dilihat kemajuannya karena belum dapat diperbandingkan dengan rencana induk (seperti kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial, Penguatan dan Fasilitas Lembaga Masyarakat, FKK Stakeholder RR, Dukungan Penyiapan KDH dan DPRD dan Harmonisasi Peraturan di Aceh). Masing-masing Rincian selanjutnya dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel II. 68
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sarana Prasarana PEMDA oleh BRR

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	SAT	RENCA NA INDUK	REALISASI TAHUN 2005-2006				PROG RAM 2007	2005 -2007	
				AP BN	NON APBN	TO TAL	CAPAI AN		TOTAL	CAPAI AN
1	Penataan Administrasi Kependudukan	Dok				73			73	
2	Penataan Administrasi Wilayah Pemerintah	Kab./ kota	13				0.0%			0.0%
3	Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Paket				1			1	
	Layanan Rehab Kessos (Trauma Centre)									
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana							1	1	
	Penguatan dan Fasilitas Lembaga Masy.	Paket				1		1	2	
	FKK Stakeholder RR	Paket				1		1	2	
4	Penguatan Kelembagaan Demokrasi									
	Dukungan Penyiapan KDH dan DPRD	Kab/k				21			21	
5	Peraturan Perundang-Undangan (Desentralisasi/OTD A)									
	Harmonisasi Peraturan di Aceh	Paket				1		6	7	
6	Pengelolaan SDM Aparatur									
	Fasilitas Penyediaan Aparat Instansi Vertikal di Aceh									

Sumber : BRR NAD-Nias, 2007

II.1.3.5.2 Pembangunan Sarana dan Prasarana HUKUM

Sepanjang tahun 2005–2006 pembangunan di bidang hukum lebih menitikberatkan pada pembangunan kembali berbagai gedung perkantoran dan fasilitas di bidang hukum yang mengalami kerusakan. Penyediaan sarana dan prasarana hukum pasca bencana di Aceh ini hampir 40% sudah berhasil dikerjakan, mulai dari rehabilitasi gedung perkantoran hingga penyediaan fasilitas pendukung kerja lembaga hukum. Penyediaan sarana dan prasarana hukum menjadi jawaban terhadap lumpuhnya sebagian besar kegiatan penegakan hukum di Aceh pasca bencana. Ketiadaan sarana dan prasarana hukum di Aceh pasca bencana membuat banyak kasus-kasus hukum di Aceh tidak bisa dilanjutkan dan diputuskan. Kondisi seperti ini bisa menimbulkan kehilangan kepercayaan dari masyarakat sebagai syarat mutlak keberhasilan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh. Bentuk pembangunan di bidang hukum yang telah dilakukan hingga tahun 2006 adalah penyediaan gedung perkantoran untuk institusi penegakan hukum di Aceh, seperti Kejaksaan, pengadilan, Departemen Hukum dan HAM, Mahkamah Syar'iyah, dan lembaga pemasyarakatan. Rinciannya dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel II. 69
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sarana Prasarana Kejaksaan oleh BRR, Departemen
Hukum dan HAM dan Pengadilan

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SAT.	RENCANA INDUK	REALISASI TAHUN 2005-2006				PROG RAM 2007	2005 -2007	
				AP BN	NON APBN	TO TAL	CAPAI AN		TO TAL	CAPAIAN
A	SARPRAS KEJAKSAAN									
	Kejati Provinsi NAD	Unit	1			1	0.0%		1	100.0%
	Kejari	Unit	5			6	120.0%		6	120.0%
	Rumah Dinas Jaksa	Unit	38			20	52.6%	2	22	57.9%
	Peralatan Kantor	Paket	6			79	1316.7%		79	1316.7%
	Kendaraan R2	Unit	38			17	44.7%		17	44.7%
	Kendaraan R4	Unit	15				0.0%			0.0%
	Kendaraan Tahanan	Unit	12			7	58.3%		7	58.3%
B	SARPRAS DEPKUMHAM									
	Rumah Dinas	Unit	49			20	40.8%	4	24	49.0%
	Lapas/Rutan	Unit	6			3	50.0%	6	9	150.0%
	Bapas	Unit	2			1	50.0%	1	2	100.0%
	Kanwil Depkumham	Unit	1			1	100.0%		1	100.0%
	Kantor Imigrasi	Unit	2			2	100.0%		2	100.0%
	Kendaraan R2	Unit	8				0.0%			0.0%
	Kendaraan R4	Unit	10			6	60.0%		6	60.0%
	Peralatan Kantor	Paket	3			19	633.3%		19	633.3%
C	SARPRAS PENGADILAN									
	PT/PTUN	Unit	2				0.0%	1	1	50.0%
	Pengadilan Negeri	Unit	9			10	111.1%	5	15	166.7%
	Kendaraan R2 Pengadilan	Unit	25				0.0%			0.0%
	Kendaraan R4 Pengadilan	Unit	33				0.0%			0.0%
	Bangunan Mahkamah Syari'ah	Unit	6			1	16.7%	5	6	100.0%
	Kendaraan R2 Mah. Syari'ah	Unit	33			12	36.4%		12	36.4%
	Kendaraan R4 Mah. Syari'ah	Unit	18			17	94.4%		17	94.4%
	Peralatan Kantor	Unit	17			79	464.7%		79	464.7%
	Pengadilan Militer	Paket						1	1	
	Pengawasan Pembangunan Gedung	Paket						1	1	
D	PENGEMBANGAN INSTITUSI HUKUM									
	Penelitian dan Pengembangan Hukum	Paket						1	1	
	Pengembangan Hukum Adat	Paket						1	1	
	Diklat Teknis Hukum dan HAM	Paket						1	1	

Sumber : BRR NAD-Nias, 2007

Hingga akhir tahun 2006 untuk penyediaan sarana dan prasarana hukum juga telah terdata sebanyak 10 unit kantor Pengadilan Negeri, 7 unit kantor Kejaksaan Negeri, 20 unit rumah dinas Kejari, 3 unit Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan, 1 unit Kanwil Depkumham, 2 unit Kanwil Imigrasi, dan 1 unit Balai Pemasyarakatan telah berhasil dibangun kembali, serta 289 unit peralatan kantor telah berhasil disumbangkan. Berikut adalah Tabel beberapa kemajuan yang telah dicapai dalam Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias oleh BRR Bidang Pemulihan Kelembagaan.

Tabel II. 70
Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias oleh
BRR Bidang Pemulihan Kelembagaan

NO	KEGIATAN	KEMAJUAN
1	Pembangunan sarana dan prasarana kantor pemerintahan	❖ Perencanaan dan desain kantor desa/kelurahan (991 unit), balai musyawarah (489 unit), dan Camat (65 unit) ❖ Perencanaan dan desain gedung kantor yang lebih besar di tingkat kota/kabupaten dan provinsi (166 unit) ❖ Pembangunan Kantor Desa 217 unit di 10 Kabupaten/Kota Provinsi NAD dan 1 unit di Kepulauan Nias ❖ Pembangunan Kantor Camat 18 unit di 6 Kabupaten/Kota Provinsi NAD dan 3 unit di Kepulauan Nias ❖ Pembangunan Kantor Bupati 2 unit di Kepulauan Nias ❖ Pembangunan Kantor Dinas 3 unit untuk Provinsi NAD, 4 unit di 3 Kabupaten/Kota Provinsi NAD dan 7 unit di Kepulauan Nias ❖ Pembangunan Meuligo 2 unit di Kota Banda Aceh Provinsi NAD ❖ Pembangunan Kantor Mukim/Bale 73 unit di 12 Kabupaten/Kota Provinsi NAD ❖ Pembangunan Rumah Dinas 17 unit untuk Provinsi NAD, 239 unit di 12 Kabupaten/Kota Provinsi NAD dan 45 unit di Kepulauan Nias, namun tidak dirinci menurut instansi terkait (Rumah Dinas TNI/Polri/PNS/Hakim)
2	Penyediaan SDM aparatur:	❖ Rekrutmen PNS. Berdasarkan data BKN rekrutmen di Provinsi NAD mencapai 9.191 orang dari total kebutuhan di Provinsi NAD sebanyak 17.307 orang ❖ Percepatan pemrosesan kepegawaian (pengurusan administrasi, pemberian NIP, dan lain sebagainya). Tidak semua calon PNS yang diterima dapat diproses karena persyaratan administrasi yang diperlukan tidak dapat dilengkapi ❖ Pelatihan Prajabatan calon PNS 1434 orang, serta mempercepat proses PNS yang belum mengikuti prajabatan. ❖ Program pengiriman PNS untuk gelar S2 sebanyak 52 orang ❖ Diklat Penjenjangan Karir untuk 130 orang
3	Peningkatan kapasitas aparatur melalui:	❖ Pelatihan administrasi pemerintahan kepada Camat, mukim, dan keuchik di kabupaten/kota, secara bertahap mencakup 6 kabupaten/kota. ❖ Pelatihan fasilitasi forum komunikasi kecamatan di kabupaten/kota. ❖ Pendidikan/pelatihan Aparatur Pemda sebanyak 1.222 orang ❖ Pelatihan ESQ untuk 2.500 orang. ESQ diperuntukkan bagi aparatur di Provinsi NAD yaitu di Banda Aceh dan Lhokseumawe, Aceh Utara trauma healing yang diadakan di Nias telah membantu aparatur dan masyarakat sebanyak 680 orang ❖ Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa 800 orang ❖ Penerbitan Buku/Arsip/Modul Panduan sebanyak 81 Dokumen
4	Penataan batas-batas administrasi wilayah yang telah berubah akibat bencana	❖ Penentuan pilar batas daerah 303 unit
5	Penataan administrasi kependudukan	❖ Dukungan pengadaan KTP sebanyak 1.360.000 B
6	Pelatihan hakim dan aparat pengadilan untuk 380 orang, termasuk pelatihan Hakim Syari'ah sebanyak 40 orang	❖ Pelatihan Manajemen Peradilan Bagi Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Se-Provinsi NAD; ❖ Pelatihan Penyusunan Renstra dan LAKIP bagi pejabat Kesekretariatan Mahkamah Syar'iyah se-Provinsi NAD; ❖ Workshop Sengketa Tata Usaha Negara dalam Kaitannya dengan Pembentukan Good Governance; ❖ Sosialisasi Draf Perpu tentang Penanganan Permasalahan Hukum Pasca-Tsunami bagi Hakim Mahkamah Syar'iyah di Wilayah Provinsi NAD; ❖ Seminar Peranan dan Fungsi Mahkamah Syar'iyah Pasca-Pelaksanaan MOU Helsinki bagi Hakim Mahkamah Syar'iyah se-Provinsi NAD; ❖ Seminar Peranan dan Fungsi Mahkamah Syar'iyah Pasca-Pelaksanaan MOU Helsinki bagi Hakim Mahkamah Syar'iyah se-Provinsi NAD; ❖ Pelatihan terhadap Pelaksanaan Hukum Pidana Islam bagi Para Hakim Mahkamah Syar'iyah se-Provinsi NAD; ❖ Workshop Kritisasi Rancangan Qanun tentang Hukum Acara Jinayat; ❖ Pelatihan 14 Hakim Mahkamah Syar'iyah di Mahkamah Syar'iyah Pulo Penang dan Kelantan, Kuala Lumpur (Malaysia); ❖ Pelatihan Pembinaan Adat bagi Tokoh Adat Gampong dan Mukim dalam

NO	KEGIATAN	KEMAJUAN
		Wilayah Tsunami di Banda Aceh dan Aceh Besar ; ❖ Seminar Dalam Rangka Pemberdayaan Baitul Mal di Provinsi NAD; ❖ Pelatihan Pengelolaan Keuangan Negara (Kaur Umum dan Kaur Keuangan Mahkamah Syar'iyah se- Prov. NAD) Tahun 2005; ❖ Pelatihan Administrasi Umum dan Peradilan Bagi Wakil Panitera dan Wakil Sekretaris Mahkamah Syar'iyah Se - Prov. NAD; ❖ Comparative Study Pelaksanaan Syari'at Islam di Pakistan (Hakim Mahkamah Syar'iyah se- Prov. NAD). ❖ Need assessment manajemen informasi teknologi dalam proses penanganan perkara di Mahkamah Syar'iyah Provinsi serta Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dan Aceh Besar (pilot project)
7	Pembangunan sarana dan prasarana hukum	❖ Lembaga Pemasyarakatan, Balai Pemasyarakatan & Rumah Tahanan sebanyak 8 unit di 6 Kabupaten/Kota Provinsi NAD ❖ Kantor Imigrasi sebanyak 2 unit di 2 Kabupaten/Kota Provinsi NAD ❖ Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah syari'ah, Mahkamah Militer, PTUN sebanyak 3 unit untuk Provinsi NAD, 14 unit di 11 Kabupaten/Kota Provinsi NAD

Sumber : Laporan Kegiatan 1 Tahun Bapel BRR (April 2006), Monitoring dan Evaluasi Pokja Kelembagaan (September 2006), Paparan Bapel BRR pada Lokakarya Perkembangan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi NAD-Nias: Membangun Sinergi Menuju Pemulihan Berkelanjutan (Desember 2006), dan Data Kedeputan Bidang Kelembagaan dan Pengembangan SDM (Desember 2006)

II.1.3.5.3 Ketertiban, Keamanan dan Ketahanan Masyarakat (K3M)

Bidang pemulihan Ketertiban, Keamanan dan Ketahanan Masyarakat (K3M) diupayakan untuk menciptakan kembali ketertiban, keamanan dan ketahanan di dalam masyarakat. Beberapa kebijakan dalam sub bidang pemulihan di bidang K3M diterapkan melalui koordinasi di bawah satuan kerja; Deop, Delog, dan Desdm Polri NAD-Nias, Penguatan Kelembagaan Komunikasi dan informasi, Peningkatan Komitmen Persatuan Nasional, Pengembangan Pertahanan Matra Darat, Matra Laut, dan Matra Udara NAD-Nias, dan Pengembangan Pertahanan Integratif. Sebagian besar program Menkopolhukam, Menkominfo, dan Polri telah mencapai target yang ditetapkan dalam rencana induk (100%), sedangkan pada program TNI-AD, TNI-AL, TNI-AU dan Matra Integratif juga telah mencapai beberapa realisasi sampai dengan tahun 2007. Kemajuan program/kegiatan secara terperinci ditampilkan dalam Tabel berikut.

Tabel II. 71
Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD -Nias oleh Bapel BRR Dalam Bidang Ketertiban, Keamanan dan Ketahanan Masyarakat (K3M)

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SAT	RENCANA INDUK	REALISASI TAHUN 2005-2006				PROGRAM 2007	2005 -2007	
				APBN	NON APBN	TOTAL	CAPAIAN		TOTAL	CAPAIAN
1	Menkopolhukam	Unit	1			1	100.0%		1	100.0%
2	Menkominfo									
	Gedung Kantor Dinas Kominfo	Unit	1			2	200.0%	1	3	300.0%
	Stasiun RRI	Unit	1			3	300.0%	7	10	1000.0%
	Stasiun Transmisi TVRI	Unit	6			10	166.7%	6	16	266.7%
	Gedung PWI	Unit				1		1	2	
	Rumah Dinas	Unit				1		1	2	
	Kendaraan Roda-2 dan Roda - 4	Unit				3			3	
3	POLRI									
	Pengembangan Sarana dan Prasarana							5	5	
	Penampungan Sementara	Unit	1.416			1	0.1%		1	0.1%
	Mapolda	Kompleks	1			1	100.0%	1	2	200.0%

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SAT	RENCANA INDUK	REALISASI TAHUN 2005-2006				PROGRAM 2007	2005-2007	
				APBN	NON APBN	TOTAL	CAPAIAN		TOTAL	CAPAIAN
	Brimobda	Kompleks	1			1	100.0%	1	2	200.0%
	Dit. Polair	Kompleks	1					2	2	200.0%
	Polres	Unit	5							0.0%
	Rumah Dinas (Aspol)	Komplek	26					57	57	219.2%
	Polsek	Unit	20			2	10.0%	6	8	40.0%
	Pengadaan Material (Gedung)	Unit				193			193	
	Pengadaan Peralatan dan Komlek	Unit				434		5	439	
	Kendaraan Roda - 4	Unit				71			71	
	Gedung PUSDIK Pasukan Anjing/Kuda									
	Biaya Perencanaan dan Pengawasan							5	5	
4	TNI-AD									
	Bidang ALPAL					1			1	
	- Kendaraan	Unit				8			8	
	- Alat Angkutan Air	Unit				2			2	
	- Alat Berat Zeni	Unit				27			27	
	- Alat Utama Militer (Senjata)	Unit				295			295	
	- Alpasus Zeni	Unit				39			39	
	- Alsatri dan Alsintor	Unit				4			4	
	- Peralatan Lainnya	Unit				7			7	
	- Kendaraan Roda - 2	Unit				217			217	
	- Kendaraan Roda - 4	Unit				28			28	
	Bidang Faskon	Unit				461			461	
	Bidang Alkon	Unit				1			1	
	Korem/Kodim	Unit						2	2	
	Rumah Dinas	Unit						1	1	
	Kompi	Unit						2	2	
	Biaya Perencanaan dan Pengawasan	Paket						1	1	
5	TNI-AL								-	
	Bidang Bekal Umum	Unit				1			1	
	Bidang ALPAL	Unit				1			1	
	- Alat Perlengkapan Laut Lanal Sabang	Unit				1		3	4	
	- Peralatan Bengkel	Unit				4			4	
	- Peralatan Laut Komar	Unit				1			1	
	- Peralatan Khusus Komar	Unit				130			130	
	- Persenjataan (Senapan dan Pistol)	Unit				56			56	
	- Amunisi	Butir				19.769			19.769	
	- Kendaraan	Unit				6			6	
	- Peralatan Lainnya	Unit				74		2	76	

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SAT	RENCANA INDUK	REALISASI TAHUN 2005-2006				PROGRAM 2007	2005 -2007	
				APBN	NON APBN	TOTAL	CAPAIAN		TOTAL	CAPAIAN
	Bidang Faskon	Unit				40			40	
	Rumah Sakit Sabang	Unit							-	
	Rumah Dinas	Unit						2	2	
	Posal Sitoli (Dermaga + Mesjid)	Unit						2	2	
	Pengembangan SARPRAS Gedung	Unit						3	3	
6	TNI-AU								-	
	Bidang ALPAL	Paket							-	
	Bidang Faskon	Paket							-	
	Lanud Maimun Saleh	Unit						1	1	
	Lanud Iskandar Muda	Unit						1	1	
	Paskhas AU	Unit						1	1	
	Satrad	Unit						3	3	
7	Matra Integratif								-	
	Bidang Bekal Umum	Unit				3			3	
	Bidang ALPAL								-	
	- Kendaraan Roda-2	Unit				40			40	
	- Alat Utama Militer	Unit				958			958	
	- Alat Angkutan Air	Unit				13			13	
	- Jembatan Bailey	Unit				15			15	
	- Alat Berat	Unit				483			483	
	- Suku Cadang/Ban Pesawat	Unit				2.299			2.299	
	Bidang Faskon	Unit				3			3	
	Bidang Kesehatan	Unit				4			4	
	Bidang Alkon	Unit				1			1	

Sumber : BRR NAD-Nias, 2007

II.1.3.6. Realisasi Anggaran

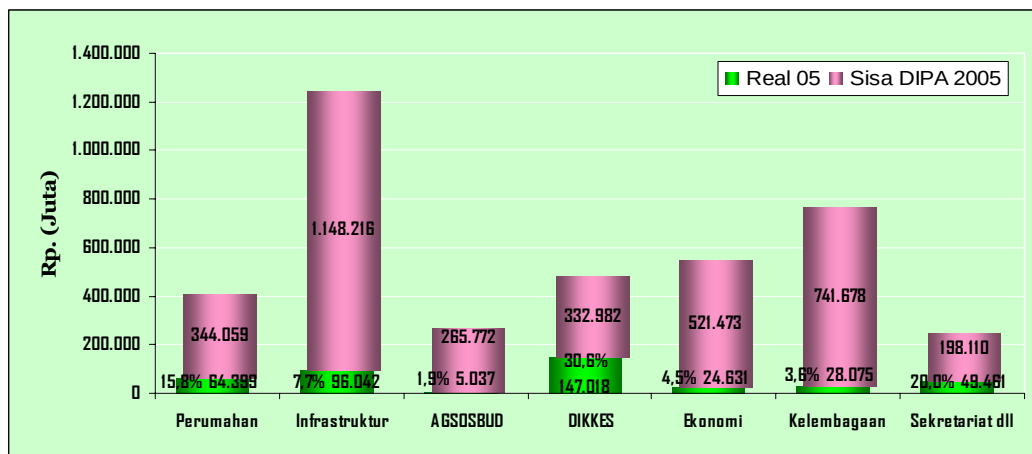
II.1.3.6.1 Penyerapan DIPA 2005

Realisasi DIPA 2005 pada tahun 2005 adalah sebesar Rp. 415 Milyar atau 10% dari Pagu DIPA. Penyerapan tertinggi ada pada bidang Pendidikan dan Kesehatan sebesar 30,6% disusul bidang Sekretariat-dll sebesar 20%. Penyerapan terendah ada pada bidang Agama-Sosbud yakni sebesar 1,9% disusul bidang Kelembagaan sebesar 3,6%. Sisa anggaran sebesar Rp. 3,55 Trilyun kemudian diluncurkan pada tahun 2006. Dari luncuran DIPA 2005 pada 2006, berhasil diserap Rp. 2,06 Trilyun atau 58,1%. Penyerapan tertinggi ada pada Satker-Satker bidang Perumahan sebesar 78,6%, disusul bidang Sekretariat sebesar 77,1%. Penyerapan terendah ada pada bidang Agama-Sosbud sebesar 43,9% disusul. Total penyerapan DIPA 2005 baik yang direalisasikan pada tahun 2005 maupun tahun 2006, adalah sebesar Rp. 2,48 Trilyun, atau 62,5% dari pagu. Penyerapan tertinggi ada pada Satker-Satker bidang Perumahan sebesar 82%. Penyerapan terendah ada pada bidang Agama-Sosbud sebesar 44,6%.

Tabel II. 72
Penyerapan Anggaran DIPA 2005 (Dalam Rp. Juta)

No	Bidang	DIPA 2005	DIPA-L 2006	Real 05	% Real 05	Real L-06	%Real L-06	Real 05+L	% Real 05+L
1	Perumahan	408,458	344,059	64,399	15.8%	270,389	78.6%	334,788	82.0%
2	Infrastruktur	1,244,258	1,148,215	96,042	7.7%	665,608	58.0%	761,650	61.2%
3	AGSOSBUD	270,809	263,275	5,037	1.9%	115,681	43.9%	120,718	44.6%
4	DIKKES	480,000	335,480	147,018	30.6%	150,363	44.8%	297,381	62.0%
5	Ekonomi	546,104	521,473	24,631	4.5%	373,285	71.6%	397,916	72.9%
6	Kelembagaan	769,753	741,678	28,075	3.6%	334,683	45.1%	362,758	47.1%
7	Sekretariat dll.	247,571	198,079	49,461	20.0%	152,801	77.1%	202,262	81.7%
TOTAL		3,966,953	3,552,259	414,663	10.5%	2,062,810	58.1%	2,477,473	62.5%

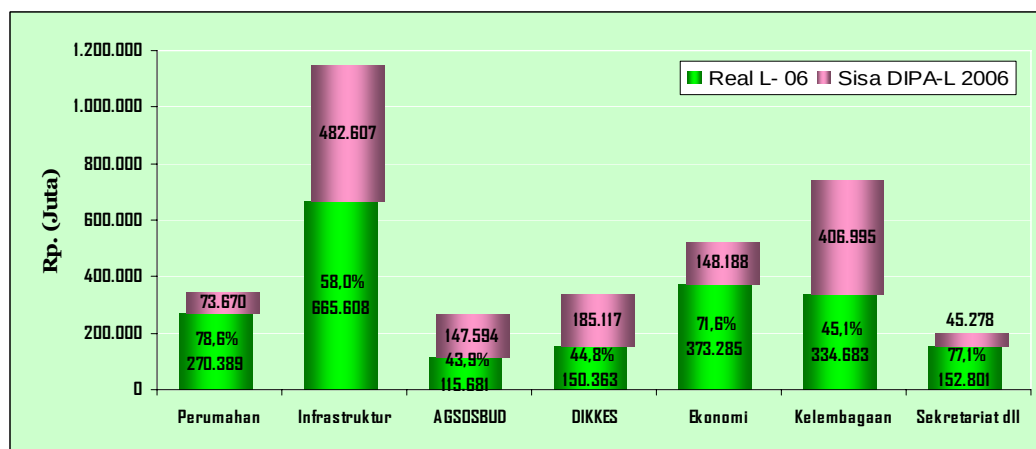
Sumber : BRR NAD-Nias, 2007



Sumber : BRR NAD-Nias, 2007

Gambar II. 1

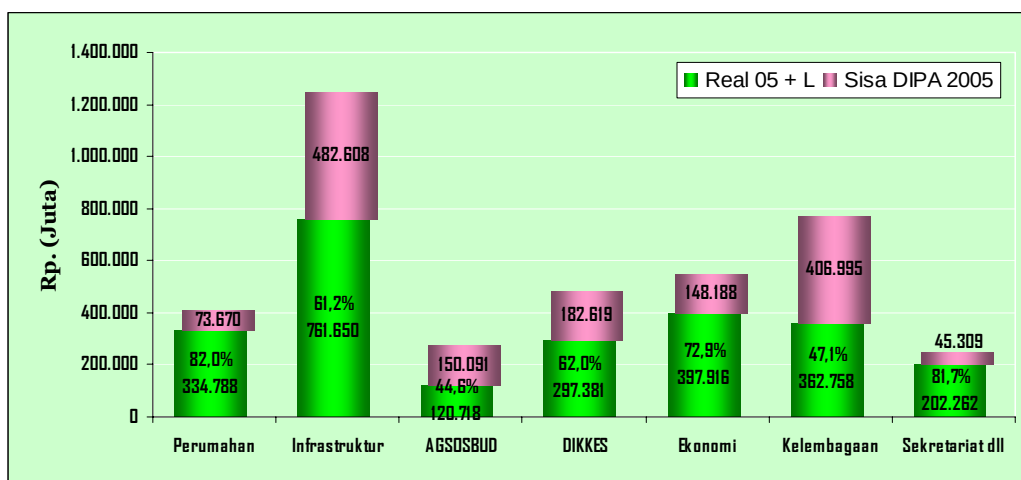
Penyerapan Anggaran DIPA 2005 Pada Tahun 2005



Sumber : BRR NAD-Nias, 2007

Gambar II. 2

Penyerapan Anggaran DIPA 2005 pada Tahun 2006



Sumber : BRR NAD-Nias, 2007

Gambar II. 3
Total Penyerapan Anggaran DIPA 2005 Pada 2005 dan 2006

II.1.3.6.2 Penyerapan DIPA 2006

Realisasi DIPA 2006 pada tahun 2006 adalah sebesar Rp. 7,79 Trilyun atau 74% dari Pagu DIPA. Penyerapan tertinggi ada pada bidang Infrastruktur sebesar 87,4% disusul bidang Agama-Sosbud sebesar 82,4%. Penyerapan terendah ada pada bidang Kelembagaan yakni sebesar 54,9% disusul bidang Pendidikan-Kesehatan sebesar 63,8%. Khusus bidang Perumahan dan Infrastruktur, terdapat luncuran anggaran sebesar Rp. 2,2 Trilyun yang dikelola dengan mekanisme Trust Fun 2007.

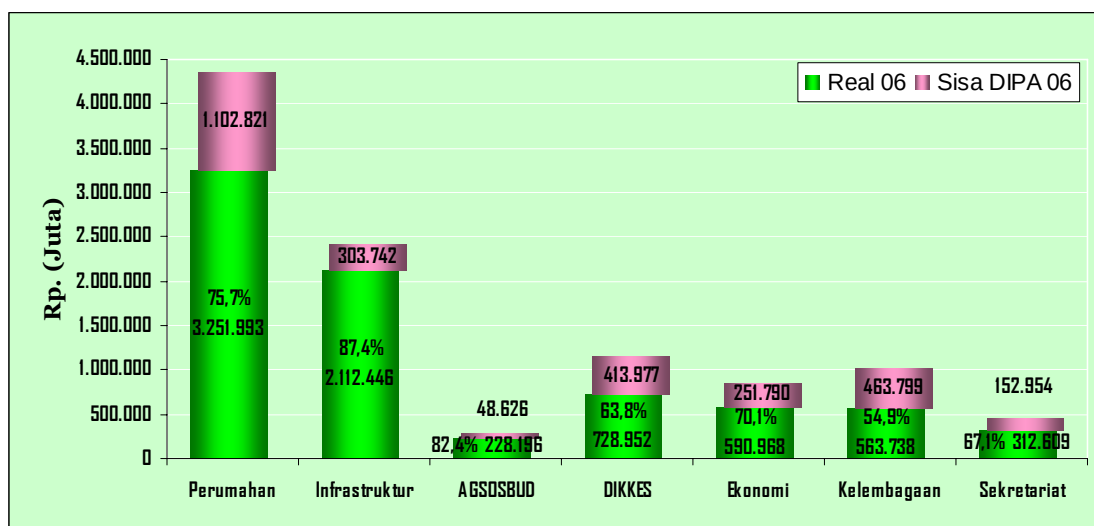
Dari luncuran DIPA 2006 pada 2007, sampai 31 Mei 2007, berhasil diserap Rp. 1,24 Trilyun atau 55,9%. Sehingga Total penyerapan DIPA 2006 baik yang direalisasikan pada tahun 2006 maupun Trust Fund tahun 2007, adalah sebesar Rp. 9,03 Trilyun, atau 79,6% dari pagu.

Tabel II. 73
Penyerapan Anggaran DIPA 2006 (Dalam Rp. Juta)

No	Bidang	DIPA 06	TF 07	D 06+TF	Real 06	% R 06	R TF 07	% R TF 07	R 06+TF	% 06+TF
		1	2	3	4	5=4/1	6	7=6/2	8=4+6	9=8/3
1	Perumahan	4,354,814	1,263,127	4,515,120	3,251,993	74.7%	782,281	61.9%	4,034,274	89.4%
2	Infrastruktur	2,416,188	950,575	3,063,021	2,112,446	87.4%	454,620	47.8%	2,567,066	83.8%
3	AGSOSBUD	276,822		276,822	228,196	82.4%			228,196	82.4%
4	DIKKES	1,142,929		1,142,929	728,952	63.8%			728,952	63.8%
5	Ekonomi	842,758		842,758	590,968	70.1%			590,968	70.1%
6	Kelembagaan	1,027,537		1,027,537	563,738	54.9%			563,738	54.9%
7	Sekretariat	465,563		465,562	312,609	67.1%			312,609	67.1%
TOTAL		10,526,611	2,213,702	11,333,749	7,788,902	74.0%	1,236,901	55.9%	9,025,803	79.6%

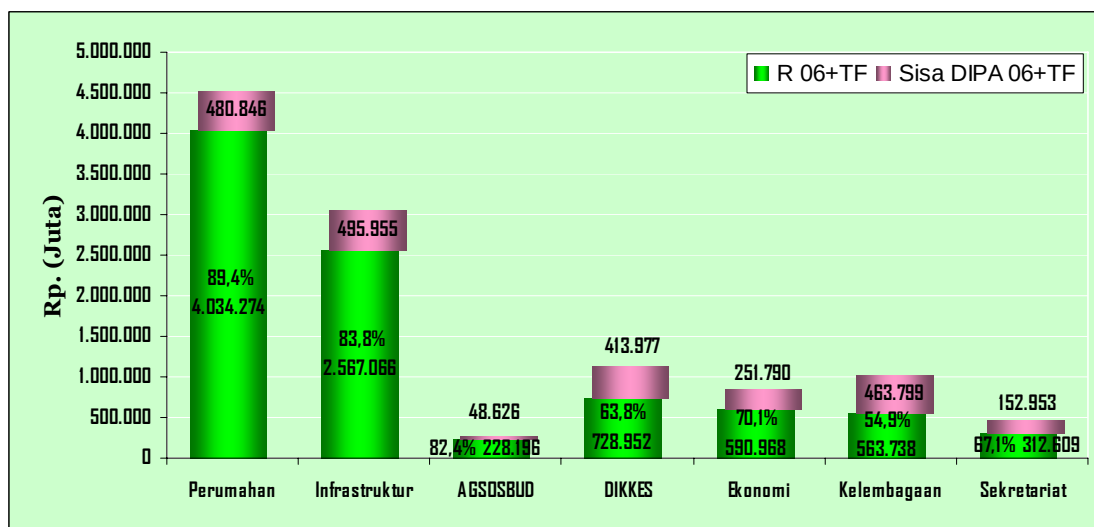
Sumber : BRR NAD-Nias, 2007

Gambar II. 4
Penyerapan Anggaran DIPA 2006 Pada Tahun 2006



Sumber : BRR NAD-Nias, 2007

Gambar II. 5
Penyerapan Anggaran DIPA 2006 dan Trust Fund 2007



Sumber : BRR NAD-Nias, 2007

II.1.3.6.3 Kinerja Penyerapan Anggaran

Penyerapan anggaran Rehabilitasi dan Rekonstruksi sumber dana APBN (On Budget) menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat. Pada tahun 2005 penyerapan anggaran DIPA 2005 hanya mencapai 10,5%. Total penyerapan DIPA 2005 baik pada 2005 maupun pada 2006 mencapai 62,5%. Khusus Luncuran DIPA 2005 pada 2006 penyerapannya mencapai 58,1% anggaran.

Pada tahun 2006, penyerapan DIPA meningkat menjadi 74% atau meningkat 11,5% dari penyerapan DIPA 2005 (termasuk luncuran). Peningkatan penyerapan tertinggi terdapat pada bidang Agama-Sosbud yakni meningkat 37,8% disusul bidang Infrastruktur meningkat 26,2%. Walaupun secara umum kemampuan penyerapan meningkat, namun pada beberapa bidang

mengalami penurunan kemampuan penyerapan. Bidang yang mengalami penurunan kemampuan penyerapan adalah bidang Sekretariat dll terjadi penurunan sebesar 14,6% dan bidang Perumahan mengalami penurunan sebesar 7,3%.

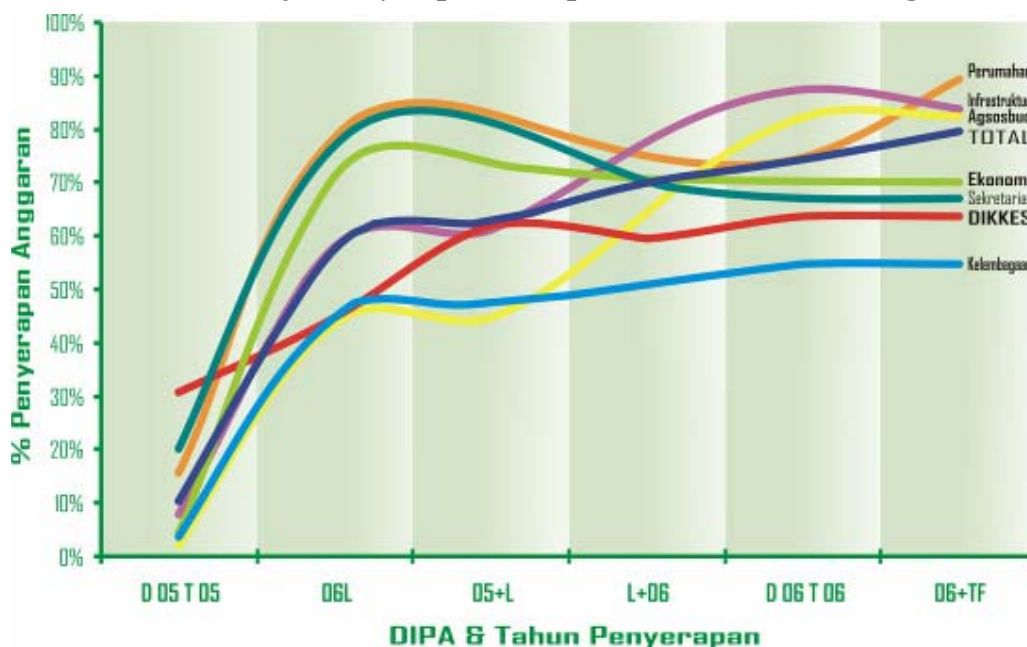
Tabel II. 74
Persentase Penyerapan Anggaran

No	Bidang	D 05 T 05	06L	05+L	L+06	D 06 T 06	06+TF	Δ 06-05
1	Perumahan	15.8%	78.6%	82.0%	75.0%	74.7%	89.4%	-7.3%
2	Infrastruktur	7.7%	58.0%	61.2%	77.9%	87.4%	83.8%	26.2%
3	AGSOSBUD	1.9%	43.9%	44.6%	63.7%	82.4%	82.4%	37.9%
4	DIKKES	30.6%	44.8%	62.0%	59.5%	63.8%	63.8%	1.8%
5	Ekonomi	4.5%	71.6%	72.9%	70.7%	70.1%	70.1%	-2.7%
6	Kelembagaan	3.6%	45.1%	47.1%	50.8%	54.9%	54.9%	7.7%
7	Sekretariat	20.0%	77.1%	81.7%	70.1%	67.1%	67.1%	-14.6%
TOTAL		10.5%	58.1%	62.5%	70.0%	74.0%	79.6%	11.5%

Sumber : BRR NAD-Nias, 2007

Gambar II. 6

Jejak Penyerapan DIPA per Tahun Menurut Bidang



Sumber : BRR NAD-Nias, 2007

II.2. Donor/NGO

Pembiayaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang bersumber dari sumbangan dunia/Internasional, disebut dana Non APBN atau lebih dikenal dengan sebutan 'off budget's karena merupakan anggaran yang bersumber bukan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN. Pembiayaan Non APBN ini menangani semua aspek kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Tabel berikut menjelaskan pembiayaan rehabilitasi dan rekonstruksi Prov.NAD-Nias berdasarkan sektor pemulihan.

Tabel II. 75
Pembiayaan rehabilitasi dan rekonstruksi Prov.NAD-Nias
bersumber dari off-budget berdasarkan sektor pemulihan

No	Bidang Pemulihan	2005		2006		2007	
		Komitmen (USD)	Realisasi (USD)	Komitmen (USD)	Realisasi (USD)	Komitmen (USD)	Realisasi (USD)
1	Perumahan, Pemukiman, Tata Ruang, Pertanahan & Lingkungan Hidup	604,485,111	231,087,189	146,985,458	180,251,212	22,556,973	46,048,948
2	Infrastruktur	573,046,776	205,793,204	199,485,166	77,180,957	5,849,444	9,671,646
3	Sosial Kemasyarakatan	756,021,749	370,457,692	180,103,231	125,028,992	28,921,981	32,053,684
4	Perekonomian	261,000,851	136,164,460	121,195,137	67,888,236	12,670,068	13,968,858
5	Kelembagaan dan Hukum	181,062,385	107,329,082	82,415,109	35,512,339	6,639,074	10,139,874
6	Biaya Administrasi dan Biaya lainnya	28,710,662	7,808,422	7,650,651	13,678,678	1,696,531	1,285,399
7	Tidak dialokasikan	115,208,350	69,677,804	31,303,268	10,531,209	38,229	223,633
8	Semua subsektor-Sektor yang didefinisikan	500,000	500,000				
9	Subsektor yang didefinisikan	2,681,172	449,803	393,711	1,672,658		
TOTAL		2,522,717,056	1,129,267,656	769,531,731	511,744,281	78,372,300	113,392,042

Sumber: Realisasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias 2005-2007

Akan dijelaskan secara detil mengenai rehabilitasi dan rekonstruksi pada tiap bidang pemulihan baik realisasi keuangan maupun realisasi fisik yang masing-masing akan dijabarkan dalam subbidang berikut dibawah ini.

II.2.1. Bidang Pemulihan Perumahan, Permukiman, Tata Ruang, Pertanahan & Lingkungan Hidup

Tabel II. 76
Pembiayaan rehabilitasi dan rekonstruksi Prov.NAD-Nias
Bidang Pemulihan Perumahan, Pemukiman, Tata Ruang,
Pertanahan & Lingkungan Hidup

Subbidang/Program	2005		2006		2007	
	Komitmen (USD)	Realisasi (USD)	Komitmen (USD)	Realisasi (USD)	Komitmen (USD)	Realisasi (USD)
Semua subbidang - Perencanaan Spasial & Perlindungan Lingkungan	17,466,853	6,216,853	2,343,813	1,666,667	697,124	4,216,014
Konservasi Sumber Daya Alam	17,292,788	1,733,955	819,034	889,319	11,483	52,227
Riset dan Pengembangan Perlindungan Lingkungan	6,691,181	2,601,302	1,789,725	1,697,160	204,002	361,373
Perencanaan Spasial	12,490,576	7,607,456	1,925,278	2,371,438	0	199,419
Perencanaan Spasial dan Urusan Agraria	29,234,231	251,029	49,779	133,282	207	52,227
Subbidang yang harus ditegaskan – Perencanaan Spasial &	681,140	672,256	778,697	646,239	0	41,674

Subbidang/Program	2005		2006		2007	
	Komitmen (USD)	Realisasi (USD)	Komitmen (USD)	Realisasi (USD)	Komitmen (USD)	Realisasi (USD)
Perlindungan Lingkungan						
Pembangunan Perumahan	494,201,914	195,076,815	137,166,816	171,452,150	21,640,969	41,041,385
Lainnya yang berkaitan dengan perumahan dan kemasyarakatan	26,412,600	16,927,523	1,654,816	1,308,923	3,188	84,629
Riset dan Pengembangan yang berkaitan dengan Perumahan dan kemasyarakatan	13,828	0	457,500	86,034		
TOTAL	604,485,111	231,087,189	146,985,458	180,251,212	22,556,973	46,048,948

Sumber: Realisasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias 2005-2007

Keterlibatan NGO dan donor pada bidang perumahan sangat dominan, semenjak masa tanggap darurat, telah menyelesaikan rumah sementara bagi para pengungsi sebanyak 13.900 unit rumah, dari komitmen 14.000 unit rumah (97%). Selanjutnya pada masa rehabilitasi dan rekonstruksi sampai dengan pertengahan Juni 2007, telah menyelesaikan pembangunan rumah baru sebanyak 55.467 unit rumah, terdiri dari rumah baru 50.309 unit dan rumah relokasi sebesar 5.158 unit. Selain pembangunan rumah baru juga merehabilitasi rumah sebesar 1.635 unit rumah, terdiri dari rehab rusak berat sebanyak 231 unit dan rehab rusak ringan sebanyak 1.404 unit. Selanjutnya, dari jumlah rumah yang telah diselesaikan pembangunannya, 18.613 unit rumah (57% dari total komitmen). telah ditempati oleh sasaran 'beneficiaries' para pengungsi korban tsunami. Sertifikasi lahan telah terealisasi sebanyak 4.505 persil dari komitmen sejumlah 4869 persil (93%).

Kegiatan Perencanaan dan Pemetaan untuk menunjang kualitas dan pelaksanaan proyek perumahan dan permukiman, antara lain survey dan pemetaan tata batas (desa/Gampong). Telah terealisasi 100% dari komitmen 416 desa. Juga pelayanan masyarakat khususnya untuk pengungsi telah terealisasi sepenuhnya (98%). Program lainnya yang capaian terhadap komitmen nya masih rendah adalah pemetaan, sertifikasi lahan, layout gampong dan pelaporan, capaian nya masih di bawah 50% dari komitmen awal.

Capaian kinerja NGO dan Donor terhadap komitmennya yang masih kurang dari 50% adalah pada kegiatan penyediaan material bangunan permukiman baru, realisasinya baru sebesar 92,760 USD (1%) dari total komitmen sejumlah 11,285.760 USD

Sumbangan NGO dan Donor untuk rehabilitasi dan rekonstruksi bangunan pemerintah adalah rehabilitasi bangunan pemerintah sebanyak 63 unit dari 72 unit komitmen (88%). Untuk bangunan publik telah kemajuan realisasi sebesar 429 unit, atau 63% dari komitmen sejumlah 686 unit. Restorasi taman kota terealisasi sebesar 44% dari komitmen sejumlah 134 unit adapun untuk pelaporan studi terealisasi sebesar 45% dari komitmen sebesar 33 paket. Secara lebih terinci uraian di atas disajikan pada tabel berikut.

Tabel II. 77
Realisasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan dan Permukiman Dilaksanakan oleh Donor dan NGO (Off Budget)

NO	KEGIATAN	SATUAN	KOMITMEN	REALISASI *)	
				VOLUME	(%)
A	PERUMAHAN				
1	Rumah rusak berat yang diperbaiki	unit	474	231	49%
2	Rumah yang dibangun	unit	80,224	50,309	63%
3	Rumah yang ditempati	unit	32,628	18,613	57%
4	Rumah rusak ringan yang diperbaiki	unit	1,590	1,404	88%
5	Pembangunan rumah yang direlokasi	unit	5,158	2,250	44%
6	Pembangunan rumah sementara	unit	14,302	13,900	97%

NO	KEGIATAN	SATUAN	KOMITMEN	REALISASI *)	
				VOLUME	(%)
B	PERMUKIMAN	Satuan	Target	Realisasi	(%)
1	Suplai bahan bangunan (USD)	\$	11,285,760	92,760	1%
2	Fasilitas Distribusi Komunikasi yang direhabilitasi	unit	5	0	0%
3	Fasilitas Distribusi Listrik yang direhabilitasi	unit	255	107	42%
4	Gedung pemerintah yang dibangun/diperbaiki	unit	72	63	88%
5	Surat tanah yang diterbitkan	persil	4,869	4,505	93%
6	Gedung kantor yang dibangun/diperbaiki	unit	33	2	6%
7	Jumlah orang yang dipekerjakan	org	459	407	89%
8	Jumlah orang yang dilayani	org	289,219	208,889	72%
10	Gedung sarana publik yang dibangun/diperbaiki	unit	686	429	63%
11	Restorasi taman publik/umum	unit	134	59	44%
12	Laporan sebagai bahan untuk dipelajari	pkt	33	15	45%
13	Gedung pendukung lainnya yang dibangun/diperbaiki	unit	1	1	100%
14	Kemajuan fisik (%)	%	6,533	4,467	68%
C	PERENCANAAN dan PEMETAAN				
1	Peta yang telah dihasilkan (persentase)	%	20,203	5,001	25%
2	Surat tanah yang diterbitkan	persil	146,565	8,103	6%
3	Jumlah orang yang dilayani	org	102,005	100,201	98%
4	Laporan sebagai bahan untuk dipelajari	pkt	32	9	28%
5	Desa yang dilengkapi batas property	Gampong	416	415	100%
6	Desa yang dilengkapi gambar tampilan	Gampong	111	53	48%

Sumber : Data Ran Database, Juni 2007.

Catatan : *) Capaian realisasi berdasarkan komitmen.

II.2.2. Bidang Pemulihan Infrastruktur

Tabel II. 78
Pembiayaan rehabilitasi dan rekonstruksi Prov.NAD-Nias
Bidang Pemulihan Infrastruktur

Subbidang/Program	2005		2006		2007	
	Komitmen (USD)	Realisasi (USD)	Komitmen (USD)	Realisasi (USD)	Komitmen (USD)	Realisasi (USD)
Semua subbidang - Infrastruktur, Perumahan & Tanah	38,128,289	30,845,398	51,459,950	10,199,009	4,013,167	3,320,149
Bahan Bakar dan Energi	1,303,484	234,706	1,569,621	93,614	23,800	11,821
Pengawasan Irigasi dan Banjir/Pengamanan Pantai	3,303,548	345,555	1,502,124	417,735	44,070	0
Lampu Jalan			74,074	74,074		
Subbidang yang harus ditegaskan – Infrastruktur, Perumahan & Tanah	18,093,271	5,517,829	2,364,500	2,420,182	314,653	992,118
Transportasi	307,350,580	56,403,664	100,019,858	31,978,124	119,070	1,998,635
Pengelolaan Limbah	13,375,995	11,387,936	4,714,869	1,618,859	0	939,987
Pengelolaan Limbah Air	50,803,722	28,500,328	6,950,742	10,549,608	521,663	80,312
Penyediaan Air	140,687,887	72,557,788	30,829,428	19,829,752	813,021	2,328,624
TOTAL	573,046,776	205,793,204	199,485,166	77,180,957	5,849,444	9,671,646

Sumber: Realisasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias 2005-2007

Kegiatan pada bidang infrastruktur meliputi transportasi, energi dan listrik dan sumberdaya air. Pembangunan kembali/rehabilitasi landasan pacu (airstrip) dan jalan di sekitar bandara telah mencapai realisasi 100% dari komitmen (masing-masing sepanjang 6 km dan 150 meter) dan pembangunan kembali pelabuhan telah terealisasi sejumlah 13 unit dari 17 unit yang dikomitmenkan (76%).

Perbaikan jembatan telah mencapai realisasi 91% (dari komitmen 255 meter dan 186 unit). dan perbaikan fasilitas jalan mencapai realisasi sebesar 31% dari komitmen 7.802 meter.

Namun demikian, masih ada realisasi yang baru mencapai 8% dari komitmen, yakni pembangunan/konstruksi jalan kampung yang baru merealisasikan 3.542 meter dari komitmen sepanjang 46.640 meter.

Pada kegiatan energi dan listrik, pengadaan generator telah dilakukan dan kapasitas sampai saat ini adalah sebesar 43.801 Kw dari komitmen awal sebesar 57.721 Kw. Selanjutnya suplai peralatan telah direalisasikan sebesar 88% dari nilai bantuan sejumlah 1.551.249 USD.

Rehabilitasi drainase telah direalisasikan mencapai 100% dengan panjang struktur outlet sepanjang 30.742 meter. Selanjutnya konstruksi drainase yang telah direhabilitasi adalah sepanjang 377.828 (85%) dari komitmen. Rehabilitasi areal irigasi telah terealisasi seluas 74 H (99%) dari komitmen seluas 75 Ha. Selanjutnya, perlindungan pantai dan pengendalian banjir baru terealisasi 22 km² dari komitmen 524 km² (4%).

Secara lebih terperinci, dalam bentuk Tabel disajikan pada Tabel berikut.

Tabel II. 79
Realisasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Prasarana Publik (Perhubungan, Energi dan Listrik serta Sumberdaya Air) Dilaksanakan oleh Donor dan NGO

NO	KEGIATAN	SATUAN	KOMITMEN	REALISASI *)	
				VOLUME	(%)
A	Transportasi				
1	Lapangan terbang darurat yang dibangun/dibangun kembali (Km)	km	6	6	100%
2	Jembatan yang dibangun (m)	m	255	233	91%
3	Jalan sekitar pelabuhan yang dibangun kembali (m)	m	150	150	100%
4	Jalan sekitar perumahan/desa yang dibangun kembali (m)	m	46,640	3,542	8%
5	Jalan untuk fasilitas umum yang dibangun kembali (m)	m	7,802	2,427	31%
6	Jalan yang dibangun kembali (Km)	km	8,207	4,613	56%
7	Transportasi – Jembatan dibangun kembali	unit	186	170	91%
8	Pelabuhan yang diperluas kembali	unit	17	13	76%
B	ENERGI DAN LISTRIK				
1	Tenaga Listrik yang dihasilkan (kW)	kw	57,721	43,801	76%
2	Peralatan & suplai yang disediakan (nilai dalam USD)	\$	1,551,249	1,365,340	88%
C	Sumber Daya Air				
1	Area yang dilengkapi dengan Pengendali Banjir/Pengaman Pantai (Km ²)	km ²	524	22	4%
2	Area yang dilengkapi dengan system irigasi (Ha)	ha	75	74	99%
3	Drainase/Manajemen hujan deras – Panjang konstruksi pengaliran yang disediakan/direhabilitasi (m)	m	446,495	377,828	85%
4	Drainase/ Manajemen hujan deras – Panjang struktur outlet yang disediakan/direhabilitasi (m)	m	30,742	30,742	100%

Sumber : Data Ran Database, Juni 2007.

Catatan : *) Capaian realisasi berdasarkan komitmen.

Untuk mendukung rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan dan permukiman, diperlukan prasarana dasar permukiman yaitu air bersih dan sanitasi lingkungan. Untuk kegiatan air bersih, beberapa kegiatan telah mencapai realisasi di atas 80% seperti penyediaan hidran yang mencapai realisasi 100% (35.051 unit), penyediaan saluran air perpipaan primer dan sekunder sepanjang 6.200 km dari 6.233 km komitmen (99%), restorasi 'water system' mencapai realisasi sebesar 93% dari rencana 2.994 unit. Kegiatan suplai air ke rumah tangga telah merealisasikan kegiatannya pada 88.927 rumah dari target awal 98.583 rumah (90%) dan purifikasi air tanah telah mencapai realisasi sebesar 88% dari rencana 8.970 unit.

Selanjutnya pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilaksanakan oleh Donor dan NGO yang capaiannya terhadap komitmen awal lebih dari 50% dari komitmen adalah kegiatan pembuatan sumur air tanah dalam (*deep well*) dan pemompaan yang masing-

masing mencapai realisasi sebesar 56% dan 51%. Adapun program lainnya seperti rehabilitasi keran umum mencapai 48% dari komitmen 753 unit, dukungan logistik mencapai realisasi sebesar 15%, rehabilitasi fasilitas distribusi air bersih mencapai realisasi sebesar 8% dari komitmen 27.036 unit. Kegiatan rekonstruksi dan rehabilitasi fasilitas produksi air bersih sampai saat ini baru dapat merealisasikan 1% dari komitmen. Kapasitas air bersih yang diproduksi saat ini adalah 240 lt/det dari komitmen 40.466 lt/det. Kegiatan sanitasi lingkungan meliputi pengelolaan limbah dan pengelolaan limbah padat. Dalam kegiatan ini, hampir seluruh realisasi telah mencapai lebih 50% dari komitmen. Kegiatan pengelolaan limbah padat (TPA) dan sludge water treatment (2 unit) telah mencapai realisasi 100%. Secara terperinci, dalam bentuk Tabel disajikan pada Tabel berikut.

Tabel II. 80
Realisasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Prasarana Dasar Permukiman Dilaksanakan oleh Donor dan NGO (Off Budget)

NO	KEGIATAN	SATUAN	KOMITMEN	REALISASI *)	
				VOLUME	(%)
A	AIR BERSIH				
1	Kapasitas fasilitas produksi air yang direkonstruksi/ direhabilitasi (lt/sec)	lt/det	40,466	240	1%
2	Panjang water mains primer dan sekunder yang direhabilitasi/disediakan (km)	km	6,233	6,200	99%
3	Sistem pengairan skala besar yang diperbaiki	unit	2,994	2,776	93%
4	Titikairan skala kecil yang direhabilitasi/dikonstruksi	unit	9,229	8,187	89%
5	Pompa pendorong yang direhabilitasi	unit	766	389	51%
6	Sumur air dalam yang direhabilitasi/dibor	unit	2,422	1,351	56%
7	Sumur air tanah yang dimurnikan	unit	8,970	7,855	88%
8	Penyediaan rumah dilengkapi dengan air	rumah	98,583	88,927	90%
9	Hydran umum yang disediakan	unit	35,051	35,051	100%
10	Kran public yang direhabilitasi/direkonstruksi	unit	753	360	48%
11	Fasilitas distribusi air yang direhabilitasi	unit	27,036	2,151	8%
12	Pendukung logistic (nilai USD)		29,024,872	4,418,572	15%
B	SANITASI LINGKUNGAN				
-	Manajemen Limbah Manusia				
1	Rumah dilengkapi dengan pembuang kotoran&sanitasi	unit	14,372	7,839	55%
2	Fasilitas toilet umum yang dibangun/direhabilitasi	unit	1,387	921	66%
3	Skema sanitasi yang diperbaiki	unit	16,281	13,539	83%
4	Alat pengolahan air kotoran/endapan	unit	2	2	100%
5	Toilet yang dibangun/direhabilitasi	unit	11,191	8,709	78%
-	Manajemen Limbah Padat				
1	Wadah sampah yang disediakan/direhabilitasi		11,134	9,715	87%
2	Truk sampah yang disediakan /direkondisi		5	5	100%
3	Tanah tempat pembuangan sampah yang disediakan/direhabilitasi		105,000	65,049	62%
4	Transfer penampungan yang disediakan /direhabilitasi		626,001	485,452	78%
5	Manajemen limbah padat – Tempat yang disediakan dan dilandscape untuk Tempat Pembuangan Akhir/TPA (m²)		60,004	60,003	100%

Sumber : Data Ran Database, Juni 2007.

Catatan : *) Capaian realisasi berdasarkan komitmen.

II.2.3. Bidang Pemulihan Sosial dan Kemasyarakatan

Tabel II. 81
Pembiayaan rehabilitasi dan rekonstruksi Prov.NAD-Nias
Bidang Pemulihan Sosial Kemasyarakatan

Sector Versi Bappenas	2005		2006		2007	
	Komitmen (USD)	Realisasi (USD)	Komitmen (USD)	Realisasi (USD)	Komitmen (USD)	Realisasi (USD)
Pendidikan	363,960,787	140,269,762	78,789,611	52,327,812	8,210,123	21,348,626
Kesehatan	293,811,186	171,908,558	66,353,662	53,671,790	11,599,114	7,481,103
Agama	3,982,459	2,939,950	4,805,381	4,278,730	2,156,670	1,485,008
Sosial Budaya	94,267,317	55,339,422	30,154,577	14,750,660	6,956,074	1,738,947
TOTAL Sosial Kemasyarakatan	756,021,749	370,457,692	180,103,231	125,028,992	28,921,981	32,053,684

Sumber: Realisasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias 2005-2007

Sumbangan masyarakat pada rehabilitasi dan rekonstruksi sosial dan budaya, meliputi aspek pendidikan, kesehatan, agama, sosial dan budaya serta sumber daya manusia lainnya seperti, peranan wanita, perlindungan anak, pemuda dan olahraga serta lainnya.

II.2.3.1. Pendidikan

Tabel II. 82
Pembiayaan Pendidikan dalam rehabilitasi dan rekonstruksi Prov.NAD-Nias

SubSector/Program	2005		2006		2007	
	Committed (USD)	Disbursed (USD)	Committed (USD)	Disbursed (USD)	Committed (USD)	Disbursed (USD)
Semua SubSektor – Pendidikan	44,525,828	17,364,615	9,616,771	3,710,200	3,358,516	2,129,660
Pegawai Pemerintah – Pendidikan	4,890,005	107,580	243,845	1,566,854	167,445	86,539
Pendidikan Non Formal dan Informal	6,689,775	3,192,079	7,164,553	2,945,874	189,797	390,992
Urusan Pendidikan Lainnya	18,910,232	4,566,021	1,423,477	1,069,453	167,445	14,611
Pendidikan Pra Primer	2,505,412	1,773,401	1,365,885	1,296,829	144,346	131,137
Pendidikan Primer	233,912,112	86,528,962	28,893,066	29,290,960	3,394,629	15,880,045
Pendidikan Riset dan pengembangan	95,556	65,659	0	8,718		
Pendidikan Agama	7,420,276	4,360,029	542,265	2,245,137	714,160	973,776
Pendidikan Sekunder	37,188,663	16,437,010	27,307,729	8,739,467	43,785	1,542,508
Subsektor yang perlu ditegaskan – Pendidikan	568,000	94,788	4,167	4,167		
Pelayanan tambahan untuk pendidikan	3,916,545	2,636,596	544,207	519,079	0	3,708
Pendidikan Tersier	3,338,383	3,143,022	1,683,646	931,074	30,000	195,650
TOTAL	363,960,787	140,269,762	78,789,611	52,327,812	8,210,123	21,348,626

Sumber: Realisasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias 2005-2007

Kegiatan bidang pendidikan yang didanai oleh NGO/donor utamanya berkenaan dengan penyediaan fasilitas pendidikan berupa buku dan furnitur sekolah, dan peralatan lainnya. Kegiatan lainnya adalah rehabilitasi bangunan/fasilitas sekolah dasar sampai dengan universitas, pelatihan, pelayanan dan pemberian beasiswa kepada siswa dan mahasiswa. Hal ini ditujukan untuk memulihkan kembali aspek kualitas pendidikan di Provinsi NAD dan Nias.

Rata-rata pencapaian/realisasi sampai dengan tahun 2007 adalah di atas 50% dari komitmen, antara lain adalah kegiatan penyediaan buku-buku (90%), pelayanan masyarakat pendidikan (84%), perbaikan gedung sekolah (78%) dan penyediaan peralatannya (83%). Namun demikian terdapat juga kegiatan yang realisasinya di bawah 50% terhadap komitmen seperti pembangunan gedung SMA (41%), serta penyediaan fasilitas air bersih dan sanitasi sekolah yang pencapaiannya masing-masing sebesar 14% dan 33%. Secara terperinci, ilustrasi dalam bentuk Tabel disajikan pada Tabel berikut.

Tabel II. 83
Realisasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi bidang Pendidikan Dilaksanakan oleh Donor dan NGO (Off Budget)

NO	KEGIATAN	SATUAN	KOMITMEN	REALISASI *)	
				VOLUME	(%)
1	Penerima manfaat/partisipan pada pelatihan kejuruan	org	25,987	12,668	49%
2	Penyediaan buku-buku	buku	476,622	431,319	90%
3	Penyediaan ruang kelas dengan furniture	kelas	573	462	81%
4	Sekolah dasar yang dibangun/diperbaiki	unit	845	530	63%
5	Sekolah menengah pertaman yang dibangun/diperbaiki	unit	94	41	44%
6	Taman Kanak-kanak yang dibangun/diperbaiki	unit	73	61	84%
7	Jumlah orang yang dilayani	org	944,522	846,496	90%
8	Beasiswa yang disediakan	murid	19,386	13,174	68%
9	Perlengkapan sekolah dengan fasilitas sanitasi	unit	2,932	978	33%
10	Perlengkapan sekolah dengan fasilitas air	sekolah	236	34	14%
11	Sekolah Menengah Umum yang dibangun/diperbaiki	unit	88	36	41%
12	Guru yang diberi pelatihan	guru	23,613	16,260	69%
13	Sekolah smentara yang dibangun	unit	120,326	124	0%
14	Transportasi yang disediakan	unit	63	57	90%
15	Universitas yang dibangun/diperbaiki	unit	9	7	78%
16	Perlengkapan & Penyediaan Sekolah (Nilai USD)	\$	10,867,896	9,016,297	83%
17	Jumlah laporan untuk tujuan studi dan survey	Pkt	1,065	707	66%

Sumber : Data Ran Database, Juni 2007.

Catatan : *) Capaian realisasi berdasarkan komitmen.

II.2.3.2. Kesehatan

Tabel II. 84
Pembiayaan Kesehatan dalam rehabilitasi dan rekonstruksi Prov.NAD-Nias

SubSector/Program	2005		2006		2007	
	Committed (USD)	Disbursed (USD)	Committed (USD)	Disbursed (USD)	Committed (USD)	Disbursed (USD)
Semua SubSektor – Kesehatan	96,288,298	47,278,628	16,959,361	17,144,066	508,394	1,421,606
Keluarga Berencana	3,049,801	2,056,436	500,045	135,720	50,000	50,000
Pelayanan Kesehatan Perorangan	7,916,306	4,624,826	2,808,674	2,861,342	30,278	261,594
Produk Kesehatan, Peralatan dan perlengkapan	22,389,842	18,819,227	1,622,706	2,643,042	2,974,823	397,197
Urusan Kesehatan lainnya	10,018,418	5,887,061	2,526,881	2,655,849	178,047	575,137
Pelayanan Kesehatan Masyarakat	146,999,294	89,299,689	41,179,500	26,521,221	7,753,662	4,671,659
Urusan Riset dan Pengembangan Kesehatan	3,787,793	581,257	733,731	1,687,786		
SubSektor yang harus ditegaskan - Kesehatan	3,361,434	3,361,434	22,764	22,764	103,910	103,910
TOTAL	293,811,186	171,908,558	66,353,662	53,671,790	11,599,114	7,481,103

Sumber: Realisasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias 2005-2007

Sumbangan NGO dan Donor pada rehabilitasi dan rekonstruksi bidang kesehatan meliputi delapan kelompok kegiatan yaitu tahap tanggap darurat, tahap rehabilitasi dan rekonstruksi, pelayanan CDC, pelayanan kesehatan lingkungan, pelayanan promosi kesehatan, pelayanan dan pelatihan bidang kesehatan. Realisasi kegiatan pada saat tanggap darurat berkenaan dengan penyediaan dan distribusi peralatan medis dan obat-obatan, peralatan medis, penyediaan komunikasi dan informasi serta penataan kelembagaan. Selanjutnya pada tahap rekonstruksi dan rehabilitasi, kegiatan berupa pembangunan/rehabilitasi klinik, puskesmas, puskesmas pembantu, laboratorium, rumah sakit, polindes dan posyandu kegiatan lainnya adalah pelatihan bidang kesehatan dan penataan kelembagaan kesehatan. Pelayanan CDC

meliputi penanganan terhadap wabah penyakit seperti diare, malaria, TBC maupun program lainnya.

Selanjutnya dalam kegiatan pelayanan kesehatan lingkungan dan promosi pelayanan kesehatan, kegiatan realisasi berupa program pengelolaan limbah/sampah serta kampanye dan sosialisasi bidang kesehatan. Kegiatan lainnya berupa pelatihan dan pelayanan dibidang kesehatan seperti kesehatan anak dan orang tua, reproduksi, kesehatan mental, nutrisi dan lain sebagainya. Rata-rata pencapaian sampai dengan tahun 2007 adalah lebih dari 50%. Secara terperinci, ilustrasi dalam bentuk Tabel disajikan pada Tabel berikut.

Tabel II. 85
Realisasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi bidang Kesehatan yang Dilaksanakan oleh Donor dan NGO (Off Budget)

NO	KEGIATAN	SATUAN	KOMITMEN	REALISASI *)	
				VOLUME	(%)
A	Perlengkapan dan Peralatan				
1	Aktivient penilaian (angka)	Keg	68,957	61,297	89%
2	Program Peningkatan Kapasitas & Lain-lain (Jumlah Penerima Manfaat)	Org	168,520	34,715	21%
3	Perlengkapan & Peralatan – Non Kesehatan – TEknologi Informasi & Komunikasi (Nilai USD)	\$	348,586	347,704	100%
4	Perlengkapan & Peralatan- Kesehatan – Yang dapat dikonsumsi	\$	4,157,163	3,094,785	74%
5	Perlengkapan & Peralatan- Kesehatan – Yang tidak dapat dikonsumsi	\$	9,253,158	5,212,822	56%
6	Perlengkapan & Peralatan- Non Kesehatan – Transportasi	\$	14,206,766	3,406,766	24%
7	Perlengkapan & Peralatan- Lain-lain (nilai USD)	\$	1,527,308	465,509	30%
8	Jumlah peralatan kesehatan yang didistribusi	Unit	15,496	15,496	100%
9	Jumlah orang yang dilayani	Org	3,581,622	2,995,449	84%
B	Rehabilitasi & Rekonstruksi				
1	Klinik (Jumlah yang dibangun/diperbaiki)	Unit	89	87	98%
2	Kantor distrik kesehatan (Jumlah yang dibangun/diperbaiki)	Unit	1	1	100%
3	Lembaga pendidikan (Jumlah yang dibangun/diperbaiki)	Unit	7	3	43%
4	Pusat Pelatihan Kesehatan (Jumlah yang dibangun/diperbaiki)	Unit	1	1	100%
5	Laboratorium (Jumlah yang dibangun/diperbaiki)	Unit	1	1	100%
6	Gudang Farmasi (Jumlah yang dibangun/diperbaiki)	Unit	2	0	0%
7	Posyandu (Jumlah yang dibangun/diperbaiki)	Unit	57	56	98%
8	Rumah Sakit (Jumlah yang dibangun/diperbaiki)	Unit	25	12	48%
9	Lain-lain (Jumlah yang dibangun/diperbaiki)	Unit	372	340	91%
10	Polindes (Jumlah yang dibangun/diperbaiki)	Unit	510	135	26%
11	Puskesmas (Jumlah yang dibangun/diperbaiki)	Unit	90	72	80%
12	Pustu (Jumlah yang dibangun/diperbaiki)	Unit	151	88	58%
13	Satellite Health Posts (Jumlah yang disediakan)	Unit	40	40	100%
C	Pelayanan/Jasa CDC				
1	Program Diare (Jumlah Penerima Manfaat)	Org	240,417	130,417	54%
2	Program Pengawasan Penyakit (Jumlah Penerima Manfaat)	Org	37,559	37,549	100%
3	Program EPI (Jumlah Penerima Manfaat)	Org	240,502	74,471	31%
4	Program Malaria (Jumlah Penerima Manfaat)	Org	2,812,627	810,673	29%
5	Program lainnya (Jumlah Penerima Manfaat)	Org	10,410	10,395	100%
6	Program TBC (Jumlah Penerima Manfaat)	Org	4,672	4,672	100%
D	Pelayanan Kesehatan Lingkungan				
1	Program Manajemen Pelayanan Kesehatan Limbah (Jumlah Penerima Manfaat)	org/kk	227,942	25,158	11%
2	Program Lainnya (Jumlah Penerima Manfaat)	Org	37,470	35,159	94%
E	Promosi Pelayanan Kesehatan				
	Program Promosi Kesehatan (Jumlah Penerima Manfaat)	Org	2,484,083	586,548	24%

NO	KEGIATAN	SATUAN	KOMITMEN	REALISASI *)	
				VOLUME	(%)
F	Pelayanan				
1	Program Anak & Remaja (Jumlah Penerima Manfaat)	Org	540,970	535,017	99%
2	Program Reproduksi Kesehatan (Jumlah Penerima Manfaat)	Org	42,639	27,736	65%
3	Program Kesehatan Mental (Jumlah Penerima Manfaat)	Org	254,314	56,709	22%
4	Program Nutrisi (Jumlah Penerima Manfaat)	Org	1,803,999	870,576	48%
5	Program Pencegahan (Jumlah Penerima Manfaat)	Org	201,846	149,857	74%
6	Program Lainnya (Jumlah Penerima Manfaat)	Org	1,516,148	1,515,023	100%
G	Pelatihan				
1	Pelayanan CDC (Jumlah Orang yang dilatih)	Org	33,357	31,359	94%
2	Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Jumlah Orang yang dilatih)	Org	9,121	8,701	95%
3	Promosi Kesehatan (Jumlah Orang yang dilatih)	Org	53,887	38,265	71%
4	Pelayanan MCH (Jumlah Orang yang dilatih)	Org	11,322	10,532	93%
5	Pelayanan Kesehatan Mental (Jumlah Orang yang dilatih)	Org	7,354	7,063	96%
6	Pelayanan Nutrisi (Jumlah Orang yang dilatih)	Org	8,099	6,897	85%

Sumber : Data Ran Database, Juni 2007.

Catatan : *) Capaian realisasi berdasarkan komitmen.

II.2.3.3. Agama

Tabel II. 86
Pembiayaan Agama dalam rehabilitasi dan rekonstruksi Prov.NAD-Nias

SubSector/Program	2005		2006		2007	
	Committed (USD)	Disbursed (USD)	Committed (USD)	Disbursed (USD)	Committed (USD)	Disbursed (USD)
Kemajuan Kehidupan Beragama	1,758,058	806,240	1,622,783	1,321,294	1,470,000	735,713
Semua SubSektor - Agama	677,137	619,812	1,177,087	1,223,769		
Keselarasn dalam kehidupan Beragama			470,137	448,137		
Urusan Pelayanan Keagamaan Lainnya	666,014	632,648	1,003,374	879,086		
Urusan Riset dan pengembangan Keagamaan	481,250	481,250	94,500	56,444	68,750	68,750
SubSektor yang harus ditegaskan - Keagamaan	400,000	400,000	437,500	350,000	617,920	680,545
TOTAL	3,982,459	2,939,950	4,805,381	4,278,730	2,156,670	1,485,008

Sumber: Realisasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias 2005-2007

Tujuan utama dari rehabilitasi dan rekonstruksi bidang agama adalah untuk mengembalikan situasi kehidupan beragama pasca tsunami di provinsi NAD dan Nias. Implikasinya berupa pembangunan/rehabilitasi sarana ibadah, penyediaan fasilitas keagamaan, pelayanan masyarakat serta pelatihan peningkatan kualitas sumberdaya manusia melalui bidang keagamaan.

Realisasi yang telah dicapai pada saat tanggap darurat adalah sebesar 70% untuk KPI dan penggunaan 90% anggaran penyediaan bahan dan peralatan bidang keagamaan senilai 1.479.306 USD (komitmen).

Selanjutnya pembangunan/rehabilitasi sarana ibadah adalah berupa pembangunan/rehabilitasi gereja yang telah terlaksana 2 unit dari 3 unit komitmen, Masjid dengan realisasi 80%, pesantren (56%), dan vihara 1 unit (100%). Realisasi kegiatan lainnya yang mencapai 100% adalah pelayanan masyarakat dan pelatihan guru agama. Terdapat juga kegiatan yang masih kurang direalisasikan antara lain pembangunan/perbaikan meunasah yang baru terlaksana 15 unit dari rencana komitmen 17.947 unit. Secara terperinci, ilustrasi dalam bentuk Tabel disajikan pada Tabel berikut.

Tabel II. 87
Realisasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi bidang Agama yang Dilaksanakan oleh Donor dan NGO (Off Budget)

NO	KEGIATAN	SATUAN	KOMITMEN	REALISASI *)	
				VOLUME	(%)
	KPI untuk ditegaskan		440,000	308,000	70%
	Perlengkapan & peralatan yang disediakan (nilai USD)	\$	1,479,306	1,330,654	90%
1	Gereja yang dibangun/diperbaiki	Unit	3	2	67%
2	Pelajar Dayah yang menerima pelatihan keterampilan hidup	santri	165	11	7%
3	Meunasah (aula ibadah) yang dibangun/diperbaiki	Unit	17,947	15	0%
4	Mesjid yang dibangun/diperbaiki	Unit	75	60	80%
5	Jumlah orang yang dilayani	Org	15,367	15,367	100%
6	Pesantren (sekolah keagamaan) yang dibangun/diperbaiki	Unit	9	5	56%
7	Laporan untuk tujuan studi/survey	Pkt	32,000	7	0%
8	Guru/pemimpin dayah yang dilatih	Org	600	600	100%
9	Kuil yang dibangun kembali/diperbaiki	Unit	1	1	100%
10	Kemajuan Fisik (%)		1,400	1,210	86%

Sumber : Data Ran Database, Juni 2007.

Catatan : *) Capaian realisasi berdasarkan komitmen.

II.2.3.4. Sosial dan Budaya

Tabel II. 88
Pembiayaan Sosial Budaya dalam rehabilitasi dan rekonstruksi Prov.NAD-Nias

SubSector/Program	2005		2006		2007	
	Committed (USD)	Disbursed (USD)	Committed (USD)	Disbursed (USD)	Committed (USD)	Disbursed (USD)
Semua SubSektor - Sosial	16,983,769	8,501,188	1,951,186	3,018,559	142,200	0
Pemberdayaan Perempuan	9,040,118	3,585,790	3,067,897	4,465,921	294,310	186,488
Bantuan Perumahan	7,371,415	6,881,789	0	159,982	3,000,000	150,000
Pedoman Informasi dan Sosial	3,036,717	1,767,922	3,674,864	1,933,761	1,325,324	40,257
Pelayanan dan Proteksi Penduduk Usia Lanjut	9,176	4,118	477,281	479,457	637,130	338,952
Jasa Perlindungan dan Sosial bagi Anak-anak dan Keluarga	40,471,774	20,489,479	7,488,282	2,983,605	1,252,270	908,649
Proteksi Riset dan Pengembangan Sosial	535,238	116,721	167,594	302,594	102,411	21,779
Pelayanan dan Perlindungan Orang Sakit dan Cacat	166,858	166,858	152,229	4,029		
Bantuan Pengamanan Sosial	2,598,497	2,402,304	9,025	54,634		
SubSektor yang harus ditegaskan - Sosial	10,687,014	9,143,653	13,151,562	893,416		
Pemuda dan olahraga	3,366,741	2,279,600	14,657	454,702	202,429	92,822
TOTAL	94,267,317	55,339,422	30,154,577	14,750,660	6,956,074	1,738,947

Sumber: Realisasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias 2005-2007

Sumbangan Donor dan NGO pada aspek sosial berkenaan dengan pembangunan/rehabilitasi fasilitas sosial, penanganan masalah anak, kaum perempuan, pelatihan peningkatan sumberdaya manusia dan lain sebagainya. Berikut akan diuraikan secara singkat beberapa kegiatan di bidang ini.

Realisasi yang telah dicapai pada saat tanggap darurat adalah sebesar 33% untuk KPI dan penggunaan 81% anggaran penyediaan bahan dan peralatan bidang keagamaan senilai 1.479.306 USD (komitmen). Selanjutnya pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi, hampir seluruh realisasi kegiatan bidang sosial yang didanai oleh donor/NGO pencapaiannya di atas

50% dari komitmen. Hanya 3 kegiatan yang pencapaiannya masih di bawah 50% sampai dengan tahun 2007 yaitu pelatihan masyarakat (18%), laporan studi/survei (33%) dan pencetakan media publikasi (17%). Secara terperinci, ilustrasi dalam bentuk Tabel disajikan pada Tabel berikut.

Tabel II. 89
Realisasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi bidang Sosial dan Budaya yang Dilaksanakan oleh Donor dan NGO (Off Budget)

NO	KEGIATAN	SATUAN	KOMITMEN	REALISASI *)	
				VOLUME	(%)
	KPI untuk ditegaskan		19,968	6,653	33%
	Perlengkapan & peralatan yang disediakan (nilai USD)	\$	3,667,465	2,966,513	81%
1	Pusat sosial yang dibentuk/dibangun	Unit	40	37	93%
2	Organisasi anak-anak atau panti asuhan	Anak	1,778	1,101	62%
3	Program Penerimaan Komunitas Psikososial Wanita dan Anak-anak	Org	386,354	377,464	98%
4	Jumlah anak yang menerima bantuan penuh (makanan, pendidikan, dan program psikososial)	Org	139,363	132,479	95%
5	Jumlah anak yang kembali ke keluarganya	Org	62	62	100%
6	Mendirikan grup diskusi komunitas awal	Kel	510,691	479,103	94%
7	Balai desa yang dibangun	Unit	546	335	61%
8	Pertunjukan kebudayaan yang diadakan	Keg	2,375	2,269	96%
9	Workshop/Pelatihan Kebudayaan	Keg	4,630	4,259	92%
10	Asrama baru/yang dibangun	Unit	91	55	60%
11	Komunitas gabungan berdasar pusat pembangunan wanita	Kel	34	20	59%
12	Museum, perpustakaan, dan fasilitas kebudayaan lainnya yang dibangun/diperbaiki	Unit	116	114	98%
13	Jumlah orang yang dilayani	Org	449,103	443,253	99%
14	Jumlah orang yang dilatih (contoh kepemimpinan masyarakat, pendidikan perdamaian, penelitian sosial, metodologi penelitian sosial)	Org	34,315	6,143	18%
15	Proposal yang diimplementasikan untuk memperingati tsunami	Pkt	12	12	100%
16	Taman bacaan umum yang dibangun	Unit	13	8	62%
17	Fasilitas olahraga yang direhabilitasi	Unit	44	39	89%
18	Pemberdayaan staf untuk proyek	Org	8	8	100%
19	Laporan untuk tujuan studi dan survey	Pkt	113	37	33%
20	Bantuan hukum untuk wanita	Org	546	532	97%
21	Pelatihan Kapasitas Bermata Pencaharian untuk wanita	Org	8,519	5,173	61%
22	Pelatihan yang diterima oleh wanita	Org	2,705	2,642	98%

Sumber : Data Ran Database, Juni 2007.

Catatan : *) Capaian realisasi berdasarkan komitmen.

II.2.4. Bidang Pemulihan Perekonomian

Tabel II. 90
Pembiayaan rehabilitasi dan rekonstruksi Prov.NAD-Nias
Bidang Pemulihan Perekonomian

SubSector/Program	2005		2006		2007	
	Committed (USD)	Disbursed (USD)	Committed (USD)	Disbursed (USD)	Committed (USD)	Disbursed (USD)
Pertanian, Kehutanan, Perikanan, dan Kelautan	80,204,779	38,410,705	42,178,973	27,339,159	3,379,052	3,638,972
Semua SubSektor – Pembangunan Ekonomit	26,922,125	17,631,487	1,731,218	3,036,163	1,469,863	1,083,964
Pengembangan Bisnis	97,251,768	47,330,743	42,096,074	19,789,007	2,436,571	6,444,984

SubSector/Program	2005		2006		2007	
	Committed (USD)	Disbursed (USD)	Committed (USD)	Disbursed (USD)	Committed (USD)	Disbursed (USD)
Pengembangan Kepariwisata dan Kebudayaan	670,256	649,539	398,800	20,172	831,248	43,600
Industri dan Konstruksi	5,117,226	2,176,340	3,339,051	4,541,014	1,347,789	30,134
Ketenagakerjaan	26,339,768	18,855,312	2,016,392	5,841,010	365,326	678,376
Urusan Ekonomi Lainnya	13,784,336	9,417,998	20,492,525	5,464,863	553,773	1,633,998
Urusan Perlindungan Lingkungan Lainnya	1,050,020	23,693	1,351,989	116,230	1,072,132	9,435
Urusan Kepariwisata dan Kebudayaan Lainnya	27,000	0	257,500	16,000		
Pelayanan Publikasi dan Penyiaran			506,198	0		
Urusan Riset dan Pengembangan Ekonomi	156,710	0	4,741	4,510	420,702	1,746
Riset dan Pengembangan Kepariwisata dan Kebudayaan	11,000	0			418,612	0
SubSektor yang harus ditegaskan – Pengembangan Ekonomi	9,465,863	1,668,643	6,821,676	1,720,108	375,000	403,649
TOTAL	261,000,851	136,164,460	121,195,137	67,888,236	12,670,068	13,968,858

Sumber: Realisasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias 2005-2007

Aspek pemulihan (*recovery*) perekonomian masyarakat prop. NAD dan Nias kepulauan, yang langsung menyangkut dengan pencaharian dan sumber pendapatan masyarakat, meliputi sektor primer (pertanian, perikanan, perkebunan, peternakan dan kehutanan), sektor sekunder (industri) dan sektor tersier (perdagangan, koperasi dan UKM) serta aspek ketenagakerjaan. Program dan kegiatan yang mendapatkan perhatian dan bantuan dari masyarakat dunia melalui sumbangan NGO dan Donor, sebagaimana diuraikan di bawah ini.

II.2.4.1. Pertanian

II.2.4.1.1 Pertanian, Perkebunan dan Peternakan

Sektor pertanian mencakup sub sektor pertanian tanaman pangan (lahan kering dan sawah), perkebunan dan peternakan. Rehabilitasi dan rekonstruksi pertanian, perkebunan dan Peternakan mencakup pembangunan kembali areal pertanian (sawah, ladang/kebun dan perkebunan) yang rusak sebagai akibat dari bencana tsunami. Kegiatan bertujuan untuk memulihkan perekonomian masyarakat di Provinsi NAD dan Nias, karena secara statistik sektor pertanian, perkebunan dan peternakan ini merupakan sektor terbesar yang menyumbang perekonomian wilayah NAS dan Nias Kepulauan, terutama bagi masyarakat pedesaan (*rural*) .

Realisasi yang telah dicapai oleh Donor dan NGO adalah sebesar 71% untuk kegiatan rehabilitasi areal pertanian, 92% untuk kegiatan rehabilitasi dan pembangunan kanal baru untuk irigasi, 62% untuk kegiatan bantuan bibit dan pupuk, 99% untuk bantuan peralatan pertanian, 100% untuk kegiatan rehabilitasi *area of cages* dan 14% bagi kegiatan bantuan penyediaan ternak. Secara terperinci, ilustrasi dalam bentuk Tabel disajikan pada Tabel berikut.

Tabel II. 91
Realisasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sektor Pertanian, perkebunan dan Peternakan
yang Dilaksanakan oleh Donor dan NGO (Off Budget)

NO	KEGIATAN	SATUAN	KOMITMEN	REALISASI *)	
				VOLUME	(%)
1	Area tanah pertanian yang direhabilitasi (Hektar)		61,033	43,220	71%
2	Panjang kanal irigasi yang baru/direhabilitasi (meter)		112,534	103,658	92%
3	Jumlah bibit dan penyubur yang disediakan (Kg)		3,882,089	2,410,371	62%
4	Mesin pertanian yang disediakan		9,548	9,467	99%
5	Area kandang yang dibangun kembali/direhabilitasi (Sq meters)		27,344	27,344	100%
6	Peternakan yang disediakan		7,454	1,032	14%

Sumber : Data Ran Database, Juni 2007.

Catatan : *) Capaian realisasi berdasarkan komitmen.

II.2.4.1.2 Kehutanan

Hampir sama dengan Kegiatan Pertanian dan Peternakan, Kegiatan Kehutanan dan perkebunan bertujuan untuk merehabilitasi areal hutan dan kebun masyarakat yang rusak di Provinsi NAD dan Nias. Secara terperinci masing-masing realisasi yang telah dicapai adalah sebesar 12% untuk kegiatan rehabilitasi dan perlindungan areal hutan dan 15% untuk kegiatan restorasi areal hutan mangrove. Secara terperinci, ilustrasi dalam bentuk Tabel disajikan pada Tabel berikut.

Tabel II. 92
Realisasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sektor Kehutanan yang Dilaksanakan oleh
Donor dan NGO (Off Budget)

NO	KEGIATAN	SATUAN	KOMITMEN	REALISASI *)	
				VOLUME	(%)
1	Area kehutanan yang dilindungi/direhabilitasi (Hektar)		1,383,769	162,263	12%
2	Area hutan bakau yang direstorasi (Hektare)		2,156	325	15%

Sumber : Data Ran Database, Juni 2007.

Catatan : *) Capaian realisasi berdasarkan komitmen.

II.2.4.2. Perikanan

Perikanan dan kelautan merupakan sektor yang mengalami kerugian paling besar akibat bencana alam tsunami. Sehingga rehabilitasi dan rekonstruksi sektor perikanan dan kelautan ini mendapat perhatian yang utama dengan tujuan membangun kembali dan dalam upaya mewujudkan normalisasi kehidupan masyarakat di wilayah pesisir dan pada golongan nelayan baik nelayan tangkap maupun nelayan budidaya.

Beberapa kegiatan perikanan dan kelautan yang menggunakan pendanaan donor/NGO realisasinya mencapai lebih dari 50% untuk semua kegiatan kecuali pembangunan dan rehabilitasi tempat pelelangan ikan (TPI) yang baru mencapai realisasi sebesar 44% pada tahun 2007. Untuk kegiatan lain masing-masing realisasinya adalah sebagai berikut: perbaikan tambak rakyat (86%), bantuan fasilitas perkapalan (99%), perbaikan pesisir (39%) penyediaan FAD (100), bantuan perikanan (86%). Secara terperinci, ilustrasi dalam bentuk Tabel disajikan pada Tabel berikut.

Tabel II. 93
Realisasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi bidang Perikanan dan Kelautan yang
Dilaksanakan oleh Donor dan NGO (Off Budget)

NO	KEGIATAN	SATUAN	KOMITMEN	REALISASI *)	
				VOLUME	(%)
1	Area tambak yang diperbaiki (Hektare)		9,181	7,883	86%
2	Fasilitas bangunan perahu yang dilengkapi (unit)		68	67	99%
3	Area Pantai yang direstorasi (Hektare)		621	241	39%

NO	KEGIATAN	SATUAN	KOMITMEN	REALISASI *)	
				VOLUME	(%)
4	Peralatan perikanan (FAD) yang disediakan (Unit)		120	120	100%
5	Fasilitas pendaratan ikan (TPI) yang direhabilitasi		9	4	44%
6	Pendukung operasional koperasi perikanan Fisheries		29	25	86%
7	Kapal ikan yang diganti/disediakan		4,048	2,748	68%
8	Kumpulan perlengkapan pemrosesan ikan yang disediakan		597	318	53%
9	Kegiatan perikanan lain yang dibangun		1,305	952	73%

Sumber : Data Ran Database, Juni 2007.

Catatan : *) Capaian realisasi berdasarkan komitmen.

II.2.4.3. Pengembangan Usaha

II.2.4.3.1 Perindustrian dan Perdagangan

Donor dan NGO memberikan bantuan dalam rehabilitasi dan rekonstruksi mengkonsentrasikan pada 10 item yang berkenaan dengan penyediaan/pembangunan kembali pabrik, pemberian pinjaman lunak, pengembangan usaha skala kecil dan menengah, pengembangan kemitraan, lembaga keuangan mikro, penyediaan fasilitas industri dan pembangunan pasar tradisional. Rata-rata realisasi sampai dengan tahun 2007 adalah sekitar 50% dari komitmen. Pencapaian yang tinggi (94%) adalah pada penyediaan fasilitas industri, sedangkan realisasi terendah (2%) adalah pada bantuan pinjaman skala menengah (pinjaman lebih dari 50 juta Rupiah). Adapun bantuan berupa support terhadap industri kecil dan bantuan lembaga keuangan mikro realisasinya cukup baik mencapai di atas 60%. Secara terperinci, ilustrasi dalam bentuk Tabel disajikan pada Tabel berikut.

Tabel II. 94
Realisasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sektor Perdagangan dan Industri yang Dilaksanakan oleh Donor dan NGO (Off Budget)

NO	KEGIATAN	SATUAN	KOMITMEN	REALISASI *)	
				VOLUME	(%)
1	Pabrik es yang disediakan/dibangun (unit)		12	6	50%
2	Pinjaman yang disediakan untuk usaha menengah (pinjaman > IDR 50 Million)		3,272	71	2%
3	Pinjaman yang disediakan untuk usaha kecil (pinjaman < 5 million)		17,923	8,873	50%
4	Pinjaman yang disediakan untuk usaha kecil (pinjaman IDR 5-50 million)		4,501	2,801	62%
5	Usaha Kecil yang diperluas		67,827	36,441	54%
6	Kemitraan yang dibangun		216	16	7%
7	Perluasan usaha		39,380	28,212	72%
8	Lembaga keuangan mikro yang dibangun/didukung		224	148	66%
9	Penyediaan fasilitas industri (unit)		112	105	94%
10	Pembangunan pasar tradisional		75	28	37%

Sumber : Data Ran Database, Juni 2007.

Catatan : *) Capaian realisasi berdasarkan komitmen.

II.2.4.3.2 Tenaga Kerja

Kegiatan Bidang Pelatihan dan Tenaga Kerja Donor dan NGO menangani hal-hal yang berkaitan dengan pelatihan pada masyarakat, pegawai pemerintah, workshop, pemantapan organisasi dan pemberian hibah. Realisasi masing-masing kegiatan adalah 59% untuk kegiatan *Participants of vocational training*, 18% untuk kegiatan *extension, training, information and testing programmes established*, 48% untuk kegiatan *Government officials participated in training*, 36% untuk kegiatan *Vocational training organized (batch or time)*, 84% untuk kegiatan *worker for cash work programme*, 46% untuk kegiatan *workshops completed*, 94% untuk kegiatan *community development organization established* dan 56% untuk kegiatan *entrepreneur received grant*.

Kegiatan lain dengan pendanaan berasal dari donor/NGO adalah program implementasi tenaga kerja (dengan realisasi 86%), penyediaan peralatan dan bantuan material (dengan realisasi 30%), pelayanan masyarakat (dengan realisasi 75%), laboratorium/pusat penelitian (dengan realisasi 100%) dan berupa kajian/survei (dengan realisasi 75%). Secara terperinci, ilustrasi dalam bentuk Tabel disajikan pada Tabel berikut.

Tabel II. 95

Realisasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sektor Ketenagakerjaan yang Dilaksanakan oleh Donor dan NGO (Off Budget)

NO	KEGIATAN	SATUAN	KOMITMEN	REALISASI *)	
				VOLUME	(%)
1	Peserta pelatihan kejuruan		50,089	29,478	59%
2	Program pembangunan, perluasan, pelatihan, informasi dan pengujian		11,992	2,192	18%
3	Pegawai negeri pemerintah yang berpartisipasi pada pelatihan		510	247	48%
4	Pelatihan Kejuruan yang diselenggarakan (seangkatan)		3,272	1,189	36%
5	Pekerja untuk program modal kerja		108,326	91,242	84%
6	Lokakarya yang telah selesai		185	86	46%
7	Pendirian organisasi pengembangan masyarakat		253	237	94%
8	Hibah yang diterima wirausaha		9,200	5,138	56%
9	Program penyediaan lapangan kerja yang dilaksanakan (Jumlah penerima manfaat)		41,389	35,559	86%
10	Perlengkapan dan peralatan yang disediakan (nilai USD)		5,385,906,177	1,619,448,038	30%
11	Jumlah orang yang dilayani		133,429	99,911	75%
12	Pusat penelitian/laboratorium yang disediakan		2	2	100%
13	Laporan untuk tujuan studi dan survey		147	110	75%

Sumber : Data Ran Database, Juni 2007.

Catatan : *) Capaian realisasi berdasarkan komitmen.

II.2.5. Bidang Pemulihan Kelembagaan dan Hukum

Tabel II. 96

**Pembiayaan rehabilitasi dan rekonstruksi Prov.NAD-Nias
Bidang Pemulihan Kelembagaan dan Hukum**

SubSector/Program	2005		2006		2007	
	Committed (USD)	Disbursed (USD)	Committed (USD)	Disbursed (USD)	Committed (USD)	Disbursed (USD)
Semua SubSektor – Pengembangan Aparatur	25,492,944	9,865,549	14,298,017	15,508,737	0	7,940
Pengembangan Aparatur	37,359,799	19,767,042	1,884,297		0	8,056,726
Pengembangan dan Penelitian Dasar Ilmu dan Teknologi	260,136	166,318	752,067	110,875	0	2,404
Pengembangan Masyarakat	44,380,908	24,484,978	7,029,456	5,509,122	1,870,132	127,763
Penanganan Bencana	11,461,552	9,728,387	15,446,032	1,155,899	6,100	57,144
Bantuan Luar Negeri	937,289	0	1,984,297	100,000		
Pelayanan Umum	5,080,922	3,700,187	6,784,805	2,947,169	1,500,000	711,219
Yudikasi	4,334,279		50,000	1,639,083		
Urusan Hukum	15,428,884	15,266,884	5,474,437	204,500		

SubSector/Program	2005		2006		2007	
	Committed (USD)	Disbursed (USD)	Committed (USD)	Disbursed (USD)	Committed (USD)	Disbursed (USD)
Urusan Pertahanan Lainnya	300,000	0				
Pelayanan Publik Lainnya oleh Pemerintah	5,517,479	1,744,190	9,481,069	4,733,643	10,733	1,093,845
Urusan Hukum Lainnya, Keinginan dan Keamanan Masyarakat	20,733,891	20,733,891	498,509	303,899	0	44,957
Pelayanan Polisi	20,000	0				
Pelayanan Riset dan Pengembangan Pemerintah Publik	3,009,795	161,328	16,166,816	1,446,062		
Pengembangan Regional	2,146,572	306,231	2,241,797	256,008	3,252,109	37,876
SubSektor untuk ditegaskan – Pengembangan Aparatur	4,597,935	1,404,097	323,510	1,597,342		
TOTAL	181,062,385	107,329,082	82,415,109	35,512,339	6,639,074	10,139,874

Sumber: Realisasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias 2005-2007

Bidang Kelembagaan yang ditangani melalui sumbangan NGO dan Donor terutama yang berkaitan dengan kegiatan penyediaan bahan dan peralatan, pengembangan kapasitas, pelatihan, penyediaan tenaga ahli dan fasilitator, pembangunan dan perbaikan gedung pemerintahan, dan pelayanan pada masyarakat. Realisasi program sampai dengan 2007 bervariasi pada masing-masing kegiatan. Kisaran realisasi adalah antara 4% sampai dengan 100% dari komitmen. Namun demikian rata-rata pencapaian kegiatan adalah di atas 50%. Realisasi sampai dengan 100% adalah pada kegiatan penjabaran KPI, studi pengembangan institusional, penyusunan pedoman. Selanjutnya, penyediaan bahan dan peralatan pelayanan masyarakat memiliki pencapaian masing-masing sebesar 99% dan 94% dari komitmen. Pencapaian kegiatan lainnya yang mencapai lebih dari 50% adalah pelayanan masyarakat dan sosialisasi. Kegiatan lain memiliki pencapaian di bawah jauh di bawah komitmen seperti pengembangan kelembagaan (26%) dan pembangunan/perbaikan gedung pemerintah (4%). Secara terperinci, ilustrasi dalam bentuk Tabel disajikan pada Tabel berikut.

Tabel II. 97
Realisasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bidang Kelembagaan yang Dilaksanakan oleh Donor dan NGO (Off Budget)

NO	KEGIATAN	SATUAN	KOMITMEN	REALISASI *)	
				VOLUME	(%)
1	Perlengkapan & Peralatan yang disediakan (nilai dalam USD)	\$	1,288,098,850	1,274,200,963	99%
2	KPI yang harus didefinisikan		1	1	100%
3	Penyesuaian/studi/penelitian pengembangan institusi	Pkt	28,392	28,381	100%
4	Pengembangan Kapasitas (seminar/workshop/training/mentoring/konsultasi/pelatihan&pendidikan) berperan sebagai perwakilan	Keg.	2,383	458	19%
5	Pengembangan Kapasitas (seminar/workshop/training/mentoring/konsultasi/pelatihan&pendidikan) berperan sebagai pemerintah	Keg.	314	287	91%
6	Kursus / Pelatihan Pegawai negeri yang disesuaikan dan diperkuat	Org	5,955	1,937	33%
7	Pegawai Negeri yang telah menerima pelatihan	Org	8,999	6,077	68%
8	Panduan pemenuhan yang dikembangkan		473,148	472,463	100%
9	Tenaga Ahli yang disediakan	Org	30	6	20%
10	Fasilitator yang direkrut untuk pemberdayaan dan partisipasi masyarakat	Org	4,548	3,843	84%
11	Gedung Pemerintah yang dibangun/diperbaiki	Unit	209	8	4%
12	Pengujian Hukum yang diuji berdasar perjanjian pembentukan kembali hukum	Pkt	5	2	40%

NO	KEGIATAN	SATUAN	KOMITMEN	REALISASI *)	
				VOLUME	(%)
13	Penyusunan jadwal monitoring untuk penekanan tambahan yang relevan dengan standar dan panduan	Keg.	1,463	384	26%
14	Pegawai pemerintah yang menerima pengembangan kapasitas	Org	603	529	88%
15	Organisasi (CSO/CBO/NGO) yang menerima pengembangan kapasitas	Kel/	1,582	270	17%
16	Masyarakat yang dilayani	Org	726,087	683,904	94%
17	Sosialisasi/diseminasi/publikasi yang diterbitkan	Keg.	32	20	63%

Sumber : Data Ran Database, Juni 2007.

Catatan : *) Capaian realisasi berdasarkan komitmen.

II.3. Kementerian Lembaga (K/L)

II.3.1. Bidang Pemulihan Sosial Kemasyarakatan

Bagian berikut ini akan menguraikan bidang pemulihan sosial budaya oleh pembiayaan yang bersumber dari Kementerian/lembaga. Sumber pembiayaan Kementerian/lembaga berasal dari APBN, pinjaman luar negeri dan bantuan donor. Kementerian/lembaga tersebut meliputi Departemen Pendidikan Nasional Departemen Kesehatan, Badan Pengawasan Obat dan Makanan, Departemen Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Biro Pusat Statistik, dan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Secara umum, pada pemulihan sosial budaya lebih diprioritaskan pada aspek fisik, peningkatan skill Sumber Daya Manusia, serta pengembangan sistem, terutama yang terkait dengan aspek pendidikan dan kesehatan. Hal ini sangat penting dan urgen dalam rangka memulihkan kehidupan masyarakat di wilayah bencana baik di NAD maupun di Kepulauan Nias.

Kegiatan Departemen Pendidikan Nasional meliputi pendidikan sekolah dan luar sekolah sejak usia dini, pelatihan, pendirian sekolah dan bantuan perlengkapan sekolah, pemberian beasiswa, pembangunan pusat informasi dan rehabilitasi bangunan sekolah yang rusak. Sumber pembiayaan berasal dari dana APBN sebesar Rp. 70 Milyar.

Departemen kesehatan melakukan kegiatan berupa pemulihan sarana kesehatan, pembangunan fasilitas kesehatan dan bantuan tenaga kesehatan. Sumber pembiayaan berasal dari dana APBN 2005 sebesar Rp. 35.840.293.juta, PHLN 2005 sebesar Rp. 62.418.549 juta, dana Bencana 62 sebesar Rp. 95 juta dan Hibah JICS sebesar Rp. 95 juta

Badan Pengawasan Obat dan Makanan pada tahap rehabilitasi melakukan kegiatan berupa pengiriman instrument dan tenaga, rehabilitasi sarana dan prasarana, serta rekrutmen pegawai baru. Selanjutnya pada tahap rekonstruksi mengadakan renovasi laboratorium, pengadaan alat, revitalisasi kegiatan pengawasan dan rekrutmen pegawai baru. Sumber pembiayaan berasal dari dana APBN 2005 sebesar Rp. 5 milyar dan APBN TA 2006 sebesar Rp. 8 Miliar)

Departemen sosial pada tahap rehabilitasi melakukan penyiapan barak dan penyediaan tenda darurat, program peningkatan skill sumberdaya manusia, antara lain berupa pelatihan siaga bencana, dan program pemberdayaan masyarakat dengan memberikan bantuan kapal pada nelayan di Provinsi NAD. Sedangkan pada Kabupaten Nias program Departemen Sosial adalah peningkatan skill sumberdaya manusia berupa pelatihan siaga bencana dan bantuan rehabilitasi berupa bantuan bahan bangunan rumah. Sumber pembiayaan berasal dari bantuan donor yang langsung kepada masyarakat.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi melakukan kegiatan perlindungan yang berkenaan dengan perlindungan perempuan anak. Sumber pembiayaan berasal dari dana APBN.

Biro Pusat Statistik melaksanakan sensus dengan menggunakan sumber dana yang berasal dari pendanaan UNFPA, CIDA, AusAID, NZAID sebagai mitra donor sebesar Rp.20.422.634.000.

Kementerian Pemuda dan Olahraga melakukan kegiatan pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat serta melakukan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga. Sumber pendanaan berasal dari APBN sebesar Rp.29.486 Miliar.

Secara terperinci, dalam bentuk Tabel pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi Bidang Pemulihan Sosial Budaya oleh Kementerian/Lembaga disajikan dalam Tabel Berikut ini.

Tabel II. 98
Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias oleh Kementerian Lembaga
Bidang Pemulihan Sosial Budaya

NO	KEMENTERIAN LEMBAGA	KEGIATAN
1	Departemen Pendidikan Nasional (Sumber dana dari APBN sebesar Rp. 70 Milyar)	a. Pendidikan Anak Usia Dini b. Pendidikan keterampilan hidup (pendidikan Luar Sekolah) c. Pendirian sekolah tenda darurat d. Pengiriman bantuan logistik dan kebutuhan sekolah yang berupa ▪ Peralatan sekolah ▪ Pakaian dan makanan ▪ Peralatan Olahraga e. Ditjen Pendidikan Luar Sekolah, melaksanakan ▪ Pelatihan di NAD peserta 5.010 orang ▪ Pelatihan di Nias dengan peserta 290 orang ▪ Pelatihan di Kab. Bireuen dengan peserta 300 orang ▪ Pendampingan oleh BPPLSP peserta 50 orang ▪ Pengumpulan dan analisa data di 23 lokasi f. Pemberian beasiswa untuk siswa, guru, mahasiswa, dan Dosen ▪ Beasiswa untuk 25.000 siswa SMP dan SMA ▪ Magang 1.786 siswa SMK Aceh ke Jawa selama 3 bulan ▪ Program beasiswa D3 dan D4 untuk 200 mahasiswa ▪ Pendidikan calon guru kejuruan tingkat D3 di Unsyiah ▪ Pelatihan keterampilan bagi pejuang perdamaian (Eks-GAM) untuk 200 orang ▪ Bantuan beasiswa BKM untuk 162.743 siswa SD/MI,SMP/MTS, dan SMA MA/SMK. ▪ Beasiswa mahasiswa Unsyiah ▪ Beasiswa Universitas Iskandar Muda g. Pembangunan sistem Informasi Manajemen Pembangunan Pendidikan ▪ Pemetaan pendidikan sebelum dan sesudah bencana di NAD dan Nias ▪ Pembentukan Jaringan Team EMIS di setiap Kabupaten/Kota di seluruh NAD dan Nias ▪ Membangun jaringan komunikasi dan informasi Depdiknas dengan Team EMIS Kabupaten/Kota untuk penggalangan data dan informasi pendidikan di NAD dan Nias ▪ Membangun website www.eduforaceh.org bekerjasama dengan Unicef, sebagai media komunikasi dan informasi pendidikan, yang telah dikunjungi oleh lebih dari 1.000 orang per hari dari berbagai penjuru dunia diantaranya US Commercial, Indonesia, Germany, US Educational, Malaysia, Switzerland, United Kingdom, France, Singapore, Sweden, Australia, Netherlands, Mexico, Croatia (Hrvatska), Poland, Seychelles, Thailand, Denmark, Portugal. h. Rehabilitasi bangunan sekolah yang terdiri dari : ▪ SD/MIN 10 unit di NAD ▪ SMP/MTS 7 unit di NAD
2	Departemen Kesehatan (Sumber dana dari : 1. APBN 2005 sebesar Rp. 35.840.293.juta 2. PHLN 2005 sebesar Rp. 62.418.549.juta 3. Dana Bencana 62 sebesar Rp. 95.juta	a. Pemulihan Sarana Kesehatan di NAD 1. Merehabilitasi 147 unit sarana kesehatan yang rusak dari total 1186 yang meliputi: ▪ 8 unit gedung administrasi dari total 25 unit ▪ 7 unit Rumah Sakit dari total 17 unit ▪ 44 unit Puskesmas dari total 274 unit ▪ 78 unit Puskesmas Pembantu dari total 830 unit 6 unit GFK dari

NO	KEMENTERIAN LEMBAGA	KEGIATAN
	4. Hibah JICS sebesar Rp. 95 juta	total 16 unit 4 unit pendidikan tenaga Kesehatan dari total 24 unit 2. Pembangunan baru sarana kesehatan yang meliputi : 1 unit rumah sakit 18 unit Puskesmas 17 unit puskesmas pembantu 3 unit GFK 3. Pemenuhan Tenaga Kesehatan - Penempatan secara definitif per Rumah sakit di Provinsi NAD - Rekrutmen terpadu melalui Poskeslit sebanyak 768 tenaga kesehatan dari total 818 tenaga kesehatan yang hilang akibat Tsunami - Penugasan khusus Dokter Spesialis untuk memperkuat pelayanan rujukan di Nias - Penugasan Dokter, Dokter Gigi dan tenaga kesehatan lain untuk Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Barak Pengungsi - Insentif khusus/kesehatan gabungan
3	Badan Pengawasan obat dan Makanan (BPOM) (Sumber dana dari : 1. APBN TA 2005 sebesar Rp 5 milyar 2. APBN TA 2006 sebesar Rp 8 Miliar)	a. Tahap Rehabilitasi - Pembinaan dan pendampingan terutama dalam proses perencanaan dan penganggaran serta kepegawaian - Pengiriman instrumen/alat lab (Urgent Needed) - Rekrutmen pegawai baru - Pengiriman tenaga untuk mengikuti pelatihan –pelatihan teknis - Pengadaan kendaraan operasional - Rehabilitasi laboratorium - Pengadaan sarana prasarana pendukung kerja b. Tahap Rekonstruksi - Renovasi laboratorium - Pengadaan alat laboratorium secara bertahap - Revitalisasi program/kegiatan pengawasan - Rekrutmen pegawai baru
4	Departemen Sosial (Sumber dana berasal dari Bantuan langsung lembaga donor/NGO kepada masyarakat)	Tahap Rehabilitasi A. Prov NAD 1. Pemukiman Di setiap titik pengungsi disediakan tenda darurat yang sifatnya sementara sambil disiapkan barak penampungan sementara yang lebih kondusif. Pembangunan barak-barak yang dikerjakan bersama-sama dengan pengungsi yang akan ditempati diberi upah sehingga mendorong tumbuhnya ekonomi masyarakat setempat. 2. Peningkatan SDM Peningkatan sumber daya manusia dalam penanggulangan bencana alam melalui pelatihan taruna siaga bencana (Tagana) dengan peserta karang taruna dari 21 Kab/Kota sebanyak 100 orang 3. Pemberdayaan Memberikan bantuan untuk mendorong perekonomian nelayan di 10 Kabupaten pantai Barat dan Timur. Bantuan yang diberikan berupa Kapal/Boat penangkap ikan ukuran besar dan sedang sebanyak 1.320 unit kepada 4.350 KK atau sekitar 20.000 Jiwa) B. Provinsi Sumatera Utara a. Bantuan Rehabilitasi Pemberian bantuan stimulan bahan bangunan rumah sebanyak 5.171 KK dengan indeks sebesar Rp. 5.000.000/KK dan disesuaikan dengan kebutuhan material yang diperlukan b. Peningkatan SDM Peningkatan Sumber Daya Manusia dalam penanggulangan bencana

NO	KEMENTERIAN LEMBAGA	KEGIATAN
		melalui pelatihan taruna Siaga bencana (Tagana) di Sumatera Utara peserta dari beberapa kabupaten termasuk Nias sebanyak 100 orang.
5	Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan (Sumber APBN)	Tahap Rehabilitasi ▪ Perlindungan anak ▪ Peningkatan ketahanan mental ▪ Pembentukan gugus tugas penanggulangan anak korban bencana ▪ Menyusun KIE bagi anak korban bencana ▪ Menyusun strategi jangka panjang ▪ Revitalisasi kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak Tahap Rekonstruksi ▪ Perlindungan anak ▪ Pemberdayaan perempuan ▪ Program dan kegiatan pemulihan dan peningkatan KPA dan perempuan NAD-Nias ▪ Program penguatan kelembagaan PUG dan anak ▪ Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan dari perlindungan perempuan
6	Badan Pusat Statistik (Sumber dana berasal dari UNFPA, CIDA, AusAID, Nzaid sebagai mitra donor) sebesar Rp.20.422.634.000	Sensus penduduk NAD di NAS Sensus penduduk Nias di Nias
7	Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga (sumber dana berasal dari APBN sebesar Rp.29.486 miliar)	▪ Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat ▪ Peningkatan Pembangunan sarana dan prasarana

Sumber : Paparan Kementerian lembaga pada Rapat Monitoring dan Evaluasi Pokja Sosial Budaya, 21 Juni 2006 di Jakarta

II.3.2. Bidang Pemulihan Perekonomian

Pelaksanaan kegiatan bidang pemulihan ekonomi oleh Kementerian/lembaga meliputi tujuh Kementerian/lembaga yakni Departemen Kelautan dan perikanan, Departemen Pertanian, Departemen Koperasi dan UKM, Departemen Perdagangan, Departemen Perindustrian, Perum Bulog dan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Departemen Kelautan dan Perikanan melakukan beberapa program/kegiatan yang berkenaan dengan rehabilitasi sarana dan prasarana perikanan, pengolahan perikanan skala kecil, pemberian bantuan alat tangkap dan budidaya, rehabilitasi tambak dan prasarana perikanan lainnya (seperti PPI/TPI), perbaikan fasilitas pesisir yang rusak serta perencanaan kawasan pemukiman masyarakat pesisir. Harapannya adalah dapat meningkatkan denyut ekonomi dan usaha masyarakat secara luas. Sumber pendanaan berasal dari dana donor/NGO seperti JICs, GTZ dan ADB berupa dana hibah dan loan, APBN dengan total dana sejumlah Rp. 271.608.000.000,-.

Program/kegiatan Departemen Pertanian berupa beberapa kegiatan pemberian bantuan sarana produksi seperti bibit, benih, pupuk dan peralatan serta perlengkapan pertanian. Juga dilakukan survei potensi pengembangan budidaya, pelatihan peningkatan kualitas sumberdaya manusia, bantuan modal ekonomi usaha kecil, rehabilitasi areal pertanian yang rusak, pencetakan sawah baru dan koordinasi. Sumber dana Departemen Pertanian berasal dari APBN, hibah ADB, dan bantuan dana dari donor/NGO seperti ADB, FAO dengan total dana sejumlah Rp. 64.480.000.000,-.

Departemen Koperasi dan UKM memiliki kegiatan berupa bantuan penguatan modal usaha kepada koperasi/UKM, membantu jaringan pemasaran, pengembangan KSP/USP serta pelatihan dan bantuan komputer. Total dana yang dikelola oleh Departemen UKM dan Koperasi adalah sejumlah Rp. 43.923.000.000,-.

Departemen Perdagangan utamanya melakukan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasar tradisional dan pembangunan toko/kios sebagai tempat usaha masyarakat. Kegiatan ini menggunakan pendanaan bersumber dari APBN 2005 sejumlah Rp. 39.220.000.000.000,-

Departemen Perindustrian menitikberatkan kegiatan pada peningkatan kemampuan teknologi industri yang berkenaan dengan penyediaan peralatan operasional dan penyelenggaraan pendidikan kepada masyarakat melalui Balai Latihan Kerja. Anggaran yang dipergunakan sebesar Rp. 2.299.504.000.000,-.

PERUM BULOG melakukan kegiatan berupa penyediaan bantuan bahan pangan/bahan pokok berupa penyaluran beras bagi penduduk yang terkena dampak tsunami dan gempa. Anggaran yang dipergunakan sejumlah Rp. 27.485.000.000,-.

Departemen Tenaga kerja melakukan program rehabilitasi dan rekonstruksi BLK, program perluasan dan pengembangan kesempatan kerja, peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja serta perlindungan dan pengembangan lembaga tenaga kerja. Sumber pendanaan Departemen Tenaga Kerja berasal dari dana dekonsentrasi sebesar Rp. 30.739.900.000.000,-.

Secara terperinci, dalam bentuk Tabel pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi Bidang Pemulihan Ekonomi oleh Kementerian/Lembaga disajikan dalam Tabel Berikut ini.

Tabel II. 99
Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias oleh Kementerian/Lembaga
Bidang Pemulihan Ekonomi

NO	KEMENTERIAN LEMBAGA	PROGRAM	KEGIATAN
1	Departemen Kelautan dan Perikanan (Sumber dana dari donor/NGO seperti JICs, GTZ dan ADB berupa dana hibah dan loan, APBN dengan total dana sejumlah Rp. 271.608.000.000,-)	Rehabilitasi Sarana/Prasarana Pengolahan ikan skala kecil	❖ Rehabilitasi sarana kecil pengolahan ikan ❖ Pengadaan mobile mini ice plant ❖ Pembangunan tempat pengepakan ikan ❖ Peningkatan mutu, nilai tambah hasil perikanan ❖ Pengadaan sarana pengolahan ikan ❖ Pembangunan sarana pengeringan ikan 5 unit
		Rehabilitasi & Bantuan Alat Penangkap ikan	❖ Pengadaan kapal dan peralatan penangkapan ikan ❖ Purse Seine, Gill Net, Beach Seine, Hook Line (trolling) ❖ Pengadaan Lampu
		Rehabilitasi & Bantuan Pengadaan Kapal Ikan	❖ Bantuan kapal penangkap ikan sebanyak 6.000 unit ❖ Pengadaan kapal 3-5GT 138 unit ❖ Pembangunan sarana pengisian bahan bakar nelayan (SPBN)
		Rehabilitasi tambak & Sarana Perikanan Budidaya	❖ Penyuluhan perikanan dan pemberian bantuan agroinput ❖ Penanaman mangrove: pengadaan benih rumput laut, modal usaha tambak, mesin dan peralatan, pembangunan infrastruktur tambak, tempat pengumpul ❖ Sarana budidaya tambak/pompa ❖ Genset untuk pembenihan ❖ Root blower untuk pembenihan ❖ Bak induk fiber ❖ Pembangunan sarana prasarana tambak ❖ Bantuan agroinput tambak udang ❖ Rehabilitasi tambak dan salurannya seluas 9.258 hektar ❖ Rehabilitasi hatchery
		Rehabilitasi Tambak & Bantuan Agroinput	❖ Pengadaan bibit rumput laut ❖ Pembangunan budidaya tambak
		Rehabilitasi dan Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan pantai	❖ Rehabilitasi ekosistem pantai
		Rehabilitasi Prasarana PPP/PPI sebanyak 6 unit	❖ Pembangunan PPI Peudada ❖ Rehabilitasi PPP Lampulo, Lambada, Calang ❖ Rehabilitasi PPI Kuala Peukan Baro, Krueng Raya ❖ Rehabilitasi dermaga perikanan Kab Simeulue dan Nias 2 unit

NO	KEMENTERIAN LEMBAGA	PROGRAM	KEGIATAN
		Perencanaan Tata Ruang Kawasan Permukiman	❖ Menyusun rencana detail tata ruang kawasan pemukiman tingkat desa ❖ Masterplan perikanan tangkap
		Detail Design	❖ Rehabilitasi tambak dan salurannya ❖ Pembangunan kembali budidaya laut
		Rehabilitasi dan pembangunan kembali fasilitas rusak RBADC di Neuheun	❖ Pengadaan generator, fasilitas air bersih, peralatan laboratorium, excavator, fasilitas pendukung
2	Departemen Pertanian (Sumber dana dari hibah ADB, dana APBN, juga bantuan dana dari donor/NGO seperti ADB, FAO dengan total dana sejumlah Rp. 64.480.000.000,-)	Pengadaan Peralatan Karantina Ikan	❖ Penyediaan alat dan bahan laboratorium ❖ Identifikasi dan diagnosis media pembawa HPI
		Alokasi DAK Non-DR, Sektor Perikanan Tangkap	❖ Disesuaikan dengan kebutuhan setempat bagi korban bencana tsunami
		Survey Kelautan dan Kedirgantaraan	❖ Survey potensi pengembangan budidaya rumput laut
		Identifikasi Sumber Daya Ikan Pelagis dan Demersal	❖ Mengkaji lokasi sebaran potensi sumber daya perikanan pelagis di perairan Barat NAD
		Pemulihan usaha ekonomi masyarakat dan partisipasi swasta	❖ Pengadaan sarana produksi pupuk dan benih, pengadaan obat-obatan dan alat pertanian ❖ Pengadaan sarana traktor, mesin, hand tractor bajak, pompa air, mesin pembuat pupuk, pencetakan sawah, dan pengadaan perlengkapan kantor dan kendaraan tanaman pangan dan hortikultura ❖ Rehabilitasi kakao, dan penanaman kelapa, rehabilitasi kelapa sawit, perlindungan tanaman perkebunan. Rehabilitasi bangunan/kantor lingkup perkebunan, pengadaan kendaraan ❖ Bantuan dari FAO melalui proyek OSRO/INS/501/BEL Emergency Provision of Essential Inputs for The Rapid Re-start of Small-scale Food Crops Production and Fisheries Activities with Tsunami Affected Communities " berupa hand traktor sebanyak 695 unit, thresher sebanyak 100 unit, 245 ton pupuk dan pelatihan penggunaan hand tractor bagi 147 petani (Besarnya bantuan US\$ 1,9 juta). ❖ Bantuan Pemerintah Jepang melalui FAO OSRO/INS/503/JPN Japan/Fao Joint Emergency Assistance to Tsunami-Affected Rural Communities in Indonesia ", berupa benih padi dan pupuk untuk 8.700 petani (Besarnya bantuan US\$ 584,6 ribu). ❖ Bantuan Uni Eropa melalui FAO dalam proyek OSRO/INS/509/EC "Emergency Assistance for the restoration of Food Security and Sustainable Livelihood Among Tsunami Affected ", berupa benih padi, tanaman palawija, tanaman tahunan, pupuk, alat dan mesin pertanian untuk 12.500 petani. Besarnya bantuan EUROS 5,5 juta atau US\$ 7,1 juta. ❖ Bantuan Pemerintah Belgia melalui FAO dalam proyek OSRO/INS/513/BEL " Support to Farmers in Tsunami Affected Areas Through The Provision of Agricultural and Livestock Inputs", berupa input pertanian; pengadaan ternak. Besarnya bantuan US\$ 1,2 juta. ❖ Rehabilitasi areal tanaman kelapa 1.845 ha, tanaman pala 726 ha, penyediaan bibit kelapa sawit untuk 2.000 ha, bibit kelapa untuk 1.500 ha. ❖ Bantuan dari lembaga penelitian <i>Asian Vegetable Research and Development Center</i> (AVRDC), berupa bantuan benih sayuran 12.500 paket, 40 ton pupuk dan 12.500 mata cangkul. ❖ Bantuan dari Center for International Potato (CIP), berupa bibit ubi jalar sebanyak 48.000 cutting untuk disemaikan di lokasi percobaan Universitas Syah Kuala dan Kebun percobaan PLPP Saree, NAD

NO	KEMENTERIAN LEMBAGA	PROGRAM	KEGIATAN
			❖ Pencetakan sawah dari dana hibah ADB melalui proyek ETESP 0002-INO ❖ Bantuan Pemerintah Australia/AIPRD melalui kerjasama dengan lembaga penelitian ACIAR telah melakukan pelatihan dalam bidang analisis tanah dan pengelolaan lahan dan tanaman, menginisiasi proyek dalam management kesuburan lahan untuk penanaman kembali di wilayah yang terkena dampak tsunami. ❖ ACIAR melalui proyek nomor LWR/2005/118 akan bekerjasama dengan Lembaga Penelitian Tanah dan Agroklimat dan BPTP propinsi NAD serta Dinas Pertanian dan NGO. ❖ Bantuan modal untuk usaha ekonomi produktif (Bantuan Langsung masyarakat/BLM) yang mendukung peningkatan ketahanan pangan bersumber dari dana APBN Dep. Pertanian. ❖ Pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan dan pembentukan kelompok mandiri (Self-Help Group) sebanyak 410 SHG serta bantuan modal berupa grant untuk usaha ekonomi produktif. Dananya bersumber dari realokasi loan ADB dan IFAD yang terdapat pada proyek P4K atau Rural Income Generating (RIG) 1583-INO/AD dan 458-ID/IFAD (besarnya dana dari ADB US\$ 2,95 juta (ADB) dan IFAD US\$ 2,4 juta) ❖ Bantuan alat pertanian dari dana hibah ADB melalui ETESP 0002-INO ❖ Pengadaan alat pengolahan hasil perkebunan dan peralatan perkebunan bersumber dari dana realokasi loan ADB pada proyek IPM-SECP 1469-INO. ❖ Pembinaan, pendidikan dan pelatihan bagi petugas pertanian dan pemberdayaan petani serta operasionalisasi sekolah tinggi penyuluhan pertanian dari dana APBN Departemen Pertanian. ❖ Pembinaan dan pengembangan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pertanian dari dana hibah ADB melalui proyek ETESP 0002-INO ❖ Pembinaan dan koordinasi pelaksanaan, Monev pembangunan pertanian dari dana hibah ADB melalui proyek ETESP 0002-INO ❖ Pengintegrasian teknis perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dari dana hibah ADB melalui proyek ETESP 0002-INO
3	Departemen UKM dan Koperasi (total dana sejumlah Rp. 43.923.000.000,-)	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sarana Publik	❖ Bantuan Perkuatan Modal Usaha kepada Koperasi/UKM di 21 Kab/Kota ❖ Bantuan Perkuatan Modal Usaha Jaringan Pemasaran pada Koperasi Pasar di 11 Kab/Kota ❖ Bantuan Perkuatan Modal Usaha untuk Sarana Produksi di 14 Kab/Kota ❖ Bantuan Perkuatan Modal Usaha untuk Pengembangan UKM di sentra-sentra di 12 Kab/Kota ❖ Bantuan Perkuatan Modal Usaha untuk Pengembangan KSP/USP-Kop di 21 Kab/Kota ❖ Pengadaan Komputer 25 unit dan Pelatihan KUKM di 22 Kab/Kota
4	Departemen Perdagangan (Sumber dana dari APBN 2005 sejumlah Rp. 39.220.000.000.000)	Masa Tanggap Darurat : Tenda Pasar Darurat Rehabilitasi & Rekonstruksi : Pasar Tradisional Permanen	❖ Pemasangan tenda pasar darurat (termasuk ongkos angkut dan pasang) ❖ Pembangunan kembali pasar tradisional permanen ❖ Pembangunan Pasar Grosir Induk di Lambaro ❖ Kemetrolagian dan Koordinasi Posko di NAD
5	Departemen Perindustrian	Peningkatan kemampuan teknologi industri	❖ Perawatan gedung kantor (4 paket) ❖ Pengadaan alat laboratorium (2 paket)

NO	KEMENTERIAN LEMBAGA	PROGRAM	KEGIATAN
	(anggaran sebesar Rp. 2.299.504.000.000,-)		❖ Pengadaan kantor perlengkapan/sarana (8 pkt) ❖ Pengadaan alat pendukung operasional (4 paket)
		Penyelenggaraan pendidikan masyarakat	❖ Pengadaan alat laboratorium ❖ Pengadaan alat bengkel/keterampilan ❖ Penyelenggaraan laboratorium (2 paket) ❖ Rehabilitasi bangunan gedung ❖ Pemeliharaan peralatan dan mesin ❖ Pengadaan Bahan kimia
6	PERUM BULOG (anggaran sebesar Rp. 27.485.000.000)	Penyediaan Bantuan Pangan Pokok (Beras)	❖ Penyaluran bantuan beras bagi penduduk yang terkena dampak Gempa dan Tsunami di NAD dan Nias sebanyak 7.866,35
7	Departemen Tenaga kerja (sumber dana berasal dari dana dekonsentrasi sebesar Rp. 30.739.900.000.000,-)	Rehabilitasi & Rekonstruksi Prasarana Publik	❖ Pengadaan sebanyak 13 mobile training unit (MTU) ❖ Pengadaan peralatan pelatihan di BLK Lhok Seumawe, Meulaboh, Langsa, Sabang dan Banda Aceh ❖ Rehabilitasi & Rekonstruksi BLK Banda Aceh
		Perluasan & Pengembangan Kesempatan Kerja	❖ Pemberdayaan Tenaga Kerja melalui TKMT 40 org. ❖ Wirausaha Baru 30 org & PK/SPK 50 rg. ❖ Penempatan TK Aksus sebanyak 20 org ❖ Pendidikan dan pelatihan teknis 3 paket ❖ Terapan teknologi tepat guna 170 orang ❖ Pemberdayaan PKSPK 137 orang ❖ Pendayagunaan TKPMP 20 orang ❖ TKS 150 orang ❖ Pengadaan alat pengolah data 1 Paket ❖ Promosi perluasan kesempatan kerja sektor pertanian 20 orang ❖ Promosi potensi sumber daya daerah 20 orang - Nias ❖ Pembinaan WUB 10 orang ❖ TTG/TPK 15 orang ❖ Pemberdayaan AKAD/AKL 200 orang ❖ Pemberdayaan PKSPK 87 orang ❖ Informasi pasar kerja 1 paket ❖ Pengadaan peralatan mesin 1 paket
		Peningkatan kualitas & Produktivitas Tenaga Kerja	❖ Pelatihan keterampilan/institutional dengan berbagai kejuruan 384 orang. ❖ Pelatihan produktivitas 300 orang ❖ Pendidikan dan pelatihan teknis 3 paket ❖ Peningkatan keterampilan tenaga kerja Indonesia 388 orang ❖ Penyebaran Informasi tentang regulasi dibidang pelatihan dan produktivitas 8 paket ❖ Pelaksanaan rapat koordinasi daerah dibidang pelatihan dan produktivitas 1 paket ❖ Pengembangan kelembagaan lembaga latihan swasta secara kesisteman maupun SDM 5 paket (100 orang) ❖ Penyediaan data pelatihan dan produktivitas 1 paket ❖ Pengadaan sarana dan prasarana kediklatan 1 paket
		Perlindungan & Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja	❖ Perlindungan & Penyelesaian Perselisihan Ketenagakerjaan ❖ Komunikasi, Informasi & Edukasi (KIE) PHI meliputi sosialisasi HI 40 org, Penyuluhan pada 12 perusahaan, diklat/seminar 40 org dan 7 kab. ❖ Pengembangan Lembaga HI meliputi SP/SB 20 lbg, Tripartit 50 lbg. ❖ Pemberdayaan LK Tripartit 54 orang ❖ Sosialisasi Upah Minimum Provinsi (UMP) 40 prsh. ❖ UMP 100 buku ❖ Pencegahan dan penyelesaian Kasus PHI/PHK melalui sosialisasi 90 org, deteksi dini 10 prsh & pegawai pengantar 80 org. ❖ Penyelesaian Kasus oleh P4D melalui Bimtek 40 kasus, dan LKS 40 kasus. ❖ Penyelesaian kasus PHI/PHK 200 Kasus

NO	KEMENTERIAN LEMBAGA	PROGRAM	KEGIATAN
			❖ Sos. UU No.2 Tahun 2004 1 Paket ❖ Pengadaan alat pengolah data 1 unit ❖ Pembinaan dan pengaturan Satker 60 orang ❖ Penyelenggaraan Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan ❖ Pengawasan dan pemeriksaan norma kerja 3 prsh dan jamsostek 12 perusahaan. ❖ Sosialisasi pengawasan ketenagakerjaan 20 org ❖ Pengembangan lembaga pengawasan dan perlindungan tenaga kerja pada 100 perusahaan

Sumber : Laporan pelaksanaan program dan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi NAD-Nias

II.4. Pemerintah Daerah

Tabel II. 100
Penjabaran APBD TA. 2005 yang berkaitan rehabilitasi dan rekonstruksi Prov.NAD-Nias
Pasca Gempa Bumi dan Tsunami

No	Bidang	Perangkat Daerah	Program>Nama Kegiatan (2005)	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	Administrasi Umum Pemerintahan	Biro Kepegawaian	Peningkatan Kelembagaan dan Aparatur	15.886.500.000	Pemberian bantuan kepada korban gempa bumi dan gelombang tsunami
	Administrasi Umum Pemerintahan	Biro Kepegawaian	Peningkatan Kelembagaan dan Aparatur	1.844.220.000	Penyusunan Blue Print Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh Pasca Tsunami
	Administrasi Umum Pemerintahan	Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat	Peningkatan Kelembagaan dan Aparatur	173.000.000	Penyusunan naskah buku peristiwa tsunami
2	Bidang Pertanian Dan Peternakan	Dinas Pertanian Tanaman Pangan & Hortikultura	Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Usaha Pertanian	1.963.894.400	Bantuan sarana produksi padi bagi korban bencana alam tsunami
	Bidang Pertanian Dan Peternakan	Dinas Pertanian Tanaman Pangan & Hortikultura	Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Usaha Pertanian	141.108.000	Bantuan sarana produksi hortikultura bagi korban bencana alam tsunami
	Bidang Pertanian Dan Peternakan	Dinas Pertanian Tanaman Pangan & Hortikultura	Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Usaha Pertanian	1.360.000.000	Bantuan alat mesin pertanian bagi korban bencana alam tsunami
	Bidang Pertanian Dan Peternakan	Dinas Peternakan	Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Usaha Pertanian	515.000.000	Bantuan ternak untuk masyarakat korban Bencana Alam (Gempa Bumi dan Tsunami)
3	Bidang Perikanan dan Kelautan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Pengembangan Sumberdaya pesisir, kelautan dan perikanan	2.000.000.000	Optimalisasi tambak rakyat pasca tsunami
4	Bidang Kehutanan dan Perkebunan	Dinas Perkebunan	Peningkatan Kelembagaan dan Aparatur	50.000.000	Pengadaan sarana perkantoran akibat tsunami
5	Bidang Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pendidikan	Koordinasi dan Sinkronisasi pembangunan pendidikan-subdin bina program	2.500.000.000	Bantuan untuk kegiatan pasca gempa dan tsunami, organisasi kependidikan dan yayasan
	Bidang Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pendidikan	Pembangunan pendidikan Subdin Tendik	3.000.000.000	Bantuan santunan untuk tenaga kependidikan korban

No	Bidang	Perangkat Daerah	Program/Nama Kegiatan (2005)	Jumlah (Rp)	Keterangan
					gempa bumi dan gelombang tsunami
	Bidang Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pendidikan	Sinkronisasi pembangunan dan pendidikan	136.504.000	Melaksanakan seminar pendidikan rekonstruksi pendidikan provinsi NAD pasca tsunami
6.	Bidang Sosial	Dinas Sosial	Penanggulangan korban bencana	13.156.813.000	Bantuan sosial korban bencana
7.	Bidang Permukiman	Dinas Perkotaan dan Permukiman	Pengembangan Perumahan	202.461.800	Penunjangan kegiatan pengadaan tanah untuk pertapakan rumah korban gempa dan gelombang tsunami
	Bidang Permukiman	Dinas Perkotaan dan Permukiman	Pengembangan Perumahan	29.000.000.000	Pengadaan tanah untuk pertapakan rumah korban gempa dan gelombang tsunami
8.	Bidang Pekerjaan Umum	Dinas Prasarana Wilayah	Pengulangan bencana alam	688.356.600	Penanggulan darurat kerusakan jalan dan jembatan akibat bencana alam
9.	Bidang Perhubungan	Dinas Perhubungan	Transportasi	175.000.000	Inventarisasi kerusakan sarana dan prasarana perhubungan akibat gempa dan tsunami
	Bidang Perhubungan	Dinas Perhubungan	Peningkatan kelembagaan aparatur	455.754.000	Kegiatan tanggap darurat & rehabilitasi bencana alam tsunami
10.	Bidang Lingkungan Hidup	Badan pengendalian dampak lingkungan daerah/Bapedalda	Pengembangan dan peningkatan akses informasi sumber daya alam	48.840.540	Evaluasi pencemaran dan kerusakan lingkungan (tanah dan lahan) pasca tsunami.
11.	Bidang Pertanahan	Badan Pertanahan Nasional	Pemberdayaan Ekonomi Rakyat	2.880.190.000	Penerbitan sertifikat tanah pasca tsunami

Tabel II. 101
Penjabaran APBD TA. 2006 yang berkaitan rehabilitasi dan rekonstruksi
Prov.NAD-Nias Pasca Gempa Bumi dan Tsunami

No	Bidang	Perangkat Daerah	Program/Nama Kegiatan (2006)	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	Administrasi Umum Pemerintahan	Biro Pembangunan dan Tata Ruang	Koordinasi, Inventarisasi Program Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Sarana/Prasarana Serta Infrastruktur Lainnya	103.635.200	Digunakan untuk belanja barang dan jasa serta belanja perjalanan dinas
		Biro Kepegawaian	Pemberian Bantuan kepada Keluarga korban Dan Gelombang Tsunami (Luncuran 2005)	2.005.800.000	Digunakan untuk belanja barang dan jasa
		Badan Kesbang dan Linmas Prov.NAD	Koordinasi Penanggulangan Bencana	74.673.400	Digunakan untuk Belanja Pegawai/Personalia, Barang dan jasa, Perjalanan dinas dan Pemeliharaan
		Badan Kesbang dan Linmas Prov.NAD	Penyuluhan Bimbingan Kewaspadaan Bencana	304.135.000	Digunakan untuk Belanja Pegawai/Personalia, Barang dan jasa dan Perjalanan dinas

No	Bidang	Perangkat Daerah	Program>Nama Kegiatan (2006)	Jumlah (Rp)	Keterangan
2	Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pendidikan Prov.NAD + UPTD	Rehab Sekolah Terbakar Dan Bencana Alam TK/RA, SD/MI, SLTP/MTS Dan SMU/MA (Dana Pendidikan)	5.125.402.256	Digunakan untuk biaya pemeliharaan bangunan gedung
		Dinas Pendidikan Prov.NAD + UPTD	Rehab Sekolah Terbakar Dan Bencana Alam TK/RA, SD/MI, SLTP/MTS Dan SMU/MA serta Pembuatan Mobilier	1.189.179.000	Digunakan untuk belanja barang dan jasa (Biaya Jasa Pihak Ketiga lainnya)
		Dinas Kebudayaan Prov.NAD + UPTD	Penelitian dan Penulisan Buku-buku Tentang Aceh Dan Tsunami	4.200.000.000	Digunakan untuk Belanja Pegawai/Personalial, Barang dan jasa dan Perjalanan dinas
		Dinas Sosial Prov.NAD + UPTD	Penanggulangan Korban Bencana : Bantuan Sosial Korban Bencana	3.095.340.000	Digunakan untuk Belanja Barang dan jasa, Perjalanan dinas dan Pemeliharaan
3	Pemukiman	Dinas Perkotaan dan Pemukiman Prov.NAD	Pembangunan Rumah Penduduk Sederhana Type 36 Untuk Korban Kerusakan Dan Bencana Alam	30.473.250.000	Digunakan untuk Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal
			Penanggulangan Darurat Kerusakan Jalan Dan Jembatan Akibat Bencana Alam	692.443.000	Digunakan untuk Belanja Barang dan jasa, Perjalanan dinas dan Pemeliharaan
4	Perhubungan	Dinas Perhubungan Prov.NAD	Tanggap Darurat Dan Rehabilitasi Bencana Dan Tsunami NAD (Luncuran 2005)	55.000.000	Digunakan untuk Belanja Barang dan jasa

Keterangan Sumber Pendapatan:

Pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli daerah (Pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, Lain-lain Pendapatan Yang Sah, Dana Perimbangan (Bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, penerimaan dana otonomi khusus) dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah (Dana Kontijensi/dana Darurat)

1. Biro Pembangunan dan Tata Ruang & Biro Kepegawaian tidak diperoleh sumber pendapatan darimana. Badan Kesbang dan Linmas Prov.NAD, sumber pendapatannya dari Pendapatan Asli Daerah (Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yaitu dari sumbangan pihak ketiga).
2. Dinas Kebudayaan Prov.NAD, sumber pendapatannya dari Pendapatan Asli Daerah (Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yaitu dari sumbangan pihak ketiga).
3. Dinas Sosial Prov.NAD, sumber pendapatannya dari Pendapatan Asli Daerah (Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yaitu dari sumbangan pihak ketiga).

II.4.1. Bidang Pemulihan Sosial Budaya

Bidang Pemulihan Sosial Budaya yang bersumber dari pembiayaan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Dinas Syari'ah Islam dan Dinas Kesehatan. Sumber pembiayaan Pemerintah Daerah tersebut berasal dari APBD dan bantuan donor.

Secara umum, pemulihan sosial budaya oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan lebih diprioritaskan pada aspek nonfisik yakni peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dengan bentuk kegiatan seperti peningkatan pendidikan anak sejak usia dini sampai dengan pendidikan menengah, pendidikan nonformal, wajib belajar 9 tahun, peningkatan kualitas guru serta peningkatan sistem manajemen pendidikan Islami.

Dinas Syari'ah Islam menitikberatkan kegiatan pada pertemuan dan musyawarah pemimpin umat beragama, penyuluhan hukum Islam pada masyarakat dan bantuan Balee Seumebeut. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan beragama pada masyarakat.

Pada Dinas Kesehatan, pelaksanaan program dikonsentrasikan pada kegiatan fisik dan non fisik antara lain berupa rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur, penyediaan tenaga medis, peningkatan kesehatan ibu dan anak, perbaikan gizi, sanitasi lingkungan peningkatan sistem informasi bidang kesehatan.

Dalam bentuk Tabel pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi Bidang Pemulihan Sosial Budaya oleh Pemerintah Daerah disajikan dalam Tabel Berikut ini.

Tabel II. 102
Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias oleh Pemerintah Daerah NAD
Bidang Pemulihan Sosial Budaya

NO	PEMERINTAH DAERAH NAD	PELAKSANAAN
1	Dinas Pendidikan	▪ Pendidikan Anak Usia Dini ▪ Pengembangan kurikulum dan Pembelajaran ▪ Penelitian dan Pengembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi ▪ Pengembangan sistem pendidikan Islami ▪ Peningkatan mutu guru dan tenaga kependidikan ▪ Manajemen pelayanan pendidikan ▪ wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun ▪ Pendidikan menengah ▪ Pendidikan Non formal ▪ Pengembangan dayah dan Balee Seumebeut
2	Dinas Syariat Islam	▪ Pertemuan antar pemimpin umat beragama ▪ Bantuan Balee Seumebeut ▪ Penyuluhan Hukum Islam
3	Dinas Kesehatan	▪ Rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur yang rusak akibat korban gempa dan tsunami ▪ Rekrutmen tenaga medis akibat korban tsunami ▪ Pelaksanaan pengendalian penyakit menular ▪ Peningkatan kesehatan ibu dan anak dengan menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi ▪ Perbaikan gizi dilakukan program perbaikan gizi di beberapa Kab./kota bekerja sama dengan Unicef, Who, Save the Children, Plan, Care melalui : a. Program Gizi & Anak Sekolah - o Pemberian Makanan Tambahan di beberapa Kab./Kota dengan bantuan WHO, Unicef, WFP, CARE. - o Survey kesehatan & nutrisi di 21 Kab./Kota (Unicef & CARE). - o Pelatihan Teknis dan Training Of Trainer untuk petugas kesehatan. - o Penatalaksanaan kasus Gizi Buruk di RS & Puskesmas b. Program Keswa masyarakat (WHO, UNFPA) c. Pelatihan CMHN (Community Mental Health Ners) di 11 Kab. /Kota. d. Dukungan Psikososial di beberapa kab./kota e. Penyediaan obat-obatan Psikofarma bantuan UNFPA ▪ Sanitasi dan Lingkungan a. Pelatihan dan Program pengelolaan - o limbah unit pelayanan medis kabupaten, Puskesmas b. Kaporisasi, WC/jamban/tempat wudhuk di beberapa Kab./Kota kerjasama ▪ System Informasi Kesehatan a. Penataan kembali system informasi kesehatan dan pengadaan perangkat/ komputer kerjasama dengan WHO. b. Sosialisasi

Sumber : Paparan diskusi Focus Group Discussion Pokja Sosial Budaya tanggal 27 November 2006, di Banda Aceh

II.4.2. Bidang Pemulihan Perekonomian

Pada bidang pemulihan ekonomi, Dinas berperan sebagai pelaksana yang mewakili pemerintah daerah yang berperan sebagai koordinator dari pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi NAD-Nias pasca tsunami. Dinas terkait dalam bidang pemulihan ekonomi ini adalah Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Perkebunan.

Pelaksanaan program pada Dinas Perikanan dan Kelautan NAD lebih menekankan pada pengadaan peralatan dan perlengkapan perikanan tangkap maupun budidaya. Selanjutnya Dinas Pertanian Tanaman Pangan NAD mengkonsentrasikan kegiatan pada pengadaan sarana produksi pertanian, pemberian bantuan alat pertanian, rehabilitasi/pembangunan sarana dan prasarana sektor pertanian, pendidikan dan pelatihan.

Adapun Dinas Koperasi dan UKM NAD menekankan pada aspek pembinaan sistem, kelembagaan, sumber daya manusia serta pengembangan pada aspek permodalan usaha. Selanjutnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan NAD menekankan pada pembangunan pasar sebagai salah satu cara untuk menghidupkan kembali kehidupan ekonomi masyarakat. Dinas Tenaga Kerja menekankan pada peningkatan produktivitas tenaga kerja dan perluasan dan pengembangan kesempatan kerja. Dinas Perkebunan melaksanakan program pemulihan tanaman (khususnya padi dan bakau) serta pembangunan sarana kantor dan pengadaan kendaraan. Dalam bentuk Tabel, bidang pemulihan ekonomi pemerintah daerah disajikan pada Tabel berikut.

Tabel II. 103
Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias oleh Pemerintah Daerah NAD
Bidang Pemulihan Ekonomi

NO	PEMERINTAH DAERAH	KEGIATAN
1	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NAD	▪ Penyediaan peralatan pengolahan ikan (fish Nugget) ▪ Penyediaan alat penangkap ikan ▪ Rehabilitasi saluran tambak ▪ Pengadaan sarana alat pengolahan ikan ▪ Optimalisasi tambak masyarakat pasca tsunami dan penguatan institusi pembenihan ▪ Pengadaan alat penangkapan ikan skala kecil ▪ Penyediaan bantuan agroinput perikanan ▪ Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Tangkap
2	Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi NAD (di 10 Kabupaten/Kota yaitu Aceh Barat, Aceh Besar, Pidie, Bireuen, Aceh Utara, Aceh Barat Daya, Aceh Timur, Nagan Raya, Aceh Jaya, Simeulue)	▪ Realisasi Penarikan/Penyerapan Dana 2006 Hibah ADB No. 0002 – INO Juli 2006 Rp. 32.205.986.418,- atau sebesar 44,70% (dari pagu anggaran Rp. 72.050.000.000,-) dengan sisa dana Rp. 39.84.013.582,- atau sebesar 55,30% terdiri dari: ▪ Administrasi Umum, Pengadaan Sarana Produksi ▪ Pembangunan Gedung Kantor ▪ Pembangunan Prasarana dan sarana lingkungan gedung ▪ Pengadaan perlengkapan sarana gedung, pengadaan meubeler Pengadaan alat pertanian, pengadaan alat pengolah data, Pengadaan kendaraan ▪ Pencetakan sawah, rehabilitasi dan konservasi lahan ▪ Pembinaan dan pengembangan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pertanian ▪ Rehabilitasi Gedung Negara ▪ Pembinaan dan Koordinasi Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan Pertanian ▪ Pengintegrasian Teknis, Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Kerja ▪ Sedangkan Komitmen dan Realisasi Keuangan CMU Coordination dan Monitoring Unit) Dana Hibah ADB No.0002-INO-Juli 2006 sebesar Rp. 822.297.000,- atau sebesar 100%.
3	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NAD	▪ Pemantapan program pembinaan koperasi dan UKM ▪ Penataan dan Perkuatan kelembagaan koperasi dan UKM ▪ Monitoring dan evaluasi perkoperasian ▪ Pengembangan sarana dan perkuatan usaha bagi koperasi unggulan ▪ Perkuatan modal usaha sarana bagi UKI

NO	PEMERINTAH DAERAH	KEGIATAN
		- Bimbingan teknis KSP/USP Koperasi Pola Syaria'ah - Analisis diklat bagi Koperasi dan UKM - Peningkatan kualitas SDM pengelola koperasi dan UKM
4	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NAD	- Pembuatan Leaflet/Poster - Pendidikan dan Pelatihan Teknis - Penyusunan/Pengumpulan/Pengolahan/Updating/Analisa dan Statistik - Penyusunan Program dan Rencana Teknis - Pameran/Visualisasi/Publikasi dan Promosi - Bantuan Usaha Ekonomi Produktif - Evaluasi dan Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Industri Kecil Menengah - Penyelenggaraan Lomba, Sayembara dan Festival - Pemberian Status Badan Hukum - Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda 2 - Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda 4
5	Dinas Tenaga Kerja Provinsi NAD	- Memberikan bantuan untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja di Banda Aceh, Aceh Besar, Sabang, Pidie, Bireuen, Bener Meriah, Aceh Tengah, Aceh Tamiang, Aceh Utara, Lhokseumawe, Aceh Timur, Langsa, Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Abdya, Aceh Selatan, Aceh Tenggara, Gayo Lues, Simeulue, Aceh Singkil - Pembuatan Kebun Cabe di Sabang - Perbaikan Saluran Air, Pembuatan Saluran Irigasi di Aceh Besar - Perbaikan sarana publik, rehab jalan di Banda Aceh
6	Dinas Perkebunan Provinsi NAD	Pemulihan tanaman padi dan bakau juga ditambah adanya pembangunan sarana kantor, pengadaan kendaraan di NAD

Sumber : Bapel BRR NAD-Nias, 2007

Khusus untuk pembangunan dan rehabilitasi pasar yang dikoordinasikan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NAD pada tahun 2005 dan 2006, Tabel berikut menyajikan penyebaran pembangunan dan rehabilitasi pasar pada 18 Kabupaten/Kota dengan berbagai bantuan sumber pendanaan.

Tabel II. 104
Pembangunan dan rehabilitasi Pasar Tradisional, Induk, Grosir, penunjang di Provinsi NAD Tahun 2005 dan 2006

NO	KAB/KOTA	KECAMATAN	JUMLAH (UNIT)	SUMBER DANA	KETERANGAN
1	Banda Aceh	Kuta Alam Baiturrahman	1 1	CHF CHF	Pasar Ikan Peunayong Rehab Pasar Kp. Baro
2	Aceh Besar	Seulimun Lembah Selawah Lhoong Pulo Aceh Lhoknga Krueng Raya Ingin Jaya Lhoong Kuta Baro (Pekan ateuk) Lhoknga (Lampuuk) Baitussalan (Kajhu)	2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	BRR BRR BRR JICs JICs JICs JICs CHF CHF CHF CHF	Pasar tradisional Pasar tradisional Pasar tradisional Pasar tradisional Pasar tradisional Pasar tradisional Pasar tradisional Pasar Induk Rehab. Pasar sayur Rehab Pasar Ikan dan sayur Pasar tradisional Pasar tradisional
3	Pidie	Panteraja Panteraja Meuredu Jangka Buya Muara tiga Simpang Tiga Glumpang Baro Muara Tiga Padang Tiji Batee Kota Sigli	1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1	BRR CHF CHF CHF CHF APBNP APBNP APBNP APBNP APBNP JICs	Pasar tradisional Rehab Pasar Ikan Rehab Pasar Ikan Rehab Pasar Ikan Rehab Pasar Ikan Pasar tradisional Pasar tradisional Pasar tradisional Pasar tradisional Pasar tradisional Pasar Penunjang
4	Bireun	Kota Juang Peudada	1 1	BRR BRR	Pasar Grosir Pasar tradisional

NO	KAB/KOTA	KECAMATAN	JUMLAH (UNIT)	SUMBER DANA	KETERANGAN
		Simpang Mamplam	1	BRR	Pasar tradisional
		Peulimbang	1	BRR	Pasar tradisional
		Simpang Mamplam	1	APBNP	Pasar tradisional
		Juli	1	APBNP	Pasar tradisional
		Nibong	1	APBNP	Pasar tradisional
5	Aceh Utara	Baktiya	1	BRR	Pasar tradisional
		Meurah Mulia	1	BRR	Pasar tradisional
		Muara Batu	1	BRR	Pasar tradisional
		Cot Girek	1	BRR	Pasar tradisional
		Syamtalira Bayu	1	APBNP	Pasar tradisional
		Seunedon	1	APBNP	Pasar tradisional
		Nibong	1	APBNP	Pasar tradisional
6	Lhokseumawe	Blang Mangat	1	BRR	Pasar tradisional
		Banda Sakti	1	BRR	Pasar tradisional
7	Aceh Timur	Banda Alam	1	BRR	Pasar tradisional
		Darul Aman	1	APBNP	Pasar tradisional
		Idi rayek	1	APBNP	Pasar tradisional
8	Aceh Tamiang	Kota Kuala Simpang	1	BRR	Pasar tradisional
		Seureuwey	2	APBNP	Pasar tradisional
9	Bener Meriah	Pintu Rime Gayo	1	BRR	Pasar tradisional
		Permata	1	APBNP	Pasar tradisional
10	Aceh tengah	Jagong Jeget	1	BRR	Pasar tradisional
		Batu Lintang	1	APBNP	Pasar tradisional
11	Gayo Lues	Pantan Cuaca	1	BRR	Pasar tradisional
		Pantan Cuaca	1	APBNP	Pasar tradisional
12	Aceh Tenggara	Seumadam	1	BRR	Pasar tradisional
		Lawe Alas	1	APBNP	Pasar tradisional
13	Aceh Singkil	Singkil	2	BRR	Pasar tradisional
		Singkil	1	APBNP	Pasar tradisional
14	Aceh Selatan	Meukek	1	BRR	Pasar tradisional
		Kluet Tengah	1	BRR	Pasar tradisional
		Trumon Timur	1	BRR	Pasar tradisional
		Trumon Timur	1	APBNP	Pasar tradisional
		Pasi Raja	1	APBNP	Pasar tradisional
		Labuhan Haji	1	APBNP	Pasar tradisional
15	Abdya	Tangan-tangan	1	BRR	Pasar tradisional
		Manggeng	1	APBNP	Pasar tradisional
		Susoh	1	APBNP	Pasar tradisional
16	Nagan Raya	Darul Makmur	1	BRR	Pasar tradisional
		Kuala	1	APBNP	Pasar tradisional
17	Aceh Barat	Sungai Mas	1	BRR	Pasar tradisional
		Pante cermen	1	BRR	Pasar tradisional
		Woyla Barat	1	BRR	Pasar tradisional
		Woyla	1	APBNP	Pasar tradisional
		Bubon	1	APBNP	Pasar tradisional
		Arongan Lambalek	1	APBNP	Pasar tradisional
18	Aceh Jaya	Sampolnit	1	BRR	Pasar tradisional
		Krueng Sabee	3	BRR	Pasar tradisional
		Krueng Sabee	1	APBNP	Pasar tradisional
		Teunom	1	APBNP	Pasar tradisional
		Panga	1	APBNP	Pasar tradisional
		Sampolnit	1	APBNP	Pasar tradisional
		Krueng Sabee	1	CHF	Pasar tradisional
		Setia Bakti	1	CHF	Pasar tradisional
		Sampoinet	3	CHF	Pasar tradisional
		Teunom	1	CHF	Pasar tradisional
		Jaya	1	CHF	Pasar tradisional
19	Simeulue	Simeulue Timur	1	APBNP	Pasar tradisional
20	Sabang	Sabang	1	APBNP	Pasar tradisional

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NAD, 2006

II.4.3. Bidang Pemulihan Kelembagaan dan Hukum

Pelaksanaan program bidang Pemulihan Kelembagaan dan Hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah didasarkan pada data yang diperoleh dari Badan Kesbang dan Linmas Tahun 2005 yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel II. 105
Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias oleh Pemerintah Daerah NAD
Bidang Pemulihan Kelembagaan dan Hukum

NO	PEMERINTAH DAERAH NAD	KEGIATAN
1	Badan Kesbang dan Linmas Prov NAD	▪ Bimbingan Teknis Pemantapan Bagi Aparatur Kesbang dan Linmas Kab./Kota ▪ Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Pageu Gampong

Sumber : Badan Kesbang dan Linmas, 2005

Dari Tabel di atas diketahui bahwa kegiatan yang berkaitan dengan bidang kelembagaan pada Badan Kesbang dan Linmas yaitu berupa bimbingan teknis pemantapan bagi aparatur Kesbang dan Linmas Kabupaten/Kota serta kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka Pageu Gampong.

Sedangkan pelaksanaan Badan Kesbang dan Linmas yang terkait dengan Ketertiban, Keamanan dan Ketahanan Masyarakat menekankan pada aspek pemberian bantuan serta pelatihan-pelatihan yang diorientasikan pada pemberian penyadaran dan penanaman nilai-nilai kebangsaan dan kenegaraan. Dalam bentuk Tabel disajikan pada Tabel berikut.

Tabel II. 106
Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias oleh Pemerintah Daerah NAD
Bidang Pemulihan Ketertiban, Keamanan dan Ketahanan Masyarakat

NO	PEMERINTAH DAERAH NAD	KEGIATAN
1	Badan Kesbang Linmas Prov NAD	▪ Penyaluran bantuan korban konflik Pola Diyat ▪ Pemantapan wawasan kebangsaan bagi aparatur Kab/Kota ▪ Pembauran bangsa bagi generasi muda dan pramuka ▪ Pelatihan Wanra Wilayah I ▪ Pelatihan Wanra wilayah II ▪ Sosialisasi wawasan kebangsaan ▪ Sosialisasi pemantapan budaya politik bagi pengurus Parpol, Ormas, dan LAM ▪ Penanganan masalah-masalah strategis

Sumber : Bapel BRR NAD-Nias, 2007

II.5. Identifikasi Isu dan Permasalahan Pelaksanaan Rehabilitasi Rekonstruksi NAD-Nias Tahun 2005-2006

Secara umum isu dan permasalahan yang dapat diidentifikasi dalam penanganan dan penanggulangan bencana melalui upaya rehabilitasi dan rekonstruksi, meliputi antara lain:

1. Belum terselesaikannya secara keseluruhan penanganan korban bencana;
2. Belum berjalan dengan baik program pemberdayaan masyarakat korban bencana; masih rendahnya kualitas pelayanan publik;
3. Belum optimalnya fungsi dan pelayanan infrastruktur utama di wilayah pascabencana;
4. Belum terselesaikannya secara keseluruhan masalah penataan ruang dan hukum serta perangkat peraturan lainnya terkait dengan masalah pertanahan.

Disamping itu, menyangkut permasalahan yang dihadapi pada tatanan kelembagaan internal Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi, teridentifikasi meliputi antara lain :

1. Koordinasi yang cukup kompleks antar pemangku kepentingan, baik ditingkat pusat dan daerah dalam implementasi kebijakan maupun kegiatan.
2. BRR merupakan badan yang baru dibentuk sebagai lembaga yang belum pernah ada sebelumnya dalam hal rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Selain itu, BRR yang dibentuk oleh pemerintah hingga satu tahun pertama berlalu belum memiliki Standard Operating Procedures (SOP) penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.
3. Sistem rekrutmen staff pendukung operasional BRR tidak dapat dilakukan sekaligus sementara kebutuhan staff sangat mendesak.
4. Adanya dinamika dan tuntutan yang cukup tinggi dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi mengakibatkan perlunya reorganisasi BRR dari waktu ke waktu sehingga sampai batas tertentu dapat menghambat proses rehabilitasi dan rekonstruksi.

Secara pembedaan, isu dan permasalahan yang teridentifikasi serta diperlukan tindak lanjut dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pada tahun 2007-2009, sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel II. 11
Identifikasi Isu dan Permasalahan

Bidang Pemulihan	Permasalahan	Rekomendasi Wanrah	Rekomendasi Wanwas
Perumahan, permukiman, tata ruang, pertanahan dan lingkungan hidup	• Ada beneficiaries yang belum menempati rumah karena minim fasilitas pendukung dan para korban ada yang tidak mendapat bantuan rumah namun ada yang mendapat rumah lebih dari satu. • Rendahnya kualitas rumah terbangun sehingga banyak rumah yang tidak ditempati oleh penerima bantuan. • Kontraktor mengalami hambatan fisik lokasi, hambatan non fisik lokasi, hambatan calon penerima bantuan (beneficiaries), problem internal kontraktor dan kontraktor. • Kurangnya koordinasi internal dan eksternal dalam Bapel BRR yang terkait dengan peran kelembagaan Donor/NGO. • Kebijakan dan strategi mengenai rumah tahan gempa yang ditetapkan dalam Rencana Induk Bidang Perumahan tidak ditetapkan dalam Rencana Strategis BRR. • Konsep village planning yang direncanakan dan tengah dilaksanakan BRR, merupakan konsep di luar Perencanaan Tata Ruang yang ditetapkan dalam Rencana Induk. • Kebijakan dan Strategi Rencana Induk (membangun Aceh yang baru dengan tata ruang yang bisa mengantisipasi bencana tsunami jika kembali terjadi) tidak terlihat dalam kebijakan. • Peranan BRR belum optimal dalam memfasilitasi penyusunan revisi Qanun RTRW, sehingga revisi Qanun RTRW dalam rangka menampung perubahan struktur tata ruang yang diakibatkan oleh bencana alam gempa bumi dan tsunami di NAD dan Nias belum berjalan lancar. • Adanya pungutan liar yang dilakukan oleh oknum petugas di lapangan dalam pengurusan hak atas tanah. • Keterlambatan dalam penerbitan PERPU yang dapat dijadikan dasar dalam menata kembali hak atas tanah perorangan sehingga penataan hak tanah	• Dewan Pengarah dapat mengusulkan kepada Bapel agar pembangunan perumahan perlu perubahan konsep menjadi paket pembangunan permukiman lengkap, sehingga meminimalkan resiko tidak ditempatinya rumah	• Prioritas utama bidang perumahan tahun 2008 harus difokuskan pada pembangunan prasarana sarana dasar (PSD) permukiman, penambahan pembangunan rumah baru harus benar-benar sesuai dan dapat dipastikan ada beneficiaries yang tepat. Memastikan calon pemilik (khususnya mereka yang masih tinggal di barak) terhadap rumah-rumah yang belum dihuni. • Perlu pelibatan benefecieres dalam pembangunan sarana dan prasarana. • Perlu validasi database penerima manfaat, upaya verifikasi data serta tindak lanjut hasil verifikasi perlu dipublikasikan kepada masyarakat. • Upgrading pada rumah-rumah yang belum layak huni. • Memperkuat koordinasi internal dan eksternal dalam Bapel BRR yang terkait dengan peran kelembagaan Donor/NGO atas dasar kelemahan koordinasi selama ini. • Rumah tahan gempa yang ditetapkan dalam Rencana Induk Bidang Perumahan dan renaksi 2008-2009. • Kalau konsep village planning dikembangkan di luar Perencanaan Tata Ruang yang ditetapkan dalam Rencana Induk tersebut mengakibatkan kerugian negara maka konsep tersebut tidak perlu dilaksanakan. • Mengenai legalisasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dikarenakan mengacu kepada RPJMD yang baru yang tertunda perlu ada keputusan pada tingkat politik antara BRR dan PEMDA NAD • PERPU penyelesaian masalah akibat bencana tetap perlu diterbitkan.

Bidang Pemulihan	Permasalahan	Rekomendasi Wanrah	Rekomendasi Wanwas
	masyarakat terlambat. • Pemerintah daerah mengalami kesulitan dana dalam penyediaan lahan (ditambah peran Bapel yang tidak optimal) yang akan digunakan untuk relokasi permukiman dan perumahan pengungsi korban bencana		
Infrastruktur	• Masalah pembebasan lahan. • Tidak adanya Perpu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang) terkait hukum dan pertanahan. • Proses tender yang berlarut-larut sehingga memperlambat proses rehabilitasi dan rekonstruksi. • Belum adanya proses legalisasi tata ruang yang baru. • Adanya ketidakpastian yang menyangkut pemilikan tanah yang disebabkan oleh spekulasi tanah, pemilikan penguasaan tanah yang tidak sah karena hilangnya data dan informasi tentang tanah, dan konflik horizontal dalam masyarakat. • Terhambatnya proses penerbitan sertifikat oleh RALAS karena sertifikat lama masih aktif sehingga dikuatirkan terjadi tumpang tindih (Double Sertifikat). • Masih lemahnya koordinasi baik dari sisi program maupun pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi antara Dinas/Pemda dan BRR. • Beberapa fasilitas yang telah dibangun (pelabuhan penyeberangan Sinabang dan Singkil) mengalami kerusakan dan perlu penanganan lebih lanjut sebelum dilakukan serah terima. • Beberapa kegiatan yang telah masuk dalam Blue Print Rehabilitasi dan Rekonstruksi sampai saat ini belum ada realisasi. • Pembangunan bandara udara belum disertai dengan pembangunan fasilitas keselamatan penerbangan untuk meningkatkan pelayanan jasa angkutan udara dan Pembangunan Pelabuhan Laut yang terkena dampak tsunami langsung dengan pengadaan fasilitas bongkar muat mekanik untuk menunjang peningkatan pelayanan jasa angkutan laut.		• BRR dan PEMDA perlu memperkuat kapasitas panitia pembebasan tanah di masing-masing daerah yang memerlukan rehab dan rekon dengan memperhatikan aspek sosial setempat. • Perlu tindakan administratif dan hukum apabila ada kerugian negara terhadap pihak-pihak yang sengaja memperlambat proses terder untuk kepentingan pribadi atau kelompok. • Fasilitas yang belum sempurna dibangun dimintakan perbaikannya kepada kontraktor yang telah membangun dan dilaporkan kepada polisi apabila kontraktor tidak melaksanakan kewajibannya. • Seluruh fasilitas sosial dan fasilitas umum yang dibangun oleh BRR mutlak dilengkapi dengan fasilitas penunjang termasuk fasilitas keselamatan.
Perekonomian	• BRR Nias tidak melakukan koordinasi dengan Dinas		• Dalam setiap kegiatan pemulihan ekonomi,

Bidang Pemulihan	Permasalahan	Rekomendasi Wanrah	Rekomendasi Wanwas
	teknis terkait setempat, baik di Kabupaten Nias maupun Kabupaten Nias Selatan. • Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang sudah dibentuk belum berfungsi dengan baik. • Masih terdapat tambak rusak oleh tsunami di Kabupaten Aceh Timur yang belum diperbaiki. Perikanan laut budidaya (seperti keramba) masih kurang dikembangkan. • Ada prasarana ekonomi pertanian dan perikanan yang belum dapat difungsikan karena kualitas konstruksi yang rendah dan belum ada sarana dasar seperti jaringan listrik, jalan akses dan cold storage. • Bantuan bergulir yang telah disampaikan kepada masyarakat kelompok penerima telah berjalan baik, namun program yang sifatnya bergulir ini belum dibuat suatu mekanisme yang baik dan terpadu.		dinas terkait harus dilibatkan. • Bapel harus konsisten membantu LKM dan AMF dengan program peningkatan kapasitas untuk mandiri. • Tambak yang rusak oleh tsunami harus direhabilitasi termasuk yang di Aceh Timur. • Perlu memperbanyak bantuan untuk perikanan budidaya, sehingga mengurangi kegiatan yang bersifat overfishing. • Prasarana ekonomi pertanian harus dilengkapi dengan sarana dasar, sehingga prasarana ini berfungsi dengan baik dan optimal. • Perlu membuat suatu mekanisme yang terpadu antara BLM bergulir dan LKM.
Sosial Kemasyarakatan	• Kurangnya koordinasi antara Pemda, BRR dan NGOs, contoh NGO langsung melakukan pendekatan dengan masyarakat secara masing-masing tanpa koordinasi dengan Pemda atau BRR. • Masih banyak pengungsi yang tinggal di barak-barak pengungsian. • Terdapat 1 program/kegiatan yang belum dilaksanakan oleh Bapel BRR yaitu penelitian dan pengembangan pendidikan. • Belum adanya pelayanan kesehatan yang bermutu karena kurangnya penyediaan tenaga dokter dan perawat serta tenaga administrasi, dan tingginya biaya operasionalnya. • Masih belum tertanganinya masalah kebersihan dan sanitasi lingkungan di beberapa daerah pasca bencana. • Kurangnya peningkatan kualitas pendidikan (hal ini terkait dengan kegiatan dan program non fisik). • Pelaksanaan rehabilitasi mental spiritual dan peningkatan nilai-nilai keagamaan belum tertata secara sistematis. • Adanya perbedaan dari pemberian jadup yang diterima oleh para pengungsi. • Adanya masalah kualitas dan kuantitas prasarana	• Dewan Pengarah mengharapkan Bapel dan pemerintah daerah melakukan identifikasi, inventarisasi, penyusunan dan menyepakati rencana kerja dan penjadwalan penyerahan aset dari donor/LSM	• Perlu koordinasi BRR dan Pemda dalam hal pembuatan aturan atau pedoman yang mengikat terhadap keberadaan NGOs dalam misi kemanusiaan di Nanggroe Aceh Darussalam agar mematuhi ketentuan syari'at dan adat yang berlaku dalam masyarakat. • Pihak yang berwenang perlu menindak tegas lembaga kemanusiaan yang melakukan usaha-usaha provokasi atas pelaksanaan Syari'at Islam di NAD. • Perlu ada peringatan keras terhadap deputi terkait yang lalai dalam menjalankan program-program • Alokasikan dana yang lebih besar terhadap pengembangan soft program dibidang agama, sosial dan budaya, terutama menyangkut penguatan human capital seperti pembinaan akhlak generasi penerus • Mengingat waktu yang tersisa sangat singkat, program penelitian dan pengembangan pendidikan dialihkan saja ke dinas terkait/universitas. • Agar revitalisasi unit pelayanan kesehatan

Bidang Pemulihan	Permasalahan	Rekomendasi Wanrah	Rekomendasi Wanwas
	dan sarana air bersih dan sanitasi antara daerah permukiman sementara dan daerah permukiman yang telah direhabilitasi atau dibangun kembali. • Belum adanya kejelasan satu kesatuan tugas yang dibentuk pemerintah terutama dalam mengatasi hancurnya hampir seluruh tertib administrasi kependudukan dan tanda kependudukan masyarakat akibat bencana.		yang dilakukan BRR menjadi fungsional maka tahun 2008 bidang kesehatan harus melakukan program penguatan kapasitas SDM, penguatan manajemen, penguatan Sistem Rekam Medik dan pembangunan prasarana dasar • Perlu alokasi anggaran yang cukup untuk bidang pendidikan khususnya untuk kegiatan non-fisik peningkatan mutu pendidikan.
Kelembagaan dan Hukum	• Kurangnya koordinasi dalam penyusunan perencanaan antara Bapel RR dengan Pemerintah Daerah. • Perbedaan fokus kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi antara Rencana induk dan Renstra BRR. • Kurangnya koordinasi/konfirmasi/klarifikasi dalam penyusunan perencanaan antara Bapel BRR dengan Satkernya. • Rencana Induk tidak menampung semua daerah yang terkena dampak tsunami, contoh pembangunan pengadilan tinggi di Brastagi dan Sibolga. • Saat awal kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi, sesuai Perpu Nomor 2 Tahun 2005, belum ada Perpres yang mengatur mengenai keterlibatan LSM/lembaga asing lainnya dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi. • Belum ada Perpres atau produk hukum lainnya, yang mengatur tentang masalah: pertanahan, perbankan dan perpajakan. • Belum tuntasnya penelusuran keberadaan anak korban tsunami dan Belum tuntas perlindungan harta peninggalan korban tsunami. • Belum semua prasarana penegakan hukum seperti LP dan Rumah Tahanan siap dibangun. • Rancangan Aksi Nasional HAM Provinsi NAD tidak berjalan maksimal dan Produk hukum daerah di daerah-daerah bencana belum terdokumentasi dengan baik.	• Dewan Pengarah akan melakukan koordinasi dan komunikasi Intra BRR NAD-Nias dengan para pemangku kepentingan dalam percepatan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi NAD-Nias, khusus dalam penegasan mekanisme pengalihan aset kepada Pemda dan penyesuaian Rencana Induk Kepulauan Nias	• Perlu identifikasi terhadap kegagalan koordinasi selama ini untuk kemudian ditetapkan mekanisme koordinasi yang baku dan dapat dilaksanakan. • Tindakan administratif tegas kepada setiap unit di BRR yang tidak mampu menjalankan koordinasi yang diputuskan. • Mengingat waktu dan dana yang semakin terbatas BRR perlu hanya fokus pada kegiatan di daerah yang ditentukan dalam UU Nomor 10 tahun 2005. • Untuk penelusuran anak korban tsunami BRR perlu meningkatkan koordinasi dengan Dinas Sosial, Dinas Kesehatan dan Lembaga Perlindungan Anak Daerah (LPAD) dan dengan pemerintah provinsi lain serta dengan kepolisian. • Perlu dukungan terhadap pengesahan qanun tentang Baital Mal yang antara lain akan mengurus harta peninggalan korban tsunami. • Perlu prioritas pembangunan Lembaga Permasalahatan (LP) yang sudah hancur karena bencana. • Perlu dukungan dana untuk tahun 2008 dan 2009 agar Rancangan Aksi Nasional HAM dapat berjalan maksimal. • Perlu pendokumentasian termasuk dalam bentuk digital seluruh produk hukum daerah.

Sumber : BRR NAD-Nias, 2007



Sasaran Rehabilitasi dan Rekonstruksi Tahun 2008-2009

Inti pembahasan dalam Bab III ini adalah sasaran program dan kegiatan yang direkomendasikan untuk dilaksanakan pada paruh waktu kedua masa kerja BRR. Hal ini dimaksudkan agar setiap pelaksana rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah Provinsi NAD dan Kepulauan Nias mempunyai arahan yang jelas terkait pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Di samping itu, dalam bab ini akan disajikan kembali hasil realisasi kemajuan per bidang pemulihan selama paruh waktu pertama pada tahun 2005-2007 sebagaimana yang sudah dikemukakan dalam Bab II sebelumnya. Struktur penyajian dalam bab ini dikelompokkan ke dalam lima bidang pemulihan, yaitu sebagai berikut :

1. Bidang Pemulihan Perumahan, Permukiman, Tata Ruang, Pertanian, dan Lingkungan Hidup
2. Bidang Pemulihan Infrastruktur
3. Bidang Pemulihan Perekonomian
4. Bidang Pemulihan Sosial Kemasyarakatan
5. Bidang Pemulihan Kelembagaan dan Hukum

Pembahasan di masing-masing bidang dan sub bidang akan menguraikan sasaran 2008-2009 yang merupakan selisih dari Rencana Induk atau Kebutuhan Riil di masing-masing program kegiatan dengan realisasi pelaksanaan yang dihitung hingga akhir tahun 2007. Selain itu, akan diuraikan berbagai permasalahan yang dihadapi serta rencana tindak lanjut yang diperlukan. Pada bagian akhir akan diuraikan kebutuhan pendanaan yang diperlukan pada tahun 2008-2009 guna mengejar target dan menuntaskan program dan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara.

III.1 BIDANG PEMULIHAN PERUMAHAN, PERMUKIMAN, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP

Program dan kegiatan Bidang Pemulihan Perumahan, Permukiman, Tata Ruang, Pertanian, dan Lingkungan Hidup mengacu pada Lampiran 4 Rencana Induk (Buku Rinci Bidang Infrastruktur dan Perumahan), termasuk juga acuan untuk pembangunan Prasarana dasar permukiman (PSD). Bahasan lain yang termasuk dalam Permukiman adalah kegiatan Tata ruang dan Pertanian yang mengacu pada Lampiran 2 Rencana Induk (Buku Rinci Bidang Tata Ruang dan Pertanian).

Sasaran Rencana Induk untuk pelaksanaan kegiatan bidang pemulihan ini perlu disesuaikan dengan kenyataan lapangan dan kebutuhan masyarakat yang dikenal sebagai pihak penerima manfaat (beneficiaries). Hasil verifikasi penerima manfaat ini mengubah sasaran Bidang Pemulihan Perumahan, Permukiman, Tata Ruang, Pertanian, dan Lingkungan Hidup yang telah ditetapkan dalam rencana induk.

Berdasarkan evaluasi paruh waktu bahwa tidak semua yang tertera dalam rencana induk dapat dilaksanakan seluruhnya oleh BRR dan masih adanya rumah yang sudah selesai dibangun tetapi pengungsi di barak tidak mau menempatinnya, maka dalam menyusun rencana aksi BRR NAD-Nias tahun 2007-2008, perlu adanya suatu model percontohan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang dikelola secara bersama oleh Tripartite BRR

bekerjasama dengan Pemerintah Kab/Kota di NAD. Model percontohan ini pada akhir mandat BRR tahun 2009 selanjutnya akan diserahkan kepada Pemda setempat guna dijadikan model percontohan bagi daerah lainnya dan dikelola sesuai dengan UU no 11 tentang Pemerintahan Aceh dan UU no 32 tentang Pemerintahan Daerah.

III.1.1 Perumahan dan Permukiman

Realisasi pembangunan perumahan tidak hanya terdiri dari program pembangunan rumah baru dan perbaikan rumah (rehabilitasi). Dalam perkembangannya, kemudian dikenal program Bantuan Sosial Bertempat Tinggal (BSBT/renters) dan Program 'upgrading'. Upgrading adalah program yang terpaksa dilakukan dikarenakan berbagai kondisi pembangunan rumah yang telah dinyatakan selesai atau sedang dikerjakan, namun bermasalah. Persoalan ini bisa diakibatkan oleh ketidaksesuaian mutu rumah terbangun (dengan berbagai kondisi dan variasi), atau pekerjaan pembangunan rumah yang ditinggalkan kontraktor, atau berbagai persoalan lain yang menyebabkan tertundanya penyelesaian pembangunan rumah, sambil tetap menjalankan proses penyelesaian hukumnya (bila diperlukan).

Bagian utama selain perumahan adalah Permukiman (gampong). Pembangunan permukiman ini mencakup kegiatan pembangunan prasarana dasar permukiman berupa jalan pemukiman, drainase lingkungan, penyediaan air bersih, pengelolaan limbah rumah tangga dan drainase lingkungan, listrik serta adanya dukungan ketersediaan fasilitas umum lainnya.

Tabel III. 1
Sasaran Rencana Aksi Sub Bidang Perumahan dan Permukiman NAD - Nias

	Program/ Kegiatan	Satuan	Rencana Induk 2005-2009	Kebutuhan Riil 2005-2009	Realisasi 2005-2007	Sasaran 2008-2009
1.	Rumah Baru (Bangun Baru)	Unit	90.158	130..837	100.557	30.280
-	Rekonstruksi	Unit	*	118..900	91.540	27.360
-	Relokasi	Unit	*	11..937	9.017	2.920
2.	Perbaikan Rumah (Perbaikan)	Unit	155..838	79..784	11.316	68.468
-	Rehabilitasi	Unit	*	78..084	11.316	66.768
-	<i>Upgrading</i>	Unit	*	1.700	**	1.700
3.	Prasarana Dasar dan Meunasah	Pkt	420	**	368	52
-	Pembangunan baru PSD	Pkt	*	***	***	***
-	Perbaikan PSD	Pkt	*	***	***	***
-	Penyusunan DED kawasan	Pkt	*	***	***	***
-	Penyusunan Rencana Detail Induk Sistem PSD	Pkt	*	***	***	***
-	Pembangunan PSD berbasis kecamatan	Pkt	*	***	***	***
4.	Rumah bagi penyewa (BSBT-Bantuan Sosial Bertempat Tinggal/ Renters)	Unit	*	8.898	87	8.811

Sumber : Bapel BRR, 2007

* : Tidak terinci / tercantum dalam Rencana Induk

** : Data belum tersedia

*** : Tergabung dalam Program Prasarana Dasar dan Meunasah

Berdasarkan Rencana Induk, jumlah kebutuhan rumah untuk seluruh propinsi NAD dan pulau Nias adalah 246.096 unit rumah, terdiri dari rehabilitasi rumah 155. 838 unit dan rumah baru 90.158 unit serta 420 paket prasarana dasar. Namun demikian ternyata kebutuhan Riil di bidang perumahan dan permukiman jauh lebih besar dari sasaran Rencana Induk. Berdasarkan hasil verifikasi, kebutuhan riil rumah baru adalah 130.837 unit dan Perbaikan Rumah adalah 79.784 unit. Adapun secara lebih detil dapat dilihat pada tabel 3.1 diatas.

Hingga bulan Mei 2007 telah terealisasi rekonstruksi rumah baru sejumlah 100.557 unit, rehabilitasi rumah sebesar 11.316 unit dan 368 paket PSD sehingga Sasaran Kegiatan 2008-2009 adalah rekonstruksi rumah baru sebanyak 30.280 unit, rehabilitasi rumah sebanyak 64.468 unit dan pembanguna 52 paket PSD. Dari 8.898 unit kebutuhan riil Bantuan Sosial Bertempat Tinggal, telah terealisasi 87 unit sehingga sasaran kegiatan 2008-2009 sebesar 8.811 unit.

Masalah dan tantangan pada pelaksanaan di bidang perumahan adalah masalah harga, seperti diketahui, pada Rencana Induk, harga satuan rumah ditetapkan Rp.28, 5 juta, namun berdasarkan kenyataan di lapangan, harga rumah menjadi antara sekitar Rp.60 juta-Rp.80 juta/unit, hal tersebut disebabkan oleh banyak faktor, antara lain adalah susahny memperoleh material lokal yang *sustainable*, alur distribusi dan suplai material yang panjang dan dibeberapa tempat susah dijangkau karena memang tidak ada prasarana dan sarana pendukung dilain pihak permintaan di lapangan sangat tinggi. Ditambah lagi dengan banyaknya pelaku rehabilitasi dan rekonstruksi yang melakukan kegiatan pembangunan perumahan dalam waktu yang relatif bersamaan sehingga menyerap semua *resources* berkualitas yang ada, dan menyisakan *resources resources* yang kurang berkualitas, dan bahkan tidak punya pengalaman dalam pembangunan, sehingga *output* yang dihasilkannyaupun tidak sesuai dengan permintaan, dan justru menimbulkan masalah baru di bidang perumahan dan permukiman, yaitu rumah-rumah *sub-standard*, masalah lingkungan, dan bahkan masalah sosial. Kontribusi yang sama juga bersumber dari minimnya tingkat pemahaman masyarakat korban terhadap lingkungan dan partisipasi dalam pembangunan.

Tabel III. 2
Permasalahan dan Rencana Tindak Lanjut Bidang Pemulihan Perumahan,
Permukiman, Tata Ruang, Pertanahan, dan Lingkungan Hidup
sub bidang pemulihan perumahan dan permukiman NAD - Nias

Bidang	Sub Bidang	Isu dan Masalah	Rencana Tindak Lanjut
BIDANG PEMULIHAN PERUMAHAN, PERMUKIMAN, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP	PEMULIHAN PERUMAHAN dan PERMUKIMAN	• Kebutuhan 30.000 unit rumah baru di tahun 2008-2009. • Perbaikan rumah sebanyak 68.468 unit ditahun 2008-2009 • Pembangunan dan perbaikan prasarana dasar dan Meunasah sebanyak 52 paket. • Kebutuhan rumah bagi penyewa sebanyak 8.811 unit • Para beneficiaries tidak menempati rumah yang telah dibangun karena perumahan dan permukiman masih mengalami kekurangan Prasarana Sarana Dasar (listrik, pembuangan air limbah, drainase, jalan	• Pembangunan perumahan didasarkan pada kebutuhan lokal dan aspirasi masyarakat lokal serta memberdayakan masyarakat setempat seoptimal mungkin. • Pemanfaatan material lokal dan memenuhi persyaratan <i>building code</i> setempat; • Berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota, dan • Penetapan tipe rumah inti (<i>core houses</i>) merupakan tipe T-36 dengan luas bangunan 36m². • Pusat permukiman/kota-kota di Pantai Barat tetap dipertahankan untuk menjaga keseimbangan pertumbuhan antar wilayah (Barat-Timur) dan wilayah Tengah serta didukung pusat-pusat pertumbuhan skala lebih

Bidang	Sub Bidang	Isu dan Masalah	Rencana Tindak Lanjut
		akses, dan airbersih) dan kelengkapan fasilitas lainnya seperti tempat ibadah pasar/jauh dari tempat bekerja dan fasilitas pendidikan dan kesehatan. • Para beneficiaries ada sebagian yang tidak mendapat bantuan rumah atau ada yang mendapat rumah double. • Rendahnya kualitas rumah terbangun sehingga banyak rumah yang tidak ditempati oleh penerima bantuan. • Kontraktor mengalami hambatan fisik lokasi, hambatan non fisik lokasi, hambatan calon penerima bantuan (beneficiaries), internal kontraktor dan kontraktor mengalami over cash flow sehingga tidak melakukan penagihan tiap termin melainkan menunggu hingga termin terakhir. • Kurangnya koordinasi internal serta koordinasi eksternal dalam Bapel BRR yang terkait dengan peran kelembagaan donor / NGO. • Kebijakan dan strategi mengenai rumah tahan gempa yang ditetapkan dalam Rencana Induk Bidang Perumahan tidak ditetapkan dalam rencana strategis BRR.	kecil adalah Sigli, Bireuen, Singkil, Tapak Tuan, Blangpidie, Calang di wilayah pesisir; dan Blangkejeren dan Jantho di wilayah pedalaman. • Kota-kota tepi air dikembangkan dengan memperhatikan juga aspek-aspek lokal terutama keterkaitannya dengan rawan gempa dan tsunami dengan kawasan konservasi dan penyangga yang berfungsi lindung. • Jaringan jalan direhabilitasi untuk menjaga keterkaitan antar kota-kota di Pantai Barat, Pantai Timur, atau keterkaitan kedua wilayah, serta mendorong perkembangan dan pemerataan wilayah: Meulaboh-Calang-Lamno-Banda Aceh Jantho-Sigli-Bireuen hingga Lhokseumawe dan Rehabilitasi dan pembangunan jalan baru yang menghubungkan daerah terisolir Aceh Barat/Meulaboh dan Aceh Jaya antara lain: Lhok Kruet-Calang-Teunom-Woyla-Meulaboh dengan memanfaatkan jalan perkebunan Sawit dan peningkatan jalan desa; membuka kembali ruas jalan Jantho-Lamno; Beureunun-Geumpang-Tutut-Meulaboh, jalan Ladia Galaska Simpang Peut-Jeuram-Beutong Ateuh-Takengon, ruas jalan lintas Barat Meulaboh-Tapaktuan-Bakongan; Jantho-Lamno; Calang-Tangse-Beureunun; Teunom-Sarah Raya-Geumpang; Teunom-Sarah Raya-Woyla; dan Calang-Geumpang. • Penyeberangan ke pulau-pulau kecil (P. Weh, Sabang, Simeulue) difungsikan kembali untuk mobilisasi penduduk dan perkembangan ekonomi wilayah. • Fungsionalisasi dan peningkatan Bandar Udara: Bandar Udara Sultan Iskandar Muda, Cut Nyak Dien, Lasikin, Maimun Saleh, Malikussaleh, dan Teuku Cut Ali. Pelabuhan udara di pantai Barat-Selatan dapat didarati Hercules untuk evakuasi dan suplai logistik. • Fungsionalisasi dan peningkatan pelabuhan laut: Sabang, Malahayati, Calang, Meulaboh, Kuala Langsa, Singkil, dan Lhokseumawe. Lokasi pelabuhan penyeberangan pengganti Uleu-

Bidang	Sub Bidang	Isu dan Masalah	Rencana Tindak Lanjut
			lhee ditentukan setelah melakukan studi kelayakan teknis terlebih dahulu. • Rehabilitasi sistem jaringan listrik terinterkoneksi untuk Banda Aceh-Sigli-Bireuen-Lhokseumawe dan Meulaboh-Calang-Takengon. • Perbaikan kawasan budidaya industri di Lhoknga, Lhokseumawe, dan Malahayati; perdagangan, pertanian pangan dan perkebunan, dan pesisir kelautan. • Rehabilitasi jaringan sumberdaya air (antara lain: saluran irigasi, alur sungai, dan pantai) mendukung ketersediaan air baku dan air minum • Rehabilitasi dan rekonstruksi untuk fungsionalisasi kawasan berfungsi Lindung konservasi antara lain kawasan ekosistem Leuser, hutan lindung, dan lindung binaan di sepanjang pantai melalui penyiapan area penyangga (<i>buffer zone</i>) pantai, baik berupa vegetasi atau bangunan. • Kawasan permukiman diupayakan tidak berada di kawasan lindung, seperti wilayah kehidupan gajah yang semakin langka populasinya, antara lain di Desa Pucok, Alue Raya, Blang Dalam & Lhok Kuala, Lamje, Kr. Batee Mirah, Kr. Alue Ceuroloup, Kr. Buerieng, Can. Kaking Ungoh Batee, perbatasan Tutut, Kawasan Uteun Cut, Panga, Panga-Teunom, dan Lageun.

Sumber: *Bapel BRR, 2007*

III.1.2 Tata Ruang

Perencanaan tata ruang merupakan prasyarat ketika kita akan membangun atau mengembangkan suatu wilayah ataupun kawasan. Dikaitkan dengan proses rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah propinsi NAD dan Nias kepulauan, maka diperlukan perencanaan tata ruang, yang bersifat makro yaitu tata ruang wilayah propinsi dan kabupaten/kota ataupun tata ruang meso (kecamatan) dan tata ruang mikro atau detail tata ruang pada tingkat dusun/kampung (gampong), atau lebih dikenal sebutan '*Village Planning*'.

Karena itulah maka Tata Ruang dan pertanahan menjadi bagian dari pembangunan perumahan dan permukiman. Meskipun di dalamnya terdapat tataruang makro, yaitu mulai dari penyusunan tata ruang Provinsi (RTRW) hingga tata ruang Kabupaten/Kota (RTRWK), beserta turunannya. Berdasarkan arahan Rencana Induk, kegiatan penyusunan Tata Ruang perlu di ikuti oleh berbagai kegiatan lain sebagai pendukung dan kelanjutannya.

Selama 2005-2007, sebagian besar upaya tindak lanjut belum dilaksanakan. Rencana Tata Ruang ini seharusnya menjadi tugas Pemda, yang diharapkan akan menjadi acuan bagi seluruh kegiatan Rehab/Rekon, namun karena dalam kondisi pasca bencana di semua bidang dan sub bidang pemlihan harus segera dapat dilaksanakan untuk pemenuhan kebutuhan mendasar, maka semua kegiatan, termasuk perencanaan tata ruang di semua tingkatan dilakukan secara paralel dengan kegiatan fisik itu sendiri.

Perencanaan detail tata ruang kampung/dusun (gampong) atau disebut 'Village Planning' merupakan kegiatan penunjang untuk perumahan/permukiman, sehingga akan terbangun sebuah pemukiman yang terencana dan tertata dengan baik, sesuai dengan harapan pemukimnya, karena direncanakan secara bersama-sama dengan masyarakat pemukim di kampung tersebut. Meskipun village planning tidak secara eksplisit tertuang dalam rencana induk namun pendekatan pembangunan yang dilakukan adalah *community based approach* oleh karena itu dalam hal perencanaan-pun sebanyak mungkin menyerap aspirasi dari masyarakat korban itu sendiri, tentunya dengan dampingan-dampingan *guideline* mengenai mitigasi dan minimalisasi resiko bencana dan wawasan lingkungan.

Tabel III. 3
Sasaran Rencana Aksi Sub Bidang Tata Ruang NAD - Nias

Program/ Kegiatan		Satuan	Rencana Induk 2005-2009	Kebutuhan Riil 2005-2009	Realisasi 2005-2007	Sasaran 2008-2009
1.	Penyusunan Rencana Tata Ruang					
a	Penyusunan RTRW Provinsi NAD	propinsi	1	1	1	0
b	Penyusunan dan Revisi RTRW Kabupaten/Kota (NAD dan Nias)	Kabupaten/Kota	13	14	13	1
c	Perencanaan RDTR Kecamatan dan Kawasan Kota	Kota	8	27	15	12
d	RTBL/RTRK	Kabupaten/Kota	13	**	16	3
	i. Penyusunan Rencana <i>Tsunami Heritage and Living Museum</i>		*	1	***	***
	ii. Penyusunan Rencana <i>Water front City</i> (Banda Aceh)		*	1	***	***
	iii. Perencanaan Kawasan lainnya		*	10	***	***
2.	Penyusunan SOP Pengendalian Pemanfaatan Ruang (Buku Pedoman)	Propinsi	1	2	0	2
		Kabupaten/Kota	13			
3.	Sosialisasi Kebijakan Penataan Ruang	Propinsi	1	2	0	2
		Kabupaten/Kota	13			
4.	Koordinasi Pemerintah Pusat dan Daerah (Program Integrasi Sektoral)	Propinsi	1	1	2	0
		Kabupaten/Kota	13			
5.	Pemantapan Kelembagaan Penataan Ruang	Propinsi	1	1	3	0
		Kabupaten/Kota	13			
6	Rencana Tindak Manajemen Bencana	Kabupaten/Kota	13	-	2	11
7	Perencanaan <i>Bottom Up Planning</i>	Unit	*	**	**	**

Program/ Kegiatan		Satuan	Rencana Induk 2005-2009	Kebutuhan Riil 2005-2009	Realisasi 2005-2007	Sasaran 2008-2009
a	Kecamatan <i>Action Plan</i>	Unit	*	148	0	148
b	<i>Village Planning</i>	Unit	*	812	368	444
8	Studi	Unit	*	6	0	6

Sumber : Bapel BRR, 2007

* : Tidak terinci / tercantum dalam Rencana Induk

** : Data belum tersedia

*** : Tergabung dalam Program/Kegiatan Penyusunan RTBL/RTRK

Terdapat 8 program dan kegiatan pada sub bidang tata ruang yang direncanakan dalam rencana induk, yaitu Penyusunan Tata Ruang, Penyusunan SOP Pengendalian Pemanfaatan Ruang, Sosialisasi Kebijakan Penataan Ruang, Koordinasi Pemerintah Pusat dan Daerah, Pemantapan Kelembagaan Penataan Ruang, Rencana Tindak Manajemen Bencana, Perencanaan Bottom up Planning, dan Studi. Program kegiatan ini masing-masing mempunyai sasaran yang ditetapkan dalam rencana induk, yang dalam perkembangannya terdapat penyesuaian kebutuhan riil sesuai situasi dan keadaan wilayah di lapangan. Adapun Sasaran Rencana Induk dan Kebutuhan Riil dapat dilihat secara lebih detail pada tabel 3.2 diatas.

Sasaran kegiatan 2008-2009 pada sub bidang tata ruang adalah 12 unit Perencanaan RDTR Kecamatan dan Kawasan Kota, 1 unit Penyusunan dan Revisi RTRW Kabupaten/Kota (NAD dan Nias), 1 unit Penyusunan Rencana Tsunami Heritage and Living Museum, 1 unit Penyusunan Rencana Water front City (Banda Aceh), 10 unit Perencanaan Kawasan Lainnya, SOP Pengendalian Pemanfaatan Ruang (Buku Pedoman) di 2 propinsi, Sosialisasi Kebijakan Penataan Ruang di 2 propinsi, 148 unit Kecamatan action Plan, 444 unit Village Planning, dan 6 unit studi.

Tabel III. 4
Permasalahan dan Rencana Tindak Lanjut Bidang Pemulihan Perumahan ,
Permukiman, Tata Ruang, Pertanahan, dan Lingkungan Hidup
sub bidang tata ruang NAD - Nias

Bidang	Sub Bidang	Isu dan Masalah	Rencana Tindak Lanjut
BIDANG PEMULIHAN PERUMAHAN, PERMUKIMAN, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP	TATA RUANG	- Kebutuhan Penyusunan dan Revisi RTRW Kabupaten/Kota (NAD dan Nias) sebanyak 1 paket. - Kebutuhan Perencanaan RDTR Kecamatan dan Kawasan Kota sebanyak 1 paket. - Penyusunan Rencana Tsunami Heritage and Living Museum sebanyak 1 unit. - Penyusunan Rencana Water front City (Banda Aceh) sebanyak 1 unit. - Kebutuhan Perencanaan Kawasan lainnya sebanyak 10 unit. - Penyusunan SOP Pengendalian Pemanfaatan Ruang (Buku Pedoman), 2 sasaran.	- Memasukkan bukit penyelamatan (<i>escape hill</i>) di sekitar kawasan permukiman yang bisa dicapai dalam waktu 5, 10, 20 menit; - Mendesain akses untuk evakuasi (<i>evacuation/escape routes</i>) dengan penataan kembali dan pembangunan jaringan jalan lingkungan dan jalan lokal; - Melakukan kampanye dan penyadaran publik yang berkelanjutan mengenai jalur-jalur evakuasi dan bukit penyelamatan; - Mendesain dan merekonstruksi bangunan tahan gempa/tsunami; - Menciptakan jalur hijau (<i>green belt/forested town</i>) sejajar garis pantai dari pohon kelapa, cemara, dan pohon lainnya yang sesuai tingkatannya sehingga

Bidang	Sub Bidang	Isu dan Masalah	Rencana Tindak Lanjut
		• Sosialisasi Kebijakan Penataan Ruang, 2 sasaran. • Koordinasi Pemerintah Pusat dan Daerah (Program Integrasi Sektoral), 2sasaran. • Pemantapan Kelembagaan Penataan Ruang, 3 sasaran. • Rencana Tindak Manajemen Bencana, 2 sasaran. • Kebutuhan untuk Kecamatan <i>Action Plan</i>, sebanyak 148 unit. • Kebutuhan <i>Village Planning</i>, sebanyak 444 unit. • Kebutuhan untuk Studi, sebesar 6 unit. • Konsep village planning yang direncanakan dan tengah dilaksanakan BRR, merupakan konsep yang dikembangkan di luar perencanaan tata ruang yang ditetapkan dalam rencana induk. • Kebijakan dan Strategi Rencana Induk (membangun Aceh yang baru dengan tata ruang yang bisa mengantisipasi bencana tsunami jika kembali terjadi) tidak terlihat dalam kebijakan, strategi maupun pelaksanaan tata ruang makro BRR yang disebabkan karena kondisi sosial masyarakat setempat dalam rangka mempertahankan hak-hak kepemilikan tanah dan juga ketidakmampuan pemerintah daerah dalam menyediakan lokasi lahan baru. Sebagai contoh kebijakan dan strategi Rencana Induk adalah membangun area permukiman yang jauh dari pesisir pantai, namun pada kenyataannya cukup banyak perumahan dibangun di area pantai. • Tertundanya legalisasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dikarenakan mengacu kepada RPJMD yang baru.	membentuk <i>city belt</i> , <i>district belt</i> , <i>neighborhood belt</i> .

Bidang	Sub Bidang	Isu dan Masalah	Rencana Tindak Lanjut
		• RTRW yang ada saat ini terkesan tumpang tindih dan belum memperhatikan kesesuaian (interface) dengan rencana penyusunan village planning oleh masyarakat dan RTRW Kota, Kabupaten dan Provinsi. • Penyusunan village planning oleh masyarakat berjalan lamban dan belum optimal dalam melibatkan peran serta masyarakat. • Peranan Badan Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi belum optimal dalam memfasilitasi penyusunan revisi Qanun RTRW, sehingga revisi Qanun RTRW dalam rangka menampung perubahan struktur tata ruang yang diakibatkan oleh bencana alam gempa bumi dan tsunami di NAD dan Nias belum berjalan lancar. • Belum adanya proses legalisasi tata ruang yang baru, sebagai contoh : pembebasan lahan, seringkali tidak dapat sejalan dengan arahan tata ruang (akibat masalah pemilikan dan kesediaan pemilik lahan).	

Sumber : Bapel BRR, 2007

III.1.3 Pertanahan

Aspek pertanahan merupakan kegiatan yang menentukan dalam kelancaran dan keberhasilan rehabilitasi dan rekonstruksi bidang perumahan khususnya dan pembangunan NAD -Nias secara umum.

Kegiatan pemetaan dan administrasi pertanahan dimaksudkan untuk:

1. Menyiapkan infrastruktur pertanahan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi
2. Mewujudkan rekonstruksi pemilikan hak atas tanah.
3. Menyediakan lahan yang memenuhi syarat kelayakan untuk resettlement (program relokasi) korban tsunami serta kebutuhan rehab-rekon lainnya.
4. Meningkatkan kapasitas pelayanan, mengembangkan sistem penanganan sengketa serta mengembangkan pemberdayaan masyarakat di bidang pertanahan

Tabel III. 5
Sasaran Rencana Aksi Sub Bidang Pertanahan NAD - Nias

Program/ Kegiatan		Satuan	Rencana Induk 2005-2009	Kebutuhan Riil 2005-2009	Realisasi 2005-2007	Sasaran 2008- 2009
1	Pemulihan pelayanan pertanahan 2005-2006	Propinsi	1	**	0	1
		Kab/Kota	13	**	0	13
2	Pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemulihan pengelolaan dan pelayanan pertanahan 2005-2008	Propinsi	1	**	0	1
		Kab/Kota	13	**	0	13
3	Pembangunan fisik kadastral 2005-2006	Propinsi	1	**	0	1
		Kab/Kota	13	**	0	13
4	Penyusunan rencana tata guna tanah 2005	Propinsi	1	**	0	1
		Kab/Kota	13	**	0	13
5	Pengadaan peralatan komputerisasi, training, serta pembangunan <i>database digital</i> 2005-2006	Propinsi	1	**	0	1
		Kab/Kota	13	**	0	13
6	Pembuatan sertifikat pengganti 2005-2006	Propinsi	1	400.000 Bidang Sertifikat	285.000 Bidang Sertifikat	115.000 Bidang Sertifikat
		Kab/Kota	13			
7	Konsolidasi tanah 2005-2009	Propinsi	1	**	0	1
		Kab/Kota	13	**	0	13
8	Penanganan sengketa pertanahan 2005-2008	Propinsi	1	**	0	1
		Kab/Kota	13	**	0	13
9	Penyusunan naskah perundang-undangan dan penyuluhan	Propinsi	1	**	0	1
		Kab/Kota	13	**	0	13

Sumber : Bapel BRR, 2007

** : Data belum tersedia

Terdapat 9 program kegiatan pada sub bidang pertanahan yang direncanakan dalam rencana induk yaitu: Pemulihan pelayanan pertanahan 2005-2006, Pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemulihan pengelolaan dan pelayanan pertanahan 2005-2008, Pembangunan fisik kadastral 2005-2006, Penyusunan rencana tata guna tanah 2005, Pengadaan peralatan komputerisasi, training, serta pembangunan database digital 2005-2006, Pembuatan sertifikat pengganti 2005-2006, Konsolidasi tanah 2005-2009, Penanganan sengketa pertanahan 2005-2008, dan Penyusunan naskah perundang-undangan dan penyuluhan. Dari program dan kegiatan tersebut hanya Program Pembuatan Sertifikat Pengganti yang sudah terealisasi sedangkan program-program lainnya belum.

Dari 400.000 sertifikat pengganti yang merupakan kebutuhan riil telah terealisasi sebanyak 285.000 bidang sertifikat sehingga sasaran yang harus diselesaikan pada 2008-2009 adalah sebanyak 115.000 bidang sertifikat. Sedangkan Sasaran 2008-2009 untuk program lainnya masing-masing dilaksanakan 1 unit pada tingkat propinsi dan 13 unit pada tingkat Kab/Kota.

Tabel III. 6
Permasalahan dan Rencana Tindak Lanjut Bidang Pemulihan Perumahan ,
Permukiman, Tata Ruang, Pertanahan, dan Lingkungan Hidup
sub bidang pertanahan NAD - Nias

Bidang	Sub Bidang	Isu dan Masalah	Rencana Tindak Lanjut
BIDANG PEMULIHAN PERUMAHAN, PERMUKIMAN, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP	PERTANAHAN	• Pemulihan pelayanan pertanahan 2005-2006 untuk kebutuhan Propinsi, 1 sasaran. • Pemulihan pelayanan pertanahan 2005-2006 untuk kebutuhan kab/kota, 13 sasaran. • Sosialisasi Pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemulihan pengelolaan dan pelayanan pertanahan 2005-2008 di Propinsi, 1 sasaran. • Sosialisasi Pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemulihan pengelolaan dan pelayanan pertanahan 2005-2008 di kab/kota, 13 sasaran. • Kebutuhan Pembangunan fisik kadastral 2005-2006 di Propinsi sebanyak 1 unit. • Kebutuhan Pembangunan fisik kadastral 2005-2006 di kab/kota sebanyak 13 unit. • Penyusunan rencana tata guna tanah 2005 di Propinsi, 1 paket. • Penyusunan rencana tata guna tanah 2005 di kab/kota, 13 paket. • Pengadaan peralatan komputerisasi, training, serta pembangunan <i>database digital</i> 2005-2006 di Propinsi, 1 unit. • Pengadaan peralatan komputerisasi, training, serta pembangunan <i>database digital</i> 2005-2006 di Kab/Kota, 13 unit. • Kebutuhan Pembuatan sertifikat pengganti 2005-2006 sebanyak 115.000 bidang sertifikat. • Konsolidasi tanah 2005-2009 untuk Propinsi, 1 sasaran. • Konsolidasi tanah 2005-	• Dewan Pengarah BRR telah meminta kepada Bapel rehabilitasi dan rekonstruksi untuk berkoordinasi dengan Kementerian / lembaga terkait guna mempercepat penerbitan peraturan perundangan tentang penyelesaian masalah hukum yang berkaitan dengan hak atas tanah perorangan • Berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan oleh para anggota Dewan Pengarah, maka Dewan pengarah telah menyampaikan rekomendasi kepada Bapel dan instansi terkait untuk mempercepat penyelesaian masalah penataan hak atas tanah perorangan bagi warga masyarakat di NAD dan Nias dengan meningkatkan koordinasi dengan Pemda Kabupaten / Kota dalam pemanfaatan dana untuk pembebasan tanah bagi permukiman dan infrastruktur lainnya • Dewan Pengarah BRR juga telah meminta kepada Bapel untuk segera mencairkan dan memanfaatkan seoptimal mungkin dana bantuan MDTF untuk mempercepat penyelesaian proyek penataan hak atas tanah dan mengkoordinasikan pelaksanaannya dengan instansi terkait • Berbagai masalah yang berkaitan dengan penataan kembali hak-hak atas tanah perorangan telah dicoba dibahas pada tingkat Staff melalui forum rapat dan pertemuan antara sekretariat Dewan Pengarah dan para Deputi Bapel guna dicarikan solusi bagi penyelesaiannya dan upaya optimalisasi pemanfaatan dana APBN dan dana dari Multilateral Donor Trust Fund (MDTF) • Sebagai tindak lanjut, Bapel dalam mempercepat penyelesaian masalah pertanahan selain melaksanakan melalui Village Planning juga menindaklanjutinya dengan Program RALAS (Rehabilitation of Aceh Land Administration System)dengan dukungan pembiayaan MDF.

Bidang	Sub Bidang	Isu dan Masalah	Rencana Tindak Lanjut
		2009 untuk Kab/Kota, 13 sasaran. • Penanganan sengketa pertanahan 2005-2008 di Propinsi, 1 sasaran. • Penanganan sengketa pertanahan 2005-2008 di Kab/Kota, 13 sasaran. • Penyusunan naskah perundang-undangan dan penyuluhan di Propinsi, 1 sasaran. • Penyusunan naskah perundang-undangan dan penyuluhan • Upaya penataan kembali hak atas tanah perorangan di daerah yang terkena bencana terkesan lamban. • Adanya pungutan liar yang dilakukan oleh oknum petugas di lapangan dalam pengurusan hak atas tanah. • Keterlambatan dalam penerbitan PERPU yang dapat dijadikan dasar dalam menata kembali hak atas tanah perorangan. • Pemerintah daerah mengalami kesulitan dana dalam penyediaan lahan (ditambah peran Bapel yang tidak optimal) yang akan digunakan untuk relokasi permukiman dan perumahan pengungsi korban bencana. • Masalah pembebasan lahan, banyak anggaran pembangunan fasilitas umum dengan bantuan luar negeri yang belum dapat diserap karena terhambat masalah pembebasan tanah. • Tidak adanya PERPU terkait hukum dan pertanahan. • Adanya ketidakpastian menyangkut pemilikan tanah yang disebabkan oleh spekulasi tanah, pemilikan penguasaan tanah yang tidak sah karena hilangnya data dan informasi tentang tanah dan konflik horizontal dalam masyarakat.	

Bidang	Sub Bidang	Isu dan Masalah	Rencana Tindak Lanjut
		Terhambatnya proses penerbitan sertifikat oleh RALAS karena sertifikat yang lama masih aktif sehingga dikawatirkan terjadi tumpang tindih.	

Sumber : Bapel BRR, 2007

III.1.4 Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam

Subbidang ini merupakan lintas sektoral sehingga beberapa program dan kegiatannya telah diakomodasi dalam program kegiatan bidang-bidang lainnya, seperti bidang perumahan dan permukiman, bidang infrastruktur dan bidang ekonomi.

Berdasarkan Rencana Induk telah ditetapkan 4 kebijakan utama yang menjadi acuan dari program rehabilitasi dan rekonstruksi di bidang lingkungan hidup dan sumber daya alam, yaitu: 1) Memulihkan kembali daya dukung lingkungan dan mengantisipasi ancaman bencana alam, 2) Memulihkan kembali kegiatan perekonomian masyarakat yang berbasis sumber daya alam, 3) Melibatkan masyarakat dan menggunakan pranata sosial dan budaya lokal dalam menghadapi bencana dan kegiatan pembangunan dan 4) memulihkan kembali sistem kelembagaan pemerintahan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Tabel III. 7
Kebijakan dan Kegiatan Pokok Pemulihan Lingkungan Hidup dan SDA
Dalam Rencana Induk

No	KEBIJAKAN	PROGRAM UTAMA	KEGIATAN POKOK
1	Pemulihan kembali daya dukung lingkungan dan antisipasi ancaman bencana alam	1 Mengamankan dan menginformasikan wilayah yang terkena pencemaran dan bahaya kegempaan	Survei Berkala parameter pencemar, Penetapan status keamanan lingkungan dari suatu wilayah, dan Sosialisasi kualitas lingkungan dan ancaman bahaya gempa
		2 Melakukan pembersihan wilayah bencana	Pembuangan limbah padat tsunami, Penataan kembali sistem persampahan kota, Menata ulang sistem drainase perkotaan, Membangun sistem pengolahan limbah cair.
		3 Merehabilitasi tanah	Penelitian kualitas tanah, termasuk kegiatan survei, pengklasifikasian status tanah, evaluasi dan rekomendasi penanganan serta rehabilitasi tanah.
		4 Merehabilitasi terumbu karang	Pendataan kembali terumbu karang, penanaman kembali terumbu karang dan penyusunan mekanisme kelembagaan
		5 Merehabilitasi dan membangun kawasan pesisir khususnya pada zona penyangga (green belt), kawasan tambak dan hutan sesuai dengan Rencana Tata Ruang dan karakter pantai	Rehabilitasi Mangrove dan Rehabilitasi Vegetasi Pelindung kawasan pantai lainnya; rehabilitasi kawasan tambak; dan pembangunan hutan kota
		6 Mengamankan fungsi kawasan lindung eksisting	Mengamankan Taman Nasional Lueser dari Pembangunan R3WANS dan Mengamankan fungsi kawasan lindung lainnya, yang berada di NAD dan Nias, maupun propinsi lainnya yang berdekatan
		7 Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS)	Pengelolaan lahan melalui Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL), melindungi dan mengembangkan sumber-sumber air, pengelolaan vegetasi untuk perlindungan tanah dan tata air dan pembinaan kesadaran dan kemampuan sumber daya manusia

No	KEBIJAKAN		PROGRAM UTAMA	KEGIATAN POKOK
2	Pemulihan kembali kegiatan perekonomian masyarakat yang berbasis sumber daya alam	1	Memulihkan dan meningkatkan kegiatan pertanian	Rehabilitasi/ pembangunan saluran air dan irigasi tersier dan kuarter (menurut skema dan tipe); rehabilitasi jalan usaha tani/ produksi; pembangunan unit perbibitan/ perbenihan; pembangunan fasilitas pemasaran hasil pertanian; pembangunan pos kesehatan hewan (Poskeswan); penelitian dan pengembangan teknologi tepat guna; Bantuan sarana pertanian dalam rangka reinisiasi produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan; pengembangan pertanian terpadu, penyediaan modal kerja untuk usaha pertanian; bantuan sarana pengolahan dan pemasaran hasil pertanian dan bantuan kios sarana produksi serta peningkatan usaha ekonomi masyarakat khususnya di daerah penyangga kawasan konservasi (taman wisata, cagar alam dan suaka margasatwa).
		2	Memulihkan dan meningkatkan kegiatan perikanan	Mengembalikan kegiatan perikanan tangkap, Merehabilitasi lahan tambak masyarakat dan perikanan budidaya lainnya dan fasilitasi kegiatan ekonomi masyarakat pesisir.
		3	Menyediakan material dasar pembangunan dari sumber daya alam yang tidak mengancam kelestarian lingkungan	Penyediaan kayu dan Penyediaan bahan dan material bangunan konstruksi lainnya, Pengembangan alternatif bahan bangunan dari kayu kelapa, Pembinaan dan pengendalian perusahaan hutan serta pembinaan dan pengendalian pemanfaatan hutan produksi NAD dan Sumut.
3	Pelibatan masyarakat dan penggunaan pranata sosial dan budaya lokal dalam menghadapi bencana dan kegiatan pembangunan	1	Membangun Sistem Peringatan Dini secara terintegrasi	Menyusun Standar, operasi dan prosedur (SOP) untuk respon darurat bencana, Melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan institusi pemerintah, dan Membangun prasarana dan sarana sistem peringatan dini
		2	Meningkatkan kepedulian masyarakat dalam mengantisipasi bencana	Memanfaatkan nilai kearifan lokal sebagai bagian yang melengkapi sistem peringatan dini, Memberdayakan peran masyarakat dalam mekanisme penanganan bencana, Mengembangkan Pendidikan tentang kebencanaan
		3	Melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan bidang SDA dan LH	Memberdayakan pranata sosial dan lembaga adat yang ada dalam proses perencanaan dan pelaksanaan serta membangun mekanisme pengawasan sesuai dengan nilai sosial, budaya dan aspirasi masyarakat setempat
4	Pemulihan kembali sistem kelembagaan pemerintahan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup	1	Melengkapi dan mengisi kembali formasi pegawai (tenaga ahli dan tenaga pendukung)	Melakukan kajian kelembagaan yang responsif terhadap visi pembangunan di masa yang akan datang, melakukan rekrutmen pegawai baru dan meningkatkan kapasitas aparat di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup.
		2	Memulihkan sarana dan prasarana pemerintahan bidang sumber daya alam dan lingkungan daerah	Melakukan pembangunan dan rehabilitasi kantor dan sarana pendukung kegiatan operasional instansi bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup di daerah.

Sumber : Lampiran III Rencana Induk

III.2 BIDANG PEMULIHAN INFRASTRUKTUR

III.2.1 Jalan dan Transportasi

III.2.1.1 Transportasi Laut dan ASDP

Prasarana transportasi laut dan Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (ASDP) sebagian besar mengalami kerusakan. Pelabuhan laut Malahayati (Banda Aceh), Meulaboh (Aceh Barat), Calang (Aceh Jaya), dan Ulee Lheue (Banda Aceh) mengalami rusak berat, sedangkan Pelabuhan Sabang (Kota Sabang), Krueng Geukueh (Lhokseumawe), Susoh (Aceh Barat Daya), Tapak Tuan (Aceh Selatan), Balohan (Sabang), Labuhan Haji (Aceh Selatan), Lamteng (Aceh Besar), Sinabang (Simeulue), Pulau Banyak (Aceh Singkil), dan Singkil (Aceh Singkil) rusak ringan.

Gempa pada tanggal 28 Maret yang terjadi di dekat Pulau Nias mengakibatkan kerusakan pada pelabuhan laut dan pelabuhan penyeberangan di Pulau Nias, Provinsi Sumatera Utara dan Pulau Simeulue, Provinsi NAD. Kerusakan total terjadi pada pelabuhan penyeberangan dan pelabuhan laut di Gunung Sitoli dan kerusakan berat terjadi pada pelabuhan di Lahewa, Tello serta Teluk Dalam. Pelabuhan Sibigo di Simeuleu juga mengalami rusak berat.

Tabel III. 7
Sasaran Rencana Aksi Sub Transportasi Laut dan ASDP NAD - Nias

Program/ Kegiatan		Satuan	Rencana Induk 2005-2009	Kebutuhan Riil 2005-2009	Realisasi 2005-2007	Sasaran 2008-2009
1	Pel. Laut	unit	17	15	15	0
2	Pel. Ferry	unit	9	8	8	0

Sumber : Bapel BRR, 2007

0 : Sudah terlaksana

Rehabilitasi dan rekonstruksi pelabuhan di NAD serta Nias dalam rencana induk ditetapkan sejumlah 17 unit, namun setelah dilakukan inventarisasi ternyata kebutuhan di lapangan adalah 15 unit. Hal ini disebabkan karena dibutuhkannya beberapa dermaga darurat untuk keperluan pendaratan logistik menggunakan LCT pada daerah-daerah tertentu seperti Calang, Pulo Aceh dan Nias. Dari jumlah tersebut, 15 unit telah dan sedang dilaksanakan kegiatan rehabilitasi serta rekonstruksinya. Dengan demikian Sasaran 2008-2009 adalah melanjutkan pembangunan pelabuhan laut yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Disamping pembangunan fisik, disediakan pula berbagai fasilitas peralatan bongkar-muat di beberapa pelabuhan utama di Prov. NAD-Nias. Pada akhir tahun 2008 diharapkan seluruh kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pelabuhan dapat diselesaikan.

Rehabilitasi dan rekonstruksi pelabuhan penyeberangan (Pel. Ferry) ditargetkan sebanyak 9 unit, sebagaimana tertuang dalam rencana induk. Dari keseluruhan jumlah tersebut, 8 unit telah selesai dilaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi pada tahun anggaran 2005-2006. Sisa pekerjaan (1 unit) akan dilaksanakan pada TA 2007 dan dilanjutkan pada tahun 2008.

III.2.1.2 Transportasi Udara

Setelah bencana gempa bumi dan tsunami, beberapa bandar udara mengalami kerusakan ringan dan kerusakan berat, yaitu: (a) Bandara Cut Nyak Dien-Meulaboh dalam kondisi *runway* patah dan retak; (b) Bandara Maimun Saleh-Kota Sabang dalam kondisi landasan yang baik namun sistem komunikasi rusak; (c) Bandara Sultan Iskandar Muda-Banda Aceh dalam kondisi landasan yang baik namun *tower* rusak; dan (d) Bandara Lasikin-Sinabang mengalami penurunan landasan pacu. Selain itu, masih ada bandara yang masih laik operasi

yaitu: Bandara Teuku Cut Ali-Tapak Tuan; Bandara Malikul Saleh-Lhokseumawe; dan Bandara Rembele-Takengon.

Gempa bumi yang terjadi pada 28 Maret 2005 telah mengakibatkan kerusakan pada Bandar Udara Binaka dan Lasundre di Pulau Nias, Bandar Udara Kuala Batee di Blang Pidie, dan Bandar Udara Lasikin di Simeulue. Kerusakan berat yang terjadi meliputi landasan, *taxiway* dan *apron*.

Tabel III. 8
Sasaran Rencana Aksi Sub Transportasi Udara NAD - Nias

Program/Kegiatan	Satuan	Rencana Induk 2005-2009	Kebutuhan Riil 2005-2009	Realisasi 2005-2007	Sasaran 2008-2009
Bandar Udara					
Rehabilitasi-rekonstruksi Bandara	Unit	10	9	9	0
Airstrip	Unit	*	3	3	0
Helipad	Unit	*	1	1	0

Sumber : Bapel BRR, 2007

* : Tidak terinci / tercantum dalam Rencana Induk

o : Sudah terlaksana

Rehabilitasi dan rekonstruksi bandar udara sesuai dengan Rencana Induk dilaksanakan sebanyak 10 unit. Dari hasil penelitian di lapangan, kebutuhan yang perlu dilaksanakan adalah 9 unit. Dari jumlah tersebut 6 unit diantaranya telah dan sedang dilaksanakan pada tahun 2005-2006 sedangkan 3 unit lainnya akan dilaksanakan pada tahun 2007 dan 2008. Pada tahun 2008 kegiatan difokuskan pada pengembangan Bandara SIM dan Bandara Cut Nyak Dhien Nagan Raya. Disamping melaksanakan pembangunan fisik, maka bandara-bandara yang belum memiliki master plan juga disiapkan oleh BRR NAD-Nias yang akan dipergunakan sebagai arah pembangunan masa depan. Disamping itu, berbagai fasilitas navigasi, keselamatan penerbangan serta PKP-PK (pemadam kebakaran) juga dilengkapi.

Pembangunan airstrip dan helipad tidak terdapat dalam Rencana Induk, namun melihat kondisi medan yang terpisah secara geografis serta topografi yang sulit dicapai, maka di beberapa lokasi perlu dibangun airstrip dan helipad yang dipergunakan khususnya pada keadaan darurat untuk evakuasi bencana. Pembangunan airstrip tahap I dilakukan pada TA 2007 sementara helipad pada tahun 2007 sebanyak 1 unit.

III.2.1.3 Transportasi Darat, Jalan dan Jembatan

Bidang Jalan dan Jembatan

Tingkat kerusakan aset prasarana jalan nasional dan provinsi dengan total panjang mencapai 3.484,6 km mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Kondisi prasarana jalan nasional dan provinsi sebelum bencana gempa bumi dan tsunami, 32,7 persen dalam keadaan baik, 35,8 persen rusak ringan, dan 31,5 persen rusak berat. Setelah bencana gempa bumi dan tsunami, kondisi tersebut memburuk menjadi hanya sekitar 28,4 persen dalam keadaan baik, sedangkan sisanya sebesar 71,6 persen dalam keadaan rusak (35,7 persen rusak ringan dan 35,9 persen rusak berat). Kenaikan tingkat kerusakan prasarana jalan tersebut digambarkan pada Tabel 2.1. Kerusakan jembatan diperkirakan mencapai 25 persen dari total jembatan nasional sepanjang 21.340 m dan jembatan provinsi sepanjang 14.015 m.

Setelah gempa bumi dan tsunami tanggal 26 Desember 2004 di Provinsi NAD dan Kepulauan Nias dan gempa bumi yang terjadi tanggal 28 Maret 2005 di Kepulauan Nias telah mengakibatkan kerusakan berbagai sarana dan prasarana di kedua wilayah tersebut. Beberapa lokasi yang mengalami kerusakan sarana dan prasarana, antara lain; di Pulau Simeuleu, sebagian Kabupaten Aceh Barat Daya, Aceh Selatan dan Aceh Singkil juga

mengalami kerusakan. Jalan provinsi di Pulau Nias mencapai 426 km di mana 15 persen mengalami rusak ringan dan 45 persen dalam kondisi rusak berat. Sedangkan di Pulau Simeuleu jalan yang mengalami kerusakan berat sekitar 15 persen dan kerusakan ringan sekitar 5 persen. Jalan dari Tapak Tuan (Aceh Selatan) ke batas Sumut (Aceh Singkil) juga mengalami kerusakan sekitar 10 persen

Tabel III. 9
Sasaran Rencana Aksi Sub Jalan dan Jembatan NAD - Nias

	Program/ Kegiatan	Satuan	Rencana Induk 2005-2009	Kebutuhan Riil 2005-2009	Realisasi 2005-2007	Sasaran 2008-2009
1	Lintas Timur NAD (Jalan Nasional)	km	257	80	80	0
2	Lintas Barat NAD (Jalan Nasional)	km	441	702	667	35
3	Lintas Tengah NAD (Jalan Nasional)	km	341	191	27	164
4	Lintas Lainnya (Jalan Propinsi)	km	1.455	313	148	165
5	Jalan Propinsi P. Nias	km	256	469	250	219
6	Jalan Kabupaten NAD dan Nias	km	1.900	3.511	942	2569
	TOTAL	km	4.650	5.266	2.114	3152

Sumber : Bapel BRR, 2007

o : Sudah terlaksana

Pada sub Jalan dan Jembatan, Sasaran 2008-2009 untuk Lintas Timur NAD (Jalan Nasional) telah terselesaikan, Lintas Barat NAD (Jalan Nasional) sebesar 35 km, Lintas Tengah NAD (Jalan Nasional) 164 km, Lintas Lainnya (Jalan Propinsi) 165 km, Jalan Propinsi P. Nias 219 km, dan Jalan Kabupaten NAD dan Nias 2569 km.

Pada tahun 2007 diprogramkan rehabilitasi dan rekonstruksi jalan sepanjang 778 km, yang terdiri dari jalan Nasional 252 km, jalan propinsi 155 km (Prop. NAD : 32 km dan Nias 123 km). Sehingga sampai akhir tahun 2007 akan ditangani jalan sepanjang 1.735 km.

Dalam Rencana Induk direncanakan pembangunan prasarana jalan kereta api sepanjang 233 km dengan biaya Rp.1,093 triliun. Namun demikian, Pelaksanaan studi dan pembangunan jalan kereta api telah mulai dirintis Departemen Perhubungan bersama Pemerintah Provinsi NAD sehingga pelaksanaan kegiatan yang menelan biaya sangat besar tersebut tidak ditangani oleh BRR.

Terminal Bus

Sebagian besar terminal bus di tiga kota besar yaitu Banda Aceh, Meulaboh, dan Lhokseumawe mengalami kerusakan berat, sedangkan di Sigli, Langsa, Bireun, dan Gunung Sitoli mengalami kerusakan ringan sampai dengan sedang; demikian juga untuk prasarana jembatan timbang, pemeriksaan kendaraan bermotor (PKB), dan operasi kedaruratan. Adapun prasarana PKB yang mengalami kerusakan berat yaitu: Unit Pelaksana Pemeriksaan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Bayu di Aceh Utara, UPPKB Lamno di Aceh Barat, PKB Banda Aceh, PKB Aceh Besar, PKB Aceh Timur, PKB Aceh Utara, PKB Lhokseumawe, dan PKB Aceh Barat. Gempa bumi tanggal 28 Maret 2005 telah menyebabkan kerusakan yang cukup berat pada bangunan khususnya fasilitas LLAJ di Pulau Nias dan Simeulue.

Berdasarkan Rencana Induk, kebutuhan terminal dan stasiun DAMRI sebanyak 29 unit, namun dari hasil inventarisasi di lapangan, jumlah kebutuhan yang teridentifikasi turun menjadi 13 unit. Hal ini disebabkan karena pada beberapa daerah, fasilitas terminal existing masih dalam kondisi baik dan operasional. Prioritas pembangunan dilakukan pada ibukota/kabupaten yang belum memiliki fasilitas terminal dan beberapa ibu kota kecamatan yang sudah memenuhi persyaratan pembangunan terminal. Sampai dengan April 2007, 8

unit terminal sedang dalam proses pembangunan. Sasaran 2008-2009 sebesar 8 unit terminal.

Tabel III. 10
Sasaran Rencana Aksi Sub Terminal Bus dan LLAJ NAD - Nias

Program/Kegiatan	Satuan	Rencana Induk 2005-2009	Kebutuhan Riil 2005-2009	Realisasi 2005-2007	Sasaran 2008-2009
Pembangunan Terminal dan stasion/ol Damri	unit	29	13	8	5
Rehab dan rekon sarana keselamatan LLAJ (rambu, traffic-light, pagar, patok, lampu)	unit	622.416	325	**	**
Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB)	unit	10	2	2	0
Rehab jembatan timbang	unit	3	2	0	2
Pengadaan bus bantuan	unit	131	36	28	***
Pembangunan halte bus	unit	60	60	0	***

Sumber : Bapel BRR, 2007

** : Data belum tersedia

*** : Dilaksanakan oleh Pemda

0 : Sudah terlaksana

Rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas keselamatan LLAJ (rambu, *traffic light*, pagar, patok, lampu) direncanakan sebanyak 62.2416 unit. Dari hasil inventarisasi di lapangan, prioritas kebutuhan adalah sebanyak 4.002 unit. Berkurangnya jumlah rencana penanganan disebabkan karena diprioritaskan pada lokasi-lokasi tertentu yang sangat rawan terhadap kecelakaan. Disamping itu, pendanaan untuk kegiatan tersebut juga ikut dianggarkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota sehingga pelaksanaannya dilakukan secara *sharing*. Pembangunan sarana fasilitas keselamatan LLAJ mulai dilaksanakan pada TA 2007 mengingat pada tahun-tahun sebelumnya masih banyak jalan-jalan yang rusak dan belum representatif. Pada tahun 2007 dianggarkan dana sebesar 4.874.230.000 untuk pemasangan sebanyak 325 unit sarana keselamatan lalu lintas sedangkan sisanya dilaksanakan pada tahun 2008.

Pembangunan gedung Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) menurut Rencana Induk dibangun sejumlah 10 unit. Berdasarkan hasil inventarisasi di lapangan, kebutuhan terhadap prasarana tersebut berjumlah 4 unit. Lokasi pembangunan gedung PKB diarahkan pada daerah-daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan kendaraan bermotor yang cukup tinggi. Fasilitas gedung PKB mulai dilaksanakan pada tahun 2007 sejumlah 2 unit, yaitu di Meulaboh dan Langsa.

Pengadaan Bus Bantuan menurut Rencana Induk sebanyak 131 unit namun kebutuhan di lapangan adalah sebanyak 48 unit. Dari jumlah tersebut 28 unit diantaranya telah dilaksanakan pengadaannya pada tahun 2006 dan telah diserahkan serta dioperasikan oleh DAMRI sedangkan sisanya akan diadakan pada tahun 2007 dan 2008 untuk diserahkan kepada pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota.

Pembangunan/rehabilitasi jembatan timbang berdasarkan Rencana Induk sebanyak 3 unit, sementara kebutuhan di lapangan hanya dibutuhkan 2 unit untuk wilayah pantai Barat dan Selatan Propinsi NAD. Pembangunan 2 unit jembatan timbang tersebut direncanakan pada tahun 2008. Pembangunan halte bus sebanyak 60 unit yang tercantum dalam rencana induk tidak dilaksanakan karena tidak merupakan prioritas. Pembangunan diserahkan kepada pemerintah kabupaten/kota

Pos dan Telematika

Tabel III. 11
Sasaran Rencana Aksi Sub Pos dan Telematika NAD - Nias

Program/Kegiatan	Satuan	Rencana Induk 2005-2009	Kebutuhan Riil 2005-2009	Realisasi 2005-2007	Sasaran 2008-2009
Kantor SAR	unit	1	1	1	0
Meteorologi dan Geofisika	unit	8	8	8	0
Pos dan Telematika	unit	19	19	16	3

Sumber : Bapel BRR, 2007

o : Sudah terlaksana

Pembangunan Kantor SAR dan BMG dalam rencana induk ditargetkan 1 unit dan 8 unit dimana sasaran tersebut diharapkan telah terselesaikan pada akhir tahun 2007. Dari 19 unit Kantor Pos yang merupakan sasaran rencana induk 16 unit telah terealisasi sehingga diperkirakan masih 3 unit Kantor Pos yang dilanjutkan pembangunannya pada tahun 2008-2009.

Dalam kurun waktu 2005-2006, berbagai kegiatan untuk memfungsikan kembali prasarana transportasi dan telekomunikasi telah dilaksanakan untuk dapat memperlancar distribusi logistik, mobilisasi peralatan dan tenaga manusia bagi keperluan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi itu sendiri, sambil melakukan investigasi terhadap kebutuhan riil di lapangan. Bersamaan dengan itu, selanjutnya dipersiapkan pula studi-studi yang terkait dengan Master Plan dan Detailed Engineering Design untuk pengembangan berbagai sarana dan prasarana perhubungan.

Tabel III. 12
Permasalahan dan Rencana Tindak Lanjut Bidang Pemulihan Infrastruktur sub bidang Jalan dan Transportasi NAD - Nias

Bidang	Sub Bidang	Isu dan Masalah	Rencana Tindak Lanjut
BIDANG PEMULIHAN INFRASTRUKTUR	Jalan dan Transportasi	- Pembuatan jalan Lintas Barat NAD (Jalan Nasional) sepanjang 35 km. - Pembuatan jalan Lintas Tengah NAD (Jalan Nasional) sepanjang 164 km. - Pembuatan jalan Lintas Lainnya (Jalan Propinsi) sepanjang 165 km. - Pembuatan Jalan Propinsi P. Nias sepanjang 219 km. - Pembuatan jalan Kabupaten NAD dan Nias sepanjang 2569 km. - Pembangunan Terminal dan stasion/ol Damri sebanyak 5 unit. - Rehab dan rekon sarana keselamatan LLAJ (rambu, traffic-light, pagar, patok, lampu) sebanyak 325 unit. - Pembangunan Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB)	- mengembalikan dan memfungsikan jaringan transportasi darat dengan mengutamakan rehabilitasi dan rekonstruksi jaringan jalan arteri nasional dan provinsi di NAD dan Nias, serta mengembangkan sistem jaringan transportasi darat untuk evakuasi masyarakat apabila terjadi bencana. - mengembalikan dan memfungsikan pelabuhan dan bandar udara yang rusak, membuka dan memfungsikan kembali pelabuhan Lhokseumawe, Meulaboh untuk wilayah Barat dan Kruing (Malahayati), mengembangkan kapasitas Bandar Udara Sultan Iskandar Muda (SIM) dan Bandara Udara Cut Nyak Dhien di Meulaboh, serta meningkatkan kapasitas beberapa pelabuhan laut, merelokasi Pelabuhan Meulaboh dan Ulee Lheue.

Bidang	Sub Bidang	Isu dan Masalah	Rencana Tindak Lanjut
		sebanyak 2 unit. • Pengadaan bus bantuan sebanyak 8 unit. • Pembangunan Kantor Pos sebanyak 3 unit.	

Sumber : Bapel BRR, 2007

III.2.2 Energi dan Telekomunikasi

III.2.2.1 Energi dan Kelistrikan

Tabel III. 13
Sasaran Rencana Aksi Sub Listrik NAD - Nias

No	Program/Kegiatan	Satuan	Rencana Induk 2005-2009	Kebutuhan Riil 2005-2009	Realisasi 2005-2007	Sasaran 2008-2009
1	Sarana dan Prasarana Energi	pkt	12	**	**	***
2	Sarana dan Prasarana Ketenagalistrikan	pkt	13	**	**	***
3	Rehabilitasi dan pengembangan jaringan distribusi		tersebar	**	**	***
4	Pengadaan generator	pkt	7	**	**	***
5	Perbaikan kantor PT. PLN	pkt	5	**	**	***
6	Pengadaan PLTD Apung baru	pkt	1	**	**	***
7	Pengembangan Sistem Ketenagalistrikan NAD		tersebar	**	**	***
8	Pembangunan jaringan transmisi		tersebar	**	**	***
9	Pembangunan PLTA / PLTM	Unit	2	**	**	***
10	Pembangunan PLTG	Unit	1	**	**	***
11	Trasmission lines (SUTM dan SKTM)	Km	1.805	**	695	**
12	Distribution lines (SKTR)	Km	2.714	**	1.102	**
13	Stasiun Distribusi	Unit		**	557	**
14	Sambungan Pelanggan	Pg	119.253	**	136.380	**
15	Gardu Distribusi	Unit	883	**	535	**
16	Diesel	Unit	24	**	**	**
17	Bangunan	Buah	6	**	1	**
18	Infrastructure Energy NAD-Nias	Unit	*	**	**	**

Sumber : Bapel BRR, 2007

* : Tidak terinci / tercantum dalam Rencana Induk

** : Data belum tersedia

*** : Dilaksanakan oleh PLN

Program rehabilitasi dan rekonstruksi bidang energi dan listrik yang dilaksanakan oleh BRR lebih difokuskan pada pelayanan sambungan rumah untuk rumah-rumah yang baru dibangun, jaringan tegangan rendah (JTR), penggantian diesel-diesel pembangkit listrik yang rusak dan tidak fungsional dan sebagian jaringan tegangan menengah (JTM). Dari target 119.253 sambungan rumah, sampai dengan Desember 2006 telah dicapai pengadaan sebanyak 71.993 unit (48.1%). Pemasangan sambungan rumah terus dilaksanakan sesuai dengan progress penyelesaian pembangunan rumah bagi korban bencana tsunami. Pada tahun anggaran 2007, sasaran yang akan dicapai adalah pengadaan sambungan rumah sebanyak 61.927 unit (51.9%). Dengan demikian secara keseluruhan, target yang akan dicapai sampai dengan 2007 untuk pengadaan listrik (sambungan rumah) mencapai 133.920 unit atau melebihi target yang tercantum dalam Rencana Induk. Kelebihan alokasi ini dimaksudkan untuk memenuhi target sambungan bagi pembangunan rumah baru sebanyak 120.000 unit dan permintaan masyarakat lainnya seperti bangunan fasilitas umum, fasilitas

sosial, bangunan publik lainnya. Sebagai catatan: Kebijakan BRR selama ini adalah bahwa masyarakat korban tsunami dan gempa harus dibebaskan dari membayar Biaya Penyambungan (BP).

Dari target sasaran 2.394 km JTR dan 1.046 km JTM, sampai Desember 2006 telah dilaksanakan sebanyak 570 km JTR dan 357,75 km JTM. Pada tahun anggaran 2007 sasaran yang akan dicapai sepanjang 384,38 km JTR dan 217,81 km JTM. Dengan demikian masih terdapat sisa target sebesar 954,38 km JTR dan 470,44 km JTM. Sedangkan target sasaran 736 unit Gardu Distribusi (GD) dan 6 unit Gardu Hubung (GH), sampai Desember 2006 telah tercapai 278 GD dan 5 unit GH. Tahun anggaran 2007 sasaran yang akan dicapai sebanyak 260 unit GD dan 1 unit GH. Dengan demikian masih terdapat sisa target sebesar 198 unit GD.

Pembangunan pembangkit listrik dengan target 16 unit, sampai Desember 2006 telah berhasil dicapai 11 unit pembangkit listrik. Pada tahun anggaran 2007 tidak ada pengadaan dan pemasangan pembangkit listrik. Target pembangkit listrik tersebut belum termasuk target rekonstruksi pembangunan baru Pembangkit Listrik Tenaga Air Peusangan (PLTA) Peusangan dengan kapasitas 2X42 MW. Pembangunan PLTA Peusangan akan dibiayai JBIC dengan percepatan proses pinjaman sehingga pelaksanaannya dapat dimulai akhir tahun 2007. Sebagai tambahan dari pemenuhan target rekonstruksi tersebut, PT. PLN juga sudah memproses tender pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batu Bara sebesar 2X100 MW di kabupaten Nagan Raya. Disamping itu Departemen ESDM akan memproses tender pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) sebesar 2X20 MW di Seulawah, kabupaten Aceh Besar.

Untuk bangunan gedung layanan umum, dari sasaran target 6 unit bangunan gedung, BRR hanya akan membangun satu gedung pelayanan masyarakat di Merduati. Masih terdapat sisa target 5 gedung kantor termasuk kantor wilayah.

PT. PLN sebagai badan usaha mempunyai kewajiban untuk turut membiayai rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana tenaga listrik. Pembangunan kembali gedung kantor wilayah NAD harus dibiayai oleh PT. PLN. Demikian juga pembiayaan pembangunan gedung-gedung lainnya. Rehabilitasi sebagian JTM dan JTR dibiayai melalui dana PT. PLN demikian juga untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan ringan. Disamping itu sebagian perluasan sebagai bagian dari target rekonstruksi JTR dan JTM juga dibiayai dana APBN Departemen ESDM melalui program listrik desa.

Khusus untuk daerah-daerah yang tidak terjangkau jaringan listrik, BRR membiayai pengadaan 1.691 unit Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan 1 unit Pembangkit Listrik Mikro Hydro (PLTMH). Disamping itu Departemen ESDM melalui program Listrik Desa mengadakan 1.000 unit PLTS pada tahun anggaran 2006. Pada tahun anggaran 2007 sasaran yang akan dicapai 469 unit. Tahun anggaran 2008, perlu dilanjutkan pengadaan PLTS sebanyak 1.000 unit.

B. Energi

Sebagian besar rehabilitasi dan rekonstruksi yang berkaitan dengan penyediaan bahan bakar minyak (BBM) dilaksanakan oleh PT. Pertamina dan perusahaan swasta yang bergerak di bidang penyaluran BBM. Khusus untuk pembangunan Depo BBM di pulau Simeulue, BRR menggantikan peran Pemerintah Provinsi yang sedang collapse dalam kewajiban berkontribusi pembiayaan pembangunan Depo BBM di pulau tersebut. BRR membantu sepertiga (atau senilai Rp. 10 milyar) dari biaya pembangunan Depo BBM di Simeulue. Pada akhir Desember 2006, pembangunan Depo BBM Simeulue saat sudah mencapai 71 persen dan kontribusi BRR sebesar Rp. 10 milyar telah dibayarkan kepada kontraktor PT. Pertamina pada bulan Desember 2006.

Selain penanganan masalah BBM, BRR pada tahun anggaran 2005 dan 2006 melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi gedung dinas, gedung dan peralatan laboratorium, gedung balai latihan kerja (BLK) pada Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi NAD, pengadaan

peralatan pertambangan rakyat dan peralatan pengeboran sumur dalam. Selain itu BRR juga membangun kembali 3 unit gedung pemantau gunung api yang hancur berikut pengadaan peralatan pemantau gunung api.

Tabel III. 14
Sasaran Rencana Aksi Sub Energi NAD - Nias

No	Program/Kegiatan	Satuan	Rencana Induk 2005-2009	Kebutuhan Riil 2005-2009	Realisasi 2005-2007	Sasaran 2008-2009
1	Rekon Sarana dan Prasarana Energi	Pkt	15	**	**	***
2	Diklat ESDM	Pkt	2	**	**	***
3	Rehab / Pembangunan SPBU		tersebar	**	**	***
4	Pengadaan mobil tangki BBM	Pkt	2	**	**	***
5	Rehab / Pembangunan depot BBM		tersebar	**	**	***
6	Perbaikan kantor PT. Pertamina	Pkt	2	**	**	***

Sumber : Bapel BRR, 2007

** : Data belum tersedia

*** : Dilaksanakan oleh KL / Pertamina

Program kegiatan pada sub bidang energi berdasarkan data realisasi belum dilaksanakan sehingga Sasaran Kegiatan 2008-2009 pada masing-masing kegiatan seperti yang tercantum pada rencana induk.

III.2.2.2 Telekomunikasi

Untuk memenuhi kebutuhan pelayanan telekomunikasi masyarakat yang harus segera dipenuhi, maka BRR telah melaksanakan rehab 4.310 SST, yang merupakan capaian sampai dengan awal tahun 2007, meliputi wilayah Meulaboh, Simpang Peut, Kaway XVI. Sedangkan sisanya untuk wilayah yang lain akan ditangani oleh PT. TELKOM tbk.

Infrastruktur ICT (VSAT & Wifi base) telah dibangun di 21 lokasi (seluruh ibukota kabupaten di Propinsi NAD) dan selesai pada tahun 2006, sehingga sudah dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, rencana untuk ke depan akan dilakukan migrasi dari *Wifi* ke *Wimax* karena merupakan dasar pemikiran awal bahwa NAD adalah propinsi Cyber pertama di Indonesia. Hal ini merupakan sasaran baru yang dilakukan ke deputian Infrastruktur, Lingkungan dan Pemeliharaan yaitu terciptanya pemerintah dan masyarakat dimana teknologi, digunakan dengan tujuan untuk meningkatkan akses dan distribusi informasi pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat, bisnis, pegawai, dan departemen lainnya serta untuk meningkatkan kinerja pemerintahan itu sendiri, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat (target *e-government* dan *e-community*). Migrasi ini rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2008.

Tabel III. 15
Sasaran Rencana Aksi Sub Telekomunikasi NAD - Nias

No	Program/Kegiatan	Satuan	Rencana Induk 2005-2009	Kebutuhan Riil 2005-2009	Realisasi 2005-2007	Sasaran 2008-2009
	Pos dan Telekomunikasi					
1	Fastel Desa PFS-PASTI dan Radio	unit	143	**	**	**
2	Rehab/Rekonstruksi BMF UPT Postel	unit	1	**	**	**
3	Rehab/rekonstruksi PS RRI-TVRI	paket	9	**	**	**
4	Radio Broadcast EWS	paket	1	**	**	**
5	Fasilitas Telematika		*	12	4	8
6	Pemb Infrastruktur WIMAX Prov. NAD dan P Nias		*	**	**	**

Sumber : Bapel BRR, 2007

* : Tidak terinci / tercantum dalam Rencana Induk
 ** : Data belum tersedia

Sasaran Kegiatan 2008-2009 sub bidang telekomunikasi yaitu Fastel Desa PFS-PASTI dan Radio sejumlah 143 unit, Rehab/Rekonstruksi BMF UPT Postel sejumlah 1 unit, Rehab/rekonstruksi PS RRI-TVRI 9 unit, Radio Broadcast EWS 1 unit, dan Fasilitas Telematika 8 unit.

Tabel III. 16
Permasalahan dan Rencana Tindak Lanjut Bidang Pemulihan Infrastruktur sub bidang Energi dan Telekomunikasi NAD - Nias

Bidang	Sub Bidang	Isu dan Masalah	Rencana Tindak Lanjut
BIDANG PEMULIHAN INFRASTRUKTUR	Energi dan Telekomunikasi	- Pembangunan Sarana dan Prasarana Energi sebanyak 12 paket. - Pembangunan Sarana dan Prasarana Ketenagalistrikan sebanyak 13 paket. - Rehabilitasi dan pengembangan jaringan distribusi, sasaran tersebar. - Pengadaan generator sebanyak 7 paket. - Perbaikan kantor PT. PLN sebanyak 5 paket. - Pengadaan PLTD Apung baru sebanyak 5 paket. - Pengembangan Sistem Ketenagalistrikan NAD, sasaran tersebar. - Pembangunan jaringan transmisi sasaran tersebar. - Pembangunan PLTA / PLTM sebanyak 2 unit. - Pembangunan PLTG sebanyak 2 unit. - Pembangunan Transmission lines (SUTM dan SKTM) sepanjang 1.110 km. - Pembangunan	- pembangunan jaringan telekomunikasi menggunakan teknologi <i>wireless line</i> - rehabilitasi fasilitas telekomunikasi yang ada - pemanfaatan teknologi nirkabel untuk fasilitas komunikasi baru - memberikan kemudahan akses telekomunikasi - menjadikan Stasiun RRI dan TVRI Stasiun Banda Aceh sebagai media sosialisasi dalam melakukan proses peringatan dini bencana alam - mempercepat pengadaan dan pembangunan kembali prasarana dan sarana pos - pemulihan penyediaan energi dan ketenagalistrikan secara memadai - mengupayakan sistem jaringan penyaluran energi dan ketenagalistrikan - mengupayakan diversifikasi sumber energi listrik dari PLTD ke PLTA dan PLTG termasuk mengoperasikan kembali PLTG Arun (60 MW).

Bidang	Sub Bidang	Isu dan Masalah	Rencana Tindak Lanjut
		Distribution lines (SKTR) sepanjang 1.612 km. • Penyediaan diesel sebanyak 24 unit. • Bangunan sebanyak 5 buah. • Pembangunan Fastel Desa PFS-PASTI dan Radio sebanyak 143 unit. • Rehab/Rekonstruksi BMF UPT Postel sebanyak 1 unit. • Rehab/rekonstruksi PS RRI-TVRI sebanyak 9 paket. • Pengadaan Radio Broadcast EWS sebanyak 1 paket. • Pengadaan Fasilitas Telematika sebanyak 8 paket.	

Sumber : Bapel BRR, 2007

III.2.3 Infrastruktur Sumber Daya Air

Tabel III. 17
Sasaran Rencana Aksi Sub Sumber Daya Air NAD -Nias

Program/ Kegiatan		Satuan	Rencana Induk 2005-2009	Kebutuhan Riil 2005-2009	Realisasi 2005-2007	Sasaran 2008-2009
1	Irigasi	ha	62.995	121.884	108.181	13.703
2	Pengendalian Banjir	m'	138.795	132.938	100.189	32.749
3	Pengaman Pantai	m'	69.057	139.745	72.454	67.291

Sumber : Bapel BRR, 2007

Sasaran Kegiatan 2008-2009 Bidang Sumber Daya Air yaitu dari 109.978 ha kebutuhan riil rehabilitasi dan rekonstruksi sub bidang Irigasi, sampai dengan Mei 2007 telah terealisasi 108.181 ha sehingga sasaran penyelesaian rehabilitasi rekonstri sebesar 1.797 ha. Dari 103.852 ha kebutuhan riil rehabilitasi dan rekonstruksi sub bidang Pengendalian Banjir, sampai dengan Mei 2007 telah terealisasi 100.189 ha sehingga sasaran penyelesaian rehabilitasi rekonstri sebesar 38.606 ha. Dari 84.230 ha kebutuhan riil rehabilitasi dan rekonstruksi sub Pengaman Pantai, sampai dengan Mei 2007 telah terealisasi 72.454 ha sehingga sasaran penyelesaian rehabilitasi rekonstri sebesar 11.776 ha.

Tabel III. 18
Permasalahan dan Rencana Tindak Lanjut Bidang Pemulihan Infrastruktur
sub bidang Sumber Daya Air NAD - Nias

Bidang	Sub Bidang	Isu dan Masalah	Rencana Tindak Lanjut
BIDANG PEMULIHAN INFRASTRUKTUR	Sumber daya air	• Penyelesaian rehab rekons Irigasi 1.797 ha. • Penyelesaian rehab rekons Pengendalian Banjir 38.606 ha. • Penyelesaian rehab rekons Pengaman Pantai 11.776 ha.	• Prioritas penanganan prasarana pengendalian banjir yang diarahkan pada wilayah-wilayah pusat kegiatan ekonomi dan permukiman serta menjaga keterpaduan fungsi dengan sistem drainase kota • Mengarahkan irigasi untuk mendukung pulihnya kegiatan usaha tani dalam arti luas • memprioritaskan daerah irigasi yang bersifat <i>quick yielding</i> • Melindungi wilayah pantai strategis dari ancaman abrasi • menyelaraskan pendekatan konstruksi dengan pendekatan vegetatif • memprioritaskan dukungan penyelesaian masalah kontaminasi dan buruknya drainase pada lahan-lahan pertanian pada wilayah pantai Barat.

Sumber : Bapel BRR, 2007

III.2.4 Air Minum dan Sanitasi

Tabel III. 19
Sasaran Rencana Aksi Sub Air Minum dan Sanitasi NAD - Nias

Program/ Kegiatan	Satuan	Rencana Induk 2005-2009	Kebutuhan Riil 2005-2009	Realisasi 2005-2007	Sasaran 2008-2009
a Air Bersih	Lt/dtk	3.256	1.467	480	2.976
b Pembuangan Limbah	Rumah	543.217	365.243	291.710	251.507
c Sampah	Rumah	543.217	**	**	**
d Drainase	m'	106.347	27.563	26.202	79.752

Sumber : Bapel BRR, 2007

** : Data belum tersedia

Sasaran Rekonstruksi 2008-2009 yaitu Prasarana Air Bersih dengan kapasitas 2.976 Lt/dtk, Rekonstruksi Prasarana Pembuangan Limbah untuk 251.507 Rumah, Rekonstruksi Prasarana persampahan untuk 541.552 rumah, dan Drainase sepanjang 79.752m.

Tabel III. 20
Permasalahan dan Rencana Tindak Lanjut Bidang Pemulihan Infrastruktur sub
bidang Sumber Daya Air NAD - Nias

Bidang	Sub Bidang	Isu dan Masalah	Rencana Tindak Lanjut
BIDANG PEMULIHAN INFRASTRUKTUR	Air minum dan sanitasi	• Penyelesaian Rekons prasarana Air Bersih dengan kapasitas 2.976 Lt/dtk. • Penyelesaian Rekons prasarana Pembuangan Limbah untuk 251.507 rumah. • Penyelesaian Rekons prasarana persampahan untuk 541.552 rumah. • Penyelesaian Rekons prasarana Drainase sepanjang 79.752 m.	• Di perkotaan rehabilitasi dan fungsionalitas instalasi pengolahan air dan jaringan distribusi utama dan terpenuhinya kebutuhan air minum minimal untuk lokasi-lokasi pengungsian yang didasarkan pada kebutuhan masyarakat • Pelaksanaan kegiatan perbaikan/pembangunan diutamakan untuk dilakukan secara kontraktual mengingat skala pekerjaan yang relatif besar • di daerah pedesaan yang skala pekerjaannya lebih kecil dan terpisah (<i>scattered</i>), didorong untuk menggunakan teknologi sederhana berdasarkan pendekatan masyarakat. • rehabilitasi dan rekonstruksi prasarana air limbah meliputi penanganan air limbah untuk daerah-daerah permukiman kembali (dengan atau tanpa relokasi) yang dilakukan dengan pendekatan <i>best practice</i> • Di daerah perkotaan, kegiatan perbaikan atau pembangunan sarana air limbah dengan sistem perpipaan diutamakan untuk dilakukan secara kontraktual. • memfungsikan saluran primer maupun saluran sekunder dan menjaga keterpaduan antara pembangunan prasarana drainase kota dengan prasarana pengendali banjir lainnya

Sumber : Bapel BRR, 2007

III.2.5 Fasilitas dan Bangunan Publik

Tabel III. 21
Sasaran Rencana Aksi Sub Fasilitas dan Bangunan Publik NAD - Nias

Program/ Kegiatan		Satuan	Rencana Induk 2005-2009	Kebutuhan Riil 2005-2009	Realisasi 2005-2007	Sasaran 2008-2009
1	Pusat Pelatihan Mitigasi Bencana Banda Aceh	unit	*	1	4	0
2	<i>Escape Hill</i>	unit	5	0	0	5
3	<i>Escape Building</i>	unit	*	5	5	0
4	Museum Tsunami Banda Aceh	unit	*	1	2	0
5	Pusat Kualitas Struktur dan Lab	unit	*	1	1	0
6	Koordinasi dan Konsultasi program dan Proyek Infrastruktur NAD-Nias	pkt	*	1	0	1
7	Bangunan Pemerintah	pkt	*	1	**	**
8	Pasar	pkt	1	**	**	**

Sumber : Bapel BRR, 2007

* : Tidak terinci / tercantum dalam Rencana Induk

** : Data belum tersedia

0 : Sudah terlaksana

Sasaran 2008-2009 yang masih harus dilanjutkan pada sub bidang Fasilitas dan Bangunan Publik adalah Pembanguna *Escape Hill* sebanyak 5 unit, dan Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi program dan Proyek Infrastruktur NAD-Nias sebanyak 1 unit.

Tabel III. 22
Permasalahan dan Rencana Tindak Lanjut Bidang Pemulihan Infrastruktur sub bidang Fasilitas dan Bangunan NAD - Nias

Bidang	Sub Bidang	Isu dan Masalah	Rencana Tindak Lanjut
BIDANG PEMULIHAN INFRASTRUKTUR	Fasilitas dan bangunan publik	Pembangunan <i>Escape Hill</i> sebanyak 5 unit.	Bangunan fasilitas umum yang diamanatkan perlu dibangun adalah berupa fasilitas yang terkait dengan fasilitas umum penyelamatan jiwa manusia, jika terjadi lagi bencana tsunami, yaitu bukit penyelamat (<i>'Escape Hills'</i>) dan Bangunan penyelamat (<i>'Escape Buildings'</i>) serta bangunan museum tsunami, yang akan dibangun dibeberapa tempat sesuai dengan potensi kesesuaian untuk tujuan dimaksud.

Sumber : Bapel BRR, 2007

III.3 Bidang Sosial Kemasyarakatan

Bidang sosial Kemasyarakatan meliputi beberapa kelompok kegiatan yaitu, Pendidikan, Kesehatan, Agama, Sosial, Budaya dan Sumberdaya Manusia (Pemberdayaan Perempuan, Kependudukan dan Keluarga Berencana, serta Pemuda dan Olahraga).

III.3.1 Pendidikan, Kesehatan dan Pemberdayaan Perempuan

Sub bidang Pendidikan

Sesuai dengan rencana induk, pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam bidang pendidikan berupa program pembangunan fasilitas (gedung) untuk pendidikan darurat/ sementara, program pendidikan anak usia dini, memantapkan program pendidikan

dasar, menengah dan pendidikan tinggi serta penelitian dan pengembangan pendidikan di wilayah bencana Provinsi NAD dan Kepulauan Nias (Kabupaten Nias dan Nias Selatan).

Dalam pelaksanaannya pada saat tanggap darurat, capaian pelaksanaan telah melebihi target rencana induk, hal ini disebabkan kebutuhan real di lapangan serta melimpahnya bantuan dari masyarakat dunia terutama Donor dan NGO.

Secara terperinci, kemajuan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam bidang pendidikan akan diuraikan dan disajikan dalam beberapa Tabel berikut berdasarkan kelompok program/kegiatannya.

Tabel III. 23
Sasaran Rencana Aksi Sub Bidang Pendidikan NAD - Nias
(Program Pendidikan Anak Usia Dini)

Program/ Kegiatan		Satuan	Rencana Induk 2005-2009	Kebutuhan Riil 2005-2009	Realisasi 2005-2007	Sasaran 2008-2009
A	Pembangunan Gedung rurat/semntara	Unit/ Ruang	12	12	295	0
B	Program Pendidikan Anak Usia Dini/TK					
1	Rehabilitasi dan pembangunan TK	Unit	101	101	63	38
2	Perabot/Peralatan	set	125	125	106	19
3	Materi belajar mengajar		125	125	126	0

Sumber : Bapel BRR, 2007

0 : Sudah terlaksana

Berdasarkan Rencana Induk direncanakan sejumlah 12 unit namun dalam realisasi mencapai 295 unit 24 kali nya (2.458%). Demikian pula dengan penyediaan materi belajar mengajar sampai dengan akhir tahun 2007 yang telah melampaui target realisasi (100.8%). Pada rehabilitasi dan pembangunan TK dan bantuan peralatannya, terlihat target realisasi lebih dari separuhnya sampai dengan tahun 2006. Realisasi ini terutama berasal dari pendanaan yang bersumber dari bantuan NGO dan Donor (non APBN). Sasaran 2008-2009 Program Pendidikan Anak Usia Dini yang masih harus dilanjutkan yaitu Rehabilitasi dan pembangunan TK 38 unit dan Perabot/Peralatan 19 set.

Tabel III. 24
Sasaran Rencana Aksi Sub Bidang Pendidikan NAD – Nias
(Program Pendidikan Menengah)

Program/ Kegiatan		Satuan	Rencana Induk 2005-2009	Kebutuhan Riil 2005-2009	Realisasi 2005-2007	Sasaran 2008-2009
A	SMA	UNIT				
1	Pembangunan RKB	Paket	530	530	269	261
2	Pembangunan UGB Reguler & Berasrama	Unit	42	42	40	2
3	Rehab	skl	148	148	76	72
4	Meubeler	pkt	90	90	85	5
5	Buku perpustakaan	Expl	973.208	973.208	487.000	486.208
6	Lab IPA dan Komputer	pkt	140	140	44	96
7	Ruang Serbaguna/RPL	pkt	100	100	42	58
8	Fasilitas Ibadah	pkt	100	100	**	100
9	Peralatan Olahraga dan Seni	pkt	100	100	69	31
10	Pengembangan sekolah bertaraf International	skl	20	20	7	13

	Program/ Kegiatan	Satuan	Rencana Induk 2005-2009	Kebutuhan Riil 2005-2009	Realisasi 2005-2007	Sasaran 2008-2009
11	Operasional dan pemeliharaan	skl	1.120	1.120	**	1.120
12	Peningkatan kapasitas manajemen sekolah	skl/org	92	92	360	**
B	SMK	UNIT				
1	Rehab gedung	unit	14	14	1	13
2	Pembangunan	unit	3	3	1	2
3	Pembangunan RKB	ruang	34	34	**	34
4	Pendidikan dan pelatihan siswa	siswa	240	240	100	140
5	Bantuan Peralatan dan meubeler	lokasi	67	67	**	67
6	bantuan BOP (buku, bahan ajar, PBS)	skl	152	152	**	152
7	Vocational Training	Org	*	**	10.975	**
C	PENDIDIKAN DEPAG (MADRASAH)	UNIT				
1	Pembangunan RKB madrasah		85	85	291	**
2	Pembangunan UGB Madrasah		52	52	32	20
3	Pembangunan BKG Madrasah		*	**	31	**

Sumber : Bapel BRR, 2007

* : Sama seperti Rencana Induk

** : Data belum tersedia

Pada pendidikan menengah, program diklasifikasikan dalam tiga bagian yaitu pendidikan SMA, SMK, dan Madrasah (Tsanawiyah dan Aliyah). Pencapaian realisasi terlihat pada beberapa program baik yang dibiayai oleh sumber pendanaan APBN maupun Non APBN. Pada pendidikan SMA, pencapaian lebih dari 100% dari rencana induk terlihat pada program peningkatan kapasitas manajemen sekolah (391.3%). Selanjutnya pada program lain, realisasi hampir seluruhnya mencapai di atas 50% dari rencana induk sampai dengan tahun 2007. Pencapaian program di bawah 50% adalah pada pembangunan fasilitas ibadah dan operasional dan pemeliharaan (0%), Laboratorium IPA dan komputer (31.4%) dan ruang serbaguna (42.0%).

Selanjutnya pada program pendidikan SMK, pencapaian target dari rencana induk masih di bawah 50%. Pencapaian tertinggi adalah pada program pendidikan dan pelatihan siswa (41.7%), pembangunan sekolah (33.3%) dan rehab gedung (7%). Selanjutnya pada program pembangunan RKB meubeler dan bantuan BOB belum ada realisasi dari rencana induk.

Program pendidikan madrasah (Departemen Agama) realisasi pembangunan RKB dan UGB masing-masing mencapai 342.4% dan 61.5% dari rencana induk sampai dengan tahun 2007. Selanjutnya pembangunan BKG madrasah mencapai 31 buah, namun tidak terdapat dalam rencana induk.

Sasaran 2008-2009 Program Pendidikan Menengah yang masih harus dilanjutkan yaitu:

1. SMA. Pembangunan RKB 261 unit, Pembangunan UGB Reguler & Berasrama 2 unit, Rehab 72 sekolah, Meubeler 5 paket, Buku perpustakaan 486.208 unit, Lab IPA dan Komputer 96 unit, Ruang Serbaguna/RPL 58 unit, Fasilitas Ibadah 100 unit, Peralatan Olahraga dan Seni 31 unit, Pengembangan sekolah bertaraf International 13 unit, Operasional dan pemeliharaan 1.120 skl.
2. SMK. Rehab gedung 13 unit, Pembangunan 2 unit, Pembangunan RKB 34 ruang, Pendidikan dan pelatihan siswa 140 orang, Bantuan Peralatan dan meubeler 67 lokasi, bantuan BOP (buku, bahan ajar, PBS) 152 skl.

3. Madrasah. Pembangunan UGB Madrasah 20 unit

Program dan kegiatan pendidikan tinggi, menitikberatkan pada kegiatan fisik dan pemberian santunan/bantuan berupa beasiswa pendidikan kepada mahasiswa/dosen yang melakukan studi. Hampir seluruh kegiatan pada program ini telah mencapai realisasi yang telah ditetapkan dalam rencana induk (pencapaian lebih dari 100%). Namun demikian, terdapat beberapa program yang belum terealisasi yaitu perbaikan dan perluasan asrama mahasiswa (realisasi 0%) sampai dengan tahun 2007.

Tabel III. 25
Sasaran Rencana Aksi Sub Bidang Pendidikan NAD - Nias
(Program Pendidikan Tinggi)

Program/ Kegiatan		Satuan	Rencana Induk 2005-2009	Kebutuhan Riil 2005-2009	Realisasi 2005-2007	Sasaran 2008-2009
	PENDIDIKAN TINGGI (4 PT + swasta)	pts				
1	Penyediaan dosen bantu 6 bulan	OB	900	900	0	900
2	Kompensasi SPP 2004/2005	Mhs	-	-	0	0
3	Beasiswa mahasiswa korban tsunami/kurang Mampu/ikatan dinas	Mhs	13.500	13.500	40.746	0
4	Penggantian ruang kantor dan Laboratorium	pkt	4	4	4	0
5	Penggantian meubeler kuliah, lab & kantor	pkt	17	17	16	1
6	Perbaikan Mess Dosen	pkt	2	2	2	0
7	Penggantian Meubeler asrama mahasiswa	pkt	2	2	2	0
8	Perbaikan Asrama Mahasiswa	m2	5.900	5.900	0	5900
9	Penggantian/pengadaan peralatan Lab	pkt	26	26	8	18
10	Penambahan Luas asrama mahasiswa	pkt	1	1	0	1
11	Penggantian Kendaraan Dinas	unit	10	10	8	2
12	Santunan dosen/tenaga adm PT	org	213	213	500	0
13	Penggantian Bus kampus	unit	15	15	0	15
14	Perbaikan pagar kampus	m2	5.200	5.200	0	5200
15	Perbaikan jalan Kampus	pkt	1	1	2	0
16	Beasiswa dan Pelatihan Dosen S2/S3	org	150	150	369	0
17	Pembangunan Rumah Dosen	pkt	1	1	5	0
18	Pembuatan sumur dan jaringan air bersih	unit	3	3	3	0
19	Pembangunan Pusat Pelatihan Unsyiah	pkt	1	1	1	0
20	Meubeler Pusat Pelatihan Unsyiah	pkt	1	1	1	0
21	Rehab gedung PGSD Unsyiah	pkt	1	1	2	0
22	Meubeler PT	pkt	1	1	8	0
23	Perbaikan gedung pendidikan PT	pkt	7	7	23	0
24	Pembangunan kembali gedung kuliah/lab PTN & PTS	pts	3	3	7	0

Sumber : Bapel BRR, 2007

* : Sama seperti Rencana Induk

0 : Sudah terlaksana

Sasaran 2008-2009 Program Pendidikan Tinggi yang masih harus dilanjutkan yaitu: Penyediaan dosen bantu 6 bulan 900 orang, Penggantian meubeler kuliah, lab & kantor 1 pkt, Perbaikan Asrama Mahasiswa 5.900 m², Penggantian/pengadaan peralatan Lab 18 pkt, Penambahan Luas asrama mahasiswa 1 pkt, Penggantian Kendaraan Dinas 2, Penggantian Bus kampus 15 unit.

Tabel III. 26
Sasaran Rencana Aksi Sub Bidang Pendidikan NAD – Nias
(Program Penelitian dan Pengembangan Pendidikan)

	Program / Kegiatan	Satuan	Rencana Induk 2005-2009	Kebutuhan Riil 2005-2009	Realisasi 2005-2007	Sasaran 2008-2009
1	Teaching Grant	Keg	56	*	51	5
2	Riset	Keg	56	*	81	0
3	Bantuan Praktek Mahasiswa & ekstra kurikuler	OB	1.800	*	837	963
4	Akreditasi, sertifikasi, dan pelatihan data base	Keg	-	*	40	0
5	TOEFL dan POT dosen	Org	-	*	180	0
6	Matrikulasi mahasiswa Undangan	Org	-	*	540	0
7	Buku Pustaka	Pkt	59	*	11	48
8	Monitoring dan pengawasan	Keg	184	*	8	176

Sumber : Bapel BRR, 2007

* : Sama seperti Rencana Induk

o : Sudah terlaksana

Sampai dengan tahun 2007, realisasi kegiatan riset mencapai 144.6% dan teaching grant mencapai 91.1% dari rencana induk dalam program penelitian dan pengembangan pendidikan. Selanjutnya bantuan praktek mahasiswa, realisasi mencapai 46.5%, pengadaan buku pustaka (18.6%) serta monitoring dan pengawasan baru mencapai 4.3% dari rencana induk.

Sasaran 2008-2009 Program Penelitian dan Pengembangan Pendidikan yang masih harus dilanjutkan yaitu :Teaching Grant 5 keg, Bantuan Praktek Mahasiswa & ekstra kurikuler 963 org, Buku Pustaka 48 pkt, Monitoring dan pengawasan 176 keg.

Tabel III. 27
Permasalahan dan Rencana Tindak Lanjut Bidang Sosial Kemasyarakatan
sub bidang Pendidikan NAD - Nias

Bidang	Sub Bidang	Isu dan Masalah	Rencana Tindak Lanjut
BIDANG SOSIAL KEMASYARAKATAN	Pendidikan	TK - Rehabilitasi dan pembangunan TK sebanyak 38 unit. - Pengadaan Perabot/Peralatan sebanyak 19 set. SMA - Pembangunan RKB 261 unit. - Pembangunan UGB Reguler & Berasrama 2 unit. - Rehab 72 paket. - Penyediaan Meubeler, sebanyak 5 paket.	- menyelenggarakan pendidikan darurat bagi peserta didik yang terkena bencana dengan menyediakan fasilitas pendidikan di hunian sementara dan memperluas jangkauan pelayanan pendidikan bagi semua penduduk usia sekolah. - penyediaan fasilitas pendidikan di hunian sementara - rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas pendidikan dengan memperhatikan kebutuhan aksesibilitas peserta didik khususnya untuk penyandang cacat - perekrutan tenaga pendidik untuk

Bidang	Sub Bidang	Isu dan Masalah	Rencana Tindak Lanjut
		• Pengadaan Buku perpustakaan sebanyak 486.208 Expl • Lab IPA dan Komputer sebanyak 96 pkt • Ruang Serbaguna/RPL sebanyak 58 pkt • Pengadaan Fasilitas Ibadah 100 pkt • Penyediaan Peralatan Olahraga dan Seni 31 pkt • Pengembangan sekolah bertaraf International 13 skl • Operasional dan pemeliharaan 1.120 skl <u>SMK</u> • Rehab gedung 13 unit • Pembangunan 2 unit • Pembangunan RKB sebanyak 34 ruang • Pendidikan dan pelatihan siswa sebanyak 140 orang • Bantuan Peralatan dan meubeler sebanyak 67 set • Penyediaan bantuan BOP (buku, bahan ajar, PBS sebanyak 152 paket <u>PENDIDIKAN DEPAG (MADRASAH)</u> • Pembangunan UGB sebanyak 20 unit <u>PENDIDIKAN TINGGI (4 PT + swasta)</u> • Penyediaan dosen bantu 6 bulan sebanyak 900 OB • Penggantian meubeler kuliah, lab & kantor sebanyak 1 PAKET • Perbaikan Asrama Mahasiswa seluas 5.900 m2 • Penggantian/pengadaan peralatan Lab sebanyak 18 pkt • Penambahan Luas asrama mahasiswa sebanyak 1 paket • Penggantian Kendaraan Dinas sebanyak 2 unit • Penggantian Bus kampus sebanyak 15 unit • Perbaikan pagar kampus seluas 5.200 m2 <u>LITBANG</u> • Teaching Grant sebanyak 5 KEG • Bantuan Praktek Mahasiswa & ekstra kurikuler sebanyak 963 ob	mengganti tenaga didik yang meninggal akibat bencana • penampungan peserta didik yang tidak mempunyai orang tua lagi di panti asuhan • serta memobilisasi sumberdaya dan pemberdayaan semua potensi pemerintah, masyarakat dan swasta

Bidang	Sub Bidang	Isu dan Masalah	Rencana Tindak Lanjut
		- Kebutuhan Buku Pustaka sebanyak 48 pkt - Kebutuhan Monitoring dan pengawasan sebanyak 176 keg	

Sumber : Bapel BRR, 2007

Sub Bidang Kesehatan

Berdasarkan Rencana Induk pemulihan bidang Kesehatan memuat tentang beberapa kegiatan yang meliputi upaya pengelolaan, pemeliharaan, pemulihan, pencegahan, pemberantasan penyakit, penyehatan masyarakat, kefarmasian, peralatan, perbaikan gizi, penelitian, kebijakan dan lain-lain.

Utamanya untuk program yang berkaitan dengan pemeliharaan dan pemulihan kesehatan dilaksanakan pada periode tahun 2005-2006, sedangkan perbaikan manajemen dan peningkatan pelayanan kesehatan dilaksanakan pada umumnya dilaksanakan pada tahun 2007. Rata-rata pencapaian realisasi hingga tahun 2007 telah melampaui amanat rencana induk (100%) untuk hampir seluruh program.

Secara terperinci, kemajuan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam bidang kesehatan akan diuraikan dan disajikan dalam beberapa Tabel berikut berdasarkan kelompok program/kegiatannya.

Pelaksanaan Program upaya pemeliharaan dan pemulihan kesehatan, capaiannya rata-rata telah melebihi rencana induk yang telah ditetapkan. Untuk kegiatan pengadaan alat kedokteran, operasional dan pemeliharaan rumah sakit serta pendidikan dan pelatihan teknis realisasinya telah mencapai lebih dari 100% dan utamanya dilaksanakan pada tahun 2005-2006. Namun demikian masih terdapat beberapa kegiatan yang sampai dengan tahun 2007 belum terealisasi sepenuhnya seperti pembangunan rumah dinas (4.8%), pengadaan kendaraan(7.2%) maupun pembangunan dan perawatan gedung kesehatan dan pendidikan.

Tabel III. 28
Sasaran Rencana Aksi Sub Bidang Kesehatan NAD - Nias
(Program Upaya Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan)

	Program/ Kegiatan	Satuan	Rencana Induk 2005-2009	Kebutuhan Riil 2005-2009	Realisasi 2005-2007	Sasaran 2008-2009
1	Pendidikan dan Pelatihan Teknis	pkt	1	1	250	0
2	Pembangunan Rumah Negara	pkt	*	**	**	**
-	Rumah Dinas	pkt	21	21	1	20
-	Rumah Dokter dan Paramedis Puskesmas	pkt	42	42	117	0
3	Pembangunan dan Perawatan Gedung Kesehatan/Pendidikan	pkt	*	**	**	**
-	Kantor Dinas Kesehatan	pkt	5	5	15	0
-	Rumah Sakit	pkt	9	9	31	0
-	Pustu	pkt	174	174	124	50
-	Polindes	pkt	700	700	236	464
-	Klinik	pkt	6	6	5	1
-	BBPOM	pkt	3	3	**	3
-	Laboratorium Kesehatan	pkt	1	1	1	0
4	Operasional Dan Pemeliharaan Rumah Sakit	pkt	4	4	12	0
5	Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan, Dan KB	unit	4	4	43	0
6	Pengadaan Kendaraan	unit	69	69	5	64

Program/ Kegiatan	Satuan	Rencana Induk 2005-2009	Kebutuhan Riil 2005-2009	Realisasi 2005-2007	Sasaran 2008-2009
Roda4/Roda 6/Roda 10 (ambulance)					

Sumber : Bapel BRR, 2007

* : Tidak terinci / tercantum dalam Rencana Induk

** : Data belum tersedia

o : Sudah terlaksana

Sasaran 2008-2009 Program Program Upaya Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan yang masih harus dilanjutkan yaitu: Rumah Dinas 20 pkt, Rumah Dokter dan Paramedis Puskesmas 32 pkt, Kantor Dinas Kesehatan 3 pkt, Pustu 123 pkt, Polindes 640 pkt, Klinik 1 pkt, BBPOM 3 pkt, Laboratorium Kesehatan 1 pkt, Pengadaan Kendaraan Roda4/Roda 6/Roda 10 (ambulance) 64 unit.

Pada Program pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah, terdiri dari dua kegiatan dengan capaian yang telah melebihi rencana induk yang telah ditetapkan. Untuk kegiatan bantuan penanggulangan bencana alam dan kerusakan dalam pencegahan dan pemberantasan penyakit menular telah merealisasikan 2 paket dari 1 paket yang diamanatkan dalam rencana induk (200%) sedangkan pembangunan kantor kesehatan pelabuhan baru merealisasikan 50% dari rencana induk sebesar 2 paket.

Tabel III. 29
Sasaran Rencana Aksi Sub Bidang Kesehatan NAD - Nias
(Program Penyelenggaraan Pencegahan dan Pemberantasan
Penyakit Menular dan Wabah)

Program/ Kegiatan	Satuan	Rencana Induk 2005-2009	Kebutuhan Riil 2005-2009	Realisasi 2005-2007	Sasaran 2008-2009
1 Bantuan Penanggulangan Bencana Alam dan Kerusakan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular	pkt	1	**	24	o
2 Pembangunan Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP)	pkt	2	**	3	o

Sumber : Bapel BRR, 2007

** : Data belum tersedia

o : Sudah terlaksana

Sasaran 2008-2009 Program Penyelenggaraan Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular dan Wabah yang masih harus dilanjutkan yaitu : Pembangunan Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) 1 pkt.

Realisasi program pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan seluruhnya telah mencapai lebih dari 100% dari rencana induk. Pengadaan peralatan medis dan pembangunan gedung farmasi/obat telah dilaksanakan seluruhnya pada tahun 2006 dan diteruskan lagi pada tahun 2007. Demikian pula dengan program peningkatan kesehatan masyarakat. Pembangunan fasilitas puskesmas dan pelayanan kesehatan di pengungsian telah terealisasi masing-masing sebesar 148.4% dan 276.4% sampai dengan tahun 2007.

Tabel III. 30
Sasaran Rencana Aksi Sub Bidang Kesehatan NAD - Nias
(Program Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan dan Program Peningkatan
Kesehatan Masyarakat)

Program/ Kegiatan		Satuan	Rencana Induk 2005-2009	Kebutuhan Riil 2005-2009	Realisasi 2005-2007	Sasaran 2008-2009
A	Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan		6	6	21	0
1	Pengadaan Peralatan Medis di Laboratorium Daerah dan Balai Pengawasan Obat dan Makanan	pt	1	1	2	0
2	Pembangunan Gudang Farmasi/Obat	pt	5	5	19	0
B	Peningkatan Kesehatan Masyarakat		119	119	298	0
1	Pembangunan Fasilitas Pelayanan Kesehatan/Puskesmas	unit	64	64	136	0
2	Pelayanan Kesehatan di Pengungsian/Poskeslit	unit	55	55	162	0

Sumber : Bapel BRR, 2007

o : Sudah terlaksana

Sasaran Program Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan dan Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat telah terealisasi semua.

Demikian pula dengan program pengkajian dan penelitian bidang kesehatan. Realisasi telah mencapai 100% untuk seluruh kegiatannya. Bahkan pada program perbaikan gizi masyarakat, realisasi mencapai lima kali lipat dari amanat rencana induk (lebih dari 500%) dan telah dilaksanakan pada 21 kota/kabupaten di Provinsi NAD dan Kepulauan Nias. Selanjutnya pada program pengembangan pendidikan tenaga kesehatan, seluruh kegiatan telah melampaui amanat rencana induk (lebih dari 100%) kecuali pada kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Institusi Pendidikan dan Pengembangan Kesehatan yang baru mencapai realisasi 33% (2 unit) dari amanat rencana induk.

Sasaran 2008-2009 Program Pengkajian & Penelitian Terapan di Bidang Kesehatan, Pengembangan Pendidikan Tenaga Kesehatan & Program Perbaikan Gizi Masyarakat yang masih harus dilanjutkan yaitu Pembangunan Sarana dan Prasarana Institusi Pendidikan dan Pengembangan Kesehatan 4 pkt.

Tabel III. 31
Sasaran Rencana Aksi Sub Bidang Kesehatan NAD - Nias
(Program Pengkajian & Penelitian Terapan di Bidang Kesehatan, Pengembangan
Pendidikan Tenaga Kesehatan & Program Perbaikan Gizi Masyarakat)

Program/ Kegiatan		Satuan	Rencana Induk 2005-2009	Kebutuhan Riil 2005-2009	Realisasi 2005-2007	Sasaran 2008-2009
A	Pengkajian dan Penelitian Terapan di Bidang Kesehatan		2	2	3	0
1	Pengadaan Barang Reagensia Litbangkes untuk Kegiatan Laboratorium	pkt	1	1	1	0
2	Penelitian, Pengkajian Dan Pelaksanaan Terapan	pkt	1	1	2	0
B	Pengembangan Pendidikan Tenaga Kesehatan		8	8	19	0
1	Pengadaan Buku Perpustakaan UPTD Pendidikan	pkt	1	1	1	0

	Program/ Kegiatan	Satuan	Rencana Induk 2005-2009	Kebutuhan Riil 2005-2009	Realisasi 2005-2007	Sasaran 2008-2009
2	Beasiswa Pendidikan Lanjutan Tenaga Kesehatan	pkt	1	1	4	0
3	Pembangunan Sarana dan Prasarana Institusi Pendidikan dan Pengembangan Kesehatan	pkt	6	6	14	0
C	Perbaikan Gizi Masyarakat		42	42	21	21
1	Pendidikan dan Pelatihan Teknis	Kab/Kota	21	21	21	0
2	Pelayanan Kesehatan dan Perbaikan Gizi	Kab/Kota	21	21	21	0

Sumber : Bapel BRR, 2007

0 : Sudah terlaksana

Selanjutnya pada program penyelenggaraan kebijakan & manajemen pembangunan kesehatan, program peningkatan pelayanan kesehatan pengungsi korban bencana dan penanggulangan masalah kesehatan dan program penyelenggaraan penyehatan lingkungan, realisasi seluruhnya telah mencapai target atau melampaui target yang telah ditetapkan rencana induk sejak periode tahun 2005-2006. selanjutnya beberapa penambahan juga dilaksanakan realisasinya pada tahun 2007.

Tabel III. 32
Sasaran Rencana Aksi Sub Bidang Kesehatan NAD - Nias
(Program Penyelenggaraan Kebijakan & Manajemen Pembangunan Kesehatan,
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pengungsi Korban Bencana dan Penanggulangan
Masalah Kesehatan dan Program Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan)

	Program/ Kegiatan	Satuan	Rencana Induk 2005-2009	Kebutuhan Riil 2005-2009	Realisasi 2005-2007	Sasaran 2008-2009
A	Penyelenggaraan Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan		3	3	30	0
1	Administrasi Umum	pkt	1	1		0
2	Pendidikan dan Pelatihan Teknis	pkt	1	1	3	0
3	Bantuan Penanggulangan Bencana Alam dan Kerusuhan	pkt	1	1	24	0
B	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pengungsi Korban Bencana dan Penanggulangan Masalah Kesehatan		1	1	2	0
1	Program Promosi Kesehatan	pkt	1	1	2	0
C	Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan		1	1	72	0
1	Peningkatan Sarana Sanitasi Air Bersih dan Sarana Sanitasi Dasar	pkt	1	1	72	0

Sumber : Bapel BRR, 2007

0 : Sudah terlaksana

Sasaran Program Penyelenggaraan Kebijakan & Manajemen Pembangunan Kesehatan, Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pengungsi Korban Bencana dan Penanggulangan Masalah Kesehatan dan Program Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan telah terealisasi semua.

Tabel III. 33
Permasalahan dan Rencana Tindak Lanjut Bidang Sosial Kemasyarakatan sub
bidang Kesehatan NAD - Nias

Bidang	Sub Bidang	Isu dan Masalah	Rencana Tindak Lanjut
BIDANG SOSIAL KEMASYARAKATAN	Kesehatan	Program Upaya Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan • Kebutuhan Rumah Dinas, 20 unit • Kebutuhan Rumah Dokter dan Paramedis Puskesmas, 32 unit • Kebutuhan Kantor Dinas Kesehatan, 3 pkt • Rehab dan rekons RS Bayangkara • Kebutuhan Pustu, 123 pkt • Kebutuhan Polindes, 640 pkt • Kebutuhan Klinik, 1 pkt • Kebutuhan BBPOM, 3 pkt • Kebutuhan Laboratorium Kesehatan, 1 pkt • Pengadaan Kendaraan Roda4/Roda 6/Roda 10 (ambulance), 64 unit Program Penyelenggaraan Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular dan Wabah • Pembangunan Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), 1 pkt Program Pengkajian & Penelitian Terapan di Bidang Kesehatan, Pengembangan Pendidikan Tenaga Kesehatan & Program Perbaikan Gizi Masyarakat • Pembangunan Sarana dan Prasarana Institusi Pendidikan dan Pengembangan Kesehatan, 4 pkt	• mengadakan pelayanan kesehatan darurat • mobilisasi tenaga kesehatan dari daerah lain dan menempatkan serta mengangkat tenaga kesehatan baru • melatih tenaga kesehatan • merehabilitasi dan membangun prasarana dan sarana pelayanan kesehatan yang rusak • memulihkan fungsi fasilitas pelayanan kesehatan • melakukan imunisasi • <i>vector control</i> • disinfeksi dan penyediaan air minum • memperkuat <i>surveillance</i> epidemiologi • hjserta memperbaiki paket penyuluhan gizi.

Sumber : Bapel BRR, 2007

Sub Bidang Peranan Perempuan, Kesejahteraan Anak dan KB

Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pada bidang pemberdayaan perempuan, yang mengacu pada rencana induk, terutama berkenaan dengan Program Penguatan Kelembagaan, Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan, Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak, dan Pelayanan Keluarga Berencana di Provinsi NAD dan Nias kepulauan.

Realisasi pelaksanaan sampai dengan tahun 2006 terdapat program dengan capaian sesuai target rencana induk (100%), melebihi target rencana induk ($\geq 100\%$) dan adapula yang belum sesuai target rencana induk bahkan sampai tahun 2007, seperti revitalisasi kelembagaan (5,9%), pengarusutamaan gender dan survey assessment kebutuhan khusus perempuan. Untuk program/kegiatan dengan realisasi yang belum mencapai target rencana induk akan dilakukan penajaman sasaran disesuaikan dengan kebutuhan real.

Program rehabilitasi psikologis dan peningkatan keterampilan perempuan, pemberian beasiswa kepada ulama perempuan dan sosialisasi kepada masyarakat desa telah mencapai target sasaran rencana induk (100%). Selanjutnya untuk *assessment* daya dan kebutuhan khusus perempuan pencapaiannya sebesar 29.4%. adapun revitalisasi kelembagaan dan pengarusutamaan gender masing-masing pencapaiannya baru mencapai 5.9%.

Tabel III. 34
Sasaran Rencana Aksi Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan NAD - Nias
(Program Penguatan Kelembagaan)

Program/ Kegiatan		Satuan	Rencana Induk 2005-2009	Kebutuhan Riil 2005-2009	Realisasi 2005-2007	Sasaran 2008- 2009
I	PENGUATAN KELEMBAGAAN PENG-ARUS-UTAMA-AN					
	GENDER DAN ANAK					
a	Revitalisasi Kelembagaan	Unit	55	3	3	0
b	Peng-arus-utama-an Gender	Paket	57	3	3	0
c	Assessment data dan Kebutuhan	survai	19	5	5	0
	Rehabilitasi Psikologis & Peningkatan Ketrampilan Perempuan	Paket	*	1	1	0
	Bea Siswa Bagi Ulama Perempuan, Pelatihan Dan Kursus Singkat Bagi Pemimpin Perempuan	Paket	*	1	1	0
	Sosialisasi Garapan Kepada Masyarakat Desa	Paket	*	1	1	0
	Community Volunteer Training Bagi Remaja Desa	Paket	*	**	**	**

Sumber : Bapel BRR, 2007

* : Tidak terinci / tercantum dalam Rencana Induk

** : Data belum tersedia

0 : Sudah terlaksana

Sasaran Kegiatan Pada Program Penguatan Kelembagaan telah terealisasi semua. Selanjutnya pada program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan memiliki beberapa kegiatan yang berkenaan dengan fasilitasi program, workshop, pemberdayaan ekonomi, sosial dan hukum bagi perempuan, pelatihan dan penyediaan sarana publik bagi kaum perempuan. Realisasi program yang telah mencapai target atau melampaui target yang telah ditetapkan rencana induk adalah pelatihan life skill dan vocational, bantuan dengan kompetensi bagi masyarakat dan workshop 'trafficking' dan 'judicial watch networking' (masing-masing pencapaian 100% hingga tahun 2007). Pencapaian tersebut terutama pada periode tahun 2005-2006. Selanjutnya program lain mencapai lebih dari 100% kecuali program fasilitasi 'woman crisis center' (19.6%) dan pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (2.6%). Untuk Program dan kegiatan yang realisasi pencapaiannya rendah dan belum merupakan prioritas untuk ditangani, akan dilakukan evaluasi untuk menetapkan kebutuhan real.

Tabel III. 35
Sasaran Rencana Aksi Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan NAD - Nias
(Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan perempuan)

Program/ Kegiatan		Satuan	Rencana Induk 2005-2009	Kebutuhan Riil 2005-2009	Realisasi 2005-2007	Sasaran 2008- 2009
a	Fasilitasi <i>Women Crisis Center</i>	Unit	57	10	10	0
b	Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan	Kelompok	6	23	23	0
c	Pemberdayaan Ekonomi Perempuan	Kelompok	1.951	5300	5.300	0
d	Dukungan Hukum untuk Perempuan	Paket	17	218	218	0
e	TRAINING LIFESKILL DAN VOCATIONAL SKILL UNTUK PEREMPUAN	Paket	*	1	1	0
f	BANTUAN PADA KELOMPOK PENGAJIAN	Paket	*	2100	2.100	0
g	BANTUAN UNTUK MASYARAKAT DENGAN KOMPETENSI	Paket	*	1	1	0
h	PENYEDIAAN SARANA TEMPAT PEREMPUAN MELAKUKAN KEGIATAN	Unit	*	49	49	0
i	WORKSHOP GUGUS ANTI TRAFFICKING	Paket	*	1	1	0
j	WORKSHOP JUDICIAL WATCH NETWORKING	Paket	*	1	1	0

Sumber : Bapel BRR, 2007

* : Tidak terinci / tercantum dalam Rencana Induk

o : Sudah terlaksana

Sasaran 2008-2009 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan perempuan yang masih harus dilanjutkan yaitu Penyediaan sarana tempat perempuan melakukan kegiatan 1 pkt.

Pada program/kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak, mengkonsentrasikan pada rehabilitasi psikologis anak dan keluarga pasca bencana serta kelengkapan kebutuhan administrasi kependudukan. Hampir seluruh program telah mencapai target realisasi yang telah ditetapkan oleh rencana induk seperti TOT pola asuh anak, qanun perlindungan anak, penyelenggaraan kongres anak, dan pedoman dan KIE (pencapaian 100%). Namun demikian, terdapat beberapa program yang realisasinya di bawah 100% yaitu reunifikasi keluarga (1.8%) dan fasilitasi *children center and kid conselling* (29.4%). Adapun kegiatan pemantauan dan evaluasi kegiatan Satker realisasinya baru mencapai 50%.

Tabel III. 36
Sasaran Rencana Aksi Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan NAD - Nias
(Program Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak)

Program/ Kegiatan		Satuan	Rencana Induk 2005-2009	Kebutuhan Riil 2005-2009	Realisasi 2005-2007	Sasaran 2008- 2009
a	Fasilitasi <i>Children Center dan Kid Line Conseling</i>	Unit	38	10	10	0
b	Reunifikasi keluarga	Anak	3.600	120	120	0

Program/ Kegiatan		Satuan	Rencana Induk 2005-2009	Kebutuhan Riil 2005-2009	Realisasi 2005-2007	Sasaran 2008-2009
c	Dukungan utk mendapatkan akte kelahiran gratis	Anak	3.600	73223	73.223	0
d	Dukungan utk pengembangan. pola asuh anak :					
	1. Pedoman dan KIE	Paket	8	1	1	0
	2. TOT bagi pola asuh anak	Diklat	19	1	1	0
e	Qanun Perlindungan Anak (Akte Kelahiran Bebas)	Paket	*	1	1	0
f	Penyelenggaraan Kongres Anak	Paket	*	1	1	0
g	Monitoring Dan Evaluasi Untuk Kegiatan Satker	Paket	*	2	2	0

Sumber : Bapel BRR, 2007

* : Tidak terinci / tercantum dalam Rencana Induk

o : Sudah terlaksana

Sasaran 2008-2009 Program Program Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak yang masih harus dilanjutkan yaitu Fasilitasi Children Center dan Kid Conselling 24 unit, Reunifikasi Keluarga 6680 anak.

Tabel III. 37
Sasaran Rencana Aksi Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan NAD - Nias
(Program Pelayanan Keluarga Berencana)

Program/ Kegiatan		Satuan	Rencana Induk 2005-2009	Kebutuhan Riil 2005-2009	Realisasi 2005-2007	Sasaran 2008-2009
1.	Pendidikan dan pelatihan masyarakat	Paket	190	290	190	100
2.	Penyuluhan dan penyebaran informasi	Paket	190	290	190	100
3.	Pelayanan kesehatan/perbaikan gizi ibu/anak dan kb	Paket	190	290	190	100
4.	Program Perlengkapan Sarana Gedung	Paket	3	3	1	2
5.	Pengadaan kendaraan bermotor roda 2	Unit	271	271	271	0
6.	Pengadaan kendaraan bermotor roda-4/roda-6/roda-10	Unit	3	3	1	2

Sumber : Bapel BRR, 2007

* : Tidak terinci / tercantum dalam Rencana Induk

** : Data belum tersedia

o : Sudah terlaksana

Program Pelayanan Keluarga Berencana (KB) menitikberatkan pada program pendidikan, pelatihan, pelayanan kesehatan gizi serta pengadaan peralatan/perlengkapan operasional. Hampir seluruh program telah terealisasi pada periode tahun 2005-2006. dari keseluruhan program yang telah ditetapkan dalam rencana induk, terdapat 5 program yang belum terealisasi penuh sampai dengan tahun 2007 yaitu program perlengkapan sarana kantor dan pengadaan kendaraan roda 4 yang masing-masing pencapaiannya sebesar 33.3%, dan pendidikan pelatihan masyarakat, penyuluhan penyebaran informasi serta pelayanan kesehatan perbaikan gizi ibu/anak dan kb.

Sasaran 2008-2009 Program Pelayanan Keluarga Berencana yang harus diselesaikan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel III. 38
Permasalahan dan Rencana Tindak Lanjut Bidang Sosial Kemasyarakatan sub
bidang Pemberdayaan Perempuan NAD - Nias

Bidang	Sub Bidang	Isu dan Masalah	Rencana Tindak Lanjut
BIDANG SOSIAL KEMASYARA- KATAN	Pemberdayaan perempuan	Program Penguatan Kelembagaan • Revitalisasi Kelembagaan sebanyak 48 unit • Pengarus utamaan Gender, sebanyak 48 pkt pertemuan • Assessment data dan kebutuhan khusus perempuan sebanyak 12 survey • Community volunteer training bagi remaja desa sebanyak 1 paket Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan perempuan • Fasilitasi Woman Crisis Center, sebanyak 41 unit • Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan, sebanyak 878 kelompok • Penyediaan sarana tempat perempuan melakukan kegiatan, sebanyak 1 unit Program Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak • Fasilitasi Children Center dan Kid Conselling, sebanyak 24 unit • Reunifikasi Keluarga, 6.680 anak • Fasilitasi Children Center dan Kid Conselling, sebanyak 2paket Program Pelayanan Keluarga Berencana • Program Pelayanan Keluarga Berencana, sebanyak 2 paket • Pendidikan dan pelatihan masyarakat • Penyuluhan dan penyebaran informasi • Pelayanan kesehatan/perbaikan gizi ibu/anak dan kb • Program Perlengkapan Sarana Gedung • Pengadaan kendaraan bermotor roda-4/roda-6/roda-10	• peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan peningkatan kualitas kehidupan adat, tradisi dan kegiatan seni budaya serta pelestarian budaya masyarakat • melakukan pendataan penduduk khusus perempuan dan anak • mengembangkan dan memfungsikan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan Perempuan (P2TP2) • memfasilitasi <i>Women Crisis Center</i> • memfasilitasi reunifikasi keluarga • bantuan hukum dan dukungan untuk pengasuhan anak • memberdayakan kepala keluarga perempuan dalam kegiatan ekonomi • Melakukan pendataan lengkap penduduk guna menyediakan data komposisi penduduk yang lengkap; • Merehabilitasi dan merekonstruksi akses dan sarana prasarana pelayanan keluarga • berencana, kesehatan reproduksi dan pemberdayaan ketahanan keluarga; dan • Menyediakan alat dan obat kontrasepsi yang dibutuhkan oleh pasangan usia subur.

Sumber : Bapel BRR, 2007

3.2 Agama, Sosial, Budaya, Pemuda dan Olah Raga

SOSIAL

Untuk kegiatan bidang sosial, berdasarkan rencana induk terdapat 5 (lima) kelompok program penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi yaitu: Bantuan dan jaminan sosial; Pelayanan dan rehabilitasi sosial; Pemberdayaan Fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS lainnya; Penelitian dan pengembangan kesejahteraan sosial; Pemberdayaan kelembagaan Kesejahteraan sosial.

Program bantuan jaminan sosial sebagian besar telah selesai dilaksanakan pada masa tanggap darurat, berupa bantuan kebutuhan pokok kepada pengungsi. Selanjutnya pada program tahun 2007, masih ada bantuan kebutuhan pokok (beras, lauk pauk dan sandang) untuk pengungsi yang masih tersisa tinggal di barak.

Tabel III. 39
Sasaran Rencana Aksi Sub Bidang Sosial NAD - Nias
(Program Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial)

	Program/ Kegiatan	Satuan	Rencana Induk 2005-2009	Kebutuhan Riil 2005-2009	Realisasi 2005-2007	Sasaran 2008-2009
1.	Bantuan Lauk Pauk	Jiwa	391.550	**	**	**
2.	Bantuan Beras	Jiwa	391.550	**	**	**
3.	Bantuan Sandang	Jiwa	391.550	**	**	**
4.	Bantuan Peralatan Dapur	Kk	103.550	**	**	**
5.	Bantuan Bahan Bangunan Rumah	Kk	35.000	**	**	**
6.	Pemberian Perlindungan Sosial Dalam Bentuk Jaminan Sosial	Kk	1.120	**	**	**
7.	Bantuan Pemberdayaan Korban Bencana Alam	Kk	5.000	**	**	**
8.	Pembangunan Pusat trauma Center	Unit	1	**	**	**

Sumber : Bapel BRR, 2007

* : Tidak terinci / tercantum dalam Rencana Induk

** : Data belum tersedia

Sasaran 2008-2009 Program Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial yang masih harus dilanjutkan yaitu Pembangunan Trauma Centre namun data untuk program sasaran belum tersedia.

Pada program pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS berdasarkan rencana induk, yang diamanatkan hanya dua kegiatan yaitu bantuan pengungsi sebanyak 19.500 paket dan bantuan pengembangan usaha produktif untuk 15.659 desa. Realisasi pada kegiatan program ini lebih banyak ditangani melalui bantuan Internasional NGO dan Donor. Sehingga pada program tahun 2007, BRR (APBN) hanya menangani desa-desa yang belum mendapatkan bantuan (*filling gap*), yakni untuk 45 desa.

Tabel III. 41
Sasaran Rencana Aksi Sub Bidang Sosial NAD - Nias
(Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT, MKS.)

Program/ Kegiatan		Satuan	Rencana Induk 2005-2009	Kebutuhan Riil 2005-2009	Realisasi 2005-2007	Sasaran 2008-2009
1.	Bantuan usaha ekonomis produktif	KK	15.660	**	1	15.659
2.	Pengembangan usaha ekonomis produktif	KK	9.500	**	**	**
3.	Rehabilitasi sosial daerah kumuh	KK	20.000	**	**	**
4.	Pemdampingan sosial dan monev	kegiatan	19	**	**	**
5.	Pemberdayaan Kat	KK	546	**	**	**
6.	Peningkatan kesos keluarga	KK	33.600	**	**	**
7.	Panti Masyarakat	Panti	14	**	**	**
8.	Rehabilitasi TMP/MPN dan perbaikan rumah perintis kemerdekaan	TMP/MPN/RPK	4/2/9	**	**	**

Sumber : Bapel BRR, 2007

* : Tidak terinci / tercantum dalam Rencana Induk

** : Data belum tersedia

Sasaran 2008-2009 Program Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT, MKS yang masih harus dilanjutkan yaitu seluruh program yang ada dalam program pemberdayaan fakir miskin, KAT dan MKS dikarenakan data yang belum tersedia.

Tabel III. 42
Sasaran Rencana Aksi Sub Bidang Sosial NAD - Nias
(Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial)

Program/ Kegiatan		Satuan	Rencana Induk 2005-2009	Kebutuhan Riil 2005-2009	Realisasi 2005-2007	Sasaran 2008-2009
1.	Bantuan biaya percepatan pembangunan panti baru	Unit	*	**	6	**
2.	Bantuan biaya perencanaan rehab panti	Unit	*	**	25	**
3.	Bantuan sarana panti sosial	Unit	*	**	49	**
4.	Bantuan untuk rehabilitasi panti sosial	Unit	5	**	24	**
5.	Bantuan untuk pembangunan dan renovasi gedung khusus (Loka Bina Karya)	Unit	*	**	13	**
6.	Bantuan sarana dan fasilitas loka bina karya penyandang cacat	paket	*	**	10	**
7.	Program penampungan anak yatim piatu di masyarakat dan pemda	Kegiatan	*	**	51	**
8.	Bantuan biaya uang saku untuk kesejahteraan anak di dalam panti	Orang	*	**	13.366	**
9.	Bantuan pembinaan loka bina karya penyandang cacat	Orang	*	**	150	**
10.	Pelayanan panti jompo dan penyandang cacat	Paket	*	**	35	**
11.	Bantuan usaha ekonomis produktif untuk panti	Paket	*	**	22	**

Program/ Kegiatan		Satuan	Rencana Induk 2005-2009	Kebutuhan Riil 2005-2009	Realisasi 2005-2007	Sasaran 2008-2009
	penyantunan					
12.	Bantuan beasiswa untuk anak, biaya kesehatan untuk janda dan lansia	Orang	*	**	1.300	**
13.	Bantuan alat Bantu penyandang cacat	Paket	*	**	1	**
14.	Bantuan fasilitas panti/dayah yang menampung anak terlantar/yatim/piatu	Paket	*	**	50	**
15.	Bantuan biaya subsidi makanan anak di dalam panti	Orang	*	**	10.000	**
16.	Bantuan sarana belajar anak pengungsi dalam rangka kegiatan children center	Paket	*	**	19	**
17.	Bantuan biaya pembinaan untuk anak berprestasi	Orang	*	**	500	**
18.	Bantuan subsidi anak asuh diluar panti (huntara dan keluarga rentan)	Orang	*	**	2.000	**
19.	Bantuan sarana kantor Children Center permanent dalam rangka pelayanan anak korban tsunami diluar panti	Kegiatan	*	**	2	**

Sumber : Bapel BRR, 2007

* : Tidak terinci / tercantum dalam Rencana Induk

** : Data belum tersedia

Jika mengacu pada Rencana Induk, program pelayanan dan rehabilitasi sosial hanya menyebutkan kebutuhan bantuan rehabilitasi sosial sebanyak 12 kegiatan, baik dilihat dari jumlah kegiatan maupun jenis kegiatannya. Sasaran 2008-2009 pada Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial harus terealisasi semua.

Begitupula pada program pelayanan rehabilitasi sosial, meskipun realisasi capaian pelaksanaan terhadap rencana induk pada beberapa kegiatan mencatat angka nol namun kenyataan di lapangan kegiatan dimaksud sudah ditangani melalui bantuan NGO dan donor, serta sebagian pekerjaan tidak diperlukan lagi. Program tahun 2007 mencatat beberapa kegiatan yang juga sifatnya *'filling gap'*.

Tabel III. 43
Sasaran Rencana Aksi Sub Bidang Sosial NAD - Nias
(Program Pelayanan Rehabilitasi Sosial)

Program/ Kegiatan		Satuan	Rencana Induk 2005-2009	Kebutuhan Riil 2005-2009	Realisasi 2005-2007	Sasaran 2008-2009
1.	Bantuan Panti Sosial	Keg	12	**	6	**
2	Bantuan sarana Panti Sosial	Panti	*	**	49	**
3	Pembangunan Gedung Sosial Kemasyarakatan	Unit	*	**	1	**
4	Bantuan Sarana Penyandang Cacat	Unit	*	**	10	**
5	Penampungan anak dan lansia (Org)	Paket	*	**	229	**
6	Bantuan Biaya fakir miskin	Org	*	**	13.366	**
7	Bantuan Lokakarya Bidang Sosial	Angk.	*	**	10	**

Program/ Kegiatan		Satuan	Rencana Induk 2005-2009	Kebutuhan Riil 2005-2009	Realisasi 2005-2007	Sasaran 2008-2009
8	Bantuan Prasarana dan sarana penyandang cacat	Pkt	*	**	35	**
9	Bantuan ekonomi untuk Panti	Pkt	*	**	22	**
10	Bantuan Makan Panti	Org	*	**	10.000	**
11	Peningkatan Kesra Anak (Org)	Pkt	*	**	139.382	**
12	Bantuan anak berprestasi	Org	*	**	500	**

Sumber : Bapel BRR, 2007

* : Tidak terinci / tercantum dalam Rencana Induk

** : Data belum tersedia

Seluruh Sasaran 2008-2009 Program-Program Pelayanan Rehabilitasi Sosial masih harus dilanjutkan dikarenakan adanya data yang belum tersedia yang belum dimasukkan kedalam tabel.

Untuk program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial yaitu meliputi pemugaran taman makam pahlawan, bantuan penunjang kegiatan karang taruna, bantuan operasional dalam mendukung kegiatan trauma center serta bantuan insentif bagi petugas KBS, seluruh program ini tidak ada dalam rencana induk namun kenyataan di lapangan kegiatan tersebut harus segera direalisasikan untuk sasaran 2008-2009.

Tabel III.44
Sasaran Rencana Aksi Sub Bidang Sosial NAD - Nias
(Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial)

Program/ Kegiatan		Satuan	Rencana Induk 2005-2009	Kebutuhan Riil 2005-2009	Realisasi 2005-2007	Sasaran 2008-2009
1	Pemugaran Taman Makam Pahlawan/Makam Pahlawan Nasional/Rumah Perintis Kemerdekaan	Unit	*	**	**	**
2.	Bantuan penunjang kegiatan Karang Taruna Indonesia Propinsi NAD	Keg	*	**	1	**
3.	Bantuan operasional FK-PSM Prov. NAD dalam mendukung kegiatan Trauma Center	Paket	*	**	1	**
4.	Bantuan Insentif bagi petugas KBS (keluarga Binaan Sosial)		*	**	**	**

Sumber : Bapel BRR, 2007

* : Tidak terinci / tercantum dalam Rencana Induk

** : Data belum tersedia

Sasaran dan rencana tindak lanjut 2008-2009 untuk Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial dapat dilihat di dalam tabel dibawah ini :

Tabel III.45
Permasalahan dan Rencana Tindak Lanjut Bidang Sosial Kemasyarakatan
sub bidang Sosial NAD - Nias

Bidang	Sub Bidang	Isu dan Masalah	Rencana Tindak Lanjut
BIDANG SOSIAL KEMASYARAKATAN	Sosial	Program Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial Pembangunan Trauma Centre sebanyak 1 unit Program Pemberdayaan	- pengasuhan anak yatim piatu - Memberikan bantuan dan jaminan sosial bagi masyarakat korban bencana - Meningkatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi anak, lanjut

Bidang	Sub Bidang	Isu dan Masalah	Rencana Tindak Lanjut
		Fakir Miskin, KAT, MKS - Bantuan pengembangan usaha ekonomi produktif, sebanyak 10.655 desa - Bantuan Pengungsi (Org), sebanyak 19.500 paket Program Pelayanan Rehabilitasi Sosial - Bantuan insentif petugas pendamping Keluarga Binaan Sosial sebanyak 25.000 paket - Pendirian Pati, 5 unit Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial - Rehab TMP/MPN/Perbaikan Rumah PK, 18.810 paket	usia, dan penyandang cacat korban bencana - Membangun dan memfungsikan <i>trauma center</i>; dan - Memberdayakan anggota rumah tangga dan keluarga pengungsi dan korban bencana

Sumber : Bapel BRR, 2007

Pemuda dan Olahraga

Realisasi bidang pemuda dan olahraga pada tahun 2005-2006 meliputi dua jenis program yaitu pembinaan dan peningkatan partisipasi pemuda dan rehabilitasi serta pemeliharaan bangunan gedung olahraga dan pada program tahun 2007 seluruh program bidang pemuda dan olahraga ditangani. Untuk lebih jelasnya volume dari realisasi sampai dengan tahun 2006 dan program 2007 disajikan pada tabel berikut:

Tabel III. 46
Sasaran Rencana Aksi Sub Bidang Pemuda dan Olah Raga
NAD - Nias

Program/ Kegiatan		Satuan	Rencana Induk 2005-2009	Kebutuhan Riil 2005-2009	Realisasi 2005-2007	Sasaran 2008-2009
A	Program Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Pemuda					
1	Rencana Kegiatan (Adm.) (Kab./Kota)	OB	300	81	60	21
2	Penumbuhan KUPP	kelompok	125	140	25	115
3	Kelompok Pemuda sebaya	kelompok	40	91	8	83
4	Pengembangan Sentra Pemberdayaan pemuda	lokasi	5	2	1	1
5	Pertukaran Pemuda antar Propinsi	orang	160	32	32	0
6	Monitoring dan Evaluasi life skills	kelompok	250	50	50	0
7	Latihan kewirausahaan Pemuda di Kabupaten/Kota	orang	300	60	60	0
8	Bantuan untuk lembaga kepemudaan	lembaga	25	5	5	0
9	Pelatihan/seleksi SP3	orang	100	20	20	0
10	Peningkatan Sumber daya SP3	orang	275	55	55	0
11	Sosialisasi dan sinkronisasi SP3	kegiatan	10	2	2	0

Program/ Kegiatan		Satuan	Rencana Induk 2005-2009	Kebutuhan Riil 2005-2009	Realisasi 2005-2007	Sasaran 2008-2009
12	Monitoring dan Evaluasi SP3	kegiatan	5	1	1	0
B	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga					
1	Peningkatan mutu SDM keolahragaan daerah	orang	300	386	60	326
2	Inventarisasi/Pendataan OR daerah	kegiatan	5	2	1	1
3	Pembinaan Akademik Atlet Pelajar (PPLP)	kegiatan	5	1	1	0
4	Festival OR Tradisional bagi masyarakat	orang	100	440	20	420
5	Kompetisi antar klub OR Pelajar	orang	1125	225	225	0
6	Pemberdayaan Diklat OR Pelajar berbakat	orang	125	25	25	0
7	Pemberdayaan Diklat OR Mahasiswa berbakat	orang	50	10	10	0
8	Kompetisi antar PPLP dan PPLS	orang	330	66	66	0
9	Pekan OR Pelajar	orang	550	110	110	0
10	Pemberdayaan organisasi OR Pelajar dan ORMAS	kegiatan	5	6	1	5
11	Training Camp Atlet Pelajar	orang	400	80	80	0
12	Pekan OR Pelajar Cacat	orang	175	35	35	0
13	Pekan OR Pedesaan	kec./desa	15	3	3	0
14	Peringatan HAORNAS	21 kab./kota	105	21	21	0
15	Dukungan admn. Pengelolaan Kegiatan (Kab./Kota)	kegiatan	5	22	1	21
C	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga					
1	Bantuan Peralatan Olahraga	paket	5	92	1	91
2	Inventarisasi Organisasi dan Potensi Olahraga	kab./kota	30	7	6	1
3	Konsolidasi dengan Stake Holder keolahragaan	organisasi	90	18	18	0
4	Menyusun model increatment dan strategi perlakuan	kegiatan	5	1	1	0

Program/ Kegiatan	Satuan	Rencana Induk 2005-2009	Kebutuhan Riil 2005-2009	Realisasi 2005-2007	Sasaran 2008-2009
5 TOT instruktur dari masyarakat setempat	orang	300	60	60	0

Sumber : Bapel BRR, 2007

* : Tidak terinci / tercantum dalam Rencana Induk

** : Data belum tersedia

o : Sudah terlaksana

Tabel III.47
Permasalahan dan Rencana Tindak Lanjut Bidang Sosial Kemasyarakatan sub
bidang Pemuda dan Olah raga NAD - Nias

Bidang	Sub Bidang	Isu dan Masalah	Rencana Tindak Lanjut
	Pemuda dan olah raga	Program Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Pemuda - Rencana Kegiatan (Adm.) (Kab./Kota), sebanyak 219 ob - Pengembangan Sentra Pemberdayaan pemuda, sebanyak 3 lokasi - Pertukaran Pemuda antar Propinsi, sebanyak 128 orang - Latihan kewirausahaan Pemuda di Kabupaten / Kota, sebanyak 240 orang - Bantuan untuk lembaga kepemudaan, 20 lembaga - Pelatihan/seleksi SP3, sebanyak 80 orang - Peningkatan Sumber daya SP3, sebesar 220 orang - Sosialisasi dan sinkronisasi SP3, 8 kegiatan - Monitoring dan Evaluasi SP3, 4 kegiatan Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga - Inventarisasi/Pendataan OR daerah, 3 kegiatan - Pembinaan Akademik Atlet Pelajar (PPLP), sebanyak 4 kegiatan - Kompetisi antar klub OR Pelajar, sebanyak 900 orang - Pemberdayaan Diklat OR Pelajar berbakat, sebanyak 100 orang - Pemberdayaan Diklat OR Mahasiswa berbakat, sebanyak 40 orang - Pekan OR Pelajar, 440 orang - Training Camp Atlet Pelajar, 320 orang - Pekan OR Pelajar Cacat, 140 orang	- Menyediakan fasilitas kepemudaan dan keolahragaan dan memulihkan fungsi kelembagaannya; dan - Mobilisasi dan pemberdayaan potensi kepemudaan

Bidang	Sub Bidang	Isu dan Masalah	Rencana Tindak Lanjut
		- Pekan OR Pedesaan, 12 kec/desa - Peringatan HAORNAS, sebanyak 84 kab/kota Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga - Inventarisasi Organisasi dan Potensi Olahraga, sebanyak 23 kab/kota - Konsolidasi dengan Stake Holder keolahragaan, sebanyak 72 organisasi - Menyusun model increatment dan strategi perlakuan, sebanyak 4 kegiatan - TOT instruktur dari masyarakat setempat, sebesar 240 orang	

Sumber : Bapel BRR, 2007

Budaya

Berdasarkan rencana induk, bidang budaya yang ditangani meliputi 3 jenis program, yaitu pengembangan nilai budaya; pengelolaan keragaman budaya dan pengelolaan kekayaan budaya. Realisasi pelaksanaan dibidang budaya sampai dengan tahun 2006, telah ditangani untuk seluruh kegiatan pada masing-masing program tersebut di atas. Untuk lebih jelasnya melihat realisasi dan program per program dan kegiatan yang ditangani disajikan pada tabel berikut.

Tabel III. 48
Sasaran Rencana Aksi Sub Bidang Budaya
NAD - Nias

Program/ Kegiatan		Satuan	Rencana Induk 2005-2009	Kebutuhan Riil 2005-2009	Realisasi 2005-2007	Sasaran 2008-2009
1.	Pengembangan Nilai Budaya					
	(1) Pengumpulan dokumentasi bencana kemanusiaan akibat tsunami	Paket	2	2	**	**
	(2) Penyembuhan trauma dan membangkitkan kembali semangat melalui gerakan kebudayaan					
	(a) Penyusunan Materi Penguatan Tradisi	Naskah	2	2	**	**
	(b) Penyebarluasan materi penguatan tradisi ke masyarakat	Paket	2	2	**	**
	(3) Reinventarisasi potensi budaya dan penyelamatan warisan budaya yang terkena bencana	Paket	2	2	1	1
	(4) Pemulihan sumberdaya budaya yang rusak terkena bencana.	Paket	2	2	**	**
	(5) Penyusunan modul dan	Paket	2	2	**	**

Program/ Kegiatan		Satuan	Rencana Induk 2005-2009	Kebutuhan Riil 2005-2009	Realisasi 2005-2007	Sasaran 2008-2009
	sosialisasi nilai budaya Aceh melalui media elektronik					
	(6) Pagelaran budaya Aceh	Kali	2	2	**	**
	(7) Pedoman penanganan berwawasan budaya pasca bencana					
	(a) Penyusunan dan penerbitan buku	Paket	1	1	**	**
	(b) Penggandaan dan penyebarluasan	Paket	1	1	**	**
2.	Pengelolaan Keragaman Budaya					
	(1) Wawasan Budaya dalam pembangunan kembali wilayah bencana di Aceh dan Sumatera Utara		*	**	**	**
	(a) Workshop	Kali	2	2	**	**
	(b) Sosialisasi	Paket	5	5	**	**
	(2) Membangun sistem jaringan informasi kebudayaan	Paket	1	1	**	**
	(3) Penyusunan peta budaya	Paket	5	5	1	4
	(4) Museum Peringatan Bencana Kemanusiaan Tsunami					
	(a) Pembuatan Rancangan	Paket	1	1	**	**
	(b) Pendirian	Paket	2	2	**	**
	(5) Museum Budaya dan Sejarah Purbakala Nias	Paket	1	1	**	**
	(6) Menghimpun informasi kebudayaan (NAD dan Nias-Sumut)	Paket	2	2	1	1
	(7) Pendukung rehabilitasi bangunan bersejarah (Tjut Nyak Dhien dan Cut Meutia) dan sejumlah bangunan purbakala yang rusak (20 buah di NAD dan 6 di Nias-Sumut)	Paket	26	26	20	6
	(8) Rehabilitasi Gedung Kantor BKSNT dan BP3 Banda Aceh	Paket	2	3	3	0
	(9) Pengembangan SDM Kebudayaan di tingkat Kabupaten dan Provinsi	Paket	1	3	**	**
	(10) Bantuan rehabilitasi lingkungan, gedung, dan fasilitas Taman Budaya serta Museum Negeri NAD	Paket	6	5	4	2

Program/ Kegiatan		Satuan	Rencana Induk 2005-2009	Kebutuhan Riil 2005-2009	Realisasi 2005-2007	Sasaran 2008-2009
	(11) Pemugaran dan konservasi objek budaya	Paket	5	5	2	3
3.	Pengelolaan Kekayaan Budaya (1) Penyembuhan trauma dan membangkitkan kembali semangat melalui gerakan kebudayaan					
	(a) Pelatihan seni grafis budaya Aceh	Kali	2	2	**	**
	(b) Pemulihan norma-norma budaya melalui seni tutor	Kali	5	5	**	**
	(c) Pembuatan, pengandaan dan sosialisasi film dokumenter bencana alam gempa dan tsunami dari sisi budaya	Paket	1	1	**	**
	(d) Pembuatan antologi puisi bertemakan kebangkitan budaya Aceh dari bencana	Paket	1	5	1	4
	Pencetakan dan penyebarluasan antologi puisi bertemakan kebangkitan budaya Aceh dari bencana	Paket	1	5	**	**
	Penyusunan buku cerita anak berlatar norma dan nilai budaya	Judul	1	1	**	**
	Penyebarluasan buku cerita anak berlatar norma dan nilai budaya	Paket	1	2	**	**
	Pembuatan kembali instrumen seni		*	*	*	*
	Pembuatan	Paket	1	1	**	**
	Pemberian bantuan alat-alat seni	Paket	5	5	5	0
	Pembangunan Pusat Data dan Informasi Aceh (PDIA)		*	*	*	*
	Penelusuran dan pengumpulan koleksi	Paket	4	4	**	**
	Pembangunan gedung	Paket	2	2	1	1

Sumber : Bapel BRR, 2007

* : Tidak terinci / tercantum dalam Rencana Induk

** : Data belum tersedia

0 : Sudah terlaksana

Agama

Pada kegiatan bidang keagamaan, rencana induk yang tertuang memuat tentang empat program yang terdiri dari Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama, Program Pengembangan Nilai-nilai Keagamaan, Program Peningkatan Pendidikan Agama dan

Keagamaan, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Aparatur Negara. di wilayah bencana Provinsi NAD dan Kepulauan Nias (Kabupaten Nias dan Nias Selatan).

Pelaksanaan Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama, ada program yang capaiannya sudah melebihi rencana induk yang telah ditetapkan. Untuk program pembangunan tempat ibadah, pencapaian sebesar 91% telah terlaksana pada tahun 2005-2006 dan 2007 yang meliputi pembangunan Masjid, Meunasah, dayah, Balai pengajian, Gereja dan Vihara.

Selanjutnya untuk pembangunan kembali KUA yang direncanakan sebanyak 68 buah (rencana induk), telah terealisasi pembangunannya sebanyak 81 unit pada 2005-2006 dan memiliki sasaran program yang akan ditetapkan sebanyak 62 unit pada tahun 2007. Namun demikian untuk pengadaan buku nikah yang direncanakan sejumlah 30.000 eksemplar belum terealisasi hingga tahun 2007 (0%).

Tabel III. 49
Sasaran Rencana Aksi Sub Bidang Agama NAD - Nias
(Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama)

Program/ Kegiatan		Satuan	Rencana Induk 2005-2009	Kebutuhan Riil 2005-2009	Realisasi 2005- 2007	Sasaran 2008- 2009
1.	Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama					
-	Program Bantuan Tempat Ibadah:	Unit	3.114	2.830	**	**
-	Masjid	Unit	1.167	1.533	724	809
-	Meunasah	Unit	*	1.062	518	544
-	Dayah	Unit	*	252	**	**
-	Balai Pengajian	Unit	85	211	**	**
-	Vihara		4	2	2	0
-	Gereja	Unit	1.943	478	478	0
-	Terbangunnya kembali KUA	Unit	68	143	81	62
-	Pengadaan buku nikah	exp.	30.000	**	**	**

Sumber : Bapel BRR, 2007

* : Tidak terinci / tercantum dalam Rencana Induk

** : Data belum tersedia

0 : Sudah terlaksana

Untuk program Pengembangan Nilai-nilai Keagamaan, beberapa capaian telah terlaksana pada tahun 2005-2006 dan tahun 2007. Sumber pembiayaan berasal dari pendanaan APBN. Rincian kegiatan meliputi terbinanya kembali ketenteraman bathin (berupa pembinaan dan pelatihan serta bantuan imuem meunasah sebanyak 104 orang), bantuan Al-Qur'an sebanyak 32.655 eksemplar dan pemberian beasiswa pada siswa/santri korban tsunami (7.900 orang). Target realisasi program pada periode 2005-2006 dan sampai dengan tahun 2007

Program Pengembangan Nilai Keagamaan meliputi pelatihan kader-kader agama, pemulihan kondisi mental dan spiritual, penelitian keagamaan dan penempatan guru da'i di dayah. Sumber pembiayaan terutama berasal dari APBN, namun pada beberapa kegiatan juga didanai dari sumber non APBN (seperti bantuan pembangunan dayah sebanyak 7 unit pada tahun 2005-2006). Realisasi pelatihan kader Masjid telah melatih 585 orang pada tahun 2005-2006. selanjutnya hingga tahun 2007 telah dilakukan beberapa realisasi seperti pembangunan asrama santri, bantuan pembangunan gedung dan pengadaan fasilitas agama, kegiatan magang, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat seperti remaja Masjid.

Tabel III.50
Sasaran Rencana Aksi Sub Bidang Agama NAD - Nias
(Program Pengembangan Nilai-nilai Keagamaan)

Program/ Kegiatan		Satuan	Rencana Induk 2005-2009	Kebutuhan Riil 2005-2009	Realisasi 2005-2007	Sasaran 2008-2009
1.	Pengembangan Nilai-nilai Keagamaan					
-	Terbinanya kembali ketenteraman bathin	Pkt	589	589	104	485
-	Bantuan Qur'an dan Kitab	Buah	*	32.655	2.230	30.425
2.	Beasiswa Siswa dan Santri Korban Tsunami	Org	*	9.000	7.900	1.100

Sumber : Bapel BRR, 2007

* : Tidak terinci / tercantum dalam Rencana Induk

** : Data belum tersedia

Sasaran Rencana Aksi Sub Bidang Agama untuk Program pengembangan Nilai – nilai Agama 2008-2009 yaitu Terbinanya kembali ketenteraman bathin 485 pk, Bantuan Qur'an dan Kitab 30.425 buah, serta Beasiswa Siswa dan Santri Korban Tsunami sebanyak 1.100 orang.

Tabel III.51
Sasaran Rencana Aksi Sub Bidang Agama NAD - Nias
(Program Peningkatan Pendidikan Agama dan Keagamaan)

Program/ Kegiatan		Satuan	Rencana Induk 2005-2009	Kebutuhan Riil 2005-2009	Realisasi 2005-2007	Sasaran 2008-2009
1.	Peningkatan Pendidikan Agama dan Keagamaan					
-	Pelatihan Imam Masjid dsb.	Pkt	154	585	68	517
-	Pulihnya kondisi mental spiritual.	Org	*	150	**	**
2.	Penelitian Keagamaan	Paket	*	8	8	0
-	Bantuan Guru dan Tenaga Dai	Org	*	6000	3755	2245

Sumber : Bapel BRR, 2007

* : Tidak terinci / tercantum dalam Rencana Induk

** : Data belum tersedia

0 : Sudah terlaksana

Program lainnya di bidang agama adalah Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Aparatur Negara. Realisasi yang telah dilaksanakan adalah kegiatan rehabilitasi gedung Kanwil Depag pada beberapa kabupaten/kota sebanyak 9 unit (rencana induk 7 unit).

Rehabilitasi Gedung Dinas Syari'ah Propinsi dan gedung Dinas Syari'ah Kab/kota yang direncanakan sejumlah 4 unit, namun dalam realisasinya telah melakukan rehabilitasi sebanyak 6 unit (150%) sampai dengan tahun 2007. Sedangkan rehabilitasi gedung untuk observasi vital dan asrama haji masing-masing telah direalisasikan sebanyak 1 unit.

Penambahan ruangan pada pembangunan beberapa gedung baitul mal juga telah dilaksanakan antara lain di Provinsi NAD, Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Jaya, Pidie dan Aceh Barat. Selanjutnya pengadaan meubeler dan perlengkapan gedung juga beberapa telah terealisasi seperti pengadaan meubeler asrama haji, Kantor Depag dan Syari'ah Islam Aceh Jaya.

Tabel III.52
Sasaran Rencana Aksi Sub Bidang Agama NAD - Nias
(Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Aparatur Negara)

Program/ Kegiatan	Satuan	Rencana Induk 2005-2009	Kebutuhan Riil 2005-2009	Realisasi 2005-2007	Sasaran 2008-2009
1. Gedung Kanwil Depag Propinsi NAD	Unit	1	1	**	**
- Gedung Kandepag Kab./kota	Unit	7	9	8	1
- Gedung Dinas Syariat propinsi dan gedung Dinas Syariat Kab./Kota	Unit	4	8	5	3
2. Gedung MPU propinsi dan gedung MPU kab./kota	Unit	4	13	5	8
- Gedung Observasi Hilal*	Unit	1	1	1	0
- Asrama Haji	Unit	1	2	1	1
3. Gedung Baitul Mal	Unit	*	24	5	19
- Mobil operasional haji dan ambulance	Unit	*	**	3	**
- Bangunan lain (rumah dinas dan Aula)	Unit	4	10	2	8

Sumber : Bapel BRR, 2007

* : Tidak terinci / tercantum dalam Rencana Induk

** : Data belum tersedia

o : Sudah terlaksana

Sasaran Rencana Aksi Sub Bidang Agama untuk Program peningkatan sarana dan prasarana gedung aparatur negara 2008-2009 yaitu gedung kanwil Depag, gedung MPU Propinsi dan gedung Baitul Mal.

Tabel III.53
Permasalahan dan Rencana Tindak Lanjut Bidang Sosial Kemasyarakatan sub bidang Agama NAD - Nias

Bidang	Sub Bidang	Isu dan Masalah	Rencana Tindak Lanjut
BIDANG SOSIAL KEMASYARAKATAN	Agama	Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama - Terbangunnya kembali tempat ibadah, sebanyak 284 unit - Pembangunan Vihara, sebanyak 2 unit - Kebutuhan Gereja, sebanyak 1.450 unit - Pengadaan buku nikah, sebesar 30.000 exp Program Pengembangan Nilai-nilai Keagamaan - Terbinanya kembali ketenteraman bathin, 433 paket	- pemulihan ketenteraman rohani - merekruit tenaga pelayanan keagamaan menggantikan yang meninggal dan rehabilitasi simbol-simbol agama - memberikan bimbingan dan konseling keagamaan - menggiatkan pengajian majelis taklim - mendidik dan melatih tenaga pengganti untuk imam Masjid, khatib, da'i dan guru pengajian.

Sumber : Bapel BRR, 2007

III.4 Bidang Pemulihan Perekonomian

III.4.1 Pertanian

Bidang pertanian, meliputi sub-sektor tanaman pangan dan hortikultura, sub-sektor perkebunan dan sub-sektor peternakan. Kehancuran dan kerusakan di sektor pertanian

(Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan), mengakibatkan sekitar 300.000 petani kehilangan mata pencaharian dan pekerjaan, karena rusaknya lahan pertanian, yakni lahan sawah seluas 23.330 ha; lahan palawija/tegalan seluas 24.345 ha dan lahan perkebunan (tanaman keras) seluas 102.461 ha. Serta 1.904.587 ekor ternak (ternak besar, kecil dan unggas) hilang.

Melalui kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2005 dan 2006, telah mampu menyediakan pekerjaan bagi petani yang kehilangan pekerjaan akibat tsunami, melalui kegiatan padat karya pada saat pelaksanaan kegiatan serta telah selesainya rehabilitasi sebagian besar lahan pertanian, baik berupa lahan sawah, lahan palawija/tegalan dan perkebunan. Lahan pertanian (Sawah, tegalan dan perkebunan) yang sudah direhabilitasi seluas 64.009 Ha dari areal pertanian yang rusak (Rencana Induk) seluas 150.136 Ha atau 42,63%.

Selain rehabilitasi lahan pertanian untuk mengganti kerusakan lahan pertanian yang disebutkan dalam Rencana Induk (Perpres no. 30 Tahun 2005) tersebut di atas, BRR pada tahun anggaran 2005 dan 2006 telah menyediakan traktor, mesin dan peralatan pertanian berupa traktor roda 4 (4 WD) = 46 unit, Hand traktor = 366 unit, Power Tresher = 975 unit, dan Hand sprayer = 1395 unit, serta alat pertanian kecil sebanyak 33.734 unit. Selanjutnya penggilingan padi (*Heuleur/Rice Milling Unit*), meliputi mesin RMU dan gudang yang telah dibangun sejumlah 82 unit.

Program pendukung pengembangan pertanian tanaman pangan dan hortikultura pada tahun 2007 adalah pembangunan lining irigasi 31 km; pembangunan Balai Benih Utama (BBU) dan Balai Benih Induk (BBI) sebanyak 14 unit; gudang Alsintan sebanyak 22 unit dan gedung Balai Pertemuan Petani sebanyak 12 unit dan penggilingan padi (*Rice Milling Unit*) sebanyak 2 unit.

Tabel III.54
Sasaran Rencana Aksi Sub Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura
NAD - Nias

Program/ Kegiatan		Satuan	Rencana Induk 2005-2009	Kebutuhan Riil 2005-2009	Realisasi 2005-2007	Sasaran 2008-2009
1	Pembangunan lining jaringan irigasi tingkat usaha tani	M	1.182.840	228.054	135.554	92.500
2	Pembangunan Jalan Usaha Tani	M	*	361.993	41.993	320.000
3	Rehabilitasi Lahan Pertanian	Ha	150.136	93.787	76.517	17.270
	- Rehabilitasi Lahan Sawah	Ha	23.330	16.356	13.886	2.470
	- Rehabilitasi Lahan Tegalan	Ha	24.345	2.200	2.200	0
	- Lahan Perkebunan	Ha	102.461	32.011	17.211	14.800
4	Agroinput Lahan Pertanian	Ha	*	40.083	32.243	7.840
	- Pengembangan Padi Sawah (Agroinput)	Ha	*	25.259	19.159	6.100
	- Pengembangan Lahan Tegalan (Agroinput)	Ha	*	14.824	13.084	1.740
5	Pencetakan sawah baru	Ha	*	2.921	2.921	0
6	Pembangunan/Rehabilitasi Balai Benih Utama (BBU), Balai Benih Induk (BBI) dan BPP Plus	Unit	*	19	17	2
7	Pembangunan Gudang dan Mesin RMU	Unit	*	92	84	8

Program/ Kegiatan		Satuan	Rencana Induk 2005-2009	Kebutuhan Riil 2005-2009	Realisasi 2005-2007	Sasaran 2008-2009
8	Pembangunan Balai Pertemuan Petani	Unit	*	154	154	0
9	Pembangunan Gedung Kantor Karantina Tumbuhan	Unit	1	1	**	1
10	Pengadaan alat mesin pertanian	Unit	*	12.701	12.701	0
11	Pengadaan Gudang Alsintan dan Saprotan	Unit	*	24	23	1
12	Pendidikan dan pelatihan penyuluh pendamping	Orang	*	814	634	180
13	Penataan/Penguatan kelembagaan petani	Paket	*	264	264	0
14	Bantuan Pembiayaan Pertanian Melalui LKM	Paket	*	32	32	0
15	Penelitian dan Pengembangan Teknologi	Paket	*	1	**	1
16	Pengembangan Terminal Agribisnis	Unit	*	3	1	2
17	Pengembangan Kawasan Tanaman Pangan dan Hortikultura	Kwsn	*	5	**	5
18	Balai Pengujian dan Sertifikasi Benih Rusak Ringan	Paket	1	1	**	1

Sumber : Bapel BRR, 2007

* : Tidak terinci / tercantum dalam Rencana Induk

** : Data belum tersedia

0 : Sudah terlaksana

Pada sub-sektor perkebunan Rehabilitasi dan pengembangan tanaman perkebunan yang telah dilakukan pada tahun 2006 sebesar 6.703 Ha. Jika mengacu kepada data Rencana Induk, luas areal kebun yang rusak adalah sebesar 102.461 Ha. Namun berdasarkan sumber data dari Dinas Perkebunan Aceh, areal perkebunan yang rusak akibat tsunami seluas 22.000 Ha. (Data kerusakan areal perkebunan dalam Rencana Induk adalah total kerusakan lahan akibat tsunami dan konflik selama 32 tahun, karena selama konflik kebun-kebun tersebut menjadi tidak terurus dan terlantar).

Selain telah merehabilitasi areal kebun seluas tersebut di atas, pada tahun 2006 telah dilakukan penyediaan bibit kelapa sawit sejumlah 685.000 batang dan penyiapan lahan (*Land clearing*) untuk perkebunan kelapa sawit 2006 seluas 3.000 Ha yang berlokasi di kabupaten Aceh Jaya, Aceh Barat dan Nagan Raya.

Rehabilitasi dan pengembangan sub-sektor perkebunan di atas telah mampu menyediakan lapangan pekerjaan dan sumber pencaharian bagi 1.776 keluarga petani perkebunan (KK), sejak pelaksanaan proyek, melalui program padat karya rehabilitasi kebun, pembangunan jalan produksi hingga pemeliharaan kebun hingga berproduksi.

Pada tahun 2007 diprogramkan Rehabilitasi perkebunan seluas 10.508 ha. Sehingga secara kumulatif sampai dengan akhir program tahun 2007 akan rehabilitasi lahan perkebunan total seluas 17.211 Ha, atau baru mencapai sekitar 10% dari Rencana Induk yaitu sebesar 102,461 Ha.

Sedangkan untuk penyediaan bibit kelapa sawit, pada tahun 2007 diprogramkan sebesar 1,211,500 batang.

Tabel III.55
Sasaran Rencana Aksi Sub Bidang Perkebunan
NAD - Nias

	Program/ Kegiatan	Satuan	Rencana Induk 2005-2009	Kebutuhan Riil 2005-2009	Realisasi 2005-2007	Sasaran 2008-2009
1	Pembangunan jalan produksi	M	*	30.386	1.386	29.000
2	Rehabilitasi Kantor	Unit	*	10	10	0
3	Rehabilitasi, intensifikasi, penanaman, perawatan dan pengembangan tanaman perkebunan (kelapa sawit, kakao, kelapa, karet)	Ha	102.461	32.011	17.211	14.800
4	Pemeliharaan Tanaman Kelapa Sawit	Ha	*	5.700	**	5.700
5	Penyediaan bibit tanaman (kelapa sawit dan Kakao)	Batang	*	1.896.500	1.896.500	0
6	Pendidikan, pelatihan fasilitator dan penyuluh pendamping	Orang	*	535	385	150
7	Pendidikan dan pelatihan masyarakat	Orang	*	405	255	150
8	Peralatan Pengolahan Hasil Kebun Rakyat	Paket	*	28	1	27
9	Pembangunan Gedung Lab Analisa Kualitas Hasil Produksi	Paket	*	2	2	0
10	Kantor Operasional Pengembangan Kawasan Agribisnis Perkebunan Sawit (100 M2)	Unit	*	4	4	0
11	Penelitian dan Pengembangan Teknologi	Paket	*	1	**	1
12	Pembangunan Experimental Farm	Unit	*	2	**	2
13	Bantuan Langsung Masyarakat untuk Pemulihan dan Pengembangan Ekonomi bidang Perkebunan (Revolving)	Paket	*	100	**	100

Sumber : Bapel BRR, 2007

* : Tidak terinci / tercantum dalam Rencana Induk

** : Data belum tersedia

*** : Melebihi target

o : Sudah terlaksana

Sampai dengan tahun 2006 BRR telah melakukan restocking ternak besar (sapi/kerbau) sejumlah 2.650 ekor dan ternak kecil (kambing) sejumlah 13.000 ekor (Grafik). Untuk ternak jenis unggas, terutama ayam ras, restocking baru dilaksanakan sebesar 10.000 ekor. Hal ini atas pertimbangan belakangan ini sedang terjadi wabah penyakit Flu Burung yang sudah menyebar ke Aceh dapat mengancam keselamatan ternak dan manusia, sehingga untuk restocking unggas harus sangat hati-hati.

Jika dibandingkan dengan data Rencana Induk, yakni sejumlah 1.904.587 ekor ternak (ternak besar, kecil dan unggas) hilang, pencapaian realisasi tersebut masih relatif kecil. Selanjutnya data dari Menteri Pertanian (Sub Dinas Peternakan) menyebutkan bahwa ternak yang hilang akibat tsunami adalah sapi = 40.000 ekor; kerbau = 39.000 ekor; kambing dan domba = 65.000 ekor, serta unggas sejumlah 1.800.000 ekor.

Pada tahun 2007 diprogramkan Restocking ternak (Besar, Kecil, unggas) sejumlah 5.935 ekor. Sehingga secara kumulatif sampai dengan akhir program tahun 2007 Restocking ternak (Besar, Kecil, unggas) sejumlah 32,617 ekor atau baru mencapai sekitar 2% dari Rencana Induk sebesar 1,904,587 ekor.

Program pendukung pengembangan peternakan pada tahun 2007 adalah pembangunan Poskeswan 7 unit; pembangunan Pasar Hewan sebanyak 1 unit; Tempat Pemotongan Hewan sebanyak 2 unit; Tempat Penjualan Daging sebanyak 1 unit; pengembangan Kebun HMT sebesar 70 Ha dan Tempat Penempatan Ternak sebanyak 2 unit

Tabel III.56
Sasaran Rencana Aksi Sub Bidang Peternakan
NAD - Nias

	Program/ Kegiatan	Satuan	Rencana Induk 2005-2009	Kebutuhan Riil 2005-2009	Realisasi 2005-2007	Sasaran 2008- 2009
1	Restoking ternak (besar, kecil, unggas)	Ekor	1.887.260	36.817	32.617	4.200
2	Pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan menular	Ekor	*	35.785	31.895	3.890
3	Pelayanan Inseminasi Buatan	Dosis	*	53.270	33.000	20.270
4	Pembangunan Poskeswan dan gedung fasilitas IB	Unit	*	30	16	14
5	Pembangunan pasar hewan	Unit	*	7	2	5
6	Tempat Penjualan daging	Unit	*	7	7	0
7	Pembangunan tempat/Rumah pemotongan ternak	Unit	*	15	6	9
8	Pembangunan BPP, gedung karantina hewan dan laboratorium	Unit	*	2	2	0
9	Pembangunan Rumah Paramedis	Unit	*	6	6	0
10	Pembangunan Kandang Isolasi, penggemukan Ternak dan kandang produksi ternak unggas	Unit	*	11	11	0
11	Pembangunan Kandang Isolasi, penggemukan Ternak dan kandang produksi ternak unggas	Unit	*	11	11	0
12	Pengadaan Starage N2 Cair Lengkap	Paket	*	1	1	0
13	Peningkatan kegiatan laboratorium dan obat-obatan poskeswan	Paket	*	8	1	7
14	BPLM Kandang Ternak Pola Kemitraan	Paket	*	22	22	0
15	Pelatihan penyuluh dan petugas inseminator	Orang	*	212	92	20
16	BPLM Kandang Ternak Pola Kemitraan	Paket	*	22	**	22

Program/ Kegiatan		Satuan	Rencana Induk 2005-2009	Kebutuhan Riil 2005-2009	Realisasi 2005-2007	Sasaran 2008-2009
17	Penyebaran Ternak dan Pengembangan Kawasan Peternakan	Kwsn	*	6	1	5
18	Pembinaan Breeding Center	Paket	*	1	**	1
19	Penelitian dan Pengembangan Teknologi Peternakan	Paket	*	1	**	1
20	Bantuan Langsung Masyarakat untuk Pemulihan dan Pengembangan Ekonomi bidang Peternakan (Bantuan Revolving Melalui LKM)	Paket	*	150	**	150

Sumber : Bapel BRR, 2007

* : Tidak terinci / tercantum dalam Rencana Induk

** : Data belum tersedia

o : Sudah terlaksana

Pada sektor kehutanan dan lingkungan, realisasi pelaksanaan proyek pada tahun anggaran 2005 dan 2006 untuk rehabilitasi hutan pantai dan mangrove seluas 5.113 Ha, dari Rencana Induk seluas 164.840 Ha, atau baru mencapai sekitar 3%.

Sedangkan program lain yang telah terealisasi pada tahun anggaran 2005 dan 2006 antara lain untuk rehabilitasi hutan alam seluas 820 Ha; rehabilitasi hutan kota seluas 130 Ha/paket; pengembangan hutan konservasi sejumlah 3 kawasan; pengukuran kawasan hutan (tata batas) sebesar 130 Km; tumpangsari hutan rakyat sebesar 2 paket; peningkatan usaha masyarakat sekitar hutan sebanyak 40 kelompok; peningkatan kelembagaan lokal seluas 20 Ha; restorasi kawasan bufferzone sebesar 188 Ha; transplantasi terumbu karang sejumlah 1 paket dan rehabilitasi fasilitas kantor dinas sejumlah 1 unit.

Program tahun 2007 untuk sektor kehutanan dan lingkungan adalah rehabilitasi hutan pantai dan mangrove seluas 6.662 Ha dari Rencana Induk seluas 164.840 Ha, atau baru mencapai sekitar 7%.

Untuk program tahun 2007 lainnya yang berkaitan dengan sektor kehutanan dan lingkungan adalah rehabilitasi hutan alam seluas 961 Ha; rehabilitasi hutan kota seluas 36 Ha; magersari (tumpangsari di hutan) seluas 115 Ha; bantuan bibit kepada masyarakat sejumlah 20.000 batang; pengembangan hasil hutan Non Kayo sejumlah 7 Kabupaten; pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir sejumlah 9 Kabupaten; pemberdayaan masyarakat sekitar hutan sejumlah 2 lokasi; Pawang Uteun & Inong Beuraleu sejumlah 3 paket dan Pembangunan Laboratorium. Klimatologi lapangan sejumlah 1 paket.

Tabel III.57
Sasaran Rencana Aksi Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan
NAD - Nias

Program/ Kegiatan		Satuan	Rencana Induk 2005-2009	Kebutuhan Riil 2005-2009	Realisasi 2005-2007	Sasaran 2008-2009
1	Rehabilitasi fasilitas kantor dinas kehutanan provinsi	Unit	*	1	1	0
2	Penguatan Kawasan Hutan (Tata Batas, Rekonstruksi, orientasi dan Pemeliharaan batas)	Km	*	134	134	0
3	Pengembangan Database Kehutanan dan Pelatihan Sistem	Paket	*	3	3	0

	Program/ Kegiatan	Satuan	Rencana Induk 2005-2009	Kebutuhan Riil 2005-2009	Realisasi 2005-2007	Sasaran 2008-2009
	Informasi Kehutanan					
4	Rehabilitasi/Pemeliharaan Hutan Alam dan Lahan	Ha	*	164.044	164.044	0
5	Peningkatan Usaha Masyarakat Di sekitar kawasan hutan	Klp	*	76	76	0
6	Rehabilitasi/Pemeliharaan Hutan Pantai dan Mangrove	Ha	164.840	16.775	11.775	5.000
7	Peningkatan kapasitas kelembagaan lokal	Paket	*	23	23	0
8	Rehabilitasi Hutan kota	Ha	*	166	166	0
9	Restorasi kawasan bufferzone	Ha	*	267	267	0
10	Transplantasi terumbu karang	Paket	*	1	1	0
11	Bantuan Pembangunan Laboratorium Klimatologi Lapangan	Paket	*	1	1	0
12	Perbaikan dan Pengembangan fasilitas Ekowisata (Wilayah Wisata)	Paket	*	3	3	0
13	Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu	Kab	*	7	7	0
14	Penghijauan Reservoir Waduk Alue Baroh Desa Klip	Paket	*	1	7	0
15	Pengembangan Hutan Rakyat	Kab	*	13	13	0
16	Pengembangan Hutan Rakyat	Ha	*	1.513	**	1.513
17	Pengembangan Hutan Pendidikan STIK (Belanja Sosial)	Pkt	*	1	**	1
18	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Petugas Kehutanan	Org	*	150	**	150
19	Pendidikan dan Pelatihan Masyarakat Sekitar Hutan	Org	*	160	**	160
20	Pemulihan Kembali Kegiatan Ekonomi Masyarakat yang Berbasis Sumber Daya Alam di sekitar kawasan hutan	Org	*	250	**	250

Sumber : Bapel BRR, 2007

* : Tidak terinci / tercantum dalam Rencana Induk

** : Data belum tersedia

0 : Sudah terlaksana

Sasaran Rencana Aksi Sub Bidang kehutanan dan lingkungan 2008-2009 yaitu pengembangan hutan rakyat, pendidikan pelatihan teknis dan pemulihan kembali kegiatan ekonomi masyarakat di sekitar hutan.

Tabel III.58
Permasalahan dan Rencana Tindak Lanjut Bidang Pemulihan Ekonomi
sub bidang Pertanian NAD - Nias

Bidang	Sub Bidang	Isu dan Masalah	Rencana Tindak Lanjut
BIDANG PEMULIHAN EKONOMI	Pertanian	Sub Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura • Terehabilitasinya Lahan sawah seluas 2.470 ha • Terbangunnya BBU dan BBI skala besar sebanyak 2 Unit • Pembangunan gudang RMU skala besar sebanyak 8 unit • Terbangunnya terminal agribisnis 2 unit dan kawasan Tanaman Pangan Hortikultura sebanyak 5 kawasan	• Memulihkan fasilitas pelayanan masyarakat guna memenuhi standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah, melalui mobilisasi berbagai sumber daya yang tersedia seperti APBN dan bantuan terutama kepada sarana pelayanan masyarakat yang berkaitan langsung dengan kegiatan ekonomi masyarakat termasuk nelayan dan pertanian seperti pemulihan pangkalan pendaratan ikan, tempat pelelangan ikan, sarana irigasi serta pusat-pusat penjualan lainnya • Memulihkan dan meningkatkan kegiatan pertanian • merehabilitasi kapasitas pertanian; merehabilitasi layanan pertanian yang penting milik pemerintah maupun swasta; merehabilitasi kondisi teknis, perencanaan dan dukungan manajemen terhadap program kerja, dengan penekanan pada pemberdayaan masyarakat korban bencana • Kebutuhan dan langkah-langkah untuk menjamin ketersediaan pangan bagi pengungsi korban tsunami • Langkah-langkah untuk menjamin fungsi pemerintahan; • Langkah-langkah untuk memulihkan kegiatan ekonomi pertanian, yang mencakup komoditi tanaman pangan, peternakan, perkebunan dan hortikultura; • Pencegahan dan penanggulangan masalah pangan; dan • Pengembangan dan rehabilitasi infrastruktur pertanian dan pedesaan • Merehabilitasi dan membangun kawasan pesisir khususnya pada zona penyangga (<i>green belt</i>), kawasan tambak dan hutan sesuai dengan Rencana Tata Ruang dan karakter pantai • Mengamankan fungsi kawasan lindung eksisting • Pemulihan kembali kegiatan perekonomian masyarakat yang berbasis sumber daya alam, dengan strategi menyediakan material dasar pembangunan lainnya yang dapat mengantisipasi penebangan hutan yang terjadi • Pelibatan masyarakat dan
		Sub Bidang Perkebunan • Rehabilitasi lahan perkebunan seluas 14.800 Ha • Lanjutan pemeliharaan tanaman perkebunan 5.700 Ha	
		Sub Bidang Peternakan • Restocking ternak (besar, kecil, unggas) • Pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan menular • Pelayanan Inseminasi Buatan	
		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan • Rehab Hutan Mangrove, seluas 162.815 ha	

Bidang	Sub Bidang	Isu dan Masalah	Rencana Tindak Lanjut
			penggunaan pranata sosial dan budaya lokal dalam pelestarian hutan lindung dan pengendalian pemanfaatan hutan lainnya • Pemulihan kembali sistem kelembagaan pemerintahan terutama Departemen Kehutanan

Sumber : Bapel BRR, 2007

III.4.2. Perikanan

Pada sub sektor perikanan, realisasi pelaksanaan proyek pada tahun anggaran 2005 dan 2006 untuk budidaya perikanan telah merehabilitasi tambak yang rusak sejumlah 13.403 Ha dari kerusakan tambak seluas 36.597 Ha (Rencana Induk), atau mencapai 36%.

Sedangkan untuk perikanan tangkap (nelayan), BRR telah menyediakan sejumlah 633 unit Kapal motor kayu ukuran (<3,5 – 8 GT) dan boat yang direhabilitasi sejumlah 50 unit dan pengadaan alat tangkap sejumlah 89 paket. Berdasarkan data Rencana Induk jumlah kapal motor kayu yang rusak adalah 21.455 unit dan 16.012 unit alat tangkap. Data lain, berdasarkan sumber dari FAO (2005) menyebutkan boat yang rusak sejumlah 10.569 unit.

Prasarana Pelabuhan Perikanan (PPI/PPP) sampai dengan tahun 2006 telah berhasil direhab sejumlah 8 unit dan telah dibentuk 216 UPI (Unit Pengolahan Ikan) dan bantuan agroinput (pupuk, benih ikan, obat-obatan, pakan ikan dan fasilitas produksi lainnya) untuk melayani areal tambak yang telah berhasil direhabilitasi seluas 5.304 Ha.

Berdasarkan Rencana Induk jumlah Pelabuhan Perikanan yang rusak adalah sebesar 305 unit yang rusak. Gedung Tempat Pendaratan Ikan Pantai Lampulo seluas 480 M² yang telah selesai dibangun dan difungsikan oleh para nelayan untuk melakukan kegiatan perekonomiannya. Dalam hal ini pelaksanaannya sudah sesuai dengan Rencana Induk.

Tabel III.59
Sasaran Rencana Aksi Sub Bidang Perikanan
NAD - Nias

Program/ Kegiatan		Satuan	Rencana Induk 2005-2009	Kebutuhan Riil 2005-2009	Realisasi 2005- 2007	Sasaran 2008- 2009
A	Perikanan Tangkap					
1	Pembuatan Boat Nelayan	Unit	21.455	3.532	3.520	12
2	Pengadaan Alat Tangkap	Unit	16.012	3.532	3.520	12
3	Pelabuhan Perikanan					
	- Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Lampulo	Unit	1	1	1	1 (lanjutan)
	- Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)	Unit	49	18	12	6
	- Pelabuhan Perikanan lebih kecil dari PPI	Unit	253	13	**	13
4	Galangan Kapal	Paket	*	67	67	0
5	Pembangunan Solar Packed Dealer Nelayan (SPDN)	Unit	*	4	4	0
6	Pengadaan GPS dan Fishfinder	Unit	*	72	**	72
7	Pembuatan Rumpon	Paket	*	26	26	0
8	Bagan Apung	Unit	*	59	50	9
B	Perikanan Budidaya					

Program/ Kegiatan		Satuan	Rencana Induk 2005-2009	Kebutuhan Riil 2005-2009	Realisasi 2005-2007	Sasaran 2008-2009
1	Rehabilitasi Tambak	Ha	36.597	18.631	14.791	3.840
2	Agroinput Tambak	Ha	*	10.532	6.692	3.840
3	Bantuan Hatchery	Unit	*	**	53	**
4	Pembangunan Keramba Jaring Apung	Unit	*	485	64	121
C Pengolahan Ikan						
1	Pabrik Es	Unit	*	64	56	8
2	Pengadaan Cold Storage	Paket	*	7	**	7
3	Unit Pengolahan Ikan (UPI)/Pengembangan Sentra Pengolahan Ikan (SPI)	Paket	*	229	217	12
4	Pembangunan Laboratorium Perikanan	Paket	*	1	**	1
D Fasilitas Penunjang Lainnya						
1	Fasilitas Lab SUPM Ladong	Paket	1	1	**	1
2	Fasilitas Lab GIS Marine Centre (Dinas Kelautan dan Perikanan)	Paket	*	1	1	0
3	Pembangunan Pasar Ikan	Paket	*	7	**	7
4	Pemulihan Kembali Kegiatan Ekonomi Masyarakat Bidang Perikanan	Paket	*	100	**	100
5	Penelitian dan Pengembangan Teknologi Perikanan dan Kelautan	Paket	*	2	**	2
6	Pengembangan Kelembagaan	Paket	*	94	88	6

Sumber : Bapel BRR, 2007

* : Tidak terinci / tercantum dalam Rencana Induk

** : Data belum tersedia

0 : Sudah terlaksana

Sasaran Rencana Aksi Sub Bidang perikanan untuk tahun 2008-2009 yaitu perikanan tangkap, perikanan budidaya dan pengolahan ikan.

Tabel III.60
Permasalahan dan Rencana Tindak Lanjut Bidang Pemulihan Ekonomi
sub bidang Perikanan NAD - Nias

Bidang	Sub Bidang	Isu dan Masalah	Rencana Tindak Lanjut
BIDANG PEMULIHAN EKONOMI	Perikanan	• Perikanan Tangkap • Perikanan Budidaya • Pengolahan Ikan • Fasilitas Penunjang Lainnya	

Sumber : Bapel BRR, 2007

III.4.3 Pengembangan Usaha

Sub bidang Pengembangan Usaha dibagi ke dalam 4 (empat) bagian, yaitu Industri, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil-Menengah (UKM), Ketenagakerjaan dan Pariwisata.

Tabel III.61
Sasaran Rencana Aksi Sub Bidang Industri
NAD - Nias

	Program/ Kegiatan	Satuan	Rencana Induk 2005-2009	Kebutuhan Riil 2005-2009	Realisasi 2005-2007	Sasaran 2008-2009
1	Bantuan Langsung Masyarakat Industri	Orang	92.000	5.214	5.214	0
2	Peningkatan sarana dan prasarana industri pada pelabuhan Malahayati	Unit	*	1	1	0
3	Pilot Project Pengembangan Industri Garam Rakyat	Lokasi	*	3	3	0
4	Fasilitas Pendukung industri	Unit	*	105	105	0
5	Pengadaan peralatan Pendukung Alat Produksi dan penyelesaian bangunan gedung batik Aceh serta pengembangan desa batik Aceh	Paket	*	3	3	0
6	Peningkatan Kualitas Produk pada Sentra Industri dan Pengembangan Kerajinan Aceh Besar	Paket	*	1	1	0
7	BLM Penguatan Perajin Sentra Dan Non Sentra Industri	Paket	*	29	24	5
8	BLM Modal LKM	Unit	*	138	43	105
9	Bantuan Pengembangan Industri Oleh Dekranas	Paket	*	1	1	0
10	Bantuan Pengembangan Ekonomi Produktif	Kab	*	4	4	0
11	Pembangunan Pabrik Es	Paket	*	3	3	0
12	Pengembangan Sarana Pengolahan Komoditi	Unit	*	6	**	6

Sumber : Bapel BRR, 2007

* : Tidak terinci / tercantum dalam Rencana Induk

** : Data belum tersedia

0 : Sudah terlaksana

Sasaran Rencana Aksi Sub Bidang industri tahun 2008-2009 yaitu meliputi BLM modal LKM, dan pengembangan sarana pengolahan komoditi.

Tabel III.62
Sasaran Rencana Aksi Sub Bidang Perdagangan
NAD - Nias

	Program/ Kegiatan	Satuan	Rencana Induk 2005-2009	Kebutuhan Riil 2005-2009	Realisasi 2005-2007	Sasaran 2008-2009
1	Bantuan Modal Bergulir Bagi Grosir Dan Pedagang Pasar	Unit	*	13.779	12.639	1.140
2	Pengadaan Cold Storage & Truck Cold Storage	Unit	*	1	1	0
3	Pasar Induk/Grosir/tradisional	Unit	195	89	70	19
4	Rehabilitasi/Pembangunan Gudang Transito	Paket	*	1	1	0

	Program/ Kegiatan	Satuan	Rencana Induk 2005-2009	Kebutuhan Riil 2005-2009	Realisasi 2005-2007	Sasaran 2008-2009
5	Pembangunan Pasar dan Pertokoan di Labui	Paket	*	1	1	0
6	Pembangunan Halte di Labui	Unit	*	3	3	0

Sumber : Bapel BRR, 2007

* : Tidak terinci / tercantum dalam Rencana Induk

** : Data belum tersedia

o : Sudah terlaksana

Sasaran Rencana Aksi Sub Bidang perdagangan tahun 2008-2009 yaitu meliputi bantuan modal bergilir, dan pengadaan pasar induk.

Tabel III.63
Sasaran Rencana Aksi Sub Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)
NAD - Nias

	Program/ Kegiatan	Satuan	Rencana Induk 2005-2009	Kebutuhan Riil 2005-2009	Realisasi 2005-2007	Sasaran 2008-2009
1	Pemberdayaan Koperasi dan UKM Melalui LKM disetiap kecamatan	Unit	*	444	359	85
2	Bantuan Modal LKM untuk Usaha Masyarakat dan BLM aset produktif	Orang	*	77.316	77.316	0
3	Penguatan Kelembagaan Aceh Micro Finance	Unit	*	2	1	1
4	Pengembangan AMF Center dan perwakilannya di Kab/Kota	Unit	*	43	22	21
5	Bantuan Teknis dan manajemen LKM	Paket	*	100	100	0
6	Bantuan Modal Usaha Penghuni Huntara	Paket	*	1	1	0
7	Pendirian Kelembagaan Koperasi Terpadu	Paket	*	1	1	0
8	Bantuan Langsung Masyarakat Melalui Koperasi	Unit	*	60	60	0
9	Penyelenggaraan Program Pelatihan	Orang	*	2.016	2.016	0
10	Pelatihan LKM	Orang	*	410	400	10
11	Penyehatan LKM dan Penegakan Hukum	Paket	*	91	**	91
12	Pengembangan Pusat Distribusi Koperasi (UKM Trading House)	Paket	*	2	**	2
13	Pengembangan Pusat Pasar Ekspor	Paket	*	2	1	1
14	Penguatan IOO (Investor outreach Office)	Paket	*	2	1	1
15	Penguatan Klinik Kemasan dan Merk UKM	Paket	*	2	1	1

Sumber : Bapel BRR, 2007

* : Tidak terinci / tercantum dalam Rencana Induk

** : Data belum tersedia

*** : Melebihi target

o : Sudah terlaksana

Sasaran Rencana Aksi Sub Bidang UKM tahun 2008-2009 yaitu meliputi pemberdayaan koperasi, pengembangan AMF center, serta penyehatan LKM dan penegakan hukum.

Tabel III.64
Sasaran Rencana Aksi Sub Bidang Ketenagakerjaan
NAD - Nias

	Program/ Kegiatan	Satuan	Rencana Induk 2005-2009	Kebutuhan Riil 2005-2009	Realisasi 2005-2007	Sasaran 2008-2009
1	Jasa Pelatihan	Orang	600.000	41.953	41.953	0
2	Pembangunan/Rehab Balai Latihan Kerja	Unit	5	10	6	4
3	Peralatan Balai Latihan Kerja	Paket	5	10	6	4
4	Pekerja Cash for Work	Orang	*	91.242	91.242	0
5	Pelatihan Pegawai	Orang	*	247	247	0
6	Pembangunan Jalan di Lingkungan BLK	Paket	*	1	1	0
7	Informasi Bursa Kerja	Paket	*	1	1	0
8	Bantuan Modal Bagi Tenaga Kerja Terlatih melalui LKM	Orang	*	750	**	750
9	Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja	Paket	*	5	**	5

Sumber : Bapel BRR, 2007

* : Tidak terinci / tercantum dalam Rencana Induk

** : Data belum tersedia

0 : Sudah terlaksana

Sasaran Rencana Aksi Sub Bidang ketenagakerjaan tahun 2008-2009 yaitu meliputi rehab BLK, peralatan BLK, dan bantuan modal bagi tenaga kerja terlatih.

Tabel III.65
Sasaran Rencana Aksi Sub Bidang Pariwisata
NAD - Nias

	Program/ Kegiatan	Satuan	Rencana Induk 2005-2009	Kebutuhan Riil 2005-2009	Realisasi 2005-2007	Sasaran 2008-2009
1	Pemugaran Kawasan Wisata dan Pengembangan Sarana/Prasarana Objek Wisata	Paket	*	25	19	6
2	Pelatihan Bidang Pariwisata	Paket	*	11	11	0
3	Penyelenggaraan Pesta Rakyat	Paket	*	4	4	0
4	Pengembangan dan studi pengembangan wisata	Paket	*	57	**	57
5	Pengembangan Usaha Ekonomi Pariwisata	Paket	*	156	156	0
6	Peningkatan Kualitas SDM Kepariwisata dan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Objek Wisata (Belanja Lembaga Sosial Lainnya)	Orang	*	100	**	120

Sumber : Bapel BRR, 2007

* : Tidak terinci / tercantum dalam Rencana Induk

** : Data belum tersedia

0 : Sudah terlaksana

Sasaran Rencana Aksi Sub Bidang pariwisata tahun 2008-2009 yaitu meliputi pemugaran kawasan wisata, pengembangan wisata dan peningkatan kualitas SDM pariwisata.

Tabel III.66
Permasalahan dan Rencana Tindak Lanjut Bidang Pemulihan Ekonomi
sub bidang Pengembangan Usaha NAD - Nias

Bidang	Sub Bidang	Isu dan Masalah	Rencana Tindak Lanjut
BIDANG PEMULIHAN EKONOMI	Pengembangan usaha	Sub Bidang Industri • Telah tercapai Perdagangan • Telah tercapai Koperasi dan UKM • Telah tercapai Ketenagakerjaan • Peralatan BLK, sebanyak 2 unit Pariwisata • Pemugaran Kawasan Wisata dan Pengembangan Sarana/Prasarana Objek Wisata • Pengembangan dan studi pengembangan wisata • Peningkatan Kualitas SDM Kepariwisata dan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Objek Wisata (Belanja Lembaga Sosial Lainnya)	• Melakukan penyempurnaan berbagai perluasan kesempatan kerja; • Koordinasi penyusunan rencana tenaga kerja dan informasi pasar kerja; • Penyelenggaraan program-program pelatihan kerja berbasis kompetensi • Penyediaan investasi padat karya untuk pembangunan infrastruktur; • Pembangunan lembaga pelayanan ketenagakerjaan pasca bencana; • Pelatihan teknis keterampilan berbasis kompetensi masyarakat

Sumber : Bapel BRR, 2007

III.5 Bidang Pemulihan Kelembagaan Dan Hukum

Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada Bidang pemulihan kelembagaan dan hukum dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan yang secara garis besar dikelompokkan menjadi 3, yaitu: Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemda, Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Hukum, dan Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Ketertiban, Keamanan dan Ketahanan Masyarakat (K3M).

Sub Bab ini mencoba menguraikan Sasaran Program dan Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi tahun 2005 s/d 2009 untuk bidang pemulihan kelembagaan dan hukum. Realisasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi (hingga Mei 2007) juga akan diuraikan lebih lanjut sehingga nantinya dapat diidentifikasi program dan kegiatan yang perlu dilanjutkan pasca Evaluasi Paruh Waktu.

III.5.1 Kelembagaan Daerah

Pembangunan Sarana dan Prasarana terbagi atas beberapa program/kegiatan prioritas yaitu Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sarana dan Prasarana Pemda, Peningkatan Profesionalisme Aparat Pemda, Peningkatan Kapasitas Kelembagaan PEMDA, Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemda, Peningkatan Kerjasama Antar Daerah, Penataan Administrasi

Kependudukan, dan Penataan Administrasi Wilayah Pemerintah. Masing-masing program/kegiatan akan diuraikan pada penjelasan dan Tabel Berikut.

Tabel III.67
Sasaran Rencana Aksi Sub Bidang Sarana Prasarana PEMDA
NAD - Nias

	Program/ Kegiatan	Satuan	Rencana Induk 2005-2009	Kebutuhan Riil 2005-2009	Realisasi 2005-2007	Sasaran 2008-2009
1	Perencanaan	Dokumen	550	**	**	**
2	Ktr KDH/DPRD/Dinas/Meuligo	Unit	76	11	30	***
3	Kantor Kecamatan	Unit	23	69	20	49
4	Rumah Dinas Camat	Unit	*	106	80	26
5	Kantor Desa/Kelur.	Unit	450	1119	316	803
6	Ambulan Pemda	Paket	12	**	**	**
7	Pemadam Kebakaran	Paket	12	**	**	**
8	Ktr Mukim/Balee	Unit	*	419	185	234

Sumber : Bapel BRR, 2007

* : Tidak terinci / tercantum dalam Rencana Induk

** : Data belum tersedia

*** : Target terlampaui

Pada Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sarana dan Prasarana Pemda oleh BRR, diperkirakan perlu melanjutkan pelaksanaan pembangunan Kantor KDH/DPRD/Dinas/Meuligo sebanyak 46 unit, Kantor Kecamatan 3 unit, Kantor Desa/Kelurahan 13 unit, Ambulan Pemda 12 unit, Pemadam Kebakaran 12 unit, dan kantor mukim (Kep. Nias) sebanyak 573 unit. Pembangun Rumah Dinas Camat melebihi target Rencana induk sebanyak 80 unit dan kantor mukim /Balee melebihi target Rencana induk 185 unit. Adapun Sasaran Program dan Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi serta Realisasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi (hingga Mei 2007) dapat dilihat lebih detail pada tabel.

Tabel III.68
Sasaran Rencana Aksi Sub Bidang Sarana Prasarana PEMDA
(Program Peningkatan Profesionalisme Aparat Pemda)
NAD - Nias

	Program/ Kegiatan	Satuan	Rencana Induk 2005-2009	Kebutuhan Riil 2005-2009	Realisasi 2005-2007	Sasaran 2008-2009
1	Pemberdayaan dan Fasilitasi Aparat PEMDA	Paket	*	**	3	**
2	Penanganan masalah administrasi Kepegawaian	Paket	*	**	1	**
3	Penyusunan Sisdur Adm Paska Bencana bagi PNS	Paket	*	**	**	**
4	Penyediaan tenaga-tenaga Kontrak/Suplemen	Paket	*	**	**	**
5	Penyelesaian rekrutmen CPNS yang telah dilaksanakan	Paket	*	**	**	**
6	Penataan & Penyediaan (rekrutmen & mutasi) aparatur Pemda	Paket	*	**	5	**
7	Penyusunan Rencana Pengelolaan Pegawai	Pemda	13	**	14	**
8	Peningkatan Kapasitas Mitigasi Bencana Pemda	Kab/k	13	**	7	**

Sumber : Bapel BRR, 2007

* : Tidak terinci / tercantum dalam Rencana Induk

** : Data belum tersedia

Pada Program Peningkatan Profesionalisme Aparat Pemda, kegiatan Pemberdayaan dan Fasilitasi Aparat Pemda melebihi target Rencana induk sebanyak 3 paket, Penanganan masalah administrasi Kepegawaian melebihi target Rencana induk sebanyak 1 paket, Penyusunan Sisdur Adm Paska Bencana bagi PNS belum terealisasi, Penyediaan tenaga-tenaga Kontrak/Suplemen belum terealisasi, Penyelesaian rekrutmen CPNS yang telah dilaksanakan belum terealisasi, Penataan & Penyediaan (rekrutmen & mutasi) aparatur Pemda melebihi target Rencana induk sebanyak 5 paket, Penyusunan Rencana Pengelolaan Pegawai melebihi target Rencana induk sebanyak 1 paket, dan kegiatan Peningkatan Kapasitas Mitigasi Bencana Pemda perlu dilanjutkan sebanyak 6 paket. Adapun Sasaran Program dan Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi serta Realisasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi (hingga Mei 2007) dapat dilihat lebih detail pada tabel.

Tabel III.69
Sasaran Rencana Aksi Sub Bidang Sarana Prasarana PEMDA
(Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan PEMDA)
NAD - Nias

	Program/ Kegiatan	Satuan	Rencana Induk 2005-2009	Kebutuhan Riil 2005-2009	Realisasi 2005-2007	Sasaran 2008-2009
1	Penyelamatan Administrasi Pemerintahan	Pemda	13	**	23	**
2	Penyusunan Rencana Penataan Organisasi Pemda	Pemda	13	**	16	**
3	Pemantapan dan Monev Penataan Organisasi Pemda	Pemda	13	**	4	**
4	Penataan SisKom Humas daerah (media centre)		13	**	1	**
5	BOP Kecamatan/Gampong (Buku, Komputer, Fax, Roda2, Seragam)	Kab/k	13	**	23	**
		Kec.	77	**	263	**
6	Peningkatan kapasitas pemerintahan kecamatan/mukim/gampong	Kab/k	13	**	7	**
		Kec.	77	**	263	**
7	Rencana Perbaikan Sisdur Kerja lembaga Pemerintah	Keg	*	**	21	**

Sumber : Bapel BRR, 2007

* : Tidak terinci / tercantum dalam Rencana Induk
 ** : Data belum tersedia
 o : Sudah terlaksana

Program peningkatan kapasitas kelembagaan Pemda memiliki kegiatan yang berkenaan dengan penyelesaian administrasi, penyusunan rencana tata organisasi, sistem komunikasi, monev dan peningkatan kapasitas kelembagaan. Beberapa pencapaian sampai saat ini telah mencapai lebih dari 100%, yaitu kegiatan penyelamatan administrasi pemerintahan (176%), penyusunan penataan organisasi pemda (123.1%) dan BOP kecamatan/Gampong (341.6%). Program ini terutama dilaksanakan pada tahun 2006 dan sebagian kecil dilanjutkan pada tahun 2007. namun demikian beberapa pencapaian masih sedikit sampai dengan tahun 2007 seperti pada kegiatan penataan siskom humas daerah yang pencapaiannya baru mencapai 7.7%.

Tabel III.70
Sasaran Rencana Aksi Sub Bidang Sarana Prasarana PEMDA
(Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemda)
NAD - Nias

	Program/ Kegiatan	Satuan	Rencana Induk 2005-2009	Kebutuhan Riil 2005-2009	Realisasi 2005-2007	Sasaran 2008-2009
1	Peningkatan Kapasitas Legislatif dalam PKeuD	Kab/k	13	**	25	**
2	Penataan Keuangan Daerah dan Pengelolaannya	Kab/k	13	**	22	**

Sumber : Bapel BRR, 2007

* : Tidak terinci / tercantum dalam Rencana Induk

** : Data belum tersedia

o : Sudah terlaksana

Program peningkatan kapasitas keuangan Pemda memiliki dua kegiatan dan pencapaian keduanya sejak tahun 2006 telah mencapai lebih dari 100%. Selanjutnya sampai tahun 2007 terdapat beberapa penambahan. Masing-masing adalah kegiatan peningkatan kapasitas legislatif (192.3%) dan penataan keuangan daerah dan pengelolaannya (169.2%).

Tabel III.71
Sasaran Rencana Aksi Sub Bidang Sarana Prasarana PEMDA
(Program Peningkatan Kerjasama Antar Daerah)
NAD - Nias

	Program/ Kegiatan	Satuan	Rencana Induk 2005-2009	Kebutuhan Riil 2005-2009	Realisasi 2005-2007	Sasaran 2008-2009
1	Optimalisasi Kerjasama antara Daerah	Paket	*	**	2	**
2	Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Pusat dan Daerah	Paket	*	**	1	**

Sumber : Bapel BRR, 2007

* : Tidak terinci / tercantum dalam Rencana Induk

** : Data belum tersedia

Program peningkatan kerjasama antar daerah juga memiliki dua kegiatan yaitu optimalisasi kerjasama antar daerah dan koordinasi penyelenggaraan pusat dan daerah. Pencapaian pada tahun 2006 masing-masing telah menyelesaikan 1 paket. Pada tahun 2007 pelaksanaan optimalisasi kerjasama pemerintah daerah melaksanakan 1 paket lagi.

Tabel III.72
Sasaran Rencana Aksi Sub Bidang Sarana Prasarana PEMDA
NAD - Nias

	Program/ Kegiatan	Satuan	Rencana Induk 2005-2009	Kebutuhan Riil 2005-2009	Realisasi 2005-2007	Sasaran 2008-2009
1	Penataan Administrasi Kependudukan	Dok	*	**	73	**
2	Penataan Administrasi Wilayah Pemerintah	Kab./kota	13	**	**	**
3	Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Paket	*	**	1	**
	Layanan Rehab Kessos (Trauma Centre)		*	**	**	**
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana		*	**	1	**
	Penguatan dan Fasilitasi Lembaga Masy.	Paket	*	**	2	**

Program/ Kegiatan		Satuan	Rencana Induk 2005-2009	Kebutuhan Riil 2005-2009	Realisasi 2005-2007	Sasaran 2008-2009
	FKK Stakeholder RR	Paket	*	**	2	**
4	Penguatan Kelembagaan Demokrasi		*	**	**	**
	Dukungan Penyiapan KDH dan DPRD	Kab/k	*	**	21	**
5	Peraturan Perundang-Undangan (Desentralisasi/OTDA)		*	**	**	**
	Harmonisasi Peraturan di Aceh	Paket	*	**	7	**
6	Pengelolaan SDM Aparatur		*	**	**	**
	Fasilitasi Penyediaan Aparat Instansi Vertikal di Aceh		*	**	**	**

Sumber : Bapel BRR, 2007

* : Tidak terinci / tercantum dalam Rencana Induk

** : Data belum tersedia

o : Sudah terlaksana

Beberapa kegiatan pembangunan sarana dan prasarana lainnya, ada yang belum dikerjakan (yaitu penataan administrasi wilayah pemerintahan) dan kegiatan lainnya lainnya belum dapat dilihat kemajuannya karena belum dapat diperbandingkan dengan rencana induk (seperti kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial, Penguatan dan Fasilitasi Lembaga Masyarakat, FKK Stakeholder RR, Dukungan Penyiapan KDH dan DPRD dan Harmonisasi Peraturan di Aceh).

Tabel III.73
Permasalahan dan Rencana Tindak Lanjut Bidang Pemulihan Kelembagaan dan Hukum sub bidang Kelembagaan Daerah NAD - Nias

Bidang	Sub Bidang	Isu dan Masalah	Rencana Tindak Lanjut
BIDANG PEMULIHAN KELEMBAGAAN DAN HUKUM	Kelembagaan daerah	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sarana Prasarana PEMDA - Ktr KDH/DPRD/Dinas/Meuligo, sebanyak 46 unit - Kebutuhan Kantor Kecamatan, sebanyak 3 unit - Rehab gedung KPPN Gunung Sitoli - Pembangunan Kantor Desa/Kelur, sebanyak 134 unit - Pengadaan Ambulan Pemda, sebanyak 12 paket - Pengadaan Pemadam Kebakaran, sebanyak 12 paket	- Merehabilitasi prasarana pemerintah daerah yang permanen berdasarkan masterplan dan rencana teknis (DED); - Menyediakan sarana kerja pemerintah daerah dan peralatan mitigasi bencana untuk mendukung pelayanan publik - Memfasilitasi dan mendukung ketersediaan sarana dan prasarana <i>trauma centre</i>, sistem kehumasan Pemda, dan forum komunikasi

Sumber : Bapel BRR 2007

III.5.2 Hukum

Sepanjang tahun 2005-2006 pembangunan di bidang hukum lebih menitikberatkan pada pembangunan kembali berbagai gedung perkantoran dan fasilitas di bidang hukum yang mengalami kerusakan. Penyediaan sarana dan prasarana hukum pasca bencana di Aceh ini hampir 40% sudah berhasil dikerjakan, mulai dari rehabilitasi gedung perkantoran hingga penyediaan fasilitas pendukung kerja lembaga hukum. Penyediaan sarana dan prasarana

hukum menjadi jawaban terhadap lumpuhnya sebagian besar kegiatan penegakan hukum di Aceh pasca bencana. Ketiadaan sarana dan prasarana hukum di Aceh pasca bencana membuat banyak kasus-kasus hukum di Aceh tidak bisa dilanjutkan dan diputuskan. Kondisi seperti ini bisa menimbulkan kehilangan kepercayaan dari masyarakat sebagai syarat mutlak keberhasilan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh.

Bentuk pembangunan di bidang hukum yang telah dilakukan hingga tahun 2006 adalah penyediaan gedung perkantoran untuk institusi penegakan hukum di Aceh, seperti kejaksaan, pengadilan, Departemen Hukum dan HAM, Mahkamah Syar'iyah, dan lembaga pemasyarakatan. Rinciannya dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel III.74
Sasaran Rencana Aksi Sub Bidang Hukum
NAD - Nias

Program / Kegiatan		Satuan	Rencana Induk 2005-2009	Kebutuhan Riil 2005-2009	Realisasi 2005-2007	Sasaran 2008-2009
A	SARPRAS KEJAKSAAN					
	Kejati Provinsi NAD	Unit	1	1	1	0
	Kejari	Unit	5	6	7	***
	Rumah Dinas Jaksa	Unit	38	**	21	17
	Peralatan Kantor	Paket	6	**	79	***
	Kendaraan R2	Unit	38	**	17	21
	Kendaraan R4	Unit	15	**	**	**
	Kendaraan Tahanan	Unit	12	**	7	5
B	SARPRAS DEPKUMHAM					
	Rumah Dinas	Unit	49	**	22	27
	Lapas/Rutan	Unit	6	4	5	***
	Bapas	Unit	2	1	2	***
	Kanwil Depkumham	Unit	1	1	1	0
	Kantor Imigrasi	Unit	2	2	2	0
	Kendaraan R2	Unit	8	**	**	**
	Kendaraan R4	Unit	10	**	6	4
	Peralatan Kantor	Paket	3	**	19	**
C	SARPRAS PENGADILAN					
	PT/PTUN	Unit	2	1	1	0
	Pengadilan Negeri	Unit	9	10	15	***
	Kendaraan R2 Pengadilan	Unit	25	**	**	**

Program / Kegiatan		Satuan	Rencana Induk 2005-2009	Kebutuhan Riil 2005-2009	Realisasi 2005-2007	Sasaran 2008-2009
	Kendaraan R4 Pengadilan	Unit	33	**	**	**
	Bangunan Mahkamah Syar'iah	Unit	6	13	3	10
	Kendaraan R2 Mah. Syar'iah	Unit	33	**	12	21
	Kendaraan R4 Mah. Syar'iah	Unit	18	**	17	1
	Peralatan Kantor	Unit	17	**	79	***
	Pengadilan Militer	Paket	*	1	1	0
	Pengawasan Pembangunan Gedung	Paket	*	**	1	**

Sumber : Bapel BRR, 2007

- * : Tidak terinci / tercantum dalam Rencana Induk
- ** : Data belum tersedia
- *** : Target terlampaui
- o : Sudah terlaksana

Dukungan terhadap Mahkamah Syar'iyah menjadi salah satu program penting untuk pembangunan di bidang hukum pasca bencana. Lembaga Mahkamah Syar'iyah merupakan lembaga yang cukup istimewa di Aceh sebagai bagian dari penerapan legal formal Syariat Islam secara menyeluruh. Mahkamah Syar'iyah memegang peranan cukup dominan dalam penegakan hukum di Aceh, sehingga perlu mendapat dukungan yang lebih maksimal. Kedeputan Kelembagaan dan Pengembangan SDM BRR NAD-Nias menjadikan penguatan lembaga Mahkamah Syar'iyah sebagai salah satu sasaran pokok.

Berbagai sarana dan prasarana lembaga Mahkamah Syar'iyah berhasil dibangun hingga tahun 2006, terdata 2 (dua) unit kantor Mahkamah Syar'iyah, 23 unit rumah dinas untuk hakim Mahkamah Syar'iyah, serta 29 unit kendaraan roda 2 dan roda 4 telah berhasil dibangun. Hal ini ditujukan untuk mendukung kinerja penegakan hukum di Aceh.

Untuk lebih meningkatkan kualitas kerja dan pelayanan hukum oleh Mahkamah Syar'iyah, direktorat hukum juga telah mendukung penciptaan sebuah jaringan komunikasi (*information technology* -IT) Mahkamah Syar'iyah. Dengan adanya jaringan IT ini akan lebih mendorong terciptanya transparansi peradilan dan kemudahan akses informasi bagi masyarakat pencari keadilan.

Hingga akhir tahun 2006 untuk penyediaan sarana dan prasarana hukum juga telah terdata sebanyak 10 unit kantor Pengadilan Negeri, 7 unit kantor Kejaksaan Negeri, 20 unit rumah dinas Kejari, 3 unit Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan, 1 unit Kanwil Dephukham, 2 unit Kanwil Imigrasi, dan 1 unit Balai Pemasyarakatan telah berhasil dibangun kembali, serta 289 unit peralatan kantor telah berhasil disumbangkan.

Untuk pembangunan gedung Kejaksaan Tinggi Aceh (yang menurut Rencana Induk hanya di rehabilitasi), dilakukan berdasarkan pertimbangan akan pentingnya fasilitas kantor Kejaksaan Tinggi Aceh sebagai salah satu ujung tombak penegakan hukum di Aceh. Pembangunan sarana yang lebih baik adalah salah satu langkah dalam rangka menumbuhkan sistem kerja lebih efektif dan produktif.

Hal penting lainnya yang telah dilakukan dalam pembangunan di bidang hukum adalah menginisiasi lahirnya Pusat Klinik Hukum. Nantinya Pusat Klinik Hukum ini akan menjadi sebuah pusat lembaga pembinaan dan pelatihan untuk para aparaturnya penegak hukum serta sebagai tempat untuk konsultasi berbagai permasalahan hukum yang terjadi di Aceh.

Untuk pembangunan gedung Kejaksaan Tinggi Aceh (yang menurut Rencana Induk hanya di rehabilitasi), dilakukan berdasarkan pertimbangan akan pentingnya fasilitas kantor Kejaksaan Tinggi Aceh sebagai salah satu ujung tombak penegakan hukum di Aceh. Pembangunan sarana yang lebih baik adalah salah satu langkah dalam rangka menumbuhkan sistem kerja lebih efektif dan produktif.

Hal penting lainnya yang telah dilakukan dalam pembangunan di bidang hukum adalah menginisiasi lahirnya Pusat Klinik Hukum. Nantinya Pusat Klinik Hukum ini akan menjadi sebuah pusat lembaga pembinaan dan pelatihan untuk para aparaturnya penegak hukum serta sebagai tempat untuk konsultasi berbagai permasalahan hukum yang terjadi di Aceh.

Tabel III.75
Permasalahan dan Rencana Tindak Lanjut Bidang Pemulihan Kelembagaan dan Hukum sub bidang Hukum NAD-Nias

Bidang	Sub Bidang	Isu dan Masalah	Rencana Tindak Lanjut
BIDANG PEMULIHAN KELEMBAGAAN DAN HUKUM	Hukum	SARPRAS KEJAKSAAN - Pembangunan Rumah Dinas Jaksa, sebanyak 16 unit - Kebutuhan Kendaraan R2, sebanyak 21 unit	- Mewujudkan jaminan kepastian, perlindungan, penegakan hukum dan HAM, melalui strategi pemulihan dan pemberian hak-hak keperdataan serta penerbitan kembali alat bukti haknya, pemulihan hak-hak yang berkaitan dengan hukum publik, pemberian kembali dokumen identitas, pemberian status hukum Baitul Maal sebagai subjek hukum khusus bagi Provinsi NAD - Mengembalikan fungsi dan tugas pelayanan hukum, adalah melalui strategi mobilisasi tenaga hakim dan tenaga peradilannya serta jaksa dari daerah lain, merehabilitasi dan membangun kembali sarana dan prasarana pengadilan dan kejaksaan serta sarana pendukung lainnya, - Kebijakan terakhir adalah menetapkan payung hukum bagi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi dengan memperhatikan pengarusutamaan kesetaraan gender, melalui strategi menyusun substansi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) untuk pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di bidang: Pertanahan dan tata ruang; Ekonomi dan Ketenagakerjaan; dan Hukum
		SARPRAS DEPKUMHAM - Pembangunan Rumah Dinas, 25 unit - Kebutuhan Kendaraan R2, 8 unit - Kebutuhan Kendaraan R4, 4 unit	
		SARPRAS PENGADILAN - Pembangunan PT/PTUN, 1 unit - Kebutuhan Kendaraan R2 Pengadilan, 25 unit - Kebutuhan Kendaraan R4 Pengadilan, 33 unit - Kebutuhan Kendaraan R2 Mah. Syari'ah, 21 unit - Kebutuhan Kendaraan R4 Mah. Syari'ah, 1 unit	

Sumber : Bapel BRR, 2007

III.5.3 Ketertiban, Keamanan, dan Ketahanan Masyarakat (K3M)

Bidang pemulihan Ketertiban, Keamanan dan Ketahanan Masyarakat (K3M) diupayakan untuk menciptakan kembali ketertiban, keamanan dan ketahanan di dalam masyarakat.

Beberapa kebijakan dalam sub bidang pemulihan di bidang K3M diterapkan melalui koordinasi di bawah satuan kerja: Deop, Delog, dan Desdm Polri NAD-Nias, Penguatan Kelembagaan Komunikasi dan informasi, Peningkatan Komitmen Persatuan Nasional, Pengembangan Pertahanan Matra Darat, Matra Laut, dan Matra Udara NAD-Nias, dan Pengembangan Pertahanan Integratif. Sasaran Rencana Aksi sub Bidang Keamanan dan Ketahanan Masyarakat dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel III.76
Sasaran Rencana Aksi Sub Bidang Keamanan dan Ketahanan Masyarakat (K3M)
NAD - Nias

Program/ Kegiatan		Satuan	Rencana Induk 2005-2009	Kebutuhan Riil 2005-2009	Realisasi 2005-2007	Sasaran 2008-2009
1	Menkopolhukam	unit	1	**	1	**
2	Menkominfo					
	Gedung Kantor Dinas Kominfo	Unit	1	**	1	0
	Stasiun RRI	Unit	1	**	2	***
	Stasiun Transmisi TVRI	Unit	6	**	7	***
	Gedung PWI	Unit	*	**	2	**
	Rumah Dinas	Unit	*	**	5	**
	Kendaraan Roda-2 dan Roda - 4	Unit	*	**	3	**
3	POLRI					
	Pengembangan Sarana dan Prasarana		*	**	5	**
	Penampungan Sementara	Unit	1.416	**	1	1.415
	Mapolda	Kompleks	1	**	2	***
	Brimobda	Kompleks	1	**	2	***
	Dit. Polair	Kompleks	1	**	2	***
	Polres	Unit	5	**	**	**
	Rumah Dinas (Aspol)	Komplek	26	**	57	***
	Polsek	Unit	20	**	8	12
	Pengadaan Material (Gedung)	Unit	*	**	193	***
	Pengadaan Peralatan dan Komlek	Unit	*	**	439	**
	Kendaraan Roda - 4	Unit	*	**	71	**
	Gedung PUSDIK Pasukan Anjing/Kuda		*	**	**	**

Program/ Kegiatan		Satuan	Rencana Induk 2005-2009	Kebutuhan Riil 2005-2009	Realisasi 2005-2007	Sasaran 2008-2009
	Biaya Perencanaan dan Pengawasan		*	**	5	**
4	TNI-AD					
	Bidang ALPAL		*	**	1	**
	- Kendaraan	Unit	*	**	8	**
	- Alat Angkutan Air	Unit	*	**	2	**
	- Alat Berat Zeni	Unit	*	**	27	**
	- Alat Utama Militer (Senjata)	Unit	*	**	295	**
	- Alpasus Zeni	Unit	*	**	39	**
	- Alsatri dan Alsintor	Unit	*	**	4	**
	- Peralatan Lainnya	Unit	*	**	7	**
	- Kendaraan Roda - 2	Unit	*	**	217	**
	- Kendaraan Roda - 4	Unit	*	**	28	**
	Bidang Faskon	Unit	*	**	461	**
	Bidang Alkon	Unit	*	**	1	**
	Korem/Kodim	Unit	*	**	2	**
	Rumah Dinas	Unit	*	**	1	**
	Kompi	Unit	*	**	2	**
	Biaya Perencanaan dan Pengawasan	Paket	*	**	1	**
5	TNI-AL					
	Bidang Bekal Umum	Unit	*	**	1	**
	Bidang ALPAL	Unit	*	**	1	**
	- Alat Perlengkapan Laut Lanal Sabang	Unit	*	**	4	**
	- Peralatan Bengkel	Unit	*	**	4	**

Program/ Kegiatan		Satuan	Rencana Induk 2005-2009	Kebutuhan Riil 2005-2009	Realisasi 2005-2007	Sasaran 2008-2009
	- Peralatan Laut Komar	Unit	*	**	1	**
	- Peralatan Khusus Komar	Unit	*	**	130	**
	- Persenjataan (Senapan dan Pistol)	Unit	*	**	56	**
	- Amunisi	Butir	*	**	19.769	**
	- Kendaraan	Unit	*	**	6	**
	- Peralatan Lainnya	Unit	*	**	76	**
	Bidang Faskon	Unit	*	**	40	**
	Rumah Sakit Sabang	Unit	*	**	-	**
	Rumah Dinas	Unit	*	**	2	**
	Posal Sitoli (Dermaga + Mesjid)	Unit	*	**	2	**
	Pengembangan SARPRAS Gedung	Unit	*	**	3	**
6	TNI-AU					
	Bidang ALPAL	Paket	*	**	**	**
	Bidang Faskon	Paket	*	**	**	**
	Lanud Maimun Saleh	Unit	*	**	1	**
	Lanud Iskandar Muda	Unit	*	**	1	**
	Paskhas AU	Unit	*	**	1	**
	Satrad	Unit	*	**	3	**
7	Matra Integratif				-	
	Bidang Bekal Umum	Unit	*	**	3	**
	Bidang ALPAL		*	**	**	**
	- Kendaraan Roda-2	Unit	*	**	40	**
	- Alat Utama Militer	Unit	*	**	958	**

Program/ Kegiatan		Satuan	Rencana Induk 2005-2009	Kebutuhan Riil 2005-2009	Realisasi 2005-2007	Sasaran 2008-2009
	- Alat Angkutan Air	Unit	*	**	13	**
	- Jembatan Bailey	Unit	*	**	15	**
	- Alat Berat	Unit	*	**	483	**
	- Suku Cadang/Ban Pesawat	Unit	*	**	2.299	**
	Bidang Faskon	Unit	*	**	3	**
	Bidang Kesehatan	Unit	*	**	4	**
	Bidang Alkon	Unit	*	**	1	**

Sumber : Bapel BRR 2007

* : Tidak terinci / tercantum dalam Rencana Induk

** : Data belum tersedia

o : Sudah terlaksana

Sebagian besar program Menkopolhukam, Menkominfo, dan Polri telah mencapai target yang ditetapkan dalam rencana induk (100%), sedangkan pada program TNI-AD, TNI-AL, TNI-AU dan Matra Integratif juga telah mencapai beberapa realisasi sampai dengan tahun 2007. Sebagian data yang ada di program bidang keamanan dan ketahanan masyarakat dirahasiakan.

Tabel III.77
Permasalahan dan Rencana Tindak Lanjut Bidang Pemulihan Kelembagaan dan Hukum sub bidang Ketertiban, Keamanan dan Ketahanan Masyarakat NAD - Nias

Bidang	Sub Bidang	Isu dan Masalah	Rencana Tindak Lanjut
BIDANG PEMULIHAN KELEMBAGAAN DAN HUKUM	Ketertiban, Keamanan, dan Ketahanan Masyarakat (K3M)	Sebagian data dirahasiakan	

Sumber : Bapel BRR 2007

III.6 Pendanaan Rencana Aksi NAD-Nias 2007-2009

Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias, Sumatera Utara telah berlangsung selama dua tahun (2005-2006). Badan Pelaksana BRR NAD-Nias telah melaksanakan berbagai kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang meliputi lima bidang pemulihan. Namun demikian, masih banyak yang belum terselesaikan dalam rangka pemulihan di kedua wilayah bencana tersebut.

Kebutuhan pendanaan Rehabilitasi dan rekonstruksi NAD-Nias tahun 2007 yang sedang berjalan dibutuhkan dana sebesar Rp 8,6 triliun yang bersumber dari on budget (DIPA BRR) sedangkan yang berasal dari off budget (Donor/NGO) dibutuhkan sebesar Rp. 13,7 triliun. Pada tahun 2008 dan 2009 dibutuhkan dana on budget (DIPA BRR) sebesar Rp 13.49 triliun sedangkan yang berasal dari off budget (Donor/NGO) dibutuhkan sebesar Rp. 4,04 triliun.

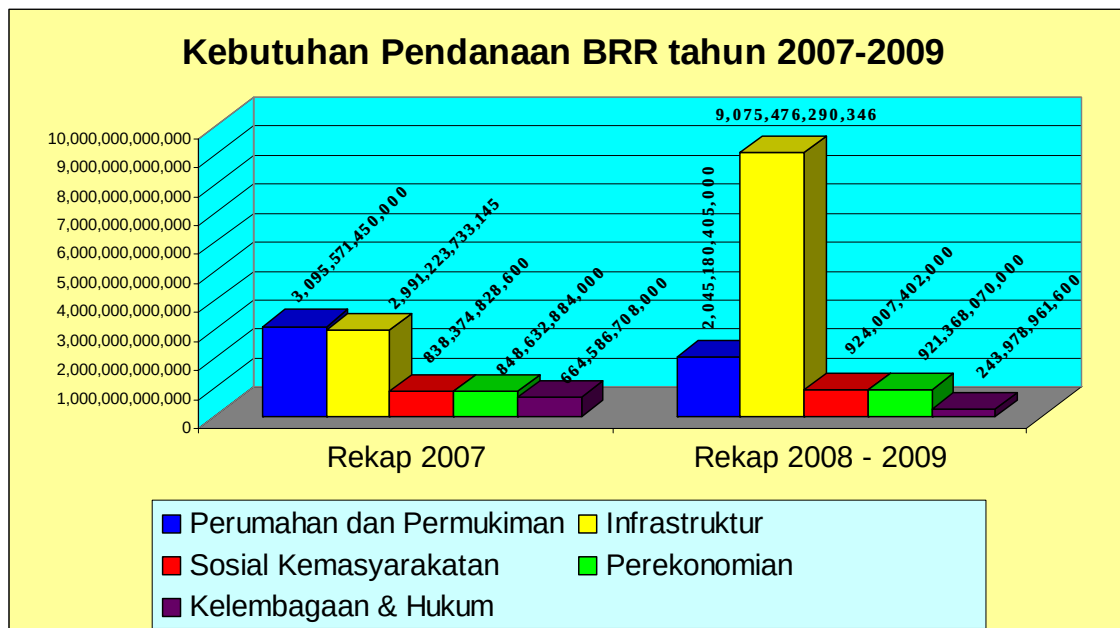
Adapun rincian on budget (DIPA BRR) dan off budget (Donor/NGO) untuk tahun 2007 dan tahun 2008 – 2009 dapat dilihat lebih detail pada tabel berikut :

Tabel III.78
Kebutuhan Pendanaan BRR NAD - Nias tahun 2007-2009

Bidang	Program Utama	2007	2008 - 2009
Perumahan dan Permukiman	Perumahan	2,829,004,800,000	1,897,649,755,000
	Tata Ruang	64,566,650,000	41,766,650,000
	Pertanahan	202,000,000,000	80,000,000,000
	Lingkungan Hidup	0	25,764,000,000
Infrastruktur	Jalan dan Transportasi	1,784,343,851,250	6,256,836,413,000
	Energi & Telekomunikasi	267,302,502,000	203,620,474,846
	Sumber Daya Air	396,398,689,195	839,046,566,500
	Air dan Sanitasi	204,219,203,000	1,286,443,377,000
	Infrastruktur Lingkungan dan Pemeliharaan	20,866,516,000	89,400,000,000
	Kawasan Percontohan	75,222,499,700	0
	Bangunan Gedung Negara dan Rumah	84,220,472,000	175,810,716,000
	IREP	158,650,000,000	224,318,743,000
Sosial Kemasyarakatan	Pendidikan, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan		
	Pendidikan	540,515,771,600	395,251,800,000
	Kesehatan	114,401,585,000	167,741,800,000
	Pemberdayaan Perempuan	44,174,975,000	7,576,000,000
	Agama, Sosial, Budaya, Pemuda dan Olahraga		
	Agama	80,290,318,000	153,461,295,000
	Sosial	10,191,127,000	54,619,500,000
	Budaya	4,778,082,000	111,493,750,000
	Pemuda dan Olahraga	44,022,970,000	33,863,257,000
Perekonomian	Pertanian		
	Tanaman Pangan & Hortikultura	87,086,300,000	27,517,500,000
	Perkebunan	81,446,000,000	37,519,410,000
	Peternakan	55,926,550,000	47,000,000,000
	Kehutanan	68,498,819,000	4,530,400,000
	Perikanan	226,697,957,000	675,458,060,000
	Pengembangan Usaha		
	Industri	73,382,440,000	9,000,000,000
	Perdagangan	56,164,000,000	4,500,000,000
	Tenaga kerja	21,644,660,000	2,500,000,000
	Koperasi dan UKM	146,671,400,000	78,442,700,000
	Pariwisata	31,114,758,000	34,900,000,000
Kelembagaan & Hukum	Kelembagaan Daerah	385,258,432,000	234,978,961,600
	Hukum	80,220,160,000	2,000,000,000
	K3M	199,108,116,000	7,000,000,000
Biaya Manajemen		242,439,125,974	280,000,000,000
TOTAL		8,680,828,729,719	13,490,011,128,946

Sumber: BRR NAD-Nias, 2007

Grafik Kebutuhan Pendanaan BRR NAD - Nias tahun 2007-2009



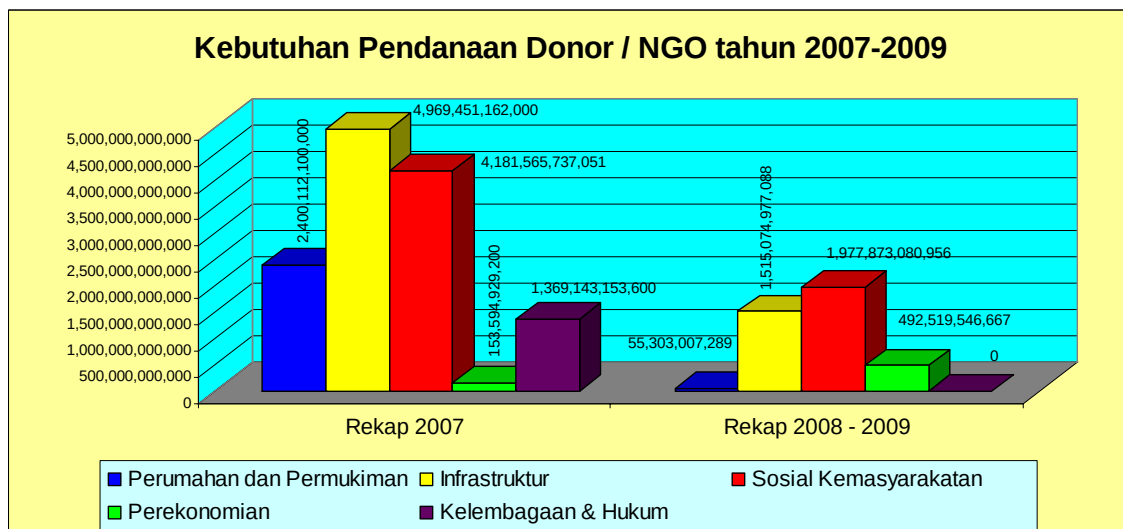
Tabel III.79
Total Kebutuhan Pendanaan Donor/NGO Tahun 2007-2009

Bidang	Program Utama	2007	2008 - 2009
Perumahan dan Permukiman	Perumahan	1,844,681,125,600	55,303,007,289
	Tata Ruang	555,430,974,400	
	Pertanahan	0	
	Lingkungan Hidup	0	
Infrastruktur	Jalan dan Transportasi	4,868,880,718,000	1,515,074,977,088
	Energi & Telekomunikasi	1,298,874,400	
	Sumber Daya Air	23,883,200,000	
	Air dan Sanitasi	75,388,369,600	
	Infrastruktur Lingkungan dan Pemeliharaan	-	
	Kawasan Percontohan	-	
	Bangunan Gedung Negara dan Rumah	-	
	IREP	-	
Sosial Kemasyarakatan	Pendidikan, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan		1,977,873,080,956
	Pendidikan	2,183,972,569,091	
	Kesehatan	1,419,937,581,800	
	Pemberdayaan Perempuan	233,801,716,000	
	Agama, Sosial, Budaya, Pemuda dan Olahraga		
	Agama	24,393,974,960	
	Sosial	303,881,096,800	
	Budaya	1,000,000,000	
	Pemuda dan Olahraga	14,578,798,400	

Bidang	Program Utama	2007	2008 - 2009
Perekonomian	Pertanian	18,524,439,200	492,519,546,667
	Tanaman Pangan & Hortikultura		
	Perkebunan		
	Peternakan		
	Kehutanan		
	Perikanan	76,798,416,800	
	Pengembangan Usaha		
	Industri	0	
	Perdagangan	7,015,920,000	
	Tenaga kerja	51,256,153,200	
	Koperasi dan UKM	0	
	Pariwisata	0	
Kelembagaan & Hukum	Kelembagaan Daerah	1,369,143,153,600	0
	Hukum	0	
	K3M	0	
Biaya Manajemen		661,039,255,600	
TOTAL		13,734,906,337,451	4,040,770,612,000

Sumber: BRR NAD-Nias, 2007

Grafik Kebutuhan Pendanaan Donor/NGO Tahun 2007-2009



Disamping dana yang bersumber dari On budget dan Off budget, juga terdapat kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi yang bersumber dari dana APBD dan APBN Pemerintah Daerah Nanggroe Aceh Darussalam, seperti terlihat pada taebI berikut :

Tabel III.80
Total Kebutuhan Pendanaan Pemda NAD Tahun 2007-2009

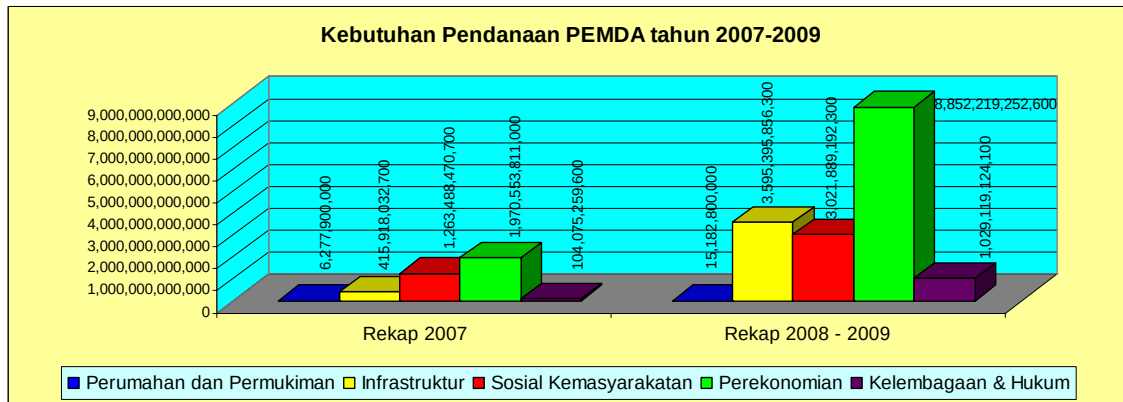
Bidang	Program Utama	2007	2008 - 2009
Perumahan dan Permukiman	Perumahan	0	0
	Tata Ruang	6,277,900,000	14,652,800,000
	Pertanahan	0	530,000,000
	Lingkungan Hidup		0

Bidang	Program Utama	2007	2008 - 2009
Infrastruktur	Jalan dan Transportasi	346,444,010,500	3,111,030,552,000
	Energi & Telekomunikasi	52,333,090,900	384,776,709,500
	Sumber Daya Air	1,126,023,000	2,597,109,000
	Air dan Sanitasi	6,013,178,000	22,877,571,000
	Infrastruktur Lingkungan dan Pemeliharaan	10,001,730,300	74,113,914,800
	Kawasan Percontohan		0
	Bangunan Gedung Negara dan Rumah	0	0
	IREP	0	0
Sosial Kemasyarakatan	Pendidikan, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan		
	Pendidikan	764,280,072,600	1,776,536,345,300
	Kesehatan	183,375,436,500	318,970,687,900
	Pemberdayaan Perempuan	7,595,000,000	20,050,799,900
	Agama, Sosial, Budaya, Pemuda dan Olahraga		
	Agama	50,688,382,700	119,910,144,100
	Sosial	135,035,896,900	478,360,066,600
	Budaya	59,532,846,000	160,908,630,500
	Pemuda dan Olahraga	62,980,836,000	147,152,518,000
Perekonomian	Pertanian		
	Tanaman Pangan & Hortikultura	169,241,324,400	2,424,431,329,000
	Perkebunan	22,472,796,000	63,772,481,900
	Peternakan	153,848,630,000	464,331,403,200
	Kehutanan	186,844,050,500	559,250,348,800
	Perikanan	20,027,000,000	243,960,000,000
	Pengembangan Usaha		
	Industri	1,259,601,490,400	4,492,239,776,800
	Perdagangan		0
	Tenaga kerja	15,500,000,000	42,500,000,000
	Koperasi dan UKM	133,956,607,800	528,835,000,000
	Pariwisata	9,061,911,900	32,898,912,900
Kelembagaan & Hukum	Kelembagaan Daerah	85,388,562,800	909,536,287,300
	Hukum	5,156,447,000	17,221,994,000
	K3M	13,530,249,800	102,360,842,800
Biaya Manajemen		23,058,627,000	46,022,699,000
TOTAL		3,783,372,101,000	16,559,828,924,300

Sumber: APBD Prov. NAD

Kebutuhan pendanaan yang berasal dari APBD pada tahun 2007 adalah sebesar Rp. 3,7 triliun dan untuk tahun 2008 -2009 adalah sebesar 16,5 triliun. Adapun grafik kebutuhan pendanaan pada tahun 2007 dan 2008 – 2009 untuk masing – masing bidang pemulihan dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik Kebutuhan Pendanaan Pemda NAD Tahun 2007-2009



**REKAPITULASI PEMETAAN PENDANAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
PROVINSI NANGROE ACEH DARUSSALAM DAN KEPULAUAN NIAS, PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN 2007 - 2009**

BIDANG	PROGRAM UTAMA	2007				
		BRR		Donor/NGO		PEMDA Prov. NAD
		NAD	NIAS	NAD	NIAS	
PERUMAHAN, PERMUKIMAN, TATA		2,877,396,800,000	218,174,650,000	2,141,194,356,400	258,917,743,600	6,277,900,000
	1 Perumahan	2,637,826,800,000	191,178,000,000	1,585,763,382,000	258,917,743,600	6,277,900,000
	2 Tata Ruang	37,570,000,000	26,996,650,000	555,430,974,400	0	6,277,900,000
	3 Pertanahan	202,000,000,000		0		0
	4 Lingkungan Hidup	0		0		0
INFRASTRUKTUR		2,352,072,243,975	639,151,489,170	4,829,641,301,200	139,809,860,800	415,918,032,700
	1 Jalan dan Transportasi	1,275,738,204,000	508,605,647,250	4,829,641,301,200	39,239,416,800	346,444,010,500
	2 Energi & Telekomunikasi	237,568,188,000	29,734,314,000	0	1,298,874,400	52,333,090,900
	3 Sumber Daya Air	320,580,561,275	75,818,127,920	0	23,883,200,000	1,126,023,000
	4 Air dan Sanitasi	179,225,803,000	24,993,400,000	0	75,388,369,600	6,013,178,000
	5 Infrastruktur Lingkungan dan Pemeliharaan	20,866,516,000	0	0	0	10,001,730,300
	6 Kawasan Percontohan	75,222,499,700	0	0	0	0
	7 Bangunan Gedung Negara dan Rumah	84,220,472,000	0	0	0	0
	8 IREP	158,650,000,000	0	0	0	0
		559,849,038,000	278,525,790,600	3,904,953,044,400	276,612,692,651	1,263,488,470,700
SOSIAL KEMASYARAKATAN	1 Pendidikan, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan	430,715,000,000	268,377,331,600	3,567,686,464,400	270,025,402,491	955,250,509,100
	- Pendidikan	339,655,000,000	200,860,771,600	2,043,598,070,000	140,374,499,091	764,280,072,600
	- Kesehatan	47,799,000,000	66,602,585,000	1,290,286,678,400	129,650,903,400	183,375,436,500
	- Pemberdayaan Perempuan	43,261,000,000	913,975,000	233,801,716,000	0	7,595,000,000
	2 Agama, Sosial, Budaya, Pemuda dan Olahraga	129,134,038,000	10,148,459,000	337,266,580,000	6,587,290,160	308,237,961,600
	- Agama	74,291,068,000	5,999,250,000	17,806,684,800	6,587,290,160	50,688,382,700
	- Sosial	9,750,000,000	441,127,000	303,881,096,800	0	135,035,896,900
	- Budaya	2,600,000,000	2,178,082,000	1,000,000,000	0	59,532,846,000
	- Pemuda dan Olahraga	42,492,970,000	1,530,000,000	14,578,798,400	0	62,980,836,000
		784,751,129,000	63,881,755,000	0	153,594,929,200	1,970,553,811,000
PEREKONOMIAN	1 Pertanian**	285,823,569,000	7,134,100,000	-	18,524,439,200	532,406,800,900
	- Tanaman Pangan & Hortikultura**	86,551,300,000	535,000,000	0	-	169,241,324,400
	- Perkebunan	75,541,000,000	5,905,000,000	0	-	22,472,796,000
	- Peternakan	55,232,450,000	694,100,000	0	-	153,848,630,000
	- Kehutanan	68,498,819,000	-	0	-	186,844,050,500
	2 Perikanan	203,002,000,000	23,695,957,000	-	76,798,416,800	20,027,000,000
	3 Pengembangan Usaha	295,925,560,000	33,051,698,000	-	58,272,073,200	1,418,120,010,100
	- Industri	44,951,000,000	28,431,440,000	0	-	1,259,601,490,400
	- Perdagangan	56,164,000,000		0	7,015,920,000	
	- Tenaga kerja	20,794,660,000	850,000,000	0	51,256,153,200	15,500,000,000
	- Koperasi dan UKM	142,928,900,000	3,742,500,000	0	-	133,956,607,800
	- Pariwisata	31,087,000,000	27,758,000	0	-	9,061,911,900
		606,483,148,000	58,103,560,000	981,607,275,600	387,535,878,000	104,075,259,600
	1 Kelembagaan Daerah	327,154,872,000	58,103,560,000	981,607,275,600	387,535,878,000	85,388,562,800
	2 Hukum	80,220,160,000		0		5,156,447,000
	3 K3M	199,108,116,000		0		13,530,249,800
BIAYA MANAJEMEN		179,513,808,974	62,925,317,000	661,039,255,600	0	23,058,627,000
JUMLAH		7,360,066,167,949	1,320,762,561,770	12,518,435,233,200	1,216,471,104,251	3,783,372,101,000

Sumber : BRR NAD-Nias (2007) dan Analisis Tim P3B Bappenas (2007)

Keterangan : 1 USD = IDR 9,200

*) Anggaran Donor/NGO 2009 Nias sudah dihitung (termasuk) dalam Anggaran Donor/NGO Nias tahun 2008

**) Rincian program/kegiatan sudah termasuk untuk program/kegiatan pendukung untuk pertanian

**REKAPITULASI PEMETAAN PENDANAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
PROVINSI NANGROE ACEH DARUSSALAM DAN KEPULAUAN NIAS, PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN 2007 - 2009**

BIDANG	PROGRAM UTAMA	2008				
		BRR		Donor/NGO		PEMDA Prov. NAD
		NAD	NIAS	NAD	NIAS	
PERUMAHAN, PERMUKIMAN, TATA		1,898,913,755,000	146,266,650,000	0	55,303,007,289	7,339,900,000
	1 Perumahan	1,772,399,755,000	125,250,000,000	0	0	0
	2 Tata Ruang	20,750,000,000	21,016,650,000	0	0	7,089,900,000
	3 Pertanahan	80,000,000,000		0	0	250,000,000
	4 Lingkungan Hidup	25,764,000,000		0	0	
INFRASTRUKTUR		4,301,125,370,000	1,522,597,441,746	276,000,000	1,514,522,977,088	1,528,809,148,800
	1 Jalan dan Transportasi	2,118,380,413,000	1,360,986,500,000	276,000,000	0	1,260,639,872,000
	2 Energi & Telekomunikasi	183,504,870,000	20,115,604,846	0	0	232,269,239,500
	3 Sumber Daya Air	357,215,000,000	88,995,336,900	0	0	1,274,350,000
	4 Air dan Sanitasi	1,233,943,377,000	52,500,000,000	0	0	10,815,149,000
	5 Infrastruktur Lingkungan dan Pemeliharaan	89,400,000,000	0	0	0	23,810,538,300
	6 Kawasan Percontohan	0	0	0	0	0
	7 Bangunan Gedung Negara dan Rumah	175,810,716,000	0	0	0	0
	8 IREP	142,870,994,000	0	0	0	0
SOSIAL KEMASYARAKATAN		509,163,602,000	375,558,800,000	757,604,265,000	1,219,624,815,956	1,433,518,364,900
	1 Pendidikan, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan	211,760,800,000	320,563,800,000	644,000,000	0	1,036,481,812,900
	- Pendidikan	177,404,800,000	210,847,000,000	460,000,000	0	852,532,832,000
	- Kesehatan	26,780,000,000	109,716,800,000	184,000,000	0	174,834,980,900
	- Pemberdayaan Perempuan	7,576,000,000	0	0	0	9,114,000,000
	2 Agama, Sosial, Budaya, Pemuda dan Olahraga	297,402,802,000	54,995,000,000	756,960,265,000	0	397,036,552,000
	- Agama	122,561,295,000	30,900,000,000	122,200,000,000	0	57,807,216,300
	- Sosial	53,339,500,000	640,000,000	400,000,000,000	0	194,998,557,000
	- Budaya	98,518,750,000	12,575,000,000	147,598,265,000	0	72,986,327,700
	- Pemuda dan Olahraga	22,983,257,000	10,880,000,000	87,162,000,000	0	71,244,451,000
PEREKONOMIAN		840,415,620,000	69,823,700,000	0	492,519,546,667	4,370,131,017,300
	1 Pertanian**	84,319,560,000	31,272,750,000	-	-	1,684,997,155,400
	- Tanaman Pangan & Hortikultura**	17,970,000,000	8,572,500,000	0	-	1,185,909,582,800
	- Perkebunan	14,819,160,000	22,700,250,000	0	-	30,278,115,200
	- Peternakan	47,000,000,000	-	0	-	201,883,219,000
	- Kehutanan	4,530,400,000	-	0	-	266,926,238,400
	2 Perikanan	666,388,060,000	9,070,000,000	-	-	124,960,000,000
	3 Pengembangan Usaha	89,708,000,000	29,480,950,000	-	-	2,560,173,861,900
	- Industri	9,000,000,000	-	0	-	2,223,304,357,000
	- Perdagangan	4,500,000,000	-	0	-	
	- Tenaga kerja	2,500,000,000	-	0	-	20,000,000,000
	- Koperasi dan UKM	39,808,000,000	28,480,950,000	0	-	300,445,000,000
	- Pariwisata	33,900,000,000	1,000,000,000	0	-	16,424,504,900
KELEMBAGAAN DAN HUKUM		154,721,961,600	77,530,750,000	0	0	475,662,716,600
	1 Kelembagaan Daerah	145,721,961,600	77,530,750,000	0	0	418,372,279,400
	2 Hukum	2,000,000,000		0		8,002,813,500
	3 K3M	7,000,000,000		0		49,287,623,700
BIAYA MANAJEMEN		280,000,000,000	0	0	0	20,612,075,000
JUMLAH		7,984,340,308,600	2,191,777,341,746	757,880,265,000	3,281,970,347,000	7,836,073,222,600

Sumber : BRR NAD-Nias (2007) dan Analisis Tim P3B Bappenas (2007)

Keterangan : 1 USD = IDR 9,200

*) Anggaran Donor/NGO 2009 Nias sudah dihitung (termasuk) dalam Anggaran Donor/NGO Nias tahun 2008

**) Rincian program/kegiatan sudah termasuk untuk program/kegiatan pendukung untuk pertanian

**REKAPITULASI PEMETAAN PENDANAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
PROVINSI NANGROE ACEH DARUSSALAM DAN KEPULAUAN NIAS, PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN 2007 - 2009**

BIDANG	PROGRAM UTAMA	2009				
		BRR		Donor/NGO		PEMDA Prov. NAD
		NAD	NIAS	NAD	NIAS*	
PERUMAHAN, PERMUKIMAN, TATA		0	0	0		7,842,900,000
	1 Perumahan	0	0	0		0
	2 Tata Ruang	0	0	0		7,562,900,000
	3 Pertanahan	0		0		280,000,000
	4 Lingkungan Hidup	0		0		
INFRASTRUKTUR		2,927,718,999,000	324,034,479,600	276,000,000		2,066,586,707,500
	1 Jalan dan Transportasi	2,472,159,500,000	305,310,000,000	276,000,000		1,850,390,680,000
	2 Energi & Telekomunikasi	0	0	0		152,507,470,000
	3 Sumber Daya Air	374,111,750,000	18,724,479,600	0		1,322,759,000
	4 Air dan Sanitasi	0	0	0		12,062,422,000
	5 Infrastruktur Lingkungan dan Pemeliharaan	0	0	0		50,303,376,500
	6 Kawasan Percontohan	0	0	0		
	7 Bangunan Gedung Negara dan Rumah	0	0	0		0
	8 IREP	81,447,749,000	0	0		0
SOSIAL KEMASYARAKATAN		0	39,285,000,000	644,000,000		1,588,370,827,400
	1 Pendidikan, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan	0	38,245,000,000	644,000,000		1,079,076,020,200
	- Pendidikan	0	7,000,000,000	460,000,000		924,003,513,300
	- Kesehatan	0	31,245,000,000	184,000,000		144,135,707,000
	- Pemberdayaan Perempuan	0	0	0		10,936,799,900
	2 Agama, Sosial, Budaya, Pemuda dan Olahraga	0	1,040,000,000	0		509,294,807,200
	- Agama	0	0	0		62,102,927,800
	- Sosial	0	640,000,000	0		283,361,509,600
	- Budaya	0	400,000,000	0		87,922,302,800
	- Pemuda dan Olahraga	0	0	0		75,908,067,000
PEREKONOMIAN		0	11,128,750,000	0		4,482,088,235,300
	1 Pertanian**	-	975,000,000	-		1,826,788,407,500
	- Tanaman Pangan & Hortikultura**	0	975,000,000	0		1,238,521,746,200
	- Perkebunan	0	-	0		33,494,366,700
	- Peternakan	0	-	0		262,448,184,200
	- Kehutanan	0	-	0		292,324,110,400
	2 Perikanan	-	-	-		119,000,000,000
	3 Pengembangan Usaha	-	10,153,750,000	-		2,536,299,827,800
	- Industri	0	-	0		2,268,935,419,800
	- Perdagangan	0	-	0		
	- Tenaga kerja	0	-	0		22,500,000,000
	- Koperasi dan UKM	0	10,153,750,000	0		228,390,000,000
	- Pariwisata	0	-	0		16,474,408,000
KELEMBAGAAN DAN HUKUM		0	11,726,250,000	0		553,456,407,500
	1 Kelembagaan Daerah	0	11,726,250,000	0		491,164,007,900
	2 Hukum	0		0		9,219,180,500
	3 K3M	0		0		53,073,219,100
BIAYA MANAJEMEN		0	0	0		25,410,624,000
JUMLAH		2,927,718,999,000	386,174,479,600	920,000,000		8,723,755,701,700

Sumber : BRR NAD-Nias (2007) dan Analisis Tim P3B Bappenas (2007)

Keterangan : 1 USD = IDR 9,200

*) Anggaran Donor/NGO 2009 Nias sudah dihitung (termasuk) dalam Anggaran Donor/NGO Nias tahun 2008

**) Rincian program/kegiatan sudah termasuk untuk program/kegiatan pendukung untuk pertanian



Prinsip, Kebijakan Umum, Strategi dan Pengendalian Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias 2007 - 2009

Rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah dan kehidupan masyarakat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara pasca bencana Tsunami 26 Desember 2007 di Provinsi NAD dan gempa bumi di Kepulauan Nias tanggal 28 Maret 2005, yang selama ini dikoordinasikan pelaksanaannya oleh BRR NAD-Nias, pada dasarnya mengacu pada Peraturan Presiden RI Nomor 30 Tahun 2005.

Pada bab ini diuraikan prinsip-prinsip, kebijakan umum, kebijakan dan strategi rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat NAD-Nias per bidang pemulihan untuk periode tahun 2007-2009. Kebijakan dan strategi pemulihan di provinsi NAD dibagi kedalam 5 (lima) bidang pemulihan yaitu: (1) Perumahan, Permukiman, Tata Ruang, Pertanahan dan Lingkungan Hidup; (2) Infrastruktur; (3) Sosial Budaya; (4) Perekonomian; (5) Kelembagaan dan Hukum. Sementara itu, kegiatan pemulihan di kepulauan Nias dibagi kedalam 4 (empat) bidang atau pilar pemulihan yaitu (i) perumahan dan permukiman, (ii) infrastruktur, (iii) kelembagaan dan sosial kemasyarakatan dan (iv) ekonomi. Pembagian kelompok ditujukan untuk mempermudah pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja manajemen rehabilitasi dan rekonstruksi. Oleh karena itu, perbedaan kelompok bidang dikedua wilayah tersebut tersebut, pada dasarnya telah disesuaikan dengan kebutuhan lapangan, tetapi tidak mengurangi jumlah sektor yang akan ditangani. Bab ini juga menjelaskan mengenai mekanisme pendanaan dan pengendalian pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang meliputi mekanisme pengendalian barang dan jasa, mekanisme transisi dan pelimpahan tanggung jawab rekonstruksi dalam rangka menjaga keberlanjutan rekonstruksi pasca kepemimpinan BRR.

IV.1 Prinsip-prinsip Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap wilayah dan kehidupan masyarakat di Provinsi NAD Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara periode 2007-2009 akan dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Berorientasi pada **Community-driven**, yaitu prinsip untuk mengedepankan partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi-rekonstruksi.
2. **Holistik**, yaitu pembangunan kembali yang mempertimbangkan seluruh aspek kehidupan dan berdasarkan pada strategi yang bersifat komprehensif.
3. **Build back better**, yaitu prinsip untuk membangun kembali menjadi lebih baik dari kondisi semula.
4. **Urgensi**, yaitu prinsip untuk mengedepankan kegiatan dan tindakan rekonstruksi yang bersifat urgen.
5. **Integrasi**, yaitu prinsip untuk menterpadukan kegiatan antar dan lintas sektor untuk memperoleh manfaat kegiatan yang optimal.
6. **Koordinasi**, yaitu prinsip untuk senantiasa mengkoordinasikan kegiatan, pelaksana dan pelaksanaannya sehingga tercapai tingkat sinergi yang optimal.
7. Adanya **monitoring** dan **evaluasi** yang efektif
8. **Promoting local autonomy**, yaitu prinsip untuk memupuk kapasitas otonomi lokal dalam pengambilan keputusan dalam proses rehabilitasi-rekonstruksi.

9. **Mewujudkan tata pemerintahan yang baik**, yaitu prinsip untuk mendorong dan memfasilitasi tercapainya tata pemerintahan yang baik dalam setiap aspek dan tataran pelaksanaan kegiatan rehabilitasi-rekonstruksi.
10. **Terpadu**, koordinasi dan strategi yang efektif untuk menjamin konsistensi dan keefektifan antara program sektoral dan regional di tingkat nasional maupun daerah.
11. **Gender**, yaitu prinsip untuk sadar dan peduli akan pengarusutamaan gender dalam setiap kegiatan rehabilitasi-rekonstruksi.
12. **Quality, efisien, transparan, dan akuntabel**, yaitu prinsip untuk mengutamakan kualitas sebagai salah satu kondisi yang harus dipenuhi oleh setiap kegiatan dan hasil kegiatan rehabilitasi-rekonstruksi.
13. **Prioritas** yaitu prinsip untuk mengutamakan atau mendahulukan kegiatan pemulihan pada daerah-daerah terkena bencana tsunami dan gempa serta daerah konflik.
14. **Pembangunan Berkelanjutan**, yaitu prinsip membangun yang tidak merusak lingkungan. Implementasinya mencakup pemberdayaan, perkuatan kapasitas lokal, tata pemerintahan yang baik, desentralisasi, integrasi rehabilitasi dan rekonstruksi dengan program reintegrasi.

IV.2 Kebijakan Umum

Pelaksanaan Rencana Aksi 2007-2009 rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara tetap mengacu pada kebijakan yang tertera pada perpres 30/2005 yaitu yang terbagi kedalam 4 (empat) kebijakan utama berikut ini:

1. **Pembangunan kembali masyarakat** dengan cara memulihkan aspek-aspek kehidupan keagamaan, sosial budaya dan ketahanan masyarakat yang meliputi bidang pendidikan, kesehatan, ilmu pengetahuan, hukum dan kelembagaan agama serta adat.
2. **Pembangunan kembali ekonomi** dengan cara penciptaan lapangan kerja, pemberian bantuan keuangan dan kredit untuk pengembangan usaha kecil dan menengah, membangun kembali sektor-sektor produktif (perikanan, pertanian, industri, perdagangan, dan jasa) disertai pembangunan kembali sarana ekonomi (pasar, tempat pelelangan ikan, gudang).
3. **Pembangunan kembali infrastruktur dan perumahan serta permukiman** dengan mendahulukan pemulihan fungsi prasarana dasar seperti jalan dan fasilitas lalu lintas dan angkutan jalan, pelabuhan penyeberangan, pelabuhan laut, bandar udara beserta fasilitasnya, prasarana dan sarana pos dan telekomunikasi, pemulihan pengadaan listrik, air bersih dan perumahan.
4. **Pembangunan kembali pemerintahan** dengan cara memfungsikan kembali sistem dan pelayanan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten/kota, merancang kembali (*redesign*) kota-kota dan pusat kegiatan baru.

Membangun kembali Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara menuju yang lebih baik (*build back better*), secara fisik dapat dimaknai sebagai rehabilitasi dan rekonstruksi bangun bangunan yang lebih tahan terhadap gempa. Sedangkan dalam konteks pembangunan non fisik dapat dimaknai sebagai usaha rehabilitasi kehidupan dan penghidupan sosial-ekonomi-budaya yang lebih baik dari kondisi sebelumnya. Artinya, peluang membangun Provinsi NAD dan Kepulauan Nias secara komprehensif ini tidak boleh diwujudkan sebagai pembangunan yang sekedar mengembalikan keadaan seperti semula, namun harus ditangkap sebagai peluang pembangunan dan pengembangan wilayah yang lebih maju.

Dalam proses rekonstruksi yang sedang berlangsung saat ini, keterkaitan antara kebijakan umum dengan pengelompokan bidang atau pilar pemulihan kembali wilayah dan kehidupan masyarakat NAD-Nias yang lebih baik adalah sebagaimana tertera pada tabel berikut:

Tabel IV.1
Keterkaitan Kebijakan Umum dengan Bidang atau Pilar Pemulihan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias

Komponen Bidang Kebijakan Umum	Bidang atau pilar Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias 2007-2009				
	Perumahan, Permukiman, Tata Ruang, Pertanian dan Lingkungan Hidup	Infrastruktur	Sosial Kemasyarakatan	Perekonomian	Kelembagaan dan Hukum
Pembangunan kembali masyarakat	☑		☑	☑	☑
Pembangunan kembali ekonomi		☑	☑	☑	
Pembangunan kembali infrastruktur dan perumahan serta permukiman	☑	☑		☑	☑
Pembangunan kembali pemerintahan		☑	☑	☑	☑

Sumber : Tim P3B Bappenas, April 2007.

Catatan:

1. Bidang pemulihan di NAD meliputi (i) perumahan dan permukiman, (ii) infrastruktur, (iii) sosial kemasyarakatan, (iv) perekonomian dan (v) kelembagaan dan hukum
2. Bidang Pemulihan di Nias meliputi (i) perumahan dan permukiman, (ii) infratsruktur, (iii) Ekonomi dan (iv) kelembagaan dan sosial kemasyarakatan

Berdasarkan Tabel tersebut fokus pemulihan untuk masing masing kebijakan umum adalah sebagai berikut:

- **Pembangunan kembali masyarakat** di Provinsi NAD dan Kepulauan Nias akan difokuskan untuk meningkatkan kestabilan dan perkuatan kehidupan sosial ekonomi dan budaya, serta kelembagaan dan hukum.
- **Pembangunan kembali ekonomi** masyarakat di Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara difokuskan untuk meningkatkan dukungan infrastruktur yang mampu meningkatkan perekonomian dan mutu kehidupan sosial budaya masyarakat..
- **Pembangunan kembali infrastruktur dan perumahan** serta permukiman difokuskan untuk meningkatkan kualitas hunian yang lebih baik dan didukung infrastruktur kawasan permukiman yang mampu meningkatkan perekonomian penghuninya serta sistem operasi dan pemeliharaannya.
- **Pembangunan kembali pemerintahan** di fokuskan peningkatan tata kelola yang baik (*good governance*) dibidang pengelolaan infrastruktur, peningkatan kehidupan sosial ekonomi dan budaya serta kelembagaan dan penerapan peraturan perundangan yang berlaku.

IV.3 Kebijakan dan Strategi Sektor

Kebijakan dan Strategi sektoral berikut ini menjadi acuan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi bidang atau sektor yang disusun berdasarkan permasalahan sektor yang ada.

Permasalahan yang ditimbulkan oleh bencana gempa bumi dan tsunami di Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara, dapat dikategorikan kedalam tiga kelompok yaitu: **1)** masalah yang timbul pada manusia sebagai individu; **2)** manusia sebagai makhluk sosial yang berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya; dan **3)** masalah yang timbul sebagai pendukung kehidupan manusia.

Atas dasar pertimbangan tersebut, perumusan kebijakan dan strategi serta Rencana Aksi untuk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara pada periode 2007 dan sesudahnya, akan memperhatikan skenario keseluruhan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dari tahun 2005-2009 sebagaimana disajikan pada Gambar Iv-1 dan Gambar Iv-2. Walaupun demikian, kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi periode 2007 dan sesudahnya akan difokuskan pada 3 (tiga) hal berikut ini:

1. Rounding up atau penyelesaian pembangunan dan fungsionalisasi semua asset yang telah dibangun selama tahun 2005-2006
2. Program program yang dikategorikan strategis misalnya untuk perkuatan pondasi perekonomian, system keagamaan dan budaya lokal pasca rekonstruksi termasuk program program bantuan hibah yang memerlukan dana pendamping
3. Program perkuatan kapasitas kelembagaan daerah dalam rangka memelihara keberlanjutan pembangunan pasca rekonstruksi

Gambar IV-1
Skenario Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD Tahun 2005-2009

2005	2006	2007	2008	2009
Perumahan > 30% dan Permukiman (Sistem on site)	Perumahan > 70% dan Permukiman (PSD, Tata Ruang)	Perumahan > 90% dan Permukiman (PSD, Tata Ruang dan Lingkungan)	Perumahan > 100% dan Permukiman (PSD, Tata Ruang dan Lingkungan)	Pemeliharaan, Capacity Building, Transfer dan Pengakhiran Masa Bakti
Infrastruktur Pendukung Logistik (Jalan & Jembatan, Pelabuhan, Bandara)	Infrastruktur Pendukung Logistik (Jalan, Jembatan, Pelabuhan, Bandara)	Infrastruktur Sektor Energi dan Komunikasi serta penunjang Perekonomian	Infrastruktur dalam Kota (Sistem Air Minum dan Sanitasi)	
Sosial Kemasyarakatan (Bangunan Sekolah, Kesehatan, Budaya, Keagamaan dan Publik)	Sosial Kemasyarakatan (Bangunan Sekolah, Kesehatan, Budaya, Keagamaan dan Publik)	Sosial Kemasyarakatan (Jaringan pendidikan dan kesehatan, pranata sosial Budaya)	Sosial Kemasyarakatan (Jaringan pendidikan dan kesehatan dan Pranata Sosial Budaya)	
Perekonomian (Peningkatan Pendapatan masy dan Pengembangan Lapangan Kerja)	Perekonomian (Penumbuhan Usaha Kecil dan Menengah)	Perekonomian (Pengembangan ekonomi pada level korporasi)	Perekonomian (Pengembangan Pariwisata dan Pembinaan UKM)	
Kelembagaan dan Hukum (Bangunan K3 dan Pemerintahan)	Kelembagaan dan Hukum (Bangunan K3 dan Pemerintahan)	Kelembagaan dan Hukum (Prasarana K3 dan, Sistem Tata Pemerintahan)	Kelembagaan dan Hukum (Prasarana K3 dan Sistem Tata Pemerintahan)	
Perumahan dan Permukiman, Infrastruktur, Sosial Budaya, Perekonomian, Kelembagaan dan Hukum				

Sumber: Analisis berdasarkan perkembangan 2 tahun BRR NAD-Nias.

Sebagaimana tertera pada Gambar IV.1 tersebut, kegiatan rekonstruksi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang dimulai pada tahun 2007 diarahkan untuk menyelesaikan pembangunan perumahan, pengembangan sektor energi dan komunikasi, pengembangan ekonomi pada tingkatan korporasi dan pengembangan pendidikan UKM untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

Berbeda dengan kegiatan di Provinsi NAD, kegiatan rekonstruksi di Kepulauan Nias yang dimulai pada tahun 2007 (Gambar IV.2), diarahkan untuk membangun infrastruktur energi listrik dan telekomunikasi, meneruskan pembangunan perumahan beserta prasarana dan sarana permukimannya, perkuatan kelembagaan sosial dan ekonomi masyarakat pada tingkat korporasi.

Gambar IV.1 dan IV.2, juga menjelaskan tahapan-tahapan recovery, rehabilitasi dan rekonstruksi baik yang dilakukan di provinsi NAD maupun Kepulauan Nias, yang telah dimulai sejak tahun 2005 dan direncanakan akan berakhir pada tahun 2009.

Gambar IV.2
Skenario Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Kepulauan Nias (2005-2009)



Sumber: Analisis Tim P3B Bappenas, Mei 2007 (Berdasarkan skenario Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias Tahun 2005-2009).

Kegiatan yang dimulai pada tahun 2007 di kedua wilayah tersebut, pada dasarnya sudah termasuk kategori rekonstruksi. Bidang pembangunan mulai tahun 2007 tersebut akan tetap difokuskan pada pengembangan infrastruktur, perumahan, permukiman, kelembagaan dan sosial kemasyarakatan dan meningkatkan perekonomian di Kepulauan Nias yang dilakukan dengan menyesuaikan kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan. Berbeda dengan kegiatan rekonstruksi di provinsi NAD, semua bidang rekonstruksi di kepulauan Nias diharapkan dapat berakhir seluruhnya pada akhir tahun 2008. Oleh karena itu rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi di kepulauan Nias hanya disusun satu periode yaitu periode tahun 2007-2009.

IV.3.1 Bidang Pemulihan Perumahan, Permukiman, Tata Ruang, Pertanian dan Lingkungan Hidup

Sasaran pokok kegiatan pemulihan bidang perumahan, permukiman, tata ruang, pertanian dan lingkungan hidup adalah untuk meningkatkan keamanan dan keselamatan hunian penduduk. Hal itu berarti bahwa hunian atau tempat tinggal dan tempat untuk mendukung kehidupan dan penghidupan pasca bencana harus lebih aman dari keadaan sebelum bencana sehingga korban jiwa dapat di cegah apabila terjadi bencana serupa.

Selain itu, permukiman yang berfungsi sebagai hunian tersebut harus memiliki prasarana dan sarana skala kawasan yang meliputi prasarana akses masuk dan keluar dari kawasan, prasarana dan sarana air minum dan sanitasi, prasarana dan sarana lingkungan kawasan atau ruang terbuka hijau (taman kota, kawasan tepian air dll), fasilitas sosial (taman kanak kanak, balai pertemuan warga dll) dan fasilitas umum (balai desa, lahan parkir dll).

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Untuk mencapai sasaran pemulihan tersebut, kebijakan dan strategi di bidang ini adalah:

1. **Melanjutkan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan** beserta prasarana dan sarana dasar pendukungnya bagi para korban bencana.
 - a. Menetapkan standar atau model lokasi percontohan yang dikelola secara mandiri dan berkelanjutan oleh masyarakat setempat dengan fasilitasi sistem pendampingan dari Pemda, BRR dan stakeholders terkait.
 - b. Membuat panduan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di tingkat Kab/Kota yang mengatur tentang model pemberdayaan, model pelayanan kesehatan dan pendidikan serta model kelembagaan dan koordinasi lintas Departemen.
 - c. Membantu korban yang ingin kembali ke tempat asal dan melengkapi infrastruktur fasilitas penyelamatan diri
 - d. Membantu korban yang tidak memiliki lahan (penyewa) untuk memiliki rumah permanen.
 - e. Menyelesaikan penyediaan perumahan dan prasarana serta sarana dasar pendukungnya bagi korban bencana yang berkeinginan pindah ke tempat baru (*resettlement*) yang lebih aman, termasuk setifikat kepemilikan lahan.
2. **Memfungsikan sistem pelayanan prasarana dan sarana perumahan, permukiman dan lingkungan hidup yang telah dibangun.**
 - a. Memprioritaskan pembangunan kembali sistem air minum, sanitasi, drainase dan ruang terbuka hijau sekurang-kurangnya yang memenuhi standar pelayanan minimal pada skala komunal.
 - b. Memprioritaskan pelaksanaan rehabilitasi prasarana akses masuk (*entry point*), antara lain jaringan jalan pendukung antar perumahan dan permukiman.
3. **Memperbaiki rumah dan perumahan yang belum memenuhi syarat teknis minimal**
 - a. Memetakan kembali rumah dan perumahan yang tidak tahan gempa dan yang peilnya berada dibawah permukaan genangan.
 - b. Melakukan perbaikan rumah (*retrofit*) sesuai kebutuhan teknis
4. **Meningkatkan keamanan dan kenyamanan kawasan lingkungan permukiman**

- a. Memetakan kembali kawasan permukiman yang belum aman terhadap bencana yang ditinjau dari aspek lokasi, keberadaan infrastruktur penyelamatan diri
- b. Menambah kekurangan infrastruktur penyelamatan diri atau menyediakan lokasi yang lebih aman terhadap bencana.
- c. Menyelesaikan penyusunan dokumen pengelolaan lingkungan (AMDAL, UKL, UPL atau SOP) pengembangan kawasan permukiman untuk acuan pelaksanaan mitigasi dampak pasca rekonstruksi.

Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara

Kebijakan dan strategi rekonstruksi pada bidang ini meliputi :

1. Membantu dan melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan beserta prasarana dan sarana dasar pendukungnya bagi korban bencana.
2. Melakukan pemulihan perumahan dan permukiman masyarakat, terutama milik masyarakat miskin dan kelompok rentan lainnya serta pada kawasan yang mengalami kerusakan paling parah.
3. Melakukan pemulihan sarana dan prasarana pendukung perumahan dan permukiman melalui peningkatan pelayanan air bersih, sanitasi dan drainase skala komunal.
4. Menerapkan mekanisme pembangunan perumahan dan permukiman yang dilakukan secara swadaya dan gotong royong oleh masyarakat, termasuk mekanisme distribusi material bahan bangunan serta sistem informasi pembangunan perumahan dan permukiman.
5. Melaksanakan strategi pengendalian dengan: penentuan sistem benefeseries yang tepat sasaran; meningkatkan mutu (*quality*) rumah yang dibangun dan kualitas bahan material yang digunakan; serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan dan pengawasan pelaksanaan konstruksi.
6. Melakukan peningkatan kapasitas dan peran pemerintah kabupaten dalam memfasilitasi masyarakat untuk membangun perumahan termasuk mendukung proses rehabilitasi rumah berbasis kebutuhan serta prakarsa masyarakat
7. Meningkatkan kapasitas dan ketrampilan masyarakat terutama informasi tentang hak dan tanggung jawab.
8. Menerapkan Sistem pengawasan dan pemantauan terhadap bantuan perumahan, berbasis komunitas.

IV.3.2 Bidang Pemulihan Infrastruktur

Sasaran pokok kegiatan pemulihan infrastruktur, pada dasarnya adalah untuk memulihkan kembali kegiatan yang dapat mendukung perekonomian skala lokal maupun skala kawasan dan skala regional. Selain itu, sasaran untuk pengurangan risiko bencana termasuk kedalam sasaran pemulihan infrastruktur pasca bencana. Infrastruktur yang dibangun kembali meliputi infrastruktur transportasi (jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, terminal dll), infrastruktur energi (PLTA, PLTM, PLTG, PLTU dll), infrastruktur pertanian (saluran irigasi, bendung, waduk), infrastruktur pengurangan risiko bencana (pengaman pantai, pengaman sungai, kolam kolam retensi dll). Infrastruktur dalam rangka perkuatan pondasi pembangunan ekonomi pasca rekonstruksi masih belum terprogram secara memadai. Oleh karena itu, rencana aksi rekonstruksi periode 2007-2009 mulai diarahkan untuk pembangunan infrastruktur dalam kerangka investasi.

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Untuk mencapai sasaran pemulihan infrastruktur di provinsi NAD, kebijakan dan strategi bidang pemulihan infrastruktur ini adalah sebagai berikut:

1. **Menyelesaikan pembangunan sistem transportasi dan telekomunikasi** yang memadai dan **terpadu** untuk mendukung kelancaran hubungan antar wilayah di dalam propinsi dan antar propinsi, serta dengan luar negeri misalnya (i) membuka *entry point* dan jalur jalan utama (nasional) yang baru dalam rangka pengembangan wilayah untuk memperlancar distribusi barang dan jasa yang efisien, (ii) merehabilitasi fasilitas telekomunikasi yang ada dan/atau membangun fasilitas komunikasi baru melalui teknologi nir-kabel untuk meningkatkan akses kedaerah pedesaan baik secara lokal, SLJJ, maupun SLI
2. **Melanjutkan pembangunan fasilitas distribusi energi dan kelistrikan** sebagai upaya mendukung lancarnya aktivitas sosial dan perekonomian misalnya dengan cara (i) memprioritaskan pembangunan pembangkit dan penyalur energi listrik di daerah bencana, (ii) mengarahkan upaya rekonstruksi untuk mendukung diversifikasi sumber energi listrik yang ramah lingkungan dan berbasis sumberdaya terbarukan (misalnya PLTA-mikro hidro, tenaga surya dll).
3. **Menyelesaikan pembangunan sarana pendukung ketersediaan pangan dengan** memprioritaskan percepatan rehabilitasi jaringan irigasi (teknis dan non teknis), pada wilayah dimana petani penggarapnya telah siap, tetapi lebih diutamakan di pusat kegiatan ekonomi dan pemukiman.
4. **Memulihkan rasa aman bagi penduduk terkena bencana** melalui peningkatan infrastruktur penunjang upaya penyelamatan terhadap ancaman bencana misalnya (i) saluran drainase alami, (ii) sistem drainase mikro dan makro untuk kawasan perkotaan (iii) bukit penyelamatan (*escape hill*) dan jalur penyelamatan (*escape road*) (iv) kantong-kantong air (*retention basin*), tanggul, pintu-pintu air termasuk penyelesaian penyusunan dokumen lingkungan (AMDAL, UKL, UPL atau SOP) bidang infrastruktur untuk acuan pelaksanaan mitigasi dampak lingkungan pasca rekonstruksi.
5. **Menerapkan secara konsisten prinsip-prinsip investasi** yang didasarkan pada kelayakan ekonomi, teknis, lingkungan, sosial, budaya dan agama, misalnya dengan cara (i) melakukan investasi berdasarkan hasil studi kelayakan ekonomi, teknis, lingkungan, sosial, budaya dan agama (ii) memprioritaskan optimalisasi prasarana dan sarana yang telah dibangun, sebelum menetapkan pembangunan fasilitas baru, (iii) menerapkan keterpaduan intermoda, (iii) menetapkan jadwal pelaksanaan berdasarkan tingkat kepentingan (*urgency*) dan tingkat kesiapan (*readiness*), (iv) menerapkan metoda pelaksanaan dan sistem logistik yang efisien serta (v) melakukan konsultasi publik, yang antara lain ditujukan untuk menggali dan mengakomodasikan nilai budaya lokal dan agama

Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara

Kebijakan dan strategi pemulihan infrastruktur di Kepulauan Nias menjadi pembangunan infrastruktur yang lebih baik, handal dan efektif melalui:

1. Memprioritaskan penyediaan prasarana dan sarana untuk memenuhi kebutuhan sosial dasar serta prasarana untuk memperlancar logistik.
2. Membangun kembali sistem transportasi dan komunikasi yang memadai untuk mendukung kelancaran hubungan antar wilayah kecamatan, kecamatan dan desa serta menuju sentra-sentra produksi misalnya dengan cara (i) membuka *entry point* dan jalur utama untuk pengembangan wilayah, (ii) merehabilitasi fasilitas telekomunikasi

yang ada dan/atau membangun fasilitas baru melalui teknologi nirkabel untuk memberikan kemudahan akses telekomunikasi secara lokal, SLJJ, maupun SLI.

3. Meningkatkan kualitas prasarana dan sarana jalan pada wilayah-wilayah terpencil dan sangat terpencil, terutama pada wilayah-wilayah yang terkait dengan sentra-sentra produksi dan pemasaran dalam rangka penguatan ekonomi masyarakat.
4. Merehabilitasi fasilitas distribusi energi dan kelistrikan sebagai upaya mendukung kembali aktivitas sosial dan perekonomian, misalnya dengan cara (i) memprioritaskan rehabilitasi jaringan distribusi kelistrikan dan (ii) mengarahkan upaya rekonstruksi untuk mendukung diversifikasi sumber energi listrik yang ramah lingkungan dan berbasis sumberdaya terbarui.

IV.3.3 Bidang Pemulihan Sosial Kemasyarakatan

Sasaran pokok pemulihan bidang sosial budaya, pada dasarnya adalah pulihnya pelayanan prasarana dan sarana pendidikan, kesehatan, keagamaan, pemuda dan olah raga serta terwujudnya kesetaraan gender di semua aspek kehidupan masyarakat di wilayah propinsi NAD dan Nias.

Indikator pulihnya pelayanan prasarana dan sarana sosial budaya tersebut antara lain adalah rasio prasarana dan sarana kesehatan terhadap penduduk, rasio dokter dan para medis terhadap penduduk, rasio jumlah guru terhadap murid, rasio jumlah murid dalam kelas dan sebagainya.

Sampai dengan akhir tahun 2006, masih banyak prasarana dan sarana yang dibangun belum termanfaatkan secara optimal akibat kekurangan guru, para medis dan fasilitas yang berhubungan dengan pemanfaatan prasarana dan sarana tersebut. Oleh karena itu, rencana aksi pemulihan sosial budaya diprioritaskan pada upaya pemanfaatan (utilisasi) prasarana dan sarana yang telah dibangun dan pelatihan - pelatihan yang terkait dengan optimasi pemanfaatan prasarana dan sarana serta fasilitas.

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Untuk mencapai sasaran tersebut, kebijakan dan strategi rekonstruksi bidang sosial dan kemasyarakatan adalah sebagai berikut:

- (1) **Meningkatkan peran serta lembaga agama, adat, dan sosial lainnya ditingkat mukim dan gampong dalam pemanfaatan prasarana dan sarana dayah (pesantren) yang telah dibangun misalnya dengan cara** (i) melibatkan dewan penasehat beserta perangkat mukim dan gampong, (ii) penguatan kapasitas dan peran lembaga agama, adat, dan sosial lainnya dalam menghadapi ancaman bencana alam.
- (2) **Memfasilitasi sarana dan prasarana agama, adat, dan sosial lainnya ditingkat mukim dan gampong**, misalnya dengan menyelesaikan pembangunan meunasah dan *bale gampong* (tempat musyawarah) termasuk menyediakan sound system bagi yang belum memiliki.
- (3) **Meningkatkan upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak** dengan cara mengembangkan dan memfungsikan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2), *women crisis center*, *children center*, reunifikasi keluarga, bantuan hukum, dan dukungan untuk pengasuhan anak;
- (4) **Meningkatkan mutu kehidupan adat, tradisi, dan kegiatan seni budaya serta pelestarian warisan budaya masyarakat** dengan cara (i) memetakan kembali keberadaan nilai-nilai budaya, warisan seni dan budaya masyarakat yang

perlu dilestarikan serta (ii) membangun kembali atau memperbaiki atau memugar sarana dan prasarana serta warisan budaya yang rusak

- (5) **Peningkatan peran pemuda dan budaya olah raga** dengan menyediakan fasilitas kepemudaan dan keolah ragaan dan memperkuat kapasitas kelembagaannya.
- (6) **Meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi terkait dengan pengurangan resiko bencana misalnya** melalui (i) peningkatan pengetahuan, kesadaran dan kesiapan masyarakat dalam pencegahan dini terhadap bencana gempa bumi dan gelombang tsunami dengan memperhatikan kearifan budaya lokal, (ii) penyelesaian pembangunan pusat peringatan dini (*early warning system*) dan (iii) memanfaatkan teknologi tepat guna dalam mendukung kehidupan sosial, ekonomi, budaya, kesehatan dan pendidikan masyarakat

Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara

Menjadikan sebuah sistem sosial kemasyarakatan yang kokoh dalam masyarakat Kepulauan Nias yang termasuk didalamnya *sektor pendidikan; kesehatan* dapat dilaksanakan melalui kebijakan dan strategi sebagai berikut:

1. **Merehabilitasi dan membangun sarana dan prasarana peribadatan, pendidikan, kesehatan dan penunjang kehidupan social budaya lainnya dalam rangka meningkatkan akses masyarakat ke fasilitas tersebut.**
2. **Peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, misalnya dengan** (i) melakukan pendataan kebutuhan khusus perempuan dan anak, (ii) mengembangkan dan menfungsikan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2) serta memfasilitasi *women crisis center*, (iii) memfasilitasi *children center*, reunifikasi keluarga, bantuan hukum, dan dukungan untuk pengasuhan anak, (iv) memberdayakan perempuan khususnya kepala keluarga perempuan dalam kegiatan ekonomi;
3. **Peningkatan kualitas kehidupan adat, tradisi, dan kegiatan seni budaya serta pelestarian warisan budaya masyarakat Kabupaten Nias dan Kabupaten Nias Selatan, misalnya dengan** (i) melakukan pendataan dan inventarisasi terhadap kerusakan warisan budaya, (ii) memperkuat nilai-nilai budaya, melestarikan warisan seni dan budaya masyarakat, (ii) membangun/merehabilitasi sarana dan prasarana budaya serta memugar warisan budaya yang rusak;
4. **Pemberian bantuan dan jaminan bagi masyarakat korban bencana yang rentan, misalnya dengan** (i) memberikan bantuan dan jaminan sosial (ii) meningkatkan mutu pelayanan maupun manajemen pendidikan, kesehatan dan rehabilitasi sosial bagi anak, lanjut usia, dan penyandang cacat korban bencana, (iii) membangun dan memfungsikan *trauma center* dan (iv) memberdayakan keluarga, fakir miskin, dan komunitas adat terpencil;
5. **Peningkatan peran pemuda dan budaya olah raga, misalnya dengan** (i) menyediakan fasilitas kepemudaan dan keolah ragaan serta memulihkan fungsi kelembagaannya, (ii) mobilisasi dan pemberdayaan potensi kepemudaan dan keolah ragaan.
6. **Pencegahan terjadinya wabah penyakit dan kekurangan gizi, misalnya** melalui (i) penilaian kebutuhan cepat (*rapid health assessment*), (ii) imunisasi, *vector control*, disinfeksi dan penyediaan air minum, (iii) memperkuat *surveilans epidemiologi* (iv) pemberian bantuan makanan bagi bayi, balita dan ibu hamil, (v) pemberian paket pertolongan gizi seperti vitamin A, tablet besi, sirup besi, (vi) penyuluhan gizi dan memperkuat surveilans gizi.

IV.3.4 Bidang Pemulihan Perekonomian

Sasaran pokok kegiatan pemulihan perekonomian, pada dasarnya adalah untuk mengembalikan sendi-sendi perekonomian masyarakat secara berkelanjutan.

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Kebijakan dan strategi pemulihan bidang perekonomian adalah:

1. **Memulihkan pendapatan masyarakat** melalui penyediaan lapangan kerja yang berkaitan dengan rehabilitasi dan rekonstruksi dan bilamana diperlukan, pelatihan alih profesi untuk menggantikan pekerjaan yang hilang, membuka seluas-luasnya partisipasi masyarakat Aceh yang berkaitan dengan rehabilitasi dan rekonstruksi.
2. **Memulihkan fasilitas pelayanan masyarakat** sehingga mencapai standar pelayanan minimal. Pemulihan ini dilaksanakan oleh Pemerintah melalui mobilisasi berbagai sumber daya yang tersedia seperti APBN dan bantuan. Pemulihan diutamakan terhadap sarana perikanan (pangkalan pendaratan ikan, tempat pelelangan ikan) dan sarana pertanian (irigasi tersier) dan tempat-tempat penjualan hasil produksi.
3. **Memulihkan kegiatan perbankan** melalui pemulihan berbagai sarana perbankan serta mengembalikan fungsi intermediasi. Pemulihan dilakukan pula melalui identifikasi nasabah serta penetapan ahli warisnya. Sedangkan dari sisi aset perbankan pemulihan dilakukan melalui restrukturisasi.
4. **Memfasilitasi masyarakat** dalam rangka memulihkan sarana produksinya misalnya melalui pendampingan dan pelatihan membuat proposal aplikasi kredit lunak. Dukungan kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan pendekatan berbasis masyarakat (*community-based approach*).
5. **Memberikan dukungan kepada masyarakat** dengan memperpendek akses untuk memperoleh sumber daya produktif misalnya penyediaan sistem insentif kredit disertai pemberian bantuan teknis.

Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara

Pemulihan perekonomian di kepulauan Nias bertujuan untuk membangun fondasi yang kuat guna menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan di masa depan sehingga pada akhirnya dapat menciptakan kemakmuran dan keadilan yang merata bagi seluruh penduduk Kabupaten Nias dan Nias Selatan. Dalam mewujudkan hal tersebut kebijakan dan strategi bidang ini adalah sebagai berikut:

1. **Pengorganisasian dan peningkatan ketrampilan dan pengetahuan masyarakat** tentang pentingnya sebuah kohesi sosial dalam kegiatan ekonomi, penciptaan kemandirian dalam rangka memulihkan pendapatan masyarakat disektor pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan serta kepariwisataan misalnya melalui peningkatan kemampuan (*skills*) yang baru.
2. **Pemberian Bantuan modal kerja termasuk pembentukan sebuah lembaga keuangan mikro untuk meningkatkan akses ke sumberdaya produktif.** Kebijakan ini diserahkan pengaturannya kepada kelompok-kelompok kerja yang telah dibentuk sebelumnya. BRR dan pemda berperan menjadi fasilitator dan penjamin bantuan modal dan mengajak kerjasama lembaga-lembaga keuangan formal lainnya. Sementara itu, lembaga keuangan mikro dikembangkan dalam rangka menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan (i) penciptaan lapangan kerja, (ii) peningkatan pendapatan masyarakat; dan (iii) pengentasan kemiskinan.

3. **Memulihkan fasilitas pelayanan masyarakat** untuk memenuhi standar pelayanan minimal seperti pemulihan pangkalan pendaratan ikan, tempat pelelangan ikan, memulihkan sarana irigasi serta pusat-pusat penjualan lainnya termasuk pengembangan koperasi dan pengusaha kecil dan menengah.
4. **Meningkatkan upaya pemeliharaan dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup** untuk mengantisipasi eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan dan perusakan lingkungan hidup yang berdampak negatif pada keberlanjutan perekonomian jangka panjang.

IV.3.5 Bidang Pemulihan Kelembagaan dan Hukum

Sasaran pokok pemulihan kelembagaan dan hukum, pada dasarnya adalah pulihnya kembali sistem pelayanan kelembagaan pemerintah kepada masyarakat diseluruh bidang kehidupan yang meliputi: *sektor ketertiban, keamanan dan ketahanan masyarakat (K3M) serta sektor hukum.*

Sistem kelembagaan yang perlu dipulihkan kembali meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi bangunan kantor, pelatihan SDM junior yang dipromosikan untuk menggantikan seniornya yang menjadi korban, revitalisasi sistem dan prosedur pelayanan masyarakat, penyediaan perangkat perangkat kerja dan lain sebagainya.

Sampai akhir tahun 2006, sistem kelembagaan yang telah direvitalisasi tersebut belum mampu mengimbangi penambahan beban tugas` rekonstruksi yang relatif besar. Oleh karena itu, rencana aksi di bidang perkuatan kelembagaan diarahkan untuk peningkatan ketrampilan aparat, khususnya dibidang perencanaan dan pemrograman serta penganggaran secara terintegrasi yang bertumpu pada kebijakan penataan ruang dan penataan lingkungan.

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Kebijakan dan strategi untuk mencapai sasaran tersebut pemulihan bidang kelembagaan dan hukum adalah sebagai berikut:

- (1) Memperkuat pemerintah daerah dalam pelaksanaan pelayanan publik yang efektif, akuntabel dan transparan melalui pengembangan sistem dan prosedur, pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, manajemen dan ketrampilan lapangan.
- (2) Mengembangkan dan mengefektifkan ruang publik yang dinamis dengan melibatkan semua stakeholder dalam proses perencanaan, formulasi kebijakan, pembuatan keputusan, monitoring dan evaluasi;
- (3) Membangun dan memulihkan kembali infrastruktur pemerintahan untuk mendukung proses pelayanan publik.
- (4) **Meningkatkan kapasitas aparat pemerintahan di daerah dalam jangka menengah, melalui:** (i) penataan kembali terhadap ketersediaan aparatur pemerintah daerah, legislatif, pimpinan daerah yang didasarkan pada beban tugas pasca rekonstruksi, (ii) pendidikan dan pelatihan dibidang kepemimpinan, manajemen profesional (perencanaan dan pemrograman serta penganggaran terintegrasi) berbasis penataan ruang dan penataan lingkungan, (iii) perbaikan sistem administrasi dan sistem manajemen pemerintahan daerah yang responsif terhadap perubahan-perubahan yang tidak diduga (misal :bencana alam).
- (5) **Melanjutkan penyediaan sarana dan prasarana lembaga pemerintahan permanen,** melalui: (i) penyiapan masterplan dan rencana teknis (*Detail Engineering Design*), (ii) memfasilitasi penyediaan sarana kerja pemerintah daerah

dan peralatan mitigasi bencana untuk mendukung pelayanan publik termasuk trauma centre, sistem kehumasan Pemda, dan forum komunikasi.

- (6) **Melanjutkan proses pematangan dan pendewasaan sosial politik bagi masyarakat, melalui:** (i) peningkatan peran masyarakat sipil dalam membantu menyelesaikan persoalan sosial kemasyarakatan, (ii) restrukturisasi dan reorientasi lembaga masyarakat, lembaga ekonomi, dan pemerintahan, serta memantapkan sistem komunikasi massa dan informasi, (iii) pengelolaan Dampak Bencana melalui kegiatan kemanusiaan, peningkatan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat, refungsionalisasi pemerintahan, termasuk lembaga keamanan, dukungan rehabilitasi dan dukungan rekonstruksi dengan pendekatan sosio-kultural, (iv) membangun karakter dan kebangsaan (*nation and character building*) yang mandiri dan berkualitas.
- (7) **Melanjutkan program untuk menjaga rasa aman dan tertib** di masyarakat bersama-sama dengan seluruh komponen masyarakat dengan: melanjutkan refungsionalisasi lembaga – lembaga keamanan dan ketertiban; pengamanan proses pembangunan terutama rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana serta aktivitas sosial ekonomi; dan meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat di daerah yang rawan (belum kondusif).
- (8) Pada *sektor hukum*, meningkatkan peran ulama sebagai tokoh sentral dalam penerapan syariat Islam berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA), melalui:
 - a. Pelibatan ulama dalam memberikan pertimbangan (menjadi *filter* dan *quality control*) terhadap materi-materi legislasi hukum, mulai dari tahapan perencanaan hingga pada tahapan sosialisasi di masyarakat.
 - b. Peningkatan kapasitas dan peran ulama dalam hal, sebagai mitra sejajar dari pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), diharapkan dapat memainkan peran sentral dalam pembentukan qanun-qanun dan pelaksanaan program-program yang terkait dengan penerapan syariat Islam secara kaffah.

Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara

Kebijakan dan Strategi dalam rangka peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintahan meliputi:

1. **Memperkuat pemerintah daerah dalam melaksanakan pelayanan publik yang efektif, akuntabel dan transparan,** dengan: (i) rekrutmen, pelatihan dan pendidikan secara khusus dan cepat untuk mengisi kekosongan aparatur yang meninggal, (ii) penyelesaian masalah administrasi kepegawaian dan batas-batas administrasi wilayah (kecamatan/ kelurahan/ desa), (iii) pemanfaatan sarana dan prasarana pemerintahan yang masih dapat dipergunakan di Kabupaten Nias dan Kabupaten Nias Selatan, (iv) penyelamatan dokumen administrasi pemerintahan, (v) kerjasama dalam pemberian bantuan keuangan, bantuan medis, dan peralatan lainnya.
2. **Melanjutkan pembangunan dan pemulihan infrastruktur pemerintahan untuk mendukung proses pelayanan publik dalam jangka menengah,** melalui: (i) penataan, penyediaan dan peningkatan kemampuan aparatur pemerintah daerah, (ii) menata sistem administrasi pemerintahan daerah yang responsif terhadap perubahan-perubahan yang tidak diduga (bencana alam dan bencana buatan), (iii) menata struktur kelembagaan yang proporsional dan prosedur kerja sesuai dengan tugas, pokok, fungsi, wewenang dan tanggungjawab, untuk memenuhi standar

pelayanan minimum (SPM), (iv) menciptakan dan meningkatkan koordinasi serta kerjasama antar tingkat pemerintahan.

3. **Mengembangkan dan mengefektifkan ruang publik dengan melibatkan semua stakeholder dalam proses perencanaan, formulasi kebijakan, pembuatan keputusan, monitoring dan evaluasi**, dengan melanjutkan rekonstruksi prasarana pemerintahan daerah yang permanen berdasarkan masterplan dan rencana teknis (*Detail Engineering Design*) serta penyediaan sarana kerja pemerintah daerah dan peralatan mitigasi bencana untuk mendukung pelayanan publik.

Sebagaimana telah disebutkan pada bab III yang menjelaskan secara detail mengenai pendanaan Rencana Aksi rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara untuk tahun 2007-2009. Maka pada sub bab berikut ini akan menjelaskan secara umum tentang Sumber-Sumber Pendanaan, Mekanisme Pengelolaan Pendanaan, dan Mekanisme Penyaluran Dana untuk rehabilitasi dan rekonstruksi.

IV.4 Sumber-Sumber Pendanaan

Sebagaimana pada periode pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat provinsi NAD dan kepulauan Nias di provinsi Sumatera Utara tahun 2005-2006 yang lalu, pendanaannya berasal dari dana APBN, APBD, hibah (*grant*), serta dana yang berasal dari masyarakat. Pendanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi periode 2007-2009 diharapkan berasal dari sumber yang sama. Walaupun demikian, pendanaan per bidang pemulihan harus diatur berdasarkan ketersediaan dana, misi dan atau peran masing masing lembaga penyedia dana.

Sumber Dana APBN (On Budget)

Alokasi dana APBN dapat bersumber dari (i) dana rupiah murni, (ii) hibah luar negeri baik yang bersifat bilateral maupun multilateral, (iii) realokasi atau reprogramming dana pinjaman luar negeri yang sedang berjalan, (iv) pinjaman luar negeri baru (apabila diperlukan); serta (v) penundaan dana pembayaran bunga dan pokok utang luar negeri berdasarkan *moratorium* di Paris Club.

1. **Dana rupiah murni** yang bisa digunakan antara lain berasal dari dana cadangan umum dan dana dari Departemen/Lembaga yang dapat disalurkan melalui mekanisme dekonsentrasi, tugas pembantuan maupun dana instansi pusat yang kewenangannya tidak didesentralisasikan seperti bidang agama, bidang peradilkan serta bidang keuangan tetapi tidak dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan sebagaimana telah direncanakan sebelum terjadinya bencana.
2. **Hibah luar negeri**, berasal dari negara-negara dan lembaga donor yang tergabung dalam *Consultative Group on Indonesia (CGI)*. Dana hibah tersebut akan disalurkan ke dalam APBN secara *on-budget* maupun secara *off-budget*. Potensi dana hibah yang penyerapannya relatif masih rendah adalah yang berasal hibah yang disalurkan melalui Bank Pembangunan Asia (ADB). Selain itu, potensi dana hibah lainnya yang dapat dimanfaatkan antara lain yang berasal dari swasta/masyarakat yang bersumber dari perusahaan, *Non Government Organization (NGO)*, perorangan dan sumber lain.
3. **Realokasi dana pinjaman luar negeri** yang potensial digunakan misalnya yang berasal dari *Islamic Development Bank*, Bank Dunia. Dana yang dapat direalokasi adalah dana yang belum dialokasikan untuk kegiatan tertentu (*unallocated*), serta dana dari sisa pinjaman yang tidak terpakai.

4. **Pinjaman Luar Negeri baru**, terutama pinjaman sangat lunak dipertimbangkan sebagai alternatif sumber pendanaan yang potensial, apabila ketersediaan dana dalam negeri dan hibah terbatas. Beberapa pinjaman sangat lunak yang sudah disepakati, diantaranya yang berasal dari Pemerintah Australia. Pinjaman lunak tersebut bunganya 0 %, masa pengembalian 40 tahun, tenggang waktu pembayaran (*grace period*) selama 10 tahun.
5. **Moratorium** atau penundaan pembayaran hutang yang jatuh tempo, juga dipertimbangkan sebagai alternatif sumber pendanaan yang potensial.

Sumber Dana Non APBN (Off Budget)

Sumber dana non APBN adalah sumber pendanaan yang berasal dari masyarakat, lembaga donor dan dunia usaha yang bermaksud membantu pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah Aceh dan Nias. Pengalokasian dana of budget tersebut dilakukan secara langsung oleh NGO/lembaga internasional yang melakukan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.

IV.5 Mekanisme Pengelolaan Pendanaan

Pada dasarnya mekanisme dan prosedur pendanaan dalam rangka Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara mengikuti Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan serta aturan pelaksanaan yang terkait dengan undang undang dimaksud.

Mekanisme pendanaan yang menggunakan APBN, baik rupiah murni maupun PHLN dilakukan sesuai aturan yang ada. Namun untuk mempercepat pencapaian hasil-hasil kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dapat dilaksanakan *langkah-langkah* seperti: (i) percepatan penyelesaian administrasi dokumen anggaran; (ii) percepatan pembayaran melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Khusus.

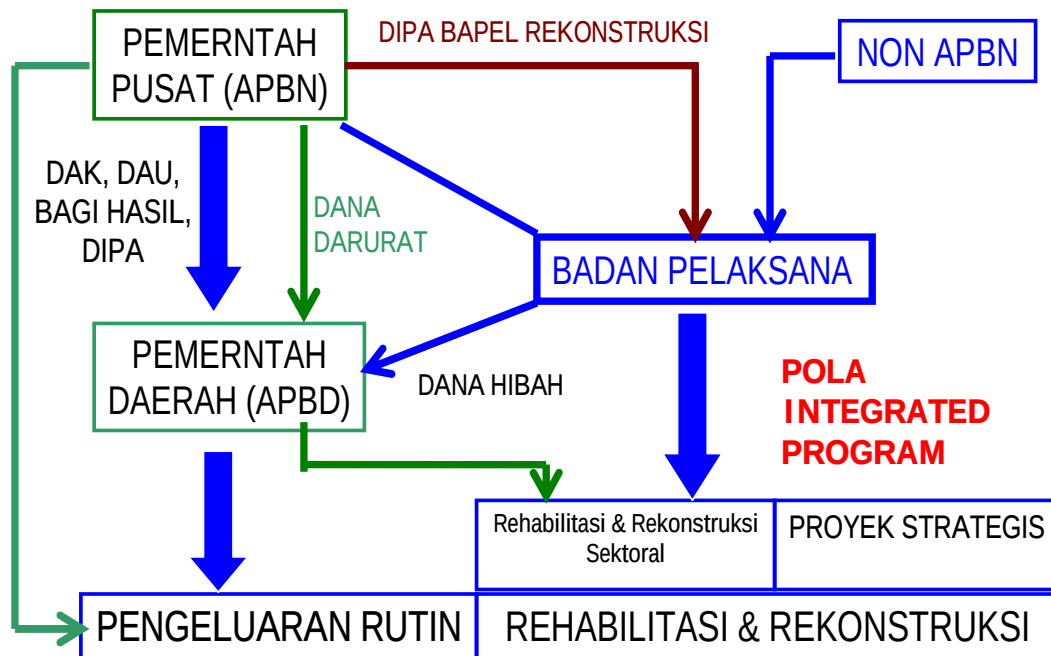
Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara yang dibentuk untuk mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi berperan sebagai Satuan Kerja (Satker), dan menjadi instansi pengguna anggaran tersendiri, yang dengan demikian mempunyai dokumen anggaran (DIPA).

Sementara itu, kegiatan pembangunan yang bersumber dari Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Bagi Hasil yang ada di APBD akan langsung dilaksanakan oleh pemerintah daerah, baik oleh Provinsi NAD dan masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota di NAD dan Nias, Sumatera Utara. Perencanaan dan pemanfaatan dana tersebut tetap dilaksanakan sendiri oleh masing-masing pemerintah daerah. Namun demikian untuk kegiatan tertentu yang sejenis dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan, perlu dilakukan langkah-langkah koordinasi antara Badan dengan Pemda.

IV.6 Mekanisme Penyaluran Dana

Mekanisme penyaluran dana rehabilitasi dan rekonstruksi tersebut, baik yang bersumber dari rupiah murni meliputi dana Dekonsentrasi, Tugas Perbantuan, Desentralisasi dan pinjaman luar negeri periode 2008-2009 sesuai PP no 2 tahun 2006, dimana usulan pendanaan diajukan oleh Kementerian/Lembaga, Pemda dan BUMN kepada Kementerian Perencanaan untuk dilakukan penilaian dan disusun dalam DRPPHLN, kemudian Meneg PPN meneruskan ke Menkeu sebagai pihak yang berwenang melakukan pinjaman luar negeri ditampilkan dalam bentuk diagram alur (flow chart) Gambar berikut:

Gambar IV.3
Alur Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

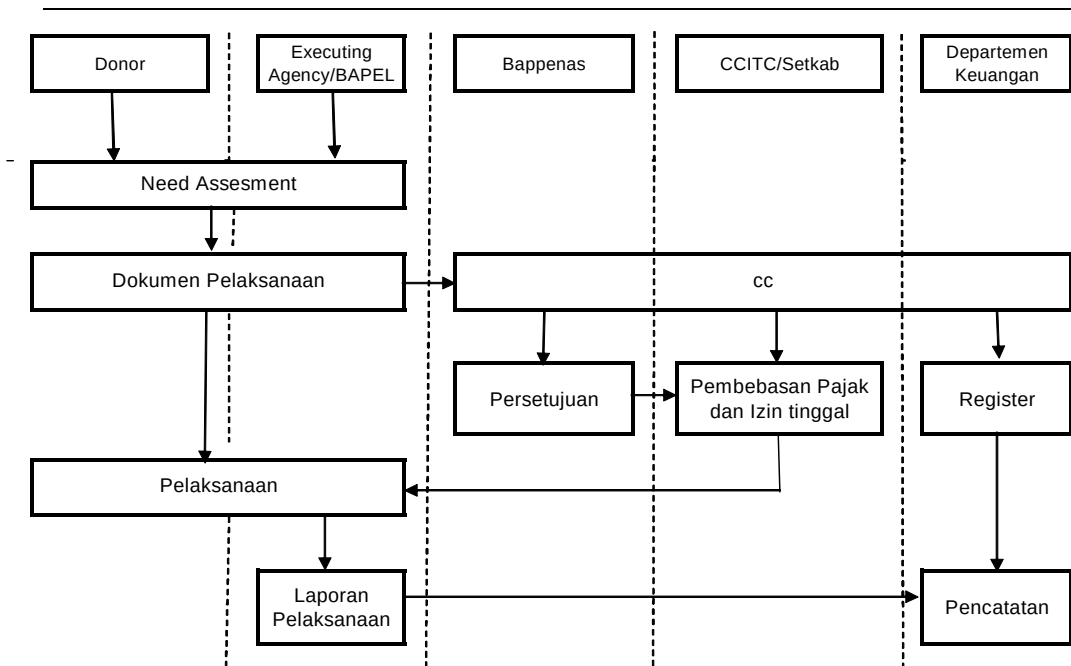


Sumber: Perpres RI No.30 Tahun 2005, Buku Utama tentang Rencana Induk Rehabilitasi dan rekonstruksi Wilayah dan kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara.

Sementara itu, untuk penyaluran dana hibah, dalam rangka pembiayaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi, menyesuaikan pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/ atau Hibah Serta Penerusan Pinjaman dan/ atau Hibah Luar Negeri. Pemerintah Indonesia telah membuat kesepakatan dengan berbagai donor/*lender* untuk memperpendek prosedur dan mempercepat proses, sehingga dana hibah dapat segera dilaksanakan dengan lebih cepat. Para donor akan membuat dokumen kesepakatan, seperti: *Grant Agreement* atau *Memorandum of Understanding, Exchange of Notes* atau sejenisnya segera setelah diperoleh perkiraan kebutuhan pendanaan yang disusun oleh POKJA dibawah koordinasi Bappenas dan kemudian tertera didalam *Rencana Induk*.

Berdasarkan dokumen kesepakatan tersebut, kegiatan dapat segera dilaksanakan secara langsung oleh pihak donor ataupun dikelola oleh Pemerintah Indonesia (dalam hal ini Bapel). Namun demikian, dokumen kesepakatan yang mendasari pelaksanaan kegiatan tersebut perlu dicatatkan (*registered*) kepada Departemen Keuangan, dan ditembuskan kepada Bappenas dan Sekretariat Kabinet (masuk dipa). Hal ini untuk menjaga ketertiban administrasi dan keselarasan pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan, agar tidak terjadi tumpang-tindih kegiatan (sebagaimana tertera pada gambar berikut) :

Gambar IV.4
Bagan Alir Mekanisme Hibah Luar Negeri



Sumber : Halaman 8, Bab VII, Pendanaan, Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kabupaten Nabire Provinsi Papua Pasca Gempa, Agustus 2005

Setiap Instansi akan mengeluarkan persetujuan kerjasama dengan pihak donor sesuai dengan kewenangannya dan sejalan dengan pelaksanaan di lapangan. Khusus untuk pengadaan barang impor yang akan mendapatkan pembebasan pajak harus memperoleh ijin dari Departemen Keuangan dengan rekomendasi dari Sekretariat Negara. Terkait dengan pemanfaatan dana hibah tersebut, maka *alur persiapan, persetujuan dan pelaksanaan proyek/program* adalah sebagai berikut :

1. Proposal proyek/program disiapkan oleh Pemerintah Indonesia;
2. *Steering Committee* mengevaluasi usulan proyek/program dan memberikan persetujuan;
3. *Trustee* melakukan penilaian (*appraisal*) dan akhirnya, perjanjian hibah dilakukan antara *Trustee* dan Pemerintah Indonesia.

Penampungan hibah dari swasta/masyarakat dilakukan sesuai dengan surat Menteri Keuangan No. S-24/MK.06/2005 tanggal 18 Januari 2005. Dalam hal ini, Menteri Keuangan telah membuka 4 (empat) rekening di Bank Indonesia untuk menampung hibah dari luar negeri dan masyarakat dalam negeri dalam mata uang Rupiah (No. Rek 510.000.272), Dollar Amerika Serikat (No. Rek 602.074.411), Japanese Yen (No. Rek. 602.075.111) dan Euro (No. Rek. 602.076.991). Apabila swasta dalam dan luar negeri yang bermaksud memberikan bantuan hibah berupa uang dapat disetorkan langsung ke rekening tersebut diatas.

Namun demikian, apabila penghibah tidak bersedia untuk menyetorkan dananya, maka swasta/masyarakat dapat melaksanakan sendiri, dengan ketentuan bahwa kegiatan/proyek yang akan dilaksanakan harus sudah dikonsultasikan dan disetujui oleh Badan untuk memastikan kegiatan tersebut sesuai dengan Rencana Induk Rehabilitasi

dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara.

MDTF

Multi Donor Trust Fund (MDTF) adalah sebuah mekanisme dimana beberapa negara donor berkumpul dan bekerjasama untuk melakukan suatu kegiatan dalam isu yang sama. Kegiatan itu dapat dilaksanakan di dalam satu negara atau dilaksanakan secara global di banyak negara. Contohnya *trust fund* yang digunakan di satu negara adalah bantuan Pemilu di Indonesia. Dasar pemikiran pembentukan *trust fund* adalah agar bantuan yang diberikan dapat dilaksanakan secara lebih efisien. Hal lain yang mendasari bantuan di suatu negara adalah penilaian bahwa negara tersebut tidak mampu melakukan kegiatan secara bilateral.

Mekanisme *trust fund* dimulai dengan penunjukan sebuah lembaga sebagai *Trust Fund Manager (TFM)*. Jika untuk kegiatan global penunjukan TFM dilaksanakan oleh sidang pertemuan negara-negara yang terlibat, biasanya lewat badan PBB atau organisasi regional. Sedangkan untuk *trust fund* pada satu negara TFM ditetapkan oleh negara yang bersangkutan. Penunjukan ini biasanya ditetapkan dalam kesepakatan Sidang atau MoU.

Bersama dengan negara penerima donor, TFM akan menyusun kebutuhan secara terperinci. Atas dasar perencanaan ini, TFM akan menghubungi negara donor untuk memberikan bantuannya. TFM bersama-sama dengan donor selanjutnya akan membuat perjanjian mengenai bantuan yang akan diberikan beserta kegiatan yang akan dibantunya. TFM akan menyampaikan total komitmen yang telah diterima kepada Negara penerima, beserta kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan serta rincian uraian dana yang dijanjikan oleh para donor.

TFM akan memberikan bantuan dalam bentuk *Technical Assistance* atau bantuan Teknik sehingga bantuan akan diberikan dalam bentuk barang dan jasa. Untuk itu pengadaan barang dan jasa akan dilakukan sesuai dengan aturan TFM. Untuk memenuhi asas APBN maka Executing Agency yang ditunjuk wajib melaporkan besaran dana yang telah disalurkan untuk setiap kegiatan kepada Departemen Keuangan yang kemudian dicatatkan sebagai penerimaan negara.

Melihat kondisinya maka bantuan untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara dapat menggunakan mekanisme ini. Namun jika melihat legitimasi Pemerintah yang cukup kuat maka MDTF menjadi kurang tepat. Namun demikian bantuan melalui mekanisme ini tetap dapat ditempuh mengingat beberapa negara yang berminat membantu Indonesia untuk melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi memilih mekanisme ini. Seperti yang dilakukan oleh IDB yang secara defakto telah menjadi *trust fund manager* untuk membantu negara-negara Organisasi Konferensi Islam (OKI) untuk melaksanakan pembangunan fasilitas sekolah terpadu (*boarding school*) di 5 lokasi di Aceh. Sementara itu usulan Bank Dunia dan ADB untuk menjadi *trust fund manager* belum ditindaklanjuti.

IV.7 Mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa

Mekanisme dan prosedur pengadaan barang/jasa (*procurement*) dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi Provinsi NAD dan wilayah Kepulauan Nias, pada prinsipnya mengikuti Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 beserta perubahannya, tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah. Meskipun demikian, jika penyelenggaraan suatu kegiatan memperoleh pendanaan dari lembaga donor atau kreditor maka aturan yang digunakan akan mengacu kepada pedoman (*guidelines*) yang ditentukan oleh lembaga donor atau kreditor tersebut. PP no 2 tahun 2006 Pasal 11 ayat (1) dan pasal 12 ayat (2 & 3) mengatur tentang mekanisme pengadaan barang dan jasa

yang dibiayai melalui fasilitas kredit ekspor atau pinjaman komersial dilaksanakan setelah alokasi pinjaman Pemerintah ditetapkan oleh Menteri dengan mempertimbangkan kebutuhan riil pembiayaan luar negeri, kemampuan membayar kembali, batas maksimum kumulatif pinjaman, kemampuan penyerapan pinjaman serta resiko pinjaman bersangkutan. Menteri menetapkan alokasi pinjaman Pemerintah menurut sumber dan persyaratannya.

Pengadaan barang dan jasa dapat dilakukan dengan cara pelelangan/seleksi umum, pelelangan/seleksi terbatas, pemilihan/seleksi langsung dan penunjukan langsung oleh aparat pemerintah (departemen/lembaga) yang membawahi proyek tersebut. Agar dapat dicapai efisiensi dan efektivitas yang optimal, proses pengadaan tersebut harus memenuhi dan mengikuti persyaratan dan prosedur tertentu serta dikelola menurut sistem manajemen proyek yang baik. Cara pengadaan barang dan jasa tersebut membuka secara luas peran serta dunia usaha. Satuan harga untuk setiap barang dan jasa yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan proyek pada dasarnya berpedoman pada satuan harga yang telah ditetapkan oleh instansi yang berwenang. Agar sesuai dengan perkembangan harga yang berlaku, pedoman satuan harga tersebut ditinjau ulang setiap tahun.

Pengadaan barang/jasa untuk setiap paket kegiatan pada prinsipnya harus dilaksanakan oleh pengguna anggaran atau di instansi yang memegang dokumen anggaran. Penentuan instansi sebagai pengguna anggaran (*pemegang dokumen anggaran*) ditetapkan sesuai dengan kewenangan yang telah digariskan oleh aturan perundangan yang berlaku.

Dengan pelaksanaan pengadaan sesuai dengan kewenangan, maka penyedia barang/jasa setempat mempunyai kesempatan yang terbuka untuk berpartisipasi dalam berkompetisi melaksanakan pekerjaan. Keterlibatan penyedia barang/jasa setempat dianggap mempunyai keunggulan komparatif yang diantaranya pengenalan medan, penggunaan tenaga dan sumber daya lokal, serta budaya setempat lainnya. Meskipun demikian apabila dianggap pelaksanaan pengadaan barang/jasa tidak mungkin dapat dilakukan di daerah bencana, maka Menteri/Ketua Lembaga Pengguna Anggaran dapat menetapkan lokasi pengadaan barang/jasa di tempat lain.

Beberapa perubahan terhadap Keppres No. 80 Tahun 2003, khusus untuk pelaksanaan kegiatan di Kepulauan Nias, perlu dilakukan untuk memberikan keleluasaan bagi para pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran mempercepat pelaksanaan kegiatannya, serta memberikan beberapa kemudahan dan fleksibilitas, dengan tidak mengabaikan prinsip efisien, transparan, persaingan yang adil, serta akuntabel.

Selain itu, beberapa pengalaman pengadaan barang dan jasa yang telah dilakukan pada periode 2005-2006 yang lalu dapat pula dilakukan pada periode pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi berikutnya yaitu:

1. Pemerintah menginventarisir sumber-sumber bahan bangunan pokok yaitu semen, besi dan kayu dan menyiapkan langkah-langkah untuk memfasilitasi pengadaan bahan bangunan lokal untuk menjamin ketersediaan material bangunan.
2. Prosedur penunjukan langsung dapat dilakukan untuk proyek perencanaan dan pembangunan rumah serta pembangunan prasarana publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2005 jo. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
3. Keringanan pajak diberikan bagi pengadaan barang dan jasa untuk rehabilitasi dan rekonstruksi terutama bagi komponen pembangunan perumahan dan prasarana publik.
4. Anggota panitia di Nias dapat berasal dari instansinya sendiri atau instansi teknis

Pemerintah, dan dapat menyertakan pihak lain yang ditunjuk oleh Kepala Badan Pelaksana (berdasarkan Peraturan Presiden no.8 tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah).

Beberapa perubahan dan penyesuaian yang diperlukan meliputi pemberian kewenangan yang lebih besar untuk melakukan penyesuaian paket-paket kontrak kegiatan sesuai dengan kondisi lapangan. Di samping itu, diberikan wewenang yang lebih besar untuk hal-hal yang batasannya telah ditentukan. Perubahan ketentuan juga diberikan untuk meningkatkan peran pemantauan dan pengawasan dalam rangka mengurangi potensi penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan. Saat ini sedang dilakukan pula penyederhanaan beberapa prosedural dan penyingkatan waktu dengan menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa yang seragam untuk berbagai sumber pendanaan, baik pendanaan yang berasal dari luar negeri maupun pendanaan yang berasal dari dalam negeri. Dalam mempersiapkan penyeragaman dokumen tersebut, telah dijalin koordinasi dengan beberapa lender/donor, diantaranya: Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia, dan JBIC.

IV.8 Mekanisme Pemantauan dan Pengendalian Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat provinsi NAD dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara dapat menimbulkan kompleksitas hubungan antar lembaga, mengingat cakupan kegiatannya dimobilisasi secara masif dan cepat. Untuk itu diperlukan pengaturan hubungan antar lembaga agar proses pelaksanaannya tetap dapat terkoordinasi secara baik sesuai dengan lingkup tugas dan wewenang yang ada pada masing-masing lembaga/instansi terkait berdasarkan PP nomor 39 tahun 2006 tentang Tata cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Beberapa hal yang diatur antara lain sebagai berikut:

1. Pimpinan Kementerian /Lembaga/SKPD melakukan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing, selanjutnya pelaksanaan kegiatan ini dikoordinasikan dengan badan pelaksana rehab rekons.
2. Pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan TP (tugas perbantuan) merupakan tugas dan fungsi yang melekat pada masing-masing Kementerian/Lembaga/SKPD, dimana, Pendanaan yang bersumber dari TP (Tugas Pembantuan) dari Kementerian/Lembaga terkait dapat dialokasikan langsung pada tingkat Kabupaten/Kota dan dipergunakan untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi daerah bencana.
3. Pimpinan Kementerian/Lembaga melakukan pengendalian pelaksanaan Renja-KL yang meliputi pelaksanaan program dan kegiatan, serta jenis belanja.
4. Gubernur melakukan pengendalian pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang meliputi pelaksanaan program dan kegiatan, serta jenis belanja.
5. Bupati/Walikota melakukan pengendalian pelaksanaan tugas pembantuan yang meliputi pelaksanaan program dan kegiatan, serta jenis belanja.
6. Tata cara pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dalam bentuk kegiatan selain dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang dilakukan oleh Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka pemantauan dan pengendalian, digunakan 5 (lima) indikator penilaian

yaitu konsistensi, koordinasi, konsultasi, kapasitas dan keberlanjutan. Penjelasan mengenai makna ke lima indikator tersebut adalah sebagai berikut:

1. **Konsistensi** yaitu proses penelaahan kesesuaian: (a) antara perencanaan yang tercantum dalam Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi dengan Rencana Aksi dan Rencana Kerja yang disusun oleh para pelaksana kegiatan (b) antara Rencana Aksi dan Rencana Kerja yang disusun oleh pelaksana dengan realisasi pelaksanaan kegiatan di lapangan; serta (c) antar kegiatan pelaksanaan
2. **Koordinasi** yaitu suatu interaksi dan komunikasi antar berbagai *stakeholders* dalam mendorong tercapainya kesepakatan, kebersamaan, kesepakatan, dan komitmen dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.
3. **Konsultasi** yaitu keikutsertaan atau partisipasi publik pada berbagai forum dalam rangka menyerap aspirasi dan pandangan, baik dalam konteks perencanaan dan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.
4. **Kapasitas** yaitu kemampuan kelembagaan, Sumber Daya Manusia (SDM), dan sumber pendanaan, yang didayagunakan dalam melaksanakan berbagai upaya perencanaan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi.
5. **Keberlanjutan** yaitu proses kesinambungan dan saling keterkaitan antara pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilaksanakan Badan Pelaksana BRR kepada Pemerintah Daerah sebagai penanggung jawab dan pelaksana pembangunan.

Tabel IV.3
Kerangka Pemantauan dan Indikator Evaluasi

NO.	RUANG LINGKUP PEMANTAUAN DAN EVALUASI	INDIKATOR
1.	Konsistensi	1. Konsistensi antar dokumen perencanaan 2. Konsistensi antara perencanaan dengan pelaksanaan 3. Konsistensi antara pelaksana rehabilitasi dan rekonstruksi
2.	Koordinasi	1. Mekanisme koordinasi dalam penyusunan perencanaan 2. Mekanisme koordinasi dalam pelaksanaan
3.	Konsultasi	1. Tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program dalam koordinasi Bapel BRR, K/L, Pemda/SKPD, Donor/NGO/ Swasta 2. Media partisipasi masyarakat secara langsung
4.	Kapasitas	1. Kelembagaan perencanaan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara 2. Sumber Daya Manusia
5.	Keberlanjutan	1. Sistem dan manajemen peralihan aset kepada Pemerintah Daerah 2. Konsep tentang <i>exit strategy</i> pasca keberadaan BRR

Sumber: Laporan monitoring dan evaluasi P3RIRRWANS, 2006, Bappenas

IV.8.1 Kerangka Pemantauan dan Pengendalian

Pemantauan dan pengendalian yang dilanjutkan dengan analisis kebijakan dapat dipergunakan untuk penyusunan bahan arahan kebijakan oleh Dewan Pengarah kepada Badan Pelaksana BRR. Perumusan kebijakan ini sangat signifikan karena mengingat bahwa tugas Dewan Pengarah adalah memberikan arahan dan saran kepada Badan Pelaksana sebagai pelaksana teknis kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah bencana Kepulauan Nias, Provinsi Sumatra Utara.

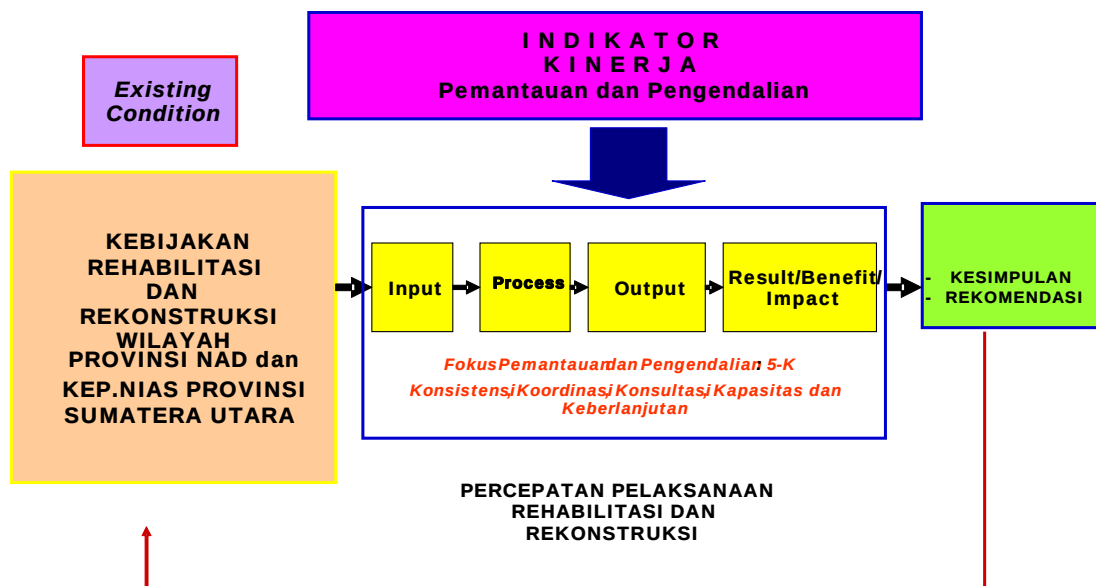
Di dalam mendukung operasionalisasi kegiatan pemantauan dan pengendalian, terhadap kelima indikator penilaian (5K) dilakukan pengukuran kinerja input, proses, output dan outcome yang dirumuskan dalam suatu kerangka kerja logis (*logical framework*) secara makro dan komprehensif berikut ini:

- a. **input** yaitu segala sesuatu yang dibutuhkan, baik *program dan kegiatan, sumber dana, sumber daya alam, sumber daya manusia, maupun yang berupa teknologi dan informasi*, agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran.
- b. **process** yaitu upaya yang dilakukan di dalam mengolah masukan menjadi keluaran. Indikator ini umumnya dikaitkan dengan *keterlibatan stakeholders* termasuk penerima manfaat, serta dikaitkan dengan *mekanisme pelaksanaannya*, termasuk *koordinasi dan hubungan kerja* antar unit organisasi.
- c. **output** yaitu *pencapaian sasaran* dari suatu kegiatan, baik berupa fisik maupun berupa non fisik.
- d. **outcome** yaitu menunjukkan telah dicapainya maksud dan tujuan dari kegiatan-kegiatan yang telah selesai dilaksanakan atau indikator yang mencerminkan *fungsi atau manfaat keluaran kegiatan*.

Evaluasi dilakukan dengan menggunakan pendekatan sistem atau keterkaitan, di mana dalam setiap tahapan akan menekankan pada 5 indikator (5K) untuk fokus evaluasi (konsistensi, koordinasi, konsultasi, kapasitas dan keberlanjutan) yang tidak terpisah satu dengan lainnya.

Gambar IV.5

Kerangka kerja logis kegiatan pemantauan dan pengendalian



Sumber: Laporan monitoring dan evaluasi P3RIRWANS, 2006, Bappenas

IV.8.2 Kegiatan Pemantauan dan Pengendalian

Pelaksanaan pemantauan dan pengendalian meliputi:

1. *Pengumpulan data dan informasi* tentang pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara.

2. Pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan meliputi : Renja K/L, Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan.
3. *Pemantauan dan pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan terhadap perkembangan realisasi penyerapan dana, realisasi pencapaian target keluaran (output) dan kendala yang dihadapi.*
4. *Penyusunan laporan triwulan dalam rangka analisa, rekomendasi serta laporan pemantauan dan pengendalian.*
5. *Penyampaian laporan hasil guna menilai kemajuan pelaksanaan rencana serta mengidentifikasi permasalahan yang memerlukan tindak lanjut.*

IV.8.3 Kegiatan Pendukung Pemantauan dan Pengendalian

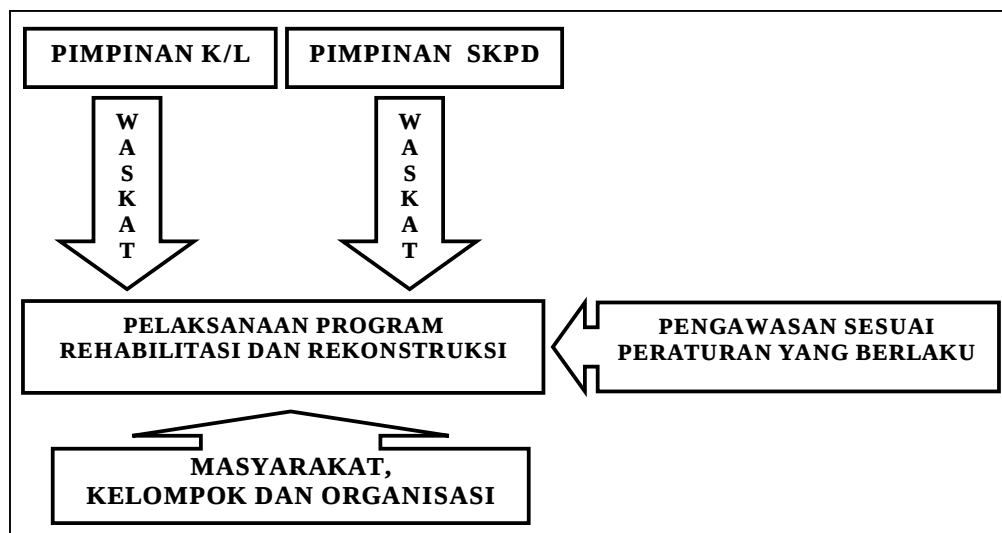
Kegiatan kegiatan pendukung pemantauan dan pengendalian meliputi:

1. Pelaksanaan koordinasi penyiapan *perumusan kebijakan rencana aksi tahunan*, dan koordinasi atas data, informasi, dan penyusunan laporan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi perencanaan atas pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi.
2. *Pengkoordinasian atas data dan informasi* perencanaan, pemantauan dan pengendalian pendanaan yang dibutuhkan dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi.
3. *Pemutakhiran data dan informasi* pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi serta penyusunan basis data dan informasi, data dan informasi spasial, melalui Situs Web on line dan off line mencakup data Kementerian/Lembaga.
4. *Penyusunan dan sosialisasi* indikator sasaran kinerja untuk kegiatan pokok dan sasaran hasil (*outcome*) serta kerangka legal kebijakan, perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi kepada stakeholders terkait.

Selain kegiatan tersebut, kegiatan pendukung pemantauan dan pengendalian lainnya adalah kegiatan pengawasan. Pelaksanaan kegiatan pengawasan tersebut mengacu pada prinsip prinsip sebagaimana disajikan pada Gambar IV.6

Gambar IV.6

Diagram Prinsip Pengawasan Pelaksanaan



Sumber: Buku Utama, Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Gempa Bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah.

Badan Perencanaan di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota harus mendapatkan tembusan laporan kinerja dan pengawasan untuk melakukan evaluasi dan menyampaikan hasil evaluasi kepada Tim Pengarah, Tim Pelaksana, Bupati/Walikota sesuai dengan tingkat kewenangannya.

Pengawasan dapat meliputi cakupan (Bersumber dari Inspektorat LIPI, Selasa, 12 Desember 2006) :

- **Pengawasan Sejak Tahap Perencanaan**

Pengawasan sejak tahap perencanaan bukan dimaksudkan sebagai jenis audit, tetapi istilah ini lebih merupakan “*Sistem Pengendalian Manajemen*” yang diterapkan dalam proses perencanaan pembangunan untuk meyakinkan keberadaan ukuran-ukuran pengendalian secara optimal. Tujuannya untuk meyakinkan bahwa perencanaan pembangunan terdokumentasi, dapat diverifikasi dan dapat dipertanggungjawabkan.

- **Pengawasan Melekat (Waskat)**

Waskat bukanlah sesuatu yang dapat dipisahkan dari organisasi dan manajemen tetapi melekat pada sistem yang dikembangkan.

Waskat adalah bentuk pembinaan oleh atasan langsung kepada bawahan yang dipimpinnya dengan cara memberi penjelasan tentang kebijakan operasional unit kerjanya, menyediakan dan menjelaskan penggunaan prosedur prosedur kerja dan melakukan pembinaan SDM secara terus menerus tentang efektifitas penggunaan pedoman dan prosedur kerja.

- **Pengawasan Fungsional (Wasfung)**

Wasfung adalah pengawasan yang dilakukan oleh pejabat fungsional auditor terhadap kesesuaian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi unit kerja yang diawasinya. Wasfung juga bersifat pembinaan agar auditee tidak melakukan kesalahan kesalahan dalam melaksanakan tugasnya. Wasfung mencakup pemeriksaan administratif, keuangan, teknis, kinerja dan komprehensif. Wasfung dilakukan oleh instansi pemerintah baik eksternal maupun internal. Wasfung internal dilakukan oleh satuan pengawas intern, sedangkan wasfung eksternal dilakukan oleh instansi lain seperti BPK, BPKP.

- **Pengawasan Masyarakat (Wasmas)**

Pengawasan masyarakat adalah usaha pengikutsertaan masyarakat dalam pengawasan agar kebijakan pembangunan berjalan sebagaimana mestinya, dan mengandung maksud mendorong akuntabilitas publik. Dalam wasmas ini masyarakat dapat menyampaikan informasi tentang kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh aparat pemerintah atau pihak lain yang ditunjuk oleh pemerintah, informasi tersebut dapat berupa umpan balik, sasaran dan gagasan, maupun keluhan.

Dewan Pengawas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana, selanjutnya disebut Dewan Pengawas, adalah kelengkapan organisasi fungsional yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi telah berjalan secara efisien dan efektif serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Wilayah Pasca Bencana. Lembaga dewan pengawas, termasuk kategori pengawas internal dilingkungan BRR

Dewan Pengawas sebagaimana tertera dalam peraturan pengganti undang undang (PerPu nomor 2/2005 tentang BRR) mempunyai tugas :

- a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan proses rehabilitasi dan rekonstruksi;
- b. Menerima, menelaah dan menindaklanjuti pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat.

Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Presiden dan dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Pengawas bersifat independen.

Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Pengawas berwenang :

- a. Menunjuk dan menggunakan jasa profesional auditor independen atau tenaga ahli lainnya;
- b. Meminta penjelasan Badan Pelaksana dan pihak lain yang terkait dengan pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi;

Memberikan rekomendasi hasil pengawasan dalam pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi kepada Presiden.

Mekanisme koordinasi pelaksanaan partisipasi swasta dimulai dari inisiatif yang datang dari swasta, kemudian dikoordinasikan dengan Bapel BRR dan Pemda untuk melihat keterkaitan dan kesesuaiannya dengan master plan (rencana induk) dan keinginan masyarakat. Setelah melakukan koordinasi, Bapel BRR melakukan konfirmasi dan menerbitkan persetujuan teknis atas inisiatif tersebut. Mekanisme tersebut dikenal dengan proses "Concept Note". Persetujuan teknis diteruskan untuk dituangkan dalam Nota Kesepakatan yang ditandatangani oleh Swasta dan Bapel BRR. Kesepakatan tersebut dapat dipakai sebagai acuan oleh pihak swasta untuk melakukan kontrak dengan pihak ketiga, dan Bapel BRR dapat melaporkan jumlah dana ke Departemen Keuangan untuk dicatat dalam register. Pada tahap implementasi, Bapel BRR, Pemda dan swasta bersama-sama mempelajari umpan balik yang diterima melalui sistem RAND database. Setelah implementasi selesai, Departemen Keuangan mencatat sebagai penerimaan negara. Untuk monitoring, dilakukan oleh semua pihak yang terkait, termasuk Departemen Keuangan.

IV.9 Strategi Transisi dan Pengalihan Tanggung Jawab Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 30 mengenai Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara, BRR akan mengakhiri masa tugasnya pada April 2009. Jika semua berjalan sesuai rencana, pada saat seluruh kegiatan rekonstruksi selesai, Pemerintah Daerah akan melanjutkan proses tersebut kepada fase pembangunan reguler.

Untuk memastikan bahwa proses peralihan (transisi) dari fase rehabilitasi dan rekonstruksi ke fase pembangunan reguler berjalan lancar, mekanisme peralihan aset (kekayaan) yang telah diinvestasikan dan tanggung jawab pengelolaannya perlu diatur secara baik.

Peralihan (transisi) dan pengalihan tanggung jawab pembangunan pasca rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat NAD dan kepulauan Nias, pada dasarnya harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Strategi pengakhiran masa bakti BRR adalah sebagai berikut:

1. Mempercepat proses membangun sehingga pencapaian sasaran program lebih besar daripada yang tertera pada sasaran baru yang ditetapkan dalam rencana aksi ini.
2. Memanfaatkan seoptimal mungkin dukungan dana yang berasal dari lembaga nasional dan lembaga internasional untuk meningkatkan kapasitas manajemen, operasi, dan pemeliharaannya untuk memastikan keberlanjutan pembangunan.
3. Meningkatkan program perkuatan kapasitas lembaga dan perilaku masyarakat agar lebih siap dalam menghadapi bencana. Untuk itu, dibutuhkan upaya kritis dalam membangun mekanisme yang memandu kelembagaan manajemen resiko bencana ke dalam proses pembangunan dan kebudayaan.

Implementasi untuk setiap kegiatan yang dilakukan sebagai strategi transisi dan pengalihan tanggungjawab rehabilitasi dan rekonstruksi ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel IV.4
Kegiatan Exit Strategy BRR

No	Kegiatan	2006	2007	2008	2009
1.	Pembentukan Regionalisasi dan peningkatan efektivitas Sekretariat Bersama	☑	☑	☑	
2.	Pelatihan dan peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah	☑	☑		
3.	Perencanaan, monitoring, dan evaluasi kegiatan rekonstruksi yang dilakukan antar stakeholder	☑	☑	☑	☑
4.	Pembiayaan gabungan terhadap: ▪ Pemeliharaan dan operasi fasilitas ▪ Pembangunan wilayah			☑	☑
5.	Manajemen dan peralihan aset BRR			☑	☑
6.	Institusionalisasi skema pengurangan resiko bencana			☑	☑

Sumber: Action Plan 2007-2009 BRR Nias dan Hasil Analisis Tim P3B Bappenas, 2007

Tahun 2009 merupakan fase terakhir dari proses rekonstruksi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara. Oleh karenanya, dimulai pada tahun 2008, perlu diperhatikan aspek peralihan yang mendukung proses peralihan program dan kegiatan dari BRR dan *stakeholder* lain kepada Pemerintah Daerah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara.

Beberapa *kriteria untuk exit program* ini yang menjadi Strategi transisi dan pengalihan tanggung jawab rehabilitasi dan rekonstruksi oleh para *stakeholders* yang terlibat dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara pasca masa bakti BRR NAD-Nias, dapat dilaksanakan dengan:

1. Mengakomodasi skema pengurangan resiko bencana dan/atau pengurangan kemiskinan.
2. Mengintegrasikan program-program rehabilitasi dan rekonstruksi dan program reintegrasi Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara ke dalam program pembangunan Pemerintah Daerah.
3. Program lanjutan dari tahun 2008 dan harus selesai di tahun 2009.
4. Memastikan transisi dari fase rekonstruksi menuju fase pembangunan dengan tahapan penilaian, persiapan dan pelaksanaan dengan melibatkan Pemerintah Daerah di dalam perencanaan, evaluasi, dan transfer kegiatan pemulihan.
5. Program yang mendukung pemeliharaan dan operasi dari fasilitas yang dibangun selama masa rekonstruksi.
6. Pemerintah Daerah dan Kementerian/Lembaga, serta instansi terkait lainnya diwajibkan memiliki kapasitas yang cukup untuk menjalankan dan memelihara fasilitas-fasilitas yang telah dibangun selama proses pemulihan.

7. Program yang bertujuan untuk melembagakan mekanisme pengurangan resiko bencana ke dalam kebijakan Pemerintah Daerah.

Kriteria-kriteria kegiatan di atas dilakukan pada jangka waktu hingga 2009 dan pada fase selanjutnya Pemerintah Daerah maupun Kementerian/lembaga terkait akan melanjutkan kegiatan-kegiatan rekonstruksi yang perlu dilanjutkan ke dalam konteks pembangunan daerah, dalam hal ini di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara.



Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias Tahun 2007 – 2009

V.1. Penyesuaian Program 2007

Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Provinsi NAD dan Kepulauan Nias telah berjalan selama 2 (dua) tahun. Sisa paruh waktu kedua yaitu tahun 2007-2009 merupakan kesempatan BRR maupun *stakeholder* lain terkait untuk menyelesaikan program dan kegiatan yang telah menjadi komitmen masing-masing. Evaluasi realisasi program tahun anggaran 2005-2006 menunjukkan perbedaan, penambahan, maupun pengurangan program/kegiatan yang disesuaikan dengan kebutuhan riil di lapangan. Untuk itu perlu penyesuaian/pemantapan program/kegiatan tahun 2007-2009 melalui klasifikasi menurut prioritas kebutuhan. Klasifikasi tersebut digambarkan kuadran penilaian program berikut ini.

Gambar V. 1
Kuadran Penilaian Program Tahun 2007-2009

Yang Diperintahkan (Harus Dikerjakan) I • Pencapaian target program prioritas • Penyempurnaan program sebelumnya • Dampak jangka panjang • Berkelanjutan • Strategis • Daerah bencana atau terkena dampak langsung • Tercantum dalam Rencana Induk dan Renstra • Dapat meningkatkan kinerja BRR	II Baik Untuk Dikerjakan • Dampak jangka panjang • Berkelanjutan • Strategis • Dapat meningkatkan kinerja BRR • Mendukung program yang tercantum dalam Renstra TETAPI : • Bukan pada daerah bencana/tidak terkena dampak langsung • Tidak tercantum dalam Rencana Induk
Justifikasi Kurang Relevan IV • Dampak jangka pendek • Program <i>sporadis</i> (tidak berkelanjutan) • Biaya tinggi • Bukan daerah bencana • Tidak tercantum dalam rencana Induk dan Renstra • Tidak dapat meningkatkan kinerja BRR • <i>Overlapping</i> program	III Tambahan • Bermanfaat namun hanya ber-dampak pada jangka pendek • Program <i>sporadis</i> (tidak berkelanjutan) • Biaya tinggi • Tercantum dalam Renstra • Mungkin tidak dapat meningkatkan kinerja BRR WALAUPUN : • Daerah bencana • Tercantum dalam Rencana Induk

Sumber : Bapel BRR NAD-Nias, 2007

Kebutuhan dana yang diperlukan untuk penyesuaian tahun 2007 adalah 8,2 Triliun berasal dari dana *on budget* (BRR).

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, penyesuaian program dan kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang terdapat dalam DIPA BRR tahun anggaran 2007, Donor/NGO, Kementrian/Lembaga, serta Pemerintah Daerah dianggap perlu untuk disesuaikan dengan kondisi tersebut.

V.1.1. Bidang Pemulihan Perumahan, Permukiman, Tata Ruang, Pertanian, dan Lingkungan Hidup

Dana tahun 2007 yang digunakan untuk bidang pemulihan perumahan, permukiman, tata ruang, pertanian, dan lingkungan hidup sebesar 2,9 triliun.

1. Perumahan & Permukiman

Pada sub bidang pemulihan perumahan dan permukiman, arahan penyesuaian program 2007 sebagai berikut :

- a. Pemantapan sasaran lokasi dari program pembangunan rumah melalui inventarisasi secara lebih rinci hingga ke tingkat desa berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2005-2006. Penyesuaian program lebih berfokus kepada penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi rumah yang masih belum selesai serta rencana kegiatan yang menjadi komitmen antara BRR dan Donor/NGO.
- b. Memantapkan kepastian *beneficiaries* kepada masyarakat yang berhak untuk mendapatkan rumah dengan prasarana dasar permukiman yang memadai, agar rumah yang selesai dibangun dapat segera ditempati.
- c. Percepatan realisasi target fisik dan peningkatan mutu perumahan.

Prioritas kegiatan yang dilakukan BRR adalah :

- a. Rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan. Pembangunan perumahan secara keseluruhan, baik yang ditangani BRR maupun lembaga Donor/NGO, perlu diupayakan secara maksimal agar dapat diselesaikan pada tahun 2007
- b. Pembangunan PSD Lingkungan (air bersih, drainase, jalan lingkungan dan sanitasi) terutama pada rumah rekonstruksi.
- c. Upgrading rumah bantuan terbengkalai yang belum layak huni

Sedangkan kegiatan lain BRR yang mendukung pemerataan bidang perumahan adalah:

- a. Program Pengembangan Kecamatan (KDP)
- b. Penyusunan DED & perencanaan lain untuk dapat dilaksanakan pekerjaan fisiknya pada tahun 2008

Komitmen Donor/NGO terhadap rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan sangat besar. Kegiatan tersebut tetap menjadi prioritas yang akan dilakukan sepanjang tahun 2007.

Pemerintah daerah Provinsi NAD maupun Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara tidak melakukan program kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan dan permukiman. Keterlibatan hanya pada pelaksanaan pengawasan baik secara kualitatif dan maupun kuantitatif melalui dana-dana khusus dari BRR.

2. Tata Ruang

Konsep tata ruang wilayah harus dijadikan acuan utama dalam pelaksanaan rehabilitasi rekonstruksi guna pembangunan yang berkelanjutan. Dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) sangat diperlukan pengaturan tujuan yang jelas dari tata ruang, termasuk di dalamnya **pengurangan resiko bencana**. Harus jelas pula aturan pemakaian ruang kosong agar tidak disalah artikan.

Arahan penyesuaian program tata ruang pada tahun 2007 adalah sebagai berikut :

- a. Penyelesaian penyusunan RTRW yang belum disahkan.
- b. Kegiatan perencanaan yang berbasis *Village Planning* didukung dengan perencanaan yang terintegrasi dan pelaksanaan yang konsisten. Apabila dianggap perlu maka dilakukan “*plan as you proceed*” yang benar-benar implementatif.

Prioritas kegiatan yang harus diselesaikan adalah :

- a. Penyempurnaan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
- b. Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota
- c. Sosialisasi Produk Penataan Ruang untuk mendukung upaya transisi aset

3. Pertanian

Penyesuaian kegiatan pemetaan dan administrasi pertanian diarahkan kepada :

- a. Mengoptimalkan RALAS (*Reconstruction of Aceh Land Administration System Project*) untuk mempercepat penyelesaian administrasi pemilikan hak atas tanah.
- b. Penyediaan lahan yang memenuhi syarat kelayakan untuk *resettlement* (program relokasi) korban tsunami serta kebutuhan rehabilitasi rekonstruksi lainnya.

Prioritas kegiatan yang harus diselesaikan adalah :

- a. Penyelesaian sertifikasi tanah untuk Relokasi/RALAS. Penyelesaian permasalahan sertifikasi dilakukan dengan semua cara pendekatan, baik teknis maupun non teknis, sehingga keseluruhan sertifikasi dapat diselesaikan
- b. Penyelesaian masalah penyediaan tanah pada dasarnya sudah tidak diperlukan lagi, karena tinggal memanfaatkan lahan/tanah yang sudah dikuasai, kecuali untuk hal-hal yang khusus dalam jumlah terbatas.

4. Lingkungan Hidup

Masalah lingkungan perlu diprioritaskan selama proses rekonstruksi yang sedang berlangsung dan harus menjadi perhatian utama dalam rencana kerja para pemangku kepentingan yang terlibat dalam rekonstruksi. Sebelum proses rekonstruksi dilaksanakan perlu dilakukan analisis dan pengkajian dampak lingkungan di semua daerah bencana dan sekitarnya yang berpengaruh.

Masalah lingkungan utama yang perlu menjadi perhatian dan arahan program dalam tahun 2007 antara lain:

- a. Penataan kembali wilayah yang memiliki permukaan tanah lebih rendah dari muka air sungai maupun laut.
- b. Rehabilitasi dan perlindungan terhadap ekosistem daerah pesisir yang telah rusak karena tsunami dan/atau gempa bumi.
- c. Peningkatan kapasitas SDM dalam bidang pengelolaan lingkungan dan pemantauan atas dampak lingkungan.
- d. Penanaman hutan bakau guna mitigasi bencana tsunami.

V.1.2. Bidang Pemulihan Infrastruktur

Bidang pemulihan infrastruktur mencakup : 1) jalan dan transportasi; 2) energi dan telekomunikasi; 3) infrastruktur sumber daya air, 4) air minum dan sanitasi, dan 5) fasilitas dan bangunan publik.

Pada tahun 2007, pemeliharaan infrastruktur merupakan kegiatan penting yang sebaiknya dipersiapkan untuk peralihan aset kepada pemerintah daerah, termasuk

penyediaan semua peralatan yang diperlukan dengan koordinasi penanganan oleh BRR dan Donor/NGO. Ringkasan Program berkelanjutan 2005-2009 untuk 5 sektor Infrastruktur dan jasa konsultansi IREP dapat dilihat pada tabel lampiran rencana rinci.

Pemeliharaan aset bidang infrastruktur merupakan kegiatan yang penting pada tahun 2007, oleh karena itu sebaiknya telah dipersiapkan untuk dialihkan kepada pemerintah daerah, termasuk semua alat berat dan permesinan yang diperlukan dan masih di bawah koordinasi penanganan oleh BRR dan Donor/NGO.

1. *Jalan dan Transportasi*

Penyesuaian program tahun 2007 pada sub bidang jalan dan transportasi, yaitu :

- a. Penyesuaian kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi jalan/jembatan yang telah dikontrak melalui optimalisasi kontrak. Apabila diperlukan dapat mengubah ruas jalan (terutama jalan Kabupaten/Kota) yang langsung mendukung akses menuju perumahan dan permukiman. Upaya ini dapat dilakukan dengan melakukan amandemen kontrak yang sudah dibuat.
- b. Melakukan revisi terhadap kegiatan jalan yang belum dikontrak dengan pengalihan sasaran lokasi/ruas jalan sebagaimana di sebutkan dalam butir (a).
- c. Penyiapan perangkat peralatan maupun sarana-prasarana transportasi yang diperlukan untuk meningkatkan akses ke lokasi sentra produktif dan perumahan.
- d. Penyiapan perangkat kebijakan, standar kelayakan operasional, kelembagaan, SDM dan biaya operasional khusus untuk pengoperasian sarana-prasarana bandara atau pelabuhan laut yang telah selesai dibangun. Upaya ini dilakukan untuk mendukung peralihan aset kepada pemerintah daerah/pusat.

Bila butir (a) dan (b) masih belum mencukupi maka pengalihan dari program infrastruktur yang dinilai kurang prioritas, termasuk kegiatan pada sub bidang infrastruktur lainnya, pada pembangunan jalan/jembatan yang lebih prioritas.

Transportasi Laut dan ASDP

Program pada sub bidang transportasi laut dan ASDP yang sudah dibangun oleh BRR maupun Donor/NGO pada dasarnya sudah cukup. Namun untuk meningkatkan akses dan kelayakan pelabuhan yang tersebar di Provinsi NAD dan Nias, maka pada tahun 2007 BRR akan melaksanakan pembangunan dermaga dan pelabuhan laut serta pengadaan kapal. Donor/NGO terlibat dalam pengadaan kapal ferry dalam sub bidang ini.

Transportasi Udara

Pembangunan bandar udara menjadi prioritas oleh BRR, sedangkan Donor/NGO tidak terlibat dalam pembangunan di sub bidang transportasi udara.

Pemerintah daerah dalam alokasi anggaran APBD telah merencanakan pemulihan pembangunan bandara Bandara Singkil, Bandara SIM, Bandara Alas Leuser, dan Bandara Kuala Batee.

Transportasi Darat, Jalan dan Jembatan

Prioritas kegiatan yang dilakukan BRR adalah

- a. Rehabilitasi dan rekonstruksi jembatan dan jalan, baik berupa jalan nasional (jalan lintas timur, jalan lintas barat, jalan lintas tengah), jalan provinsi, dan jalan kabupaten
- b. Pembangunan terminal, serta pengadaan bus
- c. Pengadaan peralatan SAR dan pengadaan *rescue boat*.

d. Pembuatan sistem aplikasi bencana alam (mitigasi)

Kegiatan Pemerintah daerah pada sub bidang transportasi darat antara lain pembangunan yang berskala kecil seperti pembangunan jalan kecamatan. Donor/NGO juga berperan besar dalam pemulihan di sub bidang transportasi darat seperti rehabilitasi dan pembangunan jalan dan jembatan, dimana lokasi kegiatannya saling melengkapi dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh BRR.

2. *Energi dan Telekomunikasi*

Prioritas penyesuaian program rehabilitasi dan rekonstruksi bidang energi dan telekomunikasi yang dilaksanakan oleh BRR lebih difokuskan pada beberapa hal sebagai berikut.

Energi dan Kelistrikan

Kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2007 yaitu

- a. Pelayanan sambungan rumah untuk rumah-rumah yang baru dibangun.
- b. Pembangunan pembangkit listrik (mikro), antara lain PLTS dan PLTMH.

PT. Pertamina dan PT. PLN sebagai badan usaha milik negara, masing-masing mempunyai kewajiban penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana Bahan Bakar Minyak (BBM) dan tenaga listrik. Selain itu Donor/NGO juga membantu dalam rehabilitasi jaringan distribusi listrik.

Telekomunikasi

Kegiatan prioritas yang dilaksanakan pada tahun 2007 antara lain :

- a. Pada sub bidang telekomunikasi akan dilaksanakan peningkatan pelayanan akses dan distribusi informasi yang berfokus kepada masyarakat dan pemerintahan serta untuk meningkatkan kinerja pemerintahan itu sendiri, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat (target *e-government* dan *e-community*), migrasi ini rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2008.
- b. Penyelesaian bangunan Kantor Pos yang sedang direhabilitasi dan rekonstruksi, serta pengadaan peralatan operasional.

Untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan telekomunikasi masyarakat yang harus segera dipenuhi, sisa prasarana telekomunikasi publik yang belum tertangani BRR akan diselesaikan oleh PT. TELKOM tbk. Donor/NGO berperan dan kegiatan rehabilitasi jaringan distribusi telepon di tahun 2007.

3. *Infrastruktur Sumberdaya Air*

Pada dasarnya pembangunan infrastruktur sumber daya air di Provinsi NAD dengan adanya program tahun 2007 telah melebihi sasaran Rencana Induk. Sedangkan capaian rehabilitasi dan rekonstruksi untuk Kepulauan Nias masih terdapat beberapa fasilitas yang belum terbangun. Untuk meningkatkan capaian target pelaksanaan kegiatan tahun 2007 dalam sub bidang ini, perlu dilakukan penyesuaian dengan upaya pengalihan program irigasi, pengamanan pantai dan pengendalian banjir yang kurang prioritas ke lokasi yang lebih prioritas dan mendesak.

Irigasi

Kegiatan prioritas di tahun 2007 oleh BRR dan Donor/NGO meliputi rehabilitasi daerah irigasi yang rusak akibat bencana.

Sungai dan Pengendalian Banjir

Perkuatan tebing dan normalisasi sungai adalah kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan oleh BRR. Selain itu juga akan dilakukan pengendalian banjir dan pembuatan tanggul untuk mencegah bencana banjir terjadi di Provinsi NAD dan Kepulauan Nias.

Pengamanan Pantai

Pengamanan pantai dan pembuatan tanggul laut pasang surut adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh BRR sedangkan Donor/NGO dan Pemda tidak terlibat dalam pengamanan pantai.

4. Air Minum dan Sanitasi

Air Bersih

Banyak perumahan yang dibangun belum dilengkapi dengan prasarana dasar yang memadai. Suplai air bersih masih menjadi kendala dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi, oleh karena itu pembangunan sarana dan prasarana air bersih berupa pembangunan jaringan air minum dan jaringan pipa air bersih adalah kegiatan prioritas di tahun 2007 oleh BRR dan Donor/NGO.

Persampahan

Pembangunan sistem persampahan serta peningkatan sarana dan prasarana persampahan seperti TPA, pengadaan *amroll* truk, kontainer serta gerobak sampah merupakan kegiatan prioritas yang dilaksanakan oleh BRR.

Sanitasi

BRR dan Donor/NGO melaksanakan kegiatan pembangunan sarana sanitasi berupa MCK. Kegiatan prioritas tahun 2007 oleh BRR di sub bidang air limbah adalah pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).

Drainase

Prasarana drainase yang dibangun dibawah peil banjir atau jalan/salurannya menimbulkan permasalahan pada kawasan permukiman sekitarnya. Oleh karena itu kegiatan tahun 2007 diprioritaskan untuk membangun saluran drainase primer, agar genangan air ketika hujan dapat dihindari.

5. Fasilitas dan Bangunan Publik

Fasilitas dan bangunan publik yang dilaksanakan oleh BRR meliputi pembangunan gedung khusus berupa pembangunan *escape building*, serta gedung laboratorium uji mutu struktur, serta *central and training mitigation of tsunami NAD disaster Area*, dan *center of tsunami museum development*.

V.1.3. Bidang Pemulihan Sosial Kemasyarakatan

1. Pendidikan, Kesehatan dan Pemberdayaan Perempuan

Pendidikan

Dalam penyesuaian program pendidikan, upaya yang perlu dilakukan adalah dengan lebih menekankan pembangunan prasarana dan sarana fisik yang baru kepada kegiatan fisik tahun 2006 yang belum fungsional agar menjadi fungsional, beberapa diantaranya adalah kelengkapan bangunan fisik pendidikan untuk meningkatkan fungsi dan manfaatnya, sekolah kejuruan (vocational schools), Peralatan laboratorium dan komputer, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), beasiswa, dan asrama..

Disamping itu untuk memperkuat proses pengalihan kepada Dinas Terkait nantinya maka kegiatan peningkatan mutu SDM pendidikan dari tingkat dasar, menengah sampai perguruan tinggi akan terus dilanjutkan agar terjadi keseimbangan antara rehabilitasi dan rekonstruksi fisik maupun non fisik di bidang pendidikan sehingga akan dapat memacu percepatan peningkatan kualitas pendidikan secara menyeluruh di NAD dan Nias. Secara umum kerangka program pendidikan 2007, meliputi:

- a. Penyempurnaan dan pelengkapan sarana fisik
- b. PAUD dan sekolah kejuruan
- c. Kapasitas pendidikan dan manajemen sekolah
- d. Perpustakaan dan peralatan laboratorium
- e. SDM pendidikan
- f. Beasiswa
- g. Program penunjang peningkatan mutu pendidikan

Komitmen NGO untuk sektor pendidikan pada tahun 2007 dalam merealisasi program fisik bangunan dan sarana sangat tinggi. Namun untuk program non-fisik masih minim dan bersifat partial sehingga dukungan dari pendanaan on budget masih sangat diperlukan. Sedangkan program pemerintah daerah baik bagi sektor pendidikan selama kurun waktu rehabilitasi dan rekonstruksi sangat terbatas pada program-program strategis.

Kesehatan

Dalam melakukan pemantapan program, yang perlu dilakukan adalah dengan lebih menekankan pada perbaikan manajemen dan peningkatan pelayanan kesehatan.

Prioritas kegiatan yang harus diselesaikan adalah :

- a. Penyediaan peralatan medis guna meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
- b. Pemberian program bantuan beasiswa dan/atau pengadaan tenaga medis dan tenaga spesialis kesehatan, terutama di rumah sakit kabupaten.
- c. Program standarisasi pelayanan kesehatan
- d. Revitalisasi sarana fisik kesehatan

Sedangkan program pemerintah daerah baik bagi sektor kesehatan selama kurun waktu rehabilitasi dan rekonstruksi sangat terbatas pada program-program strategis.

Pemberdayaan Perempuan

Program pemberdayaan perempuan, yang perlu dilakukan adalah dengan lebih menekankan pembangunan prasarana dan sarana fisik yang baru agar menjadi fungsional. Disamping itu program terkait dengan upaya peningkatan peran perempuan dan pemberdayaan perempuan dan anak akan dilanjutkan.

Prioritas kegiatan yang harus diselesaikan adalah :

- e. Perlindungan dan kesejahteraan anak
- f. Workshop dan pelatihan Peningkatan Peran Perempuan
- g. pembangunan gedung pusat pemberdayaan perempuan, khusus untuk Kepulauan Nias

2. Agama, Sosial, Budaya, Pemuda dan Olahraga

Dalam melakukan pemantapan program sub bidang agama, sosial, budaya, serta pemuda dan olahraga, yang perlu dilakukan adalah dengan lebih menekankan pembangunan prasarana dan sarana fisik yang baru, kepada kegiatan fisik tahun 2006 yang belum fungsional agar menjadi fungsional.

Untuk sektor agama, sosial, budaya, pemuda dan olahraga, dukungan program dari donor/NGO sangat kurang dan terbatas sehingga diperlukan dukungan yang besar dari sumber dana on budget. Di sisi lain, program pemerintah daerah baik bagi sektor agama, sosial, budaya, pemuda dan olahraga selama kurun waktu rehabilitasi dan rekonstruksi sangat terbatas pada program-program strategis.

Agama

Arah kebijakan pembangunan sub bidang agama untuk tahun 2007 – 2009 adalah meningkatkan pelayanan keagamaan kepada masyarakat secara optimal melalui penyediaan rumah ibadah, pembangunan gedung pemerintah yang berhubungan dengan pelayanan kehidupan beragama, pengembangan lembaga pendidikan keagamaan serta pengembangan kapasitas aparatur dan petugas agama.

Tradisi dalam pembangunan rumah ibadah di Provinsi NAD melalui swadaya masyarakat di samping subsidi dari Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, pembangunan rumah ibadah dijalankan secara bertahap. Hingga pertengahan tahun 2007 masih terdapat lebih 1.000 unit rumah ibadah yang belum tertangani secara maksimal. Lembaga pendidikan keagamaan juga menjadi fokus dalam kegiatan 2007 di Aceh, beberapa diantaranya adalah dayah/pesantren, TPA, dan asrama.

Mayoritas penduduk Provinsi NAD bergama Islam, maka rumah ibadah yang paling banyak adalah masjid dan meunasah/mushalla. Masjid biasanya terdapat di setiap pemukiman yang membawahi 3 – 5 desa, meunasah atau mushalla terdapat di setiap desa. Demikian juga dengan pembangunan dayah/pesantren yang diprioritaskan untuk beberapa daerah di Provinsi NAD. Sedangkan mayoritas penduduk Kepulauan Nias beragama Kristen dan Katolik sehingga rehabilitasi dan rekonstruksi rumah ibadah paling banyak dibangun di wilayah ini adalah gereja.

Arah kebijakan pembangunan agama tahun 2007 adalah meningkatkan pelayanan keagamaan kepada masyarakat secara optimal melalui penyediaan rumah ibadah, pembangunan gedung pemerintah, pengembangan lembaga pendidikan keagamaan serta pengembangan kapasitas aparatur dan petugas agama. Disamping masih diperlukan

revitalisasi rumah ibadah, gedung kantor, lembaga pendidikan keagamaan, rehabilitasi mental spritual & Pengembangan Kapasitas Aparatur/Masyarakat,

Prioritas kegiatan yang harus diselesaikan adalah :

- a. Bantuan pembangunan rumah ibadah dan dayah
- b. Pembangunan *escape building* di sekitar masjid
- c. Pembangunan gedung/kantor Kantor Urusan Agama (KUA), Kadepag, rumah dinas, Dinas Syariat Islam, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), Baitul Mal, asrama haji, dan gedung observasi hilal
- d. Bantuan pengembangan lembaga pendidikan dan kapasitas aparatur agama

Sosial

Pada sub bidang sosial, arahan program untuk tahun 2007 yaitu meningkatkan pelayanan sosial untuk kelompok rentan dan pengungsi, pemberdayaan masyarakat pedesaan dan pengungsi di pemukiman baru; pembangunan pusat kegiatan sosial masyarakat; serta pembangembangan sistem kesejahteraan sosial.

Upaya penyesuaian program dan kegiatan pada sub bidang kebudayaan adalah :

- a. Pemberian bantuan kebutuhan pokok (beras, lauk pauk dan sandang) untuk pengungsi yang masih tersisa tinggal di barak, sekitar 1.500 pengungsi.
- b. Pemberian bantuan pengembangan usaha produktif desa-desa yang belum mendapatkan bantuan (*filling gap*), yakni sekitar 45 desa.
- c. Penyelesaian rehabilitasi yayasan/panti yang belum diselesaikan pada tahun 2006, sekitar 5 unit di Provinsi NAD.
- d. Revitalisasi kelembagaan dengan berfokus pada pengutamaan gender dan survey *assessment* kebutuhan khusus perempuan.
- e. Program perlengkapan sarana kantor pelayanan Keluarga Berencana (KB) dengan menitikberatkan pada program pendidikan, pelatihan, pelayanan kesehatan gizi serta pengadaan peralatan/perlengkapan operasional.

Prioritas kegiatan yang harus diselesaikan adalah :

- a. Pelayanan Sosial Kelompok Rentan, Pengungsi dan Anak
- b. Pemberdayaan pengungsi di pemukiman baru dan masyarakat pedesaan
- c. pembangunan pusat kegiatan sosial masyarakat
- d. pembangembangan sistem kesejahteraan sosial

Budaya

Upaya rehabilitasi dan rekonstruksi sarana, prasarana, serta situs/ benda cagar budaya, pemetaan potensi budaya dan pengembangan data base, ensiklopedi seni kebudayaan Aceh dan Nias dalam tatanan kebudayaan nasional menjadi penting dan mendesak untuk dilakukan, mengingat khasanah kebudayaan tersebut tidak berdiri sendiri dalam khasanah budaya nasional. Salah satu yang menjadi fokus kegiatan dalam tahun 2007 adalah pembangunan Gedung Galeri Museum yang representatif untuk menyimpan benda-benda kuno.

Adapun titik berat program budaya 2007, antara lain;

- a. Program Strategis Keragaman Budaya
- b. Program Strategis Nilai Budaya
- c. Program Strategis Kekayaan Budaya

Prioritas kegiatan yang harus diselesaikan adalah :

- a. Pembangunan gedung museum adat dan seni budaya di Provinsi NAD
- b. Di Kepulauan Nias, pembangunan gedung nasional Nias, sebagai pusat studi seni, budaya dan bahasa Nias.
- c. Pembangunan gedung budaya Nias (*community centre*) dan pengembangan wisata budaya di Kepulauan Nias.

Pemuda dan Olahraga

Arah kebijakan rehabilitasi dan rekonstruksi bidang pemuda dan olah raga di tahun 2007 untuk Provinsi NAD dan Kepulauan Nias adalah melanjutkan program pemulihan dan peningkatan partisipasi pemuda, program pembinaan dan pemasyarakatan kegiatan olahraga, dan program peningkatan sarana dan prasarana olahraga.

Kerangka program pemuda tahun 2007-2009 meliputi;

- a. Program pemulihan dan peningkatan partisipasi pemuda
- b. Program pembinaan dan pemasyarakatan kegiatan olahraga
- c. Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga
- d. Program fisik

Prioritas kegiatan yang harus diselesaikan adalah :

- a. Di Provinsi NAD, fokus terhadap program non fisik seperti pembinaan, pengadaan peralatan olah raga dan pelatihan-pelatihan untuk peningkatan kapasitas pemuda. Sedangkan kegiatan fisik adalah melanjutkan penyelesaian fasilitas, sarana dan prasarana olah raga.
- b. Untuk Kepulauan Nias, melanjutkan pembangunan stadion serta pengadaan sarana dan prasarana olah raga.

V.1.4. Bidang Pemulihan Perekonomian

Bidang pemulihan perekonomian terdiri dari sub bidang pertanian (tanaman hortikultura, perkebunan, peternakan, dan kehutanan), perikanan, dan pengembangan usaha (industri, perdagangan, tenaga kerja, Koperasi dan UKM, serta pariwisata). Fokus arahan penyesuaian kegiatan tahun 2007 menitikberatkan pada pembangunan kembali perekonomian ekonomi masyarakat terutama pada sentra-sentra produktif yang potensial dan berpengaruh terhadap daerah sekitarnya.

1. Pertanian

Tanaman Pangan dan Hortikultura

Mengingat kegiatan ekonomi telah dilakukan dengan cukup luas, dan output yang dihasilkan belum memberikan gambaran akan manfaat, maka diperlukan studi sebagai penilaian terhadap *outcomes*.

Penyesuaian program dan kegiatan sub bidang pertanian pada tahun 2007 mengarah kepada beberapa hal sebagai berikut :

- a. Program pendukung pengembangan pertanian tanaman pangan dan hortikultura dengan kegiatan seperti pembangunan lining irigasi, pembangunan Balai Benih Utama (BBU) dan Balai Benih Induk (BBI), gudang alsintan, gedung Balai Pertemuan Petani dan penggilingan padi (*Rice Milling Unit*).
- b. Rehabilitasi lahan sawah dan lahan kering (tegalan)
- c. Untuk kegiatan non fisik, berupa pelatihan bagi petani palawija dan hortikultura.

Prioritas kegiatan yang harus diselesaikan terkait dengan tanaman pangan dan hortikultura adalah :

- a. Untuk Provinsi NAD: melanjutkan pembangunan jaringan irigasi tingkat usaha tani dan gedung pendukung program pertanian, rehabilitasi lahan serta pengadaan sarana dan prasarana pendukung bagi para petani.
- b. Sedangkan untuk Kepulauan Nias: program pelatihan dan pendampingan bagi petani serta melanjutkan program pemberian bantuan bibit unggul.

Perkebunan

Perkebunan produktif di Provinsi NAD adalah kelapa sawit, sedangkan di Kepulauan Nias memiliki potensi pada kakao dan karet. Pengembangan produktifitas pertanian akan dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi masing-masing wilayah. Hal ini dianggap penting untuk mendukung kemampuan daerah dalam pengembangan ekonomi pasca rehabilitasi dan rekonstruksi. Oleh karena itu, program dan kegiatan pada tahun 2007 difokuskan kepada :

- a. Penyelesaian penyiapan lahan berupa bantuan intensifikasi dan ekstensifikasi lahan perkebunan komoditi utama masing-masing wilayah.
- b. Penyediaan bibit kelapa sawit, khusus untuk Provinsi NAD.
- c. Dukungan peralatan terhadap kegiatan operasional produksi dan pengolahan hasil perkebunan
- d. Pengadaan pelatihan budidaya dan pendampingan kelompok tani, khusus untuk Kepulauan Nias.

Peternakan

Orientasi peningkatan sub bidang peternakan tahun 2007 untuk Provinsi NAD dan Kepulauan Nias yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat adalah sebagai berikut.

- a. *Restocking* ternak (BSRR, KCL, unggas).
- b. Pengembangan sarana-prasarana peternakan yaitu pembangunan Poskeswan, phewan, rumah potong hewan dan pengembangan Kebun HMT
- c. Penyebaran hewan ternak dan pengembangan kawasan tenak..
- d. Pelatihan SDM untuk meningkatkan kualitas teknik budidaya dan pemberantasan penyakit ternak.
- e. Pengembangan kawasan peternakan dan pusat *breeding* ternak, khusus untuk ternak potong.

Kehutanan

Pada tahun 2007 yang menjadi fokus untuk sub bidang kehutanan untuk wilayah NAD dan Kepulauan Nias meliputi pada:

- a. Rehabilitasi sarana dan prasarana kantor kehutanan, mencakup pada: pengembangan database kehutanan; peningkatan usaha masyarakat di kawasan hutan; restorasi kawasan *bufferzone*, khusus Provinsi NAD
- b. Pengembangan kapasitas kelembagaan; peningkatan dalam penyediaan bibit unggul; serta pengembangan wilayah ekowisata (wilayah wisata), khusus untuk Kepulauan Nias.

2. Perikanan

Perikanan merupakan potensi SDA yang cukup menonjol bagi NAD dan Kepulauan Nias, karena itu perlu ditangani secara komprehensif dan terfokus sehingga memudahkan integrasi kegiatan, mulai dari penangkapan/budidaya, pengolahan hingga pemasaran. Produk yang dihasilkan umumnya masih terbatas pada konsumsi lokal, dan belum

ditingkatkan nilai tambahnya menjadi komoditi ekspor, keluar daerah dan/atau keluar negeri.

Prioritas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2007 adalah :

- a. Pembangunan pabrik es, *cold storage*, dan *hachery*, baiknya langsung dikerjasamakan dengan swasta dan/atau koperasi sehingga dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.
- b. Peningkatan kesiapan manajemen dan dukungan *finansial* koperasi.
- c. Pelatihan dan pembinaan untuk pengolahan pasca produksi yang dapat memberikan nilai tambah. Pengolahan ini terkait dengan kegiatan pemasaran, baik menyangkut kualitas, kuantitas dan kontinuitas .
- d. Pembangunan pelabuhan perikanan PPI Lampulo dan sentra pengolahan ikan.
- e. Peningkatan manajemen dan pengelolaannya untuk Tempat Pendaratan Ikan (TPI) dan Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI), dan dilengkapi dengan pengadaan peralatan tangkap ikan, perahu dan kapal motor.
- f. Pelatihan dan pembinaan untuk memberikan nilai tambah bagi nelayan/petambak, disamping meningkatkan pendapatan asli daerah.
- g. Penyelesaian rehabilitasi tambak.

3. *Pengembangan Usaha*

Industri

Pada sub bidang industri, prioritas untuk tahun 2007 di fokuskan untuk menjadikan salah satu sektor industri sebagai *pilot project*; peningkatan sarana dan prasarana pendukung dalam penguatan perajin sentra dan non sentra industri; dan termasuk pada pengembangan ekonomi produktif.

Perdagangan

Pembangunan pasar telah dilakukan di beberapa lokasi, demikian pula pembinaan keterampilan dan sebagian usaha industri. Namun upaya untuk mengembangkan industri kerajinan rakyat masih dilakukan secara sangat terbatas dan belum konsepsional. Upaya penanganan ini juga dapat dilakukan pada tahun 2007. Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) pedagang pasar (*revolving*), sampai dengan akhir program tahun 2007, juga menjadi target penyelesaian kegiatan di tahun ini. Disamping tetap melanjutkan penyelesaian pembangunan pasar induk/ grosir/ tradisional; pengadaan *cold storage* ; dan pembangunan halte-halte pendukung distribusi.

Tenaga Kerja

Upaya diarahkan bagi pemantapan kegiatan tenaga kerja yang telah dilakukan pada tahun 2005-2006, yang diarahkan pada penduduk korban bencana. Pada aspek tenaga kerja, dapat menjadi tenaga kerja siap pakai dan/atau mampu menciptakan kerja/usaha mandiri. Koperasi yang telah dibina semakin dimantapkan secara selektif, agar mampu menjadi koperasi yang maju. Memantapkan hubungan kerja dengan lembaga keuangan perbankan dan non perbankan dalam memberikan kredit mikro. Pada tahun 2007, prioritas yang akan dilakukan untuk wilayah NAD dan Kep.Nias adalah:

- a. Pelatihan-pelatihan agar dapat menjadi tenaga kerja yang siap pakai melalui balai latihan kerja yang telah dibangun
- b. Pelatihan keterampilan dan penyediaan fasilitas/peralatan penunjang industri (*home industri*)

Koperasi dan UKM

Pemberdayaan Koperasi dan UKM (Usaha Kecil Menengah) merupakan salah satu fokus arahan penyesuaian program dan kegiatan pada tahun 2007. Selain itu, melanjutkan pemberian bantuan modal usaha masyarakat (aset produktif); pelatihan pengelolaan dan pendampingan; bantuan teknis dan manajemen LKM menjadi *stimulan* bagi unit koperasi dan UKM agar dapat lebih berkembang secara mandiri yang diikuti dengan pengembangan pusat distribusi koperasi dan pasar ekspor.

Pariwisata

Penyesuaian untuk pengembangan potensi lokasi pariwisata di tahun 2007 adalah:

- a. Penataan lokasi wisata kota Sabang untuk Provinsi NAD. Termasuk daerah-daerah wisata lainnya dengan memprioritaskan pada: studi pengembangan wisata dan pengembangan usaha ekonomi wisata.
- b. Pemugaran kawasan wisata dan pengembangan sarana/prasarana objek wisata.
- c. Penataan lokasi-lokasi wisata, seperti Muara Indah di Gunungsitoli Utara untuk Kepulauan Nias ditambah dengan pengembangan wisata-wisata budaya dan cagar alam yang ada di Kabupaten Nias dan Nias Selatan.

Pariwisata merupakan sektor yang sangat potensial karena mampu menciptakan kesempatan kerja yang sangat besar karena sektor ini mempunyai keterkaitan yang cukup besar dengan sektor lainnya. Kegiatan pariwisata di Provinsi NAD dan Kepulauan Nias, belum ditangani dengan baik. Untuk itu diperlukan arah penanganan yang jelas dan komprehensif, studi yang sudah dilakukan perlu dikaji ulang, dan upaya ini dapat dilakukan pada tahun anggaran 2007 melalui program revisi.

V.1.5. Bidang Pemulihan Kelembagaan dan Hukum

Bidang pemulihan kelembagaan dan hukum terdiri dari bidang kelembagaan daerah, hukum dan ketertiban, keamanan, dan ketahanan masyarakat. Dalam melakukan pemantapan program, yang perlu dilakukan adalah dengan lebih menekankan pembangunan prasarana dan sarana fisik yang baru terhadap kegiatan fisik tahun 2006 yang belum fungsional agar menjadi fungsional.

1. Kelembagaan

Sasaran pembangunan rehabilitasi dan rekonstruksi hingga akhir 2006 menghasilkan bangunan fisik pemerintah daerah di masing-masing lokasi. Pada tahun 2007 banyak direncanakan kegiatan prioritas sebagai berikut :

- a. Penyelesaian kegiatan fisik 2006 seperti pemulihan sarana dan prasarana pemerintah seperti kantor kepala daerah, Dinas/Badan, Pendopo/Meuligo, Kantor camat, rumah dinas camat, Kantor Kelurahan, meusanah dan/atau Balee. Pembangunan ini ditujukan untuk meningkatkan fungsi pelayanan publik dari pemda terhadap masyarakat.
- b. Peningkatan profesionalisme aparat Pemda, seperti pemberdayaan dan fasilitasi aparat untuk menjalani fungsi pemerintahan, penanganan masalah administrasi kepegawaian dan wilayah pemerintah, peningkatan kapasitas kelembagaan dan keuangan Pemda, peningkatan kerjasama antar daerah, serta kapasitas pemerintah untuk mitigasi bencana
- c. Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial melalui penguatan dan fasilitasi lembaga adat, sosial dan adat pada tingkat kecamatan/mukim/gampong

Donor/NGO membantu pada sub bidang kelembagaan ini dalam hal pembangunan gedung pemerintahan berupa kantor kecamatan, kelurahan dan desa. Selain itu juga dilaksanakan *capacity building* untuk meningkatkan kapasitas Pemda.

2. Hukum

Pemulihan sub bidang hukum perlu lebih dimaksimalkan kembali pada tahun 2007 untuk lebih meningkatkan kualitas kerja dan pelayanan hukum. Sasaran kegiatan penyesuaian yang perlu dilakukan yaitu :

- a. Pembangunan beberapa gedung fasilitas perkantoran yang belum dilaksanakan seperti
 - Kejaksaan Agung (Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri)
 - Dirjen Pemasyarakatan (Lapas/Rutan)
 - Mahkamah Agung (Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri, Mahkamah Syariah)
- b. Pemberdayaan dan pengembangan institusi hukum antara lain penelitian dan pengembangan hukum, pengembangan hukum adat, pengembangan pusat studi hukum, dan pendidikan dan pelatihan teknis hukum dan HAM.
- c. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM sebagai aparat penegak hukum

Kegiatan tahun 2007 yang menjadi prioritas Donor/NGO di sub bidang hukum adalah pelatihan (*workshop*) terhadap aparat hukum.

3. Ketertiban, Keamanan, dan Ketahanan Masyarakat (K3M)

Ketertiban, Keamanan dan Ketahanan Masyarakat (K3M) harus diupayakan secara penuh untuk menjaga stabilitas keamanan, khususnya di Provinsi NAD. Penyesuaian program dan kegiatan prioritas tahun 2007 yang perlu dilakukan sebagai berikut :

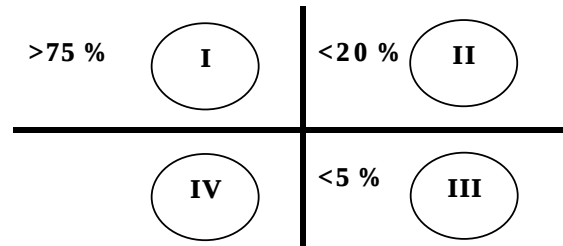
- a. Refungsionalisasi kelembagaan serta prasarana pendukungnya, antara lain
 - Kominfo (Gedung kantor Dinas Kominfo, Stasiun RRI, Stasiun Transmisi TVRI, dan Gedung PWI)
 - Polri (Mapolda, Brimobda, Dit. Polair, Polsek)
 - TNI AD (Korem/Kodim, Kompi)
 - TNI AL (RS Sabang)
 - TNI AU (Bidang Faskon, Lanud, Paskhas AU dan Satrad)
- b. Pemeliharaan keamanan dan ketertiban daerah terutama pada mobilisasi pasukan Polri
- c. Perencanaan dan sosialisasi kegiatan ketertiban, keamanan dan ketahanan masyarakat untuk masyarakat di Provinsi NAD dan Kepulauan Nias. Selain itu juga dilaksanakan dialog antar komponen masyarakat.

V.2. Pemantapan Rencana Program Tahun 2008

Prioritas kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di tahun 2008 adalah

1. *Rounding up* dengan upaya tindak lanjut penyelesaian kegiatan fisik tahun 2007 yang belum tuntas
2. Kegiatan yang berbasis Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) dengan fokus utama adalah memaksimalkan pengalokasian ADB-ETESP karena batas akhirnya pada tahun 2008
3. Kegiatan yang terkait dengan pengakhiran masa tugas dan *capacity building* dan pada tahun 2008 ini akan diterapkan pola dekonsentrasi.

Bagan V. 2
Distribusi Alokasi Indikatif Tahun 2008 Menurut Kuadran



Sumber : Bapel BRR NAD-Nias, 2007

Kebutuhan dana yang diperlukan untuk penyesuaian tahun 2008-2009 adalah 13,9 Triliun berasal dari dana *on budget* (BRR).

V.2.1. Bidang Pemulihan Perumahan, Permukiman, Tata Ruang, Pertanian, dan Lingkungan Hidup

1. Perumahan dan Permukiman

Apabila program dan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sub bidang perumahan dan permukiman tahun anggaran 2007 tidak dapat dilaksanakan, maka program dan kegiatan tersebut akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2008, namun khusus untuk rehabilitasi rumah tidak akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2008-2009, khusus NAD, melainkan akan diselesaikan pada tahun 2007.

Prioritas kegiatan yang dilakukan BRR pada tahun 2008-2009 sebagian besar merupakan lanjutan kegiatan tahun 2007, yaitu :

- Rekonstruksi rumah,
- Upgrading* rumah bantuan terbengkalai
- Penertiban dan penghunian rumah bantuan
- Penyiapan/pematangan/pembersihan lahan
- Penyusunan DED dan perencanaan lainnya serta program pengembangan kecamatan.

Kegiatan Donor/NGO tahun 2008-2009 terhadap rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan serta penyediaan bahan bangunan (kayu) terus berlangsung di Kepulauan Nias. Namun mengingat pada tahun 2008 kegiatan lembaga Donor/NGO tidak lagi mengalokasikan anggarannya di Provinsi NAD, maka BRR menyelesaikan sisa tugas, baik dalam menyelesaikan rumah dan PSD (pada tahun 2009 sudah tidak ada lagi kegiatan perumahan dan permukiman).

2. Tata Ruang

Permasalahan tata ruang semula mempunyai peran yang strategis, oleh karena itu arahan untuk program dan kegiatan tahun 2008-2009 oleh BRR adalah penyelesaian penyusunan RDTR Kabupaten/Kota, penyusunan RDTR/RTBL Kawasan Khusus, serta penguatan kelembagaan penataan ruang. Kegiatan-kegiatan ini diharapkan dapat memberikan dasar dan arahan pembangunan di Provinsi NAD dan Kepulauan Nias.

3. *Pertanahan*

Program tahun 2008-2009 di sub bidang pertanahan yang dilaksanakan oleh BRR merupakan lanjutan kegiatan tahun 2007 yaitu penyelesaian sertifikasi untuk relokasi tanah (RALAS) dan penyediaan cadangan pengadaan tanah untuk hal-hal khusus dalam jumlah terbatas.

4. *Lingkungan Hidup*

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh tahun 2008-2009 di sub bidang lingkungan hidup yaitu penyelesaian dokumen pengelolaan lingkungan kawasan permukiman dan penyediaan kawasan percontohan untuk ruang terbuka hijau di Provinsi NAD dan Kepulauan Nias.

V.2.2. *Bidang Pemulihan Infrastruktur*

Sasaran bidang pemulihan infrastruktur tahun anggaran 2008 sampai dengan 2009 perlu didasarkan pada alternatif dan asumsi sebagai berikut :

1. Dengan adanya perubahan volume sasaran dalam program dan kegiatan tahun anggaran 2007, maka untuk program dan kegiatan tahun anggaran 2008 -2009 perlu disesuaikan
2. Bila tidak ada perubahan volume sasaran pada program tahun 2007, maka program tahun 2008 - 2009 dilaksanakan untuk mengisi selisih sasaran penajaman yang telah ditetapkan setelah dikurangi realisasi program tahun 2005-2006 dan program 2007, dengan asumsi seluruh program tahun 2007 dapat terlaksana.

Tahun 2008-2009 untuk pemulihan infrastruktur merupakan kegiatan yang sangat penting terutama dalam pemeliharannya untuk tahun yang akan datang.

1. *Jalan dan transportasi*

Transportasi Laut dan ASDP

Program tahun 2008-2009 untuk transportasi laut adalah lanjutan pembangunan pelabuhan laut dan dermaga agar dapat segera berfungsi secara optimal.

Transportasi Udara

Pelabuhan udara di tahun 2008-2009 lebih terfokus pada lanjutan pembangunan bandar udara serta penyediaan sarana dan prasarana pendukung seperti peralatan, gedung operasi, bengkel, dan lain-lain.

Transportasi Darat, Jalan dan Jembatan

Program tahun 2008-2009 di sub bidang transportasi darat adalah lanjutan pembangunan di tahun sebelumnya. Kegiatan tersebut adalah :

- a. Rehabilitasi dan rekonstruksi jembatan dan jalan,
- b. Pembangunan terminal, serta pengadaan bus
- c. Pengadaan peralatan SAR dan pengadaan *rescue boat*.
- d. Pembuatan sistem aplikasi bencana alam

Dengan adanya pelaksanaan kegiatan diatas dapat memperlancar arus lalu lintas antar kota antar provinsi di Provinsi NAD dan Kepulauan Nias.

2. Energi dan telekomunikasi

Energi dan Kelistrikan

Program dan kegiatan pada sub bidang energi dan kelistrikan dilakukan melalui kerjasama dengan PLN dan Kementerian/Lembaga ESDM, sedangkan BRR lebih menekankan pada sambungan listrik Rumah Tangga korban bencana, dan memberikan percontohan dam penyediaan listrik alternatif (tenaga surya) bersama dengan lembaga Donor/NGO. Salah satu program 2008-2009 adalah pembangunan gardu induk.

Telekomunikasi

Untuk sub bidang telekomunikasi lebih banyak dilakukan oleh pihak swasta, misalnya oleh Telkom. Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di tahun 2008-2009 lebih banyak dilakukan untuk mengisi kekurangannya, misalnya lanjutan pembangunan kantor pos, serta peralatan dan perlengkapan untuk gedung kantor BMG dari kegiatan tahun 2007.

3. Infrastruktur sumberdaya air

Salah satu cara untuk mengatasi permasalahan banjir dan pengamanan pantai di Provinsi NAD dan Kepulauan Nias masih terus berlangsung yaitu melalui kerjasama dengan Departemen PU dan Pemda. Tahun 2008-2009 perlu ditetapkan prioritas kegiatan penanganan untuk sub bidang infrastruktur sumberdaya air. Mayoritas program yang akan dilaksanakan adalah lanjutan program dan kegiatan tahun 2007

Irigasi

Kegiatan prioritas di tahun 2009 oleh BRR dan Donor/NGO meliputi lanjutan kegiatan rehabilitasi daerah irigasi yang rusak akibat bencana.

Sungai dan Pengendalian Banjir

Perkuatan tebing dan normalisasi sungai adalah kegiatan prioritas lanjutan tahun 2005-2007 yang akan dilaksanakan oleh BRR. Selain itu juga akan dilakukan pengendalian banjir dan pembuatan tanggul untuk mencegah bencana banjir terjadi di Provinsi NAD dan Kepulauan Nias.

Pengamanan Pantai

Pengamanan pantai dan pembuatan tanggul laut pasang surut adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh BRR sedangkan Donor/NGO dan Pemda secara fisik tidak terlibat dalam pengamanan pantai.

5. Air Minum dan Sanitasi

Air Bersih

Program sub bidang air minum di tahun 2008-2009 adalah pembangunan sistem air bersih dan jaringan air minum baik di Provinsi NAD maupun di Kepulauan Nias. Program sub bidang air bersih ini sangat perlu untuk dikerjasamakan dengan PDAM

Persampahan

Program pada sub bidang persampahan adalah pengadaan peralatan kebersihan berupa dump truk, amroll, container dan landasan. Program ini merupakan lanjutan dari pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di tahun 2007.

Sanitasi

Di tahun 2008-2009, program pada sub bidang sanitasi yaitu supervisi pelaksanaan kegiatan sektor air bersih dan air limbah di Provinsi NAD dan *water supply and environmental sanitation modul development and training*. Selain itu pembangunan sarana sanitasi berupa MCK tetap dilaksanakan.

Pengolahan air limbah untuk tahun 2008-2009 yaitu pada program pembangunan sarana dan prasarana air limbah serta pengadaan truk tinja.

Drainase

Prioritas kegiatan tahun 2008-2009 pada sub bidang drainase juga merupakan program lanjutan dari tahun 2007, yaitu pembangunan sistem drainase. Kegiatan ini diharapkan dapat dikerjasamakan dengan Pemerintah Daerah.

6. Fasilitas dan Bangunan Publik

Untuk fasilitas dan bangunan publik di tahun 2008-2009 merupakan lanjutan dari kegiatan pada tahun 2007, antara lain *central and training mitigation of tsunami NAD disaster Area, escape building, center of tsunami museum development*, serta koordinasi dan konsultasi rencana kerja

V.2.3. Bidang Pemulihan Sosial Masyarakat

Bidang sosial masyarakat terdiri dari 2 (dua) sub bidang besar yaitu : 1) pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat, dan 2) agama, sosial, budaya, pemuda dan olahraga.

1. Pendidikan, Kesehatan dan Pemberdayaan Perempuan

Pendidikan

Disamping itu untuk memperkuat proses pengalihan kepada Dinas Terkait nantinya maka kegiatan peningkatan mutu SDM pendidikan dari tingkat dasar, menengah sampai perguruan tinggi akan terus dilanjutkan agar terjadi keseimbangan antara rehabilitasi dan rekonstruksi fisik maupun non fisik di bidang pendidikan sehingga akan dapat memacu percepatan peningkatan kualitas pendidikan secara menyeluruh di NAD dan Nias. Secara umum kerangka program pendidikan 2007-2009, meliputi:

- a. Penyempurnaan dan pelengkapan sarana fisik
- b. PAUD dan sekolah kejuruan
- c. Kapasitas pendidikan dan manajemen sekolah
- d. Perpustakaan dan peralatan laboratorium
- e. SDM pendidikan
- f. Beasiswa
- g. Program penunjang peningkatan mutu pendidikan

Prioritas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2008-2009 adalah :

- a. Operasionalisasi dan lanjutan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan yang telah dibangun, antara lain SD, SMP, SMU, laboratorium, buku-buku dan perpustakaan, serta universitas.
- b. Pelatihan tenaga guru dan dosen perguruan tinggi,
- c. Upaya pemenuhan wajib belajar 9 tahun,
- d. Mengembangkan pendidikan yang bersifat khusus bagi anak-anak jenius/berkemampuan lebih perlu dikembangkan,
- e. Pemberian beasiswa dan bimbingan karir bagi pelajar dan mahasiswa.

Komitmen NGO untuk sektor pendidikan pada tahun 2008-2009 dalam merealisasi program fisik bangunan dan sarana sangat tinggi. Namun untuk program non-fisik masih minim dan bersifat partial sehingga dukungan dari pendanaan on budget masih sangat diperlukan. Sedangkan program pemerintah daerah baik bagi sektor pendidikan selama kurun waktu rehabilitasi dan rekonstruksi sangat terbatas pada program-program strategis.

Adapun kebijakan pembangunan pendidikan menurut Pola Dasar Pembangunan Nanggroe Aceh Darussalam tahun 2007 - 2012 adalah:

- a. Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang tinggi serta peningkatan anggaran pendidikan.
- b. Meningkatkan kemampuan akademik dan profesional kepada tenaga kependidikan serta kesejahteraannya;
- c. Meningkatkan kelangsungan proses belajar mengajar pada seluruh jenjang pendidikan melalui penyediaan bantuan biaya pendidikan bagi yang berprestasi dan mengalami hambatan pendanaan;
- d. Peningkatan operasional pendidikan pencegahan anak putus sekolah, mendukung upaya pendidikan luar sekolah, penyiapan tenaga terampil pendidikan serta kegiatan bidang kecakapan hidup dan ketrampilan lainnya.

Secara garis besar, pemantapan program dan kegiatan yang dilakukan dalam rehabilitasi dan rekonstruksi ini sejalan dan selaras dengan kebijakan pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah setempat.

Kesehatan

Pelayanan kesehatan pada tahun 2008-2009 dilakukan melalui lanjutan pembangunan sarana kesehatan berupa puskesmas rawat inap, puskesmas pembantu, sekolah perawat, rumah dinas dokter dan paramedis serta penyediaan peralatan medis dengan tujuan agar pelayanan kesehatan yang ada di Provinsi NAD dan Kepulauan Nias dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Untuk kegiatan non fisik di tahun 2008-2009 akan dilaksanakan peningkatan profesionalisme tenaga kesehatan, misalnya melalui pemberian beasiswa bagi dokter. Hal penting yang harus dilaksanakan pada tahun 2008-2009 khususnya dalam rangka menekan tingkat kematian ibu dan anak yaitu peningkatan gizi masyarakat dan pencegahan terjadinya wabah penyakit.

Pemberdayaan Perempuan

Arahan program sub bidang peran perempuan di tahun 2008-2009 adalah peningkatan peran perempuan dalam segala bidang kehidupan melalui pelatihan-pelatihan dan workshop yang terkait dengan pengembangan peran perempuan dengan memperhatikan adat istiadat dan tata nilai lokal yang ada yang terus digali.

2. Agama, Sosial, Budaya, Pemuda dan Olahraga

Agama

Program sub bidang agama di Provinsi NAD tidak lagi diarahkan pada upaya pembangunan fisik, sedangkan di Kepulauan Nias program 2008-2009 masih banyak diperlukan pembangunan lanjutan sarana peribadatan di beberapa lokasi. Sarana pendidikan keagamaan berupa dayah/pesantren, TPA, asrama, juga dibangun pada tahun 2008-2009 yang diikuti dengan penambahan fasilitas-fasilitas pendukung dalam sosialisasi program-program keagamaan. Selain itu juga diarahkan dalam pembinaan keimanan dan ketaqwaan umat beragama, sehingga masyarakat dapat menjalankan perilaku dan akhlak, hidup damai dan saling menghormati di antara para pemeluk agama.

Sosial

Program sub bidang sosial difokuskan pada meningkatkan pelayanan sosial bagi anak cacat, yatim-piatu dan orang jompo, dengan mendayagunakan prasarana dan sarana yang telah di rehabilitasi dan di rekonstruksi melalui peningkatan mutu pelayanan yang terkait dengan pembinaan dan pelatihan para pendidik/pemberi pelayanan sosial.

Upaya untuk mengatasi kelompok masyarakat yang hidupnya terasing dan terpencil juga perlu dilakukan dengan memberikan bimbingan ekonomi dan sosial. Pembangunan *trauma center* dan pembangunan/rehabilitasi taman makan pahlawan juga dibangun pada tahun 2008-2009.

Budaya

Program tahun 2008-2009 pada pengelolaan keragaman budaya yaitu perlunya pemantapan situs dan cagar budaya. Selain itu pengembangan tata nilai dan tradisi serta adat istiadat Aceh dan Nias juga perlu ditingkatkan.

Untuk mengembangkan kekayaan budaya yang ada di Provinsi NAD dan Kepulauan Nias di tahun 2008-2009 salah satunya adalah menyelenggarakan festival dan pameran seni budaya secara rutin. Selain itu perlunya pemberdayaan pengrajin tradisional agar kebudayaan di NAD dan Nias tetap terpelihara.

Pemuda dan olahraga

Arahan program sub bidang pemuda dan olahraga di Kepulauan Nias yaitu pembangunan stadion olahraga dan prasarana pendukung lainnya. Selain kegiatan fisik, juga dilaksanakan kegiatan non fisik berupa peningkatan prestasi dan peran serta pemuda dalam kegiatan olah raga maupun kegiatan lain yang sehat dan bermartabat.

V.2.4. Bidang Pemulihan Perekonomian

1. Pertanian

Tanaman Pangan dan Hortikultura

Pada sub bidang pertanian, upaya yang perlu diarahkan untuk tahun 2008-2009 yaitu :

- a. Pembangunan/Rehabilitasi Balai Benih Utama (BBU), Balai Benih Induk (BBI) dan BPP Plus
- b. Penyediaan alsintan (alat mesin pertanian).

- c. Peningkatan kapasitas SDM di bidang pertanian melalui pembinaan usaha tani, pemberian dana bergulir dan pembinaan pasca panen/agro industri dan pemasaran.
- d. Pengembangan terminal agribisnis untuk menunjang pemasaran dan peningkatan kualitas produk
- e. Pengembangan kawasan tanaman pangan dan hortikultura

Perkebunan

Program tahun 2008-2009 untuk sub bidang perkebunan antara lain :

- a. Rehabilitasi lahan perkebunan
- b. Peremajaan tanaman perkebunan serta terbangunnya sentra produksi hasil perkebunan.
- c. Pelatihan budidaya dan teknologi tanaman perkebunan.
- d. Penyelesaian kegiatan pemeliharaan tanaman perkebunan 2007.

Peternakan

Program sub bidang peternakan untuk tahun 2008-2009 adalah :

- a. Penyediaan alsinak (alat mesin peternakan)
- b. Lanjutan pengembangan kawasan produksi peternakan

Kehutanan

Mengingat masalah kehutanan di Aceh cukup kritis dan banyak wilayah yang merupakan hutan lindung dan suaka (Gunung Leuser), maka pengelolaan hutan perlu ditingkatkan melalui hutan kemasyarakatan, sehingga penduduk dapat mengelola hutan secara lestari, termasuk memanfaatkan hasil hutan dengan tepat sehingga tidak mengganggu ekosistem.

2. Perikanan

Arahan untuk sub bidang perikanan di tahun 2008-2009 yaitu

- a. Lanjutan pembangunan pelabuhan perikanan Lampulo dan sentra pengolahan ikan.
- b. pengadaan peralatan tangkap ikan, pembangunan pabrik es pada setiap tempat pendaratan ikan, tempat pengolahan ikan serta lanjutan penyelesaian pembangunan dermaga PPI.

3. Pengembangan Usaha

Industri

Kegiatan di sub bidang industri tahun 2008-2009 yaitu pengembangan sarana pengolahan komoditi.

Perdagangan

Arahan program tahun 2008-2009 yaitu perlunya peningkatan pembinaan UKM melalui berbagai upaya, salah satunya yaitu pemberian kredit mikro. Selain itu untuk industri kerajinan rakyat dari berbagai jenis komoditi harus dilakukan secara terstruktur dan terpadu

Tenaga Kerja

Program tahun 2008-2009 untuk sub bidang ketenagakerjaan adalah bantuan modal

kerja, pengembangan pusat pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja, BLM industri rumah tangga. Selain itu perlunya peningkatan kualitas tenaga kerja baik melalui BLK maupun kerjasama dengan swasta. Tujuan program ini yaitu meningkatkan lapangan kerja mandiri atau tenaga kerja siap pakai.

Koperasi dan usaha

Pembinaan koperasi dan UKM pada tahun 2008-2009 harus dilakukan secara terintegrasi sehingga memungkinkan kemampuan bersaing dengan perusahaan menengah dan besar sejenis. Koperasi harus ditumbuh-kembangkan dari bawah, baik melalui usaha hilir terus ke hulu, dan akan lebih baik bila melalui usaha hulu baru ke hilir dalam bentuk Usaha Bersama (UB) baru secara bertahap dijadikan koperasi yang telah lebih mapan. Selain itu juga dilaksanakan lanjutan pembangunan pasar atau Waserda; penguatan IOO (*Investor Outreach Office*); dan penguatan lembaga *micro finance* dan perwakilannya.

Pariwisata

Pariwisata adalah salah satu aset daerah yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah, oleh karena itu di tahun 2008 dan seterusnya sangat diperlukan kegiatan penataan lokasi pariwisata dengan tujuan meningkatkan wisatawan, baik domestik maupun mancanegara agar mengunjungi kawasan wisata di Provinsi NAD dan Kepulauan Nias.

V.2.5. Bidang Pemulihan Kelembagaan dan Hukum

Secara umum, bidang pemulihan kelembagaan dan hukum untuk tahun 2008-2009 menitikberatkan pada pengembangan kapasitas kelembagaan, aparatur dan pelayanan hukum terhadap masyarakat guna mengembangkan dan mengelola secara optimal sumberdaya pelaksana dan pengawasan secara berkelanjutan terkait dengan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Alokasi anggaran yang diperlukan untuk pemantapan program dan kegiatan bidang pemulihan kelembagaan dan hukum pada tahun 2008/2009 adalah sebagai berikut.

1. Kelembagaan

Fokus program bidang pemulihan kelembagaan tahun 2008-2009 adalah

- a. Lanjutan pembangunan kantor berskala besar seperti kantor Bupati, DPRD dan kantor Dinas, dan lain sebagainya. Pembangunan gedung kantor dengan skala kecil seperti kantor desa, dan kecamatan akan dimaksimalkan pembangunannya di tahun 2007.
- b. Upaya peningkatan kapasitas Pemda akan terus ditingkatkan untuk mengantisipasi kegiatan peralihan/fungsionalisasi aset kepada Pemerintah Daerah

Donor/NGO membantu pada sub bidang kelembagaan ini dalam hal pembangunan gedung pemerintahan berupa kantor kecamatan, kelurahan dan desa. Selain itu juga dilaksanakan *capacity building* untuk meningkatkan kapasitas Pemda.

2. Hukum

Kegiatan prioritas di sub bidang hukum untuk tahun 2008-2009 adalah

- a. Fungsionalisasi aset-aset bidang hukum
- b. Peningkatan kapasitas aparatur hukum dan sosialisasi hukum kepada masyarakat

- c. Kegiatan lanjutan tahun 2007 yaitu pengembangan hukum adat dan pengembangan pusat studi hukum

3. Ketertiban, Keamanan, dan Ketahanan Masyarakat (K3M)

Kegiatan prioritas di sub bidang ketertiban, keamanan, dan ketahanan masyarakat untuk tahun 2008-2009 adalah :

- c. Refungsionalisasi sarana dan prasarana kelembagaan yang berfokus pada rehabilitasi dan rekonstruksi bangunan kantor dan asrama
- d. Mobilisasi pasukan POLRI untuk mendukung pemeliharaan keamanan dan ketertiban daerah
- e. Upaya peningkatan kualitas pelayanan informasi publik

V.3 Tahapan Transisi Pasca 2009 dan Persiapan Exit Strategy

Tahun 2009 merupakan fase terakhir dari proses rekonstruksi di Kepulauan Nias. Oleh karenanya, dimulai pada tahun 2008, perlu diperhatikan aspek peralihan yang mendukung proses peralihan program dan kegiatan dari BRR dan *stakeholder* lain kepada Pemerintah Daerah di Kepulauan Nias. Beberapa kriteria untuk *exit program* ini adalah:

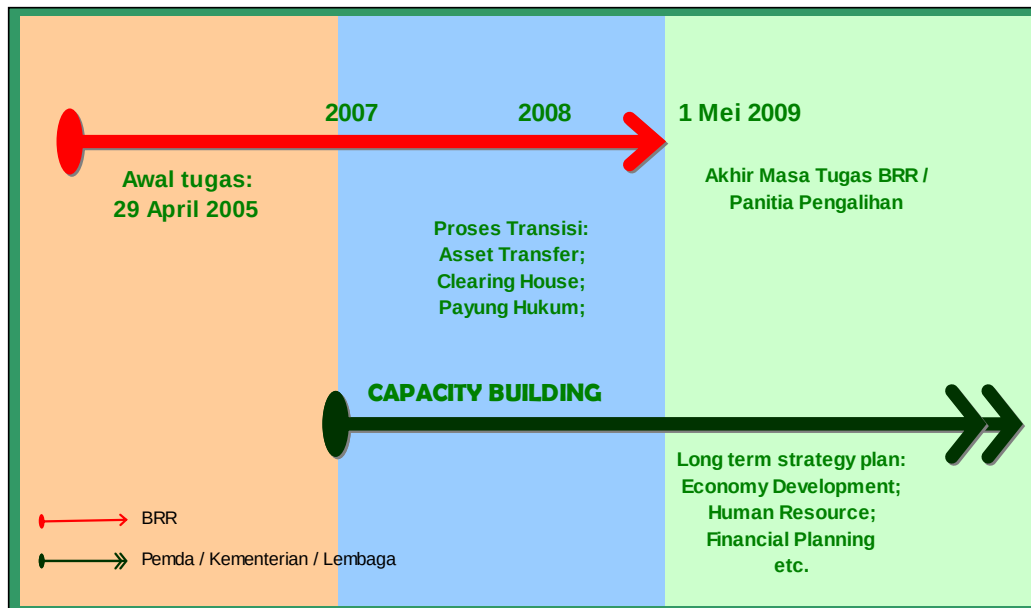
1. Mengakomodasi skema pengurangan resiko bencana dan/atau pengurangan kemiskinan
2. Program dengan pembiayaan gabungan oleh BRR dan Pemerintah Daerah
3. Program lanjutan dari tahun 2008 dan harus selesai di tahun 2009
4. Program yang mendukung pemeliharaan dan operasi dari fasilitas yang dibangun selama masa rekonstruksi
5. Program yang bertujuan untuk melembagakan mekanisme pengurangan resiko bencana ke dalam kebijakan Pemerintah Daerah

V.3.1 Persiapan Peralihan

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 30 mengenai Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara, BRR akan mengakhiri masa tugasnya pada April 2009. Jika semua berjalan sesuai rencana, pada saat seluruh kegiatan rekonstruksi selesai, Pemerintah Daerah akan melanjutkan proses tersebut kepada fase pembangunan reguler. Oleh karenanya, diperlukan upaya-upaya persiapan yang optimal dalam rangka *exit strategy* BRR.

Pengakhiran masa tugas BRR NAD-Nias dalam rangka melanjutkan proses pembangunan dapat terlihat pada bagan di bawah ini yang menjadi strategi masa tugas BRR dalam rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap Provinsi NAD dan Nias.

Bagan V. 3
Strategi Pengakhiran Masa Tugas BRR



Sumber: Bapel BRR NAD- Nias, 2007

Untuk penguatan kelembagaan dalam rangka pengakhiran masa tugas BRR, tahapan proses yang akan dilalui adalah:

Pertama, proses membangun untuk menjadi lebih baik membutuhkan lebih banyak upaya dari apa yang tercantum di rencana induk yang telah ada, karena membangun NAD-Nias tidak hanya sampai pada tingkat kerusakan dan kerugian tanpa menyelesaikan permasalahan keterbelakangan pembangunan di Nias.

Kedua, selama 4 (empat) tahun masa rehabilitasi dan rekonstruksi, lembaga nasional dan internasional telah menginvestasikan proyek-proyek dalam jumlah besar, lebih besar dari kemampuan Pemerintah Daerah dalam hal kapasitas manajemen, operasi, dan pemeliharannya. Dalam ketiadaan dukungan dari donor, pertanyaan kritis yang dihadapi adalah, tanggung jawab apa yang perlu diemban lembaga yang memfasilitasi dan mendukung Pemerintah Daerah dalam masa pasca rekonstruksi.

Ketiga, perubahan lembaga dan perilaku masyarakat agar lebih siap apabila bencana melanda di masa mendatang dan tidak dapat dilakukan dalam satu generasi.

Dengan demikian, para *stakeholders* yang terlibat dalam proses rekonstruksi memiliki beberapa tugas untuk menyongsong pencapaian *exit strategy* BRR NAD-Nias, yaitu :

1. Memastikan transisi dari fase rekonstruksi menuju fase pembangunan sedini mungkin dengan melibatkan Pemerintah Daerah di dalam perencanaan, evaluasi, dan transfer kegiatan pemulihan.
2. Memastikan Pemerintah Daerah dan mitra-mitra yang terkait memiliki kapasitas yang cukup untuk menjalankan dan memelihara fasilitas-fasilitas yang telah dibangun selama proses pemulihan.
3. Menyiapkan mekanisme manajemen resiko bencana ke dalam kerangka pembangunan Pemerintah Daerah

Jenis- Jenis pengalihan asset

Berdasarkan undang-undang Nomor 1 Tahun 2004, yang dimaksud dengan asset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan / atau dimiliki sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan diharapkan dapat diperoleh manfaat ekonomi dan / atau sosial di masa depan. Sedangkan Barang Milik Negara (BMN) adalah kekayaan negara, dapat dinilai/dihitung/diukur/ ditimbang dengan satuan tertentu. Sehingga sesuai dengan undang-undang tersebut bahwa semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Dengan demikian dapat diklasifikasikan jenis-jenis aset yang dimaksudkan disini adalah:

1. Aset Lancar dan Aset Tetap
2. Barang Bergerak dan Barang Tidak Bergerak
3. Beban APBN Belanja Barang (MAK 52) atau Belanja Modal (MAK 53) atau Belanja Bantuan Sosial (MAK 57)
4. Perolehan lain yang sah merupakan hibah dari NGO atau Negara Donor

V.3.1.1 Pemantapan Sekretariat Bersama

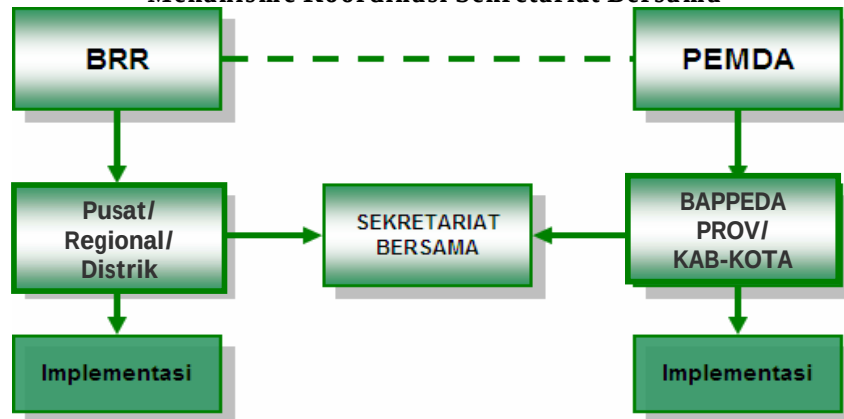
Salah satu langkah penting untuk memastikan transisi yang lancar dari fase rekonstruksi adalah dari sedini mungkin melibatkan Pemerintah Daerah. Hal ini akan memperkuat dan membangun keterlibatan Pemda dalam kegiatan rekonstruksi dan mendukung koordinasi antara pihak-pihak yang terlibat. Sejak Mei 2006, BRR Nias telah meningkatkan kerjasama dan koordinasi antara Pemerintah Daerah dan BRR melalui pendirian Sekretariat Bersama (Sekber). Adapun Sekber ini mengemban fungsi-fungsi sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi satu atap dalam perencanaan, pemrograman, dan evaluasi terhadap kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Sekretariat Bersama akan mendukung perencanaan satu atap antara Pemda Kabupaten Nias dan BRR. Tugas-tugas khusus termasuk:

- Melakukan perencanaan berdasarkan kebutuhan (*needs-based*), dengan memperhitungkan kapasitas setiap lembaga secara terukur.
- Melakukan langkah-langkah khusus termasuk penetapan kriteria, evaluasi rencana program, pemrioritasan, penentuan program tahunan dan tahun jamak dan pembagian penanggungjawab program
- Melakukan perencanaan terkait pemeliharaan aset rekonstruksi secara bersama
- Melakukan monitoring dan evaluasi terkoordinasi antara Pemda dan BRR yang berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik,
- Mendukung perencanaan kecamatan atau pembangunan kecamatan sebagai unit perencanaan rekonstruksi yang akan memperbaiki implementasi kegiatan di tingkat bawah, dan
- Mempromosikan peranan koordinasi dan integrasi antar tingkat kabupaten dan tingkat kecamatan.

Bagan V. 4
Mekanisme Koordinasi Sekretariat Bersama



Sumber: Bapel BRR NAD- Nias, 2007

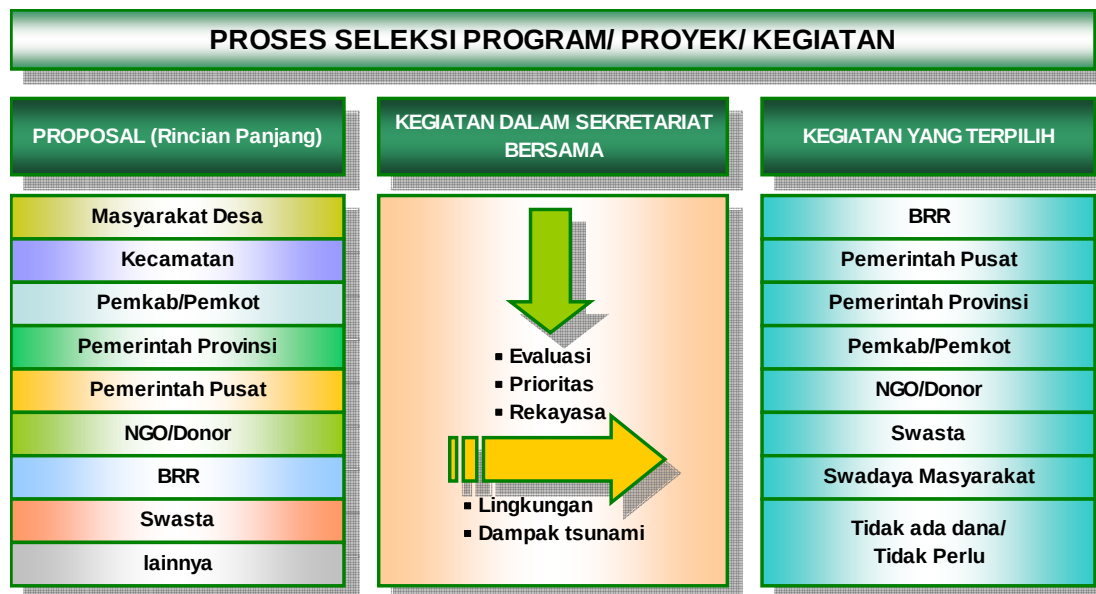
Struktur organisasi Sekber terdiri dari Sekber di tingkat pusat, regional dan distrik. Sekber Pusat berkoordinasi dengan Bappeda tingkat I, Sekber regional berkoordinasi dengan beberapa Bappeda kabupaten/kota yang ada di regional tersebut dan Sekber distrik berkoordinasi dengan Bappeda kabupaten/kota.

2. Melakukan pengelolaan data dan informasi yang mencakup kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.
Sekretariat akan menjadi satu pintu untuk data/informasi yang tepat dan akurat tentang semua kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Tugas-tugas khusus termasuk:
 - Mendukung Pemda melalui pengelolaan RAND, database sektor dan lain lain yang mencatat data/informasi tentang semua program rehabilitasi dan rekonstruksi yang didanai oleh pemerintah, BRR dan LSM di Nias, dan
 - Mengintegrasikan semua data/informasi dari instansi-instansi pemerintah, BRR dan LSM sehingga database Sekretariat Bersama dapat menjadi sumber utama informasi tentang rehabilitasi dan rekonstruksi di Nias.
3. Memperkuat hubungan antarstakeholder melalui strategi komunikasi yang jelas.
Sekretariat Bersama akan mensosialisasikan data/informasi tersebut kepada instansi pemerintah di tingkat kabupaten dan kecamatan dan masyarakat, dan juga untuk memperkuat hubungan antar stakeholder pada umumnya. Tugas-tugas khusus Sekretariat Bersama meliputi :
 - Membangun strategi komunikasi untuk menyampaikan data/informasi tentang rehabilitasi dan rekonstruksi kepada Pemda dan masyarakat melalui seminar, pembuatan brosur dan penyiapan bahan press release konferensi pers (*press release*) dan lain lain
 - Bekerjasama dengan Humas, Pemda. Kab. Nias, Pusat Informasi Publik BRR dan UNORC untuk membuat pendekatan terpadu dalam penyampaian informasi kepada para stakeholder.
4. Mempromosikan tata pemerintahan yang baik melalui peningkatan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi di semua kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.
Pada masa pembentukan Sekretariat Bersama, staf pegawai di Sekretariat Bersama memerlukan bimbingan dan bantuan dari stakeholder yang lain untuk berbagai tugas, misalnya:
 - Mengintegrasikan perencanaan antara pemerintah daerah, BRR dan LSM

- Mengerti dan menguasai database operasional dan cara cara pengumpulan data dan informasi untuk proses rehabilitasi dan rekonstruksi.

Sebagaimana yang terlihat dalam struktur organisasi Sekretariat Bersama di atas, setiap wakil koordinator bidang dipegang oleh staf Pemerintah Daerah. Wakil-wakil koordinator ini dalam tugasnya hingga tahun 2009, bekerjasama dengan staf BRR sesuai dengan bidang tugas masing-masing. Diharapkan pasca tahun 2009, Pemda sudah dapat meneruskan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang belum selesai. Secara rinci proses seleksi program di Sekretariat Bersama dapat dilihat pada bagan berikut :

Bagan V. 5
Proses Seleksi Program Sekretariat Bersama



Sumber: Bapel BRR NAD- Nias, 2007

Skema proses seleksi kegiatan di atas menjelaskan bagaimana alur proses dari usulan-usulan kegiatan yang berasal dari berbagai pihak seperti masyarakat, Pemda, BRR, NGO, dan lainnya, akan melalui rangkaian proses di Sekretariat Bersama. Proposal kegiatan yang diajukan merupakan kebutuhan rencana pembangunan yang sesuai dengan kapasitas dan kewenangan masing-masing *stakeholder*. Kegiatan yang diusulkan dikaji berdasarkan prioritasnya, hasil evaluasi, dampak lingkungan dan rekayasa. Hal ini bertujuan agar kegiatan-kegiatan yang diusulkan dapat diintegrasikan dan tidak tumpang tindih dengan kegiatan lainnya. Pada tahap selanjutnya, kegiatan-kegiatan yang terpilih akan dikembalikan lagi kepada pihak terkait untuk selanjutnya dilaksanakan pembangunannya.

V.3.1.2 Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah

Pengembangan kelembagaan dan kapasitas ini dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas berbagai aparatur pemerintah termasuk badan-badan Pemerintah Daerah kabupaten dan provinsi, Kepolisian Republik Indonesia (Polri), dan Tentara Nasional Indonesia. Usaha ini dilakukan melalui penyediaan bangunan fisik, peralatan, dukungan dari perusahaan konsultan independen untuk membantu dalam pengalihan keahlian teknis dan manajemen, serta mendukung pengembangan kelembagaan secara umum dan penyediaan program-program pelatihan dan pendidikan.

Selain itu, berdasarkan Laporan Kemajuan 2 Tahun BRR, BRR juga telah memberikan dukungan untuk membantu proses rekrutmen pegawai negeri. Hal ini dilakukan dengan mengembangkan prosedur pendaftaran pegawai negeri dan apabila diperlukan, dapat menyelenggarakan lokakarya dan kursus pelatihan untuk memastikan dipenuhinya standar kompetensi. Serangkaian program yang dilaksanakan sejak tahun 2005 dan sepanjang 2006 adalah melatih para pegawai Pemerintah Daerah, termasuk Program Aksi Pemerintahan Daerah Aceh EU/GTZ, Program Dukungan Pemerintah Daerah USAID, dan pelatihan lainnya melalui YIPD. Dukungan yang berasal dari JICA, AusAid, GTZ, dan Pemerintah Negara Perancis, BRR juga melakukan pelatihan untuk para bupati dan kepala desa. Dukungan untuk pemerintah provinsi juga sedang dilakukan kajian mengenai kebutuhan sumber daya manusia untuk selanjutnya melakukan pelatihan dan pengembangan staf dalam waktu yang lebih panjang.

V.3.1.3 Pemantapan Tim Pengalihan 2008-2009

Tim pengalihan asset perlu dibentuk oleh BRR, dalam rangka melakukan persiapan pengalihan asset termasuk melakukan inventarisasi dan pengumpulan asset, dan mempersiapkan penyerahan asset. Baik yang dilakukan antar lembaga maupun dimasukkan melalui “*Clearing House*”.

Clearing house yang dimaksud adalah semacam wadah untuk mempertemukan tiga unsur, yaitu mereka yang memiliki dan memegang asset yang akan diserahkan, dan mereka yang akan menerima asset, serta mereka yang merupakan tim penyerahan, yang mempersiapkan barang yang akan diserahkan dan mempertemukan antara pemilik asset semula dan pihak yang akan menerima penyerahan. Hal ini dimaksudkan agar dengan demikian penyerahan asset dapat dilakukan secara transparan sehingga dapat mengatasi semua permasalahan sekaligus menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

V.3.1.4 Persiapan Penyelesaian Tugas BRR

Pada tahap persiapan penyelesaian tugas BRR pada April 2009, ada 4 hal yang perlu diperhatikan dalam proses transisi aset dari BRR kepada pemda yakni P3D (Pendanaan, Peralatan, Personil (SDM) dan Dokumen).

V.3.2 Pengelolaan Pendanaan

Pengelolaan pendanaan ini dilaksanakan dengan merujuk berdasarkan UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Secara umum pelaksanaan program proyek APBN yang dikelola BRR akan di akhiri hingga tahun anggaran 2008. Maka untuk itu, pendanaan sebagai salah satu bagian yang penting dalam proses transisi perlu dilakukan pengaturan dan pengolahan secara maksimal. Disamping sumber dana yang berasal dari DIPA BRR, terdapat juga pendanaan yang bersumber dari APBN yang dikelola oleh Pemda. Pendanaan tersebut meliputi Dana Desentralisasi Kementerian/Lembaga, Dana Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, Dana Perimbangan (Dana Alokasi Khusus) dan DAU (Dana Alokasi Umum). Total dana yang bergulir untuk pembangunan Nanggroe Aceh Darussalam tahun 2007 sebesar Rp 19.2 triliun.

V.3.2.1 Dana Desentralisasi Kementrian/Lembaga

Dana desentralisasi merupakan penyerahan wewenang pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada konteks realisasinya, dana ini merupakan dana kegiatan/program dari Kementerian lembaga yang bersifat partikal untuk pembiayaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa dan tsunami di Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias. Pada tahun 2007 terdapat dana sebesar Rp 2.98 triliun. Dana ini didistribusikan pada semua bidang sektor rehabilitasi dan rekonstruksi. Pendanaan dan kegiatan yang bersumber dari dana ini, perlu dikelola secara baik terutama pasca keberadaan BRR di Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias.

V.3.2.2 Dana Dekonsentrasi

Dana Dekonsentrasi merupakan pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah. Dana ini bersifat reguler yang dikelola oleh Pemerintah Daerah. Sampai tahun 2007, dana dekonsentrasi yang bergulir di Nanggroe Aceh Darussalam sebesar 601.8 miliar.

BRR sebagai lembaga pelaksana rehabilitasi dan rekonstruksi di NAD dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara, peranannya sudah disejajarkan dengan Kementerian/Lembaga. Maka untuk itu pada tahun 2008 diharapkan sebagai DIPA 2008 sudah dapat didekonsentrasikan kepada pemerintah daerah NAD dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

V.3.2.3 Dana Tugas Pembantuan

Dana Tugas Pembantuan merupakan penugasan dari pemerintah kepada daerah dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaannya kepada pemerintah. Pada tahun 2007, dana Tugas Pembantuan yang didistribusikan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebesar 391 miliar.

V.3.2.4 Dana Perimbangan (DAU dan DAK)

Secara definitif Dana Perimbangan merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan meliputi 2 yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Dana Alokasi Umum yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana DAU tahun 2007 di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebesar Rp 5.6 triliun.

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dana DAUK di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam tahun 2007 sebanyak 800 miliar.

V.3.3 Pengalihan Peralatan dan Perangkat (Aset)

Pada setiap akhir tahun anggaran, Satker sebagai pelaksana kegiatan menyerahkan seluruh hasil kegiatan kepada deputi sektornya. Penyerahan ini disamping sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan, juga sebagai proses dokumentasi yang mendukung pemanfaatan hasil sesegera mungkin. Proses penyerahan aset dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST), didahului dengan inventarisasi yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh :

1. Satker yang bersangkutan,
2. Deputi Sektor dan/atau Kantor Perwakilan BRR,
3. Direktorat Manajemen Aset,
4. Instansi Pengguna Akhir.

Hasil inventarisasi dituangkan dalam Berita Acara Inventarisasi (BAI). Selanjutnya, dokumen ini menjadi dasar dibuatnya Berita Acara Serah Terima Aset (BAST) dan Berita Acara Serah Terima Pengelolaan (BASP). Untuk kepentingan penelitian dokumen oleh pihak Departemen Keuangan, proses serah terima ini dilengkapi dengan copy dokumen pendukung aset antara lain : kontrak, BPKB dan STNK Kendaraan bermotor, sertifikat dll. Dokumen tersebut diserahkan kepada Direktorat Manajemen Aset.

Sebagai bentuk pengendalian, apabila pada saat dilakukannya inventarisasi dijumpai permasalahan (antara lain : barang tidak dijumpai, rusak, belum selesai pembangunannya dll), maka dilakukan klarifikasi kepada deputi sektor terkait untuk ditindaklanjuti. BAI tidak akan ditandatangani, sebelum ada kejelasan posisi aset yang bermasalah tersebut. Kebijakan ini juga bertujuan untuk meyakinkan pihak penerima akhir, bahwa aset yang diserahkan tidak bermasalah dari segi keberadaan, kecukupan dan pemanfaatan.

Prosedur serah terima aset *off budget*, tidak jauh berbeda dengan tata laksana penyerahan aset dari Satker kepada Badan Pelaksana BRR, namun pada proses inventarisasinya sebisa mungkin melibatkan rekanan pelaksana pembangunan aset.

Penyerahan aset ke Pemerintah Daerah dan kementerian/lembaga sebagai pengguna akhir (*end user*) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Pengelolaan (BASP). Serah terima pengelolaan merupakan awal dari proses serah terima aset secara formal, ditindaklanjuti dengan pengajuan usulan kepada Menteri Keuangan untuk penetapan status penggunaan maupun hibah.

Pada prinsipnya, karena pengendali program adalah deputi sektor, maka BAST dan BASP merupakan wewenang dan tanggung jawab kedeputian terkait. Namun, dengan semangat regionalisasi dan kebutuhan mendesak serta kepraktisan, kedeputian sektor dapat diwakili Kepala Perwakilan BRR khususnya untuk satker yang ada di daerah. Adapun tahapan peralihan aset BRR NAD-Nias dapat dilihat pada bagan berikut :

Bagan V. 6
Tahapan Peralihan Aset BRR NAD-Nias

Januari-September 2007	September-Desember 2007	Januari-April 2008	April 2008-April 2009
Informasi	Penilaian	Persiapan	Pelaksanaan
ASET DAN TANGGUNG JAWAB 1. Tugas dan Tanggung Jawab (Biaya, akuntan, pengadaan, administrasi kontrak, pemeliharaan, dll) 2. Aset a. Bergerak tidak bergerak (Bangunan, kendaraan, meubelur, peralatan, computer, kredit berjalan, software, barang-barang, konsumsi, mesin fotocopy, dll) b. Dokumen dan Database (Dokumen kontrak, laporan, audit, database, website, dll) c. Infrastruktur di bawah kontrak BRR (pusat, provinsi, kabupaten/kota) , antara lain jalan, pelabuhan, air bersih, sanitasi, listrik, pengendalian banjir, irigasi, pengamanan pantai, termasuk kontrak yang belum selesai	Identifikasi Aset pusat, provinsi, kabupaten/kota yang akan menerima aset	Menyiapkan <i>Memoranda of Agreement</i> (MOA) antara BRR dan instansi pusat, provinsi, kabupaten/kota	Pelaksanaan berdasarkan MOAs
PENGUATAN LEMBAGA 1. Kemampuan manajemen untuk tingkat senior 2. Perencanaan strategis dan programming 3. Manajemen fiscal dan pembiayaan 4. Audit dan akuntabilitas 5. Lingkungan dan keamanan sosial 6. Pengadaan/pelelangan 7. Manajemen konstruksi dan supervisi 8. Quality Assurance dan Quality Control 9. Operasi dan pemeliharaan 10. Hal-hal lain yang akan di identifikasi kemudian	Perencanaan dan program “ <i>Capacity Building</i> ”, dengan berkonsultasi dengan pusat, provinsi, kabupaten/kota. Dan pelaksanaan program dan biaya pelaksana	Pelaksanaan <i>Capacity Building</i> yang akan dimulai pada kuartal ke empat 2007	

Sumber: Bapel BRR NAD- Nias, 2007

Pada akhir masa tugas BRR NAD-Nias, seluruh aset termasuk yang digunakan untuk operasional diserahkan kepada Pemda dan Kementerian/Lembaga terkait. Oleh karenanya, dukungan administrasi yang baik sangat diperlukan demi menjaga dan menjamin akuntabilitas organisasi.

V.3.1.1 BRR

Dalam akuntansi pemerintahan, aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan / atau dimiliki sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan diharapkan dapat diperoleh manfaat ekonomi dan / atau sosial di masa depan. Oleh karenanya, aset tersebut harus dikelola dengan baik agar terjaga keberadaannya dan optimal pemanfaatannya.

Aset hasil rehabilitasi dan rekonstruksi pada Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) NAD-Nias diperuntukkan bagi pemulihan kehidupan masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias – Provinsi Sumatera Utara perlu penanganan khusus dan cepat dengan mempertimbangkan berakhirnya masa tugas BRR NAD-Nias pada tahun 2009. Penanganan khusus dan cepat bukan berarti meninggalkan sisi administrasi berupa pencatatan dan dokumentasi kepemilikannya.

Dalam proses pemindahan aset BRR ini ada beberapa hal penting yaitu :

a. Kerangka Manajemen Aset BRR

1. Tersedianya database tentang jumlah, keberadaan dan besaran nilai aset hasil Rehabilitasi dan Rekonstruksi BRR NAD-Nias yang *realible* dan mudah di *update*
 - a. Penyediaan aplikasi manajemen aset
 - b. Pelaksanaan proses inventarisasi yang dilakukan secara bertahap yaitu 3 kali dalam 1 tahun anggaran
 - c. Proses validasi dan rekonsiliasi dengan aplikasi SABMN (Sistem Akuntansi Barang Milik Negara) sehingga mendapatkan kepastian nilai perolehan aset sesuai dengan realisasi belanja barang yang telah dikeluarkan dan memenuhi asersi manajemen tentang keberadaan aset
2. Adanya kepastian administrasi fisik dan kepastian hukum atas penguasaan aset hasil Rehabilitasi dan Rekonstruksi BRR NAD-Nias termasuk nilainya
 - a. Memfasilitasi pelaksanaan proses serah terima aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 - b. Percepatan proses penetapan status kepemilikan atas aset yang di hibahkan atau dialihkan status penggunaannya ke instansi vertikal pemerintah pusat
3. Pemanfaatan terhadap aset hasil Rehabilitasi dan Rekonstruksi BRR NAD-Nias sehingga secara ekonomis maupun sosial dapat ditetapkan mana yang perlu di optimalkan dan yang akan dihapuskan.
 Penelitian dan identifikasi terhadap seluruh aset yang berada di bawah tanggungjawab BRR NAD-Nias agar penggunaannya dapat di optimalkan sesuai dengan TUPOKSI

b. Prosedur Pengelolaan Aset di BRR

1. Penyerahan Aset dari Satker ke BRR
 Pada setiap akhir tahun anggaran, satker sebagai pelaksana kegiatan menyerahkan seluruh hasil kegiatan kepada deputi sektor-nya. Penyerahan ini disamping sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan, juga sebagai proses dokumentasi yang mendukung pemanfaatan hasil sesegera mungkin. Proses penyerahan aset dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST), didahului dengan Inventarisasi yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh :
 - a. Satker yang bersangkutan,
 - b. Deputi Sektor dan/atau Kantor Perwakilan BRR,
 - c. Direktorat Manajemen Aset,
 - d. Instansi Pengguna Akhir.

Hasil inventarisasi dituangkan dalam Berita Acara Hasil Inventarisasi. Selanjutnya, dokumen ini menjadi dasar dibuatnya Berita Acara Serah Terima Aset (BAST) dan Berita Acara Serah Terima Pengelolaan (BASP). Untuk kepentingan penelitian dokumen oleh pihak Departemen Keuangan, proses serah terima ini dilengkapi dengan copy dokumen pendukung aset antara lain : kontrak, BPKB dan STNK Kendaraan bermotor, sertifikat dll. Dokumen tersebut diserahkan kepada Direktorat Manajemen Aset.

2. Penyerahan aset dari NGO/ Negara Donor ke BRR
 Tidak jauh berbeda dengan tata laksana penyerahan aset dari Satker kepada Badan Pelaksana BRR, namun pada proses inventarisasinya sebisa mungkin melibatkan rekanan pelaksana pembangunan aset.

3. Penyerahan aset dari BRR ke Pemerintah Daerah dan Kementerian/Lembaga terkait sebagai pengguna akhir. Penyerahan aset ke Pemerintah Daerah dan kementerian/lembaga sebagai pengguna akhir (*end user*) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Pengelolaan (BASP). Serah terima pengelolaan merupakan awal dari proses serah terima aset secara formal, ditindaklanjuti dengan usulan kepada Menteri Keuangan untuk penetapan status penggunaan maupun.

Untuk mempercepat proses penyerahan aset dari Satker kepada BRR (BAST) dan dari BRR ke Pengguna Akhir (BASP) dapat dilakukan dalam waktu bersamaan. Pada prinsipnya, karena pengendali program adalah deputi sektor, maka BAST dan BASP merupakan wewenang dan tanggung jawab kedeputian terkait. Namun, dengan semangat regionalisasi dan kebutuhan mendesak serta kepraktisan, kedeputian sektor dapat diwakili Kepala Perwakilan BRR khususnya untuk Satker yang ada di daerah.

V.3.1.2 Donor dan NGO

Aset *off budget* berasal dari perolehan lainnya yang bersumber dari masyarakat, lembaga donor dan dunia usaha yang bermaksud membantu pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dengan cara langsung melaksanakan suatu kegiatan tertentu tanpa melalui APBN. Asset-asset tersebut untuk selanjutnya diterima oleh Badan Pelaksana BRR NAD-Nias sebagai wakil dari Pemerintah Indonesia. Aset yang diterima baik berupa barang jadi atau siap pakai.

Aset *off-budget* terdapat di beberapa sektor dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias pasca gempa dan tsunami, diantaranya pada sektor infrastruktur (jalan dan transportasi, energi dan telekomunikasi, infrastruktur sumber daya air), sektor perumahan dan pemukiman (perumahan, air minum dan sanitasi), sektor kelembagaan & pengembangan manusia (kepemerintahan, pendidikan, kesehatan, kebudayaan), sektor pengembangan ekonomi dan administrasi.

Realisasi kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dengan sumber pembiayaan dari Off-Budget tahun 2005-2006 adalah sebesar Rp.14.8 triliun atau sebesar 44.5% dari total kebutuhan dana.

V.3.4 Pengalihan Personil (SDM)

V.3.4.1. Status Personil dan SDM BRR NAD-Nias

Setelah pembentukan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) yang dilanjutkan dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 34 tahun 2005 jo. Nomor 76 tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Kerja serta Hak Keuangan BRR NAD-Nias, maka masing-masing kelembagaan BRR yang terdiri dari Dewan Pengarah, Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas telah menindaklanjuti penyempurnaan organisasi dengan pemenuhan personil sesuai kebutuhan.

Personil Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias terdiri dari berbagai unsur dan jenjang jabatan yang berbeda-beda. Disamping itu, pada masing-masing kelembagaan BRR NAD-Nias (Dewan Pengarah, Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas) memiliki tugas pokok dan fungsi sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Menurut data SDM BRR per Mei 2007, jumlah pegawai dari ketiga lembaga BRR NAD-Nias mencapai 1543 orang, sebagaimana tersebut pada tabel dibawah ini.

Tabel V. 1
Komposisi Pegawai BRR NAD-Nias Tahun 2007

No	Subject	Jumlah	Keterangan
1	Badan Pelaksana BRR NAD-Nias	1,355	
	• Ka Bapel / Wakil	2	
	• Deputi	10	
	• Direktur	65	
	• Manager	230	
	• Asst. Manager	280	
	• Senior Staff	198	
	• Staff	208	
	• Staf Ahli	21	
	• Driver	142	
	• Security	90	
	• Pramubakti/Office Boy	26	
	• Tim Komunikasi & Jaringan Wilayah	83	
2	Dewan Pengawas BRR NAD-Nias	111	
	• Pejabat	8	
	• Staff Ahli	9	(Tim Ahli Wanwas Belum Terdaftar)
	• Staff	13	
	• Pelaksana	4	
	• Tim Ahli Dewan Pengawas :	77	
	o Tenaga Ahli Muda	50	
	o Tenaga Ahli Utama	10	
	o Staff	11	
	o Pelaksana	6	
3	Dewan Pengarah BRR NAD-Nias	75	
	• Ketua & Anggota	26	
	• Pejabat Penghubung	14	
	• Anggota Sekretariat	18	
	• Staff	15	
	• Pelaksana	2	
Total Pegawai		1.541	

Sumber : Bapel BRR NAD-Nias, 2007

Jumlah personil di atas belum termasuk Satker dan PPK dan stafnya. Jumlah personil yang merupakan tugas perbantuan atau direkrut dari PNS. Sisanya berasal dari berbagai asal dan latar belakang pengalaman, seperti LSM, Swasta, Perguruan Tinggi, dan langsung masuk BRR.

V.3.4.2. Kebijakan Penyesuaian Organisasi dan Personil BRR NAD-Nias Tahun 2007-2009

Dengan memperhatikan jumlah personil yang cukup besar, maka diperlukan proses pentahapan penyesuaian organisasi hingga saat tugas BRR berakhir, termasuk pengakhiran hubungan kerja (*lay off*) yang tepat, agar tidak menimbulkan masalah. Disamping itu, menuju proses pengakhiran tugas BRR, aspek personalia yang penting perlu diantisipasi adalah terhadap pengunduran diri yang tidak terkendali, terutama dari personil kunci dan berkemampuan. Karena diperkirakan pada akhir tahun 2007, personil yang berkualitas justru telah mempersiapkan diri dengan melakukan pengunduran diri.

Karena itu diharapkan adanya kepastian kontinuitas pekerjaan/ promosi bagi personil yang berprestasi sangat diperlukan, dengan demikian mereka akan tetap tinggal di BRR, sehingga sampai akhir tugas BRR akan tetap dikelola oleh para personil yang berkualitas.

Pentahapan manajemen yang telah ditentukan oleh SDM BRR terhadap keberadaan personil adalah sebagai berikut:

1. Tahun 2008

Kebijakan penanganan proyek akan diserahkan kepada Kantor Regional, artinya Kantor Pusat BRR tidak lagi mempunyai kegiatan penanganan proyek. Dengan demikian, organisasi ke deputian Bapel BRR juga perlu disesuaikan bahkan diusulkan untuk ditiadakan. Personil BRR yang mempunyai keahlian dan pengalaman menangani proyek dialihkan ke Kantor Regional. Disamping itu, pada tahun 2008 sebagian program/ proyek/ kegiatan mulai diserahkan ke pemerintah Daerah, maka tugas yang ditangani Kantor Regional juga akan berkurang. Kalau nilai kegiatan yang dialihkan sekitar 40%, maka akan terjadi pengurangan staff BRR dalam jumlah yang sebanding. Sedangkan staf satker dan PPK akan dapat langsung dialihkan. Upaya persiapan ke arah ini harus telah dilakukan pada akhir tahun 2007.

2. Tahun 2009

Dengan berakhirnya masa tugas BRR pada April 2009, maka keseluruhan personil BRR telah diakhiri. Dengan demikian pada akhir tahun 2008, telah dilakukan persiapan dalam menetapkan lebih rinci tahapan/ proses pengakhiran tugas terkait dengan masalah personil. Kantor Regional sebagai organisasi Bapel BRR di ujung tombak, akan selesai tugasnya.

Bagi personil PNS secara bertahap, menjelang akhir tahun 2008 hingga April 2009, sesuai dengan tingkat kebutuhannya dikembalikan ke instansinya masing-masing. Sedangkan personil non PNS juga akan dilepas dan mengakhiri kontraknya sesuai dengan kebutuhannya. Untuk itu jumlah personil yang dipertahankan dan secara bertahap dilepas perlu dirancang dengan seksama.

Mulai pertengahan tahun 2008 sampai awal tahun 2009, adalah saat-saat yang paling kritis dan krusial bagi BRR, di satu pihak harus menyelesaikan tugas dengan baik, di lain pihak juga melakukan pelepasan personil. Secara teoritis dapat dirancang dengan mudah, namun pada pelaksanaannya sangat sulit karena menyangkut dengan sumber daya manusia yang dinamis dan menjadi subyek / asset kegiatan BRR.

V.3.5 Pengalihan Dokumen

Dengan berakhirnya masa tugas Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias, maka kegiatan pengalihan dokumen merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dari proses peralihan yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya. BRR NAD-Nias sampai dengan paruh waktu masa tugasnya telah menerapkan Sistem Manajemen Dokumen (selanjutnya disingkat SMD) sebagai sistem pengelolaan dokumen melalui teknologi informasi, termasuk pengaturan proses pergerakan dan isinya.

Beberapa fungsi SMD yang telah dijalankan oleh BRR NAD-Nias adalah sebagai berikut:

1. Fungsi Perpustakaan;
2. Fungsi pengelompokkan (Indeks) dokumen sesuai dengan klasifikasinya;
3. Fungsi pencarian dan pengambilan dokumen yang mudah dan cepat, sesuai teks aslinya, kata petunjuk, judul dan profilnya;
4. Fungsi keamanan terhadap dokumen;
5. Kontrol terhadap versi dokumen, dan perubahan isi dokumen;
6. Fungsi administrasi surat masuk dan keluar
7. Fungsi menjalankan secara otomatis aplikasi yang sesuai dengan dokumennya dan kemampuan melihat isi dokumen tanpa membuka aplikasinya.

Beberapa katagorikan yang masuk dalam proses pengalihan dokumen BRR NAD-Nias setelah masa tugasnya adalah sebagai berikut :

V.3.5.1 Dokumen Administrasi

Secara umum terdapat beberapa administrasi yang menjadi perhatian khusus adalah:

1. *Pengalihan Administrasi Proyek*

Merupakan dokumen proyek/paket kegiatan, mulai dari proses pelelangan/penunjukkan langsung (terdiri dari dokumen lelang/penunjukkan langsung dan proses lelang hingga penetapan pemenang lelang/penunjukkan langsung), hingga pada seluruh proses kegiatan pelaksanaan dan supervisi, beserta inventarisasi barang dan jasa yang tidak habis pakai. Penyerahan pengelolaan proyek ke pengguna akhir (*end user*) yang dituangkan dalam suatu Berita Acara Serah Terima Pengelolaan (BASP).

2. *Pengalihan Regulasi/Peraturan*

Hal ini terkait dengan semua penetapan/ keputusan yang berkaitan dan membawa akibat pada pembiayaan. Peraturan-peraturan yang telah dihasilkan antara lain, mencakup Surat keputusan dan pengaturan; kepegawaian, kebijakan operasional, penetapan standar dan prosedur dan lain sebagainya.

V.3.5.2 Hasil Studi

Hasil studi adalah segala bentuk penelitian, survey, studi kelayakan, studi banding yang dilaksanakan untuk keperluan perencanaan, penyelesaian masalah atau pengambilan kebijakan. Tujuan pengalihan hasil studi dapat diserahkan ke Departemen atau Instansi terkait di Pemerintah Daerah sesuai dengan bidang yang diteliti. Disamping itu hasil studi tersebut dapat ditempatkan di tempat khusus seperti di Perpustakaan Nasional, Wilayah, Daerah, Kantor Pemerintah Daerah, Universitas, Sekolah, LSM, dan lain sebagainya.

V.3.5.3 Sistem

Sistem adalah bentuk perangkat lunak yang dilengkapi dengan perangkat keras serta dukungan keahlian tertentu untuk mengoperasionalkannya. Karena itu proses pengalihan di lakukan secara utuh dan lengkap, dalam arti meliputi perangkat keras dan perangkat lunak serta pengalihan keahlian (kalau perlu dengan personil) atau pelatihan serta bila dimungkinkan juga dialihkan pembiayaannya. Beberapa hal yang termasuk dalam sistem antara lain database, data spatial/sistem pemetaan, sistem kependudukan (SISDUK), pelayanan satu atap (keimigrasian), dan lain sebagainya.



Keberlanjutan Pemulihan Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara

VI.1 Permasalahan dan Tantangan Pembangunan Jangka Menengah Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara

VI.1.1 Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Keberlanjutan pemulihan wilayah dan kehidupan masyarakat dan pembangunan jangka menengah provinsi Aceh dan Kepulauan Nias pasca bencana bukan hanya berfokus semata-mata pada bagaimana membangun kembali rumah-rumah dan infrastruktur yang hancur dan rusak akibat bencana gempa dan tsunami, namun lebih penting dari itu adalah bagaimana merekonstruksi dan merehabilitasi sektor-sektor sosial budaya.

Masa bakti BRR NAD-Nias akan berakhir pada akhir April 2009, untuk itu bekerja berdampingan dengan pemerintah daerah merupakan hal yang sangat penting untuk keberhasilan lanjutan proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Program penguatan institusi dan kapasitas lokal harus secara sistematis disiapkan dan dilaksanakan secara bertahap yang dimulai dari sekarang. Penguatan institusi daerah ini harus muncul melalui peningkatan peran institusi daerah dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi yang dari tahun ke tahun harus terus meningkat. Keterlibatan pemerintah daerah dalam pembangunan infrastruktur dan sektor-sektor lainnya di tingkat kabupaten dan kota serta program-program lainnya harus ditingkatkan agar kemampuan daerah dalam mengelola pembangunan bisa mencapai tingkat yang diharapkan. Seiring dengan itu, penguatan institusi daerah ini juga diharapkan memberikan dampak positif pada upaya melibatkan masyarakat dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Pada akhirnya seluruh pihak yang terkait dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berperan secara optimal.

Upaya penguatan institusi daerah ini juga diperlukan dalam rangka memastikan terjadi keselarasan dan kesinambungan pembangunan NAD dan Nias pasca mandat BRR 2009 baik dalam memelihara dan merawat seluruh kemajuan yang ada, maupun melanjutkan dan mengembangkan program-program yang bersifat strategis. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa akan terdapat permasalahan dan hambatan dalam rangka kegiatan lanjutan program rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh dan Nias pasca mandat BRR berakhir.

Masalah-masalah yang dapat diidentifikasi dalam keberlanjutan pembangunan jangka menengah meliputi antara lain: belum terselesaikannya penanganan korban bencana secara total; belum berjalan baiknya program pemberdayaan masyarakat korban bencana; masih rendahnya kualitas pelayanan publik; masih belum optimalnya fungsi dan pelayanan infrastruktur utama di wilayah bencana; serta belum terselesaikannya masalah penataan ruang dan hukum serta perangkat peraturan lainnya yang terkait dengan masalah pertanahan.

Sejak dimulainya masa tanggap darurat sampai ke tahap rekonstruksi sekarang ini, penanganan para korban bencana tsunami belum sepenuhnya dapat tertanggulangi. Di sana sini masih banyak meninggalkan permasalahan yang seharusnya bisa diselesaikan secara cepat dan tuntas. Permasalahan dalam bidang penanganan korban yang sangat

mendasar dan penting adalah menyangkut dengan percepatan pembangunan rumah untuk para korban, disamping penyelesaian sejumlah pembebasan tanah untuk pembangunan infrastruktur terutama jalan dan jembatan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi sebagaimana yang diharapkan. Termasuk besarnya kesenjangan antar wilayah karena bervariasinya dampak bencana dan kemampuan Pemda dalam menangani korban bencana. Dengan demikian, penting untuk memberikan perlakuan dan pendekatan yang berbeda untuk masing-masing daerah.

Kondisi infrastruktur yang hancur akibat amukan badai tsunami, terutama pada bagian infrastruktur yang terkait dengan sektor perhubungan, seperti jalan raya, pelabuhan laut, dan pelabuhan udara. Perbaikan dan peningkatan dalam bidang infrastruktur utama tersebut terkendala oleh sulitnya penyediaan material, terutama pada wilayah yang memiliki kesulitan akses dan penataan ruang yang belum terselesaikan secara tuntas. Penyelesaian masalah ini diharapkan dapat mempercepat perbaikan infrastruktur dan sekaligus meningkatkan mobilitas, interaksi sosial, dan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Bencana alam tersebut selain mengakibatkan korban jiwa, harta benda, dan kerusakan yang luar biasa juga menimbulkan permasalahan hukum dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan, hak keperdataan, perwalian, pertanahan, serta perbankan. Permasalahan hukum tersebut sangat mendesak untuk ditangani guna mengembalikan kondisi psikologis masyarakat, kehidupan sosial-ekonomi, dan normalisasi pemerintahan melalui usaha rehabilitasi dan rekonstruksi yang bersifat menyeluruh.

Selain itu, permasalahan yang juga patut diperhatikan adalah kondisi psikologis masyarakat korban bencana. Sebelum bencana alam menyapu hidup mereka, masyarakat Aceh telah memiliki rekam jejak penderitaan yang panjang akibat konflik selama tiga dasawarsa. Kondisi ini berpotensi memicu munculnya situasi psikososial berupa perasaan tidak aman, kecurigaan, bahkan keengganan bekejasama dengan warga pendatang. Tanpa penanganan yang cepat dan tepat, semua itu akan bermuara pada hilangnya kepercayaan diri, identitas, bahkan harapan akan masa depan.

Berdasarkan apa yang telah dilakukan selama ini, berbagai macam kegiatan dan program rehabilitasi dan rekonstruksi masih belum sepenuhnya melibatkan komunitas dalam arti pemberdayaan. Padahal pada dasarnya segala bentuk kegiatan atau program yang telah direncanakan dan disusun bermuara pada masyarakat. Dengan demikian posisi masyarakat dapat bertambah kuat dan berdaya dalam menatap kehidupannya. Beberapa kegiatan yang mendukung keberdayaan masyarakat adalah penguatan pada sektor pengembangan perekonomian rakyat.

Secara detail permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam jangka menengah tahun 2007-2012 dapat dirangkum dalam bidang-bidang/sektor-sektor sebagai berikut:

Bidang Pemerintahan, Politik dan Hukum

Permasalahan yang dihadapi :

1. Belum tersedianya qanun yang cukup dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Aceh sebagai konsekuensi implementasi UU no. 11 Tahun 2006.
2. Tidak adanya ketegasan pendelegasian sebagian kewenangan bupati/walikota kepada lembaga pemerintahan di bawahnya (kecamatan, mukim dan gampong).
3. Pemekaran wilayah belum diikuti dengan peningkatan pelayanan masyarakat, penataan tata ruang dan penataan batas wilayah administrasi.
4. Sistem administrasi pemerintahan daerah masih lemah.
5. Rendahnya disiplin dan kapasitas aparatur pemerintah daerah.
6. Partai politik yang ada belum memberikan pembelajaran politik yang baik kepada masyarakat.

7. Kualitas produk qanun di tingkat kabupaten/kota masih rendah karena rendahnya kualitas sumber daya manusia dalam bidang hukum di kabupaten/kota.

Dalam bidang pemerintahan permasalahan yang dihadapi ke depan adalah ketidakjelasan pemberian kewenangan pemerintah pusat kepada Aceh yang jelas sehingga menimbulkan multi tafsir dalam mengimplimentasikan kebijakan pemerintah daerah. Dalam bidang politik tantangan yang akan dihadapi adalah rendahnya perhatian partai politik pada aspirasi bawah dikarenakan akan berlangsungnya pemilihan umum pada tahun 2009 yang mana partai-partai politik akan lebih fokus pada menarik simpati pemilih. Dalam bidang hukum penyelesaian qanun-qanun yang menjadi prioritas belum mempunyai komitmen yang jelas dari para anggota dewan dan pemerintah. Hal ini dapat dilihat dari masih sangat sedikitnya produk qanun yang disahkan.

Bidang Ekonomi

Permasalahan yang dihadapi adalah :

1. Kapasitas pemerintah daerah dalam bidang perencanaan dan manajemen pembangunan masih relatif terbatas.
2. Minimnya kebijakan pemerintah yang mendukung peningkatan ekspor komoditi non-migas Aceh sebagai salah satu kekuatan perekonomian daerah.
3. Perekonomian daerah masih belum sepenuhnya pulih yang diakibatkan oleh belum optimalnya fungsi pasar dan tempat usaha, sarana dan prasarana perikanan, struktur tata guna lahan, industri dan perdagangan, serta jasa perbankan.
4. Produktivitas lahan pertanian relatif rendah yang diakibatkan oleh minimnya adopsi teknologi pertanian, rendahnya kualitas, dan masih tingginya harga sarana produksi.
5. Produktivitas tanaman perkebunan rakyat relatif rendah yang diakibatkan oleh minimnya perawatan, pemeliharaan dan luasnya kebun terlantar akibat konflik serta banyaknya tanaman berusia tua.
6. Tingginya angka pengangguran absolut, terbatasnya kesempatan kerja, dan rendahnya kemampuan tenaga kerja.
7. Dampak konflik yang berkepanjangan secara langsung mempengaruhi usaha bidang jasa perhotelan, rumah makan dan usaha jasa lainnya.
8. Tingkat kemiskinan di NAD relatif sangat besar yang diakibatkan oleh konflik berkepanjangan, krisis ekonomi, serta gempa dan tsunami Desember 2004.

Dalam bidang ekonomi masalah pemberdayaan ekonomi rakyat masih menjadi hambatan utama pembangunan di Aceh. Namun apabila kondisi keamanan masih berjalan normal seperti sekarang maka kita harus optimis pembangunan ekonomi akan berjalan semakin baik dan perekonomian masyarakat akan meningkat. Kita tentu tidak melupakan bagaimana terpuruknya ekonomi Aceh selama darurat militer beberapa tahun yang lalu sehingga menjadikan Aceh menjadi salah satu provinsi termiskin.

Bidang Infrastruktur

Permasalahan yang dihadapi adalah :

1. Di sektor jalan dan jembatan; tingginya aktivitas lalu lintas berat dan jumlah kendaraan yang melewati jalan raya mengakibatkan kondisi mantap jalan dan jembatan makin menurun. Permasalahan lainnya berupa masih tingginya kesenjangan antar wilayah dan terbatasnya akses dari pusat produksi ke pemasaran, serta masih banyak daerah yang terpencil dan terisolir.
2. Di sektor perumahan; masih banyak rumah masyarakat korban tsunami, korban konflik, dan rumah dhuafa yang belum terbangun dan direhabilitasi. Demikian juga sarana dan prasarana dasar pemukiman.

3. Di bidang tata ruang; pemekaran kabupaten/kota telah mengakibatkan perubahan struktur ruang dan pola pemanfaatan ruang yang ada sehingga perlu dilakukan revisi dan penyesuaian tata ruang sebelumnya.
4. Di sektor perhubungan; kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana transportasi (dermaga penyeberangan, pelabuhan laut, dan bandara) masih belum memadai. Di samping itu, banyak pulau-pulau kecil yang belum terakses dengan sarana perhubungan.
5. Di sektor pos dan telekomunikasi; fasilitas pos dan telekomunikasi masih banyak yang rusak akibat konflik dan bencana alam serta belum terjangkaunya telekomunikasi di daerah terisolir.
6. Di sektor sumber daya air; meningkatnya ancaman terhadap keberlanjutan daya dukung sumber daya air. Kondisi ini disebabkan oleh kerusakan daerah hulu yang cenderung terus berlangsung; lemahnya operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air; lemahnya koordinasi dan partisipasi masyarakat; lemahnya pengelolaan data dan informasi sumber daya air.
7. Di sektor lingkungan hidup; rusaknya laboratorium lingkungan hidup daerah dan mobil uji emisi mengakibatkan tidak berjalannya kegiatan pengujian pencemaran yang terjadi. Kurangnya tenaga terampil dan teknologi pendukung di bidang lingkungan hidup, kurangnya kesadaran pemrakarsa usaha atau kegiatan yang menimbulkan dampak lingkungan untuk menyusun amdal dan usaha pengelolaan lingkungan/usaha pemantau lingkungan (UKL/UPL), kurangnya partisipasi masyarakat untuk ikut menjaga kelestarian lingkungan hidup, serta masih rendahnya tingkat penerapan dan pengawasan terhadap implementasi perundang-undangan lingkungan hidup.
8. Di sektor pertanahan; tenaga profesional untuk melakukan sertifikasi dan indentifikasi lahan relatif terbatas. Selain itu, hak guna usaha perseorangan ataupun badan usaha masih berlaku sementara aktivitas di lapangan tidak dilaksanakan.
9. Di sektor informatika; sarana dan prasarana telekomunikasi sangat minim. Selain itu, sumber daya manusia di bidang informatika relatif terbatas.
10. Di sektor kelistrikan; kondisi geografis yang jauh dari pembangkit listrik dan tingkat beban yang secara teknis dan ekonomis belum layak untuk dipasok oleh pembangkit skala besar; kurangnya kemampuan pendanaan pemerintah karena untuk memenuhi kebutuhan listrik pedesaan yang letaknya terpencil dan tersebar membutuhkan dana jauh lebih besar dibandingkan dengan beban yang terkonsentrasi; energi pembangkit listrik masih sangat tergantung pada BBM sedangkan pemanfaatan energi non BBM masih pada taraf penjajakan.

Di bidang infrastruktur, permasalahan jalan dan energi listrik masih menjadi isu sentral dalam pembangunan jangka menengah ekonomi Aceh. Pembangunan jalan yang menjangkau seluruh Aceh dalam rangka menghilangkan keterisoliran akan memakan waktu yang lebih dari lima tahun ke depan. Hal ini mengingat begitu panjangnya jalan yang harus dikerjakan untuk menembus keterisoliran Aceh dan dalam rangka pengembangan kawasan pedalaman. Listrik juga menjadi hambatan utama karena berdampak langsung terhadap aktivitas rutin segala lini kehidupan warga.

Bidang Pendidikan

Permasalahan yang dihadapi adalah :

1. Dukungan sarana/prasarana dan tenaga pengajar skill yang berkualitas untuk pengembangan pendidikan kejuruan/vokasional dan pendidikan tinggi terbatas.
2. Kualifikasi dan jumlah guru belum memadai, di samping itu persebarannya juga tidak merata, umumnya tenaga pengajar lebih terkonsentrasi di perkotaan dibandingkan di daerah pedalaman.

3. Persebaran sekolah atau lembaga pendidikan belum merata. Di beberapa daerah masih ditemukan rendahnya daya tampung, dan untuk lembaga Pendidikan Taman Kanak-kanak/ Raudhatul Athfal (TK/RA) persebarannya masih berorientasi ke wilayah perkotaan dengan segmen masyarakat menengah ke atas.
4. Penerapan “manajemen berbasis sekolah (*school based management*)” dalam rangka mewujudkan “tata kelola yang baik (*good governance*)”, pemberdayaan sekolah dan partisipasi masyarakat belum berjalan dengan baik, ditandai dengan lemahnya peran Komite Sekolah serta kurangnya transparansi dan akuntabilitas
5. Tingginya biaya penyelenggaraan pendidikan menengah kejuruan di bandingkan dengan pendidikan menengah umum, serta terbatasnya dunia usaha yang dapat dimanfaatkan sebagai mitra.
6. Belum adanya program pendidikan yang memberikan kesempatan kepada mantan anggota GAM untuk melanjutkan pendidikan formalnya di sekolah dan perguruan tinggi dengan pemberian beasiswa.
7. Angka kemiskinan yang tinggi melemahkan kemampuan akses masyarakat terhadap pendidikan.
8. Untuk pendidikan non-formal belum mendapat perhatian yang proporsional dari pemerintah dan masyarakat, di samping itu koordinasi penyelenggaraan pendidikan non-formal antar instansi terkait masih lemah.
9. Rendahnya penguasaan dan pemahaman peserta didik terhadap dasar-dasar ajaran Islam dan banyaknya lulusan pendidikan dasar yang belum mampu membaca Al-quran. Dukungan sarana dan prasarana pendidikan agama Islam di sekolah belum mencukupi terutama untuk mendukung pelaksanaan praktek ibadah serta ketersediaan buku pelajaran agama di sekolah sekolah juga masih sangat terbatas.

Pembangunan dalam bidang pendidikan akan mengalami kesenjangan apabila perhatian pemerintah tidak ditujukan kepada para mantan anggota GAM untuk diberikan beasiswa pendidikan guna melanjutkan pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi sehingga mereka akan dapat berperan lebih banyak di segala sektor kehidupan. Hal ini dikarenakan salah satu kelemahan mantan anggota GAM itu adalah minim dan rendahnya tingkat pendidikan mereka sehingga mereka sulit mendapatkan pekerjaan yang layak.

Bidang Kesehatan

Permasalahan yang dihadapi adalah :

1. Masih belum terpenuhinya jumlah, jenis dan pemerataan tenaga dokter spesialis.
2. Aksesibilitas terhadap pelayanan kesehatan masih rendah.
3. Dalam hal pelayanan kesehatan, permasalahan utama berhubungan dengan mutu layanan, baik layanan primer, sekunder dan tertier dan keterjangkauan pelayanan. Hal ini sejalan dengan semakin meningkatnya pendidikan pengetahuan dan tuntutan masyarakat terhadap layanan itu sendiri. Di lain pihak semakin banyak proporsi masyarakat miskin di wilayah ini.
4. Sistem Informasi Kesehatan (MIS) masih belum optimal baik pengadaan maupun penggunaan perangkat data yang dihasilkan dalam pengambilan keputusan.

Pembangunan di bidang kesehatan akan berkisar pada belum meratanya penempatan tenaga medis ke seluruh penjuru Aceh karena keterbatasan jumlah tenaga dokter, bidan maupun perawat. Hal ini bisa diselesaikan apabila pemerintah mengupayakan tenaga dokter yang lebih banyak dengan mengirimkan lulusan terbaik terutama yang berasal dari daerah yang belum ada tenaga medisnya sehingga mereka akan termotivasi untuk kembali ke daerah asalnya. Jadi solusinya adalah menyekolahkan mereka yang berasal dari daerah terpencil itu dan mereka diikat dengan perijinan dan akan kembali bertugas di kampung halamannya.

Bidang Agama, Sosial dan Budaya

Permasalahan yang dihadapi adalah :

1. Masih rendahnya perhatian pemerintah daerah dalam pembangunan nilai-nilai Islami dalam kehidupan masyarakat, seperti pemamfaatan masjid-masjid untuk dijadikan tempat pembinaan umat yang dilaksanakan berkala seperti yang ada di Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh, yang seharusnya menjadi model kegiatan masjid-masjid di Aceh. Selama ini pemerintah daerah dan BRR hanya fokus kepada pembangunan fisik namun tidak dibarengi dengan pembangunan mental manusianya.
2. Kemiskinan telah berdampak pada rendahnya daya beli masyarakat dan kondisi ini memperburuk kesadaran akan perbaikan gizi.
3. Masih minimnya upaya penanganan di bidang kesejahteraan sosial, baik perorangan maupun kelompok masyarakat termasuk perlindungan sosial masyarakat miskin terkait dengan pemenuhan kebutuhan dasar secara mandiri termasuk mengakses sistem pelayanan sosial dasar.
4. Belum optimalnya penanganan dan perlindungan sosial terhadap anak terlantar, anak jalanan, anak terpisah dari keluarga, anak korban penyalahgunaan NAPZA, penyandang cacat, eks penyakit kronis (eks kusta), gelandangan, pengemis, lansia dan wanita rawan sosial ekonomi serta korban tindak kekerasan.
5. Belum tersedianya sarana dan prasarana penanggulangan bencana di wilayah Kabupaten/Kota dalam rangka penanggulangan korban bencana dalam situasi tanggap darurat.
6. Tingkat pendidikan yang rendah dan terbatasnya akses terhadap informasi menyebabkan perempuan menjadi rentan terhadap berbagai krisis yang terjadi baik ekonomi maupun sosial. Perempuan masih terbelenggu dalam kondisi diskriminatif antara laki-laki dan perempuan.
7. Di bidang Budaya dan adat Istiadat, keterbatasan ketersediaan dana dalam melaksanakan Program dan kegiatan, sehingga pencapaian sasaran dan hasil sesuai tupoksi sangat terbatas, juga terbatasnya tokoh-tokoh adat yang benar-benar memahami hukum adat dan adat istiadat serta kurangnya media yang bisa menumbuhkembangkan pemahaman/ pengetahuan akan aktualisasi hukum adat dan adat istiadat.
8. Di bidang keagamaan, minimnya sarana dan prasarana kantor yang mendukung pelaksanaan syariat Islam secara kaffah, minimnya aparaturnya secara kuantitas dan kualitas yang profesional di bidang syariat Islam, sebagian wilayah Aceh rentang waktu tahun 2005 – 2006 belum kondusif, kuatnya pengaruh negatif era globalisasi dan degradasi moral keagamaan, kuatnya upaya pemurtadan dari pihak non muslim pasca gempa bumi dan tsunami tahun 2004, minimnya pemahaman, pengetahuan dan kesadaran di bidang syariat Islam, belum memadainya sarana dan prasarana peribadatan dan keagamaan.

Hambatan pembangunan dalam bidang agama, sosial dan budaya akan berkisar pada hambatan penerapan syariat Islam dengan menerapkan kehidupan islami di seluruh Aceh. Penerapan syariat Islam akan berimbas pada kondisi sosial budaya masyarakat. Kondisi kemajuan global yang meninggalkan nilai-nilai agama akan menjadi salah satu masalah utama dalam rangka melestarikan nilai-nilai islami masyarakat Aceh yang ada. Hambatan itu akan dapat diatasi dengan meniru model pembinaan umat yang dilakukan oleh Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh dengan segala kegiatannya. Hal itu baik untuk dilakukan oleh seluruh pengurus masjid yang di Aceh guna pembinaan umat yang Islami.

Tantangan

Tantangan pembangunan jangka menengah di Provinsi NAD secara umum dapat ditinjau dari tiga aspek, yaitu: (1) Aspek politik, (2) Aspek geografis dan tata ruang, serta (3) Aspek pendanaan.

Pertama, kondisi perdamaian sosial masyarakat Aceh pasca konflik berkepanjangan yang sudah mulai stabil dan kondisi pemulihan (rehabilitasi dan rekonstruksi) pasca bencana tsunami yang membaik perlu dijaga selalu agar dapat mempercepat keberlanjutan pemulihan wilayah. Begitu pula halnya dengan pelaksanaan Pilkada Provinsi yang berlangsung dengan baik dapat memperlancar proses demokrasi.

Kedua, mengingat kondisi geografis wilayah Aceh yang sangat menyebar, maka pembangunan harus dilakukan secara adil dan merata di seluruh wilayah. Untuk aspek tata ruang, perencanaan desa (*village mapping*) yang telah dilakukan di sebagian wilayah terkena bencana sebagai instrumen operasionalisasi rencana tata ruang semestinya mengacu kepada rencana yang lebih tinggi, dalam hal ini rencana tata ruang wilayah. Sementara itu, status dokumen rencana tata ruang wilayah Provinsi NAD yang saat ini masih berupa *draft* menimbulkan tantangan dalam bidang perencanaan untuk memastikan perencanaan desa yang ada sejalan dengan arahan makro yang terdapat dalam rencana tata ruang wilayah.

Ketiga, dengan disahkannya UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, maka adanya alokasi dana otonomi khusus yang ditujukan untuk akselerasi pembangunan provinsi menjadi tantangan sendiri agar Provinsi NAD dapat mempergunakan dana tersebut seefisien dan seefektif mungkin.

VI.1.2 Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara

Kabupaten Nias

Permasalahan strategis yang dihadapi Kabupaten Nias dalam jangka waktu menengah ke depan adalah sebagai berikut:

- a. *Infrastruktur*
 - Infrastruktur dasar yang mengalami kehancuran akibat gempa bumi. Ini juga memperparah kondisi awal infrastruktur yang memang sudah cukup minim.
 - Aksesibilitas transportasi darat terbatas, oleh sebab itu dalam lima tahun terakhir pembangunan infrastruktur diutamakan. Penyebab terhambatnya pembangunan infrastruktur adalah : kondisi geologi yang sangat labil dan rawan bencana longsor, faktor konstruksi dan partisipasi masyarakat.
 - Perkembangan infrastruktur perlu diarahkan untuk memacu pertumbuhan ekonomi di sentra-sentra produksi dan membuka daerah yang tertinggal.
- b. *Sumber daya alam dan lingkungan hidup*
 - Ragam potensi SDA yang dimiliki belum diolah secara optimal bagi kesejahteraan masyarakat. Salah satu potensi SDA yang belum terkelola dengan optimal adalah padi. Hal ini dibuktikan dengan Kabupaten Nias belum mampu untuk mencukupi kebutuhan pangan untuk daerahnya sendiri (swasembada).
 - Letak geografis Kabupaten Nias yang relatif jauh dari pusat-pusat pertumbuhan ekonomi (sebelah barat Sumatera, 92 mil laut dari Kota Sibolga).
 - Struktur batuan dan susunan tanah labil, mengakibatkan sering terjadinya banjir bandang.

- Beberapa kawasan lindung (sempadan pantai dan sungai) beralih fungsi menjadi lahan pertanian dan permukiman, beberapa belum tertata dan terpelihara dengan baik.
- Struktur geologi berada pada daerah patahan sehingga sebagian besar wilayahnya berpotensi mengalami bencana alam gempa bumi, tsunami, dan abrasi.
- Kondisi lingkungan hidup mengalami degradasi dan penurunan kualitas akibat perambahan hutan, kerusakan bakau, kerusakan DAS, menurunnya diversifikasi flora dan fauna, gangguan dan kerusakan ekosistem terumbu karang.

c. *Sumber daya manusia*

- Laju pertumbuhan penduduk relatif cukup tinggi (1,23% dari 2000-2004) dan daya serap lapangan kerja yang tersedia tidak sebanding dengan potensi angkatan kerja yang tersedia, sehingga angka pengangguran sangat besar dari tahun ke tahun. Hal ini diperparah dengan minimnya keterampilan sebagian besar angkatan kerja. Minimnya kemampuan masyarakat ini juga berimbas pada rendahnya perkembangan ekonomi skala lokal.
- Masalah turunan lainnya adalah persebaran penduduk yang kurang merata dan Angka Beban Tanggungan Keluarga yang masih cukup besar (tahun 2000 mencapai 79% dan tahun 2004 mencapai 76%).
- Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Nias tahun 2002 urutan terakhir di Sumatera Utara. Perkembangan APK dan APM di berbagai jenjang pendidikan lima tahun terakhir menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun (2000-2004). Namun tetap banyak potensi masyarakat yang masih belum memperoleh kesempatan pendidikan di pelosok-pelosok daerah.
- Sumber daya manusia yang masih kurang memadai, baik kualitas maupun kuantitas dalam melakukan fungsi pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat.

d. *Perekonomian*

- Kabupaten Nias masih tergolong dalam salah satu Kabupaten yang memiliki PDRB per kapita terendah di Provinsi Sumatra Utara. Pada tahun 2004, secara nominal, PDRB per kapita Kabupaten Nias hanya sebesar 4,83 juta rupiah dan nilai tersebut lebih rendah dari rata-rata PDRB per kapita kabupaten/kota di Provinsi Sumatra Utara yang sebesar 7,73 juta rupiah (BPS, 2004). Kontribusi PDRB Kabupaten Nias terhadap total PDRB Provinsi Sumatra Utara juga sangat rendah. Di tahun 2004, misalnya, dari 114,65 triliun total PDRB Provinsi Sumatra Utara, Kabupaten Nias hanya menyumbang sekitar 1,96 persen¹
- Adanya potensi unggulan yang tidak dapat dikembangkan (pertanian : kelapa sawit dan karet) karena permasalahan kekurangan SDM, tidak adanya pasar, dan akses terhadap modal yang rendah.
- Akses permodalan yang sangat rendah juga menyebabkan perkembangan koperasi stagnan, SDM Usaha Kecil dan Menengah (UKM) juga kurang memiliki keterampilan yang memadai.

e. *Kelembagaan pemerintahan dan pengawasan pembangunan*

Sesuai dengan arahan prioritas pembangunan nasional dan sejalan dengan kebutuhan pembangunan di wilayah Kabupaten Nias, maka kualitas lembaga pelaksana pembangunan harus ditingkatkan. Upaya penyempurnaan sistem

¹ Hasil Studi Pengembangan Ekonomi Nias, LDFFEUI dan BRR, Desember 2006

pengawasan internal dan eksternal dalam pelaksanaan pembangunan juga harus diteruskan, tentunya dengan memberikan landasan hukum yang memadai.

Tantangan

Adapun tantangan utama yang ditemui pasca kejadian gempa bumi 28 Maret 2005 adalah morbiditas beberapa penyakit menular, yang kemungkinan di masa mendatang akan meningkat. Faktor lingkungan dan sanitasi lingkungan perumahan yang belum terpelihara adalah sebab utamanya. Selain itu, sektor infrastruktur juga perlu mendapat perhatian yang cukup, karena kondisi yang kurang memadai sudah terjadi sebelum gempa bumi. Pembangunan sektor infrastruktur erat kaitannya dengan percepatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Nias.

Kabupaten Nias Selatan

Berikut beberapa permasalahan utama dalam pembangunan jangka menengah yang terdapat di Kabupaten Nias Selatan:

a. Infrastruktur

Kabupaten Nias Selatan memiliki 212 desa, dimana 60 % dari desa tersebut belum dilalui kendaraan roda empat dan roda dua atau pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan serta sarana dan prasarana yang mendukung pertumbuhan ekonomi belum terlaksana dengan baik. Hal ini berakibat pada kurang berkembangnya sentra-sentra produksi di wilayah ini. Selain itu, minimnya infrastruktur juga menyebabkan desa-desa tertinggal, terisolir, dan termiskin masih dominan didapati di 8 Kecamatan, Kabupaten Nias Selatan.

b. Sumber daya alam dan lingkungan hidup

Walaupun padi merupakan jenis tanaman pangan yang paling banyak dibudidayakan oleh masyarakat di Kabupaten Nias Selatan, tingkat perkembangan tanaman ini masih rendah. Hal itu tercermin dari relatif rendahnya tingkat produktivitas pada sektor ini. Sebagaimana pengelolaan jenis tanaman lainnya, pengelolaan pertanian padi di kabupaten ini masih sangat tradisional. Akibatnya, tingkat produksi dan produktivitas yang dihasilkan masih relatif rendah dan belum bisa mencapai hasil yang maksimal. Akibatnya, Kabupaten Nias Selatan, sama halnya dengan Kabupaten Nias, belum mampu untuk mencukupi kebutuhan pangan untuk daerahnya sendiri (swasembada).

c. Sumber daya manusia

Kabupaten Nias Selatan merupakan kabupaten termiskin di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2004. Menurut data BPS tahun 2004, terdapat sekitar 90 ribu penduduk (atau lebih dari 32% dari total penduduk) yang hidup di bawah garis kemiskinan Rp 213.29 per kapita/bulan. Hal ini diperparah dengan kemampuan masyarakat yang rendah dalam mengembangkan ekonomi skala lokal.

Sementara itu, dalam bidang pemerintahan, penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat pada kenyataannya masih belum optimal karena kualitas sumber daya manusia aparatur dan ketersediaan sarana/prasarana pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan masih belum memadai. Keadaan ini dimungkinkan karena Kabupaten Nias Selatan merupakan kabupaten pemekaran.

d. Perekonomian

Hingga tahun 2004, Kabupaten Nias Selatan masih tergolong dalam salah satu Kabupaten yang memiliki PDRB per kapita terendah di Provinsi Sumatra Utara.

Pada tahun tersebut, secara nominal, PDRB per kapita Kabupaten Selatan hanya sebesar 4,70 juta rupiah dan nilai tersebut lebih rendah dari rata-rata PDRB per kapita kabupaten/kota di Provinsi Sumatra Utara yang sebesar 7,73 juta rupiah (BPS, 2004). Lebih lanjut, kontribusi PDRB Kabupaten Nias Selatan terhadap total PDRB Provinsi Sumatra Utara juga sangat rendah. Di tahun 2004, misalnya, dari 114,65 triliun total PDRB Provinsi Sumatra Utara, Kabupaten Nias Selatan hanya menyumbang sekitar 1,25 persen.²

Sama seperti halnya di Kabupaten Nias, permasalahan lain yang ada di wilayah Nias Selatan adalah potensi pertanian yang kurang optimal dikembangkan. Hal ini disebabkan oleh akses pasar dan akses ke permodalan yang rendah, di samping kualitas SDM yang kurang memadai.

e. *Kelembagaan pemerintahan dan pengawasan pembangunan*

Kabupaten Nias Selatan sebagai Kabupaten Pemekaran baru belum memiliki perangkat peraturan daerah yang cukup memadai sebagai pedoman dan dasar hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Nilai-nilai luhur yang dianut masyarakat Kabupaten Nias Selatan dalam semboyan *Lakhōmi Sebua Wahasaradōdō* serta nilai-nilai perjuangan pemekaran Kabupaten Nias Selatan diharapkan menjadi dasar moral pembentukan produk-produk hukum dalam bentuk Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan. Peraturan Daerah yang lahir dari pemikiran Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan bersama dengan masyarakat melalui Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Nias Selatan, diharapkan dapat menjawab kebutuhan pelaksanaan Pembangunan Kabupaten Nias Selatan.

Tantangan

Meski demikian, wilayah Kabupaten Nias Selatan dengan 104 pulau dan lautan yang luas juga memiliki beberapa tantangan. Wilayah Nias Selatan memiliki banyak kawasan terumbu karang, namun akibat penangkapan ikan dengan menggunakan bom, racun sianida, dan pukuk harimau mengakibatkan kerusakan terumbu karang pada wilayah ini. Padahal bila dikelola dengan baik, kawasan terumbu karang ini dapat menjadi objek wisata yang sangat menarik dan menguntungkan daerah di sisi lain.

Pada sektor pertanian, masih banyak lahan pertanian yang belum diusahakan dengan berbagai komoditi unggulan seperti padi sawah, padai ladang, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, kacang panjang, ubi jalar, ubi kayu, pisang, serta berbagai jenis sayuran (hortikultura). Sektor peternakan umumnya dibudidayakan oleh masyarakat di seluruh wilayah dengan jenis ternak antara lain sapi, kambing, babi, kuda, ayam, dan sejenis unggas lainnya.

Tantangan di bidang pariwisata yaitu, potensi wisata yang dimiliki oleh Kabupaten Nias belum sepenuhnya dikembangkan secara optimal. Sebagai contoh, salah satu permasalahan yang terdapat di Pusat Kawasan Pembangunan Moale yaitu objek wisata dengan pantai indah pasir putih sepanjang 25 km pantai, ternyata belum memiliki akses jalan menuju tempat tersebut.

² Hasil Studi Pengembangan Ekonomi Nias, LDPEUI dan BRR, Desember 2006

VI.2 Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara

Kebijakan membangun NAD-Nias lebih baik dari sebelum tsunami (*to build back better*) meliputi: (1) pembangunan kembali masyarakat, (2) pembangunan kembali ekonomi, (3) pembangunan kembali infrastruktur, perumahan, dan permukiman, serta (5) pembangunan kembali pemerintahan, seperti yang tercantum dalam Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias. Terkait dengan proses pembangunan selanjutnya pasca masa tugas BRR pada bulan April 2009, maka program-program pembangunan jangka menengah baik di Provinsi NAD maupun Kepulauan Nias mengacu pada kebijakan yang tertuang dalam RPJMD masing-masing daerah.

Nanggroe Aceh Darussalam

Visi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah No.21 Tahun 2007 adalah:

“Terwujudnya perubahan yang fundamental di Aceh dalam segala sektor kehidupan masyarakat Aceh dan pemerintahan, yang menjunjung tinggi asas transparansi dan akuntabilitas bagi terbentuknya suatu pemerintahan Aceh yang bebas dari praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, sehingga pada tahun 2012 Aceh akan tumbuh menjadi negeri makmur yang berkeadilan dan adil dalam kemakmuran.”

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan **misi** pembangunan jangka menengah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang meliputi aspek-aspek : (1) Kepemimpinan yang aspiratif, inovatif, dan intuitif; (2) Aparatur pemerintah yang bersih, kompeten dan berwibawa, bebas dari korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan; (3) Penegakan hukum; (4) Pengembangan sumberdaya manusia; (5) Perekonomian; (6) Politik, (7) Sumber daya alam; dan (8) Adat istiadat, kebudayaan, dan olahraga.

Berdasarkan UU No 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Arah **kebijakan umum** pemerintah Provinsi NAD selama jangka waktu tahun 2007-2012 adalah sebagai berikut :

Arah kebijakan pembangunan di **bidang pemerintahan, politik, dan hukum** adalah: (1) Menciptakan dan meningkatkan aparatur pemerintah yang bersih, profesional, dan Islami; (2) Melakukan upaya pro-aktif memfasilitasi penyelesaian masalah tata ruang dan penataan batas wilayah administrasi bagi kabupaten/kota pemekaran; (3) Melakukan pemetaan dan pemberian nama-nama pulau kecil dan terluar; (4) Melaksanakan pendidikan politik yang sehat; (5) Merevitalisasi fungsi partai politik; dan (6) Melakukan pemetaan/inventarisir kebijakan daerah kabupaten/kota yang bertentangan dengan kepentingan umum dan ketentuan perundang-undangan lebih tinggi.

Arah kebijakan pembangunan di **bidang ekonomi** adalah: (1) Meningkatkan kesempatan kerja, peluang usaha serta kapasitas Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKM) ; (2) Mendorong pengembangan kluster-kluster industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan; (3) Meningkatkan lalu lintas perdagangan dan ekspor non migas melalui perluasan jaringan pasar regional, nasional dan internasional; (4)

Penyederhanaan prosedur perizinan usaha; dan (5) melindungi aset daerah dan masyarakat dari resiko bencana.

Arah kebijakan pembangunan di **bidang infrastruktur** adalah: (1) Penyelenggaraan konservasi dan pendayagunaan sumber daya air; (2) Meningkatkan aksesibilitas daerah terpencil/terisolir, perbatasan dan kepulauan; (3) rehabilitasi rumah korban bencana/dhuafa; (4) Meningkatkan keterpaduan tata ruang provinsi dengan tata ruang kabupaten/kota; (5) Mengendalikan pencemaran lingkungan; (6) Meningkatkan kualitas pelayanan dan administrasi pertanahan; dan (7) Pengamanan hutan secara intensif.

Arah kebijakan pembangunan di **bidang pendidikan** difokuskan pada empat aspek, yaitu: (a) Pemerataan dan perluasan akses; (b) Peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing lulusan; (c) Peningkatan tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan publik; dan (d) Pengembangan sistem pendidikan yang bernuansa Islami.

Arah kebijakan pembangunan di **bidang kesehatan** adalah: (1) Pembangunan dan pengembangan fasilitas pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan pelayanan kesehatan khusus; (2) Pengembangan tenaga kesehatan; (3) Pencegahan dan pengendalian penyakit serta kesehatan lingkungan termasuk kesiap-siagaan terhadap bencana; dan (4) Pengembangan fasilitas pendidikan kesehatan dan kedokteran.

Arah kebijakan pembangunan di **bidang agama, sosial, dan budaya** adalah: (1) Menyediakan sarana dan prasarana keagamaan yang memadai; (2) Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman serta kesadaran masyarakat tentang Syari'at Islam; (3) Mempersiapkan Qanun pelaksanaan Syariat Islam; (4) Memperbaiki dan menyempurnakan data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial; (5) Meningkatkan kesejahteraan para penyandang cacat dan komunitas dhu'afa; (6) Meningkatkan peran lembaga kemanusiaan dalam penanggulangan bencana; (7) Meningkatkan peran perempuan dalam proses politik dan jabatan publik; (8) Mewujudkan keterpaduan program pembinaan kepemudaan; dan (9) melaksanakan program dan kegiatan untuk pengembangan nilai seni budaya.

Kabupaten Nias

Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten yang dicantumkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nias 2006-2011 adalah : **'Mewujudkan Nias Baru yang Maju, Beriman, Mandiri dan Sejahtera'**. Sedangkan visi dan misi Rehabilitasi dan Rekonstruksi wilayah Kabupaten Nias adalah : **"Membangun Nias Lebih Baik"**.

Berdasarkan visi misi tersebut, maka ditetapkan arah kebijakan pokok (*Grand Policies*) Kabupaten Nias 2006-2011 yang meliputi :

1. Meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai sumber tertinggi dalam penataan kehidupan berbangsa, bernegara, berpemerintahan dan bermasyarakat
2. Mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel guna mewujudkan kehidupan berpemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*) melalui kebijakan, sikap, tindakan dan perilaku pemerintahan.
3. Mendorong penegakan hukum secara konsisten, meningkatkan rasa aman dan nyaman masyarakat serta pemberantasan KKN.

4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang profesional, cerdas, terampil, kreatif dan inovatif, memiliki etos kerja serta mampu berkompetensi dalam ilmu pengetahuan, informasi dan teknologi melalui pendidikan formal dan informal.
5. Membangun fondasi perekonomian daerah melalui akselerasi penguatan ekonomi kerakyatan yang berbasis sumber daya lokal melalui sarana dan prasarana/infrastruktur daerah.
6. Mewujudkan kualitas pelayanan pemerintahan yang efektif dan efisien melalui penataan organisasi perangkat daerah, pembenahan manajemen kepegawaian dan pembinaan aparatur dengan mengoptimalkan keberadaan pemerintah sebagai pelayan dan masyarakat sebagai pihak yang dilayani.
7. Membina hubungan kerjasama dan kemitraan yang baik dengan berbagai pihak termasuk lembaga legislatif, lembaga-lembaga pemerintahan dan organisasi kemasyarakatan (lokal, regional, nasional) dan NGO-NGO, dunia usaha dan institusi lainnya guna menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif bagi pertumbuhan perekonomian masyarakat.
8. Mendorong percepatan kemandirian masyarakat melalui pemberdayaan partisipasi aktif masyarakat dalam kehidupan berpemerintahan, bermasyarakat dan berdemokrasi.
9. Mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu pilar kemandirian daerah guna mewujudkan otonomi daerah yang nyata dan bertanggungjawab.
10. Meningkatkan rasa keadilan, kesetaraan dan kebersamaan di tengah-tengah masyarakat dengan mewujudkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya.

Kabupaten Nias Selatan

Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Nias Selatan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nias Selatan 2006-2011 adalah : **"Mewujudkan masyarakat sejahtera lahir dan batin dalam Kabupaten Nias Selatan yang terus berkembang, maju, mantap dan mandiri".**

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan **misi** pembangunan jangka menengah Kabupaten Nias Selatan yang meliputi aspek-aspek : (1) Keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan YME; (2) Aparatur pemerintah yang profesional, produktif, dan transparan; (3) Persatuan dan kesatuan; (4) Keadilan pembangunan; (5) Pembangunan infrastruktur; (6) Pembangunan berbasis potensi unggulan, (7) Koordinasi, keterpaduan, dan keselarasan fungsi lembaga daerah; (8) Supremasi hukum; (9) Penciptaan situasi yang kondusif, (10) Peningkatan kualitas SDM; (11) Sistem ekonomi kerakyatan; (12) Otonomi daerah.

Dalam rangka mencapai visi dan misi tersebut, beberapa kebijakan pembangunan jangka menengah dirumuskan, sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nias Selatan 2006-2011 meliputi :

1. Membangun kesejahteraan rakyat, meningkatkan kualitas kehidupan beragama, dan ketahanan budaya
2. Mempercepat pemulihan ekonomi dan memperkuat landasan pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan yang berdasarkan sistem ekonomi kerakyatan
3. Peningkatan pembangunan daerah
4. Mewujudkan supremasi hukum dan pemerintahan yang baik
5. Mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa serta meningkatkan kehidupan demokrasi

VI.3 Rencana Pembangunan Jangka Menengah

VI.3.1 Rencana Pembangunan Jangka menengah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam tahun 2007-2012

A. Rencana Pembangunan Wilayah

Berdasarkan arahan yang tercantum dalam draft RTRW Provinsi NAD tahun 2007-2022, berikut akan diuraikan mengenai prinsip dasar Rencana Tata Ruang Wilayah di Provinsi NAD yang terkait dengan keberlanjutan pemulihan wilayah di Provinsi NAD, arahan kebijakan tata ruang, dan rencana struktur tata ruang wilayah.

Prinsip-prinsip dasar Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi NAD Tahun 2007-2022 menekankan pada pembangunan berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan prioritas pemulihan kegiatan ekonomi serta kawasan-kawasan yang mengalami kerusakan.

Kebijakan keruangan wilayah Provinsi NAD yang terkait dengan keberlanjutan pemulihan pasca rehabilitasi dan rekonstruksi yaitu perlunya kebijakan-kebijakan yang tegas untuk mencegah pemanfaatan daerah-daerah rawan bencana yang dimanfaatkan sebagai kawasan permukiman, pemulihan kondisi infrastruktur yang mengalami kerusakan akibat bencana, pengembangan infrastruktur dalam rangka pembentukan struktur ruang seperti yang diarahkan dan mengurangi kesenjangan wilayah antara wilayah Timur dengan wilayah Tengah dan Barat.

Arahan kebijakan tata ruang wilayah Provinsi NAD tahun 2007-2022 salah satunya mempertimbangkan posisi Provinsi NAD yang termasuk ke dalam kawasan kerja sama antar negara. Kerjasama regional maupun sub-regional merupakan kesempatan yang baik untuk mengembangkan kerjasama yang saling menguntungkan dalam bidang investasi. Kerjasama sub-regional menjadi sangat penting untuk memanfaatkan peluang ekonomi internasional dan memudahkan mencapai keberhasilan dalam persaingan yang ketat.

IMT-GT (*Indonesian-Malaysia-Thailand Growth Triangle*), merupakan bentuk kerjasama regional tiga negara di bagian Utara Indonesia. Kerjasama IMT-GT melibatkan empat negara bagian Semenanjung Malaysia Utara, lima Provinsi Thailand Selatan dan semula dua provinsi di Indonesia Bagian Barat kemudian menjadi lima semenjak tahun 2001. Adanya kerjasama kawasan tersebut, maka Provinsi NAD diharapkan menjadi salah satu gerbang. Untuk itu beberapa kebijakan telah ditempuh sebagai berikut:

1. Menetapkan Lhokseumawe sebagai pintu gerbang pengembangan perindustrian.
2. Menetapkan Aceh Barat sebagai pintu gerbang pengembangan pertanian.
3. Menetapkan Banda Aceh sebagai basis perindustrian dan perdagangan.
4. Menetapkan Sabang sebagai pusat kepariwisata.

Prinsip dan arahan kebijakan seperti yang telah diuraikan sebelumnya diwujudkan dalam **Rencana Struktur Tata Ruang Wilayah** Provinsi NAD tahun 2007-2022 yaitu :

- Pengembangan PKN (Pusat Kegiatan Nasional) dan PKN Kawasan
Mengembangkan Banda Aceh-Sabang sebagai PKN kawasan sesuai dengan kecenderungan integrasi yang terjadi. Implementasi PKN Kawasan yaitu pada distribusi sarana dan prasarana pendukung PKN. Pengembangan PKN di wilayah Bagian Timur Provinsi NAD (Lhokseumawe) yang berfungsi sebagai pendorong pertumbuhan wilayah Bagian Timur Provinsi NAD. Mengusulkan pengembangan PKN di wilayah Bagian Barat Provinsi NAD (Meulaboh) yang berfungsi sebagai pendorong percepatan pertumbuhan wilayah Bagian Barat Provinsi NAD.

- Pengembangan PKW (Pusat Kegiatan Wilayah)
Pengembangan Tapaktuan, Takengon dan Langsa sebagai PKW. Pengembangan PKW di wilayah Bagian Barat-Selatan, Bagian Tengah dan untuk wilayah Bagian Timur yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan pada kawasan-kawasan sekitarnya, terutama yang berada di dalam wilayah pelayanan masing-masing PKW.
- Pengembangan PKL (Pusat Kegiatan Lokal)
Pada setiap kabupaten perlu dikembangkan minimal satu kawasan perkotaan dengan fungsi sebagai PKL, yang menjadi pusat orientasi pelayanan bagi seluruh wilayah kabupaten yang bersangkutan, sesuai dengan hasil kesepakatan dalam dialog *stakeholders*.
- Pengembangan sarana transportasi yang berfungsi menghubungkan antar pusat PKN-PKW-PKL.
- Penyediaan sarana dan prasarana sesuai dengan struktur hirarki pusat pelayanan, termasuk prasarana dan sarana transportasi.

Struktur tata ruang Provinsi NAD ini memiliki beberapa pertimbangan sebagai berikut:

- Struktur tata ruang Provinsi NAD diupayakan untuk dapat membuka ketertinggalan sebagian besar wilayah NAD yang banyak termasuk dalam kategori wilayah tertinggal.
- Struktur tata ruang Provinsi NAD diupayakan untuk dapat membentuk struktur pelayanan yang lebih efisien serta meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan rakyat dengan mendayagunakan potensi yang dimiliki pada sektor pertanian, kelautan, pertambangan, pariwisata, dan sektor lainnya.
- RTRW Provinsi NAD hendaknya dapat mensinkronisasikan RTRW Kab/kota di wilayah Provinsi NAD.
- Pengintegrasian Rencana Jaringan Kereta Api yang disepakati Gubernur se-Sumatera ke dalam Rencana Struktur Tata Ruang Provinsi NAD.
- Pengembangan jaringan jalan yang melewati kawasan lindung (Taman Nasional, Hutan Lindung, Hutan Plasma Nutfah, Tahura, dan lainnya), dilakukan dengan lebih banyak meningkatkan jaringan jalan yang sudah ada dengan pengendalian pemanfaatan ruang yang sangat ketat.

Tabel VI. 1
Rencana Struktur Ruang Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

PROVINSI/ KAWASAN ANDALAN	KOTA DALAM KAWASAN			PELABUHAN	BANDAR UDARA
	PKN	PKW	PKL		
Kaw. Banda Aceh, dsk.	Banda Aceh - Sabang		Jantho	▪ Pelabuhan Sabang ▪ Pelabuhan Malahayati ▪ Pelabuhan Penyebrangan Balohan ▪ Pelabuhan Penyebrangan Ulee Lheue	▪ Bandara Sultan Iskandar Muda ▪ Bandara Maimun Saleh
			Sigli		
Kaw. Lhokseumawe, dsk.	Lhokseumawe	Langsa	Idi Rayeuk	▪ Pelabuhan Krueng Geukeuh ▪ Pelabuhan Kuala Langsa ▪ Pelabuhan Kuala Idi	▪ Bandara Malikul Saleh ▪ Bandara Rembele ▪ Bandara Point "A"
			Bireun		
			Blangkejeren		
			Karang Baru		
		Takengon	Simpang Tiga Redelong		
			Lhoksukon		
Kaw.	Meulaboh		Blang Pidie	▪ Pelabuhan	▪ Bandara Cut

PROVINSI/ KAWASAN ANDALAN	KOTA DALAM KAWASAN			PELABUHAN	BANDAR UDARA
	PKN	PKW	PKL		
Meulaboh, dsk.		Tapaktuan	Jeuram	Meulaboh	Nyak Dhien
			Calang	▪ Pelabuhan Tapaktuan	▪ Bandara Cut Ali
			Kutacane	▪ Pelabuhan Calang	▪ Bandara Kuala Batu
			Subulussalam	▪ Pelabuhan Sinabang	▪ Bandara Alas Leuser
			Sinabang	▪ Pelabuhan Singkil	▪ Bandara Lasikin
			Singkil	▪ Pelabuhan Penyebrangan Sinabang	▪ Bandara Hamzah Fansyuri
				▪ Pelabuhan Penyebrangan Meulaboh	
				▪ Pelabuhan Penyebrangan Labuhan Haji	

Sumber : draft RTRW Provinsi NAD 2007-2022

B.Rencana Pembangunan Sektoral

Program-program pembangunan Provinsi NAD yang tertuang dalam RPJMD tahun 2007-2012 terbagi ke dalam enam bidang : (1) Infrastruktur; (2) Pendidikan; (3) Kesehatan; (4) Agama, Sosial, Budaya; (5) Ekonomi; dan (6) Pemerintahan dan Hukum. Program ini diklasifikasikan ke dalam 5 bidang pemulihan dalam rehabilitasi dan rekonstruksi di NAD yaitu: (1) Perumahan, Permukiman, Tata Ruang, Pertanahan, dan Lingkungan Hidup; (2) Infrastruktur; (3) Sosial Budaya; (4) Perekonomian; dan (5) Kelembagaan dan Hukum pada tabel **VI.2** Hal ini ditujukan untuk melihat program-program pembangunan jangka menengah yang sejalan dengan bidang-bidang pemulihan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Tabel VI. 1
Klasifikasi Program Pembangunan Jangka Menengah Berdasarkan 5 Bidang Pemulihan Rehabilitasi - Rekonstruksi
dan Bidang Pembangunan RPJMD Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007-2012

5 Bidang Pemulihan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Provinsi NAD	Bidang Pembangunan RPJMD tahun 2007-2012	Program Jangka Menengah Tahun 2007-2012	Tahun Pelaksanaan					
			2007	2008	2009	2010	2011	2012
Perumahan, Permukiman, Tata Ruang, Pertanahan, dan Lingkungan Hidup	Infrastruktur	<i>Perumahan dan Permukiman</i> ▪ Penataan lingkungan permukiman penduduk perdesaan pada kawasan terisolir serta infrastruktur perdesaan ▪ Pengembangan Rumah Sehat Sederhana ▪ Pembangunan perumahan bagi masyarakat korban tsunami ▪ Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan ▪ Pembangunan saluran drainase dan gorong-gorong di areal permukiman ▪ Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan, air minum, dan air limbah ▪ Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	√	√	√	√	√	√
		<i>Tata Ruang</i> ▪ Penyusunan Revisi Perda RTRWP NAD ▪ Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi ▪ Revisi Rencana Tata ruang Wilayah Kabupaten/Kota	√ √	√	√	√ √	√ √	√
		<i>Lingkungan Hidup</i> ▪ Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur ▪ Pengendalian Pencemaran dan Perusakan lingkungan Hidup melalui Pemantauan Kualitas Lingkungan, Pengkajian Dampak Lingkungan, Koordinasi Penyusunan AMDAL. ▪ Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam.	√ √	√ √	√ √	√ √	√ √	√ √

5 Bidang Pemulihan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Provinsi NAD	Bidang Pembangunan RPJMD tahun 2007-2012	Program Jangka Menengah Tahun 2007-2012	Tahun Pelaksanaan					
			2007	2008	2009	2010	2011	2012
Infrastruktur		<i>Jalan dan jembatan</i> - Perencanaan dan pengawasan teknis jalan/jembatan di Provinsi NAD - Pembangunan jalan dan jembatan di Provinsi NAD - Rehabilitasi pemeliharaan jalan dan jembatan di Provinsi NAD - Penanganan jalan perkotaan di Provinsi NAD	√	√	√	√	√	√
		<i>Perhubungan Udara</i> Pembangunan sarana prasarana dan fasilitas perhubungan di antaranya pengembangan fasilitas keselamatan penerbangan di : Bandara SIM, Cut Nyak Dien-Meulaboh, T.Cut Ali-Tapaktuan, Lasikin-Sinabang, Leuser-Kutacane, Maimun Saleh-Sabang, Rembele-Takengon, Kuala batee- Blang Pidie		√	√	√	√	√
	Infrastruktur	<i>Perhubungan Laut</i> - Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan laut di : Pelabuhan Malahayati, Sabang, Meulaboh, Calang, Sinabang - Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Sungai, Danau & Penyeberangan melalui pembangunan pelabuhan penyeberangan lamteng, dermaga balohan, fasilitas dermaga Ulee Lheue, Meulaboh, Sinabang, dan Calang	√	√	√	√	√	√
		<i>Perhubungan Darat</i> - Pembangunan gedung terminal tipe A Banda Aceh - Peningkatan terminal Tipe C menjadi Tipe A di Meulaboh - Pembangunan Kantor Damri di Meulaboh - Pembangunan sarana prasarana pos dan stasiun telekomunikasi serta penyediaan radio dinas perhubungan		√ √ √	√			√ √
		<i>Energi dan Listrik</i> Pembinaan dan pengembangan bidang						
			√	√	√	√	√	√

5 Bidang Pemulihan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Provinsi NAD	Bidang Pembangunan RPJMD tahun 2007-2012	Program Jangka Menengah Tahun 2007-2012	Tahun Pelaksanaan					
			2007	2008	2009	2010	2011	2012
		ketenagalistrikan melalui pengembangan listrik perdesaan, pembangunan PLTMH, pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya						
		<i>Sumber Daya Air</i> ▪ Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya ▪ Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku ▪ Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya ▪ Pengendalian banjir pada daerah tangkapan sungai dan badan-badan sungai ▪ Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	√	√	√	√	√	√
		<i>Komunikasi dan informasi</i> ▪ Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi termasuk sumber dayanya ▪ Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat, melalui media pers	√	√	√	√	√	√
		▪ Program pendidikan anak usia dini melalui pengadaan alat praktek, dan pengembangan kurikulum ▪ Program pendidikan non formal ▪ Program manajemen pelayanan pendidikan melalui pelaksanaan evaluasi kinerja, peltihan, dan seminar	√	√	√	√	√	√
Sosial Budaya	Pendidikan	▪ Program pendidikan anak usia dini melalui pengadaan alat praktek, dan pengembangan kurikulum ▪ Program pendidikan non formal ▪ Program manajemen pelayanan pendidikan melalui pelaksanaan evaluasi kinerja, peltihan, dan seminar	√	√	√	√	√	√
		▪ Program Perbaikan Gizi Masyarakat mencakup penanggulangan Penanggulangan KEP, Anemia dan Gizi Besi. ▪ Program pengembangan lingkugan sehat ▪ Program peningkatan keselamatan Ibu melahirkan dan anak	√	√	√	√	√	√
		<i>Kependudukan</i> ▪ Program transmigrasi lokal ▪ Pembinaan penyiapan permukiman dan penempatan transmigrasi melalui pengembangan	√	√	√	√	√	√
	Agama, Sosial, Budaya							

5 Bidang Pemulihan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Provinsi NAD	Bidang Pembangunan RPJMD tahun 2007-2012	Program Jangka Menengah Tahun 2007-2012	Tahun Pelaksanaan					
			2007	2008	2009	2010	2011	2012
		wilayah tertinggal ▪ Pembinaan pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi	√	√				
		<i>Sosial</i> ▪ Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial ▪ Pembinaan Anak Terlantar ▪ Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma ▪ Pembinaan Panti Asuhan /Panti Jompo	√ √ √ √	√ √ √ √	√ √ √ √	√ √ √ √	√ √ √ √	√ √ √ √
		<i>Pemuda dan Olah Raga</i> ▪ Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan ▪ Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga ▪ Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	√ √ √	√ √ √	√ √ √	√ √ √	√ √ √	√ √ √
		<i>Perempuan dan Anak</i> ▪ Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak dengan memfasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2) ▪ Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dengan pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM Pelayanan dan Pendampingan Korban KDRT	√ √	√ √	√ √	√ √	√ √	√ √
		<i>Kelautan dan Perikanan</i> ▪ Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir melalui pembinaan kelompok ekonomi ▪ Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan melalui pemetaan dan rencana zonasi pengelolaan daerah Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) ▪ Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut dan Prakiraan Iklim Laut ▪ Pengembangan budidaya perikanan dengan bibit ikan unggul ▪ Pengembangan perikanan tangkap dengan memberikan alat bantu operasional	√ √ √	√ √ √	√ √ √	√ √ √	√ √ √	√ √ √
Perekonomian	Ekonomi							

5 Bidang Pemulihan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Provinsi NAD	Bidang Pembangunan RPJMD tahun 2007-2012	Program Jangka Menengah Tahun 2007-2012	Tahun Pelaksanaan					
			2007	2008	2009	2010	2011	2012
		- Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan - Pengembangan budidaya laut, air payau dan air tawar melalui identifikasi dan inventarisasi daya dukung lahan perikanan budidaya.		√	√	√	√	√
		<i>Koperasi dan UKM</i> - Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi - Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro dan Menengah	√ √	√ √	√ √	√ √	√ √	√ √
		<i>Perindustrian dan Perdagangan</i> - Peningkatan kerjasama perdagangan internasional melalui perluasan pasar serta promosi - Peningkatan ekspor dan IKM (Industri Kecil dan Menengah) - Pengembangan sentra industri potensial seperti makanan khas Aceh dan berbagai kerajinan	√ √	√ √	√ √	√ √	√ √	√ √
		<i>Pertanian</i> - Program peningkatan dan pemasaran hasil produksi pertanian melalui pembangunan terminal agribisnis dan pengembangan daerah agrowisata - Peningkatan penerapan teknologi pertanian	√ √	√ √	√ √	√ √	√ √	√ √
		<i>Ketahanan Pangan</i> Peningkatan kesejahteraan petani melalui kemampuan lembaga petani, penanganan daerah rawan pangan, dan pengembangan desa mandiri pangan	√	√	√	√	√	√
		<i>Peternakan</i> Pengembangan agribisnis, pengembangan ekonomi dan usaha peternakan	√	√	√	√	√	√
		<i>Kehutanan</i> Pengembangan hasil hutan non kayu, pengelolaan dan pemanfaatan hutan	√	√	√	√	√	√

5 Bidang Pemulihan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Provinsi NAD	Bidang Pembangunan RPJMD tahun 2007-2012	Program Jangka Menengah Tahun 2007-2012	Tahun Pelaksanaan					
			2007	2008	2009	2010	2011	2012
		• Pengembangan Industri dan Pemasaran Hasil Hutan • Restrukturisasi industri primer kehutanan • Pembinaan, pengendalian dan pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan • Pengembangan Pemanfaatan Wisata Alam • Pengembangan Mangrove Center • Pengelolaan Taman Nasional • Pengendalian kebakaran hutan • Pengelolaan DAS • Pengembangan Taman Hutan Raya Pocut Meurah Intan • Pengelolaan Kawasan lindung, Pengamanan dan Perlindungan Hutan dan Hasil Hutan • Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan	√	√	√	√	√	√
				√	√	√	√	√
				√	√	√	√	√
			√	√	√	√	√	√
			√	√	√	√	√	√
			√	√	√	√	√	√
			√	√	√	√	√	√
			√	√	√	√	√	√
			√	√	√	√	√	√
			√	√	√	√	√	√
			√	√	√	√	√	√
			√	√	√	√	√	√
			√	√	√	√	√	√
			√	√	√	√	√	√
			√	√	√	√	√	√
		<i>Pariwisata</i>						
		Pengembangan Pemasaran Pariwisata melalui:						
		✓ Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam pemasaran pariwisata	√	√	√	√	√	√
		✓ Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri	√	√	√	√	√	√
		✓ Pelatihan pemandu wisata terpadu	√	√	√	√	√	√
		Pengembangan Destinasi Pariwisata melalui:						
		✓ Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	√	√	√	√	√	√
		✓ Pembuatan Masterplan pengembangan kawasan wisata	√	√	√	√	√	√
		<i>Ketenagakerjaan</i>						
		▪ Pelatihan dan keterampilan tenaga kerja dengan membangun kemitraan dan program pelatihan sesuai dengan permintaan pasar kerja	√	√	√	√	√	√
		▪ Perluasan lapangan kerja	√	√	√	√	√	√

5 Bidang Pemulihan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Provinsi NAD	Bidang Pembangunan RPJMD tahun 2007-2012	Program Jangka Menengah Tahun 2007-2012	Tahun Pelaksanaan					
			2007	2008	2009	2010	2011	2012
Kelembagaan dan Hukum	Pemerintahan	▪ Peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur ▪ Pembangunan dan pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah						
	Hukum	Kesbang Linmas						
		▪ Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	√	√	√	√	√	√
		▪ Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam ▪ Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal.	√	√	√	√	√	√

Catatan:

- Uraian kegiatan di atas mencakup kegiatan di RPJMD NAD tahun 2007-2012 yang selaras dengan keberlanjutan pemulihan di wilayah NAD
- Kegiatan yang belum ada chekclistnya dari tahun 2007-2012 merupakan kegiatan yang tercantum dalam RPJMD namun belum ada alokasi pendanaanny

VI.1.1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Wilayah Kepulauan Nias tahun 2006-2011

A. Rencana Pembangunan Wilayah

Sesuai dengan rekomendasi penataan ruang Rencana Induk Rehabilitasi-Rekonstruksi Nias, identifikasi potensi bencana yang dalam rencana tata ruang dan poin-poin mitigasi bencana dalam UU Penanggulangan Bencana, maka prinsip-prinsip pengembangan wilayah Kepulauan Nias harus mengakomodasi manajemen penanggulangan bencana secara komprehensif, termasuk di dalamnya : pemetaan, pencegahan, peringatan dini, mitigasi, kesiapsiagaan, pemulihan dan rehabilitasi bencana.

Beberapa strategi penataan ruang wilayah Kepulauan Nias pasca bencana ³ adalah :

1. Mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah Nias sesuai dengan arahan rencana tata ruang dan Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD – Nias;
2. Membangun kembali wilayah, kota, kawasan dan lingkungan permukiman yang rusak akibat bencana gempa dan tsunami sehingga masyarakat dapat segera melakukan aktivitasnya dalam kondisi yang lebih baik dan aman dari sebelum bencana;
3. Penataan kembali wilayah Nias harus mengikuti kaidah-kaidah dan norma-norma perencanaan yang tepat dengan memasukkan aspek mitigasi terhadap bencana alam dalam rangka meminimalkan resiko dikemudian hari dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan dan implementasinya;
4. Pengembangan Nias diarahkan untuk menjaga keseimbangan, mendorong perkembangan dan pemerataan antar wilayah serta dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah, dengan memperhatikan aspek lokal terutama keterkaitannya dengan rawan bencana dengan kawasan konservasi dan penyangga yang berfungsi lindung;
5. Rencana pemanfaatan ruang Nias ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan

Berikut dijabarkan rencana pengembangan wilayah Kabupaten Nias dan Nias Selatan berdasarkan draft Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nias 2006-2016 dan draft Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nias Selatan 2004-2014.

Kabupaten Nias

Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) di Kabupaten Nias diarahkan untuk menjaga keseimbangan pertumbuhan dan pemerataan antar wilayah. Satu Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) di Kabupaten Nias juga diharapkan dapat mewakili masing-masing dari karakteristik wilayah maupun kultur sosial budaya yang ada, seperti Nias Utama, Nias Utara, dan Nias Barat. Dengan demikian maka Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) di Kabupaten Nias dapat dibedakan menjadi tiga SWP, yaitu :

1. Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) untuk kawasan Utara, yaitu meliputi seluruh kecamatan yang termasuk kedalam kawasan Nias bagian Utara. Pusat SWP yang ditetapkan pada kawasan ini adalah pusat-pusat permukiman yang selama ini sudah menjadi pusat pertumbuhan bagi wilayah utara tersebut, yaitu : Lahewa.

³ Berdasarkan draft RTRW Kabupaten Nias 2006 – 2016

2. Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) untuk kawasan Timur, yaitu meliputi seluruh kecamatan yang termasuk kedalam kawasan Nias bagian Timur atau sering disebut dengan Nias Utama atau Nias Induk. Pusat SWP yang ditetapkan pada kawasan ini adalah pusat-pusat permukiman yang selama ini sudah menjadi pusat pertumbuhan bagi wilayah Timur tersebut, yaitu : Gunungsitoli.
3. Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) untuk kawasan Barat, yaitu meliputi seluruh kecamatan yang termasuk kedalam kawasan Nias bagian Barat. Pusat SWP yang ditetapkan pada kawasan ini adalah pusat-pusat permukiman yang selama ini sudah menjadi pusat pertumbuhan bagi wilayah Barat, yaitu : Sirombu (Tetesua).

Berdasarkan pertimbangan diatas dan untuk mendukung pusat-pusat pertumbuhan yang telah ditetapkan, maka pembagian Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) di Kabupaten Nias, dapat ditetapkan sebagai berikut :

1. Satuan Wilayah Pembangunan I (SWP I) :

Dengan pusat pembangunan di **Lahewa**, meliputi : Kecamatan Lahewa, Lahewa Timur, Afulu, Alasa, Tuhemberua, Sawo, Sitolu Ori, Lotu dan Kecamatan Namohalu Esiwa.

Dalam pengembangan yang akan datang diharapkan peran dan fungsi wilayah ini sebagai:

- a. Kawasan kunjungan wisatawan, dimana kawasan ini mempunyai potensi wisata yang tergolong lengkap, wisata alam, wisata budaya dan wisata minat khusus (menyelam, selancar dll);
- b. Penyedia bahan baku dalam pengembangan agroindustri dan industri kecil;
- c. Kawasan budidaya perikanan dan produksi hasil tangkap laut;

2. Satuan Wilayah Pembangunan II (SWP II)

Dengan pusat pengembangan di **Gunungsitoli**, meliputi : Kecamatan Gunungsitoli, Kecamatan Gunungsitoli Utara, Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa, Kecamatan Gunungsitoli Selatan, Kecamatan Gunungsitoli Idanoi, Kecamatan Hiliduho, Kecamatan Alasa Talu Muzoi, Kecamatan Boto Muzoi, Kecamatan Hili Serangkai, Kecamatan Gido, Kecamatan Ma'u, Kecamatan Somolo-molo, Kecamatan Idanogawo, Kecamatan Ulu Gawo dan Kecamatan Bawolato.

Dalam pengembangan di masa yang akan datang, diharapkan dapat melakukan peran dan fungsi sebagai :

- a. Pusat Pelayanan Utama di Pulau Nias, yang meliputi pusat pelayanan jasa dan perdagangan, pendidikan, kesehatan permukiman dan transportasi;
- b. Kawasan budidaya pertanian tanaman pangan;
- c. Kawasan pengumpul hasil pertanian dan perkebunan dari daerah belakangnya kemudian didistribusikan ke daerah lain dengan memanfaatkan potensi pelabuhan laut di Gunungsitoli.
- d. Kawasan penyalur kebutuhan primer, sekunder maupun penyediaan fasilitas bagi SWP lainnya.

3. Satuan Wilayah Pembangunan III (SWP III)

Dengan pusat pengembangan **Tetesua** (Kecamatan Sirombu), meliputi : Kecamatan Sirombu, Kecamatan Lahomi, Kecamatan Moi, Kecamatan Mandrehe, Mandrehe Utara, Mandrehe Barat, Kecamatan Moro'o, Kecamatan Ulu Moro'o.

Dalam pengembangannya di masa yang akan datang dapat berperan sebagai:

- a. Pemasok bahan baku untuk kegiatan agroindustri, terutama bahan baku karet, coklat dan kelapa;
- b. Kawasan budidaya perikanan dan produksi hasil tangkap laut;
- c. Kawasan budidaya pertanian tanaman pangan;
- d. Penggerak pembangunan untuk wilayah Kabupaten Nias bagian barat;

Dalam kaitannya dengan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa dan tsunami, arahan pengembangan wilayah di Kepulauan Nias (Kabupaten Nias dan Nias Selatan) juga selayaknya mengakomodir rekomendasi penataan ruang yang tertulis dalam Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias. Secara umum, Rencana Induk berfokus kepada arah pengembangan wilayah untuk mengantisipasi terjadinya *tsunami*. Beberapa penyesuaian dalam *draft* RTRW Kabupaten Nias 2006-2016 yang harus dilakukan sesuai dengan masukan Rencana Induk adalah:

1. Pengembangan SWP utara dengan pusat Kecamatan Lahewa diarahkan ke tenggara pada ketinggian di atas 20 m dpl. Kawasan pantai dikembangkan sebagai kawasan perkebunan dan nelayan dengan di dalamnya terdapat permukiman desa terbatas.
2. Pengembangan SWP barat dengan pusat Kecamatan Sirombu diarahkan ke dalam, di atas ketinggian 20 m dpl. Kawasan pantai diarahkan sebagai kawasan pariwisata pantai, pertanian lahan basah, dan perkebunan yang di dalamnya terdapat permukiman desa terbatas (yang dipersyaratkan disertai ketentuan-ketentuan teknis, misalnya: bangunan tahan gempa atau rumah panggung disertai escape road dan escape hill). Dan apabila masih bisa dikembangkan sebagai kegiatan pariwisata maka perlu dilakukan suatu tindakan khusus dengan memperhatikan aspek mitigasi bencana dan *early warning system*.

Kabupaten Nias Selatan

Mengacu pada draft Rencana Tata Ruang Tata Wilayah Kabupaten Nias Selatan 2004-2014, disebutkan bahwa tujuan pembangunan jangka panjang Kabupaten Nias Selatan adalah mewujudkan konsep pembangunan *Segitiga Emas Kanise* (bagian dari pengembangan pantai barat Sumatera), yang juga merupakan bagian dari pembangunan Provinsi Sumatera Utara. Pertimbangan di dalam menentukan struktur ruang yang dituju adalah:

1. Sejarah pengembangan Nias Selatan dan aksesibilitas menuju pusat-pusat pelayanan dan pertumbuhan dari wilayah pengaruhnya.
2. Jumlah penduduk yang mendiami wilayah sekitar Pusat Pengembangan tersebut.
3. Pemerataan pusat-pusat pelayanan secara berjenjang, mengingat bentuk Kabupaten Nias Selatan yang memiliki jumlah kepulauan sebanyak 104 buah pulau. Dari sebanyak pulau tersebut, 40 % di antaranya belum berpenghuni dan banyak pula di antaranya yang belum memiliki nama.
4. Pembagian Pusat Pengembangan tersebut harus ditunjang dengan pola jaringan jalan yang baik.

Struktur tata ruang Kabupaten Nias Selatan direncanakan dibagi menjadi 3 (tiga) Satuan Wilayah Pembangunan (SWP), yaitu:

1. Satuan Wilayah Pembangunan (SWP – **Telukdalam**)
Berpusat di Telukdalam dengan wilayah Kecamatan Telukdalam.
2. Satuan Wilayah Pembangunan (SWP – **Boronadu**)
Berpusat di Boronadu yang meliputi Kecamatan Gomo, Kecamatan Lolomatua, Kecamatan Lahusa, Kecamatan Pulau-pulau Batu dan Kecamatan Hibala.
3. Satuan Wilayah Pembangunan (SWP – **Moale**)
Berpusat di Moale dengan wilayah Kecamatan Lolowau dan Kecamatan Amandaraya.

Penyesuaian dalam *draft* RTRW Kabupaten Nias Selatan 2004-2014 yang harus dilakukan berdasarkan rekomendasi Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias adalah:

1. SWP-Telukdalam dengan pusat Kecamatan Telukdalam dikembangkan ke arah utara pada ketinggian 20 m dpl. Kawasan pantai dikembangkan sebagai kawasan perkebunan dan nelayan dengan di dalamnya terdapat permukiman desa terbatas.
2. Sementara itu, mengikuti perkembangan wilayah pantai barat Kepulauan Nias, perlu juga diperhatikan arah pengembangan SWP-Moale yang terletak di sebelah barat. Pengembangan ke arah timur ditambah dengan pertimbangan aspek mitigasi bencana dan *early warning system* dalam pengembangan kawasan wisata.

B. Rencana Pengembangan Sektor

Kabupaten Nias

Rata-rata pertumbuhan penduduk Kabupaten Nias hingga tahun 2011 diproyeksikan sebesar 1,8% per tahun dengan jumlah hampir mencapai 500.000 jiwa pada tahun 2011. Perlu perbaikan pola pemberdayaan masyarakat dengan ditunjang pengalokasian dana yang cukup besar untuk mencapai target disparitas kemiskinan di angka 10% pada akhir tahun 2011 dan angka beban tanggungan keluarga yang menurun menjadi 50%. Rata-rata pertumbuhan sektor PDRB atas dasar harga berlaku untuk sektor-sektor unggulan hingga tahun 2011 antara lain : Pertanian (5,62%), Perdagangan, hotel dan restoran (25%), dan Jasa-jasa (20%).

Sumber pendapatan daerah dalam kurun waktu 2003-2004 masih didominasi oleh Dana Alokasi Umum (DAU). Sementara itu, beberapa komponen penerimaan daerah pada periode anggaran 2001-2004 yang dapat diidentifikasi adalah : sisa lebih perhitungan tahun anggaran yang lalu, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan lain-lain penerimaan yang sah. Kebijakan umum anggaran Kabupaten Nias secara lengkap dapat dilihat pada tabel **VI.3**.

Tabel VI. 3
Kebijakan Umum Anggaran Kabupaten Nias 2006-2011

No.	Uraian Kebijakan	Program	Indikasi	Tahun Pelaksanaan					
				2006	2007	2008	2009	2010	2011
I	ARAH DAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN PENDAPATAN								
I.1.	Mendorong tumbuhkembangnya perekonomian daerah sehingga potensi-potensi sumber penerimaan daerah akan terbuka	a. Pemenuhan prasarana dasar perekonomian yang menunjang PAD b. Peningkatan jaminan keamanan berusaha c. Penerapan pemberian izin usaha yang mudah	a. Tersedianya pasar, TPI, dan jalan yang memadai b. Terhapusnya pungli c. Tertingkatkan ketertiban d. Terciptanya pemberian izin satu atap, biaya rendah dan informasi yang pasti	√	√	√	√	√	
I.2.	Mengoptimalkan realisasi pemungutan PAD melalui peningkatan efektifitas dan efisiensi serta peningkatan pelayanan	a. Pembinaan aparaturnya b. Peningkatan sistem informasi c. Memperluas jangkauan pelayanan d. Penataan birokrasi pemungutan	a. Terbinanya aparaturnya pemungut PAD dan pajak lainnya b. Tersedianya informasi yang lengkap dan benar serta cepat c. Bertambahnya jumlah personil pemungut	√	√	√	√	√	
I.3.	Menggali sumber-sumber penerimaan baru yang potensial dengan tetap menjaga kelangsungan usaha masyarakat dan kondisi untuk tumbuh dan berkembangnya perekonomian daerah	a. Pengkajian potensi dan peluang sumber PAD baru	a. Tersajinya data potensi serta peluang sumber-sumber PAD yang baru yang potensial dan layak dilakukan	√	√	√	√		
I.4.	Mempercepat terbitnya regulasi yang baru sehingga sumber-sumber penerimaan yang baru dapat dilaksanakan	a. Penyusunan naskah akademis Perda b. Penetapan Perda	a. Tersusunnya naskah akademis Perda tentang pemungutan retribusi sumber PAD yang baru b. Ditetapkannya perda tentang pemungutan retribusi sumber PAD yang baru	√	√				
I.5.	Menerbitkan regulasi yang baru untuk membentuk BUMD khususnya bidang usaha yang potensial dalam meningkatkan penerimaan daerah sekaligus memberikan pelayanan kepada masyarakat	a. Pengkajian potensi dan peluang pendirian BUMD dan atau kemitraan dengan pihak swasta b. Studi kelayakan teknis, ekonomis dan finansial BUMD yang akan didirikan c. Penyusunan Naskah	a. Terbentuknya badan hukum BUMD yang mampu meningkatkan PAD sekaligus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat	√	√				

No.	Uraian Kebijakan	Program	Indikasi	Tahun Pelaksanaan					
				2006	2007	2008	2009	2010	2011
		Akademis Perda pendirian BUMD d. Penetapan Perda pendirian BUMD							
I.6.	Tidak melakukan pinjaman kepada pihak lain baik melalui penerbitan obligasi maupun pinjaman lainnya	a. Peningkatan sistem akuntansi keuangan daerah b. Analisis kemampuan pinjaman daerah c. Mengoptimalkan pengawasan pengelolaan keuangan daerah	a. Terciptanya kondisi pengelolaan keuangan daerah yang baik, sehingga layak melakukan pinjaman pada jangka menengah berikutnya			√	√	√	
II KEBIJAKAN PENGELOLAAN BELANJA DAERAH									
II.1.	Peningkatan alokasi anggaran belanja publik secara perlahan	a. Pengalokasian anggaran belanja yang minimal terhadap belanja operasional aparatur di setiap instansi b. Menghindari pengalokasian anggaran yang terlalu besar pada pos-pos bantuan kepada instansi vertikal	a. Pada tahun 2010 proporsi belanja publik mencapai 50%		√	√	√	√	√
II.2.	Pengalokasian anggaran yang proporsional pada satuan perangkat kerja daerah sehingga sisa perhitungan anggaran akibat tidak terlaksananya kegiatan dapat diperkecil	a. Reorganisasi satuan kerja perangkat daerah termasuk fungsi, tanggung jawab dan penempatan sumber daya b. Menghindari penumpukan belanja pada salah satu sektor c. Mengupayakan waktu penetapan APBD sesuai ketentuan	a. Menurunnya pendapatan dari pos sisa perhitungan		√	√	√	√	√
II.3.	Pengalokasian anggaran baik dalam bentuk penyertaan modal maupun dana cadangan untuk membentuk BUMD pada bidang usaha yang dapat meningkatkan penerimaan daerah sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat	a. Pembentukan dana cadangan dan atau dana penyertaan modal	a. Tersedianya dana yang mencukupi untuk mengoperasikan BUMD	√	√	√	√	√	

No.	Uraian Kebijakan	Program	Indikasi	Tahun Pelaksanaan					
				2006	2007	2008	2009	2010	2011
II.4.	Menghindari penyertaan modal pada usaha yang tidak memberikan keuntungan kepada daerah	a. Meninjau kembali penyertaan modal yang selama ini dilakukan namun tidak pernah memberikan tambahan pendapatan b. Menghentikan penyertaan modal pada bidang usaha yang tidak sehat c. Menarik kembali penyertaan modal yang selama ini telah dilakukan	a. Adanya PAD dari upaya penyertaan modal yang dilakukan minimal sebesar tingkat suku bunga yang terjadi	√	√	√	√	√	
II.5.	Memperbesar pengalokasian anggaran untuk pemberdayaan masyarakat miskin melalui pola pendampingan sehingga disparitas wilayah dapat diperkecil	a. Meneta(kan persentase minimal belanja publik untuk kegiatan pemberdayaan dan pendampingan di wilayah termiskin sebelum penyusunan APBD	a. Terlaksananya pemberdayaan masyarakat melalui sistem pendampingan di wilayah termiskin		√	√	√	√	

Sumber : RPJMD Kabupaten Nias 2006-2011

Program pembangunan daerah Kabupaten Nias untuk jangka waktu 2006-2011 terbagi atas tiga bagian:

1. Program sektoral/program SKPD

Program sektoral terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, sebagaimana diamanatkan dalam UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. Adapun urusan wajib meliputi: pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, penataan ruang, perencanaan pembangunan, perhubungan, lingkungan hidup, pertanahan, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan, keluarga bencana dan keluarga sejahtera, sosial, tenaga kerja, koperasi dan usaha kecil menengah [KUKM], penanaman modal daerah, kebudayaan, pemuda dan olahraga, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, pemerintahan umum, kepegawaian, pemberdayaan masyarakat dan desa, statistik, kearsipan dan komunikasi dan informatika.

Sementara urusan pilihan meliputi: pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, pariwisata, kelautan dan perikanan, perdagangan, perindustrian dan transmigrasi.

Pada perekonomian daerah Kabupaten Nias, sebagaimana diuraikan dalam komposisi PDRB di atas, terdapat dua sektor lapangan usaha yang cukup potensial dan memberi andil besar dalam pembentukan total PDRB Kabupaten Nias. Kedua sektor tersebut adalah sektor pertanian/perikanan dan sektor perdagangan, hotel dan restoran. Prioritas terhadap kedua sektor ini penting bukan hanya karena peranan yang signifikan yang diberikan oleh kedua sektor tersebut terhadap pembentukan PDRB Nias, tapi juga pentingnya peranan sektor tersebut dalam penyediaan lapangan kerja (atau besarnya jumlah penduduk Nias yang bekerja pada kedua sektor tersebut).

Adapun prioritas strategi pembangunan ekonomi sektoral untuk pertanian, peternakan dan perkebunan dibagi per wilayah di Kabupaten Nias⁴ dapat dilihat pada tabel VI.4 berikut ini.

Tabel VI. 4
Prioritas Strategi Pembangunan Ekonomi Sektoral
(Komoditas dan Sentra Unggulan) di Kabupaten Nias

Sektor	Komoditas	Sentra Daerah Potensial
Pertanian	Beras	Tuhemberua, Gido, Idano Gawo, Alasa, Mandrehe, Sirombu
	Karet	Alasa, Mandrehe, Tuhemberua, Lolofitu Moi, Gunungsitoli
	Kelapa/Kopra	Namohalu Esiwa, Lahewa, Gunungsitoli, Lotu, Idano, Gawo
	Kakao	Alasa, Lahewa
Peternakan	Babi	Gunungsitoli, Idano Gawo, Gido, Tuhemberua;
	Ayam	Gunungsitoli, Gido, Tuhemberua, Mandrehe, Lotu;
	Telur	Gunungsitoli, Mandrehe, Gido
Perikanan	Ikan	Tuhemberua, Lahewa, Gunungsitoli;
	Garam	Gunungsitoli

Sumber: Studi Pengembangan Ekonomi Nias, LDFEUI-BRR 2006

Secara umum potensi pariwisata Nias dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu: pariwisata alam dan pariwisata budaya atau peninggalan sejarah. Di pariwisata alam, Kabupaten Nias memiliki banyak potensi objek wisata seperti Air Terjun Lahandoi di Kecamatan Alasa yang merupakan obyek wisata yang masih alami. Dari sisi pariwisata budaya, di Kabupaten Nias, wisata budaya dan peninggalan sejarah seperti *Batu Megalit* di desa Lolofitu Kecamatan Lolofitu Moi dan rumah-rumah adat tradisional serta kesenian tradisional seperti atraksi tari perang dan tarian

maena juga merupakan kekayaan budaya dan peninggalan sejarah yang dapat di tawarkan untuk wisata budaya.

Untuk mengembangkan wisata budaya terdapat beberapa program yang dapat dilakukan. Program-program tersebut dibagi ke dalam jangka waktu pelaksanaan, yaitu (*Kesimpulan "Stakeholders Meeting on Nias Cultural Heritage Development", Sumatera Utara, 25 Mei 2007*):

- a. Jangka Pendek: Memulai Pemetaan Budaya
 - Memulai kegiatan pemetaan budaya di Kecamatan Telukdalam;
 - Memasukkan Nias ke dalam daftar sementara Indonesia untuk diajukan sebagai Warisan Dunia.
 - b. Jangka Menengah: Membangun/mengembangkan Sumberdaya Warisan
 - Memperluas kegiatan pemetaan budaya ke seluruh wilayah Nias Selatan;
 - Pelestarian dan pengembangan sumber daya alam;
 - Pelestarian dan pengembangan sumber daya warisan budaya;
 - Pengembangan sumber daya manusia/masyarakat setempat;
 - Mendirikan sebuah pusat pusaka budaya dan informasi pariwisata;
 - Membangun infrastruktur pariwisata;
 - Mengembangkan program dukungan terhadap pariwisata budaya;
 - Menominasikan Nias untuk didaftarkan dalam daftar Warisan Budaya Dunia UNESCO.
 - c. Jangka Panjang: Menerapkan Rencana Pembangunan Pariwisata
 - Memperluas pemetaan budaya ke seluruh Nias;
 - Memantapkan rencana pengembangan pariwisata budaya Nias;
 - Mengintegrasikan proses nominasi sebagai Warisan Dunia ke dalam rencana manajemen pariwisata.
2. **Program lintas sektoral**, yang meliputi:
- a. Program pemantapan ketahanan pangan dan penanggulangan kemiskinan
 - b. Program pembukaan daerah terisolir
 - c. Program peningkatan dan pengawasan kinerja aparatur
 - d. Program pengendalian penduduk
3. **Program kewilayahan**, merupakan program yang harus dikerjasamakan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi atau dengan instansi vertikal di daerah meliputi:
- a. Program pencegahan penyebaran flu burung dan penyakit menular yang sangat berbahaya
 - b. Program pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba dan zat aditif
 - c. Program pengembangan agrobisnis wilayah pesisir dan kepulauan
 - d. Program pengawasan dan pengamanan perairan dan pulau-pulau terluar
 - e. Program pertukaran pemuda dan pelajar antar kabupaten/kota

Kabupaten Nias Selatan

Program-program pembangunan Kabupaten Nias Selatan 2006-2011 terbagi ke dalam sembilan bidang: pembangunan wilayah, infrastruktur, ekonomi, pemerintahan, hukum dan politik, sumber daya manusia, kemasyarakatan dan kebudayaan, agama, sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Pada Tabel VI.5 disajikan secara terperinci mengenai sektor/komoditas unggulan di Kabupaten Nias Selatan dan sentra-sentra daerah unggulan yang potensial menjadi target prioritas dalam strategi pembangunan ekonomi sektoral. Dengan didasarkan pada tingkat

⁴ Hasil Studi Pengembangan Ekonomi Nias, LDFEUI dan BRR, Desember 2006

produksi dan besarnya jumlah rumah tangga yang aktif dalam kegiatan produksi komoditas-komoditas tersebut, maka sentra daerah potensial yang disajikan menunjukkan daerah-daerah (kecamatan) mana di masing-masing kabupaten di Kabupaten Nias Selatan, yang patut mendapat perhatian dan dijadikan pusat pengembangan ekonomi sektoral.

Tabel VI. 5
Prioritas Strategi Pembangunan Ekonomi Sektoral
(Komoditas dan Sentra Unggulan) di Kabupaten Nias Selatan

Sektor	Komoditas	Sentra Daerah Potensial
Pertanian	Beras	Amandraya, Lolowa'u, Gomo, Lahusa
	Karet	Lolowa'u, Amandraya
	Kelapa/kopra	Pulau-pulau Batu, Hibala, Teluk Dalam
	Kakao	Gomo, Lolomatua, Lahusa, Teluk Dalam
Perikanan	Ikan	Pulau-Pulau Batu, Hibala, Lahusa, Lolowa'u
	Garam	Lolowa'u

Sumber: Studi Pengembangan Ekonomi Nias, LDFEUI-BRR 2006

Secara umum potensi pariwisata di Kabupaten Nias Selatan dikelompokkan menjadi dua yaitu pariwisata alam dan pariwisata budaya atau peninggalan sejarah. Pariwisata alam di Kabupaten Nias Selatan salah satunya pantai Lagundri dan Sorake di kecamatan Teluk Dalam yang memiliki ombak yang tinggi sehingga cocok untuk olah raga selancar yang merupakan salah satu objek wisata yang sangat potensial untuk dikembangkan. Lebih lanjut, tidak ketinggalan panorama bukit Hilidauru di kecamatan Lolowa'u, serta objek wisata taman laut (*wisata bahari*) di kecamatan Pulau-pulau Batu.

Sementara itu, untuk pariwisata budaya di Kabupaten Nias Selatan, wisata budaya dan peninggalan sejarah seperti *Batu Megalit* di desa Tundrumbaho kecamatan Gomo dan desa Olayama di kecamatan Lolowa'u, rumah adat tradisional di desa Bawomataluo dan desa Hiliamaetaniha di kecamatan Teluk Dalam, serta kesenian tradisional seperti atraksi lompat batu (*hombo batu*), atraksi tari perang dan *tari maena*.

Dalam rangka pengembangan potensi daerah baik di Kabupaten Nias dan Nias Selatan, kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang telah dilakukan diharapkan menjadi pondasi awal bagi pengembangan potensi daerah selanjutnya. Program pembangunan jangka menengah (2006-2011) Kabupaten Nias dan Kabupaten Nias Selatan kemudian diklasifikasikan berdasarkan 4 pilar rehabilitasi dan rekonstruksi di Kepulauan Nias untuk melihat kesesuaiannya dengan bidang pembangunan RPJMD. Secara paralel, program-program tersebut juga dibandingkan dengan Rencana Aksi (*Action Plan*) BRR Nias yang sudah terealisasi pada tahun 2005 dan 2006. Hal ini bertujuan untuk memilah, program-program jangka menengah mana yang sudah pernah dilakukan oleh BRR Nias dan mana yang belum, agar dapat dilakukan oleh pemerintah daerah selanjutnya. Hasil perbandingan ini secara lengkap disertai program-program RPJMD kedua kabupaten dapat dilihat pada tabel **VI.6** dan **VI.7**.

Tabel VI. 6
Klasifikasi Program Pembangunan Jangka Menengah Berdasarkan 4 Pilar Rehabilitasi-Rekonstruksi
dan Bidang Pembangunan RPJMD Kabupaten Nias

4 Pilar Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Kepulauan Nias	Bidang Pembangunan RPJMD 2006-2011	Program Jangka Menengah Tahun 2006-2011	Tahun Pelaksanaan					
			2006	2007	2008	2009	2010	2011
INFRASTRUKTUR YANG EFEKTIF	Pekerjaan Umum	Peningkatan jalan dan jembatan dari ibukota Kabupaten ke ibukota Kecamatan dan antar ibukota Kecamatan	√					
		Pembangunan jalan desa yang menghubungkan kota kecamatan, antara lain: ▪ Desa Dekha -Lahemo ke Kota Kecamatan Lolofitu Moi melalui Tuhemberua -Lewa-lewa ▪ Desa Sihare'o ke kecamatan Ma'u						
		▪ <u>Membangun jaringan listrik</u> ▪ <u>Membangun irigasi, sungai, pengendalian banjir</u>	√					
	Perhubungan	▪ Menyediakan sarana perhubungan ke pulau-pulau kecil yang potensial ▪ Mendorong peningkatan pelayanan perhubungan laut dan udara ke dan dari Kabupaten Nias	√					
		<u>Rehabilitasi bandara dan pelabuhan</u>	√					
	Pertanahan	Tidak mengeluarkan sertifikat hak milik pada kawasan konservasi seperti sempadan sungai, pantai dan daerah perlindungan lainnya						
	Komunikasi dan Informasi	▪ Mendorong pengembangan jaringan pelayanan dan kualitas layanan para penyedia jasa layanan telekomunikasi ▪ Memastikan adanya sarana telekomunikasi dari pemerintah kabupaten ke kecamatan dan dari setiap kecamatan ke desa-desa di wilayahnya.	√					
		▪ Pengadaan peralatan komunikasi sistem radio						
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Perumahan	▪ Melakukan kerjasama dengan pihak PT Perum Perumahan untuk penyediaan rumah keluarga miskin yang belum tertangani oleh BRR	√					
		<u>Pembangunan sarana air minum dan drainase</u>	√					
	Penataan Ruang	▪ Mempercepat penyusunan RUTR-IKK Kecamatan yang baru						

4 Pilar Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Kepulauan Nias	Bidang Pembangunan RPJMD 2006-2011	Program Jangka Menengah Tahun 2006-2011	Tahun Pelaksanaan					
			2006	2007	2008	2009	2010	2011
KELEMBAGAAN DAN SOSIAL MASYARAKAT YANG KOKOH		Monitoring dan pengendalian tata ruang yang lebih ketat						
	Pendidikan	- Mendekatkan pelayanan pendidikan khususnya pembangunan gedung baru SLTP dan SLTA dengan memperlonggar persyaratan teknis - Memberikan peluang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berperan serta dalam pengembangan pendidikan khususnya pendidikan luar sekolah - Membebaskan biaya pendidikan di tingkat Sekolah Dasar	√					
	Kesehatan	- Mempercepat pengembangan Puskesmas menjadi Puskesmas Perawatan khususnya di pusat-pusat wilayah pengembangan - Mempercepat revitalisasi posyandu - Membebaskan keluarga miskin dari biaya pengobatan di Puskesmas dan RSUD	√					
	Lingkungan Hidup	- Menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan mulai tahap perencanaan dan pelaksanaan - Pencegahan kepunahan biota langka						
	Kependudukan dan Catatan Sipil	Mempercepat pengembangan sistem administrasi kependudukan berbasis teknologi						
	Pemberdayaan Perempuan	Mendorong GOW untuk mampu merealisasikan program kerjanya	√					
	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	- Membebaskan segala biaya penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang bagi pasangan usia subur di Puskesmas, RSUD milik Pemda - Penghargaan kepada laki-laki yang melakukan operasi vasektomi						
	Sosial	- Menjamin ketersediaan panti bagi anak yatim - Mendorong partisipasi masyarakat						
	Tenaga Kerja	Melindungi tenaga kerja dari Kabupaten Nias sehingga tidak menjadi korban <i>trafficking</i>						
		- Pelatihan tenaga kerja - Bantuan Modal kerja	√					

4 Pilar Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Kepulauan Nias	Bidang Pembangunan RPJMD 2006-2011	Program Jangka Menengah Tahun 2006-2011	Tahun Pelaksanaan					
			2006	2007	2008	2009	2010	2011
	Kebudayaan	- Mendorong organisasi sanggar budaya - Penghargaan bagi budayawan yang berdedikasi	√					
		<u>Peningkatan pelayanan kehidupan beragama</u>	√					
	Pemuda	Pertukaran pemuda dan pelajar						
	Kesatuan Bangsa Politik Dalam Negeri	- Mendorong partai politik untuk senantiasa memberikan pendidikan politik - Mengupayakan hubungan yang harmonis antara Pemerintah Kabupaten Nias dengan DPRD						
	Pemerintahan Umum	- Penghematan anggaran aparatur negara - Reformasi birokrasi						
		<u>Rehabilitasi Gedung Kantor Pemerintah</u> <u>Rehabilitasi bangunan khusus</u>	√					
	Kepegawaian	- Memberhentikan sementara dari jabatannya bagi PNS yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus TIPIKOR - Bantuan hukum bagi PNS yang didakwa melakukan TIPIKOR						
	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kerjasama program dan pembiayaan kepada LSM/organisasi untuk melakukan pendampingan pemberdayaan masyarakat di lokasi terisolir						
EKONOMI YANG BERSAING	Kearsipan	Membangun kearsipan daerah yang memadai						
	Koperasi dan UKM	Kerjasama dengan pengusaha kecil dan menengah dengan pengusaha besar dari luar daerah	√					
	Penanaman Modal Daerah	- Pelayanan pemberian izin usaha satu atap - Melakukan penyertaan modal daerah	√					

Sumber: RPJMD Kabupaten Nias 2006-2011 & Action Plan BRR Nias di tahun 2005-2006

Keterangan:

- Program yang digarisbawahi adalah program yang telah terealisasi dalam Action Plan BRR Nias di tahun 2005-2006 namun tidak tercantum dalam RPJMD Kabupaten Nias 2006-2011
- Checklist [√] menandakan program yang sudah dilaksanakan oleh BRR Nias

Tabel VI. 7
Klasifikasi Program Pembangunan Jangka Menengah Berdasarkan 4 Pilar Rehabilitasi-Rekonstruksi
dan Bidang Pembangunan RPJMD Kabupaten Nias Selatan

4 Pilar Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Kepulauan Nias	Bidang Pembangunan RPJMD 2006-2011	Program Jangka Menengah Tahun 2006-2011	Tahun Pelaksanaan					
			2006	2007	2008	2009	2010	2011
Infrastruktur yang efektif	Infrastruktur	<i>Prasarana Jalan</i> ▪ Meningkatkan daya dukung, kapasitas, dan kualitas pelayanan prasarana jalan ▪ Meningkatkan aksesibilitas wilayah pedesaan, wilayah perbatasan maupun kepulauan ▪ Pengadaan sarana dan prasarana alat-alat berat ▪ Pembangunan jalan desa yang menghubungkan kota kecamatan, antara lain: – Desa Bawolatow (Kecamatan Lahusa) ke Desa Golambanua I (Kecamatan Lahusa) – Desa Golambanua I (Kecamatan Lahusa) ke Desa Hilinawalo (Kecamatan Teluk Dalam)						
		<i>Lalu lintas Angkutan Jalan</i> ▪ Meningkatkan keterpaduan antar kota ▪ Meningkatkan keterjangkauan pelayanan transportasi umum ▪ Meningkatkan keselamatan lalu lintas jalan darat ▪ Meningkatkan kualitas angkutan jalan darat	√					
		<i>Transportasi Laut</i> ▪ Meningkatkan pelayanan angkutan laut ▪ Meningkatkan peran serta swasta dalam pembangunan dan pengelolaan transportasi laut ▪ Pembangunan prasarana transportasi laut	√					
		<i>Transportasi Udara (bandara)</i>						
		<i>Komunikasi dan Informasi</i> Pengadaan peralatan komunikasi sistem radio	√					

4 Pilar Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Kepulauan Nias	Bidang Pembangunan RPJMD 2006-2011	Program Jangka Menengah Tahun 2006-2011	Tahun Pelaksanaan					
			2006	2007	2008	2009	2010	2011
Perumahan dan Permukiman	Pembangunan Wilayah	- Menyusun rencana kesepakatan tata ruang, pengendalian pemanfaatan tata ruang, dan evaluasi - Koordinasi antara kecamatan/desa dengan lembaga dan organisasi masyarakat dalam penataan ruang - Penyusunan norma, standard, pedoman, manual - Penyusunan arahan pengembangan kawasan perbatasan <u>Rehabilitasi dan rekonstruksi rumah</u> <u>Jaringan pipa air bersih</u> <u>Pembangunan tempat penampungan air</u> <u>Normalisasi air bersih</u> <u>Rehabilitasi sarana dan prasarana air bersih</u>	√					
			√					
Kelembagaan dan Sosial Kemasyarakatan yang kokoh	Pemerintahan, Hukum, dan Politik	- Terciptanya <i>Good Governance</i> - Terciptanya pedoman penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan - Meningkatnya partisipasi masyarakat - Penyesuaian Peraturan Perundang-undangan Pusat dan Daerah Provinsi - Tersedianya sarana dan prasarana pemerintahan - Pemekaran Kecamatan, Desa, dan Kelurahan - Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa - Terwujudnya tapal batas wilayah pemerintahan Kabupaten Nias Selatan, Wilayah Kecamatan dan Wilayah Desa dan Kelurahan yang permanen - Terwujudnya pemetaan wilayah kecamatan, desa, dan kelurahan	√	√				
	Sumber Daya Manusia	Peningkatan wajib belajar dan pembinaan pendidikan dasar 9 tahun dan pra sekolah						
	Kemasyarakatan dan Kebudayaan	- Mencegah tindakan-tindakan yang menimbulkan ketidakadilan dalam masyarakat - Peningkatan kerukunan masyarakat <u>Bantuan Gedung Kursus Wanita</u> <u>Pengelolaan situs budaya dan rumah adat</u> <u>Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak</u> <u>Pembangunan panti asuhan</u>	√					

4 Pilar Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Kepulauan Nias	Bidang Pembangunan RPJMD 2006-2011	Program Jangka Menengah Tahun 2006-2011	Tahun Pelaksanaan					
			2006	2007	2008	2009	2010	2011
	Agama	▪ Pembinaan, pengajaran, penyuluhan keagamaan ▪ Pelaksanaan toleransi antar umat beragama ▪ Peningkatan jumlah dan mutu tenaga pendidik ▪ Membantu pembangunan sarana ibadah ▪ Membantu kegiatan pembinaan keagamaan ▪ Menciptakan kerjasama dengan pihak-pihak dalam pembangunan sarana dan prasarana keagamaan	√					
	Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	▪ Inventarisir potensi SDA dan lingkungan hidup ▪ Pengendalian kawasan ekosistem rawan kerusakan ▪ Meningkatkan akses informasi SDA dan lingkungan ▪ Rencana pengelolaan SDA secara berkelanjutan ▪ Meningkatkan kegiatan perlindungan SDA ▪ Peningkatan penghijauan melalui kegiatan reboisasi ▪ Menurunnya aktivitas pelanggaran hukum terhadap SDA dan lingkungan hidup ▪ Konservasi dan pemanfaatan lahan kritis ▪ Meningkatkan pengendalian sampah kota ▪ Meningkatkan peran masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan SDA dan lingkungan hidup ▪ Tersedianya Perda Kabupaten Nias Selatan tentang pengelolaan lingkungan hidup ▪ Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	√					
Ekonomi yang bersaing	Ekonomi	▪ Penguatan struktur ekonomi berbasis pertanian ▪ Pengembangan hasil pertanian berorientasi pasar ▪ Pengembangan produk olahan (agro industri) ▪ Pengembangan balai penyuluhan (BPP) untuk menjamin produk lokal regional ▪ Meningkatkan pengawasan mutu pupuk pestisida ▪ Meningkatkan kualitas SDM penyuluh pertanian ▪ Publikasi metode maupun paket usaha pertanian ▪ <u>Bantuan modal kerja industri rumah tangga</u> ▪ <u>Pengadaan peralatan tangkap ikan</u> ▪ <u>Pembentukan kelompok nelayan</u> ▪ <u>Pengadaan peternakan</u>	√					

Sumber: RPJMD Nias Selatan 2006-2011 & Action Plan BRR Nias di tahun 2005-2006

Keterangan:

- *Program yang digarisbawahi adalah program yang telah terealisasi dalam Action Plan BRR Nias di tahun 2005-2006, namun tidak tercantum dalam RPJMD Kabupaten Nias Selatan*
- *Checklist [✓] menandakan program yang sudah dilaksanakan oleh BRR Nias*

VI.4 Peran dan Tanggung jawab Stakeholders dalam Keberlanjutan Pemulihan Wilayah Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara

Beberapa program dan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi hingga bulan April 2009 mungkin saja belum selesai dilaksanakan pada saat itu. Keberlanjutan dari program dan kegiatan tersebut berikutnya akan menjadi tanggung jawab bersama dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, serta Pemerintah Kabupaten. Pembagian kewenangan ini berdasarkan fungsi dari aset-aset yang telah ditransfer oleh BRR, sesuai dengan kewenangan masing-masing. Pada tabel berikut diuraikan mengenai pembagian peran tersebut secara sistematis, dan juga telah mempertimbangkan UU No.32 Tahun 2004 mengenai Pemerintahan Daerah.

Tabel VI. 8
Peran dan Tanggung jawab Pemerintah Daerah
dan Pemerintah Pusat Pasca BRR NAD-Nias

Pihak	Peran dan Tanggung jawab
Pemerintahan Provinsi	Pemeliharaan dan operasi terhadap aset-aset yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi adalah: ▪ perencanaan dan pengendalian pembangunan; ▪ perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang; ▪ penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; ▪ penyediaan sarana dan prasarana umum; ▪ penanganan bidang kesehatan; ▪ penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial; ▪ penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten/kota; ▪ pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten/kota; ▪ fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah termasuk lintas kabupaten/kota; ▪ pengendalian lingkungan hidup; ▪ pelayanan pertanahan termasuk lintas kabupaten/kota; ▪ pelayanan kependudukan, dan catatan sipil; ▪ pelayanan administrasi umum pemerintahan; ▪ pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas kabupaten/kota; ▪ penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten/kota
Pemerintahan Kabupaten/Kota	Pemeliharaan dan operasi terhadap aset-aset yang menjadi kewenangan pemkab/Pemkot Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota adalah: ▪ perencanaan dan pengendalian pembangunan; ▪ perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang; ▪ penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; ▪ penyediaan sarana dan prasarana umum; ▪ penanganan bidang kesehatan; ▪ penyelenggaraan pendidikan; ▪ penanggulangan masalah sosial; ▪ pelayanan bidang ketenagakerjaan; ▪ fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah; ▪ pengendalian lingkungan hidup; ▪ pelayanan pertanahan; ▪ pelayanan kependudukan, dan catatan sipil;

Pihak	Peran dan Tanggung jawab
	▪ pelayanan administrasi umum pemerintahan; ▪ pelayanan administrasi penanaman modal; ▪ penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya
Pemerintah Pusat	Melaksanakan kegiatan-kegiatan pusat di daerah melalui kementerian/lembaga terkait Urusan wajib yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat adalah bidang : politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, agama, moneter dan fiskal nasional Dalam menyelenggarakan urusan wajib tersebut, Pemerintah Pusat menyelenggarakan sendiri atau dapat melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada perangkat Pemerintah Pusat atau wakil Pemerintah Pusat di daerah atau dapat menugaskan kepada pemerintahan daerah dan/atau pemerintahan desa.
Hubungan Antar Pemerintah Daerah	Hubungan dalam bidang keuangan antar pemerintahan daerah adalah sebagai berikut : ▪ bagi hasil pajak dan non pajak antara pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota; ▪ pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab bersama; ▪ pembiayaan bersama atas kerja sama antar daerah; dan ▪ pinjaman dan/atau hibah antar pemerintahan daerah. Hubungan dalam bidang pelayanan umum antar pemerintahan daerah meliputi: ▪ pelaksanaan bidang pelayanan umum yang menjadi kewenangan daerah; ▪ kerja sama antar pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan pelayanan umum; dan ▪ pengelolaan perijinan bersama bidang pelayanan umum Hubungan dalam bidang pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antar pemerintahan daerah meliputi: ▪ pelaksanaan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang menjadi kewenangan daerah; ▪ kerja sama dan bagi hasil atas pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antar pemerintahan daerah; dan ▪ pengelolaan perijinan bersama dalam pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya.
Hubungan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Hubungan dalam bidang keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintahan daerah meliputi: ▪ pemberian sumber-sumber keuangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah; ▪ pengalokasian dana perimbangan kepada pemerintahan daerah; dan ▪ pemberian pinjaman dan/atau hibah kepada pemerintahan daerah. Hubungan dalam bidang pelayanan umum antara Pemerintah Pusat dan pemerintahan daerah meliputi: ▪ kewenangan, tanggung jawab, dan penentuan standar pelayanan minimal; ▪ pengalokasian pendanaan pelayanan umum yang menjadi kewenangan daerah; dan ▪ fasilitasi pelaksanaan kerja sama antar pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan pelayanan umum. Hubungan dalam bidang pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara Pemerintah Pusat dan pemerintahan daerah meliputi: ▪ kewenangan, tanggung jawab, pemanfaatan, pemeliharaan, pengendalian dampak, budidaya, dan pelestarian; ▪ bagi hasil atas pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya; dan ▪ penyerasian lingkungan dan tata ruang serta rehabilitasi lahan.

Sumber : UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Analisis Tim P3B Bappenas, 2007

LAMPIRAN I

RENCANA RINCI

**REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
WILAYAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN 2007 - 2009**

REKAPITULASI PEMETAAN PENDANAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
PROVINSI NANGROE ACEH DARUSSALAM DAN KEPULAUAN NIAS, PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN 2007 - 2009

BIDANG	PROGRAM UTAMA	2007						2008						2009					
		BRR		Donor/NGO		PEMDA Prov. NAD		BRR		Donor/NGO		PEMDA Prov. NAD		BRR		Donor/NGO		PEMDA Prov. NAD	
		NAD	NIAS	NAD	NIAS			NAD	NIAS	NAD	NIAS			NAD	NIAS	NAD	NIAS*		
PERUMAHAN, PERMUKIMAN, TATA		2.877.396.800.000	218.174.656.000	2.141.194.356.400	258.937.743.600	6.277.900.000		1.899.913.755.000	146.266.656.000	0	55.393.007.280	7.339.900.000		0	0	0	0	0	0
	1 Perumahan	2.637.826.800.000	191.178.000.000	1.985.763.382.000	258.937.743.600	6.277.900.000		1.773.399.755.000	125.258.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 Tata Ruang	37.570.000.000	26.996.650.000	555.430.974.000	0	6.277.900.000		20.750.000.000	21.016.650.000	0	0	7.089.900.000	0	0	0	0	0	7.562.900.000	0
	3 Pertanahan	202.000.000.000	0	0	0	0		80.000.000.000	0	0	0	250.000.000	0	0	0	0	0	280.000.000	0
	4 Lingkungan Hidup	0	0	0	0	0		25.764.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INFRASTRUKTUR		2.352.872.243.975	639.151.489.170	4.829.641.901.200	139.869.860.800	69.474.822.200		4.301.125.378.000	1.522.597.441.746	276.000.000	1.514.522.977.000	268.169.276.000	2.927.718.999.000	324.934.479.600	276.000.000	0	0	216.196.027.500	0
	1 Jalan dan Transportasi	1.275.738.204.000	508.605.647.250	4.829.641.301.200	39.239.416.800	52.333.090.900		2.118.380.413.000	1.360.986.509.000	276.000.000	0	232.269.239.500	2.472.159.500.000	305.310.000.000	276.000.000	0	0	152.507.470.000	0
	2 Energi & Telekomunikasi	237.368.088.000	29.734.314.000	0	1.706.874.400	1.126.823.000		183.584.870.000	20.115.844.846	0	0	0	0	0	0	0	0	1.122.750.000	0
	3 Sumber Daya Air	320.580.560.275	75.818.127.520	0	23.883.200.000	6.813.178.000		357.215.000.000	88.995.336.500	0	0	10.815.149.000	374.101.750.000	18.724.479.600	0	0	0	12.962.422.000	0
	4 Air dan Sanitasi	179.225.803.000	24.993.400.000	0	75.388.360.600	10.001.730.000		1.233.943.377.000	52.500.000.000	0	0	23.818.538.300	0	0	0	0	0	50.303.376.500	0
	5 Infrastruktur Lingkungan dan Pemeliharaan	20.866.516.000	0	0	0	0		89.400.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6 Kawasan Percontohan	75.222.499.700	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7 Rancangan Gedung Negara dan Rumah	84.220.472.000	0	0	0	0		175.810.716.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8 IREP	158.650.000.000	0	0	0	0		142.870.994.000	0	0	0	0	0	81.447.749.000	0	0	0	0	0
		555.849.038.000	278.529.798.000	3.904.953.044.400	276.612.692.051	3.103.353.899.000		509.163.602.000	375.558.800.000	797.604.265.000	1.219.624.815.956	5.745.842.165.900	0	39.285.000.000	644.000.000	0	0	6.008.356.114.900	0
SOSIAL KEMASYARAKATAN		430.715.000.000	268.377.331.600	3.567.686.464.400	278.025.492.491	955.259.569.100		329.563.800.000	329.563.800.000	644.000.000	0	1.036.481.812.900	0	38.245.000.000	644.000.000	0	0	1.079.076.028.200	0
	1 Pendidikan, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan																		
	- Pendidikan	238.650.000.000	200.860.771.600	2.643.598.070.000	148.374.409.000	764.280.072.000		177.484.800.000	218.847.000.000	460.000.000	0	802.532.632.000	0	7.000.000.000	460.000.000	0	0	924.803.513.300	0
	- Kesehatan	47.789.000.000	66.602.585.000	1.290.286.678.400	129.650.903.400	183.375.436.500		26.780.000.000	109.716.800.000	184.000.000	0	174.834.980.900	0	31.245.900.000	184.000.000	0	0	144.135.707.000	0
	- Pemberdayaan Perempuan	43.261.000.000	913.975.000	233.801.716.000	0	7.595.000.000		7.576.000.000	0	0	0	9.114.000.000	0	0	0	0	0	10.936.799.500	0
	2 Agama, Sosial, Budaya, Pemuda dan Olahraga	128.134.038.000	10.148.459.000	337.266.580.000	6.587.290.160	2.228.103.389.000		297.402.802.000	54.995.000.000	756.960.265.000	0	4.709.360.353.000	0	1.840.000.000	0	0	0	4.929.200.114.700	0
	- Agama	74.291.068.000	5.999.250.000	17.806.684.000	6.587.290.160	135.035.896.900		122.561.295.000	30.900.000.000	122.200.000.000	0	194.998.557.000	0	0	0	0	0	283.361.509.600	0
	- Sosial	9.750.000.000	441.127.000	303.881.096.000	0	59.532.846.000		53.339.500.000	640.000.000	400.000.000.000	0	72.986.327.700	0	640.000.000	0	0	0	87.922.302.800	0
	- Budaya	2.600.000.000	2.178.082.000	1.000.000.000	0	62.980.838.000		98.518.750.000	12.575.000.000	147.598.265.000	0	71.244.451.000	0	400.000.000	0	0	0	75.908.067.000	0
	- Pemuda dan Olahraga	1.538.000.000	0	14.578.788.400	0	1.970.551.811.000		22.983.207.000	18.888.000.000	87.162.000.000	0	4.709.110.071.300	0	0	0	0	0	4.482.088.216.300	0
		716.511.129.000	83.885.755.000	0	153.594.925.200	2.150.876.794.300		849.415.828.000	69.323.705.000	0	492.515.546.607	5.659.318.123.600	0	11.128.716.800	0	0	0	5.153.210.444.100	0
PEREKONOMIAN																			
	1 Pertanian**	285.823.569.000	7.134.100.000	0	18.524.439.200	483.661.004.900		84.319.560.000	31.272.750.000	0	0	1.697.684.040.200	0	975.000.000	0	0	0	1.818.616.800.000	0
	- Tanaman Pangan & Hortikultura**	86.551.300.000	535.000.000	0	0	124.941.324.400		17.970.000.000	8.572.500.000	0	-	1.103.834.582.000	0	975.000.000	0	0	0	1.144.837.746.200	0
	- Perkebunan	75.541.000.000	5.905.000.000	0	-	153.848.830.000		14.819.160.000	22.700.250.000	0	-	201.883.219.000	0	-	0	0	0	262.448.184.200	0
	- Perikanan	55.232.450.000	694.100.000	0	-	186.844.050.500		47.000.000.000	-	-	-	266.926.238.400	0	-	0	0	0	292.324.110.400	0
	- Kehutanan	48.406.015.000	0	-	-	20.027.000.000		4.530.400.000	-	-	-	124.960.000.000	0	-	0	0	0	119.000.000.000	0
	2 Perikanan	283.802.000.000	23.695.957.000	-	76.798.416.800	1.418.126.919.100		665.388.866.000	9.078.900.000	-	-	2.569.173.861.900	-	-	-	-	-	2.536.299.827.800	0
	3 Pengembangan Usaha	295.925.560.000	33.695.698.000	-	58.272.073.200	247.093.779.300		89.708.000.000	29.480.950.000	-	-	792.532.221.500	-	10.153.750.000	-	-	-	798.320.815.500	0
	- Industri	44.951.000.000	28.431.440.000	0	0	-		9.000.000.000	-	0	-	-	0	-	0	-	0	-	0
	- Perdagangan	56.164.000.000	0	0	7.815.920.000	4.500.000.000		4.500.000.000	-	0	-	-	0	-	0	-	0	-	0
	- Tenaga kerja	20.794.680.000	808.000.000	0	51.256.153.200	133.956.807.900		2.500.000.000	-	0	-	300.445.000.000	0	-	0	-	0	228.390.000.000	0
KELEMBAGAAN DAN HUKUM																			
	1 Kelembagaan Daerah	327.154.872.000	58.103.560.000	981.607.275.600	387.535.876.000	41.745.323.800		154.721.961.600	77.530.750.000	0	0	77.982.512.200	0	11.726.250.000	0	0	0	87.703.023.800	0
	2 Hukum	80.220.160.000	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53.073.219.100	0
	3 K3M	199.100.116.000	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.619.824.000	0
BIAYA MANAJEMEN		179.513.008.974	62.925.317.000	661.039.255.800	0	3.783.372.181.000		289.009.000.000	0	0	0	7.836.973.222.000	0	0	0	0	0	8.723.755.781.700	0
	JUMLAH	7.368.846.167.949	1.328.762.561.778	12.518.435.233.200	1.216.471.104.231	9.235.890.040.300		7.904.349.308.600	2.391.777.341.746	797.889.265.000	3.281.979.347.000	18.985.637.281.180	2.927.718.999.000	384.174.479.600	920.000.000	0	0	20.197.004.471.800	0

Sumber : BRR, NAD, Nias (2007) dan Analisis Tim P1B Bappenas (2007)

Keterangan : 1 USD = IDR 9,200

*) Anggaran Donor/NGO 2009 Nias sudah dihitung (termasuk) dalam Anggaran Donor/NGO Nias tahun 2008

**) Rincian program/legislatif sudah termasuk untuk program/legislatif pendukung untuk pertanian

REKAPITULASI DANA ON BUDGET						
BIDANG KEGIATAN	NAD	NAD	NAD	NIAS	NIAS	NIAS
	<u>2007</u>	<u>2008</u>	<u>2009</u>	<u>2007</u>	<u>2008</u>	<u>2009</u>
PERUMAHAN	2.877.396.800.000	1.898.913.755.000	-	218.174.650.000	146.266.650.000	-
INFRASTRUKTUR	2.352.072.243.975	4.301.125.370.000	2.927.718.999.000	639.151.489.170	1.522.597.441.746	324.034.479.600
SOSIAL	559.849.038.000	509.163.602.000	-	278.525.790.600	375.558.800.000	39.285.000.000
EKONOMI	784.751.129.000	840.415.620.000	-	63.881.755.000	69.823.700.000	11.128.750.000
KELEMBAGAAN	606.483.148.000	154.721.961.600	-	58.103.560.000	77.530.750.000	11.726.250.000
MANAJEMEN	179.513.808.974	280.000.000.000	-	62.925.317.000	-	-
TOTAL	7.360.066.167.949	7.984.340.308.600	2.927.718.999.000	1.320.762.561.770	2.191.777.341.746	386.174.479.600
TOTAL 2007 - 2009	18.272.125.475.549			3.898.714.383.116		
KEBUTUHAN DANA	NAD	NIAS	TOTAL			
2007	7.360.066.167.949	1.320.762.561.770	8.680.828.729.719			
2008	7.984.340.308.600	2.191.777.341.746,0	10.176.117.650.346			
2009	2.927.718.999.000	386.174.479.600,00	3.313.893.478.600			
TOTAL	18.272.125.475.549	3.898.714.383.116	22.170.839.858.665			
Total 2008-2009	10.912.059.307.600	2.577.951.821.346	13.490.011.128.946			

Sumber : BRR NAD-Nias (2007) dan Analisis Tim P3B Bappenas (2007)

REKAPITULASI DANA OFF BUDGET						
BIDANG KEGIATAN	NAD	NAD	NAD	NIAS	NIAS	NIAS
	<u>2007</u>	<u>2008</u>	<u>2009</u>	<u>2007</u>	<u>2008</u>	<u>2009</u>
PERUMAHAN	2.141.194.356.400	-	-	258.917.743.600	55.303.007.289	-
INFRASTRUKTUR	4.829.641.301.200	276.000.000	276.000.000	139.809.860.800	1.514.522.977.088	-
SOSIAL	3.904.953.044.400	757.604.265.000	644.000.000	276.612.692.651	1.219.624.815.956	-
EKONOMI	-	-	-	153.594.929.200	492.519.546.667	-
KELEMBAGAAN	981.607.275.600	-	-	387.535.878.000	-	-
MANAJEMEN	661.039.255.600	-	-	-	-	-
TOTAL	12.518.435.233.200	757.880.265.000	920.000.000	1.216.471.104.251	3.281.970.347.000	-
TOTAL 2007 - 2009	13.277.235.498.200			4.498.441.451.251		
KEBUTUHAN DANA	NAD	NIAS	TOTAL			
2007	12.518.435.233.200	1.216.471.104.251	13.734.906.337.451			
2008	757.880.265.000	3.281.970.346.999,6	4.039.850.612.000			
2009	920.000.000	-	920.000.000			
TOTAL	13.277.235.498.200	4.498.441.451.251	17.775.676.949.451			
Total 2008-2009	758.800.265.000	3.281.970.347.000	4.040.770.612.000			

Sumber : BRR NAD-Nias (2007) dan Analisis Tim P3B Bappenas (2007)

**RENCANA KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
TAHUN 2007 - 2009**

BIDANG	PROGRAM UTAMA	SUB BIDANG / KEGIATAN	LOKASI	2007		2008		2009		KETERANGAN
				NILAI (RUPIAH)	VOLUME	NILAI (RUPIAH)	VOLUME	NILAI (RUPIAH)	VOLUME	
PERUMAHAN, PERMUKIMAN, PERTANAHAN, TATA RUANG, DAN LINGKUNGAN HIDUP	PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			2.877.396.800.000		1.898.913.755.000		0		
				2.637.826.800.000		1.772.399.755.000		-		
				934.370.500.000		730.404.155.000		-		
		A. Regional I								
		1 Rumah Baru (Rekonstruksi/Relokasi) T-36 plus	Regional I	657.876.000.000	9.012 Unit	588.161.000.000	8.057 Unit			
		a. Rupiah Murni			6.945 Unit		6.136 Unit			
		b. ADB			420 Unit		450 Unit			
		c. MDF (Rekompak/KRRP)			1.290 Unit		1.021 Unit			
		d. Pendampingan KfW			357 Unit		450 Unit			
		2 Rehabilitasi	Regional I	35.590.500.000	4.314 Unit					
		3 BSB T-21 plus	Regional I			26.250.000.000	750 Unit			
		4 Upgrading Rumah Bantuan Terbangkalai	Regional I	6.375.000.000	425 Unit	10.845.000.000	723 Unit			
		5 Penertiban dan Penghunian Rumah Bantuan	Regional I	3.179.000.000	1 IS	928.155.000	6.188 Unit			
		6 Penyiapan/Pematangan/Pembersihan Lahan	Regional I	6.360.000.000	3 Lokasi	2.600.000.000	4 Lokasi			
		7 Fasilitator Pendampingan Penyaluran BLM	Regional I	2.900.000.000	2 Is	2.900.000.000	2 paket			
		8 Konsultan Supervisi	Regional I	20.400.000.000	12 paket	25.500.000.000	15 paket			
		9 Program perkuatan KP4D, dll.	Regional I	48.458.000.000	1 Is					
		10 Swakelola Fasilitasi/Mediasi NGO	Regional I			120.000.000	1 Is			
		11 Penyusunan DED & Perenc. Lainnya	Regional I	8.400.000.000	7 Paket	1.800.000.000	2 Paket			
		12 PSD Lingkungan (Air Bersih, Drain, Jln, Sanitasi)	Regional I	131.040.000.000	84 Kaw	55.900.000.000	172 Kaw			
		13 Program Pengembangan Kecamatan (KDP)	Regional I	13.792.000.000	8 Kec	15.400.000.000	14 Kec			
		B. Regional II		552.973.250.000		397.525.750.000				
		1 Rumah Baru (Rekonstruksi/Relokasi) T-36 plus	Regional II	342.035.000.000	5.105 Unit	324.883.000.000	4.849 Unit			
		a. Rupiah Murni			3.809 Unit		2.426 Unit			
		b. ADB								
		c. MDF (Rekompak/KRRP)			1.023 Unit		1.903 Unit			
		d. Pendampingan KfW			273 Unit		520 Unit			
		2 Rehabilitasi	Regional II	19.511.250.000	2.365 Unit					
		3 BSB T-21 plus								
		4 Upgrading Rumah Bantuan Terbangkalai	Regional II	6.345.000.000	423 Unit	5.175.000.000	345 Unit			
		5 Penertiban dan Penghunian Rumah Bantuan	Regional II	2.068.000.000	1 IS	387.750.000	2.585 Unit			
		6 Penyiapan/Pematangan/Pembersihan Lahan	Regional II			800.000.000	2 Lokasi			
		7 Fasilitator Pendampingan Penyaluran BLM	Regional II	1.000.000.000	1 Is	1.000.000.000	1 paket			
		8 Konsultan Supervisi	Regional II	11.900.000.000	7 paket	11.900.000.000	7 paket			
		9 Program perkuatan KP4D, dll.		-	-	-	-			
		10 Swakelola Fasilitasi/Mediasi NGO				80.000.000	1 Is			
		11 Penyusunan DED & Perenc. Lainnya	Regional II	5.250.000.000	5 Paket	2.400.000.000	3 Paket			
		12 PSD Lingkungan (Air Bersih, Drain, Jln, Sanitasi)	Regional II	137.280.000.000	78 Kaw	23.400.000.000	72 Kaw			
		13 Program Pengembangan Kecamatan (KDP)	Regional II	27.584.000.000	16 Kec	27.500.000.000	25 Kec			
		C. Regional III		101.035.500.000		69.455.725.000				
		1 Rumah Baru (Rekonstruksi/Relokasi) T-36 plus	Regional III	45.695.000.000	703 Unit	53.300.000.000	820 Unit			
		a. Rupiah Murni			266 Unit		540 Unit			
		b. ADB								
		c. MDF (Rekompak/KRRP)			437 unit		280 unit			
		d. Pendampingan KfW								
		2 Rehabilitasi	Regional III	15.592.500.000	1.890 Unit					
		3 BSB T-21 plus								
		4 Upgrading Rumah Bantuan Terbangkalai								
		5 Penertiban dan Penghunian Rumah Bantuan	Regional III	848.000.000	1 IS	40.725.000	272 unit			
		6 Penyiapan/Pematangan/Pembersihan Lahan	Regional III							
		7 Fasilitator Pendampingan Penyaluran BLM	Regional III							
		8 Konsultan Supervisi	Regional III	1.800.000.000	1 paket	1.800.000.000	1 paket			
		9 Program perkuatan KP4D, dll.		-	-	-	-			
		10 Swakelola Fasilitasi/Mediasi NGO				40.000.000	1 Is			
		11 Penyusunan DED & Perenc. Lainnya	Regional III	930.000.000	1 Paket	600.000.000	1 Paket			
		12 PSD Lingkungan (Air Bersih, Drain, Jln, Sanitasi)	Regional III	27.550.000.000	19 Kaw	4.875.000.000	15 Kaw			
		13 Program Pengembangan Kecamatan (KDP)	Regional III	8.620.000.000	5 Kec	8.800.000.000	8 Kec			
		D. Regional IV		641.366.300.000		398.401.200.000				
		1 Rumah Baru (Rekonstruksi/Relokasi) T-36 plus	Regional IV	442.228.300.000	6.428 Unit	286.055.600.000	4.012 Unit			
		a. Rupiah Murni			4.901 Unit		2.700 Unit			
		b. ADB			540 Unit		420 Unit			
		c. MDF (Rekompak/KRRP)			987 unit		892 unit			
		d. Pendampingan KfW								
		2 Rehabilitasi	Regional IV	16.302.000.000	1.976 Unit					
		3 BSB T-21 plus	Regional IV			12.250.000.000	350 Unit			
		4 Upgrading Rumah Bantuan Terbangkalai	Regional IV	6.645.000.000	443 Unit	5.835.000.000	389 Unit			
		5 Penertiban dan Penghunian Rumah Bantuan	Regional IV	2.987.000.000	1 IS	1.065.600.000	7.104 Unit			
		6 Penyiapan/Pematangan/Pembersihan Lahan	Regional IV	6.450.000.000	3 Lokasi	3.250.000.000	5 Lokasi			

**RENCANA KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
TAHUN 2007 - 2009**

BIDANG	PROGRAM UTAMA	SUB BIDANG / KEGIATAN	LOKASI	2007		2008		2009		KETERANGAN	
				NILAI (RUPIAH)	VOLUME	NILAI (RUPIAH)	VOLUME	NILAI (RUPIAH)	VOLUME		
		7 Fasilitator Pendampingan Penyaluran BLM	Regional IV	1.700.000.000	1 ls	1.700.000.000	1 paket				
		8 Konsultan Supervisi	Regional IV	1.440.000.000	8 paket	1.440.000.000	8 paket				
		9 Program perkuatan KP4D, dll.	Regional IV	-	-	-	-				
		10 Swakelola Fasilitasi/Mediasi NGO	Regional I			80.000.000	1 ls				
		11 Penyusunan DED & Perenc. Lainnya	Regional IV	5.940.000.000	6 Paket	1.800.000.000	2 Paket				
		12 PSD Lingkungan (Air Bersih, Drain, Jln, Sanitasi)	Regional IV	138.710.000.000	97 Kaw	64.025.000.000	197 Kaw				
		13 Program Pengembangan Kecamatan (KDP)	Regional IV	18.964.000.000	11 Kec	20.900.000.000	19 Kec				
		E. Regional V		408.081.250.000		176.612.925.000					
		1 Rumah Baru (Rekonstruksi/Relokasi) T-36 plus	Regional V	224.656.000.000	3.228 Unit	95.666.750.000	1.377 Unit				
		a. Rupiah Murni	Regional V		3.104 Unit		1.288 Unit				
		b. ADB	Regional V								
		c. MDF (Rekompak/KRRP)	Regional V		124 unit		89 unit				
		d. Pendampingan KfW	Regional V								
		2 Rehabilitasi	Regional V	6.311.250.000	765 Unit						
		3 BSBT T-21 plus	Regional V				-				
		4 Upgrading Rumah Bantuan Terbangkalai	Regional V			750.000.000	50 Unit				
		5 Penertiban dan Penghunian Rumah Bantuan	Regional V	1.874.000.000	1 IS	146.175.000	975 Unit				
		6 Penyiapan /Pematangan /Pembersihan Lahan	Regional V	6.400.000.000	2 Lokasi	1.500.000.000	3 Lokasi				
		7 Fasilitator Pendampingan Penyaluran BLM	Regional V	1.200.000.000	1 ls	1.200.000.000	1 paket				
		8 Konsultan Supervisi	Regional V	7.200.000.000	4 paket	7.200.000.000	4 paket				
		9 Program perkuatan KP4D, dll.	Regional V	-	-	-	-				
		10 Swakelola Fasilitasi/Mediasi NGO	Regional I			50.000.000	1 ls				
		11 Penyusunan DED & Perenc. Lainnya	Regional V	1.880.000.000	2 Paket	1.800.000.000	2 Paket				
		12 PSD Lingkungan (Air Bersih, Drain, Jln, Sanitasi)	Regional V	127.528.000.000	76 Kaw	50.700.000.000	156 Kaw				
		13 Program Pengembangan Kecamatan (KDP)	Regional V	31.032.000.000	18 Kec	17.600.000.000	16 Kec				
		Administrasi									
		TATA RUANG				37.570.000.000		20.750.000.000			
		A. Regional I				12.850.000.000		6.150.000.000			
		1 Penyempurnaan Tata Ruang Propinsi	Regional I	900.000.000	1 paket						
		2 Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	Regional I	3.600.000.000	3 Paket		2.250.000.000	3 Paket			
		3 Penyusunan RDTR/RTBL Kawasan Khusus	Regional I	3.600.000.000	3 Paket		2.550.000.000	3 Paket			
		4 Sosialisasi Produk Penataan Ruang	Regional I	1.350.000.000	3 Paket						
		5 Swakelola Pendukung Program (Sayembara, dsb)	Regional I	3.400.000.000	1 ls						
		6 Penguatan Kelemb. Penataan Ruang	Regional I				1.350.000.000	3 Paket			
		B. Regional II		7.140.000.000			5.000.000.000				
		1 Penyempurnaan Tata Ruang Propinsi	Regional II								
		2 Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	Regional II	2.940.000.000	3 Paket		1.500.000.000	2 Paket			
		3 Penyusunan RDTR/RTBL Kawasan Khusus	Regional II	2.400.000.000	2 Paket		1.700.000.000	2 Paket			
		4 Sosialisasi Produk Penataan Ruang	Regional II	1.800.000.000	4 Paket						
		5 Swakelola Pendukung Program (Sayembara, dsb)	Regional II								
		6 Penguatan Kelemb. Penataan Ruang	Regional II				1.800.000.000	4 Paket			
		C. Regional III		3.300.000.000			1.750.000.000				
		1 Penyempurnaan Tata Ruang Propinsi	Regional III								
2 Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	Regional III										
3 Penyusunan RDTR/RTBL Kawasan Khusus	Regional III	2.400.000.000	2 Paket		850.000.000	1 Paket					
4 Sosialisasi Produk Penataan Ruang	Regional III	900.000.000	2 Paket								
5 Swakelola Pendukung Program (Sayembara, dsb)	Regional III										
6 Penguatan Kelemb. Penataan Ruang	Regional III				900.000.000	2 Paket					
D. Regional IV		7.590.000.000			4.150.000.000						
1 Penyempurnaan Tata Ruang Propinsi	Regional IV										
2 Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	Regional IV	2.940.000.000	3 Paket		1.500.000.000	2 Paket					
3 Penyusunan RDTR/RTBL Kawasan Khusus	Regional IV	2.400.000.000	2 Paket		850.000.000	1 Paket					
4 Sosialisasi Produk Penataan Ruang	Regional IV	2.250.000.000	5 Paket								
5 Swakelola Pendukung Program (Sayembara, dsb)	Regional IV										
6 Penguatan Kelemb. Penataan Ruang	Regional IV				1.800.000.000	4 Paket					
E. Regional V		6.690.000.000			3.700.000.000						
1 Penyempurnaan Tata Ruang Propinsi	Regional V										
2 Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	Regional V	2.940.000.000	3 Paket		1.500.000.000	2 Paket					
3 Penyusunan RDTR/RTBL Kawasan Khusus	Regional V	2.400.000.000	2 Paket		850.000.000	1 Paket					
4 Sosialisasi Produk Penataan Ruang	Regional V	1.350.000.000	3 Paket								
5 Swakelola Pendukung Program (Sayembara, dsb)	Regional V										
6 Penguatan Kelemb. Penataan Ruang	Regional V				1.350.000.000	3 Paket					

**RENCANA KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
TAHUN 2007 - 2009**

BIDANG	PROGRAM UTAMA	SUB BIDANG / KEGIATAN	LOKASI	2007		2008		2009		KETERANGAN
				NILAI (RUPIAH)	VOLUME	NILAI (RUPIAH)	VOLUME	NILAI (RUPIAH)	VOLUME	
	PERTANAHAN			202.000.000.000		80.000.000.000				
		A. Regional I		166.000.000.000		44.000.000.000				
		1 Penyelesaian Sertifikasi utk Relokasi/RALAS	Regional I	24.000.000.000	40.000	24.000.000.000	40.000			
		2 Cadangan Pengadaan Tanah	Regional I	142.000.000.000	1 ls	20.000.000.000	50 ha			
		B. Regional II		12.000.000.000		12.000.000.000				
		1 Penyelesaian Sertifikasi utk Relokasi/RALAS	Regional II	12.000.000.000	20.000	12.000.000.000	20.000			
		2 Cadangan Pengadaan Tanah	Regional II							
		C. Regional III		0		0				
		1 Penyelesaian Sertifikasi utk Relokasi/RALAS	Regional III			-				
		2 Cadangan Pengadaan Tanah	Regional III			-				
		D. Regional IV		18.000.000.000		18.000.000.000				
		1 Penyelesaian Sertifikasi utk Relokasi/RALAS	Regional IV	18.000.000.000	30.000	18.000.000.000	30.000			
		2 Cadangan Pengadaan Tanah	Regional IV							
		E. Regional V		6.000.000.000		6.000.000.000				
		1 Penyelesaian Sertifikasi utk Relokasi/RALAS	Regional V	6.000.000.000	10.000	6.000.000.000	10.000			
		2 Cadangan Pengadaan Tanah	Regional V							
	LINGKUNGAN HIDUP			-		25.764.000.000				
		A. Regional I				9.834.625.000				
		1 Peny. Dok. Pengel. Lingk. Kaw. Permukiman	Regional I			7.734.625.000	- Dok			
		2 Ruang Terbuka Hijau Kaw. Percontohan	Regional I			2.100.000.000	3 kaw			
		B. Regional II				3.931.250.000				
		1 Peny. Dok. Pengel. Lingk. Kaw. Permukiman	Regional II			3.231.250.000	- Dok			
		2 Ruang Terbuka Hijau Kaw. Percontohan	Regional II			700.000.000	1 kaw			
		C. Regional III				500.000.000				
		1 Peny. Dok. Pengel. Lingk. Kaw. Permukiman	Regional III			500.000.000	2 Dok			
		2 Ruang Terbuka Hijau Kaw. Percontohan	Regional III							
		D. Regional IV				9.580.000.000				
		1 Peny. Dok. Pengel. Lingk. Kaw. Permukiman	Regional IV			8.880.000.000	- Dok			
		2 Ruang Terbuka Hijau Kaw. Percontohan	Regional IV			700.000.000	1 kaw			
		E. Regional V				1.918.125.000				
		1 Peny. Dok. Pengel. Lingk. Kaw. Permukiman	Regional V			1.218.125.000	- Dok			
		2 Ruang Terbuka Hijau Kaw. Percontohan	Regional V			700.000.000	1 kaw			
INFRASTRUKTUR	JALAN DAN TRANSPORTASI			2.352.072.243.975		4.301.125.370.000		2.927.718.999.000		
		A. TRANSPORTASI LAUT DAN ASDP		1.275.738.204.000		2.118.380.413.000		2.472.159.500.000		
		A.1. TRANSPORTASI LAUT		180.693.028.000		324.941.500.000		152.352.500.000		
		1 Review Desain Dermaga & Fasilitas Pelabuhan Sibigo (lanjutan)	Simeulu	250.000.000						
		2 Rencana Induk dan DED Pelabuhan Kuala Langsa Tahap II	Simeulu	147.175.000						
		3 Studi DED Dermaga di Pulau Rondo dan Pulau Aceh	Aceh Besar	850.000.000						
		4 Pengawasan Rehab dan Rekon Fas. Pelayaran NAD-Nias	Nad	352.825.000						
		5 Pengawasan Pemb. Fas. Sisi Darat Pel. Tapak Tuan	Aceh Selatan	150.000.000						
		6 Pengawasan Pembangunan Dermaga di Pulau Rondo	Aceh Besar	75.000.000						
		7 Pengawasan Pembangunan Dermaga di Pulau Aceh	Aceh Besar	75.000.000						
		8 Rehab dan Rekon Fas. Keselamatan Pelayaran NAD-Nias (lanjutan)	Nad	4.375.000.000						
		9 Pembangunan Fas Sisi Darat Pel. Tapak Tuan	Aceh Selatan	4.400.000.000						
		10 Pembangunan Dermaga di Pulau Rondo	Aceh Besar	1.400.000.000						
		11 Pembangunan Dermaga di Pulau Aceh	Aceh Besar	1.400.000.000						
		12 IRFF Pembuatan Dermaga dan Trestel Pel. Malahayati	NAD	38.941.291.000		100.096.000.000	Ext Unit			
		13 IRFF Pembangunan Pel. Laut Lhokseumawe	NAD	17.675.000.000						
		14 IRFF Pembuatan Dermaga dan Trestel Pel. Kuala Langsa	NAD	20.000.000.000		28.152.000.000	Ext Unit			
		15 IRFF Pembangunan Pel. Laut Singkil (termasuk jalan masuk)	NAD	24.000.000.000		28.152.000.000	Ext Unit			
		16 IRFF Pembangunan Dermaga dan Trestel Pelabuhan Calang	NAD	32.000.000.000		74.160.000.000	Ext Unit			
		17 IRFF Pembangunan Pel. Laut Sinabang Tahap I	NAD	18.000.000.000		39.240.000.000	Ext Unit			
		18 Pengadaan Fasilitas Penunjang Distrik Navigasi Sabang	Simeulu	1.490.000.000						
		19 Pengadaan Peralatan Penunjang Operasional Pel. (lanjutan)	Nad	7.200.000.000						
		20 Pengawasan Pembangunan Fasilitas Penunjang Pelabuhan Malahayati	A. Besar	150.000.000						
		21 Pembangunan Fasilitas Penunjang Pelabuhan Malahayati Paket II	A. Besar	4.661.737.000						
		22 Pembangunan Fasilitas Penunjang Pelabuhan Malahayati	A. Besar	3.100.000.000						
		23 Pembangunan Rescue Boat 40 M (Tahap II)	Propinsi			18.752.000.000	2 Unit			
		24 Pengawasan Pengadaan Kapal Rescue Boat 40 M Lanjutan	Propinsi			437.500.000	1 Lap			
		25 Pembangunan Pelabuhan Laut Sabang	Sabang			23.152.000.000		152.352.500.000	Ext	

**RENCANA KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
TAHUN 2007 - 2009**

BIDANG	PROGRAM UTAMA	SUB BIDANG / KEGIATAN	LOKASI	2007		2008		2009		KETERANGAN
				NILAI (RUPIAH)	VOLUME	NILAI (RUPIAH)	VOLUME	NILAI (RUPIAH)	VOLUME	
		26 Pembangunan Peralatan Penunjang Operasional Pel. (Lanjutan)	Propinsi			12.800.000.000	Unit			

**RENCANA KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
TAHUN 2007 - 2009**

BIDANG	PROGRAM UTAMA	SUB BIDANG / KEGIATAN	LOKASI	2007		2008		2009		KETERANGAN
				NILAI (RUPIAH)	VOLUME	NILAI (RUPIAH)	VOLUME	NILAI (RUPIAH)	VOLUME	
		A.2. ASDP		71.457.254.000		63.220.861.000				
		1 Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Meulaboh (IREP)	A.Barat	15.000.000.000						
		2 Pengawasan Pemb. Fas. Sisi Darat Pel. Penyeb. Sinabang	Nad	320.000.000						
		3 Pemb. Fasilitas Darat Pelabuhan Penyeberangan Sinabang	Simeulue	8.000.000.000						
		4 Pengawasan Pembangunan 2 (dua) unit KMP 750 GT (lanjutan)	NAD	665.000.000		875.000.000	Ext			
		5 Pengawasan Pengadaan Kapal Tunda 2x1200PK (2 Unit),Tahap I	NAD	465.000.000						
		6 Pengawasan Pengadaan KMP Ro-Ro (UleeLheue-Balohan), Tahap I	NAD	500.000.000		437.500.000	Ext			
		7 Pengawasan Pengadaan Rescue Boat 40M, Tahap I	NAD	450.000.000						
		8 Pengadaan KMP 750 GT 2 bh (lanjutan)	NAD	11.243.292.000						
		9 Pengadaan Kapal Tunda 2x1200PK (2 unit), Tahap I	Nad	12.121.450.000		36.790.000.000	2 Unit			
		10 Pengadaan KM Penumpang Ro-Ro (Ulee Lheue-Balohan), Tahap I	Nad	13.200.000.000		20.755.861.000	2 Unit			
		11 Pembangunan Gedung ASDP	B. Aceh	3.245.500.000						
		12 Pengawasan Pembangunan Gedung ASDP	B. Aceh	120.000.000						
		13 Pengawasan pembangunan fasilitas darat pelabuhan penyeberangan singkil		240.000.000						
		14 Pembangunan fasilitas darat pelabuhan penyeberangan singkil	A. Singkil	5.887.012.000						
		15 Pembangunan Gedung ASDP (Tahap II)	Banda Aceh			1.800.000.000	Unit			
		16 Pengawasan Pembangunan Gedung ASDP (Tahap II)	Banda Aceh			62.500.000	Unit			
		17 Dermaga Kapal Layar Tipe Ponton di Sabang	Sabang			2.500.000.000	3 Unit			
		B. TRANSPORTASI UDARA		170.269.888.000		253.043.073.000		31.208.000.000		
		1 Manajemen Konstruksi & Pengawasan Tahap I	Aceh Besar	2.600.000.000						
		2 Pekerjaan Perpanjangan Landasan 500 x 45 m, pemindahan & pemasangan alat electrical dan alat navigasi	Aceh Besar	62.600.000.000						
		3 Pemb. Lapangan Parkir Kenderaan, STP, WTP Bandara Sultan Iskandarmuda	Aceh Besar	21.218.404.000						
		4 Pengadaan 1 (satu) unit Genset Bandara Sultan Iskandar Muda	Aceh Besar	3.500.000.000						
		5 Pembangunan Control Tower, Gedung BMG & Taman Alatnya di Bandara Sultan Iskandar Muda	Aceh Besar	2.365.000.000						
		Pemb. Bandara LASIKIN - SINABANG		20.820.000.000		0		0		
		6 Rehab. Rekons Fasilitas Bandara Lasikin Sinabang, pemotongan bukit, Jalan Inspekt, Landscape, Jalan Lingkungan	Simeulue	15.500.000.000						
		7 Studi KKOP Bandara Lasikin Sinabang	Simeulue	360.000.000						
		8 Pengawasan Rehab Fasilitas Bandara Lasikin Sinabang	Simeulue	660.000.000						
		9 Pembangunan Gedung Kantor Control Tower, Kantor Bandara, Gedung PKP-PK & Perumahan Bandara Lasikin Sinabang	Simeulue	3.750.000.000						
		10 Studi Amdal Bandara Lasikin Sinabang	Simeulue	550.000.000						
		Pemb. Bandara CUT NYAK DHIEH - MEULABOH		9.935.000.000		0		0		
		11 Rehab Fasilitas Sisi Udara Bandara Cut Nyak Dhien Meulaboh, perluasan apron (Tahap I), rasionalisasi runway strip & saluran	Nagan Raya	6.500.000.000						
		12 Pengawasan Rehab Fasilitas Sisi Darat dan Sisi Udara Bandara Cut Nyak Dhien Meulaboh	Nagan Raya	350.000.000						
		13 Pemb.Gedung Terminal Penumpang, Control Tower, Lapangan Parkir Kenderaan, Perluasan Apron (Tahap II) Bandara Cut Nyak Dhien Meulaboh	Nagan Raya	1.785.000.000						
		14 Studi Amdal Bandar Udara Cut Nyak Dhien Meulaboh	Nagan Raya	500.000.000						
		15 Rancangan Teknik Terinci (RTT) Fasilitas Sisi Udara Bandara Cut Nyak Dhien Meulaboh	Nagan Raya	800.000.000						
		Bandar Udara KUALA BATEE - BLANG PIDIE		10.900.000.000		0		0		
		16 Rehab & Rekons Bandara Kuala Batee Blang Pidie, perpanjangan Landasan, Stopway dan Resa	Aceh Barat Daya	10.000.000.000						
		17 Pengawasan Rehab dan Rekon Fasilitas Bandara Kuala Batee Blang Pidie	Aceh Barat Daya	500.000.000						
		18 Studi Amdal Bandara Kuala Batee Blang Pidie	Aceh Barat Daya	400.000.000						
		Bandar Udara T. CUT ALI - TAPAK TUAN		11.732.529.000		0		0		
		19 Rehab Rekons Fasilitas Bandara T.Cut Ali Tapak Tuan, perpanjangan Landasan, Stopway dan Resa	Tapak Tuan	10.862.529.000						
		20 Pengawasan Rehab dan Rekons Fasilitas Bandara T.Cut Ali Tapaktuan	Tapak Tuan	470.000.000						
		21 Studi Amdal Bandara T.Cut Ali Tapaktuan	Tapak Tuan	400.000.000						
		Pemb. Bandara REMBELE - TAKENGON		7.560.000.000		0		0		
		22 Pembangunan Fasilitas Sisi Udara dan Sisi Darat Bandara Rembele Takengon Tahap II	Bener Meriah	7.010.000.000						
		23 Pengawasan Pembangunan Fasilitas Sisi Udara dan Sisi Darat Bandara Rembele Takengon Tahap II	Bener Meriah	300.000.000						
		24 Rancangan Teknik terinci (RTT) Helipad di P.Rondo, P.Banyak & P.Breuh Prov. Nad	Sabang, Singkil, A.Besar	250.000.000						
		Bandar Udara MAIMUN SALEH - SABANG		1.563.955.000		0		0		
		25 Pemb. Paved Shoulder B.Sabang	Sabang	1.413.955.000						
		26 Pengawasan Rehab Fasilitas Sisi Darat Bandara Maimun Saleh Sabang	Sabang	150.000.000						

**RENCANA KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
TAHUN 2007 - 2009**

BIDANG	PROGRAM UTAMA	SUB BIDANG / KEGIATAN	LOKASI	2007		2008		2009		KETERANGAN
				NILAI (RUPIAH)	VOLUME	NILAI (RUPIAH)	VOLUME	NILAI (RUPIAH)	VOLUME	
		Perencanaan & Pembangunan Airstrip		1.150.000.000		0		28.000.000		
		27 Rancangan Teknik Terinci (RTT) Airstrip Blangkejeren	Gayo Lues	700.000.000				28.000.000	Ext Unit	
		28 Sdudi Amdal Airstrip Blang Kejeren Kab. Gayo Lues	Gayo Lues	450.000.000						
		Perencanaan & Pembangunan Helipad		14.325.000.000		253.043.073.000		31.180.000.000		
		29 RTT Fasilitas Control Tower, Gedung Kantor, Gedung Terminal Bandara Lasikin Sinabang	Simeulue	100.000.000						
		30 Pembangunan Helipad di Pulau Rondo	Sabang	1.500.000.000						
		31 Pengawasan Pembangunan Helipad di Pulau Rondo	Sabang	90.000.000						
		32 Pengawasan Pembangunan Air Strip di Blang Kejeren	Gayo Lues	285.000.000						
		33 Pembangunan Air Strip di Blang Kejeren	Gayo Lues	7.250.000.000						
		34 Perencanaan dan pengawasan jalan masuk bandara								
		a. Perencanaan jalan masuk bandara Hamzah Fansuri	A. Singkil	100.000.000						
		b. Pengawasan pembangunan jalan masuk bandara Hamzah Fansuri	A. Singkil	308.000.000						
		35 Pembangunan jalan masuk bandara Hamzah Fansuri	A. Singkil	4.692.000.000						
		36 Pengembangan Bandara Sultan Iskandar Muda (Lanjutan)	Aceh Besar			200.000.000.000	1 Pkt			
		37 Pengembangan Bandara Cut Nyak Dhien Meulaboh (Lanjutan)	Aceh Barat			53.043.073.000	1 Pkt			
		38 Pembangunan AirStrip Blang Kejeran	Gayo Lues							
		39 Pembangunan Helipad Di Pulau Banyak	Singkil					1.500.000.000		
		40 Pembangunan Helipad Di Pulau Breuh	Aceh Besar					1.500.000.000		
		41 Pengawasan Helipad Di Pulau banyak dan Breuh	Propinsi					180.000.000		
		42 Pembangunan Air Strip Blang Kejeran (Lanjutan)	Gayo Lues					28.000.000.000		
		C. TRANSPORTASI DARAT		52.732.901.000		-		141.437.500.000		
		1 Pembangunan Fas Keselamatan LLAJ Prov. Nad	Nad	4.000.000.000						
		2 Pengadaan Bus Bantuan Kab/Kota Nad	Nad	2.320.000.000						
		3 Pengawasan Pemb.Fas Keselamatan LLAJ Prov. Nad	Nad	160.000.000						
		4 Studi AMDAL Terminal Type A Banda Aceh	B.Aceh	300.000.000						
		5 Perencanaan Terminal di 8 Lokasi Nad	Nad	1.500.000.000						
		6 Pengawasan Terminal di 5 Lokasi (Lanjutan)	Nad	540.501.000						
		7 Pengawasan Rehab & Rekon APK Keudah (Lanjutan)	B.Aceh	100.000.000						
		8 Pemb. Terminal Type C di Aceh Singkil Tahap II	Singkil	4.282.400.000						
		9 Pemb. Terminal Type C di Aceh Barat Daya Tahap II	Abdya	2.900.000.000						
		10 Pemb. Terminal Type C di Seumelu Tahap II	Simeulue	1.900.000.000						
		11 Pembangunan Terminal Type A di Banda Aceh (Lanjutan)	B.Aceh	11.000.000.000						
		12 Rehab dan Rekon Terminal Angkutan Kota (APK) Keudah Tahap II	B.Aceh	1.000.000.000						
		13 Pemb. Terminal Type C di Aceh Utara Tahap II	Aceh Utara	2.500.000.000						
		14 - Pembangunan Terminal Type B di Calang	A. Jaya	5.000.000.000						
		15 - Pengawasan Pembangunan Terminal Type B di calang	A. Jaya	185.000.000						
		16 Pengawasan Pembangunan Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor di Aceh Timur	A. Timur	125.000.000						
		17 Pembangunan Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor di Aceh Timur	A. Timur	3.000.000.000						
		18 Pengawasan Pembangunan Terminal Type C di Peureulak	A. Timur	185.000.000						
		19 Pembangunan Terminal Tipe C di Peureulak	A. Timur	3.100.000.000						
		20 Pengawasan Pembangunan Terminal Tipe B di Takengon	A. Tengah	185.000.000						
		21 Pembangunan Terminal Tipe B di Takengon	A. Tengah	5.000.000.000						
		PEMBANGUNAN GEDUNG KHUSUS	A. Barat	3.450.000.000		0		0		
		Belanja Barang Operasional Lainnya		25.000.000		0		0		
		22 Operasional proyek		25.000.000						
		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	A. Barat	3.425.000.000		0		0		
		23 pengawasan pembangunan gedung pengujian kendaraan bermotor meulaboh		125.000.000						
		24 pembangunan gedung pengujian kendaraan bermotor meulaboh		3.000.000.000						
		25 Pelatihan Keppres No. 80 Tahun 2003		150.000.000						
		26 Pelatihan Manajemen Konstruksi		150.000.000						
		PEMBANGUNAN TERMINAL		0		0		141.437.500.000		
		27 Pembangunan Terminal Bus Tipe C di Jantho, Aceh Besar	Aceh Besar	0				5.000.000.000	1 Unit	
		28 Pembangunan Terminal Bus Tipe C di Lamno, Aceh Jaya	Aceh Jaya	0				5.000.000.000	1 Unit	
		29 Pembangunan Terminal Mobil Barang di Banda Aceh	Banda Aceh	0				5.000.000.000	1 Unit	
		30 Pembangunan Terminal Bus Tipe B di Calang (Lanjutan)	Aceh jaya	0				7.500.000.000	1 Unit	
		31 Pengawasan Pembangunan Terminal Bus Tipe B di Calang (Lanjutan)	Aceh jaya	0				187.500.000	1 Lap	
		32 Pembangunan Terminal Bus Tipe C di Beurenun, Pidie	Pidie	0				5.000.000.000	1 Unit	
		33 Pembangunan Terminal Bus Tipe B di Bireun	Bireun	0				10.000.000.000	1 Unit	
		34 Pembangunan Terminal APK Lhokseumawe	Lhokseumawe	0				5.000.000.000	1 Unit	
		35 Pembangunan Terminal Mobil Barang di Lhokseumawe	Lhokseumawe	0				3.000.000.000	1 Unit	
		36 Pengawasan Pemb. Terminal APK dan Terminal Mobil Barang Lhokseumawe	Lhokseumawe	0				250.000.000	1 Lap	
		37 Pembangunan Terminal Bus Tipe C di Bener Meriah	Bener meriah	0				5.000.000.000	1 Unit	
		38 Pembangunan Terminal Tipe C di Peurelak (Lanjutan)	Aceh timur	0				9.500.000.000	1 Unit	
		39 Pembangunan Terminal Tipe B di Takengon (Lanjutan)	Aceh tengah	0				21.000.000.000	1 Unit	

**RENCANA KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
TAHUN 2007 - 2009**

BIDANG	PROGRAM UTAMA	SUB BIDANG / KEGIATAN	LOKASI	2007		2008		2009		KETERANGAN
				NILAI (RUPIAH)	VOLUME	NILAI (RUPIAH)	VOLUME	NILAI (RUPIAH)	VOLUME	
		40 Pembangunan Terminal Tipe B di Blang Kejeran		0				15.000.000.000	1 Unit	
		41 Pembangunan Terminal Barang Terpadu Meulaboh	Aceh Barat	0				4.000.000.000	1 Unit	
		42 Pembangunan Terminal Bus Tipe B di Nagan Raya	Nagan Raya	0				10.000.000.000	1 Unit	
		43 Pembangunan Terminal Bus Tipe B di Subulussalam	Singkil	0				10.000.000.000	1 Unit	
		44 Pembangunan Terminal Bus Tipe C di Kota Fajar, Aceh Selatan	aceh Selatan	0				5.000.000.000	1 Unit	
		45 Pembangunan Gedung PKB di Aceh Timur (Lanjutan)	Aceh timur	0				8.000.000.000	1 Unit	
		46 Pembangunan Gedung PKB di Aceh Barat (Lanjutan)	Aceh Barat	0				8.000.000.000	1 Unit	
		D JALAN		771.414.063.000		1.432.174.979.000		2.147.161.500.000		
		D.1. JALAN NASIONAL		319.046.580.000		530.468.208.000		342.000.000.000		
		1. LINTAS TIMUR		112.027.900.000		173.467.800.000		-		
		1 Package No. 3 East Coast Bridges	Nad	16.244.250.000		3.248.850.000	Ext			
		2 SP-3 Package No.4 East Coast Road -I KM. 8.6 to 86	Nad	20.055.060.000		12.033.040.000	10,87 KM			
		3 Package No.6A Ulee Lheu Road KM 0.78 to 3.75	Nad	23.144.610.000						
		4 SP - 4 Package -7 Ulee Lheue Bridges	Nad	11.926.060.000		7.155.640.000	Ext			
		5 SP - 4 Package 6 B Ulee Lheue Road Work - 2	Nad	23.021.780.000						
		6 Package No. 5 East Coast Road Km. 86 to 150	Nad	17.636.140.000		7.054.460.000	8,2 KM			
		7 Banda Aceh - Sigli (ADB)	Nad			77.633.000.000	29,7 KM			
		8 Banda Aceh - Ulee Lheu (ADB)	Banda Aceh			18.515.690.000	3 KM			
		9 Ulee lheu - Sp Rima (ADB)	Banda Aceh			18.417.420.000	4,4 KM			
		10 Ulee Lheu Road / Akses ke Pelabuhan (ADB)	Banda Aceh			26.691.000.000	1,3 KM			
		11 Sigli - Lhokseumawe	Nad			2.718.700.000	1 KM			
		2. LINTAS BARAT		188.018.680.000		280.200.408.000		-		
		1 IRFF Paket Meulaboh - Tapak Tuan Seksi 1	Nad	10.000.000.000		31.097.000.000	30 KM			
		2 Paket BRR JN04.2 Meulaboh - Tapak Tuan Seksi 2 (Km 281sd Km 314)	Nad	22.237.300.000						
		3 Paket BRR JN04.3 Meulaboh - Tapak Tuan Seksi 3 (Km 314 sd Km 347)	Nad	22.073.301.000						
		4 Paket BRR JN04.4 Meulaboh - Tapak Tuan Seksi 4 (Km 347 sd Km 383)	Nad	21.352.263.000						
		5 IRFF Paket Meulaboh - Tapak Tuan Seksi 5	Nad	14.000.000.000		39.660.000.000	34,43 KM			
		6 IRFF Paket Meulaboh - Tapak Tuan Seksi 6	Nad	11.000.000.000		30.792.000.000	33,9 KM			
		7 Paket BRR JN05.1 Tapak Tuan- Batas Sumut Seksi 1 (Km 450 - sd Km 481.6)	Nad	13.902.941.000						
		8 Paket BRR JN05.3 Tapak Tuan- Batas Sumut Seksi 3 (Km 511.3 sd Km 534.4)	Nad	16.348.458.000						
		9 IRFF Tapak Tuan - Batas Sumut Seksi 2	Nad	11.000.000.000		30.832.000.000	30 KM			
		10 IRFF Tapak Tuan - Batas Sumut Seksi 4	Nad	9.000.000.000		21.217.000.000	24,1 KM			
		11 Paket BRR JN05.5 Tapak Tuan- Batas Sumut Seksi 5 (Km 561.6 sd Km 583.4)	Nad	14.104.417.000						
		12 IRFF Tapak Tuan - Batas Sumut Seksi 6	Nad	14.000.000.000		37.344.000.000	33,9 KM			
		13 IRFF Lipat Kajang - Batas Sumut	Nad	9.000.000.000		34.258.408.000	21 KM			
		14 Meulaboh - Tapak Tuan - Batas Sumut	Nad	0		55.000.000.000	1 Pkt			
		3. LINTAS TENGAH		19.000.000.000		76.800.000.000		342.000.000.000		
		1 Rehab & Rekon Genteng Gerbang-Pameu	Nad	6.000.000.000				42.000.000.000	48 Km	
		3 IRFF Jalan Keumala - Geumpang	Nad	13.000.000.000		46.800.000.000				
		4 Geumpang - Pameuh (JBIC)		0		30.000.000.000	55 Km	300.000.000.000		
		D.2. JALAN PROVINSI		147.101.985.000		212.490.000.000		200.000.000.000		
		1 Rehab dan Rekons.Jalan Takengon - Bintang - Kebayakan Seksi 2 (BRRJP - 03.2)	A. Tengah	15.110.000.000		5.000.000.000	4 KM			
		2 Rehab & Rekon Jalan Bireun - Takengon	A. Tengah	5.000.000.000						
		3 IRFF Isaq - SP.Gelelungi	A. Tengah	12.000.000.000		24.800.000.000	57 KM			
		4 Rehab dan Rekons. Suak Buluh -Lasikin- Maudil (BRRJP - 04) Seksi 2 Multi Year	Simeulue	16.500.000.000						
		5 Rehab & Rekon Jembatan Bunon dan Srilamon	Simeulue	6.333.000.000						
		6 IRFF Lasikin Nasreuhe Seksi 1	Simeulue	9.000.000.000						
		7 IRFF Lasikin Nasreuhe Seksi 2	Simeulue	15.000.000.000						
		8 IRFF Geumpang - Tutut	Pidie - A.Barat	15.000.000.000		42.500.000.000	55 KM			
		9 IRFF - Tutut - Meulaboh	Pidie - A.Barat	15.000.000.000		6.000.000.000	20 KM			
		10 Rehab & Rekons. Jalan Lipat Kajang-Singkil	A. Tengah	2.000.000.000						
		11 IRFF Jl. Kuala Tuha - Lamie	Nagan Raya	12.000.000.000		43.200.000.000	33 KM			
		12 Rehab Rekon Jembatan Kuala Tadu	Nagan Raya	2.200.000.000						
		13 Rehab Rekon Jl. Lampuyang - Gugop - Seurapong	Pulo Aceh	2.960.985.000						
		14 IRFF Sabang-Iboih Seksi 3	Sabang	9.000.000.000		40.990.000.000	22 KM			
		15 Akses New Tow Tahap - 1	B.Aceh	998.000.000						
		16 IRFF Akses New Tow Tahap II	B.Aceh	9.000.000.000		20.000.000.000	3 Km			
		17 Lampuyang - Gugop - Seurapong (APBN)	Aceh Besar	0		15.000.000.000	11 KM			
		18 Pembinaan Perencanaan Jalan	Propinsi	0		15.000.000.000				
		19 Pulau Simeulue (IDB)	Propinsi	0				30.000.000.000	40 Km	
		20 Bireuen - Takengon (Jalan KKA) - ADB	Propinsi	0				170.000.000.000	50 Km	
		D.3. JALAN KABUPATEN		305.265.498.000		689.216.771.000		1.605.161.500.000		
		1 Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jalan Krueng Glumpang- Seunelop (BRR-JK AB 15)	A. Besar	3.064.663.000						
		2 Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jalan Lampadang (BRR- JK AB 16)	A. Besar	290.000.000						
		3 Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jalan Pesantren Ulee Titil (BRR- JK AB 17)	A. Besar	100.000.000						

**RENCANA KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
TAHUN 2007 - 2009**

BIDANG	PROGRAM UTAMA	SUB BIDANG / KEGIATAN	LOKASI	2007		2008		2009		KETERANGAN
				NILAI (RUPIAH)	VOLUME	NILAI (RUPIAH)	VOLUME	NILAI (RUPIAH)	VOLUME	
		4 IRFF Pasar Lhoong - Umong Siribee, Blang Mee - Geunteut, Lamkuta - Umong	A. Besar	5.226.000.000						
		5 IRFF Pasar Lhoong - Umong Siribee, Blang Mee - Geunteut, Lamkuta - Umong	A. Besar	2.574.000.000						
		6 Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jalan BRR - JK AJ 6 Batee Tutong - Simpang Tugu Calang	A. Jaya	3.503.826.000						

**RENCANA KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
TAHUN 2007 - 2009**

BIDANG	PROGRAM UTAMA	SUB BIDANG / KEGIATAN	LOKASI	2007		2008		2009		KETERANGAN
				NILAI (RUPIAH)	VOLUME	NILAI (RUPIAH)	VOLUME	NILAI (RUPIAH)	VOLUME	
		7 Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jembatan Lageun - Pante Kuyun (Krueng Padang)	A. Jaya	8.200.000.000						
		8 IRFF Dayah Baro - Ujong Serangga, Jl.Citra Ds Keutapang, Jl. Mesjid Agung Dayah	A. Besar	3.618.000.000						
		9 IRFF Dayah Baro - Ujong Serangga, Jl.Citra Ds Keutapang, Jl. Mesjid Agung Dayah	A. Besar	1.782.000.000						
		10 BRR-JK BNA 01 Jl. Syiah Kuala (Sp. Pocut Baren - Makam Syiah Kuala)	B.Aceh	8.696.127.000						
		11 BRR-JK BNA 02 Jl. Sp. Tgk. Dibrang-Sp. Gano	B.Aceh	4.667.928.000						
		12 BRR-JK BNA 03 Jl. Tgk Meunasah Meucap (SP Dodik - SP Lamjame	A. Besar	4.827.191.000						
		13 Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jalan Balohan - Keunekal (Lanjutan 2)	Sabang	4.847.000.000		10.000.000.000	1 KM			
		14 IRFF Rehab. dan Rekonst. Jalan Trieng Gadeng - Pangwa, Gigeung - Iboih	Pidie	9.168.000.000						
		15 IRFF Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jalan Seumuddon - Bantayan	A. Utara	8.484.000.000						
		16 Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jalan Ulee U - Lincab	Biereuen	3.434.000.000						
		17 IRFF Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jalan Simpang Mamplam - Kd. Samalanga	Biereuen	5.986.000.000						
		18 Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jalan Stadion		3.599.000.000						
		19 Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jalan Sp. Poska - Jalan Elak	Lhokseumawe	2.119.000.000						
		20 Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jalan Tanjung Minjet-Meunasah Asan	A. Timur	3.200.000.000						
		21 Rehab Rekon Jalan Tanjung Minjet-Meunasah Asan	A. Timur	1.614.827.000						
		22 Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jalan Idi Rayeuk- Keude Gerohak	A. Timur	3.000.000.000						
		23 Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jalan Batu Lintang-Tanoh Abu	A. Tengah	4.000.000.000						
		24 Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jalan Air Asin-Gelampang Gading]	A. Tengah	3.000.000.000						
		25 Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jalan Sp. Kenyaran-Waih Ilang	Gayo Lues	4.000.000.000						
		26 Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jalan Pasir - Peureulak	Gayo Lues	3.000.000.000						
		27 Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jalan Semadam - Pulo Tiga	A. Tamiang	7.200.000.000						
		28 Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jalan Singgah Mulo-Simpang Lancang	Bener Meriah	4.200.000.000						
		29 Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jalan Elak Bandara Rembele	Bener Meriah	3.033.150.000						
		30 Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jalan Cemparam-Jamur Atu	Bener Meriah	0						
		31 Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jalan Utama-Karang Anyer	Langsa	1.000.000.000						
		32 Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jalan Birem Puntong - Perumnas	Langsa	1.600.000.000						
		33 Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jalan Paket BRR Jl.Langsa 1 Sukarejo-Cinta Raja CS	Langsa	1.080.490.000						
		34 Rehab Rekon Jln. T. Umar Simpang Comodore, Silung Matang Panjang (LGS 2)	Langsa	1.417.640.000						
		35 Pengawasan Pemb. Dan Rekonst. Jalan Ruas Kuala Bubon - Suak Gedubang	A. Barat	68.000.000						
		36 Pengawasan Jalan Meurebo - rantau Paanjang	A. Barat	85.000.000						
		37 Pengawasan pemb. Jalan lingkar bebek - langi	Simeulu	223.000.000						
		38 Pengawasan pemb. Jalan Simeulu tahap I	Simeulu	145.792.000						
		39 Pengawasan penataan lingkungan dalam pasar inpres	Simeulu	45.000.000						
		40 Pengawasan jln tembus kom PU	Simeulu	38.000.000						
		41 Pemb. Dan rekonst. Jalan Beringin Maju Cs (Lelang thp.2)	A. Barat	5.900.539.000						
		42 Pemb. Dan rekonst. Jalan Cut Nyak Dhien Cs (Lelang thp.2)	A. Barat	2.851.905.000						
		43 Pemb. Dan rekonst. Jalan Ruas Meureubo - Rantau Panjang	A. Barat	2.800.000.000						
		44 Pemb. Dan rekonst. Jalan Ruas Kuala Bubon - Suak Gedubang	A. Barat	2.469.790.000						
		45 PENDAMPING-IRFF tanjung meulaboh-pante cermin	A. Barat	5.000.000.000						
		46 IRFF tanjung meulaboh-pante cermin	A. Barat	1.980.000.000						
		47 Rehabilitas dan Rekonstruksi Jalan Lanting - Labuhan Bajau - Pulau Bengkalak	Simeulu	1.794.313.000						
		48 Rehabilitas dan Rekonstruksi Jalan Sinabang-Sibigo	Simeulu	3.000.110.000						
		49 Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jalan Dalam Kota Sinabang, Teuku Duijung Cs	Simeulu	1.041.000.000						
		50 Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jalan Lingkar Simeulue Babek - Langi (8 Km)	Simeulu	11.463.208.000						
		51 Penataan Lingkungan Dalam Pasar Inpres Simeulue	Simeulu	1.250.000.000						
		52 Rehab. Dan Pemb. Jalan Tembus Kompleks Eks P.U Ds. Ameria Bahagia	Simeulu	1.000.000.000						
		53 Rehabilitas dan Rekonstruksi Jalan Lingkar Terminal Blang Pidie dan Kuta Tinggi	Abdya	2.797.347.000						
		54 Rehabilitas dan Rekonstruksi Jalan Pulau Kayu Lama Muda (2 Km)	Abdya	2.213.720.000						
		55 Pemb. Jembatan Drien Leukit dan Jembatan Lama Muda	Abdya	4.020.000.000						
		56 Pemb. Jembatan Drien Leukit dan Jembatan Lama Muda	Abdya	1.800.000.000						
		57 Rehabilitas dan Rekonstruksi Jalan Alue Bily - Suka Mulia	Nagan Raya	2.980.961.000						
		58 PENDAMPING-IRFF Kabu Baroh - Pulo Teungoh, Kd Simplang Blang Ara - Lhok Tonge, Jeuram Kulu	Nagan Raya	3.417.000.000						
		59 IRFF Kabu Baroh - Pulo Teungoh, Kd Simplang Blang Ara - Lhok Tonge, Jeuram Kulu	Nagan Raya	1.683.000.000						
		60 Trumon - Buloh Seuma	A. Selatan	5.109.000.000						
		61 Rehab dan Rekon Jalan Mbarung - Kedataran	A. Tenggara	3.271.000.000						
		62 Rehab dan Rekon Jalan Paket BRR Bakongan - Beutong	A. Selatan	1.914.400.000						
		63 Rehab dan Rekon Jalan Sp. Semadam - Lw ALas - Salim Pinem	A. Tenggara	3.572.776.000						
		64 Rehab dan Rekon Jalan Rimo-Blok VI-Gunung Lagan	Singkil	3.691.933.000						
		65 Rehab dan Rekon Pengembangan Jalan Handel-Singkohor	Singkil	2.000.000.000						
		66 Rehab dan Rekon Jalan Kurnia-Sumur Batu	Singkil	1.700.000.000						
		67 Pembangunan Jembatan Trandas Bentang 20 m Aceh Singkil	Singkil	1.100.000.000						
		68 Pembangunan Box Culvert Trandas Aceh Singkil	Singkil	200.000.000						
		69 Pembangunan Jembatan Trandas Bentang 5 m Aceh Singkil	Singkil	250.000.000						
		70 Pembangunan Jembatan Taqwa Aceh Singkil	Singkil	290.000.000						

**RENCANA KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
TAHUN 2007 - 2009**

BIDANG	PROGRAM UTAMA	SUB BIDANG / KEGIATAN	LOKASI	2007		2008		2009		KETERANGAN
				NILAI (RUPIAH)	VOLUME	NILAI (RUPIAH)	VOLUME	NILAI (RUPIAH)	VOLUME	
		HEADER								
		71 Rehabilitas dan Rekonstruksi Jalan Sp. Kerenjala - SKPD Sp.1	Singkil	3.479.980.000						
		72 Rehabilitas dan Rekonstruksi Jalan Sp. Kerenjala - SKPD Sp.1 (MDF)	Singkil	1.714.020.000						
		Belanja Jasa Konsultan								
		73 Perencanaan dan Pengawasan Jembatan Singkil								
		74 a. Perencanaan Jembatan Singkil	Singkil	70.000.000						
		75 b. Pengawasan Jembatan Singkil	Singkil	90.000.000						
		76 Perencanaan dan Pengawasan Jalan Kurnia-Sumur Batu								
		77 a. Perencanaan Jalan Kurnia-Sumur Batu Singkil	Singkil	30.000.000						
		78 b. Pengawasan Jalan Kurnia-Sumur Batu Singkil	Singkil	70.000.000						
		79 Jalan Sp Lamnyong - Cot Iri	Banda Aceh			8.200.000.000				
		80 Jl. Deah Raya Tibang	Banda Aceh			1.868.350.000	1,72	KM		
		81 Jl. Chik Di Pineung I - IX	Banda Aceh			3.323.920.500	3,06	KM		
		82 Jl. Tgk Lam-Oe	Banda Aceh			726.000.000	0,44	KM		
		83 Jl. Nyak Adam Kamil III and IV	Banda Aceh			586.570.500	0,54	KM		
		84 Jl. Sulaiman Daud Syah	Banda Aceh			693.000.000	0,42	KM		
		85 Jl. Rawa Sakti	Banda Aceh			782.100.000	0,72	KM		
		86 Jl. Sultan Malikussaleh	Banda Aceh			1.194.870.500	1,1	KM		
		87 Lanjutan Peningkatan Ruas Jalan Balohan Keunekai	Sabang				10	KM		
		88 Peningkatan Jalan Ke Lokasi Pengungsi Ujong Sikundo Krueng Raya	Sabang			2.000.000.000	2	KM		
		89 Jalan Ie Mele - Balohan (lanjutan)	Sabang			12.040.000.000	12	KM		
		90 Peningkatan Ruas Batee Shock (Simpang Cot Damar- Keunekai)	Sabang			9.600.000.000	9	KM		
		91 Jalan dan Jembatan Labui - Labui Baro	Aceh Besar			4.000.000.000	3	Km		
		92 Jalan Lambdhe - Lampu uk (Escape Road)	Aceh Besar			7.000.000.000	5,5	Km		
		93 Jl. Kantor Camat, Kec. Leupung	Aceh Besar			6.952.000.000	3,2	Km		
		94 Jl. Meunauh Ketapang, Desa Lamsujen, Kec. Lhoong	Aceh Besar			11.948.750.000	5,5	Km		
		95 Jl. SP Lambaro - Cot Iri Limpok, Darussalam	Aceh Besar			6.376.280.750	5,87	Km		
		96 Jl. SP Lambaro - Krueng Mak	Aceh Besar			9.776.250.000	4,5	Km		
		97 Jl. Indrapuri - Lamkabeu	Aceh Besar			7.623.000.000	4,62	Km		
		98 Jl. Kemireu - Lampakuk Section 1	Aceh Besar			7.169.250.000	3,3	Km		
		99 Jl. Kemireu - Lampakuk Section 2	Aceh Besar			3.150.120.500	2,9	Km		
		100 Jl. Kemireu - Lampakuk Section 3	Aceh Besar			4.996.750.000	2,3	Km		
		101 Jl. Lampenerut - P. Bilui - Sibreh	Aceh Besar			15.840.000.000	9,6	Km		
		102 Jl. SP. Japakeh - Cot Gae	Aceh Besar			6.930.000.000	4,2	Km		
		103 Kota Jantihoe - resettlement / Terebeh	Aceh Besar			9.355.500.000	5,67	Km		
		104 Jl. Aneuk Galong - Weu Bada, Indrapuri	Aceh Besar			16.728.250.000	7,7	Km		
		105 Jl. & Jembatan Desa Ie Alang	Aceh Besar			5.500.000.000	0,94	km		
		106 Rehab-Rekon Jalan Keude Panga - Ujung Buloh (Kec. Panga)	Aceh Jaya			7.000.000.000	7	KM		
		107 Jalan Pasar Lamno (Kec. Jaya)	Aceh Jaya			2.000.000.000	2	Km		
		108 Jalan Janget - Kuala Daya Kec. Jaya	Aceh Jaya			5.000.000.000	3	Km		
		109 Jalan dan Jembatan Kuala Meurisi Kec Krueng Sabee	Aceh Jaya			5.500.000.000	3,5	Km		
		110 Pembangunan Jalan Lingkar Dalam Kota Calang Baru	Aceh Jaya			7.500.000.000	5	Km		
		111 Jl. Keude KR Sabee, Desa Panggong	Aceh Jaya			26.939.000.000	12,4	KM		
		112 Jembatan Kualabakong	Aceh Jaya			3.025.000.000	0,022	km		
		113 Lamno Bypass I, Lam Durian section	Aceh Jaya			2.607.000.000	2,4	KM		
		114 Jl. Arongan Cot Langsat	Aceh Jaya			10.210.750.000	4,7	KM		
		115 Jl. Pasi Timon	Aceh Jaya			4.950.000.000	3	KM		
		116 Jl. TVRI	Aceh Jaya			749.510.250	0,69	KM		
		117 Rehab. & Rekonst. Jalan Meureudu - Kuala Kec. Meureudu	Pidie			1.730.000.000	1,06	KM		
		118 Rehab. & Rekonst. Jalan Blang Malu - Ujong Rimba Kec. Mutiara Timur	Pidie			3.500.000.000	2,5	KM		
		119 Rehab. & Rekonst. Jalan Ie Leubeu - Pasi Lhok - Jeumeurang (Lanjutan) Kec. Kb.	Pidie			1.680.000.000	1,2	KM		
		120 Jalan Rungkom - Neuen Kec Batee	Pidie			2.100.000.000	1,5	Km		
		121 Jalan Beuracan - Muling Kec Meureudu	Pidie			4.480.000.000	3,2	Km		
		122 Rehab dan Rekon Jalan Beuracan - Teupin Peuraho Merdu	Pidie			2.380.000.000	1,7	KM		
		123 Jembatan Kr. Pangwa Kec. Trieng Gadeng				2.000.000.000	1	Unit		
		124 Pembangunan Box Culvert Ds Bungan Kec Meurah Dua	Pidie			400.000.000	1	Unit		
		125 Rehab dan Rekon Jalan Sp. Tambu - Lhok Dagang Tahap II	Bireuen			2.983.000.000	2,5	KM		
		126 Pembangunan Jalan Sp Mamplam - Kr Meusagob	Bireuen			3.900.000.000	4	KM		
		127 Rehab. & Rekonst. Jalan Keude Lapang - Kuala Cangko	Aceh Utara			5.037.000.000	1,8	KM		
		128 Pemb dan Peningk Jalan Kr. Mane - Bungkah	Aceh Utara			7.567.000.000	6,9	KM		
		129 Rehab & Rekon Jalan Alue Kuyun - Kuala Jambo Aye	Aceh Utara			4.920.000.000	4,1	KM		
		130 Rehab. dan Rekonst. Jalan Puntuet - Blang Weu	Lhoksemawe			2.598.298.000	2,2	KM		
		131 Rehab. dan Rekonst. Jalan Merdeka	Lhoksemawe			2.663.000.000	3	KM		
		132 Rehab & Rekon Jln Sp Poska - Jln Elak Thp II	Lhoksemawe			1.650.000.000	2,4	KM		
		133 Rehab jl Sp Semadam-Pulo Tiga (lanjutan)	Tamiang			16.800.000.000	12	KM		
		134 Pemb. Gelampang Gading - Tanoh Abu (Lanjutan)	Aceh Tenggara			8.120.000.000	5,8	KM		
		135 Jalan Papalang - Beurawang Gading	Aceh Tenggara			8.400.000.000	6	KM		
		136 Pembukaan jalan Gunung UjenGele Rau	Aceh Tenggara			4.700.000.000	8	Km		
		137 Jalan Weh Lah - Sp.Lancang (Lanjutan)	Bener Meriah			9.380.000.000	6,7	KM		
		138 Pembangunan Jembatan Suka Damai Rusip	Bener Meriah			5.200.000.000	0,05	m		

**RENCANA KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
TAHUN 2007 - 2009**

BIDANG	PROGRAM UTAMA	SUB BIDANG / KEGIATAN	LOKASI	2007		2008		2009		KETERANGAN
				NILAI (RUPIAH)	VOLUME	NILAI (RUPIAH)	VOLUME	NILAI (RUPIAH)	VOLUME	
		139 Rehab Jl. Sp. Kenyaran – Aih Ilang (lanjutan)	Gayo Lues			11.289.000.000	10 KM			
		140 Jalan Sp Penampaan -RSU - Badak	Gayo Lues			4.900.000.000	3,5 Km			
		141 Jalan Idi Rayeuk - Keude Geurobak	Aceh Timur			21.000.000.000	15 KM			
		142 Jalan Keude Rambe - Perumnas - Timbang Langsa	Langsa			12.600.000.000	9 KM			
		143 Jl. Kuala Bubon - Suak Geudeubang	Aceh Barat			17.380.000.000	8 KM			
		144 Jl. Gunong Kleng - Peunaga Cot Ujong	Aceh Barat			6.930.000.000	4,2 KM			
		145 Jembatan Pasi Malee (to be provided)	Aceh Barat			21.450.000.000	0,12 KM			
		146 Jl. Sudirman	Aceh Barat			825.000.000	0,5 KM			
		147 Jl. Let Mubin	Aceh Barat			4.455.000.000	2,7 KM			
		148 Jl. Pribu - Karak Section 1	Aceh Barat			33.891.000.000	15,6 KM			
		149 Jl. Layueng - Gunong Meuh Section 1	Aceh Barat			27.156.250.000	12,5 KM			
		150 Jl. Layueng - Gunong Meuh Section 2	Aceh Barat			18.031.750.000	8,3 KM			
		151 Jl. Suenebok Woila - Alue Kuyue Section 1	Aceh Barat			3.476.000.000	16 KM			
		152 Jl. Suenebok Woila - Alue Kuyue Section 2	Aceh Barat			9.124.500.000	4,2 KM			
		153 Jl. T.J.Meulaboh - Pante Cermin	Aceh Barat			13.686.750.000	6,3 KM			
		154 Jalan Alue Siron - Alue Bata	Nagan Raya			10.000.000.000	20 KM			
		155 Jalan Jeuram Kulu	Nagan Raya			4.000.000.000	2,5 KM			
		156 Jalan Alue Billie - Suka Mulia	Nagan Raya			4.000.000.000	2,5 KM			
		157 Jalan Guhang - Cot Mane	Abdya			7.000.000.000	2 KM			
		158 Jalan SP III - Urok Pawoh	Abdya			3.000.000.000	2 Km			
		159 Jalan Meunasah Teugoh	Abdya			3.000.000.000	2 Km			
		160 Jembatan Suak Beurembang	Abdya			1.200.000.000	0,06 km			
		161 Jembatan Luan Surip (rangka Baja)	Simeulue			6.000.000.000	0,06 km			
		162 Jembatan Ladon ((rangka Baja)	Simeulue			6.000.000.000	0,05 km			
		163 Jalan Bukangan - Beutong (8 Km)	Aceh Selatan			5.200.000.000	8 KM			
		164 Jalan Pasie Lembang - Kumbang Gajah (7,5) KM	Aceh Selatan			5.250.000.000	7,5 KM			
		165 Jalan Tanah Munngu - Pucuk Lembang	Aceh Selatan			7.500.000.000	8 KM			
		166 Jalan Trumon - Teupin Tinggi	Aceh Selatan			7.500.000.000	10 KM			
		167 Jembatan Ds Keumumun	Aceh Selatan			1.000.000.000	1 Unit			
		168 Jalan Lingkar P. Balai	Aceh Singkil			2.350.000.000	1,2 KM			
		169 Jalan Bukit Harapan - L. Bisik	Aceh Singkil			2.150.000.000	1,5 KM			
		170 Jalan Kp. Badar - Genasing	Aceh Singkil			2.050.000.000	2 KM			
		171 Jalan Lentong - Kirenjala	Aceh Singkil			2.450.000.000	2,2 KM			
		172 Rehab & rekon Jembatan Singkil - Kuala baru	Aceh Singkil			12.766.000.000	0,22 M			
		173 Rehab Jalan Lingkar Desa Labuhan Tarok	Aceh Tenggara			1.500.000.000	5 KM			
		174 Rehab & Rekon Jalan Simpang Lawe Bekang - Sp Bukahan	Aceh Tenggara			5.700.000.000	3,8 KM			
		175 Rehab & rekon Sp Rikit - Lawe Sikahan	Aceh Tenggara			6.500.000.000	5,7 Km			
		176 Jembatan Rangka Baja Pante Dona				3.000.000.000	6,5 Km			
		177 Jembatan Lubuk Layu	A. Singkil			5.000.000.000	1 Unit			
		178 Jembatan Lhok Sialang	A. Singkil			10.000.000.000	10 KM			
		179 Jembatan Desa Mutiara	A. Singkil			2.500.000.000	5 KM			
		180 Jembatan Desa Ie Merah Pasie Raja 20 M	A. Selatan			1.875.000.000	2,5 KM			
		181 Jembtan Desa Simpang III Kluet Tengah 18 M	A. Selatan			2.500.000.000	2,5 KM			
		182 Jalan Taman Makam Pahlawan	Banda Aceh					550.000.000	0,99 KM	
		183 Jalan Akasia Prada	Banda Aceh					175.000.000	0,32 KM	
		184 Jalan Kenari Prada	Banda Aceh					195.000.000	0,35 KM	
		185 Jalan Jambu	Banda Aceh					190.000.000	0,27 KM	
		186 Jalan Stadion H. Dimurtala	Banda Aceh					1.200.000.000	1,2 KM	
		187 Jalan Sultan Malikul Saleh (Spg Nesu - Spg Sukarno Hatta)	Banda Aceh					8.500.000.000	4,5 KM	
		188 Lanjutan Peningkatan Ruas Ie Meulee Balohan	Sabang					12.040.000.000	1 Pkt	
		189 Peningkatan Ruas Balohan - Aneuk Laot	Sabang					10.000.000.000	1 Pkt	
		190 Peningkatan Ruas Batee Shock (Simpang Cot Damar- Keunekai)	Sabang					9.600.000.000	1 Pkt	
		191 Pembangunan Jl. Akses Desa Nusa	Aceh Besar					2.900.000.000	2,9 KM	
		192 Pembangunan Jl. Labui - Labui Baru	Aceh Besar					3.000.000.000	3 KM	
		193 Pembangunan Jl. Lamtamot - Panca	Aceh Besar					4.000.000.000	4 KM	
		194 Pembangunan Jl. SP . Japakeh - Cot Gue	Aceh Besar					4.000.000.000	4 KM	
		195 Pembangunan Jembatan Kkrueng Kalok (60 M)	Aceh Besar					4.500.000.000	60 M	
		196 Pembangunan Jembatan Gantung Desa Lamtui	Aceh Besar					6.375.000.000	85 M	
		197 Pembangunan Jembatan Desa Labui	Aceh Besar					2.625.000.000	35 M	
		198 Pembangunan Jembatan Alue Sabang (100 M)	Aceh Besar					7.500.000.000	100 M	
		199 Pembangunan Jembatan Ie Alang (40 M) Tahap I	Aceh Besar					3.000.000.000	40 M	
		200 Jalan Lamitra - Sim Kuta Baro	Aceh Besar					2.100.000.000	2,6 KM	
		201 Rehab-Rekon Jalan Pasi Timon (Kec. Teunom)	Aceh Jaya					3.000.000.000	3 KM	
		202 Rehab-Rekon Jalan Jangeut - Kuala Daya (Kec. Jaya)	Aceh Jaya					5.000.000.000	5 KM	
		203 Rehab-Rekon Jalan Gunong Kual (Kec. Setia Bakti)	Aceh Jaya					3.500.000.000	3,5 KM	
		204 Rehab-Rekon Jalan Keude Kr. Sabee - Paya Seumantok (Kec. Kr Sabee)	Aceh Jaya					5.000.000.000	5 KM	
		205 Pembangunan Jalan Lingkar Dalam Kota Calang Baru	Aceh Jaya					7.500.000.000	5 KM	
		206 Pembangunan Jalan Arongan Cot Langsat - Jempheuk	Aceh Jaya					3.500.000.000	3,5 KM	
		207 Rehab. & Rekonst. Jalan Cot Glumpang - Unoe Kec. Glumpang Baro	Pidie					3.290.000.000	2,35 KM	
		208 Rehab. & Rekonst. Jalan Kp. Pisang - Trueng Campli Kec. Geumpang Baro	Pidie					7.700.000.000	5,5 KM	
		209 Rehab. & Rekonst. Jalan Simpang Tiga - Gigieng Kec. Simpang Tiga	Pidie					3.500.000.000	2,5 KM	

**RENCANA KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
TAHUN 2007 - 2009**

BIDANG	PROGRAM UTAMA	SUB BIDANG / KEGIATAN	LOKASI	2007		2008		2009		KETERANGAN
				NILAI (RUPIAH)	VOLUME	NILAI (RUPIAH)	VOLUME	NILAI (RUPIAH)	VOLUME	
		210 Rehab. & Rekonst. Jalan Beureunon - Kembang Tanjung	Pidie					4.800.000.000	4	KM
		211 Rehab. & Rekonst. Jalan Paru - Cubo	Pidie					5.400.000.000	4,5	KM
		212 Pembangunan Jembatan Kuala Siron Kec. Trienggadeng	Pidie					2.000.000.000	1	Unit
		213 Rehab. & Rekonst. Jalan Lueng Putu - Blang Krueng, Kec. Bandar Baru	Pidie					5.000.000.000	8	KM
		214 Pembangunan Jembatan Desa Reuseh Kec. Tringadeng	Pidie					2.000.000.000	1	Unit
		215 Rehab. & Rekons. Jalan Sp. Teupok Baroh - Lhok Awe-Awe	Bireuen					10.747.000.000	8	KM
		216 Pembangunan Jalan Blang Gandai - Sarah Sirong Km. 13 (Kec. Jeumpa/ Juli)	Bireuen					3.300.000.000	25	KM
		217 Pembangunan Jalan Lingkar Utara Pucok Alue Rheng - Jangka (Kec. Jeumpa/ Kuala/	Bireuen					26.000.000.000	21	KM
		218 Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Pucok Alue Rheng - Bukit Teukuh (Kec.	Bireuen					30.000.000.000	20	KM
		219 Pemb. Jalan Utama Kawasan Industri Cot Batee Geulungku	Bireuen					36.216.500.000	15	KM
		220 Pemb. Jalan Lingkar Kota Bireuen (Tahap I : Ruas Cot Unoe - Balee Seutui - Jangka)	Bireuen					25.988.000.000	14	KM
		221 Pembangunan Jalan Kr. Meusagop - Tp. Mane (Sp.	Bireuen					20.000.000.000	54	KM
		222 Pembangunan Jalan Sp. Bugeng - Balee Daka (Kec. Peudada/ Peulimbang)	Bireuen					1.100.000.000	8	KM
		223 Pembangunan dan Peningkatan Jalan Kr. Manee - Bungkah	Aceh Utara					7.567.000.000	6,9	KM
		224 Rehab. Jalan Pante Gurah - Tanoh Anne	Aceh Utara					3.750.000.000		KM
		225 Rehab. & Rekonst. Jalan Pawood - le masen Kec. Muara Tiga	Aceh Utara					1.700.000.000	2,7	KM
		226 Jl Paya Raya - Telaga Muku	Aceh Tamiang					8.400.000.000	6	KM
		227 Jl Suka Rahmat - Prapen	Aceh Tamiang					11.200.000.000	8	KM
		228 Rehab Jl. Sp. 4 Upah. Peukan Sei Iyu	Aceh Tamiang					29.250.000.000	19,5	KM
		229 Rehab Jl. Lubuk Siduk Sikumur	Aceh Tamiang					30.000.000.000	20	KM
		230 Tangsi Lama - Tanjung Mulia	Aceh Tamiang					34.000.000.000	200	KM
		231 Jembatan Gondeng (100 M)	Aceh Tamiang					17.000.000.000	100	M
		232 Jembatan Sungai Liput (160M)	Aceh Tamiang					27.200.000.000	160	M
		233 Jl Gunung Jati - Kenawat - Tebuk	Aceh Tenggara					7.000.000.000	5	KM
		234 Pemb. Jembatan Rangka Baja (Brawang Gajah)	Aceh Tenggara					6.300.000.000	60	M
		235 Jalan Sp. Kebayakan - Sp KKA	Aceh Tenggara					14.700.000.000	10,5	KM
		236 Jalan Bintang - Serule	Aceh Tenggara					16.800.000.000	12	KM
		237 Peningkatan Jl. Ampa Kolak-ketukah	Aceh Tenggara					21.027.000.000	16	KM
		238 Pemb. Jembatan Rangka Putri Beutung	Aceh Tenggara					7.000.000.000	60	M
		239 Rehab. Jl. Wih Ilang - Atu Lintang I	Aceh Tenggara					14.275.000.000	14	KM
		240 Rehab. Jl. Bagian Selatan Danau Laut Tawar	Aceh Tenggara					10.196.000.000	10	KM
		241 Pemb. dan Pemeliharaan Jalan Kabupaten	Aceh Tenggara					20.000.000.000	1	Pkt
		242 Pemb. dan Pemeliharaan Jalan Kampung	Aceh Tenggara					15.000.000.000	1	Pkt
		243 Pembukaan jalan Gunung UjenGele Rau	Aceh Tenggara					4.700.000.000	8	KM
		244 pembukaan jalan gele rau 8 Km-paya tumpi 2,05 km	Aceh Tenggara					1.800.000.000	10,05	KM
		245 Jl Simpang OWAQ - Jamat	Aceh Tenggara					6.300.000.000	4,5	KM
		246 Pemb. Jalan Eks. P.T. Api (Web Lah - Lancang)	Bener Meriah					6.300.000.000	4,5	KM
		247 Jalan Sp. KKA Pila Merah - Kute Kering	Bener Meriah					7.980.000.000	5,7	KM
		248 Jalan Ulu Naron - Lancang	Bener Meriah					5.880.000.000	4,2	KM
		249 Rehabilitasi Jl. Buntuk KemumuBuntul Fitri	Bener Meriah					11.925.000.000	9	KM
		250 Rehab. Jl. Pondok baru Ramung	Bener Meriah					19.875.000.000	15	KM
		251 Jln Gunung Gerdung - Bintang Permata	Bener Meriah					4.000.000.000	20	KM
		252 Pemb. Jl. Sp. Lut Atas - Lut Atas	Bener Meriah					1.689.000.000	3,2	KM
		253 Pemb. Jl. Sp. Pantan Luas - Pantan Lues	Bener Meriah					1.584.000.000	3	KM
		254 Pemb. Jl. Sp. Sumber Rejo - Pante Karya	Bener Meriah					4.224.000.000	8	KM
		255 Pemb. Jl. Pondok Ulung - Bener Kelipah	Bener Meriah					1.848.000.000	3,5	KM
		256 Pemb. Jl. Sp. Teleden - Tanjung Pura	Bener Meriah					1.848.000.000	3,5	KM
		257 Pemb. Jl. Bener Pepanyi - Bale Permata	Bener Meriah					4.224.000.000	8	KM
		258 Pemb. Jl. Rata Ara - Bener Tengah	Bener Meriah					1.689.000.000	3,2	KM
		259 Pemb. Jl. Ulu Naron Bawah - Sp. AAB	Bener Meriah					2.218.000.000	4,2	KM
		260 Pemb. Jl. Temas Mumanang	Bener Meriah					2.112.000.000	4	KM
		261 Pemb. Jl. Uning Mas	Bener Meriah					1.584.000.000	3	KM
		262 Pemb. Jl. Bakongan	Bener Meriah					1.584.000.000	3	KM
		263 Pemb. Jl. PantanTengah	Bener Meriah					2.112.000.000	4	KM
		264 Pemb. Jl. Wih Tenang Toa	Bener Meriah					1.742.000.000	3,3	KM
		265 Pemb. Jl. Gunung Jati	Bener Meriah					2.640.000.000	5	KM
		266 Pemb. Jl. Sp. Bener Lukup II - Bener Kelipah	Bener Meriah					1.056.000.000	2	KM
		267 Pemb. Jl. Rime raya - Menasah Selatan	Bener Meriah					1.795.000.000	3,4	KM
		268 Pemb. Jl. KM 40 Sayeng	Bener Meriah					3.538.000.000	6,7	KM
		269 Pemb. Jembatan Bakongan	Bener Meriah					1.750.000.000	25	M
		270 Pemb. Jembatan Suka Jati	Bener Meriah					1.190.000.000	17	M
		271 Pemb. Jembatan Pondok Ulung	Bener Meriah					840.000.000	12	M
		272 Pemb. Jembatan Timang Gajah	Bener Meriah					1.470.000.000	21	M
		273 Pemb. Jembatan Suka Damai	Bener Meriah					2.100.000.000	30	M
		274 Pemb. Jembatan Pantan Tengah	Bener Meriah					1.890.000.000	27	M
		275 Pemb. Jembatan Pantan Tengah II	Bener Meriah					1.050.000.000	15	M
		276 Jalan Bukit - Pangor	Gayo Lues					3.500.000.000	2,5	KM
		277 Pemb. Jembatan Rangka Baja Kendawi	Gayo Lues					6.300.000.000	60	M
		278 Jalan Sp. Porang Keudah	Gayo Lues					4.200.000.000	3	KM
		279 Pemb. Jembatan Rangka Baja Aih Bobo	Gayo Lues					4.000.000.000	35	M

**RENCANA KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
TAHUN 2007 - 2009**

BIDANG	PROGRAM UTAMA	SUB BIDANG / KEGIATAN	LOKASI	2007		2008		2009		KETERANGAN
				NILAI (RUPIAH)	VOLUME	NILAI (RUPIAH)	VOLUME	NILAI (RUPIAH)	VOLUME	
		280 Rehabilitasi Jl. Sp. Porang Keudah	Gayo Lues					3.765.000.000	3	KM
		281 Pembangunan Jembatan Seneren	Gayo Lues					7.500.000.000	50	M
		282 Pemb dan Pemeliharaan Jalan Kampung	Gayo Lues					15.000.000.000	1	Pkt
		283 Peningkatan Jl. Rema Tue – Cinta Maju	Gayo Lues					18.506.000.000	14	KM
		284 Rehabilitasi Jl. Padang Akul	Gayo Lues					11.289.000.000	10	KM
		285 rehabilitasi Jl. Gele – Cinta Maju	Gayo Lues					300.000.000	6	KM
		286 Jalan Sp.Pasir - Perlak (Lanjutan)	Gayo Lues					12.600.000.000	9	KM
		287 Rehab Jl. Bukit – Pangur (lanjutan)	Gayo Lues					3.279.000.000	2,5	KM
		288 Pembangunan Jembatan Rangka Baja Gp. Teungoh - Merandeh (Type B)	Langsa					4.600.000.000	0,04	KM
		289 Pembangunan Jembatan Rangka Baja Gp. Langsa Lama - Merandeh (Type B)	Langsa					7.700.000.000	0,06	KM
		290 Pembangunan Jembatan Gp. Matang Cengai - Alue Manye	Langsa					800.000.000	0,02	KM
		291 Rehabilitasi Jl. T. Umar - Sp. Commodore	Langsa					1.820.000.000	1	KM
		292 Rehabilitasi Jl. Sei Lueng - Matang Panyang	Langsa					2.675.000.000	1,5	KM
		293 Pemb. Jalan Julok - Alue Ie Merah	Aceh Timur					21.000.000.000	15	KM
		294 Jalan Sp Timun Kec. Pendawa	Aceh Timur					21.000.000.000	15	KM
		295 Jalan Titi Kangkung - Meurandeh	Aceh Timur					4.200.000.000	3	KM
		296 Rehabilitasi Jalan Gampung (tersebar) Aceh Timur	Aceh Timur					87.750.000.000	65	KM
		297 Peningkatan Jalan Gampung (tersebar) Aceh Timur	Aceh Timur					22.800.000.000	190	KM
		298 Pemb. Jalan Gampung (tersebar) Aceh Timur	Aceh Timur					20.000.000.000	200	KM
		299 Jl. Alue Pineng-Meuradeh-Keude Rambe-perumans-timbang langsa 2 unit jembatan + 3 unit plat beton	Langsa					24.000.000.000	16	KM
		300 Rekontruksi jl. titi kangkung -meuradeh	Langsa					5.400.000.000	3	KM
		301 Jalan Suak Ribee - Suak Sigadeng - Seuneubok	Aceh Barat					3.750.000.000	2,5	KM
		302 Jalan Layung - Gunong Mesh	Aceh Barat					20.000.000.000	12	KM
		303 Jalan Kuala Bubon - Suak Geudeebang	Aceh Barat					11.000.000.000	8	KM
		304 Jalan Tj.Meulaboh - Pante Cermin	Aceh Barat					12.750.000.000	8,5	KM
		305 Jalan Keudee Simpang - Bl.Ara - Lho Tonge	Nagan Raya					6.300.000.000		
		306 Jalan Suka Makmue - Ujong Fatihah	Nagan Raya					10.000.000.000	6,5	KM
		307 Jalan Sangkalau - Keudee Susoh	Abdya					6.000.000.000	4	KM
		308 Jalan Lama Mudu - Ie Mameh	Abdya					6.000.000.000	4	KM
		309 Jalan Lasikin - Nasrehe- Lafakha	Simeulue					15.000.000.000		
		310 Jalan Lanting - Lebuan Bajau	Simeulue					15.000.000.000	10	KM
		311 Jalan Sinabang - Sibigo	Simeulue					15.000.000.000	10	KM
		312 Jalan Dalam Kota Sinabang	Simeulue					10.000.000.000		
		313 Jalan Sitok - Babek	Simeulue					15.000.000.000		
		314 Jalan Keude Trumon-Bulussuma (16 Km)	Aceh Selatan					9.600.000.000	16	KM
		315 Jalan Ds. Jilatang - Lubok Layu (2,5 Km)	Aceh Selatan					1.625.000.000	2,5	KM
		316 Jalan Alue Rumbia Samadua - Menggamat	Aceh Selatan					15.000.000.000		
		317 Jalan Kubang Gajah-Pucuk Lembang	Aceh Selatan					5.000.000.000		
		318 Pembangunan Jembatan Ds. Keumumu 1 unit	Aceh Selatan					1.200.000.000		
		319 Pembangunan Jembatan Ds. Lubuk Layu 1 unit	Aceh Selatan					1.200.000.000	1	Unit
		320 Pembangunan Jembatan Ds. Mutiara 2 unit	Aceh Selatan					1.500.000.000	2	Unit
		321 Pembangunan Jembatan Gantung Pasie Meurapat	Aceh Selatan					250.000.000	1	Unit
		322 Pembangunan Jembatan Gantung Desa Sialang Samadua	Aceh Selatan					250.000.000	1	Unit
		323 Pembangunan Jembatan Gantung Desa koto Kec. Kluet	Aceh Selatan					250.000.000	1	Unit
		324 Perbaikan Jembatan UPT V Seunebok Jaya Ie Meudama	Aceh Selatan					250.000.000	1	Unit
		325 Jalan Kota Fajar - Mersak	Aceh Selatan					4.355.000.000	6,7	KM
		326 Jalan Lhok Bengkuang - Pantan Luas	Aceh Selatan					4.225.000.000	6,5	KM
		327 Jalan Kuta bUloh - Sp Ie Jeureneuh	Aceh Selatan					4.550.000.000	7	KM
		328 Jalan Lhok Keutapang - Kp Hilir	Aceh Selatan					1.500.000.000	2	KM
		329 Jembatan Lhok Sialang	Aceh Selatan					200.000.000	1	unit
		330 Jambatan Ds Ie Mirah Pasie Raja (20 M)	Aceh Selatan					200.000.000	1	unit
		331 Jembatan Simpang Tiga Kluet Tengah (18 M)	Aceh Selatan					200.000.000	1	unit
		332 Jalan Singkohor-SKPA	Singkil					9.160.000.000	5	KM
		333 Jalan Lentong-SKPD-SP II	Singkil					4.961.000.000	3	KM
		334 Jalan Makmur Desa Pulau Balai	Singkil					4.580.000.000	2,5	KM
		335 Jalan Lingkar Teluk Nibung	Singkil					14.656.000.000	8	KM
		336 Jalan Rimo-Block VI-G.Lagan	Singkil					5.458.000.000	3,3	KM
		337 Jalan Padang Lawas-Lae Paris	Singkil					13.230.000.000	8	KM
		338 Jalan Kurma-Sumur Batu	Singkil					4.796.000.000	2,9	KM
		339 Jalan singkil-T.Rumbia	Singkil					7.904.000.000	3,5	KM
		340 Jalan ujong Bawang-Pemuka	Singkil					8.233.000.000	4	KM
		341 Jalan Sukamakmur-Buloh Duri	Singkil					10.066.000.000	8	KM
		342 Jalan Rantau Gedang	Singkil					10.037.000.000	150	KM
		343 Jalan Rantau Gedang-Kuala Baru	Singkil					13.971.000.000	6	KM
		344 Jembatan Kuala Baru	Singkil					3.112.000.000	100	M
		345 Rundeng-Krueng Luas	Singkil					62.100.000.000	27	KM
		346 Singkil-Sebatang	Singkil					27.040.000.000	13	KM
		347 Kuala Baru-Bolusema	Singkil					50.400.000.000	24	KM
		348 Gelombang-Muara Situlen	Singkil					49.400.000.000	24	KM
		349 Jembatan Muara Situlen I	Singkil					4.100.000.000	100	M

**RENCANA KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
TAHUN 2007 - 2009**

BIDANG	PROGRAM UTAMA	SUB BIDANG / KEGIATAN	LOKASI	2007		2008		2009		KETERANGAN
				NILAI (RUPIAH)	VOLUME	NILAI (RUPIAH)	VOLUME	NILAI (RUPIAH)	VOLUME	
		350 Jembatan Muara Situlen II	Singkil					5.300.000.000	120 M	
		351 Peningkatan Jalan Muara Situlen - Gelombang	Aceh Tenggara					28.000.000.000	26 KM	
		352 Peningkatan Jalan Desa Tenembak Juhar - Bendung Lawe Kinga	Aceh Tenggara					1.500.000.000	2 KM	
		353 Jembatan Gantung Kumbang Alas	Aceh Tenggara					600.000.000	15 M	
		354 Rehab / Rekon Kampung Bakti - Muara Situlen	Aceh Tenggara					7.000.000.000	7 KM	
		355 Rehab / Rekon Mbarung - Rambung Teldak	Aceh Tenggara					5.000.000.000	4,17 KM	
		356 Rehab / Rekon Simpang Lawe Bekung - Simpang Rukahan	Aceh Tenggara					5.700.000.000	5,7 KM	
		357 Rehab / Rekon Kelapa Gading - Kuning	Aceh Tenggara					4.500.000.000	4,5 KM	
		358 Rehab / Rekon Tanah Merah - Terutung Pedi	Aceh Tenggara					4.000.000.000	4 KM	
		359 Rehab / Rekon Kutambaru - Bunga Melur	Aceh Tenggara					2.500.000.000	2,5 KM	
		360 Rehab / Rekon Jln lawe Sagu - Kandang Mbelang	Aceh Tenggara					3.500.000.000	3,5 KM	
		361 Rehab/ Rekon Lantai Beton jembtana Rangka Baja Salim Pitpit	Aceh Tenggara					3.000.000.000	100 M	
		362 Rehab / Rekon Jembatan 14 Unit (Titi Pasir, Kutambaru, Kutalingga, Maha Singkil, Salang Baru, Kampung Bhakti, Pinding- Lawe Ketuban, Desa Rikit, Likat, Kuta Rambé, Kuta Grotu, Tenembak Lang-lang, Kuta Rih I Dan II.	Aceh Tenggara					4.325.000.000	14 Unit	
		363 ADMINISTRASI		91.111.862.000						
		E. SAR		10.305.000.000		0		0		
		1 Pengadaan Peralatan SAR	Nad	1.740.000.000						
		2 Pengawasan Pembuatan Bangunan Pelengkap dan Prasarana Lingkungan Gedung SAR	B. Aceh	65.000.000						
		3 Pengadaan Rescue Boat 40M, Tahap I	Nad	8.500.000.000						
		F. METEOROLOGI DAN GEOFISIKA		18.866.070.000		45.000.000.000		0		
		1 Pembuatan Master Plan, Business Plan & Detail Engineering Design Pemb. Infrastruktur Wimax Prov Nad & P. Nias	7 Stasiun BMG	1.820.000.000						
		2 Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan VOIP, VPN, dan Telcenter Kecamatan di Prov Nad	3 Stasiun BMG	310.950.000						
		3 Technical Assistant Pembangunan Infrastruktur IT Prov Nad	Nad	875.000.000						
		4 Pembuatan Aplikasi Perindustrian & Perdagangan	Nad	97.000.000						
		5 Pembuatan Sistem Aplikasi Bencana Alam	Nad	97.050.000						
		6 Pembuatan Aplikasi sistem informasi Bimbingan Teknis Aparatur	Nad	45.000.000						
		7 Pembangunan Infrastruktur WIMAX, NAD	Propinsi	0		20.000.000.000				
		8 Early warning System (EWS)	Propinsi	0		25.000.000.000				
		9 ADMINISTRASI KEGIATAN		15.621.070.000						
ENERGI DAN TELEKOMUNIKASI				237.568.188.000		183.504.870.000		-		
		G. ENERGI DAN LISTRIK		213.573.208.000		183.504.870.000		-		
		1 Administrasi umum		1.529.819.000						
		Sumber Dana HLN (ADB - Etesp)		86.439.208.000		0		0		
		2 Administrasi umum		1.937.365.000						
		3 Paket 04 : Pengadaan SR & APP Aceh Jaya.		2.908.292.000						
		4 Paket 19 : Pengadaan SR & APP Aceh Besar dan Pidie		1.698.766.000						
		5 Paket 54 : Pengadaan Tiang Beton Wilayah Utara		3.649.398.000						
		6 Paket 55 : Pengadaan Tiang Beton Aceh Besar		3.445.838.000						
		7 Paket 55a : Pengadaan Tiang Beton Aceh Jaya		4.998.835.000						
		8 Paket 56 : Pengadaan Kabel AAAC dan TIC Wilayah Utara		4.124.269.000						
		9 Paket 57 : Pengadaan Kabel Tanah 20 kV Wilayah Utara		4.327.891.000						
		10 Paket 58 : Pengadaan Rupa-rupa Kabel Wilayah Barat		4.081.470.000						
		11 Paket 59 : Pengadaan Transformmer		4.236.836.000						
		12 Paket 60 : Pengadaan Kubikel 20 kV		4.209.500.000						
		13 Paket 61 : Pengadaan Insulator dan Fuse 20 kV		1.715.393.000						
		14 Pemasangan SKTM dan Cubicle 20 KV Wilayah Utara		5.900.000.000						
		15 Pemasangan JTM/JTR/GD B.Aceh, A.Besar		3.900.000.000						
		16 Pemasangan JTM/JTR/GD Pidie		600.000.000						
		17 Pemasangan JTM/JTR/GD Aceh Jaya		2.200.000.000						
		18 Pemasangan JTM/JTR/GD Bireun		2.100.000.000						
		19 Pemasangan JTM/JTR/GD Simelue		6.800.000.000						
		20 Pengadaan Alat Kerja di Banda Aceh & Meulaboh		1.670.000.000						
		21 Rehab sistem pengontrolan Scada di B.Aceh		7.900.000.000						
		22 Pengadaan Alat Kerja di Banda Aceh		3.200.000.000						
		23 Rehabilitasi dan Rekon Gedung Kantor Cabang Banda Aceh Pelayanan Masyarakat.		7.360.000.000						
		24 Rehab Jaringan Prov. Nad		3.475.355.000						
		Sumber Dana APBN		89.361.988.000		0		0		
		25 Administrasi		986.000.000						
		26 Biaya Langganan Listrik untuk Barak		5.400.000.000						
		27 Pemindahan Tiang Listrik Akibat Pembangunan Jalan oleh USAID dan JICS -- PEMINDAHAN TIANG AKIBAT PEMBANGUNAN JALAN	Pantai Barat	1.497.421.000						
		28 Pengadaan Sambungan Rumah (SR, APP & Acc) - - CABANG BANDA ACEH (B. Aceh, A.Besar & Sabang)	B.Aceh	8.064.222.000						
		29 Pengadaan Sambungan Rumah (SR, APP & Acc) - - CABANG SIGLI	Sigli	2.450.251.000						

**RENCANA KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
TAHUN 2007 - 2009**

BIDANG	PROGRAM UTAMA	SUB BIDANG / KEGIATAN	LOKASI	2007		2008		2009		KETERANGAN
				NILAI (RUPIAH)	VOLUME	NILAI (RUPIAH)	VOLUME	NILAI (RUPIAH)	VOLUME	
		30 Pengadaan Sambungan Rumah (SR, APP & Acc) - - CABANG LHOKSEUMAWE		3.374.853.000						
		31 Pengadaan Sambungan Rumah (SR, APP & Acc) - - CABANG LANGSA		2.862.453.000						
		32 Pengadaan Sambungan Rumah (SR, APP & Acc) - - CABANG MEULABOH		6.795.772.000						
		33 Pengadaan Sambungan Rumah (SR, APP & Acc) - - CABANG SUBULUSSALAM		2.552.253.000						
		34 Konsultan Pengawas Rehab Gedung PLN Cab Banda Aceh & Sektor L. Bata		185.100.000						
		35 Pemasangan JTM/JTR/GD Lokasi Pulau Aceh (Cab. Banda Aceh)		1.000.000.000						
		36 Pemasangan JTM/JTR/GD Lokasi Tersebar 1 (Cab. Subulussalam)		800.000.000						
		37 Pemasangan SKTM Lokasi Calang (Cab. Meulaboh)		200.000.000						
		38 Pemasangan JTM/JTR/GD Lokasi Tersebar 1 (Cab. Lhokseumawe)		2.800.000.000						
		39 Pemasangan JTM/JTR/GD Lokasi Tersebar 1 (Cab. Banda Aceh)		3.500.000.000						
		40 Pemasangan JTM/JTR/GD Lokasi Deudap (Cab. Banda Aceh)		500.000.000						
		41 Pemasangan JTM/JTR/GD Lokasi Simpang Ulim (Cab. Langsa)		400.000.000						
		42 Pemasangan JTM/JTR/GD Lokasi Tersebar (Cab. Banda Aceh)		1.800.000.000						
		43 Pemasangan JTM/JTR/GD Lokasi Lhok Kruet-Calang (Cab. Meulaboh)		9.500.000.000						
		44 Pemasangan JTM/JTR/GD Lokasi Tersebar (Rtg. Calang)		3.500.000.000						
		45 Pemasangan JTM/JTR/GD Lokasi Tersebar (Rtg. Teunom)		8.000.000.000						
		46 Pemasangan JTM/JTR/GD Lokasi Tersebar (Rtg. Jeuram)		3.400.000.000						
		47 Pemasangan JTM/JTR/GD Lokasi Kota Meulaboh (Cab. Meulaboh)		3.700.000.000						
		48 Pemasangan JTM/JTR/GD Lokasi Tersebar (Rtg. Blang Pidie)		1.400.000.000						
		49 Pemasangan JTM/JTR/GD Lokasi Tersebar (Rtg. Tapak Tuan)		1.200.000.000						
		50 Pemasangan JTM/JTR/GD Lokasi Tersebar (Rtg. Subulussalam)		2.500.000.000						
		51 Up Rating Gardu Induk Sigli		6.300.000.000						
		52 Reha Intalasi Gardu Hubung Lambaro A.Besar		3.600.000.000						
		53 Kontrak2 penunjukan Langsung (Emergency)		1.093.663.000						
		Sumber Dana Rupiah Murni (APBN)		12.242.193.000		0		0		
		54 Administrasi		832.450.000						
		55 KERJA SAMA SWAKELOLA DENGAN BPPT DALAM RANGKA SITE SURVEY, FEASIBILITY STUDY, DED, DAN PEMBUATAN DOKUMEN LELANG UNTUK PEMBANGKIT HYBRID (TENAGA SURYA, DIESEL,MIKRO HIDRO, DAN ANGIN)	Nad	900.000.000						
		56 Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di P.Nasi, Kabupaten Aceh Besar	P.Nasi	195.000.000						
		57 P. Breuh di P. Aceh Kabupaten Aceh Besar		0						
		58 Pengadaan dan Pemasangan PLTS di Kab. Gayo Lues	Gayo Lues	1.430.000.000						
		59 Pengadaan dan Pemasangan PLTS di Kab. Pidie	A.Tengah	1.423.500.000						
		60 Pembangunan PLTMH Beutong Ateuh 1, Kabupaten Aceh Barat	A.Barat	2.468.672.000						
		61 Pembangunan PLTMH Beutong Ateuh 2, Kabupaten Aceh Barat	A.Barat	2.468.671.000						
		REHABILITASI GEDUNG NEGARA								
		62 Rehabilitasi Gedung Serbaguna dan Olah Raga Dinas Pertambangan dan Energi Prov. NAD	B.Aceh	450.000.000						
		63 Survey Pemetaan Daerah Bahaya Gunungapi pada " Gunungapi Seulawah, Peut Sagoe dan Burni Telong	Nad	498.900.000						
		64 Studi Perencanaan/inventarisasi data perseorangan pemasangan PLTS di Kab. Pidie	Pidie	45.000.000						
		65 Supervisi Pembangunan PLTS di P. Nasi & P. Breuh Kab. Aceh Besar	P.Nasi	20.000.000						
		66 Supervisi Pembangunan PLTS di Gayo Lues	Gayo Lues	20.000.000						
		67 Supervisi Pembangunan PLTS di Pidie	Pidie	20.000.000						
		68 Supervisi Pembangunan PLTMH Jim-Jim Kab. Pidie	Pidie	90.000.000						
		69 Supervisi Pembangunan PLTMH Bergang Kab. Aceh Tengah	A.Tengah	90.000.000						
		70 Supervisi Pembangunan PLTMH Marpunge Kab. Gayo Lues	Gayo Lues	90.000.000						
		71 Supervisi Pembangunan PLTMH Putri Betung Kab. Gayo Lues	Gayo Lues	90.000.000						
		72 Supervisi Pembangunan PLTMH Meurah Said Kab. Aceh Tengah	A.Tengah	90.000.000						
		73 Supervisi Pembangunan PLTMH Arul Badak Kab. Aceh Tengah	A.Tengah	90.000.000						
		74 Supervisi Pembangunan PLTMH Beutong Ateuh 1 Kab. Nagan Raya	Nagan Raya	90.000.000						
		75 Supervisi Pembangunan PLTMH Beutong Ateuh 2 Kab. Naga Raya	Nagan Raya	90.000.000						
		76 Supervisi Pembangunan PLTMH Lawe Gerger Kab. Aceh Tenggara	A.Tenggara	90.000.000						
		77 Supervisi Pembangunan PLTMH Lawe Sikap Kab. Aceh Tenggara	A.Tenggara	90.000.000						
		78 Com. Dev. Pengelolaan & Pemeliharaan PLTMH Jim-Jim (Pidie)	Pidie	55.000.000						
		79 Com. Dev. Pengelolaan & Pemeliharaan PLTMH Bergang (Aceh Tengah)	A.Tengah	55.000.000						
		80 Com. Dev. Pengelolaan & Pemeliharaan PLTMH Marpunge (Gayo Lues)	Gayo Lues	55.000.000						
		81 Com. Dev. Pengelolaan & Pemeliharaan PLTMH Putri Betung (Gayo Lues)	Gayo Lues	55.000.000						
		82 Com. Dev. Pengelolaan & Pemeliharaan PLTMH Meurah Said (Aceh Tengah)	A.Tengah	55.000.000						
		83 Com. Dev. Pengelolaan & Pemeliharaan PLTMH Arul Badak (Aceh Tengah)	A.Tengah	55.000.000						
		84 Com. Dev. Pengelolaan & Pemeliharaan PLTMH Beutong Ateuh 1 (Aceh Barat)	A.Barat	55.000.000						
		85 Com. Dev. Pengelolaan & Pemeliharaan PLTMH Beutong Ateuh 2 (Aceh Barat)	A.Barat	55.000.000						
		86 Com. Dev. Pengelolaan & Pemeliharaan PLTMH Lawe Gerger (Aceh Tenggara)	A.Tenggara	55.000.000						
		87 Com. Dev. Pengelolaan & Pemeliharaan PLTMH Lawe Sikap (Aceh Tenggara)	A.Tenggara	55.000.000						
		88 Perencanaan Rehab Gedung Laboraturium Distamben NAD	B.Aceh	30.000.000						
		Sumber Dana HLN (Sharing MDF-RM)		24.000.000.000		183.504.870.000		0		
		89 Dana MDF Non Alokasi utk Pembangunan PLTMH		7.920.000.000						

**RENCANA KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
TAHUN 2007 - 2009**

BIDANG	PROGRAM UTAMA	SUB BIDANG / KEGIATAN	LOKASI	2007		2008		2009		KETERANGAN
				NILAI (RUPIAH)	VOLUME	NILAI (RUPIAH)	VOLUME	NILAI (RUPIAH)	VOLUME	
		90 Pembangunan PLTMH Manpuge Gayo Lues	Gayo Lues	1.515.800.000						
		91 Pembangunan PLTMH Turbin Ulir Putri Betung Gayo Lues	Gayo Lues	3.024.344.000						
		92 Pembangunan PLMTH Arul Badak Kab. A.Tengah	A.Tengah	1.573.883.000						
		93 Pembangunan PLTMH Bergang Kab.A.tengah	A.Tengah	2.020.491.000						
		94 Pembangunan PLTMH Meurah Said Kab.Aceh Tengah	A.Tengah	7.158.982.000						
		95 Pengadaan & Pemasangan PLTS di A.Selatan	A.Selatan	786.500.000						
		96 Pembangunan Jaringan Tegangan Rendah (24 Km)	Simeulue			600.000.000				
		97 Jaringan Listrik Relokasi Rt. Binuang	Aceh Selatan			750.000.000				
		98 Jaringan Listrik Ds. Lubuk Layu	Aceh Selatan			500.000.000				
		99 Pembangunan Gardu Induk / Distribusi	Nias			26.439.894.000				
		100 - Trafo 3 phase 20 kV/B2, 50 kVA dan Asesoris (Sisipan)	Banda Aceh			434.190.000	6 UNIT			
		101 - Trafo 3 phase 20 kV/B2, 100 kVA dan Asesoris (Sisipan)	Banda Aceh			340.132.000	4 UNIT			
		102 - Trafo 3 phase 20 kV/B2, 50 kVA dan Asesoris (Sisipan)	Aceh Besar			361.825.000	5 UNIT			
		PEMB. JTM, Gd. Dist & JTR Lbr & Jantho (ACEH BESAR)								
		103 - Pemb. SUTM3x150 mm ² (Pemisahan bbn Bl.Bintang)	Aceh Besar			921.250.000	5 kms			
		104 - Pemb. SUTM3x240 mm ² (u/ Tie Line LBR-Jantho)	Aceh Besar			481.500.000	2 kms			
		105 - Pemb. SUTM3x150 mm ² (Lambaroe tersebar)	Aceh Besar			1.474.000.000	8 kms			
		PEMB. JTM & LBS (KT. BANDA ACEH & ACEH BESAR)								
		PEMB. JTM, GARDU Dist & JTR (ACEH BESAR Tersebar)								
		106 - Pemb. SUTM A3C 3x150 mm ²	Aceh Besar			2.763.750.000	15 kms			
		107 - Trafo 3 phase 20 kV/B2, 50 kVA dan Asesoris	Aceh Besar			217.095.000	3 UNIT			
		108 - Trafo 3 phase 20 kV/B2, 100 kVA dan Asesoris	Aceh Besar			170.066.000	2 UNIT			
		PEMB. JTM, GARDU Dist & JTR (B. ACEH Tersebar)								
		109 - Trafo 3 phase 20 kV/B2, 50 kVA dan Asesoris	Banda ACEH			217.095.000	3 UNIT			
		110 - Trafo 3 phase 20 kV/B2, 100 kVA dan Asesoris	Banda ACEH			170.066.000	2 UNIT			
		111 - Trafo 3 phase 20 kV/B2, 50 kVA dan Asesoris (Sisipan)	Sabang			289.460.000	4 UNIT			
		112 - Trafo 3 phase 20 kV/B2, 100 kVA dan Asesoris (Sisipan)	Sabang			255.099.000	3 UNIT			
		PEMB. JTM, GARDU Dist & JTR (KOTA SABANG)								
		113 - Pemb. SUTM A3CS 3x150 mm ²	Sabang			3.316.500.000	15 kms			
		114 - Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel untuk Kota Sabang Kapasitas 2 x 1000 kW	Sabang			10.274.484.000	2 Lot			
		115 - Trafo 3 phase 20 kV/B2, 25 kVA dan Asesoris (Sisipan)	Aceh Jaya			399.402.000	6 UNIT			
		116 - Trafo 3 phase 20 kV/B2, 50 kVA dan Asesoris (Sisipan)	Aceh Jaya			289.460.000	4 UNIT			
		PEMB. JTM, GARDU Dist & JTR (Calang Tersebar A. JAYA)								
		117 - Pemb. SUTM3x150 mm ²				4.606.250.000	25 Kms			
		PEMB. JTM, GARDU Dist & JTR (Teunom Tersebar A. JAYA)								
		118 - Pemb. SUTM3x150 mm ²	Aceh Jaya			4.606.250.000	25 kms			
		119 - Trafo 3 phase 20 kV/B2, 25 kVA dan Asesoris	Aceh Jaya			199.701.000	3 UNIT			
		120 - Pemb. SKTM 3x150 mm ² (Jemb. S Semaseh&Teunom)	Aceh Jaya			414.132.000	0,8 kms			
		121 - Pemb. SUTM3x150 mm ² KL.Bubon-KL.Abee(u/Pemisahan Bbn)	Aceh Jaya			3.132.250.000	17 kms			
		122 - Up Rating SUTM dari 70 ke 3x150 mm ² (S.Tiga-KL.Bubon)	Aceh Jaya			1.105.500.000	6 kms			
		123 - Trafo 3 phase 20 kV/B2, 50 kVA dan Asesoris (Sisipan)	Aceh Barat			434.190.000	6 UNIT			
		REHAB. JTM, GARDU Dist & JTR (ACEH BARAT Tersebar)								
		124 - Pemb. SUTM A3C 3x150 mm ²	Aceh Barat			4.606.250.000	25 kms			
		125 - Trafo 3 phase 20 kV/B2, 25 kVA dan Asesoris	Aceh Barat			133.134.000	2 Unit			
		126 - Trafo 3 phase 20 kV/B2, 50 kVA dan Asesoris	Aceh Barat			217.095.000	3 Unit			
		127 - Trafo 3 phase 20 kV/B2, 25 kVA dan Asesoris (Sisipan)	Nagan Raya			199.701.000	3 UNIT			
		128 - Trafo 3 phase 20 kV/B2, 50 kVA dan Asesoris (Sisipan)	Nagan Raya			255.099.000	3 UNIT			
		PEMB. JTM, GARDU Dist & JTR (NAGAN RAYA Tersebar)								
		129 - Pemb. SUTM3x150 mm ²	Nagan Raya			5.527.500.000	30 kms			
		130 - Trafo 3 phase 20 kV/B2,25 kVA dan Asesoris	Nagan Raya			133.134.000	2 Unit			
		PEMB. JTM, GARDU Dist & JTR (NAGAN RAYA Tersebar)								
		131 - Pemb. SUTM A3C 3x150 mm ² (Sp. Peut - PLTD Jeuram)	Nagan Raya			3.685.000.000	20 kms			
		132 - Trafo 3 phase 20 kV/B2, 25 kVA dan Asesoris (Sisipan)	Simeulue			332.835.000	5 UNIT			
		133 - Trafo 3 phase 20 kV/B2, 50 kVA dan Asesoris (Sisipan)	Simeulue			289.460.000	4 UNIT			
		PEMB. JTM, GARDU Dist & JTR (SINABANG SIMEULUE)								
		134 - Pemb. SUTM A3C 3x150 mm ² (Sinabang tersebar)	Simeulue			4.606.250.000	25 kms			
		135 - Trafo 3 phase 20 kV/B2, 50 kVA dan Asesoris	Simeulue			217.095.000	3 unit			
		136 - Trafo 3 phase 20 kV/B2, 50 kVA dan Asesoris (Sisipan)	Pidie			361.825.000	5 UNIT			
		137 - Trafo 3 phase 20 kV/B2, 100 kVA dan Asesoris (Sisipan)	Pidie			255.099.000	3 UNIT			

**RENCANA KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
TAHUN 2007 - 2009**

BIDANG	PROGRAM UTAMA	SUB BIDANG / KEGIATAN	LOKASI	2007		2008		2009		KETERANGAN
				NILAI (RUPIAH)	VOLUME	NILAI (RUPIAH)	VOLUME	NILAI (RUPIAH)	VOLUME	
		PEMB. JTM, GARDU Dist & JTR (Beureunon A. PIDIE)	Pidie							
		138 - UP. Rating. SUTM 3x35 mm ² menjadi A3C 3x150 mm ²	Pidie			2.948.000.000	16 kms			
		139 - Trafo 3 phase 20 kV/B2, 50 kVA dan Asesoris	Pidie			217.095.000	3 Unit			
		140 - Trafo 3 phase 20 kV/B2, 100 kVA dan Asesoris	Pidie			170.066.000	2 Unit			

**RENCANA KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
TAHUN 2007 - 2009**

BIDANG	PROGRAM UTAMA	SUB BIDANG / KEGIATAN	LOKASI	2007		2008		2009		KETERANGAN
				NILAI (RUPIAH)	VOLUME	NILAI (RUPIAH)	VOLUME	NILAI (RUPIAH)	VOLUME	
		PEMB. JTM, & JTR (A.PIDIE)								
		141 - UP. Rating. SUTM 3x35 mm ² menjadi 3x150 mm ² (PK. Meureudue)	Pidie			2.211.000.000	12 kms			
		142 - Pemb. SUTR TIC 3x50+35 mm ² (Meureudue Tersebar)	Pidie			2.160.800.000	25 kms			
		PEMB. JTM, GARDU Dist & JTR (A. PIDIE Tersebar)								
		143 - UP. Rating. SUTM 3x35 mm ² menjadi A3C 3x150 mm ²	Pidie			1.805.650.000	14 kms			
		144 - Pemb. SUTR TIC 3x50+35 mm ²	Pidie			2.592.960.000	30 kms			
		145 - Trafo 3 phase 20 kV/B2, 50 kVA dan Asesoris (Sisipan)	Bireuen			361.825.000	5 UNIT			
		146 - Trafo 3 phase 20 kV/B2, 100 kVA dan Asesoris (Sisipan)	Bireuen			255.099.000	3 UNIT			
		PEMB. JTM, GARDU & JTR (BIREUEN)								
		147 - Pemb. SUTR TIC 3x50+35 mm ²	Bireuen			2.160.800.000	25 kms			
		148 - Trafo 3 phase 20 kV/B2, 50 kVA dan Asesoris (Sisipan)	Lhoksemawe			361.825.000	5 UNIT			
		149 - Trafo 3 phase 20 kV/B2, 100 kVA dan Asesoris (Sisipan)	Lhoksemawe			255.099.000	3 UNIT			
		PEMB. JTM, GARDU & JTR (LHOKSEUMAWE & A. UTARA)								
		150 - Pemb. SUTM A3C 3x150 mm ²	Lhoksemawe			5.527.500.000	30 kms			
		PEMB. JTM, GARDU & JTR (LHOKSEUMAWE & A. UTARA)								
		151 - UP. Rating. SUTM 3x35 mm ² menjadi A3C 3x150 mm ²	Lhoksemawe			552.750.000	3 kms			
		152 - Pemb. SUTM A3C 3x150 mm ²	Lhoksemawe			1.474.000.000	8 kms			
		153 - Trafo 3 phase 20 kV/B2, 50 kVA dan Asesoris (Sisipan)	Langsa			289.460.000	4 Unit			
		154 - Trafo 3 phase 20 kV/B2, 100 kVA dan Asesoris (Sisipan)	Langsa			170.066.000	4 Unit			
		PEMB. JTM, GARDU Dist & JTR (LANGSA Tersebar)								
		155 - Pemb. SUTM A3C 3x150 mm ²	Langsa			2.026.750.000	11 kms			
		156 - Pemb. SUTR TIC 3x50+35 mm ² (Perb. SR Serie)	Langsa			2.592.960.000	30 kms			
		157 - Trafo 3 phase 20 kV/B2, 50 kVA dan Asesoris (Sisipan)	Aceh Timur			361.825.000	5 UNIT			
		158 - Trafo 3 phase 20 kV/B2, 100 kVA dan Asesoris (Sisipan)	Aceh Timur			255.099.000	3 UNIT			
		PEMB. JTM, GARDU & JTR (A.TIMUR)								
		159 - Pemb. SUTM A3C 3x150 mm ²	Aceh Timur			1.474.000.000	8 kms			
		160 - Pemb. SUTR TIC 3x50+35 mm ² (Perb. SR Serie)	Aceh Timur			1.728.640.000	20 kms			
		161 - Trafo 3 phase 20 kV/B2, 50 kVA dan Asesoris (Sisipan)	Aceh Tamiang			217.095.000	3 UNIT			
		PEMB. JTM, GARDU Dist & JTR (A. TAMIANG Tersebar)								
		162 - Pemb. SUTM A3C 3x150 mm ²	Aceh Tamiang			737.000.000	4 kms			
		163 - Pemb. SUTR TIC 3x50+35 mm ²	Aceh Tamiang			2.160.800.000	25 kms			
		164 - LBS Motorize+Konstruksi	Aceh Tamiang			630.000.000	6 set			
		165 - Trafo 3 phase 20 kV/B2, 50 kVA dan Asesoris (Sisipan)	Aceh Tenggara			217.095.000	3 UNIT			
		166 - Trafo 3 phase 20 kV/B2, 100 kVA dan Asesoris (Sisipan)	Aceh Tenggara			170.066.000	2 UNIT			
		PEMB. GARDU Dist & JTR (A. TENGGARA Tersebar)								
		167 - Pemb. SUTR TIC 3x50+35 mm ²	Aceh Tenggara			2.592.960.000	30 kms			
		168 - Trafo 3 phase 20 kV/B2, 50 kVA dan Asesoris (Sisipan)	Gayo Lues			289.460.000	4 UNIT			
		169 - Trafo 3 phase 20 kV/B2, 100 kVA dan Asesoris (Sisipan)	Gayo Lues			170.066.000	2 UNIT			
		PEMB. GARDU Dist & JTR (GAYO LUWES Tersebar)								
		170 - Trafo 3 phase 20 kV/B2, 50 kVA dan Asesoris (Sisipan)	Singkil			361.825.000	5 UNIT			
		171 - Trafo 3 phase 20 kV/B2, 100 kVA dan Asesoris (Sisipan)	Singkil			255.099.000	3 UNIT			
		PEMB. JTM, GARDU Dist & JTR (ACEH SINGKIL Tersebar)								
		172 - UP. Rating SUTM 2x35 mm ² menjadi 3x150 mm ²	Singkil			2.763.750.000	15 kms			
		173 - Pemb. SUTM A3C 3x150 mm ²	Singkil			3.316.500.000	18 kms			
		174 - Trafo 3 phase 20 kV/B2, 25 kVA dan Asesoris	Singkil			133.134.000	2 Unit			
		175 - Trafo 3 phase 20 kV/B2, 50 kVA dan Asesoris (Sisipan)	ABDYA			361.825.000	5 UNIT			
		176 - Trafo 3 phase 20 kV/B2, 100 kVA dan Asesoris (Sisipan)	ABDYA			255.099.000	3 UNIT			
		PEMB. JTM, GARDU Dist & JTR (Bl. Pidie A. Barat Daya)								
		177 - Pemb. SUTM 3x150 mm ² utk Pengoperasian (GH Babah Rot)	ABDYA			2.763.750.000	15 kms			
		178 - Trafo 3 phase 20 kV/B2, 50 kVA dan Asesoris (Sisipan)	Aceh Selatan			217.095.000	3 UNIT			
		179 - Trafo 3 phase 20 kV/B2, 100 kVA dan Asesoris (Sisipan)	Aceh Selatan			170.066.000	2 UNIT			
		PEMB. JTM, GARDU Dist & JTR (ACEH SELATAN)								
		180 - Pemb. SUTM A3C 3x150 mm ²	Aceh Selatan			1.842.500.000	10 kms			
		181 - Trafo 3 phase 20 kV/B2, 25 kVA dan Asesoris	Aceh Selatan			133.134.000	2 Unit			
		182 - Pemb. SUTM A3C 3x150 mm ²	Ateng & BM			2.763.750.000	15 kms			
		183 - Pemb. SUTR TIC 3x50+35 mm ²	Ateng & BM			2.160.800.000	25 kms			
		184 - Pemb. SUTR TIC 3x50+35 mm ² (Perb. SR Serie)	Ateng & BM			3.025.120.000	35 kms			
		185 - Pengadaan kelengkapan Alat Pemantauan Perkembangan aktifitas	Propinsi			1.500.000.000	1 Pkt			
		186 - Sosialisasi/Pelatihan Mitigasi Bencana Gunungapi Peut Sagoe,	Propinsi			150.000.000	1 Pkt			

**RENCANA KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
TAHUN 2007 - 2009**

BIDANG	PROGRAM UTAMA	SUB BIDANG / KEGIATAN	LOKASI	2007		2008		2009		KETERANGAN
				NILAI (RUPIAH)	VOLUME	NILAI (RUPIAH)	VOLUME	NILAI (RUPIAH)	VOLUME	
		187 - Pengadaan dan Pemasangan PLTS untuk korban Gempa & Tsunami	Propinsi			8.027.500.000	1 Pkt			
		188 - Pemb. SUTM3x240 mm ² Pelab. Malahayati (Kr.Cut-Uj,Batee)	Banda Aceh			5.296.500.000	22 Kms			
		189 - Trafo 3 phase 20 kV/B2, 50 kVA dan Asesoris	Aceh Jaya			361.825.000	5 UNIT			
		190 - Trafo 3 phase 20 kV/B2, 100 kVA dan Asesoris	Aceh Jaya			255.099.000	3 UNIT			
		191 - Pemb. SUTM A3C 3x150 mm ²	Ateng & BM			2.763.750.000	15 kms			
		192 - Pemb. SUTR TIC 3x50+35 mm ²	Ateng & BM			2.160.800.000	25 kms			
		193 - Pemb. SUTR TIC 3x50+35 mm ² (Perb. SR Serie)	Ateng & BM			3.025.120.000	35 kms			
		194 Jaringan Tegangan Menengah Calang - Lamno	Aceh Jaya			10.800.000.000	60 km			
		195 Jaringan Tegangan Rendah Tersebar Calang - Lamno	Aceh Jaya			3.520.000.000				
		H. POS DAN TELEKOMUNIKASI		23.994.980.000		0		0		
		1 Pengadaan Virtual Private Network (VPN) dan VOIP Prop Nad	Nad	7.893.478.000						
		2 Pengadaan Perangkat Monitoring Frekuensi & Direction Finder V-UHF Mobile	Nad	8.350.000.000						
		3 Pengadaan peralatan Jaringan Komunikasi Data	Nad	2.750.000.000						
		4 Pengadaan peralatan perangkat keras pelatihan dan pengolahan data	Nad	1.500.000.000						
		5 Pengadaan Peralatan Operasional Kantor Pos	Nad	96.525.000						
		6 Pengadaan Peralatan Pendukung Operasional Pos, Kantor Pos Wilayah Banda Aceh & Aceh Besar	Nad	348.381.000						
		7 Pengadaan Peralatan Pendukung Operasional Pos, Kantor Pos Wilayah Aceh Barat & Aceh Jaya	Nad	104.616.000						
		8 Pengadaan kendaraan Truk Operasional Pos	Nad	596.400.000						
		9 Pengadaan kendaraan Roda Dua Operasional Pos	Nad	147.000.000						
		10 Pengawasan Pembangunan Kantor Pos Lamno	A. Jaya	20.000.000						
		11 Pembangunan Kantor Pos Lamno	A. Jaya	420.000.000						
		12 Rehab Kantor Pos Besar Banda Aceh	B. Aceh	600.000.000						
		13 Pengawasan Pembangunan Kantor Pos Sabang	Sabang	20.000.000						
		14 Pembangunan Kantor Pos Sabang	Sabang	420.000.000						
		15 Pengawasan Rehab Kantor Pos Besar Sigli	Pidie	11.080.000						
		16 Rehab Kantor Pos Besar Sigli	Pidie	277.000.000						
		17 Rehab Kantor Pos Trienggadeng	Pidie	420.000.000						
		18 Pengawasan Rehab Kantor Pos Trienggadeng	Pidie	20.500.000						
INFRASTRUKTUR				320.580.561.275		357.215.000.000		374.111.750.000		
SUMBER DAYA AIR		I. IRIGASI		198.826.873.275		20.650.000.000		47.024.000.000		
		1 Administrasi Umum		1.130.100.000						
		2 SID. D.I. Tripa, 3000 Ha (lanjutan)	Nagan Raya	1.000.000.000						
		3 SID. D.I. Jambo Aye Kanan, 3000 Ha	Aceh Timur	1.000.000.000						
		4 SID. D.I. Kr. Ligan-Masen, 1500 Ha	Aceh Jaya	770.000.000						
		5 DD Bangunan Utama Tamiang	Nagan Raya	450.000.000						
		6 SID. Bangunan Suplesi DI Baro Raya (tersebar)	Aceh Utara	400.000.000						
		7 SID. DI Tangse, 550 Ha	Aceh Barat	468.000.000						
		8 SID. DI Lam Girek, 650 Ha	Aceh Besar	500.000.000						
		9 Supervisi Rehabilitasi Saluran Sekunder D.I Pante Lhong dan Cot Trieng dan Jaringan I	Aceh Barat	673.282.000						
		10 Supervisi/Pengawasan Konstruksi Jaringan Irigasi Suak Lamatan dan Sefulu	Pidie & A. Timur	376.000.000						
		11 Supervisi Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Krueng Aceh dan Pembangunan Embung Leu	Pidie & A. Timur	790.318.000						
		12 Rehabilitasi Gedung Kantor Perencanaan SKNVT IRA NAD	Banda Aceh	20.000.000						
		(APBN)		2.856.600.000		0		0		
		13 Administrasi Umum		736.600.000						
		14 Rehabilitasi Saluran Sekunder D.I Pante Lhong, 6252 Ha	Bireun	2.100.000.000						
		15 Rehabilitasi Gedung Kantor	Bireun	20.000.000						
		(Grant - ADB)		43.985.263.000		0		0		
		16 Administrasi Umum		755.100.000						
		17 Rehabilitasi D.I. Pseudada, 1.067 Ha (Paket LCB)	Bireuen	12.743.807.000						
		18 Rehabilitasi D.I. Pseudada, 1.067 Ha (Paket SP3)	Bireuen	1.099.869.000						
		19 Rehabilitasi D.I. Pandrah, 1.015 Ha (Paket LCB)	Bireuen	922.412.000						
		20 Rehabilitasi D.I. Pandrah, 1.015 Ha (Paket SP3)	Bireuen	1.362.991.000						
		21 Rehabilitasi D.I. Samalanga, 2.168 Ha (Paket LCB)	Bireuen	2.213.519.000						
		22 Rehabilitasi D.I. Samalanga, 2.168 Ha (Paket SP3)	Bireuen	2.653.895.000						
		23 Rehabilitasi D.I Kr. Nalan, 1.750 Ha (Paket LCB)	Bireuen	10.514.471.000						
		24 Rehabilitasi D.I Kr. Nalan, 1.750 Ha (Paket SP3)	Bireuen	2.518.171.000						
		25 Rehabilitasi D.I. Pante Lhong, 6.252 Ha (Paket LCB)	Bireuen	6.382.648.000						
		26 Rehabilitasi D.I. Pante Lhong, 6.252 Ha (Paket SP3)	Bireuen	1.755.621.000						
		27 Rehabilitasi D.I.Paya Nie, 3.121 Ha (Paket LCB)	Bireuen	259.309.000						
		28 Rehabilitasi D.I.Paya Nie, 3.121 Ha (Paket SP3)	Bireuen	803.450.000						
		(APBN)		6.215.900.000		0		0		
		29 Administrasi Umum		750.000.000						
		30 Rehabilitasi Waduk / Bendungan / Bendung / Embung		0						
		31 Rehab D.I. Embung Lubok / Lanjutan	Aceh Besar	3.000.000.000						
		32 Rehab Saluran Sekunder Lamcot, Dayah Daboh, Lam Raya dan Blang Bintang, D.I Krueng Aceh		1.000.000.000						

**RENCANA KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
TAHUN 2007 - 2009**

BIDANG	PROGRAM UTAMA	SUB BIDANG / KEGIATAN	LOKASI	2007		2008		2009		KETERANGAN
				NILAI (RUPIAH)	VOLUME	NILAI (RUPIAH)	VOLUME	NILAI (RUPIAH)	VOLUME	
		33 Rehabilitasi Saluran Sekunder Lam Raya & Blang Bintang	D.I. Krueng Aceh, 250 Ha	1.000.000.000						
		34 Rehab D.I Blang Batee Beukah		465.900.000						

**RENCANA KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
TAHUN 2007 - 2009**

BIDANG	PROGRAM UTAMA	SUB BIDANG / KEGIATAN	LOKASI	2007		2008		2009		KETERANGAN
				NILAI (RUPIAH)	VOLUME	NILAI (RUPIAH)	VOLUME	NILAI (RUPIAH)	VOLUME	
		(Grant - ADB)		6.474.824.000		0		0		
		35 Administrasi Umum		87.000.000						
		36 Rehabilitasi D.I Geunteut Lamsujen, 868 Ha, Paket LCB		2.981.349.000						
		37 Rehabilitasi D.I Geunteut Lamsujen, 868 Ha, Paket SP3		56.443.000						
		38 Rehabilitasi D.I Krueng Kala, 200 Ha, Paket LCB		1.100.032.000						
		39 Rehabilitasi D.I Krueng Kala, 200 Ha, Paket SP3		300.000.000						
		40 Rehabilitasi D.I Krueng Geupue, 216 Ha, Paket LCB		1.950.000.000						
		(APBN)		3.555.800.000		0		0		
		41 Administrasi Umum		785.800.000						
		42 Rehabilitasi Jaringan Irigasi		0						
		43 Pembangunan D.I Suak Lamatan	Nagan Raya	2.750.000.000						
		44 Rehabilitasi Gedung Kantor, Pagat dan Halaman Kantor	Nagan Raya	20.000.000						
		(GRANT-ADB)		30.948.141.275		0		0		
		45 Administrasi Umum		982.500.000						
		46 Rehabilitasi D.I. Bungong Talo, 250 Ha (Paket SP3)	Nagan Raya	472.803.000						
		47 Rehabilitasi D.I. Bungong Talo, 250 Ha (Paket LCB)	Nagan Raya	1.323.459.000						
		48 Rehabilitasi D.I. Bungong Talo, 250 Ha (Paket LCB II)	Nagan Raya	1.617.105.000						
		49 Rehabilitasi D.I. Pante Ara, 500 Ha (Paket LCB)	Nagan Raya	262.106.000						
		50 Rehabilitasi D.I. Pante Ara, 500 Ha (Paket LCB II)	Nagan Raya	1.438.208.000						
		51 Rehabilitasi D.I. Pante Ara, 500 Ha (Paket SP3)	Nagan Raya	229.153.000						
		52 Rehabilitasi D.I. Panga Pucuk, 516 Ha (Paket LCB)	Aceh Jaya	1.354.012.000						
		53 Rehabilitasi D.I. Panga Pucuk, 516 Ha (Paket SP3)	Aceh Jaya	563.200.000						
		54 Rehabilitasi D.I. Panghule Hareukat (Kr. Sabe), 150 Ha (Paket LCB)	Aceh Jaya	932.912.000						
		55 Rehabilitasi D.I. Panghule Hareukat (Kr. Sabe), 150 Ha (Paket SP3)	Aceh Jaya	81.284.000						
		56 Rehabilitasi D.I. Blang Jeumpeuk (Kr. Sabe), 100 Ha (Paket LCB)	Aceh Jaya	856.980.000						
		57 Rehabilitasi D.I. Blang Jeumpeuk (Kr. Sabe), 100 Ha (Paket SP3)	Aceh Jaya	81.236.275						
		58 Rehabilitasi D.I. Kuala Meuresi (Kr. Sabe), 125 Ha (Paket LCB)	Aceh Jaya	825.296.000						
		59 Rehabilitasi D.I. Kuala Meuresi (Kr. Sabe), 125 Ha (Paket SP3)	Aceh Jaya	53.453.000						
		60 Rehabilitasi D.I. Kulam Asan (Kr. Sabe), 100 Ha (Paket LCB)	Aceh Jaya	1.459.260.000						
		61 Rehabilitasi D.I. Kulam Asan (Kr. Sabe), 100 Ha (Paket SP3)	Aceh Jaya	121.070.000						
		62 Rehabilitasi D.I. Trieng Lipeh (Kr. Sabe), 175 Ha (Paket LCB)	Aceh Jaya	1.687.345.000						
		63 Rehabilitasi D.I. Trieng Lipeh (Kr. Sabe), 175 Ha (Paket SP3)	Aceh Jaya	148.004.000						
		64 Rehabilitasi D.I. Pucok Alue Mon Mata (Kr. Sabe), 140 Ha (Paket LCB)	Aceh Jaya	968.415.000						
		65 Rehabilitasi D.I. Pucok Alue Mon Mata (Kr. Sabe), 140 Ha (Paket SP3)	Aceh Jaya	83.146.000						
		66 Rehabilitasi D.I. Jabie, 150 Ha (Paket LCB)	Aceh Jaya	614.687.000						
		67 Rehabilitasi D.I. Jabie, 150 Ha (Paket SP3)	Aceh Jaya	155.489.000						
		68 Rehabilitasi D.I. Ladang Baro, 1000 Ha (Paket LCB)	Aceh Jaya	304.484.000						
		69 Rehabilitasi D.I. Ladang Baro, 1000 Ha (Paket SP3)	Aceh Jaya	135.382.000						
		70 Rehabilitasi D.I. Blang Ulee Gajah, 500 Ha (Paket LCB)	Aceh Jaya	790.582.000						
		71 Rehabilitasi D.I. Blang Ulee Gajah, 500 Ha (Paket SP3)	Aceh Jaya	97.491.000						
		72 Rehabilitasi D.I. Krueng Ateuh, 500 Ha (Paket LCB)	Aceh Jaya	1.756.051.000						
		73 Rehabilitasi D.I. Krueng Ateuh, 500 Ha (Paket SP3)	Aceh Jaya	98.492.000						
		74 Rehabilitasi D.I. Meudheun, 100 Ha (Paket LCB)	Aceh Jaya	779.213.000						
		75 Rehabilitasi D.I. Meudheun, 100 Ha (Paket SP3)	Aceh Jaya	82.314.000						
		76 Rehabilitasi D.I. Lambaro, 150 Ha (Paket LCB)	Aceh Jaya	1.038.479.000						
		77 Rehabilitasi D.I. Lambaro, 150 Ha (Paket SP3)	Aceh Jaya	95.764.000						
		78 Rehabilitasi D.I. Babah Awe, 100 Ha (Paket LCB)	Aceh Jaya	1.465.507.000						
		79 Rehabilitasi D.I. Babah Awe, 100 Ha (Paket SP3)	Aceh Jaya	69.145.000						
		80 Rehabilitasi D.I. Bunbum, 150 Ha (Paket LCB)	Aceh Jaya	1.952.186.000						
		81 Rehabilitasi D.I. Bunbum, 150 Ha (Paket SP3)	Aceh Jaya	97.134.000						
		82 Rehabilitasi D.I. Babah Ie, 200 Ha (Paket LCB)	Aceh Jaya	832.080.000						
		83 Rehabilitasi D.I. Babah Ie, 200 Ha (Paket SP3)	Aceh Jaya	56.925.000						
		84 Rehabilitasi D.I. Krueng Tunong, 150 Ha (Paket LCB)	Aceh Jaya	1.013.774.000						
		85 Rehabilitasi D.I. Krueng Tunong, 150 Ha (Paket SP3)	Aceh Jaya	67.324.000						
		86 Rehabilitasi D.I. Meulha, 125 Ha (Paket LCB)	Aceh Jaya	612.150.000						
		87 Rehabilitasi D.I. Meulha, 125 Ha (Paket SP3)	Aceh Jaya	102.242.000						
		88 Rehabilitasi D.I. Ketimbang Tunong, 250 Ha (Paket LCB)	Aceh Barat	625.000.000						
		89 Rehabilitasi D.I. Ketimbang Tunong, 250 Ha (Paket SP3)	Aceh Barat	750.000.000						
		90 Rehabilitasi D.I. Kinco, 300 Ha (Paket LCB)	Aceh Barat	750.000.000						
		91 Rehabilitasi D.I. Kinco, 300 Ha (Paket SP3)	Aceh Barat	750.000.000						
		92 Rehabilitasi D.I. Lambaya	Aceh Barat	163.351.000						
		93 Rehabilitasi D.I. Sambai	Aceh Barat	131.948.000						
		94 Rehab kantor	Aceh Barat	20.000.000						
		(APBN)		751.800.000		0		0		
		95 Administrasi Umum		751.800.000						
		(GRANT-ADB)		15.524.806.000		0		0		
		96 Administrasi Umum		537.600.000						
		97 Rehabilitasi D.I. Meureudu, 518 Ha (1.729 Ha) lanjutan (Paket LCB)	Pidie	3.137.600.000						
		98 Rehabilitasi D.I. Meureudu, 518 Ha (1.729 Ha) lanjutan (Paket SP3)	Pidie	2.040.000.000						

**RENCANA KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
TAHUN 2007 - 2009**

BIDANG	PROGRAM UTAMA	SUB BIDANG / KEGIATAN	LOKASI	2007		2008		2009		KETERANGAN
				NILAI (RUPIAH)	VOLUME	NILAI (RUPIAH)	VOLUME	NILAI (RUPIAH)	VOLUME	
		99 Rehabilitasi D.I. Ulim Kiri, 100 Ha (Paket LCB)	Pidie	1.147.000.000						
		100 Rehabilitasi D.I. Ulim Kiri, 100 Ha (Paket SP3)	Pidie	195.000.000						
		101 Rehabilitasi D.I. Cubo Trieng Gadeng, 1.909 Ha (Paket LCB)	Pidie	2.268.900.000						
		102 Rehabilitasi D.I. Cubo Trieng Gadeng, 1.909 Ha (Paket SP3)	Pidie	2.244.800.000						
		103 Rehabilitasi D.I. Beuracan, 863 Ha (Paket LCB)	Pidie	1.299.215.000						
		104 Rehabilitasi D.I. Beuracan, 863 Ha (Paket SP3)	Pidie	654.691.000						
		105 Intake Alue Adam LCB	Pidie	2.000.000.000						
		(APBN)		644.800.000		0		0		
		106 Administrasi Umum		624.800.000						
		107 Rehabilitasi Gedung kantor	Aceh Timur	20.000.000						
		(GRANT-ADB)		4.372.414.000		0		0		
		108 Administrasi Umum		160.500.000						
		109 Rehab DL Alue Canang, 200 Ha (Paket LCB)	Aceh Timur	1.372.350.000						
		110 Rehab DL Alue Canang, 200 Ha (Paket SP3)	Aceh Timur	120.021.000						
		111 Rehab DL Alue Nibong, 200 Ha (Paket LCB)	Aceh Timur	1.676.106.000						
		112 Rehab DL Alue Nibong, 200 Ha (Paket SP3)	Aceh Timur	62.009.000						
		113 Rehab DL Leles, 150 Ha (Paket LCB)	Aceh Timur	354.650.000						
		114 Rehab DL Leles, 150 Ha (Paket SP3)	Aceh Timur	77.054.000						
		115 Rehab DL Julok Tunong, 300 Ha (Paket SP3)	Aceh Timur	549.724.000						
		(APBN)		2.197.400.000		0		0		
		116 Administrasi Umum		797.400.000						
		117 Pembangunan Irigasi Desa Cot Trieng	Aceh Utara	1.000.000.000						
		118 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kecil	Aceh Utara	400.000.000						
		(GRANT-ADB)		15.841.843.000		0		0		
		119 Administrasi Umum		653.400.000						
		120 Rehabilitasi D.I. Binjee, 200 Ha (Paket LCB)	Aceh Utara	593.418.000						
		121 Rehabilitasi D.I. Binjee, 200 Ha (Paket SP3)	Aceh Utara	158.318.000						
		122 Rehabilitasi D.I. Sawang, 225 Ha (Paket LCB)	Aceh Utara	243.019.000						
		123 Rehabilitasi D.I. Sawang, 225 Ha (Paket SP3)	Aceh Utara	166.434.000						
		124 Rehabilitasi D.I. Krueng Tuan, 2.222 Ha (Paket LCB)	Aceh Utara	2.147.727.000						
		125 Rehabilitasi D.I. Krueng Tuan, 2.222 Ha (Paket SP3)	Aceh Utara	1.206.206.000						
		126 Rehabilitasi D.I. Alue Ubay, 2.541 Ha (Paket LCB)	Aceh Utara	1.961.144.000						
		127 Rehabilitasi D.I. Alue Ubay, 2.541 Ha (Paket SP3)	Aceh Utara	1.296.062.000						
		128 Rehabilitasi D.I. Krueng Pase Kiri, 3.308 Ha (Paket LCB)	Aceh Utara	2.686.700.000						
		129 Rehabilitasi D.I. Krueng Pase Kiri, 3.308 Ha (Paket SP3)	Aceh Utara	2.686.571.000						
		130 Rehabilitasi D.I. Krueng Pase Kanan, 5.614 Ha (Paket LCB)	Aceh Utara	759.636.000						
		131 Rehabilitasi D.I. Krueng Pase Kanan, 5.614 Ha (Paket SP3)	Aceh Utara	888.860.000						
		132 Rehabilitasi D.I. Meunasah Daya, 100 Ha (Paket LCB)	Aceh Utara	252.404.000						
		133 Rehabilitasi D.I. Meunasah Daya, 100 Ha (Paket SP3)	Aceh Utara	141.944.000						
		(APBN)		1.003.400.000		0		0		
		134 Administrasi Umum		1.003.400.000						
		(GRANT-ADB)		56.876.182.000		20.650.000.000		47.024.000.000		
		135 Administrasi Umum		997.800.000						
		136 Rehabilitasi D.I. Babah Rote, 930 Ha (1.550 Ha) (Paket LCB)	Abdya	363.002.000						
		137 Rehabilitasi D.I. Babah Rote, 930 Ha (1.550 Ha) (Paket SP3)	Abdya	364.751.000						
		138 Rehabilitasi D.I. Babah Rote, 1.550 Ha, Paket LCB-2	Abdya	2.535.273.000						
		139 Rehabilitasi D.I. Babah Rote, 1.550 Ha, Paket LCB-3	Abdya	1.954.393.000						
		140 Rehabilitasi D.I. Krueng Susoh, 250 Ha (2.100 Ha) lanjutan (Paket SP3)	Abdya	182.968.000						
		141 Rehabilitasi D.I. Krueng Susoh, 2.100 Ha (Paket LCB)	Abdya	1.506.000.000						
		142 Rehabilitasi D.I. Krueng Susoh, 2.100 Ha (Paket LCB-2)	Abdya	2.533.383.000						
		143 Rehabilitasi D.I. Krueng Susoh, 2.100 Ha (Paket SP3)	Abdya	764.859.000						
		144 Rehabilitasi D.I. Tangan-tangan, 710 Ha lanjutan (Paket LCB)	Abdya	131.700.000						
		145 Rehabilitasi D.I. Tangan-tangan, 710 Ha lanjutan (Paket SP3)	Abdya	351.953.000						
		146 Rehabilitasi D.I. Tangan-tangan, 710 Ha (Paket LCB)	Abdya	3.681.937.000						
		147 Rehabilitasi D.I. Tangan-tangan, 710 Ha (Paket SP3)	Abdya	865.603.000						
		148 Rehabilitasi D.I. Pantan Cut, 600 Ha (Paket LCB)	Abdya	1.875.177.000						
		149 Rehabilitasi D.I. Pantan Cut, 600 Ha (Paket SP3)	Abdya	176.451.000						
		150 Rehabilitasi D.I. Manggeng, 1.034 Ha (Paket LCB)	Aceh Selatan	1.214.683.000						
		151 Rehabilitasi D.I. Manggeng, 300 ha (1.604 Ha) (Paket SP3)	Aceh Selatan	313.209.000						
		152 Rehabilitasi D.I. Manggeng, 300 ha (1.604 Ha) (Paket LCB)	Aceh Selatan	2.074.573.000						
		153 Rehabilitasi D.I. Manggeng, 1.034 Ha (Paket SP3)	Aceh Selatan	417.226.000						
		154 Rehabilitasi D.I. Gunung Pudung, 1.258 Ha lanjutan (Paket LCB)	Aceh Selatan	389.682.000						
		155 Rehabilitasi D.I. Gunung Pudung, 1.258 Ha lanjutan (Paket SP3)	Aceh Selatan	233.557.000						
		156 Rehabilitasi D.I Gunung Pudung, 2.229 Ha, Paket LCB-2	Aceh Selatan	1.547.273.000						
		157 Rehabilitasi D.I Gunung Pudung, 2.229 Ha, Paket LCB-3	Aceh Selatan	3.687.847.000						
		158 Rehabilitasi D.I Gunung Pudung, 2.229 Ha, Paket SP3	Aceh Selatan	1.791.796.000						
		159 Rehabilitasi D.I. Paya Dapur, 2.391 Ha (Paket LCB)	Aceh Selatan	6.681.460.000						
		160 Rehabilitasi D.I. Paya Dapur, 2.391 Ha (Paket SP3)	Aceh Selatan	1.704.116.000						

**RENCANA KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
TAHUN 2007 - 2009**

BIDANG	PROGRAM UTAMA	SUB BIDANG / KEGIATAN	LOKASI	2007		2008		2009		KETERANGAN
				NILAI (RUPIAH)	VOLUME	NILAI (RUPIAH)	VOLUME	NILAI (RUPIAH)	VOLUME	
		161 Rehabilitasi D.I Jambo Dalam, 1500 Ha (Paket LCB)	Aceh Selatan	5.709.536.000						
		162 Rehabilitasi D.I Beutong, 1100 Ha (Paket SP3)	Aceh Tenggara	7.872.452.000						
		163 Rehabilitasi D.I Sidorejo, 200 Ha (Paket LCB)	Aceh Tenggara	500.000.000						
		164 Rehabilitasi D.I Tanah Bara, 150 Ha (Paket LCB)	Aceh Tenggara	375.000.000						
		165 Rehabilitasi D.I Lae Langge, 200 Ha (Paket LCB)	Aceh Tenggara	1.140.196.000						
		166 Rehabilitasi D.I Bulusema, 70 Ha (Paket LCB)	Aceh Tenggara	908.524.000						
		167 Rehabilitasi D.I. Lawe Ijo, 100 Ha (Paket SP3)	Aceh Tenggara	90.863.000						
		168 Rehabilitasi D.I. Kedataran, 100 Ha (Paket SP3)	Aceh Tenggara	88.939.000						
		169 Rehabilitasi D.I. Tenembak Juhar, 250 Ha (Paket LCB)	Aceh Tenggara	1.850.000.000						
		170 Rehabilitasi Saluran Irigasi Lampu'uk Kab. Aceh Besar (75 ha)	Aceh Besar			500.000.000	75 Ha			
		171 Pembangunan Bendung Blang Ura Lamtamot Kec. Lembah Seulawah Kab. A. Besar	Aceh Besar			500.000.000	1 Unit			
		172 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Lamteh, Leupung Aceh Besar	Aceh Besar			400.000.000	250 Ha			
		173 Rehabilitasi Irigasi DI. Kr. Aceh	Aceh Besar			1.500.000.000	300 Ha			
		174 Rehabilitasi Irigasi Blang Nibong	Aceh Besar			200.000.000	100 Ha			
		175 Rehab. DI. Blang Bate Beukah	Aceh Besar			1.000.000.000	90 Ha			
		176 Rehab. DI. Baro Raya GIp. Baro	Pidie			1.500.000.000	500 Ha			
		177 Rehab. Sub. DI Lhok Sukon DI Jambo Aye (BA)	Aceh Utara			3.000.000.000	5.326 Ha			
		178 Rehab. DI Gajah (BA)	Gayo Lues			500.000.000	200 Ha			
		179 Rehab. DI Uring (BA)	Gayo Lues			500.000.000	200 Ha			
		180 Rehab. Sub DI Arakundo DI Jambo Aye (BA)	Aceh Timur			2.000.000.000	1.636 Ha			
		181 Rehab. DI Alue Lhok Peureulak (300 ha)	Aceh Timur			3.000.000.000	300 Ha			
		182 Rehab. Sal. Irigasi Desa Jeungki Kec. Perlak	Aceh Timur			500.000.000	250 M			
		183 Rehab. Jaringan Irigasi Jambo Aye (Pantai Bidari Aceh Timur)	Aceh Timur			1.000.000.000	500 M			
		184 Pembangunan Drainase Induk Rawa Leuhan (8000 M)	Aceh Barat			2.300.000.000	8.000 M			
		185 DI. Alur Sungai Rambot (260 ha)	Aceh Barta Daya			1.500.000.000	2.500 M			
		186 Irigasi D.I. Trieng Meuduro	Aceh Selatan			750.000.000	250 Ha			
		187 Rehab. DI Lamgeuriheu Kec. Lhoong	Aceh Besar					200.000.000	75 ha	
		188 Rehab. Saluran Irigasi Kr. Jreu	Aceh Besar					500.000.000	2.000 M	
		189 Rehab. Irigasi Blang Lam Kura	Aceh Besar					900.000.000	200 ha	
		190 Saluran Pmbuang Rawa Seunebok Padang	Aceh Jaya					1.000.000.000	1 Pkt	
		191 Saluran Pmbuang Rawa Tanoh Ano	Aceh Jaya					1.000.000.000	1 Pkt	
		192 Saluran Pmbuang Rawa Pesi Timon	Aceh Jaya					1.000.000.000	1 Pkt	
		193 Saloran Pmbuang Rawa Panga	Aceh Jaya					1.000.000.000	1 Pkt	
		194 Rehab. Dan Pengembangan DI. Kr. Masen/Babah Nipah	Aceh Jaya					500.000.000	300 ha	
		195 Rehab DI Baro Raya Kec. Kembang Tanjung	Pidie					1.000.000.000	1.200 ha	
		196 Perbaikan Sal. Baro Raya Kec. Sakti	Pidie					1.000.000.000	1.500 m	
		197 Reha. DI Alue Deumam Kec. Meureudu	Pidie					200.000.000	25 ha	
		198 Rehab. Bendung Alue Badeuk Kec. Tangse	Pidie					2.000.000.000	1 Unit	
		199 Rehab. Intake Lhong Adan Kec. Sakti	Pidie					2.000.000.000	1 Unit	
		200 Rehab. Sal. Irigasi Desa Lhok Krek Kec. Sawang	Aceh Utara					200.000.000	1.500 m	
		201 DI. Pantan Pineung (3900 ha)	Abdya					16.000.000.000	3.900 ha	
		202 DI. Twi Kareung (300 ha)	Abdya					1.500.000.000	300 ha	
		203 Irigasi D.I Ujung Tanoh	Aceh Selatan					3.500.000.000		Ha
		204 Pembangunan Irigasi Lawe Mengkudu	Aceh tengara					500.000.000	1 Pkt	
		205 Irigasi D.I Jambo Dalem	Aceh Selatan					1.250.000.000	1.000 Ha	
		206 Irigasi D.I Krueng Baro	Aceh Selatan					1.250.000.000	200 Ha	
		207 Pembangunan Irigasi Daerah Irigasi Cipare-pare Kec. Sultan Daulat	Singkil					2.200.000.000	550 Ha	
		208 Pembangunan Irigasi Daerah Irigasi Lae Langge Kec. Sultan Daulat	Singkil					2.200.000.000	550 Ha	
		209 Peningkatan Jaringan Irigasi di Sidorejo Kec.G.Meriah	Singkil					1.124.000.000	321 Ha	
		210 Rehab. DI Lawe Buloh	Aceh Tengara					1.500.000.000	500 ha	
		211 Rehab. DI Lawe Bulan	Aceh Tengara					1.000.000.000	500 ha	
		212 Pembangunan Irigasi Lawe Mengkudu	Aceh Tengara					500.000.000	1 Pkt	
		213 Pembangunan Irigasi Liang Panggi	Aceh Tengara					450.000.000	1 Pkt	
		214 Pembanguna Irigasi Lawe Pangkat, Alur Langsat, Mendabe, Dan Kuta Lang-lang	Aceh Tengara					1.550.000.000	4 Pkt	

**RENCANA KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
TAHUN 2007 - 2009**

BIDANG	PROGRAM UTAMA	SUB BIDANG / KEGIATAN	LOKASI	2007		2008		2009		KETERANGAN
				NILAI (RUPIAH)	VOLUME	NILAI (RUPIAH)	VOLUME	NILAI (RUPIAH)	VOLUME	
		J. PENGENDALIAN BANJIR		54.497.159.000		203.900.000.000		141.250.000.000		
		1 Administrasi		1.234.200.000						
		2 Penyusunan Detail Design		0						
		3 - Konsultan Supervisi Pengamanan Pantai (Tersebar)		800.000.000						
		4 - Supervisi Pengendalian Banjir Tersebar (Lanjutan)		556.444.000						
		5 - Identifikasi dan Pengukuran Kr. Arusan Syiah Kuala Banda Aceh	Banda Aceh	100.000.000						
		6 - Identifikasi dan Optimalisasi Muara Floodway Kr. Aceh	Banda Aceh	100.000.000						
		7 - Macro Drain Kr. Titi Panjang (Lanjutan)	Aceh Besar	1.873.600.000						
		8 - Pengendalian Banjir Sungai Kr. Arusan-Side Drain Floodway Kr. Aceh(Lanjutan)	Banda Aceh	2.110.580.000						
		9 - Pengamanan Tebing dan Normalisasi Kr. Neng Kota Banda Aceh (Lanjutan)	Banda Aceh	703.338.000						
		10 - Pengamanan Tebing Sungai Desa Lambhuk Kota Banda Aceh (Lanjutan)	Banda Aceh	702.239.000						
		11 - Pembuatan Saluran Pembuang Desa Lambada	Aceh Besar	500.000.000						
		12 - Pembuatan Tanggul Air Asin Desa Neuhen Aceh Besar	Aceh Besar	1.000.000.000						
		13 Penyusunan Amdal / UKL / UPL		100.000.000						
		14 SID Pantai Malikul Saleh	A. Utara	850.000.000						
		15 Supervisi Pengendalian Banjir Kota Sigli dan Kr. Baro (Lanjutan)	Tersebar	600.000.000						
		16 Supervisi Kr. Trienggadeng, Kr. Pandrah, Kr. Jeunieb, Kr. Peudada dan Kr. Nalan (Lanjutan/MY))	Tersebar	530.800.000						
		17 Pengukuran Tambahan Jetty Kr. Baro Pidie	Pidie	100.000.000						
		PEMBANGUNAN PRASARANA PENGENDALIAN AIR		23.500.263.000		0		0		
		18 Pengamanan Tebing Sungai Kr. Panter Raja (Lanjutan/MY)	Pidie	649.658.000						
		19 Pengamanan Tebing Sungai Kr. Trienggadeng (Lanjutan/MY)	Pidie	522.800.000						
		20 Pengamanan Tebing Sungai Kr. Reubee (Lanjutan/MY)	Pidie	1.631.640.000						
		21 Pengamanan Tebing Sungai Kr. Batee (Lanjutan/MY)	Pidie	960.477.000						
		22 Pengamanan Tebing Sungai Kr. Keumala (Lanjutan/MY)	Pidie	700.887.000						
		23 Pengendalian Banjir Kota Sigli dan Kr. Baro di Kabupaten Pidie (Lanjutan)	Pidie	7.528.023.000						
		24 Pengendalian Banjir Kr. Pasee (Lanjutan/MY)	A. Utara	2.597.701.000						
		25 Pengamanan Tebing Sungai Kr. Peusangan (Lanjutan/MY)	Bireuen	1.755.582.000						
		26 Pengendalian Banjir Kr. Jeunib (Lanjutan/MY)	Bireuen	1.659.537.000						
		27 Pengamanan Tebing Sungai Kr. Peudada (Lanjutan/MY)	Bireuen	1.285.181.000						
		28 Pengamanan Tebing Sungai Kr. Nalan (Lanjutan/MY)	Bireuen	1.219.987.000						
		29 Pengendalian Banjir Kr. Pandrah (Lanjutan/MY)	Bireuen	2.988.790.000						
		PENYUSUNAN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN		19.135.695.000		203.900.000.000		141.250.000.000		
		30 UKL/UPL	Bireuen	100.000.000						
		31 Administrasi Kegiatan		2.518.800.000						
		32 Pengendalian Banjir Kr. Arakundo (Lanjutan)	A. Timur	603.394.000						
		33 Pengamanan Tebing Sungai Kr. Peureulak (Lanjutan)	A. Timur	581.790.000						
		34 Pengendalian Banjir Sungai Kr. Langsa (Lanjutan)	Langsa	682.708.000						
		35 Pengendalian Banjir Kr. Tamiang Intake PDAM Karang Baru (Lanjutan)	Langsa	938.278.000						
		36 Amdal/UKL/UPL		100.000.000						
		37 PENDAMPING-Pengendalian Sungai Kr. Babah Rote	Abdya	3.000.000.000						
		38 IRFF-Pengendalian Sungai Kr. Babah Rote	Abdya	1.500.000.000						
		39 Pengamanan Tebing Sungai Kr. Manggeng (lanjutan)	Abdya	560.611.000						
		40 Pengamanan Tebing Sungai Kr. Labuhan Haji (lanjutan)	Abdya	586.669.000						
		41 Pengaman Tebing Krueg Tripa	Nagan Raya	2.000.000.000						
		42 Amdal/UKL/UPL	A. Barat	100.000.000						
		43 Administrasi Kegiatan		934.100.000						
		44 SID Lae Matee	Singkil	750.000.000						
		45 Supervisi Pengendalian Banjir Tersebar (Lanjutan)	Tersebar	534.200.000						
		46 Pengendalian Banjir Kr. Peulumat (lanjutan)	A. Selatan	1.254.938.000						
		47 Pengendalian Banjir Kr. Meukek (lanjutan)	A. Selatan	950.637.000						
		48 Pengendalian Banjir Kr. Keumumu (lanjutan)	A. Selatan	950.270.000						
		49 Amdal/UKL/UPL	Singkil	489.300.000						
		50 Pengendalian Banjir Kr. Doy	Banda Aceh			3.000.000.000	2000	M		
		51 Pengendalian Banjir Krueg raya	Banda Aceh			1.000.000.000	1000	M		
		52 Perbaikan Tebing Sungai Kr. Pudeng Lhoong	Aceh Besar			4.000.000.000	2500	M		
		53 Pengendalian Banjir Sungai Kr. Raya Ds Meunasah Keude	Aceh Besar			3.000.000.000	2000	M		
		54 Pembuatan Tanggul dan Muara Kr. Teunom (lanjutan)	Aceh Jaya			10.000.000.000	5000	M		
		55 Normalisasi Kr. Padang Lageun	Aceh Jaya			10.000.000.000	5000	M		
		56 Pengamanan Tebing Sungai Kr. Tiro (Kec. Mutiara Timur/Kbg. Tanjong)	Pidie			6.000.000.000	3	Km		
		57 Pengamanan Tebing Sungai Kr. Cubo (Kec. Bandar Baru)	Pidie			4.000.000.000	2	Km		
		58 Normalisasi Tebing Sungai Kr. Peusangan Bireuen	Bireuen			4.000.000.000	1	Km		
		59 Normalisasi Sungai Kr. Langsa (lanjutan)	Langsa			4.000.000.000	1500	M		
		60 Pemb. Tanggul Banjir Kiri Sungai Tamiang	Tamiang			14.400.000.000	10	Km		
		61 Pengendalian Banjir Kr. Tripa	Nagan Raya			9.000.000.000	4000	M		
		62 Krueg Sarullah Tapaktuan (1500 m)	Aceh Selatan			3.750.000.000	1500	M		
		63 Saluran Pembangunan Trumon	Aceh Selatan			1.500.000.000	4	Km		
		64 Pembangunan Tanggul Banjir Krueg Kluet Selatan Aceh Selatan	Aceh Selatan			3.500.000.000	1000	M		
		65 Pembangunan Tanggul Banjir Krueg Kluet Utara Aceh Selatan	Aceh Selatan			2.250.000.000	800	M		

**RENCANA KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
TAHUN 2007 - 2009**

BIDANG	PROGRAM UTAMA	SUB BIDANG / KEGIATAN	LOKASI	2007		2008		2009		KETERANGAN
				NILAI (RUPIAH)	VOLUME	NILAI (RUPIAH)	VOLUME	NILAI (RUPIAH)	VOLUME	
		66 Pengendalian Banjir Kr. Singkil	Singkil			15.000.000.000	7500 M			
		67 Tanggul Kr. Meurbo dan Kr. Cangky	Aceh Barat			105.000.000.000	20 KM			
		68 Tangul air Asin Ds Pulot Kec. Leupung	Aceh Besar			500.000.000	200 m			
		69 Pembuatan Tanggul dan Volder serta Water Pump Kr. Titi Panjang	Banda Aceh					20.000.000.000	1 Pkt	
		70 Normalisasi Kr. Arusan di Syiah Kuala	Banda Aceh					5.000.000.000	1 Pkt	
		71 Perbaikan Jetty Muara Alue Naga	Banda Aceh					7.000.000.000	1 Pkt	
		72 Perkuatan Tebing Alur Mata Ie Balohan	Sabang					2.500.000.000	1 Pkt	
		73 Penanganan Muara Sungai Kr. Raya Desa Meunasah Keudee	Aceh Besar					3.000.000.000	1 Pkt	
		74 Pembuatan Tanggul dan Normalisasi Sungai Kr. On	Aceh Jaya					7.000.000.000	1 Pkt	
		75 Pengendalian Banjir Kr. Pasee	Aceh Utara					4.500.000.000	1 Pkt	
		76 Pengendalian Banjir Kr. Pandrah	Bireuen					3.500.000.000	1,5 Km	
		77 Pengamanan Tebing Sungai Kr. Putu Gp. Udeung Pohroh, Kec. Bandar Dua	Pidie					-	400 m	
		78 Pembangunan Jetty Kr. Baro	Pidie					13.200.000.000	1 Pkt	
		79 Normalisasi Krueng Langsa	Langsa					10.200.000.000	1 Pkt	
		80 Pengaman Tebing Kr. Woyla	Aceh Barat					3.000.000.000	1 Pkt	
		81 Pengendalian Banjir Kr. Babah Rot	Aceh Barat Daya					7.000.000.000	11 Km	
		82 Krueng Pulau Ie - Sialang Kl. Selatan (1000 m)	Aceh Selatan					2.500.000.000	1000 m	
		83 Alue Paku Sawang (500 m)	Aceh Selatan					1.250.000.000	500 m	
		84 Krueng Labuhan Haji 400 m)	Aceh Selatan					1.000.000.000	400 m	
		85 Sungai Lubuk Layu Samadua (1500 m)	Aceh Selatan					3.750.000.000	1500 m	
		86 Sungai Pantan Luas Tapaktuan (1000 m)	Aceh Selatan					2.500.000.000	1000 m	
		87 Sungai Kedai Padang Kl. Utara (750 m)	Aceh Selatan					1.875.000.000	750 m	
		88 Sungai Lhok Bengkuang (1000 m)	Aceh Selatan					2.500.000.000	1000 m	
		89 Krueng Meukek Ds. Jambo Papeun (500 m)	Aceh Selatan					1.250.000.000	500 m	
		90 Krueng Payo Nan Gadang Perumnas (Samadua)	Aceh Selatan					21.625.000.000	500 M'	
		91 Krueng Kluet Ds. Kampung Paya	Aceh Selatan					1.250.000.000	500 M'	
		92 Krueng Alue Meutuah	Aceh Selatan					750.000.000	375 M'	
		93 Sungai Krueng Suak Bakong	Aceh Selatan					3.500.000.000	1000 M'	
		94 Perkuatan Tebing/Krep Sungai Gelomhang Kec. Sultan Daulat	Singkil					4.000.000.000	1 Km	
		95 Perkuatan Tebing/Sungai Ujung Bawang Kec. Singkil	Singkil					500.000.000	500 Meter	
		96 Perkuatan Tebing Desa Belukur-M-akmur Kec. Rundeng	Singkil					750.000.000	500 Meter	
		97 Perkuatan Tebing Sungai Bengkolan Kec. Singkil	Singkil					400.000.000	400 Meter	
		98 Pengendalian Banjir Sungai Bulan Desa Kutacane Lama	Aceh Tenggara					650.000.000	1 Pkt	
		99 Pengendalian Banjir Sungai Kisam Desa Kandang Belang	Aceh Tenggara					600.000.000	1 Pkt	
		100 Pengendalian Banjir Sungai Alas Desa Salim Pinem	Aceh Tenggara					850.000.000	1 Pkt	
		101 Perkuatan Tebing Sungai Lawe Alas Lawe Mengkudu	Aceh Tenggara					1.000.000.000	1 Pkt	
		102 Perkuatan Tebing Sungai Semadam	Aceh Tenggara					1.000.000.000	1 Pkt	
		103 Perkuatan Tebing Sungai Lawe Alas Desa Kuta Baru	Aceh Tenggara					1.000.000.000	1 Pkt	
		104 Pengendalian Banjir Sungai Alas Desa Salim Pinem	Aceh Tenggara					850.000.000	1 Pkt	
		K. PENGAMANAN PANTAI		67.256.529.000		132.665.000.000		185.837.750.000		-
		1 Pengamanan Pantai Keuneikal Sabang	Sabang	1.000.000.000						
		2 Pengamanan Tebing Krueng Teunom (Aceh Jaya)	Aceh Jaya	10.822.807.000						
		3 Pengamanan Pantai Pria Laot Sabang	Sabang	1.000.000.000						
		4 Pengamanan Tebing Sungai Kr. Seulimum Aceh Besar (lanjutan)	Aceh Besar	1.316.891.000						
		5 Pengamanan Tebing Sungai Kr. Lhoong Aceh Besar (lanjutan)	Aceh Besar	689.798.000						
		6 Pengamanan Tebing Sungai Kr. Raya Aceh Besar (lanjutan)	Aceh Besar	790.000.000						
		7 Pengamanan Pantai Lhok Buya (Lanjutan)	Aceh Jaya	600.410.000						
		8 Pengamanan Pantai Ulee Lheu (Lanjutan)	Banda Aceh	13.766.592.000						
		9 Pengamanan Pantai Kampung Jawa (Lanjutan)	Banda Aceh	4.200.924.000						
		10 Pembuatan Tanggul Air Asin Pasar Ulee Lheu (Lanjutan)	Banda Aceh	1.159.730.000						
		11 Pengamanan Tanggul Air Asin Lampaseh	Banda Aceh	5.099.587.000						
		12 Pembangunan Tanggul Air Asin Desa Gano (Lanjutan)	Banda Aceh	407.760.000						
		13 Pembuatan Tanggul Air Asin Desa Neuhen Aceh Besar	Aceh Besar	1.000.000.000						
		14 Supervisi Pengamanan Pantai Wilayah II	Tersebar	800.000.000						
		15 Pengamanan Pantai Desa Benteng Komplek TNI dan Pantai Mantak Tari (675 M)	Pidie	3.050.000.000						
		16 Pengamanan Pantai Samalanga Bireun (Lanjutan/MY)	Bireuen	2.295.029.000						
		17 Pengamanan Pantai Ujung Blang Sepanjang 300 M	Lhokseumawe	2.800.000.000						
		18 Pengamanan Pantai Idi Rayeuk (Lanjutan)	A. Timur	2.315.430.000						
		Administrasi Kegiatan		665.700.000						
		19 PENYUSUNAN DETAIL DESAIN	A. Barat	2.600.500.000						
		20 Pengamanan Pantai Ujung Kalak (lanjutan)	A. Barat	438.245.000						
		21 Pengamanan Pantai Sama Tiga (lanjutan)	A. Barat	593.918.000						
		22 Tanggul Air Asin Kuala Cangko (lanjutan)	A. Barat	1.524.576.000						
		23 Pengamanan Pantai Meulaboh (lanjutan)	A. Barat	1.636.043.000						
		24 Pengamanan Pantai Kota Blang Pidie (lanjutan)	Abdya	604.754.000						
		25 Konsultan Supervisi Pengamanan Pantai (Tersebar)	Tersebar	800.000.000						
		26 Perencanaan Pantai Keude Meukek Aceh Selatan	A. Selatan	50.000.000						
		27 Pengamanan Pantai Keude Meukek Aceh Selatan	A. Selatan	950.000.000						
		28 Pengamanan Pantai Lhokbengkuang (lanjutan)	A. Selatan	238.610.000						

**RENCANA KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
TAHUN 2007 - 2009**

BIDANG	PROGRAM UTAMA	SUB BIDANG / KEGIATAN	LOKASI	2007		2008		2009		KETERANGAN
				NILAI (RUPIAH)	VOLUME	NILAI (RUPIAH)	VOLUME	NILAI (RUPIAH)	VOLUME	
		29 Pengaman Pantai Pulo Sarok (Lanjutan)	Singkil	2.786.425.000						
		30 Pengaman Pantai Batu Itam (lanjutan)	A. Selatan	401.161.000						
		31 Pengaman Pantai Bakongan (lanjutan)	A. Selatan	851.639.000						
		32 Pengaman Pantai Kp. Jawa (lanjutan)	Banda Aceh			10.470.000.000	1 Pkt			
		33 Pengaman Pantai Putaran Alue Naga	Banda Aceh			5.000.000.000	1 Pkt			
		34 Pembuatan Tanggul Air Asin Alue Naga	Banda Aceh			2.000.000.000	1 Pkt			
		35 Pembuatan Tanggul Air Asin Desa Tibang	Banda Aceh			2.000.000.000	1 Pkt			
		36 Pengaman Pantai Ujung Pancu (lanjutan)	Aceh Besar			1.000.000.000	1 Pkt			
		37 Pengaman Pantai Durung Kec. Mesjid Raya	Aceh Besar			2.000.000.000	500 m			
		38 Pengaman Pantai Krueng Raya	Aceh Besar			4.000.000.000	1 Pkt			
		39 Pengaman Pantai Ujung Kareung ds Durung	Aceh Besar			3.500.000.000	1 Pkt			
		40 Pengaman Pantai Jaln Nasional Lhoknga	Aceh Besar			4.000.000.000	1 Pkt			
		41 Tangul air Asin Ds Meunasah Tuha	Aceh Besar			500.000.000	1 Pkt			
		42 Pengaman Pantai Pria Laot	Sabang			3.500.000.000	1 Pkt			
		43 Pengaman Pantai Lhok Buya (lanjutan)	Aceh Jaya			3.000.000.000	1 Pkt			
		44 Pengaman Pantai Malikul Saleh	Aceh Utara			6.000.000.000	1 Pkt			
		45 Pengaman Pantai Ujong Blang	Aceh Utara			7.500.000.000	1 Km			
		46 Pembangunan Tanggul Air Asin Lancang - Ie Leubeu (Lanjutan)	Pidie			6.000.000.000	1 Pkt			
		47 Pengaman Pantai Pasi Ie Leubeu - Pasi Lhok - Pusong Kec. Kembang Tanjung	Pidie			15.000.000.000	1 Pkt			
		48 Pengaman Pantai Simpang Ulim	Aceh Timur			3.000.000.000	1000 m			
		49 Pengaman PantaiUjong Serangga	Aceh Barat Daya			15.000.000.000	500 M			
		50 Pengaman Pantai Kota Meulaboh	Aceh Barat			4.000.000.000	3000 M			
		51 Pengaman Pantai Desa Pauh - Desa Padang Bajau	Aceh Selatan			6.000.000.000	500 M			
		52 Pengaman Pantai Ds Batu Itam (Lanjutan)	Aceh Selatan			3.500.000.000	700 M			
		53 Pembangunan Tanggul Pantai di Singkil	Singkil			10.000.000.000				
		54 Pembangunan Tanggul Air Asin di Singkil	Singkil			8.000.000.000				
		55 Lanjuatan Pemb Tanggul Pasang Surut Pulau sarok	Singkil			5.875.000.000	2,5 Km			
		56 Lanjuatan Pemb Tanggul Banjir Ds Kilangan	Singkil			1.820.000.000	800 M			
		57 Peningkatan / Peninggian Revetmen Pantai Syiah Kuala	Banda Aceh					4.500.000.000	1 Pkt	
		58 Pengaman Pantai Kr. Raya Sabang	Sabang					2.500.000.000	1 Pkt	
		59 Pengaman Pantai Beursawang Keunekai	Sabang					3.000.000.000	1 Pkt	
		60 Pengaman Pantai Tapak Gajah	Sabang					3.000.000.000	1 Pkt	
		61 Pengaman Pantai Kr. Raya	Aceh Besar					4.000.000.000	1 Pkt	
		62 Pengaman Pantai Ujung Kareung Desa Durung	Aceh Besar					3.500.000.000	1 Pkt	
		63 Pengaman Pantai dan Penanganan Muara pasar Lhoknga	Aceh Besar					10.000.000.000	1 Pkt	
		64 Pengaman Pantai dan Pengerukan Kuala Kr. Manee	Aceh Utara					6.000.000.000	1 Pkt	
		65 Pengaman Pantai Muara Batuphat Timur	Aceh Utara					1.800.000.000	1 Pkt	
		66 Penambahan Jetty dan Revetment Kuala Jangka	Bireuen					6.000.000.000	1 Pkt	
		67 Pengaman Pantai Seuneubok Peulimbang	Bireuen					3.500.000.000	1 Pkt	
		68 Tanggul Air Laut Lho' Bubon - Kuala Bubon	Aceh Barat					2.600.000.000	1 Pkt	
		69 Tanggul Air Laut Kp. Pasir/Ujung Kalak	Aceh Barat					2.400.000.000	1 Pkt	
		70 Pengaman Pantai Air Pinang Tapaktuan (450 m)	Aceh Selatan					2.700.000.000	450 m	
		71 Pengaman Pantai Kuta Blang Samadua (750 m)	Aceh Selatan					4.500.000.000	750 m	
		72 Pengaman Pantai Sawang Bunga Samadua (700 m)	Aceh Selatan					4.200.000.000	700 m	
		73 Pengaman Pantai Pasar Lama L.Haji (1000 m)	Aceh Selatan					6.000.000.000	1000 m	
		74 Pengaman Pantai Air Berudang Tapaktuan (2000 m)	Aceh Selatan					12.000.000.000	2000 m	
		75 Pengaman Pantai Lhok Keutapang Tapaktuan (1000 m)	Aceh Selatan					6.000.000.000	1000 m	
		76 Pengaman Pantai Padang Bakau L. Haji (1000 m)	Aceh Selatan					6.000.000.000	1000 m	
		77 Pengaman Pantai Batu Itam (500 m)	Aceh Selatan					3.000.000.000	500 m	
		78 Pengaman Pantai Ds Keude Meukek (Lanjutan)	Aceh Selatan					3.900.000.000	650 M'	
		79 Pengaman Pantai Ds. Sawang I	Aceh Selatan					1.800.000.000	300 M'	
		80 Pengaman Pantai Ds Kuta Blang	Aceh Selatan					4.500.000.000	750 M'	
		81 Pengaman Pantai Ds Lhok Paoh	Aceh Selatan					3.000.000.000	500 M'	
		82 Pengaman Pantai Ujung Mangki	Aceh Selatan					10.000.000.000	2000 M'	
		83 Pengaman Pantai Ds Lembah Baru	Aceh Selatan					2.500.000.000	500 M'	
		84 Pengaman Pantai Kota Tapaktuan	Aceh Selatan					6.250.000.000	1250 M'	
		85 Pengaman Pantai Ds Gunung Kerambil	Aceh Selatan					2.500.000.000	500 M'	
		86 Pengaman Pantai Ds Pawoh	Aceh Selatan					2.500.000.000	500 M'	
		87 Pembuatan Tanggul Laut Desa Gostel Kec. Ski utara	Singkil					2.250.000.000	1,5 Km	
		88 Pembuatan Tanggul laut P. Balai/P.Baguk Kec. P.Banyak	Singkil					1.000.000.000	1 Km	
		89 PembangunanN Tangul Banjir Sungai Bingkolan Singkil	Singkil					7.565.250.000	2,5 Km	
		90 Pemb Tangul air asin & Timbunan Belakang Tangul	Singkil					12.840.000.000	3,21 KM	
		91 Pemb Tangul Banjir Ds Kilangan	Singkil					1.820.000.000	0,8 KM	
		92 Pemb Tangul Pasang Surut P Sarok	Singkil					5.875.000.000	2,5 KM	
		93 Pemb Talud Pengaman Pantai Kecamatan Pulau Banyak	Singkil					15.750.000.000	7 KM	
		94 Pembuatan Tanggal Laut Danau - Danau Anak Laut Kec Ski Utara	Singkil					1.137.500.000	0,5 KM	
		95 Pembangunan Tangul Air Asin Ujung Bawang Kec. Singkil	Singkil					1.875.000.000	750 m	
		96 Pengerukan Sungai Lae-Ijuk Kec. G.Meriah	Singkil					1.575.000.000	4,5 Km	
AIR DAN SANITASI				179.225.803.000		1.233.943.377.000		-		
Regional I				23.956.625.000		0		0		

**RENCANA KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
TAHUN 2007 - 2009**

BIDANG	PROGRAM UTAMA	SUB BIDANG / KEGIATAN	LOKASI	2007		2008		2009		KETERANGAN
				NILAI (RUPIAH)	VOLUME	NILAI (RUPIAH)	VOLUME	NILAI (RUPIAH)	VOLUME	
		1 Administrasi Kegiatan		1.518.200.000						
		2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Kec. Teunom	A. Jaya	9.091.228.000						
		3 Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Kota Sabang	Sabang	11.190.293.000						
		4 Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Desa Labui Kecamatan Baitussalam Kab. Aceh Besar	A. Besar	2.156.904.000						
		Regional II		52.160.061.000		0		0		
		5 Administrasi Kegiatan		5.101.723.000						
		PENINGKATAN PRASARANA DAN SARANA PERSAMPAHAN		294.000.000						
		6 Pengadaan Amroll Truk dan Kontainer	Pidie	276.500.000						
		7 Gerobak Sampah	Pidie	17.500.000						
		PEMBANGUNAN JARINGAN DRAINASE		4.110.837.000						
		8 Pembangunan Saluran Primer Jl. Prof.A.Majid Ibrahim (Simpang Empat) P = 1.263 m'	Pidie	2.166.921.000						
		9 Pembangunan Saluran Primer Jl. Prof.A.Majid Ibrahim (Kiri - Kanan) P = 1.200 m'	Pidie	1.943.916.000						
		PEMBANGUNAN JARINGAN PENYEDIAAN AIR BERSIH		41.458.255.000						
		10 Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Sigli	Pidie	35.842.419.000						
		11 Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Kec. Sawang	A. Utara	5.615.836.000						
		PEMBANGUNAN JARINGAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH		1.195.246.000						
		12 Pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT) Kota Lhokseumawe	Lhokseumawe	1.195.246.000						
		Regional III		13.004.421.000		0		0		
		13 Administrasi Kegiatan		1.263.500.000						
		14 Pembangunan TPA Kota Langsa	Langsa	10.575.780.000						
		15 Pembangunan IPLT Kota Langsa	Langsa	1.165.141.000						
		Regional IV		66.611.321.000		0		0		
		16 Administrasi Kegiatan		3.426.175.000						
		PENINGKATAN PRASARANA DAN SARANA PERSAMPAHAN		14.019.347.000		0		0		
		17 Belanja Jasa Konsultan Pengawas Pemb. TPA Kota Meulaboh	A. Barat	104.391.000						
		18 Belanja Jasa Konsultan Pengawas Pemb. Infrastruktur N. Raya	Nagan Raya	313.913.000						
		19 PEMBANGUNAN SISTEM PERSAMPAHAN KEC. JOHAN PAHLAWAN	A. Barat	6.666.411.000						
		20 PEMBANGUNAN SISTEM PERSAMPAHAN KEC. SEUNAGAN	Nagan Raya	6.934.632.000						
		PEMBANGUNAN JARINGAN DRAINASE		11.328.703.000		0		0		
		21 Belanja Jasa Konsultan Pengawas Pemb. Saluran Primer, Abdya	Abdya	175.812.000						
		22 Belanja Jasa Konsultan Pengawas Pemb. SDA dan Air Bersih Simeulue	Simeulu	167.700.000						
		23 Pembangunan Saluran Primer Jl. Pahlawan (L=1000m), Kec. Simeulue Timur	Simeulu	2.079.585.000						
		24 Pembangunan Saluran Primer (L= 910,236 M) Kec. Blang Pidie (Jalur I)	Abdya	1.893.435.000						
		25 Pembangunan Saluran Primer (L= 2.288,63 M)Kec. Blang Pidie (Jalur II)	Abdya	5.027.936.000						
		26 Pembangunan saluran Primer Jl. Nasional (L=1.300m), Kec. Seunagan	Nagan Raya	1.984.235.000						
		PEMBANGUNAN JARINGAN PENYEDIAAN AIR BERSIH		37.837.096.000		0		0		
		27 Belanja Jasa Konsultan Pengawas Pemb. Sarpras Air Bersih Kota Meulaboh	A. Barat	204.000.000						
		28 Belanja Jasa Konsultan Pengawas Pemb. Sarpras Air Bersih Nagan Raya	Nagan Raya	288.000.000						
		29 Belanja Jasa Konsultan Pengawas Pemb. Sarpras Air Bersih Kec. Blang Pidie dan Kec. Susoh, Abdya	Abdya	201.803.000						
		30 Pembangunan Sarana Dan Prasarana Air Bersih Kota Meulaboh	A. Barat	8.480.846.000						
		31 Pembangunan Sarana Dan Prasarana air Bersih Kec. Simeulu Timur	Simeulu	6.500.000.000						
		32 Pembangunan Sarana Dan Prasarana Air Bersih Kec. Blang Pidie dan Kec. Susoh	Abdya	10.569.285.000						
		33 Pembangunan Sarana Dan Prasarana Air Bersih Kec. Seunagan Timur, Kec. Seunagan & Kec. Kuala	Nagan Raya	11.593.162.000						
		Regional V		23.493.375.000		1.233.943.377.000		0		
		34 Administrasi Kegiatan		1.862.000.000						
		35 Pembangunan TPA Singkil		7.385.747.000						
		36 Pembangunan Saluran Primer Jl. T. Umar, Kec. Simpang Kiri	A. Singkil	1.782.378.000						
		37 Pembangunan Saluran Primer Di Kota Singkil	A. Singkil	1.600.000.000						
		38 Pembangunan Saluran Primer Kota Tapak Tuan	A. Selatan	3.274.589.000						
		39 Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Kec. Singkil	A. Singkil	2.157.064.000						
		PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA AIR LIMBAH		5.431.597.000		620.509.441.000		0		
		40 MCK Komunal	A. Selatan	1.076.190.000						
			A. Singkil	1.434.920.000						
		41 Pengadaan Truk Tinja	A. Selatan	849.750.000						
			A. Singkil	0						
		42 Pembangunan IPLT Kota Singkil	A. Singkil	2.070.737.000						
		43 Lanjutan Pembangunan SPAM Baitussalam (Q=40 lt/dt IPA Reservoir dan Pipa Distribusi) rehabilitasi Siron I & II	Aceh Besar			13.000.000.000	1	Pkt		
		44 Pembangunan Jaringan pipa air bersih dan resevoir untuk Kecamatan Baitusalam	Aceh Besar			28.000.000.000	1	Pkt		
		45 Pembangunan SPAM Masjid Raya (Q: 20 lt/dt IPA, Reservoir, dan Pipa Distribusi)	Aceh Besar			13.800.000.000	1	Pkt		
		46 Pembangunan SPAM IKK Batee (IPA, Reservoir, dan Pipa Distribusi)	PIDIE			6.000.000.000	1	Pkt		

**RENCANA KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
TAHUN 2007 - 2009**

BIDANG	PROGRAM UTAMA	SUB BIDANG / KEGIATAN	LOKASI	2007		2008		2009		KETERANGAN
				NILAI (RUPIAH)	VOLUME	NILAI (RUPIAH)	VOLUME	NILAI (RUPIAH)	VOLUME	
		47 Pembangunan jaringan pipa air bersih untuk IKK Dewantara	Aceh Utara			5.000.000.000	1 Pkt			
		48 Penggantian pipa transmisi Lambaro-Taman Sari dia 600 mm	Banda Aceh			15.700.000.000	1 Pkt			
		49 Pembangunan SPAM Kota Idie Rayeuk dan Peureulak (Q= 40 lt/dt, IPA Tempen,	Aceh Timur			18.080.000.000	1 Pkt			
		50 Pembangunan SPAM Kota Langsa (Q=60 Lt/dt, IPA Kemuning Reservoir dan pipa	Langsa			12.267.231.000	1 Pkt			
		51 Pembangunan Jaringan Primer dan Skunder Kota Redolong	Bener Meriah			6.000.000.000	1 Pkt			
		52 Pembangunan SPAM Kota Tapaktuan (Q= 20 lt/dt;IPA, Reservoir, dan Pipa	Aceh Selatan			6.000.000.000	1 Pkt			
		53 Peningkatan Sarana Air Bersih Trumon Timur	Aceh Selatan			4.000.000.000	1 Pkt			
		54 Pembangunan SPAM untuk kawasan Rumah Baru di Kuala Q = 10 Lt/dt	Nagan Raya			15.000.000.000	1 Pkt			
		55 Pembangunan SPAM untuk kawasan Rumah Baru di Babah Rot Q = 10 Lt/dt	Abdya			3.000.000.000	1 Pkt			
		56 Pembangunan SPAM untuk kawasan Rumah Baru di Bubon Q = 10 Lt/dt	Aceh Barat			3.000.000.000	1 Pkt			
		57 Pembangunan SPAM untuk kawasan Rumah Baru di Woyla Q = 10 Lt/dt	Aceh Barat			4.000.000.000	1 Pkt			
		58 Pembangunan SPAM Kota Singkil (Q = 20 Lpd :IPA ReserVoir dan pipa Dostribusi	ACEH SINGKIL			6.000.000.000	1 Pkt			
		59 Pembangunan Ground Reservoir di Lambaro	Banda Aceh			3.000.000.000	1 Pkt			
		60 Pembangunan SPAM Leupung (Q =30 Lt/dt IPA, Reservoir, dan Pipa Distribusi	Aceh Besar			5.000.000.000	1 Pkt			
		61 Pembangunan SPAM untuk Kawasan Rumah Baru di Lhoong Q= 20 Lt/dt	Aceh Besar			6.000.000.000	1 Pkt			
		62 Lanjutan IRFF Pembangunan SPAM Kota Sabang	Sabang			9.000.000.000	1 Pkt			
		63 Lanjutan IRFF Pembangunan SPAM Kota Sigli	Pidie			10.000.000.000	1 Pkt			
		64 Pembangunan SPAM Pante Raja & Triengadeng (Q=40 Lps:IPA, Reservoir dan Pipa	Pidie			10.500.000.000	1 Pkt			
		65 Pembangunan TPA Sementara Gampong Jawa	Banda Aceh			21.500.000.000	1 Pkt			
		66 Pembangunan TPA Kota Cane	Aceh Tenggara			9.172.484.000	1 Pkt			
		67 Pembangunan TPA Kota Blang Pidie	Abdya			8.624.000.000	1 Pkt			
		68 Pembangunan TPA Kota Takengon	Aceh tenggah			10.982.026.000	1 Pkt			
		69 Supervisi pelaksanaan kegiatan sektor air bersih dan air limbah NAD	PROVINSI			1.000.000.000	1 Pkt			
		70 Water Supply and Environmental Sanitation modul development and training	PROVINSI			4.000.000.000	1 Pkt			
		71 Pembangunan Sarana dan Prasarana Drainase kota Banda Aceh	Banda Aceh			96.000.000.000	1 Pkt			
		72 Pembangunan Sarana dan Prasarana Drainase kota Lhoksemawe	Lhok semawe			107.000.000.000	1 Pkt			
		73 Pembangunan Sistem Drainase Kota Subulussalam	Aceh Selatan			3.000.000.000	1 Pkt			
		74 Pembangunan Sistem Drainase Kota Meulaboh	Aceh Barat			115.000.000.000	1 Pkt			
		75 Desain dan Supervisi	Aceh Barat			12.800.000.000	1 Pkt			
		76 Penyusunan Dokumen Amdal dan UKL / UPL untuk Pekerjaan tahun 2005 - 2008	Propinsi			23.600.000.000	1 Pkt			
		77 Pembangunan sarana dan Prasarana Air limbah Kota Calang (IPLT dan Truck Tinja)	Aceh Jaya			2.550.000.000	1 Pkt			
		78 Pembangunan sarana dan Prasarana Air limbah (IPLT,MCK dan Truck Tinja)	Pidie			2.383.700.000	1 Pkt			
		79 Pengadaan Truck Tinja 3 M3				550.000.000	1 Pkt			
		Air Minum		0		306.568.633.000		0		
		80 Pembangunan IPA Siron III 40 lt/dt dan rehabilitasi Siron I & II	ACEH BESAR			18.741.448.000	40 Lt/dtk			
		81 Pengadaan dan pemasangan pipa transmisi dari Siron ke Labui	ACEH BESAR			14.000.000.000	1900 Lt/dtk			
		82 Pembangunan elevated reservoir di Taman Sari	BANDA ACEH			26.000.000.000	M3			
		83 Pembangunan SPAM IKK Bendahara (Q= 10 lt/dt, Reservoir, dan Pipa Distribusi)	ACEH TAMIANG			8.359.571.000	10 Lt/dtk			
		84 Pembangunan SPAM IKK Seruway (Q= 10 lt/dt, Reservoir, dan Pipa Distribusi)	ACEH TAMIANG			8.583.929.000	10 Lt/dtk			
		85 Pembangunan SPAM IKK Pegasing (Q=20 lt/sec & jaringan pipa distribusi primer dan sekunder)	ACEH TENGAH			5.129.800.000	20 Lt/dtk			
		86 Pembangunan SPAM IKK Bandar (Q=40 lt/sec & jaringan pipa distribusi primer dan sekunder)	BENER MERIAH			9.057.000.000	40 Lt/dtk			
		87 Pembangunan SPAM IKK Kuta Panjang (IPA, Reservoir, dan Pipa Distribusi)	GAYO LUES			7.889.700.000	20 Lt/dtk			
		88 Pembangunan SPAM untuk kawasan rumah baru di Darul Makmur Q=10 lt/dt	NAGAN RAYA			3.000.000.000	10 Lt/dtk			
		89 Pembangunan SPAM untuk kawasan rumah baru di Teupah Selatan Q=30 lt/dt	SIMEULUE			9.000.000.000	30 Lt/dtk			
		90 Pembangunan SPAM untuk kawasan rumah baru di Teupah Barat Rot Q=20 lt/dt	SIMEULUE			6.000.000.000	20 Lt/dtk			
		91 Pembangunan SPAM untuk kawasan rumah baru di Simeuleu Tengah Rot Q=20 lt/dt	SIMEULUE			6.000.000.000	20 Lt/dtk			
		92 Pembangunan SPAM untuk kawasan rumah baru di Salang Q=10 lt/dt	SIMEULUE			3.000.000.000	10 Lt/dtk			
		93 Pembangunan SPAM untuk kawasan rumah baru di Simeuleu Barat Q=40 lt/dt	SIMEULUE			12.000.000.000	40 Lt/dtk			
		94 Pembangunan SPAM untuk kawasan rumah baru di Alafan Q=20 lt/dt	SIMEULUE			6.000.000.000	20 Lt/dtk			
		95 Rehabilitasi PDAM Kota Langsa	Langsa			8.560.000.000				
		96 Pembangunan SPAM Kota Sebulussalam dan Rundeng (Q=40 lpd;IPA, Reservoir, dan Pipa Distribusi)	ACEH SINGKIL			14.270.827.000	40 Lt/dtk			
		97 Pembangunan SPAM Kota Babussalam (Q=20 lpd; IPA, Reservoir, dan Pipa Distribusi)	ACEH TENGGARA			9.000.000.000	20 Lt/dtk			
		98 Pembangunan SPAM Kota Lawe Sigalagala (Q=20 lpd; IPA, Reservoir, dan Pipa Distribusi)	ACEH TENGGARA			5.417.040.000	20 Lt/dtk			
		99 Penyusunan DED Air Siap Minum untuk Zona Pilot Project Kec. Baitussalam'	PROVINSI			750.000.000	1 Pkt			
		100 Pembangunan SPAM IKK Pulo Aceh (Q: 10 lt/dt IPA, Reservoir, dan Pipa Distribusi)	ACEH BESAR			5.000.000.000	10 Lt/dtk			
		101 Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Kota Teunom (Q=10 lt/dt, pipa=27527 m)	ACEH JAYA			10.284.790.000	10 Lt/dtk			
		102 Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Kec. Jaya (Reservoir, SR, Jaringan pipa distribusi dan hidran umum)	ACEH JAYA			4.254.790.000	1 Lt/dtk			
		103 Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Kec. Kr Sabe (Reservoir, SR, Jaringan pipa distribusi dan hidran umum)	ACEH JAYA			6.030.000.000	1 Lt/dtk			
		104 Pembangunan SPAM Kota Idie Rayeuk (Pemasangan booster pump Q= 10 lt/dt, IPA, Reservoir, dan Pipa)	ACEH TIMUR			836.923.000	10 Lt/dtk			
		105 Pembangunan SPAM IKK Timang Gajah (Q=40 lt/sec & jaringan pipa distribusi primer dan sekunder)	BENER MERIAH			5.460.800.000	40 Lt/dtk			
		106 Pembangunan SPAM IKK Rikit Gaib (IPA, Reservoir, dan Pipa Distribusi)	GAYO LUES			4.982.000.000	10 Lt/dtk			

**RENCANA KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
TAHUN 2007 - 2009**

BIDANG	PROGRAM UTAMA	SUB BIDANG / KEGIATAN	LOKASI	2007		2008		2009		KETERANGAN
				NILAI (RUPIAH)	VOLUME	NILAI (RUPIAH)	VOLUME	NILAI (RUPIAH)	VOLUME	
		107 Pembangunan SPAM Kota Pinding (IPA, Reservoir, dan Pipa Distribusi)	GAYO LUES			7.161.200.000	10	Lt/dtk		
		108 Pembangunan SPAM IKK Manggeng (IPA, Reservoir, dan Pipa Distribusi)	ACEH BARAT DAYA			1.638.960.000	10	Lt/dtk		
		109 Pembangunan SPAM IKK Tangan-Tangan (IPA, Reservoir, dan Pipa Distribusi)	ACEH BARAT DAYA			1.505.220.000	10	Lt/dtk		
		110 Pembangunan SPAM Kota Alue Bilie (IPA, Reservoir, dan Pipa Distribusi)	NAGAN RAYA			4.390.550.000	10	Lt/dtk		
		111 Pembangunan SPAM Simeulue (IPA, Reservoir, dan Pipa Distribusi)	SIMEULUE			19.909.460.000	20	Lt/dtk		
		112 Pembangunan SPAM Kota Samadua (IPA, Reservoir, dan Pipa Distribusi)	ACEH SELATAN			5.441.000.000	10	Lt/dtk		
		113 Pembangunan SPAM Kota Kedue Trumon (IPA, Reservoir, dan Pipa Distribusi)	ACEH SELATAN			8.546.040.000	10	Lt/dtk		
		114 Peningkatan Sarana Air Bersih Tirta Naga Sumber Tuwi Lhok	ACEH SELATAN			10.000.000.000	10	Lt/dtk		
		115 Pembangunan SPAM IKK Gunung Meriah (Q=10 lpd;IPA, Reservoir, dan Pipa Distribusi)	ACEH SINGKIL			8.181.100.000	10	Lt/dtk		
		116 Pemb IPA dan Jaringan Distribusi di Singkil				9.000.000.000	10	Lt/dtk		
		117 Pemb Air Bersih suka Makmur & Ujung Salat P. Banyak				900.000.000	5	Lt/dtk		
		118 Pemb Sumur Bor Sederhana Kee Singkil				60.000.000	1	Unit		
		119 Pembangunan SPAM Kota Lawedua (IPA, Reservoir, dan Pipa Distribusi)	ACEH TENGGARA			5.070.485.000	10	Lt/dtk		
		120 Pembangunan SPAM Kota Kampung Bakti (IPA, Reservoir, dan Pipa Distribusi)	ACEH TENGGARA			1.284.400.000	10	Lt/dtk		
		121 Pembangunan SPAM IKK Ketol (Q=10 l/sec & jaringan pipa distirbusi primer dan sekunder)	ACEH TENGAH			5.871.600.000	10	Lt/dtk		
		Sanitasi		0		34.750.000.000		0		
		122 Supervisi pelaksanaan kegiatan sektor air bersih dan air limbah NAD	PROVINSI			15.000.000.000	1	pkt		
		123 Pedoman Tanggap darurat Watsan di Wilayah NAD	PROVINSI			750.000.000	1	pkt		
		124 Penyusunan MP Watsan untuk 10 Kabupaten/ Kota	PROVINSI			15.000.000.000	1	pkt		
		125 Water Supply and Environmental Sanitation modul development and training	PROVINSI			4.000.000.000	1	pkt		
		Air Limbah		0		62.991.486.000		0		
		126 Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Limbah Kota Sabang (IPLT dan Truck Tinja)	SABANG			2.550.000.000	20000	Jiwa		
		127 Pembangunan Sarana dan Prasarana Persampahan Sabang (Pagar dan Jalan Masuk TPA)	SABANG			674.000.000	2	Ha		
		128 Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Limbah (IPLT dan Truck Tinja)	ACEH UTARA			2.538.700.000	41900	Jiwa		
		129 Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Limbah (IPLT dan Truck Tinja)	BIREUEN			2.538.700.000	85000	Jiwa		
		130 Pengadaan truck tinja kap 3 cumec	LHOKSEUMAWE			550.000.000	3	Unit		
		131 Prastudi sewerage system konvensional di Banda Aceh dan Aceh Besar	PROVINSI			1.000.000.000	1	Pkt		
		132 Pembuatan Pedoman Penggunaan Secondary Treatment pada penggunaan on-site sanitation	PROVINSI			750.000.000	1	Set		
		133 Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Limbah (IPLT, MCK dan Truck Tinja)	ACEH TAMIANG			6.166.249.000	38500	Jiwa		
		134 Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Limbah (IPLT, MCK, dan Truck Tinja)	ACEH TENGAH			7.115.129.000	21000	Jiwa		
		135 Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Limbah (IPLT, MCK, dan Truck Tinja)	ACEH TIMUR			3.149.270.000	37800	Jiwa		
		136 Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Limbah (IPLT, MCK, dan Truck Tinja)	BENER MERIAH			6.318.060.000	19200	Jiwa		
		137 Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Limbah (IPLT, MCK, dan Truck Tinja)	GAYO LUES			2.696.000.000	4300	Jiwa		
		138 Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Limbah (MCK dan Truck Tinja)	LANGSA			18.741.378.000	130900	Jiwa		
		139 Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Limbah (IPLT, MCK dan Truck Tinja)	NAGAN RAYA			4.272.000.000	39300	Jiwa		
		140 Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Limbah (IPLT, MCK dan Truck Tinja)	ACEH TENGGARA			3.932.000.000	32900	Jiwa		
		Drainase		0		108.828.000.000		0		
		141 Pembangunan Sarana dan Prasarana Drainase Banda Aceh	BANDA ACEH			40.000.000.000	200000	Jiwa		
		142 Pembangunan Sarana Drainase Kota Meulaboh	ACEH BARAT			10.000.000.000	45900	Jiwa		
		143 Pembangunan Saluran Drainase Kota Lhoksukon	ACEH UTARA			3.164.000.000	36000	Jiwa		
		144 Pembangunan sarana dan prasarana drainase Kota Bireuen	BIREUEN			10.447.500.000	43000	Jiwa		
		145 Pembangunan saluran drainase Kota Kuala Simpang	ACEH TAMIANG			3.800.000.000	17700	Jiwa		
		146 Saluran Primer Desa Pasar Singki dan Ujung Singkil	Singkil			4.200.000.000	32900	Jiwa		
		147 Pembangunan sarana dan prasarana drainase Kota Takengon	ACEH TENGAH			2.919.500.000	18800	Jiwa		
		148 Rehabilitasi/ Peningkatan Drainase Induk Kota Langsa	LANGSA			11.650.000.000	130900	Jiwa		
		149 Pembangunan saluran drainase Kota Idie Rayeuk	ACEH TIMUR			4.000.000.000	37900	Jiwa		
		150 Pembangunan sarana dan prasarana drainase Kota Redelong	BENER MERIAH			4.020.000.000	19200	Jiwa		
		151 Pembangunan Sarana dan Prasarana Drainase Kota Blangkejeren	GAYO LUES			4.331.000.000	18200	Jiwa		
		152 Pembangunan saluran drainase Kota Langsa	LANGSA			4.550.000.000	130900	Jiwa		
		153 Pembangunan Sarana dan Prasarana Drainase Kota Kutacane	ACEH TENGGARA			5.746.000.000	32900	Jiwa		
		Persampahan		0		100.295.817.000		0		
		154 Pembangunan Sarana dan Prasarana Persampahan Kota Lamno (TPA dan IPLT)	ACEH JAYA			8.000.000.000	3	Ha		
		155 Pembangunan Sarana dan Prasarana Persampahan (TPA, Truck sampah dll)	ACEH UTARA			8.590.000.000	4	Ha		
		156 Pembangunan sarana dan prasarana persampahan Kota Lhosseumawe (Truck Sampah, Arm Roll, alat berat)	LHOKSEUMAWE			10.890.000.000	4	Ha		
		157 Pembangunan Sarana dan Prasarana Persampahan (TPA, Truck sampah dll)	PIDIE			7.616.800.000	4	Ha		
		158 Pembangunan Sarana dan Prasarana Persampahan (TPA, Excavator Truck, Arm Roll dll)	ACEH TENGAH			13.425.595.000	4	Ha		
		159 Pembangunan Sarana dan Prasarana Persampahan (TPA, Truck dan Arm Roll)	ACEH TENGGARA			12.736.970.000	4	Ha		
		160 Pembangunan Sarana dan Prasarana Persampahan (TPA, Truck dan Arm Roll)	ACEH TAMIANG			9.791.887.000	4	Ha		
		161 Pembangunan Sarana dan Prasarana Persampahan (TPA, Excavator Truck, Arm Roll dll)	ACEH TIMUR			9.460.683.000	4	Ha		
		162 Pembangunan Sarana dan Prasarana Persampahan (TPA, Excavator Truck, Arm Roll dll)	BENER MERIAH			9.113.382.000	3	Ha		
		163 Pembangunan Sarana dan Prasarana Persampahan (TPA, Excavator Truck, Arm Roll dll)	GAYO LUES			6.523.000.000	3	Ha		

**RENCANA KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
TAHUN 2007 - 2009**

BIDANG	PROGRAM UTAMA	SUB BIDANG / KEGIATAN	LOKASI	2007		2008		2009		KETERANGAN
				NILAI (RUPIAH)	VOLUME	NILAI (RUPIAH)	VOLUME	NILAI (RUPIAH)	VOLUME	
		164 Pembangunan Sarana dan Prasarana Persampahan (Truck dan Arm Roll)	LANGSA			4.147.500.000	1 Pkt			

**RENCANA KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
TAHUN 2007 - 2009**

BIDANG	PROGRAM UTAMA	SUB BIDANG / KEGIATAN	LOKASI	2007		2008		2009		KETERANGAN
				NILAI (RUPIAH)	VOLUME	NILAI (RUPIAH)	VOLUME	NILAI (RUPIAH)	VOLUME	
INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN DAN PEMELIHARAAN				20.866.516.000		89.400.000.000		-		
		1 Administrasi		1.117.040.000						
		2 Pengawasan Konstruksi		0						
		3 Paket Supervisi pelaksanaan kegiatan sektor Air Minum, Air Limbah Drainase dan persampahan wilayah pantai barat provinsi	Wil Pantai Barat Nad	3.860.000.000						
		4 Paket Supervisi pelaksanaan kegiatan sektor Air Minum, Air Limbah Drainase dan persampahan wilayah pantai Timur dan Utara	Wil Pantai Timur & Utara	2.150.000.000						
		5 Paket studi pengembangan kapasitas institusi pengelolaan air minum (capacity building) di Prop. Nad & Nias	Nad & Nias	2.000.000.000						
		6 Pembangunan Jaringan Drainase		0						
		7 Cadangan		300.000.000						
		8 Biaya Operasional Penanggulangan Pasca Bencana Banjir di Aceh Tamiang	Tamiang	100.000.000						
		9 Pengadaan Sambungan Air Minum rumah-rumah di Aceh Tamiang	B.Aceh	1.500.000.000						
		10 Administrasi		3.889.476.000						
		11 Pengawasan Konstruksi		0						
		12 Pengadaan Alat Laboratorium	Nad	4.650.000.000						
		13 Pengawasan Konstruksi	Nad	1.300.000.000						
		14 Equipment Of Laboratorium	Propinsi			10.000.000.000	1 Pkt			
		15 Equipment Of Prefabricated Bridges Component	Propinsi			6.000.000.000	1 Pkt			
		16 Training Of Laboratory Technican of Kabupaten Staff and Bridge Component Staff	Propinsi			400.000.000	1 Pkt			
		17 Maintenance Of Infrastructure Assets Of Kabupaten / City	Propinsi			25.000.000.000	21 Kab			
		18 Heavy Equipment for Rountine Maintenance Of Kabupaten (City NAD)	Propinsi			48.000.000.000	21 Kab			
PENGEMBANGAN KAWASAN PERCONTOHAN NAD				75.222.499.700		-		-		
		1 Administrasi		3.275.000.000						
		2 Studi Amdal (lanjutan)	B.Aceh	270.000.000						
		3 Pengawasan Jalan (Paket I B) - (Lanjutan)	B.Aceh	686.840.000						
		4 Pengawasan Jalan (Paket I C) - (Lanjutan)	B.Aceh	369.065.000						
		5 Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Punge Jurong & Jembatan Bitai (Paket I D)	B.Aceh	222.750.000						
		6 Perencanaan Landscape Kec. Meuraxa (Lanjutan)	B.Aceh	118.000.000						
		7 Pengawasan Teknis Pemasangan Pipa & Water meter (9 Desa)	B.Aceh	200.000.000						
		8 Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Surien B, Jalan Akses (Kab. Aceh Jaya, Kota Banda Aceh)	B.Aceh	386.000.000						
		9 Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Kawasan Darussalam, Kuta Baro & Kawasan Lamlagang	B.Aceh	450.000.000						
		10 Pengawasan Pembangunan Landscape Meuraxa	B.Aceh	67.500.000						
		11 Pengawasan Teknis Rehab Sumur Bor, Koneksi Pipa Pembuang dari Biofil sistem, pembangunan prasarana air limbah 15 desa, percepatan program korban tsunami & prasarana dan sarana air bersih	B.Aceh	257.000.000						
		12 Perencanaan Jalan Akses ke Permukiman	B.Aceh	500.000.000						
		13 Perencanaan Escape Road Deah Raya - Tibang-Lingke - Uleekareng- Pango Deah - Cot Irie	B.Aceh	350.000.000						
		14 Perencanaan Jalan Akses ke Terminal Terpadu Lhoong Raya (Sp. Sultan Malikul Saleh), Escape Road Lambung, Jalan Perintis, Jalan Moh. Jam & Jembatan Penghubung Kr. Doi	B.Aceh	200.000.000						
		15 Perencanaan Escape Road Jembatan Penghubung Jalan T.P.Nyak Makam - Meunasah Manyang (150 m), Jembatan Muara Kr. Aceh, Jembatan Kr. Doy & Titi Gantung-Deah Raya	B.Aceh	500.000.000						
		16 Perencanaan DED Jetty Krueng Teunom	Teunom	500.000.000						
		17 Perencanaan DED Jetty Krueng Padang-Lageun	Teunom	500.000.000						
		18 Perencanaan DED Prasarana dan Sarana Air Bersih Kawasan Labui	B.Aceh	250.000.000						
		19 Study Amdal TPA Calang	ACEH JAYA	600.000.000						
		20 Perencanaan & Pengawasan Kegiatan Usulan Masyarakat & Pemerintah Daerah	B.Aceh	2.000.000.000						
		21 Cadangan utk Pengawasan fisik	B.Aceh	282.845.000						
		PPK Jalan		49.537.999.700		0		0		
		22 Jalan Cendana & Geulepee - Jeulingke (BRR J-P1A) Lanjutan	B.Aceh	711.363.700						
		23 Jalan Cot Lamkeuweuh (BRR B - CL) Lanjutan	B.Aceh	6.877.783.000						
		24 Jalan Surien A (BRR B-SRN A) Lanjutan	B.Aceh	737.610.000						
		25 Jalan Gampong Blang (BRR B-GBL) Lanjutan	B.Aceh	4.443.010.000						
		26 Jalan Punge Jurong A (BRR PJ A)	B.Aceh	4.450.000.000						
		27 Paket Jalan Punge Jurong B	B.Aceh	6.250.000.000						
		28 Jalan Surien B (BRR B SRN-B)	B.Aceh	4.187.450.000						
		29 Jalan & Jembatan Desa Mon Ara Cot Sibate	A.Besar	5.000.000.000						
		30 Jalan Lamme Garot	B.Aceh	682.034.000						
		31 Jembatan Bitai	B.Aceh	948.749.000						
		32 Jalan Akses ke Pemukiman Kawasan Alue Naga	A.Besar	4.500.000.000						
		33 Jalan pada Kawasan labui Aceh Besar	B.Aceh	4.000.000.000						
		34 Jalan Kawasan Kec. Kuta Baro	B.Aceh	3.250.000.000						
		35 Jalan Mujur cs	B.Aceh	3.500.000.000						
		PPK Air Minum		13.699.500.000		0		0		
		36 Pengadaan Pipa & Accessories 5 Desa (Surien, Asoe Nanggroe, Ulee Lheu, Deah Gelumpang, Punge Jurong)	B.Aceh	721.000.000						
		37 Pengadaan water meter, meter induk & Assories 5 Desa (Surien, Asoe Nanggroe, Ulee Lheu, Deah Gelumpang, Punge Jurong)	B.Aceh	1.478.000.000						

BIDANG	PROGRAM UTAMA	SUB BIDANG / KEGIATAN	LOKASI	2007		2008		2009		KETERANGAN
				NILAI (RUPIAH)	VOLUME	NILAI (RUPIAH)	VOLUME	NILAI (RUPIAH)	VOLUME	
		38 Pemasangan pipa, water meter, meter induk dan assesories desa Blang Oi	B.Aceh	356.400.000						
		39 Pemasangan pipa, water meter, meter induk dan assesories desa Punge Jurong	B.Aceh	278.000.000						
		40 Pemasangan pipa, water meter, meter induk dan assesories desa Cot Lamkewueh	B.Aceh	343.200.000						
		41 Pemasangan pipa, water meter, meter induk dan assesories desa Jeulingke	B.Aceh	255.500.000						
		42 Pemasangan pipa, water meter, meter induk dan assesories Desa Surien	B.Aceh	143.000.000						
		43 Pemasangan pipa, water meter, meter induk dan assesories Desa Asoe Nanggroe	B.Aceh	177.000.000						
		44 Pemasangan pipa, water meter, meter induk dan assesories Desa Ulee Lheu	B.Aceh	240.000.000						
		45 Pemasangan pipa, water meter, meter induk dan assesories Desa Deah Gelumpang	B.Aceh	161.000.000						
		46 Pemasangan pipa, water meter, meter induk dan assesories Desa Punge Jurog-Surien	B.Aceh	317.000.000						
		47 Pemasangan pipa, water meter, meter induk dan assesories Desa Lambung	B.Aceh	300.000.000						
		48 Rehab Sumur Bor beserta prasarana dan sarana air bersih desa punge jurong & deah gelumpang	B.Aceh	50.000.000						
		49 Koneksi pipa pembuang dari biofil sistem Desa Surien	B.Aceh	100.000.000						
		50 Koneksi pipa pembuang dari biofil sistem Desa Asoe Nanggroe	B.Aceh	100.000.000						
		51 Prasarana & Sarana air bersih beserta tempat wudhuk Desa AsoeNanggroe	B.Aceh	100.000.000						
		52 Prasarana & Sarana air bersih beserta tempat wudhuk Desa Cot Lamkewueh	B.Aceh	100.000.000						
		53 Prasarana & Sarana air bersih beserta tempat wudhuk Desa Deag Glumpang	B.Aceh	100.000.000						
		54 Prasarana & Sarana air bersih beserta tempat wudhuk Desa Beurawe	B.Aceh	100.000.000						
		55 Prasarana & Sarana air bersih beserta tempat wudhuk Desa Jeulingke	B.Aceh	100.000.000						
		56 Prasarana & Sarana air bersih beserta tempat wudhuk Desa Blang Oi	B.Aceh	100.000.000						
		57 Prasarana & Sarana air bersih beserta tempat wudhuk Desa Geuce Kayee Jato	B.Aceh	50.000.000						
		Koneksi pipa pembuang dari biofil sistem Desa Asoe Pesantren Blang Bintang, Madrasah Desa Garot, Kec. Aceh Besar	B.Aceh	100.000.000						
		Koneksi pipa pembuang dari biofil sistem Desa Asoe Pesantren Darul Hijrah Samahani Aceh Besar	B.Aceh	100.000.000						
		60 Pengadaan pipa buangan dari biofil 3 Desa (Desa Cot Lamkewueh, Asoe Nanggroe & Ulee Lheu)	B.Aceh	240.000.000						
		61 Pemasangan+B88 pipa buangan dari biofil 3 Desa (Desa Cot Lamkewueh, Asoe Nanggroe & Ulee Lheu)	B.Aceh	100.000.000						
		62 Prasarana & Sarana Persampahan 9 Desa (Blang Oi, Punge Ujong, Cot Lamkewueh, Jeulingke, Surien, Asoe Nanggroe, Deah Gelumpang, & Punge Jurong)	B.Aceh	1.500.000.000						
		63 Pembangunan Prasarana & Sarana Air Limbah 9 Desa (Blang Oi, Punge Ujong, Cot Lamkewueh, Jeulingke, Surien, Asoe Nanggroe, Deah Gelumpang, & Punge Jurong)	B.Aceh	300.000.000						
		64 Sistem Sanitasi Wetland lokasi Campong Baro, Punge Ujong & Blang Oi Kec. Meuraxa	B.Aceh	347.000.000						
		65 Paket Prasarana & sarana Pipa Air bersih Kec. Peukan bada	A.Besar	300.000.000						
		66 Prasarana & sarana Pipa Air bersih Kec. Seulimum	A.Besar	300.000.000						
		67 Prasarana & sarana Pipa Air bersih Kec. Sukajaya	A.Besar	300.000.000						
		68 Program Percepatan Pemindahan Penghuni Barak ke Lokasi Hunian		0						
		69 Pengadaan pipa air bersih	B.Aceh	1.000.000.000						
		70 Pemb. Prasarana & Sarana Air Limbah	B.Aceh	292.400.000						
		71 Pemb. Prasarana & Sarana Persampahan	B.Aceh	500.000.000						
		72 Pembuatan Sumur Bor	B.Aceh	1.400.000.000						
		73 Pemasangan Pipa Air Bersih	B.Aceh	400.000.000						
		74 Pengadaan Pipa, Water meter, water induk dan Accessories	B.Aceh	850.000.000						
				84.220.472.000			175.810.716.000			-
	PENYELENGGARAAN DAN PENDAFTARAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA DAN RUMAH NEGARA NAD	1 Administrasi		21.765.749.000						
		2 Pembangunan Gedung Khusus		0						
		3 Perencanaan Pusat/Kajian dan Pelatihan Mitigasi BencanaTsunami	Ulee Lheue	623.583.000						
		4 Perencanaan Pembangunan Pusat/Kajian dan Pelatihan Mitigasi BencanaTsunami	Ulee Lheue	511.837.000						
		5 Pembangunan Pusat Kajian dan Pelatihan Mitigasi Bencana Tsunami	NAD	20.756.316.000						
		6 Perencanaan Pembangunan Escape Building di Lhokseumawe, Calang, Meulaboh, Sigli dan Bireun	NAD	1.217.187.000						
		7 Pemb. Escape Building di Lhokseumawe	Lhokseumawe	7.500.000.000						
		8 Pemb. Escape Building di Calang	Ace							

**RENCANA KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
TAHUN 2007 - 2009**

BIDANG	PROGRAM UTAMA	SUB BIDANG / KEGIATAN	LOKASI	2007		2008		2009		KETERANGAN
				NILAI (RUPIAH)	VOLUME	NILAI (RUPIAH)	VOLUME	NILAI (RUPIAH)	VOLUME	
SOSIAL KEMASYARAKATAN	IREP			156.650.000.000		142.870.994.000		81.447.749.000		
		1 IREP - Infrastructure Program Management (IPM)	Nad	74.100.000.000		56.871.808.000	1 Pkt	32.742.952.000	1 Pkt	
		2 IREP - West Coast Infrastructure and Services Planning, Design and Construction Supervision (PDCS)	Nad	38.000.000.000		20.428.754.000	1 Pkt	14.607.189.000	1 Pkt	
		3 IREP - Nias Coast Infrastructure Planning, Design and Construction Supervision (PDCS)	Nad	19.000.000.000		18.437.616.000	1 Pkt	9.359.404.000	1 Pkt	
		4 IREP - Planning, Design Procurement, and Construction Supervision and Capacity for strategic Infrastructure Provincial Level	Nad	22.800.000.000		21.592.816.000	1 Pkt	11.098.204.000	1 Pkt	
		5 IREP- Finansial Management of BRR - Financed Project	Nad	4.750.000.000		9.810.000.000	1 Pkt	3.640.000.000	1 Pkt	
		6 Administrasi PMU				13.000.000.000		10.000.000.000	1 Lap	
		7 Performance BPK				2.730.000.000	1 Lap			
							1 Lap			
				559.849.038.000		509.163.602.000				
				430.715.000.000		211.760.800.000				
		A. PENDIDIKAN		339.655.000.000		177.404.800.000				
		A.1. Pendidikan Dasar dan Menengah		248.567.000.000		145.160.800.000				
		1 Revitalisasi/ Penyempurnaan Gedung/ Pagar Sekolah/ Madrasah	Provinsi NAD	103.119.000.000	309 Unit	6.000.000.000	80 paket			
		2 Rehab Gedung Pendidikan	Provinsi NAD	9.997.000.000	128 paket					
		3 Pemberdayaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Provinsi NAD			5.000.000.000	1 paket			
		4 Peningkatan Kualifikasi/ Sertifikasi guru	Provinsi NAD			21.600.000.000	4 paket			
		5 Peningkatan Profesionalisme pengawas Sekolah	Provinsi NAD			6.000.000.000	6 paket			Gabung 2008-2009
		6 Magang Kepala Sekolah	Provinsi NAD	2.190.000.000	2 paket	2.400.000.000	2 paket			Gabung 2008-2010
		7 Pelatihan Guru Bidang Studi Sekolah/ Madrasah	Provinsi NAD	34.282.000.000	3 paket	34.652.000.000	3 paket			
		8 Pelatihan Teknis Laboratorium MIPA, Bahasa dan Multi Media.	Provinsi NAD			2.200.000.000	10 paket			Gabung 2008-2010
		9 Pertukaran Guru Sekolah Bilingual (Australia, Malaysia, Aceh)	Provinsi NAD			4.000.000.000	1 paket			
		10 Peningkatan Produktivitas ilmiah Guru/ Teaching Grant	Provinsi NAD			2.500.000.000	2 paket			Gabung 2008-2009
		11 Vocational Studi/ Bimbingan Karir Siswa SMA/ MA	Provinsi NAD			5.200.000.000	46 paket			Gabung 2008-2009
		12 Beasiswa bagi Siswa Miskin dan Berprestasi	Provinsi NAD			1.000.000.000	1000 Org			
		13 Pengembangan Tenaga Kependidikan Sekolah Kejuruan	Provinsi NAD			5.000.000.000	20 paket			Gabung 2008-2009
		14 KPM Mhs Pendidikan MIPA Teknisi Lab di SMA/ MA	Provinsi NAD			830.000.000	1 paket			
		15 Sosialisasi Edukatif Bencana Alam di Sekolah	Provinsi NAD			1.260.000.000	3 paket			
		16 Peralatan Laboratorium MIPA	Provinsi NAD	55.371.000.000	255 paket					
		17 Peningkatan fasilitas sekolah unggulan/ binaan	Provinsi NAD	19.400.000.000	160 paket					
		18 Penyediaan Buku Pustaka Sekolah	Provinsi NAD	24.208.000.000	2 paket					
		19 Pembangunan Gedung SMK Perikanan	Aceh Barat			2.500.000.000	1 Paket			
		20 Pembangunan USB SMP Kampung Cot	Aceh Barat			1.500.000.000	1 Paket			
		21 Pembangunan Kantor Guru MIN Putim	Aceh Barat			240.000.000	1 Paket			
		22 Revitalisasi SDLB Meulaboh	Aceh Barat			500.000.000	1 Paket			
		23 Pembangunan MIN Suak Bidok	Aceh Barat			900.000.000	1 Paket			
		24 Pembangunan SDN Inti Kuala Bubon	Aceh Barat			1.500.000.000	1 Paket			
		25 Pembangunan 3 RKB SMPN 4 Kec. Meurebo	Aceh Barat			500.000.000	1 Paket			
		26 Pembangunan TK Doa Ibunda Pucok Lueng	Aceh Barat			150.000.000	1 Paket			
		27 Pembangunan TK Boh Hate Poma	Aceh Barat			150.000.000	1 Paket			
		28 Pembangunan TK Drien Rampak Arongan	Aceh Barat			150.000.000	1 Paket			
		29 Pembangunan 3 RKB MIN Rantau Panyang	Aceh Barat			500.000.000	1 Paket			
		30 Pembangunan Sekolah TK Binaan	Aceh Barat			300.000.000	1 Paket			
		31 Pembangunan TK Tiga Serangkai	Aceh Barat			150.000.000	1 Paket			
		32 Pemb. Puskesmas Pembantu Seunebok Teungoh	Aceh Barat			360.000.000	1 Paket			
		33 Pembangunan Kembali Polindes Pasi Pinang	Aceh Barat			360.000.000	1 Paket			
		34 Pembangunan UGB SDN Suak Geudeubang	Aceh Barat			1.500.000.000	1 Paket			
		35 Pemb. Puskesmas Pembantu Kel. Ujung Kalak	Aceh Barat			360.000.000	1 Paket			
		36 Pembangunan Rumah Sakit Korem 012 TU	Aceh Barat			5.000.000.000	1 Paket			
		37 Penataan Lingkungan Puskesmas Pembantu Alue Raya	Aceh Barat			150.000.000	1 Paket			
		38 Pemb. Ruang Kantor / Guru MTsS Lambalek	Aceh Barat			300.000.000	1 Paket			
		39 Pembangunan TK Bungong Kupula Cot Pluh	Aceh Barat			150.000.000	1 Paket			
		40 Penataan Lingkungan BKG Suak Timah	Aceh Barat			150.000.000	1 Paket			
		41 Pembangunan Puskesmas Pembantu Gampong cot	Aceh Barat			360.000.000	1 Paket			
		42 Pembangunan TK Aisyiyah Alue Raya	Aceh Barat			150.000.000	1 Paket			
		43 Pengadaan Meubelair SMK Perikanan Suak Timah	Aceh Barat			360.000.000	1 Paket			
		44 Pengadaan Meubelair USB SMP Kampung Cot	Aceh Barat			360.000.000	1 Paket			
		45 Pengadaan Meubelair 6 RKB & Kantor Guru MIN Putim	Aceh Barat			280.000.000	1 Paket			
		46 Pengadaan Meubelair SDLB Meulaboh	Aceh Barat			240.000.000	1 Paket			
		47 Pengadaan Meubelair MIN Suak Bidok	Aceh Barat			360.000.000	1 Paket			
		48 Pengadaan Meubelair SDN Inti Kuala Bubon	Aceh Barat			360.000.000	1 Paket			
		49 Pengadaan Meubelair 3 RKB SMPN 4 Kec. Meurebo	Aceh Barat			120.000.000	1 Paket			
		50 Pengadaan Meubelair TK Doa Ibunda Pucok Lueng	Aceh Barat			40.000.000	1 Paket			
		51 Pengadaan Meubelair TK Boh Hate Poma	Aceh Barat			40.000.000	1 Paket			
		52 Pengadaan Meubelair TK Drien Rampak Arongan	Aceh Barat			40.000.000	1 Paket			
		53 Pengadaan Meubelair 3 RKB MIN Rantau Panyang	Aceh Barat			120.000.000	1 Paket			
		54 Pengadaan Meubelair TK Binaan Negeri	Aceh Barat			40.000.000	1 Paket			
		55 Pengadaan Meubelair TK Tiga Serangkai	Aceh Barat			40.000.000	1 Paket			
		56 Pengadaan meubelair UGB SDN Suak Geudeubang	Aceh Barat			240.000.000	1 Paket			

**RENCANA KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
TAHUN 2007 - 2009**

BIDANG	PROGRAM UTAMA	SUB BIDANG / KEGIATAN	LOKASI	2007		2008		2009		KETERANGAN
				NILAI (RUPIAH)	VOLUME	NILAI (RUPIAH)	VOLUME	NILAI (RUPIAH)	VOLUME	
		57 Pengadaan Meubelair Kantor / Guru MTsS Lambalek	Aceh Barat			40.000.000	1 Paket			
		58 Pengadaan Meubelair TK Bungong Kupula Cot Pluh	Aceh Barat			40.000.000	1 Paket			
		59 Pengadaan Meubelair UGB SMP 2 Meulaboh	Aceh Barat			360.000.000	1 Paket			
		60 Pengadaan Meubelair UGB MIN Arongan	Aceh Barat			360.000.000	1 Paket			
		61 Pengadaan Meubelair 6 RKB MAS Woyla	Aceh Barat			240.000.000	1 Paket			
		62 Pengadaan Meubelair UGB MIS Pribu	Aceh Barat			320.000.000	1 Paket			
		63 Pengadaan Meubelair BKG Suak timah	Aceh Barat			40.000.000	1 Paket			
		64 Pengadaan Meubelair TK Aisyiah	Aceh Barat			40.000.000	1 Paket			
		65 Pemb. 3 RKB SD Ujong Tanah-tangan	Aceh Barat Daya			500.000.000	1 Paket			
		66 Pemb. Pustu Ujung Tanah Tangan - Tangan	Aceh Barat Daya			350.000.000	1 Paket			
		67 Pengadaan meubelair UGB SD Pantee Rakyat	Aceh Barat Daya			320.000.000	1 Paket			
		68 Pengadaan meubelair. UGB MIN Lama Tuha	Aceh Barat Daya			320.000.000	1 Paket			
		69 Pengadaan meubelair 3 RKB SD Ujong Tanah	Aceh Barat Daya			120.000.000	1 Paket			
		70 Pemb. 3 RKB MAS Sinabang	Simeuleu			500.000.000	1 Paket			
		71 Pemb. UGB MAN Kuala Makmur	Simeuleu			1.500.000.000	1 Paket			
		72 Pemb. UGB MIN Sinabang	Simeuleu			1.490.000.000	1 Paket			
		73 Pemb. 3 RKB MTsS Buluh Hadek	Simeuleu			500.000.000	1 Paket			
		74 Pemb.Kantor Guru MTsN Sinabang	Simeuleu			300.000.000	1 Paket			
		75 Pengadaan meubelair UGB MAN Kuala Makmur	Simeuleu			320.000.000	1 Paket			
		76 Pengadaan meubelair. UGB MIN Sinabang	Simeuleu			280.000.000	1 Paket			
		77 Pengadaan meubelair 3 RKB MTsS Buluh Hadek	Simeuleu			120.000.000	1 Paket			
		78 Pengadaan meubelair.Kantor Guru MTsN Sinabang	Simeuleu			40.000.000	1 Paket			
		79 Revitalisasi SMA Negeri 1 Lhokseumawe	Kota Lhokseumawe			2.900.000.000	1 Paket			
		80 Pembangunan SDN 4 Samalanga	Bireun			224.000.000	112 M2			
		81 Pembangunan SDN 5 Pendrah	Bireun			336.000.000	168 M2			
		82 Pembangunan SDN 2 Jeumpa, Blang Badeh	Bireun			588.800.000	256 M2			
		83 Revitalisasi SMA Negeri 1 Tanah Jambo Aye	Aceh Utara			1.800.000.000	1 Paket			
		84 Pembangunan 2 RKB MIN Seunuddon	Aceh Utara			400.000.000	1 Paket			
		85 Pembangunan 3 RKB MTsN Dewantara	Aceh Utara			600.000.000	1 Paket			
		86 Revitalisasi Sekolah SMA Negeri 1 Tanah Pasir	Aceh Utara			600.000.000	1 Paket			
		87 Revitalisasi SMA Persiapan Negeri 2 Seunuddon	Aceh Utara			2.700.000.000	1 Paket			
		88 Pembangunan RKB Seintakat SMU (20 lokal)	Aceh Selatan			3.000.000.000	Paket			
		89 Pembangunan RKB Seintakat SMP (20 Lokal)	Aceh Selatan			3.000.000.000	Paket			
		Pendapatan PHLN				2.750.000.000				
		1 Dana Pendamping IDB	Provinsi NAD			1.450.000.000	1 paket			
		2 Dana Pendamping ADB	Provinsi NAD			1.300.000.000	1 paket			
		A.2. Perguruan Tinggi		91.088.000.000		32.244.000.000				
		1 Rehab gedung/lab PT	Provinsi NAD	4.813.000.000	6 paket					
		2 Peralatan Lab. Integrated tahap 2	Provinsi NAD	7.906.000.000	5 paket					
		3 Penyelesaian lanjutan Gedung PT	Provinsi NAD			1.400.000.000	2 paket			
		4 Revitalisasi Taman tugu Darussalam	Provinsi NAD			1.100.000.000	1 paket			
		5 Peningkatan/Pelatihan Penelitian bagi Dosen Muda PTN/PTS	Provinsi NAD			1.500.000.000	1 paket			
		6 Riset Terpadu Unggulan	Provinsi NAD			4.500.000.000	60 paket			Gabung 2008-2009
		7 Up-Grading Lembaga Pengadaa Tenaga Keguruan (LPTK)	Provinsi NAD			1.000.000.000	2 paket			
		8 Beasiswa mahasiswa miskin berprestasi PTN/PTS	Provinsi NAD			3.670.000.000	3670 Org			
		9 Pengembangan Tenaga Lab Sosial Keagamaan di PTAIS	Provinsi NAD			1.124.000.000	5 paket			
		10 Bantuan Beasiswa Penyelesaian Tugas Akhir Dosen S2/S3	Provinsi NAD			1.000.000.000	100 paket			
		11 Kegiatan Ekstrakurikuler mahasiswa	Provinsi NAD			2.000.000.000	200 paket			Gabung 2008-2009
		12 Bantuan Beasiswa Mhs Korban Tsunami Aceh di PT Luar NAD	Provinsi NAD	9.580.000.000	2977 Orang	1.500.000.000	50 Org			
		13 Pengembangan akademik perguruan tinggi	Provinsi NAD			12.000.000.000	6 paket			2.009
		Pendapatan PHLN		68.789.000.000		1.450.000.000				
		1 IDB Pembangunan Gedung Pendidikan	Provinsi NAD	68.789.000.000	28	1.450.000.000				Exit Strategy, 200
		B. KESEHATAN		47.799.000.000		26.780.000.000				
		1 Revitalisasi Puskesmas/Puslit	Provinsi NAD	36.299.000.000	11 paket					
		2 Peralatan Medis Kedokteran		11.500.000.000	2 paket					
		3 Penyempurnaan Gedung Kesehatan	Provinsi NAD			1.440.000.000	9 paket			
		4 Magang Tenaga Kesehatan dan Gizi	Provinsi NAD			726.000.000	66 paket			
		5 Pencegahan Penyakit Endemic	Provinsi NAD			1.050.000.000	3 paket			Exit Strategy
		6 Peningkatan Manajemen Lab. Kes	Provinsi NAD			650.000.000	2 paket			Exit Strategy
		7 Revitalisasi Pustu Seuneum III	Nagan Raya			300.000.000	1 Paket			
		8 Program Paket Capacity Building untuk RSU dan Puskesmas Plus	Provinsi NAD			9.200.000.000	23 paket			Exit Strategy
		9 Revitalisasi Puskesmas Cot Glungku,	Bireun			2.000.000.000	1 Paket			
		10 Revitalisasi RSUD Meureudu	Pidie			7.400.000.000	1 Paket			
		11 Revitalisasi RSUD Sigli (Lanjutan 2007)	Pidie			4.000.000.000	1 Paket			
		12 Pemb. Gedung RSU Idi (Lanjutan)	Aceh Timur			4.000.000	1 Unit			
		13 Revitalisasi RSU Peurlak (Lanjutan)	Aceh Timur			5.000.000	1 Unit			
		14 Revitalisasi RSU Gayo Lues (Lanjutan)	Gayo Lues			5.000.000	1 Unit			

**RENCANA KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
TAHUN 2007 - 2009**

BIDANG	PROGRAM UTAMA	SUB BIDANG / KEGIATAN	LOKASI	2007		2008		2009		KETERANGAN
				NILAI (RUPIAH)	VOLUME	NILAI (RUPIAH)	VOLUME	NILAI (RUPIAH)	VOLUME	
AGAMA, SOSIAL, PEMUDA DAN OLAH RAGA, DAN BUDAYA		C. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		43.261.000.000		7.576.000.000				
		1 Perlindungan dan Kesejahteraan Anak	Provinsi NAD	8.900.000.000	paket	4.500.000.000	2 paket			Exit Strategy, Gabung
		2 Workshop dan pelatihan Peningkatan Peran Perempuan	Provinsi NAD	34.361.000.000	paket	2.800.000.000	4 paket			Gabung 2008-2009
		3 Pemberdayaan Anak-Anak Panti Asuhan	Provinsi NAD			276.000.000	46 paket			Gabung 2008-2009
				129.134.038.000		297.402.802.000				
		A. AGAMA		74.291.068.000		122.561.295.000				
		A.1. Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama		20.121.186.000		80.819.680.000				
		1 Bantuan Pembangunan Masjid	Provinsi NAD	13.405.200.000	75 unit					
		2 Bantuan Pembangunan Gereja	Provinsi NAD	400.000.000	2 unit					
		3 Bantuan Pembangunan Vihara	Provinsi NAD	100.000.000	1 unit					
		4 Pembangunan Masjid Lamjabat, Banda Aceh	Kota Banda Aceh			1.000.000.000	1 unit			
		5 Pembangunan Masjid Ruhul Falah Gampong Jawa, B.Aceh	Kota Banda Aceh			1.000.000.000	1 unit			
		6 Pembangunan Masjid Gampong Pande, B.Aceh	Kota Banda Aceh			1.000.000.000	1 unit			
		7 Pemb. Meunasah Gampong Pande, Banda Aceh	Kota Banda Aceh			500.000.000	1 unit			
		8 Pembangunan Masjid Kp. Mulia, B.Aceh	Kota Banda Aceh			1.000.000.000	1 unit			
		9 Pembangunan Masjid Tgk. Di Anjong Peulanggahan, B.Aceh	Kota Banda Aceh			1.000.000.000	1 unit			
		10 Pemb. Masjid Lampaseh Aceh, Banda Aceh	Kota Banda Aceh			1.000.000.000	1 unit			
		11 Bantuan Pembangunan Meunasah	Provinsi NAD	5.265.986.000	59 unit					
		12 Bantuan Pembangunan Masjid Jam' Lueng Bata, Banda Aceh	Kota Banda Aceh			1.500.000.000	1 Unit			
		13 Bantuan Pemb. Masjid Peunayong, Banda Aceh	Kota Banda Aceh			500.000.000	1 unit			
		14 Bantuan Pembangunan Masjid Pasi Janeng, Pulau Aceh	Kab. Aceh Besar	250.000.000	1 unit	500.000.000	1 unit			
		15 Pembangunan Escape Building di Masjid Muhammadiyah	Kota Banda Aceh	700.000.000	1 unit	3.000.000.000	1 unit			
		16 Pembangunan Escape Building di Masjid Asrama Haji	Kota Banda Aceh			3.000.000.000	1 unit			
		17 Bantuan Pemb. Masjid Lambada Lhok, Aceh Besar	Kab. Aceh Besar			1.000.000.000	1 unit			
		18 Bantuan Pembangunan Masjid Lamteungoh, Peukan Bada	Kab. Aceh Besar			500.000.000	1 unit			
		19 Pembangunan Masjid Baitussalam Umong Sirebee, Lhong, A.Besar	Kab. Aceh Besar			1.000.000.000	1 unit			
		20 Pemb. Masjid Al-Qurban, Birek, Lhoong, A.Besar	Kab. Aceh Besar			1.000.000.000	1 unit			
		21 Pemb. Masjid Pasi, Lhoong, Aceh Besar	Kab. Aceh Besar			1.000.000.000	1 unit			
		22 Pemb. Meunasah Bak U, Leupueung, Aceh Besar	Kab. Aceh Besar			1.000.000.000	1 unit			
		23 Pemb. Masjid An-Nur, Layoun, Leupueung, Aceh Besar	Kab. Aceh Besar			1.000.000.000	1 unit			
		24 Pemb. Meunasah Dusun Matirara Gemenang, Baitussalam, A.Besar	Kab. Aceh Besar			500.000.000	1 unit			
		25 Bantuan Pemb. Masjid Neuheun, Kec. Mesjid Raya, A.Besar	Kab. Aceh Besar			500.000.000	1 unit			
		26 Pembangunan Meunasah Durueung, Masjid Raya, A.Besar	Kab. Aceh Besar			500.000.000	1 unit			
		27 Pembangunan Masjid Jam' Saree, Aceh Besar	Kab. Aceh Besar			2.000.000.000	1 unit			
		28 Pembangunan Masjid Baiturrahim, Kec. Panga, Aceh Jaya	Kab. Aceh Jaya			1.000.000.000	1 unit			
		29 Pemb. Masjid An-Nuha Ranto Sabon, Sampoiniet, A.Jaya	Kab. Aceh Jaya			1.000.000.000	1 unit			
		30 Pemb. Masjid At-Taqwa, Clurek, Kr. Sabe, A.Jaya	Kab. Aceh Jaya			1.000.000.000	1 unit			
		31 Pemb. Masjid Krueng Tho, Sampoiniet, A.Jaya	Kab. Aceh Jaya			1.000.000.000	1 unit			
		32 Pemb. Masjid Al-Ikhlash, Sampoiniet, A.Jaya	Kab. Aceh Jaya			1.000.000.000	1 unit			
		33 Pemb. Masjid Al-Iman, Desa Kabung, Kr. Sabe, A.Jaya	Kab. Aceh Jaya			1.000.000.000	1 unit			
		34 Pemb. Masjid Al-Munawwarah, Desa Padang Data, Kr. Sabe, A.Jaya	Kab. Aceh Jaya			1.000.000.000	1 unit			
		35 Pemb. Masjid Al-Muttaqin, Desa Keutapang, Kr. Sabe, A.Jaya	Kab. Aceh Jaya			1.000.000.000	1 unit			
		36 Pemb. Masjid Al-Munawwarah, Twi Kareung, Kec. Panga, A.Jaya	Kab. Aceh Jaya			1.000.000.000	1 unit			
		37 Pemb. Masjid Nurul Hidayah, Kuta Tuha, Panga, A.Jaya	Kab. Aceh Jaya			1.000.000.000	1 unit			
		38 Pemb. Masjid Babul Khairat, Dusun Aron Patah, Kuta Tuha, Panga	Kab. Aceh Jaya			1.000.000.000	1 unit			
		39 Pemb. Masjid Al-Hidayah, Kuta Tuha, Panga, A.Jaya	Kab. Aceh Jaya			1.000.000.000	1 unit			
		40 Revitalisasi Balee Musapat (Sarana Ibadah)Kuala Bubon	Kab. Aceh Barat			800.000.000	1 unit			
		41 Revitalisasi Balee Musapat (Sarana Ibadah)Suak Timah	Kab. Aceh Barat			800.000.000	1 unit			
		42 Rev. Balee Musapat (Sarana Ibadah) Blang Beurandang (Perum Relokasi)	Kab. Aceh Barat			800.000.000	1 unit			
		43 Revitalisasi Balee Musapat (Sarana Ibadah) Kampung Pasir	Kab. Aceh Barat			800.000.000	1 unit			
		44 Rev. Balee Musapat (Sarana Ibadah) Seunebok Teungoh (Perum Relokasi)	Kab. Aceh Barat			880.000.000	1 unit			
		45 Revitalisasi Balee Musapat (Sarana Ibadah) Suak Seumaseh	Kab. Aceh Barat			880.000.000	1 unit			
		46 Revitalisasi Balee Musapat (Sarana Ibadah) Baitussalam Kelurahan U. Baroh	Kab. Aceh Barat			640.000.000	1 unit			
		47 Revitalisasi Masjid Al-Ikhas, Desa Paya Lumpat, Sama Tiga	Kab. Aceh Barat			640.000.000	1 unit			
		48 Revitalisasi Masjid Al-Fitrah, Gampong Teungoh, Samatiga	Kab. Aceh Barat			240.000.000	1 unit			
		49 Revitalisasi Mesjid Mistabul Janah, Gampong Masjid Baro	Kab. Aceh Barat			400.000.000	1 unit			
		50 Revitalisasi Meunasah Al-Bayan, Ujung Kalak	Kab. Aceh Barat			200.000.000	1 unit			
		51 Penataan Balee Musapat Desa Ladang, Susoh	Kab. Abdiya			800.000.000	1 unit			
		52 Penataan Balee Musapat Desa Pulau Kayu, Susoh	Kab. Abdiya			800.000.000	1 unit			
		53 Penataan Balee Musapat Desa Sejahtera, Manggeng	Kab. Abdiya			800.000.000	1 unit			
		54 Revitalisasi Balee Musapat Desa Lama Tuha (Kompl. Perumahan Tsunami)	Kab. Abdiya			800.000.000	1 unit			
		55 Pemb Mesjid Suka Mulia	Kab. Nagan Raya			680.000.000	1 unit			
		56 Pemb Mesjid Baitul Yaqin	Kab. Nagan Raya			680.000.000	1 unit			
		57 Pemb mesjid Al Ikhlash	Kab. Nagan Raya			680.000.000	1 unit			
		58 Pemb Mesjid Babul Qudus	Kab. Nagan Raya			680.000.000	1 unit			
		59 Pemb Mesjid Muhajirin	Kab. Nagan Raya			680.000.000	1 unit			
		60 Pem. Masjid Al-Ikhas	Kab. Nagan Raya			600.000.000	1 unit			
		61 Balai Musapat Desa Kolok (Perum Relokasi)	Kab. Simeulue			960.000.000	1 unit			
		62 Balai Musapat Desa Badegong, Teupah Selatan	Kab. Simeulue			960.000.000	1 unit			
		63 Revitalisasi Masjid Babushalihin	Kab. Simeulue			960.000.000	1 unit			

**RENCANA KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
TAHUN 2007 - 2009**

BIDANG	PROGRAM UTAMA	SUB BIDANG / KEGIATAN	LOKASI	2007		2008		2009		KETERANGAN
				NILAI (RUPIAH)	VOLUME	NILAI (RUPIAH)	VOLUME	NILAI (RUPIAH)	VOLUME	
		64 Revitalisasi Masjid Al Muhajirin	Kab. Simeulue			1.200.000.000	1 unit			
		65 Revitalisasi Masjid Babul Iman	Kab. Simeulue			1.200.000.000	1 unit			
		66 Revitalisasi Masjid Baiturrahman	Kab. Simeulue			760.000.000	1 unit			
		67 Revitalisasi Masjid Baitul Hikmah	Kab. Simeulue			760.000.000	1 unit			
		68 Revitalisasi Masjid Babussalam Kec. Simeulue Tengah	Kab. Simeulue			720.000.000	1 unit			
		69 Bantuan Pembangunan Manzilul Minan, Peureulak, A.Timur	Kab. Aceh Timur			500.000.000	1 unit			
		70 Bantuan Pemb. Masjid Jami' Timang Gajah, Bener Meriah	Kab. Bener Meriah			500.000.000	1 unit			
		71 Bantuan Pemb. Masjid An-Nur, Dabun Blang, Gayo Luwes	Kab. Gayo Luwes			500.000.000	1 unit			
		72 Rehab Mesjid Marhamah Kota Blangkejeren	Kab. Gayo Luwes			2.630.327.000	1 unit			
		73 Bantuan Pemb. Masjid Jami' Tursina, K.Muda, A.Tamiang	Kab. Aceh Tamiang			500.000.000	1 unit			
		74 Bantuan Pemb. Masjid Jami' Paya Reje, Kabayakan, A.Tengah	Kab. Aceh Tengah			500.000.000	1 unit			
		75 Bantuan Pemb./Rehab Masjid di Aceh Selatan	Kab. Aceh Selatan			2.500.000.000	25 unit			
		76 Bantuan Pemb./Rehab Meunasah/ Mushollah di Aceh Selatan	Kab. Aceh Selatan			2.000.000.000	40 unit			
		77 Bantuan Pemb./Rehab Dayah/ Pesantren di Aceh Selatan	Kab. Aceh Selatan			750.000.000	10 unit			
		78 Pembangunan Mesjid Al-Suhadah Kute Rambung	Kab. Aceh Tenggara			82.750.000	1 unit			
		79 Pembangunan Mesjid Baiturrahman dan MCK Ds. Lawe Pinis	Kab. Aceh Tenggara			397.600.000	1 unit			
		80 Rehabilitasi Mesjid Mutalim Ds. Pulonas Baru	Kab. Aceh Tenggara			202.518.000	1 unit			
		81 Pembangunan Pondok Pesantren Darunnashihin	Kab. Aceh Tenggara			143.000.000	1 unit			
		82 Pembangunan Musalla Pondok Pesanten Bina Islami	Kab. Aceh Tenggara			151.231.000	1 unit			
		83 Pembangunan Mesjid Al-Azhar Ds Lawe Loning Aman	Kab. Aceh Tenggara			482.254.000	1 unit			
		84 Pembangunan Mesjid Usuluddin Ds. Gunung Malas	Kab. Aceh Tenggara			180.000.000	1 unit			
		85 Rehab Mesjid Agung An Nur (escape building)	Kab. Aceh Singkil			10.000.000.000	1 Unit			
		A.2. Sarana Pelayanan Keagamaan		39.651.245.000		16.463.280.000				
		A.2.1. Gedung Kantor		38.671.245.000		12.875.000.000				
		1 Pembangunan Gedung KUA	Provinsi NAD	8.588.400.000	25 unit					
		2 Pembangunan Aula Asrama Haji	Provinsi NAD	8.000.000.000	2.500 m2					
		3 Lanjutan Pembangunan Observasi Hilal	Provinsi NAD	1.229.675.000	1 unit					
		4 Pembangunan menara Observasi Hilal	Provinsi NAD							
		5 Pemb. Gedung Baitul Mal Kab/Kota	Provinsi NAD	1.176.000.000	420 m2					
		6 Pembangunan Kandepeg Kab/Kota	Provinsi NAD	6.533.000.000	4 unit					
		7 Pembangunan Dinas Syariat Islam Kab/Kota	Provinsi NAD	4.375.980.000	1.380 m2					
		8 Pembangunan Gedung MPU Kab/Kota	Provinsi NAD	2.352.000.000	840 m2					
		9 Pembangunan Kantor WH Prov	Provinsi NAD	3.200.640.000	1 unit					
		10 Pembangunan Gedung Baitul Mal Prov	Provinsi NAD	2.666.400.000	1 unit					
		11 Pembangunan KUA Kec. Kuta Blang	Kab. Bireun			425.000.000,00	1 unit			
		12 Pembangunan KUA Kec. Jeumpa	Kab. Bireun			425.000.000,00	1 unit			
		13 Pembangunan KUA Kec. Kuala	Kab. Bireun			425.000.000,00	1 unit			
		14 Pembangunan Baitul Mal Kab. Bireun	Kab. Bireun			750.000.000,00	1 unit			
		15 Revitalisasi Kantor Depag Kab. Bireun	Kab. Bireun			750.000.000,00	1 unit			
		16 Pembangunan KUA Kec. Muara Satu	Kota Lhokseumawe			425.000.000,00	1 unit			
		17 Pembangunan Gedung Dinas Syariat Islam Kota Lhokseumawe	Kota Lhokseumawe			1500000000	1 unit			
		18 Pembangunan Gedung Dinas Syariat Islam Kab. Pidie	Kab. Pidie			1500000000	1 unit			
		19 Lanjutan Pembangunan Baitul Mal Pidie	Kab. Pidie			400000000	1 unit			
		20 Pembangunan KUA Kec. Muara Batu	Kab. Aceh Utara			425000000	1 unit			
		21 Pembangunan KUA Kec. Bakitya Barat	Kab. Aceh Utara			425000000	1 unit			
		22 Pembangunan KUA Kec. Tanah Pasir	Kab. Aceh Utara			425000000	1 unit			
		23 Pembangunan Gedung Dinas Syariat Islam Kab. Aceh Timur	Kab. Aceh Timur			800000000	1 unit			
		24 Pembangunan Gedung Kantor Baitul Mal Kab. Aceh Timur	Kab. Aceh Timur			700000000	1 unit			
		25 Pembangunan Gedung Kantor Baitul Mal Kab. Aceh Tamiang	Kab. Aceh Tamiang			700000000	1 unit			
		26 Pembangunan Gedung Kantor Baitul Mal Kab. Aceh Kab. Gayo Lues	Kab. Gayo Lues			700000000	1 unit			
		27 Pembangunan Gedung Kantor Baitul Mal Kota Langsa	Kota Langsa			700000000	1 unit			
		28 Pembangunan Gedung Kantor Baitul Mal Kab. Aceh Tengah	Kab. Aceh Tengah			700000000	1 unit			
		29 Pembangunan Gedung Kantor Baitul Mal Kab. Bener Meriah	Kab. Bener Meriah			700000000	1 unit			
		30 Pembangunan Rumdis Kandepeg Kota B. Aceh	Kota Banda Aceh	211.050.000	1 unit					
		31 Pembangunan Rumdis TU Kandepeg Kota B. Aceh	Kota Banda Aceh	150.570.000	1 unit					
		32 Pembangunan Rumdis Kepala Dinas Syari'at Islam Aceh Jaya	Kab. Aceh Jaya	187.530.000	1 unit					
		A.2.2. Prasarana Lingkungan Gedung Kantor		0		588.280.000				
		1 Pemb. Pagar dan Penataan Halaman Kandepeg Kab. Aceh Jaya	Kab. Aceh Jaya			275.995.000	1 unit			
		2 Pemb. Pagar dan Penataan Halaman Kandepeg Kab. Pidie	Kab. Pidie			312.285.000	1 unit			
		A.2.3. Peralatan		980.000.000		3.000.000.000				
		1 Pengadaan peralatan observasi hilal	Provinsi NAD			3.000.000.000	1 unit			
		2 Pengadaan Ambulance untuk Asrama Haji	Provinsi NAD	230.000.000	1 Unit					
		3 Pengadaan Mobil Operasional Asrama Haji	Provinsi NAD	300.000.000	2 Unit					
		4 Pengadaan Mobil Operasional Depag Aceh Jaya	Kab. Aceh Jaya	150.000.000	1 Unit					
		5 Pengadaan Mobil Operasional MPU Aceh Jaya	Kab. Aceh Jaya	150.000.000	1 Unit					
		6 Pengadaan Mobil Operasional Dinas Syari'at Aceh Jaya	Kab. Aceh Jaya	150.000.000	1 Unit					

**RENCANA KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
TAHUN 2007 - 2009**

BIDANG	PROGRAM UTAMA	SUB BIDANG / KEGIATAN	LOKASI	2007		2008		2009		KETERANGAN
				NILAI (RUPIAH)	VOLUME	NILAI (RUPIAH)	VOLUME	NILAI (RUPIAH)	VOLUME	
		A.3. Sarana Pendidikan		9.314.837.000		9.478.335.000				
		1 Bantuan Pembangunan dayah	Provinsi NAD	2.850.000.000	38 unit					
		2 Bantuan Pembangunan balai pengajian/TPA	Provinsi NAD	1.700.000.000	85 unit					
		3 Pemb. Asrama Dayah Babul Huda, Birek, Lhoong, A.Besar	Kab. Aceh Besar			2.000.000.000	1 unit			
		4 Pemb. Asrama Dayah Jabal Ulum, Sageo, Muara Tiga				2.000.000.000	1 unit			
		5 Pemb. Perpustakaan Dayah Mahyal'Ulum, Sibreh, A.Besar	Kab. Aceh Besar			500.000.000	1 unit			
		6 Lanjutan Pembangunan Pusat Kegiatan Santri Aceh	Provinsi NAD	714.690.000	270 m2	600.000.000	1 unit			
		7 Peralatan Lab Bahasa Dayah Malikussaleh Pantion Labu	Provinsi NAD			300.000.000	1 unit			
		8 Peralatan Lab Bahasa Dayah Mudi Mesra Samalanga	Provinsi NAD			300.000.000	1 unit			
		9 Lanjutan Pembangunan Dayah Arr-Risalah Aceh Jaya	Kab. Aceh Jaya	1.185.355.000	1 unit					
		10 Lanjutan Pembangunan Dayah Darul Abrar Aceh Jaya	Kab. Aceh Jaya	1.232.235.000	1 unit					
		11 Lanjutan Pembangunan Dayah Ummul Ayman	Provinsi NAD	695.134.000	1 unit					
		12 Lanjutan Pemb.Lab. Komputer dan Bahasa Dayah Mudi Mesra	Provinsi NAD	687.423.000	1 unit					
		13 Pemb. Asrama Dayah Putri Muslimat Samalanga	Provinsi NAD			2.000.000.000	1 unit			
		14 Revitalisasi Pesantren Darul Itami	Kab. Simelee			680.000.000	1 unit			
		15 Pembangunan Dayah Tgk. Awe Geutah	Kab. Bireun			225.000.000	1 unit			
		16 Pembangunan TPA Alhuda Kelurahan Kuta Blang	Kota Lhokseumawe			300.000.000	1 unit			
		17 Pembangunan Balai Pengajian Dayah Tgk. Chik Di Reubei	Kab. Pidie	250.000.000	1 unit	450.000.000	1 unit			
		18 Pembangunan Dayah Tgk. Syik Muhammad Daud Beurueh	Kab. Pidie			123.335.000	1 unit			
		A.4. Rehabilitasi Mental Spiritual		500.000.000		1.000.000.000				
		1 Rehabilitasi Mental Spiritual Korban Tsunami	Provinsi NAD	500.000.000	5 Lok	1.000.000.000	5 Lok			
		A.5. Pengembangan Kapasitas Agama		4.793.800.000		14.800.000.000				
		1 Pendidikan Studi Purna Ulama (SPU)	Provinsi NAD	1.050.000.000	1 Keg	3.000.000.000	2 Akt			
		2 Magang Alumni Kelas SPU	Provinsi NAD	209.000.000	1 Keg	250.000.000	1 Keg			
		3 Biaya Short Course ke LN Alumni SPU	Provinsi NAD			2.500.000.000	1 Akt			
		4 Penulisan Buku Ulama	Provinsi NAD			500.000.000	1 Keg			
		5 Penulisan Buku Ulama Perempuan	Provinsi NAD	133.300.000	1 Keg	500.000.000	1 Keg			
		6 Penulisan Buku Tafsir Tematik Ayat-ayat Perdamaian	Provinsi NAD			500.000.000	1 Keg			
		7 Pembinaan dan Penulisan Buku untuk Santri	Provinsi NAD	125.000.000	1 Keg	300.000.000	2 Keg			
		8 Konferensi Islam Internasional	Provinsi NAD			1.500.000.000	1 Keg			
		9 Peningkatan Kapasitas Remaja Masjid	Provinsi NAD	500.000.000	5 Paket	1.150.000.000	23 paket			
		10 Peningkatan Kapasitas TPA	Provinsi NAD	500.000.000	5 Paket	1.150.000.000	23 paket			
		11 Peningkatan Kapasitas Petugas Baitul Mal	Provinsi NAD	500.000.000	5 Paket	1.150.000.000	23 paket			
		12 Peningkatan Kapasitas Imam Masjid	Provinsi NAD			1.150.000.000	23 paket			
		13 Peningkatan Kapasitas Imam Meunasah	Provinsi NAD			1.150.000.000	23 paket			
		14 Penempatan Da'I dihuntara dan huntut	Provinsi NAD	250.000.000	1 paket					
		15 Penempatan Guru Bahasa Inggris di Dayah	Provinsi NAD	220.000.000	220 OB					
		16 Penempatan instruktur Komputer di Dayah	Provinsi NAD	220.000.000	220 OB					
		17 Bantuan Kegiatan Remaja Masjid	Provinsi NAD	475.000.000	5 lok					
		18 Sosialisasi Draf Qanun Anti Korupsi	Provinsi NAD	71.500.000	1 keg					
		19 Bantuan kegiatan Majelis Taklim	Provinsi NAD	450.000.000	5 Paket					
		B. SOSIAL		9.750.000.000		53.339.500.000				
		B.1. Penangan Kelompok Rentan dan Bantuan Sosial		9.750.000.000		0				
		1 Bantuan Transformasi Sosial Mahasiswa	Provinsi NAD	3.000.000.000,00	3 Pkt					
		2 Bantuan Pengembangan Kapasitas Ulama	Provinsi NAD	2.500.000.000,00	1 Pkt					
		3 Penempatan Guru Pengajian di Huntara/Huntap	Provinsi NAD	900.000.000,00	600 OB					
		4 Bantuan Kegiatan Sosial Keagamaan	Provinsi NAD	2.000.000.000,00	1 Pkt					
		5 Workshop Kebersihan & Kesehatan Untuk Dayah	Provinsi NAD	100.000.000,00	1 Pkt					
		6 Sosialisasi Draft Qanun Anti Korupsi	Provinsi NAD	250.000.000,00	1 Pkt					
		7 Rehabilitasi Mental Spiritual	Provinsi NAD	1.000.000.000,00	1 Pkt					
		B.2. Pembangunan Sosial Masyarakat Pedesaan Berbasis Kawasan di Aceh		0		14.000.000.000				
		1 Pengembangan Komunitas Adat Terpencil	Provinsi NAD			14.000.000.000	10 Paket			
		B.3. Pembangunan Sarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial Masyarakat (Kegiatan)		0		28.439.500.000				
		1 Trauma Center Terpadu	Provinsi NAD			10.000.000.000	1 paket			
		2 Pusat Rehabilitasi Sosial Masyarakat Terpadu	Provinsi NAD			18.000.000.000	1 paket			
		3 Pemb. Pagar Panti Asuhan Sp. Empat Kl. Utara	Kab. Aceh Selatan			175.000.000	1 unit			
		4 Bantuan Pembangunan Sarana & Prasarana Panti Asuhan Raudhatul Hasanah	Kab. Aceh Tenggara			143.000.000	1 paket			
		5 Bantuan Pembangunan Sarana & Prasarana Panti Asuhan Darul Ihsan	Kab. Aceh Tenggara			121.500.000	1 paket			
		B.4. Pembangunan/Rehabilitasi Taman Makam Pahlawan		0		6.900.000.000				
		1 Pembangunan/Rehabilitasi Taman Makam Pahlawan/Makan Pahlawan Nasional.	Provinsi NAD			6.900.000.000	23 unit			
		B.5. Aceh Development Summit		0		4.000.000.000				
		1 Pra Summit (FGD, seminar, dan sosialisasi)	Provinsi NAD			1.000.000.000	1 Paket			
		2 Aceh Development Summit	Provinsi NAD			3.000.000.000	1 Paket			

**RENCANA KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
TAHUN 2007 - 2009**

BIDANG	PROGRAM UTAMA	SUB BIDANG / KEGIATAN	LOKASI	2007		2008		2009		KETERANGAN
				NILAI (RUPIAH)	VOLUME	NILAI (RUPIAH)	VOLUME	NILAI (RUPIAH)	VOLUME	
		C BUDAYA		2.600.000.000		98.518.750.000				
		1 Bantuan Terjemahan dan Cetak Buku T. Iskandar	Provinsi NAD			2.000.000.000	1 paket			
		2 Bantuan Penghargaan Kepada T. Iskandar	Provinsi NAD			500.000.000	1 paket			
		3 Survey dan Penulisan Sejarah, Kearifan Lokal dan Biografi Gampong di Aceh	Provinsi NAD			1.500.000.000	1 paket			
		4 Cetak Buku Biografi Tgk. Syech Abdul Rauf Al-Singkili	Provinsi NAD			500.000.000	1 paket			
		5 Seminar Internasional Khaul Hamzah Fansury	Provinsi NAD			1.750.000.000	1 paket			
		6 Terjemahan dan Cetak Buku Aceh Sepanjang Abad Haji Muhammad Said	Provinsi NAD			1.980.000.000	1 paket			
		7 Survey, identifikasi dan Dokumentasi Perkusi Aceh	Provinsi NAD			300.000.000	1 paket			
		8 Terjemahan dan Penggandaan Qanun Al-Asy	Provinsi NAD			500.000.000	1 paket			
		9 Sosialisasi dan Distribusi Qanun Al-Asy	Provinsi NAD			275.000.000	1 paket			
		10 Pelatihan dan penguatan Adat Aceh Bagi perempuan	Provinsi NAD			125.000.000	1 paket			
		11 Cetak Ulang Hikayat Aceh Lama	Provinsi NAD			350.000.000	7 paket			
		12 Pelatihan Seni Untuk Anak Usia SD lanjutan	Provinsi NAD			1.750.000.000	7 paket			
		13 Sosialisasi Budaya damai bagi Masyarakat Gampong	Provinsi NAD			4.025.000.000	7 paket			
		14 Bantuan Kegiatan Seni Budaya Masyarakat Lanjutan	Provinsi NAD			1.750.000.000	7 paket			
		15 Cetak Kamus Bahasa Aceh dan Etnik Aceh (Versi : Aceh - German - Inggris)	Provinsi NAD			600.000.000	2 paket			
		16 Penyusunan Bahan Ajar seni dan budaya Aceh	Provinsi NAD			5.750.000.000	23 paket			
		17 Bantuan Advokasi qanun wali nangroe, lembaga adat, mukim dan gampong	Provinsi NAD			3.450.000.000	23 paket			
		18 Pembangunan taman bacaan gampong II di Relokasi Korban Tsunami	Provinsi NAD			2.500.000.000	1 paket			
		19 Penerbitan Seni Budaya Aceh (Komik, Pantun, Hikayat , Puisi, essay, Novel Cerpen)	Provinsi NAD			750.000.000	1 paket			
		20 Piasan gampong (Pagelaran, pameran, karnaval, Lomba, Diskusi)	Provinsi NAD			1.750.000.000	1 paket			
		21 Pembangunan Taman kesenian masyarakat gampong (Seung Piasan)	Provinsi NAD			3.500.000.000	1 paket			
		22 Penguatan Jaringan Budaya Aceh	Provinsi NAD			850.000.000	1 paket			
		23 Pameran seni rupa	Provinsi NAD			17.500.000.000	7 paket			
		24 Film Dokumenter ttg. Seniman	Provinsi NAD			250.000.000	1 paket			
		25 Pelatihan Seni Kerajinan masyarakat Untuk Korban Tsunami	Provinsi NAD			2.750.000.000	1 paket			
		26 Penerbitan Buku Hikayat tsunami	Provinsi NAD			750.000.000	1 paket			
		27 Bantuan Cetak Buku Buku Cerita Aceh	Provinsi NAD			750.000.000	1 paket			
		28 Pembangunan bale Pasie	Provinsi NAD			2.500.000.000	1 paket			
		29 Event Seni Budaya (Kecamatan, kab/kota, Provinsi)	Provinsi NAD			1.750.000.000	1 paket			
		30 Pembangunan Gedung MAA lanjutan	Provinsi NAD	1.600.000.000		3.000.000.000	1 unit			
		31 Pembangunan Gedung PIDA lanjutan	Provinsi NAD			2.300.000.000	1 unit			
		32 Pembangunan Gedung Galeri Museum Lanjutan	Provinsi NAD			3.200.000.000	1 unit			
		33 Pembangunan Penggugur Seni Pertunjukan BPSNT	Provinsi NAD			750.000.000	1 unit			
		34 Rehabilitasi Taman Ratu Safiatuddin (Pasar Seni-makanan Tradisional Aceh)	Provinsi NAD			2.500.000.000	1 unit			
		35 Penataan Lingkungan Taman Budaya Aceh	Provinsi NAD			1.500.000.000	1 sit/ paket			
		36 Teater Arena Tirik Nol Kota Banda Aceh	Kota Banda Aceh			1.500.000.000	1 sit/ paket			
		37 Rehabilitasi Taman Ratu Safiatuddin bangunan utama	Provinsi NAD			600.000.000	1 sit/ paket			
		38 Penataan Situs BCB Aceh Barat (Kopiyah Mekeutup T. Umar)	Kab. Aceh Barat			240.000.000	1 sit/ paket			
		39 Lanjutan Penataan Kuburan Tsunami	Kab. Aceh Barat			480.000.000	1 sit/ paket			
		40 Pemb/Rehab Makam Tsunami Desa Kuala Tripa Kec. Darul Makmur	Kab. Nagan Raya			224.560.000	1 sit/ paket			
		41 Pemb/Rehab Makam Tsunami Desa Cot Mee, Kec. Kuala	Kab. Nagan Raya			122.000.000	1 sit/ paket			
		42 Pemb/Rehab Makam Tsunami Desa Ujong Patihah Kec. Kuala	Kab. Nagan Raya			269.560.000	1 sit/ paket			
		43 Pemb/Rehab Makam Tsunami Desa Ujong Patihah Kemukiman, Suak Sika	Kab. Nagan Raya			183.880.000	1 sit/ paket			
		44 Pembangunan meseum Aceh Jaya	Kab. Aceh Jaya			1.000.000.000	1 sit/ paket			
		45 Pembangunan Gedung MAA Kab. Pidie	Kab. Pidie			1.443.750.000				
		46 Pembangunan Gedung Seni Budaya Aceh Singkil tahap II	Kab. Aceh Singkil	1.000.000.000	1 unit	1.500.000.000	1 nit/paket			
		47 Pembangunan Gedung Pusat Seni Budaya Aceh Selatan (community center)	Kab. Aceh Selatan			2.500.000.000	1 sit/ paket			
		48 Pembangunan Gedung Pusat Seni Budaya Aceh Timur (community center)	Kab. Aceh Timur			2.500.000.000	1 sit/ paket			
		49 Pembangunan Gedung Pusat Seni Budaya Aceh Tamiang (community center)	Kab. Aceh Tamiang			2.500.000.000	1 sit/ paket			
		50 Pembangunan Gedung Pusat Seni Budaya Aceh Langsa (community center)	Kota Langsa			2.500.000.000	1 sit/ paket			
		51 Pembangunan Gedung Pusat Seni Budaya Aceh Gayo Luwes (community center)	Kab. Gayo Luwes			2.500.000.000	1 sit/ paket			
		52 Pembangunan Gedung Pusat Seni Budaya Aceh Bener Meriah (community center)	Kab. Bener Meriah			2.500.000.000	1 sit/ paket			
		D PEMUDA DAN OLAHRAGA		42.492.970.000		22.983.257.000				
		D.1. Kegiatan Non Fisik		6.087.970.000		-				
		1 Bantuan Sentral Usaha Ekonomi Pemuda (SUEP)	Provinsi NAD	350.000.000	1 paket					
		2 Bantuan Pembinaan Atlet Olahraga Prestasi KONI NAD	Provinsi NAD	1.500.000.000	1 paket					
		3 Bantuan Biaya Kompetisi Olahraga Prestasi	Provinsi NAD	1.400.000.000	1 paket					
		4 Bantuan Tim Evaluasi dan Monitoring Olahraga	Provinsi NAD	100.000.000	1 paket					
		5 Bantuan Pengadaan Olahraga Prestasi	Provinsi NAD	350.000.000	1 paket					
		6 Bantuan Pembinaan Cabang Olahraga Sepakbola	Provinsi NAD	1.300.000.000	1 paket					
		7 Bantuan Pengembangan Pusat Kajian Ilmu Olahraga dan Data Base Olahraga	Provinsi NAD	75.000.000	1 paket					
		8 Bantuan Kegiatan Kepemudaan	Provinsi NAD	350.000.000	1 paket					
		9 Bantuan Penggandaan/cetak buku keolahragaan	Provinsi NAD	75.000.000	3000 BH					
		10 Bantuan Peralatan Olahraga Masyarakat	Provinsi NAD	250.000.000	1 paket					
		11 Bantuan Kegiatan Olahraga Pemuda dan Masyarakat	Provinsi NAD	337.970.000	1 paket					

**RENCANA KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
TAHUN 2007 - 2009**

BIDANG	PROGRAM UTAMA	SUB BIDANG / KEGIATAN	LOKASI	2007		2008		2009		KETERANGAN		
				NILAI (RUPIAH)	VOLUME	NILAI (RUPIAH)	VOLUME	NILAI (RUPIAH)	VOLUME			
		D.2. Kegiatan Fisik		36.405.000.000		22.983.257.000						
		1 Lanjutan Pembangunan Hall Olahraga Serbaguna Lhongraya Banda Aceh Tahap II	Kota Banda Aceh	11.750.000.000	1 paket	12.985.856.000	1 paket					
		2 Lanjutan Pembangunan Gedung Hall Olahraga Sport Center Darussalam Tahap II (495	Provinsi NAD	1.995.000.000	1 paket	5.999.136.000	1 paket					
		3 Pembangunan dan Pengawasan Gedung Kempo Prov NAD (628 m2) (lanjutan)	Provinsi NAD	1.000.000.000	1 paket	2.498.265.000	1 Paket					
		4 Bantuan Pembangunan Fasilitas atau Lapangan Olahraga Masyarakat	Provinsi NAD	300.000.000	1 paket							
		5 Bantuan Pembangunan Fasilitas/Lapangan Olahraga Pelajar dan Mahasiswa	Provinsi NAD	300.000.000	1 paket							
		6 Pembangunan Gedung Hall Olahraga Serbaguna LHONGRAYA (5000m2)tahap I	Provinsi NAD	11.750.000.000	1 paket							
		7 Pengembangan dan Peningkatan Sport Center Unsyiah	Provinsi NAD	1.995.000.000	700 M2							
		8 lanjutan rehabilitasi kolam renang tirta raya	Provinsi NAD	4.100.000.000	1 paket							
		9 lanjutan rehabilitasi stadion harapan bangsa	Provinsi NAD	2.650.000.000	1 paket							
		10 Pengadaan Meubiler Gedung Pemuda Provinsi NAD	Provinsi NAD	300.000.000	1 paket							
		11 Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 2	Provinsi NAD	15.000.000	1 unit							
		12 Pengadaan Mobil Dinas Pick-Up Double Cabin untuk BPS Provinsi NAD	Provinsi NAD	250.000.000	1 unit							
		13 Rehabilitasi Lapangan Sepak Bola	Kab. Aceh Utara			500.000.000	3 paket					
		14 Pembangunan Lapangan Sepak Bola Trienggadeng	Kab. Pidie			1.000.000.000	1 paket					
PEREKONOMIAN				784.751.129.000		840.415.620.000						
	PERTANIAN			285.823.569.000		84.319.560.000						
		A TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA		86.551.300.000		17.970.000.000						
		1 Pembangunan lining jaringan irigasi tingkat usaha tani	Provinsi NAD	4.185.000.000	31.000 M							
		2 Pembangunan Jalan Usaha Tani	Provinsi NAD	-	-							
		3 Rehab Saluran Air Tingkat Usaha Tani	Provinsi NAD	2.162.500.000	4.325 Ha							
		4 Rehabilitasi Lahan Sawah	Provinsi NAD	7.000.000.000	2.000 Ha							
		5 Pengembangan Padi Sawah / Agroinput	Provinsi NAD	8.243.200.000	6.144 Ha							
		6 Pencetakan sawah baru	Provinsi NAD	5.725.000.000	1.145 Ha							
		7 Rehabilitasi Lahan Tegalan (palawija/sayuran)	Provinsi NAD									
		8 Pengembangan tegalan (palawija/sayuran)	Provinsi NAD	110.200.000	49 Ha							
		9 Pembangunan/Rehabilitasi Balai Benih Utama (BBU), Balai Benih Induk (BBI) dan BPP Plus	Provinsi NAD	29.450.000.000	14 Unit	5.400.000.000	2 Unit					
		10 Pembangunan Gudang dan Mesin RMU	Provinsi NAD	187.400.000	2 Unit	8.000.000.000	8 Unit					
		11 Pembangunan Balai Peremuan Petani	Provinsi NAD	3.240.000.000	12 Unit	-	-					
		12 Pembangunan Gedung Kantor Karantina Tumbuhan	Provinsi NAD	1.000.000.000	1 Unit	-	-					
		13 Pengadaan alat mesin pertanian	Provinsi NAD									
		14 Pengadaan Gudang Alsiotan dan Saprotan	Provinsi NAD	6.331.000.000	22 Unit							
		15 Pendidikan dan pelatihan penyuluh pendamping	Provinsi NAD	310.000.000	537 Orang							
		16 Penataan/Penguatan kelembagaan petani	Provinsi NAD	482.000.000	263 Paket	-	-					
		17 Bantuan Pembiayaan Pertanian Melalui LKM	Provinsi NAD	17.500.000.000	32 Paket	1.000.000.000	100 Paket					
		18 Penelitian dan Pengembangan Teknologi	Provinsi NAD	-	-							
		19 Pengembangan Terminal Agribisnis	Provinsi NAD	625.000.000	1 Paket							
		20 Pengembangan Kawasan Tanaman Pangan dan Hortikultura	Provinsi NAD	-	-							
		21 Balai Pengujian dan Sertifikasi Benih Rusak Ringan	Provinsi NAD									
		22 Pencetakan sawah baru Cot Trieng Muara Satu	Kota Lhokseumawe			1.925.000.000	350 Ha					
		23 Pencetakan sawah baru Alueliem Blang Mangat	Kota Lhokseumawe			825.000.000	150 Ha					
		24 Pembuatan SID pencetakan sawah baru	Aceh Utara			270.000.000	90 Ha					
		25 Pencetakan sawah baru	Aceh Utara			550.000.000	100 Ha					
			B PERKEBUNAN			75.541.000.000		14.819.160.000				
		1 Pembangunan jalan produksi	Provinsi NAD	-	-							
		2 Rehabilitasi Kantor	Provinsi NAD									
		3 Rehabilitasi, intensifikasi, penanaman, perawatan dan pengembangan tanaman perkebunan (kelapa sawit, kakao, kelapa, karet)	Provinsi NAD	47.883.000.000	10508 Ha							
		4 Pengembangan Kelapa Sawit (Lanjutan)	Simeuleu	-	0	2.750.000.000	1 Paket					
		5 Pemeliharaan Tanaman Sawit Tahun II (Lanjutan)	Nagan raya			3.500.000.000	1 Paket					
		6 Pemeliharaan Tahun II Tanaman Kehutanan (Lanjutan)	Nagan raya			168.480.000	1 Paket					
		7 Pemeliharaan Tanaman Kakao Rakyat (Lanjutan)	Nagan raya			1.980.000.000	1 Paket					
		8 Pemeliharaan Tanaman kelapa Sawit TBM tahun I (Lanjutan)	Aceh Barat			1.750.000.000	1 Paket					
		9 Pemeliharaan Tahun II Tanaman Kehutanan (Lanjutan)	Aceh Barat			140.400.000	1 Paket					
		10 Pemeliharaan K. sawit (P2) Kec. Peulimbang	Bireun			500.000.000	500 Ha					
		11 Pemb. Jalan akses ke Perkebunan Kelapa sawit	Bireun			2.000.000.000	2.000 m					
		12 Pengembangan Karet Rakyat	Aceh Barat			2.000.000.000	1 Paket					
		13 Penyediaan bibit tanaman (kelapa sawit dan Kakao)	Provinsi NAD									
		14 Pendidikan, pelatihan fasilitator dan penyuluh pendamping	Provinsi NAD	370.000.000	110 Orang							
		15 Pendidikan dan pelatihan masyarakat	Provinsi NAD	585.000.000	165 Orang							
		16 Peralatan Pengolahan Hasil Kebun Rakyat	Provinsi NAD	23.698.000.000	2 Paket							
		17 Pembangunan Gedung Lab Analisa Kualitas Hasil Produksi	Provinsi NAD	2.000.000.000	2 Paket							
		18 Kantor Operasional Pengembangan Kawasan Agribisnis Perkebunan Sawit (100 M2)	Provinsi NAD	1.005.000.000	4 Unit							
		19 Penelitian dan Pengembangan Teknologi	Provinsi NAD	-	-							
		20 Pembangunan Experimental Farm	Provinsi NAD	-	-							
		21 Bantuan Langsung Masyarakat untuk Pemulihan dan Pengembangan Ekonomi bidang Perkebunan (Revolving)	Provinsi NAD	-	-							

**RENCANA KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
TAHUN 2007 - 2009**

BIDANG	PROGRAM UTAMA	SUB BIDANG / KEGIATAN	LOKASI	2007		2008		2009		KETERANGAN
				NILAI (RUPIAH)	VOLUME	NILAI (RUPIAH)	VOLUME	NILAI (RUPIAH)	VOLUME	
		22 Rehabilitasi Kebun Kopi Rakyat	Gayo Lues			9.710.000	1.000 Ha			
		23 Rehabilitasi Kebun kakao Rakyat	Gayo Lues			8.360.000	1.000 Ha			
		24 Pengembangan Jernang (lanjutan)	Bener Meriah			2.500.000	1.000 Ha			
		25 Rehabilitasi Kebun Kopi Rakyat (lanjutan)	Bener Meriah			9.710.000	1.000 Ha			
		C PETERNAKAN		55.232.450.000		47.000.000.000				
		1 Restocking ternak (besar, kecil, unggas)	Provinsi NAD	29.222.000.000	5935 Ekor					
		2 Pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan menular	Provinsi NAD	296.750.000	5935 Ekor					
		3 Pelayanan Inseminasi Buatan	Provinsi NAD	131.000.000	11870 Dosis					
		4 Pembangunan Poskeswan dan gudang fasilitas IB	Provinsi NAD	1.682.000.000	7 Unit					
		5 Pembangunan pasar hewan	Provinsi NAD	250.000.000	1 Unit					
		6 Tempat Penjualan daging	Provinsi NAD	150.000.000	1 Unit					
		7 Pembangunan tempat/Rumah pemotongan ternak	Provinsi NAD	412.000.000	2 Unit					
		8 Pembangunan BPP, gedung karantina hewan dan laboratorium	Provinsi NAD	1.440.000.000	2 Unit					
		9 Pembangunan Rumah Paramedis	Provinsi NAD	511.200.000	6 Unit					
		10 Pembangunan Kandang Isolasi, penggemukan Ternak dan kandang produksi ternak unggas	Provinsi NAD	1.318.400.000	11 Unit					
		11 Pengadaan Tanah dan pembangunan Laboratorium Balai Penyidikan Penyakit Veteriner Lab Type A	Provinsi NAD	6.400.000.000	10.000 M					
		12 Pengadaan Storage N2 Cair Lengkap	Provinsi NAD	1.800.000.000	1 Paket					
		13 Peningkatan kegiatan laboratorium dan obat-obatan poskeswan	Provinsi NAD	250.000.000	6					
		14 Pelatihan penyuluh dan petugas inseminator	Provinsi NAD	2.352.000.000	94 Klip					
		15 Pelatihan Petani ternak penerima BPLM	Provinsi NAD	100.000.000	50 Orang					
		16 BPLM Kandang Ternak Pola Kemitraan	Provinsi NAD	1.430.000.000	22 Paket					
		17 Pengembangan Kawasan Peternakan	Provinsi NAD	7.487.100.000	1 Kwsn	42.000.000.000	6 Kwsn			
		18 Pembinaan Breeding Center	Provinsi NAD	-	-	5.000.000.000	1 Kwsn			
		D KEHUTANAN		68.498.819.000		4.530.400.000				
		1 Rehabilitasi fasilitas kantor dinas kehutanan provinsi	Provinsi NAD							
		2 Pengukuhan Kawasan Hutan (Tata Batas, Rekonstruksi, orientasi dan Pemeliharaan batas)	Provinsi NAD	60.000.000	4 Km	-	-			
		3 Pengembangan Database Kehutanan dan Pelatihan Sistem Informasi Kehutanan	Provinsi NAD	256.460.000	1 Paket	-	-			
		4 Rehabilitasi/Pemeliharaan Hutan Alam dan Lahan	Provinsi NAD	9.856.000.000	961 Ha	-	-			
		5 Peningkatan Usaha Masyarakat Di sekitar kawasan hutan	Provinsi NAD	11.403.634.000	36 Klip	-	-			
		6 Rehabilitasi/Pemeliharaan Hutan Pantai dan Mangrove	Provinsi NAD	21.233.000.000	6.662 Ha	-	-			
		7 Peningkatan kapasitas kelembagaan lokal	Provinsi NAD	2.750.000.000	3 Paket	-	-			
		8 Rehabilitasi Hutan kota	Provinsi NAD	1.577.000.000	36 Ha	-	-			
		9 Restorasi kawasan bufferzone	Provinsi NAD	1.000.000.000	79 Ha	-	-			
		10 Transplantasi terumbu karang	Provinsi NAD							
		11 Bantuan Pembangunan Laboratorium Klimatologi Lapangan	Provinsi NAD	300.000.000	1 Paket	-	-			
		12 Perbaikan dan Pengembangan fasilitas Ekowisata (Wilayah Wisata)	Provinsi NAD	2.675.000.000	3 Paket	-	-			
		13 Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu	Provinsi NAD	7.030.000.000	7 Kab	-	-			
		14 Penghijauan ReservoarWaduk Alue Baroh Desa Klip	Provinsi NAD	1.045.000.000	1 Paket	-	-			
		15 Pengembangan Hutan Rakyat	Provinsi NAD	9.312.725.000	13 Kab					
		16 Pemeliharaan Tahun II Tanaman Kehutanan (Lanjutan)	Simeuleu	-	-	140.400.000	1 Paket			
		17 Penanaman kelapa sawit pola kawasan di kecamatan Panga (P0)(lanjutan)	Aceh Jaya			1.800.000.000	1 Paket			
		18 Penyediaan bibit kelapa sawit lanjutan TA. 2007	Aceh Jaya	-	-	590.000.000	1 Paket			
		19 Pemeliharaan kelapa Sawit pola kawasan di kecamatan Sampoinet (P1)(lanjutan)	Aceh Jaya	-	-	2.000.000.000	1 Paket			
PERIKANAN				203.002.000.000		666.388.060.000				
		A PERIKANAN TANGKAP		135.486.000.000		533.994.530.000				
		1 Pembuatan Boat Nelayan	Provinsi NAD	33.080.000.000	139 Unit					
		2 Pengadaan Alat Tangkap	Provinsi NAD							
		3 Pelabuhan Perikanan	Provinsi NAD	35.389.000.000	1 Unit	315.000.000.000	1 Unit			
		- Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP)	Provinsi NAD	43.216.000.000	6 Unit	208.000.000.000	7 Unit			
		- Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)	Provinsi NAD	18.547.000.000	13 Unit	-	-			
		- Pelabuhan Perikanan lebih kecil dari PPI	Provinsi NAD	2.222.000.000	5 Unit	-	-			
		4 Galangan Kapal	Provinsi NAD							
		5 Pembangunan Solar Packed Dealer Nelayan (SPDN)	Provinsi NAD	37.000.000	22 Unit					
		6 Pengadaan GPS dan Fishfinder	Provinsi NAD	900.000.000	20 Paket	-	-			
		7 Pembuatan Rumpun	Provinsi NAD	2.095.000.000	9 Unit	-	-			
		8 Bagan Apung	Provinsi NAD	-	0			1 Paket		
		9 Pembangunan PPI Bakongan	Aceh Selatan			9.000.000.000	1 Paket			
		10 Pengawasan PPI Bakongan	Aceh Selatan			120.000.000	1 Paket			
		11 Perencanaan PPI Bakongan	Aceh Selatan			74.530.000	1 Paket			
		12 Pembangunan Pabrik Es Meukek	Aceh Selatan			450.000.000	1 Paket			
		13 Pembangunan Pabrik Es Lab. Haji	Aceh Selatan			450.000.000	1 Paket			
		14 Pembangunan Pabrik Es Sawang	Aceh Selatan			450.000.000	1 Paket			
		15 Pembangunan Pabrik Es Bakongan	Aceh Selatan			450.000.000	1 Paket			

**RENCANA KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
TAHUN 2007 - 2009**

BIDANG	PROGRAM UTAMA	SUB BIDANG / KEGIATAN	LOKASI	2007		2008		2009		KETERANGAN
				NILAI (RUPIAH)	VOLUME	NILAI (RUPIAH)	VOLUME	NILAI (RUPIAH)	VOLUME	
PENGEMBANGAN USAHA		B PERIKANAN BUDIDAYA		52.069.000.000		90.293.530.000				
		1 Rehabilitasi Tambak	Provinsi NAD	27.019.000.000	1388 Ha	76.800.000.000	3.840 Ha			
		2 Agroinput Tambak	Provinsi NAD	16.620.000.000	1388 Ha					
		3 Bantuan Hatchery	Provinsi NAD	5.551.000.000	41 Unit	-	-			
		4 Pembangunan Keramba Jaring Apung	Provinsi NAD	1.925.000.000	48 Unit					
		5 Budidaya Rumput Laut	Provinsi NAD	954.000.000	7 Paket	-	-			
		6 Keramba Jaring Apung	Simeuleu			2.500.000.000	1 Paket			
		7 Rehabilitasi Tambak Rakyat	Aceh Timur			10.000.000.000	500 Ha			
		8 Budidaya Keramba Apung Utik 5 kecamatan	Aceh Timur			993.530.000	15 Unit			
		C PENGOLAHAN IKAN		12.492.000.000		23.600.000.000				
		1 Pabrik Es	Provinsi NAD	4.000.000.000	2 Unit	3.600.000.000	6 Unit			
		2 Pengadaan Cold Storage	Provinsi NAD							
		3 Unit Pengolahan Ikan (UPI)/Pengembangan Sentra Pengolahan Ikan (SPI)	Provinsi NAD	8.492.000.000	1 Paket	20.000.000.000	10 Paket			
		4 Pembangunan Laboratorium Perikanan	Provinsi NAD	-	0	-	1 Paket			
		D FASILITAS PENUNJANG LAINNYA		2.955.000.000		18.500.000.000				
		1 Fasilitas Lab SUPM Ladong	Provinsi NAD	555.000.000	1 Paket	-	-			
		2 Fasilitas Lab GIS Marine Centre (Dinas Kelautan dan Perikanan)	Provinsi NAD	800.000.000	1 Paket	-	-			
		3 Pembangunan Pasar Ikan	Provinsi NAD	-	0	16.000.000.000	7 Paket			
		4 Pemulihan Kembali Kegiatan Ekonomi Masyarakat Bidang Perikanan	Provinsi NAD	-	0	1.000.000.000	100 Paket			
		5 Penelitian dan Pengembangan Teknologi Perikanan dan Kelautan	Provinsi NAD	-	0	1.000.000.000	2 Paket			
		6 Pengembangan Kelembagaan	Provinsi NAD	1.600.000.000	11 Paket	500.000.000	5 Paket			
				295.925.560.000		89.708.000.000				
		A. INDUSTRI		44.951.000.000		9.000.000.000				
		1 Bantuan Langsung Masyarakat Industri	Provinsi NAD							
		2 Peningkatan sarana dan prasarana industri pada pelabuhan Malahayati	Provinsi NAD							
		3 Pilot Project Pengembangan Industri Garam Rakyat	Provinsi NAD	1.000.000.000	2 Lokasi	-	-			
		4 Fasilitas Pendukung industri	Provinsi NAD			-	-			
		5 Pengadaan peralatan Pendukung Alat Produksi dan penyelesaian bangunan gedung batik Aceh serta pengembangan desa batik Aceh	Provinsi NAD	4.650.000.000	3 Paket	-	-			
		6 Peningkatan Kualitas Produk pada Sentra Industri dan Pengembangan Kerajinan Aceh Besar	Provinsi NAD	1.810.000.000	1 Paket	-	-			
		7 BLM Penguatan Perajin Sentra Dan Non Sentra Industri	Provinsi NAD	16.011.000.000	24 Paket					
		8 BLM Modal LKM	Provinsi NAD	16.080.000.000	43 Paket					
		9 Bantuan Pengembangan Industri Oleh Dekranas	Provinsi NAD	250.000.000	1 Paket	-	-			
		10 Bantuan Pengembangan Ekonomi Produktif	Provinsi NAD	4.000.000.000	4 Kab	-	-			
		11 Pembangunan Pabrik Es	Provinsi NAD	1.150.000.000	3 Paket	-	-			
		12 Pengembangan Sarana Pengolahan Komoditi	Provinsi NAD	-	-					
		13 Pengembangan Sentra Perajin Industri	Provinsi NAD	-	-	9.000.000.000	5 Paket			
		B. PERDAGANGAN		56.164.000.000		4.500.000.000				
		1 Bantuan Modal Bergulir Bagi Grosir Dan Pedagang Pasar	Provinsi NAD		-	-	-			
		2 Pengadaan Cold Storage & Truck Cold Storage	Provinsi NAD	600.000.000	1 Unit					
		3 Pasar Induk/Grosir/tradisional	Provinsi NAD	48.314.000.000	11 Unit	-	-			
		4 Rehabilitasi/Pembangunan Gudang Transito	Provinsi NAD	5.000.000.000	1 Paket	-	-			
		5 Pembangunan Pasar dan Pertokoan di Labui	Provinsi NAD	2.010.000.000	1.000 M2	-	-			
		6 Pembangunan Halte di Labui	Provinsi NAD	240.000.000	3 Unit					
		7 Pembangunan Pasar Lambaro (Lanjutan)	Aceh Besar			4.500.000.000	m2 2.000			
		C. TENAGA KERJA		20.794.660.000		2.500.000.000				
		1 Jasa Pelatihan	Provinsi NAD	11.324.000.000	1.540 Orang	-	-			
		2 Pembangunan/Rehab Balai Latihan Kerja	Provinsi NAD	7.332.000.000	4 Paket					
		3 Peralatan Balai Latihan Kerja	Provinsi NAD	1.500.000.000	2 Paket					
		4 Pekerja Cash for Work	Provinsi NAD							
		5 Pelatihan Pegawai	Provinsi NAD							
		6 Pembangunan Jalan di Lingkungan BLK	Provinsi NAD	520.000.000	1 Paket	-	-			
		7 Informasi Bursa Kerja	Provinsi NAD	118.660.000	1 Paket	-	-			
		8 Bantuan Modal Bagi Tenaga Kerja Terlatih melalui LKM	Provinsi NAD	-	-					
		9 Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja	Provinsi NAD	-	-					
		10 Pembangunan Kantor dan Workshop KLIK Aceh Selatan (Lanjutan)	Provinsi NAD	-	-	2.500.000.000	1 Paket			

**RENCANA KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
TAHUN 2007 - 2009**

BIDANG	PROGRAM UTAMA	SUB BIDANG / KEGIATAN	LOKASI	2007		2008		2009		KETERANGAN
				NILAI (RUPIAH)	VOLUME	NILAI (RUPIAH)	VOLUME	NILAI (RUPIAH)	VOLUME	
KELEMBAGAAN DAN HUKUM	KELEMBAGAAN DAERAH	D. KOPERASI DAN UKM		142.928.900.000		39.808.000.000				
		1 Pemberdayaan Koperasi dan UKM Melalui LKM disetiap kecamatan	Provinsi NAD	10.000.000.000	65 Unit	25.500.000.000	85 Unit			
		2 Bantuan Modal LKM untuk Usaha Masyarakat dan BLM aset produktif	Provinsi NAD							
		3 Penguatan Kelembagaan Aceh Micro Finance	Provinsi NAD	913.200.000	1 Unit	-	-			
		4 Pengembangan AMF Center dan perwakilannya di Kab/Kota	Provinsi NAD	110.000.000	11 Paket	6.300.000.000	21 Paket			
		5 Bantuan Teknis dan manajemen LKM	Provinsi NAD	6.350.000.000	100 Paket	-	-			
		6 Bantuan Modal Usaha Penghuni Huntara	Provinsi NAD	9.992.000.000	1 Paket	-	-			
		7 Pendirian Kelembagaan Koperasi Terpadu	Provinsi NAD	3.669.000.000	1 Paket	-	-			
		8 Bantuan Langsung Masyarakat Melalui Koperasi	Provinsi NAD	90.000.000.000	60 Unit	-	-			
		9 Penyelenggaraan Program Pelatihan	Provinsi NAD	4.698.000.000	2.016 Orang	-	-			
		10 Pelatihan LKM	Provinsi NAD	900.000.000	400 Orang					
		11 Penyehatan LKM dan Penegakan Hukum	Provinsi NAD	2.168.000.000	1 Paket					
		12 Pengembangan Pusat Distribusi Koperasi (UKM Trading House)	Provinsi NAD	250.000.000	1 Paket					
		13 Pengembangan Pusat Pasar Ekspor	Provinsi NAD	4.547.200.000	1 Paket					
		14 Penguatan IOO (Investor outreach Office)	Provinsi NAD	7.986.500.000	1 Paket	5.000.000.000	1 Paket			
		15 Penguatan Klinik Kemasan dan Merk UKM	Provinsi NAD	1.345.000.000	1 Paket					
		17 Bantuan Pondok Kerja, Perlatan, dan Modal Kerja untuk Pengembangan (6 KUB @125	Aceh Jaya			750.000.000	6 Klp			
		18 Pembangunan Sarana dan Prasarana UPTD Nilam di Teunom	Aceh Jaya			1.150.000.000	1 Paket			
		19 Bantuan untuk Penguatan dan Pengembangan Desa Batik (Lanjutan)	Banda Aceh			1.108.000.000	1 Paket			
		E. PARIWISATA		31.087.000.000		33.900.000.000				
		1 Pemugaran Kawasan Wisata dan Pengembangan Sarana/Prasarana Objek Wisata	Provinsi NAD	11.062.000.000	8 Paket					
		2 Pelatihan Bidang Pariwisata	Provinsi NAD	4.250.000.000	8 Paket	-	-			
		3 Penyelenggaraan Pesta Rakyat	Provinsi NAD	2.000.000.000	4 Paket	-	-			
		4 Pengembangan dan studi pengembangan wisata	Provinsi NAD	7.150.000.000	57 Paket	-	-			
		5 Pengembangan Usaha Ekonomi Pariwisata	Provinsi NAD	6.625.000.000	156					
		6 Pengembangan Kawasan Wisata (Pulau Banyak, Danau Laut Tawar, Anak Laot, Ujung Blang, Gosong Telaga)	Lhokseumawe, Aceh Tengah, Singkil			29.400.000.000	7 Paket			
		7 Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Bidang Pariwisata				4.500.000.000	5 Paket			
				606.483.148.000		154.721.961.600				
				327.154.872.000		145.721.961.600				
		A. Pemulihan Sarana Prasarana Pemerintah		198.638.514.000		27.221.961.600				
		1 Kantor Kepala Daerah	Provinsi NAD	20.400.771.000	2 unit					
		2 Dinas / Badan	Provinsi NAD	58.371.097.000	14 unit					
		3 Pendopo / Meuligo	Provinsi NAD	10.014.781.000	3 unit					
		4 Kantor Kecamatan	Provinsi NAD	29.088.502.000	4 unit					
		5 Rumah Dinas Kecamatan	Provinsi NAD	357.698.000	1 unit					
		6 Kantor Kelurahan	Provinsi NAD	52.368.872.000						
		7 Pembangunan Meunasah dan/atau Balee	Provinsi NAD	28.036.793.000	7 paket					
		8 PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR PEMERINTAH								
		- Pemb. Gedung DPRD (Lanjutan 30%)	Aceh Jaya			1.795.802.500	1 Paket			
		- Pemb. Gedung Kantor Bupati (Lanjutan 50 %)	Aceh Jaya			5.076.209.500	1 Paket			
		- Pemb. Gedung Kantor Bappeda (Lanjutan 50 %)	Aceh Jaya			1.467.634.000	1 Paket			
		- Pemb. Rumah Dinas Bupati	Aceh Jaya			3.500.000.000	1 Paket			
		9 Pembangunan gedung induk Kantor Bupati Aceh Besar	Aceh Besar			4.850.000.000	1 Paket			
		10 Rehap Kantor Bapeda Kab. Pidie	Pidie			12.315.600	1 Paket			
		11 Penataan Balee Musapat Desa Ladang, Susoh	Aceh Barat Daya			800.000.000	1 Paket			
		12 Penataan Balee Musapat Desa Pulau Kayu, Susoh	Aceh Barat Daya			800.000.000	1 Paket			
		13 Penataan Balee Musapat Desa Sejahtera, Manggeng	Aceh Barat Daya			800.000.000	1 Paket			
		14 Revitalisasi Balee Musapat Desa Lama Tuha (Kompl. Perumahan Tsunami)	Aceh Barat Daya			800.000.000	1 Paket			
		15 Balai Musapat Desa Kolok (Perum Relokasi)	Simelue			960.000.000	1 Paket			
		16 Balai Musapat Desa Badegong, Teupah Selatan	Simelue			960.000.000	1 Paket			
		17 Pemb. Gdg. Ktr. Dinas Perhubungan Kebudayaan dan Pariwisata	Aceh Barat			1.200.000.000	1 Paket			
		18 Pemb. Gdg. Ktr. Pos Indonesia Sinabang	Simelue			700.000.000	1 Paket			
		19 Pemb. Gdg. Ktr. BPM	Simelue			1.500.000.000	1 Paket			
		20 Pemb. Gdg. Ktr. Dispenda	Simelue			2.000.000.000	1 Paket			
		B. Peningkatan Profesionalisme Aparat Pemda		16.318.434.000		800.000.000				
		1 Pemberdayaan dan Fasilitas Aparat untuk menjalani fungsi pemerintahan (rencana daerah, keuangan daerah, pelayanan umum)	Provinsi NAD	12.968.434.000	11 paket					
		2 Penanganan masalah administrasi Kepegawaian	Provinsi NAD	300.000.000						
		3 Peningkatan Kapasitas Pemerintah untuk Mitigasi Bencana	Provinsi NAD	3.050.000.000						
		4 Peningkatan SDM Aparatur	Aceh Barat			200.000.000	1 Paket			
		5 Pengembangan SDM Aparatur	Nagan Raya			200.000.000	1 Paket			
		6 Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	Aceh Barat Daya			200.000.000	1 Paket			
		7 Pengembangan Kapasitas SDM Aparatur	Simelue			200.000.000	1 Paket			

**RENCANA KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
TAHUN 2007 - 2009**

BIDANG	PROGRAM UTAMA	SUB BIDANG / KEGIATAN	LOKASI	2007		2008		2009		KETERANGAN
				NILAI (RUPIAH)	VOLUME	NILAI (RUPIAH)	VOLUME	NILAI (RUPIAH)	VOLUME	
		C. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan PEMDA - SPADA		94.712.024.000		107.000.000.000				
		1 Pemantapan kelembagaan Pemerintah Daerah menurut potensi dan jumlah penduduk	Provinsi NAD	11.200.446.000	15 paket					
		2 Penataan, Pemantapan, dan Monev Organisasi Pemda	Provinsi NAD			11.000.000.000	2 paket			
		3 Penataan Sistem Komunikasi dan kehumasan daerah (media centre)	Provinsi NAD	4.648.650.000	3 paket					
		4 Penataan dan peningkatan kapasitas pemerintah kecamatan/ mukim/gampong	Provinsi NAD	1.000.000.000	1 paket					
		5 Penyusunan Rencana Perbaikan Sisdur Kerja lembaga Pemerintah	Provinsi NAD	1.350.000.000	1 paket					
		6 Bantuan Pemerintah Daerah - SPADA	Provinsi NAD	76.512.928.000	19 paket	96.000.000.000	19 paket			
		D. Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemda		3.880.000.000		3.000.000.000				
		1 Peningkatan Kapasitas Legislatif dalam pengelolaan Keuangan	Provinsi NAD	3.000.000.000	3 paket	3.000.000.000	1 paket			
		2 Penataan Keuangan Daerah dan Pengelolaannya	Provinsi NAD	880.000.000	1 paket					
		E. Peningkatan Kerjasama Antar Daerah		1.350.000.000		-				
		Optimalisasi Kerjasama antara Daerah	Provinsi NAD	1.350.000.000	1 paket					
		F. Penataan Administrasi Wilayah Pemerintah		800.000.000		-				
		Pendataan Administrasi Batas Wilayah Pemda	Provinsi NAD	800.000.000	1 paket					
		G. Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial		1.014.900.000		-				
		Penguatan dan Fasilitas lembaga Agama, Sosial, dan Adat pada tingkat Kecamatan/Mukim/Gampong	Provinsi NAD	1.014.900.000						
		H. Penyempurnaan dan Penguatan Kelembagaan Demokrasi		7.441.000.000		2.000.000.000				
		Dukungan terhadap penataan &penyiapan Kepala Daerah & Legislatif Daerah	Provinsi NAD	7.441.000.000	7 paket	2.000.000.000	1 paket			
		I. Peraturan Perundang-Undangan (Desentralisasi/OTDA)		3.000.000.000		5.700.000.000				
		Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang ada di Aceh	Provinsi NAD	3.000.000.000	4 paket	5.700.000.000	1 paket			
HUKUM				80.220.160.000		2.000.000.000				
		A. Pembangunan Gedung Kantor		64.485.410.000		2.000.000.000				
		A.1. Rehabilitasi dan pembangunan sarana dan prasarana hukum -Instansi Kejaksaan Agung	Provinsi NAD	11.390.180.000		-				
		1 Kejati Provinsi NAD	Provinsi NAD	1.956.362.000	1 unit					
		2 Kejari	Provinsi NAD	7.309.139.000	5 unit					
		3 Rumah Dinas	Provinsi NAD	2.124.679.000	2 unit					
		A.2. Rehabilitasi dan pembangunan sarana dan prasarana hukum -Dirjen Pemasyarakatan		31.217.634.000		-				
		Lapas/Rutan	Provinsi NAD	31.217.634.000	5 unit					
		A.3 Rehabilitasi dan pembangunan sarana dan prasarana hukum -Mahkamah Agung		21.877.596.000		2.000.000.000				
		1 Pengadilan Tinggi	Provinsi NAD	518.607.000	2 unit					
		2 Pengadilan Negeri/PTUN	Provinsi NAD	7.195.089.000	11 unit					
		3 Bangunan Mahkamah Syar'iyah	Provinsi NAD	10.091.904.000	5 unit					
		4 Peralatan Kantor	Provinsi NAD	3.381.785.000	4 paket					
		5 Pengadilan Militer	Provinsi NAD	690.211.000	1 unit					
		6 Pemb. Gdg. Rutan (Tahap III)	Simeulue			2.000.000.000	1 Paket			
		B. Pemberdayaan dan Pengembangan Institusi Hukum		15.734.750.000		-				
		1 Penelitian dan Pengembangan Hukum	Provinsi NAD	2.058.900.000	4 paket					
		2 Pengembangan Hukum Adat	Provinsi NAD	4.155.000.000	4 paket					
		3 Pengembangan Pusat Studi Hukum	Provinsi NAD	4.389.900.000	8 paket					
		4 Pendidikan dan Pelatihan Teknis Hukum dan HAM	Provinsi NAD	5.130.950.000	9 paket					
K3M				199.108.116.000		7.000.000.000				
		A. Refungsionalisasi Kelembagaan		182.621.538.000		7.000.000.000				
		A.1 Kominfo	Provinsi NAD	11.185.148.000		-				
		1 Gedung Kantor Dinas Kominfo		43.076.000	1 unit					
		2 Stasiun RRI	Provinsi NAD	4.172.499.000	7 unit					
		3 Stasiun Transmisi TVRI	Provinsi NAD	6.846.665.000	6 unit					
		4 Gedung PWI	Provinsi NAD	13.125.000	1 unit					
		5 Rumah Dinas	Provinsi NAD	109.783.000	1 unit					
		A.2 POLRI		94.739.203.000		7.000.000.000				
		1 Mapolda	Provinsi NAD	27.717.876.000	1 unit					
		2 Brimobda	Provinsi NAD	3.206.686.000	1 unit					
		3 Dit. Polair	Provinsi NAD	10.238.827.000	3 unit					
		4 Rumah Dinas (Aspol)	Provinsi NAD	14.564.620.000						
		5 Polsek	Provinsi NAD	1.834.962.000	3 unit					
		6 Pengadaan Material (Gedung)	Provinsi NAD	5.027.754.000						
		7 Pengadaan Peralatan dan Komlek	Provinsi NAD	32.148.478.000						
		8 Pemb. Asrama Polres Aceh Barat	Aceh Barat			5.000.000.000	1 paket			

**RENCANA KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
TAHUN 2007 - 2009**

BIDANG	PROGRAM UTAMA	SUB BIDANG / KEGIATAN	LOKASI	2007		2008		2009		KETERANGAN
				NILAI (RUPIAH)	VOLUME	NILAI (RUPIAH)	VOLUME	NILAI (RUPIAH)	VOLUME	
		9 Pemb. Asrama Polres dan Polsek Sinabang	Simeulue			2.000.000.000	1 paket			

**RENCANA KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
TAHUN 2007 - 2009**

BIDANG	PROGRAM UTAMA	SUB BIDANG / KEGIATAN	LOKASI	2007		2008		2009		KETERANGAN
				NILAI (RUPIAH)	VOLUME	NILAI (RUPIAH)	VOLUME	NILAI (RUPIAH)	VOLUME	
		A.3 TNI-AD		53.569.423.000		-				
		1 Korem / Kodim	Provinsi NAD	4.509.647.000	3 unit					
		2 Rumah Dinas	Provinsi NAD	3.679.256.000	3 unit					
		3 Kompi	Provinsi NAD	43.318.154.000	7 unit					
		4 Biaya Perencanaan dan Pengawasan	Provinsi NAD	2.062.366.000						
		A.4 TNI-AL		8.094.300.000		-				
		1 Bidang ALPAL								
		- Kenderaan	Provinsi NAD	1.374.219.000	1 paket					
		- Peralatan Lainnya	Provinsi NAD	5.076.283.000	11 unit					
		2 Rumah Sakit Sabang	Provinsi NAD	456.140.000	1 unit					
		3 Rumah Dinas	Provinsi NAD	1.187.658.000	3 unit					
		A.5 TNI-AU		15.033.464.000		-				
		1 Bidang Faskon	Provinsi NAD	1.010.000.000	1 paket					
		2 Lanud Maimun Saleh	Provinsi NAD	3.667.650.000	1 unit					
		3 Lanud Iskandar Muda	Provinsi NAD	2.448.614.000	1 unit					
		4 Paskhas AU	Provinsi NAD	1.283.700.000	2 unit					
		5 Satrad	Provinsi NAD	6.163.500.000	2 unit					
		6 Pengawasan dan Perencanaan	Provinsi NAD	460.000.000	1 paket					
		B. Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Daerah		10.437.578.000		-				
		Mobilisasi Pasukan POLRI	Provinsi NAD	10.437.578.000	1 paket					
		C. Program Pengembangan Ketahanan Masyarakat		6.049.000.000		-				
		Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik		6.049.000.000		-				
		1 Perencanaan dan sosialisasi kegiatan	Provinsi NAD	2.695.000.000	6 paket					
		2 Dialog antar komponen masyarakat	Provinsi NAD	2.539.000.000	8 paket					
		3 Kerjasama dengan media	Provinsi NAD	815.000.000	3 paket					
TOTAL				7.180.552.358.975		7.704.340.308.600		2.927.718.999.000		

Sumber : BRR Nias (Juni 2007) dan Analisis Tim P3B Bappenas, 2007

REALISASI DAN RENCANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI (DANA OFF BUDGET)
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
TAHUN 2004 - 2009

BIDANG	PROGRAM UTAMA	SUB BIDANG / KEGIATAN	LOKASI	2004		2005		2006		2007		2008		2009		TOT
				COMITTED (RUPIAH)	DISBURSED (RUPIAH)	COMITTED (RUPIAH)	DISBURSED (RUPIAH)	COMITTED (RUPIAH)	DISBURSED (RUPIAH)	COMITTED (RUPIAH)	DISBURSED (RUPIAH)	COMITTED (RUPIAH)	DISBURSED (RUPIAH)	COMITTED (RUPIAH)	DISBURSED (RUPIAH)	
PERUMAHAN, PERMUKIMAN, PERTANAHAN, TATA RUANG, DAN LINGKUNGAN HIDUP	PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			25.161.199.600	-	3.535.990.560.000	1.292.862.862.400	1.157.712.084.000	1.317.508.319.200	382.118.679.600	349.436.985.200	-	-	-	-	5.101.462.523.200
				25.161.199.600	-	2.778.994.559.200	1.117.144.333.200	1.087.097.824.400	1.249.592.656.000	369.849.411.600	308.402.626.000	-	-	-	-	4.261.162.994.000
		1 Housing Development	NAD	25.161.199.600	-	2.445.840.330.000	1.030.717.657.600	1.080.601.952.800	1.178.141.797.200	369.849.411.600	274.380.892.000	-	-	-	-	3.921.452.914.400
		2 Housing Development; Other Housing and Community Amenities	NAD	-	-	211.440.426.000	52.429.484.400	6.495.871.600	44.772.977.600	-	34.021.728.800	-	-	-	-	217.936.297.600
		3 Housing Development; Water Supply; Transportation	NAD	-	-	94.629.452.000	7.112.860.400	-	26.677.884.000	-	-	-	-	-	-	94.629.452.000
		4 Housing Development; Water Supply; Waste Water Management	NAD	-	-	27.084.330.800	27.084.330.800	-	-	-	-	-	-	-	-	27.084.330.800
	TATA RUANG DAN LINGKUNGAN			-	-	750.996.000.800	175.318.529.200	70.614.239.600	67.915.660.400	12.289.268.000	41.034.364.400	-	-	-	-	839.899.528.400
		1 All SubSectors - Spatial Planning & Environment Protection	NAD	-	-	147.501.530.800	57.195.047.600	19.958.434.800	15.333.336.400	6.413.540.800	33.857.186.800	-	-	-	-	173.873.564.800
		2 Conservation of Natural Resources	NAD	-	-	151.064.763.600	12.903.138.000	4.529.500.400	6.793.510.000	-	-	-	-	-	-	155.594.264.000
		3 Conservation of Natural Resources; R & D Environmental Protection	NAD	-	-	146.436.400	34.914.000	47.840.000	47.840.000	-	-	-	-	-	-	194.276.400
		4 Conservation of Natural Resources; R & D Environmental Protection; All	NAD	-	-	-	-	4.355.482.400	-	-	-	-	-	-	-	4.355.482.400
		5 Conservation of Natural Resources; Spatial Planning and Agrarian Affairs	NAD	-	-	13.325.841.200	4.406.680.400	-	1.992.416.400	-	960.976.800	-	-	-	-	13.325.841.200
		6 Conservation of Natural Resources; Spatial Planning and Agrarian Affairs; R & D Environmental Protection	NAD	-	-	-	857.145.600	1.945.064.000	181.322.800	115.386.400	-	-	-	-	-	2.060.450.400
		7 R & D Environmental Protection	NAD	-	-	46.493.046.400	20.040.636.000	-	2.391.641.200	353.924.000	-	-	-	-	-	46.486.970.400
		8 Spatial Planning	NAD	-	-	105.815.511.200	67.804.662.400	9.316.702.000	13.807.553.200	-	21.215.200	-	-	-	-	115.132.213.200
		9 Spatial Planning and Agrarian Affairs	NAD	-	-	262.252.009.200	92.000.000	425.923.200	226.990.600	-	-	-	-	-	-	262.717.932.400
		10 Spatial Planning; R & D Environmental Protection	NAD	-	-	23.179.374.800	5.896.459.600	23.788.246.800	20.378.340.400	5.406.416.800	5.811.584.800	-	-	-	-	52.365.038.400
		11 Spatial Planning; SubSector to be defined - Spatial Planning & Environment Protection	NAD	-	-	1.012.000.000	112.957.600	-	899.042.400	-	-	-	-	-	-	1.012.000.000
		12 SubSector to be defined - Spatial Planning & Environment Protection	NAD	-	-	6.174.488.000	6.174.488.000	6.247.066.800	5.863.666.000	-	383.400.800	-	-	-	-	12.421.554.800
INFRASTRUKTUR				38.440.884.400	7.011.255.600	6.522.670.276.800	2.545.171.940.800	1.846.742.827.200	951.606.040.000	106.448.462.000	180.871.898.800	276.000.000	276.000.000	-	-	8.514.854.444.400
		1 All SubSectors - Infrastructure, Housing & Land	NAD	-	-	219.840.522.800	172.278.408.800	301.720.771.200	74.263.301.600	10.779.253.600	7.580.094.400	-	-	-	-	563.770.176.400
		2 Fuel and Energy	NAD	-	-	484.665.200	392.665.200	4.780.522.400	205.583.200	-	108.753.200	-	-	-	-	5.265.187.600
		3 Housing Development; All SubSectors - Infrastructure, Housing & Land	NAD	-	-	213.959.597.600	213.959.597.600	-	-	58.511.162.800	48.656.104.400	-	-	-	-	272.470.760.400
		4 Housing Development; Other Housing and Community Amenities	NAD	-	-	186.135.494.800	102.284.956.400	1.446.543.600	54.997.701.200	92.000	55.200	-	-	-	-	187.582.130.400
		5 Housing Development; Other Housing and Community Amenities; Fuel and Energy	NAD	-	-	301.484.000	182.004.400	-	-	-	-	-	-	-	-	301.484.000
		6 Housing Development; R & D Housing and Community Amenities; Other Housing and Community Amenities	NAD	-	-	381.652.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	381.652.800
		7 Housing Development; SubSector to be defined - Infrastructure, Housing & Land	NAD	-	-	33.062.886.400	33.062.886.400	-	-	-	-	-	-	-	-	33.062.886.400
		8 Housing Development; Waste Management; Waste Water Management	NAD	-	-	110.371.976.800	110.371.976.800	-	-	-	-	-	-	-	-	110.371.976.800
		9 Housing Development; Waste Water Management	NAD	-	-	23.737.472.000	17.448.867.200	6.992.000.000	4.186.000.000	2.346.000.000	-	-	-	-	-	30.729.472.000
		10 Housing Development; Water Supply	NAD	-	-	355.541.792.400	202.675.576.800	62.752.960.800	60.044.536.000	7.542.693.600	86.468.776.000	-	-	-	-	425.837.446.800
		11 Housing Development; Water Supply; All SubSectors - Infrastructure, Housing & Land	NAD	-	-	38.772.618.000	-	-	38.772.618.000	-	-	-	-	-	-	38.772.618.000
		12 Housing Development; Water Supply; Fuel and Energy; Transportation;	NAD	-	-	56.620.645.600	6.488.143.600	-	3.843.125.200	-	-	-	-	-	-	56.620.645.600
		13 Housing Development; Water Supply; Irrigation and Flood Control/Coastal Protection; Fuel and Energy; Transportation; Waste Management; All SubSectors - Infrastructure, Housing & Land	NAD	-	-	-	-	183.539.981.600	-	-	-	-	-	-	-	183.539.981.600
		14 Housing Development; Water Supply; Other Housing and Community Amenities	NAD	-	-	387.861.098.000	123.852.874.800	26.202.234.800	12.595.867.200	5.721.194.800	677.202.800	-	-	-	-	419.784.527.600
		15 Housing Development; Water Supply; Waste Management	NAD	-	-	246.389.174.400	-	60.226.042.800	185.379.558.400	-	-	-	-	-	-	306.615.217.200
		16 Housing Development; Water Supply; Waste Water Management	NAD	-	-	7.639.496.000	3.978.126.000	-	-	771.263.600	205.638.400	-	-	-	-	7.639.496.000
		17 Irrigation and Flood Control/Coastal Protection	NAD	-	-	30.735.580.800	1.970.161.600	3.975.062.400	3.699.338.400	-	-	-	-	-	-	35.481.906.800
		18 Irrigation and Flood Control/Coastal Protection; Transportation	NAD	-	-	-	-	-	810.878.800	-	-	-	-	-	-	810.878.800
		19 Irrigation and Flood Control/Coastal Protection; Waste Water Management	NAD	-	-	5.379.856.400	5.379.856.400	-	-	-	-	-	-	-	-	5.379.856.400
		20 Other Housing and Community Amenities	NAD	-	-	140.492.344.400	115.414.414.000	9.176.668.800	4.556.842.800	17.507.600	23.487.600	-	-	-	-	149.086.120.000
		21 Other Housing and Community Amenities; Waste Water Management	NAD	-	-	1.094.800.000	-	-	-	-	1.094.800.000	-	-	-	-	1.094.800.000
		22 R & D Housing and Community Amenities	NAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		23 SubSector to be defined - Infrastructure, Housing & Land	NAD	-	-	137.827.398.800	24.090.246.000	20.989.625.200	21.369.511.600	5.892.406.800	7.948.993.200	-	-	-	-	164.709.430.800
		24 Transportation	NAD	-	-	2.761.484.245.200	503.526.598.400	826.436.671.600	236.253.865.600	-	18.387.442.000	-	-	-	-	3.587.520.916.000
		25 Waste Management	NAD	-	-	65.671.780.400	65.671.780.400	8.952.924.800	374.274.400	-	-	-	-	-	-	74.624.705.200
		26 Waste Management; Waste Water Management	NAD	-	-	8.329.054.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.329.054.400
		27 Waste Water Management	NAD	-	-	132.034.545.200	131.875.155.200	34.931.259.200	31.345.108.400	2.654.853.200	-	-	-	-	-	169.620.657.600
		28 Water Supply	NAD	7.011.255.600	7.011.255.600	728.881.233.200	479.414.014.800	220.654.603.200	86.241.296.800	1.582.105.600	3.424.405.600	-	-	-	-	958.129.197.600
		29 Water Supply; Other Housing and Community Amenities; Irrigation and Flood Control/Coastal Protection; Transportation; Waste Management; Waste Water Management	NAD	-	-	1.987.117.200	1.369.254.400	-	371.680.000	-	-	-	-	-	-	1.987.117.200
		30 Water Supply; Other Housing and Community Amenities; Waste Management	NAD	-	-	-	945.695.600	-	-	-	-	-	-	-	-	945.695.600
		31 Water Supply; R & D Housing and Community Amenities; Other Housing and Community Amenities; Waste Management	NAD	-	-	-	-	16.180.490.800	6.960.379.600	-	-	-	-	-	-	16.180.490.800
		32 Water Supply; Street Lighting	NAD	-	-	-	-	1.135.804.400	1.135.804.400	-	-	-	-	-	-	1.135.804.400
		33 Water Supply; SubSector to be defined - Infrastructure, Housing & Land	NAD	-	-	-	-	-	-	3.545.542.000	3.545.542.000	-	-	-	-	3.545.542.000
		34 Water Supply; Transportation	NAD	-	-	3.472.282.400	3.421.369.600	11.724.148.800	50.922.000	1.380.000.000	-	-	-	-	-	16.576.431.200
		35 Water Supply; Transportation; SubSector to be defined - Infrastructure, Housing & Land	NAD	-	-	690.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	690.000.000
		36 Water Supply; Waste Management	NAD	-	-	460.000.000	-	-	160.411.200	-	-	-	-	-	-	460.000.000
		37 Water Supply; Waste Management; Waste Water Management	NAD	-	-	48.703.705.200	21.458.871.200	2.323.000.000	7.526.023.200	3.260.480.000	127.604.000	-	-	-	-	54.287.185.200
		38 Water Supply; Waste Water Management	NAD	-	-	573.380.054.800	204.583.334.800	42.601.510.800	117.272.298.800	-	276.000.000	276.000.000	276.000.000	-	-	620.512.593.200
SOSIAL KEMASYARAKATAN	PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN			93.729.958.800	72.013.239.200	6.758.036.529.600	3.289.329.912.000	1.560.454.108.400	1.124.142.020.000	264.730.238.000	286.512.619.200	757.604.265.000	644.000.000	644.000.000	-	9.435.199.099.800
		A. PENDIDIKAN		81.685.263.600	72.013.239.200	6.264.110.784.400	2.951.225.974.400	1.330.449.599.000	1.015.011.600.000	197.812.314.400	267.521.114.400	644.000.000	644.000.000	644.000.000	-	7.874.745.952.400
		1 All SubSectors - Education	NAD	3.973.001.600	5.148.163.600	3.182.953.214.400	1.280.847.038.400	632.352.211.200	454.572.441.600	76.875.514.000	199.886.227.600	460.000.000	460.000.000	460.000.000	-	3.885.971.941.200
		2 Government Official Education	NAD	-	-	117.26.945.600	144.771.200	39.228.800	3.412.556.000	-	-	-	-	-	-	117.664.174.400
		3 Government Official Education; All SubSectors - Education	NAD	-	-	-	-	49.680.000.000	-	-	-	-	-	-	-	49.680.000.000
		4 Government Official Education; Other Education Affairs	NAD	-	-	-	-	-	-	583.436.400	-	-	-	-	-	583.436.400
		5 Government Official Education; Religious Education	NAD	-	-	46.174.892.000	1.152.474.800	6.093.390.000	16.937.761.200	-	3.184.626.000	-	-	-	-	5

REALISASI DAN RENCANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI (DANA OFF BUDGET)
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
TAHUN 2004 - 2009

BIDANG	PROGRAM UTAMA	SUB BIDANG / KEGIATAN	LOKASI	2004		2005		2006		2007		2008	2009	TOTAL
				COMMITTED (RUPIAH)	DISBURSED (RUPIAH)	COMMITTED (RUPIAH)	DISBURSED (RUPIAH)	COMMITTED (RUPIAH)	DISBURSED (RUPIAH)	COMMITTED (RUPIAH)	DISBURSED (RUPIAH)	COMMITTED (RUPIAH)	COMMITTED (RUPIAH)	COMMITTED (RUPIAH)
		22 Primary Education; Non-formal and Informal Education	NAD	-	-	23.000.000	-	-	23.000.000	-	-	-	-	23.000.000
		23 Primary Education; Non-formal and Informal Education; Subsidiary Services to Education	NAD	-	-	-	-	266.579.200	78.604.800	-	-	-	-	266.579.200
		24 Primary Education; Secondary Education	NAD	-	-	51.696.814.800	34.924.166.000	38.600.587.200	13.932.608.800	-	-	-	-	90.297.402.000

REALISASI DAN RENCANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI (DANA OFF BUDGET)
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
TAHUN 2004 - 2009

BIDANG	PROGRAM UTAMA	SUB BIDANG / KEGIATAN	LOKASI	2004		2005		2006		2007		2008		2009		TOT	
				COMITTED (RUPIAH)	DISBURSED (RUPIAH)	COMITTED (RUPIAH)	DISBURSED (RUPIAH)	COMITTED (RUPIAH)	DISBURSED (RUPIAH)	COMITTED (RUPIAH)	DISBURSED (RUPIAH)	COMITTED (RUPIAH)	DISBURSED (RUPIAH)				
		25 Primary Education; Secondary Education; Non-formal and Informal Education	NAD	-	-	838.350.000	762.450.000	-	-	-	-	-	-	-	-	838.350.000	
		26 Primary Education; Secondary Education; Non-formal and Informal Education; Subsidiary Services to Education; Other Education Affairs	NAD	-	-	2.018.332.800	199.382.400	-	229.852.800	-	175.434.800	-	-	-	-	2.018.332.800	
		27 Primary Education; Secondary Education; Other Education Affairs	NAD	-	-	6.747.537.600	6.747.537.600	-	-	-	-	-	-	-	-	6.747.537.600	
		28 Primary Education; Secondary Education; Religious Education	NAD	-	-	-	-	3.350.483.600	-	-	-	-	-	-	-	3.350.483.600	
		29 Primary Education; Secondary Education; Tertiary Education	NAD	-	-	2.056.945.200	3.213.293.200	5.796.348.000	4.600.000.000	-	-	-	-	-	-	7.813.293.200	
		30 Primary Education; Secondary Education; Tertiary Education; Religious Education	NAD	-	-	46.245.796.400	46.245.796.400	-	-	-	-	-	-	-	-	46.245.796.400	
		31 Primary Education; Tertiary Education	NAD	-	-	531.447.200	246.808.400	-	-	-	-	113.196.800	-	-	-	531.447.200	
		32 Religious Education	NAD	-	-	16.606.276.000	1.058.276.000	-	14.720.000.000	6.570.272.000	6.570.272.000	-	-	-	-	23.176.548.000	
		33 Secondary Education	NAD	5.148.163.600	-	113.330.604.800	58.864.728.000	21.334.855.200	11.502.116.000	375.222.000	3.141.735.600	-	-	-	-	135.040.682.000	
		34 Secondary Education; Non-formal and Informal Education	NAD	-	-	140.022.721.200	43.439.364.000	173.412.750.400	51.244.211.600	3.769.838.000	13.851.179.600	-	-	-	-	317.205.309.600	
		35 Secondary Education; Subsidiary Services to Education	NAD	-	-	39.162.477.200	37.685.932.400	-	-	-	-	-	-	-	-	39.162.477.200	
		36 Secondary Education; Tertiary Education	NAD	-	-	10.086.245.200	5.486.245.200	4.600.000.000	-	-	-	-	-	-	-	10.086.245.200	
		37 SubSector to be defined - Education	NAD	-	-	4.051.919.200	593.915.200	26.238.400	26.238.400	-	-	-	-	-	-	4.078.157.600	
		38 Subsidiary Services to Education	NAD	-	-	19.751.618.000	9.796.077.200	-	1.910.030.400	-	-	-	-	-	-	19.751.618.000	
		39 Subsidiary Services to Education; Other Education Affairs	NAD	-	-	3.468.860.000	3.468.860.000	-	-	-	-	-	-	-	-	3.468.860.000	
		40 Tertiary Education	NAD	-	-	25.464.155.600	24.834.102.800	13.554.956.400	6.384.404.400	276.000.000	1.544.818.000	184.000.000	184.000.000	-	-	39.662.212.000	
		41 Tertiary Education; Subsidiary Services to Education	NAD	-	-	-	-	138.000.000	-	-	-	-	-	-	-	138.000.000	
		B. KESEHATAN		77.620.262.000	66.773.075.600	2.703.010.324.000	1.580.979.106.000	613.361.313.600	496.688.109.600	111.345.934.800	70.610.864.800	104.000.000	104.000.000	104.000.000	3.585.705.834.400		
		1 All SubSectors - Health	NAD	62.173.259.600	62.173.259.600	876.192.341.600	434.503.396.000	154.593.534.000	147.092.829.200	4.360.671.200	12.762.230.800	-	-	-	-	1.097.319.806.400	
		2 Individual Health Services	NAD	-	-	25.283.743.600	12.156.889.200	21.677.270.000	19.044.938.400	-	2.128.098.000	-	-	-	-	46.961.013.600	
		3 Individual Health Services; Public Health Services	NAD	-	-	2.052.409.600	-	-	486.528.400	-	-	-	-	-	-	2.052.409.600	
		4 Individual Health Services; Public Health Services; All SubSectors - Health	NAD	-	-	-	-	3.735.200.000	3.735.200.000	-	-	-	-	-	-	3.735.200.000	
		5 Individual Health Services; Public Health Services; Family Planning; Other Health Affairs	NAD	-	-	58.291.200.000	36.478.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	58.291.200.000	
		6 Individual Health Services; Public Health Services; Other Health Affairs	NAD	102.221.200	-	22.273.604.800	5.410.713.200	-	3.733.065.600	-	-	-	-	-	-	22.375.826.000	
		7 Individual Health Services; Public Health Services; R & D Health Affairs	NAD	-	-	-	-	2.796.873.600	2.796.873.600	-	-	-	-	-	-	2.796.873.600	
		8 Medical Products, Appliances and Equipment	NAD	-	-	24.533.630.800	16.381.538.400	4.996.805.200	4.948.164.800	1.483.021.600	1.812.308.000	-	-	-	-	31.013.457.600	
		9 Medical Products, Appliances and Equipment; Individual Health Services	NAD	-	-	3.624.238.800	3.624.238.800	-	-	-	-	-	-	-	-	3.624.238.800	
		10 Medical Products, Appliances and Equipment; Individual Health Services; Public Health Services	NAD	-	-	5.978.104.800	5.575.853.200	1.528.552.400	333.730.000	-	-	-	-	-	-	7.506.657.200	
		11 Medical Products, Appliances and Equipment; Individual Health Services; Public Health Services; Family Planning; Other Health Affairs	NAD	-	-	6.064.750.400	3.472.954.000	-	-	-	-	-	-	-	-	6.064.750.400	
		12 Medical Products, Appliances and Equipment; Individual Health Services; Public Health Services; Other Health Affairs	NAD	-	-	4.048.009.200	4.048.009.200	-	-	-	-	-	-	-	-	4.048.009.200	
		13 Medical Products, Appliances and Equipment; Individual Health Services; Public Health Services; Other Health Affairs; All SubSectors - Health	NAD	-	-	19.320.000.000	-	-	19.320.000.000	-	-	-	-	-	-	19.320.000.000	
		14 Medical Products, Appliances and Equipment; Individual Health Services; Public Health Services; Other Health Affairs; All SubSectors - Health ; SubSector to be defined - Health	NAD	-	-	3.268.070.000	3.268.070.000	-	-	2.248.912.400	2.248.912.400	-	-	-	-	5.516.982.400	
		15 Medical Products, Appliances and Equipment; Individual Health Services; SubSector to be defined - Health	NAD	-	-	16.001.596.800	16.001.596.800	1.734.522.000	1.734.522.000	-	-	-	-	-	-	17.736.118.800	
		16 Medical Products, Appliances and Equipment; Other Health Affairs	NAD	-	-	11.363.748.000	6.763.748.000	4.600.000.000	-	-	-	-	-	-	-	11.363.748.000	
		17 Medical Products, Appliances and Equipment; Other Health Affairs; SubSector to be defined - Health	NAD	-	-	16.978.204.400	16.978.204.400	-	-	-	-	-	-	-	-	16.978.204.400	
		18 Medical Products, Appliances and Equipment; Public Health Services	NAD	-	-	285.909.531.600	247.674.046.400	29.042.090.800	22.485.490.000	30.544.000.000	2.896.776.400	184.000.000	184.000.000	-	-	345.863.622.400	
		19 Medical Products, Appliances and Equipment; Public Health Services; Family Planning; Other Health Affairs	NAD	-	-	3.634.570.400	3.634.570.400	-	-	-	-	-	-	-	-	3.634.570.400	
		20 Medical Products, Appliances and Equipment; Public Health Services; Other Health Affairs	NAD	-	-	45.392.790.800	10.948.000.000	-	2.392.000.000	-	-	-	-	-	-	45.392.790.800	
		21 Medical Products, Appliances and Equipment; R & D Health Affairs	NAD	-	-	1.727.474.800	1.727.474.800	-	-	-	-	-	-	-	-	1.727.474.800	
		22 Other Health Affairs	NAD	9.200	-	50.364.139.600	31.741.223.600	18.140.136.800	16.539.879.600	1.472.000.000	5.125.237.200	-	-	-	-	69.976.285.600	
		23 Other Health Affairs; All SubSectors - Health	NAD	-	-	-	-	975.788.800	975.788.800	-	-	-	-	-	-	975.788.800	
		24 Public Health Services	NAD	15.344.772.000	4.599.816.000	1.138.790.931.600	686.014.523.200	351.228.961.200	227.521.139.200	70.317.320.400	42.717.302.000	-	-	-	-	1.575.601.985.200	
		25 Public Health Services; Family Planning	NAD	-	-	6.819.389.600	6.819.389.600	5.405.671.600	1.790.412.000	920.000.000	920.000.000	-	-	-	-	13.145.961.200	
		26 Public Health Services; Family Planning; Other Health Affairs	NAD	-	-	1.965.672.000	606.427.200	676.494.400	1.143.164.400	9.200	-	-	-	-	-	2.642.175.600	
		27 Public Health Services; Family Planning; R & D Health Affairs; Other Health Affairs	NAD	-	-	-	-	5.865.165.600	978.797.200	-	-	-	-	-	-	5.865.165.600	
		28 Public Health Services; Other Health Affairs	NAD	-	-	16.583.000.000	101.200.000	6.270.628.000	21.958.800	-	-	-	-	-	-	22.853.628.000	
		29 R & D Health Affairs	NAD	-	-	33.134.729.200	3.634.598.000	4.529.767.200	14.657.375.600	-	-	-	-	-	-	37.664.496.400	
		30 R & D Health Affairs; Other Health Affairs	NAD	-	-	369.177.600	163.852.000	-	163.852.000	-	-	-	-	-	-	533.029.600	
		31 SubSector to be defined - Health	NAD	-	-	23.045.264.000	23.045.264.000	-	-	-	-	-	-	-	-	23.045.264.000	
		C. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		92.000.000	92.000.000	379.049.246.000	169.399.830.000	84.936.065.200	63.750.608.000	8.990.865.600	6.024.022.000	-	-	-	-	473.668.176.800	
		1 Empowerment of Women	NAD	-	-	67.610.680.400	20.387.476.000	19.375.393.200	39.457.926.000	2.245.940.800	1.415.061.200	-	-	-	-	89.232.014.400	
		2 Empowerment of Women; Information and Social Guidance	NAD	-	-	784.907.200	77.537.600	976.350.000	89.387.200	-	68.227.200	-	-	-	-	1.761.257.200	
		3 Empowerment of Women; SubSector to be defined - Social	NAD	-	-	3.281.235.200	3.281.235.200	2.595.145.200	73.600.000	-	-	-	-	-	-	5.876.380.400	
		4 Protection and Social Services to Children and Family	NAD	92.000.000	92.000.000	307.377.423.200	145.653.581.200	61.989.176.800	24.129.695.600	6.744.924.800	4.540.733.600	-	-	-	-	376.198.524.800	
AGAMA, SOSIAL, BUDAYA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	A. AGAMA			12.944.695.200	-	493.925.745.200	338.103.937.000	229.804.518.400	109.110.860.000	67.717.923.600	18.991.504.800	756.960.265.000	-	-	-	1.569.453.147.400	
		1 Advancement of Religious Life	NAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2 All SubSectors - Religion	NAD	-	-	16.174.124.400	7.417.408.000	14.929.594.400	12.155.904.800	9.200.000.000	6.124.559.600	-	-	-	-	40.303.718.800	
		3 Harmony in Religious Life	NAD	-	-	6.229.660.400	5.702.270.400	10.829.200.400	11.258.674.800	-	-	-	-	-	-	17.058.860.800	
		4 Other Religious Affairs Services	NAD	-	-	-	-	4.325.260.400	4.122.860.400	-	-	-	-	-	-	4.325.260.400	
		5 R & D Religious Affairs	NAD	-	-	6.127.											

REALISASI DAN RENCANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI (DANA OFF BUDGET)
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
TAHUN 2004 - 2009

BIDANG	PROGRAM UTAMA	SUB BIDANG / KEGIATAN	LOKASI	2004		2005		2006		2007		2008	2009	TOTAL
				COMMITTED (RUPIAH)	DISBURSED (RUPIAH)	COMMITTED (RUPIAH)	DISBURSED (RUPIAH)	COMMITTED (RUPIAH)	DISBURSED (RUPIAH)	COMMITTED (RUPIAH)	DISBURSED (RUPIAH)	COMMITTED (RUPIAH)	COMMITTED (RUPIAH)	COMMITTED (RUPIAH)
		30 Menasah, Ldang Baru, Panga	Kab. Aceh Jaya									500.000.000		
		31 Menasah, Mentara, Panga	Kab. Aceh Jaya									500.000.000		
		32 Masjid Al Ahrar, Sawang, Setia Bakti	Kab. Aceh Jaya									1.000.000.000		

REALISASI DAN RENCANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI (DANA OFF BUDGET)
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
TAHUN 2004 - 2009

BIDANG	PROGRAM UTAMA	SUB BIDANG / KEGIATAN	LOKASI	2004		2005		2006		2007		2008	2009	TOT
				COMITTED (RUPIAH)	DISBURSED (RUPIAH)	COMITTED (RUPIAH)	DISBURSED (RUPIAH)	COMITTED (RUPIAH)	DISBURSED (RUPIAH)	COMITTED (RUPIAH)	DISBURSED (RUPIAH)	COMITTED (RUPIAH)	COMITTED (RUPIAH)	COMITTED (RUPIAH)
		33	Mesjid Al Ikhlas, Babah Ngom, Setia Bakti	Kab. Aceh Jaya								1.000.000.000		
		34	Mesjid Al Ikhlas, Kuala Laman	Kab. Aceh Jaya								1.000.000.000		
		35	Mesjid Alur Batak, Setia Bakti	Kab. Aceh Jaya								1.000.000.000		
		36	Mesjid Babul Khairat, Kuta Tuha Dusun Patah, Panga	Kab. Aceh Jaya								1.000.000.000		
		37	Mesjid Baiturrahman, Panga	Kab. Aceh Jaya								1.000.000.000		
		38	Mesjid Baiturrahman, Lhok Grolumpang, Setia Bakti	Kab. Aceh Jaya								1.000.000.000		
		39	Mesjid Baiturrahman, Lhok, Laman	Kab. Aceh Jaya								1.000.000.000		
		40	Mesjid Bani Salim, Lampaseh Kota	Kota Banda Aceh								500.000.000		
		41	Mesjid Desa Bate, Kemukimana Kale, Laweung	Kab. Pidie								500.000.000		
		42	Mesjid Glee jong, Kuala Daya, Laman	Kab. Aceh Jaya								1.000.000.000		
		43	Mesjid jami' ujang Mulok, Laman	Kab. Aceh Jaya								1.000.000.000		
		44	Mesjid Nurul Hidayah, Alor Pate, Panga	Kab. Aceh Jaya								1.000.000.000		
		45	Mesjid Nurul Yaqin, Kuala Doe, Setia Bakti	Kab. Aceh Jaya								1.000.000.000		
		46	Mesjid Sepak, Sepak, Kuala Bakti	Kab. Aceh Jaya								1.000.000.000		
		47	Mesjid Tgk Andjong, Peulanggahan	Kota Banda Aceh								1.000.000.000		
		48	Meunasah Mahajirin, Lampaseh Kota	Kota Banda Aceh								500.000.000		
		49	Mrs Al Ikhlas, Peulanggahan	Kota Banda Aceh								500.000.000		
		50	Mrs Darussalam, Meridati	Kota Banda Aceh								500.000.000		
		51	Mushalla Komplek Perum Kuta Raja Bilui	Kota Banda Aceh								500.000.000		
		52	Pemb. Masjid Al-Falah, Gp. Tgk Di Laweung	Kab. Pidie								1.000.000.000		
		53	Pemb. Masjid Al-Ikhlas Bak U. Leupang	Kab. Aceh Besar								1.000.000.000		
		54	Pemb. Masjid Al-Ikhlas, Kuala Lagan, Sampoiniet, A. Jaya	Kab. Aceh Jaya								1.000.000.000		
		55	Pemb. Masjid Al-Mukhlis, Gp. Jawa	Kota Banda Aceh								1.000.000.000		
		56	Pemb. Masjid Babul Khairat, Dusun Aron Patah, Kuta Tuha, Panga	Kab. Aceh Jaya								1.000.000.000		
		57	Pemb. Masjid Baitul Izzah Paya Semantuk	Kab. Aceh Jaya								1.000.000.000		
		58	Pemb. Masjid Cot Leur Tringgadeng (kawasan masyarakat lepra)	Kab. Pidie Jaya								1.000.000.000		
		59	Pemb. Masjid Darul Iman, Kende Ulim	Kab. Pidie Jaya								500.000.000		
		60	Pemb. Masjid Duta Lase, Kr. Sabe, A. Jaya	Kab. Aceh Jaya								1.000.000.000		
		61	Pemb. Masjid Gle Ceurih, Kec. Delima	Kab. Pidie								1.000.000.000		
		62	Pemb. Masjid Iskandar Muda, Meureudu	Kab. Pidie Jaya								1.000.000.000		
		63	Pemb. Masjid Jami' Gp. Sukajaya, Laweung	Kab. Pidie								500.000.000		
		64	Pemb. Masjid Jami' Kec. Bate	Kab. Pidie								500.000.000		
		65	Pemb. Masjid Masjid Baitul 'Ala Any-Syukri, Peureulak	Kab. Aceh Timur								750.000.000		
		66	Pemb. Masjid Mini Gampong Bhang, Meuraxa	Kota Banda Aceh								750.000.000		
		67	Pemb. Masjid Nurul Falah Kileng Muria, Baitussalam	Kab. Aceh Besar								500.000.000		
		68	Pemb. Masjid Nurul Yakin, Ulin Baroh	Kab. Pidie Jaya								500.000.000		
		69	Pemb. Masjid Raya Pate, Pantan Lahu	Kab. Aceh Utara								2.000.000.000		
		70	Pemb. Meunasah As Syfiyah, Pasi Tulak Bala	Kab. Aceh Jaya								1.000.000.000		
		71	Pemb. Meunasah Lhok Kruet, Sampoiniet	Kab. Aceh Jaya								500.000.000		
		72	Pemb. Masjid Al Ihsan, Lhok Kruet, Sampoiniet	Kab. Aceh Jaya								1.000.000.000		
		73	Pemb. Masjid Al Jabar, Pasi Pawang, Teunom	Kab. Aceh Jaya								1.000.000.000		
		74	Pemb. Masjid Al Wafid, Rambong Payang	Kab. Aceh Jaya								1.000.000.000		
		75	Pemb. Masjid Baitul Ghafer, Teupin Ara	Kab. Aceh Jaya								1.000.000.000		
		76	Pemb. Masjid Baiturrahim, Babah Lipah, Sampoiniet	Kab. Aceh Jaya								1.000.000.000		
		77	Pemb. Masjid Baitussalihin, Kuala Bakong, Sampoiniet	Kab. Aceh Jaya								1.000.000.000		
		78	Pemb. Masjid Krung No, Sampoiniet	Kab. Aceh Jaya								1.000.000.000		
		79	Pemb. Masjid Mithsal Huda, Pank, Sampoiniet	Kab. Aceh Jaya								1.000.000.000		
		80	Pemb. Masjid Nurul Huda, Mon Lueng, Sampoiniet	Kab. Aceh Jaya								1.000.000.000		
		81	Pemb. Meunasah Balek, Meurah Dua	Kab. Pidie Jaya								500.000.000		
		82	Pemb. Meunasah Keude Tringgadeng	Kab. Pidie Jaya								500.000.000		
		83	Pemb. Meunasah Kiran Dayah, Ulee Gle	Kab. Pidie Jaya								500.000.000		
		84	Pemb. Meunasah Kuta Sigli	Kab. Pidie								500.000.000		
		85	Pemb. Meunasah Lueng Rimba, Meurah Dua	Kab. Pidie Jaya								500.000.000		
		86	Pemb. Meunasah Tijen, Ulim	Kab. Pidie Jaya								500.000.000		
		87	Pemb. Nurul Mukmin Panggong	Kab. Aceh Jaya								1.000.000.000		
		88	Pemb. Mesjid Panti Ilham Bosna, Calang, Aceh Jaya	Kab. Aceh Jaya								500.000.000		
		89	Pembangunan Escape Building pada Masjid Cadek, Baitussalam	Kab. Aceh Besar								2.000.000.000		
		90	Pembangunan Escape Building pada Masjid Jami' Kota Sigli	Kab. Pidie								3.000.000.000		
		91	Pembangunan Masjid Baburrahman Lamtemen Timur	Kota Banda Aceh								500.000.000		
		92	Pembangunan Masjid Baiturrahman Lampoh Daya, Jaya Baru	Kota Banda Aceh								500.000.000		
		93	Pembangunan Masjid Jami' Simpang Tiga	Kab. Pidie								500.000.000		
		94	Pembangunan Masjid Pasi Rewa	Kab. Pidie								1.000.000.000		
		95	Pembangunan Meunasah Nuhuen, Mesjid Raya	Kab. Aceh Besar								500.000.000		
		96	Pembangunan Mushalla Lamtemen Timur	Kota Banda Aceh								500.000.000		
		97	Rehabilitasi Masjid An-Nur, Kr. Sabe	Kab. Aceh Jaya								500.000.000		
		98	Rehabilitasi Masjid Nurul Mukmin Ranto Manyang	Kab. Aceh Jaya								500.000.000		
		99	Revitalisasi Masjid As-Sadeqah Lamtagang	Kota Banda Aceh								500.000.000		
		100	Revitalisasi Masjid Baitul Musyadadah Seurui	Kota Banda Aceh								1.000.000.000		
		101	Revitalisasi Masjid Baitussalihin Ulee Kareng	Kota Banda Aceh								1.000.000.000		
		102	Revitalisasi Masjid Jami Pulau Banyak	Kab. Aceh Singkil								1.000.000.000		
		103	Revitalisasi Masjid Kec. Seumudon	Kab. Aceh Utara								500.000.000		
		104	Revitalisasi Masjid Syekh Hamzah Al-Fanshury	Kab. Aceh Singkil								1.000.000.000		
		105	Revitalisasi Masjid Gle Bruak, Lhong	Kab. Aceh Besar								500.000.000		
		106	Revitalisasi Masjid Jami' Keudah, Banda Raya	Kota Banda Aceh								500.000.000		
			Sarana Pelayanan Kegamaan (Gedung Kantor)											
		107	Pemb. Panti Informasi Haj	Provinsi NAD								9.000.000.000		
		108	Pembangunan Kanwil Depag NAD	Provinsi NAD								12.000.000.000		
		109	Pembangunan Gedung Baitul Mal Abdiya	Kab. Abdiya								1.000.000.000		
		110	Pembangunan Gedung Baitul Mal Aceh Besar	Kab. Aceh Besar								1.000.000.000		
		111	Pembangunan Gedung Baitul Mal Aceh Selatan	Kab. Aceh Selatan								1.000.000.000		
		112	Pembangunan Gedung Baitul Mal Aceh Tenggara	Kab. Aceh Tenggara								1.000.000.000		
		113	Pembangunan Gedung Baitul Mal Aceh Utara	Kab. Aceh Utara								1.000.000.000		
		114	Pembangunan Gedung Baitul Mal Bireun	Kab. Bireun								1.000.000.000		
		115	Pembangunan Gedung Baitul Mal Kota Lhokseumawe	Kota Lhokseumawe								1.000.000.000		
		116	Pembangunan Gedung Baitul Mal Sabang	Kota Sabang								1.000.000.000		
		117	Pembangunan Gedung Baitul Mal Simeulue	Kab. Simeulue								1.000.000.000		
		118	Pembangunan Gedung Baitul Mal Singkil	Kab. Singkil								1.000.000.000		
		119	Pembangunan KUA Jeumpa	Kab. Bireun								425.000.000		
		120	Pembangunan KUA Langkahan	Kab. Bireun								425.000.000		
		121	Pembangunan KUA Muara Batu	Kab. Bireun								425.000.000		
		122	Pembangunan KUA Peudada	Kab. Bireun								425.000.000		
		123	Pembangunan KUA Samalanga	Kab. Bireun								425.000.000		
		124	Pembangunan KUA Sp. Keramat	Kab. Bireun								425.000.000		
		125	Pembangunan KUA Tanah Pasir	Kab. Bireun								425.000.000		
		126	Pembangunan Matang Kuli	Kab. Bireun								425.000.000		
			Sarana Pendidikan											
		127	Lanjutan Pemb. Asrama Dayah Raudhatul Maarif, Cot Truong	Kab. Aceh Utara								600.000.000		
		128	Pemb. Balai Pengajian Gp. Jawa	Kota Banda Aceh								300.000.000		

REALISASI DAN RENCANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI (DANA OFF BUDGET)
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
TAHUN 2004 - 2009

BIDANG	PROGRAM UTAMA	SUB BIDANG / KEGIATAN	LOKASI	2004		2005		2006		2007		2008	2009	TOTAL
				COMMITTED (RUPIAH)	DISBURSED (RUPIAH)	COMMITTED (RUPIAH)	DISBURSED (RUPIAH)	COMMITTED (RUPIAH)	DISBURSED (RUPIAH)	COMMITTED (RUPIAH)	DISBURSED (RUPIAH)	COMMITTED (RUPIAH)	COMMITTED (RUPIAH)	COMMITTED (RUPIAH)
		129 Pemb. Dayah Blang Rakal	Kab. Bener Meriah									200.000.000		
		130 Pemb. Dayah Jahai Uluw, Gp. Tpk Di Laweng	Kab. Pidie									500.000.000		
		131 Pemb. Dayah Madrasah Uluwul Qur'an, Pagar Air	Kab. Aceh Besar									1.000.000.000		

REALISASI DAN RENCANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI (DANA OFF BUDGET)
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
TAHUN 2004 - 2009

BIDANG	PROGRAM UTAMA	SUB BIDANG / KEGIATAN	LOKASI	2004		2005		2006		2007		2008		2009		TOT
				COMITTED (RUPIAH)	DISBURSED (RUPIAH)	COMITTED (RUPIAH)	DISBURSED (RUPIAH)	COMITTED (RUPIAH)	DISBURSED (RUPIAH)	COMITTED (RUPIAH)	DISBURSED (RUPIAH)	COMITTED (RUPIAH)	DISBURSED (RUPIAH)	COMITTED (RUPIAH)	DISBURSED (RUPIAH)	
		132 Pembangunan Dayah NurulHidayah, Ujung Singkil	Singkil									1.000.000.000				
		133 Rehabilitasi Dayah Darul Itami	Kab. Simeulue									1.000.000.000				
		Pengembangan Kapasitas Agama														
		134 Pembukaan Kelas Menulis di Dayah Perempuan	Provinsi NAD									1.150.000.000				
		135 Pendalaman Bahasa Inggris untuk Alumni SPU	Provinsi NAD							250.000.000						
		136 Peningkatan Kapasitas Aparatur Depag, DSI, MPU	Provinsi NAD													
	B. SOSIAL			125.690.400	-	404.702.388.000	266.871.585.200	186.237.127.200	62.635.173.200	47.724.785.600	5.402.056.000	480.000.000.000	-	-	638.789.911.200	
		1 All SubSectors - Social	NAD	-	-	133.402.971.600	72.508.686.800	17.453.688.000	27.273.528.800	-	-	-	-	-	-	150.856.659.600
		2 Housing Assistance	NAD	-	-	67.817.018.000	63.199.685.200	-	1.471.834.400	27.600.000.000	1.380.000.000	-	-	-	-	95.417.018.000
		3 Information and Social Guidance	NAD	-	-	19.899.977.200	12.468.116.000	26.127.678.000	15.906.432.000	12.192.971.600	336.250.800	-	-	-	-	58.220.626.800
		4 Information and Social Guidance; SubSector to be defined - Social	NAD	-	-	21.428.943.600	8.030.772.000	-	8.226.952.800	-	-	-	-	-	-	21.428.943.600
		5 Old Age Protection and Services	NAD	-	-	56.819.200	37.885.600	4.390.985.200	4.383.404.400	5.861.596.000	3.118.358.400	-	-	-	-	10.309.400.400
		6 Old Age Protection and Services; Empowerment of Women	NAD	-	-	46.000.000	-	-	46.000.000	-	-	-	-	-	-	46.000.000
		7 Protection and Social Services to Children and Family; All SubSectors - Social	NAD	-	-	34.290.902.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.290.902.400
		8 Protection and Social Services to Children and Family; Empowerment of Women	NAD	-	-	11.216.520.400	5.959.272.400	1.622.834.000	158.782.800	629.280.000	367.080.000	-	-	-	-	13.468.634.400
		9 All SubSectors - Social	NAD	-	-	67.877.600	67.877.600	-	-	-	-	-	-	-	-	67.877.600
		10 Protection and Social Services to Children and Family; Empowerment of Women; Information and Social Guidance	NAD	-	-	602.784.000	602.784.000	13.971.074.000	-	-	-	-	-	-	-	14.573.858.000
		11 Protection and Social Services to Children and Family; Empowerment of Women; Information and Social Guidance; Housing Assistance	NAD	125.690.400	-	-	125.690.400	-	-	-	-	-	-	-	-	125.690.400
		12 SubSector to be defined - Social	NAD	-	-	4.227.344.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.227.344.800
		13 Protection and Social Services to Children and Family; Information and Social Guidance	NAD	-	-	958.998.800	845.590.400	-	112.562.000	-	-	-	-	-	-	958.998.800
		14 Protection and Social Services to Children and Family; Information and Social Guidance; Social Security and Assistance	NAD	-	-	294.400.000	-	-	294.400.000	-	-	-	-	-	-	294.400.000
		15 Protection and Social Services to Children and Family; Social Security and Assistance	NAD	-	-	3.444.875.600	3.444.875.600	-	-	-	-	-	-	-	-	3.444.875.600
		16 R & D Social Protection	NAD	-	-	4.453.536.000	1.873.832.200	2.105.162.400	3.032.918.000	1.440.858.000	200.366.800	-	-	-	-	7.999.556.400
		17 Sickness and Disability Protection and Services	NAD	-	-	55.761.200	55.761.200	1.380.000.000	16.560.000	-	-	-	-	-	-	1.435.761.200
		18 Sickness and Disability Protection and Services; Information and Social Guidance	NAD	-	-	1.803.687.600	1.803.687.600	-	-	-	-	-	-	-	-	1.803.687.600
		19 Sickness and Disability Protection and Services; Information and Social Guidance; Social Security and Assistance	NAD	-	-	377.301.200	377.301.200	-	-	-	-	-	-	-	-	377.301.200
		20 Sickness and Disability Protection and Services; Protection and Social Services to Children and Family; Empowerment of Women	NAD	-	-	313.324.400	313.324.400	54.675.600	54.675.600	-	-	-	-	-	-	368.000.000
		21 Social Security and Assistance	NAD	-	-	22.797.894.400	21.066.518.800	83.030.000	429.032.800	-	-	-	-	-	-	22.880.924.400
		22 SubSector to be defined - Social	NAD	-	-	77.145.450.000	74.889.922.800	119.048.000.000	1.228.089.600	-	-	-	-	-	-	196.193.450.000
		Pengembangan Kapasitas Masyarakat untuk Transformasi Aceh														
		1 Pembangunan Pusat Kegiatan Sosial Masyarakat (PKSM) dan Perlekapan	Provinsi NAD									12.000.000.000				
		Pembangunan Sistem Kesejahteraan Sosial														
		1 Implementasi Sistem Kewas Provinsi berbasis SIN dan E-Gov	Provinsi NAD									10.000.000.000				
		2 Implementasi Sistem Kewas Kabupaten/Kotamadya berbasis SIN dan E-Gov	Provinsi NAD									276.000.000.000				
		Pembangunan Aceh Social Fund (ASF)														
		1 Pendirian dan Management ASF	Provinsi NAD									2.000.000.000				
		2 Pengembangan Jaringan dan Kelembagaan Sosial Produktif	Provinsi NAD									100.000.000.000				
	C. BUDAYA			-	-	-	-	-	-	-	1.000.000.000	-	147.598.265.000	-	-	
		1 Advokasi qanun wali nanggroe, lembaga adat, musik dan gampong	Provinsi NAD									200.000.000				
		2 Cetak Buku Ensiklopedi Seni Budaya Aceh (10 ribu eks)	Provinsi NAD							1.000.000.000		1.900.000.000				
		3 Cetak Buku Seiman - Budayawan Daerah Tsunami	Provinsi NAD									5.000.000.000				
		4 Cetak Kamus Bahasa Aceh dan Emik Aceh (Yeri : Aceh - German), 10 Ribu eks	Provinsi NAD									1.900.000.000				
		5 Distribusi Buku Ensiklopedi Seni Budaya Aceh	Kab/Kota									50.000.000				
		6 Dokumentasi Biografi Budaya Tatar	Kab/Kota									3.450.000.000				
		7 Evenr Experi Seni Budaya Pasca Tsunami (Kecamatan, kab/kota, Provinsi)	Kab/Kota									5.750.000.000				
		8 Festival dan Bazar Seni Mahasiswa Se-Aceh	Provinsi NAD									1.000.000.000				
		9 Festival Seni Budaya Aceh Tengah	Kab/Kota									750.000.000				
		10 Festival Seni Budaya Anak Aceh	Kab/Kota									4.600.000.000				
		11 Festival Tari Internasional (Aceh Dance Festival International)	Provinsi NAD									1.000.000.000				
		12 Konservasi Pusaka Sajana Teuku Umar Dalam Konteks Charta Indonesia	Kab/Kota									2.000.000.000				
		13 Lomba Bata Poni Karya Ali Hajjmy di Museum Pusaka A Hajjmy	Provinsi NAD									150.000.000				
		14 Lomba Menulis Syair Di Da Idi	Provinsi NAD									300.000.000				
		15 Lomba Penulisan Naskah Teater (Drama) dan Pagelaran Teater Keliling	Provinsi NAD									850.000.000				
		16 Master Plan Pembangunan Gampong Pandu sebagai Gampong Budaya	Provinsi NAD									350.000.000				
		17 Museum Keliling Gampong dan wisata Budaya (sosialisasi Benda Cagar Budaya)	Provinsi NAD									800.000.000				
		18 Museum Keliling Gampong dan wisata Budaya (sosialisasi Benda Cagar Budaya)	Provinsi NAD									800.000.000				
		19 Pagelaran Kesenian Tradisional Masyarakat Gayo Luwes	Provinsi NAD									500.000.000				
		20 Pameran seni rupa, Kaligrafi Tema tsunami	Provinsi NAD									2.500.000.000				
		21 Pembinaan Sistem Ejaan Bahasa Aceh	Provinsi NAD									1.000.000.000				
		22 Pembangunan bale Pasie (nelayan tradisional) Panglima Laut Kab/Kota	Kab/Kota									3.450.000.000				
		23 Pembangunan Baru Tulis di Kompleks Benda Cagar Budaya (BCB) Aceh Besar	Kab/Kota									3.000.000.000				
		24 Pembangunan Institut Kesenian Aceh	Kab/Kota									5.000.000.000				
		25 Pembangunan Kantor Dewan Kesenian Aceh (DKA) Provinsi NAD	Provinsi NAD									900.000.000				
		26 Pembangunan Komplek Gampong Donya Tahap I	Kab/Kota									7.500.000.000				
		27 Pembangunan Monumen Seiman dan Budayawan Korban Tsunami	Provinsi NAD									350.000.000				
		28 Pembangunan Panggung Arena Pertunjukan Mini di Halaman Taman Budaya Aceh	Provinsi NAD									2.000.000.000				
		29 Pembangunan Panggung Terbuka Seni Pertunjukan Komplek Relokasi Pengungsi Labuy	Provinsi NAD									750.000.000				
		30 Pembangunan Rumah Kepala Ahli waris Seiman - Budayawan Korban tsunami	Provinsi NAD									3.750.000.000				
		31 Pembangunan taman bacaan gampong di Relokasi Korban Tsunami (lanjutan)	Kab/Kota									4.800.000.000				
		32 Pembangunan Tugu Sejarah Perdamaian Ilhar Lamteh dan MOU Helsinki	Kab/Kota									1.000.000.000				
		33 Pembangunan Taman Adat Komplek Mayjelo Adat Aceh (MA)	Provinsi NAD									400.000.000				
		34 Pembinaan Kapasitas Kelompok industri Pengrajin kakab/motif, batik Aceh serta makanan khas Aceh (Binaan DEKRANAS Provinsi)	Provinsi NAD									1.000.000.000				
		35 Pembuatan Film Dokumenter Biografi Seiman dan Budayawan Aceh	Provinsi NAD									250.000.000				
		36 Pembuatan Film Dokumenter Tata Cara Adat Intelektual Aceh	Provinsi NAD									1.000.000.000				
		37 Pembuatan Microfilm Naskah Kuno Pustaka Dayak Tak Chik Tanoh Abee	Provinsi NAD									5.000.000.000				
		38 Penataan Lingkungan Taman Budaya Aceh (TBA) Banda Aceh	Provinsi NAD									1.500.000.000				
		39 Penataan Lingkungan Taman Putro Phang (Taman Bermain Anak-Anak)	Provinsi NAD									3.000.000.000				
		40 Penataan Pagur Dan Lingkungan Kuburan Masal Korban Tsunami Aceh	Kab/Kota									5.000.000.000				
		41 Penerbitan Antologi 20 Tahun Sateh Aceh	Provinsi NAD									200.000.000				
		42 Penerbitan Jurnal Kebudayaan Perspektif Perempuan Aceh	Provinsi NAD									1.000.000.000				
		43 Penerbitan Karya Seni Budaya Aceh (Komik, Pantun, Hikayat , Puisi, essay, Novel Cerpas)	Provinsi NAD									5.000.000.000				
		44 Penerjemahan Cetak Buku dan penghargaan karya T. Iskandar	Provinsi NAD									2.000.000.000				

REALISASI DAN RENCANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI (DANA OFF BUDGET)
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
TAHUN 2004 - 2009

BIDANG	PROGRAM UTAMA	SUB BIDANG / KEGIATAN	LOKASI	2004		2005		2006		2007		2008	2009	TOTAL
				COMMITTED (RUPIAH)	DISBURSED (RUPIAH)	COMMITTED (RUPIAH)	DISBURSED (RUPIAH)	COMMITTED (RUPIAH)	DISBURSED (RUPIAH)	COMMITTED (RUPIAH)	DISBURSED (RUPIAH)	COMMITTED (RUPIAH)	COMMITTED (RUPIAH)	COMMITTED (RUPIAH)
		45 Pengadaan Peralatan Gedung Seni Budaya (Simeulu, Aceh Jaya, Abdya, Singkil)	Propinsi NAD									8.000.000.000		
		46 Pengadaan Peralatan Seni Pertunjukan Untuk Gedung Tertutup Taman Budaya Aceh (TBA)	Propinsi NAD									2.000.000.000		

REALISASI DAN RENCANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI (DANA OFF BUDGET)
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
TAHUN 2004 - 2009

BIDANG	PROGRAM UTAMA	SUB BIDANG / KEGIATAN	LOKASI	2004		2005		2006		2007		2008		2009		TOTAL
				COMMITTED (RUPIAH)	DISBURSED (RUPIAH)	COMMITTED (RUPIAH)	DISBURSED (RUPIAH)	COMMITTED (RUPIAH)	DISBURSED (RUPIAH)	COMMITTED (RUPIAH)	DISBURSED (RUPIAH)	COMMITTED (RUPIAH)	DISBURSED (RUPIAH)	COMMITTED (RUPIAH)	DISBURSED (RUPIAH)	
		47. Pengadaan Perlengkapan Group Seni Dalam Khairat se-Provinsi NAD	Kab/Kota									700.000.000				
		48. Pengembangan lapangan Tenis berisikan Kwartir Lokal	Propinsi NAD									800.000.000				
		49. Penulisan dan cetak buku Biografi Tokoh Budaya Aceh Nardin Abdurrahman	Propinsi NAD									900.000.000				
		Penulisan Sejarah Gampong Berbasis Penelitian "dari sejarah menuju masa depan"														
		50. Penulisan Ulang dan Cetak Buku Sejarah Bremcong (senjata tradisional Aceh)	Propinsi NAD									1.500.000.000				
		51. Penyusunan Draf Qanun tentang Penyelamatan Warisan Budaya Aceh	Propinsi NAD									300.000.000				
		53. Rehab dan Penataan Lingkungan Rumah Tgk. Chik Awe Grutah	Propinsi NAD									2.498.265.000				
		54. Rehabilitasi Rumah Kontrolir Belanda Aceh Besar (Lanjutan)	Kab/Kota									350.000.000				
		55. Revitalisasi dan Penataan Lingkungan Monumen Asia Tenggara (MONISA)	Kab/Kota									5.000.000.000				
		56. Revitalisasi Gedung Terbuka Taman Budaya (TBA) Banda Aceh	Kab/Kota									500.000.000				
		57. Revitalisasi Gedung Terbuka Taman Budaya (TBA) Banda Aceh	Propinsi NAD									3.000.000.000				
		58. Revitalisasi Mess Taman Budaya Aceh (TBA) Banda Aceh	Propinsi NAD									3.000.000.000				
		59. Revitalisasi Menasab Lanjutan	Kab/Kota									12.000.000.000				
		60. Revitalisasi Pembangunan Teater terbuka Taman Budaya Aceh (DKA)	Propinsi NAD									3.000.000.000				
		61. Revitalisasi Situs-Situs Benda Cagar Budaya (BCB) Lanjutan	Kab/Kota									10.000.000.000				
		62. Sattrawan Masuk Sekolah	Propinsi NAD									500.000.000				
		63. Survey dan Cetak Ulang Hikayat Aceh Lama	Propinsi NAD									500.000.000				
		B. PEMUDA DAN OLAHRAGA		11.919.004.800	-	52.584.734.400	44.184.812.400	162.984.400	7.131.361.600	2.375.854.600	1.147.523.200	87.162.000.000	-	-	-	67.042.497.600
		1. Youth and Sports	NAD	-	-	15.131.764.400	5.155.137.200	524.400	2.695.830.000	1.656.000.000	736.000.000	-	-	-	-	16.708.289.800
		2. Youth and Sports; Empowerment of Women	NAD	-	-	146.436.400	34.914.000	47.840.000	47.840.000	-	-	-	-	-	-	194.276.400
		3. Youth and Sports; Information and Social Guidance	NAD	-	-	202.400.000	-	114.540.000	114.540.000	-	-	-	-	-	-	316.940.000
		4. Youth and Sports; Protection and Social Services to Children and Family; Empowerment of Women	NAD	11.919.004.800	-	7.544.230.000	9.434.857.600	-	4.273.151.600	719.854.000	411.525.200	-	-	-	-	20.183.088.800
		5. Youth and Sports; Protection and Social Services to Children and Family; Empowerment of Women; All SubSectors - Social	NAD	-	-	29.559.903.600	29.559.903.600	-	-	-	-	-	-	-	-	29.559.903.600
		Kegiatan New Feak														
		1. Pembinaan Olahraga Prestasi KONI NAD untuk PON XVII di Samarinda Pontianak	Propinsi NAD									2.520.000.000				
		2. Kompetisi Cabang Olahraga Prestasi Dalam rangka PON XVII di Pontianak	Propinsi NAD									1.155.000.000				
		3. Try Out Cabang Olahraga Prestasi Atlet Binaan KONI NAD 16 Cabang Andalan +	Propinsi NAD									1.650.000.000				
		4. Seminar Internasional "Kontribusi Internasional & BBR terhadap pembangunan	Propinsi NAD									250.000.000				
		5. Shortcourse "Pelatih" Cabang Olahraga Prestasi Provinsi NAD ke Luar Negeri	Propinsi NAD									2.500.000.000				
		6. Kegiatan Olahraga Mahasiswa, Pelajar dan Pemuda	Propinsi NAD									300.000.000				
		7. Safari Pengabdian Pemuda (SAPDA)	Propinsi NAD									500.000.000				
		8. Peningkatan Seetra Usaha Ekonomi Pemuda (SUEP)	Propinsi NAD									500.000.000				
		9. Penguatan Peranan Kelembagaan Pemuda	Propinsi NAD									400.000.000				
		10. Peremajaan Pemuda Gampong se-Aceh	Propinsi NAD									150.000.000				
		11. Pertemuan Pemuda Internasional se Asia (AFIAN)	Propinsi NAD									1.500.000.000				
		12. Monitoring dan Evaluasi Program Olahraga	Propinsi NAD									100.000.000				
		13. Kegiatan Olahraga Masyarakat	Propinsi NAD									2.300.000.000				
		14. Kompetisi Olahraga Mahasiswa, Pelajar, pemuda dan masyarakat	Propinsi NAD									805.000.000				
		15. Pengembangan Peta Kajian Ilmu Olahraga & Data Base Olahraga Aceh	Propinsi NAD									150.000.000				
		16. Pelatihan Manajemen Life-Skill Pemuda	Propinsi NAD									500.000.000				
		Kegiatan Fisik														
		1. Bantuan Langsung Pembangunan Lapangan Bola Basket Multi guna untuk Dayah/Pesantren 2 unit x 21 kab/kota										1.840.000.000				
		2. Pembangunan Areal Sirkuit Balapan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam										2.500.000.000				
		Pembangunan dan Pengawasan Gedung Olahraga Serbaguna STAIN Malikussaleh														
		3 (700 m2)										2.540.000.000				
		4. Pembangunan dan Pengawasan Public Space	kabupaten/kota									3.000.000.000				
		5. Pembangunan fasilitas olahraga di 100 areal pemukiman baru (Daerah relokasi)	NAD									10.000.000.000				
		6. Pembangunan Gedung IPSI	Propinsi NAD									2.500.000.000				
		7. Pembangunan Gedung Olahraga Serbaguna di 5 Kab/Kota (700 m2/unit/Gedung)										12.705.000.000				
		8. Pembangunan Gedung Pemuda Serbaguna di 5 Kab/Kota (700 m2/unit/gedung)										12.705.000.000				
		9. Pembangunan Kantor Badan Pusat Statistik 3 Kab/kota (150 m2)										1.833.500.000				
		10. Pembangunan Lapangan Bola Basket Multi guna SMP/MTsN dan SMA/SMK/MAN 2 unit x 23 kab/kota										1.840.000.000				
		11. Pembangunan Lapangan Sepak Bola Kecamatan Leupung Aceh Besar	Aceh Besar									1.200.000.000				
		Pengadaan Komputer untuk Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) Tingkat Provinsi NAD	Propinsi NAD									960.000.000				
		Pengadaan paket peralatan olahraga (sport Kids) untuk Dayah dan Pesantren Terpadu 23 kab/kota x 5 paket										1.150.000.000				
		Pengadaan paket peralatan olahraga Sekolah (sport Kids) SD/MI, SMP/MTsN, SMA/SMK/MA 23 kab/kota x 21 paket/sekolah										3.105.000.000				
		15. Pengadaan Peralatan Fitness Center	NAD									1.500.000.000				
		16. Pengadaan Peralatan Olahraga Masyarakat, Pemuda, dan Mahasiswa	kabupaten/kota									2.300.000.000				
		17. Olahraga										1.650.000.000				
		18. Pengembangan dan Peningkatan Sport Center Unsyiah Tahap II	Propinsi NAD									6.352.500.000				
		19. Rehabilitasi Lapangan Bola Voli Masyarakat 10 Kecamatan x 23 Kab/Kota	kabupaten/kota									1.400.000.000				
		20. Rehabilitasi Lapangan Bulutangkis Masyarakat 10 Kecamatan x 23 Kab/Kota	kabupaten/kota									1.000.000.000				
PEREKONOMIAN				60.221.544.800	8.024.083.600	2.325.840.950.800	1.210.531.390.800	1.065.791.645.600	604.712.329.200	87.391.885.600	123.726.380.400	-	-	-	-	3.519.246.026.000
		1. Agriculture, Forestry, Fisheries, and Maritime	NAD	8.024.083.600	-	461.549.933.200	235.314.186.800	275.537.451.600	143.127.546.400	9.966.415.200	19.429.400.000	-	-	-	-	755.077.983.600
		2. Agriculture, Forestry, Fisheries, and Maritime; Development of Tourism and Culture	NAD	-	-	318.200.400	318.200.400	1.660.241.200	-	-	-	-	-	-	-	1.978.441.600
		3. Agriculture, Forestry, Fisheries, and Maritime; Industry and Construction	NAD	-	-	2.833.600.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.833.600.000
		4. Agriculture, Forestry, Fisheries, and Maritime; Industry and Construction; SubSector to be defined - Economic Development	NAD	-	-	41.040.933.200	9.725.430.400	-	-	-	-	-	-	-	-	41.040.933.200
		5. Agriculture, Forestry, Fisheries, and Maritime; Other Environmental Protection Affairs	NAD	-	-	5.393.389.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.393.389.600
		6. All SubSectors - Economic Development	NAD	50.999.924.000	-	234.215.541.200	155.573.775.600	15.893.368.000	23.748.539.600	13.522.739.600	9.970.730.000	-	-	-	-	314.631.572.800
		7. Business Development	NAD	844.753.200	-	716.321.264.400	349.398.924.800	314.499.460.800	109.700.873.600	11.296.385.600	41.006.911.600	-	-	-	-	1.042.961.864.000
		8. Business Development; Agriculture, Forestry, Fisheries, and Maritime	NAD	-	-	162.515.037.600	84.650.221.200	52.988.255.600	70.629.200.400	3.271.529.200	3.624.422.800	-	-	-	-	218.774.822.400
		9. Business Development; Agriculture, Forestry, Fisheries, and Maritime; Industry and Construction	NAD	-	-	2.639.194.800	-	17.924.930.400	2.639.194.800	-	-	-	-	-	-	20.564.125.200
		10. Business Development; Agriculture, Forestry, Fisheries, and Maritime; Industry and Construction; Other Economic Affairs	NAD	-	-	-	-	4.048.000.000	4.048.000.000	-	-	-	-	-	-	4.048.000.000
		11. Business Development; Agriculture, Forestry, Fisheries, and Maritime; Industry and Construction; R & D Economic Affairs; Development of Tourism and Culture; R & D Tourism and Culture	NAD	-	-	-	-	-	-	8.449.970.000	-	-	-	-	-	8.449.970.000
		12. Business Development; Agriculture, Forestry, Fisheries, and Maritime; Other Economic Affairs	NAD	352.783.200	-	61.573.198.800	11.857.972.000	70.779.583.600	50.757.375.200	13.629.625.200	18.138.103.600	-	-	-	-	146.335.190.800
		13. Business Development; Agriculture, Forestry, Fisheries, and Maritime; Other Economic Affairs; Other Environmental Protection Affairs; Publishing and Broadcasting Services	NAD	-	-	-	-	23.285.117.200	-	-	-	-	-	-	-	23.285.117.200
		14. Business Development; Agriculture, Forestry, Fisheries, and Maritime; SubSector to be defined - Economic Development	NAD	-	-	-	-	2.832.928.400	2.065.206.800	-	-	-	-	-	-	2.832.928.400
		15. Business Development; Industry and Construction	NAD	-	-	-	-	15.706.240.000	12.256.240.000	-	-	-	-	-	-	15.706.240.000
		16. Business Development; Industry and Construction; R & D Economic Affairs; Other Environmental Protection Affairs	NAD	-	-	-	-	1.315.204.400	1.250.914.800	1.126.245.600	-	-	-	-	-	2.441.450.000
		17. Business Development; Labor	NAD	-	-	95.332.856.400	39.722.932.000	-	9.730.297.200	5.178.910.000	3.680.000.000	-	-	-	-	100.511.766.400
		18. Business Development; Labor; Agriculture, Forestry, Fisheries, and Maritime	NAD	-	-	46.940.010.000	45.391.861.600	8.092.596.000	4.692.588.800	-	-	-	-	-	-	55.032.606.000

REALISASI DAN RENCANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI (DANA OFF BUDGET)
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
TAHUN 2004 - 2009

BIDANG	PROGRAM UTAMA	SUB BIDANG / KEGIATAN	LOKASI	2004		2005		2006		2007		2008	2009	TOTAL
				COMMITTED (RUPIAH)	DISBURSED (RUPIAH)	COMMITTED (RUPIAH)	DISBURSED (RUPIAH)	COMMITTED (RUPIAH)	DISBURSED (RUPIAH)	COMMITTED (RUPIAH)	DISBURSED (RUPIAH)	COMMITTED (RUPIAH)	COMMITTED (RUPIAH)	COMMITTED (RUPIAH)
		19 Business Development; Labor; Agriculture, Forestry, Fisheries, and Maritime; Development of Tourism and Culture	NAD	-	-	292.872.800	69.837.200	95.680.000	95.680.000	-	-	-	-	388.552.800

REALISASI DAN RENCANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI (DANA OFF BUDGET)
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
TAHUN 2004 - 2009

BIDANG	PROGRAM UTAMA	SUB BIDANG / KEGIATAN	LOKASI	2004		2005		2006		2007		2008		2009		TOT
				COMITTED (RUPIAH)	DISBURSED (RUPIAH)	COMITTED (RUPIAH)	DISBURSED (RUPIAH)	COMITTED (RUPIAH)	DISBURSED (RUPIAH)	COMITTED (RUPIAH)	DISBURSED (RUPIAH)	COMITTED (RUPIAH)	DISBURSED (RUPIAH)	COMITTED (RUPIAH)	DISBURSED (RUPIAH)	
		20 Business Development; Labor; Agriculture, Forestry, Fisheries, and Maritime; Industry and Construction	NAD	-	-	12.815.600	12.815.600	-	-	-	-	-	-	-	-	12.815.600
		21 Business Development; Labor; Agriculture, Forestry, Fisheries, and Maritime; Industry and Construction; All SubSectors - Economic Development	NAD	-	-	4.926.710.400	2.626.563.200	-	2.300.147.200	-	-	-	-	-	-	4.926.710.400
		22 Business Development; Labor; Agriculture, Forestry, Fisheries, and Maritime; Other Economic Affairs	NAD	-	-	27.530.006.400	8.259.005.600	-	16.510.011.200	-	-	-	-	-	-	27.530.006.400
		23 Business Development; Labor; Industry and Construction	NAD	-	-	5.761.601.200	2.304.636.800	-	2.880.796.000	-	418.351.600	-	-	-	-	5.761.601.200
		24 Business Development; Other Economic Affairs	NAD	-	-	36.361.408.400	1.451.042.400	-	17.762.734.400	-	15.307.631.600	-	-	-	-	36.361.408.400
		25 Business Development; Other Environmental Protection Affairs	NAD	-	-	1.902.679.600	354.411.600	1.446.543.600	1.446.552.800	-	-	-	-	-	-	3.349.223.200
		26 Business Development; Other Environmental Protection Affairs; Development of Tourism and Culture	NAD	-	-	-	330.022.400	748.898.400	69.809.600	44.426.800	-	-	-	-	-	793.325.200
		27 Business Development; R & D Economic Affairs	NAD	-	-	2.041.544.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.041.544.400
		28 Development of Tourism and Culture	NAD	-	-	4.406.846.000	4.406.846.000	401.120.000	-	-	401.120.000	-	-	-	-	4.807.966.000
		29 Development of Tourism and Culture; Other Tourism and Culture Affairs	NAD	-	-	294.400.000	-	-	294.400.000	-	-	-	-	-	-	294.400.000
		30 Industry and Construction	NAD	-	-	3.558.044.800	2.105.926.000	1.983.685.600	2.867.897.600	-	-	-	-	-	-	5.541.730.400
		31 Industry and Construction; SubSector to be defined - Economic Development	NAD	-	-	4.440.000.000	4.600.000.000	1.840.000.000	6.900.000.000	173.392.400	-	-	-	-	-	13.340.000.000
		32 Labor	NAD	-	-	95.929.054.000	72.423.062.400	21.082.776.400	130.345.600	3.278.392.400	-	-	-	-	-	101.334.099.600
		33 Labor; Agriculture, Forestry, Fisheries, and Maritime	NAD	-	-	67.122.703.200	53.303.254.400	9.099.175.200	13.645.780.400	247.388.000	2.908.773.200	-	-	-	-	76.465.266.400
		34 Labor; Agriculture, Forestry, Fisheries, and Maritime; All SubSectors - Economic Development	NAD	-	-	28.713.614.000	17.228.168.400	-	8.614.088.800	-	-	-	-	-	-	28.713.614.000
		35 Labor; Agriculture, Forestry, Fisheries, and Maritime; Industry and Construction; All SubSectors - Economic Development	NAD	-	-	26.943.331.600	-	-	26.943.331.600	-	-	-	-	-	-	26.943.331.600
		36 Labor; Development of Tourism and Culture	NAD	-	-	-	-	30.562.400	21.601.600	-	-	-	-	-	-	30.562.400
		37 Labor; Industry and Construction	NAD	-	-	23.000.000.000	23.000.000.000	23.000.000.000	23.000.000.000	-	-	-	-	-	-	46.000.000.000
		38 Other Economic Affairs	NAD	-	-	74.344.344.400	74.249.842.000	150.797.402.400	15.403.356.400	2.569.238.000	804.586.000	-	-	-	-	227.710.984.000
		39 Other Environmental Protection Affairs	NAD	-	-	6.577.034.000	-	6.302.947.600	90.794.800	7.242.368.800	-	-	-	-	-	20.122.350.400
		40 R & D Tourism and Culture; Other Tourism and Culture Affairs	NAD	-	-	202.400.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	202.400.000
		41 SubSector to be defined - Economic Development	NAD	-	-	78.805.939.600	11.852.452.000	62.051.194.000	14.388.698.800	3.816.298.000	4.102.298.400	-	-	-	-	144.673.431.600
KELEMBAGAAN DAN HUKUM				5.520.000.000	-	1.619.114.016.000	954.686.766.000	668.866.249.600	306.116.466.800	51.318.814.800	94.487.772.000	-	-	-	-	2.336.818.280.400
		1 All SubSectors - Apparatus Development	NAD	5.520.000.000	-	2.287.741.633.200	85.089.889.200	129.434.882.800	142.510.392.000	-	73.048.000	-	-	-	-	363.696.516.000
		2 Apparatus Development	NAD	-	-	186.510.956.000	42.236.353.600	-	-	-	72.478.501.600	-	-	-	-	186.510.956.000
		3 Apparatus Development; General Services	NAD	-	-	-	-	-	82.343.808.800	-	-	-	-	-	-	82.343.808.800
		4 Apparatus Development; General Services; Other Government Public Services	NAD	-	-	9.171.838.800	1.657.361.600	-	-	-	-	-	-	-	-	9.171.838.800
		5 Apparatus Development; Legal Affairs; Other Legal Affairs, Public Order and	NAD	-	-	440.346.941.600	440.346.941.600	-	-	-	-	-	-	-	-	440.346.941.600
		6 Apparatus Development; Regional Development; SubSector to be defined -	NAD	-	-	32.200.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.200.000.000
		7 Basic Research and Development of Science and Technology	NAD	-	-	1.843.983.600	980.858.000	6.085.496.400	584.862.400	-	22.116.800	-	-	-	-	7.929.480.000
		8 Basic Research and Development of Science and Technology; R & D Government	NAD	-	-	858.268.000	858.268.000	1.302.444.000	680.018.000	-	-	-	-	-	-	2.160.712.000
		9 Community Development	NAD	-	-	306.711.587.200	138.571.964.000	17.694.516.400	35.436.992.400	3.646.401.600	832.278.000	-	-	-	-	328.052.505.200
		10 Community Development; All SubSectors - Apparatus Development	NAD	-	-	11.968.657.200	11.968.657.200	-	-	-	-	-	-	-	-	11.968.657.200
		11 Community Development; Disaster Relief	NAD	-	-	8.755.750.400	437.634.800	-	-	-	-	-	-	-	-	10.535.913.600
		12 Community Development; General Services	NAD	-	-	94.642.497.600	94.642.497.600	98.062.800	162.021.200	1.682.100.400	1.013.481.200	-	-	-	-	94.642.497.600
		13 Community Development; Other Defense Affairs	NAD	-	-	5.520.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.520.000.000
		14 Community Development; Other Government Public Services	NAD	-	-	1.125.298.000	168.967.200	-	863.328.000	-	-	-	-	-	-	1.125.298.000
		15 Community Development; Regional Development	NAD	-	-	211.600.000	-	-	-	4.439.092.000	-	-	-	-	-	4.650.692.000
		16 Disaster Relief	NAD	-	-	88.988.117.600	-	137.046.768.400	6.627.293.600	28.960.800	28.060.800	-	-	-	-	286.062.538.000
		17 Foreign Aid	NAD	-	-	7.569.622.000	-	920.000.000	920.000.000	-	-	-	-	-	-	8.489.622.000
		18 Foreign Aid; General Services	NAD	-	-	2.106.873.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.106.873.600
		19 General Services	NAD	-	-	18.902.292.800	9.807.890.000	43.591.292.800	26.331.504.000	15.708.144.400	6.780.924.400	-	-	-	-	78.201.729.600
		20 R & D Government Public Services	NAD	-	-	39.875.366.800	-	-	14.691.930.800	-	-	-	-	-	-	39.875.366.800
		21 R & D Government Public Services; Judicature	NAD	-	-	2.888.800.000	1.398.400.000	50.364.830.400	1.881.400.000	-	-	-	-	-	-	53.253.20.400
		22 Other Government Public Services	NAD	-	-	46.776.130.400	15.260.104.400	51.935.518.000	42.041.663.200	5.777.747.200	12.497.298.400	-	-	-	-	104.489.395.600
		23 Other Legal Affairs, Public Order and Safety	NAD	-	-	5.342.559.600	5.342.559.600	4.586.282.800	2.795.870.800	-	413.604.400	-	-	-	-	9.928.842.400
		24 Police Services	NAD	-	-	184.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	184.000.000
		25 R & D Government Public Services	NAD	-	-	27.496.969.200	1.291.082.000	130.932.210.400	13.004.236.800	-	-	-	-	-	-	158.429.179.600
		26 R & D Government Public Services; Judicature	NAD	-	-	-	-	633.861.600	534.131.600	-	-	-	-	-	-	633.861.600
		27 Regional Development	NAD	-	-	9.021.262.400	2.817.325.200	920.000.000	2.355.273.600	20.036.468.400	348.459.200	-	-	-	-	29.977.730.800
		28 SubSector to be defined - Apparatus Development	NAD	-	-	31.353.011.200	12.917.701.600	2.976.292.000	14.695.546.400	-	-	-	-	-	-	34.329.303.200
ADMINISTRASI				-	-	1.293.236.410.000	715.595.044.000	144.944.417.600	230.114.273.200	223.285.628.400	54.717.883.200	-	-	-	-	1.661.466.456.000
		1 Administrative and Other Costs	NAD	-	-	261.546.008.800	70.996.952.000	64.155.068.400	120.915.140.000	10.421.787.600	11.087.205.200	-	-	-	-	336.122.864.800
		2 a. All SubSectors - SECTOR TO BE DEFINED	NAD	-	-	4.600.000.000	4.600.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	4.600.000.000
		b. SubSector to be defined - SECTOR TO BE DEFINED	NAD	-	-	24.194.233.600	3.939.624.000	3.622.141.200	15.185.041.600	-	-	-	-	-	-	27.816.374.800
		3 Unallocated	NAD	-	-	1.002.896.167.600	636.058.468.000	77.167.208.000	94.014.091.600	212.863.840.800	43.630.678.000	-	-	-	-	1.292.927.216.400
TOTAL				223.073.586.800	87.048.578.400	22.054.888.738.000	10.008.097.916.000	6.436.511.332.400	4.534.199.456.400	1.115.312.907.600	1.089.755.538.800	757.886.265.000	920.000.000	-	-	30.588.586.829.800

Sumber : BRR Nias (Juni 2007) dan Analisis Tim P3B Bappenas, 2007
Keterangan : 1 USD = IDR 9.200
Data RAN DATABASE BRR Status Tanggal 23 Juli 2007

AL
DISBURSED (RUPIAH)
7.959.000.166.800
2.675.339.612.000
2.483.240.346.800
131.224.190.800
33.790.744.400
27.084.330.800
284.468.554.000
106.385.570.800
19.686.648.000
82.754.000
7.360.073.600
1.038.468.400
22.432.277.200
81.633.430.800
318.991.600
32.006.784.000
1012.000.000
12.421.554.800
3.684.661.143.200
254.122.804.800
707.001.600
262.615.702.000
157.292.712.800
192.804.400
33.062.886.400
110.371.976.800
23.980.867.200
349.188.888.800
38.772.618.000
10.331.268.800
137.125.944.800
185.379.558.400
3.978.126.000
5.875.138.400
5.379.856.400
119.994.744.400
1.094.800.000
53.408.750.800
758.167.906.000
66.046.054.800
163.220.263.600
576.090.972.800
1.740.934.400
6.960.379.600
1.135.804.400
3.545.342.000
3.472.291.600
160.411.200
29.112.498.400
322.131.633.600
4.771.997.790.400
4.305.771.488.000
1.851.453.871.200
150.605.548.400
3.557.327.200
21.274.862.000
30.360.000
39.268.985.600
2.043.310.800
2.593.848.000
319.387.200
3.312.000.000
46.401.156.800
25.710.953.200
276.000.000
2.612.800.000
3.617.844.800
8.585.100.000
18.932.983.600
1.104.938.501.200

AL
DISBURSED (RUPIAH)
23.000.000
76.604.800
48.856.774.800

DISBURSED (RUP/IAH)
762.450.000
604.670.000
6.747.537.600
7.813.293.200
46.243.796.400
360.005.200
22.346.548.000
78.656.743.200
108.534.755.200
37.685.932.400
10.086.245.200
620.133.600
11.706.107.600
3.468.860.000
73.362.325.200
2.215.051.156.000
656.531.715.600
33.329.925.600
496.328.400
3.735.200.000
36.478.000.000
9.343.378.800
2.796.873.600
23.142.011.200
3.624.238.800
5.909.583.200
3.472.954.000
4.048.009.200
19.320.000.000
5.516.982.400
17.736.118.800
1.136.378.000
16.978.204.400
27.056.312.800
3.634.570.000
13.340.000.000
1.727.474.800
50.346.340.400
97.578.000
960.854.780.400
9.529.801.600
1.749.591.600
978.797.200
313.158.800
18.291.973.600
533.025.600
23.045.264.000
239.266.460.800
61.260.463.200
235.152.000
3.354.835.200
174.416.010.400
466.226.302.400
78.853.788.800
25.697.872.400
16.960.945.200
4.122.860.400
13.907.962.000
5.579.284.800
12.584.864.000

AL
DISBURSED (RUPIAH)

[illegible]

AL
DISBURSED (RUPIAH)

[illegible]

AL
DISBURSED (RUPIAH)

[illegible]

AL
DISBURSED (RUPIAH)
165.517.200

AL
DISBURSED (RUPIAH)
12.815.600
4.926.710.400
24.777.016.800
5.603.784.400
34.521.400.400
18.000.964.400
399.832.000
4.807.966.000
294.400.000
4.573.823.600
6.613.392.400
97.584.225.200
69.857.808.000
25.842.257.200
26.943.331.600
21.601.600
46.000.000.000
90.457.684.400
90.794.800
30.343.449.200
1.355.241.004.800
2.276.733.292.00
114.714.855.200
1.657.361.600
440.346.941.600
1.587.837.200
1.538.286.000
174.841.234.400
11.968.657.200
181.313.720.00
94.642.497.600
1.032.295.200
95.467.664.000
920.000.000
42.920.318.400
14.691.930.800
3.279.800.000
69.799.066.000
8.552.034.800
14.295.318.800
134.133.600
5.521.058.000
27.613.248.000
1.000.427.200.400
202.599.297.200
4.600.000.000
19.124.665.600
773.703.237.600
15.719.101.489.600

**REKAPITULASI PEMETAAN PENDANAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
TAHUN 2007 - 2009**

BIDANG	PROGRAM UTAMA	ON Budget			OFF Budget			KETERANGAN
		2007	2008	2009	2007	2008	2009	
PERUMAHAN, PERMUKIMAN, TATA		2.877.396.800.000	1.898.913.755.000	0	2.141.194.356.400	0	0	
	1 Perumahan	2.637.826.800.000	1.772.399.755.000	0	1.585.763.382.000	0	0	
	2 Tata Ruang	37.570.000.000	20.750.000.000	0	555.430.974.400	0	0	
	3 Pertanahan	202.000.000.000	80.000.000.000	0				
	4 Lingkungan Hidup	0	25.764.000.000	0				
INFRASTRUKTUR		2.352.072.243.975	4.301.125.370.000	2.927.718.999.000	4.829.641.301.200	276.000.000	276.000.000	
	1 Jalan dan Transportasi	1.275.738.204.000	2.118.380.413.000	2.472.159.500.000	4.829.641.301.200	276.000.000	276.000.000	
	2 Energi & Telekomunikasi	237.568.188.000	183.504.870.000	0				
	3 Sumber Daya Air	320.580.561.275	357.215.000.000	374.111.750.000				
	4 Air dan Sanitasi	179.225.803.000	1.233.943.377.000	0				
	5 Infrastruktur Lingkungan dan Pemeliharaan	20.866.516.000	89.400.000.000	0				
	6 Kawasan Percontohan	75.222.499.700	0	0				
	7 Bangunan Gedung Negara dan Rumah	84.220.472.000	175.810.716.000	0				
	8 IREP	158.650.000.000	142.870.994.000	81.447.749.000				
SOSIAL KEMASYARAKATAN		559.849.038.000	509.163.602.000	0	3.904.953.044.400	757.604.265.000	644.000.000	
	1 Pendidikan, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan	430.715.000.000	211.760.800.000	0	3.567.686.464.400	644.000.000	644.000.000	
	- Pendidikan	339.655.000.000	177.404.800.000	0	2.043.598.070.000	460.000.000	460.000.000	
	- Kesehatan	47.799.000.000	26.780.000.000	0	1.290.286.678.400	184.000.000	184.000.000	
	- Pemberdayaan Perempuan	43.261.000.000	7.576.000.000	0	233.801.716.000	0	0	
	2 Agama, Sosial, Budaya, Pemuda dan Olahraga	129.134.038.000	297.402.802.000	0	337.266.580.000	756.960.265.000	0	
	- Agama	74.291.068.000	122.561.295.000	0	17.806.684.800	122.200.000.000	0	
	- Sosial	9.750.000.000	53.339.500.000	0	303.881.096.800	400.000.000.000	0	
	- Budaya	2.600.000.000	98.518.750.000	0	1.000.000.000	147.598.265.000	0	
	- Pemuda dan Olahraga	42.492.970.000	22.983.257.000	0	14.578.798.400	87.162.000.000	0	
		784.751.129.000	840.415.620.000	0	1.592.249.842.000	0	0	
	1 Pertanian	285.823.569.000	84.319.560.000	-	1.592.249.842.000	0	0	
PEREKONOMIAN	- Tanaman Pangan & Hortikultura	86.551.300.000	17.970.000.000					
	- Perkebunan	75.541.000.000	14.819.160.000					
	- Peternakan	55.232.450.000	47.000.000.000					
	- Kehutanan	68.498.819.000	4.530.400.000					
	2 Perikanan	203.002.000.000	666.388.060.000	-		-	-	
	3 Pengembangan Usaha	295.925.560.000	89.708.000.000	-		-	-	
	- Industri	44.951.000.000	9.000.000.000					
	- Perdagangan	56.164.000.000	4.500.000.000					
	- Tenaga kerja	20.794.660.000	2.500.000.000					
	- Koperasi dan UKM	142.928.900.000	39.808.000.000					
	- Pariwisata	31.087.000.000	33.900.000.000					
		606.483.148.000	154.721.961.000	0	981.607.275.600	0	0	
	1 Kelembagaan Daerah	327.154.872.000	145.721.961.600	0	981.607.275.600	0	0	
	2 Hukum	80.220.160.000	2.000.000.000	0				
	3 K3M	199.108.116.000	7.000.000.000	0				
BIAYA MANAJEMEN		179.513.808.974	280.000.000.000	0	661.039.255.600	0	0	
TOTAL		7.360.066.167.949	7.984.340.308.600	2.927.718.999.000	14.110.685.075.200	757.880.265.000	920.000.000	

Sumber : BRR Nias (Juni 2007) dan Analisis Tim P3B Bappenas, 2007

**RENCANA KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI (DANA ON BUDGET)
KABUPATEN NIAS, KEPULAUAN NIAS, PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN 2007 - 2009**

BIDANG	PROGRAM UTAMA	SUB BIDANG/KEGIATAN	2007		2008		2009		KETERANGAN
			Nilai (Rupiah)	Volume	Nilai (Rupiah)	Volume	Nilai (Rupiah)	Volume	
PERUMAHAN, PERMUKIMAN, TATA RUANG, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	A Perumahan dan Permukiman	92.722.325.000		73.000.000.000		0		
			80.680.000.000		73.000.000.000		0		
		1 Rekonstruksi	79.450.000.000	1,215 unit					
		2 Rehabilitasi	800.000.000	100 unit					
		3 Merancang Masa Depan Desa (KRRP)	430.000.000	1 pkt					
		4 Pembangunan Rumah			52.000.000.000	1.000 unit			
		5 Rehabilitasi Rumah			12.000.000.000	1.500 unit			
		6 Pembangunan Prasarana			5.000.000.000	1.000 unit			
		7 Konsultan Pengawasan (pembangunan rumah)			2.000.000.000	1 pkt			
	8 Konsultan pendamping/Fasilitator			2.000.000.000	1 pkt				
	PERTANAHAN	B Pembuatan Sertifikat Tanah Kab. Nias	12.042.325.000		0		0		
		1 Pengadaan tanah	5.250.000.000	3 pkt					
		2 Peralatan & gedung kantor pertanahan	1.400.000.000	2 pkt					
		3 Sertifikasi tanah permukiman	2.652.325.000	5.000 bidang					
		4 Peralatan pengukuran dan pemetaan	2.740.000.000	6 unit					
	INFRASTRUKTUR			472.846.648.920		1.230.831.505.246		251.805.537.600	
	JALAN DAN TRANSPORTASI	A TRANSPORTASI LAUT DAN ASDP	383.475.845.000		1.148.151.500.000		240.110.000.000		
		A.1. TRANSPORTASI LAUT	46.910.000.000		31.300.000.000		0		
			46.910.000.000		31.300.000.000		0		
		Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pelabuhan							
		1 Rehabilitasi Pelabuhan Gunungsitoli	25.550.000.000	1 unit					
2 Rehabilitasi Pelabuhan Lahewa		8.510.000.000	1 unit						
3 Rehabilitasi Pelabuhan Sirombu		12.850.000.000	1 unit						
4 Rehab Rekonstruksi Pelabuhan Laut Nias				10.000.000.000	1 pkt				
5 Pembangunan Pelabuhan Gunungsitoli (lanjutan TA 2007)				7.000.000.000	1 pkt				
6 Pembangunan Pelabuhan Lahewa (lanjutan TA 2007)				5.000.000.000	1 pkt				
7 Pembangunan Pelabuhan Sirombu (lanjutan TA 2007)				7.000.000.000	1 pkt				
Konsultan									
1 Pengawasan Pelabuhan Gunungsitoli				1.250.000.000	1 pkt				
2 Pengawasan Pelabuhan Lahewa				350.000.000	1 pkt				
3 Pengawasan Pelabuhan Sirombu				700.000.000	1 pkt				
B. TRANSPORTASI UDARA		24.465.700.000		41.755.000.000		25.750.000.000			
1 Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bandara		24.465.700.000		41.755.000.000		25.750.000.000			
1 Bandar Udara Binaka		24.465.700.000	1 unit						
2 Pembangunan Apron Bandara Binaka				7.000.000.000	1 pkt				
3 Pembangunan Terminal Penumpang Bandara Binaka				5.000.000.000	1 pkt				
4 Perbaikan Elevasi dan Overlay Runway Bandara Binaka				14.000.000.000	1 pkt				
5 Perbaikan Shoulder Bandara Binaka				3.000.000.000	1 pkt				
6 Pembangunan Gedung Operasi & Bengkel Bandara Binaka				1.666.000.000	1 pkt				
7 Pembangunan Gedung Genset dan kantin Bandara Binaka				1.330.000.000	1 pkt				
8 Pembangunan Lapangan Parkir Kendaraan Bandara Binaka				5.000.000.000	3 unit				
9 Pembangunan Rumah Dinas Type 70 M2 Bandara Binaka				750.000.000	1 unit				
10 Pemb. Gedung PK - PPK Bandara Binaka				2.000.000.000	1 pkt				
11 Perpanjangan runway Bandara Binaka						25.000.000.000	1 pkt		
Konsultan									
1 Pengawasan Pembangunan Apron Bandara Binaka				350.000.000	1 pkt				
2 Pengawasan Pembangunan Terminal Penumpang Bandara Binaka				250.000.000	1 pkt				
3 Supervisi Perbaikan Elevasi dan Overlay Runway Bandara Binaka				700.000.000	1 pkt				
4 Supervisi Perbaikan Shoulder Bandara Binaka				150.000.000	1 pkt				
5 Pengawasan Pemb. Gedung Operasi & Bengkel Bandara Binaka				90.000.000	1 pkt				
6 Pengawasan Ruang Genset dan Kantin Bandara Binaka				75.000.000	1 pkt				
7 Pengawasan Pemb. Lapangan Parkir Kendaraan Bandara Binaka				250.000.000	1 pkt				
8 Pengawasan Pemb. Rumah Dinas Type 70 M2 Bandara Binaka				45.000.000	1 unit				
9 Pengawasan Pemb. Gedung PK - PPK Bandara Binaka				99.000.000	1 pkt				
10 Pengawasan Perpanjangan runway Bandara Binaka						750.000.000	1 pkt		
C. TRANSPORTASI DARAT		7.200.000.000		13.974.000.000		2.000.000.000			
C.1. Terminal Bus		7.200.000.000		13.974.000.000		2.000.000.000			
Pengadaan Sarana dan Prasarana Transportasi Darat									
1 Rehabilitasi Terminal Bus Gunungsitoli		2.950.000.000	1 unit						
2 Pembangunan Terminal Bus Lahewa									
3 Pembangunan Terminal Bus Sirombu		4.250.000.000	1 unit						
4 Pengadaan Bus Penumpang (DAMRI)							2000000000	5 UNIT	
5 Pembangunan Terminal Bus Gunungsitoli (lanjutan TA 2007)						2.000.000.000	1 pkt		
6 Pembangunan Terminal Bus Lahewa						5.000.000.000	1 pkt		
7 Pembangunan Terminal Bus Sirombu (lanjutan TA 2007)						1.000.000.000	1 pkt		
8 Pengadaan dan Pemasangan Guard Rail						2.000.000.000	1 PKT		
9 Pengadaan rambu-rambu dan lampu lalu lintas					3.000.000.000	1 PKT			

RENCANA KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI (DANA ON BUDGET)
KABUPATEN NIAS, KEPULAUAN NIAS, PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN 2007 - 2009

BIDANG	PROGRAM UTAMA	SUB BIDANG/KEGIATAN	2007		2008		2009		KETERANGAN
			Nilai (Rupiah)	Volume	Nilai (Rupiah)	Volume	Nilai (Rupiah)	Volume	
		Konsultan							
		1 Pengawasan Terminal Bus Gunungsitoli (lanjutan TA 2007)			99.000.000	1 pkt			
		2 Pengawasan Terminal Bus Lahewa			250.000.000	1 pkt			
		3 Pengawasan Terminal Bus Sirombu (lanjutan TA 2007)			75.000.000	1 pkt			
		4 Pengawasan Pemasangan Guard Rail			400.000.000	1 PKT			
		5 Pengawasan Pemasangan Rambu lalulintas			150.000.000	1 PKT			
		D. JALAN	304.900.145.000		1.061.122.500.000				
		D.1. Jalan Nasional dan Provinsi	228.266.357.000		551.500.000.000		212.360.000.000		
		1 Rehab. Rekonstruksi Jl. Gunungsitoli - Tuhemberua - Lahewa	14.528.122.500	9,08 km					
		2 Rehab. Rekonstruksi Jl. Moi - Lolowa'u - Sirombu	15.301.604.500	9,56 km					
		3 Rehab. Rekonstruksi Jl. Moi - Mandrehe - Sirombu	15.456.805.500	9,66 km					
		4 Rehab. Rekonstruksi Jl. Tuhemberua	14.228.666.500	8,89 km					
		5 Rehab. Rekonstruksi Jl. Lahewai - Afulu	15.278.666.500	9,55 km					
		6 Rehab. Rekonstruksi Jl. Migai - Moi I	17.028.666.500	10,64 km					
		7 Rehab. Rekonstruksi Jl. Gunungsitoli - Binaka I	15.296.166.500	9,56 km					
		8 Rehab. Rekonstruksi Jl. Binaka - Lahusa	15.148.666.500	9,47 km					
		9 Rehab. Rekonstruksi Jl. Sp. Awa'ai - Sp. Lotu	11.378.666.500	7,11 km					
		10 Rehab. Rekonstruksi Jl. Idanogawo - Lahusa	11.378.666.500	7,11 km					
		11 Rehab. Rekonstruksi Jl. Miga-Moi	2.578.666.500	1,61 km					
		12 Rehab. Rekonstruksi Jl. Miga - Borombawo STA. 5 + 000 s.d. 17 + 000 (24 Milyar)	3.878.666.500	2,42 km					
		13 Rehab. Rekonstruksi Jl. Botombawo - Lalai STA. 17 + 000 s.d. 23 + 000 (22 Milyar)	3.378.666.500	2,11 km					
		14 Rehab. Rekonstruksi Jl. Moi - Soliga - Lolowau (Rp 34 Milyar)	4.378.666.500	2,74 km					
		15 Rehab. Rekonstruksi Jl. Mandrehe - Lasarafaga - Sirombu (Rp 36 Milyar)	4.878.666.500	3,05 km					
		16 Rehab. Rekonstruksi Jl. Idanogawo - Lahusa (Rp. 10 Milyar)	2.878.666.500	1,80 km					
		17 Belanja Bahan Material Untuk Bakti TNI	4.500.000.000	2,81 km					
		18 Pembangunan Gedung Workshop Kab. Nias	3.500.000.000	2,19 km					
		19 Bakti TNI Pemb. Bid. Sarana dan Prasarana Kep. Nias	24.500.000.000	15,31 km					
		20 Rehab. Rekons. Jembatan Siwalawa I, Siwalawa II & Lahusa (Lanjutan)	2.851.660.000	1,00 unit					
		21 Rehab. Rekons. Jembatan Muzoi Km. 67+690	5.523.000.000	1,00 unit					
		22 Rehab. Rekons. Jembatan Lafao, Fofola, Mo'awo, Taliwa'a	13.795.000.000	1,00 unit					
		23 Rehab. Rekons. Jembatan Box Culvert Km. 12 + 800 Desa Humene	1.300.000.000	1,00 unit					
		24 Rehab. Rekons. Jembatan Box Culvert Km. 15 + 170 Desa Humene	1.300.000.000	1,00 unit					
		25 Rehab. Rekons. Jembatan Km. 39 Kec. Idonogawo	4.000.000.000	2,50 km					
		26 Rehab. Rekonstruksi Jl. Sp.Awa'ai km 12- Sp. Lotu Km17 (Multiyears)			15.000.000.000	1 pkt			
		27 Rehab. Rekonstruksi Jl. Lotu km 4 - Lahewa km 21 (Multiyears)			33.000.000.000	1 pkt			
		28 Rehab. Rekonstruksi Jl. Idanogawo - Lahusa (Multiyears)			10.000.000.000	1 pkt			
		29 Rehab. Rekonstruksi Jl. T. Dalam - Amandraya (Multiyears)			10.000.000.000	1 pkt			
		30 Rehab. Rekonstruksi Jl. Lahewa - Afulu			45.000.000.000	22 km			
		31 Rehab. Rekonstruksi Jl. Tuhemberua-Lahewa			27.750.000.000	17 km			
		32 Rehab. Rekonstruksi Jl. Lahusa - Teluk Dalam - Lolowa'u			49.500.000.000	30 km			
		33 Rehab. Rekonstruksi Jl. Teluk Dalam - Amandraya			15.000.000.000	10 km			
		34 Rehab. Rekonstruksi Jl. Sp. Awa'ai - Sp. Lotu			21.750.000.000	13 km			
		35 Rehab. Rekonstruksi Jl. Binaka - Idanogawo - Lahusa			20.000.000.000	10 km			
		36 Rehab. Rekonstruksi Jl. Tuhemberua - Sawo (Hotmix)			30.000.000.000	19 km			
		37 Rehab. Rekonstruksi Jl. Sawo - Simp. Lotu							
		38 Rehab. Rekonstruksi Jl. Tetehosi (Idano Gawo)-Lahusa (widening dan Overlay Hotmix)			50.500.000.000	25 km	24.000.000.000	15 km	
		39 Rehab. Rekonstruksi Jl. Lolowa'u-Sirombu (overlay hotmix)			48.750.000.000	30 km			
		40 Rehab. Rekonstruksi Jl. Miga - Lolowa'u (Rusak berat/ pembangunan baru)			62.250.000.000	39 KM			
		41 Rehab. Rekonstruksi Jl. Miga - Moi			30.000.000.000	16 KM			
		42 Rehab. Rekonstruksi Jl. Teluk Dalam - Lolowau			50.000.000.000	30 KM			
		43 Rehab. Rekonstruksi Jl. Sisarahilioyo - Tuhemberua					24.000.000.000	12 KM	
		44 Rehab. Rekonstruksi Jl. Alasa - Tumula (pembangunan jalan kabupaten)			33.000.000.000	30 km			
		D.2. Pengawasan Teknik Jalan dan Jembatan	-		30.467.500.000		2.160.000.000		
		1 Paket Pengawasan Rekonstruksi Jl. Sp.Awa'ai - Sp. Lotu (Multiyears)			675.000.000	1 pkt			
		2 Rehab. Rekonstruksi Jl. Lotu km 4 - Lahewa km 21 (Multiyears)			1.485.000.000	1 pkt			
		3 Paket Pengawasan Rekonstruksi Jl. Idanogawo - Lahusa (Multiyears)			450.000.000	1 pkt			
		4 Paket Pengawasan Rekonstruksi Jl. T. Dalam - Amandraya (Multiyears)			450.000.000	1 pkt			
		5 Paket Pengawasan Rekonstruksi Jl. Lahewa - Afulu			2.025.000.000	1 pkt			
		6 Paket Pengawasan Rekonstruksi Jl. Tuhemberua-Lahewa			1.248.750.000	1 pkt			
		7 Paket Pengawasan Rekonstruksi Jl. Lahusa - Teluk Dalam - Lolowa'u			2.227.500.000	1 pkt			
		8 Paket Pengawasan Rekonstruksi Jl. Teluk Dalam - Amandraya			675.000.000	1 pkt			
		9 Paket Pengawasan Rekonstruksi Jl. Sp. Awa'ai - Sp. Lotu			978.750.000	1 pkt			
		10 Paket Pengawasan Rekonstruksi Jl. Binaka - Idanogawo - Lahusa			900.000.000	1 pkt			
		11 Paket Pengawasan Rekonstruksi Jl. Tuhemberua - Sawo (Hotmix)			1.350.000.000	1 pkt			
		12 Paket Pengawasan Rekonstruksi Jl. Sawo - Simp. Lotu					1.080.000.000	1 pkt	
		13 Paket Pengawasan Rekonstruksi Jl. Tetehosi (Idano Gawo)-Lahusa (widening dan Overlay Hotmix)			2.272.500.000	1 pkt			
		14 Paket Pengawasan Rekonstruksi Jl. Lolowa'u-Sirombu (overlay hotmix)			2.193.750.000	1 pkt			
		15 Paket Pengawasan Rekonstruksi Jl. Miga - Lolowa'u (Rusak berat/ pembangunan baru)			2.801.250.000	1 pkt			
		16 Paket Pengawasan Teknik Jalan & Jembatan Kab. Nias Selatan			3.000.000.000	1 pkt			
		17 Paket Pengawasan Teknik Jalan dan Jembatan Kab. Nias			4.000.000.000	1 pkt			
		18 Pengawasan Rehab. Rekonstruksi Jl. Teluk Dalam - Lolowau			2.250.000.000	1 PKT			
		19 Pengawasan Rehab. Rekonstruksi Jl. Sisarahilioyo - Tuhemberua					1.080.000.000	1 PKT	

RENCANA KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI (DANA ON BUDGET)
KABUPATEN NIAS, KEPULAUAN NIAS, PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN 2007 - 2009

BIDANG	PROGRAM UTAMA	SUB BIDANG/KEGIATAN	2007		2008		2009		KETERANGAN
			Nilai (Rupiah)	Volume	Nilai (Rupiah)	Volume	Nilai (Rupiah)	Volume	
		20 Pengawasan Rehab. Rekonstruksi Jl. Alasa - Tumula (pembangunan jalan kabupaten)			1.485.000.000	1 pkt			
		D.3. Perencanaan Teknik Jalan dan Jembatan	-		2.950.000.000		-		
		1 Perencanaan Jalan Full Design Jalan Propinsi			750.000.000	1 pkt			
		2 Perencanaan Jalan Simplified Design			300.000.000	1 pkt			
		3 Perencanaan Jalan Kabupaten Kep. Nias			900.000.000	1 pkt			
		4 Perencanaan Teknik Jembatan			800.000.000	1 pkt			
		5 Perencanaan Teknik Jalan			200.000.000	1 pkt			
		D.4. Pembangunan Jembatan	-		185.625.000.000		-		
		1 Box Culvert Idano Lakha			1.650.000.000	1 pkt			
		2 Box Culvert Idano Helera			1.350.000.000	1 pkt			
		3 Box Culvert Idano Mau'so			1.425.000.000	1 pkt			
		4 Box Culvert Idano Hili'uso			1.350.000.000	1 pkt			
		5 Box Culvert Idano Bogarawi			1.350.000.000	1 pkt			
		6 Box Culvert Idano Moi			1.500.000.000	1 pkt			
		7 Jemb. S. Gido si'ite			7.000.000.000	1 pkt			
		8 Jemb. S. Gido Sebuwa			10.000.000.000	1 pkt			
		9 Jemb. S. Gawo			34.000.000.000	1 pkt			
		10 Jemb. Batu Buaya			8.000.000.000	1 pkt			
		11 Jemb. O'ou			37.000.000.000	1 pkt			
		12 Jemb. Eho			10.000.000.000	1 pkt			
		13 Jemb. Otua			7.000.000.000	1 pkt			
		14 Jemb. S Saruru			6.000.000.000	1 pkt			
		15 Jemb. S Nalua			6.000.000.000	1 pkt			
		16 Jemb. S Lahomi			12.000.000.000	1 pkt			
		17 Jemb. S Sie			5.000.000.000	1 pkt			
		18 Jemb. S Muzoi			7.000.000.000	1 pkt			
		19 Jemb. S Alasa			6.000.000.000	1 pkt			
		20 Jemb. S Sa'uai			12.000.000.000	1 pkt			
		21 Jemb. S Tumula			10.000.000.000	1 pkt			
		D.5. Jalan Kabupaten	76.633.788.000		151.800.000.000		43.200.000.000		
		1 Pemeliharaan periodik jalan ruas Tetehösi - Bozhöna, Kecamatan Idanogawo, Rehabilitasi jalan dalam Kota Gido, Rehabilitasi Jalan ruas Soga'e'adu - Sifaoro'asi Kecamatan Gido	3.000.000.000	4 km					
		2 Rehabilitasi jalan ruas Hilindruria - Namöhalu Kecamatan Namöhalu, Pemeliharaan Periodik Jalan Ruas Awa'ai - Bogali - Lotu Kecamatan Tuhemberua/ Lotu, Pemeliharaan jalan ruas Sawö - Botombawö Kecamatan Tuhemberua	4.500.000.000	5 km					
		3 Rehabilitasi jalan ruas Pasar Baru Lölömojo dhi, dimulai dari Bawadasi Kec. Sirombu, Rehabilitasi Peningkatan Jalan Ruas Onolimbu - Lölöwa'u Kecamatan Sirombu							
		4 Pembangunan Jalan Ruas Lölöhia - Lasarafaga Kecamatan Mandrehe	2.250.000.000	3 km					
		5 Peningkatan Jalan Dalam Kota Gunungsitoli							
		6 Peningkatan Jalan Ruas Hilina'a - Alasa Kecamatan Gunungsitoli/ Alasa	3.000.000.000	3 km					
		7 Lanjutan Pembangunan Ruas DAO - AFIA Kecamatan Lahewa	2.250.000.000	3 km					
		8 Pembangunan Badan Jalan yang longsor ruas Ono Zalukhu	1.351.170.000	1 km					
		9 Lanjutan Rehabilitasi Jalan Ruas Dahana - Tumöri Balöhihi + Gunungsitoli - Faekhu + Hiliwöria - Onozikhö Kecamatan Gunungsitoli(Ex Pemutusan Kontrak)	632.500.000	800 m					
		10 Lanjutan Pemb. Jl. Ruas Alo'oa - Nazalou-Namohalu Esiwa	3.000.000.000	3 km					
		11 Lanjutan Pemb. Jl. Ruas Jalan Kota Gunungsitoli	8.000.000.000	8 km					
		12 Rehab. & Rekon. Jalan Lingkar Luar Selatan (SMA plus kantor Bupati Baru)	3.000.000.000	3 km					
		13 Rehab. & Rekonst. Jalan Afia - Simpang Lima-Nazalou	1.054.689.000	1 km					
		14 Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jalan Lahewa - Afulu via Ono Zalukhu	5.000.000.000	5 km					
		15 Rehab. & Rekonst. Jalan Sawo - Botombawo - Bogali	1.125.000.000	2 km					
		16 Rehab. & Rekonst. Jalan Bogali - Lotu	3.000.000.000	3 km					
		17 Rehab. & Rekonst. Jalan Lafau - Dao - Afia	2.250.000.000	3 km					
		18 Rehab. & Rekonst. Jalan Hilina'a - Alasa - Tumula	3.000.000.000	3 km					
		19 Rehab. & Rekonst. Jalan Namohalu - Alasa	1.500.000.000	2 km					
		20 Rehab. & Rekonst. Jalan Muzoi - Banuasibohou II	1.500.000.000	2 km					
		21 Rehab. & Rekonst. Jalan Lolohia - Lasarafaga	2.250.000.000	3 km					
		22 Rehab. & Rekonst. Jalan Gunung Baru - Hiliwaele - Gunungtua	1.875.000.000	3 km					
		23 Rehab. & Rekonst. Jalan Tetehosi - Holli - Soliga	1.500.000.000	2 km					
		24 Rehab. & Rekonst. Jalan Hiliweto - Lahemo - Mau	2.250.000.000	3 km					
		25 Rehab. & Rekonst. Jalan Hilina'atafu - Siofawall - Tagaule	1.500.000.000	2 km					
		26 Rehab. & Rekonst. Jalan Duria - Sisarahili Ma'u-Lasara Siwalubana	1.500.000.000	2 km					
		27 Rehab. & Rekonst. Jalan Hiluaso - Lahagu	1.500.000.000	2 km					
		28 Rehab. & Rekonst. Jalan Botombawo - Boto Muzoi - Ono Nazara	1.875.000.000	3 km					
		29 Rehab. & rekonst. Jalan Ruas Umbu - Bawadesolo-Iraonolase-Hilina'a+Tumori Balohili-Dahana-Faekhu+SMU Sukma Plus-Pertapakan Kantor Bupati.							
		30 Rehab. & rekonst. Jalan Ruas Hiliweto - Lewa-lewa - Hilimbuasi							
		31 Rehab. & rekonst. Jalan Ruas Huno - Gomo							
		32 Rehab. & rekonst. Jalan Ruas Simaeasi - Onolimbu - Sisobandao							
		33 Rehab. & rekonst. Jalan Ruas Botomuzoi - Lahagu - Doli-doli							
		34 Rehab. & rekonst. Jalan Ruas Alasa - G.Tua-Zuzundrao - Mandrehe							
		35 Rehab. & rekonst. Jalan Ruas Tetehosi - G. Baru-Lasarafaga							
		36 Rehab. & rekonst. Jalan Ruas Zuzundrao - Tetehosi - Tumori - Fadoro Sifulubana							

**RENCANA KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI (DANA ON BUDGET)
KABUPATEN NIAS, KEPULAUAN NIAS, PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN 2007 - 2009**

BIDANG	PROGRAM UTAMA	SUB BIDANG/KEGIATAN	2007		2008		2009		KETERANGAN	
			Nilai (Rupiah)	Volume	Nilai (Rupiah)	Volume	Nilai (Rupiah)	Volume		
		37 Rehab. & rekonst. Jalan Ruas Nazalou - Namohalu								
		38 Rehab. & rekonst. Jalan Ruas Lewa-lewa -Lasara Siwalu Banua-Sifaoro'asi								
		39 Rehab. & rekonst. Jalan Ruas Lauri - Somolo-molo-Holi - Tuhemberua								
		40 Rehab & rekonst. Jalan Ruas Faekhu - Lalai								
		41 Rehab & rekonst. Jalan Ruas Hilina'atafu-Siofaewali-Tagaule								
		42 Rehab & rekonst. Jalan Ruas Duria-Sisarahili Ma'u - Siwalubanua								
		43 Rehab & rekonst. Jalan Ruas Lologolu-Lawelu.								
		44 Rehab & rekonst. Jalan Ruas Afia - Iraonolase								
		45 Rehab & rekonst. Jalan Ruas Tetehosi - Bazihona.								
		46 Penggantian Jembatan Boyo Cs.	3.500.000.000	15 m						
		47 Penggantian Jembatan Teolo Oyo Cs.	3.500.000.000	46 m						
		48 Penggantian Jembatan Idano Mola Cs.	3.000.000.000	36 m						
		49 Penggantian Jembatan Wango Cs.	2.056.451.000	26 m						
		50 Penggantian Jembatan Wango Cs. Jembatan Sawo Kec. Sawo Cs.	913.978.000	5 m						
		51 Rehab. & rekonst. Jalan Ruas Umbu - Bawadesolo-Iraonolase-Hilina'a+Tumori Balohili-Dahana-Faekhu+SMU Sukma Plus-Pertapakan Kantor Bupati.			13.200.000.000	13 km	8.800.000.000	9 km		
		52 Rehab. & rekonst. Jalan Ruas Humo - Gomo			13.800.000.000	14 km	9.200.000.000	9 km		
		53 Rehab. & rekonst. Jalan Ruas Simaesi - Onolimu - Sitobandao			10.000.000.000	10 km				
		54 Rehab. & rekonst. Jalan Ruas Botomuzoi - Lahagu - Doli-doli			12.000.000.000	12 km	8.000.000.000	8 km		
		55 Rehab. & rekonst. Jalan Ruas Alasa - G.Tua-Zuzundao - Mandrehe			13.200.000.000	13 km	8.800.000.000	9 km		
		56 Rehab. & rekonst. Jalan Ruas Tetehosi - G. Baru-Lasara'aga			12.000.000.000	12 km				
		57 Rehab. & rekonst. Jalan Ruas Zuzundao - Tetehosi - Tumori - Fadoro Sifulubanua			5.000.000.000	5 km				
		58 Rehab. & rekonst. Jalan Ruas Nazalou - Namohalu			15.000.000.000	15 km				
		59 Rehab. & rekonst. Jalan Ruas Lewa-lewa -Lasara Siwalu Banua-Sifaoro'asi			12.000.000.000	12 km				
		60 Rehab. & rekonst. Jalan Ruas Lauri - Somolo-molo-Holi - Tuhemberua			15.000.000.000	15 km				
		61 Rehab & rekonst. Jalan Ruas Faekhu - Lalai			12.600.000.000	13 km	8.400.000.000	8 km		
		62 Rehab & rekonst. Jalan Ruas Lologolu-Lawelu.			6.000.000.000	6 km				
		63 Rehab & rekonst. Jalan Ruas Afia - Iraonolase			6.000.000.000	6 km				
		64 Rehab & rekonst. Jalan Ruas Tetehosi - Bazihona.			6.000.000.000	6 km				
		D.6. Jalan dan Jembatan Kab.Nias (Wilayah Utara)			-		47.200.000.000		77.800.000.000	
		1 Rehab. & Rekonst. Jalan Sawo - Botombawo - Bogali					9.600.000.000	10 km	6.400.000.000	6 km
		2 Rehab. & Rekonst. Jalan Bogali - Lotu					3.000.000.000	3 km		
		3 Rehab. & Rekonst. Jalan Lafau - Dao - Afia					4.000.000.000	4 km		
		4 Rehab. & Rekonst. Jalan Hilina'a - Alasa - Tumula					6.600.000.000	7 km	15.400.000.000	15 km
		5 Rehab. & Rekonst. Jalan Namohalu - Alasa					12.000.000.000	12 km	8.000.000.000	8 km
		6 Rehab. & Rekonst. Jalan Muzoi - Banuasibohou II					6.000.000.000	6 km	24.000.000.000	24 km
		7 Rehab. & Rekonst. Jalan Lahewa - Afulu via Ono Zalukhu					6.000.000.000	6 km	24.000.000.000	24 km
		D.7. Jalan dan Jembatan Kab. Nias (Wilayah Tengah-Barat)			-		14.000.000.000		6.000.000.000	
		1 Rehab. & Rekonst. Jalan Lolohia - Lasara'aga, Kec. Mandrehe					5.000.000.000	5 km		
		2 Rehab. & Rekonst. Jalan Gunung Baru - Hiliwale - Gunungtua					9.000.000.000	9 km	6.000.000.000	6 km
		D.8. Jalan dan Jembatan Kab. Nias (Wilayah Selatan)			-		56.550.000.000		35.200.000.000	
		1 Rehab. & Rekonst. Jalan Tetehosi - Holi - Soliga					9.000.000.000	9 km	6.000.000.000	6 km
		2 Rehab. & Rekonst. Jalan Ruas Hiliweto - Lewa-lewa - Hilimbuasi					16.200.000.000	16 km	10.800.000.000	11 km
		3 Rehab. & Rekonst. Jalan Hiliweto - Lahemo - Mau					2.250.000.000	3 km		
		4 Rehab. & Rekonst. Jalan Hilina'atafu - Siofawall - Tagaule					9.600.000.000	10 km	6.400.000.000	6 km
		5 Rehab. & Rekonst. Jalan Duria - Sisarahili Ma'u-Lasara Siwalubanua					9.000.000.000	9 km	6.000.000.000	6 km
		6 Rehab. & Rekonst. Jalan Hiliuso - Lahagu					1.500.000.000	2 km		
		7 Rehab. & Rekonst. Jalan Botombawo - Boto Muzoi - Ono Nazara					9.000.000.000	9 km	6.000.000.000	6 km
		D.9. Jembatan Kab. Nias			-		21.030.000.000		-	
		1 Penggantian Jembatan Boyo Cs.					1.500.000.000	7 m		
		2 Penggantian Jembatan Teolo Oyo Cs.					6.500.000.000	84 m		
		3 Penggantian Jembatan Idano Mola Cs.					2.000.000.000	24 m		
		4 Penggantian Jembatan Wango Cs.					5.030.000.000	64 m		
		5 Penggantian Jembatan Sawo Kec. Sawo Cs.					6.000.000.000	35 m		
		ENERGI DAN TELEKOMUNIKASI			28.299.766.000		20.115.604.846		0	
			E. ENERGI DAN KELISTRIKAN		24.160.766.000		14.245.604.846		0	
			1 Pembangunan Gardu Induk / Distribusi Ranting Gunungstoli				14.245.604.846	1 pkt		
			2 Pengadaan MDU Ranting Gunungstoli	668.772.000	26 km					
			3 Pemasangan HUTM 20 kV 70 mm2	4.851.024.000	20 km					
			4 Pemasangan Trafo Distribusi 25 kVA	1.350.908.000	20 set					
			5 Pemasangan HUTR numpang 3 x 35 + 1 x 25 mm2	605.590.000	14 km					
			6 Pemasangan HUTR khusus 3 x 35 + 1 x 25 mm2	8.384.472.000	40 km					
			7 Rehabilitasi HUTM 20 kV Feeder GS 04	8.300.000.000	50 km					
			F. POS DAN TELEKOMUNIKASI		4.139.000.000		5.870.000.000		0	
			F.1. POS		2.240.000.000		3.300.000.000		0	
	1 Pembangunan Kantor Pos Hiliweto	560.000.000	1 unit							
	2 Pembangunan Kantor Pos Tetehosi	560.000.000	1 unit							
	3 Pembangunan Kantor Pos Tuhemberua	560.000.000	1 unit							

RENCANA KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI (DANA ON BUDGET)
KABUPATEN NIAS, KEPULAUAN NIAS, PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN 2007 - 2009

BIDANG	PROGRAM UTAMA	SUB BIDANG/KEGIATAN	2007		2008		2009		KETERANGAN
			Nilai (Rupiah)	Volume	Nilai (Rupiah)	Volume	Nilai (Rupiah)	Volume	
		4 Pembangunan Gedung Kantor Pos Idanogawo	560.000.000	1 unit					
		2 Pembangunan Gedung Kantor Pos Alasa			500.000.000	1 PKT			
		3 Pembangunan Gedung Kantor Pos Lotu			500.000.000	1 PKT			
		4 Pembangunan Gedung Kantor Pos Mandrehe			500.000.000	1 PKT			
		5 Pembangunan Gedung Kantor Pos Gunungsitoli Selatan			500.000.000	1 PKT			
		3 Pembangunan Gedung Kantor Pos Namohalu Esiwa			500.000.000	1 PKT			
		4 Pembangunan Gedung Kantor Pos Hiliduhu			500.000.000	1 PKT			
		Konsultan							
		1 Perencanaan Gedung Kantor Pos Alasa (typical design)			15.000.000	1 PKT			
		2 Perencanaan Gedung Kantor Pos Lotu (typical design)			15.000.000	1 PKT			
		3 Perencanaan Gedung Kantor Pos Mandrehe (typical design)			15.000.000	1 PKT			
		4 Perencanaan Gedung Kantor Pos Gunungsitoli Selatan (typical design)			15.000.000	1 PKT			
		5 Perencanaan Gedung Kantor Pos Namohalu Esiwa (typical design)			15.000.000	1 PKT			
		6 Perencanaan Gedung Kantor Pos Hiliduhu (typical design)			15.000.000	1 PKT			
		7 Pengawasan Gedung Kantor Pos Alasa			35.000.000	1 PKT			
		8 Pengawasan Gedung Kantor Pos Lotu			35.000.000	1 PKT			
		9 Pengawasan Gedung Kantor Pos Mandrehe			35.000.000	1 PKT			
		10 Pengawasan Gedung Kantor Pos Gunungsitoli Selatan			35.000.000	1 PKT			
		11 Pengawasan Gedung Kantor Pos Namohalu Esiwa			35.000.000	1 PKT			
		12 Pengawasan Gedung Kantor Pos Hiliduhu			35.000.000	1 PKT			
		F.2. TELEKOMUNIKASI	1.899.000.000		2.570.000.000		0		
		Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi							
		1 Pembangunan Gedung Meteorologi dan Geofisika	1.899.000.000	1 unit					
		2 Pemb. Sal. Drainase Kantor BMG			120.000.000	1 PKT			
		3 Pengadaan Theodolite			275.000.000	1 PKT			
		4 Pengadaan VSAT			350.000.000	1 PKT			
		5 Pengadaan Automatic Weather Station			400.000.000	1 PKT			
		6 Pembangunan Parkir dan penimbunan Halaman Kantor BMG			1.000.000.000	1 PKT			
		7 Pengadaan Peralatan Komunikasi			350.000.000	1 PKT			
		Konsultan							
		1 Pengawasan Pembangunan Prasarana Kantor BMG			75.000.000	1 pkt			
INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR			50.689.437.920		34.314.400.400		11.695.537.600		
		G. IRIGASI	31.998.752.720		25.314.400.400		6.695.537.600		
		1 Rehabilitasi DI Gido Zebua	5.613.714.100	1.258 ha					
		2 Rehab DI Moafoa	3.944.094.000	276 ha					
		3 Rehab DI Fusi	2.138.332.620	185 ha					
		4 Rehab DI Lazagaramba	2.631.617.000	250 ha					
		5 Rehab DI Siwalawa	4.414.180.000	300 ha					
		6 DI. Lologundre (70 Ha) Kec. Sirombu	1.556.793.000	70 ha					
		7 DI. Ahedano (60 Ha) Kec. Idano Gawo	1.034.804.000	60 ha					
		8 DI. Fatosa Iraono Geba (150 Ha) Kec. Mandrehe	399.000.000	150 ha					
		9 DI. Lawira (75 Ha)	956.400.000	75 ha					
		10 Pendukung ETESP: empowerment training, supervision & equipment	2.127.770.000	1 pkt					
		11 DI. Torowa (234 Ha) ETSP	1.179.953.000	262 ha					
		12 DI. Banua Gea (259 Ha) ETSP	836.949.000	259 ha					
		13 DI. arongo (220 Ha) ETSP	1.188.063.000	370 ha					
		14 DI. Bawa Sebuwa (40 Ha) ETSP	433.663.000	420 ha					
		15 DI. Simali (214 Ha) ETSP	1.439.900.000	250 ha					
		16 DI. Borosi (40 Ha) ETSP	713.400.000	40 ha					
		17 DI. Hiliduruwa (100 Ha) ETSP	1.390.120.000	200 ha					
		18 Rehabilitasi DI Lagundri			1.481.480.000	100 Ha			
		19 DI. Mizawa Hou, Kec. Idanogawo			4.800.000.000	240 Ha	3.200.000.000	160 Ha	
		20 DI. Siholi, Kec. Idanogawo			2.525.284.800	42 Ha	1.683.523.200	28 Ha	
		21 DI. Farua/Gito, Kec. Mandrehe			2.718.021.600	90 Ha	1.812.014.400	60 Ha	
		22 DI. Suitaro Lauri, Kec. Mandrehe			1.842.354.000	130 Ha			
		23 DI. Mo'awu, Kec. Idanogawo			3.442.079.000	153 Ha			
		24 DI. Ma'ae, Kec. Tuhemberua			2.092.870.000	70 Ha			
		25 DI. Sinizi, Kec. Idanogawo			2.074.820.000	78 Ha			
		26 DI. To'o Hilimbowa, Kec. Gunungsitoli			2.733.273.000	150 Ha			
		27 DI. So'ohi/Sea (100 Ha) Kec. Lotu			1.604.218.000	100 Ha			
		H. PENGENDALIAN BANJIR	10.086.150.200		4.500.000.000		2.000.000.000		
		1 Perkuatan Tebing dan Normalisasi Sungai NOU	1.625.328.000	1 pkt	3.000.000.000	1 PKT	2.000.000.000	1 PKT	
		2 Normalisasi Sungai Muzoi dan Lafau	1.407.423.000	1 pkt					
		3 Normalisasi sungai dan Perkuatan Tebing sungai Moro'o	974.585.000	1 pkt					
		4 Normalisasi sungai dan Perkuatan Tebing sungai Gido Zebua	1.088.954.000	1 pkt					
		5 Normalisasi sungai dan Perkuatan Tebing sungai Solagasi	1.286.647.400	1 pkt					
		6 Normalisasi sungai dan Perkuatan Tebing sungai Moi	860.354.000	1 pkt					
		7 Normalisasi sungai dan Perkuatan Tebing sungai Sui	880.931.000	1 pkt					
		8 Normalisasi sungai dan Perkuatan Tebing sungai Muzoi Hulu	975.348.000	1 pkt					

BIDANG	PROGRAM UTAMA	SUB BIDANG/KEGIATAN	2007		2008		2009		KETERANGAN
			Nilai (Rupiah)	Volume	Nilai (Rupiah)	Volume	Nilai (Rupiah)	Volume	
		9 Normalisasi sungai dan Perkuatan Tebing sungai Bobatalu	986.579.800	1 pkt					
		10 Normalisasi Sungai Kabupaten Nias			1.500.000.000	1 PKT			

RENCANA KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI (DANA ON BUDGET)
KABUPATEN NIAS, KEPULAUAN NIAS, PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN 2007 - 2009

BIDANG	PROGRAM UTAMA	SUB BIDANG/KEGIATAN	2007		2008		2009		KETERANGAN
			Nilai (Rupiah)	Volume	Nilai (Rupiah)	Volume	Nilai (Rupiah)	Volume	
	AIR MINUM DAN SANITASI	I. PENGAMANAN PANTAI	8.604.535.000		4.500.000.000		3.000.000.000		
		1 Pengamanan Pantai Gunungsitoli	7.584.000.000	1 pkt					
		2 Pengamanan Pantai Moawo	1.020.535.000	1 pkt					
		3 Pengamanan pantai di Gunungsitoli/Moawo			4.500.000.000	1 PKT	3.000.000.000	1 PKT	
			10.381.600.000		28.250.000.000		0		
		J. AIR MINUM	5.874.600.000		23.000.000.000		0		
		1 Jembatan Pipa Idanoi CS(GTZ)	1.329.000.000	1 sist					
		2 Pemb. Sist. Jaringan Air Minum Kec. Mandrehe	1.400.000.000	1 sist					
		3 Pemb. Sist. Jaringan Air Minum Desa Fadoro Hunogoa, Kec Hili Serangkai	1.000.000.000	1 sist					
		4 Pemb. Sist. Jaringan Air Minum Dusun I Tetelesi Desa Ombolata Kec. Alasa	1.500.000.000	1 sist					
		5 Pemb. Sist. Jaringan Air Minum Desa Hihao dan Sisarahili, Kec. Gunungsitoli	500.000.000	1 sist					
		6 Pengadaan rumah pompa dan genset Desa Holi	145.600.000	1 sist					
		7 Pemb. Sistem Air Minum Kota Gunungsitoli			8.000.000.000	1 pkt			
		8 Pemb. Sistem Jaringan Air Minum 9 Kecamatan Kab. Nias			15.000.000.000	6 pkt			
		K. PERSAMPAHAN	1.507.000.000		1.500.000.000		0		
		1 Pengadaan Amrol & Dump Truk Sampah berikut landasannya Kota Gunungsitoli	1.507.000.000	7 unit					
		2 Pengadaan Dump Truk, Armroll,container & landasan untuk Kota Gunungsitoli, Kec. Lahewa, Gido, Idanogawo			1.500.000.000	1 pkt			
		L. DRAINASE	3.000.000.000		3.750.000.000		0		
		1 Normalisasi/Rehab Saluran Drainase Gsitol							
		2 Pembangunan Sist. Drainase. Lotu	1.500.000.000	945 m					
		3 Pembangunan Sist. Drainase Gido	750.000.000	650 m					
		4 Pembangunan Sistim Drainase Lolowa'u	750.000.000	945 m					
		5 Pembangunan Sistem Drainase Kota Gunungsitoli			3.000.000.000	1 pkt			
		6 Pembangunan Sistim Drainase Gido			750.000.000	1 pkt			
SOSIAL KEMASYARAKATAN	PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		105.847.223.600		193.997.800.000		13.995.000.000		
		A. PENDIDIKAN	98.830.296.600		171.487.800.000		13.995.000.000		
		A.1. Pembangunan Fasilitas Pendidikan	61.097.228.600		125.405.000.000		1.500.000.000		
		1. Pembangunan dan Rehabilitasi	46.401.848.600		96.830.000.000		0		
		1.1. Pembangunan dan Rehabilitasi	46.401.848.600		91.500.000.000		0		
		1 Pembangunan Unit RKB TK	231.481.000	1 sekolah					
		2 Pembangunan Unit RKB SD Kab. Nias	36.824.597.000	81 sekolah					
		3 Pembangunan Unit RKB SMP Kab. Nias	1.771.738.000	3 sekolah					
		4 Pembangunan Unit RKB SMU Kab. Nias	1.421.484.000	3 sekolah					
		5 Pembangunan Unit RKB STT Sunderman	1.820.440.000	1 universitas					
		6 Rehab. & Rekonst. IKIP Gunungsitoli Kec. G.Sitoli	1.600.000	1 unit					
		7 Pembangunan Perpustakaan terpusat	453.600	1 unit					
		8 Pembangunan Laboratorium	4.330.055.000	12 sekolah					
		9 Pembangunan RKB SD			60.000.000.000	120 unit			
		10 Pembangunan RKB SMP			7.500.000.000	15 unit			
		11 Pembangunan RKB SMU			5.000.000.000	10 unit			
		12 Pembangunan RKB IKIP Gunungsitoli			5.000.000.000	1 unit			
		13 Pembangunan RKB STT Sunderman			3.000.000.000	1 unit			
		14 Pembangunan pilot project Laboratorium dan Perpustakaan Terpadu			5.000.000.000	1 UNIT			
		15 Pembangunan UGB perpusatakaan			4.000.000.000	10 UNIT			
		16 Pembangunan laboratorium SMA			1.500.000.000	3 UNIT			
		17 Pengadaan peralatan laboratorium			500.000.000	1 UNIT			
		Konsultan	0		5.330.000.000		0		
		1 DED Gedung, SD/MI, SMP/MTS & SMU/SMK, Perpustakaan ,Laboratorium			2.300.000.000	1 PKT			
		2 DED Gedung IKIP Gunung Sitoli, STT Sunderman			300.000.000	1 PKT			
		3 Pengawasan Pembangunan RKB SD			2.100.000.000	1 UNIT			
		4 Pengawasan Pembangunan RKB SMP			262.500.000	1 UNIT			
		5 Pengawasan Pembangunan RKB SMU			175.000.000	1 UNIT			
		6 Pengawasan Pembangunan UGB perpusatakaan			140.000.000	1 UNIT			
		7 Pengawasan Pembangunan laboratorium SMA			52.500.000	1 UNIT			
		A.2. Penyediaan Fasilitas Sekolah (Pengadaan Meubelair)	11.715.380.000		16.500.000.000		0		
		1 Pengadaan Meubelair TK, SD, SMP, SMA/SMK, IKIP, STT Kab. Nias	11.715.380.000	1 pkt	16.500.000.000	500 PKT			
		A.3. Pengadaan Peralatan Laboratorium	0		0		0		
		1 Pengadaan Alat Laboratorium							
		A.4. Pengadaan Buku Referensi Sekolah	430.000.000		575.000.000		-		
		1 Pengadaan Buku Referensi Pelajaran SD Nias			75.000.000	1 PKT			
		2 Pengadaan Buku Referensi Pelajaran SMP Nias	100.000.000	1 pkt	75.000.000	1 PKT			
		3 Pengadaan Buku Referensi Pelajaran SMU Nias	100.000.000	1 pkt	100.000.000	1 PKT			
		4 Pengadaan Buku Referensi Pelajaran SMK Nias	50.000.000	1 pkt	75.000.000	1 PKT			
		5 Pengadaan Buku Referensi / Perpustakaan IKIP Gunungsitoli Nias	100.000.000	1 pkt	150.000.000	1 PKT			
		6 Pengadaan Buku Referensi / Perpustakaan STIE Pembangunan G.Sitoli Nias	80.000.000	1 pkt	100.000.000	1 PKT			

**RENCANA KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI (DANA ON BUDGET)
KABUPATEN NIAS, KEPULAUAN NIAS, PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN 2007 - 2009**

BIDANG	PROGRAM UTAMA	SUB BIDANG/KEGIATAN	2007		2008		2009		KETERANGAN
			Nilai (Rupiah)	Volume	Nilai (Rupiah)	Volume	Nilai (Rupiah)	Volume	
		A.5. Pembangunan Kapasitas Pendidikan	2.550.000.000		11.500.000.000		1.500.000.000		
		1. Beasiswa	1.000.000.000		7.000.000.000		0		
		1 Beasiswa anak sekolah							
		2 Beasiswa Studi Lanjut S2 untuk 10 Dosen IKIP Gunungsitoli	1.000.000.000	1	5.000.000.000	1			
		3 Beasiswa Studi Lanjut S2 untuk 6 Dosen STIE Pembangunan G.Sitoli			2.000.000.000	1			
		2. Pelatihan	1.550.000.000		4.500.000.000		1.500.000.000		
		1 Pelatihan Manajemen Kepala Sekolah SD/SMP/SMU/SMK	300.000.000	2	1.500.000.000	3			
		2 Pelatihan / Peningkatan Kualitas Guru	600.000.000	2	1.000.000.000	2	1.000.000.000	2	PKT
		3 Pelatihan Manaj. Pengemb. Instruksi dan Kurikulum untuk Pimpinan dan Dosen IKIP Gunungsitoli	150.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1	KEG
		4 Pelatihan Guru Sains dan Matematika	500.000.000	1	1.500.000.000	3			
		B. KESEHATAN	37.101.000.000		46.082.800.000		12.495.000.000		
		B.1. Upaya Kesehatan Masyarakat dan Perorangan	30.101.000.000		46.082.800.000		12.495.000.000		
		1. Pembangunan Rumah Sakit	1.500.000.000		0		0		
		1 Penyambungan PLN RSU G.Sitoli	1.500.000.000	1					
		2. Pembangunan Puskesmas dan Pustu	28.601.000.000		32.658.800.000		12.495.000.000		
		1 Puskesmas perawatan Inap Plus Alasa + Fasilitas Gedung Kab. Nias	4.000.000.000	1					
		2 Puskesmas perawatan Inap Plus Gunung Sitoli + Fasilitas Gedung Kab. Nias	4.000.000.000	1					
		3 Puskesmas perawatan Inap Plus Awei + Fasilitas Gedung Kab. Nias	2.000.000.000	1					
		4 Puskesmas Rawat Inap BOTOMBAWO+ Fasilitas Lingkungan Gedung			2.989.000.000	1			
		5 Puskesmas Rawat Inap NAMOHALU ESIWA + Fasilitas Lingkungan Gedung			3.209.000.000	1			
		6 Puskesmas Perawatan Inap HILIDUHO + Fasilitas Lingkungan Gedung			2.947.000.000	1			
		7 Pembangunan Puskesmas MANDREHE UTARA + Fasilitas Lingkungan Gedung			2.674.000.000	1			
		8 Pembangunan Puskesmas Rawat Inap Plus Kec. Mandrehe Kab. Nias	2.260.000.000	1					
		9 Pembangunan Puskesmas Perawatan Jalan Bawolato	1.581.000.000	1					
		10 Pembangunan Puskesmas Perawatan Jalan Lotu	1.580.000.000	1					
		11 Pembangunan Puskesmas Lahewa (Lanjutan)	420.000.000	1					
		12 Pembangunan Puskesmas Afulu (Lanjutan)	350.000.000	1					
		13 Pembangunan Paket Puskesmas Mandrehe Barat + Fasilitas Lingkungan Gedung	2.500.000.000	1					
		14 Pembangunan Paket Puskesmas Alasa Talumuzoi + Fasilitas Lingkungan Gedung	3.000.000.000	1					
		15 Pembangunan Paket Puskesmas Lahewa Timur + Fasilitas Lingkungan Gedung	3.000.000.000	1					
		16 Pembangunan Gedung Sekolah Perawat Kesehatan dan Asrama	2.700.000.000	1					
		17 Pembangunan Gedung Farmasi	1.210.000.000	1					
		18 Pembangunan Gedung Sekolah Perawat Kesehatan dan Asrama (lanjutan 2007)			2.700.000.000	1			
		19 Pembangunan SPK/Akper Gunungsitoli: Gedung Kuliah; Lab komplit; Asrama; Aula; Perpustakaan komplit; Dapur & Ruang makan; Rumah Dosen; Air bersih & Listrik (LANJUTAN)			3.200.000.000	1			
		20 Pembangunan Kantor Dinas Kesehatan			5.355.000.000	2	12.495.000.000	1	PKT
		21 Pembangunan Rumah Dokter dan Rumah Paramedis Puskesmas Rawat Jalan AFULU + Fasilitas Lingkungan Gedung (LANJUTAN)			1.100.000.000	1			
		22 Pembangunan Rumah Dinas Dokter dan Rumah Paramedis Puskesmas Rawat Inap Plus Lahewa + Fasilitas Lingkungan Gedung (LANJUTAN)			1.368.800.000	1			
		23 Pembangunan Rumah Dokter dan Rumah Paramedis Puskesmas Rawat Jalan Ulu Gawo + Fasilitas Lingkungan Gedung (LANJUTAN)			1.888.000.000	1			
		24 Pembangunan Rumah Dokter dan Rumah Paramedis Puskesmas Rawat Jalan Lahomi + Fasilitas Lingkungan Gedung (LANJUTAN)			2.212.000.000	1			
		25 Pembangunan Rumah Dokter dan Rumah Paramedis Puskesmas Rawat Jalan Tugla Oyo + Fasilitas Lingkungan Gedung (LANJUTAN)			2.016.000.000	1			
		26 Rehabilitasi Puskesmas Sirombu...			1.000.000.000	1			
		3. Pengawasan	0		3.104.000.000		0		
		1 Pengadaan Jasa Konsultan Pengawasan Puskesmas (I)			1.200.000.000	1			
		2 Pengadaan Jasa Konsultan Pengawasan Puskesmas (II)			1.200.000.000	1			
		3 Pengadaan Jasa Konsultan Pengawasan SPK dan Kantor Dinas Kesehatan			350.000.000	1			
		4 Jasa Konsultan Perencana Puskesmas dan Akper			147.500.000	1			
		5 Pengawas Pembangunan Puskesmas dan Akper			206.500.000	1			
		4. Perencanaan	0		350.000.000		0		
		1 Lanjutan Biaya Perencanaan Puskesmas (20%) dari Kontrak TA. 2006			150.000.000	1			
		2 Lanjutan Biaya Perencanaan Kantor Dinas Kesehatan /Gudang Farmasi Kabupaten/SPK/Akper (20%) dari Kontrak TA. 2006			100.000.000	1			
		3 Lanjutan Kontrak Perencanaan Fisik Tahap Pertama TA. 2006 (CV.BIRAMOS)			100.000.000	1			
		5. Dukungan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan	0		9.520.000.000		0		
		1 Bantuan Operasional Puskesmas dan Rumah Sakit							
		2 Pengadaan Peralatan Medis / Kedokteran							
		3 Revitalisasi Posyandu							
		4 Peralatan puskesmas plus & ambulans							
		5 Pengadaan Alat Medik dan pendukung pelayanan di Puskesmas: Mandrehe, Lahewa & Gido			2.700.000.000	1			
		6 Pengadaan Meubelair di Puskesmas: Mandrehe, Lahewa, Gido dll			2.100.000.000	1			
		7 Pengembangan Sistem Manajemen RSU			400.000.000	1			
		8 Training dan sosialisasi pengurus dan kader Posyandu tingkat kabupaten dan kecamatan Kep. Nias			300.000.000	1			
		9 Capacity Building untuk Dinkes & Puskesmas, Lanjutan			1.500.000.000	1			
		10 Pengelolaan Limbah Medis RSU Gunungsitoli			500.000.000	1			

**RENCANA KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI (DANA ON BUDGET)
KABUPATEN NIAS, KEPULAUAN NIAS, PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN 2007 - 2009**

BIDANG	PROGRAM UTAMA	SUB BIDANG/KEGIATAN	2007		2008		2009		KETERANGAN
			Nilai (Rupiah)	Volume	Nilai (Rupiah)	Volume	Nilai (Rupiah)	Volume	
		11. Program Peningkatan Kesehatan Reproduksi Wanita Usia Subur melalui YKI & Dinkes			500.000.000	1 PKT			
		12. Penanganan Gizi Buruk			500.000.000	1 PKT			
		13. Monitoring & Evaluasi Kegiatan Kesehatan			300.000.000	1 PKT			
		14. UKL & UPL			720.000.000	1 PKT			
		6. Pelayanan Kesehatan/ Perbaikan Gizi Ibu/ Anak & KB	0		450.000.000		0		
		1. Penanganan Kasus Gizi Buruk			300.000.000	1 pkt			
		2. Identifikasi dan Evaluasi penanganan gizi buruk tingkat kabupaten dan kecamatan.			150.000.000	1 pkt			
		B.2. Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan	7.000.000.000		0		0		
		1. Program Beasiswa	5.000.000.000		0		0		
		1. Program Beasiswa Berkelanjutan untuk Dokter Umum, Ahli Gizi, Rekam Medis, Rehabilitasi Medis Kep. Nias (lanjutan)	5.000.000.000	1 pkt					
		2. Pelatihan	2.000.000.000		0		0		
		1. Program Paket Capacity Building untuk RSU Gusit Melalui Residency Training Kab. Nias	1.000.000.000	1 pkt					
		2. Program Paket Capacity Building untuk Dinas Kesehatan Kab. Nias	1.000.000.000	1 pkt					
		C. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	632.068.000		0		0		
		1. Penguatan Kelembagaan (Bantuan Gedung Kursus Wanita)							
		a. Bantuan gedung kursus wanita di Gedung Sitoli & Sirombu	70.068.000	2 unit					
		b. Pemb. Gedung Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Kab. Nias	562.000.000	1 unit					
	AGAMA, SOSIAL, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN BUDAYA		7.016.927.000		22.510.000.000		0		
		D. AGAMA	3.149.625.000		11.625.000.000		0		
		E.1. Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama	3.149.625.000		11.625.000.000		0		
		1. Bantuan Pembangunan Gereja Kab. Nias	2.812.500.000	75 unit	11.250.000.000	300 UNIT			
		2. Bantuan Pembangunan Mesjid Kab. Nias	300.000.000	8 unit	375.000.000	10 unit			
		3. Bantuan Pembangunan Vihara	37.125.000	1 unit					
		E. SOSIAL	441.127.000		0		0		
		1. Rehabilitasi Sosial							
		a. Biaya Makan Anak Panti							
		b. Bantuan Biaya Pendidikan Anak Panti Asuhan							
		2. Pemberdayaan Sosial dan Kelembagaan Sosial							
		a. Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif							
		3. Pembangunan Panti Asuhan							
		4. Pembangunan Panti Asuhan Kudus 03 Tohia Gunung Sitoli (Lanjutan)	441.127.000	1 unit					
		F. BUDAYA	1.896.175.000		6.170.000.000		0		
		F.1. Pengelolaan Keragaman Budaya	1.502.558.000		5.170.000.000		0		
		1. Rehabilitasi Rumah Adat Nias	22.344.000						
		2. Pembangunan Gedung Nasional Gunungsitoli	1.480.214.000	1 unit	1.000.000.000	1 pkt			
		3. Pembangunan Gedung Budaya Nias (Community Centre)			1.000.000.000	1 PKT			
		4. Pembangunan Balai Pelatihan Sanggar Seni Budaya di 16 Kecamatan			2.400.000.000	1 PKT			
		5. Bantuan Pembentukan Pusat Studi Seni, Budaya dan Bahasa Nias di IKIP Gunungsitoli			400.000.000	1 PKT			
		Konsultan							
		4. Pengawasan Pembangunan Gedung Nasional Gunungsitoli (Lanjutan)			35.000.000	1 pkt			
		5. Pengawasan Pembangunan Gedung Budaya Nias (Community Centre)			35.000.000	1 PKT			
		6. Tersedianya fasilitas kerja pada Gedung P2TP2 (lanjutan)			300.000.000	1 pkt			
		F.2. Pengelolaan Kekayaan Budaya	365.859.000		0		0		
		1. Pemberdayaan Pengrajin Tradisional Nias							
		2. Penyelenggaraan Festival dan Pameran Seni Budaya	365.859.000	1 keg					
		G. PEMUDA DAN OLAHRAGA	1.530.000.000		4.715.000.000		0		
		1. Pembangunan Stadion Pelita, Gunungsitoli	1.530.000.000	1 unit	1.500.000.000	1 PKT			
		2. Pembangunan Lapangan Sepak Bola di 16 Kec. Kab. Nias			3.200.000.000	1 PKT			
		Konsultan							
		3. Pengawasan Pembangunan Stadion Pelita Gunungsitoli (lanjutan)			15.000.000	1 pkt			
PEREKONOMIAN			37.751.315.000		33.591.375.000		3.453.750.000		
	PERTANIAN		4.279.100.000		14.682.625.000		800.000.000		
		A. TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	415.000.000		6.272.500.000		800.000.000		
		1. Pengadaan Power Thresher							
		2. Pengadaan Alat Pertanian Kecil							
		3. Pengadaan Hand Tractor Type Bajak Singkal							
		4. Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SL-PHT) di Kab. Nias	90.000.000	18 klp					
		5. Pelatihan dan Pendampingan bagi Peternak, Petani Palawija dan Hortikultura	125.000.000	1 pkt					
		6. Bantuan Agro Input Palawija & Hortikultura untuk Pemberdayaan Perempuan dan Pensiunan	200.000.000	1 pkt					
		7. Sekolah lapangan Pengendalian Hama Terpadu			45.000.000	9 klp	45.000.000	9 klp	
		8. Pengawasan Pembangunan Balai Benih Tanaman			122.500.000	1 pkt			

RENCANA KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI (DANA ON BUDGET)
KABUPATEN NIAS, KEPULAUAN NIAS, PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN 2007 - 2009

BIDANG	PROGRAM UTAMA	SUB BIDANG/KEGIATAN	2007		2008		2009		KETERANGAN
			Nilai (Rupiah)	Volume	Nilai (Rupiah)	Volume	Nilai (Rupiah)	Volume	
		9 Pembangunan Balai Benih Tanaman lengkap			3.500.000.000	1 pkt			
		10 Penyuluhan bimbingan & pelatihan pembenihan Tanaman			700.000.000	1 pkt			
		11 Mesin Blower (Mesin semprot hama)			625.000.000	50 unit			
		12 Mesin Panen Padi			375.000.000	15 unit			
		13 Power Trasher + accessories			130.000.000	10 unit	130.000.000	10 unit	
		14 Handtractor			625.000.000	25 unit	625.000.000	25 unit	
		15 Hand Sprayer			150.000.000	500 unit			
		B. PERKEBUNAN	3.170.000.000		8.410.125.000		0		
		1 BLM Pembangunan Rumah Pompa dan Bak Penampung Air	30.000.000	3 unit					
		2 BLM Pembuatan Unit Pengolah Hasil (UPH) kakao	100.000.000	4 keg					
		3 Bantuan Perluasan Tanaman Karet	950.000.000	100 ha					
		4 Bantuan Perluasan Tanaman Karet Pola Demplot	525.000.000	30 ha					
		5 Bantuan Intensifikasi Tanaman Kakao	250.000.000	100 ha					
		6 Bantuan Ekstensifikasi Tanaman Kakao Pola Demplot	625.000.000	25 ha					
		7 Pembuatan Kebun Entres Karet	390.000.000	3 ha					
		8 Pelatihan Budidaya dan Pendampingan Kelompok Tani Kakao	175.000.000	1 keg					
		9 Pelatihan Budidaya dan Pendampingan Kelompok Tani Karet	125.000.000	1 keg					
		10 Pelatihan dan Pendampingan Bagi Peternak, Petani Palawija dan Hortikultura							
		11 Pembuatan Kebun Entres Karet							
		12 Pelatihan Budidaya dan pendampingan Kelompok tani Karet							
		13 Bantuan Perluasan Tanaman Karet							
		14 BLM Pembuatan Unit Pengolah Hasil (UPH) Kakao							
		15 Bantuan Perluasan Tanaman Karet Pola Demplot							
		16 Bantuan Intensifikasi Tanaman kakao							
		17 Bantuan Ekstensifikasi Tanaman kakao Pola Demplot							
		B.1. Terbangunnya Sentra Produksi Kakao Berstandar 7 Kec.							
		1 Gedung Kantor dan Gudang Produksi (325 m2)			5.687.500.000	7 unit			
		2 Jasa Perencanaan Pembangunan Sentra Produksi Kakao.			297.500.000	7 unit			
		3 Jasa Pengawasan Pembangunan Pusat Sentra Produksi Kakao.			223.125.000	7 unit			
		4 Pengadaan Alat Pengolahan Kakao (Alat Pengereng, Frementasi, dan Sortir)			365.000.000	3 pkt			
		5 Bangunan Peralatan Pengolahan Kakao			75.000.000	3 unit			
		B.2. Pembangunan Pusat Sentra Produksi Kakao							
		1 Gedung Kantor dan Gudang Produksi (350 m2)			875.000.000	1 unit			
		2 Jasa Perencanaan Pembangunan Pusat Sentra Produksi Kakao			35.000.000	1 unit			
		3 Jasa Pengawasan Pembangunan Pusat Sentra Produksi Kakao			26.250.000	1 unit			
		4 Fasilitas Penunjang Kegiatan			93.750.000	1 pkt			
		B.3. Pengawal Program 7 Sentra Produksi Kakao							
		1 Petugas Pendamping (7 org selama 8 bln, gaji 4,5 jt/orang)			252.000.000	56 orang			
		2 Motivator Desa (14 org Selama 8 bln, gaji 2,5 jt/org)			280.000.000	112 orang			
		3 Bantuan Agro Input Palawija & Hortikultura untuk Pemberdayaan Prempuan dan Pensiunan			200.000.000	1 pkt			
		C. PETERNAKAN	694.100.000		0		0		
		1 Pemberantasan Penyakit Menular Hewan dan Unggas							
		2 Pemb. Gedung Utama Rumah Potong Hewan Pasar Beringin	694.100.000	1 unit					
		3 Pelatihan Teknik Budidaya dan Pemberantasan Penyakit Ternak							
		4 Bantuan Modal dan Peralatan- Pendukung Usaha Peternakan (Bibit, obat-obatan/vaksin, pengolahan pakan)							
		5 Bantuan Penyuluhan bimbingan dan pendampingan sentra peternakan (ayam)							
		D. KEHUTANAN	0		0		0		
PERIKANAN			7.275.957.000		2.895.000.000		0		
		1 Bantuan Modal Usaha Pengolahan Ikan							
		2 Pengadaan Peralatan Tangkap Ikan	600.000.000	2 pkt					
		3 Unit Pengembangan Pelayanan (UPP)	45.000.000	1 pkt					
		4 Pembangunan Komplek Dermaga PPI,Pembangunan Rumah Dinas Type 36 (2 unit), Kantor Adm, Pos Satpam (3 Unit), Godang, Toilet Umum, Rumah Genset dan Jaringan listrik, Balai pertemuan	5.580.957.000	1 pkt					
		5 BLM Pengadaan Perahu Motor 0,5 GT - 5,5 PK dan Alat Tangkap Lengkap untuk nelayan Kab. Nias	600.000.000	40 unit					
		6 BLM Pengadaan Kapal Motor 5 GT dan Alat Tangkap Lengkap untuk Nelayan Kab. Nias	450.000.000	3 unit					
		7 Unit Pengembangan Pelayanan (UPP)			45.000.000	1 pkt			
		8 BLM Modal Usaha pengolahan Ikan			300.000.000	2 pkt			
		9 BLM Pengadaan Perahu Motor 0,5 GT - 5,5 PK dan Alat Tangkap lengkap			1.200.000.000	40 unit			
		10 BLM Pengadaan Kapal Motor 5 GT dan Alat Tangkap Lengkap			900.000.000	6 unit			
		11 Pengadaan Alat Tangkap Pancing Berikut Kelengkapannya			450.000.000	30 pkt			
PENGEMBANGAN USAHA	A. PERDAGANGAN		26.196.258.000		16.013.750.000		2.653.750.000		
			23.666.000.000		0		0		
		1 Pembangunan Pasar Tradisional	666.000.000	2 unit					
		2 Pembangunan Pasar Penunjang							

**RENCANA KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI (DANA ON BUDGET)
KABUPATEN NIAS, KEPULAUAN NIAS, PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN 2007 - 2009**

BIDANG	PROGRAM UTAMA	SUB BIDANG/KEGIATAN	2007		2008		2009		KETERANGAN
			Nilai (Rupiah)	Volume	Nilai (Rupiah)	Volume	Nilai (Rupiah)	Volume	
KELEMBAGAAN DAN HUKUM	KELEMBAGAAN DAERAH	3 Bantuan Modal Bergilir Pedagang							
		4 Pembangunan Pasar Yaahowu Blok I & II (1986 x 2 m2) Kab. Nias	23.000.000.000	1 pkt					
		5 UKM Trading House & Bantuan Modal							
		B. TENAGA KERJA	530.000.000		0		0		
		1 Pelatihan Ketrampilan dan Ketenaga Kerjaan	50.000.000	1 keg					
		2 BLM Peralatan Penunjang Usaha Keterampilan	180.000.000	1 keg					
		3 BLM Peralatan Penunjang Industri Rumah Tangga	300.000.000	1 keg					
		C. KOPERASI DAN UKM	1.972.500.000		15.013.750.000		2.653.750.000		
		C.1. Pengembangan Usaha Ekonomi	332.500.000		600.000.000		0		
		1 Promosi Potensi Wilayah dan Stimulan Investasi Kab. Nias	200.000.000	1 keg					
		2 Bantuan Sarana dan Prasarana Kantor, Identifikasi dan Seleksi, Pelatihan Pengelola LKM Kab. Nias	132.500.000	3 unit					
		3 BLM Peralatan Penunjang Industri rumah Tangga			600.000.000	2 pkt			
		C.2. Pengembangan Koperasi dan Pengusaha Kecil	1.640.000.000		14.413.750.000		2.653.750.000		
		1. Penyelenggaraan Pusat Pengembangan	1.640.000.000		4.167.500.000		1.000.000.000		
		1 Penyelenggaraan Pelatihan dan Pendampingan Produksi UKM (Toko/Ruko)			800.000.000	1 pkt			
		2 Bantuan Modal sarana & peralatan Pendukung bagi usahawan (UKM)			1.000.000.000	1 pkt	1.000.000.000	1 pkt	
		3 Pendirian Nias Mikro Finance	175.000.000	1 keg	300.000.000	1 pkt			
		4 Pendirian Nias UKM Centre	715.000.000	1 keg	500.000.000	1 pkt			
		5 Identifikasi dan Seleksi LKM Oleh Tim (terpadu (Dinas Staff PPK & Tim Ekonomi-Usaha Distrik Nias)			25.000.000	1 pkt			
		6 Pelatihan Pengelola LKM (15 LKM x 3 Org)			60.000.000	2 pkt			
		7 Identifikasi dan Konsolidasi UKM			80.000.000	2 pkt			
		8 Pelatihan dan Pendampingan UKM			465.000.000	1 pkt			
		9 Penyelenggaraan Nias UKM Centre (produksi, packaging, labelling pemasaran, promosi)			120.000.000	1 pkt			
		10 BLM UKM Melalui Nias Micro Finance / LKM	750.000.000	3 pkt	750.000.000	3 pkt			
		11 Bantuan sarana dan prasarana kantor LKM Kab. Nias			67.500.000	3 pkt			
		2. Pembangunan Pasar/ Waserda	0		10.246.250.000		1.653.750.000		
		1 Pembangunan Pasar Yaahowu Blok I & II (1986 x 2 m2) Kab. Nias (lanjutan)			5.000.000.000	1 pkt			
		2 Pembangunan pasar Tradisional Kab.Nias di 15 kecamatan			2.925.000.000	10 pkt	1.575.000.000	5 pkt	
		3 Pengembangan Manajemen &SDM Pengelolaan Pasar Yahowuu			2.000.000.000	1 pkt			
		4 Pengawasan Pembangunan Pasar ya'ahowu			175.000.000	1 pkt			
		5 Perenc. & Pengawasan Pembangunan Pasar Tradisional Kab. Nias			146.250.000	1 unit	78.750.000	1 unit	
		D. PARIWISATA	27.758.000		1.000.000.000		0		
		1 Penataan Lokasi Pariwisata Nias							
		a. Muara Indah Kec. Gunungsitoli Utara	27.758.000	1 lokasi					
		b. Kawasan wisata Gunung Somomo (termasuk jalan masuk 500m) didesa Lologolu, Kec. Mandrehe							
		2 Bantuan Pengembangan penataan kawasan wisata laut (fisik dan non fisik)			1.000.000.000	1 PKT			
			47.978.194.000		46.600.750.000		5.486.250.000		
		A. KELEMBAGAAN	47.978.194.000		46.600.750.000		5.486.250.000		
		Peningkatan Sarana-Prasarana Pemerintahan							
		A.1. Rehabilitasi Gedung Kantor Pemerintah	34.901.175.000		39.898.750.000		5.486.250.000		
		1 Pembangunan Kantor Dinas & kecamatan kab. Nias, Kelurahan	3.124.423.000	4 unit					
		2 Pemb. Kantor Bupati Nias	12.433.405.000	1 unit					
		3 Pemb. Komplek Gedung Kantor DPRD Nias	1.343.347.000	1 unit					
		4 Pembangunan Kantor Desa (KRRP)	18.000.000.000	72 unit					
		5 Pembangunan Gedung Utama Kantor Bupati Nias (lanjutan)			18.000.000.000	1 unit			
		6 Pembangunan Kantor DPRD Nias (lanjutan TA. 2006)			10.000.000.000	1 unit			
		7 Pembangunan Kantor Dinas & kantor kecamatan kab. Nias			9.750.000.000	10 unit	5.250.000.000	5 unit	
		Konsultan							
		1 Pengawasan Pembangunan Gedung Utama Kantor Bupati Nias (lanjutan)			810.000.000	1 pkt			
		2 Pengawasan Pembangunan Kantor DPRD Nias (lanjutan TA. 2006)			450.000.000	1 pkt			
		3 Perencanaan Pembangunan Kantor Dinas & kantor kecamatan kab. Nias			450.000.000	1 pkt			
		4 Pengawasan Pembangunan Kantor Dinas & kantor kecamatan kab. Nias			438.750.000	1 pkt	236.250.000	1 pkt	
		A.2. Rehabilitasi Gedung Negara	8.283.579.000		2.002.000.000		0		
		1 Pembangunan /Renovasi Kantor KORAMIL	2.655.518.000	1 unit					
		2 Rehabilitasi /Pembangunan Gedung KPPN Gunungsitoli	491.466.000	1 unit					
		3 Rehabilitasi /Pembangunan Stasiun RRI, rumah dinas & prasarana lainnya Gunungsitoli	1.032.595.000	4 unit					
		4 Pengadaan peralatan pemancar siaran luar Stasiun RRI Gunungsitoli	1.565.000.000	1 unit					
		5 Pembangunan Kantor BPS Gunungsitoli	1.330.000.000	1 unit					
		6 Pembangunan Kantor Kejaksaan Negeri Gunungsitoli	1.209.000.000	1 unit					
		7 Pembuatan peta digital pasca tsunami			2.002.000.000	1 pkt			

RENCANA KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI (DANA ON BUDGET)
KABUPATEN NIAS, KEPULAUAN NIAS, PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN 2007 - 2009

BIDANG	PROGRAM UTAMA	SUB BIDANG/KEGIATAN	2007		2008		2009		KETERANGAN
			Nilai (Rupiah)	Volume	Nilai (Rupiah)	Volume	Nilai (Rupiah)	Volume	
		A.3. Rehabilitasi Bangunan / Gedung Khusus	4.793.440.000		4.700.000.000		0		
		1 Pembangunan Gedung & Sarana Operasional LAPAS Gunungsitoli	4.793.440.000	1 unit					
		2 Pembangunan /Renovasi Kantor Koramil			2.400.000.000	1 UNIT			
		3 Pembangunan /Renovasi Kantor Polres			2.000.000.000	1 UNIT			
		Konsultan							
		1 Pengawasan Pembangunan / Renovasi Kantor Koramil			100.000.000	1 unit			
		2 Pengawasan Pembangunan / Renovasi Kantor Polres			200.000.000	2 unit			
		BIAYA MANAJEMEN	62.925.317.000						
TOTAL			820.071.023.520		1.578.021.430.246		274.740.537.600		

Sumber : BRR Nias (Juni 2007) dan Analisis Tim P3B Bappenas, 2007

**RENCANA KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI (DANA OFF BUDGET)
KABUPATEN NIAS, KEPULAUAN NIAS, PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN 2007-2009**

BIDANG	PROGRAM UTAMA	SUB BIDANG/KEGIATAN	2007 (Sedang Berjalan)		2008/2009 (Perencanaan)	KETERANGAN
			Nilai (Rp)	Volume	Nilai (Rp)	
PERUMAHAN, PERMUKIMAN, TATA RUANG, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP			161.396.308.400		27.651.503.644	
	Perumahan	1 Rekonstruksi 2 Rehabilitasi 3 Penyediaan Bahan Bangunan (kayu)	161.396.308.400 137.579.247.200 4.230.730.400 19.586.330.800	5.543 149 2.500	unit unit m3	
	Tata Ruang Pertanahan Lingkungan Hidup					
INFRASTRUKTUR			109.402.379.600		843.526.198.044	
	Jalan dan Transportasi	A Transportasi Laut dan ASDP A.1. ASDP 1 Pengadaan Kapal Ferry B Jalan Kabupaten 1 Rehab Jalan Lokal 2 Pembangunan Jembatan 3 Rehab Jembatan	33.667.620.800 14.044.591.200 6.564.503.600 1.765.130.400 11.293.395.600 1.298.874.400	1 27 1 23	unit Km unit unit	
	Energi dan Telekomunikasi	A Energi 1 Rehabilitasi Jsringn distribusi listrik B Telekomunikasi 1 Rehabilitasi Jaringsn distribusi listrik	1.225.890.800 72.983.600 23.883.200.000	2 1	pkt unit	
	Sumber Daya Air	A Irigasi 1 Rehab Daerah Irigasi	23.883.200.000 50.552.684.400	4.439		
	Air dan Sanitasi	A Air Minum 1 Penyediaan fasilitas air bersih(utk rumah) 2 Rehab sarana dan prasarana air bersih B Sanitasi 1 Pembangunan Sarana Sanitasi (MCK) 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi	10.858.097.600 11.151.513.200 9.272.109.600 19.270.964.000	13.725 6 33 24.830	unit pkt Kec Unit	
	Infrastruktur Lingkungan dan Pemeliharaan Bangunan Gedung Negara dan Rumah IREP					
SOSIAL KEMASYARAKATAN			190.459.062.400		609.812.407.978	
	Pendidikan, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan	A Pendidikan A.1. Pembangunan Fasilitas Pendidikan A.1.1. Pembangunan dan Rehabilitasi 1 Pembangunan dan Rehabilitasi SMP 2 Pembangunan dan Rehabilitasi SMU A.1.2. Pengadaan Meubalair 1. Pengadaan Meublair A.1.3. Pengadaan Buku A.2. Pembangunan Kapasitas Pendidikan 1. Beasiswa A.3. Pelatihan Peningkatan Kapasitas	97.695.807.400 2.468.176.000 28.997.181.000 23.000.000.000 19.320.000.000 903.513.600 23.006.936.800	1 2 1 212	sekolah sekolah kab orang	

**RENCANA KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI (DANA OFF BUDGET)
KABUPATEN NIAS, KEPULAUAN NIAS, PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN 2007-2009**

BIDANG	PROGRAM UTAMA	SUB BIDANG/KEGIATAN	2007 (Sedang Berjalan)		2008/2009 (Perencanaan)	KETERANGAN	
			Nilai (Rp)	Volume	Nilai (Rp)		
	Agama, Sosial Budaya, Pemuda dan Olahraga	B Kesehatan	92.211.255.000				
		B.1. Upaya Kesehatan Masyarakat dan Perorangan					
		B.1.1. Pembangunan Rumah Sakit					
		1 Rehabilitasi Rumah Sakit Umum Gunungsitoli	20.240.000.000	1	unit		
		B.1.2. Pembangunan Puskesmas dan Pustu					
		1 Pembangunan Klinik	23.000.000.000	7	unit		
		B.1.3. Pembangunan dan Rehabilitasi Fasilitas Kesehatan					
		1. Pengadaan Alat Kedokteran	11.560.048.400	1	kab		
		2. Perbaikan Gizi Ibu, Anak dan KB	968.240.200	1	kab		
		B.2. Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan					
		B.2.1. Pelatihan					
		1. Program Peningkatan Kebersihan	22.360.351.600	1	kab		
		2. Program Pelatihan Kesehatan	14.082.614.800	20.325	orang		
		C Pemberdayaan Perempuan	0				
			552.000.000				
	A Agama	552.000.000					
	A.1. Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama						
	1. Rehabilitasi Rumah Ibadah - Gereja	230.000.000	2	Unit			
	2. Rehabilitasi Rumah Ibadah - Mesjid	276.000.000	1	Unit			
	3. Rehabilitasi Rumah Ibadah - Vihara	46.000.000	1	Unit			
	B Sosial	-					
	C Budaya	-					
	D Pemuda dan Olahraga	-					
PEREKONOMIAN			104.562.296.400			246.259.773.333	
	Pertanian	1 Pengadaan bibit dan pupuk 2 Optimaslisai pemanfaatan lahan 3 Pengadaan alat pertanian	18.524.439.200 12.485.292.400 3.511.465.200 2.527.681.600	1.666,740 247 6	kg ha unit		
	Perikanan	1 Pengadaan peralatan perikanan	39.319.208.400 39.319.208.400	243	unit		
	Pengembangan Usaha	A Industri B Perdagangan 1 Pembangunan Pasar Trdisional C Tenaga Kerja 1 Pelatihan tenaga kerja D Koperasi dan UKM E Pariwisata	7.015.920.000 7.015.920.000 39.702.728.800 39.702.728.800	10.967	org		
KELEMBAGAAN DAN HUKUM			74.984.250.400			*	
	Kelembagaan, Hukum dan K3M	A. Peningkatan Sarana-Prasarana Pemerintahan A.1. Pembangunan Gedung Negara 1 Pembangunan Gedung Pemerintahan 2 Rehabilitasi Gedung Publik B. Pembinaan Sarana dan Prasarana 1 Rehabilitasi Gedung Publik C. Pembangunan Kapasitas Kepemerintahan 1 Pelatihan	1.000.444.800 927.461.200 72.983.600 73.983.805.600 73.983.805.600	4 4 1 1417	Unit unit Unit org		
TOTAL			640.804.297.200			1.727.249.883.000	

Sumber : BRR Nias (Juni 2007) dan Analisis Tim P3B Bappenas, 2007

Keterangan : 1 USD = IDR 9,200

*) Dana *off budget* 2008-2009 untuk bidang kelembagaan dan hukum tergabung dengan bidang sosial kemasyarakatan

**REKAPITULASI PEMETAAN PENDANAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
KABUPATEN NIAS, KEPULAUAN NIAS, PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN 2007 - 2009**

BIDANG	PROGRAM UTAMA	ON Budget			OFF Budget		KETERANGAN
		2007	2008	2009	2007	2008/2009	
PERUMAHAN, PERMUKIMAN, TATA		92.722.325.000	73.000.000.000	0	161.396.308.400	27.651.503.644	
	1 Perumahan	80.680.000.000	73.000.000.000	0	161.396.308.400		
	2 Tata Ruang	12.042.325.000	0	0			
	3 Pertanahan						
	4 Lingkungan Hidup						
INFRASTRUKTUR		472.846.648.920	1.230.831.505.246	251.805.537.600	109.402.379.600	843.526.198.044	Sumber dana APBD Provinsi Tahun 2008 adalah Rp. 83,7 Milliar
	1 Jalan dan Transportasi	383.475.845.000	1.148.151.500.000	240.110.000.000	33.667.620.800		
	2 Energi & Telekomunikasi	28.299.766.000	20.115.604.846	0	1.298.874.400		
	3 Sumber Daya Air	50.689.437.920	34.314.400.400	11.695.537.600	23.883.200.000		
	4 Air dan Sanitasi	10.381.600.000	28.250.000.000	0	50.552.684.400		
	5 Infrastruktur Lingkungan dan Pemeliharaan	0	0	0	0		
	6 Kawasan Percontohan	0	0	0	0		
	7 Bangunan Gedung Negara dan Rumah	0	0	0	0		
	8 IREP	0	0	0	0		
SOSIAL KEMASYARAKATAN		105.847.223.600	193.997.800.000	13.995.000.000	190.459.062.400	609.812.407.978	Sumber dana APBD Kab/kota Nias Tahun 2008 adalah Rp.1,5 Triliun Nias Selatan : Rp.363 Milliar
	1 Pendidikan, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan	98.830.296.600	171.487.800.000	13.995.000.000	189.907.062.400		
	- Pendidikan	61.097.228.600	125.405.000.000	1.500.000.000	97.695.807.400		
	- Kesehatan	37.101.000.000	46.082.800.000	12.495.000.000	92.211.255.000		
	- Pemberdayaan Perempuan	632.068.000	0	0	0		
	2 Agama, Sosial, Budaya, Pemuda dan Olahraga	7.016.927.000	22.510.000.000	0	552.000.000		
	- Agama	3.149.625.000	11.625.000.000	0	552.000.000		
	- Sosial	441.127.000	0	0	0		
	- Budaya	1.896.175.000	6.170.000.000	0	0		
	- Pemuda dan Olahraga	1.530.000.000	4.715.000.000	0	0		
PEREKONOMIAN		37.751.315.000	33.591.375.000	3.453.750.000	104.562.296.400	246.259.773.333	
	1 Pertanian	4.279.100.000	14.682.625.000	800.000.000	18.524.439.200		
	- Tanaman Pangan & Hortikultura	415.000.000	6.272.500.000	800.000.000			
	- Perkebunan	3.170.000.000	8.410.125.000	-			
	- Peternakan	694.100.000	-	-			
	- Kehutanan	-	-	-			
	2 Perikanan	7.275.957.000	2.895.000.000	-	39.319.208.400		
	3 Pengembangan Usaha	26.196.258.000	16.013.750.000	2.653.750.000	46.718.648.800		
	- Industri	23.666.000.000	-	-	-		
	- Perdagangan				7.015.920.000		
	- Tenaga kerja	530.000.000	-	-	39.702.728.800		
	- Koperasi dan UKM	1.972.500.000	15.013.750.000	2.653.750.000	-		
	- Pariwisata	27.758.000	1.000.000.000	-	-		
KELEMBAGAAN DAN HUKUM		47.978.194.000	46.600.750.000	5.486.250.000	74.984.250.400	0	
	1 Kelembagaan Daerah	47.978.194.000	46.600.750.000	5.486.250.000	74.984.250.400		
	2 Hukum						
	3 K3M						
BIAYA MANAJEMEN		62.925.317.000					
JUMLAH		820.071.023.520	1.578.021.430.246	274.740.537.600	640.804.297.200	1.727.249.883.000	

Sumber : BRR Nias (Juni 2007) dan Analisis Tim P3B Bappenas, 2007

Keterangan : 1 USD = IDR 9,200

*) Dana off budget 2008-2009 untuk bidang kelembagaan dan hukum tergabung dengan bidang sosial kemasyarakatan

**RENCANA KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI (DANA ON BUDGET)
KABUPATEN NIAS SELATAN, KEPULAUAN NIAS, PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN 2007 - 2009**

BIDANG	PROGRAM UTAMA	SUB BIDANG/KEGIATAN	2007			2008			2009			KETERANGAN
			Nilai (Rupiah)	Volume		Nilai (Rupiah)	Volume		Nilai (Rupiah)	Volume		
PERUMAHAN, PERMUKIMAN, TATA RUANG, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	A. Perumahan dan Permukiman	110.498.000.000			52.250.000.000			0			
		1 Rekonstruksi	87.220.000.000	1.703	unit							
		2 Rehabilitasi	12.850.000.000	857	unit							
		3 PSD	10.428.000.000	1.042	unit							
		4 Pembangunan Rumah				39.000.000.000	750	unit				
		5 Rehabilitasi Rumah				3.750.000.000	750	unit				
		6 Pembangunan Prasarana				6.000.000.000	750	unit				
		7 Konsultan Pengawasan (pembangunan rumah)				1.500.000.000	1	PKT				
		8 Konsultan pendamping/Fasilitator				2.000.000.000	1	PKT				
INFRASTRUKTUR	JALAN DAN TRANSPORTASI	B. Pembuatan Sertifikat Tanah	14.954.325.000			21.016.650.000			0			
		1. Pengadaan tanah	5.250.000.000	3	pkt	10.000.000.000	5	PKT				
		2. Peralatan & gedung kantor pertanahan	1.400.000.000	2	pkt	2.800.000.000	4	PKT				
		3. Sertifikasi tanah permukiman	2.652.325.000	5.000	bidang	5.304.650.000	10.000	bidang				
		4. Ajudikasi tanah	2.912.000.000	1	pkt	2.912.000.000	1	PKT				
		5. Peralatan pengukuran dan pemetaan	2.740.000.000	6	unit							
INFRASTRUKTUR	JALAN DAN TRANSPORTASI	A. TRANSPORTASI LAUT DAN ASDP	28.875.000.000			700.000.000			0			
		A.1. Transportasi Laut	28.875.000.000			700.000.000			0			
		1 Pembangunan Pelabuhan Teluk Dalam	20.250.000.000	1	unit							
		2 Pembangunan Pelabuhan Laut P.Tello	8.625.000.000	1	unit							
		Konsultan										
		1 Pengawasan Pelabuhan Teluk Dalam				450.000.000	1	pkt				
		2 Pengawasan Pelabuhan Laut P.Tello				250.000.000	2	pkt				
		B. TRANSPORTASI UDARA	4.450.000.000			0			0			
		1 Rehabilitasi dan Rekonstruksi Landas Pacu	4.450.000.000			0			0			
		1 Pembangunan Landas Pacu / Air Strip di Teluk Dalam	4.450.000.000	1	unit							
		Konsultan	0			0			0			
		1 Pengawasan Pemb. Air Strip Teluk Dalam										
INFRASTRUKTUR	JALAN DAN TRANSPORTASI	C. TRANSPORTASI DARAT	38.572.880.250			0			0			
		C.1. Transportasi Darat dan Kereta Api	34.322.880.250			0			0			
		1 Pembangunan Jalan Miga - Moi	22.350.000.000	15	km							
		2 Rehab / Rekon Jembatan Oyo	1.966.262.250	55	m							
		3 Rehab. Rekonstruksi Jl. Teluk Dalam - Amandraya	10.000.000.000	7	km							
		4 Rehab. Rekons. Jembatan Idano Waji Km. 77+790	5.393.000	12	m							
		5 Rehab. Rekons. Jembatan Box Culvert Km. 71 + 200 Desa Siwalawabanua	900.000	6	m							
		6 Rehab. Rekons. Jembatan Box Culvert Km. 41 + 150 Kec. Idonogawo dan Km. 103 + 150 Desa Hilisimaetana	325.000	2	unit							
		7 Jalan Tetelesi (Idano Gawo)-Lahusa (widening dan Overlay Hotmix)										
		8 Jalan Lolowa'u-Sirombu (overlay hotmix)										
		C.2. Terminal Bus	4.250.000.000			0			0			
		1 Pembangunan Terminal Bus Teluk Dalam	4.250.000.000	1	unit							
		D. JALAN	53.231.922.000			212.135.000.000			65.200.000.000			
		Jalan Kabupaten	53.231.922.000			212.135.000.000			65.200.000.000			
		1 Peningkatan Jalan Ruas Jalan Gomo-Sifalago-Susua-Amorosa	352.000.000	1	km							
		2 Peningkatan Ruas Jalan BAWODABARA-HILIFALAGO-SIWALAWA-HILINAWALO FAU	814.922.000	1	km							
		3 Rehabilitasi dan Pelebaran dan Peningkatan Jalan Ruas Jalan Teluk Dalam-Hilimondrege	200.000.000	1	km							
		4 Rehabilitasi dan Pelebaran dan Peningkatan Jalan Ruas Jalan Simpang AUGÉ-BAWOLAHUSA-MAZINGO	565.000.000	1	km							
		5 Rehabilitasi Berat dan Peleb Jalan Kelling Pulau Tello	500.000.000	1	km							
		6 Peningkatan Jalan Ruas Eho - Tebolo	500.000.000	1	km							

**RENCANA KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI (DANA ON BUDGET)
KABUPATEN NIAS SELATAN, KEPULAUAN NIAS, PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN 2007 - 2009**

BIDANG	PROGRAM UTAMA	SUB BIDANG/KEGIATAN	2007		2008		2009		KETERANGAN
			Nilai (Rupiah)	Volume	Nilai (Rupiah)	Volume	Nilai (Rupiah)	Volume	
		7 Rehab dan Peningk. Simp Jalan KM 19 Prov.Orahili -Bawonahono	600.000.000	1 km					
		8 Rehabilitasi Berat Jalan Ruas Helezalulu - Gomo	6.000.000.000	6 km					
		9 Rehab & Peningk Jl. Ruas Tuhemberua - Orahili - Sambulu Kecamatan Lolomatua:	1.875.000.000	3 km					
		10 Rehab & Peningk Jl. Ruas Bawomataluo - Siwalawa - Onohondro -Hilinawalo Fau Kec Teluk Dalam	2.625.000.000	4 km					
		11 Rehab & Peningk Ruas Simpang Jalan Propinsi Km 28 - Hilizihono -Orahili - RS Lukas	4.500.000.000	5 km					
		12 Rehab & Peningk Jl. Ruas Soledua - Togizita - Bawosalo'o - Sambulu Kecamatan Lolowau	2.625.000.000	4 km					
		13 Rehab & Peningk Jl. Ruas Teluk Dalam - Hilimondrege Raya	2.200.000.000	2 km					
		14 Rehab & Peningk Jalan dalam Kota Teluk Dalam	6.000.000.000	6 km					
		15 Rehab & Peningk Jl. Propinsi menuju Ibukota Kec Lolomatua	4.000.000.000	4 km					
		16 Rehab & Peningk Jl. Ruas Hilifarono-Hilifalago-Hilinomozaua-Hilimondrege Raya	3.000.000.000	3 km					
		17 Rehab & Peningk Jl. Ruas Orahili-Gomo-Hilina'a (2,5KM) Gomo-Sambulu Kec Gomo / Lolomatua (lanjutan)	1.875.000.000	3 km					
		18 Rehab & Peningk Jl. Ruas Gomo - Boronadu (3,5KM) (lanjutan)	3.500.000.000	4 km					
		19 Rehab & Peningk Jl. Keliling Pulau Tello (2,5 KM) Kec Pulau-pulau Batu (lanjutan)	2.500.000.000	3 km					
		20 Rehab & Peningk Jl. Ruas Eho - Tebolo (2KM) Kec Hibala	2.000.000.000	2 km					
		21 Rehab & Peningk Jl. Ruas SMAN 1 Gomo Desa Tetegawa'ai (4KM) Kec Gomo	3.000.000.000	4 km					
		22 Pembangunan Jembatan Sungai Batu Buaya Cs (40M)	4.000.000.000	40 km					
		23 Peningkatan Jalan Propinsi Km. 6 - Bawonahono-Bawomataluo-Hilisematanao-Bandara (Rencana), Sorake-Lagundri (35 Km)			21.000.000.000	21 km	14.000.000.000	14 km	
		24 Rehabilitasi dan Peningkatan Jalan Lahusa - Gomo (18 Km)			42.500.000.000	17 km			
		25 Rehabilitasi dan Peningkatan Jalan Ruas Huno - Gomo (10 Km)			10.000.000.000	10 km			
		26 Peningkatan Ruas Jalan Desa Silimabanua - Desa Silimabanua - Baruzo - Gomo (8 Km)			8.000.000.000	8 km			
		27 Rehabilitasi dan Peningkatan Jalan Ruas Simpang PDAM - Lazafahuwo - Hilifalago - Hilinamozaua (8 Km)			8.000.000.000	8 km			
		28 Rehabilitasi dan Peningkatan Ruas Jalan Telukdalam - Godu - Sifalago Susua - Hoya - Lahusa (22 Km)			13.200.000.000	13 km	8.800.000.000	9 km	
		29 Rehabilitasi dan Peningkatan Ruas Jalan Togizita -Daodao - Oladano - Harefa (22 Km)			13.200.000.000	13 km	8.800.000.000	9 km	
		30 Rehabilitasi dan Peningkatan Ruas Jalan Desa Lahusa Fau - Bawomataluo (2,250 Km)			2.250.000.000	2 km			
		31 Rehabilitasi dan Peningkatan Ruas Jalan Desa Lahusa Fau - Hilisimaetano (2,210 Km)			2.210.000.000	2 km			
		32 Rehabilitasi dan Peningkatan Ruas Jalan Desa Lahusa Fau - Siwalawa (3 Km)			3.000.000.000	3 km			
		33 Rehabilitasi dan Peningkatan Ruas Jalan Gomo - Boronadu - Hilidanayao - Oladano - Sambulu - Lolomatua (35 Km)			18.000.000.000	18 km	12.000.000.000	12 km	
		34 Peningk Jl. Ruas Helezalulu-Gomo			6.000.000.000	6 km			
		35 Rehab & Peningk Jl. Propinsi menuju Ibukota Kec Lolomatua			4.000.000.000	4 km			
		36 Rehab & Peningk Jl. Ruas Hilifarono-Hilifalago-Hilinomozaua- Hilimondrege Raya			3.000.000.000	3 km			
		37 Rehab & Peningk Jl. Ruas Orahili-Gomo-Hilina'a Gomo-Sambulu Kec Gomo / Lolomatua (lanjutan)			1.875.000.000	3 km			
		38 2. Rehab & Peningk Jl. Ruas Gomo - Boronadu			3.500.000.000	4 km			
		39 3. Rehab & Peningk Jl. Ruas Gomo - Sifalago Susua - Amorosa Kec Gomo (lanjutan)			2.500.000.000	3 km			
		40 4. Rehab & Peningk Jl. Keliling Pulau Tello Kec Pulau-pulau Batu (lanjutan)			2.500.000.000	3 km			
		41 5. Rehab & Peningk Jl. Ruas Eho - Tebolo Kec Hibala			2.000.000.000	2 km			
		42 6. Rehab & Peningk Jl. Ruas SMAN 1 Gomo Desa Tetegawa'ai Kec Gomo			3.000.000.000	4 km			
		43 Pembangunan Jembatan Bawodobara - Hilifarono (50 m)			6.000.000.000	50 m			
		44 7. Pembangunan Jembatan Sungai Batu Buaya Cs			4.000.000.000	40 m			
		45 Peningkatan Jembatan Ruas Jalan Lahusa - Teluk Dalam - Lolowa'u (18 buah)			32.400.000.000	11 unit	21.600.000.000	7 unit	
			1.434.548.000		0		0		
		E. ENERGI DAN KELISTRIKAN	874.548.000		0		0		
		1 Pengadaan MDU Ranting Telukdalam	874.548.000	34 km					
		2 Pembangunan Gardu Induk / Distribusi Ranting Teluk Dalam							
		F. TELEKOMUNIKASI	560.000.000		0		0		
		1 Pembangunan Kantor Pos Teluk Dalam	560.000.000	1 unit					

**RENCANA KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI (DANA ON BUDGET)
KABUPATEN NIAS SELATAN, KEPULAUAN NIAS, PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN 2007 - 2009**

BIDANG	PROGRAM UTAMA	SUB BIDANG/KEGIATAN	2007		2008		2009		KETERANGAN
			Nilai (Rupiah)	Volume	Nilai (Rupiah)	Volume	Nilai (Rupiah)	Volume	
INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR		G. IRIGASI	25.128.690.000		54.680.936.500		7.028.942.000		
			16.906.690.000		43.830.936.500		7.028.942.000		
		1 Rehabilitasi DI Lagundri							
		2 Rehab DI Siwalawa	4.414.180.000	300 Ha					
		4 DI Lobu Faulo (100 Ha) Kec. Teluk Dalam	1.626.014.000	100 Ha					
		5 DI Lakunda (75 Ha) Kec. Amandraya	889.963.000	75 Ha					
		6 DI Sisombowo (50 Ha) Kec. Amandraya	860.210.000	50 Ha					
		7 DI Lahesa (70 Ha) Kec. Amandraya	2.095.273.000	70 Ha					
		8 DI Otua (130 Ha) Kec. Teluk Dalam (ETESP)	1.591.210.000	120 Ha					
		9 DI Mbomboharu (16 Ha) Kec. Teluk Dalam (ETESP)	1.141.210.000	100 Ha					
		10 DI Tegoyo (34 Ha) Kec. Amandraya (ETESP)	906.210.000	50 Ha					
		11 DI Mbombonaajui (350 Ha) Kec. Amandraya (ETESP)	1.791.210.000	150 Ha					
		12 DI Mowao Kec. Teluk Dalam (ETESP)	1.591.210.000	50 Ha					
		13 DI Idano Mola, Kec. Bawotalo			4.200.000.000	300 Ha	2.800.000.000	200 Ha	
		14 DI Zumuzu, Kec. Bawotalo			1.530.759.000	66 Ha	1.020.506.000	44 Ha	
		15 D.I. Lahusa / Nukito			2.406.327.000	150 Ha	1.604.218.000	100 Ha	
		16 D.I. Soenuo, Teluk Dalam			1.122.952.600	70 Ha			
		17 D.I. Taro'olala, Teluk Dalam			962.530.800	60 Ha			
		18 D.I. Boriwi, Teluk Dalam			2.406.327.000	150 Ha			
		19 D.I. Lao'a, Teluk Dalam			2.406.327.000	150 Ha			
		20 D.I. Batunitaruo, Teluk Dalam			1.604.218.000	100 Ha			
		21 D.I. Khelo, Amandraya			802.109.000	50 Ha			
		22 D.I. Baikoro, Lolowau			1.203.163.500	75 Ha			
		23 D.I. Lato Slide-ide, Lolowau			802.109.000	50 Ha			
		24 D.I. Lato Sebua, Lolowau			1.604.218.000	100 Ha			
		25 D.I. Bombolaehua, Lolowau			1.203.163.500	75 Ha			
		26 D.I. Fausi Laza, Teluk Dalam			1.604.218.000	100 Ha			
		27 D.I. Losu II, Teluk Dalam			802.109.000	50 Ha			
		28 D.I. Hili Sondrekha, Teluk Dalam			1.283.374.400	80 Ha			
		29 D.I. Siboleang, Teluk Dalam			1.203.163.500	75 Ha			
		30 D.I. Bouneng, Teluk Dalam			802.109.000	50 Ha			
		31 D.I. Marembe, Teluk Dalam			802.109.000	50 Ha			
		32 D.I. Togi Guro, Lolowau			481.265.400	30 Ha			
		33 D.I. Bohalu, Amandraya			802.109.000	50 Ha			
		34 D.I. Sefa, Amandraya			1.604.218.000	100 Ha			
		35 D.I. Tanamo, Amandraya			802.109.000	50 Ha			
		36 D.I. Tetemawe, Lahusa			2.406.327.000	150 Ha			
		37 D.I. Lamori, Teluk Dalam			1.764.639.800	110 Ha			
		38 D.I. Losu, Teluk Dalam			2.406.327.000	150 Ha			
		39 D.I. Hilifalawu, Teluk Dalam			2.406.327.000	150 Ha	1.604.218.000	100 Ha	
		40 D.I. Bou, Teluk Dalam			2.406.327.000	150 Ha			
		H. PENGENDALIAN BANJIR	3.782.000.000		3.000.000.000		0		
		1 Normalisasi dan Perkuatan Tebing Sungai Manawa Dano, Idanomi	782.000.000	1 pkt					
		2 Normalisasi Sungai dan Perkuatan Tebing sungai Siwalawa	1.000.000.000	1 pkt					
		3 Normalisasi Sungai dan Perkuatan Tebing sungai Susua dan Saua	1.000.000.000	1 pkt					
		4 Normalisasi Sungai dan Perkuatan Tebing sungai Masio	1.000.000.000	1 pkt					
		5 Normalisasi Sungai di Nias Selatan			3.000.000.000	3 pkt			
		I. PENGAMANAN PANTAI	4.440.000.000		7.850.000.000		0		
		1 Pengamanan Pantai Pasir Putih Kec. Teluk Dalam	4.440.000.000	1 pkt					
		2 Pengamanan pantai di Nias Selatan			7.850.000.000	3 pkt			
AIR MINUM DAN SANITASI			14.611.800.000		24.250.000.000		0		
		J. AIR MINUM	7.600.000.000		17.500.000.000		0		
		1 Pemb. Sist. Air Minum Kec. Teluk Dalam	2.650.000.000	1 sist					
		2 Pemb. Sist. Air Minum Kec. Lolowau	1.650.000.000	1 sist					
		3 Pemb. Sist. Air Minum Kec. Amandraya	1.650.000.000	1 sist					
		4 Pemb. Sist. Air Minum Kec. Lahusa	1.650.000.000	1 sist					
		5 Pemb. Sist. Jaringan Air Minum Kecamatan Kab. Nisel							
		6 Pemb. Sistem Air Minum Kec. Teluk Dalam			2.500.000.000	1 pkt			
		7 Pemb. Sistem Jaringan Air Minum Kecamatan Kab. Nisel			15.000.000.000	6 pkt			

**RENCANA KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI (DANA ON BUDGET)
KABUPATEN NIAS SELATAN, KEPULAUAN NIAS, PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN 2007 - 2009**

BIDANG	PROGRAM UTAMA	SUB BIDANG/KEGIATAN	2007			2008			2009			KETERANGAN
			Nilai (Rupiah)	Volume		Nilai (Rupiah)	Volume		Nilai (Rupiah)	Volume		
		K. PERSAMPAHAN	1.122.000.000			1.500.000.000			0			
		1 Pengadaan Amrol & Dump Truk Sampah berikut landasannya Kota Teluk Dalam	1.122.000.000	6	unit							
		2 Pengadaan Dump Truk, Armroll, container & landasan untuk Kota. Teluk Dalam, Amandraya, Lahusa, Lolowau				1.500.000.000	1	pkt				
		L. DRAINASE	5.889.800.000			5.250.000.000			0			
		1 Normalisasi/Rehab Saluran Drainase Teluk Dalam	3.110.000.000	6.575	m							
		2 Pembangunan Sistem Jaringan Drainase di Kota Lahusa	750.000.000	1.500	m							
		3 Pembangunan Sistim Drainse Pekan Togizita Kec. Lolowau	529.800.000	945	m							
		4 Pembangunan Sistim Drainse Lolowa'u	750.000.000	945	m							
		5 Pembangunan Sistim Drainse Amandraya	750.000.000	945	m							
		6 Pembangunan Sistem Drainase Teluk dalam				2.500.000.000	1	pkt				
		7 Pembangunan Sistim Drainse Pekan Togizita Kec. Lolowau				750.000.000	1	pkt				
		8 Pembangunan Sistim Drainse Lolowa'u				1.250.000.000	1	pkt				
		9 Pembangunan Sistim Drainse Amandraya				750.000.000	1	pkt				
SOSIAL KEMASYARAKATAN	PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		172.678.567.000			181.561.000.000			25.290.000.000			
			169.547.035.000			149.076.000.000			24.250.000.000			
		A. PENDIDIKAN	139.763.543.000			85.442.000.000			5.500.000.000			
		A.1. Pembangunan Fasilitas Pendidikan	137.713.543.000			71.442.000.000			0			
		1. Pembangunan dan Rehabilitasi	130.325.543.000			50.092.000.000			-			
		1 Pembangunan Unit RKB SD Kab. Nias Selatan	78.855.677.787	94	sekolah							
		2 Pembangunan Unit RKB SMP Kab. Nias Selatan	12.071.426.089	11	sekolah							
		3 Pembangunan Unit RKB SMU Kab. Nias Selatan	5.923.384.123	8	sekolah							
		4 Pembangunan Laboratorium	4.330.055.000	12	sekolah							
		5 Pembangunan RKB SD/MI, SMP/MTS dan SMU/SMK/MA Kab. Nisel (185 Lkl X 56 M2)	29.145.000.000	29	sekolah							
		6 Pembangunan RKB SD				30.000.000.000	60	unit				
		7 Pembangunan RKB SMP				3.500.000.000	7	unit				
		8 Pembangunan RKB SMU				2.500.000.000	5	unit				
		9 Pembangunan RKB IKIP Teluk Dalam				4.000.000.000	1	unit				
		10 Pembangunan UGB perpustakaan				1.600.000.000	4	unit				
		11 Pembangunan laboratorium SMA				3.600.000.000	10	unit				
		12 Pengadaan peralatan laboratorium				1.000.000.000	2	pkt				
		Konsultan	0									
		13 DED Gedung, SD/MI, SMP/MTS & SMU/SMK, Perpustakaan, Laboratorium				2.300.000.000	1	pkt				
		14 DED Gedung IKIP Teluk Dalam				150.000.000	1	pkt				
		15 Pengawasan Pembangunan RKB SD				1.050.000.000	1	unit				
		16 Pengawasan Pembangunan RKB SMP				122.500.000	1	unit				
		17 Pengawasan Pembangunan RKB SMU				87.500.000	1	unit				
		18 Pengawasan Pembangunan UGB perpustakaan				56.000.000	1	unit				
		19 Pengawasan Pembangunan laboratorium SMA				126.000.000	1	unit				
		2. Penyediaan Fasilitas Sekolah	7.021.720.000			20.000.000.000			0			
		1 Pengadaan Meubelair TK, SD, SMP, SMA/SMK, IKIP Kab. Nias Selatan	7.021.720.000	1	pkt	20.000.000.000	571	pkt				
		3. Pengadaan Buku referensi Sekolah	366.280.000			1.350.000.000			-			
		1 Pengadaan buku referensi pelajaran SD NiSel				75.000.000	1	pkt				
		2 Pengadaan buku referensi pelajaran SMP NiSel	86.280.000	1	pkt	50.000.000	1	pkt				
		3 Pengadaan buku referensi pelajaran SMU NiSel	100.000.000	1	pkt	75.000.000	1	pkt				
		4 Pengadaan buku referensi/perpustakaan IKIP Teluk Dalam NiSel	180.000.000	1	pkt	150.000.000	1	pkt				
		5 Pengadaan Buku Referensi SD, SMP, SMA, & IKIP				1.000.000.000	3	pkt				
		A.2. Pembangunan Kapasitas Pendidikan	2.050.000.000			14.000.000.000			5.500.000.000			
		1. Beasiswa	1.000.000.000			7.000.000.000			0			
		1 Beasiswa Studi Lanjut S2 untuk Dosen IKIP Teluk Dalam	1.000.000.000	1	paket	5.000.000.000	1	pkt				
		2 Beasiswa Anak Sekolah				2.000.000.000	1	pkt				

**RENCANA KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI (DANA ON BUDGET)
KABUPATEN NIAS SELATAN, KEPULAUAN NIAS, PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN 2007 - 2009**

BIDANG	PROGRAM UTAMA	SUB BIDANG/KEGIATAN	2007		2008		2009		KETERANGAN
			Nilai (Rupiah)	Volume	Nilai (Rupiah)	Volume	Nilai (Rupiah)	Volume	
		2. Pelatihan	1.050.000.000		7.000.000.000		5.500.000.000		
		1 Pelatihan Manajemen Kepala Sekolah SD/SMP/SMU/SMK	300.000.000	2 keg	500.000.000	1 keg	500.000.000	1 keg	
		2 Pelatihan/Peningkatan Kualitas Guru	600.000.000	2 pkt					
		3 Pelatihan Manaj. Pengemb. Institusi dan kurikulum untuk pimpinan & dosen IKIP Teluk Dalam	150.000.000	1 keg					
		5 Pelatihan Guru dalam Menerapkan Kurikulum Berdasarkan Satuan Pendidikan			1.500.000.000	3 pkt			
		6 Pelatihan Manaj. Pengemb. Institusi dan Kurikulum untuk Pimpinan dan Dosen IKIP Teluk Dalam			2.000.000.000	1 keg	2.000.000.000	1 keg	
		7 Pelatihan Guru Sains dan Matematika			3.000.000.000	1 pkt	3.000.000.000	1 pkt	
		B. KESEHATAN	29.501.585.000		63.634.000.000		18.750.000.000		
		B.1. Upaya Kesehatan Masyarakat dan Perorangan	22.501.585.000		55.634.000.000		18.750.000.000		
		1. Pembangunan Rumah Sakit	2.910.000.000		0		0		
		1 Rehab Gedung RSU St. Lukas	2.910.000.000	1 paket					
		2. Pembangunan Puskesmas dan Pustu	12.751.585.000		43.284.000.000		12.500.000.000		
		1 Puskesmas Rawat Inap Type 250 M2 dan rumah Dinas Paramedis (Kec. Lolomatua) Kab. NiSel	1.000.000.000	1 pkt					
		2 Puskesmas Rawat Inap Plus Teluk Dalam Kab. Nisel	349.512.000	1 pkt					
		3 Puskesmas perawatan Inap Plus T. Dalam + Fasilitas Gedung Kab. Nisel	4.000.000.000	1 pkt					
		4 Puskesmas perawatan Inap Plus Lahusa + Fasilitas Gedung Kab. Nisel	2.000.000.000	1 pkt					
		5 Puskesmas perawatan Inap Plus Lolowau + Fasilitas Gedung Kab. Nisel	4.000.000.000	1 pkt					
		6 Penyempurnaan Puskesmas Rawat Inap Plus Teluk Dalam Kab. Nisel	98.000.000	1 pkt					
		7 Puskesmas Tuindrao Kab. NiSel	215.273.000	1 pkt					
		8 Polindes Golambanua II	30.800.000	1 pkt					
		9 Pembangunan Rumah Dinas Dokter & Paramedis Puskesmas Amandraya	330.000.000	1 pkt					
		10 Pembangunan Rumah Dinas Dokter & Paramedis dan Prasarana Air Bersih (Lanjutan 2006)	728.000.000	1 pkt					
		11 Pembangunan Paket Puskesmas Rawat Inap + Fasilitas Lingkungan Gedung			21.400.000.000	7 unit			
		12 Pembangunan Paket Puskesmas Pembantu			12.500.000.000	13 unit	12.500.000.000	12 unit	
		13 Puskesmas			3.600.000.000	3 unit			
		14 Rumah Dinas Dokter dan Paramedis			3.000.000.000	5 unit			
		Konsultan							
		15 Jasa Konsultan Perencana Puskesmas			1.160.000.000	1 pkt			
		16 Pengawas Pembangunan Puskesmas			1.624.000.000	1 pkt			
		3. Dukungan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan	6.840.000.000		12.050.000.000		6.250.000.000		
		1 Pengembangan Sistem Manajemen RSU St. Lukas			300.000.000	1 PKT			
		2 Training dan sosialisasi pengurus dan kader Posyandu tingkat kabupaten dan kecamatan Kep. Nias			1.500.000.000	2 PKT			
		3 Pengadaan Peralatan dan perabotan Puskesmas Perawatan Inap Plus & Ambulans			1.500.000.000	2 PKT			
		4 Bantuan Operasional Puskesmas dan Rumah Sakit			1.000.000.000	1 PKT			
		5 Pengadaan Peralatan Medis / Kedokteran			5.000.000.000	1 PKT	5.000.000.000	1 PKT	
		6 Peralatan Puskesmas Plus & Ambulans			1.500.000.000	2 PKT			
		7 Capacity Building dan manajemen pelayanan bidang Kesehatan	6.840.000.000	10 pkt	1.250.000.000	1 PKT	1.250.000.000	1 PKT	
		4. Pelayanan Kesehatan/ Perbaikan Gizi Ibu/ Anak & KB	0		300.000.000		0		
		1 Penanganan Kasus Gizi Buruk							
		2 Identifikasi dan Evaluasi penanganan gizi buruk tingkat kabupaten dan kecamatan.			300.000.000	1 pkt			
		B.2. Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan	7.000.000.000		8.000.000.000		0		
		1 Beasiswa	5.000.000.000		8.000.000.000		0		
		1 Program Beasiswa berkelanjutan untuk Tenaga Kesehatan	5.000.000.000	1 pkt	8.000.000.000	2 pkt			
		2 Pelatihan	2.000.000.000		0		0		
		2 Program Paket Capacity Building untuk Tenaga Kesehatan RSU St. Lukas Kab. Nisel	1.000.000.000	1 pkt					
		3 Program Paket Capacity Building untuk Dinas Kesehatan Nisel	1.000.000.000	1 pkt					
		C. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	281.907.000,00		-		-		
		1 Bantuan gedung kursus wanita di Telukdalam & Pulau-Pulau Batu							
		2 Penguatan Kelembagaan (Bantuan Gedung Kursus Wanita)	281.907.000	2 unit					

**RENCANA KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI (DANA ON BUDGET)
KABUPATEN NIAS SELATAN, KEPULAUAN NIAS, PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN 2007 - 2009**

BIDANG	PROGRAM UTAMA	SUB BIDANG/KEGIATAN	2007		2008		2009		KETERANGAN
			Nilai (Rupiah)	Volume	Nilai (Rupiah)	Volume	Nilai (Rupiah)	Volume	
AGAMA, SOSIAL, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN BUDAYA		D. AGAMA	3.131.532.000		32.485.000.000		1.040.000.000		
		D.1. Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama	2.849.625.000		19.275.000.000		0		
		D.1.1. Bantuan Pembangunan Gereja Kab. Nias Selatan	2.400.000.000	64 unit	18.750.000.000	500 pkt	0		
		1 Bantuan Pembangunan Gereja Kab. Nias Selatan	2.400.000.000	64 unit	18.750.000.000	500 pkt			
		2 Bantuan Pembangunan Mesjid Kab. Nias Selatan	187.500.000	5 unit	487.500.000	13 pkt			
		3 Bantuan Pembangunan Vihara	37.125.000	1 unit	37.500.000	1 pkt			
		4 Bantuan Pengadaan buku Kerohanian Kab. NISel	225.000.000	2.250 Exp					
		E. SOSIAL	0		640.000.000		640.000.000		
		E.1. Rehabilitasi Sosial	0		640.000.000		640.000.000		
		1 Rehabilitasi Sosial							
		a. Biaya Makan Anak Panti			90.000.000	500 Orang	90.000.000	500 Orang	
		b. Bantuan Biaya Pendidikan Anak Panti Asuhan			250.000.000	1 Keg	250.000.000	1 Keg	
		2 Pemberdayaan Sosial dan Kelembagaan Sosial			300.000.000	1 Keg	300.000.000	1 Keg	
		a. Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif							
		F. BUDAYA	281.907.000		6.405.000.000		400.000.000		
		F.1. Pengelolaan Keragaman Budaya	0		2.000.000.000		0		
		1 Pembangunan lahan parkir Sal. Drainase dan Fasos Lainnya di Tradisional Ds. Bawomataluo			500.000.000	1 PKT			
		2 Pembangunan Balai Pelatihan Sanggar Seni Budaya di 10 Kecamatan			1.500.000.000	1 PKT			
		F.2. Pengelolaan Kekayaan Budaya	0		3.405.000.000		400.000.000		
		1 Bantuan pembentukan Pusat Studi Seni, Budaya dan Bahasa Nias IKIP Teluk Dalam			400.000.000	1 PKT			
		2 Rehabilitasi situs budaya Nias Selatan			1.000.000.000	1 PKT			
		3 Pembangunan Gedung Budaya Nias Selatan (Community Centre)			1.500.000.000	1 PKT			
		4 Pemberdayaan Pengrajin Tradisional Nias			400.000.000	1 Keg	400.000.000	1 Keg	
		Konsultan							
		Perencanaan & Pengawasan Pemb. Gedung Budaya Nias Selatan (Community Centre)			105.000.000	1 PKT			
		G. PEMUDA DAN OLAHRAGA	0		6.165.000.000		0		
		1 Pembangunan Lapangan Olah raga nias Selatan (stadion perintis Kab. Nisel)			4.000.000.000	1 PKT			
		2 Pembangunan Lapangan Sepak Bola di 10 Kec. Kab. Nias			2.000.000.000	1 PKT			
		3 Pembangunan Stadion Olah Raga Kab. Nias Selatan			15.000.000				
		Konsultan							
		1 Perencanaan & pengawasan pemb. Lapangan Olah raga nias Selatan (stadion perintis Kab. Nisel)			150000000	1 PKT			
PEREKONOMIAN			26.130.440.000		36.232.325.000		7.675.000.000		
PERTANIAN	PERTANIAN	A. TANAMAN HORTIKULTURA	2.855.000.000		2.300.000.000		175.000.000		
		1 Pengadaan Power Thresher							
		2 Pengadaan Alat Pertanian Kecil							
		3 Pengadaan Hand Tractor Type Bajak Singkal							
		4 Pengadaan Pompa Air 6" dan Kelengkapannya							
		5 Pengembangan Usaha Tani							
		6 Pelatihan Teknologi Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura (Kab. Nias)	60.000.000	1 pkt					
		7 Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SL-PHT)	60.000.000	1 pkt					
		8 Bantuan Agro Input Palawija & Hortikultura untuk Pemberdayaan Perempuan dan			100.000.000	1 pkt			
		9 Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SL-PHT) di Kab.Nias Selatan			100.000.000	1 pkt			
		10 Mis Blower (Mesin semprot hama)			625.000.000	50 unit			
		11 Mesin Panen Padi			375.000.000	15 unit			
		12 Power Trasher + accessories			400.000.000	30 unit			
		13 Handtractor			400.000.000	20 unit			
		14 Hand Sprayer			75.000.000	250 unit	75.000.000	250 unit	
		15 Pengadaan Alat Pertanian Kecil			100.000.000	300 unit	100.000.000	300 unit	
		16 Pelatihan dan Pendampingan bagi Peternak, Petani Palawija dan Hortikultural			125.000.000	1 pkt			

**RENCANA KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI (DANA ON BUDGET)
KABUPATEN NIAS SELATAN, KEPULAUAN NIAS, PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN 2007 - 2009**

BIDANG	PROGRAM UTAMA	SUB BIDANG/KEGIATAN	2007		2008		2009		KETERANGAN
			Nilai (Rupiah)	Volume	Nilai (Rupiah)	Volume	Nilai (Rupiah)	Volume	
		B. PERKEBUNAN	2.735.000.000		14.290.125.000		0		
		1 Pembuatan Kebun Entres Karet	260.000.000	2 ha					
		2 Peremajaan dan Perluasan Tanaman Karet	570.000.000	60 ha					
		3 Perluasan Tanaman Karet Pola Demplot	525.000.000	30 ha					
		4 Intensifikasi Tanaman Kakao	200.000.000	80 ha					
		5 Ekstensifikasi tanaman Kakao Pola Demplot	750.000.000	30 ha					
		6 Pelatihan Budidaya kakao & pendampingan	300.000.000	1 keg					
		7 Pelatihan dan Pendampingan Teknis Bagi Petani Karet	120.000.000	1 keg					
		8 Pembangunan Rumah Pompa dan bak tampung air	10.000.000	1 keg					
		9 Pembuatan Kebun Entres Karet			520.000.000	4 Ha			
		10 Peremajaan dan Perluasan Tanaman Karet			1.140.000.000	120 Ha			
		11 Perluasan Tanaman Karet Pola Demplot			1.050.000.000	60 Ha			
		12 Pelatihan dan Pendampingan Teknis Bagi Petani Karet			240.000.000	2 pkt			
		13 Intensifikasi Tanaman Kakao			400.000.000	160 Ha			
		14 Ekstensifikasi tanaman Kakao Pola Demplot			750.000.000	30 Ha			
		15 Pelatihan Budidaya kakao & pendampingan			300.000.000	1 pkt			
		16 Pembangunan Rumah Pompa dan Bak Tampung Air			20.000.000	2 keg			
		Terbangunnya Sentra Produksi Kakao Berstandar 7 Kec.							
		17 Gedung Kantor dan Gudang Produksi (325 m2)			5.687.500.000	7 unit			
		18 Jasa Perencanaan Pembangunan Sentra Produksi Kakao.			297.500.000	7 unit			
		19 Jasa Pengawasan Pembangunan Pusat Sentra Produksi Kakao.			223.125.000	7 unit			
		20 Pengadaan Alat Pengolahan Kakao (Alat Pengereng, Fermentasi, dan Sortir)			365.000.000	3 pkt			
		21 Bangunan Peralatan Pengolahan Kakao			75.000.000	3 unit			
		Pembangunan Pusat Sentra Produksi Kakao							
		20 Gedung Kantor dan Gudang Produksi (350 m2)			875.000.000	1 unit			
		21 Jasa Perencanaan Pembangunan Pusat Sentra Produksi Kakao			35.000.000	1 unit			
		22 Jasa Pengawasan Pembangunan Pusat Sentra Produksi Kakao			26.250.000	1 unit			
		23 Fasilitas Penunjang Kegiatan			93.750.000	1 pkt			
		Pengawal Program 7 Sentra Produksi Kakao							
		21 Petugas Pendamping (7 org selama 8 bln, gaji 4,5 jt/orang)			252.000.000	56 Orang			
		22 Motivator Desa (14 org Selama 8 bln, gaji 2,5 jt/org)			280.000.000	112 Orang			
		Optimalisasi Pemanfaatan Lahan							
		23 Pelatihan Teknologi Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura (Kab. Nias)			60.000.000	1 pkt			
		24 Transplantasi Terumbu Karang			1.500.000.000	1 pkt			
		25 Pendidikan dan Pelatihan Amdal			100.000.000	1 pkt			
		C. PETERNAKAN	0		0		0		
		D. KEHUTANAN	0		0		0		
	PERIKANAN		16.420.000.000		6.175.000.000		0		
		1 Bantuan Pengadaan Peralatan Kepada UKM							
		2 Bantuan Modal Usaha Pengolahan Ikan							
		3 Pengadaan Peralatan Tangkap Ikan							
		4 Pemb. Dermaga Pusat Pelelangan Ikan di Teluk Dalam	15.000.000.000	1 pkt					
		5 Pembangunan Unit Pengolah Ikan	120.000.000	1 pkt					
		6 Pembangunan Kebun Bibit Rumpul Laut	600.000.000	1 pkt					
		7 BLM Swadaya Pengadaan Kapal 5 GT	300.000.000	2 unit					
		8 BLM Modal Kerja UPP	400.000.000	1 pkt					
		9 Pembangunan pabrik Es							
		10 Pengawasan Dermaga PPI, Docking Kapal, Rumah Dinas (lanjutan)			175.000.000	1 pkt			
		11 Pembangunan Dermaga PPI, Docking Kapal, Rumah Dinas (lanjutan)			5.000.000.000	1 pkt			
		12 BLM Pengadaan Perahu Motor 0,5 GT - 5,5 PK dan Alat Tangkap lengkap			1.000.000.000	7 unit			

**RENCANA KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI (DANA ON BUDGET)
KABUPATEN NIAS SELATAN, KEPULAUAN NIAS, PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN 2007 - 2009**

BIDANG	PROGRAM UTAMA	SUB BIDANG/KEGIATAN	2007		2008		2009		KETERANGAN
			Nilai (Rupiah)	Volume	Nilai (Rupiah)	Volume	Nilai (Rupiah)	Volume	
	PENGEMBANGAN USAHA	A. PERDAGANGAN	6.855.440.000		14.482.200.000		7.500.000.000		
			4.765.440.000		0		0		
		1 Bantuan Modal Bergilir Usaha ekonomi produktif	4101440000	1 unit					
		2 Pembangunan Pasar Teluk Dalam (Kab. Nias Selatan)	664.000.000	2 unit					
		B. TENAGA KERJA	320.000.000		0		0		
		1 BLM Peralatan Penunjang Industri Rumah Tangga	200.000.000	1 pkt					
		2 Bantuan Modal Kerja / Peralatan Penunjang Usaha Ketrampilan Kab. Nisel	120.000.000	1 pkt					
		3 Pembangunan Gedung Pusat Balai Pelatihan Tenaga Kerja Kab. Nisel							
		4 Pelatihan Tenaga Kerja Kab. Nisel							
		5 BLM Peralatan Penunjang Usaha Keterampilan							
		C. KOPERASI DAN UKM	1.770.000.000		13.467.200.000		7.500.000.000		
		1 Bantuan Modal Usaha Industri Rumah Tangga							
		2 Identifikasi, Seleksi dan Konsolidasi, Movev, Pelatihan Pengurus LKM	170.000.000	1 keg					
		3 Pendampingan UKM	590.000.000	1 pkt					
		4 BLM untuk UKM melalui LKM/KSP/USP Koperasi	750.000.000	3 pkt					
		5 Pengembangan Usaha SpesifikKab. Nias Selatan	100.000.000	1 pkt					
		6 Bantuan Sarana dan Prasarana Kantor LKM Nisel	60.000.000	5 pkt					
		7 Biaya jasa promosi potensi wilayah dan stimulan investasi	100.000.000	1 pkt					
		8 Pendirian Nisel Micro Finance dan Pemb. Gedung LKM dan prasarananya							
		9 Pendirian UKM Center dan Pemb. Gedung UKM Center Kab. Nisel dan prasarananya							
		10 Bantuan Modal Kerja / Peralatan Penunjang Industri UKM			300.000.000	1 pkt			
		11 Bantuan Modal Kerja / Peralatan Penunjang Industri Rumah Tangga			300.000.000	1 pkt			
		12 Bantuan Modal sarana & peralatan Pendukung bagi usahawan (UKM)			100.000.000	1 pkt			
		13 Identifikasi, Seleksi dan Konsolidasi, Movev, Pelatihan Pengurus, Pelatihan dan Pendampingan LKM			250.000.000	1 pkt			
		14 Monitoring, Evaluasi dan Konsolidasi LKM			20.000.000	1 pkt			
		15 Identifikasi, Seleksi dan Konsolidasi, Movev, Pelatihan Pengurus, Pelatihan dan Pendampingan UKM			260.000.000	1 pkt			
		16 Monitoring dan Evaluasi UKM			40.000.000	1 keg			
		17 Pelatihan Pengurus dan pengelola LKM			100.000.000	1 pkt			
		18 Transport / BBM Petugas Penyuluh dan Pendamping Lapangan			7.200.000	1 pkt			
		19 BLM untuk UKM melalui LKM/KSP/USP Koperasi			900.000.000	72 OH			
		20 Pengembangan Usaha SpesifikKab. Nias Selatan			100.000.000	3 pkt			
		21 Bantuan Sarana dan Prasarana Kantor LKM Nisel			100.000.000	1 pkt			
		22 Pelatihan dan Pendampingan UKM			500.000.000	5 pkt			
		23 Biaya jasa promosi potensi wilayah dan stimulan investasi			100.000.000	1 pkt			
		24 Pendirian Nisel Micro Finance dan Pemb. Gedung LKM dan prasarananya			7.500.000.000	1 pkt	7.500.000.000	1 pkt	
		25 Pendirian UKM Center dan Pemb. Gedung UKM Center Kab. Nisel dan prasarananya			1.070.000.000	2 pkt			
		26 Bantuan Peralatan Kerja			200.000.000	1 pkt			
		27 Bantuan Modal Usaha Industri			300.000.000	5 pkt			
		28 Pembangunan Pasar Tradisional (Kab. Nias Selatan)			1.000.000.000	10 pkt			
		29 Pembangunan Pasar Tradisional kab. Nisel			200.000.000	2 pkt			
		Konsultan							
		30 Pengawasan Pembangunan Pasar Tradisional kab. Nisel			120.000.000	1 pkt			
		D. PARIWISATA	0		1.015.000.000		0		
		Bantuan Pengembangan penataan kawasan wisata laut (fisik dan non fisik)			1.000.000.000	1 PKT			
		Konsultan							
		1 Pengawasan penataan lahan parkir dan tempat penjualan souvenir desa Bawomataluo			15.000.000	1 PKT			

**RENCANA KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI (DANA ON BUDGET)
KABUPATEN NIAS SELATAN, KEPULAUAN NIAS, PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN 2007 - 2009**

BIDANG	PROGRAM UTAMA	SUB BIDANG/KEGIATAN	2007			2008			2009			KETERANGAN
			Nilai (Rupiah)	Volume		Nilai (Rupiah)	Volume		Nilai (Rupiah)	Volume		
KELEMBAGAAN DAN HUKUM	KEPEMERINTAHAN		10.125.366.000			30.930.000.000			6.240.000.000			
			10.125.366.000			30.930.000.000			6.240.000.000			
		A. Peningkatan Sarana-Prasarana Pemerintahan	10.125.366.000			30.930.000.000			6.240.000.000			
		A.1. Rehabilitasi Gedung Kantor Pemerintah	9.377.366.000			24.050.000.000			6.240.000.000			
		1 Pembangunan Kantor Dinas & Kecamatan Kab. Nias Selatan	5.250.000.000	4	unit							
		2 Pemb. Komplek Gedung Kantor Bupati Nias Selatan	4.127.366.000	1	unit							
		3 Pembangunan Gedung Utama Kantor Bupati Nias Selatan (lanjutan)				10.000.000.000	1	unit				
		4 Pembangunan Kantor Dinas & kantor kecamatan kab. Nias Selatan				6.000.000.000	6	unit	6.000.000.000	6	unit	
		5 Pembangunan Kantor Desa (KRRP)				7.000.000.000	28	unit				
		KONSULTAN										
		1 Pengawasan Pembangunan Gedung Utama Kantor Bupati Nias (lanjutan)				450.000.000	1	pkt				
		2 Perencanaan Pembangunan Kantor Dinas & kantor kecamatan kab. Nias Selatan				360.000.000	1	pkt				
		3 Pengawasan Pembangunan Kantor Dinas & kantor kecamatan kab. Nias Selatan				240.000.000	1	pkt	240.000.000	1	pkt	
		A.2. Rehabilitasi Bangunan / Gedung Khusus	748.000.000			6.880.000.000			0			
		1 Pengadaan Kendaraan Operasional untuk LAPAS Gunungsitoli dan Pulau Tello	248.000.000	2	unit							
		2 Pembangunan Kantor Sekretariat Bersama di Kab. Nias Selatan	500.000.000	1	unit							
		3 Pembangunan Gedung Kantor Polres Kab. Nisel				4.000.000.000	1	unit				
		4 Pembangunan / Renovasi Kantor Koramil				2.400.000.000	1	unit				
		KONSULTAN										
		1 Perencanaan Gedung Kantor Polres Kab. Nisel				120.000.000	1	unit				
		2 Pengawasan Gedung Kantor Polres Kab. Nisel				360.000.000	2	unit				
TOTAL			500.131.538.250			401.620.911.500			46.233.942.000			

Sumber : BRR Nias (Juni 2007) dan Analisis Tim P3B Bappenas, 2007

**RENCANA KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI (DANA OFF BUDGET)
KABUPATEN NIAS SELATAN, KEPULAUAN NIAS, PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN 2007-2009**

BIDANG	PROGRAM UTAMA	SUB BIDANG/KEGIATAN	2007		2008	KETERANGAN
			Nilai (Rupiah)	Volume	Nilai (Rupiah)	
PERUMAHAN, PERMUKIMAN, TATA RUANG, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	Perumahan		97.521.435.200		27.651.503.644	
			97.521.435.200			
		1 Rekonstruksi	77.935.104.400	789 unit		
		2 Penyediaan Bahan Bangunan (kayu)	19.586.330.800	2.500 m3		
	Tata Ruang					
	Pertanahan					
	Lingkungan Hidup					
INFRASTRUKTUR			30.407.481.200		670.996.779.044	
	Jalan dan Transportasi	A Jalan	5.571.796.000			
		A.1. Jalan Kabupaten				
		1 Rehab Jalan Lokal	5.287.847.200	22 km		
		2 Pembangunan Jembatan	283.948.800	1 unit		
	Air dan Sanitasi		24.835.685.200			
		A Air Minum				
	Infrastruktur Lingkungan dan Pemeliharaan	1 Penyediaan fasilitas air bersih(utk rumah)	3.183.687.600	31 unit		
		2 Pembangunan Sarana Sanitasi (MCK)	21.651.997.600	6 Kec		
	Bangunan Gedung Negara dan Rumah IREP					
SOSIAL KEMASYARAKATAN			86.153.630.251		609.812.407.978	
	Pendidikan, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan		80.118.340.091			
		A Pendidikan	42.678.691.691			
		A.1. Pembangunan Fasilitas Pendidikan				
		A.1.1. Pembangunan dan Rehabilitasi				
		1 Pembangunan dan Rehabilitasi SD	358.691.691	13 sekolah		
		A.1.2. Pengadaan Meubalair				
		1 Pengadaan Meublair	23.000.000.000	1 kab		
		A.1.2. Pengadaan Buku	19.320.000.000			
		A.2. Pembangunan Kapasitas Pendidikan	16.648.936.400			
		1 Pelatihan Peningkatan Kapasitas	16.648.936.400	1 kab		
		B Kesehatan	37.439.648.400			
		B.1. Upaya Kesehatan Masyarakat dan Perorangan				
	1 Pengadaan Alat Kedokteran	11.560.048.400	1 kab			
	2 Program Peningkatan Kebersihan	25.879.600.000	1 kab			
	C Pemberdayaan Perempuan	0				
	Agama, Sosial Budaya, Pemuda dan Olahraga		6.035.290.160			
		A Agama	6.035.290.160			
		A.1. Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama				
		1 Rehabilitasi Rumah Ibadah - Gereja	69.000.000	20 Unit		
		a. Bantuan Hibah Pasca Bencana	36.800.000	400 pakaian		
		2 Pemberdayaan Sosial dan Kelembagaan Sosial				
		a. Pelatihan	5.929.490.160	2.000 org		
B Sosial						
C Budaya						
D Pemuda dan Olahraga						

**RENCANA KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI (DANA OFF BUDGET)
KABUPATEN NIAS SELATAN, KEPULAUAN NIAS, PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN 2007-2009**

BIDANG	PROGRAM UTAMA	SUB BIDANG/KEGIATAN	2007		2008		KETERANGAN
			Nilai (Rupiah)	Volume	Nilai (Rupiah)		
PEREKONOMIAN			49.032.632.800			246.259.773.333	
	Pertanian		0				
	Perikanan		37.479.208.400				
		1 Pengadaan peralatan perikanan	37.479.208.400	210 unit			
	Pengembangan Usaha						
		A Industri					
		B Perdagangan					
		C Tenaga Kerja	11.553.424.400				
		1 Pelatihan tenaga kerja	11.334.464.400	94.115 org			
		2 Penyuluhan	218.960.000	1 paket			
		D Koperasi dan UKM					
		E Pariwisata					
KELEMBAGAAN DAN HUKUM			312.551.627.600			*	*
	Kelembagaan, Hukum dan K3M		312.551.627.600				
		A. Peningkatan Sarana-Prasarana Pemerintahan	1.440.269.200				
		1 Rehabilitasi Gedung Pemerintahan	1.440.269.200	1 Unit			
		B. Pembinaan Sarana dan Prasarana	311.111.358.400				
		1 Pelatihan	74.288.436.000	1200 org			
		2 Penguatan Pemerintahan Kecamatan	236.822.922.400	2 kecamatan			
TOTAL			575.666.807.051			1.554.720.464.000	

Sumber : BRR Nias (Juni 2007) dan Analisis Tim P3B Bappenas, 2007

**REKAPITULASI PEMETAAN PENDANAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
KABUPATEN NIAS SELATAN, KEPULAUAN NIAS, PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN 2007 - 2009**

BIDANG	PROGRAM UTAMA	ON Budget			OFF Budget		KETERANGAN
		2007	2008	2009	2007	2008/2009	
PERUMAHAN, PERMUKIMAN, TATA		125.452.325.000	73.266.650.000	0	97.521.435.200	27.651.503.644	
	1 Perumahan	110.498.000.000	52.250.000.000	0	97.521.435.200		
	2 Tata Ruang	14.954.325.000	21.016.650.000				
	3 Pertanahan			0			
	4 Lingkungan Hidup						
INFRASTRUKTUR		166.304.840.250	291.765.936.500	72.228.942.000	30.407.481.200	670.996.779.044	
	1 Jalan dan Transportasi	125.129.802.250	212.835.000.000	65.200.000.000	5.571.796.000		
	2 Energi & Telekomunikasi	1.434.548.000	0	0	0		
	3 Sumber Daya Air	25.128.690.000	54.680.936.500	7.028.942.000	0		
	4 Air dan Sanitasi	14.611.800.000	24.250.000.000	0	24.835.685.200		
	5 Infrastruktur Lingkungan dan Pemeliharaan	0	0	0	0		
	6 Kawasan Percontohan	0	0	0	0		
	7 Bangunan Gedung Negara dan Rumah	0	0	0	0		
	8 IREP	0	0	0	0		
		172.678.567.000	181.561.000.000	25.290.000.000	86.153.630.251	609.812.407.978	
SOSIAL KEMASYARAKATAN	1 Pendidikan, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan	169.547.035.000	149.076.000.000	24.250.000.000	80.118.340.091		Sumber dana APBD Kab/kota Nias Tahun 2008 Nias Selatan adalah Rp.363 Milliar
	- Pendidikan	139.763.543.000	85.442.000.000	5.500.000.000	42.678.691.691		
	- Kesehatan	29.501.585.000	63.634.000.000	18.750.000.000	37.439.648.400		
	- Pemberdayaan Perempuan	281.907.000	0	0	0		
	2 Agama, Sosial, Budaya, Pemuda dan Olahraga	3.131.532.000	32.485.000.000	1.040.000.000	6.035.290.160		
	- Agama	2.849.625.000	19.275.000.000	0	6.035.290.160		
	- Sosial	0	640.000.000	640.000.000	0		
	- Budaya	281.907.000	6.405.000.000	400.000.000	0		
	- Pemuda dan Olahraga	0	6.165.000.000	0	0		
		26.130.440.000	36.232.325.000	7.675.000.000	49.032.632.800	246.259.773.333	
PEREKONOMIAN	1 Pertanian	2.855.000.000	16.590.125.000	175.000.000	-		
	- Tanaman Pangan & Hortikultura	120.000.000	2.300.000.000	175.000.000			
	- Perkebunan	2.735.000.000	14.290.125.000	-			
	- Peternakan	-	-	-			
	- Kehutanan	-	-	-			
	2 Perikanan	16.420.000.000	6.175.000.000	-	37.479.208.400		
	3 Pengembangan Usaha	6.855.440.000	13.467.200.000	7.500.000.000	11.553.424.400		
	- Industri	4.765.440.000	-	-			
	- Perdagangan						
	- Tenaga kerja	320.000.000	-	-	11.553.424.400		
	- Koperasi dan UKM	1.770.000.000	13.467.200.000	7.500.000.000			
	- Pariwisata	-	-	-			
		10.125.366.000	30.930.000.000	6.240.000.000	312.551.627.600	0	
KELEMBAGAAN DAN HUKUM	1 Kelembagaan Daerah	10.125.366.000	30.930.000.000	6.240.000.000	312.551.627.600		
	2 Hukum						
	3 K3M						
BIAYA MANAJEMEN*		0	0	0			
JUMLAH		500.691.538.250	613.755.911.500	111.433.942.000	575.666.807.051	1.554.720.464.000	

Sumber : BRR Nias (Juni 2007) dan Analisis Tim P3B Bappenas, 2007

Keterangan

*) Biaya Manajemen Kabupaten Nias Selatan sudah Termasuk dalam Kabupaten Nias Selatan

**RENCANA KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI/KABUPATEN NANGGROE ACEH DARUSSALAM
TAHUN 2007 - 2009**

BIDANG	PROGRAM UTAMA	SUB BIDANG / KEGIATAN	2007			2008			2009			KETERANGAN
			NILAI (RUPIAH)	SUMBER PENDANAAN	LOKASI	NILAI (RUPIAH)	SUMBER PENDANAAN	LOKASI	NILAI (RUPIAH)	SUMBER PENDANAAN	LOKASI	
PERUMAHAN, PERMUKIMAN, TATA RUANG, DAN LINGKUNGAN HIDUP	PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		6.277.900.000			7.319.900.000			7.842.900.000			
			6.277.900.000			0			0			
	TATA RUANG		6.277.900.000			7.089.900.000			7.562.900.000			Setda
		A. Pemanfaatan Ruang										
		1 Pengendalian tertib pemanfaatan ruang	65.500.000	APBD	Prov. NAD	65.500.000	APBD	Prov. NAD	65.500.000	APBD	Prov. NAD	Setda
		2 Koordinasi tata ruang dan pemanfaatan ruang kab/ kota	74.200.000	APBD	Prov. NAD	74.200.000	APBD	Prov. NAD	74.200.000	APBD	Prov. NAD	Setda
		3 Monitoring dan evaluasi dan pelaporan	108.000.000	APBD	Prov. NAD	108.000.000	APBD	Prov. NAD	108.000.000	APBD	Prov. NAD	Setda
		4 Sosialisasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang	148.200.000	APBD	Prov. NAD	148.200.000	APBD	Prov. NAD	148.200.000	APBD	Prov. NAD	Setda
		5 Inventarisasi permasalahan penyimpangan pemanfaatan ruang	50.000.000	APBD	Prov. NAD	50.000.000	APBD	Prov. NAD	50.000.000	APBD	Prov. NAD	Setda
		B. Perencanaan Tata Ruang										
		1 Koordinasi pembangunan kawasan permukiman	70.500.000	APBD	Prov. NAD	70.500.000	APBD	Prov. NAD	70.500.000	APBD	Prov. NAD	Setda
		2 Koordinasi perkembangan perencanaan tata ruang	41.500.000	APBD	Prov. NAD	41.500.000	APBD	Prov. NAD	41.500.000	APBD	Prov. NAD	Setda
		3 Fasilitas percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah	1.500.000.000	APBD	Prov. NAD	1.500.000.000	APBD	Prov. NAD	1.600.000.000	APBD	Prov. NAD	Setda
		4 Fasilitas percepatan penyerahan PTD dari daerah induk ke daerah pemekaran				350.000.000	APBD	Prov. NAD	375.000.000	APBD	Prov. NAD	Setda
		5 Koordinasi dan pemantauan pemerintah daerah dan kecamatan	520.000.000	APBD	Prov. NAD	530.000.000	APBD	Prov. NAD	550.000.000	APBD	Prov. NAD	Setda
		6 Evaluasi penyelenggaraan otonomi daerah pada pemerintahan kabupaten/kota	200.000.000	APBD	Prov. NAD	202.000.000	APBD	Prov. NAD	205.000.000	APBD	Prov. NAD	Setda
		7 Penyusunan Grand Strategi Otonomi Daerah				250.000.000	APBD	Prov. NAD	275.000.000	APBD	Prov. NAD	Setda
		8 Koordinasi Penyelesaian masalah perbatasan antar daerah	3.500.000.000	APBD	Prov. NAD	3.700.000.000	APBD	Prov. NAD	4.000.000.000	APBD	Prov. NAD	Setda
PERTANAHAN			0			250.000.000			280.000.000			
	1 Fasilitas penyelesaian konflik-konflik Pertanahan					250.000.000	APBD	Prov. NAD	280.000.000	APBD	Prov. NAD	Setda
LINGKUNGAN HIDUP			0			0			0			
INFRASTRUKTUR			415.918.032.700			1.528.809.148.000			2.066.586.707.500			
	JALAN DAN TRANSPORTASI		346.444.010.500			1.260.639.872.000			1.850.390.680.000			Dinas Perhubungan
		A. Transportasi Laut dan ASDP										
		1 Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Laut										Dinas Perhubungan
		a Perencanaan Pelabuhan Rakyat Pulau Simatumeulu	200.000.000									Dinas Perhubungan
		b Perencanaan Pelabuhan Rakyat Meuligge Pulo Aceh	100.000.000									Dinas Perhubungan
		c Perencanaan Pelabuhan Rakyat Bulusema di Aceh Selatan	100.000.000									Dinas Perhubungan
		d DED Pelabuhan Rakyat Keude Meukek Kab. Aceh Selatan	200.000.000									Dinas Perhubungan
		e DED Pelabuhan Rakyat Keude Lhok Pawoh	200.000.000									Dinas Perhubungan
		2 Pembangunan Pengembangan Fasilitas Keselamatan Pelayaran										Dinas Perhubungan
		a Pelabuhan Laut Malahayati										Dinas Perhubungan
		1 Pemasangan Rambu Suar				2.500.000.000			337.869.000			Dinas Perhubungan
		2 Pembangunan Menara Suar				3.000.000.000						Dinas Perhubungan
		3 Pemasangan Rambu Pelayaran				19.883.000			20.272.000			Dinas Perhubungan
		4 Pemasangan Pelampung (Buoy)				700.000.000			36.267.000			Dinas Perhubungan
		5 Pengadaan Kapal Tunda				15.000.000.000						Dinas Perhubungan
		6 Pengadaan Kapal Pandu							5.000.000.000			Dinas Perhubungan
		7 Pengadaan Alat Telekomunikasi dan Navigasi							177.813.000			Dinas Perhubungan
		b Pelabuhan Laut Krueng Geukuh - Lhoksuemawe				174.397.000						Dinas Perhubungan
		1 Pemasangan Rambu Suar				662.757.700						Dinas Perhubungan
		2 Pemasangan Pelampung (Buoy)				600.000.000			36.267.000			Dinas Perhubungan
		3 Pengadaan Kapal Tunda							15.000.000.000			Dinas Perhubungan
		4 Pengadaan Alat Telekomunikasi dan Navigasi				662.708.800			50.000.000			Dinas Perhubungan
		c Pelabuhan Laut - Sabang & Distrik Navigasi Sabang										Dinas Perhubungan
		1 Pemasangan Rambu Suar				2.500.000.000			2.500.000.000			Dinas Perhubungan
		2 Pembangunan Menara Suar				3.000.000.000			2.000.000.000			Dinas Perhubungan
		3 Pemasangan Pelampung (Buoy)				700.000.000			35.000.000			Dinas Perhubungan
		4 Pengadaan Kapal Tunda							1.700.000.000			Dinas Perhubungan
		5 Pengadaan Alat Telekomunikasi dan Navigasi				2.500.000.000						Dinas Perhubungan
		d Pelabuhan laut Meulaboh										Dinas Perhubungan
		1 Pemasangan Rambu Suar				500.000.000			300.000.000			Dinas Perhubungan
		2 Pemasangan Rambu Pelayaran				250.000.000			25.000.000			Dinas Perhubungan
		3 Pemasangan Pelampung (Buoy)				15.000.000			20.000.000			Dinas Perhubungan
		4 Pengadaan Kapal Tunda							15.000.000.000			Dinas Perhubungan
		5 Pengadaan Alat Telekomunikasi dan Navigasi				3.000.000.000			675.689.000			Dinas Perhubungan
		e Pelabuhan Laut Kuala Langa										Dinas Perhubungan
		1 Pemasangan Rambu Suar				500.000.000			30.000.000			Dinas Perhubungan
		2 Pembangunan Menara Suar				2.000.000.000			200.000.000			Dinas Perhubungan
		3 Pemasangan Rambu Pelayaran				700.000.000			75.000.000			Dinas Perhubungan
		4 Pemasangan Pelampung (Buoy)				750.000.000			36.267.000			Dinas Perhubungan
		5 Pengadaan Kapal Tunda							15.000.000.000			Dinas Perhubungan
		6 Pengadaan Alat Telekomunikasi dan Navigasi				3.500.000.000			300.000.000			Dinas Perhubungan
		7 Pengadaan Kapal Patroli KPLP							1.000.000.000			Dinas Perhubungan
		f Pelabuhan Laut Calang										Dinas Perhubungan
		1 Pemasangan Rambu Suar				1.200.000.000			30.000.000			Dinas Perhubungan
		2 Pemasangan Rambu Pelayaran							700.000.000			Dinas Perhubungan
		3 Pemasangan Pelampung (Buoy)				700.000.000			100.000.000			Dinas Perhubungan
		4 Pengadaan Kapal Tunda							15.000.000.000			Dinas Perhubungan
		5 Pengadaan Alat Telekomunikasi dan Navigasi				3.500.000.000			300.000.000			Dinas Perhubungan
		6 Pengadaan Kapal Patroli KPLP							10.000.000.000			Dinas Perhubungan
		g Pelabuhan Tapaktuan										Dinas Perhubungan
		1 Pemasangan Pelampung (Buoy)				700.000.000			50.000.000			Dinas Perhubungan
		2 Pengadaan Kapal Tunda							15.000.000			Dinas Perhubungan
		3 Pengadaan Alat Telekomunikasi dan Navigasi				500.000.000			100.000.000			Dinas Perhubungan
		h Pelabuhan Saseh										Dinas Perhubungan
		1 Pemasangan Rambu Suar				25.000.000			30.000.000			Dinas Perhubungan

**RENCANA KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI/KABUPATEN NANGGROE ACEH DARUSSALAM
TAHUN 2007 - 2009**

BIDANG	PROGRAM UTAMA	SUB BIDANG / KEGIATAN	2007			2008			2009			KETERANGAN
			NILAI (RUPIAH)	SUMBER PENDANAAN	LOKASI	NILAI (RUPIAH)	SUMBER PENDANAAN	LOKASI	NILAI (RUPIAH)	SUMBER PENDANAAN	LOKASI	
		2 Pemasangan Pelampung (Buoy)				30.000.000			35.000.000			Dinas Perhubungan
		3 Pengadaan Alat Telekomunikasi dan Navigasi				250.000.000			50.000.000			Dinas Perhubungan
		i Pelabuhan Idi										
		1 Pemasangan Rambu Suar				25.000.000			30.000.000			Dinas Perhubungan
		j Pelabuhan Sinabang										
		1 Pemasangan Rambu Suar				1.500.000.000			35.000.000			Dinas Perhubungan
		2 Pemasangan Rambu Pelayaran				800.000.000			100.000.000			Dinas Perhubungan
		3 Pemasangan Pelampung (Buoy)				800.000.000			100.000.000			Dinas Perhubungan
		4 Pengadaan Kapal Tunda							1.500.000.000			Dinas Perhubungan
		5 Pengadaan Alat Telekomunikasi dan Navigasi				350.000.000			200.000.000			Dinas Perhubungan
		6 Pengadaan Kapal Patroli KPLP							10.000.000.000			Dinas Perhubungan
		k Pelabuhan Singkil										
		1 Pemasangan Rambu Suar				1.200.000.000			30.000.000			Dinas Perhubungan
		2 Pemasangan Rambu Pelayaran				700.000.000			100.000.000			Dinas Perhubungan
		3 Pemasangan Pelampung (Buoy)				700.000.000			100.000.000			Dinas Perhubungan
		4 Pengadaan Alat Telekomunikasi dan Navigasi				600.000.000			100.000.000			Dinas Perhubungan
		l Pelabuhan Rakyat Ujung Sarang (Simelue)										
		1 Pemasangan Rambu Pelayaran							350.000.000			Dinas Perhubungan
		2 Pengadaan Alat Telekomunikasi dan Navigasi							50.000.000			Dinas Perhubungan
		m Pelabuhan Rakyat Kuala Tari (Sigli)										
		1 Pemasangan Rambu Pelayaran							350.000.000			Dinas Perhubungan
		2 Pengadaan Alat Telekomunikasi dan Navigasi							50.000.000			Dinas Perhubungan
		n Pelabuhan Rakyat Sibige - Sinabang										
		1 Pemasangan Rambu Pelayaran							375.000.000			Dinas Perhubungan
		2 Pengadaan Alat Telekomunikasi dan Navigasi							50.000.000			Dinas Perhubungan
		o Pelabuhan Rakyat Sibadeh (Aceh Selatan)										
		1 Pemasangan Rambu Pelayaran							35.000.000			Dinas Perhubungan
		2 Pengadaan Alat Telekomunikasi dan Navigasi							50.000.000			Dinas Perhubungan
		p Pelabuhan Rakyat Kuala Raja (Aceh Jeumpa)										
		1 Pemasangan Rambu Pelayaran							350.000.000			Dinas Perhubungan
		2 Pengadaan Alat Telekomunikasi dan Navigasi							50.000.000			Dinas Perhubungan
		q Pelabuhan Rakyat Pulau Banyak										
		1 Pemasangan Rambu Suar				350.000.000			10.000.000			Dinas Perhubungan
		2 Pengadaan Alat Telekomunikasi dan Navigasi				50.000.000			5.000.000			Dinas Perhubungan
		3 Peningkatan Pelayanan Angkutan										
		a Koordinasi Dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan	93.442.000			95.310.000			97.217.000			Dinas Perhubungan
		4 Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut										
		a Pembangunan Pelabuhan Regional Kuala Langsa Tahap III										
		1 Konstruksi Penahan Ponton	833.277.000									Dinas Perhubungan
		2 Atap Ponton	193.225.000									Dinas Perhubungan
		3 Accre ke Pelabuhan	561.600.000									Dinas Perhubungan
		4 Dinding Penahan Tanah	1.378.300.000			114.247.000			116.485.000			Dinas Perhubungan
		5 Pengukuran Alur dan Kolam Pelabuhan				537.433.000			547.960.000			Dinas Perhubungan
		6 Perluasan Trestle				612.948.000			624.954.000			Dinas Perhubungan
		7 Pemasangan Fender				26.383.000			26.900.000			Dinas Perhubungan
		8 Pembangunan Dolphin				1.021.123.000			1.041.123.000			Dinas Perhubungan
		9 Pembangunan Penerak Gelombang				511.683.000			521.705.000			Dinas Perhubungan
		10 Timbunan Tanah Area Pelabuhan	499.887.500									Dinas Perhubungan
		11 Konstruksi Abutment	257.476.000									Dinas Perhubungan
		12 Accre Bridge	192.000.000									Dinas Perhubungan
		13 Pembangunan Gedung Terminal	1.950.000.000									Dinas Perhubungan
		14 Pembangunan Pagar	515.190.000									Dinas Perhubungan
		15 Pengadaan Fasilitas Penerangan Kawasan Pelabuhan	350.000.000									Dinas Perhubungan
		16 Pembangunan Mushalla	657.000.000									Dinas Perhubungan
		17 Pembangunan Pos Jaga	105.488.000									Dinas Perhubungan
		18 Landscaping	719.398.000									Dinas Perhubungan
		19 Perkerasan dan Pengembangan Lapangan Penumpukan				195.245.000			199.069.000			Dinas Perhubungan
		20 Pembangunan Gudang Darat (Linie II)				349.761.000			356.612.000			Dinas Perhubungan
		21 Pembangunan Bangunan Pendingin				1.221.009.000						Dinas Perhubungan
		22 Pemasangan Kran Darat (Shore Crane)				734.007.000						Dinas Perhubungan
		23 Pengadaan Fork lift				446.037.000						Dinas Perhubungan
		24 Pembangunan Terminal Barang Curah				412.533.000			420.614.000			Dinas Perhubungan
		25 Pembangunan Terminal Peti Kemas				197.453.000			201.320.000			Dinas Perhubungan
		26 Pembangunan Terminal Penumpang				425.002.000			433.326.000			Dinas Perhubungan
		27 Pembangunan Gedung Kantor				176.817.000			180.281.000			Dinas Perhubungan
		28 Pembangunan Rumah Dinas Operasional				232.892.000			474.908.000			Dinas Perhubungan
		29 Pembangunan Bangunan Komersil (Kantin)				103.501.000			105.528.000			Dinas Perhubungan
		30 Pemasangan dan Instalasi Water Resourch							33.669.000			Dinas Perhubungan
		31 Pemasangan dan Instalasi Elektrikal				143.995.000						Dinas Perhubungan
		32 Pembangunan dan Instalasi Drainase				22.422.000						Dinas Perhubungan
		33 Perluasan dan perkerasan Jalan Masuk				131.804.000			134.385.000			Dinas Perhubungan
		34 Perluasan dan Perkerasan Lahan Parkir				19.527.000			19.909.000			Dinas Perhubungan
		35 Pengadaan Kendaraan Operasional (roda 2)				44.929.000			45.809.000			Dinas Perhubungan
		36 Pengadaan Kendaraan Operasional(Roda 4)				122.534.000						Dinas Perhubungan
		37 Pembangunan Pagar				109.744.000			111.893.000			Dinas Perhubungan
		38 Pengadaan Fasilitas Pemadam Kebakaran & Rehabilitasi							130.140.000			Dinas Perhubungan
		b Pembangunan Pelabuhan Rakyat Ujung Sarang Tahap III										
		1 Urugan Tanah / Penimbunan	680.400.000									Dinas Perhubungan
		2 Pekerjaan Talud	870.000.000			114.247.000			116.485.000			Dinas Perhubungan
		3 Pembangunan Gedung Kantor	270.000.000									Dinas Perhubungan
		4 Pengadaan Fasilitas Penerangan Kawasan Pelabuhan	300.000.000			28.799.000			29.363.000			Dinas Perhubungan
		5 Fasilitas Air Bersih	200.000.000									Dinas Perhubungan
		6 Pembangunan Pagar	99.792.000									Dinas Perhubungan
		7 Perluasan Area Sisi Darat				250.000.000						Dinas Perhubungan
		8 Perluasan Dermaga				1.164.602.000			1.187.412.000			Dinas Perhubungan
		9 Pemasangan Fender				26.383.000			26.900.000			Dinas Perhubungan
		10 Pembangunan Dolphin				510.561.500						Dinas Perhubungan
		11 Perkerasan dan Pengembangan Lapangan Penumpukan				19.525.000			19.907.000			Dinas Perhubungan

**RENCANA KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI/KABUPATEN NANGGROE ACEH DARUSSALAM
TAHUN 2007 - 2009**

BIDANG	PROGRAM UTAMA	SUB BIDANG / KEGIATAN	2007			2008			2009			KETERANGAN
			NILAI (RUPIAH)	SUMBER PENDANAAN	LOKASI	NILAI (RUPIAH)	SUMBER PENDANAAN	LOKASI	NILAI (RUPIAH)	SUMBER PENDANAAN	LOKASI	
		12 Pembangunan Gudang Darat (Linie II)				87.440.000			89.153.000			Dinas Perhubungan
		13 Pembangunan Terminal Penumpang				134.584.000			137.220.000			Dinas Perhubungan
		14 Pembangunan Gedung Kantor				221.022.000						Dinas Perhubungan
		15 Pembangunan Rumah Dinas Operasional				232.893.000						Dinas Perhubungan
		16 Pembangunan Bangunan Komersil (Kantin)							118.719.000			Dinas Perhubungan
		17 Pemasangan dan Instalasi Water Resourch							33.669.000			Dinas Perhubungan
		18 Pembangunan dan Instalasi Drainase				22.422.000						Dinas Perhubungan
		19 Perluasan dan perkerasan Jalan Masuk				105.443.000			107.508.000			Dinas Perhubungan
		20 Perluasan dan Perkerasan Lahan Parkir				97.633.000			99.545.000			Dinas Perhubungan
		21 Perngadaan Kendaraan Operasional (roda 2)				22.465.000			22.905.000			Dinas Perhubungan
		22 Pengadaan Fasilitas Pemadam Kebakaran & Rehabilitasi							130.140.000			Dinas Perhubungan
		c Pelabuhan Rakyat Krude Meukek Kab. Aceh Selatan Tahap I										
		1 Pembangunan Sisi Laut Tahap I	3.710.000.000									Dinas Perhubungan
		2 Pembangunan Sisi Darat				2.500.000.000			2.000.000.000			Dinas Perhubungan
		d Pelabuhan Rakyat Lhek Paweh Kab. Aceh Barat Daya Tahap I										
		1 Pembangunan Sisi Laut Tahap I	2.720.000.000									Dinas Perhubungan
		2 Pembangunan Sisi Darat				2.500.000.000			1.500.000.000			Dinas Perhubungan
		e Pembangunan Pelabuhan Rakyat Kuala Raja										
		1 Pembangunan Fasilitas Laut Tahap I	3.900.000.000									Dinas Perhubungan
		2 Pembangunan Sisi Darat				2.500.000.000			2.500.000.000			Dinas Perhubungan
		f Pembangunan Pelabuhan Rakyat Kuala Baro Kabupaten Aceh Singkil										
		1 Pembangunan Fasilitas Laut Tahap I	1.044.442.000									Dinas Perhubungan
		2 Pembangunan Sisi Darat				2.000.000.000			2.500.000.000			Dinas Perhubungan
		g Pelabuhan Laut Malahayati										
		1 Pengerukan Alur dan Kolam Pelabuhan				3.600.000.000						Dinas Perhubungan
		2 Perluasan Dermaga Penumpang & Peti Kemas				11.646.016.000			11.874.118.000			Dinas Perhubungan
		3 Perluasan Trestle				2.329.203.000			2.374.824.000			Dinas Perhubungan
		4 Pemasangan Fender				220.000.000			240.000.000			Dinas Perhubungan
		5 Pembangunan Dolphin				376.203.000			383.572.000			Dinas Perhubungan
		6 Perkerasan dan Pengembangan Lapangan Penumpukan				800.000.000			1.020.000.000			Dinas Perhubungan
		7 Pembangunan Gudang Darat (Linie II)				5.000.000.000						Dinas Perhubungan
		8 Pemasangan Kran Darat (Shore Crane)				13.000.000.000						Dinas Perhubungan
		9 Pengadaan Fork lift				700.000.000			750.000.000			Dinas Perhubungan
		10 Pembangunan Terminal Barang Curah				825.067.000			841.227.000			Dinas Perhubungan
		11 Pembangunan Terminal Peti Kemas							765.017.000			Dinas Perhubungan
		12 Pembangunan Terminal Penumpang				425.002.000			433.326.000			Dinas Perhubungan
		13 Pembangunan Gedung Kantor							525.819.000			Dinas Perhubungan
		14 Pembangunan Rumah Dinas Operasional				279.471.000			237.454.000			Dinas Perhubungan
		15 Pembangunan Bangunan Komersil (Kantin)				116.438.000			237.438.000			Dinas Perhubungan
		16 Pemasangan dan Instalasi Water Resourch				500.000.000			200.000.000			Dinas Perhubungan
		17 Pemasangan dan Instalasi Elektrikal				450.000.000						Dinas Perhubungan
		18 Pembangunan dan Instalasi Drainase				40.000.000						Dinas Perhubungan
		19 Perluasan dan perkerasan Jalan Masuk				131.804.000			134.385.000			Dinas Perhubungan
		20 Perluasan dan Perkerasan Lahan Parkir				390.533.000			398.182.000			Dinas Perhubungan
		21 Pengadaan Kendaraan Operasional (roda 2)							22.905.000			Dinas Perhubungan
		22 Pembangunan Pagar				250.000.000			300.000.000			Dinas Perhubungan
		23 Pengadaan Fasilitas Pemadam Kebakaran & Rehabilitasi				1.000.000.000			1.200.000.000			Dinas Perhubungan
		h Pelabuhan Laut Krueung Geukuh										
		1 Pengerukan Alur dan Kolam Pelabuhan				4.000.000.000						Dinas Perhubungan
		2 Perluasan Dermaga				5.516.534.000			5.624.582.000			Dinas Perhubungan
		3 Perluasan Trestle				1.838.845.000			1.874.860.000			Dinas Perhubungan
		4 Pemasangan Fender				220.000.000			240.000.000			Dinas Perhubungan
		5 Pembangunan Dolphin				1.021.123.000			1.041.123.000			Dinas Perhubungan
		6 Perkerasan dan Pengembangan Lapangan Penumpukan				507.637.000			517.580.000			Dinas Perhubungan
		7 Pembangunan Gudang Darat (Linie II)				5.000.000.000						Dinas Perhubungan
		8 Pembangunan Bangunan Pendingin				128.527.000			131.045.000			Dinas Perhubungan
		9 Pemasangan Kran Darat (Shore Crane)				1.300.000.000						Dinas Perhubungan
		10 Pengadaan Fork lift				700.000.000			750.000.000			Dinas Perhubungan
		11 Pembangunan Terminal Barang Curah				825.067.000			841.227.000			Dinas Perhubungan
		12 Pembangunan Terminal Peti Kemas				750.321.000			765.017.000			Dinas Perhubungan
		13 Pembangunan dan Rehab Gedung Kantor				221.022.000						Dinas Perhubungan
		14 Pembangunan Rumah Dinas Operasional							237.454.000			Dinas Perhubungan
		15 Pembangunan Bangunan Komersil (Kantin)				27.237.000			27.770.000			Dinas Perhubungan
		16 Pemasangan dan Instalasi Water Resourch				500.000.000			200.000.000			Dinas Perhubungan
		17 Pemasangan dan Instalasi Elektrikal				450.000.000						Dinas Perhubungan
		18 Pembangunan dan Instalasi Drainase				40.000.000			40.000.000			Dinas Perhubungan
		19 Perluasan dan perkerasan Jalan Masuk				131.804.000			134.385.000			Dinas Perhubungan
		20 Perluasan dan Perkerasan Lahan Parkir				390.533.000			398.182.000			Dinas Perhubungan
		21 Pengadaan Kendaraan Operasional (roda 2)				44.929.000			22.000.000			Dinas Perhubungan
		22 Pengadaan Kendaraan Operasional(Roda 4)							250.000.000			Dinas Perhubungan
		23 Pembangunan Pagar				250.000.000			300.000.000			Dinas Perhubungan
		i Pelabuhan Laut Sabang										
		1 Pengerukan Alur dan Kolam Pelabuhan							748.978.000			Dinas Perhubungan
		2 Perluasan Dermaga				11.646.016.000			11.874.118.000			Dinas Perhubungan
		3 Perluasan Trestle				4.290.637.000			4.374.675.000			Dinas Perhubungan
		4 Pemasangan Fender				220.000.000			240.000.000			Dinas Perhubungan
		5 Pembangunan Dolphin				1.021.123.000			1.041.123.000			Dinas Perhubungan
		6 Perkerasan dan Pengembangan Lapangan Penumpukan				390.490.000			398.138.000			Dinas Perhubungan
		7 Pembangunan Gudang Darat (Linie II)				5.000.000.000						Dinas Perhubungan
		8 Pemasangan Kran Darat (Shore Crane)							13.000.000.000			Dinas Perhubungan
		9 Pengadaan Fork lift				700.000.000			750.000.000			Dinas Perhubungan
		10 Pembangunan Terminal Peti Kemas							765.017.000			Dinas Perhubungan
		11 Pembangunan Terminal Penumpang							548.880.000			Dinas Perhubungan
		12 Pembangunan dan Rehab Gedung Kantor				294.696.000						Dinas Perhubungan

**RENCANA KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI/KABUPATEN NANGGROE ACEH DARUSSALAM
TAHUN 2007 - 2009**

BIDANG	PROGRAM UTAMA	SUB BIDANG / KEGIATAN	2007			2008			2009			KETERANGAN
			NILAI (RUPIAH)	SUMBER PENDANAAN	LOKASI	NILAI (RUPIAH)	SUMBER PENDANAAN	LOKASI	NILAI (RUPIAH)	SUMBER PENDANAAN	LOKASI	
		13 Pembangunan Rumah Dinas Operasional				310.523.000						Dinas Perhubungan
		14 Pembangunan Bangunan Komersil (Kantin)				27.237.000			27.770.000			Dinas Perhubungan
		15 Pemasangan dan Instalasi Water Resourch				500.000.000			200.000.000			Dinas Perhubungan
		16 Pemasangan dan Instalasi Elektrikal				450.000.000			146.815.000			Dinas Perhubungan
		17 Pembangunan dan Instalasi Drainase				30.000.000			35.000.000			Dinas Perhubungan
		18 Perluasan dan perkerasan Jalan Masuk				131.804.000			134.385.000			Dinas Perhubungan
		19 Perluasan dan Perkerasan Lahan Parkir				390.533.000			398.182.000			Dinas Perhubungan
		20 Pengadaan Kendaraan Operasional (roda 2)				44.929.000						Dinas Perhubungan
		21 Pengadaan Kendaraan Operasional(Roda 4)				122.535.000						Dinas Perhubungan
		22 Pembangunan Pagar				27.435.000			27.973.000			Dinas Perhubungan
		23 Pengadaan Fasilitas Pemadam Kebakaran & Rehabilitasi				127.640.000						Dinas Perhubungan
		j Pelabuhan Laut Meulaboh										
		1 Perluasan Dermaga				7.355.378.000			7.499.443.000			Dinas Perhubungan
		2 Perluasan Trestle				735.537.000			749.944.000			Dinas Perhubungan
		3 Pemasangan Fender				220.000.000			240.000.000			Dinas Perhubungan
		4 Pembangunan Dolphin				1.021.123.000			1.041.123.000			Dinas Perhubungan
		5 Perkerasan dan Pengembangan Lapangan Penumpukan				390.490.000			398.138.000			Dinas Perhubungan
		6 Pembangunan Gudang Darat (Linie II)				2.800.000.000			1.300.000.000			Dinas Perhubungan
		7 Pengadaan Fork lift				500.000.000						Dinas Perhubungan
		8 Pembangunan Terminal Peti Kemas				197.453.000			201.320.000			Dinas Perhubungan
		9 Pembangunan Terminal Penumpang				269.168.000			274.440.000			Dinas Perhubungan
		10 Pembangunan Gedung Kantor				442.044.000			135.210.000			Dinas Perhubungan
		11 Pembangunan Rumah Dinas Operasional				279.471.000			474.908.000			Dinas Perhubungan
		12 Pembangunan Bangunan Komersil (Kantin)				129.376.000						Dinas Perhubungan
		13 Pemasangan dan Instalasi Water Resourch							500.000.000			Dinas Perhubungan
		14 Pemasangan dan Instalasi Elektrikal				450.000.000						Dinas Perhubungan
		15 Pembangunan dan Instalasi Drainase				40.000.000			40.000.000			Dinas Perhubungan
		16 Perluasan dan perkerasan Jalan Masuk				131.804.000			134.385.000			Dinas Perhubungan
		17 Perluasan dan Perkerasan Lahan Parkir				390.533.000			398.182.000			Dinas Perhubungan
		18 Pengadaan Kendaraan Operasional (roda 2)				22.465.000			45.809.000			Dinas Perhubungan
		19 Pengadaan Kendaraan Operasional(Roda 4)				122.535.000						Dinas Perhubungan
		20 Pembangunan Pagar				104.256.000			106.298.000			Dinas Perhubungan
		k Pelabuhan Calang										
		1 Perluasan Area Siti Darat				2.500.000.000			2.500.000.000			Dinas Perhubungan
		2 Perluasan Dermaga				9.194.223.000			9.374.304.000			Dinas Perhubungan
		3 Perluasan Trestle				367.768.000			374.972.000			Dinas Perhubungan
		4 Pemasangan Fender				26.383.000			26.900.000			Dinas Perhubungan
		5 Pembangunan Pemecah Gelombang				30.700.000			31.302.000			Dinas Perhubungan
		6 Pembangunan Talud				114.247.000			116.485.000			Dinas Perhubungan
		7 Perkerasan dan Pengembangan Lapangan Penumpukan				390.490.000			398.138.000			Dinas Perhubungan
		8 Pembangunan Gudang Darat (Linie II)				349.761.000			356.612.000			Dinas Perhubungan
		9 Pemasangan Kran Darat (Shore Crane)				734.007.000						Dinas Perhubungan
		10 Pengadaan Fork lift				700.000.000						Dinas Perhubungan
		11 Pembangunan Terminal Penumpang				425.002.000			433.326.000			Dinas Perhubungan
		12 Pembangunan Gedung Kantor				353.635.000			420.655.000			Dinas Perhubungan
		13 Pembangunan Rumah Dinas Operasional				61.777.000			62.987.000			Dinas Perhubungan
		14 Pembangunan Bangunan Komersil (Kantin)				20.427.000			20.828.000			Dinas Perhubungan
		15 Pemasangan dan Instalasi Water Resourch							300.000.000			Dinas Perhubungan
		16 Pemasangan dan Instalasi Elektrikal				200.000.000						Dinas Perhubungan
		17 Pembangunan dan Instalasi Drainase				22.422.000			134.385.000			Dinas Perhubungan
		18 Perluasan dan perkerasan Jalan Masuk				131.804.000			147.955.000			Dinas Perhubungan
		19 Perluasan dan Perkerasan Lahan Parkir				439.349.000			447.955.000			Dinas Perhubungan
		20 Pengadaan Kendaraan Operasional (roda 2)				44.929.000			45.809.000			Dinas Perhubungan
		21 Pengadaan Kendaraan Operasional(Roda 4)				200.000.000						Dinas Perhubungan
		22 Pembangunan Pagar				109.744.000			111.893.000			Dinas Perhubungan
		23 Pengadaan Fasilitas Pemadam Kebakaran & Rehabilitasi							130.140.000			Dinas Perhubungan
		l Pelabuhan Tapaktuan										
		1 Pengerukan Alur dan Kolam Pelabuhan				4.000.000.000			6.000.000.000			Dinas Perhubungan
		2 Perluasan Dermaga				2.451.792.000			2.499.814.000			Dinas Perhubungan
		3 Perluasan Trestle				367.768.000			374.972.000			Dinas Perhubungan
		4 Pemasangan Fender				240.000.000			240.000.000			Dinas Perhubungan
		5 Pembangunan Dolphin				1.021.123.000			1.041.123.000			Dinas Perhubungan
		6 Perkerasan dan Pengembangan Lapangan Penumpukan				195.245.000			199.069.000			Dinas Perhubungan
		7 Pembangunan Gudang Darat (Linie II)				349.761.000			356.612.000			Dinas Perhubungan
		8 Pemasangan Kran Darat (Shore Crane)				13.000.000.000						Dinas Perhubungan
		9 Pengadaan Fork lift				500.000.000						Dinas Perhubungan
		10 Pembangunan Terminal Peti Kemas				197.452.000			201.320.000			Dinas Perhubungan
		11 Pembangunan Terminal Penumpang				425.002.000			433.326.000			Dinas Perhubungan
		12 Pembangunan Gedung Kantor				37.224.000			37.953.000			Dinas Perhubungan
		13 Pembangunan Rumah Dinas Operasional				61.287.000			62.487.000			Dinas Perhubungan
		14 Pembangunan Bangunan Komersil (Kantin)				13.618.000			13.885.000			Dinas Perhubungan
		15 Pemasangan dan Instalasi Water Resourch							400.000.000			Dinas Perhubungan
		16 Pemasangan dan Instalasi Elektrikal				143.995.000						Dinas Perhubungan
		17 Pembangunan dan Instalasi Drainase				22.422.000						Dinas Perhubungan
		18 Perluasan dan perkerasan Jalan Masuk				131.803.000			134.385.000			Dinas Perhubungan
		19 Perluasan dan Perkerasan Lahan Parkir				170.858.000			174.204.000			Dinas Perhubungan
		20 Pengadaan Kendaraan Operasional (roda 2)				44.929.000			45.809.000			Dinas Perhubungan
		21 Pengadaan Kendaraan Operasional(Roda 4)				150.000.000						Dinas Perhubungan
		22 Pembangunan Pagar				109.743.000			111.893.000			Dinas Perhubungan
		23 Pengadaan Fasilitas Pemadam Kebakaran & Rehabilitasi							130.140.000			Dinas Perhubungan
		m Pelabuhan Suseh										
		1 Perluasan Area Siti Darat				2.500.000.000			2.500.000.000			Dinas Perhubungan
		2 Perluasan Dermaga				2.500.000.000						Dinas Perhubungan
		3 Perluasan Trestle				367.768.000			374.972.000			Dinas Perhubungan
		4 Pemasangan Fender				26.383.000			26.900.000			Dinas Perhubungan
		5 Pembangunan Dolphin				1.021.123.000			1.041.123.000			Dinas Perhubungan
		6 Pembangunan Talud				102.822.000			104.836.000			Dinas Perhubungan

**RENCANA KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI/KABUPATEN NANGGROE ACEH DARUSSALAM
TAHUN 2007 - 2009**

BIDANG	PROGRAM UTAMA	SUB BIDANG / KEGIATAN	2007			2008			2009			KETERANGAN
			NILAI (RUPIAH)	SUMBER PENDANAAN	LOKASI	NILAI (RUPIAH)	SUMBER PENDANAAN	LOKASI	NILAI (RUPIAH)	SUMBER PENDANAAN	LOKASI	
		7 Perkerasan dan Pengembangan Lapangan Penumpukan				199.245.000			199.069.000			Dinas Perhubungan
		8 Pembangunan Gudang Darat (Linie II)				349.761.000			356.612.000			Dinas Perhubungan
		9 Pengadaan Fork lift				446.036.000						Dinas Perhubungan
		10 Pembangunan Terminal Penumpang				425.002.000			433.326.000			Dinas Perhubungan
		11 Pembangunan Gedung Kantor				37.224.000			37.953.000			Dinas Perhubungan
		12 Pembangunan Rumah Dinas Operasional				61.287.000			62.487.000			Dinas Perhubungan
		13 Pembangunan Bangunan Komersil (Kantin)				13.618.000			13.885.000			Dinas Perhubungan
		14 Pemasangan dan Instalasi Water Resourch							300.000.000			Dinas Perhubungan
		15 Pemasangan dan Instalasi Elektrikal				143.995.000						Dinas Perhubungan
		16 Pembangunan dan Instalasi Drainase				22.422.000						Dinas Perhubungan
		17 Perluasan dan perkerasan Jalan Masuk				131.803.000			134.385.000			Dinas Perhubungan
		18 Perluasan dan Perkerasan Lahan Parkir				146.449.000			149.318.000			Dinas Perhubungan
		19 Pengadaan Kendaraan Operasional (roda 2)				44.929.000			45.809.000			Dinas Perhubungan
		20 Pengadaan Kendaraan Operasional(Roda 4)				122.534.000						Dinas Perhubungan
		21 Pembangunan Pagar				109.743.000			111.893.000			Dinas Perhubungan
		22 Pengadaan Fasilitas Pemadam Kebakaran & Rehabilitasi							130.140.000			Dinas Perhubungan
		n Pelabuhan Idi										
		1 Perluasan Dermaga				6.742.430.000			6.874.489.000			Dinas Perhubungan
		2 Perluasan Trestle				1.884.413.000			1.921.321.000			Dinas Perhubungan
		3 Pemasangan Fender				26.383.000			26.900.000			Dinas Perhubungan
		4 Pembangunan Talud				114.247.000			116.485.000			Dinas Perhubungan
		5 Perkerasan dan Pengembangan Lapangan Penumpukan				195.245.000			199.069.000			Dinas Perhubungan
		6 Pembangunan Gudang Darat (Linie II)				174.880.000			178.306.000			Dinas Perhubungan
		7 Pengadaan Fork lift				446.036.000						Dinas Perhubungan
		8 Pembangunan Terminal Penumpang				425.002.000			433.326.000			Dinas Perhubungan
		9 Pembangunan Gedung Kantor				37.224.000			37.953.000			Dinas Perhubungan
		10 Pembangunan Rumah Dinas Operasional				250.000.000			1.500.000.000			Dinas Perhubungan
		11 Pembangunan Bangunan Komersil (Kantin)				20.427.000			20.827.000			Dinas Perhubungan
		12 Pemasangan dan Instalasi Water Resourch							33.668.000			Dinas Perhubungan
		13 Pemasangan dan Instalasi Elektrikal				143.995.000						Dinas Perhubungan
		14 Pembangunan dan Instalasi Drainase				22.422.000						Dinas Perhubungan
		15 Perluasan dan perkerasan Jalan Masuk				219.673.000			223.975.000			Dinas Perhubungan
		16 Perluasan dan Perkerasan Lahan Parkir				195.266.000			199.091.000			Dinas Perhubungan
		17 Pengadaan Kendaraan Operasional (roda 2)				44.929.000			45.809.000			Dinas Perhubungan
		18 Pengadaan Kendaraan Operasional(Roda 4)				122.534.000						Dinas Perhubungan
		19 Pembangunan Pagar				65.846.000			67.135.000			Dinas Perhubungan
		20 Pengadaan Alat Telekomunikasi dan Navigasi				662.708.000			675.688.000			Dinas Perhubungan
		21 Pengadaan Fasilitas Pemadam Kebakaran & Rehabilitasi							130.140.000			Dinas Perhubungan
		o Pelabuhan Sinabang										
		1 Pengerukan Alur dan Kolam Pelabuhan				3.000.000.000						Dinas Perhubungan
		2 Perluasan Dermaga				6.129.482.000			6.249.536.000			Dinas Perhubungan
		3 Perluasan Trestle				490.358.000			499.962.000			Dinas Perhubungan
		4 Pemasangan Fender				26.383.000			26.900.000			Dinas Perhubungan
		5 Pembangunan Dolphin				510.561.000			520.561.000			Dinas Perhubungan
		6 Pembangunan Pemecah Gelombang				255.841.000			260.852.000			Dinas Perhubungan
		7 Pembangunan Talud				342.741.000			349.454.000			Dinas Perhubungan
		8 Perkerasan dan Pengembangan Lapangan Penumpukan				97.622.000			99.534.000			Dinas Perhubungan
		9 Pembangunan Gudang Darat (Linie II)				332.273.000			338.781.000			Dinas Perhubungan
		10 Pemasangan Kran Darat (Shore Crane)				13.000.000.000						Dinas Perhubungan
		11 Pengadaan Fork lift				7.000.000.000			500.000.000			Dinas Perhubungan
		12 Pembangunan Terminal Peti Kemas				1.974.529.000			2.013.203.000			Dinas Perhubungan
		13 Pembangunan Terminal Penumpang				42.500.000			43.332.000			Dinas Perhubungan
		14 Pembangunan Gedung Kantor				525.000.000						Dinas Perhubungan
		15 Pembangunan Rumah Dinas Operasional				250.000.000			200.000.000			Dinas Perhubungan
		16 Pembangunan Bangunan Komersil (Kantin)				13.618.000			13.885.000			Dinas Perhubungan
		17 Pemasangan dan Instalasi Water Resourch				500.000.000			200.000.000			Dinas Perhubungan
		18 Pemasangan dan Instalasi Elektrikal				450.000.000						Dinas Perhubungan
		19 Pembangunan dan Instalasi Drainase				40.000.000			40.000.000			Dinas Perhubungan
		20 Perluasan dan perkerasan Jalan Masuk				131.803.000			134.385.000			Dinas Perhubungan
		21 Perluasan dan Perkerasan Lahan Parkir				976.332.000			995.455.000			Dinas Perhubungan
		22 Pengadaan Kendaraan Operasional (roda 2)				44.929.000			45.809.000			Dinas Perhubungan
		23 Pengadaan Kendaraan Operasional(Roda 4)							250.000.000			Dinas Perhubungan
		24 Pembangunan Pagar				250.000.000			300.000.000			Dinas Perhubungan
		25 Pengadaan Fasilitas Pemadam Kebakaran & Rehabilitasi				1.000.000.000			120.000.000			Dinas Perhubungan
		p Pelabuhan Singkil										
		1 Pengerukan Alur dan Kolam Pelabuhan				4.000.000.000						Dinas Perhubungan
		2 Perluasan Dermaga				4.290.637.000			4.374.675.000			Dinas Perhubungan
		3 Perluasan Trestle				220.000.000			240.000.000			Dinas Perhubungan
		4 Pemasangan Fender				26.383.000			26.900.000			Dinas Perhubungan
		5 Pembangunan Dolphin				1.021.123.000			1.041.123.000			Dinas Perhubungan
		6 Perkerasan dan Pengembangan Lapangan Penumpukan				195.245.000			199.069.000			Dinas Perhubungan
		7 Pembangunan Gudang Darat (Linie II)				3.000.000.000						Dinas Perhubungan
		8 Pemasangan Kran Darat (Shore Crane)				13.000.000.000			7.000.000.000			Dinas Perhubungan
		9 Pengadaan Fork lift				700.000.000			500.000.000			Dinas Perhubungan
		10 Pembangunan Terminal Penumpang				425.002.000			433.326.000			Dinas Perhubungan
		11 Pembangunan Gedung Kantor				300.000.000						Dinas Perhubungan
		12 Pembangunan Rumah Dinas Operasional				250.000.000			200.000.000			Dinas Perhubungan
		13 Pembangunan Bangunan Komersil (Kantin)				27.237.000			27.770.000			Dinas Perhubungan
		14 Pemasangan dan Instalasi Water Resourch				500.000.000						Dinas Perhubungan
		15 Pemasangan dan Instalasi Elektrikal				450.000.000						Dinas Perhubungan
		16 Pembangunan dan Instalasi Drainase				22.422.000						Dinas Perhubungan
		17 Perluasan dan perkerasan Jalan Masuk				105.443.000			107.508.000			Dinas Perhubungan
		18 Perluasan dan Perkerasan Lahan Parkir				19.526.000			19.909.000			Dinas Perhubungan
		19 Pengadaan Kendaraan Operasional (roda 2)				44.929.000			45.809.000			Dinas Perhubungan
		20 Pengadaan Kendaraan Operasional(Roda 4)							250.000.000			Dinas Perhubungan
		21 Pembangunan Pagar				137.179.000			139.866.000			Dinas Perhubungan
		22 Pengadaan Fasilitas Pemadam Kebakaran & Rehabilitasi							130.140.000			Dinas Perhubungan

**RENCANA KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI/KABUPATEN NANGGROE ACEH DARUSSALAM
TAHUN 2007 - 2009**

BIDANG	PROGRAM UTAMA	SUB BIDANG / KEGIATAN	2007			2008			2009			KETERANGAN
			NILAI (RUPIAH)	SUMBER PENDANAAN	LOKASI	NILAI (RUPIAH)	SUMBER PENDANAAN	LOKASI	NILAI (RUPIAH)	SUMBER PENDANAAN	LOKASI	
		q Pelabuhan Rakyat Kuala Tari (Sigli)										Dinas Perhubungan
		1 DED Pelabuhan Kuala Tari				750.000.000						Dinas Perhubungan
		2 Perluasan Area Sisi Darat				350.000.000						Dinas Perhubungan
		3 Perluasan Dermaga						1.187.411.000				Dinas Perhubungan
		4 Perluasan Trestle						474.964.000				Dinas Perhubungan
		5 Pemasangan Fender						270.000.000				Dinas Perhubungan
		6 Pembangunan Dolphin						520.561.000				Dinas Perhubungan
		7 Pembangunan Talud						349.454.000				Dinas Perhubungan
		8 Perkerasan dan PengembanganLapangan Penumpukan						238.883.000				Dinas Perhubungan
		9 Pembangunan Gudang Darat (Linie II)						267.459.000				Dinas Perhubungan
		10 Pembangunan Terminal Penumpang						137.220.000				Dinas Perhubungan
		11 Pembangunan Bangunan Komersil (Kantin)						118.719.000				Dinas Perhubungan
		12 Pemasangan dan Instalasi Water Resourch						500.000.000				Dinas Perhubungan
		13 Pemasangan dan Instalasi Elektrikal						29.363.000				Dinas Perhubungan
		14 Pembangunan dan Instalasi Drainase						450.000.000				Dinas Perhubungan
		15 Perluasan dan perkerasan Jalan Masuk						322.525.000				Dinas Perhubungan
		16 Perluasan dan Perkerasan Lahan Parkir						298.636.000				Dinas Perhubungan
		17 Pengadaan Kendaraan Operasional (roda 2)						22.904.000				Dinas Perhubungan
		18 Pengadaan Fasilitas Pemadam Kebakaran & rehabilitasi						130.140.000				Dinas Perhubungan
		r Pelabuhan Rakyat Sibigo (Sinabang)										Dinas Perhubungan
		1 DED Pelabuhan Sibigo				750.000.000						Dinas Perhubungan
		2 Perluasan Area Sisi Darat				350.000.000						Dinas Perhubungan
		3 Perluasan Dermaga						3.500.000.000				Dinas Perhubungan
		4 Perluasan Trestle						650.000.000				Dinas Perhubungan
		5 Pemasangan Fender						270.000.000				Dinas Perhubungan
		6 Pembangunan Dolphin						520.561.500				Dinas Perhubungan
		7 Pembangunan Talud						349.454.000				Dinas Perhubungan
		8 Perkerasan dan PengembanganLapangan Penumpukan						238.883.000				Dinas Perhubungan
		9 Pembangunan Gudang Darat (Linie II)						267.459.000				Dinas Perhubungan
		10 Pembangunan Terminal Penumpang						137.220.000				Dinas Perhubungan
		11 Pembangunan Bangunan Komersil (Kantin)						118.719.000				Dinas Perhubungan
		12 Pemasangan dan Instalasi Water Resourch						300.000.000				Dinas Perhubungan
		13 Pemasangan dan Instalasi Elektrikal						250.000.000				Dinas Perhubungan
		14 Perluasan dan perkerasan Jalan Masuk						322.525.000				Dinas Perhubungan
		15 Perluasan dan Perkerasan Lahan Parkir						298.636.000				Dinas Perhubungan
		16 Pengadaan Kendaraan Operasional (roda 2)						22.904.000				Dinas Perhubungan
		17 Pengadaan Fasilitas Pemadam Kebakaran & Rehabilitasi						130.140.000				Dinas Perhubungan
		s Pelabuhan Rakyat Sibadeh (Sinabang)										Dinas Perhubungan
		1 DED Pelabuhan Sibadeh				250.000.000						Dinas Perhubungan
		2 Perluasan Area Sisi Darat						1.187.411.000				Dinas Perhubungan
		3 Perluasan Dermaga						474.964.000				Dinas Perhubungan
		4 Perluasan Trestle						130.000.000				Dinas Perhubungan
		5 Pemasangan Fender						520.561.000				Dinas Perhubungan
		6 Pembangunan Dolphin						349.454.000				Dinas Perhubungan
		7 Pembangunan Talud						238.883.000				Dinas Perhubungan
		8 Perkerasan dan PengembanganLapangan Penumpukan						267.459.000				Dinas Perhubungan
		9 Pembangunan Gudang Darat (Linie II)						137.220.000				Dinas Perhubungan
		10 Pembangunan Terminal Penumpang						118.719.000				Dinas Perhubungan
		11 Pembangunan Bangunan Komersil (Kantin)						300.000.000				Dinas Perhubungan
		12 Pemasangan dan Instalasi Water Resourch						250.000.000				Dinas Perhubungan
		13 Pembangunan dan Instalasi Drainase						322.525.000				Dinas Perhubungan
		14 Perluasan dan perkerasan Jalan Masuk						298.636.000				Dinas Perhubungan
		15 Perluasan dan Perkerasan Lahan Parkir						22.904.000				Dinas Perhubungan
		16 Pengadaan Kendaraan Operasional(Roda 4)						130.140.000				Dinas Perhubungan
		t Pelabuhan Rakyat Kuala Raja (Aceh Jeumpa)										Dinas Perhubungan
		1 DED Pelabuhan Kuala Raja				750.000.000						Dinas Perhubungan
		2 Perluasan Area Sisi Darat				250.000.000						Dinas Perhubungan
		3 Pengerukan Alur dan Kolam Pelabuhan						2.500.000.000				Dinas Perhubungan
		4 Perluasan Dermaga						1.187.411.000				Dinas Perhubungan
		5 Perluasan Trestle						474.964.000				Dinas Perhubungan
		6 Pemasangan Fender						26.900.000				Dinas Perhubungan
		7 Pembangunan Dolphin						520.561.000				Dinas Perhubungan
		8 Pembangunan Talud						349.454.000				Dinas Perhubungan
		9 Perkerasan dan Pengembangan Lapangan Penumpukan						238.883.000				Dinas Perhubungan
		10 Pembangunan Gudang Darat (Linie II)						267.459.000				Dinas Perhubungan
		11 Pembangunan Terminal Penumpang						137.220.000				Dinas Perhubungan
		12 Pembangunan Bangunan Komersil (Kantin)						118.719.000				Dinas Perhubungan
		13 Pemasangan dan Instalasi Water Resourch						300.000.000				Dinas Perhubungan
		14 Pemasangan dan Instalasi Elektrikal						200.000.000				Dinas Perhubungan
		15 Perluasan dan perkerasan Jalan Masuk						322.525.000				Dinas Perhubungan
		16 Perluasan dan Perkerasan Lahan Parkir						298.636.000				Dinas Perhubungan
		17 Pengadaan Kendaraan Operasional (roda 2)						22.904.000				Dinas Perhubungan
		18 Pengadaan Fasilitas Pemadam Kebakaran & rehabilitasi						130.140.000				Dinas Perhubungan
		u Pelabuhan Pulau Banyak										Dinas Perhubungan
		1 Pengerukan Alur dan Kolam Pelabuhan				1.343.000		2.499.814.000				Dinas Perhubungan
		2 Perluasan Dermaga				2.451.792.000		1.187.411.000				Dinas Perhubungan
		3 Perluasan Trestle				1.164.601.000		26.900.000				Dinas Perhubungan
		4 Pemasangan Fender				26.383.000		520.561.500				Dinas Perhubungan
		5 Pembangunan Dolphin				510.561.500		232.969.000				Dinas Perhubungan
		6 Pembangunan Talud				228.494.500		199.069.000				Dinas Perhubungan
		7 Perkerasan dan Pengembangan Lapangan Penumpukan				195.245.000						Dinas Perhubungan
		8 Pembangunan Gudang Darat (Linie II)				300.000.000		500.000.000				Dinas Perhubungan
		9 Pengadaan Fork lift				500.000.000		137.220.000				Dinas Perhubungan
		10 Pembangunan Terminal Penumpang				134.584.000		37.953.000				Dinas Perhubungan
		11 Pembangunan Gedung Kantor				350.000.000		200.000.000				Dinas Perhubungan
		12 Pembangunan Rumah Dinas Operasional				250.000.000		6.942.000				Dinas Perhubungan
		13 Pembangunan Bangunan Komersil (Kantin)				6.809.000		300.000.000				Dinas Perhubungan

**RENCANA KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI/KABUPATEN NANGGROE ACEH DARUSSALAM
TAHUN 2007 - 2009**

BIDANG	PROGRAM UTAMA	SUB BIDANG / KEGIATAN	2007			2008			2009			KETERANGAN
			NILAI (RUPIAH)	SUMBER PENDANAAN	LOKASI	NILAI (RUPIAH)	SUMBER PENDANAAN	LOKASI	NILAI (RUPIAH)	SUMBER PENDANAAN	LOKASI	
		14 Pemasangan dan Instalasi Elektrikal				250.000.000						Dinas Perhubungan
		15 Pembangunan dan Instalasi Drainase				22.422.000			17.918.000			Dinas Perhubungan
		16 Perluasan dan perkerasan Jalan Masuk				17.573.000			19.909.000			Dinas Perhubungan
		17 Perluasan dan Perkerasan Lahan Parkir				19.526.000			45.809.000			Dinas Perhubungan
		18 Pengadaan Kendaraan Operasional (roda 2)				44.929.000						Dinas Perhubungan
		19 Pengadaan Kendaraan Operasional(Roda 4)				122.534.000			195.813.000			Dinas Perhubungan
		20 Pembangunan Pagar				192.051.000			130.140.000			Dinas Perhubungan
		5 Pembangunan Sarana Perhubungan Laut										Dinas Perhubungan
		a Pembangunan Kapal Kayu Desa Meulingge Pulo Aceh Tahap II										Dinas Perhubungan
		1 Pengadaan dan Pemasangan Mesin 255 HP dan Sistem Propulsi	500.000.000									Dinas Perhubungan
		2 Pengadaan dan Pemasangan Genset Marine 6 KVA	50.000.000									Dinas Perhubungan
		3 Pemasangan Instalasi Listrik	10.000.000									Dinas Perhubungan
		4 Pengadaan dan Pemasangan Alat-alat Navigasi dan Pelayaran	250.000.000									Dinas Perhubungan
		5 Pembuatan Sertifikat / Kelengkapan Surat kapal	50.000.000									Dinas Perhubungan
		6 Sea Trial	15.000.000									Dinas Perhubungan
		7 Pompa dan Pemipaan	20.000.000									Dinas Perhubungan
		b Kapal Kayu Desa Trumon										Dinas Perhubungan
		1 Pembangunan Fisik Kapal beserta Kelengkapannya	1.785.000.000									Dinas Perhubungan
		c Perbaikan KM. Pulo Deudap										Dinas Perhubungan
		1 Perbaikan Mesin, Body & Perlengkapan lainnya KM. Pulo Deudap	1.305.000.000									Dinas Perhubungan
		2 Sertifikat	30.000.000									Dinas Perhubungan
		3 ILR	50.000.000									Dinas Perhubungan
		6 Peningkatan Pelayanan Angkutan										Dinas Perhubungan
		1 Subsidi Angkutan Laut KM. Pulo Deudap				5.000.000.000			5.000.000.000			Dinas Perhubungan
		B. Transportasi Udara										Dinas Perhubungan
		1 Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan										Dinas Perhubungan
		a Rencana Teknis Terinci Gedung VIP Bandara SIM	250.000.000									Dinas Perhubungan
		b Studi Analisis Kelayakan Finansial Penerbangan Di Provinsi NAD	250.000.000									Dinas Perhubungan
		2 Pengembangan Fasilitas Keselamatan Penerbangan (Kespem)										Dinas Perhubungan
		a Pembangunan Fasilitas Kespem Bandara SIM - Banda Aceh										Dinas Perhubungan
		1 Pengadaan X-Ray dan Compyed										Dinas Perhubungan
		2 Pengadaan Garbarata dan AC							1.800.000.000			Dinas Perhubungan
		3 Pengadaan dan Pemasangan Outer Marker (ILS)							8.000.000.000			Dinas Perhubungan
		4 Pengadaan dan Pemasangan MSSR (Radar)							12.500.000.000			Dinas Perhubungan
									36.000.000.000			Dinas Perhubungan
		b Pemb. Fas. Kespem Bandara Cut Nyak Dhien - Meulaboh										Dinas Perhubungan
		1 Pengadaan Hend Metal Detector							7.000.000			Dinas Perhubungan
		2 Pengadaan Walkthrough Metal Detector										Dinas Perhubungan
		3 Pengadaan X-RAY Cabin				800.000.000						Dinas Perhubungan
		4 Pengadaan X-RAY Baggage				850.000.000						Dinas Perhubungan
		5 Pengadaan VHF (Very High Frequency)				65.000.000						Dinas Perhubungan
		6 Pengadaan SSB (Single Side Band)				68.000.000						Dinas Perhubungan
		7 Pengadaan Kendaraan PKP-PK (Morita)							1.800.000.000			Dinas Perhubungan
		8 Pengadaan/pemasangan Windsock dan Anemometer							45.000.000			Dinas Perhubungan
		9 Pengadaan Pemasangan Airfield Light System							2.500.000.000			Dinas Perhubungan
		10 Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2				17.500.000			20.000.000			Dinas Perhubungan
		c Pemb. Fas. Kespem Bandara T. Cut Ali - Tapaktuan										Dinas Perhubungan
		1 Pengadaan Genset 15 KVA, 50 KVA termasuk instalasi				130.000.000						Dinas Perhubungan
		2 Pengadaan Hend Metal Detector				6.000.000						Dinas Perhubungan
		3 Pengadaan Walkthrough Metal Detector				675.000.000						Dinas Perhubungan
		4 Pengadaan Handy Talky				7.000.000						Dinas Perhubungan
		5 Pengadaan VHF (Very High Frequency)							65.000.000			Dinas Perhubungan
		6 Pengadaan SSB (Single Side Band)							68.000.000			Dinas Perhubungan
		7 Pengadaan/Pemasangan NDB (Non Directional Beacon)				850.000.000						Dinas Perhubungan
		8 Pengadaan/pemasangan Windsock dan Anemometer				30.000.000						Dinas Perhubungan
		9 Pengadaan Rescue Car				700.000.000						Dinas Perhubungan
		10 Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran Dorong 40 Kg				60.000.000						Dinas Perhubungan
		11 Pengadaan Sirtel				40.000.000						Dinas Perhubungan
		12 Pengadaan dan Pemasangan Lampu				45.000.000						Dinas Perhubungan
		13 Pengadaan Kendaraan Maintenance Equipment							250.000.000			Dinas Perhubungan
		14 Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2				30.000.000						Dinas Perhubungan
		d Pemb.Fas.Kespem Bandara Lasikin - Sinabang	140.500.000									Dinas Perhubungan
		1 Pengadaan VHF (Very High Frequency)				65.000.000						Dinas Perhubungan
		2 Pengadaan SSB (Single Side Band)				68.000.000						Dinas Perhubungan
		3 Pengadaan Hend Metal Detector							7.000.000			Dinas Perhubungan
		4 Pengadaan Pemasangan Airfield Light System							2.500.000.000			Dinas Perhubungan
		5 Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2				17.500.000			20.000.000			Dinas Perhubungan
		e Pemb.Fas.Kespem Alas Leuser - Kutacane										Dinas Perhubungan
		1 Pengadaan Genset 15 KVA, 50 KVA termasuk instalasi							350.000.000			Dinas Perhubungan
		2 Pengadaan Hend Metal Detector							7.000.000			Dinas Perhubungan
		3 Pengadaan X-Ray dan Compyed							12.900.000.000			Dinas Perhubungan
		4 Pengadaan VHF (Very High Frequency)				65.000.000						Dinas Perhubungan
		5 Pengadaan SSB (Single Side Band)				68.000.000						Dinas Perhubungan
		6 Pengadaan Pemasangan NDB (Non Directional Beacon)							950.000.000			Dinas Perhubungan
		7 Pengadaan Kendaraan PKP-PK (Morita)							1.800.000.000			Dinas Perhubungan
		8 Pengadaan/pemasangan Windsock dan Anemometer							45.000.000			Dinas Perhubungan
		9 Pengadaan Mobil Ambulance dan Peralatan				350.000.000						Dinas Perhubungan
		10 Pengadaan Kendaraan Maintenance Equipment				250.000.000						Dinas Perhubungan
		11 Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2				17.500.000			20.000.000			Dinas Perhubungan
		f Pemb. Fas.Kespem Bandara Maimun Saleh - Sabang										Dinas Perhubungan
		1 Pengadaan HF-SSB (High Frequency-Single Side Band)				65.000.000						Dinas Perhubungan
		2 Pengadaan VHF (Very High Frequency)				68.000.000						Dinas Perhubungan
		3 Pengadaan/Pemasangan Airfield Light System							2.500.000.000			Dinas Perhubungan

**RENCANA KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI/KABUPATEN NANGGROE ACEH DARUSSALAM
TAHUN 2007 - 2009**

BIDANG	PROGRAM UTAMA	SUB BIDANG / KEGIATAN	2007			2008			2009			KETERANGAN
			NILAI (RUPIAH)	SUMBER PENDANAAN	LOKASI	NILAI (RUPIAH)	SUMBER PENDANAAN	LOKASI	NILAI (RUPIAH)	SUMBER PENDANAAN	LOKASI	
		4 Pengadaan X-RAY Cabin				800.000.000						Dinas Perhubungan
		5 Pengadaan X-RAY Bagage				850.000.000						Dinas Perhubungan
		g Pemb. Fas.Kespen Bandara Rembele - Takengen										
		1 Pengadaan Genset 15 KVA, 50 KVA termasuk instalasi							350.000.000			Dinas Perhubungan
		2 Pengadaan Hend Metal Detector							7.000.000			Dinas Perhubungan
		3 Pengadaan X-Ray dan Compyared							800.000.000			Dinas Perhubungan
		4 Pengadaan VHF (Very High Frequency)				65.000.000						Dinas Perhubungan
		5 Pengadaan SSB (Single Side Band)				68.000.000						Dinas Perhubungan
		6 Pengadaan/Pemasangan NDB (Non Directional Beacon)							950.000.000			Dinas Perhubungan
		7 Pengadaan Kenderaan PKP-PK (Morita)							1.800.000.000			Dinas Perhubungan
		8 Pengadaan/pemasangan Windsock dan Anemometer							45.000.000			Dinas Perhubungan
		9 Pengadaan Mobil Ambulance dan Perlitan				350.000.000						Dinas Perhubungan
		10 Pengadaan Kendaran Maintenance Equipment				250.000.000						Dinas Perhubungan
		11 Pengadaan Kendaran Operasional Roda 2				17.500.000			20.000.000			Dinas Perhubungan
		h Pemb. Fas.Kespen Bandara Kuala Batee - Blang Pidie										
		1 Pengadaan Genset 15 KVA, 50 KVA termasuk instalasi							350.000.000			Dinas Perhubungan
		2 Pengadaan Hend Metal Detector							7.000.000			Dinas Perhubungan
		3 Pengadaan X-Ray Bagage							12.900.000.000			Dinas Perhubungan
		4 Pengadaan VHF (Very High Frequency)				65.000.000						Dinas Perhubungan
		5 Pengadaan SSB (Single Side Band)				68.000.000						Dinas Perhubungan
		6 Pengadaan/Pemasangan NDB (Non Directional Beacon)							950.000.000			Dinas Perhubungan
		7 Pengadaan Kenderaan PKP-PK (Morita)							1.800.000.000			Dinas Perhubungan
		8 Pengadaan/pemasangan Windsock dan Anemometer							45.000.000			Dinas Perhubungan
		9 Pengadaan Mobil Ambulance dan Perlitan				350.000.000						Dinas Perhubungan
		10 Pengadaan Kendaran Maintenance Equipment				250.000.000						Dinas Perhubungan
		11 Pengadaan Kendaran Operasional Roda 2							20.000.000			Dinas Perhubungan
		12 Pengadaan Tanah Prasarana & Fasilitas Perhubungan Bandara SIM	60.000.000.000									Dinas Perhubungan
		3 Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Udara										
		a Bandara Sultan Iskandar Muda (SIM) Banda Aceh										
		1 Pembangunan Gedung VIP Tahap I	1.800.000.000									Dinas Perhubungan
		2 Apron Terminal Kargo				720.000.000			720.000.000			Dinas Perhubungan
		3 Perluasan Apron				4.700.000.000						Dinas Perhubungan
		4 Pelebaran Apron Tahap II							24.277.524.000			Dinas Perhubungan
		5 Lanjutan Pembangunan Terminal Tahap II				20.000.000						Dinas Perhubungan
		6 Pemagaran Lokasi Bandara				366.250.000			366.250.000			Dinas Perhubungan
		7 Pekerjaan Land Scaping				1.687.500.000			1.800.000.000			Dinas Perhubungan
		8 Pembangunan Bangunan VIP										Dinas Perhubungan
		9 Pembangunan Menara				1.500.000.000						Dinas Perhubungan
		10 Pembangunan Fasilitas Teknik/dll				4.609.575.000			4.609.575.000			Dinas Perhubungan
		11 Pembangunan Rumah Dinas Type - 36				2.016.000.000						Dinas Perhubungan
		b Bandar Udara Kuala Batee - Blang pidie										
		1 Pembangunan Gedung Terminal Tahap II	690.000.000									Dinas Perhubungan
		2 Pembangunan Saluran Tertutup (Apron)	500.250.000									Dinas Perhubungan
		3 Pembangunan Gedung Kantor	360.000.000									Dinas Perhubungan
		4 Pembangunan Saluran Pembangunan	360.000.000									Dinas Perhubungan
		5 Pembangunan Halaman Parkir	240.000.000									Dinas Perhubungan
		6 Pembuatan Box Curvert Melintang Runway				40.500.000						Dinas Perhubungan
		7 Pembuatan Saluran Kanan/Kiri Runway				187.600.000						Dinas Perhubungan
		8 Pembuatan Saluran Terbuka Pasangan Batu				1.766.000.000						Dinas Perhubungan
		9 Pembuatan Saluran Tertutup Taxiway dan Apron				778.750.000						Dinas Perhubungan
		10 Pembuatan Jalan Lingkar Access Road				1.651.000.000						Dinas Perhubungan
		11 Pembuatan Rumah Dinas Type 36, 2 Unit dan 45, 2 Unit							850.500.000			Dinas Perhubungan
		12 Pembuatan Gedung Genset				65.000.000						Dinas Perhubungan
		13 Pembuatan Gedung Kantor				135.417.000						Dinas Perhubungan
		14 Pembuatan Gedung NDB				65.000.000						Dinas Perhubungan
		15 Pembuatan Pagar Kawat Duri				475.000.000			570.000.000			Dinas Perhubungan
		16 Pembuatan Pagar BRC Pembatas Airside							75.250.000			Dinas Perhubungan
		17 Pembebasan Tanah dan Tanaman				1.200.000.000			1.440.000.000			Dinas Perhubungan
		18 Rehabilitasi dan Rekonstruksi Fas. Bandar Udara	10.900.000.000									Dinas Perhubungan
		c Bandar Udara Hamzah Fanshuri - Singkil										
		1 Pembangunan Gedung Terminal	1.800.000.000									Dinas Perhubungan
		2 Pelapukan Landasan dan Rise Course	6.888.000.000									Dinas Perhubungan
		3 Pekerjaan Pematangan Lahan Sisi Darat Tahap I	600.000.000									Dinas Perhubungan
		4 Penyambungan PLN	350.000.000									Dinas Perhubungan
		5 Pembuatan jalan masuk	500.000.000									Dinas Perhubungan
		6 Pembuatan Saluran Terbuka Landasan	840.000.000									Dinas Perhubungan
		7 Pembangunan Gedung Kantor	600.000.000									Dinas Perhubungan
		8 Pembangunan Gedung Power House	150.000.000									Dinas Perhubungan
		9 Pembangunan Gedung NDB	150.000.000									Dinas Perhubungan
		10 Pembangunan Pagar Bandara	750.000.000									Dinas Perhubungan
		11 Pembuatan Jalan Masuk dan Halaman Parkir	1.000.000.000									Dinas Perhubungan
		d Bandara Alas Leuser - Kuta Cane										
		1 Pengembangan Bandara Alas Leuser Kuta Cane Beserta Kelengkapannya										Dinas Perhubungan
		2 Pembuatan Pagar Fasilitas sisi darat	270.000.000									Dinas Perhubungan
		3 Lanjutan Pengembangan Landasan										Dinas Perhubungan
		4 Pembuatan Rumah Dinas Type 60	150.000.000									Dinas Perhubungan
		5 Pembuatan Rumah Dinas Type 45	324.000.000									Dinas Perhubungan
		6 Peningkatan Landasan, T/W. Apron termasuk Marking dan Overrun				24.800.000.000						Dinas Perhubungan
		7 Pembuatan Shoulder				8.280.000.000						Dinas Perhubungan
		8 Pembuatan Box Curvert Melintang Runway				40.500.000						Dinas Perhubungan
		9 Pembuatan Saluran Kanan/Kiri Runway				187.600.000						Dinas Perhubungan
		10 Pembuatan Saluran Terbuka Pasangan Batu				1.766.000.000						Dinas Perhubungan
		11 Pembuatan Saluran Tertutup Taxiway dan Apron				778.750.000						Dinas Perhubungan
		12 Pembangunan Fasilitas Sisi Darat				1.675.000.000			2.935.750.000			Dinas Perhubungan
		13 Pembuatan Rumah Dinas Type 36, 2 Unit dan 45, 2 Unit							850.500.000			Dinas Perhubungan

BIDANG	PROGRAM UTAMA	SUB BIDANG / KEGIATAN	2007			2008			2009			KETERANGAN
			NILAI (RUPIAH)	SUMBER PENDANAAN	LOKASI	NILAI (RUPIAH)	SUMBER PENDANAAN	LOKASI	NILAI (RUPIAH)	SUMBER PENDANAAN	LOKASI	
		14 Pembuatan Gedung Censet				65.000.000						Dinas Perhubungan
		15 Pembuatan Gedung Kantor				135.417.000						Dinas Perhubungan
		16 Pembuatan Gedung NDB				65.000.000						Dinas Perhubungan
		17 Pembuatan Pagar Kawat Duri				475.000.000			570.000.000			Dinas Perhubungan
		18 Pembebasan Tanah BRC Pembatas Airside							75.250.000			Dinas Perhubungan
		19 Pembebasan Tanah dan Tanaman				1.200.000.000			1.440.000.000			Dinas Perhubungan
		e Bandara Cut Nyak Dhien - Meulaboh										
		1 Rehabilitasi dan Rekonstruksi Fas. Udara dan Darat	6.500.000.000									Dinas Perhubungan
		2 Pembuatan Jalan Lingk. Bandara Lebar 4 m							800.000.000			Dinas Perhubungan
		f Banadar T. Cut Ali - Tapaktuan										Dinas Perhubungan
		1 Pembangunan Fasilitas Sisi Udara	11.100.000.000									Dinas Perhubungan
		2 Perpanjangn Landasan 550 M X 23 M				6.570.215.000						Dinas Perhubungan
		3 Perluasan Apron 40 M X 20 M				415.500.000						Dinas Perhubungan
		4 Rehabilitasi Overrun 2 X 30 x 30 M				934.893.000						Dinas Perhubungan
		5 Pegecatan Marking				136.575.000						Dinas Perhubungan
		6 Perbaikan RESA 2 M X 90 M X 60 M				46.224.000						Dinas Perhubungan
		7 Perbaikan Shoulder 2 x 30 x 1300 M				39.000.000						Dinas Perhubungan
		8 Perbaikan Fasilitas Operasional Bandar Udara				1.287.000.000						Dinas Perhubungan
		9 Perbaikan Pagar Kawat Duri				352.340.000						Dinas Perhubungan
		10 Perbaikan Jalan PKP-PK				101.664.000						Dinas Perhubungan
		11 Pembuatan Jalan Inspeksi				311.630.000						Dinas Perhubungan
		g Bandara Lasikin - Sinabang										Dinas Perhubungan
		1 Pembangunan Fasilitas Sisi Udara	16.500.000.000									Dinas Perhubungan
		2 Pemotongan Bukit Tahap III				11.944.400.000						Dinas Perhubungan
		3 Pematangan Shoulder				1.230.000.000						Dinas Perhubungan
		4 Pembuatan Bangunan PKP-PK				240.000.000						Dinas Perhubungan
		5 Pembuatan Pagar Bandara				360.000.000						Dinas Perhubungan
		6 Pembuatan Jalan Masuk ke Parkir				350.000.000						Dinas Perhubungan
		7 Pembuatan Jalan Lingkungan				330.000.000						Dinas Perhubungan
		8 Pembuatan Drainage Induk				110.000.000						Dinas Perhubungan
		9 Pembuatan Drainage Skunder				50.000.000						Dinas Perhubungan
		10 Pembuatan Landscape				187.000.000						Dinas Perhubungan
		11 Pembuatan Pagar Pengaman				75.000.000						Dinas Perhubungan
		12 Pembangunan Rumah Dinas Tipe 45, 4 Unit				627.258.000						Dinas Perhubungan
		13 Pembuatan Rumah Dinas Tipe 60, 3 Unit				285.000.000						Dinas Perhubungan
		14 Pembuatan Rumah Dinas Tipe 70, 1 Unit				175.000.000						Dinas Perhubungan
		15 Pembangunan Gedung Operasional				225.000.000						Dinas Perhubungan
		16 Lanjutan Pembangunan Gedung PKP-PK				465.000.000						Dinas Perhubungan
		h Bandara Rembele - Takengon										Dinas Perhubungan
		1 Konstruksi Perluasan Apron 50 m x 80 m				2.065.900.000						Dinas Perhubungan
		2 Pembuatan Box Curvert Melintang Runway				325.000.000						Dinas Perhubungan
		3 Pembuatan Jalan Masuk				1.000.000.000						Dinas Perhubungan
		4 Pembuatan Jalan Lingkungan				950.000.000						Dinas Perhubungan
		5 Pembuatan Drainage Induk				218.404.000						Dinas Perhubungan
		6 Pembuatan Drainage Skunder				150.000.000						Dinas Perhubungan
		7 Pekerjaan Turap Penahan Tanah				1.314.278.000						Dinas Perhubungan
		8 Pekerjaan Landscape										

**RENCANA KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI/KABUPATEN NANGGROE ACEH DARUSSALAM
TAHUN 2007 - 2009**

BIDANG	PROGRAM UTAMA	SUB BIDANG / KEGIATAN	2007			2008			2009			KETERANGAN
			NILAI (RUPIAH)	SUMBER PENDANAAN	LOKASI	NILAI (RUPIAH)	SUMBER PENDANAAN	LOKASI	NILAI (RUPIAH)	SUMBER PENDANAAN	LOKASI	
		2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Jembatan Timbang										Dinas Perhubungan
		a Pembangunan Jembatan Timbang Seumadam										Dinas Perhubungan
		1. Pembangunan Gudang dan Lapangan Penumpukan	1.000.000.000									Dinas Perhubungan
		2. Ruang kantor				150.000.000						Dinas Perhubungan
		3. Alat Penimbangan				585.000.000						Dinas Perhubungan
		4. Platform dan bangunan pendukung				30.000.000						Dinas Perhubungan
		5. Jalan akses keluar masuk							150.000.000			Dinas Perhubungan
		6. Lapangan parkir							75.000.000			Dinas Perhubungan
		7. Lapangan penumpukan							30.000.000			Dinas Perhubungan
		8. Gudang							30.000.000			Dinas Perhubungan
		9. Rumah dinas							45.000.000			Dinas Perhubungan
		10. Kendaraan Operasional R4 (PERAWATAN)				2.000.000			4.000.000			Dinas Perhubungan
		11. Kendaraan Operasional R2 (PERAWATAN)				1.000.000			1.000.000			Dinas Perhubungan
		b Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jembatan Timbang Jontor Subussalam										Dinas Perhubungan
		1. Ruang kantor				250.000.000						Dinas Perhubungan
		2. Alat Penimbangan				1.050.000.000						Dinas Perhubungan
		3. Platform dan bangunan pendukung				500.000.000						Dinas Perhubungan
		4. Jalan akses keluar masuk				250.000.000						Dinas Perhubungan
		5. Lapangan parkir				250.000.000						Dinas Perhubungan
		6. Lapangan penumpukan				250.000.000						Dinas Perhubungan
		7. Gudang				250.000.000						Dinas Perhubungan
		8. Rumah dinas				150.000.000						Dinas Perhubungan
		9. Mess Petugas				250.000.000						Dinas Perhubungan
		10. Genset 15 Kva				50.000.000						Dinas Perhubungan
		11. Rumah Genset				25.000.000						Dinas Perhubungan
		12. Pagar				100.000.000						Dinas Perhubungan
		13. Penerangan Jalan dan Lingkungan				150.000.000						Dinas Perhubungan
		14. Kamar mandi dan WC				10.000.000						Dinas Perhubungan
		15. Landscape				250.000.000						Dinas Perhubungan
		16. Komputer Operator Lengkap				250.000.000						Dinas Perhubungan
		17. Mesin fotocopi				250.000.000						Dinas Perhubungan
		18. Radio Komunikasi				200.000.000						Dinas Perhubungan
		19. Antena Radio Komunikasi				150.000.000						Dinas Perhubungan
		20. Kendaraan Operasional R4 (PERAWATAN)				150.000.000						Dinas Perhubungan
		21. Kendaraan Operasional R2 (PERAWATAN)				35.000.000						Dinas Perhubungan
		22. Mobilier Kantor				50.000.000						Dinas Perhubungan
		23. Mobilier mess Petugas				50.000.000						Dinas Perhubungan
		24. Mobilier Rumah Dinas				50.000.000						Dinas Perhubungan
		c Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jembatan Timbang Lawe Berbunga										Dinas Perhubungan
		1. Ruang kantor				250.000.000						Dinas Perhubungan
		2. Alat Penimbangan				1.050.000.000						Dinas Perhubungan
		3. Platform dan bangunan pendukung				500.000.000						Dinas Perhubungan
		4. Jalan akses keluar masuk				250.000.000						Dinas Perhubungan
		5. Lapangan parkir				250.000.000						Dinas Perhubungan
		6. Lapangan penumpukan				250.000.000						Dinas Perhubungan
		7. Gudang				250.000.000						Dinas Perhubungan
		8. Rumah dinas				150.000.000						Dinas Perhubungan
		9. Mess Petugas				250.000.000						Dinas Perhubungan
		10. Genset 15 Kva				50.000.000						Dinas Perhubungan
		11. Rumah Genset				25.000.000						Dinas Perhubungan
		12. Pagar				100.000.000						Dinas Perhubungan
		13. Penerangan Jalan dan Lingkungan				150.000.000						Dinas Perhubungan
		14. Kamar mandi dan WC				10.000.000						Dinas Perhubungan
		15. Landscape				250.000.000						Dinas Perhubungan
		16. Komputer Operator Lengkap				250.000.000						Dinas Perhubungan
		17. Mesin fotocopi				250.000.000						Dinas Perhubungan
		18. Radio Komunikasi				200.000.000						Dinas Perhubungan
		19. Antena Radio Komunikasi				150.000.000						Dinas Perhubungan
		20. Kendaraan Operasional R4 (PERAWATAN)				150.000.000						Dinas Perhubungan
		21. Kendaraan Operasional R2 (PERAWATAN)				35.000.000						Dinas Perhubungan
		22. Mobilier Kantor				50.000.000						Dinas Perhubungan
		23. Mobilier mess Petugas				50.000.000						Dinas Perhubungan
		24. Mobilier Rumah Dinas				50.000.000						Dinas Perhubungan
		d Pembangunan Jembatan Timbang Singkil	1.132.000.000									Dinas Perhubungan
		3 Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Sungai, Danau & Penyeberangan										Dinas Perhubungan
		a Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Lamteeng										Dinas Perhubungan
		1. Pembangunan Gedung Terminal Pelabuhan Penyeberangan Lamteeng Tahap IV	950.000.000									Dinas Perhubungan
		2. Pembangunan Talud Sisi Darat	500.000.000									Dinas Perhubungan
		b Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Labuhan Haji										Dinas Perhubungan
		1. Peningkatan Acces Road Ke Pelabuhan	1.200.000.000									Dinas Perhubungan
		2. Pembangunan Talud Pelindung	400.000.000									Dinas Perhubungan
		c Pembangunan Dermaga Penyeberangan Balohan										Dinas Perhubungan
		1. Pembangunan Terminal Penumpang Tahap I	2.698.875.000									Dinas Perhubungan
		2. Pembangunan Rumah Genset (12 M2) dan Pengadaan Genset 25 KVA				229.843.000						Dinas Perhubungan
		3. Pembangunan Pagar BRC Keliling Lingkungan Pelabuhan				441.266.000						Dinas Perhubungan
		4. Pembangunan Menara Dan Bak Air				320.012.000						Dinas Perhubungan
		5. Pembangunan Deep Weel Dengan Kelengkapannya				192.500.000						Dinas Perhubungan
		6. Pembangunan Gedung Terminal Tahap II				403.952.000						Dinas Perhubungan
		7. Pengadaan Mobilier Gedung Terminal				381.835.000						Dinas Perhubungan
		8. Gedung Operasional							2.400.000.000			Dinas Perhubungan
		d Pemb. Fas. Darat Dermaga Penyeberangan Ulee Lheue										Dinas Perhubungan
		1. Pembangunan Dermaga Ponton Kapal Cepat				2.500.000.000						Dinas Perhubungan
		2. Pembangunan Jembatan Timbang				1.320.000.000						Dinas Perhubungan
		3. Pembangunan Pagar BRC Keliling Lingkungan Pelabuhan				634.378.000						Dinas Perhubungan
		4. Perencanaan dan Supervisi				311.806.000						Dinas Perhubungan

BIDANG	PROGRAM UTAMA	SUB BIDANG / KEGIATAN	2007			2008			2009			KETERANGAN
			NILAI (RUPIAH)	SUMBER PENDANAAN	LOKASI	NILAI (RUPIAH)	SUMBER PENDANAAN	LOKASI	NILAI (RUPIAH)	SUMBER PENDANAAN	LOKASI	
		e Pembangunan Dermaga Penyeberangan Meulaboh										Dinas Perhubungan
		1 Perkerasan Jalan (2.000 M2) & Parkir (3.500 M2)				1.021.767.000						Dinas Perhubungan
		2 Pembangunan Trotoar				192.755.000						Dinas Perhubungan
		3 Pembangunan Drainase				397.402.000						Dinas Perhubungan
		4 Pematanan Tangk & Lampu Penerangan				309.312.000						Dinas Perhubungan
		5 Pembangunan Gedung Terminal				2.744.512.000						Dinas Perhubungan
		6 Pembangunan Rumah Genset (12 M2) dan Pengadaan Genset 25 KVA				228.558.000						Dinas Perhubungan
		7 Pembangunan Pos Pemeriksaan Tiket (9 M2)				42.972.000						Dinas Perhubungan
		8 Pembangunan Pos Jaga (9 M2)				42.972.000						Dinas Perhubungan
		9 Pembangunan Rumah Dinas Tipe (70 M2)				261.565.000						Dinas Perhubungan
		10 Pembangunan Rumah Dinas Tipe (45M2)				334.911.000						Dinas Perhubungan
		11 Pembangunan Pagar Keliling				474.803.000						Dinas Perhubungan
		12 Pembangunan Menara & Bak Air				296.598.000						Dinas Perhubungan
		13 Perencanaan dan Supervisi				444.369.000						Dinas Perhubungan
		14 Fasilitas Laut							15.000.000.000			Dinas Perhubungan
		f Pemb. Fas. Darat Dermaga Penyeberangan Labuhan Haji										Dinas Perhubungan
		1 Pembangunan Ruang Tunggar (200 M2)				350.118.000						Dinas Perhubungan
		2 Pembangunan Rumah Dinas Tipe (45 M2)				331.330.000						Dinas Perhubungan
		3 Pembangunan Rumah Dinas Tipe (70 M2)				256.821.000						Dinas Perhubungan
		4 Jembatan Timbang				1.320.000.000						Dinas Perhubungan
		5 Perencanaan dan Supervisi				158.079.000						Dinas Perhubungan
		g Pelabuhan Penyeberangan Siagkil :										Dinas Perhubungan
		1 Jembatan Timbang							1.000.000.000			Dinas Perhubungan
		h Pelabuhan Penyeberangan Calang										Dinas Perhubungan
		1 Pekerjaan Persiapan				361.000.000						Dinas Perhubungan
		2 Trestle				4.200.000.000						Dinas Perhubungan
		3 Plengsengan				3.200.000.000						Dinas Perhubungan
		4 Mooring Dolphin				1.770.000.000						Dinas Perhubungan
		5 Breasting Dolphin				2.645.000.000						Dinas Perhubungan
		6 Talled				1.200.000.000						Dinas Perhubungan
		7 Catwalk				750.000.000						Dinas Perhubungan
		8 Areal Parkir				1.400.000.000						Dinas Perhubungan
		9 Pagar				220.000.000						Dinas Perhubungan
		10 Pintu Gerbang				69.000.000						Dinas Perhubungan
		11 Pos Jaga				60.000.000						Dinas Perhubungan
		12 Gedung Terminal				1.200.000.000						Dinas Perhubungan
		13 Jembatan Timbang				1.500.000.000						Dinas Perhubungan
		14 Gedung Operasional				770.000.000						Dinas Perhubungan
		15 Genset & Rumah Genset				200.000.000						Dinas Perhubungan
		16 Musholla				70.000.000						Dinas Perhubungan
		17 Reservoir Air				80.000.000						Dinas Perhubungan
		18 Tangki BBM				80.000.000						Dinas Perhubungan
		19 Shelter				240.000.000						Dinas Perhubungan
		20 Rumah Dinas tipe 36				280.000.000						Dinas Perhubungan
		21 Rumah Dinas tipe 45				95.000.000						Dinas Perhubungan
		22 Gangway				230.000.000						Dinas Perhubungan
		23 Radio Telekomunikasi				25.000.000						Dinas Perhubungan
		24 Kertir										

**RENCANA KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI/KABUPATEN NANGGROE ACEH DARUSSALAM
TAHUN 2007 - 2009**

BIDANG	PROGRAM UTAMA	SUB BIDANG / KEGIATAN	2007			2008			2009			KETERANGAN
			NILAI (RUPIAH)	SUMBER PENDANAAN	LOKASI	NILAI (RUPIAH)	SUMBER PENDANAAN	LOKASI	NILAI (RUPIAH)	SUMBER PENDANAAN	LOKASI	
		1 Biaya Operasional Angkutan Penyeberangan	413.421.000			454.764.000			500.240.000			Dinas Perhubungan
		d Subsidi Angkutan Penyeberangan Perintis										Dinas Perhubungan
		1 Lintas Penyeberangan Ulee Lheue - Lamteng				873.573.000						Dinas Perhubungan
		2 Lintas Penyeberangan Labuhan Haji - Sinabang				2.437.332.000						Dinas Perhubungan
		3 (144 Trip Singkil - Pulau Banyak ; 96 Trip Pulau Banyak - Sinabang)				650.030.000						Dinas Perhubungan
		e Subsidi Operasional Angkutan Penyeberangan di Prov NAD				6.000.000.000			6.000.000.000			Dinas Perhubungan
		5 Sosialisasi/ Penyuluhan Keterlibatan Lalu Lintas & Angkutan	859.747.000			945.722.000			1.040.295.000			Dinas Perhubungan
		6 Kegiatan Temu Wicara Pengelola Angkutan Umum Guna Meningkatkan	39.786.000									Dinas Perhubungan
		7 Kegiatan Penciptaan Layanan Cepat, Tepat, Murah & Mudah	397.555.000									Dinas Perhubungan
		8 Pengumpulan dan Analisis Data Base Pelayanan Jasa Angkutan	121.895.000									Dinas Perhubungan
		9 Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan	842.969.000									Dinas Perhubungan
		10 Pemilihan & Penghargaan Supir Kend. Angkum Teladan	68.162.000									Dinas Perhubungan
		11 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	53.400.000									Dinas Perhubungan
		12 Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan										Dinas Perhubungan
		a Peningkatan Terminal Barang di Kota Banda Aceh	1.500.000.000									Dinas Perhubungan
		b Pembangunan Terminal Tipe C di Matang Glumpang dua	2.300.000.000									Dinas Perhubungan
		c Pembangunan Gedung Terpadu Pelayanan Jasa Angkutan	1.295.500.000									Dinas Perhubungan
		d Pembangunan Terminal Tipe A di Banda Aceh										Dinas Perhubungan
		1 Unit Bangunan Ruang Tunggu Keberangkatan Angkot							1.077.155.000			Dinas Perhubungan
		2 Unit Perkerasan Tahap 2							2.196.613.000			Dinas Perhubungan
		3 Unit Landscape							690.766.000			Dinas Perhubungan
		4 Unit pagar Tipe B (Pagar Pembatas Area AKDP & Angkot)							272.941.000			Dinas Perhubungan
		5 Unit Selasar							1.018.587.000			Dinas Perhubungan
		6 Unit Bangunan Bengkel & Istirahat Supir							1.104.998.000			Dinas Perhubungan
		7 Unit Bangunan Foodcourt							841.173.000			Dinas Perhubungan
		e Peningkatan Terminal Tipe C menjadi Tipe A di Lhoksukon										Dinas Perhubungan
		1 Unit Bangunan Pagar Keliling							376.258.000			Dinas Perhubungan
		2 Unit Landscape							119.049.000			Dinas Perhubungan
		3 Unit Perkerasan							90.047.000			Dinas Perhubungan
		f Peningkatan Terminal Tipe C menjadi Tipe A di Meulaboh *										Dinas Perhubungan
		1 Unit Bangunan Pagar Keliling				376.258.000						Dinas Perhubungan
		2 Unit Landscape				119.050.000						Dinas Perhubungan
		3 Unit Perkerasan				90.047.000						Dinas Perhubungan
		g Pembangunan Terminal Tipe C di Idi	2.000.000.000									Dinas Perhubungan
		1 Pekerjaan Persiapan Lahan				64.505.000						Dinas Perhubungan
		2 Unit Bangunan TPR				217.645.000						Dinas Perhubungan
		3 Unit Bangunan Kantor				317.590.000						Dinas Perhubungan
		4 Unit Bangunan Ruang Tunggu Penumpang				557.611.000						Dinas Perhubungan
		5 Unit Bangunan Musholla				157.329.000						Dinas Perhubungan
		6 Unit Area Kedatangan Angkot				97.181.000						Dinas Perhubungan
		7 Unit Area Keberangkatan Angkot				79.711.000						Dinas Perhubungan
		8 Unit Bangunan Selasar				39.659.000						Dinas Perhubungan
		9 Unit Landscape				208.530.000						Dinas Perhubungan
		10 Unit Perkerasan				953.625.000						Dinas Perhubungan
		11 Saluran Drainase				100.000.000						Dinas Perhubungan
		12 Pekerjaan Pelengkap				20.000.000						Dinas Perhubungan
		h Pembangunan Terminal Tipe C di Aceh Barat Daya	2.300.000.000									Dinas Perhubungan
		i Pembangunan Terminal Tipe C di Prov NAD				2.500.000.000						Dinas Perhubungan
						2.500.000.000						Dinas Perhubungan
						2.500.000.000						Dinas Perhubungan
						2.500.000.000						Dinas Perhubungan
						2.500.000.000						Dinas Perhubungan
						2.500.000.000						Dinas Perhubungan
		j Rehabilitasi Terminal Penumpang Tipe B di Prov. NAD	750.000.000						2.000.000.000			Dinas Perhubungan
		k Pembangunan Kantor / Pool DAMRI di Meulaboh				3.000.000.000						Dinas Perhubungan
		l Pembangunan Kantor / Pool DAMRI di Singkil				3.000.000.000						Dinas Perhubungan
		13 Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan										Dinas Perhubungan
		a Pembangunan Dermaga Penyeberangan Sungai dan	6.800.000.000									Dinas Perhubungan
		b Pendaratan di Aceh Tamiang										Dinas Perhubungan
		1 Dermaga Baling Karang	550.000.000									Dinas Perhubungan
		2 Dermaga Desa Sukumar	550.000.000									Dinas Perhubungan
		3 Dermaga Pematang Durian	550.000.000									Dinas Perhubungan
		4 Dermaga Lubuk Sulung	4.050.000.000									Dinas Perhubungan
		5 Dermaga Kuala Simpang	550.000.000									Dinas Perhubungan
		6 Dermaga Jambu Aye	550.000.000									Dinas Perhubungan
		14 Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas										Dinas Perhubungan
		a Ruas Jalan Takengon - Blang Keujeren	120.000.000									Dinas Perhubungan
		b Ruas Jalan Blang Keujeren - Kuta Cane	120.000.000									Dinas Perhubungan
		c Ruas Jalan Tangge - Tutut	120.000.000									Dinas Perhubungan
		d Pengadaan Dan Pemasangan Rambu - Rambu Lintas Timur - Batas Sumut				822.082.000			548.137.000			Dinas Perhubungan
		e Pengadaan Dan Pemasangan Rambu - Rambu Lintas Tengah				1.096.082.000			822.137.000			Dinas Perhubungan
		f Pengadaan Dan Pemasangan Rambu - Rambu Lintas Barat - Sumut				1.370.082.000			931.737.000			Dinas Perhubungan
		g Pengadaan Rambu Perunjuk Pendahulu Jurusan (RPPJ) Lintas Timur - Batas Sumut				8.863.000			9.835.000			Dinas Perhubungan
		h Pengadaan Rambu Perunjuk Pendahulu Jurusan (RPPJ) Lintas Tengah	62.500.000			5.421.000			3.872.000			Dinas Perhubungan
		i Pengadaan Rambu Perunjuk Pendahulu Jurusan (RPPJ) Lintas Barat - Batas Sumut				8.863.000			7.314.000			Dinas Perhubungan
		15 Pengadaan Marka Jalan	1.524.000.000									Dinas Perhubungan
		a Ruas Jalan Banda Aceh - Krueng Raya	300.000.000									Dinas Perhubungan
		b Ruas Jalan Lambaro - Blang Bintang	144.000.000									Dinas Perhubungan
		c Ruas Jalan Bireuen - Takengon	900.000.000									Dinas Perhubungan
		d Ruas Jalan Dalam Kota Banda Aceh	180.000.000									Dinas Perhubungan
		e Pengadaan Dan Pegecatan Marka Jalan Lintas Timur - Batas Sumut				610.000.000			610.007.000			Dinas Perhubungan
		f Pengadaan Dan Pegecatan Marka Jalan Lintas Tengah							915.007.000			Dinas Perhubungan
		g Pengadaan Dan Pegecatan Marka Jalan Lintas Barat - Batas Sumut				2.440.000.000			1.525.007.000			Dinas Perhubungan

**RENCANA KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI/KABUPATEN NANGGROE ACEH DARUSSALAM
TAHUN 2007 - 2009**

BIDANG	PROGRAM UTAMA	SUB BIDANG / KEGIATAN	2007			2008			2009			KETERANGAN	
			NILAI (RUPIAH)	SUMBER PENDANAAN	LOKASI	NILAI (RUPIAH)	SUMBER PENDANAAN	LOKASI	NILAI (RUPIAH)	SUMBER PENDANAAN	LOKASI		
		16 Pengadaan Pagar Pengaman Jalan (Guard Rail)										Dinas Perhubungan	
		a Ruas Jalan Takengon - Blang Kejeren	410.000.000									Dinas Perhubungan	
		b Ruas Jalan Blang Keujeuren - Kuta Cane	410.000.000									Dinas Perhubungan	
		c Ruas Jalan Tangse - Tutut	82.000.000									Dinas Perhubungan	
		d Pengadaan Dan Pemasangan Guard Rail Lintas Timur - Batas Sumut				15.155.000			15.215.000			Dinas Perhubungan	
		e Pengadaan Dan Pemasangan Guard Rail Lintas Tengah				30.220.000			30.280.000			Dinas Perhubungan	
		f Pengadaan Dan Pemasangan Guard Rail Lintas Barat - Batas Sumut				45.285.000			53.179.000			Dinas Perhubungan	
		17 Pengadaan Deliniator											Dinas Perhubungan
		a Ruas Jalan Bireuen - Takengon	143.700.000										Dinas Perhubungan
		b Ruas Jalan Tangse - Tutut	143.700.000										Dinas Perhubungan
		c Pengadaan Dan Pemasangan Delineator Lintas Timur - Batas Sumut				141.332.000			106.048.000				Dinas Perhubungan
		d Pengadaan Dan Pemasangan Delineator Tengah				158.992.000			141.368.000				Dinas Perhubungan
		e Pengadaan Dan Pemasangan Delineator Lintas Barat - Batas Sumut				282.612.000			247.328.000				Dinas Perhubungan
		18 Pengadaan Traffic Light											Dinas Perhubungan
		a Pengadaan dan Pemasangan Traffic Light	150.000.000										Dinas Perhubungan
		b Pada SP. 4 Ajuen Jempet Banda Aceh	150.000.000										Dinas Perhubungan
		c Pengadaan dan Pemasangan Traffic Light SP. 4 Kab. Bener Meuriah	150.000.000										Dinas Perhubungan
		d Pengadaan dan Pemasangan Warning Light pada Sp. Jantho	110.000.000										Dinas Perhubungan
		e Pengadaan dan Pemasangan Warning Light Pasar Saree	110.000.000										Dinas Perhubungan
		f Pengadaan Trffic Light				170.000.000			170.000.000				Dinas Perhubungan
		19 Pengadaan dan pemasangan fasilitas keselamatan lalu lintas jalan	3.803.504.000										Dinas Perhubungan
		20 Pengadaan Jembatan Penyeberangan											Dinas Perhubungan
		a Pembangunan Jembatan Penyeberangan, Jln. Daud Beureuh (Depan RSU Zainal Abidin)	1.500.000.000										Dinas Perhubungan
		21 Pembangunan Zona Selamat Lalu Lintas Jalan											Dinas Perhubungan
		a Pengadaan Konstruksi Bangunan Zona Keselamatan	1.000.000.000										Dinas Perhubungan
		22 Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor											Dinas Perhubungan
		a Pengadaan dan Pemasangan Alat Uji Kendaraan	2.575.500.000			5.312.500.000			5.843.750.000				Dinas Perhubungan
		b Ruang kantor, dan Areal pengujian, Fasilitas Administrasi elektronik											Dinas Perhubungan
		1 Platform dan bangunan pendukung				2.500.000.000							Dinas Perhubungan
		2 Jalan akses keluar masuk				1.250.000.000							Dinas Perhubungan
		3 Lapangan parkir				3.000.000.000							Dinas Perhubungan
		4 Lapangan penumpukan				1.250.000.000							Dinas Perhubungan
		5 Genset 15 Kva				250.000.000							Dinas Perhubungan
		6 Rumah Genset				125.000.000							Dinas Perhubungan
		23 Pelaksanaan Penelitian Kelaikan Kendaraan Bermotor				385.000.000			423.500.000				Dinas Perhubungan
		a Pengadaan Mobil Peralatan unit Penelitian	350.000.000										Dinas Perhubungan
		b Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Patroli untuk	510.000.000										Dinas Perhubungan
		24 Pembangunan/Pengadaan/ Peningkatan Sarana & Parsarana							1.300.000.000.000				Dinas Perhubungan
		a LINTAS MEUNASAH ALUE - MATANG GEULUMPANG DUA											Dinas Perhubungan
		1 Perawatan Jalan dan Jembatan Kereta Api				184.799.000							Dinas Perhubungan
		2 Pembangunan/Pengadaan sarana KA				19.343.500.000							Dinas Perhubungan
		b LINTAS MATANG GEULUMPANG DUA - LHOKEUMAWA											Dinas Perhubungan
		1 Perawatan Jalan & Jembatan KA yang telah dibangun	184.799.000			184.799.000							Dinas Perhubungan
		2 Pembangunan/Pengadaan sarana KA	19.343.500.000			19.343.500.000							Dinas Perhubungan
		25 Pembangunan Jalan & Jembatan KA											Dinas Perhubungan
		a LINTAS MEUNASAH ALUE - MATANG GEULUMPANG DUA											Dinas Perhubungan
		1 Pembangunan Jalan KA	43.066.471.000										Dinas Perhubungan
		2 Pengadaan Wesel	4.125.000.000										Dinas Perhubungan
		3 Pengadaan Bantalan Beton Lengkap dengan Penambat Elastis	18.390.064.000										Dinas Perhubungan
		4 Pembangunan Box Culvert/ Jembatan Beton	7.840.557.000										Dinas Perhubungan
		5 Pembangunan Jembata Baja	9.431.123.000										Dinas Perhubungan
		6 Pembangunan Stasiun	1.438.579.000										Dinas Perhubungan
		7 Pembangunan Pintu Perlintasan KA	517.166.000										Dinas Perhubungan
		8 Angkutan Re dari P. Jawa ke Lokasi	1.090.060.000										Dinas Perhubungan
		b LINTAS MATANG GEULUMPANG DUA - LHOKEUMAWA											Dinas Perhubungan
		1 Akuisisi Tanah				101.095.465.000							Dinas Perhubungan
		2 Pembangunan Jalan KA Spoor 1435				389.374.125.000							Dinas Perhubungan
		3 Pembangunan Box Culvert/ Jembatan Beton				21.536.987.000							Dinas Perhubungan
		4 Pembangunan Jembata Baja				135.727.334.000							Dinas Perhubungan
		5 Pembangunan Stasiun				2.029.903.000							Dinas Perhubungan
		6 Pembangunan Pintu Perlintasan KA				601.240.000							Dinas Perhubungan
ENERGI DAN TELEKOMUNIKASI			52.333.098.998			232.249.239.500			152.507.478.000			Dinas Pertambangan dan Energi, Dinas Perhubungan, Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan, BPM, Setda, BPDE	
	D. Energi dan Kelistrikan	1 Non Program	5.556.420.000	APBD	B. Aceh	6.000.000.000	APBD	B. Aceh	6.500.000.000	APBD	B. Aceh	Dinas Pertambangan dan Energi	
		2 Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.555.106.000	APBD	B. Aceh	1.248.000.000	APBD	B. Aceh	1.432.000.000	APBD	B. Aceh	Dinas Pertambangan dan Energi	
		3 Peningkatan Sarana dan Prasarana	4.092.100.000	APBD	B. Aceh	1.095.000.000	APBD	B. Aceh	1.120.000.000	APBD	B. Aceh	Dinas Pertambangan dan Energi	
		4 Peningkatan Disiplin Aparatur	256.080.000	APBD	B. Aceh	327.000.000	APBD	B. Aceh	490.000.000	APBD	B. Aceh	Dinas Pertambangan dan Energi	
		5 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur											
		a Bimbingan teknis implementasi Perundang-undangan	51.150.000	APBD	B. Aceh	65.000.000	APBD	B. Aceh	75.000.000	APBD	B. Aceh	Dinas Pertambangan dan Energi	
		b Bimbingan dan Pelatihan Teknis tentang peraturan di Bidang Pengawasan sektor pertambangan umum bagi aparat pemerintah kabupaten/Kota di Prov. NAD				120.000.000	APBD	B. Aceh	140.000.000	APBD	B. Aceh	Dinas Pertambangan dan Energi	
		c Pelatihan Teknis Pengoperasian Pos Pengamatan aktifitas gunung api Bagi Aparatur Pemerintahan Prov. NAD				150.000.000		Pidie, A. Besar, B. Meriah	150.000.000		Pidie, A. Besar, B. Meriah	Dinas Pertambangan dan Energi	
		d Pelatihan Manajemen Resiko Bencana Geologi untuk aparat pemerintah				500.000.000		B. Aceh, A. Besar, Sabang, Pidie, Pidie Jaya	500.000.000		B. Meriah, A. Tengah, Lhokseumawe, A. Utara, Bireuen	Dinas Pertambangan dan Energi	
		6 Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan											
		a Monitoring dan pengendalian kegiatan penambangan bahan galian C	308.605.000	APBD	Prov. NAD	350.000.000	APBD	Prov. NAD	400.000.000	APBD	Prov. NAD	Dinas Pertambangan dan Energi	
		b Koordinasi dan pendataan tentang hasil produksi di bidang pertambangan	52.680.000	APBD	Prov. NAD	75.000.000	APBD	16 kab/kota	100.000.000	APBD	16 kab/kota	Dinas Pertambangan dan Energi	
		c Monitoring, evaluasi dan pelaporan	322.120.000	APBD	Prov. NAD	350.000.000	APBD	16 kab/kota	450.000.000	APBD	16 kab/kota	Dinas Pertambangan dan Energi	

**RENCANA KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI/KABUPATEN NANGGROE ACEH DARUSSALAM
TAHUN 2007 - 2009**

BIDANG	PROGRAM UTAMA	SUB BIDANG / KEGIATAN	2007			2008			2009			KETERANGAN
			NILAI (RUPIAH)	SUMBER PENDANAAN	LOKASI	NILAI (RUPIAH)	SUMBER PENDANAAN	LOKASI	NILAI (RUPIAH)	SUMBER PENDANAAN	LOKASI	
		d Pemboran dan pembuatan sumur pantau air tanah	713.590.000	APBD	Pidie, Bireuen, A.Utaram A. Jaya	550.000.000	APBD	B. Aceh, A. Barat, Langsa	350.000.000	APBD	A. Tamiang, A. Besar	Dinas Pertambangan dan Energi
		e Pemboran air bawah tanah	6.330.660.000	APBD	13 Kab/kota	3.600.000.000	APBD	13 Kab/kota	3.700.000.000	APBD	13 Kab/kota	Dinas Pertambangan dan Energi
		f Pengawasan, pengambilan dan pemanfaatan air tanah dan air permukaan	157.210.000	APBD	20 kab/kota	170.000.000	APBD	20 kab/kota	185.000.000	APBD	20 kab/kota	Dinas Pertambangan dan Energi
		g Sosialisasi Resiko Bencana Alam Geologi (Pelajar dan Masyarakat)				750.000.000	APBD	B. Aceh	800.000.000	APBD	B. Aceh	Dinas Pertambangan dan Energi
		h Sertifikasi dan Pelatihan juru Pengeboran air bawah tanah				300.000.000	APBD	B. Aceh	350.000.000	APBD	B. Aceh	Dinas Pertambangan dan Energi
		i Bantuan Teknis dan Peralatan bagi usaha pertambangan				1.000.000.000	APBN	A. Jaya	1.200.000.000	APBN	A. Selatan	Dinas Pertambangan dan Energi
		j Pembinaan usaha pertambangan emas rakyat	25.897.000	APBD	A. Selatan, A. Barat	40.000.000	APBN	A. Tengah, A. Barat, Nagan Raya, A. Selatan, Pidie	63.000.000	APBN	A. Tengah, A. Barat, Nagan Raya, A. Selatan, Pidie	Dinas Pertambangan dan Energi
		k Zonasi Pertambangan				120.000.000	APBD	Pidie	125.000.000	APBD	A. Tenggara	Dinas Pertambangan dan Energi
		l Pengembangan dan pemanfaatan marmer				1.500.000	APBN	A. Besar, A. Selatan, A. Tengah	1.550.000	APBN	A. Besar, A. Selatan, A. Tengah	Dinas Pertambangan dan Energi
		m Pengembangan dan pemanfaatan granit				3.000.000.000	APBN	A. Barat, A. Timur, A. Tengah	3.005.000.000	APBN	A. Barat, A. Timur, A. Tengah	Dinas Pertambangan dan Energi
		n Pengembangan dan pemanfaatan Batu gamping				3.000.000.000	APBN	A. Timur, A. Tengah, A. Selatan	3.100.000.000	APBN	A. Timur, A. Tengah, A. Selatan	Dinas Pertambangan dan Energi
		o Pemanfaatan bahan galian lempung batu bata				2.000.000.000	APBN	A. Besar, A. Timur, A. Barat	2.005.000.000	APBN	A. Besar, A. Timur, A. Barat	Dinas Pertambangan dan Energi
		p Pemetaan gambut				750.000.000	APBN	A. Barat, Nagan Raya	755.000.000	APBN	A. Barat, Nagan Raya	Dinas Pertambangan dan Energi
		q Survey Potensi Panas Bumi				750.000.000	APBD	Kab/kota	755.000.000	APBD	Kab/kota	Dinas Pertambangan dan Energi
		r Pemetaan Lokasi Rawan Bencana Geologi				1.000.000.000		B. Aceh, A. Besar, Sabang, Pidie, Pidie Jaya	1.000.000.000		B. Meriah, A. Tengah, Lhokseumawe, A. Utara, Bireuen	Dinas Pertambangan dan Energi
		s Sosialisasi Hasil Pemetaan Lokasi Rawan Bencana Geologi				500.000.000		B. Aceh, A. Besar, Sabang, Pidie, Pidie Jaya	500.000.000		B. Meriah, A. Tengah, Lhokseumawe, A. Utara, Bireuen	Dinas Pertambangan dan Energi
		t Pemanfaatan Batu Mulia untuk Pemberdayaan Ekonomi Rakyat				1.500.000.000	APBD	Bireuen, A. Jaya, Pidie	1.515.000.000	APBD	A. Timur, A. Utara, Pidie	Dinas Pertambangan dan Energi
		u Pemantauan Aktivitas Gunungapi				300.000.000	APBD	A. Besar, Pidie, B. Meriah	300.000.000	APBD	A. Besar, Pidie, B. Meriah	Dinas Pertambangan dan Energi
		v Pelatihan Manajemen Resiko Bencana Geologi				1.000.000.000	APBD	A. Timur, A. Tamiang, G. Lues, A. Tenggara, K. Langsa	1.005.000.000	APBD	Bireuen, LSM, B. Meriah, A. Tengah, A. Utara	Dinas Pertambangan dan Energi
		w Seminar Manajemen Mitigasi Bencana Geologi (pelajar dan masyarakat)				250.000.000		B. Aceh, A. Besar, Sabang, Pidie, Pidie Jaya	250.000.000		B. Meriah, A. Tengah, Lhokseumawe, A. Utara, Bireuen	Dinas Pertambangan dan Energi
		x Survey Gerakan Tanah				1.000.000.000		B. Aceh, A. Besar, Sabang, Pidie, Pidie Jaya	1.000.000.000		B. Meriah, A. Tengah, Lhokseumawe, A. Utara, Bireuen	Dinas Pertambangan dan Energi
		y Pembuatan Pusat Database Geologi				750.000.000	APBN	A. Timur, A. Tamiang, G. Lues, A. Tenggara, K. Langsa	755.000.000	APBN	Bireuen, LSM, B. Meriah, A. Tengah, A. Utara	Dinas Pertambangan dan Energi
		z Pengawasan dan Pembinaan usaha pertambangan umum	72.150.000	APBD	5 kab	85.000.000	APBD	21 kab/kota	90.000.000	APBD	21 kab/kota	Dinas Pertambangan dan Energi
		aa Arahan Penggunaan Lahan (Zonasi Pertambangan Rakyat)				120.000.000	APBD	Pidie, A. Besar	125.000.000	APBD	A. Tenggara	Dinas Pertambangan dan Energi
		ab Pengawasan dan Pembinaan Usaha Pertambangan Umum dan Penegakan Peraturan Bidang Pertambangan Umum				160.000.000	APBD	A. Utara, A. Jempha, A. Timur	165.000.000	APBD	A. Jaya, A. Barat, Nagan Raya	Dinas Pertambangan dan Energi
		ac Penerbitan Usaha Pertambangan Ilegal (PETI)				175.000.000	APBD	A. Tamiang	180.000.000	APBD	Pidie, A. Barat	Dinas Pertambangan dan Energi
		ad Bimbingan Teknis Konservasi dan Reklamasi Pertambangan				235.000.000	APBD	A. Besar, Pidie, A. Utara	240.000.000	APBD	A. Jempha, A. Timur, A. Tamiang	Dinas Pertambangan dan Energi
		ae Pengembangan Usaha Pertambangan Rakyat dan Percontohan Pemanfaatan Briket				750.000.000	APBD	A. Barat	755.000.000	APBD	A. Barat	Dinas Pertambangan dan Energi
		af Sosialisasi Pembriketan Batubara				550.000.000	APBD	A. Jaya, A. Barat, Nagan Raya	555.000.000	APBD	A. Timur, A. Tamiang	Dinas Pertambangan dan Energi
		ag Pengawasan dan Inspeksi Keselamatan Kerja Pertambangan				145.000.000	APBD	A. Besar, Pidie	150.000.000	APBD	A. Utara, A. Jempha	Dinas Pertambangan dan Energi
		ah Inventarisasi Izin Usaha Pertambangan Daerah Galian C				125.000.000	APBD	A. Timur, A. Tamiang	130.000.000	APBD	A. Utara, A. Jempha	Dinas Pertambangan dan Energi
		ai Pemanfaatan Briket Batubara Untuk Industri Kecil Dalam Pembuatan Batubata				470.000.000	APBD	A. Besar	475.000.000	APBD	A. Utara	Dinas Pertambangan dan Energi
		aj Sosialisasi peraturan dan spesifikasi teknis pengeboran air tanah bagi para kontraktor	32.055.000	APBD	B. Aceh	40.000.000			55.000.000			Dinas Pertambangan dan Energi
		ak Survey Pendahuluan mineral logam	369.070.000	APBD	A. Singkil	450.000.000			500.000.000			Dinas Pertambangan dan Energi

**RENCANA KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI/KABUPATEN NANGGROE ACEH DARUSSALAM
TAHUN 2007 - 2009**

BIDANG	PROGRAM UTAMA	SUB BIDANG / KEGIATAN	2007			2008			2009			KETERANGAN
			NILAI (RUPIAH)	SUMBER PENDANAAN	LOKASI	NILAI (RUPIAH)	SUMBER PENDANAAN	LOKASI	NILAI (RUPIAH)	SUMBER PENDANAAN	LOKASI	
		al Bimbingan Teknis bagi usaha pertambangan rakyat	718.860.000	APBD	Prov. NAD	750.000.000	APBD	Prov. NAD	800.000.000	APBD	Prov. NAD	Dinas Pertambangan dan Energi
		am Inventarisasi kebutuhan sumur bor				400.000.000	APBD	21 kab/kota	420.000.000	APBD	21 kab/kota	Dinas Pertambangan dan Energi
		an Survey cekungan air tanah				750.000.000	APBD	A. Barat	800.000.000	APBD	Lingsa	Dinas Pertambangan dan Energi
		ao Perbaikan & pemeliharaan sumur bor				240.000.000	APBD	6 kab/kota	250.000.000	APBD	6 kab/kota	Dinas Pertambangan dan Energi
		ap Bimbingan dan pelatihan teknis tentang peraturan di bidang pertambangan umum bagi	36.039.900	APBD	B. Aceh	45.000.000	APBD	B. Aceh				Dinas Pertambangan dan Energi
		aq Sosialisasi Bencana Geologi				200.000.000		B. Aceh, A. Besar, Sabang, Pidie, Pidie Jaya	200.000.000	APBD	B. Meriah, A. Tengah, Lhokseumawe, A. Utara, Bireuen	Dinas Pertambangan dan Energi
		ar Pemetaan Abrasi Pantai				300.000.000		Aceh Besar, Pidie, Bireuen	300.000.000	APBD	Lhokseumawe, A. Utara, A. Timur	Dinas Pertambangan dan Energi
		as Survey Geologi Lingkungan				2.000.000.000		B. Aceh, A. Besar, Sabang, Pidie, Pidie Jaya	2.000.000.000	APBD	B. Meriah, A. Tengah, Lhokseumawe, A. Utara, Bireuen	Dinas Pertambangan dan Energi
		at Pembukaan Jalan Perintis Ke Puncak Gunungapi				300.000.000		Pidie, A. Besar, B. Meriah	300.000.000	APBD	Pidie, A. Besar, B. Meriah	Dinas Pertambangan dan Energi
		au Pengadaan Peralatan Laboratorium Mineralogi				1.000.000.000	APBD	B. Aceh				Dinas Pertambangan dan Energi
		av Pengadaan Sampel Batuan				500.000.000	APBD	B. Aceh, A. Besar, Sabang, Pidie, Pidie Jaya	500.000.000	APBD	B. Meriah, A. Tengah, Lhokseumawe, A. Utara, Bireuen	Dinas Pertambangan dan Energi
		aw Pengadaan kotak sampel				50.000.000	APBD	B. Aceh, A. Besar, Sabang, Pidie, Pidie Jaya	50.000.000	APBD	B. Meriah, A. Tengah, Lhokseumawe, A. Utara, Bireuen	Dinas Pertambangan dan Energi
		ax Sosia Sosialisasi dan Distribusi Sampel Bahan Galian Untuk Tingkat Pelajar di Prov.				100.000.000	APBD	B. Aceh, A. Besar,	100.000.000	APBD	B. Meriah, A.	Dinas Pertambangan dan Energi
		ay Save Suvey Biji Besi				300.000.000	APBD	Abdya, Nagan Raya, Aceh Jaya	300.000.000	APBD	A. Barat, A. Selatan, A. Tenggara	Dinas Pertambangan dan Energi
		y Biji Besi										
		az Survey Emas				300.000.000	APBD	Singkel, Simeulu, Abdya	300.000.000	APBD	A. Tengah, B. Meriah, Pidie	Dinas Pertambangan dan Energi
		ba Survey Timah				300.000.000	APBD	A. Besar, G. Lues, Subulussalam	300.000.000	APBD	A. Barat, A. Selatan, A. Tenggara	Dinas Pertambangan dan Energi
		bb Survey Galena				300.000.000	APBD	A. Barat, A. Selatan, A. Tenggara	300.000.000	APBD	A. Tengah, B. Meriah, Pidie	Dinas Pertambangan dan Energi
		bc Survey Biji Seng (Zink)				300.000.000	APBD	A. Tengah, B. Meriah, Pidie	300.000.000	APBD	A. Barat, A. Selatan, A. Tenggara	Dinas Pertambangan dan Energi
		bd Survey Tembaga				300.000.000	APBD	Abdya, Nagan Raya, Aceh Jaya	300.000.000	APBD	A. Barat, A. Selatan, A. Tenggara	Dinas Pertambangan dan Energi
		be Survey Nikel				300.000.000	APBD	Singkel, Simeulu, Ab dya	300.000.000	APBD	A. Tengah, B. Meriah, Pidie	Dinas Pertambangan dan Energi
		bf Survey Bauksit				300.000.000	APBD	A. Besar, G. Lues, Subulussalam	300.000.000	APBD	A. Barat, A. Selatan, A. Tenggara	Dinas Pertambangan dan Energi
		bg Survey Zircon				300.000.000	APBD	Nagan Raya, A. Barat, Abdya	300.000.000	APBD	A. Selatan, Singkel, A. Besar	Dinas Pertambangan dan Energi
		bh Survey Molibdenum				200.000.000	APBD	A. Tenggara, Tamiang	200.000.000	APBD	G. Lues, A. Tengah	Dinas Pertambangan dan Energi
		bi Survey Magnesit				200.000.000	APBD	A. Besar, Pidie	200.000.000	APBD	A. Barat, A. Jaya	Dinas Pertambangan dan Energi
		bj Survey Fosfat				200.000.000	APBD	A. Barat, A. Jaya	200.000.000	APBD	A. Besar, Pidie	Dinas Pertambangan dan Energi
		bk Survey Gamping				200.000.000	APBD	A. Utara, A. Besar	200.000.000	APBD	A. Jaya, A. Barat	Dinas Pertambangan dan Energi
		bl Survey Bentonit				200.000.000	APBD	Pidie, Nagan Raya	200.000.000	APBD	A. Utara, A. Besar	Dinas Pertambangan dan Energi
		bm Survey Kaolin				200.000.000	APBD	Sabang, A. Utara	200.000.000	APBD	A. Tenggara, A. Timur	Dinas Pertambangan dan Energi
		bn Survey Tras				200.000.000	APBD	A. Besar, A. Barat	200.000.000	APBD	Nagan Raya, Abdya	Dinas Pertambangan dan Energi
		bo Survey Dolomit				200.000.000	APBD	Tamiang, A. Utara	200.000.000	APBD	A. Tenggara, A. Timur	Dinas Pertambangan dan Energi
		bp Survey Batu Bara				200.000.000	APBD	A. Besar, A. Barat	200.000.000	APBD	Nagan Raya, Abdya	Dinas Pertambangan dan Energi
		7 Pengawasan dan penerbitan kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan										
		a Pengawasan penerbitan kegiatan Pertambangan Rakyat	48.565.000	APBD	10 kab/kota	55.000.000	APBD	A. Besar, Banda Aceh, A. Tengah, Bener Meriah, Bireuen, A. Tenggara, A. Singkil	70.000.000	APBD	A. Besar, Banda Aceh, A. Tengah, Bener Meriah, Bireuen, A. Tenggara, A. Singkil	Dinas Pertambangan dan Energi
		8 Pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan										
		a Pembangunan listrik pedesaan	938.470.000	APBD	Prov. NAD	1.200.000.000			1.400.000.000			Dinas Pertambangan dan Energi
		b Evaluasi, monitoring dan pelaporan ketenagalistrikan	86.630.000	APBD	10 kab/kota	140.000.000	APBD	21 kab/kota	170.000.000	APBD	21 kab/kota	Dinas Pertambangan dan Energi

**RENCANA KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI/KABUPATEN NANGGROE ACEH DARUSSALAM
TAHUN 2007 - 2009**

BIDANG	PROGRAM UTAMA	SUB BIDANG / KEGIATAN	2007			2008			2009			KETERANGAN
			NILAI (RUPIAH)	SUMBER PENDANAAN	LOKASI	NILAI (RUPIAH)	SUMBER PENDANAAN	LOKASI	NILAI (RUPIAH)	SUMBER PENDANAAN	LOKASI	
		c Penyusunan study kelayakan pengembangan/ pembangunan PLTMH	424.900.000	APBD	A. Tenggara, Nagan Raya, A.Jaya, A.Tengah, Bener Meriah	400.000.000	APBD	A. Timur, A.Tenggara, A. Tengah, G.Leues	500.000.000	APBD	A. Timur, A.Tenggara, A. Tengah, G.Leues	Dinas Pertambangan dan Energi
		d	298.500.000	APBN	A. Timur, A.Tengah, G.Leues	300.000.000	APBN	Nagan R., A.Barat,A.Tamiang	400.000.000	APBN	Nagan R., A.Barat,A.Tamiang	Dinas Pertambangan dan Energi
		e Koordinasi pengembangan ketenagalistrikan				85.000.000	APBD	21 kab/kota	90.000.000	APBD	21 kab/kota	Dinas Pertambangan dan Energi
		f Evaluasi, monitoring dan pelaporan ketenagalistrikan				165.000.000	APBD	21 kab/kota	170.000.000	APBD	21 kab/kota	Dinas Pertambangan dan Energi
		g Pembangunan PLTMH				9.500.000.000	APBD	A. Timur, A.Timur, G.Lues	14.000.000.000	APBD	A. Timur, A.Tenggara, G.Lues, Nagan R.	Dinas Pertambangan dan Energi
									9.000.000.000	APBN	A. Barat, A.Tamiang, A.Tengah	Dinas Pertambangan dan Energi
		h Pengadaan dan Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	1.435.000.000	APBN	Bener Meriah		APBN	Sinabang, A.Tenggara,A. Singkil, Bener M.G. Leues,A. Jaya,A. Besar, Nagan R.	15.750.000	APBN	Sinabang, A.Tenggara,A. Singkil, Bener M.G. Leues,A. Jaya,A. Besar, Nagan R.	Dinas Pertambangan dan Energi
		i Survey potensi Panas Bumi				1.600.000.000	APBD	A. Besar, Sabang	1.605.000.000	APBD	A. Tengah, A.Besar	Dinas Pertambangan dan Energi
		j Penyusunan Study Kelayakan Energi Pasang Surut, Lampuyang Pulau Aceh				2.950.000.000	APBD	A. Besar				Dinas Pertambangan dan Energi
		k Pengoboran Sumur Eksplorasi Panas Bumi, Jaboi				85.500.000.000	APBD	Sabang (3 lokasi)				Dinas Pertambangan dan Energi
		l Pilot Project Pengembangan Pemanfaatan Energi Bayu				1.600.000.000	APBD	Prov. NAD	1.600.000.000	APBD	Prov. NAD	Dinas Pertambangan dan Energi
		m Peningkatan pembangunan listrik pedesaan yang diarahkan terutama untuk ekstensifikasi dan intensifikasi bagi daerah yang belum berkembang (pembangkit skala kecil)				10.000.000.000		Gayo Lues, A.Tengah, A.Tenggara	10.000.000.000		A. Tenggara, B.Meriah, A.Jaya	Dinas Pertambangan dan Energi
		n Peningkatan SDM Bidang Ketenagalistrikan				150.000.000			150.000.000			Dinas Pertambangan dan Energi
		9 Pengembangan migas										
		a Advokasi Migas	558.648.000	APBD	NAD							Dinas Pertambangan dan Energi
		b Survey kebutuhan dan Penggunaan BBM di Prov. NAD	4.552.820.000	APBD	NAD							Dinas Pertambangan dan Energi
		c Studi kelayakan fasilitas bunker Minyak	505.990.000	APBD	Sabang							Dinas Pertambangan dan Energi
		d Pengembangan pemanfaatan kembali sumur tua minyak di kabupaten aceh Tamiang				2.185.000.000	APBD	A. Tamiang	2.200.000.000	APBD		Dinas Pertambangan dan Energi
		e Pengawasan pemanfaatan SDA Migas di Prov. NAD				78.000.000	APBD	A.Utara, A.Timur	80.000.000	APBD	A.Utara, A.Timur	Dinas Pertambangan dan Energi
		f Meningkatkan kegiatan eksplorasi dalam upaya mencari cadangan migas baru				5.000.000	APBD	Prov. NAD	5.000.000	APBD	Prov. NAD	Dinas Pertambangan dan Energi
		g Meningkatkan pengelolaan data dan informasi bidang eksplorasi dan eksploitasi migas				500.000.000	APBD	Prov. NAD	150.000.000	APBD	Prov. NAD	Dinas Pertambangan dan Energi
		h Pemantauan dan evaluasi Pelaksanaan Program Comodity Development bidang migas				350.000.000	APBD	Prov. NAD	350.000.000	APBD	Prov. NAD	Dinas Pertambangan dan Energi
		i Melakukan pemantauan, Pengawasan dan pengendalian dampak kenaikan harga jual				250.000.000	APBD	Prov. NAD	250.000.000	APBD	Prov. NAD	Dinas Pertambangan dan Energi
		j Peningkatan Pengawasan Pelaksanaan Kegiatan Hulu dan Hilir Migas				175.000.000	APBD	Prov. NAD	175.000.000	APBD	Prov. NAD	Dinas Pertambangan dan Energi
		k Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan bidang migas				150.000.000	APBD	Prov. NAD	150.000.000	APBD	Prov. NAD	Dinas Pertambangan dan Energi
		l Peningkatan SDM Bidang Migas				150.000.000	APBD	Prov. NAD	150.000.000	APBD	Prov. NAD	Dinas Pertambangan dan Energi
		E. Telekomunikasi										
		E.1. Pos										
		1 Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan										Dinas Perhubungan
		a Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan										Dinas Perhubungan
		1 Perencanaan Telekomunikasi Selular Prov. NAD	100.000.000									Dinas Perhubungan
		2 Perencanaan Sistem Informasi Manajemen Pembangunan Sektor Perhubungan Provinsi NAD.				2.449.320.000						Dinas Perhubungan
		b Sosialisasi Kebijakan di Bidang Perhubungan	370.129.000									Dinas Perhubungan
		2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Postal										Dinas Perhubungan
		a Pembangunan Sarana dan Prasarana Pos dan Telekomunikasi.										Dinas Perhubungan
		1 Pengadaan Handy Talkie	63.750.000									Dinas Perhubungan
		2 Biaya Program Handy Talkie	5.250.000									Dinas Perhubungan
		3 Pembangunan Sarana dan Prasarana Pos dan Telekomunikasi Stasiun Bergerak Monitoring Frekuensi Radio NAD.										Dinas Perhubungan
		- Pengadaan Stasiun Bergerak Monitoring Frekuensi Radio NAD	2.214.000.000									Dinas Perhubungan
		- Pengadaan Stasiun Bergerak Direction Finder Frekuensi Radio NAD	1.612.213.000									Dinas Perhubungan
		- Pengadaan Alat Pendukung Monitoring Frekuensi Radio	421.875.000									Dinas Perhubungan
		4 Pengadaan Fasilitas Radio Link Interkoneksi Sektor Perhubungan NAD				1.171.213.000						Dinas Perhubungan
		5 Pengadaan Alat/ Perangkat Telekomunikasi	571.938.000									Dinas Perhubungan
		6 Pengadaan Triangle Tower 40 Meter	192.500.000									Dinas Perhubungan
		7 Sosialisasi Kebijakan di Bidang Perhubungan	12.000.000									Dinas Perhubungan
		8 Pengadaan Peralatan Kerja	38.488.000									Dinas Perhubungan
		9 Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Dukungan Komunikasi Amatir Radio dan Peralatan Satgas Bankom RAPI										Dinas Perhubungan
		- Pengadaan Fasilitas Dukom Amatir Radio	154.740.000									Dinas Perhubungan
		- Pengadaan Fasilitas Jaringan Komunikasi Berbasis Masyarakat	386.850.000									Dinas Perhubungan
		- Pengadaan Triangle Tower 40 Meter	77.000.000									Dinas Perhubungan
		- Pengadaan box repeater	14.000.000									Dinas Perhubungan
		- Peralatan Satgas Bankom RAPI	49.150.000									Dinas Perhubungan
		10 Pengadaan dan Pemasangan Stasiun Tetap Monitoring Frekuensi Radio Provinsi NAD.				5.000.000.000						Dinas Perhubungan
		11 Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Penyaliran Radio Dinas Perhubungan Provinsi NAD				1.150.800.000						Dinas Perhubungan
		12 Pembangunan Gedung Monitoring Frekuensi Radio & Standarisasi Perhubungan Provinsi NAD.							400.000.000			Dinas Perhubungan
		13 Pengadaan Peralatan Standarisasi perangkat Telekomunikasi							1.000.000.000			Dinas Perhubungan
		14 Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Repeater Dukungan Komunikasi dan Bantuan Komunikasi Organisasi Komunikasi Radio Provinsi NAD.							1.680.000.000			Dinas Perhubungan
		15 Pembangunan Fasilitas Telekomunikasi Selular Provinsi NAD				28.571.429.000			28.571.429.000			Dinas Perhubungan

**RENCANA KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI/KABUPATEN NANGGROE ACEH DARUSSALAM
TAHUN 2007 - 2009**

BIDANG	PROGRAM UTAMA	SUB BIDANG / KEGIATAN	2007			2008			2009			KETERANGAN
			NILAI (RUPIAH)	SUMBER PENDANAAN	LOKASI	NILAI (RUPIAH)	SUMBER PENDANAAN	LOKASI	NILAI (RUPIAH)	SUMBER PENDANAAN	LOKASI	
	E.2. Telekomunikasi	1. Penyusunan data base pertanian TPH untuk perencanaan Teknis (17 Kab/kota)	1.000.000.000	APBD I	21 Kab/kota	1.100.000.000	APBD I	21 Kab/kota	1.200.000.000	APBD I	21 Kab/kota	Dinas Pertanian
		2. Penyusunan data base pertanian TPH untuk perencanaan Teknis (17 Kab/kota)	450.000.000	APBN	21 Kab/kota	495.000.000	APBN	21 Kab/kota	550.000.000	APBN	21 Kab/kota	Dinas Pertanian
		3. Penyelenggaraan Laboratorium	148.320.000	APBN	B. Aceh	163.152.000	APBN	B. Aceh	179.467.000	APBN	B. Aceh	Dinas Perkebunan
		4. Penyusunan/Pengumpulan/Pengolahan/Updating/Analisa Data dan Statistik	216.800.000	APBN	B. Aceh	216.800.000	APBN	B. Aceh	216.800.000	APBN	B. Aceh	Dinas Perkebunan
		5. Penyusunan Database potensi produksi pangan & perkebunan	79.070.000	APBD TK. I	Prov. NAD	86.997.000	sda	Prov. NAD	95.675.000	sda	Prov. NAD	Dinas Perkebunan
		6. Pelatihan dan Peningkatan Teknologi Tepat Guna (TIG)	904.835.000	APBD	21kab/ki	3.350.000.000	APBD	21kab/ki	1.080.000.000	APBD	21kab/ki	BPM
		7. Kearsyana Informasi dengan Masa Media	1.441.142.500	APBD	Prov. NAD	2.452.914.000	APBD	Prov. NAD	3.464.685.000	APBD	Prov. NAD	Setda
		8. Penyebarluasan informasi penyeleng garaan pemerintahan daerah	100.666.000	APBD	Prov. NAD	150.666.000	APBD	Prov. NAD	200.666.000	APBD	Prov. NAD	Setda
		9. Koordinasi pelaksanaan lintas sektor	92.250.000	APBD	Prov. NAD	92.250.000	APBD	Prov. NAD	92.250.000	APBD	Prov. NAD	Setda
		10. Koordinasi pembinaan pembangunan Kab/Kota	139.200.000	APBD	Prov. NAD	139.200.000	APBD	Prov. NAD	139.200.000	APBD	Prov. NAD	Setda
		11. Penyusunan Pelaporan data dana APBN	191.000.000	APBD	Prov. NAD	191.000.000	APBD	Prov. NAD	191.000.000	APBD	Prov. NAD	Setda
		12. Pelaporan dan evaluasi dana pembangunan kab/ kota	98.500.000	APBD	Prov. NAD	98.500.000	APBD	Prov. NAD	98.500.000	APBD	Prov. NAD	Setda
		13. Penyusunan Laporan pemantauan dan evaluasi keg. pembangunan provinsi	295.500.000	APBD	Prov. NAD	295.500.000	APBD	Prov. NAD	295.500.000	APBD	Prov. NAD	Setda
		14. Pembinaan dan pengendalian kegiatan Provinsi	220.500.000	APBD	Prov. NAD	220.500.000	APBD	Prov. NAD	220.500.000	APBD	Prov. NAD	Setda
		15. Koordinasi kegiatan berbantuan luar negeri	85.500.000	APBD	Prov. NAD	85.500.000	APBD	Prov. NAD	85.500.000	APBD	Prov. NAD	Setda
		16. Inventarisasi permasalahan kebutuhan sarana dan prasarana Publik di Kab/ Kota	104.000.000	APBD	Prov. NAD	104.000.000	APBD	Prov. NAD	104.000.000	APBD	Prov. NAD	Setda
		17. Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu										
		18. Pelatihan Tenaga Pengelola SIAK	150.000.000	APBD	Prov. NAD	165.000.000	APBD	Prov. NAD	165.000.000	APBD	Prov. NAD	Setda
		19. Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan	125.000.000	APBD	Prov. NAD	130.000.000	APBD	Prov. NAD	130.000.000	APBD	Prov. NAD	Setda
		20. Pembentukan dan Penataan Sistem Koneksi (Inter-Phase Tahap Awal) NIK	650.000.000	APBD	Prov. NAD	700.000.000	APBD	Prov. NAD	700.000.000	APBD	Prov. NAD	Setda
		21. Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan	200.000.000	APBD	Prov. NAD	225.000.000	APBD	Prov. NAD	225.000.000	APBD	Prov. NAD	Setda
		22. Pengolahan dalam Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan	50.000.000	APBD	Prov. NAD	50.000.000	APBD	Prov. NAD	50.000.000	APBD	Prov. NAD	Setda
		23. Penyediaan Informasi yang dapat diakses masyarakat	150.000.000	APBD	Prov. NAD	175.000.000	APBD	Prov. NAD	175.000.000	APBD	Prov. NAD	Setda
		24. Pengembangan data base kependudukan	150.000.000	APBD	Prov. NAD	175.000.000	APBD	Prov. NAD	175.000.000	APBD	Prov. NAD	Setda
		25. Penyusunan Kebijakan kependudukan	250.000.000	APBD	Prov. NAD							Setda
		26. Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil	200.000.000	APBD	Prov. NAD	220.000.000	APBD	Prov. NAD	240.000.000	APBD	Prov. NAD	Setda
		27. Sosialisasi kebijakan kependudukan							300.000.000	APBD	Prov. NAD	Setda
		28. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan penataan administrasi kependudukan				250.000.000	APBD	Prov. NAD	275.000.000	APBD	Prov. NAD	Setda
		29. Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi	1.541.597.500	APBD	Banda Aceh	1.772.837.000	APBD	Banda Aceh	2.038.762.000	APBD	Banda Aceh	BPDE
		a. Pengadaan Perangkat SIMDA										BPDE
		b. Pengembangan Aplikasi e-Government										BPDE
		c. Pemeliharaan perangkat sistem peringatan dini tsunami				300.000.000	APBD	Banda Aceh	300.000.000	APBD	Banda Aceh	BPDE
		30. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa	3.956.763.000	APBD	Banda Aceh	4.550.277.000	APBD	Banda Aceh	5.232.819.000	APBD	Banda Aceh	BPDE
		a. Monitoring dan evaluasi jaringan komunikasi dan informasi										BPDE
		b. Pengadaan Alat Jaringan Komunikasi										BPDE
		c. Penelitian dan Pengembangan IPTEK										BPDE
		d. Integrasi antar jaringan komunikasi				250.000.000	APBD	Banda Aceh	250.000.000	APBD	Banda Aceh	BPDE
		e. Pengelolaan jaringan komunikasi dan bandwidth pemda Aceh dan Kab/kota				5.000.000.000	APBD	Kabupaten/Kota	5.000.000.000	APBD	Kabupaten/Kota	BPDE
		31. Pengembangan Data dan Statistik	848.452.000	APBD	Banda Aceh	975.720.000	APBD	Banda Aceh	1.122.878.000	APBD	Banda Aceh	BPDE
		a. Pengelolaan Database SKPD dan Pengembangan Bank Data e-Government Pemda Aceh										BPDE
		b. Verifikasi, Perekaman, Backup Data e-Government dan Penyajian Informasi e-										BPDE
		c. Pengelolaan Website										BPDE
		d. Pengelolaan SMS Center Gub.										BPDE
		e. Pendataan Bencana Alam										BPDE
		32. Fasilitas Peningkatan Sumberdaya Manusia Bidang Komunikasi dan Informasi	554.213.000	APBD	Banda Aceh	637.345.000	APBD	Banda Aceh	732.947.000	APBD	Banda Aceh	BPDE
		a. Penerapan Sistem Informasi dan Teknologi Informasi										BPDE
		b. Evaluasi Sistem Informasi, Teknologi komunikasi dan Sumberdaya Manusia										BPDE
		33. Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.345.647.000	APBD	Banda Aceh	1.547.494.000	APBD	Banda Aceh	1.779.618.000	APBD	Banda Aceh	BPDE
		34. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	318.671.000	APBD	Banda Aceh	366.471.000	APBD	Banda Aceh	421.442.000	APBD	Banda Aceh	BPDE
		35. Peningkatan Disiplin Aparatur	69.750.000	APBD	Banda Aceh	80.212.500	APBD	Banda Aceh	92.244.000	APBD	Banda Aceh	BPDE
		36. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya										BPDE
		37. Non Program	2.147.515.000	APBD	Banda Aceh	2.469.642.000	APBD	Banda Aceh	2.840.088.000	APBD	Banda Aceh	BPDE
INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR		1.126.023.000		1.274.350.000		1.322.759.000				Dinas Sumber Daya Air		
	A. Irigasi											
		1. Belanja Tidak Langsung	14.160.000	APBD	Prov. NAD	15.576.000	APBD	Prov. NAD	17.134.000	APBD	Prov. NAD	Dinas Sumber Daya Air
		2. Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.100.000	APBD	Prov. NAD	3.401.000	APBD	Prov. NAD	3.752.000	APBD	Prov. NAD	Dinas Sumber Daya Air
		3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.156.000	APBD	Prov. NAD	1.272.000	APBD	Prov. NAD	1.399.000	APBD	Prov. NAD	Dinas Sumber Daya Air
		4. Peningkatan Disiplin Aparatur		APBD	Prov. NAD		APBD	Prov. NAD		APBD	Prov. NAD	Dinas Sumber Daya Air
		5. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	693.000	APBD	Prov. NAD	1.035.000	APBD	Prov. NAD	1.139.000	APBD	Prov. NAD	Dinas Sumber Daya Air
		6. Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya										Dinas Sumber Daya Air
		a. Pembangunan, Pemeliharaan dan Peningkatan Prasarana Irigasi - Rawa	66.383.000	APBD	Prov. NAD	110.326.000	APBD	Prov. NAD	138.763.000	APBD	Prov. NAD	Dinas Sumber Daya Air
			106.856.000	APBN	Prov. NAD	139.117.000	APBN	Prov. NAD	146.841.000	APBN	Prov. NAD	Dinas Sumber Daya Air
			242.612.000	BRR	Prov. NAD	219.136.000	BRR	Prov. NAD	195.800.000	BRR	Prov. NAD	Dinas Sumber Daya Air
		b. Penyusunan Draft Qanun Sumber Daya Air				100.000.000	APBD	Prov. NAD				Dinas Sumber Daya Air
		c. Sosialisasi Qanun Sumber Daya Air							100.000.000	APBD	Prov. NAD	Dinas Sumber Daya Air
		7. Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya										Dinas Sumber Daya Air
		a. Pembangunan Waduk dan Fasilitas Penunjang Pengelolaan Sumber Daya Air	21.861.000	APBD	Prov. NAD	34.507.000	APBD	Prov. NAD	44.860.000	APBD	Prov. NAD	Dinas Sumber Daya Air
			100.943.000	APBN	Prov. NAD	115.240.000	APBN	Prov. NAD	132.042.000	APBN	Prov. NAD	Dinas Sumber Daya Air
			26.850.000	BRR	Prov. NAD	16.800.000	BRR	Prov. NAD	17.750.000	BRR	Prov. NAD	Dinas Sumber Daya Air
		8. Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai										Dinas Sumber Daya Air
		a. Pembangunan Prasarana Pengendali Banjir dan Pengamanan Pantai	23.618.000	APBD	Prov. NAD	35.427.000	APBD	Prov. NAD	46.055.000	APBD	Prov. NAD	Dinas Sumber Daya Air
			119.009.000	APBN	Prov. NAD	166.476.000	APBN	Prov. NAD	175.651.000	APBN	Prov. NAD	Dinas Sumber Daya Air
			398.782.000	BRR	Prov. NAD	316.027.000	BRR	Prov. NAD	301.573.000	BRR	Prov. NAD	Dinas Sumber Daya Air
Air dan Sanitasi		6.013.178.000		10.815.149.000		12.062.422.000				Bappedalda, CO Sharing BRR		
	A. Air Bersih											
		1. Pelayanan Administrasi Perkantoran.	1.212.869.000			1.394.799.000			1.604.019.000			Bapedalda
		2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.	721.476.000			829.697.000			954.152.000			Bapedalda
		3. Peningkatan Disiplin Aparatur.	138.795.000			159.614.000			183.556.000			Bapedalda
		4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.										Bapedalda
		a. Pendidikan dan Pelatihan Formal.	295.629.800			339.974.000			390.970.000			Bapedalda
		b. Rapat Koordinasi Teknis (RAKOR/RS).	36.780.000			42.297.000			48.641.000			Bapedalda
		c. Pemasaran dan Penegakan Hukum Lingkungan	137.400.000			158.010.000			181.711.000			Bapedalda
		5. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan.										Bapedalda
		a. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan.	320.018.000			368.020.000			423.224.000			Bapedalda
		6. Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup.										Bapedalda
		a. Pemantauan Kualitas Lingkungan.	372.904.000			428.839.000			493.165.000			Bapedalda
		b. Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup.	159.000.000			182.850.000			210.277.000			Bapedalda

**RENCANA KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI/KABUPATEN NANGGROE ACEH DARUSSALAM
TAHUN 2007 - 2009**

BIDANG	PROGRAM UTAMA	SUB BIDANG / KEGIATAN	2007			2008			2009			KETERANGAN
			NILAI (RUPIAH)	SUMBER PENDANAAN	LOKASI	NILAI (RUPIAH)	SUMBER PENDANAAN	LOKASI	NILAI (RUPIAH)	SUMBER PENDANAAN	LOKASI	
		c Pengelolan B3 dan Limbah B3	121.278.900			139.470.000			160.391.000			Bapedalda
		d Pengkajian Dampak Lingkungan	844.114.600			970.731.000			1.116.341.000			Bapedalda
		e Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER)	63.269.000			72.759.000			83.673.000			Bapedalda
		f Bimbingan Teknis Pengawasan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	56.797.000			65.316.000			75.114.000			Bapedalda
		7 Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam.										Bapedalda
		a Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.	618.149.000			710.871.000			817.502.000			Bapedalda
		8 Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingk Hidup.										Bapedalda
		a Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan (Penyusunan Buku Status Lingkungan	143.835.000			165.410.000			190.221.000			Bapedalda
		b Penguatan Jejaring Informasi Pusat dan Daerah.	202.000.000			232.300.000			267.145.000			Bapedalda
		c Pekan Lingkungan Hidup Indonesia Dalam Rangka Hari Lingkungan Hidup.	296.960.000			341.504.000			392.729.000			Bapedalda
		d Pengembangan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Laboratorium Lingkungan Daerah.	271.902.700			312.688.000			359.591.000			Bapedalda
		e Penelitian Intensitas Penambahan Galian C Terhadap Tingkat Kerusakan Daerah Aliran				240.000.000			276.000.000			Bapedalda
		f Pengkajian Pemberian Pupuk Basat Terhadap Tingkat Kerusakan Ekosistem Lahan				320.000.000			368.000.000			Bapedalda
		g Penelitian Tingkat Kesesuaian Lahan Terhadap Pertumbuhan Tanaman Mangrove Di				285.000.000			327.750.000			Bapedalda
		h Kajian Tentang Sikap Dan Persepsi Masyarakat Terhadap Pelestarian Lingkungan.				210.000.000			241.500.000			Bapedalda
		i Kajian Tentang Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber-sumber Air				345.000.000			396.750.000			Bapedalda
		B. Persampahan										
		C. Sanitasi										
		1 Supervisi pelaksanaan kegiatan sektor air bersih dan air limbah NAD				500.000.000	BRR	NAD	500.000.000	BRR	NAD	BRR
		2 Water Supply and Environmental Sanitation modul development and training				2.000.000.000	BRR	NAD	2.000.000.000	BRR	NAD	BRR
		D. Drainase										
		E. Amdal										
		F. Air Limbah										
Fasilitas dan Bangunan Publik			10.001.730.300			23.810.538.300			50.303.376.500			Badan Ketahanan Pangan, Dinas Perkebunan, Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, BKPM, Dinas Kebudayaan, BPM, Dinas Peternakan
		A. Fasilitas dan Bangunan Publik										
		1 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	125.000.000	APBN, APBD	NAD	250.000.000	APBN, APBD	NAD	287.000.000	APBN, APBD	NAD	Badan Ketahanan Pangan
		2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	48.000.000	APBN, APBD	NAD	50.000.000	APBN, APBD	NAD	57.000.000	APBN, APBD	NAD	Badan Ketahanan Pangan
		3 Pembangunan Gedung Kantor	100.000.000	APBN, APBD	NAD	2.000.000.000	APBN, APBD	NAD	23.000.000.000	APBN, APBD	NAD	Badan Ketahanan Pangan
		4 Pengadaan Mobilier	37.000.000	APBN, APBD	NAD	400.000.000	APBN, APBD	NAD	460.000.000	APBN, APBD	NAD	Badan Ketahanan Pangan
		5 Pengadaan Perengkapan Gedung Kantor	149.180.000	APBD TK. I	B. Aceh	149.180.000	APBD TK. I	B. Aceh				Dinas Perkebunan
		6 Pengadaan Peralatan Kantor	93.442.000	APBD TK. I	B. Aceh	93.442.000	APBD TK. I	B. Aceh	93.442.000	APBD TK. I	B. Aceh	Dinas Perkebunan
		7 Pengadaan Mebeleur	15.500.000	APBD TK. I	B. Aceh	15.500.000	APBD TK. I	B. Aceh	15.500.000	APBD TK. I	B. Aceh	Dinas Perkebunan
		8 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	84.000.000	APBD TK. I	B. Aceh	92.400.000	APBD TK. I	B. Aceh	101.640.000	APBD TK. I	B. Aceh	Dinas Perkebunan
		9 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	43.500.000	APBD TK. I	B. Aceh	47.850.000	APBD TK. I	B. Aceh	52.635.000	APBD TK. I	B. Aceh	Dinas Perkebunan
		10 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perengkapan Gedung Kantor	17.625.000	APBD TK. I	B. Aceh	19.387.500	APBD TK. I	B. Aceh	21.326.000	APBD TK. I	B. Aceh	Dinas Perkebunan
		11 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	49.800.000	APBD TK. I	B. Aceh	54.780.000	APBD TK. I	B. Aceh	60.258.000	APBD TK. I	B. Aceh	Dinas Perkebunan
		12 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	9.325.000	APBD TK. I	B. Aceh	10.257.500	APBD TK. I	B. Aceh	11.283.000	APBD TK. I	B. Aceh	Dinas Perkebunan
		13 Pembangunan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Plus (7 unit)				200.000.000	APBD I		200.000.000	APBD I		Dinas Pertanian
		14 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	42.500.000	APBD	Prov. NAD	1.050.000.000	APBN	2 unit di 2 Kab	1.050.000.000	APBN	2 unit di 2 Kab	Dinas Pertanian
		15 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	156.550.000	APBD	Prov. NAD	203.515.000	APBD	Prov. NAD	264.569.000	APBD	Prov. NAD	Dinas Peternakan
		16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	107.300.000	APBD	Prov. NAD	139.490.000	APBD	Prov. NAD	181.337.000	APBD	Prov. NAD	Dinas Peternakan
		17 Rehabilitasi Sedang Gedung Kantor	180.750.000	APBD	Prov. NAD	234.975.000	APBD	Prov. NAD	305.467.000	APBD	Prov. NAD	Dinas Peternakan
		18 Rehabilitasi Sedang Kendaraan Dinas/Operasional	29.250.000	APBD	Prov. NAD	38.025.000	APBD	Prov. NAD	49.432.000	APBD	Prov. NAD	Dinas Peternakan
		19 Pembangunan Gedung Kantor	135.810.000	APBD	Prov. NAD							BPkMD
		20 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	271.538.000	APBD	Prov. NAD							BPkMD
		21 Pengadaan Meubeler	45.100.000	APBD	Prov. NAD							BPkMD
		22 Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor	151.500.000	APBD	Prov. NAD							BPkMD
		23 Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	29.400.000	APBD	Prov. NAD							BPkMD
		24 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	33.380.000	APBD	Prov. NAD							BPkMD
		25 Pemeliharaan rutin/berkala taman, tempat parkir dan halaman kantor	5.000.000	APBD	Prov. NAD							BPkMD
		26 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	13.625.000	APBD	Prov. NAD							BPkMD
		27 Penyediaan komponee inst. Air & telepon										BPkMD
		28 Penyediaan Sistem Pengamanan Kantor dan Alarm System										Dinas Kebudayaan
		29 Penyediaan alat tulis kantor	75.553.000	APBD	Prov. NAD	98.220.000	APBD	Prov. NAD	127.686.000	APBD	Prov. NAD	Dinas Kebudayaan
		30 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	79.379.000	APBD	Prov. NAD	103.192.700	APBD	Prov. NAD	134.150.000	APBD	Prov. NAD	Dinas Kebudayaan
		31 Penyediaan komponee instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	44.268.400	APBD	Prov. NAD	57.548.900	APBD	Prov. NAD	74.813.000	APBD	Prov. NAD	Dinas Kebudayaan
		32 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	70.000.000	APBD	Prov. NAD	91.000.000	APBD	Prov. NAD	118.300.000	APBD	Prov. NAD	Dinas Kebudayaan
		33 Penyediaan makan dan minuman	529.104.000	APBD	Prov. NAD	687.835.200	APBD	Prov. NAD	894.185.000	APBD	Prov. NAD	Dinas Kebudayaan
		34 Pengadaan bangunan Gedung Kantor	165.714.000	APBD	Prov. NAD	9.000.000.000	APBD	Prov. NAD	11.700.000.000	APBD	Prov. NAD	Dinas Kebudayaan
		35 Pengadaan perlengkapan gedung kantor	109.900.000	APBD	Prov. NAD	142.870.000	APBD	Prov. NAD	185.731.000	APBD	Prov. NAD	Dinas Kebudayaan
		36 Pengadaan peralatan gedung kantor	652.527.500	APBD	Prov. NAD	848.285.700	APBD	Prov. NAD	1.102.771.000	APBD	Prov. NAD	Dinas Kebudayaan
		37 Pengadaan meublier	275.000.000	APBD	Prov. NAD	357.500.000	APBD	Prov. NAD	464.750.000	APBD	Prov. NAD	Dinas Kebudayaan
		38 Pengadaan peralatan studio dan komunikasi	259.471.250	APBD	Prov. NAD	337.312.600	APBD	Prov. NAD	438.506.000	APBD	Prov. NAD	Dinas Kebudayaan
		39 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	469.870.000	APBD	Prov. NAD	610.831.000	APBD	Prov. NAD	794.080.000	APBD	Prov. NAD	Dinas Kebudayaan
		40 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	68.418.900	APBD	Prov. NAD	88.944.500	APBD	Prov. NAD	115.627.000	APBD	Prov. NAD	Dinas Kebudayaan
		41 Pemeliharaan rutin/berkala pereng kapang gedung kantor	888.840.000	APBD	Prov. NAD	1.155.492.000	APBD	Prov. NAD	1.502.139.000	APBD	Prov. NAD	Dinas Kebudayaan
		42 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	37.450.000	APBD	Prov. NAD	48.685.000	APBD	Prov. NAD	63.290.500	APBD	Prov. NAD	Dinas Kebudayaan
		43 Rehabilitasi ringan/sedang/berat gedung kantor	1.000.000.000	APBD	Prov. NAD	1.300.000.000	APBD	Prov. NAD	1.690.000.000	APBD	Prov. NAD	Dinas Kebudayaan
		44 Rehabilitasi ringan/sedang/berat instalasi air/telepon dan alarm system										Dinas Kebudayaan
		45 Penyediaan alat tulis kantor	50.264.750	APBD	Prov. NAD	60.317.700	APBD	Prov. NAD	72.381.000	APBD	Prov. NAD	BPM
		46 Penyediaan barang cetakan & penggandaan	14.410.000	APBD	Prov. NAD	17.292.000	APBD	Prov. NAD	20.750.000	APBD	Prov. NAD	BPM
		47 Penyediaan komponee instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	7.234.200	APBD	Prov. NAD	8.681.000	APBD	Prov. NAD	10.417.000	APBD	Prov. NAD	BPM
		48 Penyediaan peralatan rumah tangga	1.272.825.000	APBD	Prov. NAD	1.527.390.000	APBD	Prov. NAD	1.832.868.000	APBD	Prov. NAD	BPM
		49 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan	9.118.000	APBD	Prov. NAD	10.941.600	APBD	Prov. NAD	13.129.000	APBD	Prov. NAD	BPM
		50 Penyediaan makanan dan minuman	223.850.000	APBD	Prov. NAD	268.620.000	APBD	Prov. NAD	322.344.000	APBD	Prov. NAD	BPM
		51 Pembangunan Gedung Kantor	903.620.000	APBD	Prov. NAD	1.084.344.000	APBD	Prov. NAD	1.301.212.000	APBD	Prov. NAD	BPM
		52 Kendaraan Dinas/Operasional										
		53 Penyediaan Administrasi Keuangan	21.630.000	APBD	Prov. NAD	28.119.000	APBD	Prov. NAD	36.554.000	APBD	Prov. NAD	Dinas Peternakan
		54 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	82.748.000	APBD	Prov. NAD	120.572.400	APBD	Prov. NAD	156.744.000	APBD	Prov. NAD	Dinas Peternakan
		55 Penyediaan Alat Tulis Kantor	78.241.100	APBD	Prov. NAD	101.713.400	APBD	Prov. NAD	132.227.000	APBD	Prov. NAD	Dinas Peternakan

**RENCANA KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI/KABUPATEN NANGGROE ACEH DARUSSALAM
TAHUN 2007 - 2009**

BIDANG	PROGRAM UTAMA	SUB BIDANG / KEGIATAN	2007			2008			2009			KETERANGAN
			NILAI (RUPIAH)	SUMBER PENDANAAN	LOKASI	NILAI (RUPIAH)	SUMBER PENDANAAN	LOKASI	NILAI (RUPIAH)	SUMBER PENDANAAN	LOKASI	
SOSIAL KEMASYARAKATAN		56. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	19.165.250	APBD	Prov. NAD	24.914.800	APBD	Prov. NAD	32.389.000	APBD	Prov. NAD	Dinas Peternakan
		57. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor	9.083.850	APBD	Prov. NAD	11.809.000	APBD	Prov. NAD	15.351.000	APBD	Prov. NAD	Dinas Peternakan
		58. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	200.156.000	APBD	Prov. NAD	260.202.800	APBD	Prov. NAD	338.263.000	APBD	Prov. NAD	Dinas Peternakan
		59. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.120.000	APBD	Prov. NAD	11.856.000	APBD	Prov. NAD	15.412.000	APBD	Prov. NAD	Dinas Peternakan
		60. Penyediaan Makanan dan Minuman	186.150.000	APBD	Prov. NAD	241.995.000	APBD	Prov. NAD	314.593.000	APBD	Prov. NAD	Dinas Peternakan
		61. Penyediaan Alat Tulis	39.183.100									BPKMD
		62. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	23.670.000									BPKMD
		63. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5.625.000									BPKMD
		64. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	27.000.000									BPKMD
		65. Penyediaan makanan dan minuman	109.065.000									BPKMD
		B. Infrastructure Maintenance										
		C. IREP										
PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN			1.072.518.034.200			1.249.569.384.000			1.433.298.320.500			Dinas Perkebunan Dinas Pertanian, Dinas Kebudayaan, Serdas, Dinas Pendidikan, BPK RSUZA
		A. PENDIDIKAN	573.309.636.100			668.583.851.100			768.931.006.400			
		1. Pendidikan dan Pelatihan Teknis	170.897.000	APBN	B. Aceh	187.908.700	APBN	B. Aceh	206.785.000	APBN	B. Aceh	Dinas Perkebunan
		2. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional	50.000.000	APBN	B. Aceh	55.000.000	APBN	B. Aceh	60.500.000	APBN	B. Aceh	Dinas Perkebunan
		3. Pendidikan dan Pelatihan Teknis (SL-PHT KAB. PIDIE)	43.819.000	APBN	Pidie	48.200.900	APBN	A. Tengah				Dinas Perkebunan
		4. Pelatihan petani 4 sebagai ahli PHT untuk pelaku agribisnis pola SL (2500 Kls)	580.000.000	APBD I	18 Kab/kota	650.000.000	APBD I	18 Kab/kota	700.000.000	APBD I	18 Kab/kota	Dinas Pertanian
			520.000.000	APBN	18 Kab/kota	575.000.000	APBN	18 Kab/kota	650.000.000	APBN	18 Kab/kota	Dinas Pertanian
			118.000.000	APBD	18 Kab/kota	130.000.000	APBD I	18 Kab/kota	250.000.000	APBD I	5 Kab/kota	Dinas Pertanian
		5. Penyuluhan dan bimbingan pemamfaatan lahan tidur pola SL (1000 kls/keompok)	50.000.000	APBN	5 Kab/kota	50.000.000	APBN	18 Kab/kota	100.000.000	APBN	Kab/kota	Dinas Pertanian
		6. Penguatan sistim Informasi Pertanian (pada 17 Kab/kota)										Dinas Pertanian
		a. Pusat pelayanan Informasi pertanian (20 Unit)				2.000.000.000	APBD I	20 Kab/kota	2.200.000.000	APBD I	20 Kab/kota	Dinas Pertanian
		b. Diklat penyuluh (368 Org. 31 Org/Kls) lima kali							675.000.000	APBD I	BDP Saree	Dinas Pertanian
			70.000.000	APBN	BDP Saree	75.000.000	APBN	BDP Saree	225.000.000	APBN	BDP Saree	Dinas Pertanian
		c. Diklat petugas PHP (20 Kls)				150.000.000	APBD	Prov. NAD	150.000.000	APBD	Prov. NAD	Dinas Pertanian
			60.000.000	APBN	NAD	65.000.000	APBN	NAD	75.000.000	APBN	NAD	Dinas Pertanian
		d. Diklat petugas PPL (60 Kls)				450.000.000	APBD	Prov. NAD	450.000.000	APBD	Prov. NAD	Dinas Pertanian
			180.000.000	APBN	NAD	195.000.000	APBN	NAD	225.000.000	APBN	NAD	Dinas Pertanian
		e. Diklat petugas Benih (10 Kls)							100.000.000	APBD	Prov. NAD	Dinas Pertanian
			65.000.000	APBN	NAD	75.000.000	APBN	NAD	85.000.000	APBN	NAD	Dinas Pertanian
		f. Diklat pelaku Agribisnis (109 Kls)				600.000.000	APBD I	BDP saree/17 Kab	650.000.000	APBD I	BDP saree/17 Kab	Dinas Pertanian
			585.000.000	APBN	BDP saree/17 Kab	650.000.000	APBN	BDP saree/17 Kab	700.000.000	APBN	BDP saree/17 Kab	Dinas Pertanian
		g. Magang Petugas dan Petani Sebanyak 50 angkatan	200.000.000	APBN	BDP Saree							Dinas Pertanian
		7. Pendidikan dan Pelatihan Formal, bimbingan teknis, sosialisasi dan lain-lain	131.716.000	APBD	Prov. NAD	171.231.000	APBD	Prov. NAD	222.600.000	APBD	Prov. NAD	Dinas Kependidikan
		8. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembangunan Pendidikan	264.280.000	APBD	Prov. NAD	290.708.000	APBD	Prov. NAD	319.778.800	APBD	Prov. NAD	Serdas
		9. Sosialisasi Kebijakan Pendidikan Provinsi NAD	226.625.000	APBD	Prov. NAD	249.287.500	APBD	Prov. NAD	274.216.000	APBD	Prov. NAD	Serdas
		10. Penyediaan Meubeleur Perpustakaan				502.796.000	APBD	Prov. NAD				Dinas Pendidikan
		11. Jasa Administrasi dan Keuangan				137.062.500	APBD	Prov. NAD				Dinas Pendidikan
		12. Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.197.084.000	APBD	Kab/Kota	3.676.647.000	APBD	Kab/Kota	4.228.144.000	APBD	Kab/Kota	Dinas Pendidikan
		13. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	4.275.680.000	APBD	Kab/Kota	4.917.032.000	APBD	Kab/Kota	5.654.586.000	APBD	Kab/Kota	Dinas Pendidikan
		14. Peningkatan disiplin aparatur	273.700.000	APBD	Kab/Kota	314.755.000	APBD	Kab/Kota	361.968.000	APBD	Kab/Kota	Dinas Pendidikan
		15. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur										Dinas Pendidikan
		a. Bimtek implementasi peraturan perundang undangan	247.107.600	APBD	Kab/Kota	284.173.000	APBD	Kab/Kota	326.799.000	APBD	Kab/Kota	Dinas Pendidikan
		17. Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)										Dinas Pendidikan
		a. Pengadaan Alat-alat Praktek dan peraga siswa	1.200.000.000	APBD	Kab/Kota	1.380.000.000	APBD	Kab/Kota	1.587.000.000	APBD	Kab/Kota	Dinas Pendidikan
		b. Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar dan Model Pembelajaran PAUD	908.109.000	APBD	Kab/Kota	1.044.325.000	APBD	Kab/Kota	1.200.974.000	APBD	Kab/Kota	Dinas Pendidikan
		c. Penyelenggaraan Pendidikan Anak Dini Usia	561.869.000	APBD	Kab/Kota	546.149.000	APBD	Kab/Kota	743.071.000	APBD	Kab/Kota	Dinas Pendidikan
		d. Pembangunan gedung Sekolah	3.703.630.000	APBD	Kab/Kota	4.259.174.500	APBD	Kab/Kota	4.898.050.000	APBD	Kab/Kota	Dinas Pendidikan
		e. Administrasi Kegiatan	78.642.000	APBN	Kab/Kota	90.438.300	APBN	Kab/Kota	104.004.000	APBN	Kab/Kota	Dinas Pendidikan
		f. Sosialisasi Program PAUD	302.204.000	APBN	Kab/Kota	347.534.600	APBN	Kab/Kota	399.664.000	APBN	Kab/Kota	Dinas Pendidikan
		g. Peningkatan Mutu Pendidikan TK	4.410.000.000	APBN	Kab/Kota	5.071.500.000	APBN	Kab/Kota	5.832.225.000	APBN	Kab/Kota	Dinas Pendidikan
		h. Peningkatan Kreativitas Anak dan Guru TK	308.196.000	APBN	Kab/Kota	354.425.400	APBN	Kab/Kota	407.589.000	APBN	Kab/Kota	Dinas Pendidikan
		i. Monitoring dan Evaluasi	118.958.000	APBN	Kab/Kota	136.801.700	APBN	Kab/Kota	157.321.000	APBN	Kab/Kota	Dinas Pendidikan
		j. Penyediaan Acuan Pedoman Program PAUD	294.000.000	APBN	Kab/Kota	338.100.000	APBN	Kab/Kota	388.815.000	APBN	Kab/Kota	Dinas Pendidikan
		k. Pelaksanaan Proses Pengadaan	12.570.000	APBN	Kab/Kota	14.455.500	APBN	Kab/Kota	16.623.000	APBN	Kab/Kota	Dinas Pendidikan
		l. Penyebarluasan Program PAUD Non Formal di Masyarakat	254.240.000	APBN	Kab/Kota	292.376.000	APBN	Kab/Kota	336.232.400	APBN	Kab/Kota	Dinas Pendidikan
		m. Penyediaan Dana Bantuan Risetan Pengembangan Program PAUD	3.963.500.000	APBN	Kab/Kota	4.581.025.000	APBN	Kab/Kota	5.268.178.700	APBN	Kab/Kota	Dinas Pendidikan
		18. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun										Dinas Pendidikan
		a. Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah Dasar	1.000.000.000	APBD	Kab/Kota	1.150.000.000	APBD	Kab/Kota	1.322.500.000	APBD	Kab/Kota	Dinas Pendidikan
		b. Pembinaan Bakat dan Minat Kreatifitas Siswa	1.700.000.000	APBD	Kab/Kota	1.955.000.000	APBD	Kab/Kota	2.248.250.000	APBD	Kab/Kota	Dinas Pendidikan
		c. Pelatihan Tenaga Kompetensi Pendididk(SMP)	500.000.000	APBD	Kab/Kota	575.000.000	APBD	Kab/Kota	661.250.000	APBD	Kab/Kota	Dinas Pendidikan
		d. Pelatihan penyusunan kurikulum	1.884.000.000	APBD	Kab/Kota	2.166.600.000	APBD	Kab/Kota	2.491.500.000	APBD	Kab/Kota	Dinas Pendidikan
		e. Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa SD	5.000.000.000	APBD	Kab/Kota	5.750.000.000	APBD	Kab/Kota	6.612.500.000	APBD	Kab/Kota	Dinas Pendidikan
		f. Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa SLTP	6.000.000.000	APBD	Kab/Kota	6.900.000.000	APBD	Kab/Kota	7.935.000.000	APBD	Kab/Kota	Dinas Pendidikan
		g. Penyebarluasan dan Sosialisasi berbagai informasi Pendidikan Dasar	540.106.800	APBD	Kab/Kota	621.122.800	APBD	Kab/Kota	714.291.000	APBD	Kab/Kota	Dinas Pendidikan
		h. Pemantahan Ruang kelas sekolah	2.181.200.000	APBD	Kab/Kota	2.508.380.000	APBN	Kab/Kota	2.884.637.000	APBD	Kab/Kota	Dinas Pendidikan
		i. Pembangunan ruang serba guna/aula (SMP percontohan)	4.400.000.000	APBD	Kab/Kota	5.060.000.000	APBD	Kab/Kota	5.819.000.000	APBD	Kab/Kota	Dinas Pendidikan
		j. Penyediaan buku pelajaran untuk SD/MI/SDLB dan SMP/MTs (SD)	7.000.000.000	APBD	Kab/Kota	8.050.000.000	APBD	Kab/Kota	9.257.500.000	APBD	Kab/Kota	Dinas Pendidikan
		k. Penyediaan buku pelajaran untuk SD/MI/SDLB dan SMP/MTs (SMP)	3.400.000.000	APBD	Kab/Kota	3.910.000.000	APBD	Kab/Kota	4.496.500.000	APBD	Kab/Kota	Dinas Pendidikan
		l. Pengembangan Materi Belajar Mengajar dengan menggunakan teknologi dan Informasi	264.297.200	APBD	Kab/Kota	303.941.000	APBD	Kab/Kota	349.533.000	APBD	Kab/Kota	Dinas Pendidikan
		m. Penyediaan Dana Pengembangan Sekolah untuk SD/MI/ dan SMP/MTs	744.514.000	APBD	Kab/Kota	856.191.000	APBD	Kab/Kota	984.619.000	APBD	Kab/Kota	Dinas Pendidikan
		n. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan	141.160.000	APBN	Kab/Kota	162.334.000	APBN	Kab/Kota	186.684.000	APBN	Kab/Kota	Dinas Pendidikan
		o. Penyaluran Bantuan Beasiswa bagi siswa PK dan PLK	778.800.000	APBN	Kab/Kota	895.620.000	APBN	Kab/Kota	1.029.963.000	APBN	Kab/Kota	Dinas Pendidikan
		p. Penyediaan peralatan belajar yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan lokal	1.938.654.000	APBN	Kab/Kota	2.229.452.000	APBN	Kab/Kota	2.563.869.000	APBN	Kab/Kota	Dinas Pendidikan
		q. Sinkronisasi dan Koordinasi Program Kerja	135.300.000	APBN	Kab/Kota	155.595.000	APBN	Kab/Kota	178.934.000	APBN	Kab/Kota	Dinas Pendidikan
		r. Peningkatan Manajemen Pelayanan Pendidikan	58.810.000	APBN	Kab/Kota	67.631.000	APBN	Kab/Kota	77.776.000	APBN	Kab/Kota	Dinas Pendidikan
		s. Pengawasan dan Supervisi Kegiatan	81.666.000	APBN	Kab/Kota	93.915.000	APBN	Kab/Kota	108.003.000	APBN	Kab/Kota	Dinas Pendidikan
		t. Administrasi Kegiatan Dikdas	108.642.000	APBN	Kab/Kota	124.938.300	APBN	Kab/Kota	143.679.000	APBN	Kab/Kota	Dinas Pendidikan
		u. Sosialisasi Program Dikdas 9 Tahun	108.642.000	APBN	Kab/Kota	124.938.300	APBN	Kab/Kota	143.679.000	APBN	Kab/Kota	Dinas Pendidikan
		v. Peningkatan Akses dan mutu pendidikan SD	19.575.400.000	APBN	Kab/Kota	22.511.710.000	APBN	Kab/Kota	25.888.466.500	APBN	Kab/Kota	Dinas Pendidikan

**RENCANA KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI/KABUPATEN NANGROE ACEH DARUSSALAM
TAHUN 2007 - 2009**

BIDANG	PROGRAM UTAMA	SUB BIDANG / KEGIATAN	2007			2008			2009			KETERANGAN
			NILAI (RUPIAH)	SUMBER PENDANAAN	LOKASI	NILAI (RUPIAH)	SUMBER PENDANAAN	LOKASI	NILAI (RUPIAH)	SUMBER PENDANAAN	LOKASI	
		w Penyelenggaraan Pendidikan Tingkat SD	2.279.710.000	APBN	Kab/Kota	2.621.666.500	APBN	Kab/Kota	3.014.916.000	APBN	Kab/Kota	Dinas Pendidikan
		x Monitoring dan Evaluasi Dikdas	160.087.000	APBN	Kab/Kota	184.100.000	APBN	Kab/Kota	21.171.500	APBN	Kab/Kota	Dinas Pendidikan
		y Administrasi Umum SMP	519.546.000	APBN	Kab/Kota	597.477.900	APBN	Kab/Kota	687.099.500	APBN	Kab/Kota	Dinas Pendidikan
		z Penyusunan Rencana dan Program Di Daerah Tingkat SMP	354.750.000	APBN	Kab/Kota	407.962.500	APBN	Kab/Kota	469.156.000	APBN	Kab/Kota	Dinas Pendidikan
			3.128.465.000	APBN	Kab/Kota	3.597.734.700	APBN	Kab/Kota	4.137.394.000	APBN	Kab/Kota	Dinas Pendidikan
		aa Evaluasi Program Penyelenggara Program Dekonsentrasi	40.606.650.000	APBN	Kab/Kota	46.697.647.500	APBN	Kab/Kota	53.702.294.000	APBN	Kab/Kota	Dinas Pendidikan
		ab Pengembangan Kelembagaan	433.090.000	APBN	Kab/Kota	498.053.500	APBN	Kab/Kota	572.761.000	APBN	Kab/Kota	Dinas Pendidikan
		ac Kebutuhan Rutin BOS	2.942.499.000	APBN	Kab/Kota	3.383.873.800	APBN	Kab/Kota	3.891.454.000	APBN	Kab/Kota	Dinas Pendidikan
		ad Pelatihan Tim Kabupaten/Kota	177.640.000	APBN	Kab/Kota	204.288.000	APBN	Kab/Kota	234.928.000	APBN	Kab/Kota	Dinas Pendidikan
		ae Rapat dan Koordinasi Pusat dan Kab/Kota	401.999.000	APBN	Kab/Kota	462.298.800	APBN	Kab/Kota	531.643.000	APBN	Kab/Kota	Dinas Pendidikan
		af Sosialisasi Kepada Stakeholder Provinsi	3.044.840.000	APBN	Kab/Kota	3.501.566.000	APBN	Kab/Kota	4.026.800.000	APBN	Kab/Kota	Dinas Pendidikan
		ag Dana BOS	542.884.000	APBN	Kab/Kota	624.316.600	APBN	Kab/Kota	717.964.000	APBN	Kab/Kota	Dinas Pendidikan
		ah Work Shop dan Evaluasi	208.781.758.000	APBN	Kab/Kota	240.099.021.700	APBN	Kab/Kota	276.113.874.000	APBN	Kab/Kota	Dinas Pendidikan
		ai Supervisi Tingkat Kab/Kota	704.588.000	APBN	Kab/Kota	810.276.200	APBN	Kab/Kota	931.817.000	APBN	Kab/Kota	Dinas Pendidikan
		aj Cetak Modul Paket A dan Paket B	562.711.000	APBN	Kab/Kota	647.117.600	APBN	Kab/Kota	744.185.000	APBN	Kab/Kota	Dinas Pendidikan
		ak Bantuan Paket A dan Paket B Pendidikan Kesetaraan	1.025.640.000	APBN	Kab/Kota	1.179.486.000	APBN	Kab/Kota	1.356.408.900	APBN	Kab/Kota	Dinas Pendidikan
		al Perencanaan Program subsidi guru	15.008.600.000	APBN	Kab/Kota	17.259.890.000	APBN	Kab/Kota	19.848.873.500	APBN	Kab/Kota	Dinas Pendidikan
		am Pemberian Subsidi guru	1.058.760.000	APBN	Kab/Kota	1.217.574.000	APBN	Kab/Kota	1.400.210.100	APBN	Kab/Kota	Dinas Pendidikan
		an Pemantuan Penyaluran Subsidi Guru	12.918.674.000	APBN	Kab/Kota	14.856.475.100	APBN	Kab/Kota	17.084.946.000	APBN	Kab/Kota	Dinas Pendidikan
		ao Pelaksanaan Dana Kegiatan	284.848.000	APBN	Kab/Kota	327.575.200	APBN	Kab/Kota	376.711.000	APBN	Kab/Kota	Dinas Pendidikan
		ap Peningkatan Kualifikasi Guru	113.380.000	APBN	Kab/Kota	130.387.000	APBN	Kab/Kota	149.945.000	APBN	Kab/Kota	Dinas Pendidikan
		19 Program Pendidikan Menengah	6.876.000.000	APBN	Kab/Kota	7.907.400.000	APBN	Kab/Kota	9.093.510.000	APBN	Kab/Kota	Dinas Pendidikan
		a Pembangunan Gedung Sekolah (SMA)	16.000.000.000	APBD	Kab/Kota	18.400.000.000	APBD	Kab/Kota	21.160.000.000	APBD	Kab/Kota	Dinas Pendidikan
		b Pengadaan Alat Peraga/Praktek Siswa(sma)	1.800.000.000	APBD	Kab/Kota	2.070.000.000	APBD	Kab/Kota	2.380.500.000	APBD	Kab/Kota	Dinas Pendidikan
		c Pengadaan Alat Peraga/Praktek Siswa(sm)	3.600.000.000	APBD	Kab/Kota	4.140.000.000	APBD	Kab/Kota	4.761.000.000	APBD	Kab/Kota	Dinas Pendidikan
		d Pengadaan Alat Peraga/Praktek Siswa(teknmdk)	800.000.000	APBD	Kab/Kota	920.000.000	APBD	Kab/Kota	1.058.000.000	APBD	Kab/Kota	Dinas Pendidikan
		e Pengadaan Buku dan alat tulis siswa(sma)	1.200.000.000	APBD	Kab/Kota	1.380.000.000	APBD	Kab/Kota	1.587.000.000	APBD	Kab/Kota	Dinas Pendidikan
		f Pengadaan Buku dan alat tulis siswa(sm)	2.100.000.000	APBD	Kab/Kota	2.415.000.000	APBD	Kab/Kota	2.777.250.000	APBD	Kab/Kota	Dinas Pendidikan
		g Penyelbarlusan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah	1.500.000.000	APBD	Kab/Kota	1.725.000.000	APBD	Kab/Kota	1.983.750.000	APBD	Kab/Kota	Dinas Pendidikan
		h Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik	2.890.174.000	APBD	Kab/Kota	3.323.700.100	APBD	Kab/Kota	3.822.255.000	APBD	Kab/Kota	Dinas Pendidikan
		i Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah Menengah	566.974.800	APBD	Kab/Kota	652.021.000	APBD	Kab/Kota	749.824.000	APBD	Kab/Kota	Dinas Pendidikan
		j Monitoring dan Evaluasi Pelaporan	257.110.000	APBD	Kab/Kota	295.676.500	APBD	Kab/Kota	340.027.000	APBD	Kab/Kota	Dinas Pendidikan
		k Pengembangan Materi Balajar Mengajar dengan menggunakan teknologi Informasi dan	2.698.774.000	APBD	Kab/Kota	3.103.590.100	APBD	Kab/Kota	3.569.128.000	APBD	Kab/Kota	Dinas Pendidikan
		l Penyediaan bantuan Operasional manajemen mutu (BOMNSMA)	2.650.000.000	APBD	Kab/Kota	3.047.500.000	APBD	Kab/Kota	3.504.625.000	APBD	Kab/Kota	Dinas Pendidikan
		m Penyediaan bantuan Operasional manajemen mutu (BOMNSM)	500.000.000	APBD	Kab/Kota	575.000.000	APBD	Kab/Kota	661.250.000	APBD	Kab/Kota	Dinas Pendidikan
		n Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajemen sekolah (MBS)	239.112.000	APBD	Kab/Kota	274.978.800	APBD	Kab/Kota	316.225.000	APBD	Kab/Kota	Dinas Pendidikan
		o Pengembangan Materi Balajar Mengajar dengan menggunakan teknologi Informasi dan	1.200.000.000	APBD	Kab/Kota	1.380.000.000	APBD	Kab/Kota	1.587.000.000	APBD	Kab/Kota	Dinas Pendidikan
		p Pengembangan Alternatif layanan pendidikan menengah untuk daerah - daerah terpencil, pedesaan dan kepulauan	3.759.422.000	APBD	Kab/Kota	4.323.335.300	APBD	Kab/Kota	4.971.835.000	APBD	Kab/Kota	Dinas Pendidikan
		q Pembinaan forum masyarakat peduli pendidikan	1.217.070.000	APBD	Kab/Kota	1.399.633.000	APBD	Kab/Kota	1.609.575.000	APBD	Kab/Kota	Dinas Pendidikan
		r Pelaksanaan Administrasi Kegiatan SMA	82.220.000	APBN	Kab/Kota	94.553.000	APBN	Kab/Kota	108.735.000	APBN	Kab/Kota	Dinas Pendidikan
		s Sosialisasi dan koordinasi Program SMA	1.327.368.000	APBN	Kab/Kota	1.526.473.200	APBN	Kab/Kota	1.755.444.000	APBN	Kab/Kota	Dinas Pendidikan
		t Pelaksanaan Olimpiade Sains Tingkat Kab/kota dan Provinsi	361.100.000	APBN	Kab/Kota	415.265.000	APBN	Kab/Kota	477.554.000	APBN	Kab/Kota	Dinas Pendidikan
		u Penyaluran Beasiswa untuk siswa SMA	8.956.740.000	APBN	Kab/Kota	10.300.251.000	APBN	Kab/Kota	11.845.288.000	APBN	Kab/Kota	Dinas Pendidikan
		Urutan Urut Black Grant Imbal Swadaya	27.140.000.000	APBN	Kab/Kota	31.211.000.000	APBN	Kab/Kota	35.892.450.000	APBN	Kab/Kota	Dinas Pendidikan
		w Terselebangannya POP SMA tingkat Provinsi dan Kab/Kota	643.110.000	APBN	Kab/Kota	735.576.500	APBN	Kab/Kota	850.512.000	APBN	Kab/Kota	Dinas Pendidikan
		x Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi SMA	239.550.000	APBN	Kab/Kota	275.482.500	APBN	Kab/Kota	316.804.000	APBN	Kab/Kota	Dinas Pendidikan
		y Administrasi Kegiatan SMK	119.730.000	APBN	Kab/Kota	137.689.500	APBN	Kab/Kota	158.342.000	APBN	Kab/Kota	Dinas Pendidikan
		z Penyusunan Program dan Rencana Kegiatan Teknis	78.000.000	APBN	Kab/Kota	89.700.000	APBN	Kab/Kota	101.155.000	APBN	Kab/Kota	Dinas Pendidikan
		aa Penyuluhan dan Penyebarluasan Informasi	665.490.000	APBN	Kab/Kota	190.313.500	APBN	Kab/Kota	218.860.000	APBN	Kab/Kota	Dinas Pendidikan
		ab Pemberian Subsidi SMK	3.925.850.000	APBN	Kab/Kota	4.514.727.500	APBN	Kab/Kota	5.191.936.000	APBN	Kab/Kota	Dinas Pendidikan
		ac Pengembangan Kelembagaan	702.250.000	APBN	Kab/Kota	807.587.500	APBN	Kab/Kota	928.725.000	APBN	Kab/Kota	Dinas Pendidikan
		ad Pemantuan dan Evaluasi SMK	117.600.000	APBN	Kab/Kota	135.240.000	APBN	Kab/Kota	155.526.000	APBN	Kab/Kota	Dinas Pendidikan
		20 Program Pendidikan Non Formal										Dinas Pendidikan
		a Pemberdayaan tenaga kependidikan non-formal	3.000.000.000	APBD	Kab/Kota	3.450.000.000	APBD	Kab/Kota	3.967.500.000	APBD	Kab/Kota	Dinas Pendidikan
		b Pengembangan Pendidikan keaksaraan	457.714.000	APBD	Kab/Kota	526.371.100	APBD	Kab/Kota	605.326.000	APBD	Kab/Kota	Dinas Pendidikan
		c Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup	925.700.000	APBD	Kab/Kota	1.064.555.000	APBD	Kab/Kota	1.224.238.000	APBD	Kab/Kota	Dinas Pendidikan
		d Penyediaan sarana dan Prasarana Pendidikan Non Formal	2.944.999.000	APBD	Kab/Kota	3.386.748.000	APBD	Kab/Kota	3.894.761.000	APBD	Kab/Kota	Dinas Pendidikan
		e Pengembangan Kurikulum, bahan ajar dan model pendidikan non formal	797.796.000	APBD	Kab/Kota	917.465.400	APBD	Kab/Kota	1.055.085.000	APBD	Kab/Kota	Dinas Pendidikan
		f Publikasi dan sosialisasi Pendidikan Non Formal	132.736.000	APBD	Kab/Kota	152.648.400	APBD	Kab/Kota	175.543.000	APBD	Kab/Kota	Dinas Pendidikan
		g Pemberian bantuan operasional pendidikan non formal	6.918.306.800	APBD	Kab/Kota	7.956.052.000	APBD	Kab/Kota	9.149.460.000	APBD	Kab/Kota	Dinas Pendidikan
		h Penyaluran bantuan Pendidikan dan Kecakapan Hidup	3.436.470.000	APBN	Kab/Kota	3.951.940.500	APBN	Kab/Kota	4.544.731.000	APBN	Kab/Kota	Dinas Pendidikan
		i Penyediaan Bahan Ajar Pendidikan Keaksaraan	153.730.000	APBN	Kab/Kota	176.789.500	APBN	Kab/Kota	203.307.000	APBN	Kab/Kota	Dinas Pendidikan
		j Sosialisasi Pendidikan Keaksaraan	220.000.000	APBN	Kab/Kota	253.000.000	APBN	Kab/Kota	290.950.000	APBN	Kab/Kota	Dinas Pendidikan
		k Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan	5.662.360.000	APBN	Kab/Kota	6.511.714.000	APBN	Kab/Kota	7.488.471.000	APBN	Kab/Kota	Dinas Pendidikan
		l Penyediaan Modul Paket C	412.870.000	APBN	Kab/Kota	474.800.500	APBN	Kab/Kota	546.020.000	APBN	Kab/Kota	Dinas Pendidikan
		m Penyaluran Bantuan Penyelenggaraan Paket C	2.013.000.000	APBN	Kab/Kota	2.314.950.000	APBN	Kab/Kota	2.662.192.500	APBN	Kab/Kota	Dinas Pendidikan
		21 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan										Dinas Pendidikan
		a Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi	2.000.000.000	APBD	Kab/Kota	2.300.000.000	APBD	Kab/Kota	2.645.000.000	APBD	Kab/Kota	Dinas Pendidikan
		b Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik	40.587.400.000	APBD	Kab/Kota	46.675.510.000	APBD	Kab/Kota	53.676.836.500	APBD	Kab/Kota	Dinas Pendidikan
		c Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan	104.000.000	APBD	Kab/Kota	119.600.000	APBD	Kab/Kota	137.540.000	APBD	Kab/Kota	Dinas Pendidikan
		d Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi	4.000.000.000	APBD	Kab/Kota	4.600.000.000	APBD	Kab/Kota	5.290.000.000	APBD	Kab/Kota	Dinas Pendidikan
		e Pengembangan sistem pengabdian dan perlindungan terhadap profesi pendidik	500.000.000	APBD	Kab/Kota	575.000.000	APBD	Kab/Kota	661.250.000	APBD	Kab/Kota	Dinas Pendidikan
		f Pengemb. sistem perencanaan dan pengendalian program profesi pendidik dan tenaga	300.000.000	APBD	Kab/Kota	345.000.000	APBD	Kab/Kota	396.750.000	APBD	Kab/Kota	Dinas Pendidikan
		g Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi(SMK)	1.416.000.000	APBD	Kab/Kota	1.628.400.000	APBD	Kab/Kota	1.872.660.000	APBD	Kab/Kota	Dinas Pendidikan
		22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan										Dinas Pendidikan
		a Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan	694.010.000	APBD	Kab/Kota	798.111.500	APBD	Kab/Kota	917.828.000	APBD	Kab/Kota	Dinas Pendidikan
		b Monitoring, Evaluasi dan pelaporan	647.797.600	APBD	Kab/Kota	744.967.000	APBD	Kab/Kota	856.712.000	APBD	Kab/Kota	Dinas Pendidikan
		c Penyelenggaraan pelatihan,seminar dan lokakarya tentang isu pendidikan	491.521.500	APBD	Kab/Kota	565.249.000	APBD	Kab/Kota	650.037.000	APBD	Kab/Kota	Dinas Pendidikan
		d Pembinaan Komite Sekolah	231.127.000	APBD	Kab/Kota	265.796.000	APBD	Kab/Kota	305.665.000	APBD	Kab/Kota	Dinas Pendidikan
		e Sosialisasi dan advokasi berbagai peraturan pemerintah di bidang pendidikan.	600.000.000	APBD	Kab/Kota	690.000.000	APBD	Kab/Kota	793.500.000	APBD	Kab/Kota	Dinas Pendidikan
		f Pembinaan dewan pendidikan	114.681.000	APBD	Kab/Kota	131.800.000	APBD	Kab/Kota	151.666.000	APBD	Kab/Kota	Dinas Pendidikan
		g Administrasi Kegiatan	103.890.000	APBN	Kab/Kota	119.473.500	APBN	Kab/Kota	137.394.000	APBN	Kab/Kota	Dinas Pendidikan
		h Integrasi Program Dikdasmen	253.335.000	APBN	Kab/Kota	291.335.000	APBN	Kab/Kota	335.035.000	APBN	Kab/Kota	Dinas Pendidikan
		i Pengadaan Alat Pengolahan Data	45.000.000	APBN	Kab/Kota	51.750.000	APBN	Kab/Kota	59.512.500	APBN	Kab/Kota	Dinas Pendidikan
		j Monitoring dan Pengawasan Kegiatan	326.700.000	APBN	Kab/Kota	375.705.000	APBN	Kab/Kota	433.060.000	APBN	Kab/Kota	Dinas Pendidikan
		k Penyusunan Program dan Rencana Teknis	239.849.000	APBN	Kab/Kota	275.825.000	APBN	Kab/Kota	317.200.000	APBN	Kab/Kota	Dinas Pendidikan
		l Penyusunan data dan laporankegiatan	103.700.000	APBN	Kab/Kota	119.255.000	APBN	Kab/Kota	137.143.000	APBN	Kab/Kota	Dinas Pendidikan
		m Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	403.280.000	APBN	Kab/Kota	463.772.000	APBN	Kab/Kota	533.337.000	APBN	Kab/Kota	Dinas Pendidikan
		n Peningkatan Manajemen Perencanaan Pendidikan	1.459.892.000	APBN	Kab/Kota	1.678.875.800	APBN	Kab/Kota	1.930.707.000	APBN	Kab/Kota	Dinas Pendidikan

**RENCANA KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI/KABUPATEN NANGGROE ACEH DARUSSALAM
TAHUN 2007 - 2009**

BIDANG	PROGRAM UTAMA	SUB BIDANG / KEGIATAN	2007			2008			2009			KETERANGAN
			NILAI (RUPIAH)	SUMBER PENDANAAN	LOKASI	NILAI (RUPIAH)	SUMBER PENDANAAN	LOKASI	NILAI (RUPIAH)	SUMBER PENDANAAN	LOKASI	
		23 Program Pendidikan Dayah										Dinas Pendidikan
		a Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Dayah	270.576.000	APBD	Kab/Kota	311.162.400	APBD	Kab/Kota	357.836.000	APBD	Kab/Kota	Dinas Pendidikan
		b Penyebarluasan dan Sosialisai Program Dayah	225.622.000	APBD	Kab/Kota	259.465.300	APBD	Kab/Kota	298.385.000	APBD	Kab/Kota	Dinas Pendidikan
		c Pelatihan Kompetensi Tenaga Dayah	1.313.760.000	APBD	Kab/Kota	1.510.824.000	APBD	Kab/Kota	1.737.447.000	APBD	Kab/Kota	Dinas Pendidikan
		d Pembinaan Minat bakat dan Keratilitas Stwa	661.794.000	APBD	Kab/Kota	761.063.100	APBD	Kab/Kota	875.222.000	APBD	Kab/Kota	Dinas Pendidikan
		e Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Santri	1.305.700.000	APBD	Kab/Kota	1.501.555.000	APBD	Kab/Kota	1.726.788.000	APBD	Kab/Kota	Dinas Pendidikan
		f Pengadaan kitab Buku Pendidikan Dayah	3.635.366.800	APBD	Kab/Kota	4.180.671.000	APBD	Kab/Kota	4.807.772.000	APBD	Kab/Kota	Dinas Pendidikan
		g Bantuan dayah	6.500.000.000	APBD	Kab/Kota	7.475.000.000	APBD	Kab/Kota	8.596.250.000	APBD	Kab/Kota	Dinas Pendidikan
		24 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan										Dinas Pendidikan
		a Pengembangan minat dan budaya baca	990.250.000	APBN	Kab/Kota	1.138.787.500	APBN	Kab/Kota	1.309.605.000	APBN	Kab/Kota	Dinas Pendidikan
		25 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur										Dinas Pendidikan
		a Pendidikan dan Pelatihan Formal	22.000.000	APBD TK.I	Banda Aceh	28.000.000	APBD TK.I	Banda Aceh	36.000.000	APBD TK.I	Banda Aceh	Dinas Pendidikan
		26 Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan										Dinas Pendidikan
		a Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya	97.176.000	APBD TK.I	Banda Aceh	135.000.000	APBD TK.I	Banda Aceh	150.000.000	APBD TK.I	Banda Aceh	Dinas Pendidikan
		b Pengembangan Minat dan Budaya Baca										Dinas Pendidikan
		1 Penambahan Jam Layanan Di luar jam kerja				38.400.000	APBD TK.I	Banda Aceh	46.080.000	APBD TK.I	Banda Aceh	Dinas Pendidikan
		Supervisi Pembinaan dan Stimulasi pada Perpustakaan umum, Perpustakaan Khusus,	164.450.000	APBD TK.I	Banda Aceh	213.000.000	APBD TK.I	Banda Aceh	285.000.000	APBD TK.I	Banda Aceh	Dinas Pendidikan
		1. Pendataan Semua Jenis Perpustakaan				116.550.000	APBD TK.I	Prov. NAD	139.860.000	APBD TK.I	Prov. NAD	Dinas Pendidikan
		2 Penggandaan No Pokok Perpustakaan				275.000.000	APBD TK.I	Banda Aceh	330.000.000	APBD TK.I	Banda Aceh	Dinas Pendidikan
		3 Pengkajian Minat Baca dan Perpustakaan				60.900.000	APBD TK.I	Prov. NAD	73.080.000	APBD TK.I	Prov. NAD	Dinas Pendidikan
		4 Hunting Koleksi tentang Aceh				180.300.000	APBD TK.I	Prov. NAD	216.360.000	APBD TK.I	Prov. NAD	Dinas Pendidikan
		5 Penyuluhan Perpustakaan				35.000.000	APBD TK.I	Banda Aceh	42.000.000	APBD TK.I	Banda Aceh	Dinas Pendidikan
		c Pelaksanaan Koordinasi Pengembangan Perpustakaan	61.340.000	APBD TK.I	Banda Aceh	92.000.000	APBD TK.I	Banda Aceh	118.000.000	APBD TK.I	Banda Aceh	Dinas Pendidikan
		d Penyelesaian Bantuan Pengembangan Perpustakaan dan Minat Baca di Daerah	63.000.000	APBD TK.I	B. Aceh	66.000.000	APBD TK.I	B. Aceh	70.000.000	APBD TK.I	B. Aceh	Dinas Pendidikan
			63.000.000	APBD TK.I	Aceh Besar	66.000.000	APBD TK.I	Aceh Besar	70.000.000	APBD TK.I	Aceh Besar	Dinas Pendidikan
			63.000.000	APBD TK.I	Sabang	66.000.000	APBD TK.I	Sabang	70.000.000	APBD TK.I	Sabang	Dinas Pendidikan
			63.000.000	APBD TK.I	Sigi	66.000.000	APBD TK.I	Sigi	70.000.000	APBD TK.I	Sigi	Dinas Pendidikan
			63.000.000	APBD TK.I	A. Utara	66.000.000	APBD TK.I	A. Utara	70.000.000	APBD TK.I	A. Utara	Dinas Pendidikan
			63.000.000	APBD TK.I	A. Timur	66.000.000	APBD TK.I	A. Timur	70.000.000	APBD TK.I	A. Timur	Dinas Pendidikan
			63.000.000	APBD TK.I	A. Tamiang	66.000.000	APBD TK.I	A. Tamiang	70.000.000	APBD TK.I	A. Tamiang	Dinas Pendidikan
			63.000.000	APBD TK.I	A. Tenggara	66.000.000	APBD TK.I	A. Tenggara	70.000.000	APBD TK.I	A. Tenggara	Dinas Pendidikan
			63.000.000	APBD TK.I	A. Tengah	66.000.000	APBD TK.I	A. Tengah	70.000.000	APBD TK.I	A. Tengah	Dinas Pendidikan
			63.000.000	APBD TK.I	A. Barat	66.000.000	APBD TK.I	A. Barat	70.000.000	APBD TK.I	A. Barat	Dinas Pendidikan
			63.000.000	APBD TK.I	Abdya	66.000.000	APBD TK.I	Abdya	70.000.000	APBD TK.I	Abdya	Dinas Pendidikan
			63.000.000	APBD TK.I	A. Selatan	66.000.000	APBD TK.I	A. Selatan	70.000.000	APBD TK.I	A. Selatan	Dinas Pendidikan
			63.000.000	APBD TK.I	A. Jaya	66.000.000	APBD TK.I	A. Jaya	70.000.000	APBD TK.I	A. Jaya	Dinas Pendidikan
			63.000.000	APBD TK.I	Gaya Luwes	66.000.000	APBD TK.I	Gaya Luwes	70.000.000	APBD TK.I	Gaya Luwes	Dinas Pendidikan
			63.000.000	APBD TK.I	Lhokseumawe	66.000.000	APBD TK.I	Lhokseumawe	70.000.000	APBD TK.I	Lhokseumawe	Dinas Pendidikan
			63.000.000	APBD TK.I	Nagan Raya	66.000.000	APBD TK.I	Nagan Raya	70.000.000	APBD TK.I	Nagan Raya	Dinas Pendidikan
			63.000.000	APBD TK.I	A. Singkil	66.000.000	APBD TK.I	A. Singkil	70.000.000	APBD TK.I	A. Singkil	Dinas Pendidikan
			63.000.000	APBD TK.I	Bener Meriah	66.000.000	APBD TK.I	Bener Meriah	70.000.000	APBD TK.I	Bener Meriah	Dinas Pendidikan
			63.000.000	APBD TK.I	Bireun	66.000.000	APBD TK.I	Bireun	70.000.000	APBD TK.I	Bireun	Dinas Pendidikan
			63.000.000	APBD TK.I	Langsa	66.000.000	APBD TK.I	Langsa	70.000.000	APBD TK.I	Langsa	Dinas Pendidikan
		e Penyelenggaraan Koordinasi Pengembangan Budaya Baca	336.625.000	APBD TK.I	Banda Aceh	490.000.000	APBD TK.I	Banda Aceh	635.000.000	APBD TK.I	Banda Aceh	Dinas Pendidikan
		1. Rakorde Perpustakaan				53.800.000	APBD TK.I	Banda Aceh	66.960.000	APBD TK.I	Banda Aceh	Dinas Pendidikan
		2. Bibliografi Daerah				35.000.000	APBD TK.I	Banda Aceh	42.000.000	APBD TK.I	Banda Aceh	Dinas Pendidikan
		3. Katalog Induk Daerah				35.000.000	APBD TK.I	Banda Aceh	42.000.000	APBD TK.I	Banda Aceh	Dinas Pendidikan
		4. Accession List				35.000.000	APBD TK.I	Banda Aceh	42.000.000	APBD TK.I	Banda Aceh	Dinas Pendidikan
		5. Daftar Karya Cetak dan Karya Rekam				35.000.000	APBD TK.I	Banda Aceh	42.000.000	APBD TK.I	Banda Aceh	Dinas Pendidikan
		6. Induk Surat Kabar Daerah				35.000.000	APBD TK.I	Banda Aceh	42.000.000	APBD TK.I	Banda Aceh	Dinas Pendidikan
		7. Clipping Surat Kabar				35.000.000	APBD TK.I	Banda Aceh	42.000.000	APBD TK.I	Banda Aceh	Dinas Pendidikan
		8. Penerbitan Buku bernuansa Aceh				35.000.000	APBD TK.I	Banda Aceh	42.000.000	APBD TK.I	Banda Aceh	Dinas Pendidikan
		f Publikasi dan sosialisasi minat budaya baca	32.684.000	APBD TK.I	Banda Aceh	64.000.000	APBD TK.I	Banda Aceh	85.000.000	APBD TK.I	Banda Aceh	Dinas Pendidikan
		1. Dialog Interaktif (TV, Radio dan Media Cetak)				22.000.000	APBD TK.I	Banda Aceh	26.400.000	APBD TK.I	Banda Aceh	Dinas Pendidikan
		2. Pameran Perpustakaan di Daerah (21 Kab/Kota) 4 kali/tahun				300.000.000	APBD TK.I	Kab/Kota di Prov. NAD	360.000.000	APBD TK.I	Kab/Kota di Prov. NAD	Dinas Pendidikan
		3. Temu Pengarang / Penulis				25.000.000	APBD TK.I	Banda Aceh	30.000.000	APBD TK.I	Banda Aceh	Dinas Pendidikan
		4. Evaluasi Pelaksanaan UU No. 4 tahun 1990 tentang Wajib Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam				25.000.000	APBD TK.I	Banda Aceh	30.000.000	APBD TK.I	Banda Aceh	Dinas Pendidikan
		5. Story Telling				57.000.000	APBD TK.I	Banda Aceh	68.400.000	APBD TK.I	Banda Aceh	Dinas Pendidikan
		g Penyelesaian Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah	1.487.645.000	APBD TK.I	Banda Aceh	2.011.000.000	APBD TK.I	Banda Aceh	2.690.000.000	APBD TK.I	Banda Aceh	Dinas Pendidikan
		1. Penyerjemahan Koleksi tentang Aceh				70.000.000	APBD TK.I	Banda Aceh	84.000.000	APBD TK.I	Banda Aceh	Dinas Pendidikan
		2. Digitalisasi (Alih Media) Bahan Deposit				90.000.000	APBD TK.I	Banda Aceh	108.000.000	APBD TK.I	Banda Aceh	Dinas Pendidikan
		3. Pelestarian dan Konservasi				235.800.000	APBD TK.I	Banda Aceh	282.960.000	APBD TK.I	Banda Aceh	Dinas Pendidikan
		27 Pengembangan dan peningkatan sumber daya manusia										
		a pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan		APBD	Banda Aceh	3.000.000.000	APBD	Banda Aceh	3.300.000.000	APBD	Banda Aceh	BPK-RSUZA
		B. KESEHATAN	183.375.436.500			174.834.980.900			144.135.707.000			BPK RSIA, Dinas Peternakan
		1 Pengendalian Wabah/Flu Burung Pada Hewan	441.399.000	APBN	Prov. NAD	573.818.700	APBN	Prov. NAD	745.964.000	APBN	Prov. NAD	Dinas Peternakan
		2 Penanganan dan Pengendalian Wabah Virus Flu Burung pada Hewan				225.000.000	APBN	Prov. NAD	292.500.000	APBN	Prov. NAD	Dinas Peternakan
		3 Pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	129.000.000	APBD	Prov. NAD	129.000.000	APBD	Prov. NAD	129.000.000	APBD	Prov. NAD	Setda
		4 Bantuan biaya operasional PMI Provinsi NAD	827.000.000	APBD	Prov. NAD	827.000.000	APBD	Prov. NAD	827.000.000	APBD	Prov. NAD	Setda
		5 bantuan Biaya Operasional BNP provinsi NAD	1.650.000.000	APBD	Prov. NAD	1.650.000.000	APBD	Prov. NAD	1.650.000.000	APBD	Prov. NAD	Setda
		6 Bantuan Biaya insideni pendamping Pasien Gakin di RSU	200.000.000	APBD	Prov. NAD	200.000.000	APBD	Prov. NAD	200.000.000	APBD	Prov. NAD	Setda
		7 Bantuan biaya insideni pelayanan kesehatan masyarakat kurang mampu dalam Prov.NAD	760.000.000	APBD	Prov. NAD	760.000.000	APBD	Prov. NAD	760.000.000	APBD	Prov. NAD	Setda
		8 Bantuan biaya pelaksanaan kegiatan penanganan HIV/ AIDS	165.000.000	APBD	Prov. NAD	165.000.000	APBD	Prov. NAD	165.000.000	APBD	Prov. NAD	Setda
		9 PENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT										
		Upaya peningkatan kualitas SDM	4.746.000.000	APBN (BRR)		2.710.627.500	APBD	Prov. NAD				BPK-RSUZA
		Upaya Kesehatan Masyarakat	18.958.000.000	APBD		21.178.763.000	APBD	Prov. NAD				BPK-RSUZA
		Pelayanan Rutin dan Rumah Sakit	102.851.000.000	APBN (BRR)		97.840.827.000	APBD	Prov. NAD				BPK-RSUZA
		10 Peningkatan pelayanan kewsa anak & remaja, dewasa dan lanjut usia & gangguan mental										
		Penambahan kapasitas ruang rawat menjadi 400 TT	7.600.000.000									
		Penyempurnaan SOP				15.000.000			15.000.000			
		visite dokter spesialis non pukiater				48.000.000			48.000.000			
		Persiapan dan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan radiologi	525.000.000			100.000.000			13.000.000			
		11 Peningkatan kapasitas SDM kesehatan BPKJ										
		Pelaksanaan pendidikan formal				293.000.000			260.000.000			
		Kegiatan magang petugas BPKJ dalam dan Luar Negeri	150.000.000	APBN/APBD		180.000.000			250.000.000			
		Diklat Bimbingan Teknis				80.000.000			120.000.000			
		Kekhususan dim rapat koor-dinasi & konsultasi tingkat nasional & internasional	128.880.000			159.190.000			150.325.000			

**RENCANA KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI/KABUPATEN NANGGROE ACEH DARUSSALAM
TAHUN 2007 - 2009**

BIDANG	PROGRAM UTAMA	SUB BIDANG / KEGIATAN	2007			2008			2009			KETERANGAN
			NILAI (RUPIAH)	SUMBER PENDANAAN	LOKASI	NILAI (RUPIAH)	SUMBER PENDANAAN	LOKASI	NILAI (RUPIAH)	SUMBER PENDANAAN	LOKASI	
		12 Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan dan calon tenaga kesehatan Non BPKJ										
		Pela Pelaksanaan In House training				200.000.000			270.000.000			
		Pela Pelaksanaan bimbingan klinis bk mahasiswa (SI/DIIH)				36.000.000			36.000.000			
		13 Pendidikan bidang kesehatan Jiwa				40.000.000			50.000.000			
		Pene Penelitian Kesehatan Jiwa				4.500.000						
		Pene Penelitian dan studi kelayakan ruangan RS										
		14 Peningkatan upaya rehabilitasi dan terapi kerja (modifitas), dan kegiatan pemulangan pasien				50.000.000			60.000.000			
		Peningkatan upaya rehabilitasi pasien eks mental										
		15 Program penanganan Kesehatan Dan Keselamatan Kerja serta Bencana Rumah Sakit (K3B-RS)				24.000.000			24.000.000			
		Persiapan tempat dan penyesuaian instalansi K3B-RS				20.000.000			20.000.000			
		Sosialisasi pelaksanaan K3B-RS										
		Pelaksanaan pemantauan dan pencegahan infeksi nasokomial										
		16 Program peningkatan standarisasi dan akreditasi rumah sakit.				10.000.000			10.000.000			
		Pelaksanaan self assessment RS				15.000.000			15.000.000			
		Peningkatan Gugus Kendali Mutu RS										
		Peningkatan standarisasi dan akreditasi RS untuk 12 (dua belas) pelayanan				50.000.000			30.000.000			
		Pelaksanaan kalibrasi alat medis dan nonmedis										
		17 Penanganan khusus penderita korban penyalahgunaan narkoba dan HIV/AIDS										
		Penvedlaan 1 (satu) unit bangsal rehabilitasi korban NAPZA							1.200.000.000			
		Pelaksanaan care, support and treatment (CST) penderita HIV/AIDS							5.000.000			
		18 Program Peningkatan & Pemeliharaan Sarana dan Prasarana,	1.894.878.000			2.046.468.000			2.210.184.000			
		19 Program Pengadaan Sarana & Prasarana RS;										
		Pembangunan Gedung							1.600.000.000			
		Pembangunan Jalan							880.000.000			
		Penataan Taman							720.000.000			
		Pengadaan obat-obatan RS	452.610.500			520.502.000			598.577.000			
		Pengadaan alat-alat kes.RS	1.059.641.500			1.324.551.000			1.655.689.000			
		20 Peningkatan pelayanan keperawatan dg model praktek keperawatan profesional (MPKP)				21.600.000			21.600.000			
		Pelaksanaan Askes MPKP				10.800.000			10.800.000			
		Pelaksanaan keperawatan profesional psikogeriatri										
		21 Pendidikan kesehatan (Penkes)				19.800.000			19.800.000			
		Pelaksanaan terapi aktifitas kelompok										
		22 Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran;	1.836.993.000			2.013.008.000			2.181.006.000			
		23 Program Peningkatan kebutuhan pelayanan	7.381.416.500			8.048.811.000			8.637.771.000			
		24 Program Peningkatan Diaplin Aparatur.	316.500.000			341.820.000			369.165.000			
		25 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.	233.732.000			252.430.500			272.625.000			
		26 Peningkatan kesejahteraan pegai-wai dalam rangka peningkatan pelayanan bagi masyarakat	2.578.682.000			2.836.550.200			3.120.205.000			
		27 Program penerapan sistem Informasi dan Komunikasi Rumah Sakit (SIKRS)										
		Pengadaan Sistem LIN (Local Informations Networking)							700.000.000			
		28 Peningkatan penggunaan lingkun-gan dan komplek BPKJ NAD				7.668.000			12.668.000			
		29 Program penerimaan tenaga kese-hatan dan tenaga lain dg kualifi-kasi tertentu sesuai										
		Pelaksanaan Seleksi dan Orientasi				7.000.000			8.000.000			
		30 Penyuluhan kepada kelompok masyarakat risiko tinggi				14.400.000			16.320.000			
		Pelaksanaan penyuluhan keswa kepada kelompok remaja bermasalah	30.000.000	APBN		28.800.000			30.720.000			
		Penyuluhan kepada narapidana				7.200.000			7.200.000			
		Penyuluhan tentang lansia				7.200.000			7.200.000			
		Penyuluhan Keswa penyandang cacat				7.200.000			7.200.000			
		Penyuluhan kesehatan jiwa kpd masyarakat umum, tokoh ormas, tokoh agama,	60.000.000	APBN		61.440.000			61.440.000			
		31 Program pencegahan & penanga-nan masalah psikososial bagi masyarakat										
		Promosi kesehatan jiwa melalui leaflet, poster, buku saku dan brosur.				72.000.000			72.000.000			
		Pelaksanaan Pendidikan kesehatan kelompok keluarga	110.000.000	APBN		200.000.000			210.000.000			
		32 Pelayanan kesehatan jiwa terintegrasi dengan pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan										
		Kegiatan Integrasi kePuskesmas Dan RSU Kab/Kota	49.920.000			97.920.000			119.520.000			
		33 Program optimalisasi sistem rujukan kesehatan jiwa.										
		Rujukan Ke Puskesmas dan RSU Kab/Kota Serta Rumah Sakit Umum Provinsi				50.000.000			50.000.000			
		34 Program kemitraan dg rumah sakit umum pemerintah dan swasta.							25.000.000			
		35 Kemitraan dengan stakeholder dan masyarakat.										
		Kerjasama Lintas Sektor berdasarkan Memorandum Of Understanding / Letter Of				50.000.000			50.000.000			
		36 Program peningkatan pelayanan kesehatan bernuansa islami (PKNI).				34.560.000			34.560.000			
		Visite Ulama, Terapi Religi										
		37 Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat										
		Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba	106.615.000	APBD	Kab/Kota Prov NAD	133.268.000	APBD	Kab/Kota Prov	146.595.000	APBD	Kab/Kota Prov	
		Penyuluhan Pencegahan Eksploitasi anak Dibawah Umur	99.495.000	APBD	Kab/Kota Prov NAD	124.368.000	APBD	Kab/Kota Prov	136.805.000	APBD	Kab/Kota Prov	
		38 Peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit										
		Pembangunan gedung poliklinik terpadu							15.282.750.000	APBD	Prov.NAD	BPK RSIA
		Pembangunan gedung rawat inap ibu	17.891.680.000	APBD	Prov.NAD	5.360.791.000	APBD	Prov.NAD				
		Pembangunan gedung rawat inap anak							10.200.000.000	APBD	Prov.NAD	BPK RSIA
		Pembangunan gedung ICU, NICU dan kamar Bedah				15.578.560.000	APBD	Prov.NAD				
		Pembebasan tanah PT.KAI dan T.Mrdani Ca. Untuk pengembangan BPK RSIA	3.500.000.000	APBD	Prov.NAD							
		Pembebasan tanah SMU al-mishab untuk pengembangan BPK RSIA							8.000.000.000	APBD	Prov.NAD	BPK RSIA
		Pembebasan tanah PIDIA										
		Pengadaan fasilitas Infertilitas dan reproduksi manusia							70.000.000.000	APBD	Prov.NAD	BPK RSIA
		Rehabilitasi Bangunan Rumah sakit	6.532.994.000	APBD	Prov.NAD	6.859.644.000	APBD	Prov.NAD	7.202.628.000	APBD	Prov.NAD	BPK RSIA
		Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit										
		Pengadaan obat-obatan rumah sakit										
		Pengadaan perlengkapan rumah sakit (dapur, ruang pasien, ruang tunggu dll)										
		39 Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan										
		Kemitraan alih teknologi kedokteran dan kesehatan				1.800.000.000	APBD	Prov.NAD	1.980.000.000	APBD	Prov.NAD	BPK RSIA
		Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis										
		Kemitraan pengobatan lanjutan bagi pasien rujukan										
		40 Pencegahan dan penanganan penyakit menular										
		Penyemprotan dan foging sarang nyamuk	17.500.000	APBD	Prov.NAD	19.250.000	APBD	Prov.NAD	21.175.000	APBD	Prov.NAD	BPK RSIA
		41 Pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit										
		Pemeliharaan rutin barkala rumah sakit	91.500.000	APBD	Prov.NAD	100.650.000	APBD	Prov.NAD	110.715.000	APBD	Prov.NAD	BPK RSIA
		C. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	7.595.000.000			9.114.000.000			10.936.799.000			
		1 Fasilitas Pemberdayaan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2)	636.590.000	APBD	Prov. NAD	763.908.000	APBD	Prov. NAD	916.609.600	APBD	Prov. NAD	Setda
		2 Pemetaan Potensi Organisasi dan Lembaga Masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan	70.170.000	APBD	Prov. NAD	84.204.000	APBD	Prov. NAD	101.044.800	APBD	Prov. NAD	Setda
		3 Pengembangan materi dan pelaksanaan KIE tentang kesetaraan dan keadilan gender (KKG)	147.100.000	APBD	Prov. NAD	176.520.000	APBD	Prov. NAD	211.824.000	APBD	Prov. NAD	Setda
		4 Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	273.590.000	APBD	Prov. NAD	328.308.000	APBD	Prov. NAD	393.969.600	APBD	Prov. NAD	Setda
		5 Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak	417.450.000	APBD	Prov. NAD	500.940.000	APBD	Prov. NAD	601.128.000	APBD	Prov. NAD	Setda
		6 Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak	69.640.000	APBD	Prov. NAD	83.568.000	APBD	Prov. NAD	100.281.600	APBD	Prov. NAD	Setda
		7 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	995.350.000	APBD	Prov. NAD	1.194.420.000	APBD	Prov. NAD	1.433.304.000	APBD	Prov. NAD	Setda
		8 Sosialisasi Gender dan Pembekalan PUG	367.636.500	APBD	Prov. NAD	441.163.800	APBD	Prov. NAD	529.396.500	APBD	Prov. NAD	Setda

**RENCANA KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI/KABUPATEN NANGGROE ACEH DARUSSALAM
TAHUN 2007 - 2009**

BIDANG	PROGRAM UTAMA	SUB BIDANG / KEGIATAN	2007			2008			2009			KETERANGAN
			NILAI (RUPIAH)	SUMBER PENDANAAN	LOKASI	NILAI (RUPIAH)	SUMBER PENDANAAN	LOKASI	NILAI (RUPIAH)	SUMBER PENDANAAN	LOKASI	
		9 Penguatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Provinsi NAD	474.600.000	ABPD	Prov. NAD	569.520.000	ABPD	Prov. NAD	683.424.000	ABPD	Prov. NAD	Setda
		10 Sosialisasi Akte Kelahiran Gratis	108.961.000	ABPD	Prov. NAD	130.753.200	ABPD	Prov. NAD	156.903.800	ABPD	Prov. NAD	Setda
		11 Rapat Koordinasi Kesejahteraan dan Perlindungan Anak (KPA)	171.800.000	ABPD	Prov. NAD	206.160.000	ABPD	Prov. NAD	247.392.000	ABPD	Prov. NAD	Setda
		12 Pelatihan bagi Pelatih (TOT) Peningkatan SDM Pelayanan dan Pendampingan Anak Korban	66.800.000	ABPD	Prov. NAD	80.160.000	ABPD	Prov. NAD	96.192.000	ABPD	Prov. NAD	Setda
		13 Pelatihan bagi Pelatih (TOT) SDM Pelayanan dan Pendampingan Korban KDRT	86.800.000	ABPD	Prov. NAD	104.160.000	ABPD	Prov. NAD	124.992.000	ABPD	Prov. NAD	Setda
		14 Penyusunan Sistem Pelindungan Bagi Perempuan	389.602.500	ABPD	Prov. NAD	467.523.000	ABPD	Prov. NAD	561.027.600	ABPD	Prov. NAD	Setda
		15 Peningkatan Kualitas SDM Remaja Putri	299.300.000	ABPD	Prov. NAD	359.160.000	ABPD	Prov. NAD	430.992.000	ABPD	Prov. NAD	Setda
		16 Peringatan Puncak Hari Ibu	185.225.000	ABPD	Prov. NAD	222.270.000	ABPD	Prov. NAD	266.724.000	ABPD	Prov. NAD	Setda
		17 Bimbingan Management Usaha/ Pemberdayaan Ekonomi dan Pelatihan Keterampilan bagi	2.457.650.000	ABPD	Prov. NAD	2.949.180.000	ABPD	Prov. NAD	3.539.016.000	ABPD	Prov. NAD	Setda
		18 Pendidikan Politik Bagi Perempuan	196.175.000	ABPD	Prov. NAD	235.410.000	ABPD	Prov. NAD	282.492.000	ABPD	Prov. NAD	Setda
		19 Koordinasi Pembentukan Gugus Anti Trafficking	180.560.000	ABPD	Prov. NAD	216.672.000	ABPD	Prov. NAD	260.006.400	ABPD	Prov. NAD	Setda
			308.237.961.600			397.036.552.000			509.294.807.200			
		AGAMA, SOSIAL, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAB	50.688.382.700		0	57.807.216.300			62.102.927.800			Dinas Syariat Islam, Setda
		A. AGAMA										
		1 Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.110.740.600	ABPD	Prov. NAD	2.321.813.900	ABPD	Prov. NAD	2.553.995.000	ABPD	Prov. NAD	Dinas Syariat Islam
		2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3.281.374.000	ABPD	Prov. NAD	3.609.511.000	ABPD	Prov. NAD	3.970.461.000	ABPD	Prov. NAD	Dinas Syariat Islam
		3 Peningkatan Disiplin Aparatur	266.746.000	ABPD	Prov. NAD	293.421.000	ABPD	Prov. NAD	322.763.000	ABPD	Prov. NAD	Dinas Syariat Islam
		4 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur										
		1 Pendidikan dan pelatihan formal	112.500.000	ABPD	Prov. NAD	123.750.000	ABPD	Prov. NAD	136.125.000	ABPD	Prov. NAD	Dinas Syariat Islam
		2 Penyusunan dan penyempurnaan Rancangan Qanun kelembagaan perangkat daerah dan lembaga khusus	50.000.000	ABPD	Prov. NAD	55.000.000	ABPD	Prov. NAD	60.500.000	ABPD	Prov. NAD	Dinas Syariat Islam
		5 Penataan Peraturan Perundang-undangan										
		1 Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan	437.920.000	ABPD	B. Aceh	481.712.000	sda	B. Aceh	529.883.200	ABPD	Prov. NAD	Dinas Syariat Islam
		6 Peningkatan Sarana dan Prasarana										
		1 Pembuatan Ruang Perpustakaan dan Pengisian Buku Perpustakaan	2.396.555.000	ABPD	Prov. NAD	2.636.210.500	sda	Prov. NAD	2.899.831.000	sda	Prov. NAD	Dinas Syariat Islam
		2 Peningkatan Sarana / Prasarana Peribadatan	2.396.555.000	ABPD	Prov. NAD	2.636.210.500	sda	Prov. NAD	2.899.831.000	sda	Prov. NAD	Dinas Syariat Islam
		7 Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama										
		1 Rapat koordinasi antar pemuka Agama	102.611.000	ABPD	A. Teng	112.872.100	sda	A. Tenggara	124.159.000	sda	A. Tenggara	Dinas Syariat Islam
		8 Pembinaan Syariat Islam										
		1 Pemasyarakatan dan penyebaran informasi Syariat Islam	334.600.000	ABPD	B. Aceh	368.060.000	sda	B. Aceh	404.866.000	sda	B. Aceh	Dinas Syariat Islam
		2 Rapat Kerja Pelaksanaan Syariat Islam	238.664.000	ABPD	sda	262.530.400	sda	sda	288.783.000	sda	Prov. NAD	Dinas Syariat Islam
		3 Penyediaan sarana dan prasarana pendukung Badan Baitul Mal	329.138.000	ABPD	Prov. NAD	362.052.000	sda	Prov. NAD	398.257.000	sda	Prov. NAD	Dinas Syariat Islam
		4 Pembinaan dan koordinasi operasional Dai wilayah perbatasan dan daerah terpencil	3.064.282.500	ABPD	A. Tamiang, A. Singkil, A. Tenggara	3.370.710.000	sda	A. Tamiang, A. Singkil, A. Tenggara	3.707.781.000	sda	A. Tamiang, A. Singkil, A. Tenggara	Dinas Syariat Islam
		5 Pembekalan wawasan Syariat Islam bagi Imam Menasah dalam provinsi	800.000.000	ABPD	B. Aceh	880.000.000	sda	B. Aceh	968.000.000	sda	B. Aceh	Dinas Syariat Islam
		6 Sosialisasi kesadaran zakat dengan organisasi profesi	562.245.000	ABPD	Prov. NAD	618.471.000	sda	Prov. NAD	680.318.000	sda	Prov. NAD	Dinas Syariat Islam
		7 Workshop materi mampu baca Al Quran tamatan SD dan MI	959.700.000	ABPD	Prov. NAD	1.055.670.000	sda	Prov. NAD	1.161.237.000	sda	Prov. NAD	Dinas Syariat Islam
		8 Silaturahmi para Dai Kabupaten/Kota dalam Provinsi	317.502.000	ABPD	Prov. NAD	349.252.200	sda	Prov. NAD	384.177.000	sda	Prov. NAD	Dinas Syariat Islam
		9 Penyusunan buku panduan pelaksanaan Syariat Islam	415.500.000	ABPD	Prov. NAD	457.050.000	sda	Prov. NAD	502.755.000	sda	Prov. NAD	Dinas Syariat Islam
		10 Pembinaan kampung percontohan bersyariat Islam	582.850.000	ABPD	Kab/Kota	641.355.000	sda	Kab/Kota	705.248.500	sda	Kab/Kota	Dinas Syariat Islam
		11 Penyaluran Zakat, Infaq Shadaqah (ZIS)	3.000.000.000	ABPD	B. Aceh	3.300.000.000	sda	B. Aceh	3.630.000.000	sda	B. Aceh	Dinas Syariat Islam
		12 Pendidikan dan pelatihan PPSN dalam pelaksanaan Syariat Islam	740.392.500	ABPD	sda	814.431.000	sda	Prov. NAD	895.874.000	sda	Prov. NAD	Dinas Syariat Islam
		13 Pengkaderan para khatib Kabupaten/Kota dalam Provinsi NAD	118.630.000	ABPD	Prov. NAD	130.493.000	sda	Prov. NAD	143.542.300	sda	Prov. NAD	Dinas Syariat Islam
		9 Pembinaan Lembaga Sosial Keagamaan										
		1 Pelatihan Management dan Administrasi untuk lembaga Dakwah Islamiyah	140.560.000	ABPD	Prov. NAD	154.616.000	ABPD	Prov. NAD	170.077.600	ABPD	Prov. NAD	Dinas Syariat Islam
		2 Bimbingan teknis tenaga pelatih/juri tilawatil Quran	138.377.500	ABPD	Abdya, Nagan Raya, Pidie, A. Tamiang, dan Bener Meriah	152.215.000	ABPD	Abdya, Nagan Raya, Pidie, A. Tamiang, dan Bener Meriah	167.436.000	ABPD	Abdya, Nagan Raya, Pidie, A. Tamiang, dan Bener Meriah	
		3 Pembinaan LPPTKA dan pelatihan tutor TKA, TPA dan TQA	86.853.500	ABPD	A. Utara, Lhokseumawe, A. Tengah dan Bener Meriah	95.538.000	ABPD	A. Utara, Lhokseumawe, A. Tengah dan Bener Meriah	105.092.000	ABPD	A. Utara, Lhokseumawe, A. Tengah dan Bener Meriah	
		4 Pelatihan pendayagunaan zakat produktif untuk penanggulangan kemiskinan	123.897.500	ABPD	Prov. NAD	136.287.000	ABPD	Prov. NAD	149.915.000	ABPD	Prov. NAD	Dinas Syariat Islam
		5 Pembinaan dan koordinasi Wilayahul Hisbah (WH)	683.285.500	ABPD	sda	751.614.000	ABPD	sda	826.775.000	ABPD	Prov. NAD	Dinas Syariat Islam
		6 Rapat Kerja Badan Baitul Mal	194.884.000	ABPD	sda	214.372.000	ABPD	sda	235.809.000	ABPD	Prov. NAD	Dinas Syariat Islam
		7 Arbitrase (penyelesaian sengketa)	102.624.000	ABPD	B. Aceh	112.886.000	ABPD	B. Aceh	124.175.000	ABPD	B. Aceh	Dinas Syariat Islam
		8 Penentuan Hisab dan Rukyat	270.855.000	ABPD	Prov. NAD	297.948.500	ABPD	Prov. NAD	327.734.000	ABPD	Prov. NAD	Dinas Syariat Islam
		9 Workshop Wilayahul Hisbah (WH)	118.630.000	ABPD	Prov. NAD	130.493.000	ABPD	Prov. NAD	143.542.300	ABPD	Prov. NAD	Dinas Syariat Islam
		10 Pengembangan dan Pemberdayaan Peradilan Syariah										
		1 Penunjang sarana dan prasarana operasional Mahkamah Syar'iyah	1.299.299.500	ABPD	sda	1.429.229.000	ABPD	sda	1.572.152.000	ABPD	Prov. NAD	Dinas Syariat Islam
		2 Pembekalan dan pengkaderan penentuan Hisab dan Rukyat	178.745.000	ABPD	B. Aceh	196.619.500	ABPD	B. Aceh	216.281.000	ABPD	B. Aceh	Dinas Syariat Islam
		3 Workshop Penerapan Hukum	103.937.000	ABPD	Prov. NAD	114.330.700	ABPD	Prov. NAD	125.763.000	ABPD	Prov. NAD	Dinas Syariat Islam
		4 Penyusunan (Blue Print) rencana pengembangan Mahkamah Syar'iyah	292.945.000	ABPD	sda	322.239.500	ABPD	sda	354.643.000	ABPD	Prov. NAD	Dinas Syariat Islam
		5 Penyuluhan Qanun Bidang Syariat Islam	559.702.000	ABPD	sda	615.672.200	ABPD	sda	677.239.000	ABPD	Prov. NAD	Dinas Syariat Islam
		6 Rapat kerja pimpinan Mahkamah Syar'iyah	83.830.000	ABPD	B. Aceh	92.213.000	ABPD	B. Aceh	101.434.000	ABPD	B. Aceh	Dinas Syariat Islam
		7 Monitoring pelaksanaan dan penegak Qanun bidang Syariat Islam	460.432.000	ABPD	Prov. NAD	506.475.200	ABPD	Prov. NAD	557.122.000	ABPD	Prov. NAD	Dinas Syariat Islam
		11 Pengembangan Dayah dan Balee Seumebeut										
		1 Balai pengajian anak usia 10 s.d 12 tahun (kelas VI SD dan MI)	17.435.610.000	ABPD	sda	19.179.171.000	ABPD	sda	21.097.088.000	ABPD	Prov. NAD	Dinas Syariat Islam
		2 Pendukung kegiatan pemberdayaan Meunasah dan Balee Seumebeut dalam Provinsi	225.954.000	ABPD	B. Aceh	248.549.400	ABPD	B. Aceh	273.404.000	ABPD	B. Aceh	Dinas Syariat Islam
		12 Pengembangan dan Pemberdayaan Peradilan Syariah										
		1 Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Peradilan Syariat Islam	294.054.000	ABPD	Prov. NAD	323.459.400	ABPD	Prov. NAD	355.805.000	ABPD	Prov. NAD	Dinas Syariat Islam
		2 Perumusan Kebijakan di Bidang Penulisan Qanun Syariat Islam	300.000.000	ABPD	B. Aceh	330.000.000	ABPD	B. Aceh	330.000.000	ABPD	Prov. NAD	Dinas Syariat Islam
		3 Perumusan Kebijakan tentang Naiknail Pangkat dan Promosi Jabatan Berwawasan Syariat Islam	200.000.000	ABPD	sda	200.000.000	ABPD	sda	220.000.000	ABPD	Prov. NAD	Dinas Syariat Islam
		4 Perumusan Kebijakan tentang Pelaksanaan Syariat Islam di Bidang Pariwisata				200.000.000	ABPD	sda	220.000.000	ABPD	Prov. NAD	Dinas Syariat Islam
		13 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Syariat Islam Kabupaten/Kota.										
		1 Pengadaan Moubillier Kantor Dinas Syariat Islam Kabupaten/Kota (Kantor Baru)				1.350.000.000	ABPD	Kab/Kota din Prov. NAD				
		14 Pembinaan Kelembagaan Dayah/Program Khusus	1.258.428.000	ABPD	Prov. NAD	1.384.270.800	ABPD	Prov. NAD	1.522.697.000	ABPD	Prov. NAD	Setda
		15 Pembinaan Program Beasiswa Khusus (S-1, S-2, S-3) Dalam dan Luar Negeri	675.103.000	ABPD	Prov. NAD	742.613.000	ABPD	Prov. NAD	816.875.000	ABPD	Prov. NAD	Setda
		16 Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat Aceh dan Dosen PTS	192.844.000	ABPD	Prov. NAD	212.129.000	ABPD	Prov. NAD	233.342.000	ABPD	Prov. NAD	Setda
		17 Pembinaan Mahasiswa Aceh pada Univ. Bodi Luhur Jakarta	25.100.000	ABPD	Prov. NAD	27.610.000	ABPD	Prov. NAD	30.371.000	ABPD	Prov. NAD	Setda
		18 Pembinaan Mahasiswa Aceh korban konflik dan Tindak Kekerasan	25.100.000	ABPD	Prov. NAD	27.610.000	ABPD	Prov. NAD	30.371.000	ABPD	Prov. NAD	Setda
		19 Pembinaan Institusi PTS dan Penunjang Belajar Mengajar/Beasiswa S-1 PTS	116.220.100	ABPD	Prov. NAD	127.842.000	ABPD	Prov. NAD	140.625.000	ABPD	Prov. NAD	Setda

**RENCANA KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI/KABUPATEN NANGGROE ACEH DARUSSALAM
TAHUN 2007 - 2009**

BIDANG	PROGRAM UTAMA	SUB BIDANG / KEGIATAN	2007			2008			2009			KETERANGAN
			NILAI (RUPIAH)	SUMBER PENDANAAN	LOKASI	NILAI (RUPIAH)	SUMBER PENDANAAN	LOKASI	NILAI (RUPIAH)	SUMBER PENDANAAN	LOKASI	
		20 Pemunjang Operasional LPTQ Provinsi NAD	303.900.000	APBD	Prov. NAD	334.290.000	APBD	Prov. NAD	367.719.000	APBD	Prov. NAD	Setda
		21 Koordinasi Peningkatan Pelayanan Haji	108.700.000	APBD	Prov. NAD	119.570.000	APBD	Prov. NAD	131.527.000	APBD	Prov. NAD	Setda
		22 Pembinaan dan Peningkatan Sarana Masjid	100.200.000	APBD	Prov. NAD	110.220.000	APBD	Prov. NAD	121.242.000	APBD	Prov. NAD	Setda
		23 Pembinaan Rencana Masjid Agung Kab/Kota dalam Provinsi NAD	56.530.000	APBD	Prov. NAD	62.183.000	APBD	Prov. NAD	68.401.300	APBD	Prov. NAD	Setda
		24 Pembinaan Imam Hafidh pada Masjid Agung Kab/Kota dalam Provinsi NAD	93.490.000	APBD	Prov. NAD	102.839.000	APBD	Prov. NAD	113.122.900	APBD	Prov. NAD	Setda
		25 Koordinasi Penyelenggaraan Har-Hari Besar Islam	60.000.000	APBD	Prov. NAD	66.000.000	APBD	Prov. NAD	72.600.000	APBD	Prov. NAD	Setda
		26 Koordinasi dan Pembinaan Lembaga Sarana Kegamaan	229.220.000	APBD	Prov. NAD	252.142.000	APBD	Prov. NAD	277.356.200	APBD	Prov. NAD	Setda
		27 Peningkatan Syiar Ramadhan	7.000.000	APBD	Prov. NAD	7.700.000	APBD	Prov. NAD	8.470.000	APBD	Prov. NAD	Setda
		28 Peningkatan Toleransi Kehidupan Beragama	3.000.000	APBD	Prov. NAD	3.300.000	APBD	Prov. NAD	3.630.000	APBD	Prov. NAD	Setda
		29 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Ulama	125.315.000	APBD	Prov. NAD	137.846.500	APBD	Prov. NAD	151.631.000	APBD	Prov. NAD	Setda
		30 Pelatihan TC STQ Nasional	618.740.000	APBD	Prov. NAD	680.614.000	APBD	Prov. NAD	748.675.400	APBD	Prov. NAD	Setda
		31 Pemberangkatan Kaflah STQ Nasional Provinsi NAD	852.820.000	APBD	Prov. NAD	938.102.000	APBD	Prov. NAD	1.031.912.200	APBD	Prov. NAD	Setda
		32 Pelaksanaan MTQ XXVIII Tk Provinsi NAD 2007 di Bireuen	423.690.000	APBD	Prov. NAD	466.059.000	APBD	Prov. NAD	512.664.900	APBD	Prov. NAD	Setda
		B. SOSIAL	135.035.896.900			194.998.557.000			283.361.509.600			Setda, Dinas Sosial
		1 Bantuan seragam/ peralatan sekolah, koordinasi, movev, dan pelaporan anak yatim, piatu dan	1.200.000.000	APBD	Prov. NAD	1.200.000.000	APBD	Prov. NAD	1.200.000.000	APBD	Prov. NAD	Setda
		2 Bantuan biaya insidentil anak yatim/ piatu/ yatim piatu korban tsunami, korban konflik dan	2.400.000.000	APBD	Prov. NAD	2.400.000.000	APBD	Prov. NAD	2.400.000.000	APBD	Prov. NAD	Setda
		3 Koordinasi dan monitoring pengentasan kemiskinan dan mitigasi bencana	94.500.000	APBD	Prov. NAD	94.500.000	APBD	Prov. NAD	94.500.000	APBD	Prov. NAD	Setda
		4 Koordinasi dan monitoring pengentasan kemiskinan dan mitigasi bencana	2.452.000.000	APBD	Prov. NAD	2.452.000.000	APBD	Prov. NAD	2.452.000.000	APBD	Prov. NAD	Setda
		5 Bantuan biaya operasional Satkorlak PBP Provinsi NAD	495.500.000	APBD	Prov. NAD	495.500.000	APBD	Prov. NAD	495.500.000	APBD	Prov. NAD	Setda
		6 Bantuan biaya pemberdayaan Dhuafa/ Fakir Miskin dalam Kab/ Kota Prov.NAD	1.720.000.000	APBD	Prov. NAD	1.720.000.000	APBD	Prov. NAD	1.720.000.000	APBD	Prov. NAD	Setda
		7 Bantuan kepada masyarakat/ aparatur tertentu/ khusus	3.250.500.000	APBD	Prov. NAD	3.250.500.000	APBD	Prov. NAD	3.250.500.000	APBD	Prov. NAD	Setda
		8 Peningkatan kualitas kesejahteraan sosial	1.200.000.000	APBD	Prov. NAD	1.200.000.000	APBD	Prov. NAD	1.200.000.000	APBD	Prov. NAD	Setda
		9 Seleksi, pelatihan dan pemberian keterampilan pada peringatan hari anak nasional	520.000.000	APBD	Prov. NAD	520.000.000	APBD	Prov. NAD	520.000.000	APBD	Prov. NAD	Setda
		10 Bantuan biaya insidentil penyandang cacat dan gegeng/ masyarakat terlarant Prov.NAD	405.000.000	APBD	Prov. NAD	405.000.000	APBD	Prov. NAD	405.000.000	APBD	Prov. NAD	Setda
		11 Bantuan biaya operasional yayasan sosial kemasyarakatan	207.500.000	APBD	Prov. NAD	207.500.000	APBD	Prov. NAD	207.500.000	APBD	Prov. NAD	Setda
		12 Bantuan biaya operasional yayasan penyandang cacat	248.000.000	APBD	Prov. NAD	248.000.000	APBD	Prov. NAD	248.000.000	APBD	Prov. NAD	Setda
		13 Bantuan biaya untuk pengurus BKKS Prov. NAD dalam rangka mengikuti konferensi nasional	16.300.000	APBD	Prov. NAD	16.300.000	APBD	Prov. NAD	16.300.000	APBD	Prov. NAD	Setda
		14 Bantuan biaya transportasi peserta peserta dan pendamping forum anak daerah dari Kab/ Kota	76.000.000	APBD	Prov. NAD	76.000.000	APBD	Prov. NAD	76.000.000	APBD	Prov. NAD	Setda
		15 Bantuan biaya transportasi anak ke kongres anak nasional	57.500.000	APBD	Prov. NAD	57.500.000	APBD	Prov. NAD	57.500.000	APBD	Prov. NAD	Setda
		16 Bantuan uang saku anak selama mengikuti kongres anak nasional	49.397.600	APBD	Prov. NAD	49.500.000	APBD	Prov. NAD	49.500.000	APBD	Prov. NAD	Setda
		17 Administrasi Perkantoran	1.249.155.000	APBD	Prov. NAD	1.623.901.000	APBD	Prov. NAD	2.111.071.000	APBD	Prov. NAD	Dinas Sosial
		18 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.093.350.000	APBD	Prov. NAD	2.721.355.000	APBD	Prov. NAD	3.537.761.500	APBD	Prov. NAD	Dinas Sosial
		19 Program Peningkatan Disiplin Aparatur										Dinas Sosial
		20 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur										Dinas Sosial
		Bimbingan Teknis Implementasi Perundang-Undangan	173.280.000			225.264.000			292.843.200			Dinas Sosial
		21 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan										Dinas Sosial
		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.110.000			2.743.000			3.565.900			Dinas Sosial
		Penyusunan Laporan Keuangan Semester	2.110.000			2.743.000			3.565.900			Dinas Sosial
		Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	2.110.000			2.743.000			3.565.900			Dinas Sosial
		Penyusunan Pelaporan Akhir Tahun	2.110.000			2.743.000			3.565.900			Dinas Sosial
		22 Program Pemberdayaan Fakir Fakir KAT & PMKS										Dinas Sosial
		Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) Petugas dan Pendamping	1.799.060.000			2.698.590.000			4.047.885.000			Dinas Sosial
		Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS lainnya										Dinas Sosial
		Bimbingan Sosial dan Keterampilan Keluarga Fakir Miskin	208.810.000			313.215.000			469.822.500			Dinas Sosial
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha Kesejahteraan Sosial	551.280.000			826.920.000			1.240.380.000			Dinas Sosial
		Pelatihan Keterampilan Bagi PMKS	84.352.000			126.528.000			189.792.000			Dinas Sosial
		Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) Petugas dan Pendamping	53.015.000			79.522.500			119.283.750			Dinas Sosial
		Sosial Pemberdayaan Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)										Dinas Sosial
		Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) Pugs Pendamping Fakir Miskin	276.750.000			415.125.000			622.687.500			Dinas Sosial
		Pemberdayaan Ketrampilan berusaha bagi keluarga rentan	6.542.825.000			9.814.237.500			14.721.356.200			Dinas Sosial
		Pelatihan Keterampilan Bagi Lanjut Usia	57.430.000			86.145.000			129.217.500			Dinas Sosial
		Sosialisasi Program Pemberdayaan Perempuan	182.750.000			274.125.000			411.187.500			Dinas Sosial
		Sosialisasi Program Pemberdayaan Fakir Miskin	18.699.000			28.048.500			42.072.750			Dinas Sosial
		Pelatihan Keterampilan Bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)	8.366.715.000			12.550.072.500			18.825.108.750			Dinas Sosial
		Pemberdayaan Keterampilan Bagi Komunitas Adat Terpencil (KAT)	5.022.260.000			7.533.390.000			11.300.085.000			Dinas Sosial
		23 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial										Dinas Sosial
		Pelaksanaan KIE Konseling dan Kampanye Sosial bagi PMKS	151.360.000			227.040.000			340.560.000			Dinas Sosial
		Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja Bagi Anak Terlarant -	925.100.000			1.387.650.000			2.081.475.000			Dinas Sosial
		Termasuk Anjal, Anak Cacat, Anak Nakal										Dinas Sosial
		Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi- Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS	243.800.000			365.700.000			548.550.000			Dinas Sosial
		Penyusunan Kebijakan Pelayanan & Rehabilitasi Sosial Bagi PMKS	695.493.000			1.043.239.600			1.564.859.000			Dinas Sosial
		Koordinasi Perumusan Kebijakan & Sinkronisasi Kebijakan Pelaksanaan	107.735.000			161.603.000			242.405.000			Dinas Sosial
		Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan										Dinas Sosial
		Penganganan Masalah - Masalah Strategis Yang Menyangkut	12.884.512.000			19.326.768.000			28.990.152.000			Dinas Sosial
		Tanggab Darurat dan Kejadian Luar Biasa										Dinas Sosial
		Pelaksanaan KIE Konseling & Kampanye Sosial Bagi Korb. Tindak Kekerasan	74.730.000			112.095.000			168.142.500			Dinas Sosial
		Pendayagunaan Sumber Dana Sosial	590.810.000			886.215.000			1.329.322.500			Dinas Sosial
		Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja Bagi Anak Terlarant	32.191.500			48.287.000			72.430.000			Dinas Sosial
		Pelatihan Keterampilan & Praktek Belajar Kerja bagi Anak Korb. Narkotika	257.720.500			386.580.000			579.871.000			Dinas Sosial
		Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja bagi Anak Jalanan	38.065.000			57.097.500			85.646.200			Dinas Sosial
		Pelatihan dan Pembinaan Anak Jalanan, Anak Terlarant, Anak Cacat- Korban Bencana	653.410.000			980.115.000			1.470.172.500			Dinas Sosial
		Pemberdayaan dan Rehabilitasi Penyandang Cacat	4.059.805.600			6.089.708.400			9.134.562.600			Dinas Sosial
		Sosialisasi Pelaksanaan KIE Konseling bagi PMKS	2.116.680.000			3.175.020.000			4.762.530.000			Dinas Sosial
		Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi	931.835.000			1.397.752.500			2.096.628.700			Dinas Sosial
		Kesejahteraan Sosial bagi Pant										Dinas Sosial
		Penanggulangan Bencana Alam Banjir dalam Provinsi	37.643.605.000			56.465.407.500			84.698.111.200			Dinas Sosial
		24 Program Pembinaan Anak Terlarant										Dinas Sosial
		Pengembangan Bakat dan Keterampilan Anak Terlarant	613.449.000			920.174.000			1.380.261.000			Dinas Sosial
		Peningkatan Keterampilan Tenaga Pembinaan Anak Terlarant	198.690.000			298.035.000			447.052.500			Dinas Sosial
		25 Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma										Dinas Sosial
		Pendataan Penyandang Cacat dan Penyakit Kejiwaan	215.565.000			323.347.500			549.690.700			Dinas Sosial
		Pendidikan dan Pelatihan Bagi Penyandang Cacat dan Eks Trauma	414.360.000			617.390.000			927.085.000			Dinas Sosial
		Pendayagunaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma	1.064.327.000			1.596.490.500			2.394.735.700			Dinas Sosial

**RENCANA KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI/KABUPATEN NANGGROE ACEH DARUSSALAM
TAHUN 2007 - 2009**

BIDANG	PROGRAM UTAMA	SUB BIDANG / KEGIATAN	2007			2008			2009			KETERANGAN
			NILAI (RUPIAH)	SUMBER PENDANAAN	LOKASI	NILAI (RUPIAH)	SUMBER PENDANAAN	LOKASI	NILAI (RUPIAH)	SUMBER PENDANAAN	LOKASI	
		Peningkatan Keterampilan Tenaga Pelatih dan Pendidik	365.968.000			548.952.000			823.428.000			Dinas Sosial
		Pendidikan dan Pelatihan Bagi Penyandang Cacat Eks Psycotik	266.746.500			400.119.700			600.179.600			Dinas Sosial
		Pembinaan para Penyandang Cacat dan Eks Trauma	146.745.000			220.117.500			330.176.250			Dinas Sosial
		Pelatihan dan Pembinaan Bagi Penyandang Cacat Tuna Netra	392.526.600			568.789.900			883.184.850			Dinas Sosial
26	Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo											Dinas Sosial
		Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana P. Asuhan/ Jompo	661.097.000			991.645.500			1.487.468.250			Dinas Sosial
		Pendidikan dan Pelatihan bagi Penghuni Panti Asuhan/ Jompo	44.080.000			66.120.000			99.180.000			Dinas Sosial
		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	11.705.000			17.557.500			26.336.250			Dinas Sosial
		Pendidikan dan Pelatihan Cacat Netra	118.520.000			177.780.000			266.670.000			Dinas Sosial
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Panti Asuhan/ Jompo	382.470.000			573.705.000			860.557.500			Dinas Sosial
		Pendidikan dan Pelatihan bagi Remaja Putus Sekolah	783.160.000			1.174.740.000			1.762.110.000			Dinas Sosial
		Seleksi Orsos. Penerima Bantuan	323.300.000			484.950.000			727.425.000			Dinas Sosial
		Operasi dan Pemeliharaan Sarana Panti Bina Remaja	929.159.000			1.393.738.500			2.090.607.750			Dinas Sosial
27	Program Pembinaan Eks. Penyakit Sosial											Dinas Sosial
		Pendidikan & Keterampilan Berusaha Bagi Eks. Penyandang Penyakit Sosial	226.330.500			339.495.750			509.243.000			Dinas Sosial
		Pemberdayaan Eks. Penyandang Penyakit Sosial	370.520.000			555.780.000			833.670.000			Dinas Sosial
		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	196.544.500			294.816.750			442.225.125			Dinas Sosial
		Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi Gelandangan dan- Pengemis	473.380.000			710.070.000			1.065.105.000			Dinas Sosial
28	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial											Dinas Sosial
		Peningkatan Peran Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha	455.916.000			683.874.000			1.025.811.000			Dinas Sosial
		Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku-Pelaku UKS Masyarakat	239.486.000			359.229.000			538.843.500			Dinas Sosial
		Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat	127.280.000			190.920.000			286.380.000			Dinas Sosial
29	Peningkatan Keterampilan Bagi PMKS											Dinas Sosial
		Pelatihan Keterampilan Taruna Penanggulangan Bencana (TAGANA)	47.900.000			71.850.000			107.775.000			Dinas Sosial
30	Bantuan Sosial		22.095.560.000			33.143.340.000			49.715.010.000			Dinas Sosial
31	Pendidikan politik masyarakat.											Dinas Sosial
		Facilitasi Peyelesaian Perselisihan Partai Politik	450.000.000	APBD	Kab/Kota Prov NAD	517.500.000	APBD	Kab/Kota Prov NAD	595.125.000	APBD	Kab/Kota Prov NAD	Dinas Sosial
		Koordinasi Forum-forum Diskusi Politik	255.390.000	APBD	Kab/Kota Prov NAD	293.698.500	APBD	Kab/Kota Prov NAD	337.753.275	APBD	Kab/Kota Prov NAD	Dinas Sosial
		Penyusunan Database Partai Politik	129.040.000	APBD	Kab/Kota Prov NAD	148.396.000	APBD	Kab/Kota Prov NAD	170.655.400	APBD	Kab/Kota Prov NAD	Dinas Sosial
		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	210.296.600	APBD	Kab/Kota Prov NAD	241.841.000	APBD	Kab/Kota Prov NAD	278.117.000	APBD	Kab/Kota Prov NAD	Dinas Sosial
32	Pengembangan wawasan kebangsaan.											Dinas Sosial
		Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	282.941.000	APBD	Kab/Kota Prov NAD	311.235.100	APBD	Kab/Kota Prov NAD	342.358.000	APBD	Kab/Kota Prov NAD	Dinas Sosial
		Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	356.323.000	APBD	Kab/Kota Prov NAD	391.955.300	APBD	Kab/Kota Prov NAD	431.150.000	APBD	Kab/Kota Prov NAD	Dinas Sosial
33	Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan.											Dinas Sosial
		Seminar, Talkshow, diskusi peningkatan wasbang	300.769.168	APBD	Kab/Kota Prov NAD	330.846.000	APBD	Kab/Kota Prov NAD	363.930.000	APBD	Kab/Kota Prov NAD	Dinas Sosial
		Facilitator Wasbang bagi aparatur Pemda Kab/ Kota	239.515.992	APBD	Kab/Kota Prov NAD	263.467.000	APBD	Kab/Kota Prov NAD	289.814.000	APBD	Kab/Kota Prov NAD	Dinas Sosial
		Sosialisasi ke sekolah	-	-	-	372.600.000	APBD	Kab/Kota Prov NAD	409.860.000	APBD	Kab/Kota Prov NAD	Dinas Sosial
C BUDAYA			59.532.846.000			72.986.327.700			87.922.302.000			Dinas Kebudayaan, BPM, Setda
1	Rapat Koordinasi Kebudayaan		293.252.900			381.228.000			495.597.400			Dinas Kebudayaan
2	Penyusunan, Pengendalian, Monitoring evaluasi program		168.301.400			218.791.000			284.429.300			Dinas Kebudayaan
3	Pemeliharaan/rehabilitasi Taman Rata Salafuddin		2.000.000.000			2.600.000.000			3.380.000.000			Dinas Kebudayaan
4	Pengembangan nilai dan geografi sejarah		60.240.100			78.312.000			101.805.700			Dinas Kebudayaan
5	Perlimbaan, Pelatihan dan Upacara Adat		770.227.000			1.271.295.100			1.624.183.600			Dinas Kebudayaan
6	Pelatihan, penataran, workshop, dialog seni budaya											Dinas Kebudayaan
7	Festifal dan lomba karya seni		249.111.000			323.844.300			420.997.500			Dinas Kebudayaan
8	Rubrik/kuis budaya melalui media cetak dan elektronik		97.525.000			126.782.500			164.817.200			Dinas Kebudayaan
9	Pengumpulan koleksi benda-benda budaya dan ilmiah											Dinas Kebudayaan
10	Pemeliharaan koleksi benda-benda budaya dan ilmiah					300.000.000			390.000.000			Dinas Kebudayaan
11	Penelitian dan penerbitan koleksi benda-benda budaya dan ilmiah					250.000.000			325.000.000			Dinas Kebudayaan
12	Kegiatan Pameran koleksi benda-benda budaya dan ilmiah					250.000.000			325.000.000			Dinas Kebudayaan
13	Kegiatan pameran helling					250.000.000			325.000.000			Dinas Kebudayaan
14	Pameran Regional, Nasional dan Internasional					200.000.000			260.000.000			Dinas Kebudayaan
15	Museum Masuk Sekolah dan Festifal permuseuman					80.000.000			104.000.000			Dinas Kebudayaan
16	Seminar/diskusi budaya dan permuseuman					100.000.000			130.000.000			Dinas Kebudayaan
17	Inventarisasi/dokumentasi koleksi benda-benda budaya dan ilmiah					200.000.000			260.000.000			Dinas Kebudayaan
18	Survey koleksi benda-benda budaya dan ilmiah					250.000.000			325.000.000			Dinas Kebudayaan
19	Pengelolaan perpustakaan dan pengadaan, pemeliharaan, penggandaan buku serta pelayanan					100.000.000			130.000.000			Dinas Kebudayaan
20	Melakukan kegiatan Pameran koleksi benda-benda budaya dan ilmiah					200.000.000			260.000.000			Dinas Kebudayaan
21	Festifal dan lomba Karya Seni		249.111.000			323.844.300			420.997.500			Dinas Kebudayaan
22	TOT dan workshop Seni		122.612.000			159.395.600			2.072.142.000			Dinas Kebudayaan
23	Pelatihan Tenaga teknis Kebudayaan dan Permuseuman					100.000.000			130.000.000			Dinas Kebudayaan
24	Wisata Budaya Pelajar					200.000.000			260.000.000			Dinas Kebudayaan
25	Dokumentasi, publikasi dan informasi Seni serta pengadaan perpustakaan					150.000.000			195.000.000			Dinas Kebudayaan
26	Penyuluhan nilai-nilai budaya dan pembinaan sadar etika, adat pada masyarakat melalui media		136.501.000			177.451.000			230.687.000			Dinas Kebudayaan
27	Dialog Kebudayaan		648.539.600			843.101.000			1.096.031.000			Dinas Kebudayaan
28	Pameran Pagelaran Seni Se Sumatra		101.170.000			131.521.000			170.977.300			Dinas Kebudayaan
29	Temu Taman Budaya se Indonesia		121.670.000			158.171.000			205.622.300			Dinas Kebudayaan
30	Kampanye/promosi budaya		125.200.000			162.760.000			211.588.000			Dinas Kebudayaan
31	Pembuatan Peta Budaya											Dinas Kebudayaan
32	Pagelaran budaya daerah pada event dalam dan luar negeri		616.029.500			800.838.000			1.041.089.800			Dinas Kebudayaan
33	Pembinaan dan evaluasi sanggar-sanggar kesenian, pagelaran dan festifal tingkat nasional		826.450.000			1.074.385.000			1.396.700.500			Dinas Kebudayaan
34	Peringatan hari kesenian, hari-hari besar bersejarah dan anugrah seni					500.000.000			650.000.000			Dinas Kebudayaan
35	Pendeskripsian, pendataan dan pendoku-mentasian dan perekaman group seni		250.000.000			325.000.000			422.500.000			Dinas Kebudayaan
36	Pengadaan Perlalatan Kesenian dan Pakain Tradisional					500.000.000			650.000.000			Dinas Kebudayaan
37	Pergelaran Kesenian, Festival Kesenian dan Pameran					800.000.000			1.040.000.000			Dinas Kebudayaan
38	Even-Event Tk. Provinsi, Nasional, Internasional dan Promosi Seni					1.850.000.000			2.405.000.000			Dinas Kebudayaan
39	Pembinaan, pengembangan, pemeliharaan pelestarian dan penjernihan sejarah serta		3.742.097.500			4.864.726.000			6.324.144.700			Dinas Kebudayaan
40	Kongres Bahasa dan sastra		404.100.000			525.330.000			682.920.000			Dinas Kebudayaan
41	Partisipasi Seni pada event Tk. Provinsi, Nasional dan Internasional					700.000.000			910.000.000			Dinas Kebudayaan

BIDANG	PROGRAM UTAMA	SUB BIDANG / KEGIATAN	2007			2008			2009			KETERANGAN
			NILAI (RUPIAH)	SUMBER PENDANAAN	LOKASI	NILAI (RUPIAH)	SUMBER PENDANAAN	LOKASI	NILAI (RUPIAH)	SUMBER PENDANAAN	LOKASI	
PEREKONOMIAN		42 Pembinaan dan Perencanaan Program Pemberdayaan Masyarakat	4.887.655.000	APBD	21kab/kt	-	-	-	6.000.000.000	APBD	21kab/kt	BPM
	43 Penelitian dan Pengembangan Program	-	APBD	21kab/kt	5.000.000.000	APBD	21kab/kt	6.000.000.000	APBD	21kab/kt	BPM	
	44 Pemberdayaan Sosial Budaya Masyarakat dan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga	1.607.275.000	APBD	21kab/kt	1.928.730.000	APBD	21kab/kt	2.314.476.000	APBD	21kab/kt	BPM	
	45 Pemberdayaan Masyarakat Pesisir melalui Pemanfaatan Sumber Daya Alam	19.057.520.000	APBD	21kab/kt	-	-	-	-	-	-	BPM	
	46 Pemberdayaan Masyarakat melalui Pemanafaatan Sumber Daya Alam, Pesisir dan Daratan	1.265.620.000	APBD	21kab/kt	19.000.000.000	APBD	21kab/kt	19.500.000.000	APBD	21kab/kt	BPM	
	47 Pembinaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK)	18.355.700.000	APBD	21kab/kt	22.026.840.000	APBD	21kab/kt	26.432.208.000	APBD	21kab/kt	BPM	
	48 Pengadaan Kompor Hemat Energi Tanpa Migas	94.222.500	APBD	Prov. NAD	103.644.000	APBD	Prov. NAD	114.009.000	APBD	Prov. NAD	Seida	
	49 Koordinasi dan Monitoring Program Kegiatan Kelembagaan Adat pada Instansi Kab/Kota dalam	193.517.500	APBD	Prov. NAD	212.869.000	APBD	Prov. NAD	234.156.000	APBD	Prov. NAD	Seida	
	50 Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Kelembagaan Adat dan Istiadat pada Kab/Kota dalam Provinsi	7.723.000	APBD	Prov. NAD	8.495.300	APBD	Prov. NAD	9.344.000	APBD	Prov. NAD	Seida	
	51 Koordinasi Pelestarian Pengembangan Kebudayaan Seni Tradisional Aceh	138.100.000	APBD	Prov. NAD	151.910.000	APBD	Prov. NAD	167.101.000	APBD	Prov. NAD	Seida	
	52 Koordinasi Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat	63.076.000	APBD	Prov. NAD	69.383.600	APBD	Prov. NAD	76.321.000	APBD	Prov. NAD	Seida	
	53 Pembinaan Meunasah Kab/Kota dalam Provinsi NAD	82.400.000	APBD	Prov. NAD	90.640.000	APBD	Prov. NAD	99.704.000	APBD	Prov. NAD	Seida	
	54 Pengkajian Kelembagaan Adat di kab/kota dalam Provinsi NAD	2.133.650.000	APBD	Prov. NAD	2.347.015.000	APBD	Prov. NAD	2.581.716.500	APBD	Prov. NAD	Seida	
	55 Koordinas dan Promosi Adat/ Budaya Aceh Dalam Rangka Promosi Terpadu Indonesia di Brazil	472.750.000	APBD	Prov. NAD	520.025.000	APBD	Prov. NAD	572.027.500	APBD	Prov. NAD	Seida	
	56 Penerimaan Kontingen Qasidah Gambia Tk Nasional Provinsi NAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	D Pemuda dan Olah Raga	62.980.836.000	APBD	Prov. NAD	71.244.451.000	APBD	Prov. NAD	75.908.067.000	APBD	Prov. NAD	Dinas Pemuda dan Olah raga	
	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PEREKONOMIAN	1.970.553.811.000	4.370.131.017.300	4.482.088.235.300								
	PERTANIAN	488.106.800.900	1.602.922.155.400	1.733.104.407.500								
A. Tanaman Pangan dan Hortikultura	124.941.324.400	1.103.834.582.800	1.144.837.746.200							Dinas Perkebunan, Dinas Pertanian, BKP, Dinas Perkebunan, Dinas Peternakan		
1. Tanaman pangan												
J PENGEMBANGAN AGRIBISNIS												
1 Administrasi Kegiatan	159.124.000	APBN	B. Aceh	175.036.400	APBN	B. Aceh	192.540.000	APBN	B. Aceh	Dinas Perkebunan		
2 Penyusunan Program dan Rencana Kerja/ Teknis/ Program	175.000.000	APBN	B. Aceh	175.000.000	APBN	B. Aceh	175.000.000	APBN	B. Aceh	Dinas Perkebunan		
3 Rapat, Rapat Koordinasi Kerja/ Dinas/ Pimpinan Kelompok/ Kerja/ Konsultasi	163.504.000	APBN	B. Aceh	163.504.000	APBN	B. Aceh	163.504.000	APBN	B. Aceh	Dinas Perkebunan		
4 Penyelenggaraan Lomba, Sayembara dan Festival	50.250.000	APBN	B. Aceh	50.250.000	APBN	B. Aceh	50.250.000	APBN	B. Aceh	Dinas Perkebunan		
5 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	51.781.000	APBN	B. Aceh	51.781.000	APBN	B. Aceh	51.781.000	APBN	B. Aceh	Dinas Perkebunan		
6 Pengembangan Kelembagaan	33.000.000	APBN	B. Aceh	36.300.000	APBN	B. Aceh	39.930.000	APBN	B. Aceh	Dinas Perkebunan		
7 Monitoring dan Evaluasi	20.967.000	APBN	B. Aceh	23.063.700	APBN	B. Aceh	25.370.000	APBN	B. Aceh	Dinas Perkebunan		
J.3. Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian												
1 Administrasi Kegiatan	19.400.000	APBN	B. Aceh	21.340.000	APBN	B. Aceh	23.474.000	APBN	B. Aceh	Dinas Perkebunan		
2 Penyusunan Program dan Rencana Kerja/ Teknis/ Program	17.240.000	APBN	B. Aceh	18.964.000	APBN	B. Aceh	20.860.000	APBN	B. Aceh	Dinas Perkebunan		
3 Pemantauan dan Evaluasi	15.940.000	APBN	B. Aceh	-	-	-	15.940.000	APBN	B. Aceh	Dinas Perkebunan</		

**RENCANA KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI/KABUPATEN NANGGROE ACEH DARUSSALAM
TAHUN 2007 - 2009**

BIDANG	PROGRAM UTAMA	SUB BIDANG / KEGIATAN	2007			2008			2009			KETERANGAN
			NILAI (RUPIAH)	SUMBER PENDANAAN	LOKASI	NILAI (RUPIAH)	SUMBER PENDANAAN	LOKASI	NILAI (RUPIAH)	SUMBER PENDANAAN	LOKASI	
		18 Penyediaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian										
		- Traktor 4wd (500 Unit)				32.500.000.000	APBD I	18 Kab/Kota	35.750.000.000	APBD I	18 Kab/Kota	Dinas Pertanian
		- Hand Traktor (5000 Unit)				35.000.000.000	APBD I	18 Kab/Kota	35.000.000.000	APBD I	18 Kab/Kota	Dinas Pertanian
		- Mesin pembuat kompos (250 Unit)				1.250.000.000	APBD I	18 Kab/Kota	1.375.000.000	APBD I	18 Kab/Kota	Dinas Pertanian
		- Pabrik Pengolahan Kedele (Up Grade Pabrek di Bireuen)	2.850.000.000	APBD I	Bireuen							Dinas Pertanian
		- Power Thresher (150 unit)				159.375.000	APBD I	17 Kab	159.375.000	APBD I	17 Kab	Dinas Pertanian
				APBN	17 Kab	159.375.000	APBN	17 Kab	159.375.000	APBN	17 Kab	Dinas Pertanian
		- Mesin Tanam Padi (250 unit)				2.500.000.000	APBD I	17 Kab	2.750.000.000	APBD I	17 Kab	Dinas Pertanian
		- Mesin Panen Padi (50 Unit)				3.500.000.000	APBD I	10 Kab	3.850.000.000	APBD I	10 Kab	Dinas Pertanian
		- Alat pemipil Jagung (500 unit)				937.500.000	APBD I	17 Kab	937.500.000	APBD I	17 Kab	Dinas Pertanian
						937.500.000	APBN	17 Kab	937.500.000	APBN	17 Kab	Dinas Pertanian
		- Unit Drayer Palawija 20 unit				2.500.000.000	APBD I	17 Kab	2.750.000.000	APBD I	17 Kab	Dinas Pertanian
			1.200.000.000	APBN	17 Kab	1.200.000.000	APBN	17 Kab	1.300.000.000	APBN	17 Kab	Dinas Pertanian
		- Pabrik Pengolahan Cabe 4 Unit				30.000.000	APBD I	Aceh Tengah	33.000.000	APBD I	Gayo Lues	Dinas Pertanian
		- Alat pengolahan hasil tepat (UP3HP) 250 unit				2.250.000.000	APBD I	17 Kab	2.250.000.000	APBD I	17 Kab	Dinas Pertanian
						1.500.000.000	APBN	17 Kab	1.500.000.000	APBN	17 Kab	Dinas Pertanian
		- Pembangunan RMP Modern 5 unit seluruh NAD	40.000.000.000	APBD I		20.000.000.000	APBD I	1 Kabupaten	20.000.000.000	APBD I	1 Kabu	Dinas Pertanian
		- Up Grade RMP Modern 850 unit seluruh NAD				20.000.000.000	APBD I	200 unit	20.000.000.000	APBD I	200 Unit	Dinas Pertanian
		- Bengkel Asintan (15 Unit)				2.250.000.000	APBD I	3 Kab	2.250.000.000	APBD I	3 Kab/kota	Dinas Pertanian
		- Kendaraan Roda 4 operasi nal khusus Brigade Proteksi Tanaman (18 Unit)				1.200.000.000	APBD I	18 Kab/Kota	1.300.000.000	APBD I	18 Kab/Kota	Dinas Pertanian
19	Pemanan Dem Area untuk Integrated Farming (20 unit @ 100 Ha/Unit)		2.000.000.000	APBD I	20 Kab/Kota	2.000.000.000	APBD I	20 Kab/Kota	2.200.000.000	APBD I	20 Kab/Kota	Dinas Pertanian
20	Penerapan Dem Area padi Organik (20 Unit @ 100 Ha/Unit)		1.000.000.000	APBD I	20 Kab/Kota	1.000.000.000	APBD I	20 Kab/Kota	1.100.000.000	APBD I	20 Kab/Kota	Dinas Pertanian
21	Penyediaan Sarana Produksi pertanian											
		- Saprodi padi lahan sawah terlarang (5000 Ha)	1.060.000.000	APBD I	-	1.165.000.000	APBD I	18 Kab/Kota	1.285.000.000	APBD I	18 Kab/Kota	Dinas Pertanian
		- Saprodi Hortikultura Unggulan daerah (500 Ha)				2.500.000.000	APBD I	18 Kab/Kota	2.750.000.000	APBD I	18 Kab/Kota	Dinas Pertanian
		- Saprodi tanaman obat dan hias (500 Ha)				5.000.000.000	APBD I	18 Kab/Kota	5.000.000.000	APBD I	18 Kab/Kota	Dinas Pertanian
		- Saprodi Tanaman Sayuran (2.000 Ha)				7.500.000.000	APBD I	18 Kab/Kota	7.500.000.000	-	18 Kab/Kota	Dinas Pertanian
		- Cadangan benih Daerah (antisipasi bencana alam) 10.000 ton	22.000.000.000	APBD I	18 Kab/Kota	24.000.000.000	APBD I	18 Kab/Kota	26.700.000.000	APBD I	18 Kab/Kota	Dinas Pertanian
			3.000.000.000	APBN		3.300.000.000	APBN		7.200.000.000	APBN	-	
22	Intensifikasi Dalam Rangka Peningkatan Mutu Produksi, dan Produktivitas Produk Pertanian											
	a. Padi (60.000 Ha/Thn)					100.000.000.000	APBD I	21 Kab/kota	110.000.000.000	APBD I	21 Kab/kota	Dinas Pertanian
			18.010.937.200	APBN	21 Kab/kota	19.850.000.000	APBN	21 Kab/kota	21.000.000.000	APBN	21 Kab/kota	Dinas Pertanian
	b. Kedele (25.000 Ha/Thn)		10.800.000.000	APBD I	5 Kab	62.000.000.000	APBD I	5 Kab	68.000.000.000	APBD I	5 Kab	Dinas Pertanian
			6.160.000.000	APBN	5 Kab	500.000.000	APBN	5 Kab	550.000.000	APBN	5 Kab	Dinas Pertanian
	c. Jagung (20.000 Ha/Thn)		1.700.000.000	APBD I	5 Kab	49.500.000.000	APBD I	5 Kab	54.450.000.000	APBD I	5 Kab	Dinas Pertanian
			1.215.410.000	APBN	8 Kab	500.000.000	APBN	5 Kab	550.000.000	APBN	8 Kab	Dinas Pertanian
	d. K.Tanah (3.000 Ha/Thn)		880.000.000	APBD I	5 Kab	10.500.000.000	APBD I	5 Kab	11.550.000.000	APBD I	5 Kab	Dinas Pertanian
			75.000.000	APBN	Prov. NAD	97.500.000	APBN	Prov. NAD	126.750.000	APBN	Prov. NAD	Dinas Pertanian
23	Pengembangan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pertanian					65.000.000	Prov. NAD		84.500.000	APBN	Prov. NAD	Dinas Pertanian
24	Peningkatan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian					75.000.000	APBN	Prov. NAD	97.500.000	APBN	Prov. NAD	Dinas Pertanian
25	Pengembangan Perbenihan/Perbibitan					80.000.000	APBN	Prov. NAD	104.000.000	APBN	Prov. NAD	Dinas Pertanian
26	Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Pertanian					90.000.000	APBN	Prov. NAD	117.000.000	APBN	Prov. NAD	Dinas Pertanian
27	Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian					100.000.000	APBN	Prov. NAD	130.000.000	APBN	Prov. NAD	Dinas Pertanian
28	Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian					125.000.000	APBN	Prov. NAD	162.500.000	APBN	Prov. NAD	Dinas Pertanian
29	Pembinaan dan Pengembangan Manajemen Pembangunan Pertanian					130.000.000	APBN	Prov. NAD	169.000.000	APBN	Prov. NAD	Dinas Pertanian
30	Pembinaan dan Pengembangan Manajemen Pembangunan Ketahanan Pangan					135.000.000	APBN	Prov. NAD	175.500.000	APBN	Prov. NAD	Dinas Pertanian
31	Penyediaan dan Perbaikan Infrastruktur Pertanian dalam Mendukung Ketahanan Pangan					300.000.000	APBN	Prov. NAD	390.000.000	APBN	Prov. NAD	Dinas Pertanian
32	Bantuan Benih/Bibit Kepada Petani dalam Mendukung Ketahanan Pangan					250.000.000	APBN	Prov. NAD	325.000.000	APBN	Prov. NAD	Dinas Pertanian
33	Peningkatan Kegiatan Pasca Panen dan Pengolahan Pangan					200.000.000	APBN	Prov. NAD	260.000.000	APBN	Prov. NAD	Dinas Pertanian
34	Pembinaan dan Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian					150.000.000	APBN	Prov. NAD	195.000.000	APBN	Prov. NAD	Dinas Pertanian
35	Pembinaan dan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian					160.000.000	APBN	Prov. NAD	208.000.000	APBN	Prov. NAD	Dinas Pertanian
36	Sinkronisasi Kebijakan dan Program Peningkatan Kesejahteraan Petani					170.000.000	APBN	Prov. NAD	221.000.000	APBN	Prov. NAD	Dinas Pertanian
37	Penyelenggaraan Pendidikan Pertanian					180.000.000	APBN	Prov. NAD	234.000.000	APBN	Prov. NAD	Dinas Pertanian
38	Pelayanan Pembiayaan Pertanian					200.000.000	APBN	Prov. NAD	260.000.000	APBN	Prov. NAD	Dinas Pertanian
39	Pengembangan Perizinan dan Investasi					190.000.000	APBN	Prov. NAD	247.000.000	APBN	Prov. NAD	Dinas Pertanian
40	Pemberdayaan Petani, Pelaku Agribisnis dan Penyuluhan Pertanian					118.000.000	APBN	B. Aceh	129.808.800	APBN	B. Aceh	Dinas Pertanian
41	Perbaikan Mutu Hasil Pertanian	107.280.000	APBN	B. Aceh					49.230.600	APBN	B. Aceh	Dinas Pertanian
42	Facilitas Penerapan Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian	39.860.000	APBN	B. Aceh					49.948.800	APBN	B. Aceh	Dinas Pertanian
43	Facilitas Perbaikan Sarana Pengolahan Hasil Pertanian	41.280.000	APBN	B. Aceh					74.124.600	APBN	B. Aceh	Dinas Pertanian
44	Pomosi Produk Pertanian	61.260.000	APBN	B. Aceh					108.028.800	APBN	B. Aceh	Dinas Pertanian
45	Pengembangan Sistem Layanan Informasi Agribisnis	89.280.000	APBN	B. Aceh					42.204.800	APBN	B. Aceh	Dinas Pertanian
46	Pengembangan Pasca Panen Hasil Pertanian	34.880.000	APBN	B. Aceh					12.801.800	APBN	B. Aceh	Dinas Pertanian
47	Pengembangan Pasar Domestik Hasil Pertanian	10.580.000	APBN	B. Aceh					6.050.000	APBN	B. Aceh	Dinas Pertanian
48	Pembinaan dan Pengembangan Penyelenggaraan Pendidikan & Pelatihan Pertanian	5.000.000	APBN	B. Aceh		5.500.000	APBN	B. Aceh	19.378.100	APBN	B. Aceh	Dinas Pertanian
49	Pengelolaan Lahan	16.015.000	APBN	B. Aceh					16.150.000	APBN	B. Aceh	Dinas Pertanian
50	Perluasan Areal	15.000.000	APBN	B. Aceh		16.500.000	APBN	B. Aceh	2.400.000.000	APBD I	17 Kab/kota	Dinas Pertanian
51	Pembentukan dan Revitalisasi Kelompok Tani (5000 Kelompok)	2.000.000.000	APBD I	17 Kab/kota		2.200.000.000	APBD I	18 Kab/kota	2.400.000.000	APBD I	17 Kab/kota	Dinas Pertanian
		408.000.000	APBN	21 Kab/kota		448.800.000	APBN	18 Kab/kota	490.000.000	APBN	21 Kab/kota	Dinas Pertanian
B.	Perkebunan		22.472.796.000			30.278.115.200			33.494.366.700			Dinas Perkebunan
1	Magang Petugas Ke Pusat Penelitian & Pengolahan Hasil Perkebunan	47.000.000	APBD TK. I	Jawa Timur (Puslit - Jember)	51.700.000	APBD TK. I	Sumut, Sumsel	56.870.000	APBD TK. I	Jawa Barat		Dinas Perkebunan
2	Pengendalian dan Pemantapan Alih Teknologi PHT	608.621.000	APBD TK. I	A. Selatan, Sabang	669.483.100	APBD TK. I	A. Selatan, Sabang, Pidie					Dinas Perkebunan
3	Peningkatan Sumber Daya Teknologi Pengolahan Hasil Perkebunan	119.700.000	APBD TK. I	Prov. NAD	131.670.000	APBD TK. I	A. Selatan, Sabang, Pidie	144.837.000	APBD TK. I	Prov. NAD		Dinas Perkebunan
4	Apresiasi Penggunaan Perangkat Teknologi Informasi (TI) bagi Penyuluh & Petugas Perkebunan	50.250.000	APBD TK. I	18 Kab	55.275.000	APBD TK. I	A. Selatan, Sabang, Pidie	60.802.500	APBD TK. I	Prov. NAD		Dinas Perkebunan
5	Pengembangan Agribisnis Perkebunan Kelapa Sawit untuk Petani Miskin	3.806.730.000	APBD TK. I	A. Selatan	5.443.623.900	APBD TK. I	A. Utara	6.096.858.000	APBD TK. I	A. Timur, A. Singkil		Dinas Perkebunan
6	Pengembangan Agribisnis Perkebunan Kakao Rakyat	5.990.400.000	APBD TK. I	Pidie	8.566.272.000	APBD TK. I	Pidie, A. Timur	9.594.224.000	APBD TK. I	A. Timur, Bireuen, A. Tenggara		Dinas Perkebunan
7	Pengembangan dan Rehabilitasi Tanaman Perkebunan Rakyat	4.657.155.000	APBD TK. I	Gayo Lues, A. Tengah, B. Meriah, Agara, A. Selatan, Pidie	6.659.731.650	APBD TK. I	A. Tengah, B. Meriah, Agara, A. Selatan, Pidie	7.458.899.000	APBD TK. I	A. Utara, A. Fongah, A. Timur, Bireuen, A. Selatan		Dinas Perkebunan
8	Pengembangan Kawasan Agribisnis Perkebunan Klp. Sawit Rakyat	2.934.610.000	APBD TK. I	Abdya, A. Besar	4.196.492.300	APBD TK. I	A. Utara, A. Selatan	4.700.071.000	APBD TK. I	A. Jaya, A. Barat		Dinas Perkebunan

**RENCANA KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI/KABUPATEN NANGGROE ACEH DARUSSALAM
TAHUN 2007 - 2009**

BIDANG	PROGRAM UTAMA	SUB BIDANG / KEGIATAN	2007			2008			2009			KETERANGAN
			NILAI (RUPIAH)	SUMBER PENDANAAN	LOKASI	NILAI (RUPIAH)	SUMBER PENDANAAN	LOKASI	NILAI (RUPIAH)	SUMBER PENDANAAN	LOKASI	
		9 Pengembangan Usaha Perbenihan, Penyediaan Bibit & Pengawasan Peredaran Benih bagi petani	1.269.625.000	APBD TK. I	Agara, Gayo Lues, A. Selatan	1.815.563.750	APBD TK. I	A. Utara, A. Selatan, A. Timur	2.033.431.400	APBD TK. I	A. Jaya, A. Barat, A. Timur	Dinas Perkebunan
		10 Operasional Penyuluh Pertanian	557.260.000	APBN	B. Aceh	612.986.000	APBN	B. Aceh	674.284.600	APBN	B. Aceh	Dinas Perkebunan
		11 Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Produk Perkebunan	62.600.000	APBN	B. Aceh	68.860.000	APBN	B. Aceh	75.746.000	APBN	B. Aceh	Dinas Perkebunan
		12 Pengamatan, Peramalan Organisme Pengganggu Tanaman & fenomena Iklim	142.800.000	APBN	B. Aceh	157.080.000	APBN	B. Aceh	172.788.000	APBN	B. Aceh	Dinas Perkebunan
		13 Pengawasan Mutu Pupuk dan Pembinaan Aplikasi	38.200.000	APBN	B. Aceh	42.020.000	APBN	B. Aceh	46.222.000	APBN	B. Aceh	Dinas Perkebunan
		14 Pembinaan Manajemen Pengembangan Perkebunan	524.070.000	APBN	B. Aceh	524.070.000	APBN	B. Aceh	524.070.000	APBN	B. Aceh	Dinas Perkebunan
		15 Pembinaan Perbenihan Perkebunan	232.500.000	APBN	B. Aceh	235.750.000	APBN	B. Aceh	281.325.000	APBN	B. Aceh	Dinas Perkebunan
		16 Pengawasan Benih	18.000.000	APBN	B. Aceh	19.800.000	APBN	B. Aceh	21.780.000	APBN	B. Aceh	Dinas Perkebunan
		17 Penanggulangan Hama/Penyakit Tanaman (PENGENDALIAN HAMA BRONTISPA (KELAPA)	264.900.000	APBN	Pidie				320.529.000	APBN	B. Meriah	Dinas Perkebunan
		18 Pembinaan Manajemen Pengembangan Perkebunan										Dinas Perkebunan
		19 (Pengawasan Revitalisasi Perkebunan Kab. Pidie)	66.875.000	APBN	Pidie				80.919.000	APBN	Pidie	Dinas Perkebunan
		20 (Pengawasan Revitalisasi Perkebunan Kab. Aceh Barat Daya)	28.125.000	APBN	ABDYA							Dinas Perkebunan
		21 (Pengawasan Revitalisasi Perkebunan Kab. Aceh Utara)	41.375.000	APBN	Aceh Utara							Dinas Perkebunan
		22 (Pengawasan Revitalisasi Perkebunan Kab. Aceh Tamiang)	34.875.000	APBN	A. Tamiang				42.199.000	APBN		Dinas Perkebunan
		23 (Pengawasan Revitalisasi Perkebunan Kota Langsa)	29.825.000	APBN	Langsa							Dinas Perkebunan
		24 (Pengawasan Revitalisasi Perkebunan Kota Sabang)	31.375.000	APBN	Sabang							Dinas Perkebunan
		25 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	130.570.000	APBD TK. I	B. Aceh	143.627.000	APBD TK. I	B. Aceh	157.989.700	APBD TK. I	B. Aceh	Dinas Perkebunan
		26 Fasilitas Pengendalian OPT Perkebunan	713.480.000	APBD TK. I	Sabang, B. Meriah, A. Timur, A. Selatan	784.828.000	sda	Simeulue, A. Selatan	863.310.800	sda	A. Barat, N. Raya	Dinas Perkebunan
		27 Promosi atas Hasil Produksi Perkebunan Unggulan daerah	72.075.000	APBD TK. I	B. Aceh	79.282.500	APBD TK. I	B. Aceh	87.210.700	APBD TK. I	B. Aceh	Dinas Perkebunan
C. Peternakan			153.848.630.000			201.883.219.000			262.448.184.200			Dinas Peternakan
		1 ReisFocking	19.500.000.000	BRR	Prov. NAD	25.350.000.000	BRR	Prov. NAD	32.955.000.000	BRR	Prov. NAD	Dinas Peternakan
		2 Penelitian Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak	1.613.900.000	APBD	Prov. NAD	2.098.070.000	APBD	Prov. NAD	2.727.491.000	APBD	Prov. NAD	Dinas Peternakan
		3 Penanggulangan Kasus Flu Burung	1.958.670.000	APBD	Prov. NAD	2.546.271.000	APBD	Prov. NAD	3.310.152.300	APBD	Prov. NAD	Dinas Peternakan
		4 Diagnosa Penyakit Hewan dan Peningkatan Mutu Genetik	104.600.000	APBD	Prov. NAD	135.980.000	APBD	Prov. NAD	176.774.000	APBD	Prov. NAD	Dinas Peternakan
		5 Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat	6.233.600.000	APBD	Prov. NAD	8.103.680.000	APBD	Prov. NAD	10.534.784.000	APBD	Prov. NAD	Dinas Peternakan
		6 Perencanaan Pembangunan Peternakan	242.285.000	APBD	Prov. NAD	314.970.500	APBD	Prov. NAD	409.461.600	APBD	Prov. NAD	Dinas Peternakan
		7 Pengembangan Agribisnis Kader Peternakan di Saree	323.070.000	APBD	Prov. NAD	419.991.000	APBD	Prov. NAD	545.988.300	APBD	Prov. NAD	Dinas Peternakan
		8 Pengembangan Agribisnis Ayam Ras Petelur di Kawasan Saree	980.835.000	APBD	Prov. NAD	1.275.085.500	APBD	Prov. NAD	1.657.611.100	APBD	Prov. NAD	Dinas Peternakan
		9 Pembangunan Kawasan Peternakan terpadu	101.500.000	APBD	Prov. NAD	131.950.000	APBD	Prov. NAD	171.535.000	APBD	Prov. NAD	Dinas Peternakan
		10 Pembangunan Kebun Kumpu HMT dan Padang Pengembalaan	448.660.000	APBD	Prov. NAD	583.258.200	APBD	Prov. NAD	758.235.400	APBD	Prov. NAD	Dinas Peternakan
		11 Pengembangan Kawasan Agribisnis	114.659.315.000	APBD	Prov. NAD	148.277.109.500	APBD	Prov. NAD	192.760.242.000	APBD	Prov. NAD	Dinas Peternakan
		12 Pembangunan Sarana dan Prasarana Pasar Produksi Hasil Peternakan	105.600.000	APBD	Prov. NAD	137.280.000	APBD	Prov. NAD	178.464.000	APBD	Prov. NAD	Dinas Peternakan
		13 Magang Pelaku Usaha di Unit Pengolahan Produk Peternakan	32.300.000	APBD	Prov. NAD	41.990.000	APBD	Prov. NAD	54.587.000	APBD	Prov. NAD	Dinas Peternakan
		14 Pengolahan dan Pemasaran Produk Peternakan	28.000.000	APBD	Prov. NAD	36.400.000	APBD	Prov. NAD	47.320.000	APBD	Prov. NAD	Dinas Peternakan
		15 Pengembangan Agribisnis Peternakan	994.660.000	APBN	Prov. NAD	1.293.318.000	APBN	Prov. NAD	1.681.313.400	APBN	Prov. NAD	Dinas Peternakan
		16 Peningkatan Populasi Ternak	279.660.000	APBN	Prov. NAD	363.298.000	APBN	Prov. NAD	472.287.400	APBN	Prov. NAD	Dinas Peternakan
		17 Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian	278.400.000	APBN	Prov. NAD	361.920.000	APBN	Prov. NAD	470.496.000	APBN	Prov. NAD	Dinas Peternakan
		18 Pengembangan dan Rehabilitasi Infrastruktur Pertanian dan Pedesaan	437.000.000	APBN	Prov. NAD	568.100.000	APBN	Prov. NAD	738.530.000	APBN	Prov. NAD	Dinas Peternakan
		19 Pengembangan Sistem Perkarantinahan Pertanian dan Standart Mutu Komoditas Pertanian				200.000.000	APBN	Prov. NAD	260.000.000	APBN	Prov. NAD	Dinas Peternakan
		20 Penelitian dan Pengembangan Teknologi Budidaya, Pasca Panen dan Mekanisme Pertanian				250.000.000	APBN	Prov. NAD	325.000.000	APBN	Prov. NAD	Dinas Peternakan
		21 Pembinaan dan Pengembangan Perbenihan Pertanian				100.000.000	APBN	Prov. NAD	247.000.000	APBN	Prov. NAD	Dinas Peternakan
		22 Pengembangan Kelembagaan dan Komunikasi Hasil Litbang Pertanian				300.000.000	APBN	Prov. NAD	390.000.000	APBN	Prov. NAD	Dinas Peternakan
		23 Pengembangan Perbibitan Ternak					APBN	Prov. NAD		APBN	Prov. NAD	Dinas Peternakan
		24 Pengembangan Bahan Baku Bioenergi					APBN	Prov. NAD		APBN	Prov. NAD	Dinas Peternakan
		25 Revitalisasi Unit Pelayanan Jasa Agribisnis (UPJA) dan Kelompok Upja (KUPJA)					APBN	Prov. NAD		APBN	Prov. NAD	Dinas Peternakan
		26 Pengembangan Pertanian Terpadu Tanaman Ternak, Kompos dan Biogas					APBN	Prov. NAD		APBN	Prov. NAD	Dinas Peternakan
		27 Penyediaan danPerbaikan Infrastruktur Pertanian dalam mendukung Pengembangan					APBN	Prov. NAD		APBN	Prov. NAD	Dinas Peternakan
		28 Mekanisme Kegiatan Produksi Pertanian Pasca Panen dalam Mendukung Pengembangan					APBN	Prov. NAD		APBN	Prov. NAD	Dinas Peternakan
		29 Perindugan keamanan Produk Peternakan					APBN	Prov. NAD		APBN	Prov. NAD	Dinas Peternakan
		30 Pengembangan Pembibitan Sapi					APBN	Prov. NAD		APBN	Prov. NAD	Dinas Peternakan
		31 Penerapan Teknologi Peternakan Tepat Guna	452.075.000	APBD	Prov. NAD	587.697.500	APBD	Prov. NAD	764.006.700	APBD	Prov. NAD	Dinas Peternakan
		32 Pemulihan dan Pengembangan Peternakan										
		- Pidie	1.901.700.000	BRR	Prov. NAD	2.472.210.000	BRR	Prov. NAD	3.213.873.000	BRR	Prov. NAD	Dinas Peternakan
		- Aceh Utara	1.734.900.000	BRR	Prov. NAD	2.255.370.000	BRR	Prov. NAD	2.931.981.000	BRR	Prov. NAD	Dinas Peternakan
		- Bireun	2.037.900.000	BRR	Prov. NAD	2.649.270.000	BRR	Prov. NAD	3.444.051.000	BRR	Prov. NAD	Dinas Peternakan
D. Kehutanan			186.844.050.500			266.926.238.400			292.324.110.400			
		1 Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	86.600.000			100.000.000			110.000.000			
		1 Pengembangan hasil hutan non-kayu		APBD	Saree, Kab. A. Besar		APBD	Saree, Kab. A. Besar		APBD	Saree, Kab. A. Besar	
		2 Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan	1.100.000.000	APBD	Seluruh Prov. NAD	1.750.000.000	APBD	Seluruh Prov. NAD	1.925.000.000	APBD	Seluruh Prov. NAD	
		3 Perencanaan dan Penyajian Unit Kelola Pemanfaatan Hutan Produksi	253.450.000	APBN	Seluruh Prov. NAD	304.140.000	APBN	Seluruh Prov. NAD	334.554.000	APBN	Seluruh Prov. NAD	
		4 Pengembangan Pengelolaan Pemanfaatan Hutan Alam	535.830.000	APBN	Seluruh Prov. NAD	642.996.000	APBN	Seluruh Prov. NAD	707.295.600	APBN	Seluruh Prov. NAD	
		5 Pengembangan Pengelolaan Pemanfaatan Hutan Tanaman	122.675.000	APBN	Seluruh Prov. NAD	147.210.000	APBN	Seluruh Prov. NAD	161.931.000	APBN	Seluruh Prov. NAD	
		6 Pengembangan Industri dan Pemasaran Hasil Hutan	273.010.000	APBN	Seluruh Prov. NAD	327.612.000	APBN	Seluruh Prov. NAD	360.373.200	APBN	Seluruh Prov. NAD	
		7 Pengendalian Peredaran Hasil Hutan dan Optimalisasi PNPB	379.130.000	APBN	Seluruh Prov. NAD	454.956.000	APBN	Seluruh Prov. NAD	500.451.600	APBN	Seluruh Prov. NAD	
		8 Pengelolaan Hutan Produksi Alam yang tidak dibebani Hak/ijin pemanfaatan				1.000.000.000	APBD	Seluruh Prov. NAD	1.100.000.000	APBD	Seluruh Prov. NAD	
		9 Pengelolaan (Pemanfaatan) hutan produksi alam				1.200.000.000	APBD	Seluruh Prov. NAD	1.320.000.000	APBD	Seluruh Prov. NAD	
		10 Restrukturisasi industri primer kehutanan				1.500.000.000	APBN	Seluruh Prov. NAD	1.650.000.000	APBD	Seluruh Prov. NAD	
		11 Penertiban Tata Usaha Hasil Hutan				1.500.000.000	APBD	Seluruh Prov. NAD	1.600.000.000	APBD	Seluruh Prov. NAD	
		12 Penyusunan rencana kehutanan				1.450.000.000	APBD	Seluruh Prov. NAD	1.600.000.000	APBD	Seluruh Prov. NAD	
		13 Pembangunan KPH DAS Prov. NAD				2.000.000.000	APBD	Seluruh Prov. NAD	1.200.000.000	APBD	Seluruh Prov. NAD	
		14 Pengembangan pemanfaatan HHBK				350.000.000	APBN	Seluruh Prov. NAD	400.000.000	APBN	Seluruh Prov. NAD	

**RENCANA KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI/KABUPATEN NANGGROE ACEH DARUSSALAM
TAHUN 2007 - 2009**

BIDANG	PROGRAM UTAMA	SUB BIDANG / KEGIATAN	2007			2008			2009			KETERANGAN
			NILAI (RUPIAH)	SUMBER PENDANAAN	LOKASI	NILAI (RUPIAH)	SUMBER PENDANAAN	LOKASI	NILAI (RUPIAH)	SUMBER PENDANAAN	LOKASI	
		2 Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan										
		1 Pembinaan, pengendalian dan pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan	521.000.000	APBD	DAS Kr. Peusangan dan A. Tengah	1.000.000.000	APBD	DAS Kr. Peusangan dan A. Tengah	1.100.000.000	APBD	DAS Kr. Peusangan dan A. Tengah	
		2 Pengembangan Pemanfaatan Wisata Alam	8.053.575.000	APBN/BRR	Seluruh Prov. NAD	9.664.290.000	APBN/BRR	Seluruh Prov. NAD	10.630.719.000	APBN/BRR	Seluruh Prov. NAD	
		3 Pengembangan Mangrove Center	26.049.790.000	APBN/BRR	Seluruh Prov. NAD	31.259.748.000	APBN/BRR	Seluruh Prov. NAD	34.385.722.800	APBN/BRR	Seluruh Prov. NAD	
		4 Pengembangan Kualitas SDM dan Kapasitas Kelompok	1.135.000.000	APBN/BRR	Seluruh Prov. NAD	1.362.000.000	APBN/BRR	Seluruh Prov. NAD	1.498.200.000	APBN/BRR	Seluruh Prov. NAD	
		5 Pembuatan Persemaian Induk	200.000.000	APBN/BRR	Seluruh Prov. NAD	240.000.000	APBN/BRR	Seluruh Prov. NAD	264.000.000	APBN/BRR	Seluruh Prov. NAD	
		6 Monitoring dan Pengawasan Pelaksanaan Program dan Kegiatan	900.000.000	APBN/BRR	Seluruh Prov. NAD	1.080.000.000	APBN/BRR	Seluruh Prov. NAD	1.188.000.000	APBN/BRR	Seluruh Prov. NAD	
		7 Rehabilitasi Hutan dan Lahan	5.721.791.000	APBN/BRR	Seluruh Prov. NAD	6.866.149.200	APBN/BRR	Seluruh Prov. NAD	7.552.764.000	APBN/BRR	Seluruh Prov. NAD	
		8 Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Sekitar Hutan	27.039.884.000	APBN/BRR	Seluruh Prov. NAD	32.447.860.800	APBN/BRR	Seluruh Prov. NAD	35.692.646.000	APBN/BRR	Seluruh Prov. NAD	
		9 Pengembangan Hutan Pendidikan Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan	775.000.000	APBN/BRR	Seluruh Prov. NAD	930.000.000	APBN/BRR	Seluruh Prov. NAD	1.023.000.000	APBN/BRR	Seluruh Prov. NAD	
		10 Penguatan Kelembagaan Staf Dinas Kehutanan	100.000.000	APBN/BRR	Seluruh Prov. NAD	120.000.000	APBN/BRR	Seluruh Prov. NAD	132.000.000	APBN/BRR	Seluruh Prov. NAD	
		11 Pengawasan/Supervisi Kegiatan	100.000.000	APBN/BRR	Seluruh Prov. NAD	120.000.000	APBN/BRR	Seluruh Prov. NAD	132.000.000	APBN/BRR	Seluruh Prov. NAD	
		12 Pengembangan perbenihan				750.000.000	APBD	Provinsi NAD	800.000.000	APBD	Provinsi NAD	
		13 Pengelolaan Taman Nasional				1.100.000.000	APBN	Seluruh Prov. NAD	1.250.000.000	APBN	Seluruh Prov. NAD	
		14 Pengelolaan KSA/KPA/TB				1.350.000.000	APBN	Seluruh Prov. NAD	1.500.000.000	APBN	Seluruh Prov. NAD	
		15 Pengendalian kebakaran hutan				2.500.000.000	APBD	Seluruh Prov. NAD	2.550.000.000	APBD	Seluruh Prov. NAD	
		16 Pengelolaan keanekaragaman hayati				2.000.000.000	APBD	Seluruh Prov. NAD	2.200.000.000	APBD	Seluruh Prov. NAD	
		17 Pengelolaan hutan lindung				1.500.000.000	APBD	Seluruh Prov. NAD	1.600.000.000	APBD	Seluruh Prov. NAD	
		18 Pemanfaatan produk TSL dan jasa lingkungan				1.000.000.000	APBN	Seluruh Prov. NAD	1.000.000.000	APBN	Seluruh Prov. NAD	
						650.000.000	APBD		750.000.000	APBD		
		19 Penelitian dan pengembangan kehutanan				1.200.000.000	APBD	Seluruh Prov. NAD	1.350.000.000	APBD	Seluruh Prov. NAD	
		20 Sistem penunjang kelitbangan dan penerapan hasil litbang kehutanan				1.600.000.000	APBD	Seluruh Prov. NAD	1.650.000.000	APBD	Seluruh Prov. NAD	
		21 Pengembangan DIKLAT kehutanan				1.000.000.000	APBD	Seluruh Prov. NAD	1.150.000.000	APBD	Seluruh Prov. NAD	
		22 Pengembangan penyuluhan kehutanan				1.000.000.000	APBD	Seluruh Prov. NAD	1.200.000.000	APBD	Seluruh Prov. NAD	
		23 Standarisasi produk barang dan jasa kehutanan				1.200.000.000	APBD	Seluruh Prov. NAD	1.300.000.000	APBD	Seluruh Prov. NAD	
		24 Pengelolaan DAS				2.000.000.000	APBD	Seluruh Prov. NAD	2.150.000.000	APBD	Seluruh Prov. NAD	
		25 Pengembangan rencana dan penganggaran pembangunan kehutanan				1.500.000.000	APBD	Seluruh Prov. NAD	1.700.000.000	APBD	Seluruh Prov. NAD	
		26 Pengembangan informasi kehutanan				1.100.000.000	APBD	Seluruh Prov. NAD	1.250.000.000	APBD	Seluruh Prov. NAD	
		27 Koordinasi penyelenggaraan reboisasi dan penghijauan hutan				1.200.000.000	APBD	Seluruh Prov. NAD	1.400.000.000	APBD	Seluruh Prov. NAD	
		28 Penanaman pohon pada kawasan hutan industri dan hutan wisata				1.000.000.000	APBD	Seluruh Prov. NAD	1.200.000.000	APBD	Seluruh Prov. NAD	
		29 Pemeliharaan kawasan hutan industri dan hutan wisata				1.200.000.000	APBD	Seluruh Prov. NAD	1.350.000.000	APBD	Seluruh Prov. NAD	
		3 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan										
		1 Penyuluhan Kesadaran Masyarakat Mengenai Dampak Perusakan Hutan	250.000.000	APBD	Banda Aceh	300.000.000	APBD	Banda Aceh	330.000.000	APBD	Banda Aceh	
		2 Kegiatan Pengembangan Taman Hutan Raya Pocut Meurah Intan	1.350.000.000	APBD	Saree, Kab.A. Besar	4.500.000.000	APBD	Saree, Kab.A. Besar	4.950.000.000	APBD	Saree, Kab.A. Besar	
		3 Kegiatan Pengelolaan Kawasan lindung, Pengamanan dan Perlindungan Hutan dan Hasil Hutan	1.200.000.000	APBD	Seluruh Prov. NAD	2.000.000.000	APBD	Seluruh Prov. NAD	2.200.000.000	APBD	Seluruh Prov. NAD	
		4 Rekrutimen Tenaga Polhut Dari Masyarakat (Reintegrasi) dan Operasi Pemberantasan Illegal Logging	98.019.626.000	APBD	Seluruh Prov. NAD	100.000.000.000	APBD	Seluruh Prov. NAD	110.000.000.000	APBD	Seluruh Prov. NAD	
		5 Perlindungan dan Pengamanan Hutan	210.000.000	APBN	Seluruh Prov. NAD	252.000.000	APBN	Seluruh Prov. NAD	277.200.000	APBN	Seluruh Prov. NAD	
		6 Pengelolaan Taman Nasional dan Kawasan Konservasi Lainnya (KSA/KPA/TB) dan Hutan Lindung	109.810.000	APBN	Seluruh Prov. NAD	131.772.000	APBN	Seluruh Prov. NAD	144.949.200	APBN	Seluruh Prov. NAD	
		7 Perencanaan dan Pengendalian Pengelolaan Kawasan Konservasi	19.160.000	APBN	Seluruh Prov. NAD	22.992.000	APBN	Seluruh Prov. NAD	25.291.200	APBN	Seluruh Prov. NAD	
		8 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDAH dan Ekosistemnya	15.000.000	APBN	Seluruh Prov. NAD	18.000.000	APBN	Seluruh Prov. NAD	19.800.000	APBN	Seluruh Prov. NAD	
		9 Pengadaan Peralatan Pengaman Hutan	1.824.960.000	APBN/BRR	Seluruh Prov. NAD	2.189.952.000	APBN/BRR	Seluruh Prov. NAD	2.408.947.200	APBN/BRR	Seluruh Prov. NAD	
		10 Pemberdayaan Pawang Uten	1.500.000.000	APBN/BRR	Seluruh Prov. NAD	1.800.000.000	APBN/BRR	Seluruh Prov. NAD	1.980.000.000	APBN/BRR	Seluruh Prov. NAD	
		11 Penyiapan Kelembagaan Provinsi Konservasi	600.000.000	APBN/BRR	Seluruh Prov. NAD	720.000.000	APBN/BRR	Seluruh Prov. NAD	792.000.000	APBN/BRR	Seluruh Prov. NAD	
		12 Pengamanan Kawasan Hutan				1.200.000.000	APBD	Seluruh Prov. NAD	1.350.000.000	APBD	Seluruh Prov. NAD	
		13 Pengembangan hutan rakyat dan hutan tanaman rakyat				1.000.000.000	APBN	Seluruh Prov. NAD	1.000.000.000	APBN	Seluruh Prov. NAD	
						300.000.000	APBD		500.000.000	APBD		
		14 Pengembangan daerah penyangga di sekitar kawasan konservasi				1.000.000.000	APBN	Seluruh Prov. NAD	1.200.000.000	APBN	Seluruh Prov. NAD	
		15 Pengembangan RHL Swadaya				250.000.000	APBN	Seluruh Prov. NAD	350.000.000	APBN	Seluruh Prov. NAD	

**RENCANA KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI/KABUPATEN NANGGROE ACEH DARUSSALAM
TAHUN 2007 - 2009**

BIDANG	PROGRAM UTAMA	SUB BIDANG / KEGIATAN	2007			2008			2009			KETERANGAN
			NILAI (RUPIAH)	SUMBER PENDANAAN	LOKASI	NILAI (RUPIAH)	SUMBER PENDANAAN	LOKASI	NILAI (RUPIAH)	SUMBER PENDANAAN	LOKASI	
		16 Pengembangan hutan kemasyarakatan				1.000.000.000 400.000.000	APBD APBN	Seluruh Prov. NAD	1.000.000.000 500.000.000	APBD APBN	Seluruh Prov. NAD	
		17 Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan				1.000.000.000 1.450.000.000	APBD APBD	Seluruh Prov. NAD	1.000.000.000 1.550.000.000	APBD APBD	Seluruh Prov. NAD	
		18 Sosialisasi pencegahan dan dampak kebakaran hutan dan lahan				1.000.000.000	APBD	Seluruh Prov. NAD	1.200.000.000	APBD	Seluruh Prov. NAD	
		19 Bimbingan teknis pengendalian kebakaran hutan dan lahan				1.000.000.000	APBD	Seluruh Prov. NAD	1.100.000.000	APBD	Seluruh Prov. NAD	
		20 Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan				1.000.000.000	APBN	Seluruh Prov. NAD	1.200.000.000	APBN	Seluruh Prov. NAD	
	4	Program Perencanaan Dan Pengembangan Hutan										
	1	Kegiatan Pemantapan dan Pengendalian Kawasan Hutan	638.733.500	APBD	Kabupaten Pidie, Aceh Tamiang, dan Aceh Barat	1.000.000.000	APBD	Kabupaten Pidie, Aceh Tamiang, dan Aceh Barat	1.100.000.000	APBD	Kabupaten Pidie, Aceh Tamiang, dan Aceh Barat	
	2	Identifikasi Perambahan Hutan di Hulu DAS Tamiang	1.569.303.000	APBD	Kab. Aceh Tamiang	0	0		0	0	0	
	3	Penguikuan dan Penatgunaan Kawasan Hutan	550.830.000	APBN	Seluruh Prov. NAD	660.996.000	APBN	Seluruh Prov. NAD	727.095.600	APBN	Seluruh Prov. NAD	
	4	Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)	382.137.000	APBN	Seluruh Prov. NAD	458.564.400	APBN	Seluruh Prov. NAD	504.420.000	APBN	Seluruh Prov. NAD	
	5	Inventarisasi dan Perpetaan SDH				600.000.000	APBN	Seluruh Prov. NAD	650.000.000	APBN	Seluruh Prov. NAD	
	6	Pengembangan Sistem Informasi Assessment Pembangunan Kehutanan (SIAPHUT)				500.000.000 300.000.000	APBD APBN	Seluruh Prov. NAD	600.000.000 350.000.000	APBD APBN	Seluruh Prov. NAD	
			900.000.000	APBD		1.000.000.000	APBD		1.000.000.000	APBD		
	7	Penyiapan dan Evaluasi Penggunaan dan Perubahan Kawasan Hutan				1.350.000.000	APBD	Seluruh Prov. NAD	1.500.000.000	APBD	Seluruh Prov. NAD	
	8	Pengembangan hutan masyarakat adat				1.400.000.000	APBD	Seluruh Prov. NAD	1.600.000.000	APBD	Seluruh Prov. NAD	
	9	Pendampingan kelompok usaha perhutanan rakyat				1.000.000.000	APBN	Seluruh Prov. NAD	1.050.000.000	APBN	Seluruh Prov. NAD	
						650.000.000	APBD		750.000.000	APBD		
	5	Program pemanfaatan kawasan hutan industri										
		Pertanian tanaman palawija, padi gogorancak				1.500.000.000	APBN	Seluruh Prov. NAD	1.600.000.000	APBN	Seluruh Prov. NAD	
	6	Program pembinaan dan penertihan industri hasil hutan										
	1	Penyusunan peraturan daerah mengenai pengelolaan industri hasil hutan				1.000.000.000	APBD	Seluruh Prov. NAD	1.200.000.000	APBD	Seluruh Prov. NAD	
	2	Sosialisasi peraturan daerah mengenai pengelolaan industri hasil hutan				1.000.000.000	APBD	Seluruh Prov. NAD	1.200.000.000	APBD	Seluruh Prov. NAD	
	3	Pengawasan dan penertihan pelaksanaan peraturan daerah mengenai pengelolaan industri hasil hutan				1.200.000.000	APBD	Seluruh Prov. NAD	135.000.000	APBD	Seluruh Prov. NAD	
	4	Perluasan akses layanan informasi pemasaran hasil hutan				1.500.000.000	APBN	Seluruh Prov. NAD	1.650.000.000	APBN	Seluruh Prov. NAD	
	7	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.721.145.000	APBD	Banda Aceh	1.955.000.000	APBD	Banda Aceh	2.248.250.000	APBD	Banda Aceh	
	8	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	3.076.611.000	APBD	Banda Aceh	4.150.000.000	APBD	Banda Aceh	4.772.500.000	APBD	Banda Aceh	
	9	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur										
	1	Pendidikan dan pelatihan formal	140.000.000	APBD	Banda Aceh	200.000.000	APBD	Banda Aceh	230.000.000	APBD	Banda Aceh	
	2	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	320.000.000	APBD	Banda Aceh	400.000.000	APBD	Banda Aceh	460.000.000	APBD	Banda Aceh	
	PERIKANAN		20.027.000.000			124.960.000.000			119.000.000.000			Dinas Kelautan dan Perikanan
		1 Pengembangan bibit ikan unggul	2.411.000.000	APBD	Bireun, A. Tgh, A. Tggr, Simeulu	3.000.000.000	APBD	Bireun, B. Mrh A. Tgh, A. Tggr, G. Lues, Sim	3.000.000.000	APBD	Bireun, B. Mrh A. Tgh, A. Tggr, G. Lues, Sim	Dinas Kelautan dan Perikanan
		2 Pengadaan calon induk ikan unggul.				500.000.000	APBD	Bireun, B. Mrh A. Tgh, A. Tggr, G. Lues, Sim	500.000.000	APBD	Bireun, B. Mrh A. Tgh, A. Tggr, G. Lues, Sim	Dinas Kelautan dan Perikanan
		3 Revitalisasi perikanan budidaya di kawasan budidaya air tawar.				1.000.000.000	APBD	Bireun, B. Mrh, A. Tgh, A. Tggr, Gy Lues	1.000.000.000	APBD	Bireun, B. Mrh, A. Tgh, A. Tggr, Gy Lues	Dinas Kelautan dan Perikanan
		4 Pengembangan kawasan pendederan ikan unggul.				100.000.000	APBD	A.Tengah	100.000.000	APBD	G.Lues	Dinas Kelautan dan Perikanan
		5 Revitalisasi perikanan budidaya di kawasan budidaya air payau				3.000.000.000	APBD	ABsr, Pidie, Bir,A.Utr, Lhok, A.Tmr, A.Tmg, Lgs.	3.500.000.000	APBD	A.Jy, N.Ry, A.Brt, Abdya, A. Sln, A.Singkl,Sim	Dinas Kelautan dan Perikanan
		6 Pembangunan perikanan budidaya terpadu.				250.000.000	APBD	Prov.	250.000.000	APBD	Prov.	Dinas Kelautan dan Perikanan
		7 Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan				300.000.000	APBD	Bireun, B. Mrh A. Tgh, A. Tggr, G. Lues, Sim	300.000.000	APBD	Bireun, B. Mrh A. Tgh, A. Tggr, G. Lues, Sim	Dinas Kelautan dan Perikanan
		8 Pembinaan dan pengembangan perikanan	2.071.000.000	APBD	A. Bsr, Pidie, Bir, A. Utr, Lhoksw, Lgs, A.Tmr, A.Brt, A.Jy, Abdya, N.Ry, A.Singkl, Sim	2.000.000.000	APBD	ABsr, Pidie, Bir, A.Utr, Lhok, Lgs, A.Tmr, A.Tmg, A.Tggr, G. lues	2.000.000.000	APBD	A.Tmr, A.Tmg, A.Jy, Abdya, N.Ry, A.Brt, A.Singkl, Sim, B Mrh, A Tgh	Dinas Kelautan dan Perikanan
		9 Pengendalian dan pencegahan penyebaran penyakit ikan.				200.000.000	APBD	Prov.	50.000.000	APBD	Prov.	Dinas Kelautan dan Perikanan
		10 Pelatihan instruktur dan petani nelayan di Balai Pelatihan Perikanan dan Kelautan.				60.000.000	APBD	Prov.	60.000.000	APBD	Prov.	Dinas Kelautan dan Perikanan
		11 Kajian mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut.				100.000.000	APBD	NAD				Dinas Kelautan dan Perikanan
		12 Penyuluhan Budaya Kelautan.										
		13 Pengembangan lembaga usaha perdagangan perikanan tangkap				1.000.000.000	APBD	A. Sln, A.Singkl,Sim	1.000.000.000	APBD	Bna,ABsr, Pidie, Bir, Shg	Dinas Kelautan dan Perikanan

**RENCANA KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI/KABUPATEN NANGGROE ACEH DARUSSALAM
TAHUN 2007 - 2009**

BIDANG	PROGRAM UTAMA	SUB BIDANG / KEGIATAN	2007			2008			2009			KETERANGAN
			NILAI (RUPIAH)	SUMBER PENDANAAN	LOKASI	NILAI (RUPIAH)	SUMBER PENDANAAN	LOKASI	NILAI (RUPIAH)	SUMBER PENDANAAN	LOKASI	
		14 Motorisasi armada perikanan dalam upaya meningkatkan daya jelajah dan produktifitas nelayan.	1.406.000.000	APBD	Bna,Abur, Pidie, Bir,A.Utr, A.Tmr, A.Tmg, A.Jy, N.Ry, A.Brt, A.Singh,Sim	76.500.000.000	APBD	Bna,Shg, Abur, Pidie, Bir,A.Utr, Lhok, A.Tmr, A.Tmg, Lgs, A.Jy, N.Ry, A.Brt, Abdya, A. Sln, A.Singh,Sim	76.500.000.000	APBD	Bna,Shg, Abur, Pidie, Bir,A.Utr, Lhok, A.Tmr, A.Tmg, Lgs, A.Jy, N.Ry, A.Brt, Abdya, A. Sln, A.Singh,Sim	Dinas Kelautan dan Perikanan
		15 Pembangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)										
		16 Pemeliharaan rutin / berkala Tempat Pelelangan Ikan (TPI)				100.000.000	APBD	Banda Aceh	0	APBD		Dinas Kelautan dan Perikanan
		17 Rehabilitasi (sedang/berat) Tempat Pelelangan Ikan (TPI)										
		18 Pembangunan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)	2.360.000.000	APBD	Pidie							
		19 Bimtek aplikasi dalam upaya peningkatan teknik penangkapan				1.000.000.000	APBD	Prov.	1.000.000.000	APBD	NAD	Dinas Kelautan dan Perikanan
		20 Kegiatan magang kelompok usaha bersama (KUB) perikanan dan kelautan.				100.000.000	APBD	NAD	100.000.000	APBD	NAD	Dinas Kelautan dan Perikanan
		21 Temu usaha kelompok usaha bersama (KUB) dengan pengusaha dan temu Konsultan Keuangan										
		22 Kajian optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan.				100.000.000	APBD	NAD	100.000.000	APBD	NAD	Dinas Kelautan dan Perikanan
		23 Peningkatan kapasitas kelembagaan ; operasional pusat jaringan usaha dan investasi (PUSJUI) serta peningkatan upaya pemasaran hasil perikanan dan kelautan.	324.000.000	APBD	N.Ry, Abri, Abdya, A.Sln, A.Singk	500.000.000	APBD	A.Bur, A. Tmr,A.Jy,N.Ry, A. Brt,Sim,	500.000.000	APBD	Pidie, Bir, Lhok, A.Utr, A.Sln	Dinas Kelautan dan Perikanan
		24 Pameran ; Bazar tingkat provinsi, nasional dan luar negeri.										Dinas Kelautan dan Perikanan
		25 Kajian Sistem Penyuluhan Perikanan	75.000.000	APBD	B.Aceh	150.000.000	APBD	B. Aceh	150.000.000	APBD	B. Aceh	Dinas Kelautan dan Perikanan
		26 Kajian kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar.				150.000.000	APBD	NAD	150.000.000	APBD	NAD	Dinas Kelautan dan Perikanan
		27 Perumusan dan pengembangan kebijakan kelautan dan peraturan perundang-undangan										Dinas Kelautan dan Perikanan
		28 Fasilitasi penataan pembangunan wilayah pulau-pulau terluar							500.000.000	APBN	NAD	Dinas Kelautan dan Perikanan
		29 Peningkatan kapasitas kelembagaan daerah dalam pengelolaan sumberdaya pesisir, laut dan				5.000.000.000	APBN	NAD	5.000.000.000	APBN	NAD	Dinas Kelautan dan Perikanan
		30 Mitigasi dan penanggulangan bencana lingkungan laut dan pesisir	330.000.000	APBN	A.Selatan, Banda Aceh	500.000.000	APBN	Singkil, A.Besar, A. Jaya	500.000.000	APBN	A.Barat, Simeulue	Dinas Kelautan dan Perikanan
		31 Pengembangan sistem pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan	700.000.000	APBN	NAD				700.000.000	APBN	NAD	Dinas Kelautan dan Perikanan
		32 Pengembangan dan pengelolaan sumberdaya riset kelautan dan perikanan				350.000.000	APBN	NAD	350.000.000	APBN	NAD	Dinas Kelautan dan Perikanan
		33 Perencanaan penataan ruang, pesisir dan pulau-pulau kecil serta pengelolaan batas wilayah laut				350.000.000	APBN	NAD	250.000.000	APBN	NAD	Dinas Kelautan dan Perikanan
		34 Pengembangan dan pengelolaan terpadu wil. Laut, pesisir, pulau-pulau kecil terdepan berbasis kemitraan masyarakat	300.000.000	APBN	A.Selatan	700.000.000	APBN	Bna, A.Bor, Pidie,Bir,Acut,Lhok Atim, Langsa, Tamiang	700.000.000	APBN	A.Jaya,A.Bar,Abdya nagan A.Sel,Singkil,SIM	Dinas Kelautan dan Perikanan
		35 Pengembangan dan pengelolaan sumberdaya riset kelautan dan perikanan serta penyebaran				250.000.000	APBN	NAD				Dinas Kelautan dan Perikanan
		36 Perencanaan penataan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil serta pengelolaan batas wil.				500.000.000	APBN	NAD	600.000.000	APBN	NAD	Dinas Kelautan dan Perikanan
		37 Pemetaan dasar kelautan dan kedirgantaraan				1.500.000.000	APBN	A.Barat, A.Tengah, Bir	1.500.000.000	APBN	N.Raya, Abdya, B.Meriah	Dinas Kelautan dan Perikanan
		38 Pemberdayaan ekonomi, sosial, budaya, pelaku usaha perikanan dan masy pesisir	650.000.000	APBN	Singkil, A.Tengara, G.Lues							Dinas Kelautan dan Perikanan
		39 Pembinaan dan pengembangan sistem usaha perikanan	850.000.000	APBN	NAD	900.000.000	APBN	NAD	900.000.000	APBN	NAD	Dinas Kelautan dan Perikanan
		40 Pengembangan dan penyelenggaraan karantina ikan dan sistim pengelolaan kesehatan ikan	100.000.000	APBN	NAD	150.000.000	APBN	NAD	150.000.000	APBN	NAD	Dinas Kelautan dan Perikanan
		41 Pengembangan data dan statistik perikanan	1.050.000.000	APBN	NAD	1.100.000.000	APBN	NAD	1.150.000.000	APBN	NAD	Dinas Kelautan dan Perikanan
		42 Pengembangan SDM kelautan dan perikanan dan peningkatan sistem penyuluh				350.000.000	APBN	NAD	350.000.000	APBN	NAD	Dinas Kelautan dan Perikanan
		43 Penguatan dan pengembangan pemasaran hasil perikanan	150.000.000	APBN	NAD	350.000.000	APBN	NAD	150.000.000	APBN	NAD	Dinas Kelautan dan Perikanan
		44 Peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana perikanan serta input produksi lainnya	4.450.000.000	APBN	A.Selatan, Acut, Singkil, Abdya,Sim, Bir, A.Tengah, A.Tengg	15.000.000.000	APBN	A.Barat, Lhok, Langsa, A.Timur	10.000.000.000	APBN	Bir, G.Lues, B.Meriah, Bna, A.Besar	Dinas Kelautan dan Perikanan
		45 Peningkatan mutu dan pengembangan pengolahan hasil perikanan	450.000.000	APBN	NAD	900.000.000	APBN	Prov	900.000.000	APBN	NAD	Dinas Kelautan dan Perikanan
		46 penyelenggaraan revitalisasi perikanan	2.100.000.000	APBN	A.Besar, Pidie, Bna,	3.000.000.000	APBN	Bir, Lhok, A.Utara	2.800.000.000	APBN	A.Utara, A.Timur, Langsa, Tamiang	Dinas Kelautan dan Perikanan
		47 Pengelolaan sumberdaya ikan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan	250.000.000	APBN	NAD	1.000.000.000	APBN		500.000.000	APBN	NAD	Dinas Kelautan dan Perikanan
		48 pengelolaan lingkungan pesisir berbasis pemberdayaan masyarakat				750.000.000	APBN					Dinas Kelautan dan Perikanan
		49 Pemberdayaan ekonomi, sosial, budaya, pelaku usaha perikanan dan masy pesisir				1.500.000.000	APBN	NAD	1.500.000.000	APBN	NAD	Dinas Kelautan dan Perikanan
		50 Penguatan dan pengembangan pemasaran dalam negeri dan ekspor hasil perikanan							150.000.000	APBN	NAD	Dinas Kelautan dan Perikanan
PENGEMBANGAN USAHA			1.418.120.010.100			2.560.173.861.900			2.536.299.827.800			
A. INDUSTRI DAN PERDAGANGAN			1.259.601.490.400			2.223.304.357.000			2.268.935.419.800			Dinas Peternakan, BPM, Setda, BPKMD, Dinas Industri dan Perdagangan
		1. Pemberdayaan Ekonomi dan Pengembangan Usaha										
		- Banda Aceh	1.655.500.000	BRR	Prov. NAD	2.152.150.000	BRR	Prov. NAD	2.797.795.000	BRR	Prov. NAD	Dinas Peternakan
		- Aceh Jaya	2.446.800.000	BRR	Prov. NAD	3.180.840.000	BRR	Prov. NAD	4.135.092.000	BRR	Prov. NAD	Dinas Peternakan
		- Aceh Tengah	1.704.600.000	BRR	Prov. NAD	2.215.980.000	BRR	Prov. NAD	2.880.774.000	BRR	Prov. NAD	Dinas Peternakan
		- Gayo Lues	1.082.900.000	BRR	Prov. NAD	1.407.770.000	BRR	Prov. NAD	1.830.101.000	BRR	Prov. NAD	Dinas Peternakan
		2. Ekonomi Bisnis										
		- Aceh Barat										
		Wilayah	1.965.200.000	BRR	Prov. NAD	2.554.760.000	BRR	Prov. NAD	3.321.188.000	BRR	Prov. NAD	Dinas Peternakan
		Pusat	355.600.000	BRR	Prov. NAD	462.280.000	BRR	Prov. NAD	600.964.000	BRR	Prov. NAD	Dinas Peternakan
		- Nagan Raya										
		Wilayah	2.445.900.000	BRR	Prov. NAD	3.179.670.000	BRR	Prov. NAD	4.133.571.000	BRR	Prov. NAD	Dinas Peternakan
		Pusat	1.029.000.000	BRR	Prov. NAD	1.337.700.000	BRR	Prov. NAD	1.739.010.000	BRR	Prov. NAD	Dinas Peternakan
		3. Pengembangan Ekonomi										
		- Aceh Barat Daya										
		Wilayah	737.300.000	BRR	Prov. NAD	958.490.000	BRR	Prov. NAD	1.246.037.000	BRR	Prov. NAD	Dinas Peternakan
		Pusat	1.080.200.000	BRR	Prov. NAD	1.404.260.000	BRR	Prov. NAD	1.825.538.000	BRR	Prov. NAD	Dinas Peternakan
		4. Ekonomi dan Usaha										
		- Simeulue										
		Wilayah	658.700.000	BRR	Prov. NAD	856.310.000	BRR	Prov. NAD	1.113.203.000	BRR	Prov. NAD	Dinas Peternakan
		Pusat	161.200.000	BRR	Prov. NAD	209.560.000	BRR	Prov. NAD	272.428.000	BRR	Prov. NAD	Dinas Peternakan
		5. Ekonomi dan Pengembangan Usaha										
		- Aceh Singkil	1.374.000.000	BRR	Prov. NAD	1.786.200.000	BRR	Prov. NAD	2.322.060.000	BRR	Prov. NAD	Dinas Peternakan
		- Aceh Selatan	1.520.000.000	BRR	Prov. NAD	1.976.000.000	BRR	Prov. NAD	2.568.800.000	BRR	Prov. NAD	Dinas Peternakan
		1. Pemberdayaan Ekonomi Keluarga & Masyarakat Miskin	6.819.550.000	APBD	21kab/kt							BPM
		2. Pemberdayaan Usaha Ekonomi Gam/Kel	480.361.477.000	APBD	21kab/kt	1.495.000.000.000	APBD	21kab/kt	1.500.000.000.000	APBD	21kab/kt	BPM
		3. Pemberdayaan Usaha Ekonomi Gampong Tertinggal dan Mukim	700.503.435.000	APBD	21kab/kt							BPM
		4. Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kemukiman (PEMK)	19.468.370.000	APBD	21kab/kt	530.000.000.000	APBD	21kab/kt	650.000.000.000	APBD	21kab/kt	BPM
		5. Pembinaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)				1.500.000.000	APBD	21kab/kt	1.800.000.000	APBD	21kab/kt	BPM
		1. Penunjang Administrasi Kegiatan tata usaha	289.145.000	APBD	Prov. NAD	346.974.000	APBD	Prov. NAD	416.368.800	APBD	Prov. NAD	Setda

**RENCANA KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI/KABUPATEN NANGGROE ACEH DARUSSALAM
TAHUN 2007 - 2009**

BIDANG	PROGRAM UTAMA	SUB BIDANG / KEGIATAN	2007			2008			2009			KETERANGAN
			NILAI (RUPIAH)	SUMBER PENDANAAN	LOKASI	NILAI (RUPIAH)	SUMBER PENDANAAN	LOKASI	NILAI (RUPIAH)	SUMBER PENDANAAN	LOKASI	
		2 Peningkatan Fasilitas pembiayaan & Pengembangan Perekonomian Rakyat										
		1 Peningkatan prosedur per-izinan & peningkatan pelayanan penanaman modal	698.267.900									BPKMD
		1 Kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan investasi	752.057.500									
		6. Program pengembangan Industri dan perdagangan	32.492.288.000	APBD	Prov. NAD	172.775.413.000	APBD	Prov. NAD	85.932.490.000	APBD	Prov. NAD	Dinas Industri dan Perdagangan
		B. TENAGA KERJA	15.500.000.000	APBD	Prov. NAD	20.000.000.000	APBD	Prov. NAD	22.500.000.000	APBD	Prov. NAD	Dinas Tenaga Kerja
		1										
		2										
		C. KOPERASI dan UKM	133.956.607.000			300.445.000.000			228.390.000.000			Dinas Koperasi dan UKM
		1 Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	183.180.000	APBD	21 kab/kota	250.000.000	APBD	23 kab/kota	300.000.000	APBD	23 kab/kota	
		1 Perencanaan & pengembangan UKM										
		2 Monitoring dan pelaporan										
		2 Peningkatan Kualitas Kelembagaan koperasi										
		1 Peningkatan kualitas Kebijakan & koordinasi dim penciptaan iklim usaha yang kondusif	500.000.000	APBD	21 kab/kota	510.000.000	APBD	23 kab/kota	525.000.000	APBD	23 kab/kota	
		2 peningkatan kebijakan pembinaan koperasi dan UKM										
		3 Meningkatkan kualitas kelembagaan dan citra koperasi										
		4 Kemudahan dan pemulihan surat-surat izin usaha melalui prosedur dan mekanisme yang sederhana	15.000.000.000	APBD	21 kab/kota	25.000.000.000	APBD	23 kab/kota	22.500.000.000	APBD	23 kab/kota	
		3 Pengembangan kebijakan & program peningkatan ekonomi lokal										
		1 Pengembangan kebijakan & program peningkatan ekonomi lokal	1.000.000.000	APBD	10 kab/kota	1.300.000.000	APBD	12 kab/kota	2.000.000.000	APBD	23 kab/kota	
		a Peningkatan efektivitas pengkajian untuk perumusan kebijakan pemberdayaan KUKM										
		b Pengembangan Sistem perencanaan program pemberdayaan KUKM yang terintegrasi, berkelanjutan dan partisipatif										
		c Pengembangan Sistem perencanaan program ekonomi lokal	30.520.000.000	APBD	21 kab/kota	67.200.000.000	APBD	23 kab/kota	66.000.000.000	APBD	23 kab/kota	
		2 Koordinasi pemanfaatan fasilitas pe merintah untuk UKM dan Koperasi										
		a Peningkatan sarana pemerintah	100.000.000	APBD	21 kab/kota	150.000.000	APBD	23 kab/kota	200.000.000	APBD	23 kab/kota	
		b Pengembangan sarana dan perkuatan usaha bagi koperasi unggulan/ GLK										
		c Bantuan perkuatan alat/sarana dan pasrasana kantor	5.200.000.000	APBD	21 kab/kota	6.000.000.000	APBD	23 kab/kota	4.800.000.000	APBD	23 kab/kota	
		3 Pemberian Fasilitas pengaman kawasan UKM										
		a Meningkatkan peran serta masyarakat & mendorong tumbuh nya kegiatan usaha ekonomi masyarakat	299.800.000	APBD	21 kab/kota	350.000.000	APBD	23 kab/kota	450.000.000	APBD	23 kab/kota	
		b Dukungan pengembangan dan peningkatan penanganan setiap masalah UKM	7.002.120.300	APBD	21 kab/kota	7.500.000.000	APBD	23 kab/kota	8.250.000.000	APBD	23 kab/kota	
		c Pengembangan Pusat Promosi Produk - unggulan KUKM	6.500.000.000	APBD	12 kab/kota	41.000.000.000	APBD	12 kab/kota	8.000.000.000	APBD	23 kab/kota	
		4 Pengembangan Kewirausahaan & Keunggulan Kompetitif UKM										
		1 Program Pelatihan manajemen pengelola Koperasi/ KUD	121.507.500	APBD	21 kab/kota	300.000.000	APBD	23 kab/kota	400.000.000	APBD	23 kab/kota	
		2 Penyelenggaraan/pelatihan Kewirausahaan	400.000.000	APBD	21 kab/kota	500.000.000	APBD	23 kab/kota	600.000.000	APBD	23 kab/kota	
		1. Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif										
		a. Perencanaan & pengembangan UKM										
		1 Pemantapan Program Peminatan Koperasi dan kegiatan	183.180.000	APBD	21 Kab/Kota	250.000.000	APBD	23 Kab/Kota	300.000.000	APBD	23 Kab/Kota	Dinas Koperasi dan UKM
		2 Monitoring dan Evaluasi Program dan kegiatan										
		3 Memfasilitasi pengembangan Usaha Koperasi dan UKM										
		4 Pengembangan aturan dan pedoman kemitraan.										
		5 Pemantapan sinkronisasi program.										
		b. Monitoring dan pelaporan										
		1 Peningkatan Kualitas Kelembagaan	303.392.200	APBD Provinsi	21 Kab/Kota	325.000.000	APBD Provinsi	23 Kab/Kota	340.000.000	APBD Provinsi	23 Kab/Kota	Dinas Koperasi dan UKM
		2 Peningkatan Kualitas Kebijakan dan Koordinasi										
		3 Peningkatan Citra Koperasi dan UKM										
		4 Data base dan Informasi perkembangan Koperasi dan UKM teridentifikasi di 21 Kab/Kota										
		2. Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi										
		a. Koordinasi Pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi										
		1 Peningkatan kualitas Kebijakan & koordinasi dim penciptaan iklim usaha yang kondusif	500.000.000	APBD Provinsi	21 Kab/Kota	510.000.000	APBD Provinsi	23 Kab/Kota	525.000.000	APBD Provinsi	23 Kab/Kota	Dinas Koperasi dan UKM
		2 peningkatan kebijakan pembinaan koperasi dan UKM										
		3 Meningkatkan kualitas kelembagaan dan citra koperasi										
		4 Kemudahan dan pemulihan surat-surat izin usaha melalui prosedur dan mekanisme yang	15.000.000.000	APBD Provinsi	21 Kab/Kota	25.000.000.000	APBD Provinsi	23 Kab/Kota	22.500.000.000	APBD Provinsi	23 Kab/Kota	Dinas Koperasi dan UKM
		3. Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro dan Menengah.										
		a. Pengembangan kebijakan & program peningkatan ekonomi lokal										
		1 Peningkatan efektivitas pengkajian untuk perumusan kebijakan pemberdayaan KUKM	1.000.000.000	APBD Provinsi	10 Kab/Kota	1.300.000.000	APBD Provinsi	23 Kab/Kota	2.000.000.000	APBD	23 Kab/Kota	Dinas Koperasi dan UKM
		2 Pengembangan Sistem perencanaan program pemberdayaan KUKM yang terintegrasi,										
		3 Pengembangan Sistem perencanaan program ekonomi lokal	30.520.000.000	APBD Provinsi	21 Kab/Kota	67.200.000.000	APBD Provinsi	23 Kab/Kota	66.000.000.000	APBD Provinsi	23 Kab/Kota	Dinas Koperasi dan UKM
		b. Koordinasi pemanfaatan fasilitas pemerintah untuk UKM dan Koperasi										
		1 Peningkatan sarana pemerintah	100.000.000	APBD Provinsi	21 Kab/Kota	150.000.000	APBD	23 Kab/Kota	200.000.000	APBD	23 Kab/Kota	Dinas Koperasi dan UKM
		2 Pengembangan sarana dan perkuatan usaha bagi koperasi unggulan/ GLK										
		3 Bantuan perkuatan alat/sarana dan pasrasana kantor	5.200.000.000	APBD Provinsi	21 Kab/Kota	6.000.000.000	APBD Provinsi	23 Kab/Kota	4.800.000.000	APBD Provinsi	23 Kab/Kota	Dinas Koperasi dan UKM
		4 Meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat										
		c. Pemberian Fasilitas pengaman kawasan UKM										
		1 Meningkatkan peran serta masyarakat & mendorong tumbuhnya kegiatan usaha ekonomi	299.800.000	APBD	21 Kab/Kota	350.000.000	APBD	23 Kab/Kota	450.000.000	APBD	23 Kab/Kota	Dinas Koperasi dan UKM
		2 Dukungan pengembangan dan peningkatan penanganan setiap masalah UKM	7.002.120.300	APBD	21 Kab/Kota	7.500.000.000	APBD	23 Kab/Kota	8.250.000.000	APBD	23 Kab/Kota	Dinas Koperasi dan UKM
		3 Pengembangan Pusat Promosi Produk unggulan KUKM	6.500.000.000	APBD	12 Kab/Kota	41.000.000.000	APBD	12 Kab/Kota	8.000.000.000	APBD	12 Kab/Kota	Dinas Koperasi dan UKM
		4. Pengembangan Kewirausahaan & Keunggulan Kompetitif UKM										
		a. Program Pelatihan manajemen pengelola Koperasi/ KUD										
		1 Peningkatan peranan lembaga dilkat bagi peningkatan kualitas SDM yang responsif	121.507.500	APBD	21 Kab/Kota	300.000.000	APBD	23 Kab/Kota	400.000.000	APBD	23 Kab/Kota	Dinas Koperasi dan UKM
		2 Menyusun dan mensosialisasi petunjuk & cara berkoperasi yang benar										
		3 Memfasilitasi penataan organisasi dan manajemen koperasi sesuai dengan kepentingan anggota										
		4 Penerapan standar akuntansi dan audit koperasi										
		5 Memfasilitasi Koperasi untuk meningkatkan akuntabilitasnya										
		6 Peningkatan kemampuan SDM koperasi dan UKM										
		b. Penyelenggaraan/pelatihan Kewirausahaan										
		1 Peningkatan Kualitas SDM Pengelola KUKM yang berwawasan kewirausahaan	400.000.000	APBD	21 Kab/Kota	500.000.000	APBD	23 Kab/Kota	600.000.000	APBD	23 Kab/Kota	Dinas Koperasi dan UKM
		2 Terbukanya kesempatan berusaha bagi KUKM										
		3 Peningkatan Penguasaan jaringan informasi bisnis										
		D. PARIWISATA	9.061.911.900			16.424.504.900			16.474.408.000			Dinas Pariwisata Provinsi NAD, Dinas Pertanian
		1 Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.042.538.000	APBD	Prov NAD	1.251.247.000	APBD	Prov NAD	1.501.497.500	APBD	Prov NAD	Dinas Pariwisata Provinsi NAD
		2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	720.160.000	APBD	Prov NAD	864.193.000	APBD	Prov NAD	1.037.031.700	APBD	Prov NAD	Dinas Pariwisata Provinsi NAD
		3 Peningkatan Disiplin Aparatur	91.010.000	APBD	Prov NAD	109.213.000	APBD	Prov NAD	131.055.600	APBD	Prov NAD	Dinas Pariwisata Provinsi NAD
		4 Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur										Dinas Pariwisata Provinsi NAD

**RENCANA KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI/KABUPATEN NANGGROE ACEH DARUSSALAM
TAHUN 2007 - 2009**

BIDANG	PROGRAM UTAMA	SUB BIDANG / KEGIATAN	2007			2008			2009			KETERANGAN
			NILAI (RUPIAH)	SUMBER PENDANAAN	LOKASI	NILAI (RUPIAH)	SUMBER PENDANAAN	LOKASI	NILAI (RUPIAH)	SUMBER PENDANAAN	LOKASI	
		Pendidikan dan pelatihan formal	95.550.000	APBD	Prov NAD	114.660.000	APBD	Prov NAD	137.592.000	APBD		Dinas Pariwisata Provinsi NAD
		5 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata										Dinas Pariwisata Provinsi NAD
		1 Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam pemasaran pariwisata	65.000.000	APBD	Prov NAD	78.000.000	APBD	Prov NAD	93.600.000	APBD		Dinas Pariwisata Provinsi NAD
		2 Pengembangan Jaringan Kerja sama Promosi Pariwisata										Dinas Pariwisata Provinsi NAD
		3 Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri	2.129.467.400	APBD	Prov NAD	2.555.361.000	APBD	Prov NAD	3.066.433.200	APBD		Dinas Pariwisata Provinsi NAD
		4 Pengembangan Statistik Kepariwisata										Dinas Pariwisata Provinsi NAD
		5 Pelatihan pemandu wisata terpadu	193.077.000	APBD	Prov NAD	231.694.000	APBD	Prov NAD	278.032.800	APBD		Dinas Pariwisata Provinsi NAD
		6 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata										Dinas Pariwisata Provinsi NAD
		1 Pengembangan obyek pariwisata unggulan	400.000.000	APBD	Prov NAD	480.000.000	APBD	Prov NAD	576.000.000	APBD		Dinas Pariwisata Provinsi NAD
		2 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	1.746.425.000	APBD	Prov NAD	2.095.710.000	APBD	Prov NAD	2.514.852.000	APBD		Dinas Pariwisata Provinsi NAD
		3 Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan	1.150.000.000	APBD	Prov NAD	1.380.000.000	APBD	Prov NAD	1.656.000.000	APBD		Dinas Pariwisata Provinsi NAD
		4 Pengembangan daerah tujuan wisata										Dinas Pariwisata Provinsi NAD
		5 Pengembangan; sosialisasi; dan penerapan serta pengawasan standarisasi	259.545.000	APBD	Prov NAD	311.456.000	APBD	Prov NAD	373.747.200	APBD		Dinas Pariwisata Provinsi NAD
		6 Pembuatan Masterplan pengembangan kawasan wisata	260.148.000	APBD	Prov NAD	312.177.600	APBD	Prov NAD	374.613.200	APBD		Dinas Pariwisata Provinsi NAD
		7 Program Pengembangan Kemitraan										Dinas Pariwisata Provinsi NAD
		1 Pengembangan dan penguatan informasi dan database	49.866.000	APBD	Prov NAD	59.841.000	APBD	Prov NAD	71.809.200	APBD		Dinas Pariwisata Provinsi NAD
		2 Pengembangan dan Penguatan Litbang, Kebudayaan dan Pariwisata										Dinas Pariwisata Provinsi NAD
		3 Fasilitas pembentukan forum komunikasi antar pelaku industri pariwisata dan budaya	159.112.000	APBD	Prov NAD	190.934.400	APBD	Prov NAD	229.121.300	APBD		Dinas Pariwisata Provinsi NAD
		4 Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan kemitraan pariwisata										Dinas Pariwisata Provinsi NAD
		5 Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata	250.004.500	APBD	Prov NAD	300.005.400	APBD	Prov NAD	360.006.500	APBD		Dinas Pariwisata Provinsi NAD
		6 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	179.163.000	APBD	Prov NAD	214.996.500	APBD	Prov NAD	257.995.800	APBD		Dinas Pariwisata Provinsi NAD
		7 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	270.846.000	APBD	Prov NAD	325.016.000	APBD	Prov NAD	390.020.000	APBD		Dinas Pariwisata Provinsi NAD
		8 Pelaksanaan Gebyar Nusantara di Jakarta				250.000.000	APBD	Prov NAD	300.000.000	APBD		Dinas Pariwisata Provinsi NAD
		9 Pemilihan Agen dan Inong Tingkat Daerah				300.000.000	APBD	Prov NAD	375.000.000	APBD		Dinas Pariwisata Provinsi NAD
		9 Pengembangan daerah Agrowisata				5.000.000.000	APBD I	Aceh Besar, Aceh tengah	2.750.000.000	APBD I	A. Jaya	Dinas Pertanian
	D. PROGRAM PENDUKUNG LAINNYA		44.300.000.000			82.075.000.000			93.684.000.000			BKP
		1 Penanganan Daerah Rawan Pangan	1.949.000.000	APBN, APBD	NAD	3.000.000.000	APBN, APBD	NAD	3.450.000.000	APBN, APBD	NAD	BKP
		2 Pengembangan Desa Mandiri Pangan	6.576.000.000	APBN, APBD	NAD	6.500.000.000	APBN, APBD	NAD	7.475.000.000	APBN, APBD	NAD	BKP
		3 Percepatan diversifikasi pangan	343.000.000	APBN, APBD	NAD	2.550.000.000	APBN, APBD	NAD	2.930.000.000	APBN, APBD	NAD	BKP
		4 Pemantauan situasi ketahanan pangan	456.000.000	APBN, APBD	NAD	700.000.000	APBN, APBD	NAD	805.000.000	APBN, APBD	NAD	BKP
		5 Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan	606.000.000	APBN, APBD	NAD	500.000.000	APBN, APBD	NAD	575.000.000	APBN, APBD	NAD	BKP
		6 Pemantauan & Analisis Akses Pangan Masyarakat	193.000.000	APBN, APBD	NAD	125.000.000	APBN, APBD	NAD	143.000.000	APBN, APBD	NAD	BKP
		7 Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Panen	215.000.000	APBN, APBD	NAD	2.000.000.000	APBN, APBD	NAD	2.300.000.000	APBN, APBD	NAD	BKP
		8 Pengembangan Cadangan Pangan Daerah	119.000.000	APBN, APBD	NAD	500.000.000	APBN, APBD	NAD	575.000.000	APBN, APBD	NAD	BKP
		9 Pelaksanaan kegiatan analisis situasi ketahanan pangan	229.000.000	APBN, APBD	NAD	800.000.000	APBN, APBD	NAD	920.000.000	APBN, APBD	NAD	BKP
		10 Pembinaan manajemen pemh. ketahanan pangan	210.000.000	APBN, APBD	NAD	800.000.000	APBN, APBD	NAD	920.000.000	APBN, APBD	NAD	BKP
		11 Pengembangan Sistim InformasiPasar	181.000.000	APBN, APBD	NAD	100.000.000	APBN, APBD	NAD	115.000.000	APBN, APBD	NAD	BKP
		12 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	253.000.000	APBN, APBD	NAD	200.000.000	APBN, APBD	NAD	230.000.000	APBN, APBD	NAD	BKP
		13 Pameran Ketahanan Pangan dan Lomba Cipta Menu Tk Prov dan Nasional	379.000.000	APBN, APBD	NAD	350.000.000	APBN, APBD	NAD	403.000.000	APBN, APBD	NAD	BKP
		14 Pengembangan Lumbung Pangan Desa				1.600.000.000	APBN, APBD	NAD	1.840.000.000	APBN, APBD	NAD	BKP
		15 Penyusunan data base usaha & produk pangan				450.000.000	APBN, APBD	NAD	517.000.000	APBN, APBD	NAD	BKP
		16 Analisis dan penyusunan pola konsumsi pangan masyarakat				350.000.000	APBN, APBD	NAD	403.000.000	APBN, APBD	NAD	BKP
		17 Kajian rantai pasokan dan pemasaran pangan				1.500.000.000	APBN, APBD	NAD	1.725.000.000	APBN, APBD	NAD	BKP
		18 Pengembangan model distribusi pangan yang efisien	32.150.000.000	APBN, APBD	NAD	58.000.000.000	APBN, APBD	NAD	66.000.000.000	APBN, APBD	NAD	BKP
		19 Peningkatan mutu dan keamanan pangan	61.000.000	APBN, APBD	NAD	1.000.000.000	APBN, APBD	NAD	1.150.000.000	APBN, APBD	NAD	BKP
		20 Peningkatan kualitas konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang	230.000.000	APBN, APBD	NAD	350.000.000	APBN, APBD	NAD	403.000.000	APBN, APBD	NAD	BKP
		21 Peningkatan keamanan & preferensi pangan				150.000.000	APBN, APBD	NAD	172.000.000	APBN, APBD	NAD	BKP
		22 Pemantapan kelembagaan ketahanan pangan	150.000.000	APBN, APBD	NAD	200.000.000	APBN, APBD	NAD	230.000.000	APBN, APBD	NAD	BKP
		23 Pengembangan manajemen pembangunan ketahanan pangan				350.000.000	APBN, APBD	NAD	403.000.000	APBN, APBD	NAD	BKP
KELEMBAGAAN DAN HUKUM	KELEMBAGAAN DAERAH		127.133.886.600			496.274.791.600			578.867.831.500			
			85.386.562.000			418.372.279.400			491.164.007.900			Dinas Peternakan, BPKMD, Serda, Keshanglimas, BPK RSIA
		1 Pemantapan Kelembagaan Ketahanan Pangan	550.149.000	APBN	Prov. NAD	715.193.700	APBN	Prov. NAD	929.751.000	APBN	Prov. NAD	Dinas Peternakan
		2 Pengembangan Potensi unggulan daerah	300.000.000									BPKMD
		3 Koordinasi antar lembaga dan pengendalian pelaksanaan investasi PMDN/PMA	386.402.000									BPKMD
		4 Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah	169.020.000									BPKMD
		5 Pengawasan dan evaluasi kinerja dan aparatut badan penanaman modal daerah	60.150.000									BPKMD
		6 Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan investasi	201.245.000									BPKMD
		7 Penyelenggaraan Pameran Inves-tasi	678.722.000									BPKMD
		8 Penataan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Prov.NAD	421.480.000	APBD	Prov. NAD	463.628.000	APBD	Prov. NAD	509.990.800	APBD	Prov. NAD	Serda
		9 Pembinaan Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Kab/ Kota	131.765.000	APBD	Prov. NAD	144.941.500	APBD	Prov. NAD	159.435.000	APBD	Prov. NAD	Serda
		10 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	173.952.000	APBD	Prov. NAD	191.347.200	APBD	Prov. NAD	210.481.000	APBD	Prov. NAD	Serda
		11 Bimtek Tata Naskah Dinas Prov, Kab/ Kota dan Penyusunan Kegiatan Pemda	239.446.000	APBD	Prov. NAD	263.390.600	APBD	Prov. NAD	289.729.000	APBD	Prov. NAD	Serda
		12 Rakor Pendayagunaan Aparatur Negara Tahun 2007	157.070.000	APBD	Prov. NAD	172.777.000	APBD	Prov. NAD	190.054.000	APBD	Prov. NAD	Serda
		13 Bimtek Penyusunan Uraian Tugas Jabatan Perangkat Daerah	133.483.800	APBD	Prov. NAD	146.832.000	APBD	Prov. NAD	161.515.000	APBD	Prov. NAD	Serda
		14 Bimbingan Teknis Analisa Jabatan	123.479.200	APBD	Prov. NAD	135.827.000	APBD	Prov. NAD	149.409.000	APBD	Prov. NAD	Serda
		15 Bimtek Penyusunan Syarat Jabatan Perangkat Daerah	131.060.200	APBD	Prov. NAD	144.166.000	APBD	Prov. NAD	158.582.000	APBD	Prov. NAD	Serda

**RENCANA KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI/KABUPATEN NANGGROE ACEH DARUSSALAM
TAHUN 2007 - 2009**

BIDANG	PROGRAM UTAMA	SUB BIDANG / KEGIATAN	2007			2008			2009			KETERANGAN
			NILAI (RUPIAH)	SUMBER PENDANAAN	LOKASI	NILAI (RUPIAH)	SUMBER PENDANAAN	LOKASI	NILAI (RUPIAH)	SUMBER PENDANAAN	LOKASI	
		16 Bimbingan Teknis Pengelolaan Perpustakaan Prov.NAD	202.050.000	APBD	Prov. NAD	222.255.000	APBD	Prov. NAD	244.480.500	APBD	Prov. NAD	Setda
		17 Bimtek Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	38.230.000	APBD	Prov. NAD	42.053.000	APBD	Prov. NAD	46.258.300	APBD	Prov. NAD	Setda
		18 Bimbingan Teknis Sinkronisasi Perencanaan SKPD dengan RPJP, RPJM, dan RKPD	108.778.800	APBD	Prov. NAD	119.656.000	APBD	Prov. NAD	131.622.000	APBD	Prov. NAD	Setda
		19 Bimbingan Teknis Pengembangan Indikator Kinerja Instansi Pemerintah	42.812.500	APBD	Prov. NAD	47.093.000	APBD	Prov. NAD	51.803.000	APBD	Prov. NAD	Setda
		20 Fasilitas Penyiapan Dokumen dan Pelaksanaan Sistem AKIP	174.792.300	APBD	Prov. NAD	192.271.000	APBD	Prov. NAD	211.498.000	APBD	Prov. NAD	Setda
		21 Penataan kelembagaan dan aparatur pemerintah mukim dalam Prov.NAD	200.000.000	APBD	Prov. NAD	202.000.000	APBD	Prov. NAD	205.000.000	APBD	Prov. NAD	Setda
		22 Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum	200.000.000	APBD	Prov. NAD	220.000.000	APBD	Prov. NAD	240.000.000	APBD	Prov. NAD	Setda
		23 Fasilitas pelaksanaan Pilkadausung dan proses suksesi penggantian Kepala Daerah/Wakil Kepala	450.000.000	APBD	Prov. NAD	650.000.000	APBD	Prov. NAD	650.000.000	APBD	Prov. NAD	Setda
		24 Sosialisasi Peraturan PerUU-an				250.000.000	APBD	Prov. NAD	275.000.000	APBD	Prov. NAD	Setda
		25 Penyusunan Draft Ragan Urusan Pem-an.				250.000.000	APBD	Prov. NAD	275.000.000	APBD	Prov. NAD	Setda
		26 Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur	202.400.000	APBD	Prov. NAD	302.400.000	APBD	Prov. NAD	402.400.000	APBD	Prov. NAD	Setda
		27 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Per-UU-an	98.650.000	APBD	Prov. NAD	148.650.000	APBD	Prov. NAD	198.650.000	APBD	Prov. NAD	Setda
		28 Pembinaan Disiplin Aparatur	262.200.000	APBD	Prov. NAD	293.664.000	APBD	Prov. NAD	328.903.000	APBD	Prov. NAD	Setda
		29 Penyusunan Pola Karier PNSD dan Diklat Teknis	790.500.000	APBD	Prov. NAD	885.361.000	APBD	Prov. NAD	991.804.000	APBD	Prov. NAD	Setda
		30 Pemberian Penghargaan dan Kesejahteraan PNS	788.637.500	APBD	Prov. NAD	883.274.000	APBD	Prov. NAD	989.266.000	APBD	Prov. NAD	Setda
		31 Pelaksanaan Ujian Dinas	93.550.000	APBD	Prov. NAD	104.778.000	APBD	Prov. NAD	117.349.000	APBD	Prov. NAD	Setda
		32 Penataan Mutasi Jabatan Struktural dan Fungsional	238.281.000	APBD	Prov. NAD	266.874.000	APBD	Prov. NAD	298.899.000	APBD	Prov. NAD	Setda
		33 Rapat Koordinasi dibidang Kepegawaian	83.690.000	APBD	Prov. NAD	93.732.800	APBD	Prov. NAD	104.980.000	APBD	Prov. NAD	Setda
		34 Penyelesaian Mutasi Kepegawaian (Relokasi, Pindah, Pangkat dan Pensiun PNSD)	270.729.500	APBD	Prov. NAD	303.217.000	APBD	Prov. NAD	339.603.000	APBD	Prov. NAD	Setda
		35 Pelaksanaan Rekrutmen Seleksi dan Pengangkatan CPNSD	639.125.000	APBD	Prov. NAD	715.820.000	APBD	Prov. NAD	801.718.000	APBD	Prov. NAD	Setda
		36 Rekrutment Calon Mahasiswa Tugas Belajar	116.988.000	APBD	Prov. NAD	131.026.000	APBD	Prov. NAD	146.749.000	APBD	Prov. NAD	Setda
		37 Pelaksanaan Pemberian DP3, KGB, cuti, Bapertarum, taspen, dan askes	196.975.000	APBD	Prov. NAD	220.612.000	APBD	Prov. NAD	247.085.000	APBD	Prov. NAD	Setda
		38 Santunan kepada anak yatim piatu PNS korban Tsunami	1.200.000.000	APBD	Prov. NAD	1.344.000.000	APBD	Prov. NAD	1.505.280.000	APBD	Prov. NAD	Setda
		39 Pembinaan KORPRI Provinsi NAD	558.483.000	APBD	Prov. NAD	625.501.000	APBD	Prov. NAD	700.561.000	APBD	Prov. NAD	Setda
		40 Peningkatan sarana dan Prasarana KORPRI	232.553.600	APBD	Prov. NAD	260.460.000	APBD	Prov. NAD	291.715.000	APBD	Prov. NAD	Setda
		41 Pembinaan Lembaga Penunjang Kegiatan Pendidikan	3.780.000	APBD	Prov. NAD	4.158.000	APBD	Prov. NAD	4.573.800	APBD	Prov. NAD	Setda
		42 Pembinaan Kelembagaan Asrama Mahasiswa	40.980.000	APBD	Prov. NAD	45.078.000	APBD	Prov. NAD	49.585.800	APBD	Prov. NAD	Setda
		43 Pembangunan Rumah Jabatan	1.188.660.000	APBD	Prov. NAD	1.426.632.000	APBD	Prov. NAD	1.711.958.000	APBD	Prov. NAD	Setda
		44 Pembangunan Gedung Kantor	14.686.850.000	APBD	Prov. NAD	17.624.220.000	APBD	Prov. NAD	21.149.064.000	APBD	Prov. NAD	Setda
		45 Pengadaan Mobil Jabatan				6.806.340.000	APBD	Prov. NAD				Setda
		46 Pengadaan Mobil Dinas/ Jabatan	10.575.020.000	APBD	Prov. NAD	12.690.024.000	APBD	Prov. NAD	15.228.028.800	APBD	Prov. NAD	Setda
		47 Pengadaan Perlengkapan rumah jabatan/ Dinas	4.632.654.000	APBD	Prov. NAD	5.559.184.800	APBD	Prov. NAD	6.671.021.700	APBD	Prov. NAD	Setda
		48 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	1.592.250.000	APBD	Prov. NAD	1.910.700.000	APBD	Prov. NAD	2.292.840.000	APBD	Prov. NAD	Setda
		49 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	4.499.214.000	APBD	Prov. NAD	5.399.056.800	APBD	Prov. NAD	6.478.868.000	APBD	Prov. NAD	Setda
		50 Pengadaan Mobiler	4.435.978.000	APBD	Prov. NAD	5.323.174.000	APBD	Prov. NAD	6.387.808.000	APBD	Prov. NAD	Setda
		51 Pengadaan tanah kebutuhan Pemerintah Prov.NAD				311.499.200.000	APBD	Prov. NAD	373.799.040.000	APBD	Prov. NAD	Setda
		52 Pembangunan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	13.414.725.000	APBD	Prov. NAD	16.097.671.000	APBD	Prov. NAD	19.317.205.000	APBD	Prov. NAD	Setda
		53 Pengadaan Pembatas Tanah Milik Pem Prov.NAD	801.615.000	APBD	Prov. NAD	961.938.000	APBD	Prov. NAD	1.154.325.600	APBD	Prov. NAD	Setda
		54 Rehabilitasi Sedang/ berat rumah Jabatan	252.442.000	APBD	Prov. NAD	302.930.400	APBD	Prov. NAD	363.516.000	APBD	Prov. NAD	Setda
		55 Rehabilitasi Sedang/ berat rumah dinas	966.761.500	APBD	Prov. NAD	1.160.113.800	APBD	Prov. NAD	1.392.116.000	APBD	Prov. NAD	Setda
		56 Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang Daerah	142.780.000	APBD	Prov. NAD	171.336.000	APBD	Prov. NAD	205.603.200	APBD	Prov. NAD	Setda
		57 Peningkatan Pengembangan sarana perekonomian Daerah	155.000.000	APBD	Prov. NAD	155.000.000	APBD	Prov. NAD	155.000.000	APBD	Prov. NAD	Setda
		58 Penunjang Kelembagaan	301.433.500	APBD	Prov. NAD	301.500.000	APBD	Prov. NAD	301.500.000	APBD	Prov. NAD	Setda
		59 Peningkatan fasilitas pengembangan potensi dan hasil produksi daerah	205.000.000	APBD	Prov. NAD	205.000.000	APBD	Prov. NAD	205.000.000	APBD	Prov. NAD	Setda
		60 Peningkatan efektivitas pengembangan bidang industri, Pariwisata dan Lingkungan hidup	48.500.000	APBD	Prov. NAD	48.600.000	APBD	Prov. NAD	48.616.000	APBD	Prov. NAD	Setda
		61 Peningkatan efektivitas kerjasama luar negeri bidang Ekonomi	188.200.000	APBD	Prov. NAD	188.200.000	APBD	Prov. NAD	188.200.000	APBD	Prov. NAD	Setda
		62 Bantuan biaya transport, uang saku kepada pejuang, perintis, cacat veteran, kowaweri, warakawuri serta keluarga pahlawan dalam rangka temu rahang Gubernur pada tanggal 17 Agustus 1945	495.500.000	APBD	Prov. NAD	495.500.000	APBD	Prov. NAD	495.500.000	APBD	Prov. NAD	Setda
		63 Peningkatan operasional pelayanan kesehatan aparatur/ keluarga	894.000.000	APBD	Prov. NAD	894.000.000	APBD	Prov. NAD	894.000.000	APBD	Prov. NAD	Setda
		64 Fasilitas Pengelolaan Keuangan Gampong/Kelurahan	200.000.000	APBD	Prov. NAD	210.000.000	APBD	Prov. NAD	220.000.000	APBD	Prov. NAD	Setda
		65 Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan gampong dan kelurahan	200.000.000	APBD	Prov. NAD	202.000.000	APBD	Prov. NAD	205.000.000	APBD	Prov. NAD	Setda
		66 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Gampong				200.000.000	APBD	Prov. NAD	225.000.000	APBD	Prov. NAD	Setda
		67 Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan gampong dan kelurahan	200.000.000	APBD	Prov. NAD	202.000.000	APBD	Prov. NAD	205.000.000	APBD	Prov. NAD	Setda
		68 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Gampong				200.000.000	APBD	Prov. NAD	225.000.000	APBD	Prov. NAD	Setda
		69 Lahirnya SOP tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	681.025.000	APBD	Prov. NAD							Setda
		70 Pengendalian Pelaksanaan APBD berjalan Efektif dan Efisien	577.605.500	APBD	Prov. NAD	660.250.000	APBD	Prov. NAD	760.000.000	APBD	Prov. NAD	Setda
		71 Tersedianya informasi daerah	508.008.000	APBD	Prov. NAD	585.000.000	APBD	Prov. NAD	672.750.000	APBD	Prov. NAD	Setda
		72 Ketepatan waktu pelaporan pertanggung-jawaban Pelaksanaan APBD	95.140.000	APBD	Prov. NAD	110.000.000	APBD	Prov. NAD	126.500.000	APBD	Prov. NAD	Setda
		73 Pelaksanaan Administrasi Keuangan Sesuai Ketenraan	648.750.000	APBD	Prov. NAD	750.000.000	APBD	Prov. NAD	862.500.000	APBD	Prov. NAD	Setda
		74 Pengelolaan Keuangan Daerah	1.620.851.000	APBD	Prov. NAD	1.850.000.000	APBD	Prov. NAD	2.127.500.000	APBD	Prov. NAD	Setda
		75 Disiplin Anggaran	303.382.000	APBD	Prov. NAD	350.000.000	APBD	Prov. NAD	402.500.000	APBD	Prov. NAD	Setda
		76 Penyelesaian Administrasi dan Pelaporan	532.950.000	APBD	Prov. NAD	625.000.000	APBD	Prov. NAD	718.750.000	APBD	Prov. NAD	Setda
		77 Sistem Kearsipan Biro Keuangan	541.875.000	APBD	Prov. NAD	650.000.000	APBD	Prov. NAD	747.500.000	APBD	Prov. NAD	Setda
		78 Sinkronisasi dan sinergi pembangunan provinsi dengan Kab/kota	150.500.000	APBD	Prov. NAD	150.500.000	APBD	Prov. NAD	150.500.000	APBD	Prov. NAD	Setda
		79 Pembinaan jasa konstruksi	145.400.000	APBD	Prov. NAD	145.400.000	APBD	Prov. NAD	145.400.000	APBD	Prov. NAD	Setda
		80 Pembinaan Peningkatan kinerja BUMD Provinsi NAD	136.000.000	APBD	Prov. NAD	136.000.000	APBD	Prov. NAD	136.000.000	APBD	Prov. NAD	Setda
		81 Penyusunan Standar Satuan Harga	501.212.000	APBD	Prov. NAD	601.454.400	APBD	Prov. NAD	72.174.000	APBD	Prov. NAD	Setda
		82 Peningkatan manajemen Asset/ barang daerah	613.637.000	APBD	Prov. NAD	736.364.400	APBD	Prov. NAD	883.637.000	APBD	Prov. NAD	Setda
		83 Peningkatan manajemen inventaris daerah	1.863.515.000	APBD	Prov. NAD	2.236.218.000	APBD	Prov. NAD	2.683.461.600	APBD	Prov. NAD	Setda
		84 Revaluasi/ Appraisal Asset/ Barang Daerah	1.451.580.000	APBD	Prov. NAD	1.741.896.000	APBD	Prov. NAD	2.090.275.200	APBD	Prov. NAD	Setda
		85 Penyediaan Bahan Bacaan	18.000.000	APBD	Prov. NAD	42.000.000	APBD	Prov. NAD	25.920.000	APBD	Prov. NAD	KeshangLinmas
		86 Pembangunan Gedung Kantor		APBD	Prov. NAD	338.520.000	APBD	Prov. NAD	406.224.000	APBD	Prov. NAD	KeshangLinmas
		87 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor		APBD	Prov. NAD	114.500.000	APBD	Prov. NAD	137.400.000	APBD	Prov. NAD	KeshangLinmas
		88 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		APBD	Prov. NAD	15.000.000	APBD	Prov. NAD	18.000.000	APBD	Prov. NAD	KeshangLinmas

BIDANG	PROGRAM UTAMA	SUB BIDANG / KEGIATAN	2007			2008			2009			KETERANGAN
			NILAI (RUPIAH)	SUMBER PENDANAAN	LOKASI	NILAI (RUPIAH)	SUMBER PENDANAAN	LOKASI	NILAI (RUPIAH)	SUMBER PENDANAAN	LOKASI	
		89 Pengadaan Komputer		APBD	Prov.NAD	131.000.000	APBD	Prov.NAD	157.200.000	APBD	Prov.NAD	KeshangLimnas
		90 Bimbingan Teknis Implementasi Per UU	228.330.000	APBD	Prov.NAD	502.340.000	APBD	Prov.NAD	602.808.000	APBD	Prov.NAD	KeshangLimnas
		91 Pengendalian Kasus pada Wilayah Pemerintahan di bawahnya	276.000.000	APBD	Prov.NAD	524.400.000	APBD	Prov.NAD	629.280.000	APBD	Prov.NAD	KeshangLimnas
		92 Pelatihan Teknis Pengawasan	190.680.000	APBD	Prov.NAD	362.290.000	APBD	Prov.NAD	434.748.000	APBD	Prov.NAD	KeshangLimnas
		93 Pendidikan dan Pelatihan Formal	82.560.000	APBD	Prov.NAD	90.816.000	APBD	Prov.NAD	99.897.600	APBD	Prov.NAD	KeshangLimnas
		94 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	77.016.000	APBD	Prov.NAD	84.718.000	APBD	Prov.NAD	93.190.000	APBD	Prov.NAD	KeshangLimnas
		95 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	624.390.000	APBD	Prov.NAD	790.500.000	APBD	Prov.NAD	953.800.000	APBD	Prov.NAD	KeshangLimnas
		96 Peningkatan Disiplin Aparatur	74.700.000	APBD	Prov.NAD	106.000.000	APBD	Prov.NAD	142.000.000	APBD	Prov.NAD	KeshangLimnas
		97 Pelayanan Administrasi perkantoran	2.136.421.000	APBD	Prov.NAD	2.350.063.000	APBD	Prov.NAD	2.585.069.000	APBD	Prov.NAD	BPK RSIA
		98 Peningkatan disiplin aparatur	141.540.000	APBD	Prov.NAD	155.694.000	APBD	Prov.NAD	171.263.000	APBD	Prov.NAD	BPK RSIA
HUKUM			5.156.447.000			8.002.813.500			9.219.180.500			Dinas Kelautan dan Perikanan, Setda
	A. Pembangunan Gedung Kantor											
	B. Pemberdayaan dan Pengembangan Institusi Hukum											
	1 Penyuluhan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut.					50.000.000	APBD	Prov.NAD	50.000.000	APBD	Prov.NAD	Dinas Kelautan dan Perikanan
	2 Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja					125.000.000	APBD	Prov.NAD	130.000.000	APBD	Prov.NAD	Setda
	3 Kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamong praja dengan TNI/POLRI dan					400.000.000	APBD	Prov.NAD	450.000.000	APBD	Prov.NAD	Setda
	4 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemeliharaan Kantrantibmas					125.000.000	APBD	Prov.NAD	130.000.000	APBD	Prov.NAD	Setda
	5 Penyusunan rencana kerja peraturan perundang-undangan	3.274.619.000	APBD	Prov.NAD		4.660.986.000	APBD	Prov.NAD	5.047.353.000	APBD	Prov.NAD	Setda
	6 Fasilitas sosialisasi peraturan perundang-undangan	381.199.500	APBD	Prov.NAD		481.199.000	APBD	Prov.NAD	581.199.000	APBD	Prov.NAD	Setda
	7 Publikasi peraturan perundang-undangan	245.465.000	APBD	Prov.NAD		305.465.000	APBD	Prov.NAD	375.465.000	APBD	Prov.NAD	Setda
	8 Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang	820.891.500	APBD	Prov.NAD		1.320.891.500	APBD	Prov.NAD	1.820.891.500	APBD	Prov.NAD	Setda
	9 Peningkatan Pelayanan bantuan hukum	434.272.000	APBD	Prov.NAD		534.272.000	APBD	Prov.NAD	634.272.000	APBD	Prov.NAD	Setda
K3M			13.530.249.000			49.287.623.700			53.073.219.100			Setda, BPM, Dinas Pertanian, Dinas Kelautan dan Perikanan
	1 Koordinasi inventarisasi program rehabilitasi dan rekonstruksi	3.325.000.000	APBD	Prov.NAD		3.325.000.000	APBD	Prov.NAD	3.325.000.000	APBD	Prov.NAD	Setda
	2 Pembiayaan unit pengaduan masyarakat dan Pemantauan PKPS-BBM	117.970.000	APBD	21kab/kt		141.564.000	APBD	21kab/kt	169.876.800	APBD	Prov.NAD	BPM
	3 Peningkatan Partisipasi Masyarakat, Pengembangan Kelembagaan SDM gampong/kelurahan	679.380.000	APBD	21kab/kt		815.256.000	APBD	21kab/kt	978.307.200	APBD	Prov.NAD	BPM
	4 Peningkatan Kapasitas Pemerintah Miskin dan Gampong/Kelurahan	3.716.664.000	APBD	21kab/kt		4.500.000.000	APBD	21kab/kt	5.000.000.000	APBD	Prov.NAD	BPM
	5 Penguatan Modal Usaha Kelompok Usaha Produktif (UEP) 500 Kelompok					7.500.000.000	APBD I	21 Kab/kota	7.500.000.000	APBD	Prov.NAD	Dinas Pertanian
	6 Penguatan Kelembagaan LKM Untuk Mendukung Modal Usahatani Kecil di 200 Kecamatan					25.000.000.000	APBD I	21 Kab/kota	25.000.000.000	APBD	Prov.NAD	Dinas Pertanian
	7 Penguatan Kelembagaan Memfasilitasi Pembentukan GAPOKTAN 200 unit					1.250.000.000	APBD I	21 Kab/kota	1.250.000.000	APBD	Prov.NAD	Dinas Pertanian
	A. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Petisir											
	1 Pembinaan kelompok ekonomi masyarakat	377.000.000	APBD	A.Besar, Pidie, A. Jaya		400.000.000	APBD	Bna, Bir,A.Utr, Lhok				

**REKAPITULASI PEMETAAN PENDANAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI/KABUPATEN NANGGROE ACEH DARUSSALAM
TAHUN 2007 - 2009**

BIDANG	PROGRAM UTAMA	APBD			SKPD TERKAIT	KETERANGAN
		2007	2008	2009		
PERUMAHAN, PERMUKIMAN, TATA		6.277.900.000	7.339.900.000	7.842.900.000		
	1 Perumahan	6.277.900.000	0	0		
	2 Tata Ruang	6.277.900.000	7.089.900.000	7.562.900.000	Setda	
	3 Pertanahan	0	250.000.000	280.000.000		
	4 Lingkungan Hidup	0	0	0		
INFRASTRUKTUR		415.918.032.700	1.528.809.148.800	2.066.586.707.500		
	1 Jalan dan Transportasi	346.444.010.500	1.260.639.872.000	1.850.390.680.000	Dinas Perhubungan	
	2 Energi & Telekomunikasi	52.333.090.900	232.269.239.500	152.507.470.000	Dinas Pertambangan dan Energi, Dinas Perhubungan, Dinas Pertanian, Dinas	
	3 Sumber Daya Air	1.126.023.000	1.274.350.000	1.322.759.000	Dinas Sumber Daya Air	
	4 Air dan Sanitasi	6.013.178.000	10.815.149.000	12.062.422.000	Bapedalda, CO Sharing BRR	
	5 Infrastruktur Lingkungan dan Pemeliharaan	10.001.730.300	23.810.538.300	50.303.376.500	Badan Ketahanan Pangan, Dinas Perkebunan, Dinas Pertanian, Dinas	
	6 Kawasan Percontohan	0	0	0	Peternakan, BKPM, Dinas Kebudayaan, BPM, Dinas Peternakan	
	7 Bangunan Gedung Negara dan Rumah	0	0	0		
	8 IREP	0	0	0		
SOSIAL KEMASYARAKATAN		1.263.488.470.700	1.433.518.364.900	1.588.370.827.400		
	1 Pendidikan, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan	955.250.509.100	1.036.481.812.900	1.079.076.020.200		
	- Pendidikan	764.280.072.600	852.532.832.000	924.003.513.300	Dinas Perkebunan, Dinas Pertanian, Dinas Kebudayaan, Setda, Dinas	
	- Kesehatan	183.375.436.500	174.834.980.900	144.135.707.000	BPK RSIA, Dinas Peternakan	
	- Pemberdayaan Perempuan	7.595.000.000	9.114.000.000	10.936.799.900	Setda	
	2 Agama, Sosial, Budaya, Pemuda dan Olahraga	308.237.961.600	397.036.552.000	509.294.807.200		
	- Agama	50.688.382.700	57.807.216.300	62.102.927.800	Dinas Syariat Islam, Setda	
	- Sosial	135.035.896.900	194.998.557.000	283.361.509.600	Setda, Dinas Sosial	
	- Budaya	59.532.846.000	72.986.327.700	87.922.302.800	Dinas Kebudayaan, BPM, Setda	
	- Pemuda dan Olahraga	62.980.836.000	71.244.451.000	75.908.067.000	Dinas Pemuda dan Olah raga	
PEREKONOMIAN		1.970.553.811.000	4.370.131.017.300	4.482.088.235.300		
	1 Pertanian	532.406.800.900	1.684.997.155.400	1.826.788.407.500		
	- Tanaman Pangan & Hortikultura	169.241.324.400	1.185.909.582.800	1.238.521.746.200	Dinas Perkebunan, Dinas Pertanian, BPK, Dinas Perkebunan, Dinas	
	- Program Utama	124.941.324.400	1.103.834.582.800	1.144.837.746.200	Peternakan	
	- Program pendukung	44.300.000.000	82.075.000.000	93.684.000.000		Beberapa program pendukung dalam pertanian termasuk dalam perkebunan
	- Perkebunan	22.472.796.000	30.278.115.200	33.494.366.700	Dinas Perkebunan	
	- Peternakan	153.848.630.000	201.883.219.000	262.448.184.200	Dinas Peternakan	
	- Kehutanan	186.844.050.500	266.926.238.400	292.324.110.400	-	
	2 Perikanan	20.027.000.000	124.960.000.000	119.000.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
	3 Pengembangan Usaha	1.418.120.010.100	2.560.173.861.900	2.536.299.827.800		
	- Industri	1.259.601.490.400	2.223.304.357.000	2.268.935.419.800	Dinas Peternakan, BPM, Setda, BPKMD, Dinas Industri dan Perdagangan	
	- Perdagangan					
	- Tenaga kerja	15.500.000.000	20.000.000.000	22.500.000.000	Dinas Tenaga Kerja	
	- Koperasi dan UKM	133.956.607.800	300.445.000.000	228.390.000.000	Dinas Koperasi dan UKM	
	- Pariwisata	9.061.911.900	16.424.504.900	16.474.408.000	Dinas Pariwisata Provinsi NAD, Dinas Pertanian	
KELEMBAGAAN DAN HUKUM		104.075.259.600	475.662.716.600	553.456.407.500		
	1 Kelembagaan Daerah	85.388.562.800	418.372.279.400	491.164.007.900	Dinas Peternakan, BPKMD, Setda, Kesbanglinmas, BPK RSIA	
	2 Hukum	5.156.447.000	8.002.813.500	9.219.180.500	Dinas Kelautan dan Perikanan, Setda	
	3 K3M	13.530.249.800	49.287.623.700	53.073.219.100	Setda, BPM, Dinas Pertanian, Dinas Kelautan dan Perikanan	
BIAYA MANAJEMEN		23.058.627.000	20.612.075.000	25.410.624.000		
JUMLAH		3.783.372.101.000	7.836.073.222.600	8.723.755.701.700		

Sumber : RPJMD Provinsi NAD 2007 - 2012, Bappeda, 2007